



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**NOMOR 26 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2019**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2018**



**GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR 26 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 263 ayat (4) dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun dan ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung wajib menyusun RKPD Tahun 2019 yang digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 5 Seri E);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 10 Seri E);
12. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 03 Seri D);
13. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 05 Seri D);
14. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 06 Seri D);
15. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Staf Ahli Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 07 Seri D);
16. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 92 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 07 Seri A);



## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2019.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 25 (dua puluh lima) Tahun.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) Tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) Tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah dokumen rencana kerja perangkat daerah untuk periode 5 (lima) Tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2019 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) Tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2019 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen rencana kerja satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Musrenbangda adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.

12. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) Tahun.
13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah.
14. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah.
15. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
16. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
17. Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Perangkat Daerah serta pagu anggaran sementara berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

## BAB II

### RUANG LINGKUP, TUJUAN DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu Ruang Lingkup

#### Pasal 2

Ruang lingkup penyusunan RKPD meliputi:

- a. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
- b. Sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
- c. Arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota;
- d. Rencana kerja dan pendanaan daerah.



## Bagian Kedua Tujuan

### Pasal 3

RKPD disusun dalam rangka menciptakan integrasi, sinkronisasi, sinergitas pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.

## Bagian Ketiga Fungsi

### Pasal 4

- (1) RKPD Tahun 2019 berfungsi sebagai:
  - a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja-PD;
  - b. pedoman penyelarasan prioritas pembangunan provinsi dengan kabupaten/kota; dan
  - c. pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD provinsi serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara provinsi.
- (2) Dalam rangka perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja-PD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, PD menggunakan RKPD Tahun 2019 untuk:
  - a. menyusun Rancangan Akhir Renja-PD; dan
  - b. sebagai bahan untuk penyusunan RKA-PD.

## BAB III TAHAPAN PENYUSUNAN

### Pasal 5

Penyusunan RKPD dilakukan melalui urutan kegiatan:

- a. persiapan penyusunan RKPD;
- b. penyusunan rancangan awal RKPD;
- c. penyusunan rancangan RKPD;
- d. pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD;
- e. perumusan rancangan akhir RKPD; dan
- f. penetapan RKPD.

#### Pasal 6

Kepala Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan akhir Renja-PD berkenaan dengan kesesuaiannya dengan RKPD, Renstra-PD serta tugas pokok dan fungsi PD.

#### Pasal 7

Uraian lebih lanjut mengenai dokumen RKPD Provinsi Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

### BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

#### Pasal 8

- (1) Gubernur melalui Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2019.
- (2) Pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pengendalian kebijakan, dilakukan untuk menjamin bahwa RKPD telah disusun sesuai tahapan dan tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, telah selaras dengan sasaran, strategi, arah kebijakan, program pembangunan daerah, dan program PD yang ditetapkan dalam RPJM Daerah, RKPD Tahun 2019 dan program strategis nasional;
  - b. pengendalian pelaksanaan, dilakukan untuk menjamin prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta indikator kinerja, dan pagu indikatif dalam RKPD telah dipedomani dalam penyusunan rancangan KUA dan PPAS sebagai landasan penyusunan RAPBD Tahun 2019; dan
  - c. evaluasi hasil, dilaksanakan untuk menilai daya serap, capaian target kinerja program/kegiatan mencakup masukan, keluaran dan hasil yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD Tahun 2019.
- (3) Pengendalian kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan RKPD Tahun 2019.



- (4) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2019.
- (5) Evaluasi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilaksanakan secara periodik setiap triwulan pada Tahun 2019.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 21 Juni 2018

GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,  
  
ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 21 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

  
YAN MEGAWANDI

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN.....<sup>2018</sup>  
NOMOR 21 SERIE

# DAFTAR ISI

---

	Halaman
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 26 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2019 .....	
DAFTAR ISI .....	i
DAFTAR TABEL .....	v
DAFTAR GAMBAR .....	xvii
DAFTAR GRAFIK .....	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>I.1</b>
1.1. LATAR BELAKANG .....	I.1
1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN .....	I.7
1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN .....	I.9
1.4. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD .....	I.10
1.5. MAKSUD DAN TUJUAN .....	I.10
<b>BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH .....</b>	<b>II.1</b>
2.1. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH .....	II.1
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi .....	II.1
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat .....	II.18
2.1.2.1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat .....	II.18
2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial .....	II.27
2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga .....	II.46
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum .....	II.50
2.1.3.1. Fokus layanan urusan wajib .....	II.50
2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan .....	II.93
2.1.3.3. Fokus layanan urusan wajib .....	II.50
2.1.3.4. Fokus layanan urusan wajib .....	II.50
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah .....	II.100
2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah .....	II.100
2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur .....	II.103
2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi .....	II.105
2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia .....	II.110
2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN 2017 DAN REALISASI RPJMD .....	II.112
2.3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH .....	II.190
2.3.1. Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah .....	II.190
2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah .....	II.192



	<b>Halaman</b>
2.4. POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD .....	II.214
2.5. CAPAIAN INOVASI DAERAH .....	II.243
<b>BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA</b>	
<b>PENDANAAN .....</b>	<b>III.1</b>
3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH .....	III.1
3.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pertumbuhan Ekonomi .....	III.3
3.1.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) .....	III.3
3.1.1.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi .....	III.6
3.1.1.3. PDRB Perkapita .....	III.8
3.1.1.4. Struktur Perekonomian Daerah .....	III.9
3.1.1.5. Struktur Pengeluaran dalam PDRB .....	III.10
3.1.1.6. Tingkat Inflasi .....	III.11
3.1.1.7. Tingkat Investasi .....	III.12
3.1.1.8. Ekspor dan Impor .....	III.13
3.1.2. Indikator Pembangunan Bidang Kesejahteraan .....	III.15
3.1.2.1. Pengangguran .....	III.15
3.1.2.2. Kemiskinan .....	III.15
3.1.2.3. Ketimpangan Regional .....	III.16
3.1.2.4. Ketimpangan Distribusi Pendapatan .....	III.17
3.1.3. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2018 dan 2019 .....	III.18
3.1.3.1. Tantangan Perekonomian Global dan Nasional 2018 dan 2019 .....	III.18
3.1.3.2. Tantangan Perekonomian Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 dan 2019 .....	III.18
3.1.3.3. Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2019 .....	III.20
3.1.4. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .....	III.21
3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH .....	III.22
3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan .....	III.24
3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah .....	III.26
3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah .....	III.26
3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah .....	III.29
3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah .....	III.33
<b>BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH .....</b>	<b>IV.1</b>
4.1. TEMA, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH .....	IV.1
4.1.1. Tema Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2019 .....	IV.1
4.1.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2019 .....	IV.5
4.1.3. Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2019 .....	IV.9
4.1.4. Prioritas Pembangunan Daerah Dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Nasional .....	IV.19

	<b>Halaman</b>
4.2. PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2019 .....	IV.89
4.2.1. Penyelarasan Permasalahan Pembangunan, Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Daerah.....	IV.91
4.2.2. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Prioritas Nasional.....	IV.94
4.2.3. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan SDGs.....	IV.162
4.2.4. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) .....	IV.180
4.2.5. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Pengentasan Kemiskinan.....	IV.192
4.2.6. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Penciptaan Lapangan Pekerjaan.....	IV.193
4.2.7. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Revolusi Mental.....	IV.195
4.2.8. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Pengarusutamaan Gender (PUG).....	IV.200
4.2.9. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Perubahan Iklim .....	IV.201
4.2.10. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Tata Kelola Pemerintahan yang baik.....	IV.203
4.2.11. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan.....	IV.206
4.2.12. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Pemerataan Antar Kelompok Pendapatan .....	IV.207
4.2.13. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Ketahanan Energi.....	IV.210
4.2.14. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Ketahanan Pangan .....	IV.211
4.2.15. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Pengembangan Dunia usaha dan Pariwisata .....	IV.215
4.2.16. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Pengembangan Infrastruktur, Konektivitas dan kemaritiman .....	IV.220
4.2.17. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Wilayah.....	IV.221
4.2.18. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan.....	IV.235
4.2.19. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Peningkatan Sumber Daya Manusia.....	IV.237
4.2.20. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Peningkatan Sumber Daya Manusia.....	IV.242
4.2.21. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Dokumen RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	IV.242



4.3. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN LINTAS BIDANG MELALUI PENDEKATAN HOLISTIK-TEMATIK, INTEGRATIF DAN SPASIAL .....	IV.264
4.3.1. Pengembangan Pembangunan Agropolitan .....	IV.265
4.3.2. Pembangunan Bahari .....	IV.273
4.3.3. Pengembangan Pariwisata .....	IV.281
4.3.4. Pengembangan Tata Kelola Pertambangan .....	IV.292
4.3.5. Peningkatan Pendapatan Pemerintah daerah .....	IV.299
4.3.6. Peningkatan Ekonomi Masyarakat .....	IV.301
4.3.7. Pembangunan Konektivitas dan Infrastruktur .....	IV.308
4.3.8. Pembangunan Pendidikan .....	IV.312
4.3.9. Pembangunan Kesehatan .....	IV.316
4.3.10. Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik .....	IV.320
4.3.11. Pembangunan Demokrasi .....	IV.331
4.3.12. Peningkatan Pembangunan Bidang Kebencanaan .....	IV.334
4.3.13. Pengendalian Lingkungan Hidup .....	IV.337
4.4. PAGU INDIKATIF PER PRIORITAS DAERAH TAHUN 2019 .....	IV.340
<b>BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA .....</b>	<b>V.1</b>
5.1. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN .....	V.1
5.1.1. Arah Kebijakan Pembangunan Kota Pangkalpinang .....	V.2
5.1.2. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bangka .....	V.7
5.1.3. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bangka Barat .....	V.17
5.1.4. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bangka Tengah .....	V.23
5.1.5. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bangka Selatan .....	V.33
5.1.6. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Belitung .....	V.48
5.1.7. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Belitung Timur .....	V.61
5.2. RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) .....	V.73
5.2.1. Indikasi Program Utama Lima Tahunan RTRW Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034 .....	V.74
<b>BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH .....</b>	<b>VI.1</b>
6.1. RENCANA PROGRAM PRIORITAS .....	VI.1
6.2. PAGU INDIKATIF .....	VI.7
6.3. DUKUNGAN RENCANA PROGRAM TERHADAP PRIORITAS PROVINSI .....	VI.9
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH .....</b>	<b>VII.1</b>
7.1. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) .....	VII.1
7.2. INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) .....	VII.3
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>	<b>VIII.1</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2019 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG</b>	

# DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel II.1 Luas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2016 .....	II.3
Tabel II.1.a Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota dan Kecamatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2016 .....	II.3
Tabel II.1.b Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2016 .....	II.4
Tabel II.1.c Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota dan Kelurahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2016 .....	II.4
Tabel II.1 .d Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota dan Luas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2016 .....	II.5
Tabel II.2 Jenis dan Luas Penggunaan Lahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	II.7
Tabel II.3 Rekapitulasi Proyeksi Kebutuhan Daya Listrik 2010 – 2030– KVA .....	II.9
Tabel II.4 Rekapitulasi Proyeksi Kebutuhan Sambungan Telepon 2010 – 2030 .....	II.10
Tabel II.5 Data Bencana Alam di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 .....	II.14
Tabel II.6 Wilayah yang Berpotensi Rawan Bencana dan Jenis Bencana yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	II.14
Tabel II.7 Jumlah Penduduk Kepulauan Bangka Belitung menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013–2017 .....	II.16
Tabel II.8 Proyeksi JumlahPenduduk Menurut Kelompok Umur Kepulauan Bangka Belitung menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013–2017 (dalam ribu) .....	II.17
Tabel II.9 Laju Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk Kepulauan Bangka Belitung menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013–2017 .....	II.17
Tabel II.10 PDRB Tahun 2013–2017 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dalam Rp. Miliar) .....	II.18
Tabel II.11 Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2013–2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dalam Rp. Miliar) .....	II.19
Tabel II.12 Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2013–2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dalam Rp. Miliar).....	II.20
Tabel II.13 Distribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2013–2017 Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dalam persen).....	II.21
Tabel II.14 Perkembangan Distribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2013 s.d 2017 Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dalam persen).....	II.22
Tabel II.15 Perkembangan PDRB Kabupaten/Kota Tahun 2012 s.d 2016 Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dalam	

		<b>Halaman</b>
	Rp. Miliar) .....	II.23
Tabel II.16	Perkembangan PDRB Tahun 2012 s.d 2016 Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dalam Rp. Miliar) .....	II.25
Tabel II.17	Laju Inflasi Tahun 2012-2017 Menurut Kelompok Pengeluaran .....	II.25
Tabel II.18	Perkembangan Angka Melek Huruf Usia 15+ Menurut Kabupaten Kota, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2013 s.d 2017 .....	II.27
Tabel II.19	Angka Melek Huruf menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	II.28
Tabel II.20	Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2012 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (tahun) .....	II.28
Tabel II.21	Perkembangan Angka Putus Sekolah Kabupaten/Kota Se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2016.....	II.29
Tabel II.22	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2011/2012 s.d 2015/2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II.31
Tabel II.23	Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2014/2015 Menurut kabupaten/kotaProvinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II.31
Tabel II.24	Perkembangan Angka Pendidikan Yang Ditamatkan (APT) Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	II.33
Tabel II.25	Perkembangan APM Tahun 2011 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	II.36
Tabel II.26	Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2015 menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II.37
Tabel II.27	Perkembangan Angka Kematian Bayi dan Balita Per 1.000 Kelahiran Hidup Tahun 2013-2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	II.38
Tabel II.28	Usia Harapan Hidup menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013 s.d 2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II.39
Tabel II.29	Perkembangan Persentase Balita Dengan Gizi Buruk Tahun 2012 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	II.39
Tabel II.30	Jumlah Kasus HIV/AIDS, IMS, DBD, Diare, TB, dan Malaria Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 .....	II.40
Tabel II.31	Perkembangan Kemiskinan Tahun 2013-2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	II.40
Tabel II.32	Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kota dan Desa Tahun 2013-2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II.41
Tabel II.33	Data Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2012-2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	II.41
Tabel II.34	Data Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2013-2017 Menurut Provinsi di Pulau Sumatera (ribu jiwa) .....	II.42
Tabel II.35	Persentase penduduk miskin di Pulau SumateraTahun 2013-2017 .....	II.42
Tabel II.36	Perkembangan Ketenagakerjaan Tahun 2012 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	II.44
Tabel II.37	Perkembangan Ketenagakerjaan Tahun 2013 s.d 2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	II.44



Tabel II.38	Perkembangan Tingkat Pengangguran dan TPAK Tahun 2013 s.d 2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	II.45
Tabel II.39	Penduduk 15 tahun ke atas Tahun 2013 s.d 2017 menurut Lapangan Pekerjaan Utama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	II.45
Tabel II.40	Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II.46
Tabel II.41	Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2011 s.d 2015 Menurut kabupaten Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	II.46
Tabel II.42	Jumlah Perkumpulan Cabang Olahraga Atletik Tahun 2010 s.d 2014 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	II.47
Tabel II.43	Jumlah Perkumpulan Cabang Olahraga Sepakbola Tahun 2010 s.d 2014 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	II.47
Tabel II.44	Jumlah Perkumpulan Cabang Olahraga Bola Voli Tahun 2010 s.d 2014 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	II.48
Tabel II.45	Jumlah Perkumpulan Cabang Olahraga Bola Basket Tahun 2010-2014 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	II.48
Tabel II.46	Jumlah Perkumpulan Cabang Olahraga Bulutangkis Tahun 2010-2014 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	II.48
Tabel II.47	Jumlah Perkumpulan Cabang Olahraga Pencak silat Tahun 2010-2014 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	II.49
Tabel II.48	Perkembangan Sarana dan Prasarana Olahraga Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	II.49
Tabel II.49	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2011 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	II.50
Tabel II.50	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2015 menurut Kabupaten/Kotadi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	II.52
Tabel II.51	Ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II.53
Tabel II.52	Ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah Tahun 2011 s.d 2015 menurut Kabupaten/KotaProvinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	II.53
Tabel II.53	Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II.54
Tabel II.54	Jumlah Guru dan Murid Tahun 2011 s.d 2015 Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II.55
Tabel II.55	Jumlah Rumah Sakit Pemerintah Tahun 2012 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	II.55
Tabel II.56	Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per Jumlah Penduduk Tahun 2012 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	II.56
Tabel II.57	Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	II.56
Tabel II.58	Perkembangan Persentase Keluarga Yang Memiliki Akses Terhadap Air Bersih Tahun 2012 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	II.57
Tabel II.59	Perkembangan Angka Kesakitan Malaria per 1000 penduduk Tahun 2012 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	II.57

Tabel II.60	Perkembangan Prevelensi HIV (Persentase Kasus terhadap Penduduk Berisiko) Tahun 2010-2014 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	II.58
Tabel II.61	Distribusi Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) per 100.000 penduduk (Persentase Kasus terhadap Penduduk Berisiko) Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	II.58
Tabel II.62	Perkembangan Jumlah Puskesmas Tahun 2012 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	II.59
Tabel II.63	Perkembangan Jumlah Puskesmas Tahun 2012 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	II.60
Tabel II.64	Perkembangan Jumlah Dokter Tahun 2010 s.d 2014 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	II.60
Tabel II.65	Analisis Total Kelas Tingkat Lahan Kritis Tahun 2014 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	II.62
Tabel II.66	Gambaran Pencapaian Kinerja Pembangunan Urusan Penataan Ruang Tahun 2012 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	II.63
Tabel II.67	Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan, Kondisi Jalan, dan Pemerintahan yang Berwenang Mengelola di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (km), 2016 .....	II.64
Tabel II.68	Panjang Jembatan Menurut Jenis Konstruksidan Pemerintahan yang Berwenang Mengelola di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (km), 2016 .....	II.65
Tabel II.69	Persentase Rumah Tangga dengan Luas Hunian per Kapita <= 7,2 m2 Menurut Kabupaten/Kota, 2006-2015 .....	II.65
Tabel II.70	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per-10.000 Penduduk Tahun 2012 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	II.66
Tabel II.71	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa Tahun 2012 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	II.66
Tabel II.72	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Tahun 2012 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	II.67
Tabel II.73	Perkembangan Tingkat Pengangguran dan TPAK Tahun 2013 s.d 2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	II.68
Tabel II.74	Data Penduduk Usia Kerja Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013 s.d 2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	II.68
Tabel II.75	Data TPAK Tahun 2012 s.d 2016 Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	II.69
Tabel II.76	Data Penduduk yang Bekerja Tahun 2012 s.d 2016 Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	II.69
Tabel II.77	Data Tingkat Pengangguran Tahun 2012 s.d 2016 Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	II.70
Tabel II.78	Data Pengangguran Tahun 2012 s.d 2016 Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	II.70
Tabel II.79	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	II.71
Tabel II.80	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	II.71

Tabel II.81	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Tahun 2014 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	II.72
Tabel II.82	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Tahun 2014 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	II.73
Tabel II.83	Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Tahun 2012 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	II.74
Tabel II.84	Data Ketergantungan Beras 2013-2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	II.74
Tabel II.85	Data Produksi Padi (Ton) Kabupaten Kota Tahun 2013-2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	II.75
Tabel II.86	Data Ketersediaan Pangan 2012-2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	II.75
Tabel II.87	Luas Lahan (m <sup>2</sup> ) Berdasarkan Sertifikat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011-2013 .....	II.76
Tabel II.88	Luas Lahan (m <sup>2</sup> ) Berdasarkan Sertifikat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2016 .....	II.76
Tabel II.89	Persentase (%) Luas Lahan Bersertifikat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011-2013 .....	II.77
Tabel II.90	Persentase (%) Luas Lahan Bersertifikat Tahun 2014-2016 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	II.78
Tabel II.91	Penyelesaian Kasus Tanah Negara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011-2013 .....	II.78
Tabel II.92	Penyelesaian Kasus Tanah Negara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2016 .....	II.79
Tabel II.93	Penyelesaian Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Izin Lokasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011-2013 .....	II.79
Tabel II.94	Penyelesaian Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Izin Lokasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2016 .....	II.80
Tabel II.95	Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2012 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	II.81
Tabel II.96	Perkembangan Persentase Keluarga Yang Memiliki Akses Terhadap Air Bersih Tahun 2012 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	II.81
Tabel II.97	Perkembangan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil .....	II.82
Tabel II.98	Kelompok LPM DAN PKK Tahun 2013 s.d 2017 Menurut kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	II.83
Tabel II.99	Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2013 s.d 2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	II.84
Tabel II.100	Rasio Akseptor KB Tahun 2012 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	II.84
Tabel II.101	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Tahun 2012 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	II.85
Tabel II.102	Kunjungan Kapal di Pelabuhan Laut Tahun 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	II.87
Tabel II.103	Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Berdasarkan Jenis Kendaraan Tahun 2012 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ....	II.87



Tabel II.104	Persentase Koperasi Aktif Tahun 2013 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	II.88
Tabel II.105	Jumlah UKM non BPR/LKM Tahun 2012 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	II.88
Tabel II.106	Jumlah Investasi dan Investor PMDN/PMA Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	II.89
Tabel II.107	Jumlah Organisasi dan Kegiatan Kepemudaan Tahun 2012 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	II.90
Tabel II.108	Jumlah Klub/Organisasi Olahraga Tahun 2012 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	II.90
Tabel II.109	Buku PDRB dan Provinsi/Kabupaten/Kota Falam Angka Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	II.90
Tabel II.110	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahun 2011 s.d 2015 Kepulauan Bangka Belitung .....	II.92
Tabel II.111	Jumlah Perpustakaan Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	II.92
Tabel II.112	Potensi Kelautan dan Perikanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 – 2016 .....	II.93
Tabel II.113	Kunjungan Wisatawan Dalam dan Luar Negeri Tahun 2012 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	II.95
Tabel II.114	Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha tanpa Migas (persen) 2012 – 2016 .....	II.96
Tabel II.115	Luas Lahan (Ha) Menurut Jenis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	II.96
Tabel II.116	Luas Hutan Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ..	II.97
Tabel II.117	Potensi Bahan Galian Tahun 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .	II.98
Tabel II.118	Perkembangan Ekspor dan Impor Tahun 2012 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (juta U\$) .....	II.98
Tabel II.119	Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah Tahun 2012 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	II.100
Tabel II.120	Angka Konsumsi RT per Kapita Tahun 2012 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	II.101
Tabel II.121	Nilai Tukar etani (NTP) Tahun 2012 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	II.101
Tabel II.122	Persentase Konsumsi RT Non-Pangan Tahun 2012 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	II.102
Tabel II.123	Indikator Pengeluaran Non Pangan Perkapita Tahun 2016 Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	II.102
Tabel II.124	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun 2012 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	II.103
Tabel II.125	Rasio Panjang Jalan per jumlah kendaraan Tahun 2012 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	II.103
Tabel II.126	Rasio Panjang Jalan per jumlah kendaraan Tahun 2016 Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	II.103
Tabel II.127	Jumlah Penumpang Angkatan Laut (Jiwa/Orang) .....	II.104

	<b>Halaman</b>
Tabel II.128 Rasio luas Wilayah Produktif Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	II.105
Tabel II.129 Infrastruktur Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	II.105
Tabel II.130 Jumlah dan Penyelesaian Tindak Pidana Kejahatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 -2016 .....	II.106
Tabel II.131 Data Demonstrasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 - 2016 .....	II.107
Tabel II.132 Jumlah Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Yang Mendukung Iklim Investasi .....	II.107
Tabel II.133 Realisasi Pajak Daerah Tahun 2012 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung(dalam Rp. Juta) .....	II.109
Tabel II.134 Jumlah Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Yang Mendukung Iklim Investasi .....	II.110
Tabel II.135 Rasio Lulusan S1/S2/S3 Tahun 2013 s.d 2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	II.111
Tabel II.136 Rasio Ketergantungan Tahun 2013 s.d 2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II.111
Tabel II.137 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016 .....	II.113
Tabel II.138 Rangkuman dan Keterkaitan Permasalahan terhadap Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2017 .....	II.174
Tabel II.139 Identifikasi Isu Strategis Dalam Penyusunan RKPD Tahun 2019 .....	II.204
Tabel II.140 Identifikasi Permasalahan Pembangunan dari Kebijakan Nasional/Provinsi dan Lingkungan Eksternal Lainnya .....	II.2011
Tabel II.141 Rumusan Usulan Program/Kegiatan Hasil Penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD dan Validasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	II.2151
Tabel III.1 PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2018 (juta rupiah) .....	III.3
Tabel III.2 PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan 2010 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2018(Juta rupiah) .....	III.5
Tabel III.3 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 – 2018 .....	III.7
Tabel III.4 Distribusi Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014–2018 (dalam persen) .....	III.10
Tabel III.5 Ditribusi PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan 2010 Provinsi Kepulauan Bangka Beiltung Tahun 2014–2018 (dalam persen). .....	III.11
Tabel III.6 Laju Inflasi Tahunan Kota Pangkalpinang Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2012-2016 .....	III.12
Tabel III.7 Laju Inflasi Tahunan Kota Tanjung Pandan Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2014-2016 .....	III.12
Tabel III.8 Perkembangan Realisasi Investasi Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011–2015 .....	III.13
Tabel III.9 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014–2018 (dalam persen) .....	III.15

		<b>Halaman</b>
Tabel III.10	Indeks Willamson Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2011–2016) .....	III.17
Tabel III.11	Koefisien Gini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2010–2017) .....	III.18
Tabel III.12	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 s.d tahun 2019 .....	III.26
Tabel III.13	Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 s.d Tahun 2019 .....	III.31
Tabel III.14	Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun 2016 s.d Tahun 2019 .....	III.34
Tabel IV.1	Hubungan Visi-Misi dan Tujuan-Sasaran Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022.....	IV.5
Tabel IV.2	Target Sasaran Pembangunan Nasional dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 dan 2019 .....	IV.7
Tabel IV.3	Target Tujuan Tahun 2019 .....	IV.7
Tabel IV.4	Target Sasaran Tahun 2019 .....	IV.8
Tabel IV.5	Hubungan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 .....	IV.9
Tabel IV.6	Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	IV.20
Tabel IV.7	Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	IV.22
Tabel IV.8	Keselarasan Permasalahan pembangunan, Isu Strategis dan Prioritas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 .....	IV.91
Tabel IV.9	Keselarasan target indikator pembangunan makro antara target Nasional, Regional Sumatera dan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019.....	IV.95
Tabel IV.10	Keselarasan antara Dimensi Pembangunan, Prioritas dan Sasaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 .....	IV.96
Tabel IV.11	Arah Kebijakan, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas RKPD 2019 Dalam Rangka Mendukung Arah Kebijakan RKP 2019 .....	IV.98
Tabel IV.12	Arah Kebijakan, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas RKPD 2019 Dalam Rangka Mendukung Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) .....	IV.163
Tabel IV.13	Arah Kebijakan dan Program Prioritas RKPD 2019 Dalam Rangka Mendukung Pencapaian SPM 2019 Bidang Pendidikan.....	IV.180
Tabel IV.14	Arah Kebijakan dan Program Prioritas RKPD 2019 Dalam Rangka Mendukung Pencapaian SPM 2019 Bidang Kesehatan.....	IV.182
Tabel IV.15	Arah Kebijakan dan Program Prioritas RKPD 2019 Dalam Rangka Mendukung Pencapaian SPM 2019 Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	IV.185
Tabel IV.16	Arah Kebijakan dan Program Prioritas RKPD 2019 Dalam Rangka Mendukung Pencapaian SPM 2019 Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.....	IV.186
Tabel IV.17	Arah Kebijakan dan Program Prioritas RKPD 2019 Dalam Rangka Mendukung Pencapaian SPM 2019 Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat .....	IV.187



Tabel IV.18	Arah Kebijakan dan Program Prioritas RKPDP 2019 Dalam Rangka Mendukung Pencapaian SPM 2019 Bidang Sosial .....	IV.189
Tabel IV.19	Arah Kebijakan, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas RKPDP 2019 Dalam Rangka Mendukung Arah Kebijakan Pengentasan Kemiskinan RKP 2019.....	IV.192
Tabel IV.20	Arah Kebijakan, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas RKPDP 2019 Dalam Rangka Mendukung Arah Kebijakan Penciptaan Lapangan Pekerjaan RKP 2019.....	IV.193
Tabel IV.21	Arah Kebijakan, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas RKPDP 2019 Dalam Rangka Mendukung Arah Kebijakan Pembangunan Revolusi Mental RKP 2019 .....	IV.195
Tabel IV.22	Arah Kebijakan, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas RKPDP 2019 Dalam Rangka Mendukung Arah Kebijakan Pembangunan Pengarusutamaan Gender RKP 2019 .....	IV.200
Tabel IV.23	Arah Kebijakan, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas RKPDP 2019 Dalam Rangka Mendukung Arah Kebijakan Perubahan Iklim RKP 2019..	IV.201
Tabel IV.24	Arah Kebijakan, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas RKPDP 2019 Dalam Rangka Mendukung Arah Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan yang baik RKP 2019.....	IV.203
Tabel IV.25	Arah Kebijakan, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas RKPDP 2019 Dalam Rangka Mendukung Arah Kebijakan Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan RKP 2019.....	IV.207
Tabel IV.26	Arah Kebijakan, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas RKPDP 2019 Dalam Rangka Mendukung Arah Kebijakan Pemerataan Antar Kelompok Pendapatan RKP 2019 .....	IV.208
Tabel IV.27	Arah Kebijakan, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas RKPDP 2019 Dalam Rangka Mendukung Arah Kebijakan Ketahanan Energi RKP 2019	IV.211
Tabel IV.28	Arah Kebijakan, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas RKPDP 2019 Dalam Rangka Mendukung Arah Kebijakan Ketahanan Pangan RKP 2019 .....	IV.211
Tabel IV.29	Arah Kebijakan, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas RKPDP 2019 Dalam Rangka Mendukung Arah Kebijakan Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata RKP 2019.....	IV.215
Tabel IV.30	Arah Kebijakan, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas RKPDP 2019 Dalam Rangka Mendukung Arah Kebijakan Pengembangan Infrastruktur, Konektivitas dan kemaritiman RKP 2019.....	IV.230
Tabel IV.31	Arah Kebijakan, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas RKPDP 2019 Dalam Rangka Mendukung Arah Kebijakan Pembangunan wilayah RKP 2019 .....	IV.221
Tabel IV.32	Arah Kebijakan, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas RKPDP 2019 Dalam Rangka Mendukung Arah Kebijakan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan RKP 2019.....	IV.235
Tabel IV.33	Arah Kebijakan, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas RKPDP 2019 Dalam Rangka Mendukung Arah Kebijakan Peningkatran Sumber Daya Manusia RKP 2019.....	IV.237

Tabel IV.34	Arah Kebijakan, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas RKPD 2019 Dalam Rangka Mendukung Arah Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Air RKP 2019.....	IV.242
Tabel IV.35	Korelasi Prioritas RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 dengan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2019 .....	IV.243
Tabel IV.36	Arah Kebijakan, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas RKPD 2019 Dalam Rangka Mendukung Prioritas RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 .....	IV.243
Tabel IV.37	Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Lintas Bidang Pengembangan Pembangunan Agropolitan .....	IV.265
Tabel IV.38	Program Pembangunan Perangkat Daerah Yang Mendukung Prioritas Pengembangan Pembangunan Agropolitan .....	IV.268
Tabel IV.38.a	Stakeholder Yang Mendukung Pengembangan Pembangunan Agropolitan .....	IV.273
Tabel IV.39	Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Lintas Bidang Pembangunan bahari .....	IV.274
Tabel IV.40	Program Pembangunan Perangkat Daerah Yang Mendukung Prioritas Pembangunan Bahari.....	IV.275
Tabel IV.40.a	Stakeholder Yang Mendukung Pembangunan Lintas Bidang Pembangunan bahari .....	IV.280
Tabel IV.41	Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Prioritas Pengembangan Pariwisata .....	IV.281
Tabel IV.42	Program Pembangunan Perangkat Daerah Yang Mendukung Pembangunan Lintas Bidang Pengembangan Pariwisata.....	IV.283
Tabel IV.42.a	Stakeholder yang mendukung Prioritas Pengembangan Pariwisata	IV.291
Tabel IV.43	Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Prioritas Pengembangan Tata Kelola Pertambangan.....	IV.292
Tabel IV.44	Program Pembangunan Perangkat Daerah Yang Mendukung Pembangunan Lintas Bidang Pengembangan Tata Kelola Pertambangan.	IV.294
Tabel IV.44.a	Stakeholder yang mendukung Prioritas Pengembangan Tata Kelola Pertambangan.....	IV.299
Tabel IV.45	Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Lintas Bidang Peningkatan Pendapatan Pemerintah daerah.....	IV.299
Tabel IV.46	Program Pembangunan Perangkat Daerah Yang Mendukung Pembangunan Lintas Bidang Peningkatan Pendapatan Pemerintah daerah.....	IV.300
Tabel IV.46.a	Stakeholder Yang Mendukung Pembangunan Lintas Bidang Peningkatan Pendapatan Pemerintah daerah.....	IV.301
Tabel IV.47	Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Lintas Bidang Peningkatan Ekonomi Masyarakat.....	IV.302
Tabel IV.48	Program Pembangunan Daerah Yang Mendukung Pembangunan Lintas Bidang Peningkatan Ekonomi Masyarakat .....	IV.303
Tabel IV.48.a	Stakeholder Yang Mendukung Pembangunan Lintas Bidang Peningkatan Ekonomi Masyarakat.....	IV.307

Tabel IV.49	Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Lintas Bidang Pembangunan Konektivitas dan Infrastruktur .....	IV.308
Tabel IV.50	Program Pembangunan Daerah Yang Mendukung Pembangunan Lintas Bidang Pengembangan Konektivitas dan Infrastruktur .....	IV.310
Tabel IV.50.a	Stakeholder Yang Mendukung Pembangunan Lintas Bidang Pengembangan Konektivitas dan Infrastruktur .....	IV.311
Tabel IV.51	Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Lintas Bidang Pembangunan Pendidikan .....	IV.312
Tabel IV.52	Program Pembangunan Daerah Yang Mendukung Pembangunan Lintas Bidang Pembangunan Pendidikan .....	IV.313
Tabel IV.52.a	Stakeholder Yang Mendukung Pembangunan Lintas Bidang Pembangunan Pendidikan .....	IV.315
Tabel IV.53	Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Lintas Bidang Pembangunan Kesehatan .....	IV.316
Tabel IV.54	Program Pembangunan Perangkat Daerah Yang Mendukung Pembangunan Lintas Bidang Pembangunan Kesehatan .....	IV.317
Tabel IV.54.a	Stakeholder Yang Mendukung Pembangunan Lintas Bidang Pembangunan Kesehatan .....	IV.320
Tabel IV.55	Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Lintas Bidang Peningkatkan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik .....	IV.320
Tabel IV.56	Program Pembangunan Daerah Yang Mendukung Pembangunan Lintas Bidang Peningkatkan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik .....	IV.322
Tabel IV.57	Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Prioritas Peningkatan Pembangunan Bidang Pembangunan Demokrasi .....	IV.332
Tabel IV.58	Program Perangkat Daerah Yang Mendukung Prioritas Pembangunan Demokrasi .....	IV.332
Tabel IV.59	Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Prioritas Peningkatan Pembangunan Bidang Kebencanaan .....	IV.334
Tabel IV.60	Program Perangkat Daerah Yang Mendukung Prioritas Peningkatan Pembangunan Bidang Kebencanaan .....	IV.335
Tabel IV.61	Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Lintas Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup .....	IV.337
Tabel IV.62	Program Perangkat Daerah Yang Mendukung Pembangunan Lintas Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup .....	IV.338
Tabel IV.63	Pagu Indikatif per-prioritas Daerah Tahun 2019 .....	IV.341
Tabel V.1	Arah Kebijakan, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas RKPD 2019 Dalam Rangka Mendukung Arah Kebijakan Pembangunan Kota Pangkalpinang .....	V.3
Tabel V.2	Arah Kebijakan, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas RKPD 2019 Dalam Rangka Mendukung Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bangka .....	V.8
Tabel V.3	Arah Kebijakan, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas RKPD 2019	



	Dalam Rangka Mendukung Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bangka Barat .....	V.18
Tabel V.4	Arah Kebijakan, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas RKPD 2019 Dalam Rangka Mendukung Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bangka Tengah .....	V.24
Tabel V.5	Arah Kebijakan, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas RKPD 2019 Dalam Rangka Mendukung Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bangka Selatan .....	V.34
Tabel V.6	Arah Kebijakan, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas RKPD 2019 Dalam Rangka Mendukung Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Belitung .....	V.49
Tabel V.7	Arah Kebijakan, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas RKPD 2019 Dalam Rangka Mendukung Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Belitung Timur .....	V.62
Tabel V.8	Indikasi Program Utama Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034 .....	V.75
Tabel V.9	Indikasi Program Pengembangan Pariwisata Daerah .....	V.112
Tabel VI.1	Pagu Indikatif Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 .....	VI. 8
Tabel VI.2	Dukungan Anggaran terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi ....	VI. 9
Tabel VII.1	Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 .....	VII. 2
Tabel VII.2	Penetapan Indikator Kinerja Kunci Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 .....	VII. 4

# DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar I.1	Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD Provinsi.....	I.6
Gambar I.2	Hubungan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional, Daerah, dan SKPD.....	I.10
Gambar II.1	Gambar Lokasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II.1
Gambar II.2	Peta Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).....	II.2
Gambar II.3	Peta Administrasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II.2
Gambar II.4	Peta Rencana Struktur Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	II.11
Gambar II.5	Peta Rencana Pola Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	II.13
Gambar II.6	Peta Rawan Bencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II.15
Gambar II.7	Potensi Pengembangan Pariwisata di Kepulauan Bangka Belitung.....	II.95
Gambar III.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015-2019 .....	II.7
Gambar III.2	PDRB Per Kapita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015-2019 (dalam Rupiah) .....	II.8
Gambar III.3	Struktur Perekonomian Menurut Lapangan Usaha Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 .....	II.9
Gambar III.4	Laju Inflasi Kota Pangkalpinang dan Tanjung Pandan Tahun 2016-2019 .....	II.11
Gambar III.5	Perkembangan Ekspor Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015- 2019 (dalam juta US\$) .....	II.14
Gambar III.6	Perkembangan Impor Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2019 (dalam juta US\$) .....	II.14
Gambar III.7	Penduduk Miskin Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 – 2019 (dalam persen) .....	II.16
Gambar IV.1	Posisi Dokumen RKPD Tahun 2018 Terhadap RPJPD Tahun 2005 – 2025 dan RPJMD Tahun 2017 – 2022.....	IV.1
Gambar IV.2	Tema Prioritas Pembangunan Tahun 2019 dalam dokumen RPJMD 2017-2022 .....	IV.2
Gambar IV.3	Posisi Tema Pembangunan RKPD Tahun 2019 Terhadap Tema RKP dan RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	IV.4
Gambar V.1	Perkembangan indikator Makro Pembangunan Kabupaten/Kota Se- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 .....	IV.1
Gambar V.2	Sasaran Pembangunan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Di Kabupaten/Kota tahun 2019.....	IV.2
Gambar V.1	Perkembangan indikator Makro Pembangunan Kabupaten/Kota Se- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 .....	IV.1
Gambar V.2	Sasaran Pembangunan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Di Kabupaten/Kota tahun 2019.....	IV.2
Gambar V.3	Sasaran Pembangunan Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2019...	IV.3
Gambar V.4	Sasaran Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2019.....	IV.8
Gambar V.5	Sasaran Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019 .....	IV.17

	<b>Halaman</b>
Gambar V.6 Sasaran Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2019.....	IV.23
Gambar V.7 Sasaran Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2019.....	IV.34
Gambar V.8 Sasaran Pembangunan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2019...	IV.49
Gambar V.9 Sasaran Pembangunan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019.....	IV.62



# DAFTAR GRAFIK

			Halaman
Grafik	II.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2013 – 2017 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dalam persen) .....	II.19
Grafik	II.2	PDRB Per Kapita Tahun 2013-2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	II.24
Grafik	II.3	Laju Inflasi Tahun 2014-2016 Kota Pangkalpinang .....	II.24
Grafik	II.4	Perbandingan Angka Inflasi Tahun 2014-2017 Kota Pangkalpinang, Tanjung Pandan, Palembang dan Nasional.....	II.25
Grafik	II.5	Indeks Gini Tahun 2012-2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ...	II.26
Grafik	II.6	Indeks Williamson Tahun 2011-2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II.27
Grafik	II.7	Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013-2017.....	II.29
Grafik	II.8	Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2014/2015 Menurut kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II.32
Grafik	II.9	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Indonesia Tahun 2012-2016.....	II.36
Grafik	II.10	Perkembangan APM Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II.37
Grafik	II.11	Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2015 menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	II.38
Grafik	II.12	Grafik Tingkat Kemiskinan (%) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Nasional Tahun 2017 .....	II.42
Grafik	II.13	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II.51
Grafik	II.14	Presentase Lahan Kritis Tahun 2014 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.....	II.63
Grafik	II.15	Grafik Persentase Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah Tahun 2014 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .....	II.73
Grafik	II.16	Grafik Rasio Akseptor KB Tahun 2012 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ( <i>update grafik</i> ) .....	II.85
Grafik	II.17	Jumlah Penumpang Berangkat dari Bandara Depati Amir Pangkalpinang dan Bandara H.A.S Hanandjoeddin Tanjungpandan Tahun 2015.....	II.86
Grafik	III.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2018.....	III.6
Grafik	III.2	PDRB Per Kapita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2018 (dalam Rupiah).....	III.7
Grafik	III.3	Struktur Perekonomian Menurut Lapangan Usaha Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 .....	III.8
Grafik	III.4	Laju Inflasi Kota Pangkalpinang dan Tanjung Pandan Tahun 2014-	

			<b>Halaman</b>
		2018 .....	III.10
Grafik	III.5	Perkembangan ICOR dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008–2012 .....	III.12
Grafik	III.6	Perkembangan Ekspor Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011–2016 (dalam juta US\$).....	III.14
Grafik	III.7	Perkembangan Impor Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011–2016(dalam juta US\$).....	III.14
Grafik	III.8	Penduduk Miskin Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 – 2018 .....	III.16
Grafik	V.1	Realisasi Penelaahan terhadap Pokok-pokok Pikiran DPRD .....	III.39
Grafik	V.2	Realisasi Penelaahan terhadap Usulan Langsung Masyarakat.....	III.43
Grafik	V.3	Persentase Realisasi Usulan Kabupaten/Kota terhadap Total Usulan .	III.45

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN GUBERNUR**  
**KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**NOMOR 26 TAHUN 2018**  
**TANGGAL 21 JUNI 2018**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**TAHUN 2019**

# BAB I

## PENDAHULUAN



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Pembangunan merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari tahapan yang bersifat jangka panjang, menengah, dan tahunan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.

Penyusunan RKPD sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 3 ayat (2), dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan secara terpadu sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan yang wajib disusun oleh Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia. Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga memiliki kewajiban dalam menyusun RKPD dimaksud.

Dalam menyusun RKPD Tahun 2019, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengacu pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan menerapkan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas~bawah (*top~down*), dan bawah~atas (*bottom~up*).

Pendekatan politik bermakna bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan. Hal ini dikarenakan rakyat pemilih dalam menentukan pilihannya didasari oleh program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan oleh Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah yang disepakati bersama DPRD.

Perencanaan melalui pendekatan teknokratis dilaksanakan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah yang dilaksanakan oleh lembaga atau perangkat daerah yang secara fungsi memiliki tugas untuk itu.

Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan (*stakeholder*) terhadap pembangunan, di mana pelibatan para pihak tersebut dimaksudkan untuk menjaring aspirasi dan menumbuhkan kembangkan rasa memiliki.

Sedangkan pendekatan atas~bawah dan bawah~atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas~bawah dan bawah~atas

diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan/Desa.

Disamping pendekatan-pendekatan tersebut di atas dan selaras dengan RKP 2019, Penyusunan RKPD 2019 dengan prinsip *money follows program* menggunakan pendekatan Holistik-Tematik, Integratif, dan Spasial dengan penajaman substansi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi.

Penguatan implementasi *Money Follow Programme* dilakukan melalui penajaman kesinambungan prioritas pembangunan, pengendalian pelaksanaan program dengan penerapan standardisasi kegiatan yang mendukung pencapaian indikator program, dan penajaman integrasi sumber pendanaan.

Sedangkan penguatan pendekatan Tematik-Holistik, Integratif dan Spasial dilakukan dengan memperhatikan pada pengendalian perencanaan, penguatan perencanaan dan perencanaan, penguatan perencanaan berbasis kewilayahan dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing wilayah, dan penguatan integrasi sumber pendanaan pembangunan.

Dengan penerapan seluruh pendekatan perencanaan tersebut di dalam penyusunannya, maka diharapkan dokumen RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 dapat menjadi dokumen perencanaan yang memenuhi prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan dan kesinambungan kemajuan dan kesatuan Nasional.

Selain hal tersebut, sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diantaranya sebagai berikut:

1. RKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD kedalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah.
2. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).
3. RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
4. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

Memperhatikan posisi strategis dokumen RKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka diharapkan dapat dihasilkan suatu dokumen perencanaan yang berkualitas dengan mempedomani peraturan perundangan yang berlaku, terutama Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RKPD ditetapkan agar dapat memberikan acuan yang efektif bagi pembangunan.

Beberapa hal yang harus menjadi perhatian dalam penyusunan dokumen RKPD, antara lain adalah:

1. RKPD tahun rencana disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya.
2. Program prioritas dalam RKPD harus sesuai dengan prioritas sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJPD, RKP dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat serta dengan memperhatikan visi dan misi Kepala Daerah terpilih.
3. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus konsisten dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (*outcome*) untuk program dan indikator kinerja keluaran (*output*) untuk kegiatan, yang bersifat realistis dan terukur.
5. Program dan kegiatan dalam RKPD harus dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

RKPD disusun melalui tahapan sebagai berikut:

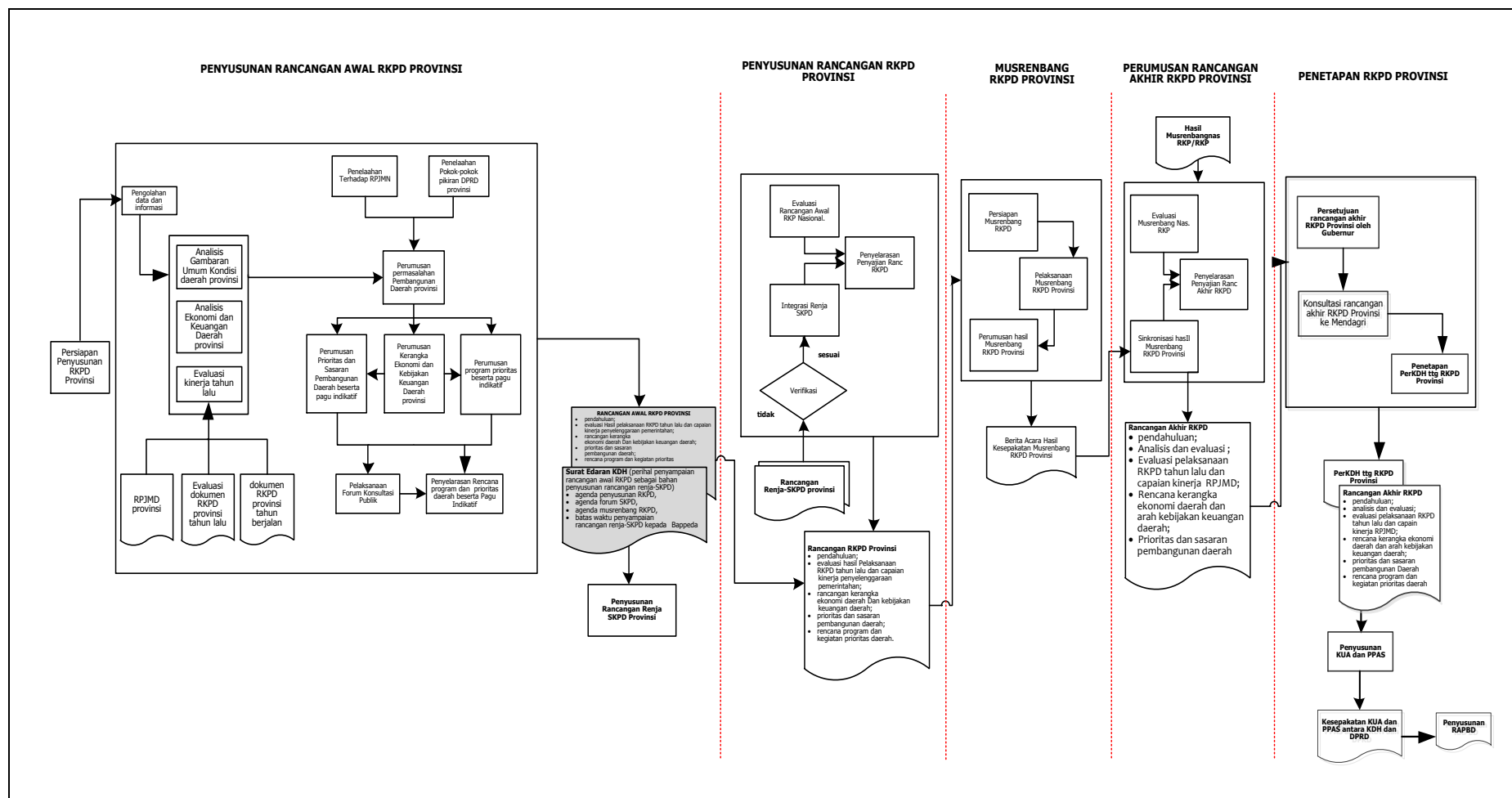
1. Persiapan penyusunan RKPD (Pasal 73) meliputi :
  - a. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD;
  - b. Orientasi mengenai RKPD;
  - c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD; dan
  - d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.
2. Penyusunan rancangan awal RKPD (Pasal 79) meliputi :
  - a. Perumusan rancangan awal RKPD dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut:
    - 1) Analisis gambaran umum kondisi daerah;
    - 2) Analisis rancangan kerangka ekonomi daerah;
    - 3) Analisis kapasitas riil keuangan daerah;
    - 4) Penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah;
    - 5) Perumusan permasalahan pembangunan daerah;
    - 6) Penelaahan terhadap sasaran RPJMD;
    - 7) Penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD;
    - 8) Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis nasional;
    - 9) Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
    - 10) Perumusan prioritas pembangunan daerah; dan
    - 11) Perumusan rencana kerja program dan pendanaan.

- b. Penyajian rancangan awal RKPD.  
Rancangan awal RKPD disajikan dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut:
  - 1) Pendahuluan;
  - 2) Gambaran umum kondisi daerah;
  - 3) Kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
  - 4) Sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
  - 5) Arah kebijakan pembangunan Kabupaten/Kota;
  - 6) Rancangan kerja dan pendanaan daerah;
  - 7) Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah;
  - 8) Penutup.
3. Penyusunan rancangan RKPD (Pasal 85)  
Penyusunan rancangan RKPD adalah proses penyempurnaan rancangan awal RKPD provinsi berdasarkan :
  - a. Rancangan awal Rencana Kerja seluruh Perangkat Daerah provinsi yang telah diverifikasi; dan
  - b. Hasil penelaahan terhadap rancangan awal RKP dan program strategis nasional.
4. Pelaksanaan Musrenbang RKPD.  
Musrenbang RKPD dilakukan dalam rangka penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD yang mencakup:
  - 1) Menyepakati permasalahan pembangunan Daerah;
  - 2) Menyepakati prioritas pembangunan Daerah;
  - 3) Menyepakati arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota lingkup provinsi;
  - 4) Menyepakati program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi;
  - 5) Penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan nasional; dan
  - 6) Klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan provinsi dengan program dan kegiatan kabupaten/kota yang diusulkan berdasarkan hasil musrenbang Kabupaten/kota.
5. Perumusan rancangan akhir RKPD.  
Perumusan rancangan akhir RKPD merupakan proses penyempurnaan rancangan RKPD menjadi rancangan akhir RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD dan bertujuan untuk memastikan program dan kegiatan Perangkat Daerah telah diakomodir dalam rancangan akhir RKPD serta sebagai bahan penyusunan Perkada tentang RKPD.
6. Penetapan RKPD.
  - 1) RKPD ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dan dijadikan sebagai :
    - a. Pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah;
    - b. Pedoman penyelarasan prioritas pembangunan provinsi dengan kabupaten/kota; dan



- c. Pedoman penyusunan rancangan kebijakan umum APBD Provinsi serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara provinsi.
- 2) Rancangan kebijakan umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang disampaikan gubernur kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan APBD.

Penyusunan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 memiliki makna yang strategis karena merupakan penjabaran tahap ketiga dari RPJPD 2005-2025 dan juga merupakan tahun keempat dari pelaksanaan RPJMN 2015-2019. Serta pelaksanaan tahun kedua RPJMD 2017-2022. RKPD yang telah ditetapkan digunakan sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



**Gambar I.1** Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD Provinsi

## **1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN**

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 – 2034);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D).
19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E) ;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



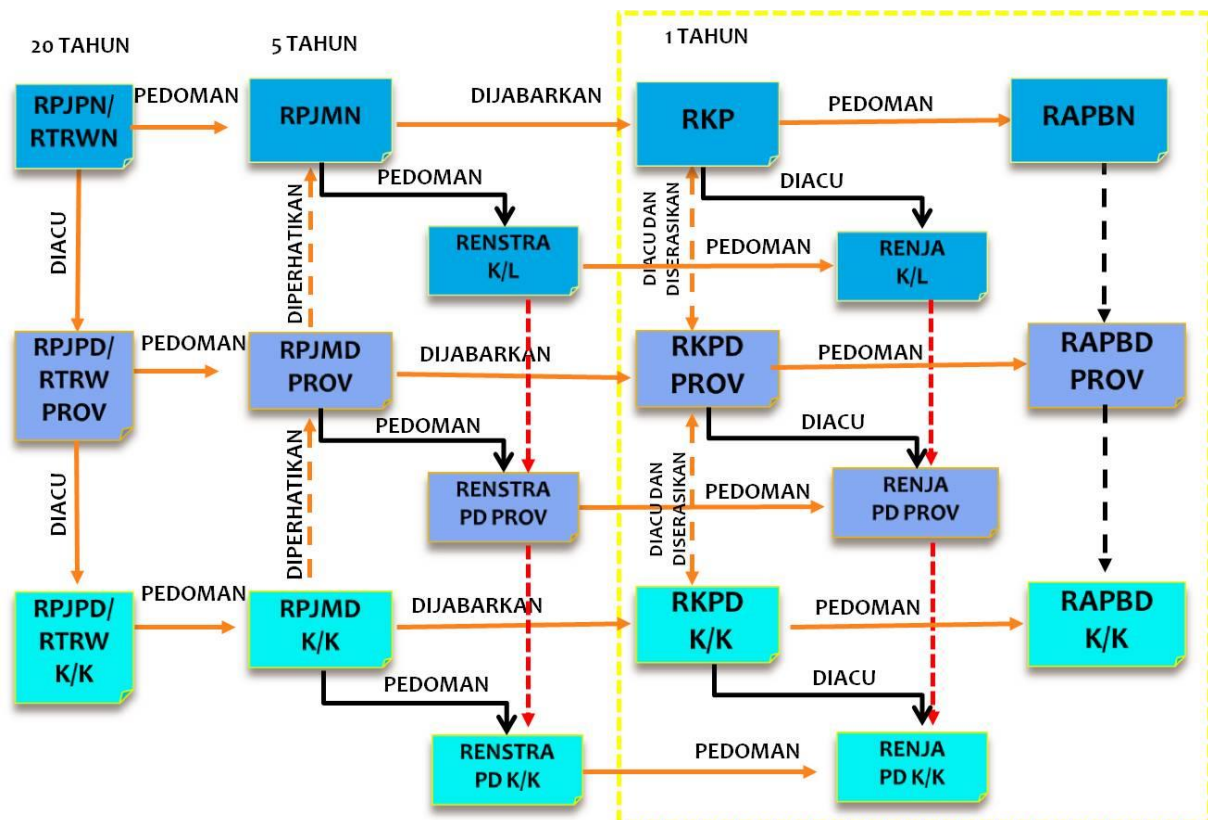
Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 10 Seri E) ;

### **1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN**

Dalam menyusun dokumen RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memperhatikan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Penyusunan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 merupakan bagian dari penerapan sistem perencanaan pembangunan nasional, dan bagian dari penerapan sistem perencanaan dan penganggaran terpadu. RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 disusun dengan memperhatikan kebijakan tingkat nasional, yang mengacu pada RKP Tahun 2019 yang merupakan penjabaran dari RPJMN Tahun 2015 - 2019 serta Renstra masing - masing Kementerian dan Lembaga Pemerintah non Kementerian di tingkat pusat. Selain itu dalam konteks daerah, dokumen RKPD Tahun 2019 juga disusun dengan berpedoman pada Perubahan RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 dan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022.

Di samping itu, dokumen-dokumen perencanaan sebagaimana tersebut di atas yang bersifat spasial perlu disinkronisasikan dengan dokumen-dokumen perencanaan spasial, yaitu dokumen RTRW Nasional, RTR Pulau dan RTR Kawasan Strategis Nasional pada level Pemerintah Pusat dan dokumen RTRW Daerah, RDTR serta RTR Kawasan Strategis Daerah. Di samping itu, dokumen RTRW Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan RPJP Daerah dan RPJM Daerah. Dengan demikian, korelasi antara RKPD dengan dokumen perencanaan spasial (RTRW Daerah) terletak pada hubungannya dengan dokumen antara RPJP Daerah dan RPJM Daerah, yang sama - sama diacu oleh RKPD

Berdasarkan kondisi diatas, maka keterkaitan antar dokumen perencanaan, spasial dan penganggaran adalah sebagaimana pada Gambar I.3 berikut:



**Gambar 1.2** Hubungan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, Daerah, dan Perangkat Daerah

Sumber: Diolah dari UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 25 Tahun 2004 dan UU Nomor 23 Tahun 2014

#### 1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun dengan maksud untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki guna peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan.

Adapun tujuannya adalah sebagai acuan bagi seluruh Instansi/Kantor Wilayah/Lembaga Teknis Daerah/Dinas Daerah/Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Tahun Anggaran 2019.

#### 1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD

Sistematika Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

## **DAFTAR ISI**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi gambaran umum penyusunan RKPD yang meliputi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RKPD dengan dokumen rencana pembangunan daerah, sistematika dokumen RKPD, serta maksud dan tujuan penyusunan RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

### **BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

Berisi penjelasan gambaran umum kondisi daerah dari berbagai aspek, hasil evaluasi RKPD tahun lalu dan tahun berjalan dan realisasi RPJMD serta permasalahan pembangunan daerah.

### **BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH**

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu (Tahun 2017) dan perkiraan tahun berjalan (Tahun 2018), yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

### **BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2019 berdasarkan hasil analisis terhadap evaluasi hasil RKPD tahun lalu (Tahun 2017) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi masalah ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta pendanaan.

### **BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA**

Mengemukakan tentang arahan kebijakan pembangunan kabupaten/kota yang ditetapkan oleh provinsi, yang nantinya akan menjadi pedoman bagi daerah kabupaten/kota dalam menyusun RKPD.

### **BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

Memuat indikator penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dijadikan Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

## **BAB VIII    PENUTUP**

Berisi penegasan bahwa dalam melaksanakan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 diperlukan sinergisitas yang mantap di jajaran pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, DPRD, pihak swasta dan seluruh lapisan masyarakat.



## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

# BAB II

## GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

### 2.1 KONDISI UMUM KONDISI DAERAH

#### 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

##### A. Karakteristik lokasi dan wilayah

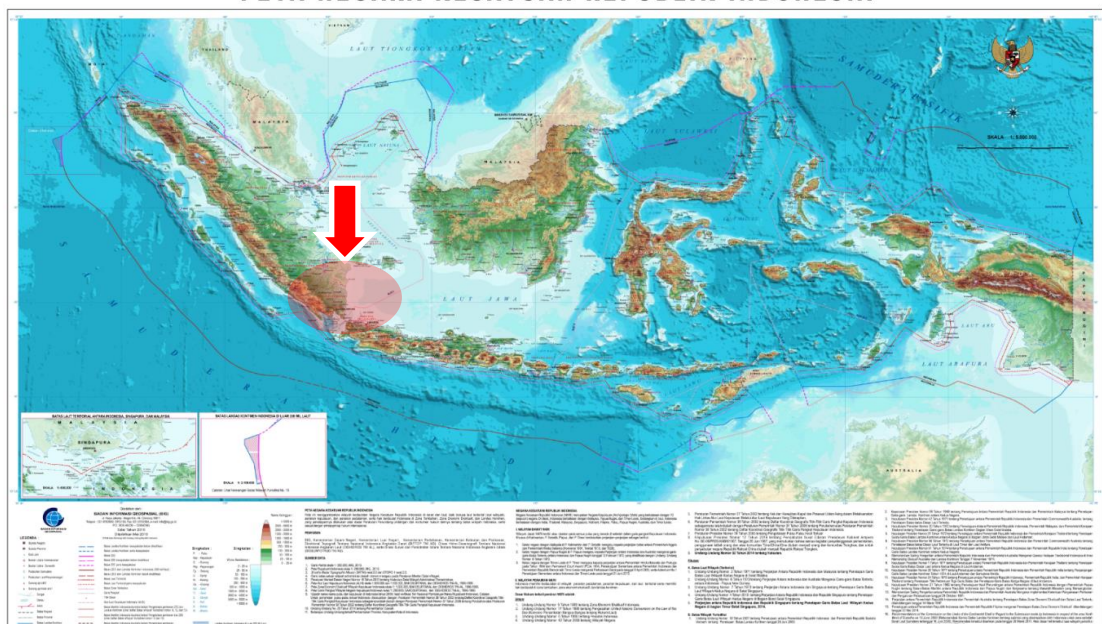
##### 1). Kondisi Astronomis dan Geografis

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara astronomis terletak pada 104°50' sampai 109°30' Bujur Timur dan 0°50' sampai 4°10' Lintang Selatan untuk jelasnya dapat dilihat pada Gambar II.1 berikut ini.

**Gambar II.1**

Gambar Lokasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

#### PETA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA



Sumber: Badan Informasi Geospasial (BIG), 2017

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada pada wilayah Indonesia sebelah Barat, dengan posisi geografis yang sangat strategis. Berada pada pertemuan arus Selat Malaka dan Laut Cina Selatan, sehingga menjadi wilayah yang kaya akan sumberdaya kelautan dan perikanan. Disamping itu dekat dan berada pada Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I, seperti tergambar pada peta Alur Laut Kepulauan Indonesia pada Gambar II.2. Jalur pada ALKI I yang difungsikan untuk pelayaran dari Laut Cina Selatan melintasi Laut Natuna, Selat Karimata, Laut Jawa, dan Selat Sunda ke Samudera Hindia, dan sebaliknya; dan untuk pelayaran dari Selat Singapura melalui Laut Natuna dan sebaliknya (Alur Laut Cabang I A),

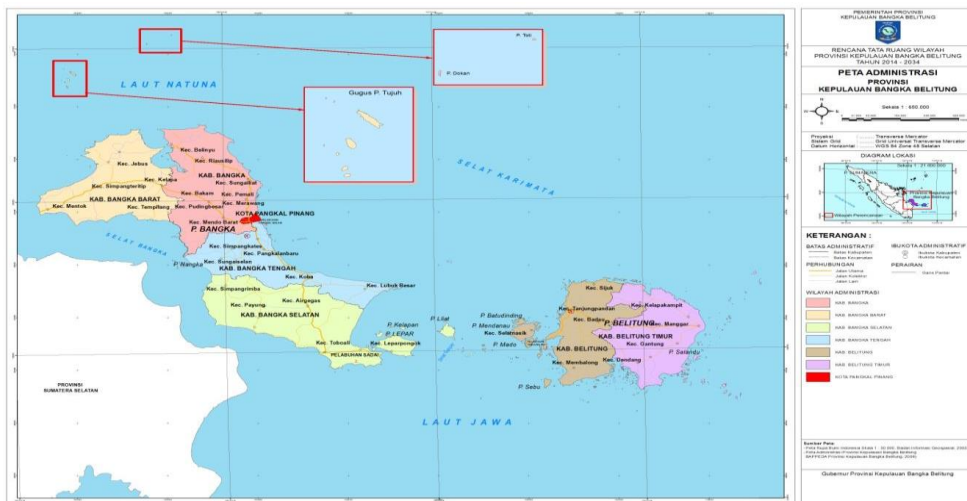
**Gambar II.2**

### Gambar II.2



**Gambar II.3.**

**Gambar II.3.**



*Sumber : RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034*

## 2. Luas dan Daerah Administratif

Luas wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai 81.725,23 km<sup>2</sup>. Terdiri atas daratan seluas 16.424,23 km<sup>2</sup> atau 20,10 persen dari total wilayah dan wilayah laut seluas 65.301,00 km<sup>2</sup> atau 79,90 persen dari total wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Secara terperinci dapat dilihat pada data tabel II.1.

**Tabel II.1**  
Luas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota dan  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2016

Nama Kabupaten/ Kota	Nama Ibu Kota	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )				
		2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bangka	Sungailiat	2.950,69	2.950,69	2.950,69	2.950,69	2.950,69
Bangka Barat	Muntok	2.820,61	2.820,61	2.820,61	2.820,61	2.820,61
Bangka Tengah	Koba	2.126,36	2.126,36	2.126,36	2.126,36	2.126,36
Bangka Selatan	Toboali	3.607,08	3.607,08	3.607,08	3.607,08	3.607,08
Belitung	Tanjungpandan	2.293,69	2.293,69	2.293,69	2.293,69	2.293,69
Belitung Timur	Manggar	2.507,00	2.507,00	2.507,00	2.507,00	2.507,00
Pangkalpinang	Pangkalpinang	118,80	118,80	118,80	118,80	118,80
Luas Daratan		16.424,23	16.424,23	16.424,23	16.424,23	16.424,23
Luas Laut		65.301,00	65.301,00	65.301,00	65.301,00	65.301,00
<b>Provinsi Kep. Babel</b>		<b>81.725,23</b>	<b>81.725,23</b>	<b>81.725,23</b>	<b>81.725,23</b>	<b>81.725,23</b>

Sumber: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka, 2017

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, yang pada saat awalnya terdiri dari 2 (dua) Kabupaten yaitu Bangka, Belitung dan 1 (satu) Kota yaitu Pangkalpinang. Kemudian melakukan pemekaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003, yang membentuk 4 (empat) kabupaten baru yaitu Bangka Tengah, Bangka Barat, Bangka Selatan dan Belitung Timur, sehingga saat ini jumlah kabupaten dan kota menjadi 7 (tujuh), dengan 6 (enam) Kabupaten dan 1 (satu) Kota. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara terperinci dapat dilihat pada tabel di bawah berikut ini.

**Tabel II.1.a** Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota dan Kecamatan  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013-2017

Nama Kota/Kabupaten	Nama Ibu Kota	Jumlah Kecamatan				
		2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kabupaten Bangka	Sungailiat	8	8	8	8	8
Kabupaten Bangka Barat	Muntok	6	6	6	6	6
Kabupaten Bangka Tengah	Koba	6	6	6	6	6
Kabupaten Bangka Selatan	Toboali	8	8	8	8	8
Kabupaten Belitung	Tanjungpandan	5	5	5	5	5
Kabupaten Belitung Timur	Manggar	7	7	7	7	7

Nama Kota/Kabupaten	Nama Ibu Kota	Jumlah Kecamatan				
		2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pangkalpinang	Pangkalpinang	7	7	7	7	7
<b>Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</b>		<b>47</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>47</b>

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

Dari Tabel II.1.a di atas Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki jumlah wilayah Administrasi kecamatan yang paling banyak adalah Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Selatan dengan jumlah masing-masing kabupaten tersebut 8 kecamatan. Dan kabupaten yang paling sedikit memiliki wilayah Administrasi kecamatannya adalah Kabupaten Belitung sebanyak 5 kecamatan. Total seluruh kecamatan yang ada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 47 kecamatan.

**Tabel II.1.b** Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013-2017

Nama Kota/Kabupaten	Nama Ibu Kota	Jumlah Desa				
		2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kabupaten Bangka	Sungailiat	62	62	62	62	62
Kabupaten Bangka Barat	Muntok	60	60	60	60	60
Kabupaten Bangka Tengah	Koba	56	56	56	56	56
Kabupaten Bangka Selatan	Toboali	50	50	50	50	50
Kabupaten Belitung	Tanjungpandan	48	42	42	42	42
Kabupaten Belitung Timur	Manggar	39	39	39	39	39
Pangkalpinang	Pangkalpinang	0	0	0	0	0
<b>Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</b>		<b>313</b>	<b>309</b>	<b>309</b>	<b>309</b>	<b>309</b>

Sumber : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka Tahun, 2017

Dari Tabel II.1.b di atas Kabupaten/Kota Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki jumlah wilayah Administrasi Desa yang paling banyak adalah Kabupaten Bangka dengan jumlah 62 Desa dan kabupaten yang paling sedikit memiliki wilayah Administrasi Desa adalah Kabupaten Belitung Timur sebanyak 39 desa. Total seluruh desa yang ada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 309 Desa.

**Tabel II.1.c** Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota dan Kelurahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013-2017

Nama Kota/Kabupaten	Nama Ibu Kota	Jumlah Kelurahan				
		2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kabupaten Bangka	Sungailiat	9	15	15	19	19
Kabupaten Bangka Barat	Muntok	4	4	4	4	4
Kabupaten Bangka Tengah	Koba	7	7	7	7	7
Kabupaten Bangka Selatan	Toboali	3	3	3	3	3
Kabupaten Belitung	Tanjungpandan	7	7	7	7	7
Kabupaten Belitung Timur	Manggar	0	0	0	0	0
Pangkalpinang	Pangkalpinang	42	42	42	42	42
<b>Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</b>		<b>72</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>82</b>	<b>82</b>



*Sumber : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka Tahun, 2017*

Dari Tabel II.1.c di atas Kabupaten/Kota Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki jumlah wilayah Administrasi Kelurahan yang paling banyak adalah Kota Pangkalpinang dengan jumlah 42 Kelurahan dan kabupaten yang paling sedikit memiliki wilayah Administrasi Kelurahan adalah kabupaten Belitung Timur yang tidak memiliki wilayah kelurahan. Total seluruh kelurahan yang ada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 78 kelurahan.

**Tabel II.1.d** Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota dan Luas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013-2017

Nama Kota/Kabupaten	Nama Ibu Kota	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )				
		2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kabupaten Bangka	Sungailiat	2.950,69	2.950,69	2.950,69	2.950,69	2.950,69
Kabupaten Bangka Barat	Muntok	2.820,61	2.820,61	2.820,61	2.820,61	2.820,61
Kabupaten Bangka Tengah	Koba	2.126,36	2.126,36	2.126,36	2.126,36	2.126,36
Kabupaten Bangka Selatan	Toboali	3.607,08	3.607,08	3.607,08	3.607,08	3.607,08
Kabupaten Belitung	Tanjungpandan	2.293,69	2.293,69	2.293,69	2.293,69	2.293,69
Kabupaten Belitung Timur	Manggar	2.507,00	2.507,00	2.507,00	2.507,00	2.507,00
Pangkalpinang	Pangkalpinang	118,80	118,80	118,80	118,80	118,80
Luas Daratan		16.424,23	16.424,23	16.424,23	16.424,23	16.424,23
Luas Laut		65.301,00	65.301,00	65.301,00	65.301,00	65.301,00
<b>Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</b>		<b>81.725,23</b>	<b>81.725,23</b>	<b>81.725,23</b>	<b>81.725,23</b>	<b>81.725,23</b>

*Sumber : Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka Tahun, 2017*

Dari Tabel II.1.d di atas Kabupaten/Kota Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki Luas wilayah Administrasi yang paling besar adalah kabupaten Bangka Selatan dengan luas wilayah 3.607,08 Km<sup>2</sup> dan kabupaten yang paling kecil luas wilayah Administrasi adalah Kota pangkalpinang sebesar 118,8 Km<sup>2</sup>. Total luas wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Luas lautan 65.301,23 Km<sup>2</sup> dan Luas daratan 16.424,23 Km<sup>2</sup>.

### 3. Keadaan Topografi, Geologi dan Hidrologi

Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai topografi yang umumnya relatif datar yang terdiri dari dataran rendah hingga berbukit dan hanya sebagian kecil yang bergunung. Ketinggian dataran rendah rata-rata sekitar 50 meter di atas permukaan laut. Titik tertinggi terdapat pada puncak Gunung Maras di Kabupaten Bangka dengan ketinggian 699 meter dan puncak Gunung Tajam di Kabupaten Belitung dengan ketinggian 445 meter di atas permukaan laut.

Komposisi lahan datar mencapai luas sekitar 46,19 persen, bergelombang 41,08 persen, dan sisanya 12,37 persen merupakan wilayah berbukit dan bergunung serta berawa-rawa. Wilayah berawa-rawa umumnya terdapat di Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Bangka Tengah, dan sebagian kecil di Kabupaten Bangka Selatan.

Pulau Bangka dan Belitung termasuk bagian tengah dari “Tin Mayor South East Asian Tin Belt” dengan tipe granit main range yang mempunyai ciri-ciri megakristal (terutama K-Feldspar) dan terjadi mineralisasi timah beserta mineral ikutannya. Granit ini umumnya terdiri atas

granit biotit dan granit muskovit yang semuanya merupakan tipe sedimen tipe S yang diperkirakan umurnya Trias (sumber: Arsip PT.Koba Tin: Survey dan Geology Department, 2007). Oleh karena itu, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki cadangan timah terbesar di Indonesia yang berpotensi sebagai modal dasar pembangunan. Terdapat pula mineral-mineral ikutan timah seperti Zirkon ( $\text{ZrSiO}_4$ ), Monazit ( $(\text{Ce, La, Dy})\text{PO}_4$  ( $\text{ThSi})\text{O}_2$ ), Hematit ( $\text{Fe}_2\text{O}_3$ ), Pyrit ( $\text{FeS}_2$ ), Ilmenit ( $\text{FeTiO}_3$ ), dan Xenotim ( $\text{YPO}_4$ ).

Sedangkan secara geologis mineralisasi timah di Indonesia terikat pada sabuk granit (granitebelt) Asia Tenggara yang memanjang dari Yunan (China) melalui Myanmar, Thailand, Semenanjung Melaka sampai pada Kepulauan Indonesia terutama di Pulau Bangka, Pulau Belitung, Pulau Singkep dan Pulau Karimun.

Selain produk timah dan mineral ikutannya, ada pula produk tambang lain nya seperti pasir kuarsa ( $\text{SiO}_2$ ), material Kaolin, dan bilitonit (dikenal dengan nama “satam”). Kaolin merupakan bahan baku untuk pembuatan kertas, keramik, deterjen, lem, kosmetik dan bahan untuk industri kimia. Pasir kuarsa dibandingkan dengan pasir biasa adalah lebih putih dan butirannya lebih kecil. Material ini digunakan untuk pembuatan kaca. Satam banyak digunakan untuk ornamen/hiasan cincin, bros, dan perhiasan lainnya.

Dari kajian hidrologi, daerah Kepulauan Bangka Belitung dihubungkan oleh perairan laut dan pulau-pulau kecil. Secara keseluruhan daratan dan perairan Bangka Belitung merupakan satu kesatuan dari bagian dataran Sunda, sehingga perairannya merupakan bagian Dangkalan Sunda (Sunda Shelf) dengan kedalaman laut tidak lebih dari 30 meter. Kepulauan Bangka Belitung mempunyai dua jenis perairan yaitu perairan terbuka dan perairan semi tertutup. Perairan terbuka yang terdapat di sekitar pulau Bangka terletak di sebelah Utara, Timur dan Selatan Pulau Bangka. Sedangkan perairan semi tertutup terdapat di Selat Bangka dan Teluk Kelabat di Bangka Utara. Sementara itu perairan di Pulau Belitung umumnya bersifat perairan terbuka.

Disamping sebagai daerah perairan laut, daerah Kepulauan Bangka Belitung juga mempunyai banyak sungai seperti : Sungai Baturusa, Sungai Kepoh, Sungai Buluh, Sungai Kotawaringin, Sungai Kampa, Sungai Layang, Sungai Manise dan Sungai Kurau di Pulau Bangka. Sedangkan di Pulau Belitung terdapat Sungai Cecuruk, Sungai Buding, Sungai Lenggang.

#### **4. Klimatologi**

Kepulauan Bangka Belitung memiliki Iklim Tropis yang dipengaruhi angin musim yang mengalami bulan basah dan kering. Selama tahun 2012-2016, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki suhu rata-rata tahunan antara 27-31 °C dan curah hujan rata-rata tahunan antara 397-580 mm. Curah hujan maximum tertinggi terjadi pada tahun 2015 sebesar 577,3 mm di Belitung dan tahun 2012 sebesar 466,2 mm di Pangkalpinang. Sementara kelembabannya relatif tinggi dengan fluktuasi yang kecil. Di bulan Desember dan Januari, biasanya musim penghujan di Kepulauan Bangka Belitung, angin kencang, dan ombak laut cenderung meninggi.

#### **5. Kondisi Lahan**

Penggunaan lahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didominasi oleh hutan negara, perkebunan, tegalan dan permukiman. Namun berdasarkan data numerik yang diperoleh dari BPS, terlihat juga bahwa lahan kering yang tidak termanfaatkan juga cukup luas (lahan

bukan sawah) mencapai 121.407 Ha. Lebih lanjut dapat diperhatikan Tabel II.2. Dari seluruh luas lahan 69% telah digunakan untuk pertanian legal/kebun/ladang/huma, tambak, kolam/tebat/empang, lahan untuk tanaman kayu-kayuan, perkebunan negara/swasta, dan lahan sawah. Sedangkan sisanya merupakan bangunan, pekarangan, padang rumput dan lahan yang sementara tidak diusahakan.

**Tabel II.2**  
Jenis dan Luas Penggunaan Lahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)				
	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
Pertanian Sawah	23.042	13.262	15.719	15.719	22.771
Tegalan	112.777	109.820	113.105	113.105	117.376
Ladang	48.960	44.085	30.348	30.348	28.147
Perkebunan	332.179	334.698	441.152	441.152	367.848
Hutan Rakyat	85.738	71.323	47.753	47.753	42.637
Tambak	*	*	*	*	*
Kolam	*	*	*	*	*
Pengembalaan	6.086	4.235	1.815	1.815	2.263
Tanah kosong/ (sementara tidak diusahakan)	121.407	126.272	76.588	76.588	67.415
Lain-Lain (pekarangan)	387.443	388.068	397.806	397.806	538.195
Permukiman	526.303	550.651	517.741	517.741	455.762
Hutan Negara	*	*	*	*	*
Rawa	*	*	*	*	*
Lainnya	*	*	*	*	*
<b>JUMLAH</b>	<b>1.642.414</b>	<b>1.642.414</b>	<b>1.642.027</b>	<b>1.642.027</b>	<b>1.642.414</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

(\*: dikelompokkan ke jenis penggunaan lahan lainnya)

Luas Penggunaan Lahan di Provinsi Kep. Bangka Belitung paling besar digunakan untuk lain-lain (pekarangan) 538.195 ha, kemudian digunakan untuk permukiman sebesar 455.762 Ha dan perkebunan sebesar 367.848 Ha dan luas penggunaan lahan paling kecil di peruntukan pada pengembalaan sebesar 2.263 Ha.

## B. Potensi pengembangan wilayah

Berdasarkan potensi karakteristik wilayah dapat diidentifikasi bahwa wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan Perkebunan, perikanan, kehutanan, pertanian, pertambangan, industri, pariwisata dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034, pengembangannya disesuaikan dengan arahan yang digariskan pada RTRWN dan RTR Pulau Sumatera. Perencanaan dan pengembangan dilakukan berdasarkan rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan kawasan strategis.

Perencanaan dan pengembangan Rencana Struktur Ruang, meliputi sistem perkotaan, sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air dan sistem prasarana lingkungan.

## **1) Rencana Struktur Ruang**

### **a) Rencana Sistem Perkotaan**

Rencana sistem perkotaan secara hierarkis dan dalam bentuk pusat kegiatan, sesuai dengan kebijakan nasional, potensi, dan rencana pengembangan wilayah provinsi sistem perkotaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut :

1. Pusat Kegiatan Nasional(PKN), yaitu: Kota Pangkalpinang;
2. Pusat Kegiatan Wilayah(PKW), meliputi: Muntok, Tanjungpandan, Manggar;
3. Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWP), meliputi: Toboali dan Koba;
4. Pusat Kegiatan Lingkungan (PKL), meliputi: Kelapa, Parittiga, Belinyu, Sungailiat, Sungai Selan, Sijuk, Membalong, Badau, Kelapa Kampit, Gantung, Puding Besar, Pangkalanbaru, Payung, dan Selat Nasik.

### **b) Rencana Sistem Jaringan Transportasi**

Sesuai dengan Karakteristik geografis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan kepulauan sistem transportasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung direncanakan sebagai sistem transportasi terpadu antar moda yang meliputi sistem transportasi darat, sistem transportasi laut dan sistem transportasi udara, dengan uraian sebagai berikut:

1. Sistem transportasi darat yang ada di Provinsi ini terdiri dari: jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan serta jaringan transportasi perkotaan;
2. Sistem transportasi laut terdiri dari pelabuhan dan alur pelayaran; dan
3. Sistem transportasi udara terdiri dari tatanan bandar udara dan ruang udara.

### **c) Sistem Transportasi Darat**

Peningkatan dan pengembangan jaringan jalan yang berkenaan dengan peningkatan status jalan diatur sesuai peraturan perundang-undangan. Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, terdiri atas: jaringan jalan dan jembatan, jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pengembangan jaringan yang menjadi kewenangan pusat diatur dengan Surat Keputusan Menteri terkait, pengembangan jaringan jalan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi diatur dengan Surat Keputusan Gubernur. Pengembangan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan dilakukan melalui peningkatan dan pengembangan jalur penyeberangan.

### **d) Sistem Transportasi Laut**

Pengembangan sistem transportasi laut ditujukan untuk mendukung sistem produksi, sistem pergerakan penumpang dan barang dengan sistem kegiatan perekonomian antar kawasan maupun internasional.

Pengembangan sistem transportasi laut dilakukan melalui pengembangan dan/atau pembangunan pelabuhan utama, pelabuhan pengumpul dan pelabuhan pengumpan, serta dilakukan juga melalui pengembangan alur pelayaran.

### e) Sistem Transportasi Udara

Sistem transportasi udara terdiri dari tatanan bandar udara dan ruang lalu lintas udara. Tatanan bandar udara terdiri dari : a. bandar udara pengumpul (*hub*) dan b. bandar udara pengumpan (*spoke*). Bandar udara pengumpul merupakan bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan yang luas dari berbagai bandar udara yang melayani penumpang dan/atau kargo dalam jumlah besar dan mempengaruhi perkembangan ekonomi secara nasional atau berbagai provinsi.

Pengembangan sistem transportasi udara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terdiri atas: Bandar Udara Depati Amir Pangkalan Baru di Pangkalpinang dan Bandar Udara H.A.S. Hanandjoeddin di Tanjung Pandan.

Dalam pembangunan dan pengembangan bandar udara harus memperhatikan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

### f) Rencana Jaringan Energi

Rasio elektrifikasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebesar 99,97 %. Dengan kondisi hampir semua rumah tangga dan desa sudah dialiri listrik PLN, beban puncak energi listrik PLN terhadap daya mampu yang tersedia sebesar 234.100 KW, dengan daya yang seluruhnya terpakai pada saat beban puncak yaitu 172.600 KW. Sehingga dari pembangkit yang tersedia telah terdapat surplus 61.500 KW. (Data PLN Desember 2017)

Pengembangan jaringan energi ditujukan bagi pengembangan jaringan prasarana energi listrik yang meliputi prasarana pembangkit dan jaringan listrik. Pengembangan prasarana pembangkit energi listrik dilakukan dengan memanfaatkan potensi sumber daya primer, terutama sumber energi terbarukan yang banyak tersedia di Kabupaten/Kota diantaranya tenaga air, tenaga surya, tenaga angin, biogas, biomasa, gelombang laut dan sumber energi alternatif lainnya. Pengembangan jaringan energi listrik dilakukan melalui pembangunan pembangkit listrik, gardu induk dan jaringan listrik. Seiring dengan bertambahnya penduduk dan pembangunan wilayah, kebutuhan akan energi listrik tentunya akan semakin meningkat, proyeksi kebutuhan energi listrik dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel II.3**  
Rekapitulasi Proyeksi Kebutuhan Daya Listrik 2010 – 2030– KVA

WILAYAH		2010	2015	2020	2025	2030
<b>A. PULAU BANGKA</b>						
1	Bangka	138.036	147.013	160.571	175.380	190.182
2	Bangka Barat	73.556	78.340	85.564	93.456	101.344
3	Bangka Tengah	89.821	95.662	104.484	114.120	123.752
4	Bangka Selatan	86.245	91.854	100.325	109.578	118.826
5	Pangkal Pinang	89.501	94.440	102.543	111.341	120.738
	<b>JUMLAH</b>	<b>477.159</b>	<b>507.309</b>	<b>553.487</b>	<b>603.875</b>	<b>654.842</b>
<b>B. PULAU BELITUNG</b>						
6	Belitung	83.842	87.455	92.464	97.759	104.266
7	Belitung Timur	62.441	65.133	68.863	72.807	77.653
	<b>JUMLAH</b>	<b>146.283</b>	<b>152.588</b>	<b>161.327</b>	<b>170.566</b>	<b>181.919</b>
	<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>623.442</b>	<b>659.897</b>	<b>714.814</b>	<b>774.441</b>	<b>836.761</b>

Sumber : Hasil Analisis Tim RTRWP 2010



**g) Rencana Jaringan Telekomunikasi**

Kebutuhan akan telepon terdiri atas kebutuhan domestik dan non domestik. Kebutuhan domestik terdiri atas untuk rumah kecil, rumah sedang dan rumah besar dengan standar masing-masing sebagai berikut :

1. 4 (Empat) rumah kecil memiliki 1 (satu) satuan sambungan (sst);
2. 2 (Dua) rumah sedang memiliki 1 (satu) satuan sambungan (sst); dan
3. Setiap rumah besar memiliki 1 (satu) satuan sambungan (sst).

Standar kebutuhan non-domestik adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan umum dan komersil : 15 % dari domestik
2. Wartel : 250 jiwa per wartel
3. Telepon Umum : 800 jiwa per unit

Kedepannya seiring dengan pertambahan penduduk dan pembangunan wilayah, kebutuhan akan sambungan telepon tentunya akan semakin meningkat, proyeksi kebutuhan sambungan telepon per kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel II.4**  
Rekapitulasi Proyeksi Kebutuhan Sambungan Telepon 2010 – 2030

WILAYAH		2010	2015	2020	2025	2030
<b>A. PULAU BANGKA</b>						
1	Bangka	32.582	36.207	39.546	43.193	45.552
2	Bangka Barat	17.363	19.294	21.073	23.017	24.258
3	Bangka Tengah	21.202	23.560	25.733	28.106	30.379
4	Bangka Selatan	20.358	22.622	24.708	26.987	29.170
5	Pangkal Pinang	21.179	23.259	25.255	27.421	29.502
	<b>JUMLAH</b>	<b>112.683</b>	<b>124.942</b>	<b>136.315</b>	<b>148.724</b>	<b>158.861</b>
<b>B. PULAU BELITUNG</b>						
6	Belitung	19.173	19.963	21.106	22.315	23.491
7	Belitung Timur	14.278	14.867	15.719	16.619	17.495
	<b>JUMLAH</b>	<b>33.451</b>	<b>34.830</b>	<b>36.825</b>	<b>38.934</b>	<b>40.986</b>
	<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>146.134</b>	<b>159.772</b>	<b>173.140</b>	<b>187.658</b>	<b>199.847</b>

Sumber : Hasil Analisis Tim RTRWP 2010

Pengembangan jaringan telekomunikasi meliputi sistem terestrial dan sistem satelit sebagai penghubung lokal dan interlokal, pengembangan jaringan ini dilakukan hingga ke pelosok wilayah yang belum terjangkau sarana prasarana telekomunikasi.

**h) Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air**

Rencana sistem pengembangan sumber daya air di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, meliputi: sistem jaringan sungai, sistem jaringan irigasi, sistem jaringan air baku, sistem pengendalian banjir dan sistem pengamanan pantai, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sistem jaringan sungai berupa Wilayah Strategis Nasional yaitu WS Bangka dan Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/kota yaitu WS Belitung;

- b. Sistem jaringan irigasi terdiri atas daerah irigasi kewenangan pemerintah dan daerah irigasi kewenangan pemerintah provinsi;
- c. Sistem jaringan air baku terdiri dari: sumber air baku, sistem pengelolaan air baku, dan peruntukan air baku;
- d. Sistem pengendalian banjir berupa: pengamanan kawasan tangkapan air hujan, pemeliharaan dan pelestarian kawasan konservasi, pengamanan sempada sungai, pembuatan cek dam penghambat laju daya rusak air, dan pembangunan kanal pengatur distribusi air sungai serta normalisasi sungai;
- e. Sistem pengamanan pantai dilakukan dengan cara: naturalisasi pantai dengan penghijauan, pengamanan gundukan pasir, pemecah ombak, turap dan pengamanan sempadan pantai.

#### i) Sistem Prasarana Lingkungan

Sistem prasarana lingkungan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, meliputi: tempat pemrosesan akhir sampah (TPA Regional), tempat pengolahan dan atau pengelolaan limbah industri bahan beracun berbahaya dan nn beracun berbahaya, sistem drainase, sistem pengelolaan air minum (SPAM) dan sarana prasarana lingkungan yang sifatnya menunjang kehidupan masyarakat.

**Gambar II.4**

Peta Rencana Struktur Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber : RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034

#### j) Rencana Pola Ruang

Rencana pola ruang adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah Provinsi yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Dalam rencana pola ruang wilayah provinsi ini juga akan dijabarkan peruntukan ruang untuk kawasan lindung dan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis provinsi.

Kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak lebih dari satu wilayah kabupaten/kota, kawasan lindung yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya yang terletak di wilayah kota/kabupaten lain, dan kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan

peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah provinsi. Kawasan budidaya provinsi adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

## 2) Kawasan Lindung

Rencana pengembangan kawasan lindung, meliputi:

- kawasan hutan lindung;
- kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya;
- kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam, situs dan; kawasan cagar budaya serta;
- kawasan rawan bencana alam.

Sesuai dengan arahan dalam RTRWN dan kondisi ekosistem di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, rencana minimal luas kawasan lindung yang harus dipulihkan kembali dan/atau dipertahankan di provinsi ini mencapai 492.700 Ha, dimana 32% diantaranya (atau 156.730 Ha) merupakan kawasan hutan lindung.

Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya adalah berupa kawasan gambut dan atau kawasan resapan air hujan. Kawasan bergambut ditetapkan dengan kriteria: kawasan tanah bergambut dengan ketebalan 3 (tiga) meter atau lebih. Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang termasuk dalam kategori ini hanyalah kawasan bergambut di Bangka Barat tepatnya di Kecamatan Muntok, Sungai Teritip, Kelapa dan Jebus.

**Sempadan Pantai;** sebagaimana diketahui bahwa Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari 2 (dua) pulau besar bangka dan Belitung. Disamping itu terdapat pulau-pulau lain yang lebih kecil yaitu Pulau Nangka, Penyu, Burung, Lepar, Pongok, Gelasa, Panjang, Tujuh, Lima, Lengkuas, Selindung, Pelanduk, Seliu, Nadu, Mendanau, Batu Dinding, Sumedang dan pulau-pulau kecil lainnya.

**Kawasan Cagar Alam;** berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN, untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat cagar alam sebagai berikut: Cagar Alam Gunung Lalang - Belitung, Gunung Menumbing, Gunung Maras, Gunung Mangkol, Gunung Permisan, dan Jering Menduyung, kawasan Gunung Tajam Belitung.

**Taman Wisata Alam Laut;** di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupa Taman Alam Laut Perairan Belitung, Perairan Belitung Timur, dan Perairan Bangka Selatan.

**Kawasan Suaka Alam Laut ;** dan perairan lainnya adalah Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) di Kabupaten Bangka Tengah yang meliputi Pulau Panjang, Pulau Ketawai, Pulau Bebuar, Pulau Gusung Asam dan Pulau Semujur.

Di Kepulauan Bangka Belitung terdapat kawasan cagar budaya berskala internasional yang berada di bawah naungan UNESCO yaitu kawasan Kota Tua Muntok dan Bukit Menumbing. Di kawasan pusat kota terdapat mercusuar Tanjung Kelian dan benteng Kuta Seribu yang dibangun tahun 1812-1817, mesjid Jami dan kelenteng Kung Fuk Nio serta Komplek Perumahan mayor chung A Thiam yang berusia ratusan tahun (dibangun 1830-an). Di Bukit Menumbing yang mempunyai ketinggian hampir 500 meter dpa dan dikelilingi hutan lindung terdapat bangunan tua yang dikenal dengan Giri Sasana Menumbing yang dibangun Belanda pada tahun 1932. Bangunan-bangunan yang dimaksud bukan saja berusia ratusan tahun namun juga mempunyai nilai sejarah, arsitektur dan budaya yang tinggi, sehingga pemerintah daerah bersama UNESCO telah menetapkan kawasan tersebut sebagai kawasan Cagar Budaya.

### 3) Kawasan Budidaya

Kawasan Budidaya di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari:

1. kawasan peruntukan hutan produksi;
2. kawasan peruntukan pertanian;
3. kawasan peruntukan perikanan;
4. kawasan peruntukan pertambangan;
5. kawasan peruntukan industri;
6. kawasan peruntukan pariwisata;
7. kawasan peruntukan permukiman; dan
8. Kawasan peruntukan lainnya.

**Gambar II.5**

Peta Rencana Pola Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber : RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034

### 4) Kawasan Strategis Provinsi

Dalam aspek keruangan, kawasan strategis merupakan kawasan yang didalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap:

- a Tata ruang di wilayah sekitarnya;
- b Kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya; dan/atau
- c Peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kawasan strategis provinsi merupakan bagian wilayah provinsi yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

#### a. Wilayah rawan bencana

Sejarah bencana yang pernah terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan Sejarah bencana yang pernah terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan bencana alam dan non alam serta bencana sosial akibat ulah manusia. Ancaman bencana alam tersebut antara lain adalah banjir dan cuaca ekstrim (puting beliung). Di samping itu bencana non alam seperti gagal teknologi (kecelakaan transportasi) juga tetap menjadi

ancaman bagi kehidupan masyarakat. Terdapat 3 (tiga) potensi bencana yang teridentifikasi berdasarkan sejarah kejadiannya. Potensi bencana tersebut dapat dilihat pada tabel II.5.

**Tabel II.5.**  
Data Bencana Alam di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016

Kejadian	Jumlah Titik Lokasi Kejadian	Meninggal	Korban	Rumah Rusak Berat	Rumah Rusak Sedang	Rumah Rusak Ringan
(1)	(2)	(3)	(6)	(10)	(11)	(12)
Banjir Bandang/Rob/Bah	143 (67,77%)	3	19.019 KK/22 Jiwa	0	2	9.984
Angin Puting Beliung/Angin Kencang	11 (5,21%)	4	111 KK	7	8	95
Di Laut/Pantai	6 (2,84%)	7	18 jiwa	0	0	0
Di sungai	0	0	0	0	0	0
Longsoran Tanah/Batu/Pasir	8 (3,79%)	10	20 jiwa	0	0	0
Kebakaran Hutan/Lahan	1 (0,47%)	0	0	0	0	0
Kebakaran Rumah/Perumahan	11 (5,21%)	0	8 KK/13 jiwa	9	2	2
Kebakaran Gedung Pemerintahan	0	0	0	0	0	0
Kebakaran Pasar/Ruko, Gedung, Kantor/Sekolah swasta, warung/toko dan lainnya	7 (3,32%)	1	10 jiwa	4	0	2
Kabut Asap	0	0	0	0	0	0
Gempa Bumi (3 Kec)	15 (7,11%)	0	0	0	0	0
Bencana Sosial	2 (0,95%)	0	2 jiwa	0	0	0
Tersambar Petir	7 (3,32%)	2	24 jiwa	0	4	0

Sumber: Data dan Informasi Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

**Tabel II.6.**  
Wilayah yang Berpotensi Rawan Bencana dan Jenis Bencana yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NO	Lokasi Bencana	Jenis Bencana	Intensitas
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Bangka	Banjir dan Puting beliung	Sedang
2	Bangka Tengah	Banjir, pergerakan tanah	Rendah
3	Bangka Selatan	Banjir, puting beliung, pergerakan tanah	Sedang, tinggi
4	Bangka Barat	Banjir, puting beliung, pergerakan tanah	Sedang
5	Belitung	Banjir, puting beliung, pergerakan tanah	Sedang
6	Belitung Timur	Banjir, puting beliung, pergerakan tanah	Rendah, sedang

NO	Lokasi Bencana	Jenis Bencana	Intensitas
(1)	(2)	(3)	(4)
7	Pangkalpinang	Banjir, puting beliung	Rendah, sedang

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2016

Kawasan rawan bencana alam di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, meliputi:

- Kawasan rawan banjir terdapat di Kecamatan Mentok, Parittiga, Kelapa, Jebus (Kabupaten Bangka Barat); Kecamatan Lubuk Besar, Koba, Namang, Sungai Selan, dan Pangkalan Baru (Kabupaten Bangka Tengah); Kecamatan Toboali dan Pulau Besar (Kabupaten Bangka Selatan); Kota Pangkalpinang; Sungai Manggar Kecamatan Manggar, Sungai Mayang Kecamatan Kelapa Kampit, Jembatan Gantung (Kabupaten Belitung Timur); Tanjung Pandan (Kabupaten Belitung); Sungailiat, Puding Besar, Mendo Barat (Kabupaten Bangka);
- Kawasan rawan abrasi/erosi tersebar di Kecamatan Parittiga, Kecamatan Tempilang (Kabupaten Bangka Barat); Kecamatan Koba, Kecamatan Lubuk Besar, Kecamatan Pangkalan Baru (Kabupaten Bangka Tengah); Kecamatan Membalong, Kecamatan Badau, Kecamatan Tanjung Pandan, Kecamatan Selat Nasik dan Kecamatan Sijuk (Kabupaten Belitung); Kecamatan Manggar, Kecamatan Gantung, Kecamatan Simpang Pesak, Kecamatan Dendang dan Kecamatan Damar (Kabupaten Belitung Timur); Pantai Pasir Padi (Kota Pangkalpinang); Kecamatan Lepar Pongok, Kecamatan Tukak Sadai, Kecamatan Simpang Rimba Permis, Kecamatan Toboali (Kabupaten Bangka Selatan); Kecamatan Sungailiat, Kecamatan Belinyu (Kabupaten Bangka); dan
- Kawasan rawan bencana longsor terdapat di Kecamatan Simpang Teritip (Kabupaten Bangka Barat).

**Gambar II.6**

Peta Rawan Bencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung





### C. Demografi

Jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hasil proyeksi Badan Pusat Statistik Tahun 2017 sebesar 1.430.865 orang, dengan laju pertumbuhan sebesar 2.08 persen sementara laju pertumbuhan penduduk secara nasional 2016 sebesar 1,36 persen. Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi ini tidak hanya dipengaruhi oleh tingginya angka kelahiran (natalitas), namun juga dikarenakan semakin tingginya angka harapan hidup sehingga tingkat kematian (mortalitas) menjadi menurun serta adanya faktor migrasi. Faktor migrasi cukup besar karena berkembangnya daerah Kepulauan Bangka Belitung dari berbagai sektor ekonomi, sehingga menjadi daya tarik untuk datang ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

**Tabel II.7.**  
Jumlah Penduduk  
Kepulauan Bangka Belitung menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013–2017

Kabupaten /Kota	Penduduk (jiwa)				
	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	
Bangka	298.013	304.485	311.085	317.735	324.305
Belitung	167.602	171.271	175.048	178.721	182.418
Bangka Barat	188.271	192.395	196.598	200.684	204.778
Bangka Tengah	173.346	177.218	180.903	184.720	188.603
Bangka Selatan	185.514	189.492	193.583	197.670	201.782
Belitung Timur	114.469	117.026	119.394	121.971	124.587
Pangkalpinang	187.908	191.994	196.202	200.326	204.392
<b>Kepulauan Bangka Belitung</b>	<b>1.315.123</b>	<b>1.343.881</b>	<b>1.372.813</b>	<b>1.401.827</b>	<b>1.430.865</b>

*Sumber: Badan Pusat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018*

Berdasarkan tabel diatas, dapat dihitung bahwa distribusi penduduk pada tahun 2017, terkonsentrasi 78,54 persen di Pulau Bangka dan 21,46 persen di Pulau Belitung. Jumlah penduduk tertinggi mendiami Kabupaten Bangka yaitu sebesar 22,66 persen. Sedangkan sebaran penduduk paling sedikit berada di Kabupaten Belitung Timur, yaitu sebesar 8,71 persen sebagaimana telah ditampilkan dalam table II.8 dan II.9 sebelumnya. Berdasarkan distribusi penduduk, sebagian besar penduduk mendiami wilayah Pulau Bangka, tepatnya berada di Kabupaten Bangka, yaitu sebesar 22,66 persen. Sedangkan sebaran penduduk paling sedikit berada di Kabupaten Belitung Timur, yaitu sebesar 8,70 persen (Tabel II.9

Sementara itu, gambaran mengenai jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dapat diamati pada Tabel II.8. Menurut tabel tersebut, Jumlah Penduduk Usia Produktif (usia 15-64 tahun) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai 1.237,8 juta jiwa, sedangkan usia non produktif yaitu 193,1 ribu jiwa.

**Tabel II.8.**

Proyeksi Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur  
Kepulauan Bangka Belitung menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013–2017 (dalam ribu)

UMUR (tahun)	Penduduk (jiwa)				
	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0-4	127,4	128,9	130,2	131,6	132,7
5-9	123,6	124,8	126,1	127,5	128,9
10-14	119,1	120,6	122,2	123,7	125,1
15-19	117,7	117,9	118,4	119,2	120,5
20-24	120,8	121,5	121,9	122,0	122,0
25-29	119,7	121,7	123,6	125,5	127,1
30-34	116,4	118,7	120,8	123,0	125,0
35-39	106,8	109,9	113,2	115,9	118,6
40-44	94,1	97,3	100,3	103,3	106,4
45-49	76,1	79,9	83,6	87,5	91,2
50-54	61,6	63,8	66,4	69,0	72,1
55-59	48,8	51,2	53,3	55,5	57,5
60-64	33,5	36,0	38,5	40,9	43,4
65-69	20,6	22,2	24,0	25,8	27,8
70-74	13,3	13,6	14,1	14,9	15,8
75+	15,6	15,9	16,2	16,5	16,8
<b>Kepulauan Bangka Belitung</b>	<b>1.315,1</b>	<b>1.343,9</b>	<b>1.372,8</b>	<b>1.401,8</b>	<b>1.430,9</b>

Sumber: Publikasi BPS, Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035

Sedangkan laju pertumbuhan dan kepadatan penduduk dari tahun 2013-2017, dapat dilihat pada Tabel II.9 berikut ini.

**Tabel II.9.**

Laju Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk  
Kepulauan Bangka Belitung menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013–2017

Kabupaten /Kota	Laju Pertumbuhan (%)					Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )				
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Bangka	2,21	2,17	2,22	2,14	2,08	101	103	105	108	110
Belitung	2,21	2,19	2,23	2,10	2,07	73	75	76	78	80
Bangka Barat	2,19	2,19	2,22	2,08	2,04	67	68	70	72	73
Bangka Tengah	2,23	2,23	2,21	2,11	2,11	82	83	85	87	89
Bangka Selatan	2,25	2,14	2,22	2,11	2,07	51	53	54	55	56
Belitung Timur	2,24	2,23	2,21	2,16	2,13	46	47	48	49	50
Pangkalpinang	2,24	2,17	2,22	2,10	2,05	1.582	1.616	1.652	1.687	1.720
<b>Kepulauan Bangka Belitung</b>	<b>2,22</b>	<b>2,19</b>	<b>2,15</b>	<b>2,11</b>	<b>2,08</b>	<b>80</b>	<b>82</b>	<b>84</b>	<b>86</b>	<b>87</b>

Sumber: Badan Pusat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

Adapun tingkat kepadatan penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017 mencapai 87 orang per km<sup>2</sup>. Apabila dilihat menurut kabupaten/kota, kota Pangkalpinang memiliki tingkat kepadatan penduduk tertinggi sebesar 1.720 orang per

Km<sup>2</sup> sedangkan Kabupaten Belitung Timur dengan tingkat kepadatan terendah yaitu 50 orang per Km<sup>2</sup>.

Secara keseluruhan, tingkat kepadatan penduduk Kepulauan Bangka Belitung tahun 2013-2017 mengalami peningkatan mulai dari tahun 2013 sebesar 80 jiwa per km<sup>2</sup> tahun 2014 sebesar 82 jiwa per km<sup>2</sup>, tahun 2015 sebesar 84 jiwa per km<sup>2</sup>, tahun 2016 sebesar 85 jiwa per km<sup>2</sup> tahun 2017 sebesar 87 jiwa per km<sup>2</sup> dan tahun 2016 sebesar 85 jiwa per km<sup>2</sup>. Konsentrasi penduduk terdapat di ibukota Provinsi yaitu Pangkalpinang dengan melihat kepadatan penduduk yang cukup besar dibandingkan dengan kabupaten lainnya.

## 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

### 2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan pemerataan ekonomi

Kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dapat dilihat dari beberapa indikator pembangunan, yaitu pertumbuhan PDRB, laju inflasi provinsi, PDRB per kapita, indeks gini, pemerataan pendapatan versi Bank Dunia, Indeks Ketimpangan Williamson (indeks ketimpangan regional), dan persentase penduduk diatas garis kemiskinan.

#### 1). Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator makro yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah pada suatu periode tertentu.

Gambaran perkembangan PDRB Kepulauan Bangka Belitung pada kurun waktu 2013-2017 atas dasar harga konstan dan atas dasar harga berlaku, terlihat pada Tabel II.10. berikut.

**Tabel II.10**

PDRB Tahun 2013–2017 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)  
dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dalam Rp. Miliar)

No.	PDRB	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	50.388,4	56.373,6	60.992,1	65.125,3	69,973
2.	Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)	42.190,9	44.159,4	45.961,5	47.852,7	50,008

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

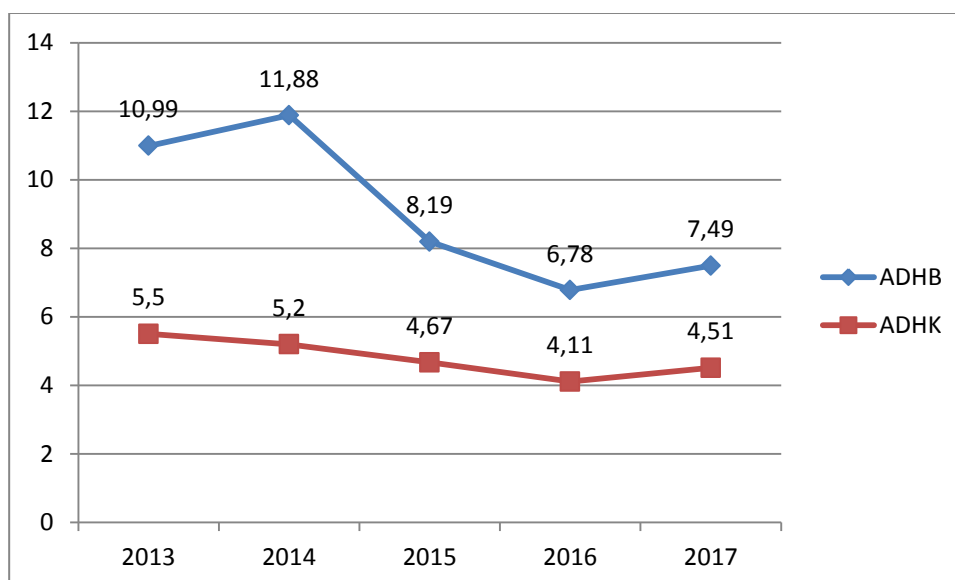
Secara nominal nilai PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) relatif lebih besar dibandingkan dengan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010, yaitu sebesar Rp. 50.388,4 miliar pada tahun 2013 dan meningkat menjadi sebesar Rp. 69.973 Miliar pada tahun 2017 atau rata-rata tumbuh sebesar 8,57 persen. Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 hanya sebesar Rp. 42.190,9 Miliar pada tahun 2013 dan meningkat menjadi sebesar Rp. 50.008 Miliar pada tahun 2017 atau rata-rata tumbuh sebesar 4,34 persen.

Sepanjang kurun waktu 2013–2016 laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terus mengalami trend perlambatan, baik dihitung berdasarkan PDRB ADHB maupun PDRB ADHK Tahun 2010. Sebagaimana diperlihatkan pada gambar II.1. Namun ditahun 2017, laju pertumbuhan ekonomi menurut ADHK mengalami

peningkatan dari 4.11 persen ditahun 2016 menjadi 4.51 persen di tahun 2017. Hal ini ditenggarai oleh membaiknya harga timah dunia rata-rata mencapai 20.000 USD/MT di sepanjang tahun 2017. Hal ini menyebabkan peningkatan yang cukup signifikan pada lapangan usaha industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor dan pertambangan, penggalan.

**Grafik II.1**

Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2013–2017 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dalam persen)



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

Perkembangan sektor-sektor ekonomi pembentuk PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sepanjang periode 2013 – 2017 dapat dilihat pada tabel II.11 dan tabel II.12. Dari kedua tabel tersebut memperlihatkan bahwa ada 4 sektor lapangan usaha yang menggerakkan perekonomian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu lapangan usaha industri pengolahan, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, sektor perdagangan besar dan eceran. sektor pertambangan dan penggalan.

Dilihat dari nilai PDRB ADHB maupun PDRB ADHK tahun 2010, nilai tambah kategori industri pengolahan pada tahun 2017 mencapai sebesar Rp.14.276,5 Miliar mengalami peningkatan dari tahun 2016 (13.088,5 miliar). Di ikuti oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, perikanan meningkat dari 13.145,6 miliar (tahun 2016) meningkat menjadi 13.145,6 miliar. Sedangkan lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dan lapangan usaha petambangan penggalan masing-masing menjadi Rp.10.890 miliar dan 8.179,2 miliar di tahun 2017.

**Tabel II.11**

Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2013–2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dalam Rp. Miliar)

Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016	2017
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9.269,6	10.748,3	12.060,4	13.126,3	13.145,6
Pertambangan dan Penggalan	7.097,6	7.622,8	7.735,4	7.743,26	8.179,2
Industri Pengolahan	12.088,2	12.877,3	12.888,4	13.088,5	14.276,5
Pengadaan Listrik dan Gas	27,3	42,0	51,1	67	79

Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016	2017
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9,1	10,4	12,1	13,2	15,04
Konstruksi	4.139,3	4.712,4	5.264,2	5753,8	6.381,4
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.671,7	7702,4	8.634,1	9.641,9	10.890,86
Transportasi dan Pergudangan	1.864,6	2.125,6	2.461,8	2.642,1	2.900,1
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.152,1	1.321,4	1.459,8	1.610,0	1.735,6
Informasi dan Komunikasi	770,2	849,1	941,7	1.034,0	1.135,4
Jasa Keuangan dan Asuransi	902,4	998,5	1.095,3	1.198,1	1.280,2
Real Estat	1.602,9	1.823,4	1.964,7	2.106,2	2.284,2
Jasa Perusahaan	134,4	154,0	169,6	176,4	196,8
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.618,0	3.025,6	3.471,6	3.781,7	4.116,3
Jasa Pendidikan	1.172,2	1.362,8	1.639,7	1.860,0	1.961,73
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	552,7	629,9	710,7	760,1	846,1
Jasa lainnya	315,9	371,7	426,6	493,1	548,55
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>	<b>50.388,4</b>	<b>56.373,6</b>	<b>60.987,3</b>	<b>65.095,3</b>	<b>69.973,2</b>

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

Selanjutnya, dilihat dari nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 (table II.12), nilai bruto lapangan usaha industri pengolahan mencapai sebesar Rp. 10.143,3 Miliar pada tahun 2013 dan meningkat menjadi sebesar Rp. 11.363,05 Miliar pada tahun 2017. Untuk nilai tambah bruto kategori pertanian, kehutanan dan perikanan pada periode yang sama sebesar Rp. 7.557,9 Miliar dan meningkat menjadi Rp. 9.083,8 miliar. Nilai tambah bruto kategori pertambangan dan penggalian sebesar Rp. 6.230,2 miliar dan meningkat menjadi sebesar Rp. 6.633,04 Miliar. Begitu juga untuk perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor nilai tambah bruto yang tercipta sebesar Rp.5.846,6 miliar meningkat menjadi Rp.7.259,8 miliar.

**Tabel II.12**

Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2013–2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dalam Rp. Miliar)

Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016	2017
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.557,7	8.254,3	8.743,5	9.116,9	9.083,8
Pertambangan dan Penggalian	6.230,2	6.354,1	6.458,09	6.491,1	6.633,04
Industri Pengolahan	10.143,3	10.270,4	10.400,6	10.668,4	11.363,05
Pengadaan Listrik dan Gas	31,5	34,4	38,9	43,7	45.864
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,3	7,7	8,1	8,6	9.406
Konstruksi	3.414,7	3.552,4	3.760,1	4.021,6	4.252,1

Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016	2017
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.846,6	6.140,7	6.402,1	6.727,7	7.259,8
Transportasi dan Pergudangan	1.484,8	1.570,8	1.662,3	1.752,3	1.892,2
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	931,0	1.000,6	1.034,8	1.084,5	1.136,5
Informasi dan Komunikasi	740,2	790,9	849,0	926,9	1.002,9
Jasa Keuangan dan Asuransi	728,3	766,6	807,9	860,0	881,3
Real Estat	1.312,6	1.403,9	1.442	1.494,8	1.572,5
Jasa Perusahaan	108,1	115,7	120,3	120,4	127,5
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.014,4	2.149,8	2.337,1	2.478,7	2.604,2
Jasa Pendidikan	903,7	964,9	1.060,0	1.139,4	1.183,3
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	475,3	500,6	533,8	559,6	605,39
Jasa lainnya	261,0	281,7	304,6	334,4	354,9
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>	<b>42.190,9</b>	<b>44.159,4</b>	<b>45.962,3</b>	<b>47.850,8</b>	<b>50.007,751</b>

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

Dengan demikian, distribusi keempat kategori terhadap PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi sangat dominan. Sebagaimana diperlihatkan pada tabel II.13, menunjukkan bahwa berdasarkan nilai PDRB ADHB, persentase distribusi keempat sektor terhadap PDRB mencapai sebesar 66,45 persen.

**Tabel II.13**

Distribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2013–2017 Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dalam persen)

No	Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016	2017
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	18,40	19,22	19,78	20,16	18,79
B.	Pertambangan dan Penggalan	14,09	13,52	12,68	11,89	11,69
C.	Industri Pengolahan	23,99	22,84	21,13	20,11	20,40
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,08	0,08	0,10	0,11
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
F.	Konstruksi	8,21	8,36	8,63	8,84	9,12
G.	Perdagangan Besar dan Eceran Motor	13,24	13,51	14,16	14,81	15,57
H.	Transportasi dan Pergudangan	3,70	3,77	4,04	4,06	4,15
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,29	2,34	2,39	2,47	2,48
J.	Informasi dan Komunikasi	1,53	1,51	1,54	1,59	1,62
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,79	1,77	1,80	1,83	1,83
L.	Real Estate	3,18	3,23	3,22	3,24	3,27
M, N.	Jasa Perusahaan	0,27	0,27	0,28	0,28	0,28
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,20	5,37	5,69	5,81	5,88
P.	Jasa Pendidikan	2,33	2,42	2,69	2,86	2,80
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,10	1,11	1,17	1,17	1,21



No	Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016	2017
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,63	0,66	0,70	0,76	0,78
	<b>PDRB</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,00</b>

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

Selanjutnya, berdasarkan nilai PDRB ADHK Tahun 2010 sebagaimana diperlihatkan pada tabel II.14, menunjukkan bahwa rata-rata kontribusi keempat sektor terhadap PDRB mencapai sebesar 65,25 persen. Dari total persentase tersebut rata-rata sekitar 20,2 persen merupakan kontribusi dari kategori industri pengolahan sebagai sektor sekunder, sector primer yaitu kategori pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 18,29 persen dan pertambangan dan penggalian sebesar 11,02 persen, Sedangkan untuk perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebagai sektor tersier memiliki kontribusi sekitar 15,74 persen.

**Tabel II.14**

Perkembangan Distribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2013 s.d 2017 Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dalam persen)

	Lapangan Usaha	2013	2014	2015	2016	2017
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	17,91	18,69	19,03	19,06	18,29
B.	Pertambangan dan Penggalian	14,77	14,39	14,06	13,57	11,02
C.	Industri Pengolahan	24,04	23,26	22,63	22,29	20,2
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,08	0,08	0,09	0,11
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,Limbah dan Daur Ulang	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
F.	Konstruksi	8,09	8,04	8,18	8,40	9,74
G.	Perdagangan Besar dan EceranMotor	13,86	13,90	13,93	14,07	15,74
H.	Transportasi dan Pergudangan	3,52	3,56	3,61	3,66	4,19
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,21	2,27	2,25	2,27	2,53
J.	Informasi dan Komunikasi	1,75	1,79	1,85	1,94	1,65
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,73	1,74	1,74	1,80	1,83
L.	Real Estate	3,11	3,18	3,14	3,12	3,38
M, N.	Jasa Perusahaan	0,26	0,26	0,26	0,25	0,29
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,77	4,87	5,08	5,20	6,17
P.	Jasa Pendidikan	2,14	2,19	2,31	2,39	2,8
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,13	1,13	1,16	1,17	1,22
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,62	0,64	0,66	0,71	0,82
	<b>PDRB</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,00</b>

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

Secara teoritis nilai PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan akumulasi dari nilai PDRB Kabupaten dan Kota yang ada di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan PDRB ADHB sebagaimana diperlihatkan pada tabel II.15, menunjukkan bahwa sepanjang periode tahun 2012 – 2016 nilai PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung rata-rata hanya 0,54 persen dari nilai PDB. Hal ini berarti bahwa besaran perekonomian daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibandingkan dengan besaran perekonomian nasional relatif kecil. Oleh karenanya, besaran perekonomian daerah kabupaten dan kota juga relatif kecil.

**Tabel II.15**

Perkembangan PDRB Kabupaten/Kota Tahun 2012 s.d 2016 Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dalam Rp. Miliar)

Sektor	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kabupaten Bangka	8.321,7	9.139,7	10.174,8	11.022,3	11.790,7
Kabupaten Bangka Barat	8.525,0	9.538,5	10.686,7	11.472,7	12.259,6
Kabupaten Bangka Tengah	5.692,5	6.198,2	6.690,3	7.056,1	7.470,0
Kabupaten Bangka Selatan	5.277,0	5.820,0	6.435,9	6.939,3	7.531,0
Kabupaten Belitung	5.333,9	6.000,3	6.731,1	7.328,4	8.003,0
Kabupaten Belitung Timur	4.541,3	5.082,8	5.666,8	6.125,7	6.606,3
Kota Pangkalpinang	7.462,0	8.414,6	9.359,7	10.234,7	11.131,6
<b>Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</b>	<b>45.400,2</b>	<b>50.388,4</b>	<b>56.373,6</b>	<b>60.992,1</b>	<b>65.125,3</b>
<b>Nasional</b>	<b>8.615.704,5</b>	<b>9.546.134,0</b>	<b>10.569.705,3</b>	<b>11.531.716,9</b>	<b>12.406.809,8</b>

Sumber: BBDA BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

Selanjutnya, dilihat berdasarkan PDRB ADHK Tahun 2010 sebagaimana diperlihatkan pada tabel II.16, juga menunjukkan bahwa besaran perekonomian daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung relatif lebih kecil dibandingkan dengan besaran perekonomian nasional, yaitu hanya sebesar 0,52 persen dari PDB. Dari besaran PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut, daerah yang memberikan kontribusi terbesar adalah Kabupaten Bangka Barat diikuti oleh Kabupaten Bangka dan Kota Pangkalpinang.

**Tabel II.16**

Perkembangan PDRB Tahun 2012 s.d 2016 Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dalam Rp. Miliar)

Sektor	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kabupaten Bangka	7.378,2	7.769,1	8.143,1	8.513,2	8.906,8
Kabupaten Bangka Barat	7.586,5	7.972,8	8.349,3	8.749,3	9.152,5
Kabupaten Bangka Tengah	5.012,9	5.178,3	5.255,8	5.271,8	5.428,2
Kabupaten Bangka Selatan	4.646,0	4.853,0	5.068,3	5.274,4	5.495,6
Kabupaten Belitung	4.656,5	4.934,0	5.167,1	5.400,9	5.660,7
Kabupaten Belitung Timur	4.028,4	4.258,0	4.478,3	4.675,0	4.870,7
Kota Pangkalpinang	6.193,0	6.571,3	6.951,0	7.247,5	7.554,9
<b>Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</b>	<b>38.014,0</b>	<b>40.104,9</b>	<b>42.190,9</b>	<b>44.159,4</b>	<b>45.961,5</b>
<b>Nasional</b>	<b>7.287.635,3</b>	<b>7.727.083,4</b>	<b>8.156.97,8</b>	<b>8.564.866,6</b>	<b>8.982.511,3</b>

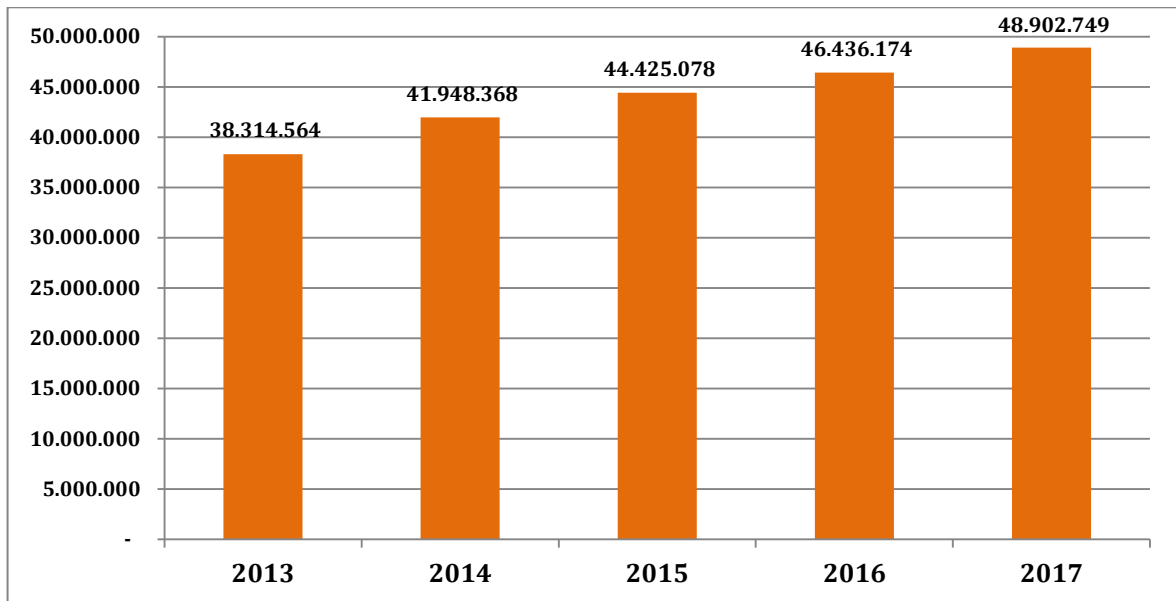
Sumber: BBDA BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

## 2). PDRB Per Kapita

Nilai PDRB Per Kapita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2013 – 2017 mengalami peningkatan. Pada tahun 2013, nilai PDRB per kapita tercatat sebesar Rp.38.314.564 dan mengalami peningkatan secara bertahap tiap tahunnya menjadi Rp.48.902.749. Hal ini disebabkan karena cukup tingginya laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada kurun waktu tersebut.

Gambaran mengenai perkembangan PDRB Per Kapita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2013-2017, sebagaimana disajikan pada Grafik II.2.

**Grafik II.2**  
PDRB Per Kapita Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013-2017

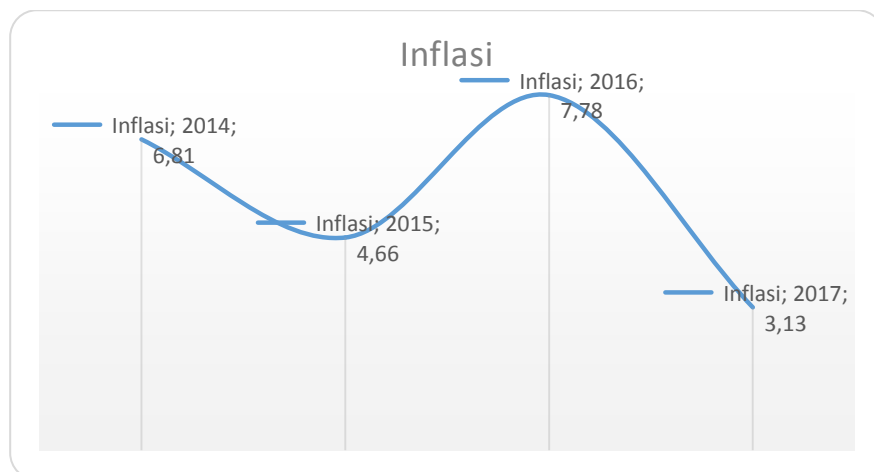


Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Babel, 2017

### 3). Tingkat Inflasi

Sepanjang periode tahun 2014-2017 inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami fluktuatif. Pada tahun 2014 tingkat inflasi berada pada angka 6,81 persen, menurun pada Tahun 2015 menjadi sebesar 4,86 persen dan naik menjadi 7,78 persen di tahun 2016. Namun pada Tahun 2017 turun kembali menjadi 3,13 persen.

**Grafik II.3**  
Laju Inflasi Tahun 2014-2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2013-2017

Jika dicermati menurut kelompoknya, sepanjang periode tahun 2013-2017 hampir semua kelompok pengeluaran mengalami inflasi. Pada tahun 2017 kelompok perumahan menyumbang sebesar 5,63 persen, diikuti oleh kesehatan sebesar 3,61 persen, dan pendidikan, rekreasi dan olahraga mengalami inflasi sebesar 3,36 persen.

**Tabel II.17**  
Laju Inflasi Tahun 2012-2017 Menurut Kelompok Pengeluaran

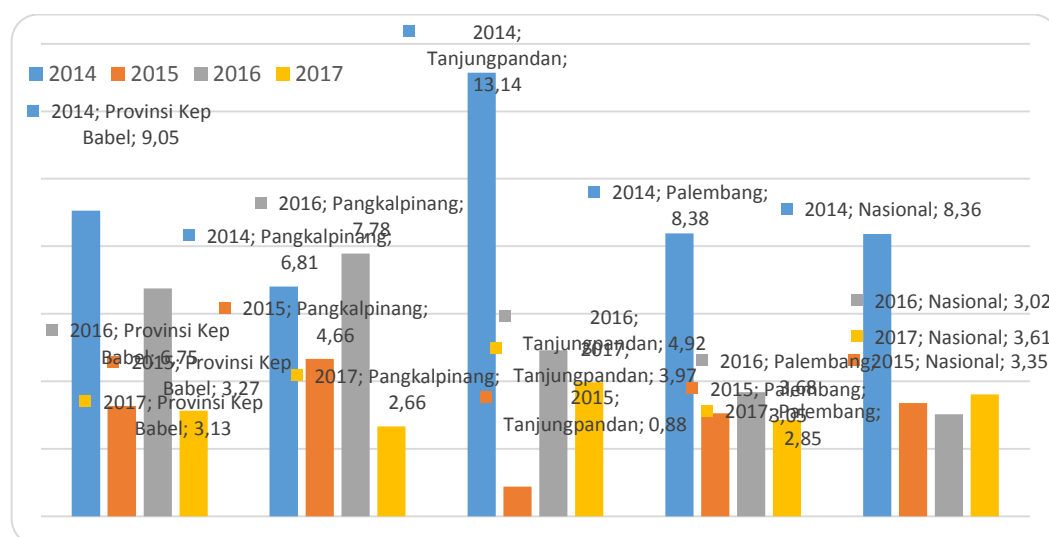
Kelompok Pengeluaran	2012	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>Umum</b>	<b>6,57</b>	<b>8,71</b>	<b>6,81</b>	<b>4,66</b>	<b>7,78</b>	<b>3,13</b>
1. Bahan Makanan	8,50	11,08	3,39	6,63	13,49	1,66
2. Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	7,95	6,82	8,63	7,92	4,77	2,90
3. Perumahan	5,81	9,20	8,85	3,74	3,59	5,63
4. Sandang	5,79	1,63	6,61	2,60	7,63	2,06
5. Kesehatan	5,19	5,08	8,13	5,50	4,31	3,61
6. Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga	10,31	3,77	6,65	8,62	4,04	3,36
7. Transportasi dan Komunikasi	-0,11	11,17	6,98	-2,04	11,42	2,09

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2013-2017

Tahun 2016, inflasi Pangkalpinang relatif tinggi yaitu 7,78 persen bila dibandingkan dengan inflasi nasional sebesar 3,02 persen dan Kota Palembang sebagai wilayah yang terdekat sebesar 3,68 persen, sedangkan Kota Tanjungpandan dengan inflasi 4,92 persen. Kondisi ini tentunya bila dibandingkan dengan tahun 2015 dimana inflasi Pangkalpinang sebesar 4,66 persen, lebih tinggi bila dibandingkan dengan inflasi Palembang sebesar 3,05 persen dan Nasional 3,35 persen. Sedangkan Tanjung Pandan tingkat Inflasi terendah 0,88 persen. Angka inflasi sebagaimana dimaksud dapat diamati pada grafik II.4 di bawah:

**Grafik II.4**

Perbandingan Angka Inflasi Tahun 2014-2017 Kota Pangkalpinang, Tanjung Pandan, Palembang dan Nasional



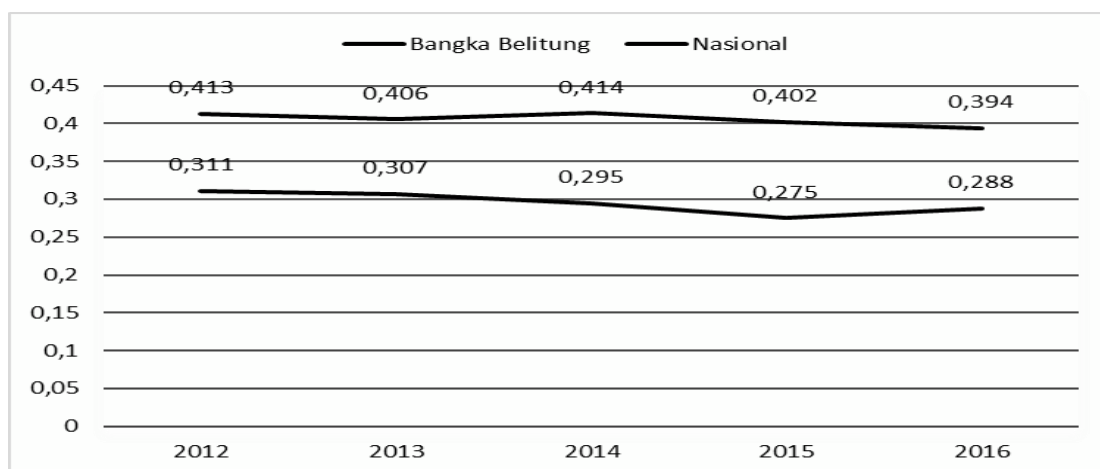
Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

Catatan: Inflasi Kota Tanjung Pandan Mulai Dihitung Pada Tahun 2014

## 5). Indeks Gini

Pada Gambar di bawah terlihat bahwa Rasio Gini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selalu lebih rendah daripada nasional. Selama periode 2012-2015 nilai rasio Gini cenderung menurun dari 0,311 pada tahun 2012 menjadi 0,275 tahun 2015 dan naik kembali pada tahun 2016 sebesar 0,288. Naiknya angka Rasio Gini di tahun 2016 patut diwaspadai mengingat Rasio Gini sebagaimana yang ditampilkan pada Grafik II.5 menyiratkan bahwa distribusi pendapatan penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung semakin merata walaupun secara nasional rasio gini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di bawah indeks gini nasional,

**Grafik II.5**  
Indeks Gini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2016

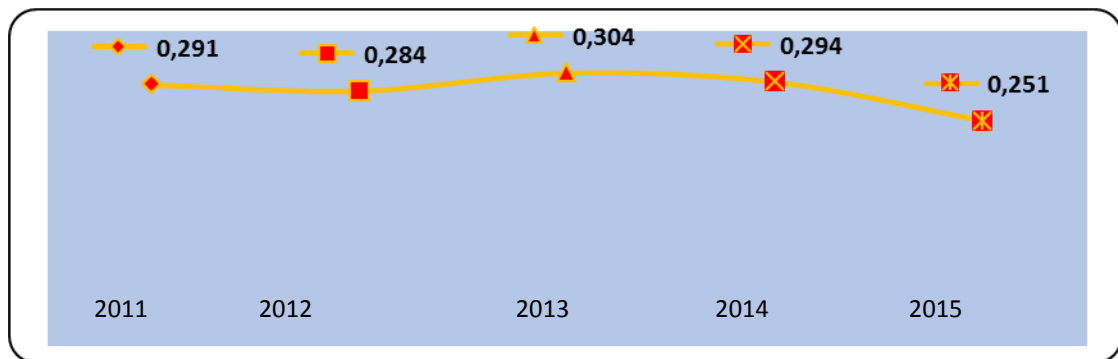


Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

## 6). Indeks Ketimpangan Williamson

Pada periode 2011 sampai 2015 Indeks Ketimpangan Williamson Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan kecenderungan fluktuatif menurun pada periode akhir. Pada tahun 2011 angka indeks sebesar 0,291 dan menurun pada tahun 2012 menjadi sebesar 0,284 dan naik pada tahun 2013 menjadi sebesar 0,304. Pada tahun 2014 turun menjadi 0,294 dan kembali turun menjadi 0,251 di akhir periode 2015. Berdasarkan angka ini, maka pembangunan wilayah antar kabupaten kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendekati merata. Hal ini sebagaimana yang ditampilkan pada Grafik II.6 berikut:

**Grafik II.6**  
Indeks Williamson Tahun 2011-2015  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber: Bappeda tahun 2016, data diolah.

Data di atas menggambarkan pembangunan antar wilayah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung relatif baik.

#### 2.1.2.2. . Fokus Kesejahteraan Sosial

##### A. Pendidikan

##### 1) Angka melek huruf

Angka melek huruf di kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana dapat dilihat pada Tabel II.18 berikut. Data menunjukkan bahwa angka melek huruf terendah dan berada dibawah rata-rata angka provinsi adalah Kabupaten Bangka Selatan dan Bangka Barat, Kabupaten Belitung, dan Kabupaten Bangka Tengah. Hal ini tentunya perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah daerah. Secara keseluruhan angka melek huruf provinsi mengalami stagnansi.

**Tabel II.18**  
Perkembangan Angka Melek Huruf Usia 15+ Menurut Kabupaten Kota,  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2013 s.d 2017

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Bangka	96,8	98,24	97,87	97,77	97,87
2	Bangka Barat	94,08	95,15	96,36	96,51	96,36
3	Bangka Tengah	96,81	97,29	97,78	97,47	95,44
4	Bangka Selatan	94,60	95,71	95,44	96,84	97,78
5	Belitung	97,65	98,68	98,86	97,35	98,86
6	Belitung Timur	97,63	98,92	98,77	98,28	98,77
7	Kota Pangkalpinang	98,3	99,26	98,60	99,41	98,60
	<b>Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</b>	<b>96,44</b>	<b>97,60</b>	<b>97,63</b>	<b>97,66</b>	<b>97,63</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017.

Angka melek huruf di kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana disajikan pada Tabel II.19 berikut:



**Tabel II.19**  
Angka Melek Huruf menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Usia Diatas 15 Tahun Yang Bisa Membaca dan Menulis	Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas	Angka Melek Huruf
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kabupaten Bangka	218.598	223.356	97,87
2	Kabupaten Bangka Barat	133,731	138,783	96,36
3	Kabupaten Bangka Selatan	129,505	135,693	95,44
4	Kabupaten Bangka Tengah	124,504	127,331	97,78
5	Kabupaten Belitung	126,995	128,459	98,86
6	Kabupaten Belitung Timur	86,9828	88,066	98,77
7	Kota Pangkalpinang	142,962	144,992	98,60
	<b>Jumlah</b>	<b>963,278</b>	<b>986,680</b>	<b>97,63</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Susenas 2006-2015)

Data menunjukkan bahwa angka melek huruf terendah dan berada dibawah rata-rata angka provinsi adalah Kabupaten Bangka Selatan. Hal ini tentunya perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah daerah.

## 2) Angka Rata-rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah juga dapat memberikan gambaran terkait penyelenggaraan pendidikan dan indeks pembangunan manusia di suatu daerah. Angka rata-rata sekolah menjelaskan rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani.

**Tabel II.20**  
Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2012 s.d 2016  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (tahun)

No	Kabupaten/ Kota	2012		2013		2014		2015		2016	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(15)
1	Bangka	8,56	7,51	8,34	7,63	8,28	7,47	8,12	8,03	8,50	8,25
2	Belitung	7,94	7,24	8,40	8,09	8,15	7,82	8,33	8,13	8,44	7,81
3	Bangka Barat	7,17	6,64	7,10	6,48	7,47	6,89	7,69	7,31	7,88	7,22
4.	Bangka Tengah	7,40	6,65	7,48	6,76	7,35	6,61	7,25	6,75	7,41	6,91
5.	Bangka Selatan	6,37	5,54	6,45	6,35	6,56	6,23	5,90	5,65	6,77	6,47
6.	Belitung Timur	7,98	7,50	7,59	7,31	8,20	7,74	7,88	7,78	8,72	8,29
7.	Pangkalpinang	9,91	8,98	9,83	9,19	10,00	9,33	10,26	9,71	9,94	9,36
	<b>Provinsi</b>	<b>7,94</b>	<b>7,17</b>	<b>7,94</b>	<b>7,44</b>	<b>8,03</b>	<b>7,46</b>	<b>7,92</b>	<b>7,65</b>	<b>8,25</b>	<b>7,80</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017.

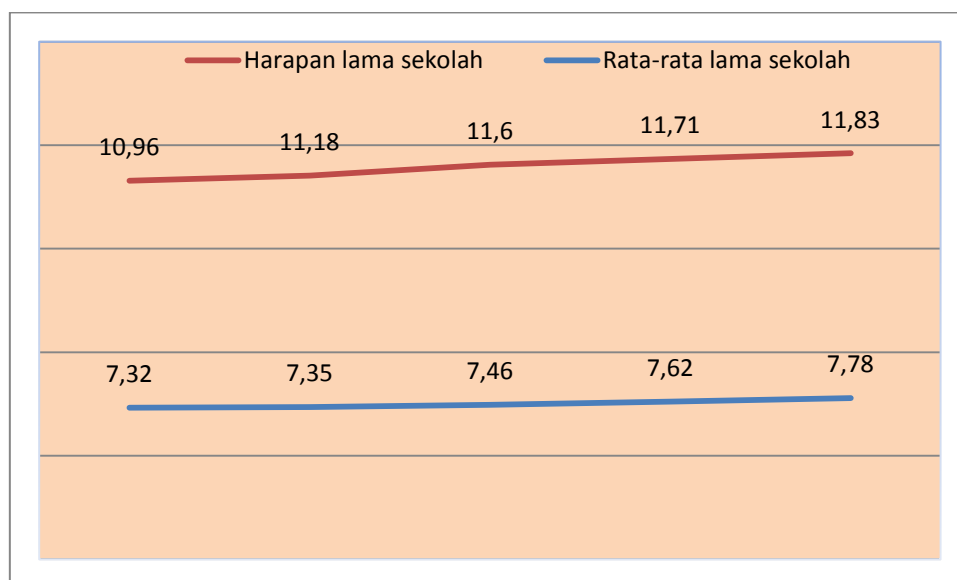
Melihat perkembangan rata-rata lama sekolah di setiap kabupaten/kota tampak menunjukkan pola yang sama yaitu terjadi peningkatan rata-rata lama sekolah di setiap

kabupaten/kota. Pada tahun 2016, tiga kabupaten dengan angka rata-rata lama sekolah terendah dan berada di bawah rata-rata lama sekolah provinsi yaitu Bangka Selatan, Bangka Tengah, dan Bangka Barat. Sedangkan rata-rata lama sekolah tertinggi ada di Kota Pangkalpinang. Sehingga perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan nilai rata-rata lama sekolah pada tiga daerah tersebut khususnya dan Bangka Belitung umumnya.

Grafik II.7 diketahui harapan lama sekolah meningkat dari 10,96 pada tahun 2013 menjadi 11,83 pada tahun 2017. Sedangkan rata-rata lama sekolah sebesar 7,32 (tahun 2013) meningkat menjadi 7,78 di tahun 2017. Kesenjangan angka jelas terlihat antara rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Perbandingan antara rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah dapat dilihat pada gambar grafik dibawah ini.

**Grafik II.7**

Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013-2017



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 208

### 3. Angka Putus Sekolah

Semakin tinggi angka putus sekolah menggambarkan kondisi pendidikan yang tidak baik dan tidak merata. Begitu sebaliknya jika angka putus sekolah semakin kecil maka kondisi pendidikan di suatu wilayah semakin baik.

**Tabel II.21**

Perkembangan Angka Putus Sekolah Kabupaten/Kota Se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2016

Kabupaten/Kota	Angka Putus Sekolah (%)								
	2012	2013	2014	2015			2016		
				SD	SMP	SMA	SD	SMP	SMA
Bangka	n/a	n/a	n/a	0,54	8,75	21,63	0,60	8,07	3,65
Belitung	n/a	n/a	n/a	1,05	10,39	16,62	0,00	5,62	3,76

Kabupaten/Kota	Angka Putus Sekolah (%)								
	2012	2013	2014	2015			2016		
				SD	SMP	SMA	SD	SMP	SMA
Bangka Barat	n/a	n/a	n/a	0,21	6,64	16,08	0,77	13,47	6,67
Bangka Tengah	n/a	n/a	n/a	1,34	6,25	11,72	0,46	6,32	6,41
Bangka Selatan	n/a	n/a	n/a	0,83	7,46	21,93	0,37	7,98	23,05
Belitung Timur	n/a	n/a	n/a	2,27	12,58	9,45	0,00	7,68	13,01
Kota Pangkal Pinang	n/a	n/a	n/a	0,00	4,25	11,51	0,00	7,73	3,67
Kep. Bangka Belitung	n/a	n/a	n/a	0,77	7,87	15,92	0,37	8,11	7,87

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

APTS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cukup tinggi terutama untuk tingkat Sekolah Menengah yang dapat diamati pada tabel diatas. Tahun 2016 APT SMP meningkat dari 7,87 di tahun 2015 menjadi 8,11 persen di tahun 2016 berarti secara rata-rata dari 100 anak usia 13-15 tahun yang sedang atau pernah bersekolah terdapat 8 sampai 9 anak yang putus sekolah dan lebih cenderung 8 anak yang putus sekolah. Sementara itu APK SMA menunjukkan penurunan cukup besar dari 15,92 persen tahun 2015 menjadi 7,87 persen ditahun 2016, namun demikian angka ini juga terbilang tinggi mengingat secara rata-rata dari 100 anak usia 16-18 tahun yang sedang atau pernah bersekolah terdapat 7 sampai 8 anak yang putus sekolah dan lebih cenderung 7 anak yang putus sekolah. APTS SD sangat baik dari 0,77 persen tahun 2015 menjadi 0,37 persen di tahun 2016 yang berarti bahwa secara rata-rata dari 100 anak usia 7-12 tahun yang sedang atau pernah bersekolah terdapat 0 sampai 1 anak yang putus sekolah.

Untuk tingkat Kabupaten/kota, APTS cukup tinggi terutama untuk tingkat sekolah menengah. Pada tahun 2016, APTS tertinggi SMP ada di Kabupaten Bangka Barat yaitu 13,47 persen berarti secara rata-rata yang sedang atau pernah bersekolah terdapat 13 sampai 14 anak putus sekolah untuk usia 13-15 tahun. Sementara kabupaten lainnya berkisar antara 5 sampai 8 anak yang putus sekolah. sementara untuk APTS SMA, persentase tertinggi ada di Kabupaten Bangka Selatan yaitu 23,05 persen berarti secara rata-rata yang sedang atau pernah bersekolah terdapat ada 23 sampai 24 anak putus sekolah dan cenderung 23 anak putus sekolah usia 16-18 tahun. Disusul Kabupaten Belitung Timur sebesar 13,01 persen yang berarti berarti secara rata-rata yang sedang atau pernah bersekolah terdapat ada 13 anak putus sekolah usia 16-18 tahun. Sementara di Kota Pangkal Pinang dan Tanjung Pandan APTS SMA cukup rendah dibandingkan kabupaten lainnya yaitu masing-masing 3,76 persen dan 3,67 persen yang menggambarkan kondisi pendidikan yang tidak merata untuk SMA yang berlokasi jauh dari pusat kota.

### 3) Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan perbandingan antara jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu dengan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dengan jenjang sekolah tersebut. Sementara itu, Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan perbandingan antara jumlah siswa kelompok usia sekolah pada jenjang

pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai. Diluar sekolah paket, APK SD/MI selama periode 2012-2016 menunjukkan kecenderungan peningkatan dari 109,50 menjadi 111,75. Sementara APK SMP/MTs juga menunjukkan kecenderungan peningkatan dari tahun ketahun dari 78,35 pada tahun 2012 menjadi 84,38 pada tahun 2016. Begitupula APK SMA/MA/SMK meningkat signifikan dari 59,69 tahun 2012 menjadi 79,10 pada tahun 2016. Walaupun meningkat, mengingat persentasenya APK tingkat sekolah menengah tergolong rendah terutama menengah atas.

**Tabel II.22**

Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2011/2012 s.d 2015/2016  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>1.</b>	<b>SD/MI</b>					
	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI	155,832	159,972	168,300	168,655	160.167
	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	142,312	145,469	148,649	151,846	157.866
	APK SD/MI	109,50	109,97	113,22	111,07	111,75
<b>2.</b>	<b>SMP/MTs</b>					
	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs	54.220	51.888	59.649	64.684	60.498
	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	69,202	70,740	72,284	73,840	79.565
	APK SMP/MTs	78,35	73,35	82,52	87,60	84,38
<b>3.</b>	<b>SMA/MA/SMK</b>					
	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK	41.133	48.250	54.353	56.185	47.512
	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	68,911	70,438	71,981	73,531	80.125
	APK SMA/MA/SMK	59,69	68,50	75,51	76,41	79,10

Sumber : Daerah Dalam Angka 2017

*\*) Belum termasuk data jumlah siswa MI, MTs, MA*

**Tabel II.23**

Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2014/2015  
Menurut kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/ Kota	SD/MI			SMP/MTs			SMA/MA/SMK		
		Jumlah siswa bersekolah di SD/MI	Jumlah penduduk usia 7-12 tahun	APK	Jumlah siswa bersekolah di SMP/MTs	Jumlah penduduk usia 13-15 tahun	APK	Jumlah siswa bersekolah di SMA/MA/SMK	Jumlah penduduk usia 16-18 tahun	APK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Bangka	38.315	34,382	111,44	15.005	16,803	89,30	13.257	16,503	80,33
2	Belitung	20.946	19,118	109,56	8.214	9,700	84,68	7.321	9,677	75,65
3	Bangka	25.016	22,444	111,46	9.850	10,325	95,40	6.523	9,965	65,46

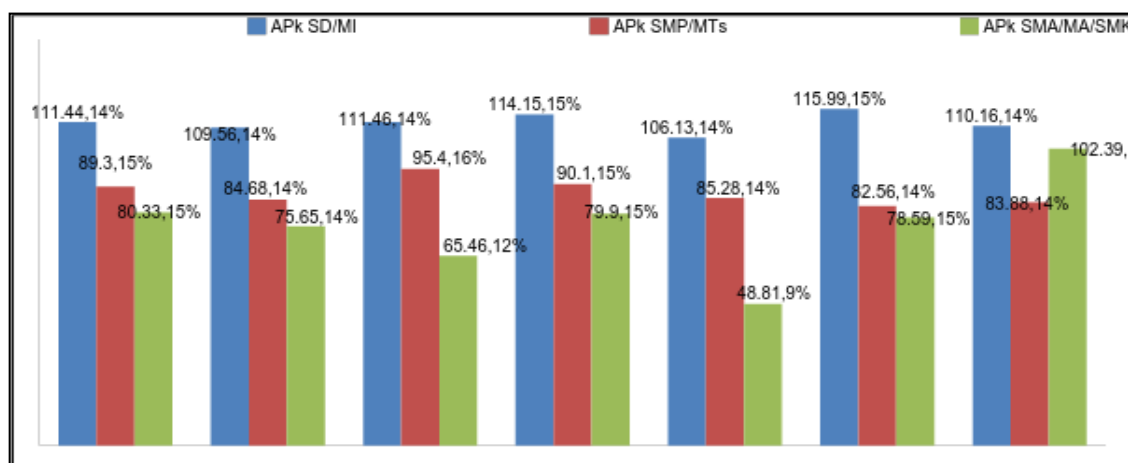
No	Kabupaten/ Kota	SD/MI			SMP/MTs			SMA/MA/SMK		
		Jumlah siswa bersekolah di SD/MI	Jumlah penduduk usia 7-12 tahun	APK	Jumlah siswa bersekolah di SMP/MTs	Jumlah penduduk usia 13-15 tahun	APK	Jumlah siswa bersekolah di SMA/MA/SMK	Jumlah penduduk usia 16-18 tahun	APK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Barat									
4.	Bangka Tengah	23.518	20,603	114,15	9.123	10,126	90,10	8.193	10,254	79,90
5.	Bangka Selatan	24.319	22,914	106,13	9.389	11,010	85,28	5.245	10,745	48,81
6.	Belitung Timur	14.922	12,865	115,99	5.013	6,072	82,56	4.634	5,896	78,59
7.	Pangkalpinang	38.315	34,382	111,44	15.005	16,803	89,30	13.257	16,503	80,33
	<b>Jumlah</b>	<b>20.946</b>	<b>19,118</b>	<b>109,56</b>	<b>8.214</b>	<b>9,700</b>	<b>84,68</b>	<b>7.321</b>	<b>9,677</b>	<b>75,65</b>

Sumber : Indikator Sosial Ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

Angka partisipasi kasar pada tahun 2014/2015 tingkat SD/MI terendah di Kabupaten Bangka Selatan 106,13. Walaupun demikian hal ini bukanlah suatu prestasi buruk bahkan telah menunjukkan tingginya partisipasi sekolah pada tingkat SD/MI.

#### Grafik II.8

Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2014/2015  
Menurut kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

Angka partisipasi kasar tahun 2014/2015 tingkat SMP/MTs terendah di Kabupaten Belitung Timur sebesar 82,56 dan tingkat SMA/MA/SMK terendah di Kabupaten Bangka Selatan 48,81. APK tingkat SMP/MTs secara keseluruhan masih berada di bawah APK nasional (101,6) sedangkan APK tingkat SMA/MA/SMK secara umum juga masih di bawah nasional (79,2) kecuali Kabupaten Bangka, Bangka Tengah, dan Kota Pangkalpinang APK-nya telah berada di atas APK nasional.

#### 4) Angka Pendidikan Yang Ditamatkan

Tamat sekolah didefinisikan sebagai menyelesaikan pelajaran yang ditandai dengan lulus

ujian akhir pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang pendidikan di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan tanda tamat belajar/ijazah. Seseorang yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi tetapi bila mengikuti ujian akhir dan lulus dianggap tamat sekolah.

Perkembangan angka pendidikan yang ditamatkan Tahun 2011 s.d 2015 sebagaimana disajikan pada Tabel II.24

**Tabel II.24**  
Perkembangan Angka Pendidikan Yang Ditamatkan (APT) Tahun 2011 s.d 2015  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	APT	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Kabupaten Bangka	73,5	75,1	74,17	71,59	75,58
	SD	31,37	29,81	29,53	28,77	31,10
	SMP	15,92	16,52	17,48	15,10	19,31
	SMA	21,53	23,19	22,80	22,11	21,07
	Perguruan Tinggi	4,68	5,58	4,36	5,61	4,10
2.	Kabupaten Belitung	70,9	72,05	76,7	75,5	76,51
	SD	31,60	29,29	30,44	30,09	27,40
	SMP	17,31	17,63	17,54	19,77	21,61
	SMA	18,36	20,57	23,44	20,66	20,09
	Perguruan Tinggi	3,63	4,56	5,28	4,98	7,41
3.	Bangka Barat	64,65	66,05	65,21	70,26	70,24
	SD	34,55	31,33	31,00	33,66	31,26
	SMP	13,08	15,73	14,09	14,87	16,41
	SMA	13,96	15,24	16,48	17,22	17,51
	Perguruan Tinggi	3,06	3,75	3,64	4,51	5,06
4.	Bangka Tengah	66,77	66,5	65,59	65,07	68,04
	SD	34,45	31,23	29,94	30,69	33,26
	SMP	14,34	13,53	15,45	14,91	17,17
	SMA	15,27	17,94	16,06	16,33	14,43
	Perguruan Tinggi	2,71	3,80	4,14	3,14	3,18
5.	Bangka Selatan	55,31	56,54	61,59	62,61	56,2
	SD	29,41	30,44	32,95	34,76	30,59
	SMP	12,90	13,44	14,77	14,03	14,16
	SMA	9,95	10,49	10,38	10,61	9,40
	Perguruan Tinggi	3,05	2,17	3,49	3,21	2,05
6.	Belitung Timur	76,06	76,24	74,51	78,4	73,53
	SD	34,39	34,74	36,59	34,31	30,05



No	APT	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	SMP	17,06	17,83	18,18	21,30	20,06
	SMA	19,94	18,83	15,41	18,15	18,97
	Perguruan Tinggi	4,67	4,84	4,33	4,64	4,45
7.	Kota Pangkalpinang	84,55	82,6	81,94	83,21	84,21
	SD	20,13	20,81	21,43	20,35	20,53
	SMP	19,27	15,86	17,69	19,89	19,89
	SMA	32,81	33,50	33,30	32,58	31,16
	<b>Perguruan Tinggi</b>	<b>12,34</b>	<b>12,43</b>	<b>9,52</b>	<b>10,39</b>	<b>12,63</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Susenas 2006-2015)

Perkembangan angka pendidikan yang ditamatkan di Kabupaten Bangka pada tingkat Sekolah Dasar mengalami penurunan dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2014 dari 31,37 menjadi 28,77. Kemudian pada Tahun 2015 meningkat kembali menjadi 31,10. Untuk tingkat SMP mengalami fluktuasi, pada Tahun 2011 APK SMP adalah 15,92 namun meningkat pada Tahun 2015 menjadi 19,31. Perkembangan APK SMA dari Tahun 2011 meningkat pada Tahun 2012 dari 21,53 menjadi 23,19. Namun tahun-tahun berikutnya semakin menurun setiap tahun, APK Tahun 2013 sebesar 22,80, Tahun 2014 sebesar 22,11, dan Tahun 2015 sebesar 21,07. Perkembangan APT untuk tingkat Perguruan Tinggi mengalami fluktuasi sejak Tahun 2011, namun pada Tahun 2015 menurun menjadi 4,10 jika dibandingkan dengan Tahun 2011 nilai APT 4,68.

Perkembangan APT tingkat Sekolah Dasar di Kabupaten Belitung dari Tahun 2011 hingga Tahun 2015 mengalami fluktuasi, namun secara keseluruhan perkembangan APT ini berkurang dari 31,60 menjadi 27,40. Untuk tingkat SMP APT Tahun 2012 meningkat dari Tahun 2011 yaitu dari 17,31 menjadi 17,63, namun menurun pada Tahun 2013 menjadi 17,54, selanjutnya kembali meningkat hingga Tahun 2015 menjadi 21,61. Perkembangan APT tingkat SMA meningkat hingga Tahun 2013 yaitu 23,44 dibanding Tahun 2011 nilai APT adalah 18,36. Namun semakin menurun hingga Tahun 2015 APT menjadi 20,09. Perkembangan APT tingkat Perguruan Tinggi sejak Tahun 2011 mengalami peningkatan walaupun pada Tahun 2014 mengalami penurunan namun pada Tahun 2015 kembali meningkat menjadi 7,41.

Perkembangan APT tingkat Sekolah Dasar di Kabupaten Bangka Barat pada Tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 31,26 dibandingkan Tahun 2011 yaitu 34,55. Untuk tingkat SMP, APT mengalami fluktuasi namun pada Tahun 2015 meningkat menjadi 16,41 dari APT Tahun 2011 yaitu 13,08. Perkembangan APT tingkat SMA cukup menggembirakan yaitu senantiasa meningkat dari Tahun 2011 13,96 menjadi 17,51 pada Tahun 2015. Demikian juga halnya dengan perkembangan APT tingkat Perguruan Tinggi sejak Tahun 2011 selalu mengalami peningkatan hingga Tahun 2015 yaitu 3,06 menjadi 5,06.

Perkembangan APT tingkat Sekolah Dasar di Kabupaten Bangka Tengah pada Tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 33,26 dibandingkan Tahun 2011 yaitu 34,45. Untuk tingkat SMP APT mengalami fluktuasi namun pada Tahun 2015 meningkat menjadi 17,17 dari APT Tahun 2011 yaitu 14,34. Perkembangan APT tingkat SMA dari Tahun 2011 hingga Tahun 2015 mengalami fluktuasi namun pada Tahun 2015 mengalami penurunan jika dibandingkan Tahun 2011 yaitu dari 15,27 menjadi 14,43. Demikian juga halnya dengan perkembangan APT tingkat Perguruan Tinggi mengalami fluktuasi namun pada Tahun 2015 meningkat dibandingkan APT Tahun 2011 yaitu 3,18 dari 2,71.

Angka pendidikan yang ditamatkan di Kabupaten Bangka Selatan pada tingkat Sekolah Dasar senantiasa meningkat dari Tahun 2011 hingga Tahun 2014 yaitu dari 29,41 menjadi 34,76 namun menurun pada Tahun 2015 menjadi 30,59. Untuk tingkat SMP APT meningkat hingga Tahun 2013, menurun pada Tahun 2014, namun jika dibandingkan Tahun 2011 nilai APT meningkat menjadi 14,16 dari 12,90. Demikian juga halnya dengan APT tingkat SMA mengalami fluktuasi namun dibanding Tahun 2011 nilai APT Tahun 2015 menurun dari 9,95 menjadi 9,40. Untuk APT Perguruan Tinggi dari Tahun 2011 mengalami penurunan pada tahun 2015 yaitu dari 3,05 menjadi 2,05.

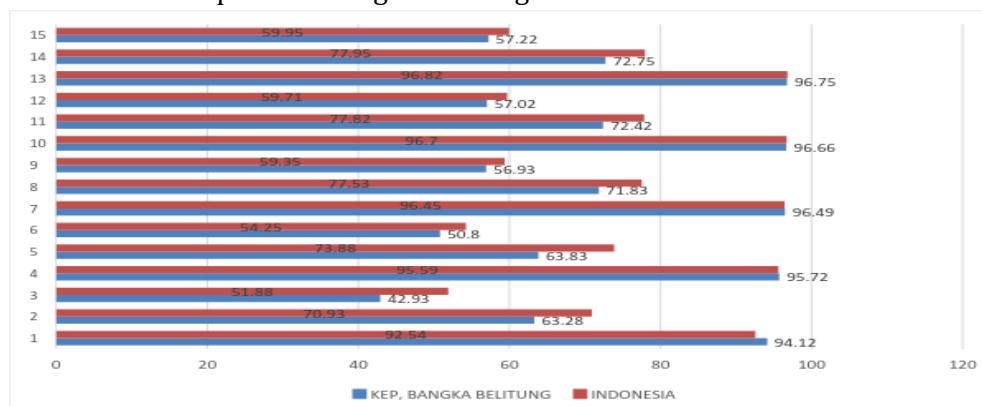
Di Kabupaten Belitung Timur APT tingkat Sekolah Dasar mengalami penurunan pada tahun 2015 dibandingkan Tahun 2011 yaitu dari 34,39 menjadi 30,05. Untuk tingkat SMP nilai APT mengalami perkembangan yang cukup baik dari Tahun 2011 hingga Tahun 2014 yaitu dari 17,06 menjadi 21,30 namun pada Tahun 2015 menurun menjadi 20,06, walaupun angka ini meningkat dibandingkan Tahun 2011. Pada tingkat SMA nilai APT mengalami penurunan cukup besar pada Tahun 2013 dibandingkan Tahun 2011 yaitu dari 19,94 menjadi 15,41, namun hingga Tahun 2015 APK terus meningkat menjadi 18,97. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan Tahun 2011. Untuk APT tingkat Perguruan Tinggi sejak Tahun 2011 tidak mengalami perkembangan yang berarti. Tahun 2011 nilai APT sebesar 4,67, dan pada Tahun 2015 nilai APT berkurang menjadi 4,45.

Angka pendidikan yang ditamatkan tingkat Sekolah Dasar di Kota Pangkalpinang hampir tidak mengalami peningkatan dari Tahun 2011 hingga Tahun 2015. Pada Tahun 2011 nilai APT sebesar 2013 dan Tahun 2015 sebesar 20,53. Untuk tingkat SMP pada Tahun 2012 mengalami penurunan yang cukup besar dibanding Tahun 2011 yaitu dari 19,27 menjadi 15,86. Angka ini terus meningkat hingga Tahun 2015 menjadi 19,89. Perkembangan APT untuk tingkat SMA mengalami fluktuasi, namun pada Tahun 2015 mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2011 yaitu dari 32,18 menjadi 31,16. Demikian juga halnya dengan APT tingkat Perguruan Tinggi mengalami fluktuasi namun pada Tahun 2015 meningkat jika dibandingkan Tahun 2011 yaitu dari 12,34 menjadi 12,63. Secara keseluruhan angka pendidikan yang ditamatkan Kota Pangkalpinang paling tinggi sedangkan APT yang paling rendah adalah Kabupaten Bangka Selatan.

## **5) Angka Partisipasi Murni**

Perkembangan APM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2012-2016 dapat diamati pada Grafik II.9 dan Tabel II.25 dibawah ini. APM SM/SMA/SMK/Paket C Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami peningkatan setiap tahunnya tetapi masih berada di bawah nasional. Pada tahun 2016 APM SM/SMK/MA/Paket C sebesar 57,22 sedangkan Nasional 59,92. Sementara APM SMP/MTs/Paket B sebesar 72,75 dan lebih rendah daripada nasional yaitu 77,95. Sedangkan SD/MI/Paket A sebesar 96,75 dan lebih rendah sedikit daripada nasional yaitu 96,82.

**Grafik II.9**  
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK)  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Indonesia Tahun 2012-2016



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

**Tabel II.25**  
Perkembangan APM Tahun 2011 s.d 2016  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>1. SD/MI</b>							
	Jumlah siswa kelompok usia 7-12 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI	126.542	133.944	139.243	143.431	146.727	143.952*
	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	139,180	142,312	145,469	148,649	151,846	152.972*
	APM SD/MI	90,92	94,12	95,72	96,49	96,66	96,75
<b>2. SMP/MTs</b>							
	Jumlah siswa kelompok usia 13-15 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs	41.183	43,791	45,153	51.921	53.568	51.210*
	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	67,680	69,202	70,740	72,284	73,840	74.074*
	APM SMP/MTs	60,85	63,28	63,83	71,83	72,42	72,75
<b>3. SMA/MA/SMK</b>							
	Jumlah siswa kelompok usia 16-18 tahun yang bersekolah dijenjang pendidikan SMA/MA/SMK	28.251	29.583	35.782	40.979	41.856	38.718*
	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	67,393	68,911	70,438	71,981	73,531	73.449*
	APM SMA/MA/SMK	41,92	42,93	50,80	56,93	57,02	57,22

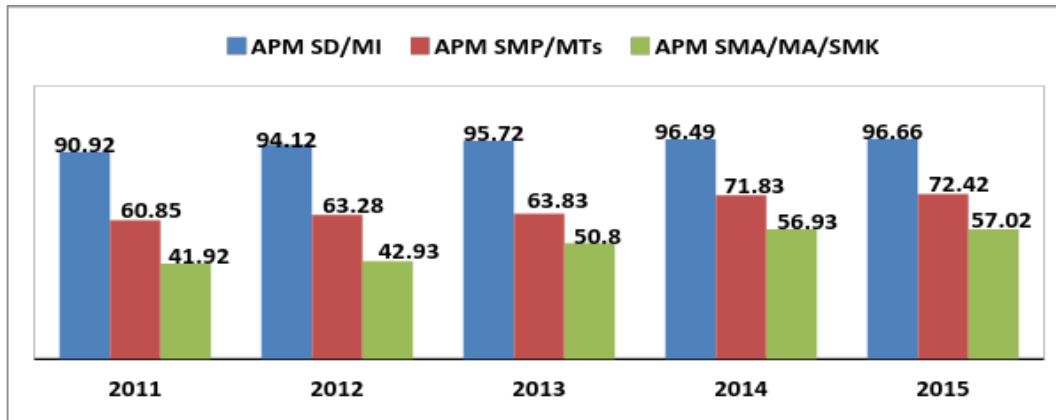
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

Sementara itu diluar sekolah paket, pada kurun waktu tahun 2011-2015 Angka Partisipasi Murni pada seluruh tingkat pendidikan meningkat. APM SD/MI pada tahun 2015 sebsar 96,99 telah melampaui APM nasional. Namun APM SMP/MTs Tahun 2015

sebesar 72,4 masih di bawah nasional berbeda dengan APM SMA/MA/SMK pada tahun 2015 sebesar 55,3 yang telah berada di atas APM nasional.

**Gafik II.10**

Perkembangan APM Tahun 2011-2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

Angka partisipasi murni untuk setiap kabupaten/kota sebagaimana disajikan pada Tabel II.26 menunjukkan bahwa APM tingkat SD/MI terendah pada Tahun 2015 ada di Kabupaten Bangka Tengah sebesar 95,08, tingkat SMP/MTs terendah di Kota Pangkalpinang sebesar 66,34 dan terendah tingkat SMA/MA/SMK di Kabupaten Bangka Selatan sebesar 37,62.

**Tabel II.26**

Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2015  
menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/ Kota	SD/MI			SMP/MTs			SMA/MA/SMK		
		Jumlah siswa usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI	Jumlah penduduk usia 7-12 tahun	APM	Jumlah siswa usia 13-15 tahun bersekolah di SMP/MTs	Jumlah penduduk usia 13-15 tahun	APM	Jumlah siswa 16-18 tahun bersekolah di SMA/MA/SMK	Jumlah penduduk usia 16-18 tahun	APM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Bangka	33.485	34.382	97,39	12.957	16.803	77,11	10.408	16.503	63,07
2	Belitung	18.277	19.118	95,60	6.917	9.700	71,31	5.385	9.677	55,65
3	Bangka Barat	22.060	22.444	98,29	7.538	10.325	73,01	4.952	9.965	49,69
4.	Bangka Tengah	19.589	20.603	95,08	7.194	10.126	71,05	6.260	10.254	61,05
5.	Bangka Selatan	21.878	22.914	95,48	8.068	11.010	73,28	4.042	10.745	37,62
6.	Belitung Timur	12.816	12.865	99,62	4.390	6.072	72,30	3.723	5.896	63,15
7.	Pangkalpinang	18.622	19.520	95,40	6.504	9.804	66,34	7.086	10.491	67,54
	<b>Jumlah</b>	<b>146.727</b>	<b>151.846</b>	<b>96,66</b>	<b>53.568</b>	<b>73.840</b>	<b>72,42</b>	<b>41.856</b>	<b>73.531</b>	<b>57,02</b>

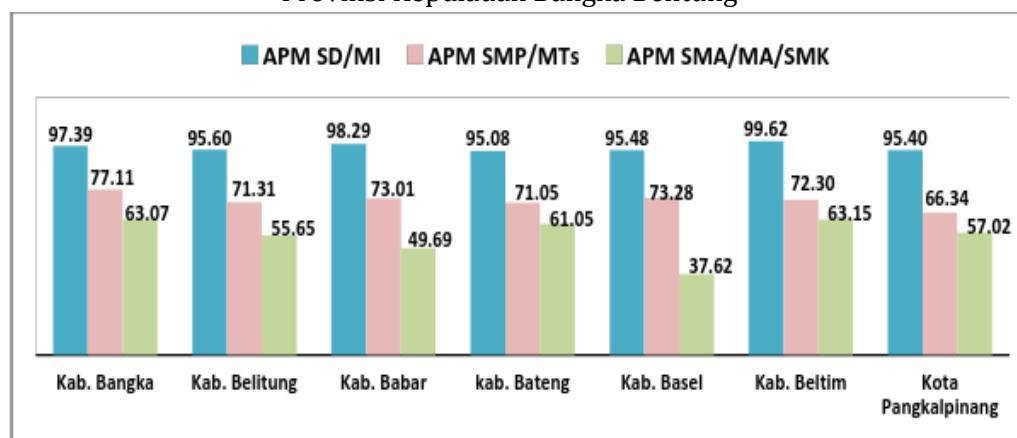
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016.

Angka partisipasi murni tingkat SD/MI pada Tahun 2015 di seluruh kabupaten/kota telah melampaui angka partisipasi murni nasional. Sedangkan untuk tingkat SMP, MTs

seluruh kabupaten/koat APMnya berada di bawah nasional.

**Grafik II.11**

Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2015 menurut Kabupaten/Kota  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

Berbeda dengan APM tingkat SMA/MA/SMK di Kabupaten Bangka, Belitung, Bangka Tengah, Belitung Timur dan Kota Pangkalpinang telah melampaui APM nasional, hanya Kabupaten Bangka Barat dan Bangka Selatan saja yang berada di bawah nasional.

## B. Kesehatan

### 1.) Angka kelangsungan bayi hidup

Beberapa faktor kesehatan seperti angka kematian bayi dan balita, persentase gizi buruk, angka kematian ibu melahirkan, dan beberapa penyakit yang terjadi menjadi hal penting diperhatikan. Perkembangan angka kematian bayi balita diperlihatkan seperti table di bawah ini.

**Tabel II.27**

Perkembangan Angka Kematian Bayi dan Balita Per 1.000 Kelahiran Hidup Tahun 2013-2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/ Kota	2013		2014		2015		2016	
		Bayi	Balita	Bayi	Balita	Bayi	Balita	Bayi	Balita
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Bangka	6,96	16,2	5,35	6,73	7,54	9,58	7,43	8,23
2	Belitung	14,75	14,16	12,91	13,81	11,29	12,26	12,17	14,02
3	Bangka Tengah	4,95	4,95	5,74	6,74	6,46	7,86	6,46	6,46
4	Bangka Barat	9,21	8,48	7,61	7,87	7,37	8,38	6,63	7,14
5	Bangka Selatan	8,84	7,74	7,37	8,42	6,28	7,38	5,85	7,52
6	Belitung Timur	14,73	12,84	10,22	11,15	8,25	8,25	6,71	8,62
7	Kota Pangkalpinang	4,73	3,48	2,92	3,16	3,38	3,38	6,33	6,33
	<b>Prov. Kepulauan Bangka Belitung</b>	<b>8,52</b>	<b>7,60</b>	<b>6,92</b>	<b>7,78</b>	<b>7,05</b>	<b>8,13</b>	<b>7,22</b>	<b>8,07</b>

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

Berdasarkan Tabel di atas, angka kematian bayi dan balita pada tahun 2013–2016 di Kabupaten/Kota menunjukkan kecenderungan meningkat. Untuk Tahun 2016 angka kematian bayi yang paling tinggi yaitu Kabupaten Belitung sebesar 12,17 dan angka kematian balita yang paling tinggi yaitu Kabupaten Belitung sebesar 14,02. Pada

tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung angka kematian bayi sebesar 7.22 dan balita sebesar 8.07 pada tahun 2016 mengalami peningkatan dari tahun 2015 dimana angka kematian bayi sebesar 7.05 dan balita sebesar 8.13.

## 2.) Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017 sebesar 69,95 tahun. UHH tertinggi berada masih berada di Kota Pangkalpinang 72,64 tahun diikuti oleh Kabupaten Belitung Timur 71,13 tahun, Kabupaten Bangka 70,56 tahun, dan Kabupaten Belitung 70,38 tahun, Kabupaten Bangka Tengah 70,49 tahun, Kabupaten Bangka Barat 69,56 tahun. Sementara UHH terendah berada di Kabupaten Bangka Selatan yaitu 67,13 tahun. Dilihat dari perkembangan UHH di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2012 hingga tahun 2016 mengalami peningkatan. Hal ini berarti angka harapan hidup di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cukup tinggi.

**Tabel II.28**

Usia Harapan Hidup menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013 s.d 2017  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Provinsi/Kabupaten /Kota	Usia Harapan Hidup (tahun)				
	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bangka	70,45	70,47	70,48	70,52	70,56
Belitung	70,20	70,22	70,32	70,38	70,44
Bangka Barat	69,44	69,46	69,47	69,52	69,56
Bangka Tengah	69,95	69,98	70,28	70,38	70,49
Bangka Selatan	66,51	66,56	66,86	66,99	67,13
Belitung Timur	71,01	71,03	71,23	71,30	71,37
Pangkalpinang	72,29	72,31	72,51	72,57	72,64
<b>Prov. Kepulauan Bangka Belitung</b>	<b>69,64</b>	<b>69,72</b>	<b>69,88</b>	<b>69,92</b>	<b>69,95</b>

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018

## 3.) Persentase balita gizi buruk

Berikut ini pada tabel II.26 menjelaskan perkembangan persentase balita dengan gizi buruk dari tahun 2012 sampai dengan 2016, dimana untuk Tahun 2016 persentase balita dengan Gizi Buruk paling tinggi di Kota Pangkalpinang dengan persentase sebesar 0,10 sedangkan yang paling rendah di Kabupaten Bangka Tengah dengan 0,03 %.

**Tabel II.29**

Perkembangan Persentase Balita Dengan Gizi Buruk Tahun 2012 s.d 2016  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Bangka	0,15	0,06	0,13	0,08	0,06
2	Belitung	0	0,01	0,01	0,03	0,05
3	Bangka Tengah	0,12	0,10	0,04	0,06	0,03
4	Bangka Barat	0,03	0,07	0,05	0,04	0,09
5	Bangka Selatan	0,21	0,05	0,02	0,05	0,04
6	Belitung Timur	0,20	0,15	0,02	0,06	0,04
7	Kota Pangkalpinang	0,16	0,11	0,01	0,05	0,10
	<b>Kepulauan Bangka Belitung</b>	<b>0,12</b>	<b>0,07</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,06</b>

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017



#### 4). Penyakit Menular

Perkembangan jumlah kasus penyakit menular cukup tinggi, yang ditunjukkan oleh tabel berikut ini.

**Tabel II.30**

Jumlah Kasus HIV/AIDS, IMS, DBD, Diare, TB, dan Malaria Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015

No	Kabupaten/Kota	HIV	DBD	Diare	TB	Malaria
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Bangka	30	218	6571	336	24
2	Belitung	47	120	1896	254	15
3	Bangka Barat	18	160	5391	165	139
4	Bangka Tengah	52	86	4145	171	35
5	Bangka Selatan	1	89	3182	126	38
6	Belitung Timur	5	18	2542	52	4
7	Kota Pangkalpinang	80	77	3231	226	24
	<b>Kepulauan Bangka Belitung</b>	<b>233</b>	<b>768</b>	<b>26.938</b>	<b>1.330</b>	<b>279</b>

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kasus tertinggi adalah diare (26.938 kasus). Sementara kasus HIV terendah, tetapi jumlah secara absolute relative sudah besar.

#### 5). Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan

Persentase penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun waktu 2013-2017 cenderung fluktuatif, yaitu dari 5,25 persen pada tahun 2013, kemudian mengalami penurunan tahun 2014 menjadi sebesar 4,97 persen dan mengalami peningkatan secara bertahap menjadi 5,30 persen. Kenaikan ini cenderung dipengaruhi oleh dampak perlambatan perekonomian daerah, sehingga penyediaan lapangan pekerjaan menjadi relatif terbatas.

**Tabel II.31**

Perkembangan Kemiskinan Tahun 2013-2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Persentase Penduduk Miskin (%)	5,25	4,97	4,83	5,04	5,30
2.	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)	70,90	67,23	66,62	71,07	76,20
3.	Garis Kemiskinan (Rp)	427.081	469.814	488.701	564.391	607.927
4.	Indeks kedalaman Kemiskinan (P1)	0,62	0,60	0,90	0,75	0,56

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, September 2018

**Tabel II.32**  
Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kota dan Desa Tahun 2013-2017  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Tingkat Kemiskinan Kota (%)	3,47	3,04	2,77	2,67	3.00
2.	Tingkat Kemiskinan Desa (%)	6,97	6,84	6,83	7,57	7.92

*Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018*

Memperhatikan Tabel II.32 ,sepanjang periode tahun 2013-2017 tingkat kemiskinan kota dan desa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung fluktuatif. Pada tahun 2017 Tingkat Kemiskinan Kota dan Tingkat Kemiskinan Desa sebesar 3 dan 7,92 sedikit meningkat dibandingkan tahun 2016 dimana Tingkat Kemiskinan Kota 2,67 dan Tingkat Kemiskinan Desa 7,57 . Disamping itu, kemiskinan di perdesaan masih relatif dominan dibandingkan dengan di perkotaan. Hal ini disebabkan karena lapangan pekerjaan di desa kurang memberi banyak alternatif, sehingga ketergantungan pada sektor tambang dan pertanian masih sangat besar. Hal ini sangat mempengaruhi kemampuan masyarakat desa untuk dapat keluar dari kemiskinan.

**Tabel II.33**  
Data Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2012-2016  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kabupaten / Kota	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bangka	5.57	5.40	5,20	5,63	5,52
Belitung	7.26	8.48	7,36	8,38	7.85
Bangka Barat	3.72	3.26	3,15	3,08	2,74
Bangka Tengah	5.77	5.46	3,27	5,67	5,64
Bangka Selatan	4.4	4.01	3,87	3,74	3,62
Belitung Timur	7.43	6.90	6,68	7,33	6,99
Kota Pangkalpinang	4.29	4.15	4,04	4,97	5,02
Kepulauan Bangka Belitung	5.37	5.25	4,97	5,40	5,22

*Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017*

Sementara itu, berdasarkan Tabel II.33, dapat diketahui persentase jumlah penduduk miskin yang paling tinggi terdapat di KabupatenBelitung dan Belitung Timur. Sementara itu, angka kemiskinan terendah terdapat di Kabupaten Bangka Barat dan Kota Pangkalpinang.

Adapun perbandingan jumlah penduduk miskin pada provinsi di wilayah Sumatera dapat dilihat pada tabel II.34 berikut:

**Tabel II.34**  
Data Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2013-2017  
Menurut Provinsi di Pulau Sumatera (ribu jiwa)

Provinsi	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	855,71	837,42	859,41	841,31	829,80
Sumatera Utara	1.390,80	1.360,60	1.508,14	1.452,55	1.320,57
Sumatera Barat	380,63	354,74	349,53	376,51	359,99
Riau	522,53	498,28	562,92	501,59	496,39
Jambi	281,57	281,75	311,56	290,81	278,61
Sumatera Selatan	1108,21	1.085,80	1.112,53	1.096,50	1086,76
Bengkulu	320,41	316,50	322,83	325,60	302,62
Lampung	1134,28	1.143,93	1.100,68	1.139,78	1083,74
Kepulauan Bangka Belitung	70,90	67,23	66,62	71,07	76,20
Kepulauan Riau	125,02	124,17	114,83	119,14	128,43

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

Berdasarkan Grafik II.14, jumlah penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung paling sedikit diantara provinsi lainnya yang ada di Sumatera, dan persentasenya juga paling rendah diantara provinsi lain yaitu 5,3 % pada tahun 2017. Namun demikian hal ini tidak serta merta menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan penduduk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung lebih tinggi dari provinsi lainnya di Sumatera. Berikut tabel persentase penduduk miskin menurut provinsi di Pulau Sumatera.

**Tabel II.35**  
Persentase penduduk miskin di Pulau Sumatera Tahun 2013-2017

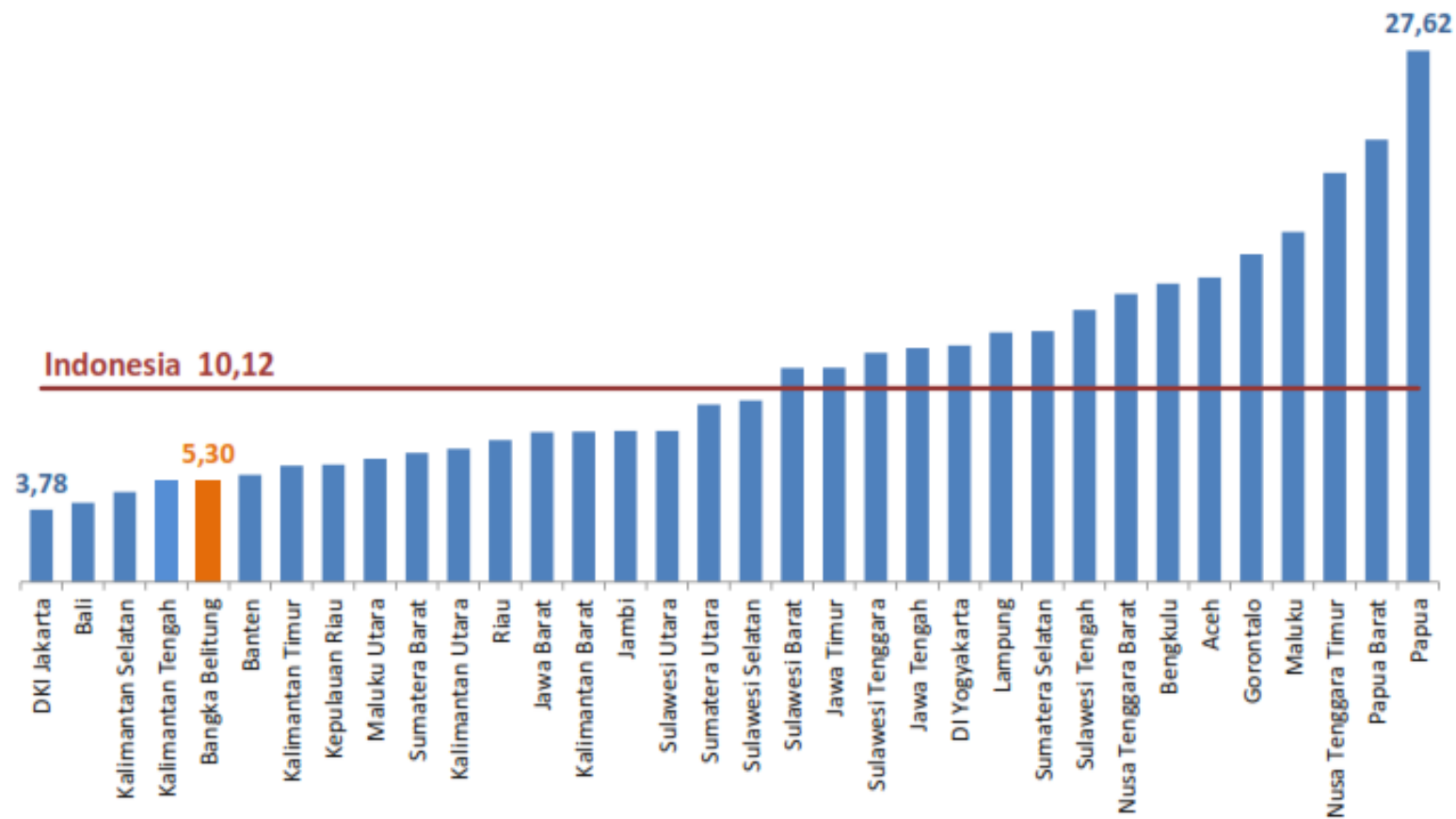
Provinsi	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	17,72	16,98	17,11	16,43	15,92
Sumatera Utara	10,39	9,85	10,79	10,27	9,27
Sumatera Barat	7,56	6,89	6,71	7,14	6,75
Riau	8,42	7,99	8,82	7,67	7,41
Jambi	8,42	8,38	9,12	8,37	7,90
Sumatera Selatan	14,06	13,62	13,77	13,39	13,10
Bengkulu	17,75	17,09	17,16	17,03	15,59
Lampung	14,39	14,21	13,53	13,86	13,04
Kepulauan Bangka Belitung	5,25	4,97	4,83	5,02	5,30
Kepulauan Riau	6,35	6,40	5,78	5,84	6,13

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

Sementara itu berdasarkan data kemiskinan tersebut memperlihatkan bahwa perkembangan tingkat kemiskinan (%) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hingga tahun 2017 adalah persentasenya berada di bawah rata-rata wilayah induknya (nasional).

**Grafik II.12**

Grafik Tingkat Kemiskinan (%) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Nasional Tahun 2017



Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018

### 1.) Rasio penduduk yang bekerja

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai salah satu Provinsi yang baru terbentuk menjadi salah satu daerah yang berpeluang besar dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan, baik pencari kerja maupun membangun bidang usaha sendiri. Rasio penduduk yang bekerja yang merupakan perbandingan antara Penduduk yang bekerja dengan angkatan kerja, selama lima tahun (2012-2015) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami penurunan walaupun sedikit. Namun melonjak secara dramatis menuju 0,97 ditahun 2017 dari 0,94 di tahun 2016.

**Tabel II.36**  
Perkembangan Ketenagakerjaan Tahun 2012 s.d 2016  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Penduduk Usia kerja	920.065	948.702	973.192	998.120	1.022.955
2.	Angkatan Kerja	604.163	619.700	636.959	665.842	705.173
3.	Penduduk yang Bekerja	583.102	596.786	604.223	623.949	686.830
4.	Rasio Penduduk yang bekerja	0.97	0.96	0.95	0.94	0,97

*Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, (Agustus), 2017*

Berdasarkan grafik Tabel II.37 dibawah dapat dilihat perkembangan penduduk yang bekerja, Angkatan kerja dan penduduk usia kerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam 5 (lima) tahun terakhir relatif meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun penduduk usia kerja cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk namun penduduk yang bekerja juga relatif terus meningkat selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.

**Tabel II.37**  
Perkembangan Ketenagakerjaan Tahun 2013 s.d 2017  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tahun	Angkatan Kerja (AK)				Bukan Angkatan Kerja (BAK)			Jumlah Penduduk Usia 15 tahun ke Atas	Persentase Angkatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja (TPAK)
	Bekerja	Pengangguran	Jumlah AK	% Bekerja / AK	Sekolah	Mengurus	Lainnya		
2013	597,613	22,657	620,270	96.35	58,101	225,269	45,043	948,683	65.38
2014	604,223	32,736	636,959	94.86	81,426	225,100	29,707	973,192	65.45
2015	623,949	41,893	665,842	93.71	75,602	220,803	35,873	998,120	66.71
2016	686,830	18,343	705,173	97.40	66,849	216,542	34,391	1,022,955	68.93
2017	672,618	26,399	699,017	96.22	80,170	235,882	32,614	1,047,683	66.72

*Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018*

Dalam menggambarkan seberapa Penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu daerah dapat dilihat dengan pendekatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dimana TPAK merupakan persentase antara jumlah angkatan kerja penduduk usia 15 tahun ke atas dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas. Dari Tabel II.38, tren TPAK dari tahun 2013-2017 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung fluktuatif dimana tahun 2013 sebesar 65,30 dan tahun 2014 turun menjadi

62,09 sedangkan tahun 2015 naik menjadi 66,71, mencapai puncaknya di tahun 2016 yaitu 68,93 persen. Naun turun kembali di tahun 2017 yaitu 66,72 persen.

**Tabel II.38**  
Perkembangan Tingkat Pengangguran dan TPAK Tahun 2013 s.d 2017  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Tingkat partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	65,30	62,09	66,71	68,93	66,72
2.	Tingkat Pengangguran	3,65	5,14	6,29	2,60	3,78

*Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, (Agustus 2017)*

Struktur penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama selama periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 seperti yang ditunjukkan pada Tabel II.39 menunjukkan pola perubahan yang hampir sama dengan keadaan sebelumnya kecuali di sektor Primer (Pertanian dan Pertambangan) yang terjadi pergeseran yang cukup besar, dimana untuk sektor pertanian tahun 2013 sebesar 28,06 % meningkat menjadi 32,56 % pada tahun 2017, sedangkan untuk sektor permbangan pada tahun 2013 sebesar 22,28 % menurun menjadi 11,36 % pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja untuk sektor pertanian meningkat dan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung lebih cenderung untuk bertani ketimbang untuk bekerja di bidang pertambangan walaupun pada tiga tahun terkahir harga komoditas pertanian dan perkebunan relatif menurun kecuali lada yang cenderung naik. Sedangkan untuk sektor pertambangan yang relatif menurun selama lima tahun terakhir dikarenakan semakin menurunnya harga komoditas timah sehingga ekspor timah yang semakin menurun dan berdampak dengan berkurangnya antusias masyarakat menambang timah dan kebijakan dari undang-undang minerba yang ketat dan melarang ekspor bahan tambang mentah.

**Tabel II.39**  
Penduduk 15 tahun ke atas Tahun 2013 s.d 2017 menurut Lapangan Pekerjaan Utama  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Lapangan Pekerjaan Utama	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Sektor Primer :</b>					
1. Pertanian	28,06	31,41	36,63	32,13	32,56
2. Pertambangan	22,28	17,5	12,24	11,48	11,36
<b>Sektor Sekunder:</b>					
3. Industri Pengolahan	6,06	5,88	5,65	8,02	6,34
4. Listrik, Gas dan Air	0,35	0,21	0,46	0,91	0,37
5. Bangunan	4,99	5,16	4,61	3,21	5,28
<b>Sektor Tersier:</b>					
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	18,49	20,45	19,68	21,69	19,93
7. Angkutan, Pergudangan dan Telekomunikasi	2,90	2,86	2,91	2,88	2,59
8. Keuangan dan Jasa Perusahaan	1,93	2,19	2,11	1,99	1,76
9. Jasa Kemasyarakatan	15,94	14,35	15,70	17,7	17,57
<b>Jumlah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

*Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018*



### 2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

#### A. Kebudayaan

##### 1) Jumlah grup kesenian

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai salah satu provinsi kepulauan yang menjadikan pariwisata sebagai sektor unggulan daerah. Dalam pengembangan kepariwisataan, selain mengandalkan wisata bahari sebagai daya tarik wisata, namun yang tak kalah menarik adalah keragaman seni dan budaya yang dimilikinya yang saat ini dikemas sebagai bagian dari atraksi budaya dalam mendukung pariwisata. Beberapa kebudayaan yang terdapat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain adalah Perang Ketupat, Rebo Kasan, Mandi Belimau, Antu Bubu Maras Taun, Beripat, dsb. Dalam rangka melestarikan nilai-nilai seni dan, peran sanggar-sanggar kesenian dan budaya yang saat ini semakin tumbuh dan berkembang dengan baik, hal yang tergambarkan pada Tabel II.40.

**Tabel II.40**  
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2011 s.d 2015  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk.	1,34	1,69	1,65	1,72	1,68
2.	Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk.	0,0079	0,0078	0,007604	0,0074	0,0073

Rumus :  $\text{jumlah grup/klub} : \text{jumlah penduduk} * 10.000$

Sumber: SKPD yang menangani urusan

Berdasarkan data perkembangan Grup kesenian di atas, menunjukkan bahwa pada kurun waktu 2011-2015 terjadi kenaikan dan penurunan jumlah grup kesenian dimana tahun 2011 sebesar 1,34 meningkat tahun 2012 menjadi 1,69 dan menurun pada tahun 2013 menjadi 1,65. Pada tahun 2014 kembali meningkat dibandingkan tahun 2013 menjadi 1,72 dan kembali menurun pada tahun 2015 menjadi 1,68.

**Tabel II.41**  
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Tahun 2011 s.d 2015  
Menurut kabupaten Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk	Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kab. Bangka	0,503	0
2.	Kab. Belitung	0,328	0
3.	Kab. Bangka Barat	0,167	0
4.	Kab. Bangka Tengah	0,138	0,051
5.	Kab. Bangka Selatan	0,160	0
6.	Kab. Belitung Timur	0,306	0
7.	Kota Pangkal Pinang	0,291	0
	<b>Jumlah</b>	<b>1,894</b>	<b>1</b>

Rumus :  $\text{jumlah grup/klub} : \text{jumlah penduduk} * 10.000$

Sumber: SKPD yang menangani urusan

## B.. Pemuda dan olahraga

### 1) Jumlah klub olahraga

Data yang diperoleh dari PD yang menangani pemuda dan olahraga, serta Organisasi Cabang Olahraga KONI Kabupaten dan Kota Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, jumlah perkumpulan olahraga pada tahun 2013 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk 6 (enam) cabang olahraga, atletik, sepakbola, bola voli, bola basket, bulutangkis, dan pencak silat, sebanyak 595 perkumpulan, terdapat 68 perkumpulan di Kabupaten Bangka, 103 perkumpulan di Kabupaten Belitung dan Kabupaten Bangka Barat, 82 perkumpulan di Kabupaten Bangka Tengah, 102 perkumpulan di Kabupaten Bangka Selatan, 77 perkumpulan di Kabupaten Belitung Timur, dan 60 perkumpulan di Kota Pangkalpinang. Perkumpulan olahraga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung paling banyak terdapat pada cabang sepakbola (335 perkumpulan), kemudian bola voli (84 perkumpulan), bulutangkis (67 perkumpulan), pencak silat (52 perkumpulan), bola basket (42 perkumpulan), dan atletik (15 perkumpulan).

**Tabel II.42**

Jumlah Perkumpulan Cabang Olahraga Atletik Tahun 2010 s.d 2014  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Kab. Bangka	2	2	2	2	2
2.	Kab. Belitung	1	1	1	1	3
3.	Kab. Bangka Barat	-	1	1	1	2
4.	Kab. Bangka Tengah	1	1	1	1	1
5.	Kab. Bangka Selatan	3	6	6	7	7
6.	Kab. Belitung Timur	1	1	1	1	2
7.	Kota Pangkal Pinang	1	1	1	2	2
	<b>Prov. Kepulauan Bangka Belitung</b>	<b>9</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>19</b>

Sumber: PD Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Organisasi Cabang Olahraga Kabupaten dan Kota

**Tabel II.43**

Jumlah Perkumpulan Cabang Olahraga Sepakbola Tahun 2010 s.d 2014  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Kab. Bangka	20	20	31	33	34
2.	Kab. Belitung	15	35	62	66	66
3.	Kab. Bangka Barat	30	38	64	64	64
4.	Kab. Bangka Tengah	24	27	30	36	36
5.	Kab. Bangka Selatan	24	51	51	58	133
6.	Kab. Belitung Timur	33	60	65	65	65
7.	Kota Pangkal Pinang	11	11	11	13	25
	<b>Prov. Kepulauan Bangka Belitung</b>	<b>57</b>	<b>242</b>	<b>314</b>	<b>335</b>	<b>423</b>

Sumber: PD Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Organisasi Cabang Olahraga Kabupaten dan Kota

**Tabel II.44**  
Jumlah Perkumpulan Cabang Olahraga Bola Voli Tahun 2010 s.d 2014  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Kab. Bangka	3	3	3	4	9
2.	Kab. Belitung	11	14	15	15	15
3.	Kab. Bangka Barat	17	19	19	19	20
4.	Kab. Bangka Tengah	11	14	15	16	23
5.	Kab. Bangka Selatan	7	10	15	23	159
6.	Kab. Belitung Timur	1	1	2	4	10
7.	Kota Pangkal Pinang	3	3	3	3	10
	<b>Prov. Kepulauan Bangka Belitung</b>	<b>53</b>	<b>64</b>	<b>71</b>	<b>84</b>	<b>246</b>

Sumber: PD Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Organisasi Cabang Olahraga Kabupaten dan Kota

**Tabel II.45**  
Jumlah Perkumpulan Cabang Olahraga Bola Basket Tahun 2010-2014  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Kab. Bangka	6	8	8	10	25
2.	Kab. Belitung	3	3	3	3	15
3.	Kab. Bangka Barat	5	5	10	14	7
4.	Kab. Bangka Tengah	-	-	-	-	2
5.	Kab. Bangka Selatan	2	2	3	3	8
6.	Kab. Belitung Timur	2	2	2	2	10
7.	Kota Pangkal Pinang	8	8	10	10	7
	<b>Prov. Kepulauan Bangka Belitung</b>	<b>26</b>	<b>28</b>	<b>36</b>	<b>42</b>	<b>84</b>

Sumber: PD Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

**Tabel II.46**  
Jumlah Perkumpulan Cabang Olahraga Bulutangkis Tahun 2010-2014  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Kab. Bangka	8	10	10	10	15
2.	Kab. Belitung	6	8	10	12	19
3.	Kab. Bangka Barat	2	2	2	4	10
4.	Kab. Bangka Tengah	8	8	10	19	20
5.	Kab. Bangka Selatan	5	5	5	5	59
6.	Kab. Belitung Timur	2	3	3	3	15
7.	Kota Pangkal Pinang	11	11	13	14	20
	<b>Prov. Kepulauan Bangka Belitung</b>	<b>41</b>	<b>47</b>	<b>53</b>	<b>67</b>	<b>158</b>

Sumber: PD Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

**Tabel II.47**  
Jumlah Perkumpulan Cabang Olahraga Pencak silat Tahun 2010-2014  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Kab. Bangka	6	6	9	9	9
2.	Kab. Belitung	6	6	6	6	6
3.	Kab. Bangka Barat	1	1	1	1	2
4.	Kab. Bangka Tengah	4	6	8	10	10
5.	Kab. Bangka Selatan	3	5	5	6	17
6.	Kab. Belitung Timur	2	2	2	2	5
7.	Kota Pangkal Pinang	15	15	15	18	18
	<b>Prov. Kepulauan Bangka Belitung</b>	<b>37</b>	<b>41</b>	<b>46</b>	<b>52</b>	<b>67</b>

Sumber: PD Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

## 2) Jumlah Gedung olahraga

Olahraga merupakan bagian penting dalam mengembangkan Sumber Daya Manusia sebagai bagian dari pelakupembangunan, sehingga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada 2007–2014 menempatkan bidang kepemudaan dan olahraga menjadi salah satu prioritas yang selanjutnya pada tahapan implementasi telah diwujudkan melalui dukungan program dan penganggaran. Salah satu wujud nyata dari upaya pengembangan bidang keolahragaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah telah disediakan lahan seluas ±50 Ha untuk pembangunan *Sport Center*, saat ini di kawasan tersebut telah tersedia Gedung Olahraga (GOR) Sahabuddin namun perlu dikembangkan lagi sehingga seluruh *venue* cabang olahraga dapat dibangun di kawasan tersebut.

**Tabel II.48**  
Perkembangan Sarana dan Prasarana Olahraga Tahun 2011 s.d 2015  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Jumlah gedung Olahraga	N/A	10	10	10	10
2.	Jumlah Lapangan Olahraga	N/A	1.730	1.730	1.730	1.731

Sumber: PD Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Dari data perkembangan sarana dan prasarana olahraga di provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 5 (lima) tahun terakhir tidak mengalami peningkatan, dimana jumlah gedung olahraga sebanyak 10 buah dan lapangan olahraga pada tahun 2015 sebanyak 1.731 buah.

### 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

#### 2.1.3.1. Fokus layanan urusan wajib

##### A. Urusan Pendidikan

###### 1) Angka partisipasi sekolah (APS)

Angka partisipasi sekolah merupakan perbandingan dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. APS dikenal sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan layanan pendidikan di suatu wilayah baik Provinsi, Kabupaten atau Kota di Indonesia. Semakin tinggi nilai APS, maka daerah tersebut dianggap berhasil menyelenggarakan layanan akses pendidikan. Semakin tinggi angka partisipasi sekolah disuatu daerah mencerminkan semakin banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah. Angka Partisipasi Sekolah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2011 s/d 2015 disajikan pada Tabel II.49.

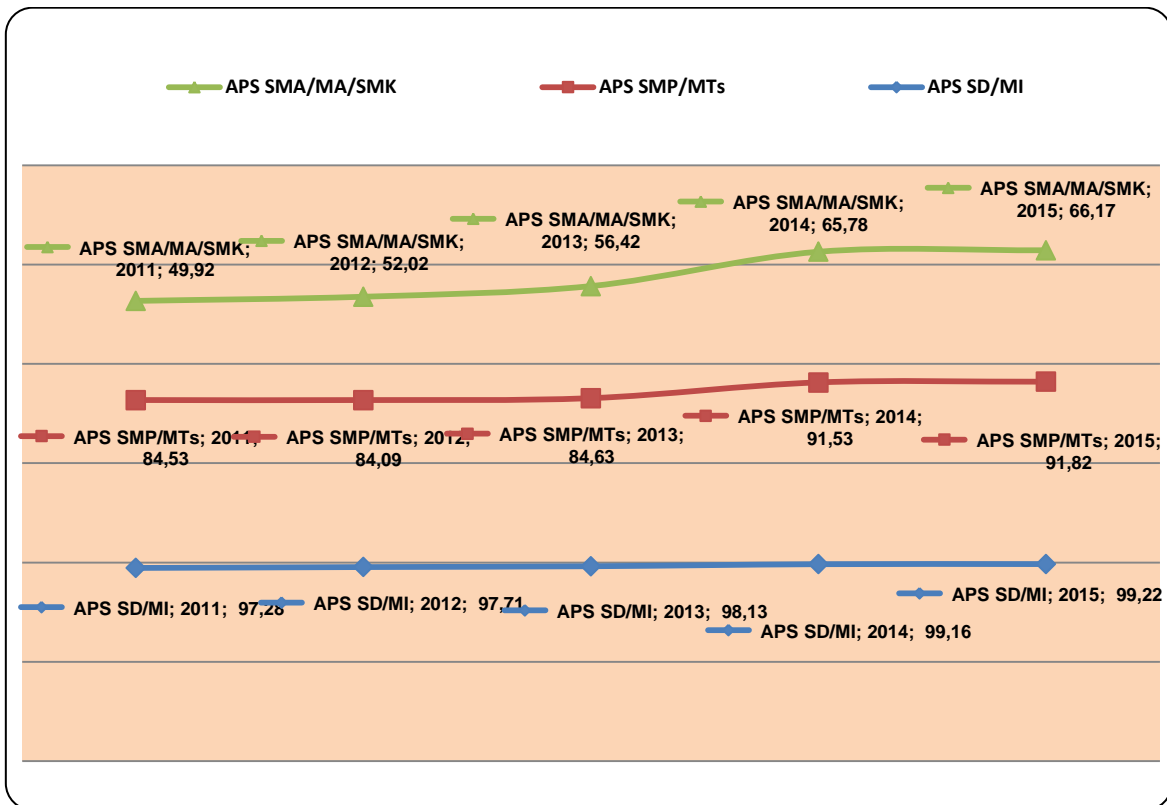
**Tabel II.49**  
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2011 s.d 2016  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1.	SD/MI						
	Jumlah siswa kelompok usia 7-12 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI	135.394	139.053	142.749	147.400	150.662	
	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	139,180	142,312	145,469	148,649	151,846	
	APS SD/MI (%)	97,28	97,71	98,13	99,16	99,22	99,25
2.	SMP/MTs						
	Jumlah siswa kelompok usia 13-15 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs	57.210	58.192	59.867	66.161	67.780	
	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	67,680	69,202	70,740	72,284	73,840	
	APS SMP/MTs (%)	84,53	84,09	84,63	91,53	91,82	92,03
3.	SMA/MA/SMK						
	Jumlah siswa kelompok usia 16-18 tahun yang bersekolah dijenjang pendidikan SMA/MA/SMK	33.642	35.847	39.741	47.349	48.655	
	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	67,393	68,911	70,438	71,981	73,531	
	APS SMA/MA/SMK (%)	49,92	52,02	56,42	65,78	66,17	66,35

*Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Susenas 2006-2015)*

Angka partisipasi sekolah tingkat SD/MI sejak Tahun 2011 hingga Tahun 2015 selalu mengalami kenaikan. Pada Tahun 2015 APS tingkat SD/MI sebesar 99,22%, hal ini menunjukkan masih ada penduduk usia 7-12 tahun sebanyak 1.184 anak atau 0,78% yang belum mendapatkan layanan sekolah tingkat SD/MI.

**Grafik II.13**  
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2011 s.d 2015  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Susenas 2006-2015)

Angka partisipasi sekolah tingkat SMP/MTs Tahun 2011 sebesar 84,53% dan menurun pada Tahun 2012 yaitu 84,09% dan terus meningkat hingga Tahun 2015 menjadi 91,82%. Demikian juga halnya dengan APS tingkat SMA/MA/SMK dari Tahun 2011 hingga Tahun 2014 mengalami kenaikan namun menurun pada Tahun 2015. Angka partisipasi sekolah tingkat SMA/MA/SMK Tahun 2015 sebesar 66,17% yang menunjukkan bahwa masih terdapat 33,83% penduduk usia 16-18 tahun belum mendapatkan layanan sekolah tingkat SMA/MA/SMK.

Angka partisipasi sekolah menurut kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disajikan pada Tabel II.50.



**Tabel II.50**  
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2015 menurut Kabupaten/Kota  
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/ Kota	SD/MI			SMP/MTs			SMA/MA/SMK		
		Jumlah siswa usia 7- 12 tahun	Jumlah pendudu k usia 7- 12 tahun	APS	Jumlah siswa usia 13- 15 tahun	Jumlah pendudu k usia 13-15 tahun	APS	Jumlah siswa usia 16- 18 tahun	Jumlah pendud uk usia 16-18 tahun	APS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Bangka	34.382	34.382	100	15.996	16.803	95,20	11.598	16.503	70,28
2	Belitung	18.705	19.118	97,84	8.889	9.700	91,64	6.296	9.677	65,06
3	Bangka Barat	22.161	22.444	98,74	9.295	10.325	90,03	6.372	9.965	63,94
4.	Bangka Tengah	20.498	20.603	99,49	9.267	10.126	91,52	6.889	10.254	67,18
5.	Bangka Selatan	22.465	22.914	98,04	9.797	11.010	88,98	4.944	10.745	46,01
6.	Belitung Timur	12.865	12.865	100	5.190	6.072	85,48	4.114	5.896	69,78
7.	Pangkalpinan g	19.520	19.520	100	9.424	9.804	96,12	8.358	10.491	79,67
	<b>Jumlah</b>	<b>150.596</b>	<b>151.846</b>	<b>99,22</b>	<b>67.859</b>	<b>73.840</b>	<b>91,82</b>	<b>48.571</b>	<b>73.531</b>	<b>66,17</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Susenas 2006-2015)

Angka partisipasi sekolah Tahun 2015 tingkat SD/MI di Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung Timur dan Kota Pangkalpinang mencapai 100%, ini menunjukkan seluruh penduduk usia 7-12 tahun telah mendapatkan layanan sekolah tingkat SD/MI. Namun masih ada daerah kabupaten yang belum mencapai 100% APS nya yaitu Kabupaten Belitung, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Bangka Selatan, yang menunjukkan masih ada penduduk usia 7-12 tahun belum mendapatkan layanan sekolah SD/MI.

Angka partisipasi sekolah Tahun 2015 tingkat SMP/MTs terendah di Kabupaten Belitung Timur 85,48% dan belum ada daerah kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai APS 100%. Ini menunjukkan bahwa pada setiap kabupaten dan kota masih terdapat penduduk usia 13-15 tahun yang belum mendapatkan layanan pendidikan tingkat SMP/MTs.

Angka Partisipasi Sekolah tingkat SMA/MA/SMK, APS terendah di Kabupaten Bangka Selatan 46,01%, yang menggambarkan bahwa lebih dari setengah penduduk usia 16-18 tahun belum mendapatkan layanan pendidikan tingkat SMA/MA/SMK. Begitu juga halnya dengan daerah kabupaten/kota lainnya, masih terdapat penduduk usia 16-18 tahun yang belum mendapatkan layanan pendidikan SMA/MA/SMK.

## 2) Rasio Ketersediaan Gedung Sekolah / Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah menunjukkan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan. Rasio ketersediaan sekolah ini dihitung untuk tiap 10.000 penduduk. Selama kurun waktu 2011-2014 rasio ketersediaan sekolah untuk jenjang pendidikan SD/MI mengalami penurunan.

**Tabel II.51**  
Ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah Tahun 2011 s.d 2015  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Jenjang Pendidikan	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>1.</b>	<b>SD/MI</b>					
	Jumlah gedung sekolah	809	817	815	812	830
	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	139.180	142.312	145.469	148.649	151.846
	Rasio	58,13	57,41	56,03	54,63	54,66
<b>2.</b>	<b>SMP/MTs</b>					
	Jumlah gedung sekolah	219	234	231	232	244
	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	67.680	69.202	70.740	72.284	73.840
	Rasio	32,36	33,81	32,65	32,10	33,04
<b>3.</b>	<b>SMA/MA/SMK</b>					
	Jumlah gedung sekolah	130	133	157	139	139
	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	67.393	68.911	70.438	71.981	73.531
	Rasio	19,29	19,30	22,29	19,31	18,90

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Susenas 2006-2015)

Menurut Tabel II.51, pada tahun 2011 rasio ketersediaan sekolah mencapai 58,13 sekolah per 10.000 penduduk, dan menurun hingga 54,63 sekolah pada Tahun 2014. Pada Tahun 2015 rasio ketersediaan sekolah sedikit meningkat dibanding tahun 2014 yaitu 54,66 sekolah per 10.000 penduduk.

Berdasarkan data, rasio ketersediaan sekolah yang terendah ada pada tingkatan SMA/SMK/MA, dengan jumlah penduduk usia sekolah pada tingkatan tersebut berjumlah 73.531 orang, namun kapasitas sekolah yang tersedia adalah hanya 139 sekolah atau dengan rasio 18,90.

Data mengenai ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah Tahun 2014/2015 menurut kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disajikan pada Tabel II.52.

**Tabel II.52**  
Ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah Tahun 2011 s.d 2015 menurut  
Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/ Kota	SD/MI			SMP/MTs			SMA/MA/SMK		
		Jumlah gedung sekolah	Jumlah penduduk usia 7- 12 th	Rasio	Jumlah gedung sekolah	Jumlah penduduk usia 13-15 th	Rasio	Jumlah gedung sekolah	Jumlah penduduk usia 16-18th	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Bangka	187	34.382	54,39	59	16.803	35,11	34	16.503	20,60
2	Belitung	121	19.118	63,29	29	9.700	29,90	17	9.677	17,57
3	Bangka Barat	138	22.444	61,49	43	10.325	41,65	22	9.965	22,08
4.	Bangka Tengah	97	20.603	47,08	26	10.126	25,68	13	10.254	12,68
5.	Bangka Selatan	94	22.914	41,02	36	11.010	32,70	18	10.745	16,75
6.	Belitung Timur	105	12.865	81,62	24	6.072	39,53	13	5.896	22,05
7.	Pangkalpinang	88	19.520	45,08	27	9.804	27,54	18	10.491	17,16
	<b>Jumlah</b>	<b>830</b>	<b>151.846</b>	<b>54,66</b>	<b>244</b>	<b>73.840</b>	<b>33,04</b>	<b>139</b>	<b>73.531</b>	<b>18,90</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Susenas 2006-2015)

Rasio ketersediaan sekolah Tahun 2014/2015 tingkat SD/MI terendah terdapat di Kabupaten Bangka Selatan 41,02, tingkat SMP/MTS dan SMA/MA/SMK di Kabupaten Bangka Tengah yaitu masing-masing 25,68 dan 12,68.

Sedangkan rasio ketersediaan sekolah Tahun 2014/2015 tingkat SD/MI tertinggi terdapat di Kabupaten Belitung Timur 81,62, tingkat SMP/MTS di Bangka Barat dan SMA/MA/SMK di Kabupaten Bangka Tengah yaitu masing-masing 41,65 dan 22,08.

### 3) Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-rata

Rasio murid per guru didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid dengan jumlah guru pada jenjang pendidikan tertentu untuk mengetahui rata-rata jumlah guru yang dapat melayani murid di suatu sekolah atau daerah tertentu. Semakin tinggi rasio tersebut berarti bahwa satu orang tenaga pengajar harus melayani banyak murid. Rasio murid dan guru di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disajikan pada Tabel II.53 berikut.

**Tabel II.53**  
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2011 s.d 2015  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Jenjang Pendidikan	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>1.</b>	<b>SD/MI</b>					
	Jumlah guru	9.694	9.875	9.635	9.767	9.303
	Jumlah murid	159.012	161.533	162.152	161.932	165.520
	Rasio	16,40	16,36	16,83	16,58	17,79
<b>2.</b>	<b>SMP/MTs</b>					
	Jumlah guru	3.799	3.934	3.841	4.005	3.784
	Jumlah murid	52.688	58.517	59.863	60.101	65.331
	Rasio	13,87	14,87	15,58	15,01	17,26
<b>3.</b>	<b>SMA/MA/SMK</b>					
	Jumlah guru	3.326	3.458	3.788	3.444	3.059
	Jumlah murid	38.435	41.999	44.269	42.930	46.914
	Rasio	11,55	12,14	11,69	12,46	15,31

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Susenas 2006-2015)

Pada kurun waktu 2011-2015, rasio guru dan murid tertinggi ada pada jenjang pendidikan SD/MI yaitu 17,79 pada Tahun 2015. Hal ini disebabkan jumlah guru pada tingkat SD/MI cenderung menurun setiap tahunnya sementara jumlah murid mengalami peningkatan. Jumlah guru pada tingkat SMP/MTs yang selalu meningkat sampai Tahun 2014 dan kembali menurun pada Tahun 2015 dengan jumlah murid yang semakin bertambah yang menyebabkan rasio guru dan murid menjadi meningkat juga. Hal yang sama terjadi pada kondisi guru dan murid pada tingkat SMA/MA/SMK. Walaupun pada setiap tingkatan sekolah rasio guru dan murid mengalami fluktuasi naik dan turun namun secara umum rasio guru dan murid pada masing-masing jenjang pendidikan mengalami peningkatan.

Berdasarkan Tabel II.54, rasio guru dan murid pada Tahun 2015 pada tingkat SD/MI tertinggi di Kota Pangkalpinang yaitu masing-masing 20,60, tingkat SMP/MTs di Kabupaten Bangka Tengah yaitu 19,46 dan tingkat SMA/MA/SMK di Kabupaten Bangka Barat yaitu 15,46.

**Tabel II.54**  
Jumlah Guru dan Murid Tahun 2011 s.d 2015 Menurut Kabupaten/Kota  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/ Kota	SD/MI			SMP/MTs			SMA/MA/SMK		
		Jumlah guru	Jumlah murid	Rasio	Jumlah guru	Jumlah murid	Rasio	Jumlah guru	Jumlah murid	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Bangka	2.049	37.580	18,34	919	15.345	16,70	712	10.458	14,69
2	Belitung	1.269	19.334	15,23	441	8.393	19,03	272	6.324	23,25
3	Bangka Barat	1.412	24.590	17,41	565	8.665	15,34	403	6.229	15,46
4.	Bangka Tengah	1.167	22.964	19,68	423	8.232	19,46	347	5.009	14,43
5.	Bangka Selatan	1.221	24.042	19,70	541	8.502	15,71	366	5.346	14,61
6.	Belitung Timur	1.032	13.253	12,84	353	5.806	16,45	300	3.816	12,72
7.	Pangkalpinang	1.153	23.757	20,60	542	10.388	19,17	659	9.732	14,77
	<b>Jumlah</b>	<b>9.303</b>	<b>165.520</b>	<b>17,79</b>	<b>3.784</b>	<b>65.331</b>	<b>17,26</b>	<b>3.059</b>	<b>46.914</b>	<b>15,34</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Susenas 2006-2015)

## B. Urusan Kesehatan

### 1) Jumlah rumah sakit pemerintah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pada kurun waktu 2012-2016, ketersediaan fasilitas kesehatan khususnya rumah sakit pemerintah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kondisi baik dan di setiap kabupaten kota sudah memiliki rumah sakit pemerintah. Berikut ini jumlah rumah sakit pemerintah diuraikan pada Tabel II.55.

**Tabel II.55**  
Jumlah Rumah Sakit Pemerintah Tahun 2012 s.d 2016  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kabupaten/kota	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bangka	1	2	2	2	2
Belitung	1	1	1	1	1
Bangka Barat	1	1	1	1	1
Bangka Tengah	1	1	1	1	1
Bangka Selatan	1	1	1	1	1
Belitung Timur	1	1	1	1	1
Pangkal Pinang	1	1	1	1	1
<b>Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>8</b>

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

### 2) Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk

Rumah sakit adalah suatu organisasi yang melalui tenaga medis profesional yang terorganisir serta sarana kedokteran yang permanen menyelenggarakan pelayanan kesehatan, asuhan keperawatan yang berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien.

**Tabel II.56**  
Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per Jumlah Penduduk Tahun 2012 s.d 2016  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Jumlah Rumah Sakit Umum (Pemerintah)	8	8	8	8	8
2.	Jumlah Rumah Sakit Jiwa/Paru dan Penyakit Khusus Lainnya milik Pemerintah	1	1	1	1	1
3.	Jumlah Rumah Sakit AD/AU/AL/POLRI	-	-	-	-	-
4.	Jumlah Rumah Sakit Daerah	-	-	-	-	-
5.	Jumlah Seluruh Rumah Sakit	9	9	9	9	9
6.	Jumlah Penduduk	1.289.321	1.339.773	1.343.881	1.372.813	1.401.827
7.	Rasio	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

**Tabel II.57**  
Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten /Kota	Rumah Sakit Umum (Pemerintah)		Rumah Sakit Jiwa/Paru dan penyakit Khusus Lainnya Milik Pemerintah		Rumah Sakit AD/AU/AL/POLRI		Rumah Sakit Daerah		Rumah Sakit Swasta		Total	
		Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Kab. Bangka	2	0,01	1	0,00	-	-	-	-	2	0,01	5	0,02
2	Kab. Bangka Barat	1	0,00	-	-	-	-	-	-	1	0,00	2	0,01
3	Kab. Bangka Tengah	1	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,01
4.	Kab. Bangka Selatan	1	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,01
5.	Kab. Belitung	1	0,01	-	-	-	-	-	-	1	0,01	2	0,01
6.	Kab. Belitung Timur	1	0,01	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,01
7.	Kota Pangkalpinang	1	0,01	-	-	-	-	-	-	3	0,02	4	0,02
	<b>Jumlah</b>	<b>8</b>	<b>0,04</b>	<b>35</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7</b>	<b>0,03</b>	<b>16</b>	<b>0,08</b>

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015

Selanjutnya memperhatikan data pada Tabel di bawah, terlihat bahwa persentase keluarga yang memiliki akses terhadap air bersih pada tahun 2016 di kabupaten/kota cenderung mengalami peningkatan yang cukup besar dibanding tahun 2015, seperti terjadi di Kabupaten Bangka Selatan yang mengalami peningkatan sebesar 74,8 persen, diikuti Kabupaten Bangka Barat 89,5 persen, Kabupaten Bangka Tengah 56,8 persen, Kota Pangkalpinang 88,7 persen. Namun juga terjadi penurunan akses terhadap air bersih yang tidak begitu besar, yakni di Kabupaten Belitung menjadi 74,2 persen dan Kabupaten Belitung Timur menjadi 76 persen.

**Tabel II.58**

Perkembangan Persentase Keluarga Yang Memiliki Akses Terhadap Air Bersih  
Tahun 2012 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
1	Bangka	81,39	87,7	87,7	75,3	<b>77,9</b>
2	Belitung	78,44	75,6	75,6	84,5	<b>74,2</b>
3	Bangka Tengah	78,87	48,2	48,2	47,7	<b>56,8</b>
4	Bangka Barat	54,66	87,4	87,4	83,7	<b>89,5</b>
5	Bangka Selatan	73,80	76,4	76,4	59,6	<b>74,8</b>
6	Belitung Timur	72,39	100	100	76,6	<b>76,0</b>
7	Kota Pangkalpinang	91,84	92,0	92,0	87,7	<b>88,7</b>
	<b>Kepulauan Bangka Belitung</b>	<b>76,38</b>	<b>80,2</b>	<b>80,2</b>	<b>73,7</b>	<b>77,6</b>

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

Beberapa jenis penyakit yang menjadi perhatian dan sekaligus topik penting di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain penyakit malaria, HIV, dan demam berdarah. Perkembangan angka penyakit yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disajikan pada tabel berikut.

**Tabel II.59**

Perkembangan Angka Kesakitan Malaria per 1000 penduduk Tahun 2012 s.d 2016  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
1	Bangka	1,67	0,97	0,48	0,21	<b>0,13</b>
2	Belitung	1,97	0,66	1,31	0,09	<b>0,01</b>
3	Bangka Tengah	4,28	2,13	2,28	0,19	<b>0,36</b>
4	Bangka Barat	4,52	4,23	0,98	0,74	<b>0,09</b>
5	Bangka Selatan	2,08	0,66	1,63	0,30	<b>0,17</b>
6	Belitung Timur	1,58	0,57	0,98	0,05	<b>0,07</b>
7	Kota Pangkalpinang	0,67	0,39	0,31	5,18	<b>0,92</b>
	<b>Kepulauan Bangka Belitung</b>	<b>2,36</b>	<b>1,39</b>	<b>0,68</b>	<b>0,97</b>	<b>0,18</b>

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016& Data Sektoral 2016

Angka kesakitan malaria di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada kurun waktu 2012–2016. Hal ini selaras dengan prioritas pembangunan bidang kesehatan yang fokus pada pengurangan angka kesakitan malaria.

HIV/AIDS merupakan masalah lintas sektoral yang memerlukan perhatian serius dari semua pihak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan semakin tersedianya akses pelayanan HIV dan AIDS jumlah kasus yang dilaporkan pun semakin banyak. AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) merupakan gejala penyakit berat karena menurunnya imunitas tubuh akibat infeksi HIV (*Human Immuno Deficiency Virus*). Berdasarkan laporan kegiatan serosurvey yang dilakukan di beberapa



populasi berisiko menunjukkan bahwa Kepulauan Bangka Belitung merupakan daerah dengan epidemi terkonsentrasi (prevalensi > 5% pada populasi berisiko).

Dari kegiatan serosurvey pada populasi berisiko diperoleh data prevalensi >5% di dua kabupaten, yaitu tertinggi di Kota Pangkalpinang 6.67%, Bangka 3.94%, sedangkan di dua kabupaten lainnya prevalensi HIV adalah sebagai berikut Belitung Timur 2,17% dan Bangka Selatan 1.08% sedangkan yang terendah di 3 Kabupaten yaitu Kabupaten Belitung, Bangka Tengah dan Bangka Barat 0%. Prevalensi kasus HIV/AIDS di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 disajikan dalam tabel II.60 berikut:

**Tabel II.60**  
Perkembangan Prevalensi HIV (Persentase Kasus terhadap Penduduk Berisiko)  
Tahun 2010-2014 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
1	Bangka	0	8,33	3,94	3,94	0
2	Belitung	0,56	2,70	1,80	0	0
3	Bangka Tengah	8,11	2,50	0,01	0	0
4	Bangka Barat	4,94	0	0	0	0
5	Bangka Selatan	0	3,17	9,84	1,08	0
6	Belitung Timur	3,85	0,20	0,02	2,17	0
7	Kota Pangkalpinang	1,96	6,98	10,33	6,67	0
	<b>Kepulauan Bangka Belitung</b>	<b>8,11</b>	<b>8,33</b>	<b>10,33</b>	<b>13,86</b>	<b>0</b>

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014

Dengan adanya fenomena gunung es dalam masalah HIV menggambarkan bahwa peningkatan penemuan kasus HIV/AIDS tidak berarti merupakan suatu kegagalan, melainkan disebabkan semakin banyak kasus yang dilaporkan terkait semakin tersedianya akses bagi masyarakat yang memerlukan.

**Tabel II.61**  
Distribusi Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (DBD) per 100.000 penduduk  
(Persentase Kasus terhadap Penduduk Berisiko) Tahun 2011 s.d 2015  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
1	Bangka	5,60	25,92	43,15	30,90	66,22
2	Belitung	19,88	214,38	111,81	13,93	74,88
3	Bangka Tengah	3,33	111,48	87,21	25,26	44,57
4	Bangka Barat	49,10	98,85	66,72	6,98	75,88
5	Bangka Selatan	46,95	75,93	26,47	20,55	45,97
6	Belitung Timur	22,66	13,24	7,72	6,80	23,38
7	Kota Pangkalpinang	29,17	88,48	27,68	8,88	39,25
	<b>Kepulauan Bangka Belitung</b>	<b>27,93</b>	<b>86,17</b>	<b>53,4</b>	<b>23,82</b>	<b>55,53</b>

Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2011-2015

Berdasarkan distribusi angka kesakitan DBD di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sepanjang tahun 2011-2015 cenderung mengalami kenaikan di tiap tahunnya. Pada tahun 2014, Penurunan angka kesakitan DBD cukup signifikan dimana angka kenaikan terbesar terdapat di Kabupaten Belitung Timur.

Dalam rangka pengendalian permasalahan kesehatan yang terjadi dan peningkatan taraf kesehatan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, keberadaan sarana dan prasarana kesehatan termasuk pula ketersediaan tenaga dokter menjadi sangat penting. Sebagai salah satu bentuk pelayanan dasar kepada masyarakat, pemerintah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan akan sarana dan prasarana kesehatan tersebut. Adapun perkembangan sarana dan prasarana kesehatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

**Tabel II.62**  
Perkembangan Jumlah Puskesmas Tahun 2012 s.d 2016  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)
1	Bangka	11	12	12	12	<b>12</b>
2	Belitung	9	9	9	9	<b>9</b>
3	Bangka Tengah	7	7	8	8	<b>8</b>
4	Bangka Barat	8	8	8	8	<b>8</b>
5	Bangka Selatan	9	9	9	9	<b>9</b>
6	Belitung Timur	6	6	6	7	<b>7</b>
7	Kota Pangkalpinang	9	9	9	9	<b>9</b>
	<b>Kepulauan Bangka Belitung</b>	<b>59</b>	<b>60</b>	<b>61</b>	<b>62</b>	<b>62</b>

Sumber: Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2016

**Tabel II.63**

Perkembangan Jumlah Puskesmas Tahun 2012 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	2012		2013		2014		2015		2016	
		Puskesmas	Pembantu	Puskesmas	Pembantu	Puskesmas	Pembantu	Puskesmas	Pembantu	Puskesmas	Pembantu
(1)	(2)	(5)	(6)	(9)	(10)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Bangka	11	36	11	37	12	36	12	33	12	35
2	Belitung	9	31	9	31	9	31	9	33	9	32
3	Bangka Tengah	7	18	7	21	7	18	8	19	8	20
4	Bangka Barat	8	19	8	19	8	19	8	18	8	19
5	Bangka Selatan	9	29	8	28	9	29	9	29	9	28
6	Belitung Timur	6	18	6	17	6	18	6	18	7	17
7	Kota Pangkalpinang	9	19	9	7	9	19	9	19	9	19
	<b>Prov. Kepulauan Bangka Belitung</b>	<b>59</b>	<b>169</b>	<b>58</b>	<b>160</b>	<b>60</b>	<b>169</b>	<b>61</b>	<b>169</b>	<b>62</b>	<b>170</b>

Sumber: Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2016

**Tabel II.64**

Perkembangan Jumlah Dokter Tahun 2010 s.d 2014 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Wilayah	2009			2010			2011			2012			2013			2014		
	U	G	Sp	U	G	Sp	U	G	Sp	U	G	Sp	U	G	Sp	U	G	Sp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Prov. Kepulauan Bangka Belitung	3	2	0	1	2	0	6	1	0	10	0	1	10	0	1	10	0	1
Bangka	48	13	11	22	11	17	60	13	17	60	11	22	61	9	16	61	9	16
Belitung	34	8	10	4	8	3	40	10	2	41	10	4	40	10	6	40	10	6
Bangka Tengah	35	8	7	4	5	0	39	7	2	42	7	4	44	7	5	44	7	5
Bangka Barat	29	4	5	4	6	2	38	5	2	54	5	4	36	7	3	36	7	3
Bangka Selatan	20	3	6	0	4	0	27	5	0	27	6	0	23	7	3	23	7	3
Belitung Timur	24	3	1	14	1	0	34	5	0	34	8	2	32	10	4	32	10	4
Pangkalpinang	63	15	46	59	17	30	61	17	41	61	21	51	56	19	42	56	19	42
<b>Jumlah</b>	<b>256</b>	<b>54</b>	<b>72</b>	<b>261</b>	<b>54</b>	<b>52</b>	<b>305</b>	<b>63</b>	<b>64</b>	<b>329</b>	<b>68</b>	<b>88</b>	<b>292</b>	<b>69</b>	<b>83</b>	<b>292</b>	<b>69</b>	<b>83</b>

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014

Keterangan :

U : Dokter Umum G : Dokter gigi Sp : Dokter Spesialis

Berdasarkan data pada Tabel II.59 terlihat bahwa jumlah dokter terus mengalami peningkatan, namun kebutuhan akan tenaga dokter masih dirasakan kurang, terutama pada tenaga dokter spesialis. Terbatasnya ketersediaan akan dokter spesialis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyebabkan banyaknya masyarakat yang harus berobat keluar daerah dan hal tersebut dirasakan memberatkan masyarakat terutama dari sisi pembiayaan.

### 3) Rasio pos pelayanan terpadu (posyandu) per satuan balita

Pengertian Posyandu adalah suatu wadah komunikasi alih teknologi dalam pelayanan kesehatan masyarakat dari Keluarga Berencana dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat dengan dukungan pelayanan serta pembinaan teknis dari petugas kesehatan dan keluarga berencana yang mempunyai nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini.

Tujuan penyelenggaraan Posyandu:

1. Menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (ibu Hamil, melahirkan dan nifas).
2. Membudayakan NKKBS.
3. Meningkatkan peran serta dan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB serta kegiatan lainnya yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera.
4. Berfungsi sebagai Wahana Gerakan Reproduksi Keluarga Sejahtera, Gerakan Ketahanan Keluarga dan Gerakan Ekonomi Keluarga Sejahtera.

Pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak-anak sejak usia dini, merupakan suatu strategi dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar yang meliputi peningkatan derajat kesehatan dan gizi yang baik, lingkungan yang sehat dan aman, pengembangan psikososial/emosi, kemampuan berbahasa dan pengembangan kemampuan kognitif (daya pikir dan daya cipta) serta perlindungan anak. Pengalaman empirik di beberapa tempat menunjukkan, bahwa strategi pelayanan kesehatan dasar masyarakat dengan fokus pada ibu dan anak seperti itu, dapat dilakukan pada Posyandu.

Karena Posyandu merupakan wadah peranserta masyarakat untuk menyampaikan dan memperoleh pelayanan kesehatan dasarnya, maka diharapkan pula strategi operasional pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak secara dini, dapat dilakukan di setiap posyandu.

Terkait dengan hal tersebut diatas perlu dilakukan analisis rasio posyandu terhadap jumlah balita dalam upaya peningkatan fasilitasi pelayanan pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang anak sejak dalam kandungan, dan agar status gizi maupun derajat kesehatan ibu dan anak dapat dipertahankan dan atau ditingkatkan.

Pembentukan Posyandu sebaiknya tidak terlalu dekat dengan Puskesmas agar pendekatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat lebih tercapai dan idealnya satu Posyandu melayani 100 balita. Oleh karena itu perlu dihitung rasio ketersediaan posyandu per balita. Kegunaannya untuk mengetahui berapa selakunya jumlah posyandu yang efektif tersedia sesuai dengan tingkat penyebarannya serta sebagai dasar untuk merevitalisasi fungsi dan peranannya dalam pembangunan daerah.

## C. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

### 1.) Penataan Ruang

Tujuan penataan ruang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu mewujudkan Tata Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Terpadu, Berimbang dan Berkeadilan berbasis Agro-Bahari untuk menunjang Pariwisata serta Pengendalian Wilayah Pertambangan untuk menjamin Pembangunan yang Berkelanjutan.

Penataan Ruang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah diatur pengelolaan dan sanksinya oleh Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pengaturan kawasan dalam Perda Tata Ruang terbagi dua kawasan yaitu: Kawasan lindung seluas 189.965 Ha merupakan kawasan yang memberikan perlindungan kawasan yang di bawahnya. Kawasan Budidaya berupa kawasan hutan produksi seluas 432.884 Ha, kawasan pertanian (903.450 Ha), kawasan perikanan, kawasan pertambangan (400.000 Ha), kaw industri, kaw pariwisata, kaw permukiman (59.188Ha), dan kawasan peruntukan lainnya seluas 750 Ha. Berdasarkan penentuan kriteria lahan kritis sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Nomor SK.167/V-set/2004 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Data Spasial Lahan Kritis, mana lahan kritis terbagi atas lima kriteria yaitu sangat kritis, kritis, agak kritis, potensial kritis, dan tidak kritis. Kriteria yang umum digunakan sebagai data lahan kritis adalah yang termasuk dalam kriteria sangat kritis (1) dan kritis (2), sedangkan kriteria agak kritis bersama-sama dengan kritis dan sangat kritis, dapat dikatakan sebagai lahan kurang produktif bila ditinjau dari aspek daya dukung/kemampuan lahan (*land capability*).

**Tabel II.65**

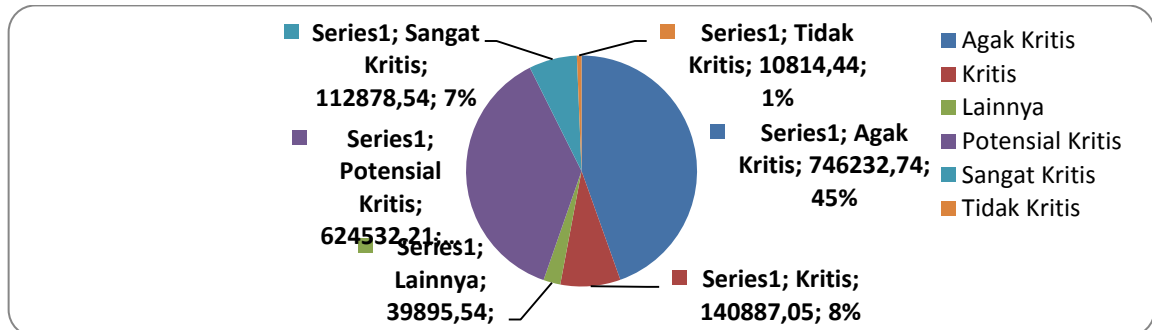
Analisis Total Kelas Tingkat Lahan Kritis Tahun 2014  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kelas Kritis	Luas (Ha)
(1)	(2)	(3)
1	Agak Kritis	746.232,74
2	Kritis	140.887,05
3	Lainnya	39.895,54
4	Potensial Kritis	624.532,21
5	Sangat Kritis	112.878,54
6	Tidak Kritis	10.814,44
Jumlah		1.675.240,51

Sumber: inventarisasi kerusakan lingkungan/lahan Prov. Kepulauan Bangka Belitung (BLHD), 2014

**Grafik II.14**

Presentase Lahan Kritis Tahun 2014 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Sumber: Inventarisasi kerusakan lingkungan/lahan (BLHD), 2014

Dapat dilihat dari presentase total lahan kritis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kelas agak kritis mendapatkan presentasi terbanyak sebesar 45 persen atau 746.232,74 Ha. Diikuti dengan potensial kritis sebesar 37 persen atau seluas 624.532,21 Ha. Sementara itu yang termasuk lahan kritis adalah seluas 140.887,05 Ha atau 8 persen. Sedangkan yang tidak kritis adalah seluas 10.814,44 Ha atau hanya 1 persen saja.

Adanya beberapa perubahan lahan kritis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di tahun 2013 ke tahun 2014 yang disebabkan banyak faktor seperti kegiatan pertambangan, industri, dan lain-lain.

Urusan Penataan Ruang, dilaksanakan dalam mendukung target sasaran pembangunan daerah yaitu, terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Capaian kinerja pembangunan pada urusan tata ruang salah satunya adalah dengan melihat kesesuaian antara perencanaan pembangunan daerah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Gambaran mengenai capaian kinerja urusan penataan ruang, adalah sebagaimana yang tertuang didalam tabel II.66 berikut.

**Tabel II.66**

Gambaran Pencapaian Kinerja Pembangunan Urusan Penataan Ruang Tahun 2012 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Indikator Kinerja Sasaran	Capaian			
	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Capaian Luas Kawasan Lindung Terhadap Luas Wilayah Bangka Belitung (%)	11.57	11.57	11.57	11.57
Ketaatan terhadap RTRW	87.50	95.00	100.00	100.00
Persentase Kawasan Strategis yang dikembangkan	n.a	3.50	6.89	17.20
Jumlah Kawasan Ekonomi Khusus yang dikembangkan	-	-	-	-

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015



Berdasarkan tabel II.65 diatas, dapat terlihat bahwa capaian kinerja urusan penataan ruang cenderung meningkat dan berada diatas target yang telah ditetapkan didalam RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada tahun 2016 telah ditetapkan 1 (satu) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata di Tanjung Kelayang Belitung. Penetapan KEK Pariwisata tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Kepulauan Bangka Belitung, terutama dalam hal penyerapan tenaga kerja.

## 2.) Pekerjaan Umum

Urusan Pekerjaan Umum dilaksanakan guna mendukung target sasaran daerah dalam meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang pembangunan. Salah satunya adalah untuk memastikan panjang jalan dan jembatan dalam kondisi mantap. Perkembangan panjang jalan berdasarkan kewenangan dan kondisi pada masing-masing jalan dan jembatan pada tahun 2016 adalah sebagaimana tertuang didalam tabel II.67 berikut:

**Tabel II.67**

Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan, Kondisi Jalan, dan Pemerintahan yang Berwenang Mengelola di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (km), 2016

No	Kondisi Jalan	Negara	Provinsi	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>1.</b>	<b>Jenis Permukaan</b>			
	Diaspal	600,4	896,33	1.496,73
	Kerikil	0,00	0,00	0,00
	Tanah	0,00	3,00	3,00
<b>2.</b>	<b>Kondisi Jalan</b>			
	Baik	539,17	387,33	926,50
	Sedang	52,72	441,89	494,61
	Rusak	7,20	58,60	65,80
	Rusak Berat	1,30	11,51	12,81

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017

Berdasarkan data diatas, terdapat 58,60 km panjang jalan provinsi dalam keadaan rusak dan 441,89 km kondisi jalan dalam keadaan sedang. Dengan kondisi yang demikian, maka peningkatan kualitas jalan harus mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah.

**Tabel II.68**

Panjang Jembatan Menurut Jenis Konstruksi dan Pemerintahan yang Berwenang Mengelola di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (km), 2016

Jenis Kontruksi		Negara	Provinsi	Jumlah Total
(1)		(2)	(3)	(5)
1. Beton+Kayu/Baja+Kayu		0,00	81,30	81,30
2. Beton Bertulang		1 804,03	2 876,90	4 680,93
3. Rangka baja		992,15	474,00	1 466,15
Jumlah/Total	2015	2 796,18	3 432,20	6 228,38
	2014	2 273,98	3 969,85	6 243,83
	2013	2 228,00	3 444,80	5 672,80
	2012	2 173,00	2 123,40	4 296,00
	2011	2 262,00	1 522,90	3 784,90

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2017

#### D. Urusan Perumahan rakyat dan kawasan permukiman

Urusan perumahan dan permukiman dilaksanakan dalam rangka untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat telah menghuni rumah tinggal sesuai dengan kriteria yang layak, yaitu diatas 7 m persegi perkapita. Gambaran mengenai perkembangan hal tersebut adalah sebagaimana disajikan pada tabel II.69.

**Tabel II.69**

Persentase Rumah Tangga dengan Luas Hunian per Kapita  $\leq 7,2 \text{ m}^2$   
Menurut Kabupaten/Kota, 2006-2015

Kabupaten / Kota	Tahun			
	2012	2013	2014	2015
Bangka	2,98	4,08	3,50	2,16
Belitung	8,08	9,05	7,02	5,84
Bangka Barat	7,35	5,85	4,59	6,82
Bangka Tengah	6,76	4,75	2,82	5,11
Bangka Selatan	7,82	6,53	6,13	5,15
Belitung Timur	8,79	7,37	7,64	7,17
Kota Pangkalpinang	6,24	6,16	5,78	7,75
Kepulauan Bangka Belitung	6,41	6,00	5,08	5,34

Sumber : SUSENAS, BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sejak tahun 2012, kecenderungan masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni cenderung menurun, namun demikian pada tahun 2014 terdapat peningkatan, meskipun pada tahun 2015 kembali mengalami penurunan.

#### E. Urusan Ketentraman, Ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

Salah satu pendukung ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Perkembangan rasio jumlah polisi pamong praja engan jumlah penduduk dapat dilihat pada tabel II.70 berikut ini.

**Tabel II.70**  
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per-10.000 Penduduk Tahun 2012 s.d 2016  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Jumlah Polisi Pamong Praja	N/A	1.053	1.097	1.229	1238
2.	Jumlah penduduk	1.286.551	1.315.123	1.343.881	1.372.813	1401827
3.	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per-10.000 Penduduk	N/A	8,01	8,16	8,95	8,83

*Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017*

Dari tabel di atas, tergambar bahwa rasio jumlah polisi pamong praja per jumlah penduduk terjadi peningkatan sampai dengan tahun 2015 yaitu 2013 sebesar 8,01 meningkat menjadi 8,95 pada tahun 2015, pada tahun 2016 rasio menjadi 8,83 atau terjadi sedikit penurunan dari tahun sebelumnya. Walaupun kenaikan ini relatif kecil namun dapat dijadikan patokan bahwa Pemerintah daerah memberikan perhatian yang cukup terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

**Tabel II.71**  
Rasio Pos Siskamling per jumlah desa Tahun 2012 s.d 2016  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Jumlah Pos Siskamling	N/A	609	721	988	1.138
2.	Jumlah Desa	380	381	387	386	386
3.	Rasio Jumlah siskamling	N/A	1,60	1,86	2,56	2,95

*Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017*

Rasio pos siskamling per jumlah desa/kelurahan sebagai perbandingan jumlah pos siskamling selama 1 (satu) tahun dengan jumlah desa/kelurahan, bertujuan untuk menggambarkan ketersediaan pos siskamling di setiap desa/kelurahan. Dari tabel di atas, terlihat tren peningkatan rasio jumlah Pos Siskamling di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dimana pada tahun 2013 sebesar 1,60 meningkat sehingga pada tahun 2016 menjadi 2,95. Hal ini menunjukkan upaya penyediaan salah satu fasilitas dalam menjaga keamanan lingkungan terus ditingkatkan.

## F. Urusan Sosial

Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967), Pembangunan dibidang kesejahteraan sosial terus menerus diupayakan agar berbagai masalah sosial seperti kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketunaansosial, penyimpangan perilaku, ketertinggalan/keterpencilan, serta korban bencana dan akibat tindak kekerasan dapat ditangani secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan. Hal ini merupakan wujud komitmen baik pemerintah maupun pemerintah daerah yang harus dilakukan lebih baik lagi untuk meningkatkan harkat dan martabat sebagian warga masyarakat yang menyandang permasalahan sosial, meningkatkan kualitas dan perluasan jangkauan pelayanan sosial dengan menekankan pada efektifitas penanganan masalah kemiskinan dan masalah sosial yang mendesak.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung meningkat, hal tersebut dapat dilihat pada Tabel II.72 dimana tahun 2012 jumlah PMKS sebesar 29.177 orang, tahun 2013 meningkat menjadi 38.506 orang, tahun 2015 sebesar 52.346 orang dan tahun 2016 turun menjadi 49.579.

**Tabel II.72**

Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Tahun 2012 s.d 2016  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	29.177	38.506	43.968	52.346	49.579

Sumber: Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

## G. Urusan Tenaga Kerja

Pembangunan Ketenagakerjaan diarahkan untuk mencapai sasaran peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ditandai dengan meningkatnya penyerapan tenaga kerja dan meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja. Dalam setiap pelaksanaan kegiatan harus memperhatikan peningkatnya daya saing dan produktivitas tenaga kerja, peningkatnya pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, terwujudnya hubungan industrial yang harmonis dan meningkatnya peran kelembagaan industrial dan pengembangan Jamsostek, peningkatnya penerapan pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di tempat kerja, perlindungan tenaga kerja dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan, terwujudnya permukiman dalam kawasan transmigrasi sebagai tempat tinggal dan tempat berusaha yang layak.

Dalam menggambarkan seberapa Penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu daerah dapat dilihat dengan pendekatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dimana TPAK merupakan persentase antara jumlah angkatan kerja penduduk usia 15 tahun ke atas dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas. Dari Tabel II.73, tren TPAK dari tahun 2013-2017 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung fluktuatif dimana tahun 2015 sebesar 66,71 dan tahun 2016 naik menjadi 68,93 sedangkan tahun 2017 turun menjadi 66,72.

**Tabel II.73**  
Perkembangan Tingkat Pengangguran dan TPAK Tahun 2013 s.d 2017  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Tingkat partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	65.30	65.45	66.71	68,93	66,72
2.	Tingkat Pengangguran	3.70	5.14	6.29	2,6	3,78

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Agustus 2018

Berdasarkan Tabel II.74, penyerapan tenaga kerja terbesar pada tahun 2017 terjadi pada sektor pertanian yaitu sebesar 219.002. Pada sektor sekunder di tahun 2017 mengalami penurunan di industri pengolahan, listrik, gas dan air dibandingkan tahun 2016 dan pada bangunan di tahun 2017 terjadi peningkatan. Sedangkan sektor tersier pada tahun 2017 terjadi peningkatan di industri perdagangan, hotel dan restoran serta angkutan dan telekomunikasi, pada lapangan pekerjaan utama keuangan dan jasa perusahaan, jasa kemasyarakatan terjadi penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

**Tabel II.74**  
Data Penduduk yang berkeja menurut lapangan pekerjaan utama  
Tahun 2013 s.d 2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Lapangan Pekerjaan Utama	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	<b>Sektor Primer</b>					
1.	Pertanian	178.107	189.774	228.578	220.658	219.002
2.	Pertambangan	121.104	105.754	76.399	78.856	91.438
	<b>Sektor Sekunder</b>					
1.	Industri Pengolahan	35.151	35.500	35.225	55.056	42.623
2.	Listrik, Gas dan Air	1.317	1.250	2.870	6.240	2.502
3.	Bangunan	34.101	31.168	28.787	22.041	35.520
	<b>Sektor Tersier</b>					
1.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	134.514	123.591	122.789	148.989	124.065
2.	Angkutan, Pergudangan dan Telekomunikasi	16.820	17.294	18.175	19.766	17.409
3.	Keuangan dan Jasa Perusahaan	14.886	13.209	13.139	13.662	11.856
4.	Jasa Kemasyarakatan	87.848	86.683	97.987	121.562	118.203
	<b>Total Prov. Kepulauan Bangka Belitung</b>	<b>623.758</b>	<b>604.223</b>	<b>623.949</b>	<b>686.830</b>	<b>672.618</b>

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Agustus 2017

Berdasarkan Tabel II.75 secara kewilayahan untuk Tingkat partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menurut Kabupaten/Kota dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, berfluktuasi untuk semua Kabupaten Kota. Untuk tahun 2015 TPAK tertinggi di Kabupaten Bangka Selatan sebesar 70.32 % dan terendah di Kabupaten Bangka sebesar 63,88 % sedangkan untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2016 sebesar 68,93 %.

**Tabel II.75**  
Data TPAK Tahun 2012 s.d 2016 Menurut Kabupaten/Kota  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Kab. Bangka	64.24	64.40	65,45	63,88	n/a
2.	Kab. Belitung	67.83	67.81	63.48	67,64	n/a
3.	Kab. Bangka Barat	65.42	69.17	67.12	65,47	n/a
4.	Kab. Bangka Tengah	64.00	62.13	62.48	66,48	n/a
5.	Kab. Bangka Selatan	65.00	64.53	67.08	70,32	n/a
6.	Kab. Belitung Timur	67.00	64.85	68.79	68,11	n/a
7.	Kota Pangkal Pinang	67,51	64.68	64.90	67,41	n/a
	<b>Prov. Kep. Bangka Belitung</b>	<b>65.67</b>	<b>65.32</b>	<b>65.45</b>	<b>66,71</b>	<b>68,93</b>

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

Penduduk yang bekerja menurut kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir relatif meningkat, kecuali Kabupaten Bangka dimana pada tahun 2014 sebesar 132.128 orang turun pada tahun 2015 menjadi 131.559 orang sedangkan secara kumulatif untuk wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Penduduk yang bekerja untuk kurun 5 (lima) tahun terkahir relatif meningkat dan untuk tahun 2016 penduduk yang bekerja sebanyak 686.830 orang.

**Tabel II.76**  
Data Penduduk yang Bekerja Tahun 2012 s.d 2016 Menurut Kabupaten/Kota  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Kab. Bangka	130.059	132.508	132.128	131.559	n/a
2.	Kab. Belitung	74.430	81.599	82.200	83.903	n/a
3.	Kab. Bangka Barat	81.732	88.601	84.219	86.480	n/a
4.	Kab. Bangka Tengah	73.428	73.376	74.102	79.971	n/a
5.	Kab. Bangka Selatan	80.044	82.739	88.740	94.575	n/a
6.	Kab. Belitung Timur	53.502	53.758	58.259	59.159	n/a
7.	Kota Pangkal Pinang	84.907	84.205	84.575	88.302	n/a
	<b>Prov. Kep. Bangka Belitung</b>	<b>583.102</b>	<b>596.786</b>	<b>604.223</b>	<b>623.949</b>	<b>686.830</b>

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) adalah perbandingan antara jumlah pencari kerja dengan jumlah angkatan kerja, yang merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan dari Kepala daerah dan menjadi salah satu sasaran ekonomi makro dari Pemerintah Daerah. Dari Tabel II.77, Tingkat pengangguran Terbuka di Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan tren peningkatan selama lima tahun terakhir. Untuk Tahun 2015 terdapat 2 (dua) Kabupaten dan 1 (satu) Kotamadya yang memiliki TPT yang tinggi yaitu Kabupaten Bangka sebesar 8,87%, Kabupaten Bangka Tengah sebesar



6,58 % dan Kota Pangkalpinang sebesar 10,64 %. Sedangkan untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 6.29 % dan secara Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung lebih tinggi dari rata-rata Nasional dimana rata-rata nasional sebesar 6,18 %.

**Tabel II.77**

Data Tingkat Pengangguran Tahun 2012 s.d 2016 Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Kab. Bangka	2,77	4,26	8,36	8,87	n/a
2.	Kab. Belitung	1,76	2,59	3,03	4,57	n/a
3.	Kab. Bangka Barat	3,79	3,91	1,21	5,92	n/a
4.	Kab. Bangka Tengah	4,54	3,47	5,64	6,58	n/a
5.	Kab. Bangka Selatan	3,83	1,64	3,26	2,01	n/a
6.	Kab. Belitung Timur	2,42	2,20	2,61	2,55	n/a
7.	Kota Pangkal Pinang	5,52	6,66	8,84	10,64	n/a
	<b>Prov. Kep. Bangka Belitung</b>	<b>3,49</b>	<b>3,70</b>	<b>5,14</b>	<b>6,29</b>	<b>2,60</b>

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

Berdasarkan Tabel II.78, dapat dilihat jumlah pengangguran pada tahun 2015 terbesar di Kabupaten Bangka yaitu 12.805 orang dan terendah pada Kabupaten Belitung Timur sebanyak 1.550 orang, sedangkan secara kumulatif untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 41.893 orang meningkat dari tahun 2014 yang hanya sebanyak 32.736 Orang. Hal ini menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja yang masih rendah dan tidak dapat menampung banyaknya angkatan kerja dan pencari kerja terutama mereka yang datang dari wilayah pedesaan yang masih beranggapan bahwa di wilayah perkotaan lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan di bandingkan wilayah pedesaan.

**Tabel II.78**

Data Pengangguran Tahun 2012 s.d 2016 Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Kab. Bangka	3.341	5.900	12.053	12.805	n/a
2.	Kab. Belitung	2.327	2.169	2.635	4.015	n/a
3.	Kab. Bangka Barat	3.177	3.605	1.083	5.443	n/a
4.	Kab. Bangka Tengah	2.604	2.639	4.430	5.631	n/a
5.	Kab. Bangka Selatan	3.432	1.377	2.769	1.936	n/a
6.	Kab. Belitung Timur	1.348	1.211	1.562	1.550	n/a
7.	Kota Pangkal Pinang	4.835	6.013	8.204	10.513	n/a
	<b>Prov. Kep. Bangka Belitung</b>	<b>22.064</b>	<b>22.657</b>	<b>32.736</b>	<b>41.893</b>	<b>18.343</b>

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

## H. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

### 1) Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik yang mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi melalui pengambilan keputusan serta penguasaan terhadap sumberdaya ekonomi. IPG juga termasuk salah satu indikator atau indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia. Gambaran terhadap perkembangan pemberdayaan dan pembangunan gender di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel II.79 dan Tabel II.80.

**Tabel II.79**  
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Tahun 2011 s.d 2015  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NO	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Bangka	52,85	58,07	59,40	62,01	61,32
2.	Belitung	49,21	49,37	48,56	40,16	52,00
3.	Bangka Barat	56,29	58,28	54,81	55,57	59,37
4.	Bangka Tengah	44,54	45,08	54,93	54,29	50,71
5.	Bangka Selatan	43,77	45,79	37,80	37,13	37,93
6.	Belitung Timur	47,21	49,65	50,11	63,33	63,04
7.	Kota Pangkal Pinang	50,01	55,20	56,10	55,44	55,22
	<b>Prov. Kepulauan Bangka Belitung</b>	<b>56,03</b>	<b>56,54</b>	<b>57,29</b>	<b>56,12</b>	<b>56,29</b>

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

**Tabel II.80**  
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2011 s.d 2015  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Bangka	85,86	86,03	86,77	86,92	87,17
2.	Belitung	85,59	85,73	86,61	87,19	87,98
3.	Bangka Barat	87,28	87,86	88,11	88,56	88,71
4.	Bangka Tengah	89,26	90,06	90,28	90,60	90,61
5.	Bangka Selatan	79,75	81,24	82,17	82,52	82,83
6.	Belitung Timur	83,95	84,17	84,29	85,37	86,10
7.	Kota Pangkal Pinang	82,05	92,08	92,30	92,47	93,09
	<b>Prov. Kepulauan Bangka Belitung</b>	<b>87,10</b>	<b>87,54</b>	<b>87,73</b>	<b>87,74</b>	<b>88,37</b>

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa angka pemberdayaan gender (IDG) dan pembangunan gender (IPG) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan trend yang semakin meningkat setiap tahunnya. Meskipun secara nasional, IDG masih berada

di peringkat 32 dan IPG di peringkat 27 dari 34 Provinsi. Namun hal ini berarti bahwa tingkat partisipasi perempuan yang antara lain tercermin pada bidang politik melalui jumlah keterwakilan perempuan yang didalam keanggotaan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami peningkatan. Pada periode 2004-2009 berjumlah 1 (satu) orang, meningkat menjadi 5 (lima) orang pada periode 2009-2014. Sementara itu peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi juga semakin meningkat yang ditandai dengan tingginya angka angkatan kerja yang bekerja dari jenis kelamin perempuan.

## 2) Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. Pekerja perempuan di lembaga pemerintahan dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah dan persentase perempuan yang menempati posisi Eselon I – IV.

Gambaran terhadap perkembangan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana yang ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel II.81**

Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Tahun 2014 s.d 2016  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon II	5	4	4
2.	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon III	51	52	49
3.	Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon IV	191	199	191
4.	Pekerja perempuan di pemerintah	1.354	1.407	1.403
5.	Jumlah pekerja perempuan	204.416	224.467	
6.	Persentase pekerja perempuan di lembaga pemerintah	0,66	0,63	0,42

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami penurunan dari 0,66 pada tahun 2014 menjadi 0,63 di tahun 2015, meskipun jumlah pekerja perempuan di pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan peningkatan dan jumlah perempuan yang bekerja juga mengalami peningkatan. Hal ini akan berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat khususnya keluarga.

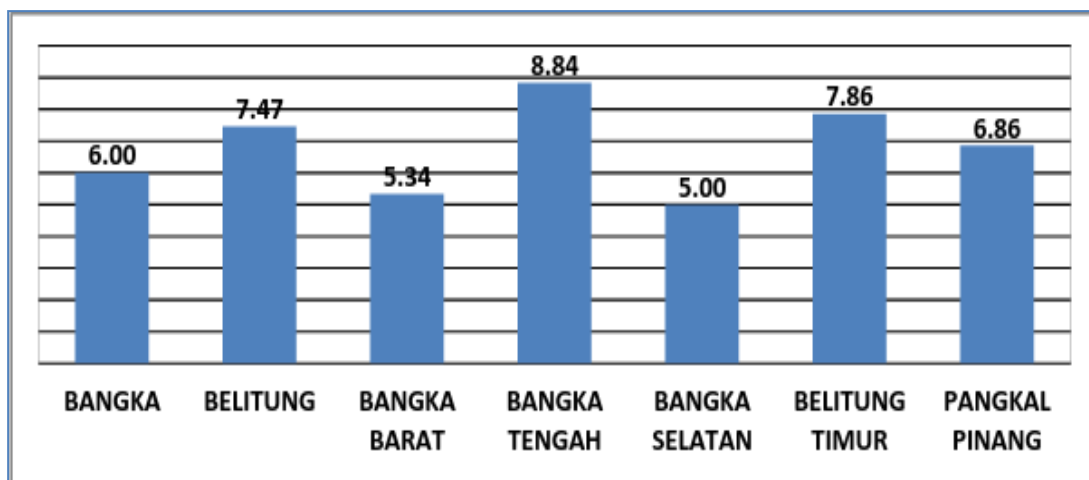
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah menurut Kabupaten/Kota tahun 2014 disajikan dalam Tabel II.82 dan Grafik II.18 berikut:

**Tabel II.82**  
**Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Tahun 2014**  
**Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah	Jumlah Pekerja Perempuan	Persentase pekerja perempuan di lembaga pemerintah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kabupaten Bangka	2.761	46.031	6,00
2	Kabupaten Bangka Barat	1.609	30.123	5,34
3	Kabupaten Bangka Selatan	1.415	28.303	5,00
4	Kabupaten Bangka Tengah	1.807	20.447	8,84
5	Kabupaten Belitung	1.986	26.591	7,47
6	Kabupaten Belitung Timur	1.609	20.479	7,86
7	Kota Pangkalpinang	2.224	32.442	6,86
	<b>Jumlah</b>	<b>13.411</b>	<b>204.416</b>	<b>6,56</b>

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

**Grafik II.15**  
**Grafik Persentase Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah Tahun 2014**  
**Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**



Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Berdasarkan gambar II.18 Grafik Persentase Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah tahun 2014 berdasarkan Kabupaten/Kota menunjukkan persentase pekerja perempuan di lembaga pemerintah yang tertinggi ada di Kabupaten Bangka Tengah dengan angka 8,84 dan yang terendah di kabupaten Bangka Selatan dengan angka 5,00.

### 3) Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Rasio KDRT adalah jumlah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilaporkan dalam periode 1 (satu) tahun per 1.000 rumah tangga, gambaran terhadap perkembangan Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana yang ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel II.83**  
Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Tahun 2011 s.d 2015  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Jumlah KDRT	N/A	135	115	84	88
2.	Jumlah Rumah Tangga	N/A	352.668	371.242	368.504	345.928
3.	Rasio KDRT		0,038	0,031	0,023	0,025

*Sumber: Profil Gender Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2016*

Berdasarkan Tabel II.83 jumlah Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2012-2015 mengalami penurunan dari 135 ditahun 2012 menjadi 88 di tahun 2015.

## I. Urusan Pangan

Data ketersediaan pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 – 2017 dapat dilihat dalam Tabel II.84 berikut

**Tabel II. 84**  
Data Ketergantungan Beras 2013-2017  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Penduduk (Jiwa)	1.315.123	1.343.881	1.372.813	1.401.827	1.428.275
2	Kebutuhan Beras/ Tahun	120.073	124.621	117.535	119.663	122.283
3	Produksi Bersih Beras (ton)	16.652	16.873	15.838	20.706	N/A
4	Kondisi ketersediaan (%)	13,87	13,54	13,48	17,30	N/A
5	Ketergantungan (%)	86,13	86,46	86,52	82,70	N/A

*Sumber: Dinas Pangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018*

Permasalahan umum terkait ketahanan pangan adalah masih rendahnya produksi pangan (utamanya beras) yang mampu dihasilkan oleh petani lokal serta tingginya ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah. Sedangkan kebutuhan beras setiap tahunnya semakin meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk. Tabel II.79 menunjukkan meskipun terjadi penurunan tingkat ketergantungan dari angka 86,13 % pada tahun 2013 menjadi 82,70 % pada tahun 2016 namun angka ini masih cukup tinggi.

**Tabel II.85**  
Data Produksi Padi (Ton) Kabupaten Kota Tahun 2013-2106  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Kab/ Kota	Tahun			
		2013	2014	2015	2016
1	Kabupaten Bangka	3.728	4.681	9.303	6.862
2	Kabupaten Bangka Tengah	588	470	365	884
3	Kabupaten Bangka Barat	4.846	6.296	3.753	6.171
4	Kabupaten Bangka Selatan	16.046	7.803	8.002	16.728
5	Kabupaten Belitung	1.785	1.614	1.477	1.557
6	Kabupaten Belitung Timur	1.487	2.617	4.170	2.186
7	Kota Pangkalpinang	-	-	-	-

*Sumber: Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017*

Tabel II.85 menunjukkan produksi padi pada tiap kabupaten setiap tahunnya mengalami peningkatan/penurunan produksi yang berfluktuatif yang dipengaruhi beberapa kendala antara lain faktor cuaca, hama penyakit dan kendala teknis lainnya.

**Tabel II.86**  
Data Ketersediaan Pangan 2012-2016  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Keterangan	Satuan	Tahun				
			2012	2013	2014	2015	2016
1	Ketersediaan Beras (Lokal)	Ton/Thn	8.937,15	13.102,15	16.652,00	16.873,00	15.838,00
2	Ketersediaan Beras (Import)	Ton/Thn	128.524,00	77.592,00	46.420,00	95.390,00	125.011,00
3	Ketersediaan Beras (Lokal + Import)	Ton/Thn	137.461,00	90.694,00	63.072,00	112.263,00	140.849,00
4	Kebutuhan Beras (HBKN)	Ton/Thn	113.304,00	120.073,00	115.816,00	117.376,00	119.854,00
5	Ketersediaan Energi	Kkal/Kap/Hari	2.221,00	4.300,00	2.768,82	2.437,20	2.490,00
6	Ketersediaan Protein	Gram/Kap/Hari	92,80	75,71	65,07	79,38	71,56
7	Ketersediaan Lemak	Gram/Kap/Hari	56,93	345,23	120,53	144,63	76,55
8	PPH Ketersediaan	Skor	93,10	70,00	57,24	78,50	78,78

*Sumber: Dinas Pangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017*

Berdasarkan tabel II.86 diatas Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2012-2016 ketersediaan energi ideal maupun protein ideal telah terpenuhi. Adapun angka ketersediaan energi ideal yang dipersyaratkan adalah 2.400 kkal/Kap/Hari sedangkan angka ketersediaan idealnya adalah 63 Gram/Kap/Hari.

## J. Urusan Pertanahan

### 1) Persentase Luas Lahan Bersertifikat

**Tabel II.87**

Luas Lahan (m<sup>2</sup>) Berdasarkan Sertifikat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011-2013

No	Kabupaten/Kota	2011					2012					2013				
		HGB	HGU	HM	HP	HPL	HGB	HGU	HM	HP	HPL	HGB	HGU	HM	HP	HPL
1	Bangka	8.380	-	293.511	-	-	49.684	-	1.101.464	-	-	604.086	-	2.648.055	-	-
2	Bangka Tengah	39.464	-	1.144.196	-	-	22.440	-	1.445.234	-	-	74.197	-	2.004.134	-	-
3	Bangka Barat	-	-	27.672.000	-	-	-	-	4.290.460	-	-	25.855	-	1.694.620	-	-
4	Bangka Selatan	68.096	139.457.500	44.842.708	61.937	-	70.014	139.457.500	48.664.372	276.502	-	101.951	139.457.500	52.813.040	602.411	-
5	Pangkalpinang	264.335	-	357.960	-	-	422.363	-	657.138	-	-	732.862	-	149.645	-	-
6	Belitung	143.353	-	5.260.054	-	-	197.045	-	5.725.718	-	-	1.071.801	55.855.200	2.968.993	-	-
7	Belitung Timur	49.495	14.764.520	378.629	-	-	75.676	-	1.857.907	-	-	5.064	55.855.200	743.650	-	-
	Jumlah	573.123	154.222.020	79.949.058	61.937	-	837.222	139.457.500	63.742.293	276.502	-	2.615.816	251.167.900	63.022.137	602.411	-
	<b>Total Luas Wilayah</b>	<b>756.527.919</b>														

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

Keterangan:

HGB= Hak Guna Bangunan, HGU= Hak Guna Usaha, HM= Hak Milik, HP= Hak Pengelolaan, HPL= Hak Pengelolaan Lahan.

**Tabel II.88**

Luas Lahan (m<sup>2</sup>) Berdasar Sertifikat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2016

No.	Kab/Kot	2014					2015						2016					
		HGB	HGU	HM	HP	HPL	HGB	HGU	HM	HP	HPL	HW	HGB	HGU	HM	HP	HPL	HW
1	Bangka	92.935	-	3.012.794	-	-	662.093	128.635	1.543.303	-	-	-	1.325.862	13.370.466	1.510.640	-	550.000	-
2	Bangka Tengah	119.468	-	3.821.638	-	194.723	332.686	-	2.226.024	-	-	-	226.308	-	1.740.960	-	-	-



No.	Kab/Kot	2014					2015						2016					
		HGB	HGU	HM	HP	HPL	HGB	HGU	HM	HP	HPL	HW	HGB	HGU	HM	HP	HPL	HW
3	Bangka Barat	444.940	-	7.390.740	-	-	31.915	-	197.805	-	-	-	29.868	-	1.398.692	-	-	-
4	Bangka Selatan	104.354	139.457.500	54.831.907	977.115	-	132.438	139.457.500	59.978.053	1.496.977	-	10.842	556.199	139.457.500	64.299.906	1.768.093	-	10.842
5	Pangkalpinang	1.196.283	-	1.439.515	-	-	800.392	-	1.224.213	-	-	-	266.080	-	1.081.783	-	-	-
6	Belitung	185.019	-	10.549.495	-	-	1.352.501	-	2.766.871	-	-	-	743.381	-	2.944.824	-	-	-
7	Belitung Timur	3.278	-	866.903	-	-	598.850	657.256	1.699.841	-	-	-	377.462	572.400	2.782.879	-	-	-
	Jumlah	2.146.277	139.457.500	81.912.992	977.115	194.723	3.910.875	140.243.391	69.636.110	1.496.977	-	10.842	3.525.160	153.400.366	75.759.684	1.768.093	550.000	10.842

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

Keterangan:

HGB= Hak Guna Bangunan, HGU= Hak Guna Usaha, HM= Hak Milik, HP= Hak Pengelolaan, HPL= Hak Pengelolaan Lahan, HW= .....

**Tabel II.89**  
Persentase (%) Luas Lahan Bersertifikat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011-2013

No.	Kabupaten/Kota	2011					2012					2013				
		HGB	HGU	HM	HP	HPL	HGB	HGU	HM	HP	HPL	HGB	HGU	HM	HP	HPL
1	Bangka	2,94	-	102,91	-	-	17,04	-	377,75	-	-	202,70	-	888,57	-	-
2	Bangka Tengah	23,80	-	690,07	-	-	13,23	-	852,30	-	-	42,80	-	1.156,15	-	-
3	Bangka Barat	-	-	15.363,09	-	-	-	-	2.328,89	-	-	13,73	-	900,10	-	-
4	Bangka Selatan	38,27	78.369,36	25.199,75	34,81	-	38,16	76.004,44	26.522,12	150,69	-	54,96	75.173,57	28.468,49	324,73	-
5	Pangkalpinang	147,11	-	190,50	-	-	229,80	-	342,27	-	-	390,01	-	76,27	-	-
6	Belitung	88,00	-	3.240,00	-	-	118,00	-	3.415,00	-	-	622,00	32.423,00	1.723,00	-	-
7	Belitung Timur	45,18	13.477,67	345,63	-	-	67,59	-	1.659,39	-	-	4,52	49.887,19	664,19	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>345,30</b>	<b>91.847,03</b>	<b>45.131,95</b>	<b>34,81</b>	<b>-</b>	<b>483,83</b>	<b>76.004,44</b>	<b>35.497,72</b>	<b>150,69</b>	<b>-</b>	<b>1.330,73</b>	<b>157.483,76</b>	<b>33.876,77</b>	<b>324,73</b>	<b>-</b>
	<b>Total Luas Wilayah</b>		<b>791.385,01</b>													

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

Keterangan:

HGB= Hak Guna Bangunan, HGU= Hak Guna Usaha, HM= Hak Milik, HP= Hak Pengelolaan, HPL= Hak Pengelolaan Lahan.

**Tabel II.90**

Persentase (%) Luas Lahan Bersertifikat Tahun 2014-2016 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No.	Kabupaten/Kota	2014					2015						2016					
		HGB	HGU	HM	HP	HPL	HGB	HGU	HM	HP	HPL	HW	HGB	HGU	HM	HP	HPL	HW
1	Bangka	30,52	-	989,47	-	-	212,39	41,26	495,07	-	-	-	417,29	4.208,06	475,44	-	-	-
2	Bangka Tengah	67,41	-	2.156,46	-	109,88	183,90	-	1.230,51	-	-	-	122,51	-	942,49	-	-	-
3	Bangka Barat	231,26	-	3.841,44	-	-	16,23	-	100,61	-	-	-	14,87	-	696,56	-	-	-
4	Bangka Selatan	55,07	73.595,46	28.936,26	515,65	-	68,41	72.040,16	30.983,12	773,30	-	5,60	281,38	70.551,74	32.529,41	494,48	-	5,48
5	Pangkalpinang	623,08	-	718,59	-	-	407,94	-	623,96	-	-	-	132,82	-	540,01	-	-	-
6	Belitung	122,00	-	6.929,00	-	-	885,00	-	1.810,00	-	-	-	478,00	-	1.895,00	-	-	-
7	Belitung Timur	2,86	-	740,78	-	-	510,57	550,41	1.423,72	-	-	-	309,47	469,29	2.281,59	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>1.132,21</b>	<b>73.595,46</b>	<b>44.312,00</b>	<b>515,65</b>	<b>109,88</b>	<b>2.284,45</b>	<b>72.631,83</b>	<b>36.666,99</b>	<b>773,30</b>	<b>-</b>	<b>5,60</b>	<b>1.756,35</b>	<b>75.229,09</b>	<b>39.360,49</b>	<b>494,48</b>	<b>-</b>	<b>5,48</b>
	<b>Total Luas Wilayah</b>	<b>791.385,01</b>																

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

Keterangan:

HGB= Hak Guna Bangunan, HGU= Hak Guna Usaha, HM= Hak Milik, HP= Hak Pengelolaan, HPL= Hak Pengelolaan Lahan, HW= .....

## 2) Penyelesaian Kasus Tanah Negara

**Tabel II.91**

Penyelesaian Kasus Tanah Negara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011-2013

No.	Kabupaten / Kota	2011			2012			2013		
		Kasus Terdaftar	Kasus Diselesaikan	Penyelesaian Kasus (%)	Kasus Terdaftar	Kasus Diselesaikan	Penyelesaian Kasus (%)	Kasus Terdaftar	Kasus Diselesaikan	Penyelesaian Kasus (%)
1	Bangka	-	-	-	3	1	33,3	5	-	-
2	Bangka Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Bangka Barat	-	-	-	1	-	-	1	-	-
4	Bangka Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Pangkalpinang	3	-	-	3	-	-	2	-	-
6	Belitung	3	-	-	4	-	-	7	2	42
7	Belitung Timur	2	-	-	4	1	25	1	-	-
	<b>Jumlah Kasus Terdaftar</b>	<b>8</b>			<b>13</b>			<b>16</b>		
	<b>Jumlah Kasus Diselesaikan</b>		<b>-</b>			<b>2</b>			<b>2</b>	
	<b>Penyelesaian Kasus (%)</b>			<b>-</b>			<b>15,4</b>			<b>12,5</b>

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

**Tabel II.92**  
Penyelesaian Kasus Tanah Negara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2016

No.	Kabupaten / Kota	2014			2015			2016		
		Kasus Terdaftar	Kasus Diselesaikan	Penyelesaian Kasus (%)	Kasus Terdaftar	Kasus Diselesaikan	Penyelesaian Kasus (%)	Kasus Terdaftar	Kasus Diselesaikan	Penyelesaian Kasus (%)
1	Bangka	4	-	-	5	1	20	4	2	50
2	Bangka Tengah	1	-	-	2	-	-	9	7	77,7
3	Bangka Barat	3	-	-	3	-	-	2	-	-
4	Bangka Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Pangkalpinang	6	3	50	2	-	-	12	6	50
6	Belitung	5	2	40	5	-	-	11	-	-
7	Belitung Timur	1	-	-	1	-	-	1	-	-
	<b>Jumlah Kasus Terdaftar</b>	<b>20</b>			<b>18</b>			<b>39</b>		
	<b>Jumlah Kasus Diselesaikan</b>		<b>5</b>			<b>1</b>			<b>15</b>	
	<b>Penyelesaian Kasus (%)</b>			<b>25</b>			<b>5,5</b>			<b>38,4</b>

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

### 3) Penyelesaian Izin Lokasi

**Tabel II.93**  
Penyelesaian Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Izin Lokasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2011-2013

No	Kabupaten/Kota	2011			2012			2013		
		Permohonan Izin Lokasi	Pemberian Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Izin Lokasi	Penyelesaian Izin Lokasi (%)	Permohonan Izin Lokasi	Pemberian Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Izin Lokasi	Penyelesaian Izin Lokasi (%)	Permohonan Izin Lokasi	Pemberian Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Izin Lokasi	Penyelesaian Izin Lokasi (%)
1	Bangka	-	-	-	4	4	100	-	-	-
2	Bangka Tengah	-	-	-	3	3	100	-	-	-
3	Bangka Barat	5	5	100	2	2	100	-	-	-
4	Bangka Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Kabupaten/Kota	2011			2012			2013		
		Permohonan Izin Lokasi	Pemberian Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Izin Lokasi	Penyelesaian Izin Lokasi (%)	Permohonan Izin Lokasi	Pemberian Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Izin Lokasi	Penyelesaian Izin Lokasi (%)	Permohonan Izin Lokasi	Pemberian Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Izin Lokasi	Penyelesaian Izin Lokasi (%)
5	Pangkalpinang	-	-	-	6	6	100	-	-	-
6	Belitung	-	-	-	2	2	100	-	-	-
7	Belitung Timur	5	5	100	5	5	100	-	-	-
	Permohonan Izin Lokasi	10	10		22	22		0	0	
	Pemberian Izin Lokasi	10	10		22	22		0	0	
	<b>Penyelesaian Izin Lokasi (%)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

**Tabel II.94**

Penyelesaian Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Izin Lokasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2016

No	Kabupaten/Kota	2014			2015			2016		
		Permohonan Izin Lokasi	Pemberian Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Izin Lokasi	Penyelesaian Izin Lokasi (%)	Permohonan Izin Lokasi	Pemberian Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Izin Lokasi	Penyelesaian Izin Lokasi (%)	Permohonan Izin Lokasi	Pemberian Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Izin Lokasi	Penyelesaian Izin Lokasi (%)
1	Bangka	5	5	100	5	5	100	-	-	-
2	Bangka Tengah	4	4	100	14	14	100	-	-	-
3	Bangka Barat	2	2	100	-	-	-	-	-	-
4	Bangka Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Pangkalpinang	9	9	100	2	2	100	-	-	-
6	Belitung	5	5	100	9	9	100	-	-	-
7	Belitung Timur	5	5	100	-	-	-	-	-	-
	<b>Permohonan Izin Lokasi</b>	<b>30</b>	<b>30</b>		<b>30</b>	<b>30</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Pemberian Izin Lokasi</b>	<b>30</b>	<b>30</b>		<b>30</b>	<b>30</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Penyelesaian Izin Lokasi (%)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	

Sumber: Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

## K. Urusan Lingkungan Hidup

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan urusan lingkungan hidup berpedoman pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun mengancam kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut maka upaya peningkatan pengetahuan dan penyadaran para pemangku kepentingan melalui berbagai metode dan media yang efektif perlu terus dilaksanakan. Urusan lingkungan hidup dilaksanakan untuk mencapai target daerah yaitu meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Gambaran mengenai capaian IKLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagaimana disajikan pada tabel II.95.

**Tabel II.95**  
Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2012 s.d 2016  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
IKLH	58.17	59.29	60.21	60.56	57.44

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

Berdasarkan data diatas, IKLH Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung meningkat setiap tahunnya, namun demikian peningkatan yang terjadi tidak terlalu signifikan. Dengan demikian maka masih dibutuhkan upaya yang optimal dari seleruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan IKLH di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Selanjutnya memperhatikan data pada Tabel II.96, terlihat bahwa persentase keluarga yang memiliki akses terhadap air bersih pada tahun 2014 di semua kabupaten/kota cenderung mengalami penurunan. Penurunan akses terhadap air bersih yang paling besar terjadi di Kabupaten Belitung Timur menjadi 73,82 persen diikuti Kabupaten Bangka Barat menjadi 77,58 persen. Hal ini menandakan kebutuhan masyarakat akan akses air bersih harus menjadi perhatian serius dalam pengolahan dan pemanfaatan sumber-sumber air bersih di tahun berikutnya.

**Tabel II.96**  
Perkembangan Persentase Keluarga Yang Memiliki Akses Terhadap Air Bersih  
Tahun 2012 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Bangka	81,39	87,7	73.82	75,3	<b>77,9</b>
2	Belitung	78,44	75,6	73.73	84,5	<b>74,2</b>
3	Bangka Tengah	78,87	48,2	38.68	47,7	<b>56,8</b>
4	Bangka Barat	54,66	87,4	77.58	83,7	<b>89,5</b>
5	Bangka Selatan	73,80	76,4	75.18	59,6	<b>74,8</b>
6	Belitung Timur	72,39	100	73.82	76,6	<b>76,0</b>

No	Kabupaten/Kota	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	Kota Pangkalpinang	91,84	92,0	86.72	87,7	<b>88,7</b>
	<b>Kepulauan Bangka Belitung</b>	<b>76,38</b>	<b>80,2</b>	<b>71.24</b>	<b>73,7</b>	<b>77,6</b>

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

#### L. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dari data tabel II.85 diatas terlihat rasio penduduk ber KTP meningkat, karena kepemilikan KTP meningkat. Di samping itu kepemilikan akta kelahiran juga meningkat.

**Tabel II.97**

Perkembangan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi				
	2012	2013	2014	2015	2016
Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	41	58	60	59	63
Rasio Bayi Berakte Kelahiran				95.5	95.1
Rasio Pasangan Ber-akte Nikah					
Kepemilikan KTP	551.011	740.365	765.507	761.597	837.252
Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	287	328	407	292	491
Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	2.349.199	1.269.381	1.281.099	1.292.863	1.321.117
Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	551.011	740.365	765.507	761.597	837.252

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Kependudukan, pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk, KB, 2017

#### M. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan desa telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sehubungan dengan hal tersebut, beberapa hal dan permasalahan yang harus mendapatkan perhatian oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu: kemampuan kelembagaan pemerintahan desa dalam penyusunan dokumen-dokumen perencanaan desa, kapasitas aparat pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan dan aset desa, belum dipahaminya proses penyusunan pedoman pengelolaan keuangan desa sesuai kondisi di masing-masing desa dengan tetap mempedomani peraturan perundangan, pendataan lembaga kemasyarakatan, pengembangan ada istiadat dan budaya masyarakat desaan stabilitas Lembaga Keuangan Mikro dan Pasar Desa.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah Desa atau Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan. Dari tabel di bawah menunjukkan kelompok binaan LPM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung meningkat, dimana tahun 2012 jumlah binaan LPM sebanyak 1.096 meningkat pada tahun 2017 menjadi sebesar 3.176. Kabupaten

Belitung Timur memiliki kelompok binaan LPM terbesar pada tahun 2017 yaitu sebanyak 571 LPM dan kabupaten Bangka Selatan yang paling rendah yaitu sebanyak 476 LPM.

**Tabel II.98**  
Kelompok LPM DAN PKK Tahun 2013 s.d 2017 Menurut kabupaten/kota  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/ Kota	2013		2014		2015		2016		2017	
		LPM	PKK	LPM	PKK	LPM	PKK	LPM	PKK	LPM	PKK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Bangka	158	385	482	1.231	501	1.499	527	1.642	527	1.642
2	Belitung	262	310	330	709	492	767	487	818	487	818
3	Bangka Barat	374	887	462	1.370	503	1.480	626	1.584	626	1.584
4.	Bangka Tengah	266	721	281	776	502	1.202	489	1.397	489	1.397
5.	Bangka Selatan	291	757	439	1.078	483	1.481	476	1.424	476	1.424
6.	Belitung Timur	224	534	552	960	581	1.058	571	1.056	571	1.056
	<b>Jumlah</b>	<b>1.575</b>	<b>3.594</b>	<b>2.546</b>	<b>6.124</b>	<b>3.062</b>	<b>7.487</b>	<b>3.176</b>	<b>7.921</b>	<b>3.176</b>	<b>7.921</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya di singkat PKK, adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaanya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesejahteraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan. Dari data di atas kelompok PKK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung meningkat, dimana tahun 2013 jumlah kelompok PKK sebanyak 3.594 meningkat pada tahun 2014 menjadi sebesar 6.124 pada tahun 2015 sebesar 7.487 dan pada tahun 2016 dan tahun 2017 meningkat menjadi sebesar 7.921. Sedangkan kabupaten Bangka memiliki kelompok PKK terbanyak pada tahun 2016 dan tahun 2017 yaitu sebanyak 1.642 kelompok PKK dan kabupaten Belitung yang paling rendah yaitu sebanyak 818 kelompok PKK.

## N. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

### 1) Pengendalian Penduduk

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana antara lain adalah sulitnya regenerasi kader dan keterbatasan petugas penyuluh Keluarga Berencana serta berbagai masalah terkait kesehatan reproduksi. Program Keluarga Berencana dikatakan berhasil apabila angka kepesertaan KB Mandiri tinggi, kepesertaan KB Pria tinggi, dan *unmet need* (kebutuhan keluarga berencana yang belum terpenuhi) yang rendah. Namun kondisi ini tidak terlalu memiliki pengaruh terhadap lonjakan pertumbuhan penduduk di Kepulauan Bangka Belitung, mengingat pertumbuhan penduduk di Kepulauan Bangka Belitung selain dari angka kelahiran juga disebabkan adanya migrasi penduduk dari luar Bangka Belitung.

Pertumbuhan penduduk di Kepulauan Bangka Belitung relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk nasional. Gambaran tentang laju



pertumbuhan penduduk di Kepulauan Bangka Belitung selama kurun waktu 2013 – 2017 adalah sebagaimana disajikan pada tabel II.99.

**Tabel II.99**  
Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2013 s.d 2017  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pertumbuhan (%)	2,22	2,19	2,15	2,11	2,07

*Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017*

Memperhatikan data diatas, terlihat bahwa sejak tahun 2013 terjadi trend penurunan pertumbuhan. Hal ini seiring dengan menurunnya aktivitas pertambangan di Kepulauan Bangka Belitung.

## 2) Rasio Akseptor KB

Rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor KB dalam periode 1 (satu) tahun per 1000 pasangan usia subur pada tahun yang sama. Besarnya angka partisipasi KB (*akseptor*) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk. Gambaran terhadap perkembangan Rasio Akseptor KB di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana yang ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

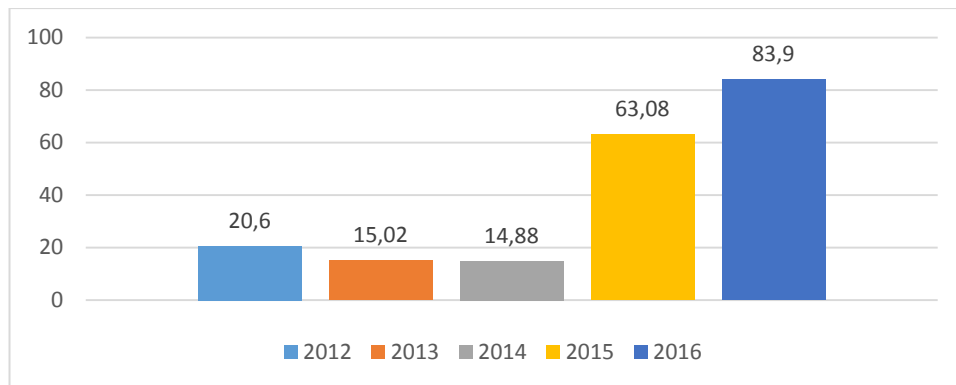
**Tabel II.100**  
Rasio Akseptor KB Tahun 2012 s.d 2016  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Jumlah akseptor KB	52.762	40.976	37.576	38.967	229.251
2.	Jumlah pasangan usia subur	256.116	272.808	252.481	279.880	273.191
3.	Rasio akseptor KB	20,60	15,02	14,88	13,92	83,92

*Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017*

Berdasarkan pada tabel II.100 pada kurun waktu 2012 - 2015 rasio akseptor KB di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami trend penurunan, namun di tahun 2016 terjadi peningkatan yang cukup tinggi dari 13,92 ditahun 2015 menjadi 83,92 pada tahun 2016. Hal ini dapat dilihat lebih jelas pada gambar berikut :

**Grafik II.16**  
**Grafik Rasio Akseptor KB Tahun 2012 s.d 2016**  
**Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (*update grafik*)**



*Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*

### 3) Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera

Berdasarkan tingkat kesejahteraan kriteria keluarga dibagi menjadi beberapa tahap diantaranya, Keluarga Pra sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu atau lebih dari 5 kebutuhan dasarnya sedangkan Keluarga Sejahtera I merupakan keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal diantaranya :

1. Melaksanakan ibadah menurut agama oleh masing-masing anggota keluarga;
2. Pada umumnya seluruh anggota keluarga makan 2 (dua) kali sehari atau lebih;
3. Seluruh anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian;
4. Bagian yang terluas darilantai rumahbukan dari tanah;
5. Bila anak sakit atau pasangan usia subur ingin ber KB dibawa kesarana/petugas kesehatan.

Gambaran terhadap perkembangan keluarga pra sejahtera dan Keluarga sejahtera I di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana yang ditampilkan dalam tabel II.101 dan Grafik II.20 sebagai berikut:

**Tabel II.101**  
**Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Tahun 2012 s.d 2016**  
**Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Jumlah keluarga pra sejahtera	10.462	8.667	10.948	20.248	20.648
2.	Jumlah keluarga sejahtera I	33.228	30.487	31.085	190.421	190.421
3.	Jumlah keluarga sejahtera I +	308.978	332.088	326.471	135.259	107.369
4.	Jumlah keluarga	352.668	371.242	368.504	345.928	318.438

*Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017*

Berdasarkan Tabel II.88 Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga sejahtera I mengalami tren Fluktuatif dari tahun 2012 sampai tahun 2014, namun dari tahun 2014 ke tahun 2015 terjadi peningkatan yang drastis, terutama meningkatnya jumlah Keluarga Sejahtera I. Artinya terjadi peningkatan jumlah keluarga Sejahtera 1+ secara drastic, namun bersamaan dengan itu terjadi juga peningkatan jumlah keluarga pra sejahtera hampir dua kali.

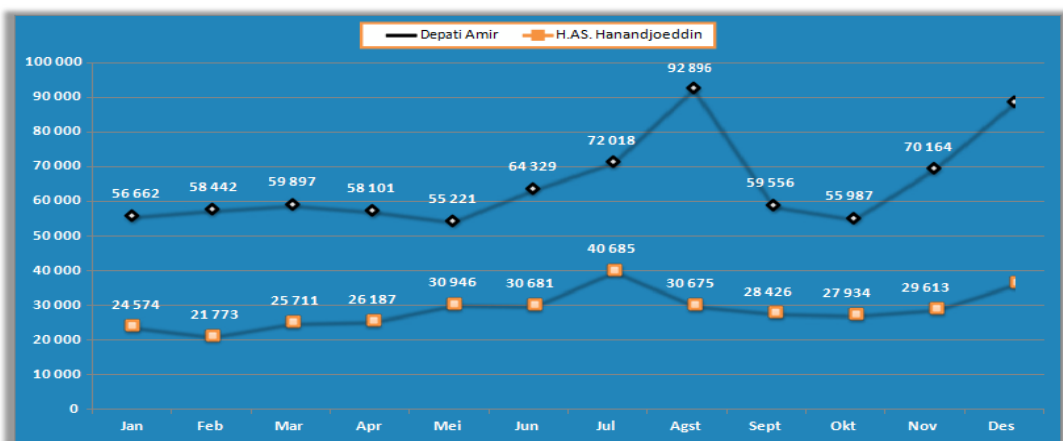
## O. Urusan Perhubungan

Perhubungan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelayanan transportasi yang handal, diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi yang aman (*security*), selamat (*safety*), nyaman (*comfortable*), tepat waktu (*punctuality*), terpelihara, mencukupi kebutuhan, menjangkau seluruh pelosok tanah air serta mampu mendukung pembangunan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pelayanan transportasi yang berdaya saing diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi yang efisien, dengan harga terjangkau (*affordability*) oleh semua lapisan masyarakat, ramah lingkungan, berkelanjutan, dilayani oleh SDM yang profesional, mandiri dan produktif. Pengembangan pembangunan infrastruktur perhubungan darat, laut dan udara dan modernisasi moda transportasi untuk membuka akses antar pulau, antar provinsi dan negara termasuk mendukung peningkatan aksesibilitas ke destinasi pariwisata daerah serta peningkatan Status Bandara Depati Amir di Pangkalan Baru, Bangka Tengah dan HAS. Hanandjoeddin di Tanjung Pandan, Belitung menjadi Bandara Internasional.

Gambaran tentang perkembangan pelaksanaan urusan perhubungan udara di Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2015, adalah sebagaimana disajikan pada Grafik II.16.

**Grafik II.17**

Jumlah Penumpang Berangkat dari Bandara Depati Amir Pangkalpinang dan Bandara H.A.S Hanandjoeddin Tanjungpandan Tahun 2015



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

Berdasarkan gambar tersebut, pada tahun 2015 kenaikan jumlah penumpang tertinggi terjadi pada bulan Juli, Agustus dan Desember. Hal ini disebabkan karena pada moment tersebut bertepatan dengan liburan anak sekolah, kuliah dan hari besar keagamaan.

Sementara itu, gambaran mengenai kondisi perhubungan laut di Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2015 adalah sebagai termuat pada tabel II.107 berikut:

**Tabel II.102**  
Kunjungan Kapal di Pelabuhan Laut Tahun 2016  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Jenis Pelayaran	Jumlah Kapal (Unit)	Berat (Grt)
(1)	(2)	(3)
1. Luar Negeri		
a. Reguler	8	4.389
b. Nonreguler	92	180.044
2. Pelayaran Dalam Negeri	1.988	2.870.313
3. Pelayaran Rakyat	316	63.288
4. Pelayaran Perintis	-	-
5. Kapal Negara/Tamu	-	-

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

Kunjungan kapal di seluruh pelabuhan di Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2016 masih didominasi oleh pelayaran dalam negeri yaitu sebanyak 1.988 unit dengan berat total 2.870.313 *Grosston*.

Disisi lain kondisi urusan perhubungan darat pada tahun 2012 – 2016 yang diukur dari jumlah kendaraan bermotor di Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagaimana tersaji pada tabel II.108.

**Tabel II.103**  
Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Berdasarkan Jenis Kendaraan  
Tahun 2012 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tahun	Jenis Kendaraan					
	Sedan	Bus	Jeep	Pickup	Truck	Motor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2016	2 359	42 262	4 169	16 633	8 166	307 604
2015	2 615	39 543	4 275	17 701	8 499	325 432
2014	2 610	35 599	4 295	17 096	8 237	328 114
2013	2 648	31 137	4 325	16 640	8 124	333 802
2012	2 672	26 006	4 036	15 604	7 585	325 196

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

Berdasarkan tabel tersebut, maka jenis kendaraan yang memiliki pertumbuhan adalah kendaraan jenis bus. Peningkatan ini diharapkan berkorelasi dengan peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor. Namun disisi lain, kendaraan roda dua mengalami kecenderungan penurunan dalam kurun waktu 2013 – 2016.

## P. Urusan Komunikasi dan Informatika

Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan komunikasi dan informatika, beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi dari pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika yang selama ini telah dilaksanakan, yaitu meliputi belum optimalnya

pengembangan infrastruktur dan layanan telekomunikasi, informatika dan penyiaran terutama di daerah pesisir, pulau-pulau kecil dan tertinggal, belum optimalnya pengembangan layanan *e-Gov* yang ditunjukkan dengan masih rendahnya instansi yang memanfaatkan layanan *e-Gov* yang terkonsolidasi, terintegrasi, aman dan berkualitas untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan berbasis Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) Nasional.

#### Q. **Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

Koperasi, usaha kecil dan menengah memiliki peranan penting terhadap pencapaian target sasaran kinerja pembangunan, terutama dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat. Beberapa hal yang masih menjadi permasalahan mendasar pada urusan ini antara lain adalah: masih lemahnya pengawasan terhadap koperasi, kapasitas SDM Koperasi yang masih belum mantap, rendahnya akses anggota koperasi dan UMKM terhadap akses permodalan yang ada, belum optimalnya sarana pemasaran yang salah satunya melalui pasar tradisional, pemberdayaan kepada koperasi dan UMKM yang juga masih belum optimal, serta pengembangan skala usaha yang masih cenderung mengalami stagnasi.

**Tabel II.104**  
Persentase Koperasi Aktif Tahun 2012 s.d 2016  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Jumlah Koperasi Aktif	738	782	798	812	821
2.	Jumlah Koperasi	950	998	1.076	1.103	1.149
3.	Persentase Koperasi Aktif	77.70	78.35	74.16	73.61	71,45

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

Persentase koperasi yang aktif di provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami penurunan, dari data di atas tahun 2013 sebesar 78, 35 % menurun pada tahun 2014 menjadi sebesar 74,16 % dan menjadi 71,45 % pada tahun 2016.

**Tabel II.105**  
Jumlah UKM non BPR/LKM Tahun 2012 s.d 2016  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Jumlah UKM	284.859	286.992	291.322	292.456	293.985

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

Jika dilihat dari tabel di atas, jumlah UKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung relatif meningkat selama lima tahun terakhir, pada tahun 2012 UKM sebanyak 284.859 meningkat pada tahun 2014 dan 2015 menjadi masing-masing 291.322 dan 292.456 dan meningkat pada tahun 2016 sebesar 293.985.

## R. Urusan Penanaman Modal

Pada tingkat nasional, arah pengembangan penanaman modal diorientasikan pada peningkatan daya saing penanaman modal, hal ini ditegaskan dalam pernyataan visi penanaman modal nasional, yaitu: “Terwujudnya daya saing penanaman modal untuk menunjang kualitas perekonomian nasional”. Peningkatan kualitas pelayanan merupakan indikator utama pencapaian daya saing penanaman modal.

Masih kurangnya kerjasama promosi penanaman modal dan masih rendahnya minat investor untuk berinvestasi, perlunya rebranding investasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menyajikan data terkini (*up to date*) peta potensi sumber daya dan peluang investasi lingkup provinsi, terkoneksi kemitraan usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dengan investor/pengusaha besar, tersedianya konsep produk turunan komoditas unggulan potensi sumber daya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tersedianya SDM promosi yang mempunyai kemampuan *marketing* investasi.

**Tabel II.106**

Jumlah Investasi dan Investor PMDN/PMA Tahun 2012 s.d 2017  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Investasi	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah Investor	46	64	104	74	164
2	Nilai Investasi (Trillin Rp)	1.706,77	1.738,75	2.056,98	1.156,00	3.061,08

Sumber: BP2TPM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

## S. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Terbatasnya pelatihan olahraga, sarana dan prasarana serta minimnya dana pembinaan, minimnya pembinaan Organisasi Kepemudaan (OKP) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, masih rendahnya prestasi olahraga pelajar daerah dalam even POPWIL (Pekan Olahraga Pelajar Wilayah) I Sumatera yang diikuti dari Provinsi Aceh, Sumut, Riau, Kepri, Sumbar, Jambi, dan Bangka Belitung yang masih menduduki peringkat 6 dari 7 provinsi, belum optimalnya koordinasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan. Dispora melaksanakan rapat koordinasi sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, itu merupakan beberapa permasalahan dalam olahraga, sedangkan pergaulan bebas, penggunaan narkoba dan degradasi moral merupakan permasalahan dalam pembinaan pemuda.

Organisasi pemuda adalah sekelompok pemuda yang berkerjasama dengan suatu perencanaanperencanaan kerja dan peraturan-peraturan, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Banyaknya jumlah organisasi pemuda menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalammemberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan dan semakin banyak jumlah organisasi pemuda menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjangpenyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai untuk memberdayakan pemuda dalam pembangunan daerah.

**Tabel II.107**  
Jumlah Organisasi dan Kegiatan Kepemudaan Tahun 2012 s.d 2016  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kegiatan	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Jumlah Organisasi Pemuda	270	270	270	270	270
2.	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	7	15	15	14	12

*Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017*

Dari data Tabel di atas, jumlah organisasi pemuda di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 5 (lima) tahun terakhir (2012 s.d 2016) relatif stabil dan tanpa penambahan yaitu sebanyak 270 Organisasi Pemuda.

**Tabel II.108**  
Jumlah Klub/Organisasi Olahraga Tahun 2012 s.d 2016  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Organisasi Olahraga	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Klub/Organisasi Olahraga	595	595	595	595	595

*Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017*

Organisasi olahraga adalah organisasi formal yang dibentuk oleh sekelompok masyarakat olahraga yang bekerjasama dengan suatu perencanaan-perencanaan kerja dan peraturan-peraturan, untuk mencapai suatu tujuan pembangunan dunia olahraga. Dari Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah klub/organisasi olahraga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 5 (lima) tahun terakhir cenderung stabil tanpa perubahan yaitu sebanyak 595 klub/organisasi.

## T. Urusan Statistik

Pada urusan statistik, terutama statistik sektoral yang dikelola oleh pemerintah daerah, ketersediaan data serta *up-dating* data dan informasi yang akurat menjadi hal yang penting untuk diperkuat, terutama kaitannya sebagai dasar perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, selain itu data tersebut dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah yang transparan dan terintegrasi secara nasional. Data dan informasi dimaksud mencakup kondisi geografis daerah, demografi, potensi sumber daya daerah, ekonomi dan keuangan daerah, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing.

**Tabel II.109**  
Buku PDRB dan Provinsi/Kabupaten/Kota Dalam Angka Tahun 2011 s.d 2015  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Buku Provinsi/Kabupaten/Kota dalam angka	8	8	8	8	8
2.	Buku PDRB	8	8	8	8	8



No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Provinsi/Kabupaten/Kota					

*Sumber : Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015*

#### U. Urusan Persandian

Persandian selama lima tahun terakhir belum memiliki struktural esselon empat yang khusus menangani urusan Persandian ini, sejak adanya perubahan terhadap SOTK di masing-masing perangkat daerah, mulai tahun 2017 Struktural Persandian muncul. Fokus urusan persandian ini dalam lima tahun kedepan adalah: (a). jumlah layanan persandian yang dimanfaatkan oleh Perangkat daerah untuk pengamanan informasi berklasifikasi dan strategis milik pemerintah daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (b). jumlah Penanganan terhadap insiden atau penyimpangan sistem informasi, semakin kecil insiden yang terjadi pada setiap tahunnya merupakan bagian dari indikator kinerja dari urusan persandian. Sehingga diharapkan pada setiap tahunnya jumlah insiden atau penyimpangan sistem informasi di lingkungan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak lebih besar dari Nol. Dan (c). adanya kebijakan teknis dan dukungan SDM dibidang keamanan informasi, akan tetapi permasalahan keamanan informasi pada implementasinya berada pada struktural yang berbeda di dalam SOTK yang diterapkan di Perangkat Daerah Komunikasi dan Informatika. Sinergitas antara keamanan informasi dan persandian sangatlah erat hal ini dapat dilihat dari dukungan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada lima tahun kedepan dalam rangka meningkatkan kemanan informasi dan persandian di Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini.

#### V. Urusan Kebudayaan

Permasalahan yang dihadapi pada urusan kebudayaan adalah kurangnya dukungan SDM yang mengerti dan mampu dalam bidang ini sehingga tumbuh kembangnya masih tertinggal dengan daerah lainnya. Permasalahan pelayanan Disbudpar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya seperti program pelestarian cagar budaya dan permuseuman yaitu belum adanya museum provinsi, program pembinaan kesenian dan perfillman yaitu belum adanya taman budaya dan pasar seni, masih terbatasnya produksi film yang mengangkat tema pendidikan dan budaya, pembangunan karakter bangsa dan penguatan kearifan lokal serta masih terbatasnya ruang pertunjukkan film.

#### W. Urusan Perpustakaan

Perpustakaan merupakan sarana dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional. Sebagai wahana belajar sepanjang hayat, perpustakaan mampu mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk itu, dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam. Sebagai salah satu upaya untuk memajukan kebudayaan nasional, perpustakaan merupakan wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa. Disinilah pentingnya keberadaan lembaga perpustakaan sebagai media belajar bagi masyarakat sehingga akan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia karena memiliki wawasan yang luas dan pemikiran yang maju untuk mendukung pembangunan daerah. Pembangunan urusan perpustakaan

masih dihadapkan pada kendala-kendala antara lain budaya baca masyarakat masih tergolong rendah karena masih dominannya budaya lisan di masyarakat, masih terbatasnya lembaga perpustakaan, sarana dan prasarana termasuk koleksi buku pustaka dan tenaga pengelola perpustakaan terbatas, baik jumlah, persebaran maupun kompetensinya.

Jumlah pengunjung perpustakaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung relatif menurun walaupun pada tahun 2013 meningkat sangat besar dari tahun sebelumnya. Tahun 2013 jumlah pengunjung perpustakaan seperti yang tergambar pada tabel di bawah sebesar 8.105 orang, menurun pada tahun 2014 menjadi 5.100 orang dan pada tahun 2015 sebanyak 2.271 orang.

**Tabel II.110**  
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahun 2011 s.d 2015  
Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Jumlah Pengunjung	N/A	2.321	8.105	5.100	2.271

*Sumber : Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015*

Perpustakaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di kategorikan menjadi 2, yaitu perpustakaan milik Pemerintah /Pemdadan Perpustakaan Non Pemda. Dari tabel di bawah ini Jumlah Perpustakaan milik pemda selama 5 (lima) tahun terakhir sebanyak 12 buah sedangkan perpustakaan non pemda terjadi penambahan dimana tahun 2013 sebanyak 1.323 buah menjadi 1.340 pada tahun 2015.

**Tabel II.111**  
Jumlah Perpustakaan Tahun 2011 s.d 2015  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Perpustakaan Milik Pemda	12	12	12	12	12
2.	Perpustakaan Non Pemda	N/A	1.323	1.323	1.340	1.340

*Sumber : Badan Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2015*

## **X. Urusan Kearsipan**

Tata kelola kearsipan daerah belum terkelola dengan baik. Hal ini terlihat dari persentase sistem kearsipan yang diterapkan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baru mencapai 70%. Selain itu, kurangnya tenaga arsiparis dan masih rendahnya kapasitas sumber daya manusia di bidang kearsipan. Hal ini terlihat dari jumlah arsiparis yang terdapat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2016 baru sebanyak 20 arsiparis. Dari sisi jumlah dibandingkan dengan jumlah Perangkat Daerah sebanyak 36, angka ini masih belum mencukupi.

### 2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan

#### A. Urusan Kelautan dan Perikanan

Sebagai provinsi yang bercirikan kepulauan, maka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki luas lautan 79,80 persen dari total wilayahnya pasti memiliki potensi perikanan yang besar, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Adapun potensi pengembangan sumberdaya kelautan dan perikanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dapat terlihat pada Tabel II.112.

**Tabel II.112**

Potensi Kelautan dan Perikanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Tahun 2012 - 2016

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	<b>Perikanan Tangkap (persentase)</b>	19,13	18,81	19,20	13,18	17,81
a	Potensi Produksi (ton)	1.059.000	1.059.000	1.059.000	1.059.000	1.059.000
b	Produksi (ton)	202.565,20	199.241,40	203.284,40	139.542,95	188.573,60
2.	<b>Perikanan Budidaya (persentase)</b>	0,62	0,22	0,32	0,33	0,35
a	Potensi Produksi (ton)	1.316.000	1.316.000	1.316.000	1.316.000	1.316.000
b	Produksi (ton)	8.113,60	2.939,10	4.198,62	4.305,29	4.618,87

Sumber : Statistik Perikanan Tangkap dan Budidaya DKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017

#### a) Perikanan Budidaya

Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2014 tercatat sebesar 4,198.62 ton. Produksi ini naik dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 2.939,08 ton. Kenaikan produksi budi daya pada tahun 2014 disumbangkan oleh produksi rumput laut.

Produksi Budidaya terbesar berdasarkan media tebar adalah budidaya kolam yaitu sebesar 2.275,14 Ton dengan komoditas terbanyak dihasilkan adalah ikan lele sebanyak 1.613,57 ton, disusul oleh Budidaya Laut sebesar 1.088 dengan komoditas utama yaitu Rumput laut Cottoni sebesar 525 Ton dan disusul Budidaya Laut lainnya dengan komoditas kerang darah sebesar 445,13 Ton. Untuk Budidaya Tambak tercatat pada tahun 2014 juga mengalami penurunan, dimana tercatat 0.12 ton dengan komoditas ikan nila.

#### b) Perikanan Tangkap

Potensi perikanan tangkap di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam skala nasional cukup besar hal ini dikarenakan luas wilayah laut Bangka Belitung yang mencapai 65,501 km<sup>2</sup> atau 80 % dari total wilayah daratan dengan panjang pantai 1,295.83 km. Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan pembagian Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) termasuk dalam WPP 711 Laut Cina Selatan yang

potensinya mencapai 1,059,000 ton/tahun (sumber : KEP MEN KP Nomor : KEPULAUAN 45/MEN/2011 tentang Estimasi potensi sumberdaya Ikan pada masing-masing wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia).

Berdasarkan data statistik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2014, jumlah produksi perikanan tangkap di laut sebesar 203.284,40 ton dan mengalami kenaikan dari produksi perikanan tangkap pada tahun 2013 sebesar 4,043 Ton dimana jumlah produksinya 199.241,40 ton. Produksi perikanan tangkap di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami fluktuatif dari tahun 2012, produksi terendah terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 139.632,96 ton dan produksi tertinggi dicapai pada tahun 2014 yaitu sebesar 203,284.4 ton, hal ini menunjukkan sektor perikanan tangkap juga memberikan kontribusi yang tidak sedikit bagi perekonomian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Melihat sektor perikanan tangkap yang cukup besar dalam memberikan kontribusi bagi perekonomian masyarakat Bangka Belitung, maka sektor perikanan tangkap diharapkan terus berkembang dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan tetap berlandaskan penangkapan secara lestari dan berkelanjutan.

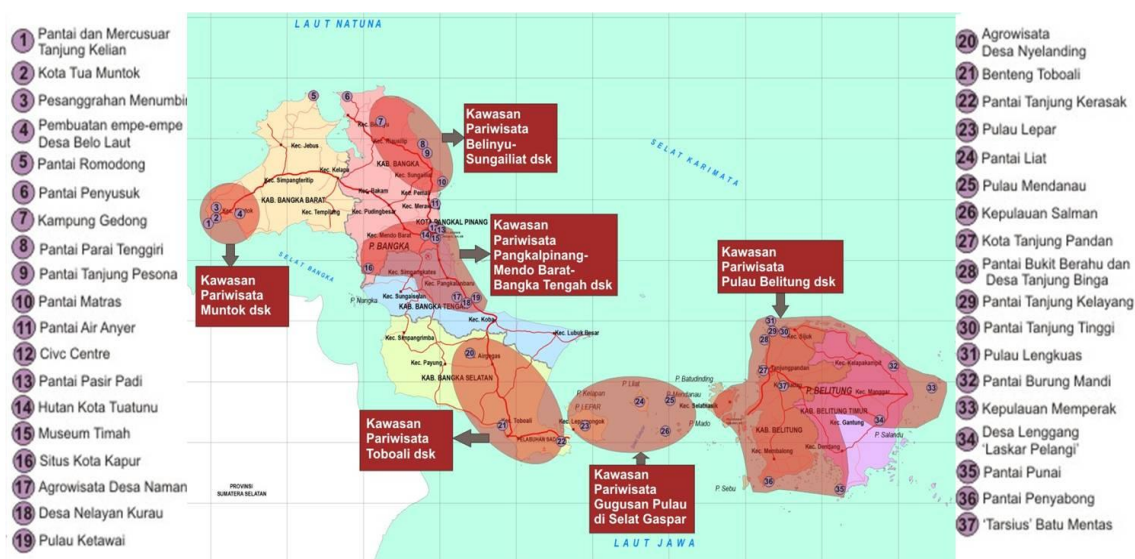
Pada tahun 2016, produksi yang dihasilkan untuk perikanan tangkap hanya 17,81 persen dari total potensi produksi. Sementara itu, untuk perikanan budidaya, hanya 0,35 persen dari total potensi. Artinya, masih sangat terbuka peluang untuk dilakukan peningkatan produksi baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya dalam rangka mensejahterakan masyarakat terutama nelayan.

## **B. Urusan Pariwisata**

Bangka Belitung sejak tahun 2010 telah ditetapkan sebagai daerah kunjungan wisata bahari ketiga di Indonesia setelah Bali dan Lombok. Selain itu, sejak tahun 2011, melalui PP Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional, telah menetapkan Kawasan Tanjung Kelayang sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Hal ini menunjukkan bahwa kepariwisataan di Kepulauan Bangka Belitung telah mendapatkan perhatian oleh pemerintah. Selain dikarenakan memiliki potensi wisata yang baik, secara geografis pun mendukung Bangka Belitung sebagai salah satu destinasi wisata di Indonesia.

Gambaran mengenai potensi pariwisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagaimana disajikan pada gambar II.7 berikut :

**Gambar II.7**  
Potensi Pengembangan Pariwisata di Kepulauan Bangka Belitung



Sumber: Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2014

Hambatan yang ada pada urusan kebudayaan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain belum sinkronnya antara struktur organisasi SKPD dengan kewenangan yang dimilikinya, khususnya pada kewenangan di bidang pariwisata di mana secara ideal meliputi 4 (empat) hal yaitu destinasi, pemasaran, industri dan kelembagaan. Sementara struktur yang ada hanya menyediakan tugas dan fungsi untuk pemasaran dan kelembagaan, sementara fungsi untuk destinasi dan industri belum mendapat porsi sebagaimana seharusnya. Akibatnya indikator kinerja menjadi tidak jelas, sehingga terjadi tumpang tindih dan ketidakjelasan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Akibatnya PD tidak dapat melaksanakan pelayanan secara optimal. Kurangnya dikenalnya beberapa wisata di beberapa lokasi di kabupaten yang berada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibandingkan dengan Kabupaten lainnya yang telah maju kepariwisataannya turut mempengaruhi kecilnya minat wisatawan untuk berkunjung, disamping juga faktor jarak tempuh dari kota serta fasilitas penunjang kepariwisataan. Selain itu masih terbatasnya kemampuan SDM kepariwisataan juga merupakan permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan sektor pariwisata.

**Tabel II.113**  
Kunjungan Wisatawan Dalam dan Luar Negeri Tahun 2012 s.d 2016  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Jumlah Wisatawan Dalam Negeri	221.747	236.370	369.743	465.554	503.965
2.	Jumlah Wisatawan Luar Negeri	1.864	2.035	3.020	4.690	12.292
3.	Jumlah	223.611	238.405	372.763	470.244	516.257

Sumber : BBDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

Sesuai dengan kategori wisatawan yang dikeluarkan oleh BPS, dimana wisatawan di bagi menjadi 2 jenis yaitu wisatawan Dalam Negeri dan wisatawan luar negeri. Jumlah

wisatawan ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk 5 (lima) tahun terakhir cenderung meningkat dan itu sangat bagus karena dapat meningkatkan perekonomian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tahun 2012 jumlah wisatawan sebanyak 223.611 orang dan ini meningkat secara bertahap setiap tahunnya menuju 516.257 orang ditahun 2016.

### C. Urusan Pertanian

Analisa berdasarkan produksi yaitu kenaikan produksi komoditi utama dan meningkatnya daya serap pasar dan lapangan usaha sektor pertanian seperti data dibawah ini :

**Tabel II.114**

Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010  
Menurut Lapangan Usaha tanpa Migas (persen) 2012 – 2016

Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertanian, kehutanan dan Perikanan	17,80	18,08	18,87	19,20	19,23

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

Beberapa komoditas strategis dan unggulan daerah sektor pertanian yang potensial untuk dikembangkan antara lain, yaitu : lada, karet, kelapa sawit, padi, jagung, ubi kayu, kacang tanah, cabai, bawang merah, sayuran dataran rendah, durian, jeruk, manggis, buah naga, nanas, sapi, ayam dan itik.

Adapun luasan lahan yang secara eksisting dan potensi yang diperuntukkan untuk pengembangan sektor pertanian, adalah sebagaimana disajikan pada tabel II.115.

**Tabel II.115**

Luas Lahan (Ha) Menurut Jenis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Penggunaan Lahan		Luas (Ha)
(1)		(2)
<b>I.</b>	<b>LAHAN PERTANIAN</b>	
I.1.	Lahan Sawah	22.771
	a. Irigasi	4.602
	b. Tadah hujan	16.397
	c. Pasang surut	270
	d. Lebak	1.502
I.2.	Lahan Bukan Sawah	1.163.881
	a. Tegal	117.376
	b. Ladang	28.147
	c. Perkebunan	367.848
	d. Hutan rakyat	42.637
	e. Pengembalaan	2.263
	f. Sementara tidak diusahakan	67.415
	g. Lain-lain	538.195
	<b>Jumlah</b>	<b>1.642.414</b>

Sumber : Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka 2017



Permasalahan-permasalahan pada urusan pertanian di Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diantaranya; tingkat ketergantungan masyarakat Bangka Belitung terhadap bahan makanan pokok terutama tanaman pangan (padi dan palawija) sangat tinggi sehingga bahan makanan tersebut sebagian besar dipasok dari luar pulau Bangka Belitung, rendahnya produksi pertanian (khususnya padi) dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, rendahnya produksi sayuran, kurangnya jaminan harga terhadap produk hortikultura, kurangnya jaminan pasar seperti manggis yang termasuk dalam komoditi unggulan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kurangnya penangkar bibit lada pada saat bibit lada dalam polybag sudah mulai menarik minat masyarakat, kurangnya penangkar bibit karet, sehingga masyarakat harus mengirim dari luar daerah yang mengakibatkan harga bibit lebih tinggi (mahal), mata rantai perdagangan Tandan Buah Segar (TBS) terlalu panjang sehingga mengakibatkan harga yang diterima petani kelapa sawit tidak sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh Tim Penetapan Harga TBS Provinsi serta kualitas TBS yang diterima Perkebunan Kelapa Sawit (PKS) sangat rendah, meningkatnya persyaratan mutu hasil pertanian, rendahnya dukungan perbankan terhadap pengembangan pertanian, tingginya angka alih guna (konversi) lahan pertanian menjadi lahan non pertanian, dan tingginya angka kerusakan lahan, pertumbuhan yang cukup pesat dari negara produsen perkebunan lainnya serta minimnya peran Indonesia dalam sistem perdagangan dunia.

satu dari negara produsen perkebunan lainnya serta minimnya peran Indonesia dalam sistem perdagangan dunia.

#### D. Urusan Kehutanan

Pada tahun 2016 tercatat 654.167,15 Ha yang terdiri dari 432.489,33 Ha Hutan Konservasi, 185.531,34 Ha Hutan Lindung, 35.453,89 Ha Hutan Produksi dan 692,58 Ha Hutan Produksi Konversi, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel II.116.

**Tabel II.116**  
Luas Hutan Tahun 2012 s.d 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Luas Kawasan Hutan	2012 (Ha)	2013 (Ha)	2014 (Ha)	2015 (Ha)	2016 (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Hutan Produksi	35.473	35.472,19	35.453,89	35.453,89	35.453,89
Hutan Lindung	189.965	189.972,25	189.983,52	185.531,34	185.531,34
Hutan Konservasi	432.884	432.882,82	432.882,82	432.489,33	432.489,33
Hutan Produksi Konversi	692,58	692,58	692,58	692,58	692,58
<b>Jumlah</b>	<b>659.014,58</b>	<b>659.019,84</b>	<b>659.012,81</b>	<b>654.167,14</b>	<b>654.167,15</b>

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

Potensi Kepulauan Bangka Belitung terhadap komoditas sektor kehutanan adalah: meranti, ramin, membalong, mandaru, kerangas, kapuk, jelutung, pulai, mahang, gelam, bakau, madu alam dan rotan.

#### E. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memiliki peran penting dalam pembangunan daerah dalam rangka mendukung perekonomian daerah, keberhasilan pembangunan di bidang Pertambangan dan Energi sangat ditentukan oleh sistem, nilai dan budaya masyarakat yang secara bersama terhimpun pada berbagai sistem kebijakan



dalam pelaksanaan program-program pertambangan dan energi yang ada, termasuk potensi swasta harus dapat berperan aktif sebagai mitra pembangunan di bidang pertambangan dan energi, terwujudnya pembangunan di bidang pertambangan dan energi juga dipengaruhi berbagai faktor yang tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor Pertambangan dan Energi melainkan juga menjadi tanggung jawab berbagai sektor terkait. Untuk kekurangan energi listrik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mendorong pihak PT. PLN Persero untuk melakukan percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 2x30 Megawatt di Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka dan 2 x 16,5 MW di Suge Kabupaten Belitung sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 71 Tahun 2006. Sementara itu, pada sektor pertambangan yang selama ini menjadi penopang utama perekonomian di Kepulauan Bangka Belitung, meskipun produksi pertambangan itu sendiri semakin berkurang saat ini, namun potensi yang dimiliki masih cukup besar. Selain pertambangan timah, juga terdapat beberapa potensi pertambangan lainnya di Kepulauan Bangka Belitung, sebagaimana ya tersaji pada tabel II.117 berikut.

**Tabel II.117**  
Potensi Bahan Galian Tahun 2016 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NO	JENIS BAHAN GALIAN	POTENSI
(1)	(2)	(2)
1	Pasir Kwarsa	57.844.000
2	Pasir Bangunan	-
3	Kaolin	22.309.264
4	Granit	-
5	Diabas	-

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

#### F. Urusan Perdagangan

Perdagangan merupakan salah satu sektor yang diharapkan oleh Kepulauan Bangka Belitung dalam menjaga stabilitas perekonomian secara makro. Kondisi perkembangan ekspor dan impor di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada Tabel II.118.

**Tabel II.118**  
Perkembangan Ekspor dan Impor Tahun 2012 s.d 2017  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (juta U\$)

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>1.</b>	<b>Ekspor ( us Dollar)</b>	<b>1.761,5</b>	<b>1.596,4</b>	<b>1.653,1</b>	<b>1.191,1</b>	<b>1.290,7</b>	<b>1.614,6</b>
	Timah	1.527,9	1.374,9	1.376,8	973,2	963,8	1.264,8
	Non Timah	233,6	221,7	276,3	217,9	326,8	349,7
<b>2.</b>	<b>Impor ( us Dollar)</b>	<b>88,9</b>	<b>49,1</b>	<b>58,9</b>	<b>49,9</b>	<b>132,0</b>	<b>70,5</b>
	Migas	15,3	14,3	20,3	31,4	41,4	52,4
	Non Migas	73,6	34,8	37,7	18,5	90,61	18,1

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

Ekspor di Kepulauan Bangka Belitung masih sangat didominasi oleh ekspor logam timah. Pada tahun 2012, ekspor Kepulauan Bangka Belitung mencapai 1.527,9 juta USD, namun pada tahun 2015 mengalami penurunan menjadi 973,2 juta USD dan pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 1.264,8 juta USD.

Sementara itu, impor Kepulauan Bangka Belitung didominasi oleh impor non migas. Pada tahun 2012, impor mencapai 73,6 juta USD dan menurun pada tahun 2013 dan 2014 meningkat menjadi 37,7 juta USD. Namun kembali menunjukkan penurunan pada tahun 2015 menjadi 18,5 juta USD. Berdasarkan kondisi ekspor dan impor Kepulauan Bangka Belitung tersebut, maka neraca perdagangan dalam kurun waktu 2012 – 2017 tersebut dalam kondisi surplus neraca perdagangan.

#### **G. Urusan Perindustrian**

Pengembangan sektor industri di Kepulauan Bangka Belitung dilakukan melalui pengembangan kawasan. Beberapa kawasan yang ada di Kepulauan Bangka Belitung yang akan dikembangkan menjadi kawasan industri antara lain adalah:

1. Kawasan industri dan pelabuhan Teluk Kelabat Belinyu, Kabupaten Bangka;
2. Kawasan pelabuhan dan industri terpadu Tanjung Berikat (Kecamatan Lubuk Besar), Kabupaten Bangka Tengah;
3. Kawasan industri dan pelabuhan terpadu (KIPT) Muntok di Kawasan Tanjung Ular di Kabupaten Bangka Barat;
4. Kawasan Bandar Udara Depati Amir Pangkalanbaru dan Bandar Udara H. AS Hanandjoeddin Tanjungpandan;
5. Kawasan Kota Terpadu Mandiri (KTM) Batu Betumpang, Kabupaten Bangka Selatan;
6. Kawasan minapolitan Tukak Sadai dan Lepar Pongok, Kabupaten Bangka Selatan;
7. Kawasan pelabuhan dan industri Sadai, Kabupaten Bangka Selatan;
8. Kawasan industri terpadu Suge dan pelabuhan Tanjung Batu di Kecamatan Badau dan Membalong Kabupaten Belitung;
9. Kawasan minapolitan Selat Nasik, Kabupaten Belitung;
10. Kawasan industri perikanan Tanjung Binga, Kabupaten Belitung;
11. Kawasan terpadu mandiri (Kecamatan Gantung) Kabupaten Belitung Timur;
12. Kawasan pelabuhan ASDP Manggar – Ketapang, Kabupaten Belitung Timur;
13. Kawasan Industri Terpadu Air Kelik (KIAK), Kabupaten Belitung Timur;
14. Kawasan pariwisata Tanjung Kelayang – Tanjung Tinggi, Kabupaten Belitung; dan
15. Kawasan lintas timur Pulau Bangka.

**Tabel II.119**  
Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah Tahun 2012 s.d 2016  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Industri Kecil	6.747	8.956	10.954	12.094	12.737
	Laju pertumbuhan	N/A	0,33	0,22	0,10	0,05
2.	Industri Menengah	80	109	103	112	106
	Laju pertumbuhan	N/A	0,36	-0,06	0,09	-0,05

*Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017*

*Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017*

Berdasarkan tabel II.119 laju pertumbuhan baik industri kecil maupun menengah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir cenderung menurun. Laju pertumbuhan Industri kecil tahun 2013 sebesar 0,33 persen dan secara konsisten turun menjadi 0,22 persen ditahun 2014 dan pada tahun 2016 menjadi 0,05 persen. Sementara itu pada kegiatan industri menengah, laju pertumbuhan pada tahun 2013 mencapai 0,36 persen dan menunjukkan penurunan jumlah di tahun 2014 dengan persentase pertumbuhan -0,06 persen, tumbuh sedikit ditahun 2015 sebesar 0,09 persen dan tumbuh negatif sebesar -0,05 persen di tahun 2016.

## H. Urusan Transmigrasi

Beberapa permasalahan di bidang ketransmigrasian yang masih dijumpai, diantaranya adalah terkait tidak seimbangnya animo masyarakat dengan kesempatan bertransmigrasi, masih banyak lokasi yang dicadangkan maupun dikembangkan belum *clear and clean*, masih rendahnya partisipasi daerah dan swasta dalam pembangunan transmigrasi, masih banyaknya lokasi transmigrasi yang tidak berkembang, rendahnya kualitas sarana dan prasarana di lokasi.

Sedangkan upaya peningkatan daya saing bidang ketransmigrasian diarahkan pada:

1. Pembangunan kawasan transmigrasi yang potensial dan layak dikembangkan, tidak tumpang tindih dengan peruntukan lainnya.
2. Pembangunan kawasan perbatasan, daerah tertinggal, dan kawasan strategis secara terintegrasi dengan sektor lainnya.
3. Pengembangan kawasan transmigrasi yang telah ada menjadi pusat pertumbuhan atau mendukung pusat pertumbuhan yang ada.
4. Peningkatan daya tarik desa di kawasan transmigrasi.
5. Membangun keterkaitan antara Kota dan desa di kawasan transmigrasi.

### 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

#### 2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

##### A. Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita menggambarkan jumlah pengeluaran rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengeluaran konsumsi perkapita

juga dapat mengindikasikan tingkat kesejahteraan masyarakat. Pengeluaran konsumsi perkapita di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disajikan pada Tabel II.120.

**Tabel II.120**  
Angka Konsumsi RT per Kapita Tahun 2012 s.d 2016  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Rata rata pengeluaran per kapita	867.065	951.307	1.023.121	1.118.101	1.211.879

Sumber: Bangka Belitung Dalam Angka, 2017

Kemampuan ekonomi rumah tangga melalui cara penggunaan pendapatan yang dibelanjakan/pengeluaran untuk kebutuhannya, maka rata-rata pengeluaran per kapita pengeluaran konsumsi rumah tangga cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya dalam kurun waktu lima tahun, yaitu dari Rp. 867.2065 pada tahun 2012 menjadi Rp. 1.211.879 pada tahun 2016.

## B. Nilai Tukar Petani

Nilai tukar petani memberikan gambaran tentang kemampuan petani dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran kebutuhannya. Nilai tukar petani juga dapat mengindikasikan tingkat kesejahteraan petani. Berdasarkan data dapat diketahui bahwa kecenderungan nilai tukar petani di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami peningkatan dengan Rasionisasi tukar petani ditampilkan pada Tabel II.121.

**Tabel II.121**  
Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2012 s.d 2016  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Indeks Yang Diterima Petani (It)	128,47	112,62	121,95	120,77	116,43
2	Indeks Yang Dibayar Petani (Ib)	128,14	110,89	116,47	119,09	122,09
3	Rasio	1,003	1,016	1,05	1,01	0,96

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

Berdasarkan tabel II.121 maka diperoleh kondisi bahwa dalam kurun waktu 2013-2017 menunjukkan trend yang terus meningkat dan pada tahun 2015 NTP di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah berada pada angka 1,05. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan petani yang diindikasikan dengan Nilai Tukar Petani sudah semakin sejahtera.

## C. Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (persentase konsumsi RT untuk non pangan)

Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita (persentase konsumsi RT untuk non pangan) menjelaskan berapa besar konsumsi rumah tangga non pangan perkeluarga per tahun. Sebagaimana diperlihatkan pada tabel II.122 dapat dijelaskan bahwa konsumsi

rumah tangga non pangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2012 s.d. 2015 yaitu sebesar Rp. 8.339.273 pada tahun 2012 menjadi sebesar Rp. 9.286.512 pada tahun 2015. Namun menurun signifikan di tahun 2016 menjadi 615.498. Selain itu, dilihat dari rasio perbandingan antara total pengeluaran dan total pengeluaran konsumsi RT Non-Pangan sepanjang kurun waktu lima tahun relatif konstan.

**Tabel II.122**  
Persentase Konsumsi RT Non-Pangan Tahun 2012 s.d 2016  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Total Pengeluaran Konsumsi RT Non-Pangan	8.339.273	8.746.368	9.082.432	9.286.512	615.498
2	Total pengeluaran	15.454.545	16.063.118	16.671.131	17.264.385	1.211.879
3	Rasio	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

Selanjutnya sebagaimana diperlihatkan pada tabel II.123 menunjukkan bahwa besaran total pengeluaran non-pangan pada setiap Kabupaten/kota secara relatif sangat bervariasi. Nilai total tersebut menggambarkan pola pikir atau kebiasaan penduduk setempat terkait perilaku pengeluarannya. Apabila suatu penduduk dalam suatu wilayah/daerah nilai pengeluaran pangannya lebih besar dari pada nilai pengeluaran non-pangan, maka daerah tersebut dapat dikatakan secara relatif sebagai daerah berkembang, tetapi apabila pengeluaran pangan lebih kecil dari pada nilai pengeluaran non-pangan maka daerah tersebut dapat dikatakan relatif maju.

**Tabel II.123**  
Indikator Pengeluaran Non Pangan Perkapita Tahun 2016 Menurut Kabupaten/Kota  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	Total Pengeluaran Konsumsi RT Non-Pangan	Total pengeluaran	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kabupaten Bangka	627.426	1.205.228	
2	Kabupaten Bangka Barat	537.508	1.118.834	
3	Kabupaten Bangka Selatan	N/A	N/A	
4	Kabupaten Bangka Tengah	513.860	1.034.887	
5	Kabupaten Belitung	596.381	1.211.879	
6	Kabupaten Belitung Timur	610.456	1.206.380	
7	Kota Pangkalpinang	816.751	1.499.317	
	<b>Provinsi</b>	<b>615.498</b>	<b>1.211.879</b>	

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

#### D. Rasio daya serap tenaga kerja

Pertumbuhan investasi merupakan hal yang sangat penting dalam upaya peningkatan penyerapan tenaga kerja yang sekaligus akan mengurangi pengangguran. Adapun gambaran serapan tenaga kerja yang bekerja di perusahaan PMA/PMDN, jumlah

PMA/PMDN, dan daya serap kerja di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disajikan pada Tabel II.124.

**Tabel II.124**  
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun 2012 s.d 2016  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Jumlah tenaga kerja yang berkerja pada perusahaan PMA/PMDN	19.664	12.532	12.532	8.255	16.264
2	Jumlah seluruh PMA/PMDN	39	40	40	104	156
3	<b>Rasio daya serap tenaga kerja</b>	<b>504,20</b>	<b>313,30</b>	<b>313,30</b>	<b>79,37</b>	<b>104,26</b>

*Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017*

#### 2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

##### A. Rasio Panjang jalan per jumlah kendaraan

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dihitung untuk mengetahui tingkat ketersediaan sarana jalan dapat memberi akses tiap kendaraan. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah perbandingan panjang jalan terhadap jumlah kendaraan.

**Tabel II.125**  
Rasio Panjang Jalan per jumlah kendaraan Tahun 2012 s.d 2016  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Panjang Jalan Provinsi	899,33	899,33	899,33	899,33	899,33
2	Jumlah Kendaraan	381.099	396.676	395.951	398.065	381.193
3	<b>Rasio</b>	<b>0.0024</b>	<b>0.0023</b>	<b>0.0023</b>	<b>0.0023</b>	<b>0.0024</b>

*Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Perhubungan*

Panjang jalan

Provinsi= 899,33 km

Panjang jalan Provinsi + Negara= 1.499,73 km

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa rasio panjang jalan per jumlah kendaraan untuk 5 (lima) tahun terakhir tahun 2012-2016 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung relatif menurun dimana tahun 2012 sebesar 0,0024 meningkat menjadi 0.0024 pada tahun 2016.

**Tabel II.126**  
Rasio Panjang Jalan per jumlah kendaraan Tahun 2016 Menurut Kabupaten/Kota  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	Panjang Jalan	Jumlah Kendaraan	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kabupaten Bangka	908,57	72.179	0.0125
2	Kabupaten Bangka Barat	891.53	39.641	0.0225

No	Kabupaten/Kota	Panjang Jalan	Jumlah Kendaraan	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Kabupaten Bangka Selatan	834.02	39.143	0.0213
4	Kabupaten Bangka Tengah	410.46	40.673	0.0101
5	Kabupaten Belitung	841.16	66.072	0.0127
6	Kabupaten Belitung Timur	533.85	40.253	0.0133
7	Kota Pangkalpinang	382.13	80.272	0.0048
	<b>Provinsi</b>	<b>5.183.85</b>	<b>378.233</b>	<b>0.0137</b>

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

Memperhatikan tabel di atas menunjukkan bahwa rasio panjang jalan per jumlah kendaraan pada 2015 menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kota Pangkalpinang memiliki rasio paling rendah, hal ini karena Kota Pangkalpinang memiliki luas wilayah yang relatif kecil namun jumlah kendaraan yang sangat banyak sehingga rasionya menjadi kecil, sedangkan Kabupaten Bangka Barat memiliki rasio yang paling besar yaitu 0,0225.

**Tabel II.127**  
Jumlah Penumpang Angkutan Laut (Jiwa/Orang)

Bulan Januari- Desember- Jumlah	Jumlah Penumpang Angkutan Laut (Jiwa/Orang)									
	Kedatangan					Keberangkatan				
	2016	2015	2014	2013	2012	2016	2015	2014	2013	2012
Januari	9573	13618	14640	19594	23865	7280	15130	10532	23696	22954
Februari	5633	8870	15028	18687	23542	4875	8331	11740	22658	21451
Maret	5860	10330	20537	23120	26543	4984	9633	17285	27157	25423
April	8139	14702	21472	24595	26480	7125	14651	17423	28448	29798
Mei	13384	19126	26376	26798	30610	11921	17421	21608	33103	29037
Juni	7706	16792	38683	30239	30289	9592	18036	32948	39801	32881
Juli	31819	11763	41301	30640	30782	31664	14504	27163	37021	33245
Agustus	14469	7292	38614	38238	51273	13356	6256	38693	54071	45428
September	12098	5948	27044	20556	36249	10781	6246	21307	19804	37744
Oktober	8828	5866	29020	24924	36842	7702	5940	22685	30724	38864
November	8905	5762	24254	20703	37825	8624	5673	20179	25351	44035
Desember	14591	15229	26368	22841	34911	14422	15164	21312	27859	41942
Jumlah	141005	135298	323337	300935	461107	132326	136985	262875	369693	381733

Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

## B. Luas wilayah produktif

Luas wilayah produktif di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggambarkan ketersediaan lahan yang produktif untuk dikelola dan dikembangkan dalam rangka peningkatan produktivitas ekonomi dan kesejahteraan. Persentase seluas wilayah produktif di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disajikan pada Tabel II.128.



**Tabel II.128**

Rasio luas Wilayah Produktif Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah Produktif	Luas Seluruh Wilayah Budidaya	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kabupaten Bangka	233.977 Ha	295.068 Ha	0,79
2	Kabupaten Bangka Barat	218.878 Ha	282.061 Ha	0,78
3	Kabupaten Bangka Selatan	231.828 Ha	360.707 Ha	0,64
4	Kabupaten Bangka Tengah	164.227 Ha	212.677 Ha	0,77
5	Kabupaten Belitung	195.776 Ha	229.369 Ha	0,85
6	Kabupaten Belitung Timur	139.850 Ha	250.691 Ha	0,56
7	Kota Pangkalpinang	2.203 Ha-	11.840 Ha	0,19
	<b>Jumlah</b>	<b>1.186.652 Ha</b>	<b>1.542.414 Ha</b>	<b>0,73</b>

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

### C. Infrastruktur

Pengembangan infrastruktur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami peningkatan pembangunan. Pengembangan infrastruktur seperti jalan, prasarana transportasi, dan kelistrikan diharapkan dapat mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Gambaran perkembangan kondisi infrastruktur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditampilkan pada Tabel II.129.

**Tabel II.129**

Infrastruktur Tahun 2011 s.d 2015 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Infrastruktur	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	3,60	4,07	4,25	5,83	3,21
2.	Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bus	22	22	26	26	26
3.	Ketaatan terhadap RTRW	75	75	75	75	100
4.	Persentase Penduduk berakses air minum	15,02	15,19	29,29	64,98	46,22
5.	Rasio daya tersambung pada rumah tangga	65,69	69,9	69,13	67,95	80,96
6.	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	48,06	62,76	92,81	80,96	88,96
7.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	0,67	0,61	0,65	0,66	0,68
8.	Panjang jalan dilalui roda 4	0,87	0,84	0,93	0,95	0,90

Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

#### 2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

##### A. Angka Kriminalitas

Data dalam 5 tahun terakhir menunjukkan bahwa jumlah tindak pidana berfluktuasi dari tahun ke tahun. Demikian pula penyelesaian tindak pidana, secara umum masih berkisar

antara 50 sampai 60 persen tindak pidana yang dapat diselesaikan. Sejumlah faktor penyebab banyaknya jumlah tindak pidana dan belum maksimalnya persentase penyelesaian tindak pidana antara lain banyaknya orang yang mengalami ketertindasan akibat krisis berkepanjangan berujung pada tindak pidana. Selain itu juga dipicu oleh lemahnya kontrol sosial yang tidak diikuti dengan langkah penegakan hukum. Pada saat kontrol sosial melemah, juga terjadi demoralisasi pihak petugas yang mestinya menjaga keamanan. Aparat yang harusnya menjaga keamanan, seringkali justru melakukan tindak pelanggaran. Pada saat yang sama masyarakat belum atau tidak melihat adanya upaya yang berarti dari aparat keamanan sendiri untuk mengembalikan citranya.

**Tabel II.130**  
Jumlah dan Penyelesaian Tindak Pidana Kejahatan  
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 -2016

NO	JENIS KRIMINALITAS	TAHUN									
		2012		2013		2014		2015		2016*	
		JTP	PTP	JTP	PTP	JTP	PTP	JTP	PTP	JTP	PTP
1	Narkoba	172	157	180	158	188	197	227	192	107	54
2	Pembunuhan	9	6	9	5	9	8	9	10	2	2
3	Penculikan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Seksual	51	12	42	39	40	28	58	55	22	13
5	Penganiayaan	205	73	133	91	73	46	88	53	25	8
6	Pencurian	188	72	166	65	148	71	188	77	71	21
7	Perampokan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Pemerasan	18	3	9	4	3	2	8	6	6	2
9	Penipuan	146	78	156	52	182	82	124	63	81	20
10	Pemalsuan Uang	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
11	Pembakaran	5	1	7	6	9	9	15	8	3	0
12	Penyelundupan	0	0	3	3	5	5	5	4	3	0
13	Lain-lain	1831	1027	1949	1262	1501	834	1756	1021	495	182
<b>Total</b>		<b>2625</b>	<b>1429</b>	<b>2654</b>	<b>1685</b>	<b>2158</b>	<b>1282</b>	<b>2478</b>	<b>1489</b>	<b>816</b>	<b>302</b>

Sumber: Kepolisian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

\*Tahun 2016 data sampai dengan bulan Mei.

Keterangan:

JTP = Jumlah Tindak Pidana

PTP = Penyelesaian Tindak Pidana

Ada beberapa pandangan mengenai perbuatan apa saja yang dapat dikatakan sebagai kejahatan. Kejahatan dalam pengertian yuridis dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan yang melanggar undang-undang atau ketentuan yang berlaku dan diakui secara legal. Secara kriminologi yang berbasis sosiologis, kejahatan merupakan suatu pola tingkah laku yang merugikan masyarakat (dengan kata lain terdapat korban) dan suatu pola tingkah laku yang mendapatkan reaksi sosial dari masyarakat.

Data dalam 5 tahun terakhir menunjukkan bahwa Jumlah Tindak Pidana berfluktuasi dari tahun ke tahun. Demikian pula Penyelesaian Tindak Pidana. Secara umum masih berkisar antara 50 sampai 60 persen tindak pidana yang dapat diselesaikan. Sejumlah faktor penyebab banyaknya jumlah tindak pidana dan belum maksimalnya persentase penyelesaian tindak pidana antara lain banyaknya orang yang mengalami ketertindasan akibat krisis berkepanjangan berujung pada tindak pidana. Selain itu juga dipicu oleh

lemahnya kontrol sosial yang tidak diikuti dengan langkah penegakan hukum. Pada saat kontrol sosial melemah, juga terjadi demoralisasi pihak petugas yang mestinya menjaga keamanan. Aparat yang harusnya menjaga keamanan, seringkali justru melakukan tindak pelanggaran. Pada saat yang sama masyarakat belum atau tidak melihat adanya upaya yang berarti dari aparat keamanan sendiri untuk mengembalikan citranya.

## B. Jumlah Demo

Jumlah demonstrasi yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung relatif sedikit daripada provinsi lain. Hal ini menggambarkan bahwa kecenderungan stabilitas keamanan bermasyarakat relative lebih aman. Jumlah demo Tahun 2010–2016 masih bersifat fluktuatif yang disebabkan terjadinya gejolak di masyarakat akibat inflasi atau daya beli masyarakat yang kurang tiap tahunnya. Diharapkan tahun–tahun yang akan datang lebih kondusif lagi. Jumlah demonstrasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditampilkan pada Tabel II.131.

**Tabel II.131**

Data Demonstrasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 -2016

NO	JENIS	TAHUN				
		2012	2013	2014	2015	2016*
1	Bidang Politik	2	1	5	3	12
2	Bidang Ekonomi	8	7	10	24	15
3	Pemogokan Kerja	4	1	2	3	-
4	Jumlah unjuk rasa	14	9	17	30	17

Sumber: Kepolisian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2016

Data tahun 2016 sampai dengan bulan Mei.

## C. Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha

Perda merupakan sebuah instrument kebijakan daerah yang sifatnya formal, melalui perda dapat diindikasikan adanya insentif maupun disinsentif suatu kebijakan di daerah terhadap aktivitas perekonomian. Perda yang mendukung iklim investasi dibatasi yaitu perda terkait dengan perizinan, perda terkait dengan lalu lintas barang dan jasa, serta perda terkait dengan ketenagakerjaan. Sebagaimana diperlihatkan pada tabel II.132, dapat dijelaskan bahwa sepanjang kurun waktu 2008-2014 jumlah perda yang sahkan untuk mendukung iklim investasi sebanyak 8 Perda, mulai dari Perda pembentukan BUMD sampai dengan Perda penyertaan modal pada bank pembangunan daerah.

**Tabel II.132**

Jumlah Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Yang Mendukung Iklim Investasi

No	Nomor	Perda
1	18 Tahun 2008	Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Bumi Bangka Belitung Sejahtera
2	11 Tahun 2008	Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada PT. Bank Perkreditan
3	12 Tahun 2008	Penambahan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka

No	Nomor	Perda
		Belitung pada Bank Sumsel
4	1 Tahun 2010	Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada PT. Bank Sumsel Babel
5	3 Tahun 2010	Pembentukan BUMD PT. Penjamin Kredit Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
6	7 Tahun 2011	Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada PT. Bank Pembangunan Sumsel Bangka Belitung
7	7 Tahun 2013	Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada BUMD Perseroan Terbatas Penjamin Kredit Daerah Kepulauan Bangka Belitung
8	3 Tahun 2014	Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada PT. Bank Pembangunan Daerah

*Sumber: Biro Hukum Setda Prov. Kep. Bangka Belitung*

#### D. Kemudahan Perizinan

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada peran usaha mikro, kecil dan menengah, perlu dilakukan penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan terpadu. Dasar hukum dari pelayanan terpadu antara lain, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melayani 38 jenis perizinan guna mempermudah para pelaku usaha meningkatkan investasinya di daerah itu. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah mulai melaksanakan penyelenggaraan PTSP sejak pertengahan 2011 bertempat di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM), penyelenggaraan PTSP ini didasarkan pada Peraturan Gubernur Nomor 40 tahun 2010 tertanggal 27 Desember dengan jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan sebanyak 31 jenis baik perizinan penanaman modal maupun perizinan teknis bersifat sektoral. Kewenangan PTSP dalam pelayanan perizinan bertambah menjadi 38 jenis sejak disahkannya Peraturan Gubernur Nomor 44 tahun 2014 tertanggal 12 Mei. PTSP melayani hampir semua perizinan baik di sektor penanaman modal, komunikasi dan informatika, koperasi dan UKM, sektor kehutanan, perhubungan, kelautan dan perikanan serta sektor perindustrian dan perdagangan. Ini merupakan kebijakan pemerintah provinsi dalam memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha dalam berinvestasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dari 38 jenis perizinan hampir keseluruhannya tanpa dipungut biaya. Tercatat hanya tiga jenis perizinan yang masih dikenakan biaya yakni perizinan pembuatan izin trayek, izin sektor perikanan dan kelautan serta perizinan memperkerjakan tenaga kerja asing (IMTA). Untuk masalah perizinan tersebut pemerintah provinsi menyadari bahwa masih banyak hal yang harus dibenahi, namun di tengah keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pihaknya berkomitmen terus meningkatkan kualitas pelayanannya. Dengan adanya PTSP ini kita semua berharap semoga mutu pelayanan prima bagi masyarakat dapat berjalan secara optimal sesuai dengan mottonya yakni cepat, transparan, sederhana, mudah dan pasti.

## E. Pengenaan Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan) kepada pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Sebagaimana diperlihatkan pada tabel II.134 dapat dijelaskan bahwa selama kurun waktu 2013-2015 pajak kendaraan bermotor merupakan sumber pendapatan asli daerah yang paling dominan diikuti oleh pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Sedangkan pajak rokok dan pajak air permukaan kontribusinya masih relatif rendah dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, setiap pungutan yang membebani masyarakat baik berupa pajak atau retribusi harus diatur dengan Undang-Undang. Dasar hukum pengenaan pajak antara lain :

1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali atas UU Nomor 34 Tahun 2000 dan UU Nomer 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah; dan
3. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

**Tabel II.133**

Realisasi Pajak Daerah Tahun 2012 s.d 2016  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (dalam Rp. Juta)

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pajak Kendaraan Bermotor	151.034,97	149.719,57	162.036,29	172.239,98	171.879,40
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	143.964,32	154.884,48	139.175,29	110.239,08	111.656,78
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	135.136,44	139.313,51	163.479,97	165.429,32	151.587,72
4	Pajak Air Permukaan	3.171,79	3.544,64	4.036,07	4.860,32	5.707,53
5	Pajak Rokok	-	-	39.534,99	54.176,24	67.152,03
	<b>Jumlah</b>	<b>433.307,52</b>	<b>447.462,20</b>	<b>508.262,62</b>	<b>506.944,94</b>	<b>507.983,46</b>

Sumber : Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

Dari data realisasi pajak daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di atas menunjukkan peningkatan realisasi penerimaan pajak daerah, dimana pada tahun 2015 besar PAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 506.764.940 meningkat di tahun 2016 menjadi sebesar 507.983.460.

## F. Peraturan Daerah (Perda) yang Mendukung Iklim Usaha

Perda merupakan sebuah instrument kebijakan daerah yang sifatnya formal, melalui perda dapat diindikasikan adanya insentif maupun disinsentif suatu kebijakan di daerah terhadap aktivitas perekonomian. Perda yang mendukung iklim investasi dibatasi yaitu

perda terkait dengan perizinan, perda terkait dengan lalu lintas barang dan jasa, serta perda terkait dengan ketenagakerjaan. Sebagaimana diperlihatkan pada tabel II.134, dapat dijelaskan bahwa sepanjang kurun waktu 2008-2014 jumlah perda yang sahkan untuk mendukung iklim investasi sebanyak 8 Perda, mulai dari Perda pembentukan BUMD sampai dengan Perda penyertaan modal pada bank pembangunan daerah.

**Tabel II.134**  
Jumlah Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Yang Mendukung Iklim Investasi

No	Nomor	Perda
1	18 Tahun 2008	Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Bumi Bangka Belitung Sejahtera
2	11 Tahun 2008	Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada PT. Bank Perkreditan
3	12 Tahun 2008	Penambahan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Bank Sumsel
4	1 Tahun 2010	Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada PT. Bank Sumsel Bangka Belitung
5	3 Tahun 2010	Pembentukan BUMD PT. Penjamin Kredit Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
6	7 Tahun 2011	Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada PT. Bank Pembangunan Sumsel Bangka Belitung
7	7 Tahun 2013	Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada BUMD Perseroan Terbatas Penjamin Kredit Daerah Kepulauan Bangka Belitung
8	3 Tahun 2014	Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada PT. Bank Pembangunan Daerah
9	15 Tahun 2016	Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.

Sumber : Biro Hukum Setda Prov. Kepulauan Bangka Belitung

#### 2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

##### A. Kualitas tenaga kerja (Rasio lulusan S1/S2/S3)

Kualitas tenaga kerja di suatu daerah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan, artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu daerah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Perhitungan kualitas tenaga kerja adalah perbandingan antara banyaknya lulusan perguruan tinggi yang dimiliki daerah yang bersangkutan atau lulusan S1/S2/S3 dengan jumlah penduduk usia kerja.

**Tabel II.135**  
Rasio Lulusan S1/S2/S3 Tahun 2013 s.d 2017  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(6)	(7)
1.	Jumlah lulusan S1/S2/S3	62.519	93.524	72.763	70.792	66.678
2.	Jumlah penduduk	1.315.123	1.343.881	1.372.813	1.401.827	1.430.865
3.	Rasio lulusan S1/S2/S3 (1/2)	475,39	695,92	530,03	504,99	465,99

*Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017*

Berdasarkan Tabel II.135 di bawah dapat dijelaskan bahwa Kualitas tenaga kerja/rasio lulusan S1/S2/S3 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk 5 (lima) tahun terakhir cenderung berfluktuasi dimana tahun 2013 sebesar 475,39 per-10.000 penduduk. Namun meningkat menjadi 695,92 pada tahun 2014 dan mengalami penurunan kembali secara bertahap ditahun 2017 menjadi 465,99 per-10.000 penduduk. Penurunan ini menunjukkan bahwa daya serap tenaga kerja dengan latar pendidikan sarjana/ perguruan tinggi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menurun, walaupun sempat pada tahun 2014 rasio ini meningkat sebesar 695,92 per-10.000 penduduk. Diperlukan strategi dan kebijakan yang tepat untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing dengan kompetensi dan latar pendidikan yang sesuai dengan keinginan pengguna tenaga kerja agar dapat terserap dalam perusahaan-perusahaan, dan secara otomatis dapat meningkatkan rasio kelulusan S1/S2/S3.

#### **B. Tingkat ketergantungan (rasio ketergantungan)**

Tingkat ketergantungan merupakan rasio perbandingan antara usia tidak produktif dengan jumlah penduduk produktif. Rasio ketergantungan ini digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Berdasarkan Tabel II.136 dapat diketahui bahwa rasio ketergantungan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung mengalami penurunan selama 5 (lima) tahun terakhir, dimana pada tahun 2013 sebesar 46,83 persen dan konstan sepanjang tahun 2014 s.d. 2015, tetapi kemudian meningkat menjadi 46,92 persen. Namun pada tahun 2017 menunjukkns penurunan menjadi 46,16 persen.

**Tabel II.136**  
Rasio Ketergantungan Tahun 2013 s.d 2017 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	369.912	377.995	386.133	392.371	392.057
2.	Jumlah Penduduk Usia > 64 tahun	49.520	50.602	51.688	55.372	59.810
3.	Jumlah Penduduk Usia tidak Produktif (1)&(2)	419.432	428.597	437.821	447.743	451.867
4.	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun	895.691	915.284	934.992	954.224	978.998
5.	Rasio Ketergantungan (3)/(4)	46,83	46,83	46,83	46,92	46,16

*Sumber: BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017*



## **2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN 2017 DAN REALISASI RPJMD**

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai Tahun 2017 dan realisasi RPJMD 2012-2017 sampai dengan tahun 2016 dilakukan telaahan terhadap hasil evaluasi pencapaian kinerja pembangunan berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun 2016 dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2016 dan realisasi Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah dari laporan pertanggungjawaban APBD.

Capaian target kinerja dan penyerapan anggaran dari program/kegiatan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Triwulan IV Tahun 2017 dihitung berdasarkan laporan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2017 Triwulan IV. Persentase capaian kinerja dan penyerapan anggaran dari masing-masing Perangkat Daerah dilakukan dengan menghitung rata-rata persentase capaian masing-masing kegiatan dari tiap program Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017. Rata-rata capaian kinerja tiap Perangkat Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selanjutnya diolah menjadi rata-rata capaian kinerja dan penyerapan anggaran Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Anggaran Belanja Langsung Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.1.176.302.017.342,00, mengalami perubahan menjadi Rp.1.181.957.576.235,26 atau bertambah sebesar Rp.5.655.558.893,29 (bertambah sebesar 0,48%. Sampai dengan akhir triwulan IV terealisasi sebesar Rp.1.033.912.343.998,00 dengan rata-rata capaian anggaran sebesar 87,47% dan rata-rata capaian kinerja sebesar 89,43% dengan predikat kinerja masing-masing Tinggi.

**Tabel II.137**  
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2017

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2018	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2016	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016			TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RKPd TAHUN BERJALAN (2018)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD S/D TAHUN BERJALAN (2018)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPd TAHUN 2017	REALISASI RKPd TAHUN 2017	TINGK AT REALIS ASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2018	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2018 (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
2	1	URUSAN PENDIDIKAN											
		RUTIN											
		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%			100%	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	100%	100%			100%	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan disiplin aparatur pegawai	100%	100%	100%	100%	100%			100%	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		WAJIB											
2	1	1 PAUD	APK PAUD	50.83%	44.51%	50,83%	38,19%	75%	50.83%		50.83%	Pendidikan	Dinas Pendidikan
			Persentase PAUD terakreditasi minimal B	40%	35%	40%		0%	40%		40%	Pendidikan	Dinas Pendidikan
2	1	2 Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun	APK SD Sederajat	116,26%	116,25%	116,26%	116,24%	100%	116.26%		116.26%	Pendidikan	Dinas Pendidikan
			APM SD Sederajat	97%	96.61%	97%	96,23%	99%	97%		97%	Pendidikan	Dinas Pendidikan
			APK SMP Sederajat	98%	96.85%	98%	95,74%	98%	98%		98%	Pendidikan	Dinas Pendidikan
			APM SMP Sederajat	84%	80.07%	84%	76,14%	91%	84%		84%	Pendidikan	Dinas Pendidikan
			Rata-rata nilai UAS SD Sederajat	6,75	6,7	6,75		0%	6.75		6.75	Pendidikan	Dinas Pendidikan
			Rata-rata nilai UN SMP Sederajat	7	6,9	7		0%	7		7	Pendidikan	Dinas Pendidikan
			Persentase SD sederajat akreditasi minimal B	90%	85%	90%		0%	90%		90%	Pendidikan	Dinas Pendidikan
			Persentase SMP sederajat akreditasi minimal B	90%	85%	90%		0%	90%		90%	Pendidikan	Dinas Pendidikan
2	1	3 Pendidikan Menengah dan Tinggi	APK Pendidikan Menengah	89%	85%	89%		0%	89%		89%	Pendidikan	Dinas Pendidikan
			APM Pendidikan Menengah	75%	69.53%	75%		0%	75%		75%	Pendidikan	Dinas Pendidikan
			Nilai rata-rata UN SMA IPA	7,5	7,4	7,5		0%	7.5		7.5	Pendidikan	Dinas Pendidikan
			Nilai rata-rata UN SMK	7,3	7,25	7,3		0%	7.3		7.3	Pendidikan	Dinas Pendidikan
			Persentase SMA sederajat terakreditasi minimal B	85%	80%	85%		0%	85%		85%	Pendidikan	Dinas Pendidikan
			Persentase tingkat melanjutkan ke perguruan tinggi di wilayah Prov. Kepulauan Bangka Belitung	10%	5%	10%		0%	10%		10%	Pendidikan	Dinas Pendidikan

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2018	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2016	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016			TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RKPD TAHUN BERJALAN (2018)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD S/D TAHUN BERJALAN (2018)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPD TAHUN 2017	REALISASI RKPD TAHUN 2017	TINGKAT AT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2018	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2018 (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
		Persentase Siswa SMK yang mendapat pendidikan kewirausahaan	25%	-	-			25%			25%	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		Persentase siswa miskin SMA sederajat yang lulus mendapat beasiswa miskin untuk melanjutkan ke perguruan tinggi	25%	-	-			25%			25%	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		Persentase mahasiswa miskin yang mendapat beasiswa miskin	25%	-	-			25%			25%	Pendidikan	Dinas Pendidikan
	Pendidikan Menengah dan Tinggi	Rasio murid dengan sarana prasarana pengembangan KTM pada SMK pertanian KTM batu betumpang	25%	-	-			25%			25%	Pendidikan	Dinas Pendidikan
2	1	4 Pendidikan Non Formal	Angka Buta Aksara	3.10%	3%	3,25%					3%	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		Lembaga Kursus Terakreditasi		30%	35%							Pendidikan	Dinas Pendidikan
		Persentase lulusan siswa SMA sederajat yang mendapat pendidikan life skill	25%	-	-			25%			25%	Pendidikan	Dinas Pendidikan
2	1	5 Manajemen Layanan Pendidikan	Dokumen Perencanaan, Pendataan dan Pelaporan	100%	100%	100%						Pendidikan	Dinas Pendidikan
2	1	6 Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Terwujudnya mutu pendidikan dan kesehatan pelajar melalui TP UKS	Peningkatan Usahan Kesehatan Sekolah (UKS) 7 kab/kota	Peningkatan Usahan Kesehatan Sekolah (UKS) 7 kab/kota	Peningkatan Usahan Kesehatan Sekolah (UKS) 7 kab/kota		Peningkatan Usahan Kesehatan Sekolah (UKS) 7 kab/kota			Peningkatan kualitas kerukunan umat beragama 7 kab/kota	Pendidikan	Biro Kesra
2	2	KESEHATAN											
		RUTIN											
		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	0%	100%			100%	Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	0%	100%			100%	Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan disiplin aparatur pegawai	100%	100%	100%	0%	100%			100%	Kesehatan	Dinas Kesehatan
		RUTIN											
		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	66,49%	100%	91,27%	91%	100%		100%	Kesehatan	RSUP
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	24,28%	100%	90,86%	91%	100%		100%	Kesehatan	RSUP
		Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan disiplin aparatur pegawai	100%	95,28%	100%	87,49%	87%	100%		100%	Kesehatan	RSUP
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%		100%	99,34%	99%	100%		100%	Kesehatan	RSUP
		RUTIN											
		Pelayanan Administrasi	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	0%	100%			100%	Kesehatan	RSJ

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2018	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2016	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016			TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RKPD TAHUN BERJALAN (2018)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD S/D TAHUN BERJALAN (2018)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPD TAHUN 2017	REALISASI RKPD TAHUN 2017	TINGK AT REALIS ASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2018	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2018 (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
		Perkantoran											
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	0%	100%			100%	Kesehatan	RSJ
		Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan disiplin aparatur pegawai	100%	100%	100%	0%	100%			100%	Kesehatan	RSJ
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	100%	0%	100%			100%	Kesehatan	RSJ
		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100%							Kesehatan	RSJ
		<b>WAJIB</b>											
2	2	1 Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase ketersediaan obat dan alat kesehatan	100%	90%	95%	0%	100%			100%	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Persentase ketersediaan obat dan alat kesehatan	100%	90%	95%	0%	100%			100%	Kesehatan	RSJ
2	2	2 Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase masyarakat yang dilayani sesuai standar	100	100	100	0%	100			100	Kesehatan	RSJ
			Persentase masyarakat yang dilayani sesuai standar									Kesehatan	RSUP
2	2	3 Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Persentase Kab/Kota dengan cakupan rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) 60%-75%	75	65	70	0%	75			75	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Persentase Promosi pelayanan kesehatan di RSUP	0	0	6	85,80%	14%	0		90	Kesehatan	RSUP
			Persentase Promosi pelayanan kesehatan di RSJ	90	0	85	0%	90			90	Kesehatan	RSJ
2	2	4 Perbaikan gizi masyarakat	Persentase balita dengan berat badan dibawah garis merah (BGM) 8%-3%	30%	50%	40%	0%	30%			30%	Kesehatan	Dinas Kesehatan
2	2	5 Pengembangan lingkungan sehat	Persentase Kab/Kota melakukan pembinaan kesehatan lingkungan 100%	100%	100%	100%	0%	100%			100%	Kesehatan	Dinas Kesehatan
2	2	6 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase Kab/Kota yang melakukan surveilans, Imunisasi dan Kesehatan Matra 42%-98%	84%	74%	84%	0%	84%			98%	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Persentase kab/kota yang melakukan pengendalian penyakit menular 100%	100%	100%	100%	0%	100%			100%	Kesehatan	Dinas Kesehatan
2	2	7 Standarisasi pelayanan kesehatan	Persentase fasilitasi pelayanan kesehatan di provinsi dan kab/kota									Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Persentase fasilitasi pelayanan kesehatan lanjutan yang terakreditasi nasional	0	0	0		0			44%	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Persentase ketersediaan obat dan alat kesehatan RSJ	100	100	100	0%	100			100	Kesehatan	RSJ
			Persentase ketersediaan obat dan alat kesehatan RSUP	80	70	75	0%	80			100	Kesehatan	RSUP
			Persentase Penerapan Standar	85	77	80	0%	85			100	Kesehatan	RSUP

KODE	URUSAN/ URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2018	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2016	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016			TARGET PROGRAM/KEGIATAN RPKD TAHUN BERJALAN (2018)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD S/D TAHUN BERJALAN (2018)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RPKD TAHUN 2017	REALISASI RPKD TAHUN 2017	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2018	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2018 (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
		Pelayanan Minimal (SPM) di RSUP											
		Persentase akreditasi pelayanan Rumah Sakit (RSUP)	100	60	80		0%	100			100	Kesehatan	RSUP
		Persentase Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di RSJ	100	100	100		0%	100			100	Kesehatan	RSJ
		Persentase akreditasi pelayanan Rumah Sakit (RSJ)	100	100	100		0%	100			100	Kesehatan	RSJ
2	2	8 Pelayanan kesehatan penduduk miskin	Persentase masyarakat miskin di Kab/Kota yang mendapatkan bantuan jaminan kesehatan 65%-95%	95%	85%	90%	0%	95%			95%	Kesehatan	Dinas Kesehatan
2	2	9 Pengadaan, Peningkatan Sarana Prasarana RS/RSJ/RS Paru/RS Mata	Persentase sarana dan prasarana yang tersedia di RSUP	80	34,46%	75%	57,96%	77%	80		80	Kesehatan	RSUP
			Persentase sarana dan prasarana yang tersedia sesuai standar di RSJ	100	100	100	0%	100			100	Kesehatan	RSJ
2	2	1 Pemeliharaan Sarana Prasarana RS/RSJ/RS Paru/RS Mata	Persentase Sarana dan prasarana RSUP yang di pelihara	80	88,34%	75%	91,47%	122%	80		80	Kesehatan	RSUP
			Persentase Sarana dan prasarana RSJ yang di pelihara	100	100	100	0%	100			100	Kesehatan	RSJ
2	2	1 Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	angka kematian bai per 1000 kelahiran hidup 35-28	28	30	29	0%	28			28	Kesehatan	Dinas Kesehatan
2	2	1 Peningkatan pelayanan kesehatan lansia	persentase pembinaan pelayanan kesehatan lansia	80%	50%	75%	0%	80%			80%	Kesehatan	Dinas Kesehatan
2	2	1 Pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	Persentase tempat pengolahan makanan dan pangan industri rumah tangga (PIRT) sesuai syarat kesehatan 30%-40%	40%	37%	39%	0%	40%			40%	Kesehatan	Dinas Kesehatan
2	2	1 Peningkatan keselamatan ibu dan anak	persentase Kab/Kota dengan cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan 96,5%-98%	27	29	28	0%	27			98	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Jumlah kematian ibu melahirkan per kelahiran hidup 35-27	26	27	27	0%	26			26	Kesehatan	Dinas Kesehatan
2	2	1 Kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan	Persentase ketersediaan bank data Provinsi dan Kabupaten/Kota 100%	100	100	100	0%	100			100	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Persentase ketersediaan dokumen perencanaan anggaran dan kebijakan pembangunan kesehatan 4 dokumen	100	100	100	0%	100			100	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Persentase ketersediaan dokumen evaluasi dan pelaporan 4 dokumen	100	100	100	0%	100			100	Kesehatan	Dinas Kesehatan
2	2	1 Pelayanan keperawatan dan	Persentase pelayanan kesehatan yang melaksanakan perkesmas	90%	75%	85%	0%	90%			90%	Kesehatan	Dinas Kesehatan

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2018	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2016	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016			TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RKPD TAHUN BERJALAN (2018)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD S/D TAHUN BERJALAN (2018)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPD TAHUN 2017	REALISASI RKPD TAHUN 2017	TINGK AT REALIS ASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2018	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2018 (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
		kesehatan lainnya											
2	2	1 Pengadaan peningkatan sarana dan prasarana labkesda	persentase sarana dan prasarana labkesda	100	100	100	0%	100			100	Kesehatan	Dinas Kesehatan & BKD Pemprov
2	2	1 Sumberdaya kesehatan	Persentase tenaga kesehatan di sarana pelayanan kesehatan	100	77.1	88.4		100			100	Kesehatan	Dinas Kesehatan
2	2	2 Bencana Bidang Kesehatan	Persentase Kab/Kota yang melakukan pengendalian PTM 100%	100%	100%	100%	0%	100%			100%	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Persentase kab/kota yang diintervensi dengan kesiapsiagaan penanggulangan bidang kesehatan	25%				25%			100.00%	Kesehatan	Dinas Kesehatan
2	3	<b>PEKERJAAN UMUM</b>											
		<b>RUTIN</b>											
		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran									Pekerjaan Umum	Dinas PU
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur									Pekerjaan Umum	Dinas PU
		Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan disiplin aparatur pegawai									Pekerjaan Umum	Dinas PU
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									Pekerjaan Umum	Dinas PU
		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan									Pekerjaan Umum	Dinas PU
2	3	<b>WAJIB</b>											
		1 Perencanaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan	Jalan dan jembatan dalam kondisi mantap (%)	94.50%	94.50%	94.50%		94.50%			94.50%	Pekerjaan Umum	Dinas PU
		Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong											
		Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong											
2	3	2 Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Jalan dan jembatan dalam kondisi mantap (%)	94.50%	94.50%	94.50%		94.50%			94.50%	Pekerjaan Umum	Dinas PU
2	3	3 Tangap Darurat Jalan dan Jembatan	Persentase cakupan perbaikan jalan dan jembatan akibat bencana (%)	95%				95%			95%	Pekerjaan Umum	Dinas PU
2	3	4 Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan	Tersedianya informasi kondisi jalan dan jembatan (%)	100%	100%	100%	0%	100%			100%	Pekerjaan Umum	Dinas PU

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2018	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2016	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016			TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RKPD TAHUN BERJALAN (2018)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD S/D TAHUN BERJALAN (2018)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPD TAHUN 2017	REALISASI RKPD TAHUN 2017	TINGK AT REALIS ASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2018	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2018 (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
2 3	5	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinarmargaan	Sarana dan prasarana kebinarmargaan dalam kondisi baik (%)									Pekerjaan Umum	Dinas PU
2 3	6	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya	Irigasi dalam kondisi baik (%)	-	-	-		-			-	Pekerjaan Umum	Dinas PU
2 3	7	Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Persentase masyarakat miskin yang tidak memiliki akses air bersih								100.00%	Pekerjaan Umum	Dinas PU
2 3	8	Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya	Embung, Sungai, Danau dan Sumber Daya Air lainnya terkelola dengan baik (%)									Pekerjaan Umum	Dinas PU
2 3	9	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Cakupan sarana pelayanan kesehatan yang mengelola air minum dan air limbah sesuai baku mutu (%)								100.00%	Pekerjaan Umum	Dinas PU
			Persentase masyarakat miskin yang tidak memiliki sanitasi									Pekerjaan Umum	Dinas PU
2 3	1	Pengendalian Banjir	Persentase daerah rawan banjir (%)								100%	Pekerjaan Umum	Dinas PU
		Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh											Dinas PU
2 3	1	Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Infrastruktur perdesaan dalam kondisi baik (%)								70.00%	Pekerjaan Umum	Dinas PU
		Program Pemb. Sarana Dan Prasarana Umum											Dinas PU
2 3	1	Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	Jalan dan jembatan dalam kondisi mantap (%)	2 dok	2 dok	2 dok		2 dok			2 dok	Pekerjaan Umum	Dinas PU
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan										Pertanahan	Dinas PU
		Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Rth)										Pertanahan	Dinas PU
		Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah										Pertanahan	Dinas PU
2 4		PERUMAHAN											
		Program Pengembangan										Perumahan	Dinas PU



KODE	URUSAN/BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2018	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2016	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016			TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RKPD TAHUN BERJALAN (2018)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD S/D TAHUN BERJALAN (2018)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPD TAHUN 2017	REALISASI RKPD TAHUN 2017	TINGK AT REALIS ASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2018	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2018 (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
		Perumahan											
		Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan										Perumahan	Dinas PU
2	4	1 Perbaikan Rumah Akibat Bencana Alam/Sosial	Persentase cakupan perbaikan perumahan akibat bencana (%)								100%	Perumahan	Dinas PU
2	4	2 Pengelolaan Area Pemakaman	TPU terkelola baik (%)									Perumahan	Dinas PU
2	5	<b>PENATAAN RUANG</b>											
2	5	1 Perencanaan Tata Ruang	Persentase meningkatnya sinkronisasi perencanaan tata ruang	90%	80%	85%	0%	90%			Perda RTRW, Rencana Detail Tata Guna Lahan, Masterplan unt review kawasan provinsi, RDTR Pelabuhan Sadai, RDTR Tj. Ru, 6 RDTR KSP, Zona Regulasi semua KSP dan 2 RTBL	Penataan Ruang	Bappeda
		Perencanaan Tata Ruang	Tersusunnya dokumen rencana detail kawasan strategis provinsi	4 KSP	3 KSP	3 KSP		4 KSP			8 Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi	Penataan Ruang	Dinas PU
			Terlaksananya Penyusunan KLHS Rencana Rinci KSP	3 Dokumen KLHS	1 Dokumen KLHS	2 Dokumen KLHS		3 Dokumen KLHS			6 Dokumen KLHS RTR KSP	Penataan Ruang	Dinas PU
2	5	2 Pemanfaatan Ruang	Tertib pemanfaatan ruang (%)								Peta Citra Satlit QuickBird untuk peta tata ruang zona darat, zona laut, Sinkronisasi peta Citra Quick Bird Zona Darat dan Laut, Penguatan dan Pemanfaatan Peta Citra Quick Bird, Wastek	Penataan Ruang	Dinas PU, Bappeda
2	5	3 Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Kesesuaian pemanfaatan ruang (%)								10 PPNS Prov/Kab/Kota dan 5 Laporan Penyelenggaraa n PR, Peralatan pendukung PPNS	Penataan Ruang	Dinas PU
		Program Kerjasama Pembangunan											
2	6	<b>PERENCANAAN</b>											

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2018	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2016	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016			TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RKPD TAHUN BERJALAN (2018)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD S/D TAHUN BERJALAN (2018)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPD TAHUN 2017	REALISASI RKPD TAHUN 2017	TINGK AT REALIS ASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2018	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2018 (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
	<b>PEMBANGUNAN</b>												
	<b>RUTIN</b>												
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%		0%	100%			100%	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase meningkatnya sarana dan prasarana aparatur dalam menunjang kelancaran tupoksi	100%	100%	100%		0%	100%			100%	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
	Peningkatan Disiplin Aparatur	Presentase peningkatan sarana penunjang disiplin aparatur	100%	100%	100%		0%	100%			100%	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Presentase meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	-	-	-			-			-	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
	<b>WAJIB</b>												
2 6 1	Perencanaan dan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Persentase kesesuaian pencapaian sasaran bidang sarana prasarana dan lingkungan hidup terhadap rpjmd	80%	70%	75%		0%	80%			80%	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
	Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh												
	Perencanaan dan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh											Perencanaan Pembangunan	Bappeda, Dinas PU
												Perencanaan Pembangunan	Bappeda
												Perencanaan Pembangunan	Bappeda
												Perencanaan Pembangunan	Bappeda
												Perencanaan Pembangunan	Bappeda
2 6 2	Kerjasama Pembangunan	kuantitas kerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah (provinsi / kabupaten / kota), badan usahadan swasta	80%	70%	75%		0%	80%			80%	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
	Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah	Terlaksananya pembayaran 5x luran APPSI, 3 X luran BKS serta 10 Dokumen Kerjasama daerah dan Peninkatan SDM Aparatur sebanyak 40 orang memahami Kerjasama Daerah	1x luran APPSI, 1 X luran BKS serta 3 Dokumen Kerjasama daerah	1x luran APPSI, 1 X luran BKS serta 5 Dokumen Kerjasama daerah	1x luran APPSI, 1 X luran BKS serta 2 Dokumen Kerjasama daerah			1x luran APPSI, 1 X luran BKS serta 3 Dokumen Kerjasama daerah			1x luran APPSI, 1 X luran BKS serta 3 Dokumen Kerjasama daerah	Perencanaan Pembangunan	Biro Pemerintahan
2 6 3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Peningkatan manajemen prgogram dan aparatur untuk kelancaran dan efektifitas tugas pokok dan fungsi bappeda	80%	70%	75%		0%	80%			80%	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
2 6 4	Perencanaan Pembangunan Daerah	persentase kesesuaian pencapaian sasaran tahunan terhadap RPJMD	80%	70%	75%		0%	80%			80%	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
2 6 5	Perencanaan	Persentase kesesuaian	80%	70%	75%		0%	80%			80%	Perencanaan	Bappeda

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2018	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2016	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016			TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RKPD TAHUN BERJALAN (2018)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD S/D TAHUN BERJALAN (2018)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPD TAHUN 2017	REALISASI RKPD TAHUN 2017	TINGK AT REALIS ASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2018	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2018 (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
		Pembangunan Ekonomi	pencapaian sasaran bidang ekonomi terhadap RPJMD									Pembangunan Daerah	
				27%	87.75%	27%	0%	27%			27%	Perencanaan Pembangunan Daerah	Biro Perekonomian
2	6	6 Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Persentase kesesuaian pencapaian sasaran bidang Sosial Budaya terhadap RPJMD	80%	70%	75%	0%	80%			80%	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
		Perencanaan Sosial dan Budaya										Perencanaan Pembangunan	Badan Kesbangpol
2	6	7 Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Persentase kesesuaian pencapaian sasaran bidang Sarana Prasarana dan Lingkungan Hidup	80%	80%	75%	0%	80%			80%	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
2	6	8 Perencanaan Pembangunan Pemerintahan	Persentase kesesuaian pencapaian sasaran bidang pemerintahan terhadap RPJMD		70%							Perencanaan Pembangunan	Bappeda
2		Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Persentase kesesuaian pencapaian sasaran bidang pemerintahan dan Otonomi daerah terhadap RPJMD	80%		75%	0%	80%			80%	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
2	6	9 Perencanaan Kota- kota Besar dan Menengah	Persentase kesesuaian pencapaian sasaran bidang sarana prasarana dan lingkungan hidup terhadap rpjmd	80%	70%	75%	0%	80%			80%	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
2	6	1 Pengembangan 0 Wilayah Perbatasan										Perencanaan Pembangunan	Bappeda
2	6	1 Pengembangan 1 Wilayah Perbatasan dan Toponimi	Tersedianya 6 Kesepakatan penyelesaian batas daerah antar Kab/Kota/Provinsi sebanyak dan 1 Peraturan tentang Toponimi	1 (satu) kesepakatan Batas dan 1 Peraturan Toponimi	1 (satu) kesepakatan Batas	1 (satu) kesepakatan Batas		1 (satu) kesepakatan Batas dan 1 Peraturan Toponimi			Tersedianya 6 Kesepakatan penyelesaian batas daerah antar Kab/Kota/Provi nsi sebanyak dan 1 Peraturan tentang Toponimi	Perencanaan Pembangunan	Biro Pemerintahan
		3 Pengembangan 2 Data/Informasi	persentase data perencanaan pembangunan yang dapat diakses									Perencanaan Pembangunan	Bappeda
		3 Pengembangan 2 Data/Informasi	Pengelolaan tertib administrasi belum memadai	0	Aplikasi dan Peralatan	0		0			1 Aplikasi dan Peralatan	Perencanaan Pembangunan	Biro Pembangunan
		Pengkajian dan Penelitian Pembangunan Daerah	Persentase penelitian, kerjasama dan publikasi yang digunakan Sebagai Rekomendasi Pemerintah Daerah	83%		75%	0%	83%			83%	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
2	7	PERHUBUNGAN											
		RUTIN											
		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	1	100%	100%	0%	1			1	Perhubungan	Dinas Perhubungan

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2018	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2016	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016			TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RKPD TAHUN BERJALAN (2018)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD S/D TAHUN BERJALAN (2018)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPD TAHUN 2017	REALISASI RKPD TAHUN 2017	TINGK AT REALIS ASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2018	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2018 (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1	100%	100%	0%	1			1	Perhubungan	Dinas Perhubungan
		Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan disiplin aparatur pegawai	1	100%	100%	0%	1			1	Perhubungan	Dinas Perhubungan
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	100%	100%	0%	1			1	Perhubungan	Dinas Perhubungan
		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	100%	100%	0%	1			1	Perhubungan	Dinas Perhubungan
		<b>WAJIB</b>											
2	7	1	Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Prosentase pemenuhan prasarana dan Fasilitas Perhubungan (%)	0.00%	24.00%	25.00%	25%	0.00%		25.00%	Perhubungan	Dinas Perhubungan
					0	0	1 rute pelayaran	1 rute pelayaran perintis	0		1 rute pelayaran	Perhubungan	Dinas Perhubungan
2	7	2	Rehabilitasi/pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Prosentase Prasana dan Fasiitas LLAJ dalam kondisi baik (%)	75.00%	60.00%	60.00%	75.00%	75.00%		75.00%	Perhubungan	Dinas Perhubungan
2	7	3	Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	Prosentase pemenuhan sarana dan prasarana Perhubungan (%)	30.00%	28.00%	29.00%	29.00%	30.00%		30.00%	Perhubungan	dinas Perhubungan
					1 paket	1 paket	1 paket	1 paket			Bandara Internasional	Perhubungan	Dinas Perhubungan
2	7	4	Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas		7.00%	8.30%	8.20%	7.00%			7.00%	Perhubungan	Dinas Perhubungan
2	7	5	Peningkatan Pelayanan Angkutan	Angka Pelanggaran lalu lintas (%)	1.20%	2.10%	1.50%	1.50%	1.20%		1.20%	Perhubungan	Dinas Perhubungan
2	8		<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>										
			<b>RUTIN</b>										
		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	0%	100%				Lingkungan Hidup	BLHD
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	0%	100%				Lingkungan Hidup	BLHD
			Persentase Peningkatan disiplin aparatur pegawai										
		Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan disiplin aparatur pegawai	100%	100%	100%	0%	100%			100%	Lingkungan Hidup	BLHD
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	100%	0%	100%			100%	Lingkungan Hidup	BLHD
		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	100%	0%	100%			100%	Lingkungan Hidup	BLHD
		<b>WAJIB</b>											
2	8	1	Cakupan Pelayanan Persampahan								3 TPA Regional di	Lingkungan Hidup	BLHD

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2018	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2016	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016			TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RKPD TAHUN BERJALAN (2018)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD S/D TAHUN BERJALAN (2018)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPD TAHUN 2017	REALISASI RKPD TAHUN 2017	TINGK AT REALIS ASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2018	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2018 (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
											Prov.Kepulauan Bangka Belitung		
2	8	2	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Penurunan Pencemaran air Sungai	11 Sungai	9 Sungai		11 Sungai			11 Sungai	Lingkungan Hidup	BLHD
				TSS(mg/l)	<50	<50		<50			<50		
				BOD(mg/l)	<5,00	<5,26		<5,00			<5,00		
				COD(mg/l)	<29,0	<29,4		<29,0			<29,0		
				Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Limbah (Gg CO <sub>2</sub> Eq)	13.16	6.23		13.16			15.499	Lingkungan Hidup	BLHD
					-	7 org		-			7 org	Lingkungan Hidup	BLHD
					-	-		-			1680 org	Lingkungan Hidup	BLHD
				Adanya Tindakanlanjutan Pengaduan Masyarakat Bidang Lingkungan Hidup	21 kasus	7 kasus		21 kasus			55 kasus	Lingkungan Hidup	BLHD
2	8	3	Peningkatan kualitas serta akses informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Peningkatan Parameter uji yang terakreditasi pada UPTB laboratorium lingkungan (Parameter)	26	8		26			30	Lingkungan Hidup	BLHD
				Terinventarisasinya status lingkungan hidup aerah	-	-		0%			1 dok	Lingkungan Hidup	BLHD
				Terbangunnya jaringan Sistem Informasi Lingkungan Hidup	-	-		-			8 jaringan	Lingkungan Hidup	BLHD
				Peningkatan Parameter uji yang terakreditasi pada UPTB laboratorium lingkungan	30	12		30			30	Lingkungan Hidup	BLHD
2	8	4	Peningkatan Pengendalian Polusi		7 Kab/Kota	7 Kab/Kota		7 Kab/Kota			7 Kab/Kota	Lingkungan Hidup	BLHD
				CO	< 10.000 µg/m3	< 10.000 µg/m3		< 10.000 µg/m3			< 10.000 µg/m3	Lingkungan Hidup	BLHD
				SO <sub>2</sub>	< 365 µg/m3	< 365 µg/m3		< 365 µg/m3			< 365 µg/m3	Lingkungan Hidup	BLHD
				NO <sub>2</sub>	< 150 µg/m3	< 150 µg/m3		< 150 µg/m3			< 150 µg/m3	Lingkungan Hidup	BLHD
				PM <sub>10</sub>	< 150 µg/m3	< 150 µg/m3		< 150 µg/m3			< 150 µg/m3	Lingkungan Hidup	BLHD
				Tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan	100%	100%		100%			100%	Lingkungan Hidup	BLHD
				Terbina dan terpantaunya pelaksanaan izin lingkungan		7 Kab/Kota					45 keg/usaha	Lingkungan Hidup	BLHD
						7 Kab/Kota					7 kab/kota	Lingkungan Hidup	BLHD
				Terbina dan terpantaunya pelaksanaan izin lingkungan		14 keg/usaha					45 keg/usaha	Lingkungan Hidup	BLHD
											1 dok	Lingkungan Hidup	BLHD
2	8	5	Pengelolaan ruang	Luas ruang terbuka hijau (%)							30% RTH	Lingkungan	Dinas PU

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2018	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2016	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016			TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RKPD TAHUN BERJALAN (2018)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD S/D TAHUN BERJALAN (2018)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPD TAHUN 2017	REALISASI RKPD TAHUN 2017	TINGK AT REALIS ASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2018	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2018 (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
		terbuka hijau									kawasan perkotaan	Hidup	
		Persentase kabupaten/kota yang memiliki luasan ruang terbuka hijau sebesar 20%	28.57	14.28	14.28			28.57			28.57	Lingkungan Hidup	BLHD
2 8	6	Deleniasi dan Konservasi Sumber Daya Alam	Peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap upaya konservasi Sumber Daya Alam								210 orang	Lingkungan Hidup	BLHD
2 9		<b>PERTANAHAN</b>											
2 9	1	Pembangunan sistem Pendaftaran Pertanahan	Tersedianya 15 buah Peta Kawasan Komplek Perkantoran terpadu, terinventarisirnya kawasan terlantar di 7 Kab/Kota serta tersedianya sertifikat tanah milik PemProv sebanyak 39 Persil	-	-	-		-			Tersedianya 15 buah Peta Kawasan Komplek Perkantoran terpadu, terinventarisirnya kawasan terlantar di 7 Kab/Kota serta tersedianya sertifikat tanah milik PemProv sebanyak 39 Persil	Pertanahan	Biro Pemerintahan
2 9	2	Penataan Penguasaan, Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Tersedianya lahan / tanah untuk pembangunan gedung dan mess Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta yang representatif								1000 M2	Pertanahan	Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta
			Terlaksananya penatausahaan tanah sebagai asset tetap daerah	-	1 lahan (3.739 M2)	-		-			1 lahan (bertambah 3.739 M2)	Pertanahan	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2 9	3	Penyelesaian-penyelesaian Konflik Pertanahan	Peningkatan Pemahaman aparaturnya sebanyak 80 orang dalam penyelesaian konflik pertanahan	1 Angkatan (40 orang)	-	1 Angkatan (40 orang)		1 Angkatan (40 orang)			Peningkatan Pemahaman aparaturnya sebanyak 80 orang dalam penyelesaian konflik pertanahan	Pertanahan	Biro Pemerintahan
2 9	4	Pengembangan sistem informasi Pertanahan	Tersedianya 1 Unit data base pertanahan di Prov. Kep. Bangka Belitung	Tersedianya 1 Unit data base pertanahan di Prov. Kep. Bangka Belitung	-	0		Tersedianya 1 Unit data base pertanahan di Prov. Kep. Bangka Belitung			Tersedianya 1 Unit data base pertanahan di Prov. Kep. Bangka Belitung	Pertanahan	Biro Pemerintahan
2 1 0		<b>KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL</b>		0.00	0.00	0.00		0.00					
2 1	1	Penataan Administrasi	Tersedianya 1 (satu) data base	Peningkatan	1 (satu) SIAK Online	Peningkatan		Peningkatan			Tersedianya	Kependudukan	Biro

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2018	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2016	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016			TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RKPD TAHUN BERJALAN (2018)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD S/D TAHUN BERJALAN (2018)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPD TAHUN 2017	REALISASI RKPD TAHUN 2017	TINGK AT REALIS ASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2018	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2018 (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
0	Kependudukan	Administrasi Kependudukan dan pencatatan sipil yang lengkap yang berbasis online	Pemahaman SDM Aparatur dan Masyarakat dibidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar 85 %	Antar Provinsi dengan Kab/Kota di Prov. Kepulauan Bangka Belitung serta 1 Unit Server	Pemahaman SDM Aparatur dan Masyarakat dibidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar 80 %			Pemahaman SDM Aparatur dan Masyarakat dibidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar 85 %			data base yang lengkap yang berbasis online serta peningkatan pemahaman aparatur dan Masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (sebesar 85 %)	dan Catatan Sipil	Pemerintahan
	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah												
2	1	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK											
	1	RUTIN											
		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	0%	100%			100%	Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak	BPPKBPA
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	0%	100%			100%	Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak	BPPKBPA
		Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan disiplin aparatur pegawai	100%	100%	100%	0%	100%			100%	Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak	BPPKBPA
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	100%	0%	100%			100%	Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak	BPPKBPA
		Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Persentase Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	100%	100%	100%	0%	100%			100%		
		WAJIB											
2	1	1	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Pengarusutamaan Gender	Persentase SKPD yang melaksanakan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	55.81	51.16	55.81	55.81			55.81	Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan	BPPKBPA



KODE	URUSAN/BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2018	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2016	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016			TARGET PROGRAM/KEGIATAN RKPD TAHUN BERJALAN (2018)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD S/D TAHUN BERJALAN (2018)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPD TAHUN 2017	REALISASI RKPD TAHUN 2017	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2018	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2018 (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
												Anak	
		Persentase SKPD yang Memiliki Data Terpilah	23.3	21	23.3			23.3			23.3	Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak	BPPKBPA
		Persentase Keberdayaan organisasi dan lembaga masyarakat yang berbasis gender	45.45	42.42	45.45			45.45			45.45	Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak	BPPKBPA
2	1	2 Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	20					20			20	Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak	BPPKBPA
		Prosentase Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan dan Peran Serta Posisi Perempuan	100	100	100		0%	100			100	Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak	BPPKBPA
		Persentase Kelompok Usaha ekonomi perempuan yang mendapatkan bimbingan manajemen usaha dari BPPKBPA	14.56	13.59	14.56			14.56			14.56	Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak	BPPKBPA
		Persentase Partisipasi Perempuan di lembaga pemerintahan	30.3	30.2	30.3			30.3			30.3	Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak	BPPKBPA
		Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	37	36.95	37		0%	37			37	Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak	BPPKBPA
2	1	3 Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	100	100	100		0%	100			100	Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak	BPPKBPA
		Persentase kebijakan perlindungan perempuan dan anak	100	100	100		0%	100			100	Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak	BPPKBPA
		Persentase Data Terpilah terkait Kesejahteraan Anak	100	100	100		0%	100			100		
		Persentase Kabupaten/Kota yang Membentuk Kota Layak Anak (KLA)	28.57	28.57	28.57			28.57			28.57		
		Persentase Anak yang Mengikuti Forum Anak Tingkat Nasional	15.58	15.58	15.58			15.58			15.58		

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2018	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2016	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016			TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RKPD TAHUN BERJALAN (2018)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD S/D TAHUN BERJALAN (2018)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPD TAHUN 2017	REALISASI RKPD TAHUN 2017	TINGK AT REALIS ASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2018	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2018 (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
2	1												
2	2	KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA											
2	1	1 Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga	Persentase kebijakan pemberdayaan keluarga dan Keluarga Berencana	100	100	100	0%	100			100	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	BPPKBPA
			Tingkat Prevalensi peserta KB aktif	81.8	81.75	81.8		81.8			81.8	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	BPPKBPA
			Keluarga Pra Sejahter dan Keluarga Sejahtera I	10.69	10.95	10.69		10.69			10.69		
			Keluarga Pra Sejahter dan Keluarga Sejahtera I	10.69	10.95	10.69		10.69			10.69		
2	1	SOSIAL											
	3	RUTIN											
		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	0%	100%			100%	Sosial	Dinas Kesejahteraan Sosial
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	0%	100%			100%	Sosial	Dinas Kesejahteraan Sosial
		Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan disiplin aparatur pegawai	100%	100%	100%	0%	100%			100%	Sosial	Dinas Kesejahteraan Sosial
		RUTIN											
		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	0%	100%			100%	Sosial	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	0%	100%			100%	Sosial	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan disiplin aparatur pegawai	100%	100%	100%	0%	100%			100%	Sosial	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100%							Sosial	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		WAJIB											
2	1	1 Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS/PSKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peran dan fungsi sosial melalui pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi sosial	1475 orang	1475 orang	1475 orang		1475 orang			7375 orang	Sosial	Dinas Kesejahteraan Sosial
2	1	2 Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS/PSKS penerima manfaat yang mampu	2785 orang	550 orang	550 orang		2785 orang			2785 orang	Sosial	Dinas Kesejahteraan

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2018	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2016	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016			TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RKPD TAHUN BERJALAN (2018)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD S/D TAHUN BERJALAN (2018)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPD TAHUN 2017	REALISASI RKPD TAHUN 2017	TINGK AT REALIS ASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2018	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2018 (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
				melaksanakan peranan dan fungsi sosial melalui pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial									Sosial
				Persentase lansia yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	25%			25%			25%	Sosial	Dinas Kesejahteraan Sosial
2	1 3	3	Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	Persentase fungsi sosial PMKS/PSKS penerima manfaat melalui pemberdayaan sosial dan pemenuhan kebutuhan sosial dasar	2,45	2,05	2,15	0%	2,45		10500	Sosial	Dinas Kesejahteraan Sosial
2	1 3	4	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dalam Panti	Persentase panti sosial skala Provinsi yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	20%			20%			20%	Sosial	Dinas Kesejahteraan Sosial
2	1 3	5	Pembinaan dan Pendampingan Sosial Luar Panti	Persentase organisasi sosial/yayasan/LSM yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial luar panti	20%			20%			20%	Sosial	Dinas Kesejahteraan Sosial
2	1 3	6	Pembinaan dan Pendampingan Sosial Luar Panti	Persentase organisasi sosial/yayasan/LSM yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial bagi lansia	20%			20%			20%	Sosial	Dinas Kesejahteraan Sosial
2	1 3	7	Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya	Persentase kesesuaian antara perencanaan dan penganggaran pada urusan sosial	80%	70%	75%	0%	80%		80%	Sosial	Dinas Kesejahteraan Sosial
2	1 3	8	Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Persentase daerah rawan bencana yang diintervensi dalam pencegahan dan kesiapsiagaan	100%	36%	70%	0%	100%		100%	Sosial	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2	1 3	9	Penyediaan Logistik/Peralatan dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	Persentase ketersediaan logistik dan peralatan terhadap kejadian bencana	100%	80%	90%	0%	100%		100%	Sosial	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2	1 3	10	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Persentase daerah rawan bencana yang diintervensi dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	50%	15%	40%	0%	50%		50%	Sosial	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2	1 3	11	Peningkatan Pengamalan terhadap Kehidupan Beragama	Persentase lansia yang mendapat pembinaan keagamaan	25%			25%			25%	Sosial	Biro Kesra
2	1 4		KETENAGAKERJAAN										
			RUTIN										
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	0%	100%		100%	Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
			Peningkatan Sarana dan Prasarana	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	0%	100%		100%	Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2018	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2016	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016			TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RKPD TAHUN BERJALAN (2018)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD S/D TAHUN BERJALAN (2018)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPD TAHUN 2017	REALISASI RKPD TAHUN 2017	TINGK AT REALIS ASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2018	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2018 (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
	Aparatur												Transmigrasi
	Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan disiplin aparatur pegawai	100%	100%	100%		0%	100%			100%	Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	100%		0%	100%			100%	Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya		100%	100%	100%		0%	100%			100%	Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	<b>WAJIB</b>												
2 1 4	1 Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Prosentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetansi	100	87%	100	93,20%	1%	100%			100.00%	Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat										Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	100%	90%	100%	83,08%	83%	100%			100%	Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Persentase masyarakat miskin yang mendapat pelatihan berbasis masyarakat	25					25			25	Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Persentase lansia yang mendapat pelatihan berbasis masyarakat	25					25			25	Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 1 4	2 Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan (%)	50	0,50%	30	8,31%	0%	50			100.00%	Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 1 4	3 Pengembangan Hubungan Industrial dan Jamsostek	Prosentase kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama	70	45,70%	60	62,39%	1%	70			100.00%	Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta jamsostek (output)	60	50	55		0%	60			70	Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 1 4	4 Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	Prosentase pemeriksaan perusahaan	30	70,90%	25	90,91%	4%	30			100.00%	Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Prosentase pengujian peralatan di perusahaan (output)	45	93,60%	40	62,83%	2%	45			50	Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 1 4	5 Revitalisasi BLKI	Prosentase infrastruktur yang terbangun	-	-	-			-			0.85	Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 1 4	6 Perencanaan Tenaga Kerja	Prosentase kesesuaian perencanaan ketenagakerjaan dengan RPJMD	-	-	-			-			100.00%	Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2 1	7 Peningkatan Kualitas	Meningkatnya tenaga kerja yang	-	-	-			-				Ketenagakerjaan	Dinas Tenaga

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2018	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2016	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016			TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RKPD TAHUN BERJALAN (2018)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD S/D TAHUN BERJALAN (2018)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPD TAHUN 2017	REALISASI RKPD TAHUN 2017	TINGK AT REALIS ASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2018	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2018 (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
4		dan Produktivitas Tenaga Kerja	mendapatkan pelatihan berbasis kompetansi (%)									an	Kerja dan Transmigrasi
2	1	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH											
		RUTIN											
		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran									Koperasi dan usaha kecil dan menengah	Dinas Koperasi dan UMKM
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur									Koperasi dan usaha kecil dan menengah	Dinas Koperasi dan UMKM
		Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan disiplin aparatur pegawai									Koperasi dan usaha kecil dan menengah	Dinas Koperasi dan UMKM
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									Koperasi dan usaha kecil dan menengah	Dinas Koperasi dan UMKM
		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan									Koperasi dan usaha kecil dan menengah	Dinas Koperasi dan UMKM
		WAJIB											
2	1	1 Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Bertambahnya jumlah usaha kecil dan menengah (%)	100%	-							Koperasi dan usaha kecil dan menengah	Dinas Koperasi dan UMKM
2	1	2 Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro, Kecil Menengah dan Koperasi		100%	-			1			1	Koperasi dan usaha kecil dan menengah	Dinas Koperasi dan UMKM
			Meningkatnya mutu dan ragam kemasan KUMKM (jenis)	100%	-			9			9	Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah	Dinas Koperasi dan UMKM
2	1	3 Pengembangan sistem pendukung Usaha bagi Koperasi & UMKM (KUMKM)	Tingkat dukungan fasilitas pendanaan bagi pengembangan usaha UMKM (%)	100%	-			75			75	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Dinas Koperasi dan UMKM
			meningkatkan sarana pemasaran bagi pengembangan UMKM (%)	100%	-			22			22	Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah	Dinas Koperasi dan UMKM
			-	100%	-			1			1	Koperasi dan usaha kecil dan menengah	Dinas Koperasi dan UMKM
			Persentase masyarakat miskin yang mendapat akses pemodalan	100%	-			75			kop	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Dinas Koperasi dan UMKM
			Persentase lansia yang mendapat	100%	-			75			75	Koperasi dan	Dinas Koperasi

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2018	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2016	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016			TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RKPD TAHUN BERJALAN (2018)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD S/D TAHUN BERJALAN (2018)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPD TAHUN 2017	REALISASI RKPD TAHUN 2017	TINGK AT REALIS ASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2018	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2018 (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
		akses pemodal										Usaha Kecil Menengah	dan UMKM
2 1 5	4	Pengembangan SDM Koperasi dan UMKM	Tingkat kemampuan SDM Koperasi dan UKM (%)	110	100%	-		110			110	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Dinas Koperasi dan UMKM
2 1 5	5	Pengembangan Koperasi dan UMKM Berbasis Potensi Lokal	Koperasi komoditi aktif (%)		100%	-						Koperasi dan usaha kecil dan menengah	Dinas Koperasi dan UMKM
2 1 5	6	Pengembangan Koperasi dan UMKM Sektor Lembaga dan Wilayah	meningkatnya pengawasan Koperasi (persentase)		100%	-						Koperasi dan usaha kecil dan menengah	Dinas Koperasi dan UMKM
2 1 6		<b>PENANAMAN MODAL DAERAH</b>											
		<b>RUTIN</b>											
		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	0%	100%			100%	Penanaman Modal	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	0%	100%			100%	Penanaman Modal	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
		Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan disiplin aparatur pegawai	100%	100%	100%	0%	100%			100%	Penanaman Modal	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-		80%	0%	-			100%	Penanaman Modal	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%		100%	0%	100%			100%	Penanaman Modal	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
		<b>WAJIB</b>											
2 1 6	1	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		7 calon investor	8 calon investor							Penanaman Modal	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
				1%	96.32%	1%	0%	1%				Penanaman Modal	Biro Perekonomian
2 1 6	2	Peningkatan Iklim Investasi dan realisasi Investasi		1.800 (Rp.Miliar)	1.900 (Rp.Miliar)							Penanaman Modal	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2018	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2016	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016			TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RKPD TAHUN BERJALAN (2018)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD S/D TAHUN BERJALAN (2018)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPD TAHUN 2017	REALISASI RKPD TAHUN 2017	TINGK AT REALIS ASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2018	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2018 (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
													Modal
		Peningkatan Iklim Investasi dan Promosi	Jumlah minat (calon investor)	9 calon investor	6	8 calon investor	4	9 calon investor			9 calon investor	Penanaman Modal	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
			Nilai realisasi investasi PMA/PMDN	2.100 (Rp.Miliar)	1023,2	1900	1177,2	62%	2.100 (Rp.Miliar)		2.100 (Rp.Miliar)	Penanaman Modal	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
2	1 6	3	Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah	-	30%	50%	0%	-			-	Penanaman Modal	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
		Penyiapan Potensi Investasi Produk Unggulan Daerah	Persentase peningkatan data potensi terhadap sektor-sektor produk unggulan	85%	-	-		85%			85%	Penanaman Modal	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
2	1 6	4	Peningkatan pelayanan perizinan terpadu satu pintu	13 sektor	10 sektor	12 sektor		13 sektor			13 sektor	Penanaman Modal	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
		Peningkatan kualitas pelayanan perizinan terpadu satu pintu	Jumlah Sektor Perizinan dan Non Perizinan Usaha	13 sektor	-	-		13 sektor			13 sektor	Penanaman Modal	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
2	1 7	KEBUDAYAAN											
		RUTIN											
		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	0%	100%			100%	Kebudayaan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	0%	100%			100%	Kebudayaan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan disiplin aparatur pegawai	100%	100%	100%	0%	100%			100%	Kebudayaan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	100%	0%	100%			100%	Kebudayaan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	100%	0%	100%			100%	Kebudayaan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		WAJIB											



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2018	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2016	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016			TARGET PROGRAM/ RKPD TAHUN BERJALAN (2018)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD S/D TAHUN BERJALAN (2018)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPD TAHUN 2017	REALISASI RKPD TAHUN 2017	TINGKAT AT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2018	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2018 (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
2 1 7	1	Pengembangan Nilai Budaya	Pertumbuhan pelestarian nilai tradisi	4	100%	100%	0%	4			4	Kebudayaan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			Jumlah Pergub pelestarian nilai tradisi									Kebudayaan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan sanggar seni	0	0	0		0				Kebudayaan	Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta
			terwujudnya mutu pendidikan dan kesehatan pelajar melalui TP UKS	seni rupa islami, musyawarah tokoh adat 7 kab/kota,		seni rupa islami, musyawarah tokoh adat 7 kab/kota,		seni rupa islami, musyawarah tokoh adat 7 kab/kota,			seni rupa islami, musyawarah tokoh adat 7 kab/kota,	Kebudayaan	Biro Kesra
2 1 7	2	Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase cagar budaya yang dikelola									Kebudayaan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			Jumlah kegiatan penyelenggaraan pagelaran kesenian daerah		100%	100%	0%					Kebudayaan	Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta
			Rasio Dokumen pendukung pengembangan dengan kawasan kota tua muntok		100%	100%	0%					Kebudayaan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			Persentase kerjasama kabupaten kota dalam keikutsertaan paket khusus acara pentas seni kabupaten kota di TMII	100%	0	100%	0%	100%			100%	Kebudayaan	Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta
2 1 7	6	Pembinaan Sejarah dan Nilai Budaya	Pertumbuhan nilai sejarah dan nilai budaya yang di apresiasi masyarakat	50	100%	0		50			50	Kebudayaan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
2 1 7	7	Peningkatan pengamalan terhadap kehidupan beragama	terwujud kualitas layanan pada umat beragama dalam kegiatan ibadah	stq/mtq,safari ramadhan,pemberangkatan jamaah haji		stq/mtq,safari ramadhan,pemberangkatan jamaah haji		stq/mtq,safari ramadhan,pemberangkatan jamaah haji			stq/mtq,safari ramadhan,pemberangkatan jamaah haji	Kebudayaan	Biro Kesra
2 1 7	8	Pembinaan kerukunan umat beragama	terwujudnya kerukunan umat beragama	peningkatan kualitas kerukunan umat beragama 7 kab/kota		peningkatan kualitas kerukunan umat beragama 7 kab/kota		peningkatan kualitas kerukunan umat beragama 7 kab/kota			peningkatan kualitas kerukunan umat beragama 7 kab/kota	Kebudayaan	Biro Kesra
2 1 8	PEMUDA DAN OLAHRAGA												
	RUTIN												
		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100	100	100	0%	100			100	Kepemudaan dan olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2018	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2016	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016			TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RKPD TAHUN BERJALAN (2018)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD S/D TAHUN BERJALAN (2018)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPD TAHUN 2017	REALISASI RKPD TAHUN 2017	TINGK AT REALIS ASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2018	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2018 (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	0%	100%			100%	Kepemudaan dan olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan disiplin aparatur pegawai	100%	100%	100%	0%	100%			100%	Kepemudaan dan olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan									Kepemudaan dan olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga
		<b>WAJIB</b>											
2	1	1 Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Persentase Organisasi Pelajar dan Mahasiswa yang dibina	7	7	7	0%	7			7	Kepemudaan dan olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	1	2 Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Prosentase pemuda peserta pelatihan kewirausahaan yang berhasil mengembangkan	22	18	20	0%	22			22	Kepemudaan dan olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga
			Persentase pemuda di wilayah KTM yang mendapat pelatihan wirausaha	10				10			10	Kepemudaan dan olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga
			Persentase pemuda miskin yang mendapat pelatihan wirausaha	20				20			20	Kepemudaan dan olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	1	3 Upaya Pencegahan Penyalagunaan Narkoba	Prosentase Pemuda Peserta Pelatihan yang Tidak Terkena NARKOBA setelah pelatihan	100	100	100	0%	100			100	Kepemudaan dan olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	1	4 Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Prosentase kesesuaian Perencanaan dan Penganggaran	100	100	100	0%	100			90%	Kepemudaan dan olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	1	5 Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Peringkat prestasi nasional dalam event POPWIL dan POPNAS	-	-	15	0%	-			POPWIL = 6 POPNAS = 28	Kepemudaan dan olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga
			Prosentase Olahragawan Berprestasi dalam POPNAS	11.39	10.13			11.39				Kepemudaan dan olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga
			Prosentase Olahragawan Berprestasi dalam POPCANAS	50	28.57	33.33		50				Kepemudaan dan olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga
			Prosentase Olahragawan Pelajar Berprestasi Hasil dari Pembinaan PPLP 7 PPLPD	57.89	36.84	47.37		57.89				Kepemudaan dan olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Terwujudnya pembinaan olahraga bagi anggota KORPRI	90%	25%	90%	0%	90%			58.00%	Kepemudaan dan olahraga	Sekretariat Korpri
		Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Rasio lansia yang mendapat pelayanan olah raga dengan kecamatan	10				10			10	Kepemudaan dan olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	1	6 Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga	Prosentase jumlah sarana dan prasarana di kawasan sport center Prov. Kepulauan Bangka Belitung	17	17	17	0%	17			20%	Kepemudaan dan olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga
2	1	7 Pembinaan Generasi Muda	Prosentase partisipasi pemuda yang lolos seleksi Paskibraka	6	6	6	0%	6				Kepemudaan dan olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga
			Prosentase Pemuda yang Lolos Seleksi Paskibra Tingkat Nasional	7	7	7	0%	7			3.57%	Kepemudaan dan olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2018	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2016	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016			TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RKPD TAHUN BERJALAN (2018)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD S/D TAHUN BERJALAN (2018)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPD TAHUN 2017	REALISASI RKPD TAHUN 2017	TINGK AT REALIS ASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2018	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2018 (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
2 1 9	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI												
	RUTIN												
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran		100%	100%		0%	100%			100%	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Badan Kesbangpol
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur		100%	100%		0%	100%			100%	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Badan Kesbangpol
	Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan disiplin aparatur pegawai		100%	100%		0%	100%			100%	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Badan Kesbangpol
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100%	100%		0%	100%			100%	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Badan Kesbangpol
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100%	100%		0%	100%			100%	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Badan Kesbangpol
	WAJIB												
2 1 9	1 Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan				100%		0%					Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Badan Kesbangpol
2 1 9	2 Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Tindak Kriminal			100%	100%		0%					Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Badan Kesbangpol
	Pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Angka kriminalitas (menurun)	0.00207	0,00155	0.00216	0,0013		0.00207			0.00207	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Satpol PP
		Cakupan penegakkan perda	100.00%	67,56%	72.97%			100.00%			100.00%	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Satpol PP
2 1 9	3 Pengembangan Wawasan Kebangsaan		100%	100%	100%		0%	100%				Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Badan Kesbangpol
2 1 9	4 Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan		1	100%	100%		0%	1				Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Badan Kesbangpol
2 1 9	5 Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat	Menurunnya tingkat kenakalan remaja di Prov. Kepulauan Bangka Belitung	100%		100%		0%	100%				Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam	Badan Kesbangpol

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2018	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2016	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016			TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RKPD TAHUN BERJALAN (2018)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD S/D TAHUN BERJALAN (2018)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPD TAHUN 2017	REALISASI RKPD TAHUN 2017	TINGK AT REALIS ASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2018	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2018 (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
2	1	6	Pendidikan Politik Masyarakat	Terlaksananya Penyusunan Kebijakan, Dukungan dan Fasilitasi Lembaga Perwakilan dan Partisipasi Politik	1	1	100%	0%	1			Negeri	Badan Kesbangpol
2	1	7	Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	3.00%	2.48%	2.74%	3.00%			3.00%	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Satpol PP
				Meningkatnya pemahaman dalam menghadapi segala potensi ancaman			100%	0%				Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Badan Kesbangpol
2	1	8	Kemitraan Kamtibmas		100%		100%	0%	100%			Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Badan Kesbangpol
2	1	9	Peningkatan Ketahanan Ekonomi, Budaya, Agama, Kepercayaan dan Sosial Lainnya	Meningkatnya hubungan toleransi antar umat beragama	100%	100%	100%	0%	100%			Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Badan Kesbangpol
				Meningkatnya peran ormas dalam pemberdayaan masyarakat								Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Badan Kesbangpol
				terciptanya stabilitas ketahanan ekonomi								Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Badan Kesbangpol
			Prioritas Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Prioritas Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	-	12 bulan	12 bulan	-				Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Satpol PP
					80.00%	60.00%	80.00%	80.00%			100.00%	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Satpol PP
					100.00%	99.21%	99.58%	100.00%			100.00%	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Satpol PP
					95.00%	93.00%	94.00%	95.00%			95.00%	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Satpol PP
					74.70%	57.43%	66.47%	74.70%			74.70%	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Satpol PP
2	1	1	Koordinasi Pelaksanaan Pilpres Pemilu DPRD dan	terlaksananya 7x Movev dan 24 SK Pengangkatan dan Pemberhentian DPRD dan Kepala	3x Movev dan 1 SK Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala	4x Movev Pemilukada	8 SK Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah	3x Movev dan 1 SK Pengangkatan			terlaksananya 7x Movev dan 24 SK	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam	Biro Pemerintahan

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2018	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2016	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016			TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RKPD TAHUN BERJALAN (2018)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD S/D TAHUN BERJALAN (2018)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPD TAHUN 2017	REALISASI RKPD TAHUN 2017	TINGK AT REALIS ASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2018	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2018 (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
	Pemilukada	Daerah	Daerah					dan Pemberhentian Kepala Daerah			Pengangkatan dan Pemberhentian DPRD dan Kepala Daerah	Negeri	
			100.00%	64.00%	72.97%			100.00%			100.00%	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Satpol PP
			3.00%	2.48%	2.74%			3.00%			3.00%	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Satpol PP
			-	12 bulan	12 bulan			-				Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Satpol PP
	Koordinasi Pelaksanaan Pilpres Pemilu DPRD dan Pemilukada		100%	-	100%		0%	100%				Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Badan Kesbangpol
2 1 9	1 Peningkatan demokrasi		100%					100%				Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Badan Kesbangpol
2 2 0	OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN												
	RUTIN												
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran										Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Sekretariat DPRD
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur										Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi	Sekretariat DPRD

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2018	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2016	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016			TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RKPD TAHUN BERJALAN (2018)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD S/D TAHUN BERJALAN (2018)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPD TAHUN 2017	REALISASI RKPD TAHUN 2017	TINGK AT REALIS ASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2018	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2018 (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
												keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	
	Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan disiplin aparaturnya pegawai										Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Sekretariat DPRD
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur										Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Sekretariat DPRD
	<b>RUTIN</b>												
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran										Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Sekretariat Daerah
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparaturnya										Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Sekretariat Daerah

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2018	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2016	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016			TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RKPD TAHUN BERJALAN (2018)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD S/D TAHUN BERJALAN (2018)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPD TAHUN 2017	REALISASI RKPD TAHUN 2017	TINGK AT REALIS ASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2018	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2018 (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
												kepegawaian, dan persandian	
	Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan disiplin aparatur pegawai										Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Sekretariat Daerah
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur										Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Sekretariat Daerah
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan										Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Sekretariat Daerah
	<b>RUTIN</b>												
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%		0%	100%			100%	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Inspektorat Provinsi
	Peningkatan Sarana	Persentase peningkatan sarana	100%	100%	100%		0%	100%			100%	Otonomi	Inspektorat



KODE	URUSAN/BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2018	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2016	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016			TARGET PROGRAM/ RKPD TAHUN BERJALAN (2018)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD S/D TAHUN BERJALAN (2018)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPD TAHUN 2017	REALISASI RKPD TAHUN 2017	TINGK AT REALIS ASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2018	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2018 (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
	dan Prasarana Aparatur	dan prasarana aparatur										daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Provinsi
	Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan disiplin aparatur pegawai	100%	100%	100%		0%	100%			100%	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Inspektorat Provinsi
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur										Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Inspektorat Provinsi
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	100%		0%	100%			100%	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Inspektorat Provinsi
	<b>RUTIN</b>												
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran										Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi	Badan Kepegawaian Daerah

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2018	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2016	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016			TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RKPD TAHUN BERJALAN (2018)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD S/D TAHUN BERJALAN (2018)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPD TAHUN 2017	REALISASI RKPD TAHUN 2017	TINGK AT REALIS ASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2018	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2018 (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
												keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur										Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Badan Kepegawaian Daerah
	Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan disiplin aparatur pegawai										Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Badan Kepegawaian Daerah
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur											Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Badan Kepegawaian Daerah
	<b>RUTIN</b>												
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran										Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah,	Badan Diklat

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2018	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2016	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016			TARGET PROGRAM/ RKPD TAHUN BERJALAN (2018)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD S/D TAHUN BERJALAN (2018)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPD TAHUN 2017	REALISASI RKPD TAHUN 2017	TINGK AT REALIS ASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2018	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2018 (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
												kepegawaian, dan persandian	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur										Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Badan Diklat
	Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan disiplin aparatur pegawai										Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Badan Diklat
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur										Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Badan Diklat
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan										Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Badan Diklat
	<b>RUTIN</b>												
	Pelayanan	Persentase pelayanan										Otonomi	DPPKAD

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2018	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2016	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016			TARGET PROGRAM/ RKPD TAHUN BERJALAN (2018)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD S/D TAHUN BERJALAN (2018)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPD TAHUN 2017	REALISASI RKPD TAHUN 2017	TINGK AT REALIS ASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2018	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2018 (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
	Administrasi Perkantoran	administrasi perkantoran										daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur										Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	DPPKAD
	Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan disiplin aparatur pegawai										Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	DPPKAD
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur										Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	DPPKAD
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan										Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan	DPPKAD

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2018	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2016	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016			TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RKPD TAHUN BERJALAN (2018)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD S/D TAHUN BERJALAN (2018)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPD TAHUN 2017	REALISASI RKPD TAHUN 2017	TINGK AT REALIS ASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2018	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2018 (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
												daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	
		<b>RUTIN</b>											
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran										Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Satpol PP
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur										Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Satpol PP
	Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan disiplin aparatur pegawai										Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Satpol PP
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur										Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian,	Satpol PP

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2018	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2016	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016			TARGET PROGRAM/ RKPD TAHUN BERJALAN (2018)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD S/D TAHUN BERJALAN (2018)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPD TAHUN 2017	REALISASI RKPD TAHUN 2017	TINGK AT REALIS ASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2018	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2018 (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
												dan persandian	
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan										Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Satpol PP
	<b>RUTIN</b>												
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran										Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Sekretariat Korpri
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur										Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Sekretariat Korpri
	Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan disiplin aparatur pegawai										Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Sekretariat Korpri
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur										Otonomi daerah,	Sekretariat Korpri

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2018	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2016	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016			TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RKPD TAHUN BERJALAN (2018)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD S/D TAHUN BERJALAN (2018)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPD TAHUN 2017	REALISASI RKPD TAHUN 2017	TINGK AT REALIS ASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2018	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2018 (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
												pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	
	<b>RUTIN</b>												
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	0	0%	0%			0			1	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	0	0%	0%			0			1	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta
	Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan disiplin aparatur pegawai	0	0%	0%			0			1	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0	0%	0%			0			1	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan	Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2018	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2016	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016			TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RKPD TAHUN BERJALAN (2018)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD S/D TAHUN BERJALAN (2018)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPD TAHUN 2017	REALISASI RKPD TAHUN 2017	TINGK AT REALIS ASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2018	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2018 (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
												daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	
		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	0	0%	0%		0			1	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta
		<b>WAJIB</b>											
2	2	1 Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah		100%	100%		0%					Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Sekretariat DPRD
2	2	2 Peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/wakil kepala daerah		12 bln	12 bln	12 bln		12 bln			95	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Biro Umum dan Perlengkapan
		Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya kegiatan pertemuan dialog/audiensi antara kepala daerah/wakil kepala daerah dengan tokoh- tokoh masyarakat Bangka Belitung Jakarta/luar Jakarta									Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian,	Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2018	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2016	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016			TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RKPD TAHUN BERJALAN (2018)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD S/D TAHUN BERJALAN (2018)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPD TAHUN 2017	REALISASI RKPD TAHUN 2017	TINGK AT REALIS ASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2018	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2018 (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
2	2	3	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Catatan hasil pemeriksaan	WTP	WDP	WDP	WTP			WTP	dan persandian	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah			100%	100%	0%				Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Sekretariat DPRD
			Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya 1x sosialisasi peraturan tentang Hibah, Monev dan verifikasi sebanyak 15 proposal atas instansi penerima dana hibah dan monev di 7 Kab/kota yang menerima dana DKTP	Terlaksananya 8x Monev dan evaluasi proposal atas instansi penerima bantuan hibah	Terlaksananya 1x sosialisasi peraturan tentang Hibah, dan monev di 7 Kab/kota yang menerima dana DKTP	Terlaksananya 7x Monev dan evaluasi proposal atas instansi penerima bantuan hibah	Terlaksananya 8x Monev dan evaluasi proposal atas instansi penerima bantuan hibah			Terlaksananya 1x sosialisasi peraturan tentang Hibah, Monev dan verifikasi sebanyak 15 proposal atas instansi penerima dana hibah dan monev di 7 Kab/kota yang menerima dana DKTP	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Biro Pemerintahan
												Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Sekretariat Korpri

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2018	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2016	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016			TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RKPD TAHUN BERJALAN (2018)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD S/D TAHUN BERJALAN (2018)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPD TAHUN 2017	REALISASI RKPD TAHUN 2017	TINGK AT REALIS ASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2018	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2018 (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
2 2 0	4	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH (upgrading)	Hasil evaluasi sistem pengendalian intern pemerintah (kategori)	-	1 unit	-		-				Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Inspektorat Provinsi
		Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Optimalnya pelaksanaan kegiatan pada APBD yang sesuai target dan tepat waktu	230 paket pengadaan barang/jasa yang dilelangkan, 36 SKPD, 200 Paket Pengadaan Barang/jasa, 55 peserta, 7 Kab/kota, 50 peserta, 7 biro, 84 Operator SiRUP dan E-Monev	210 paket pengadaan barang/jasa yang dilelangkan, 10 set buku laporan, 55 peserta, 32 peserta, 75 buku	220 paket pengadaan barang/jasa yang dilelangkan, 36 SKPD, 190 Paket Pengadaan Barang/jasa, 55 peserta, 7 Kab/kota, 50 peserta, 7 biro, 35 SKPD dan 7 Biro, 84 Operator SiRUP dan Monev		230 paket pengadaan barang/jasa yang dilelangkan, 36 SKPD, 200 Paket Pengadaan Barang/jasa, 55 peserta, 7 Kab/kota, 50 peserta, 7 biro, 84 Operator SiRUP dan E-Monev			95	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Biro Pembangunan
		Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH										Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Inspektorat Provinsi
			Indeks Reformasi Birokrasi	65.00%	45.00%	55.00%		65.00%			65.00%	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Inspektorat Provinsi
			Prosentase jumlah LAKIP SKPD yang dievaluasi memperoleh nilai	75.00%	45.00%	65.00%		75.00%			75.00%	Otonomi daerah,	Inspektorat Provinsi

KODE	URUSAN/BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2018	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2016	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016			TARGET PROGRAM/ RKPD TAHUN BERJALAN (2018)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD S/D TAHUN BERJALAN (2018)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPD TAHUN 2017	REALISASI RKPD TAHUN 2017	TINGK AT REALIS ASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2018	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2018 (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
		kategori (A) atau (B)										pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	
		Prosentase jumlah pengembalian uang yang telah disetor ke Kas Negara/Daerah atas temuan hasil Audit BPK-RI dan pengawasn APIP pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung .	98.00%	96.00%	97.00%			98.00%			98.00%	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Inspektorat Provinsi
		Prosentase jumlah rekomendasi temuan hasil pengawasan APIP dan BPK-RI pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang selesai ditindaklanjuti.	97.00%	94.00%	96.00%			97.00%			97.00%	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Inspektorat Provinsi
		Prosentase Penyelesaian Kasus Pengaduan Masyarakat	100.00%	100.00%	100.00%			100.00%			100.00%	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Inspektorat Provinsi
	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan KDH	Meningkatnya pelaksanaan hukum secara konsisten untuk menjamin kepastian hukum, keadilan dan supremasi hukum	4 Kasus, 2 Monev	4 Kasus	4 Kasus, 2 Monev			4 Kasus, 2 Monev			50%	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah,	Biro Hukum

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2018	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2016	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016			TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RKPD TAHUN BERJALAN (2018)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD S/D TAHUN BERJALAN (2018)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPD TAHUN 2017	REALISASI RKPD TAHUN 2017	TINGK AT REALIS ASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2018	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2018 (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
2	2	5	Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Jumlah unit kerja yang mendapatkan akuntabilitas minimal B (SKPD)								perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Inspektorat Provinsi
			a). Sertifikasi penjenjangan JFA/P2UPD	8 orang	7 orang	8 orang		8 orang			88 orang	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Inspektorat Provinsi
			b). Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa	7 orang	6 orang	7 orang		7 orang			32 orang	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Inspektorat Provinsi
			Jumlah peningkatan sertifikasi penjenjangan JFA/P2UPD/Pengadaan Barang dan Jasa :									Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Badan Pendidikan dan Latihan

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2018	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2016	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016			TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RKPD TAHUN BERJALAN (2018)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD S/D TAHUN BERJALAN (2018)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPD TAHUN 2017	REALISASI RKPD TAHUN 2017	TINGK AT REALIS ASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2018	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2018 (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
2 2 0	6	Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan dalam Rangka Penguatan Reformasi Birokrasi	Rekomendasi hasil pemeriksaan yang dapat ditindaklanjuti (%)	1 sistem berbasis web bases, 1 unit pengendalian gratifikasi, dan penilaian indeks reormasi birokrasi tahun 2017	Penyempurnaan sistem dan seperangkat alat penunjang	1 sistem berbasis web bases, 1 unit pengendalian gratifikasi, dan penilaian indeks reormasi birokrasi tahun 2016		1 sistem bebas web bases, 1 unit pengendalian gratifikasi, dan penilaian indeks birokrasi tahun 2017				Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Inspektorat Provinsi
			Terkoordinirnya SKPD dalam pelaksanaan RB	85%	0%	80%	0%	85%			terkoordinirnya SKPD di lingkungan Pemprop.Kep Bangka Belitung	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Biro Organisasi
2 2 0	7	Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti (%)	-	3 kasus	-		-				Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Inspektorat Provinsi
2 2 0	8	Penataan Peraturan Perundang-undangan	Terwujudnya produk hukum daerah provinsi sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan	1512 PHD dan 7 Rakor/ Bimtek/ Sosialisasi/ Penyuluhan Hukum	1412 PHD dan 5 Rakor/ Bimtek/ Sosialisasi/ Penyuluhan Hukum	1462 PHD dan 6 Rakor/ Bimtek/ Sosialisasi/ Penyuluhan Hukum		1512 PHD dan 7 Rakor/ Bimtek/ Sosialisasi/ Penyuluhan Hukum			100%	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Biro Hukum
		Penataan Peraturan Perundang-undangan	Hasil-hasil rapat, persidangan dan produk perundang-undangan yang terdokumentasikan	100	100%	100%	0%	100				Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi	Sekretariat DPRD

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2018	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2016	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016			TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RPJMD TAHUN BERJALAN (2018)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD S/D TAHUN BERJALAN (2018)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPD TAHUN 2017	REALISASI RKPD TAHUN 2017	TINGKAT AT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2018	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2018 (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
2 2 0	9	Penataan Daerah Otonomi Baru	Terlaksananya penyerahan urusan dari Kabupaten dan Kota kepada Pemerintah Provinsi sebanyak 9 Urusan	Terlaksananya rapat fasilitasi penataan urusan sebanyak 3x	Terlaksananya rapat fasilitasi penataan urusan sebanyak 3x	Terlaksananya rapat fasilitasi penataan urusan sebanyak 2x, dan penyerahan urusan dari kab/kota ke Prov sebanyak 9 urusan		Terlaksananya rapat fasilitasi penataan urusan sebanyak 3x			Terlaksananya rapat fasilitasi penataan urusan sebanyak 3x, dan penyerahan urusan dari kab/kota ke Prov sebanyak 9 urusan	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Biro Pemerintahan
2 2 0	1	Pembinaan dan Pengawasan Refresif terhadap Produk Hukum Kab/Kota	Terwujudnya produk hukum daerah kabupaten/kota sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan	460 PHD	410 PHD	450 PHD		460 PHD			100%	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Biro Hukum
2 2 0	1	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kecamatan, Desa dan Kelurahan	Terlaksananya percepatan di 47 Kab yang melaksanakan PATEN, terevaluasinya 12 Kinerja kecamatan dan tersedianya 97 buku database kecamatan	8 Kecamatan yang melaksanakan PATEN, 3 Kecamatan dengan kinerja berpredikat dan 25 Buku database kecamatan	16 Kecamatan yang melaksanakan PATEN, 3 Kecamatan dengan kinerja berpredikat dan 25 Buku database kecamatan	-		8 Kecamatan yang melaksanakan PATEN, 3 Kecamatan dengan kinerja berpredikat dan 25 Buku database kecamatan			Terlaksananya percepatan di 47 Kab yang melaksanakan PATEN, terevaluasinya 12 Kinerja kecamatan dan tersedianya 97 buku database kecamatan	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Biro Pemerintahan
2 2 0	2	Pengembangan dan rasionalitas jabatan dalam rangka penguatan reformasi birokrasi	Efektifnya penataan jabatan berdasarkan dokumen analisa jabatan, peta jabatan, analisa beban kerja, evaluasi jabatan, rumpun jabatan, dan standar kompetensi jabatan	87%	-	82%	0%	87%			penempatan pejabat sesuai kompeten	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian,	Biro Organisasi



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2018	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2016	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016			TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RKPD TAHUN BERJALAN (2018)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD S/D TAHUN BERJALAN (2018)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPD TAHUN 2017	REALISASI RKPD TAHUN 2017	TINGK AT REALIS ASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2018	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2018 (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
												dan persandian	
		Pengembangan dan rasionalitas jabatan dalam rangka penguatan reformasi birokrasi	Efektifnya penataan jabatan berdasarkan dokumen analisa jabatan, peta jabatan, analisa beban kerja, evaluasi jabatan, rumpun jabatan, dan standar kompetensi jabatan	87%	-	82%	0%	87%			penempatan pejabat sesuai kompeten	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Biro Organisasi
2	2 0	1 3	Peningkatan dan perluasan pelayanan publik dalam rangka penguatan reformasi birokrasi	Penerapan SPM dan SOP untuk meningkatkan pelayanan publik	97%	90%	95%	0%	97%		Seluruh SKPD memiliki SOP dan SPM	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Biro Organisasi
2	2 0	1 4	Bantuan Hukum	Persentase lansia yang mendapat bantuan hukum							25%	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Biro Hukum
2	2 0	1 5	Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	Meningkatnya sarana prasarana hukum yang memadai guna peningkatan pelayanan informasi hukum	1512 PHD	1412 PHD	1462 PHD		1512 PHD		100%	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Biro Hukum
2	2 0	1 6	Penataan kelembagaan SKPD dalam rangka penguatan reformasi	tertatanya kelembagaan SKPD Pemprov. Kepulauan Bangka Belitung dalam struktur yang	85%	75%	80%	0%	85%		tertatanya kelembagaan SKPD	Otonomi daerah, pemerintahan	Biro Organisasi

KODE	URUSAN/BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2018	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2016	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016			TARGET PROGRAM/KEGIATAN RKPD TAHUN BERJALAN (2018)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD S/D TAHUN BERJALAN (2018)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPD TAHUN 2017	REALISASI RKPD TAHUN 2017	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2018	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2018 (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
		birokrasi	rasional, efektif, dan efisien.									umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	
2	2	1 Pengembangan koordinasi dan sinkronisasi penataan kelembagaan SKPD Provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka penguatan reformasi birokrasi	Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi antara Pemprov dan pemkab/kota dalam penataan kelembagaan SKPD	85%	0%	85%	0%	85%			Penataan dan sinkronisasi kelembagaan Provinsi, Kabupaten/Kota	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Biro Organisasi
2	2	8 Penguatan tata kelola SKPD dalam rangka penguatan reformasi birokrasi	Tertatanya manajemen pengelolaan SKPD serta nomenklatur, struktur, kewenangan dan tupoksi SKPD	75%	65%	70%	0%	75%			seluruh SKPD menerapkan manajemen	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Biro Organisasi
2	2	2 Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Prosentase alumni diklat struktural, diklat teknis dan diklat fungsional	600	550	520	0%	600			2,760.00	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Badan Pendidikan dan Latihan
		Pembinaan dan Pengembangan Aparatur					#DIV/0!				1,245.00	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat	Badan Pendidikan dan Latihan

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2018	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2016	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016			TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RKPD TAHUN BERJALAN (2018)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD S/D TAHUN BERJALAN (2018)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPD TAHUN 2017	REALISASI RKPD TAHUN 2017	TINGK AT REALIS ASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2018	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2018 (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
												daerah, kepegawaian, dan persandian	
	Peningkatan Kapasaitas Sumber Daya Aparatur	meningkatnya kuantitas aparatur yang memiliki kompetensi	80 peserta, 50 peseta, 50 peserta, 40 peseta	360 peseta, 40 Peserta, 100 Peserta dan 40 peseta	60 peserta, 40 peserta, 60 peserta, 50 peserta			80 peserta, 50 peseta, 50 peseta, 40 peseta			90	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Biro Pembangunan
	Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur		pelaksanaan bimtek dan rapat, sosialisasi	pelaksanaan bimtek dan rapat	-			pelaksanaan bimtek dan rapat, sosialisasi			pelaksanaan bimtek dan rapat, sosialisasi	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Biro Organisasi
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	terwujudnya peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui peningkatan kemampuan/ketrampilan dengan mengikuti pelatihan/pendidikan		80	80		0%					Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Badan Kepegawaian Daerah
	Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Prosentase pengembangan kualitas penyelenggara diklat yang mengikuti pelatihan	63	63	63			63			90	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Badan Pendidikan dan Latihan
											90	Otonomi	Badan

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2018	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2016	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016			TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RKPD TAHUN BERJALAN (2018)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD S/D TAHUN BERJALAN (2018)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPD TAHUN 2017	REALISASI RKPD TAHUN 2017	TINGK AT REALIS ASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2018	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2018 (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
												daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Kepegawaian Daerah
		Prosentase Widyaiswara yang mengikuti pengembangan SDM widyaiswara	18	18	18		0%	18			77	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Badan Pendidikan dan Latihan
	Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur		pelaksanaan bimtek dan rapat, sosialisasi	pelaksanaan bimtek dan rapat	-			pelaksanaan bimtek dan rapat, sosialisasi			pelaksanaan bimtek dan rapat, sosialisasi	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Biro Organisasi
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat di bidang Hukum	15 orang	4 orang	10 orang			15 orang			100%	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Biro Hukum
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Kemampuan APIP (%)	0	0	0			0				Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan	Inspektorat Provinsi

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2018	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2016	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016			TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RKPD TAHUN BERJALAN (2018)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD S/D TAHUN BERJALAN (2018)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPD TAHUN 2017	REALISASI RKPD TAHUN 2017	TINGK AT REALIS ASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2018	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2018 (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
												daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapabilitas dan kompetensi aparatur bagi aparatur Kantor Perwakilan Prov. Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta	0%	0	0			0%			100%	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta
	2 1 Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Meningkatnya pendidikan dan pelatihan aparatur bagi aparatur Sekretariat DPP Korpri Prov. Kepulauan Bangka Belitung	90%	26%	90%		0%	90%			76%	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Sekretariat Korpri
	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		#####	#####	#####			##### #			90	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Badan Pendidikan dan Latihan
	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	terlaksananya pembinaan dan pengembangan Aparatur dalam rangka mewujudkan manajemen kepegawaian yang profesional dan sejahtera melalui peningkatan pendidikan dan karir aparatur serta penempatan aparatur yang sesuai kompetensi dan kebutuhan organisasi		80	80		0%					Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan	Badan Kepegawaian Daerah

KODE	URUSAN/BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2018	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2016	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016			TARGET PROGRAM/KEGIATAN RKPd TAHUN BERJALAN (2018)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD S/D TAHUN BERJALAN (2018)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPd TAHUN 2017	REALISASI RKPd TAHUN 2017	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2018	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2018 (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
												persandian	
											90	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Badan Kepegawaian Daerah
	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Terpenuhinya kualitas dan kuantitas PNS yang berkualitas	115	117	115		0%	115			90	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Badan Pendidikan dan Latihan
	2 Peningkatan akuntabilitas Kepala Daerah	meningkatnya predikat penilaian LAKIP dari C ke B	70%		50%		0%	70%			SKPD yang SAKIPnya baik	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Biro Organisasi
												Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta
												Otonomi daerah, pemerintahan umum,	Sekretariat DPRD

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2018	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2016	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016			TARGET PROGRAM/ RKPD TAHUN BERJALAN (2018)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD S/D TAHUN BERJALAN (2018)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPD TAHUN 2017	REALISASI RKPD TAHUN 2017	TINGK AT REALIS ASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2018	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2018 (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
												administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	
	2 3	Peningkatan pengelolaan keuangan daerah	Persentase fasilitasi fungsi penganggaran DPRD melalui mekanisme dan tata cara penyusunan APBD dan APBD-P	100%	100%		0%				100%	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Sekretariat DPRD
		Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota	Sinkronisasi kebijakan kabupaten/kota terhadap kebijakan provinsi dan nasional (%)	100%	100%		0%	100%			100%	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	2 5	Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah (sebelum) menjadi Program Peningkatan Pajak Daerah dan Restribusi serta Pendapatan Lain- lain	Sinkronisasi kebijakan kabupaten/kota terhadap kebijakan provinsi dan nasional (%)	100%	100%		0%	100%			100%	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	2 6	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Daerah	Asset daerah yang dapat dipertanggungjawabkan dan diyakini kebenarannya (%)	100%	0		0%	100%			100%	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah,	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2018	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2016	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016			TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RKPD TAHUN BERJALAN (2018)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD S/D TAHUN BERJALAN (2018)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPD TAHUN 2017	REALISASI RKPD TAHUN 2017	TINGK AT REALIS ASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2018	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2018 (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
	2 7	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya tertib pelaporan pengelolaan administrasi keuangan (%)	100%	100%	100%	0%	100%			100%	kepegawaian, dan persandian	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		meningkatnya predikat penilaian LAKIP dari C ke B	pelaksanaan rapat	0	0			pelaksanaan rapat				Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Biro Organisasi
	2 8	Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	Tersedianya 1 (satu) pedoman umum penyelenggaraan asas tugas pembantuan di prov. Kepulauan Bangka Belitung dan tersosialisasinya 2(dua) peraturan DKTP di Prov. Kepulauan Bangka Belitung	-	-	-		-			Tersedianya 1 (satu) pedoman umum penyelenggaraa n asas tugas pembantuan di prov. Kepulauan Bangka Belitung dan tersosialisasinya 2(dua) peraturan DKTP di Prov. Kepulauan Bangka Belitung	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian	Biro Pemerintahan
	2 9	Pemberdayaan Jasa Konstruksi	1 bimtek	-	-						100	Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan	Biro Pembangunan

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2018	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2016	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016			TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RKPD TAHUN BERJALAN (2018)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD S/D TAHUN BERJALAN (2018)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPD TAHUN 2017	REALISASI RKPD TAHUN 2017	TINGKAT AT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2018	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2018 (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
	3 1	Penerapan Prinsip Good Governance dalam Penyelenggaraan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik	100%					100%				persandian	Badan Kesbangpol
2 2 1		<b>KETAHANAN PANGAN</b>											
		<b>RUTIN</b>											
		Pelayanan Administrasi Perkantoran										Ketahanan Pangan	Badan Ketahanan Pangan
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur										Ketahanan Pangan	Badan Ketahanan Pangan
		Peningkatan Disiplin Aparatur										Ketahanan Pangan	Badan Ketahanan Pangan
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									Ketahanan Pangan	Badan Ketahanan Pangan
		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan									Ketahanan Pangan	Badan Ketahanan Pangan
		<b>WAJIB</b>											
2 2 1	1	Peningkatan Ketahanan Pangan	Persentase ketersediaan bahan pangan daerah (%)	35	100%	7 Kab/kota		35			35	Ketahanan Pangan	Badan Ketahanan Pangan
			Pertumbuhan tingkat produksi beras pada kawasan KTM Batu Betumpang	35	100%	7 Kab/kota		35			35	Ketahanan Pangan	Badan Ketahanan Pangan
2 2 2		<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA</b>											
		<b>RUTIN</b>											
		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	0%	100%				Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BPMPD
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	0%	100%				Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BPMPD
		Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan disiplin aparatur pegawai	100%	100%	100%	0%	100%				Pemberdayaan Masyarakat	BPMPD

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2018	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2016	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016			TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RKPD TAHUN BERJALAN (2018)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD S/D TAHUN BERJALAN (2018)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPD TAHUN 2017	REALISASI RKPD TAHUN 2017	TINGK AT REALIS ASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2018	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2018 (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
												dan Desa	
		Penataan daerah otonomi baru										Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BPMPD
		dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya	100%	100%	100%		0%	100%				Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BPMPD
		<b>WAJIB</b>											
2	2	1	Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat dan Usaha Ekonomi Desa	Persentase BUMDes dan pasar desa Yang Aktif	10%	15%	10%	5%	50%	10%	50%	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BPMPD
				Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif	100%	100%	100%		0%	100%	100%	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BPMPD
				Persentase desa yang difasilitasi dalam pelaksanaan pengelolaan SDA	10%	10%	0%		10%		25%	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BPMPD
2	2	2	Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Keuangan Desa	Persentase desa yang menyusun Peraturan Desa (PERDES), mengenal RKPDes, RPJMDes, APBDes	100%	20%	90%	10%	11%	100%	100%	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BPMPD
2	2	3	Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Prosentase jumlah desa/kelurahan yang berhasil memfasilitasi lembaga kemasyarakatan untuk lanjut usia yang ada di desa/kelurahan dalam hal pembangunan	5%				5%		5.00%	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BPMPD
				Prosentase jumlah desa/kelurahan yang berhasil memfasilitasi lembaga kemasyarakatan yang ada di desa/kelurahan dalam hal pembangunan partisipatif	15%	10.00%	15.00%		15%		100.00%	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BPMPD
2	2	4	Pengelolaan SDA Desa dan Pengembangan TTG	Persentase desa yang mengimplementasikan TTG sesuai dengan OVOP	10%	10%	10%	10%	100%	10%	50%	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BPMPD
				Rasio TTG yang diaplikasikan dengan jumlah desa di kawasan KTM batu betumpang	20%			20%			20%	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BPMPD
2	2	5	Raskintis	Persentase Rumah Tangga Miskin Yang Mendapat Raskintis	100%	100%	100%	100%	100%		100%	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	BPMPD
2	2	<b>STATISTIK</b>											
2	2	1	Pengembangan Data dan Informasi	Persentase data perencanaan pembangunan yang dapat diakses	80%	70%	75%		0%	80%	80%	Statistik	Bappeda
			Pengembangan Data dan Informasi									Statistik	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Pernakan

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2018	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2016	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016			TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RKPD TAHUN BERJALAN (2018)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD S/D TAHUN BERJALAN (2018)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPD TAHUN 2017	REALISASI RKPD TAHUN 2017	TINGKAT AT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2018	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2018 (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
		Pengembangan data/informasi	Meningkatnya wawasan masyarakat terhadap Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1000 cd, 1000 buku							95	Statistik	Biro Umum dan Perlengkapan
2	2	<b>KEARSIPAN</b>											
4		<b>RUTIN</b>											
		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	0%	100%				Kearsipan	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	0%	100%				Kearsipan	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
		Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan disiplin aparatur pegawai	100%	100%	100%	0%	100%				Kearsipan	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100%	100%	100%	0%	100%				Kearsipan	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
		<b>WAJIB</b>											
2	2	1 Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Persentase SKPD Perpustakaan Arsip Kab/kota yang baik pengelolaan kearsipannya	100.00%	80.00%	90%	0%	100.00%			100%	Kearsipan	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
2	2	2 Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Pertumbuhan dokumen/arsip daerah yang berhasil diselamatkan	250 arsip	230 arsip	240 arsip	240 arsip	250 arsip			250 arsip	Kearsipan	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
2	2	3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kearsipan	Persentase Arsip yang terpelihara	100%	83.33	83.33%		100%			300 arsip	Kearsipan	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
2	2	4 Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Kearsipan	Persentase desa/kelurahan yang telah mendapat pelayanan informasi kearsipan	24.19%	21.50%	21.50%		24.19%			186 desa	Kearsipan	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
2	2	5 Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan	Persentase SKPD di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang baik pengelolaan kearsipannya	100.00%		85%	0%	100.00%			100%	Kearsipan	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
2	2	<b>KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>											
		<b>RUTIN</b>											
		Pelayanan Administrasi Perkantoran	terlaksananya pelayanan adm. Perkantoran	100%	100%	100%	0%	100%			100%	Komunikasi dan Informatika	Diskominfo
		Peningkatan Sarana	Meningkatnya sarana dan	100%	100%	100%	0%	100%			100%	Komunikasi	Diskominfo

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2018	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2016	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016			TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RKPD TAHUN BERJALAN (2018)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD S/D TAHUN BERJALAN (2018)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPD TAHUN 2017	REALISASI RKPD TAHUN 2017	TINGKAT AT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2018	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2018 (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
		dan Prasarana Aparatur	prasarana aparatur									dan Informatika	
		Peningkatan Disiplin Aparatur	terwujudnya disiplin aparatur	100%	100%	100%	0%	100%			100%	Komunikasi dan Informatika	Diskominfo
		<b>WAJIB</b>											
2	2	1 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase SKPD yang melaksanakan e-Government	100%	100%	100%	0%	100%			100%	Komunikasi dan Informatika	Diskominfo
			Persentase SKPD yang melaksanakan e-Government	-	-	-		-			-	Komunikasi dan Informatika	Dinas PU
2	2	2 Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi	Meningkatnya jumlah invensi dan inovasi bidang komunikasi dan telekomunikasi	100%	100%	100%	0%	100%			100%	Komunikasi dan Informatika	Diskominfo
2	2	3 Fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan Informasi	Terwujudnya kualitas SDM	informasi dan publikasi bidang kesejahataraan	stq/mtq,safari ramadhan,pemberangktan jamaah haji	informasi dan publikasi bidang kesejahataraan		informasi dan publikasi bidang kesejahataraan			Informasi dan publikasi bidang kesejahataraan	Komunikasi dan Informatika	Biro Kesra
2	2	4 Kerjasama Informasi dan Media Massa	Pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi	100%	100%	100%	0%	100%			100%	Komunikasi dan Informatika	Diskominfo
2	2	5 Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Masih adanya SKPD yang tidak menyampaikan laporan secara lengkap	Jumlah Operator SiRUP dan e-Monev	Jumlah Operator SiRUP dan e-Monev, Aplikasi e-monev	Jumlah Operator SiRUP dan e-Monev		Jumlah Operator SiRUP dan e-Monev			jumlah operator SiRUP dan e-monev (35 SKPD dan 7 Biro), 1 Aplikasi	Komunikasi dan Informatika	Biro Pembangunan
		Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi		-	-	-		-			-	Komunikasi dan Informatika	Diskominfo
												Komunikasi dan Informatika	Biro Kesra
2	2	6 Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat		100%	-	100%	0%	100%			100%	Komunikasi dan Informatika	Diskominfo
2	2	<b>PERPUSTAKAAN</b>											
2	2	1 Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Persentase perpustakaan aktif (%)	85.73%	85.73%	85.73%		85.73%			87%	Perpustakaan	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
			Pertumbuhan jumlah kunjungan di perpustakaan Provinsi	500 org	-3321 org	1221 org		500 org			3500 org	Perpustakaan	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
		Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan	Rasio jumlah buku di perpustakaan KTM batu betumpang dengan jumlah	-	-	-		-			1	Perpustakaan	Badan Perpustakaan dan Arsip

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2018	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2016	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016			TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RKPD TAHUN BERJALAN (2018)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD S/D TAHUN BERJALAN (2018)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPD TAHUN 2017	REALISASI RKPD TAHUN 2017	TINGK AT REALIS ASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2018	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2018 (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
	Perpustakaan	penduduk di kawasan KTM Batu Betumpang											Daerah
3	URUSAN PILIHAN												
3 1	PERTANIAN												
	RUTIN												
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran										Pertanian	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur										Pertanian	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
	Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan disiplin aparatur pegawai										Pertanian	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur										Pertanian	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan										Pertanian	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran										Pertanian	Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur										Pertanian	Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
	Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan disiplin aparatur pegawai										Pertanian	Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur										Pertanian	Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
	WAJIB												
3 1 1	Peningkatan Kesejahteraan Petani	Meningkatnya kesejahteraan petani (%)	tinggi ????					tinggi ????			tinggi ????	Pertanian	Dinas Pertanian, Perkebunan dan

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2018	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2016	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016			TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RKPD TAHUN BERJALAN (2018)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD S/D TAHUN BERJALAN (2018)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPD TAHUN 2017	REALISASI RKPD TAHUN 2017	TINGK AT REALIS ASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2018	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2018 (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
		(Pertanian/ Perkebunan/ Pernakan)											Pernakan
		Peningkatan Kesejahteraan Petani	Meningkatnya pengetahuan, sikap dan keterampilan (PSK) petani (%)	100%	100%		0%					Pertanian	Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
3	1	2 Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/ Perkebunan	Meningkatnya kesejahteraan petani (%)									Pertanian	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Pernakan
3	1	3 Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan	Meningkatnya jumlah petani yang menerapkan teknologi Pertanian/Perkebunan/Pernakan (%)	100	50	66.67		100			50	Pertanian	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Pernakan
			Meningkatnya jumlah kelompok tani yang menerapkan SOP GAP (%)		100%	100%	0%					Pertanian	Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
3	1	4 Peningkatan Produksi Pertanian /Perkebunan	Meningkatnya produksi pertanian/perkebunan (%)	100	83.46	91.71		100			100	Pertanian	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Pernakan
			Rasio luas lahan karet dengan jumlah desa di kawasan KTM Batu Betumpang	75.00%				75.00%			75	Pertanian	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Pernakan
3	1	5 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Menurunnya angka kesakitan dan kematian ternak akibat penyakit menular (rasio)	0.5				0.5			0.5	Pertanian	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Pernakan
3	1	6 Peningkatan Produksi Hasil Pernakan	Meningkatnya produksi hasil peternakan (%)	100	82.64	90.91		100				Pertanian	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Pernakan
3	1	7 Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan (%)	85.75	79.5	82.75		85.75			100	Pertanian	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Pernakan
3	1	8 Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pernakan	Meningkatnya daya serap pasar terhadap hasil produksi komoditas peternakan (%)	100				100			100	Pertanian	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Pernakan
3	2	<b>KEHUTANAN</b>											
		<b>RUTIN</b>											
		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran									Kehutanan	Dinas Kehutanan
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur									Kehutanan	Dinas Kehutanan



KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2018	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2016	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016			TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RKPD TAHUN BERJALAN (2018)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD S/D TAHUN BERJALAN (2018)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPD TAHUN 2017	REALISASI RKPD TAHUN 2017	TINGK AT REALIS ASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2018	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2018 (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
		Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan disiplin aparatur pegawai									Kehutanan	Dinas Kehutanan
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur										Kehutanan	Dinas Kehutanan
		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan										Kehutanan	Dinas Kehutanan
		Pendidikan kedinasan											
		<b>WAJIB</b>											
3	2	1 Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan	tingkat pemanfaatan potensi sumberdaya hutan (rekomendasi)	5	4 kelompok	1 provinsi		5			5	Kehutanan	Dinas Kehutanan
3	2	2 Peningkatan Fungsi dan Daya dukung DAS berbasis Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat pengelolaan DAS berbasis masyarakat (%)	Tersusunnya dokumen pengelolaan DAS terpadu, sehingga terciptanya fungsi DAS dalam menampung tata air dan memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat di hulu dan hilir	terkendalinya pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan pada DAS prioritas	-		Tersusunnya dokumen pengelolaan DAS terpadu, sehingga terciptanya fungsi DAS dalam menampung tata air dan memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat di hulu dan hilir			Tersusunnya dokumen pengelolaan DAS terpadu, sehingga terciptanya fungsi DAS dalam menampung tata air dan memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat di hulu dan hilir	Kehutanan	Dinas Kehutanan
3	2	3 Perencanaan dan Pengembangan Hutan	terjaminnya kepastian kawasan hutan sesuai fungsi hutan (%)	Terjaminnya kepastian kawasan hutan terlaksananya penatagunaan kawasan hutan sehingga pengelolaan sumber daya hutan dapat dilaksanakan secara optimal	Terjaminnya kepastian kawasan hutan terlaksananya penatagunaan kawasan hutan sehingga pengelolaan sumber daya hutan dapat dilaksanakan secara optimal	-		Terjaminnya kepastian kawasan hutan terlaksananya penatagunaan kawasan hutan sehingga pengelolaan sumber daya hutan dapat dilaksanakan secara optimal			Terjaminnya kepastian kawasan hutan terlaksananya penatagunaan kawasan hutan sehingga pengelolaan sumber daya hutan dapat dilaksanakan secara optimal	Kehutanan	Dinas Kehutanan
		Perencanaan dan Pengembangan Kehutanan										Kehutanan	Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
3	2	4 Perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Jumlah pelanggaran hutan yang ditindaklanjuti (%) dan penurunan luas kebakaran kawasan hutan (Ha)	Terlaksananya penanganan tindak pidana kehutanan tahap P.21, tersedianya 60 orang tenaga pengamanan swakarsa dan 10 polisi	Terlaksananya penanganan tindak pidana kehutanan tahap P.21, tersedianya 60 orang tenaga pengamanan swakarsa dan 10 polisi	-		Terlaksananya penanganan tindak pidana kehutanan tahap P.21, tersedianya 60			Terlaksananya penanganan tindak pidana kehutanan tahap P.21, tersedianya 60	Kehutanan	Dinas Kehutanan

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2018	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2016	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016			TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RKPD TAHUN BERJALAN (2018)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD S/D TAHUN BERJALAN (2018)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPD TAHUN 2017	REALISASI RKPD TAHUN 2017	TINGK AT REALIS ASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2018	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2018 (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
			kehutanan (PNS)	kehutanan (PNS)				orang tenaga pengamanan swakarsa dan 10 polisi kehutanan (PNS)			orang tenaga pengamanan swakarsa dan 10 polisi kehutanan (PNS)		
3	2	5 Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Penurunan Luas Lahan Kritis (%)	Terkendalinya pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan pada daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas	-	-		Terkendalinya pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan pada daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas			Terkendalinya pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan pada daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas	Kehutanan	Dinas Kehutanan
3	2	6 Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan	tingkat ketaatan pelaku industri hasil hutan (%)	-	-	-		-			-	Kehutanan	Dinas Kehutanan
3	2	7 Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Terbentuknya kesatuan pengelolaan hutan/KPH (13 unit)	terbentuknya dan beroprasinya KPHL, sebagai unit pengelolaan dalam upaya peningkatan usaha hutan tanamandan hutan alam	-	-		terbentuknya dan beroprasinya KPHL, sebagai unit pengelolaan dalam upaya peningkatan usaha hutan tanamandan hutan alam			terbentuknya dan beroprasinya KPHL, sebagai unit pengelolaan dalam upaya peningkatan usaha hutan tanamandan hutan alam	Kehutanan	Dinas Kehutanan
3	2	8 Peningkatan Data/Informasi/Statistik Kehutanan	ketersediaan data dan informasi kehutanan (dokumen)	-	-	-		-			-	Kehutanan	Dinas Kehutanan
3	3	<b>ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL</b>											
		<b>RUTIN</b>											
		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran									Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Pertambangan dan Energi
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur									Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Pertambangan dan Energi
		Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan disiplin aparatur pegawai									Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Pertambangan dan Energi
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur										Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Pertambangan dan Energi
		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan										Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Pertambangan dan Energi
		<b>WAJIB</b>											
3	3	1 Pembinaan dan Pengawasan Minyak	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha di bidang minyak dan gas	75	30 M Rupiah	100%	0%	75			75	Energi dan Sumber Daya	Dinas Pertambangan

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2018	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2016	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016			TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RKPD TAHUN BERJALAN (2018)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD S/D TAHUN BERJALAN (2018)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPD TAHUN 2017	REALISASI RKPD TAHUN 2017	TINGK AT REALIS ASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2018	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2018 (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
		dan Gas Bumi	bumi (%)									Mineral	dan Energi
3	3	2	Pembinaan dan Pengusahaan Mineral, Panas Bumi dan Air Tanah	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha di bidang pertambangan (%)	120 Izin Usaha Pertambangan dan 40 Perusahaan pertambangan	60 Izin Usaha Pertambangan & 10 Perusahaan Pertambang	90 Izin Usaha Pertambangan & 20 Perusahaan pertambangan	120 Izin Usaha Pertambangan dan 40 Perusahaan pertambangan			150 Izin Usaha Pertambangan & 60 Perusahaan pertambangan	Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Pertambangan dan Energi
				Meningkatnya pendapatan daerah dari sektor pertambangan (%)	260 M Rupiah	195 M Rupiah		260 M Rupiah			325 M Rupiah	Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Pertambangan dan Energi
3	3	3	Pembinaan dan Pengembangan Ketenagalistrikan	Persentase elektrifikasi (%)	1 PLTS Terpusat, 200 unit PJU dan sarana umum menggunakan EBT,	100 unit PJU dan sarana umum menggunakan EBT, 60% sparepart pembangkit listrik energi baru terbarukan	-	1 PLTS Terpusat, 200 unit PJU dan sarana umum menggunakan EBT,			2 PLTS Terpusat, 300 unit PJU dan sarana umum menggunakan EBT,	Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Pertambangan dan Energi
3	3	4	Penelitian/Pengemb an ESDM dan Air Tanah	Tersedianya data potensi ESDM dan air tanah	60 titik geolistrik, 40 laporan penyelidikan kebumian dan 40 laporan supervisi pengelolaan air tanah	20 titik geolistrik	40 titik geolistrik, 20 laporan penyelidikan kebumian dan 20 laporan supervisi pengelolaan air tanah	60 titik geolistrik, 40 laporan penyelidikan kebumian dan 40 laporan supervisi pengelolaan air tanah			60 laporan penyelidikan kebumian dan 60 laporan supervisi pengelolaan air tanah	Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Pertambangan dan Energi
3	4		PARIWISATA										
3	4	1	Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Tingkat pergerakan wisatawan nusantara & kunjungan wisatawan mancanegara (%)	75	100%	100%	75			75	Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	4	2	Pengembangan Destinasi Pariwisata	Objek wisata terkelola baik (%)	10	0	0	10			10	Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			Pengembangan destinasi pariwisata		10 desa wisata	100%	100%	10 desa wisata			10 desa wisata	Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			Pengembangan Destinasi Pariwisata		50	100%	100%	50			90	Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	4	3	Pengembangan Kemitraan	Tingkat kemitraan pelaku budaya dan pariwisata (%)	75	100%	100%	75			75	Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	4	4	Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya	Meningkatnya pengembangan ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya (%)	10	0	0	10			10	Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	4	5	Pengembangan Pulau Belitung sebagai destinasi pariwisata internasional	Pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara (%)		100%	100%					Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
3	5		KELAUTAN DAN PERIKANAN										
			RUTIN										

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2018	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2016	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016			TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RPKD TAHUN BERJALAN (2018)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD S/D TAHUN BERJALAN (2018)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPd TAHUN 2017	REALISASI RKPd TAHUN 2017	TINGK AT REALIS ASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2018	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2018 (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	0%	100%				Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	0%	100%				Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan disiplin aparatur pegawai	100%	100%	100%	0%	100%				Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	-	-		-				Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	-	-		-				Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Dukungan Manajemen dan Teknis Kelautan dan Perikanan	Persentase tercapainya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di Lingkup DKP	100%	100%	100	0%	100%				Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
		<b>WAJIB</b>											
3	5	1 Pengelolaan dan Pengawasan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta Sumber Daya Perikanan	Luas Kawasan Konservasi Laut dan Perairan (Ha) dan jumlah POKMASWAS Aktif	Luas Kawasan Konservasi Laut dan Perairan : 550.000 Ha dan 35 kelompok POKMASWAS Aktif	Luas Kawasan Konservasi Laut dan Perairan : 180,02 Ha dan 145,55 kelompok POKMASWAS Aktif	Luas Kawasan Konservasi Laut dan Perairan : 500.000 Ha dan 35 kelompok POKMASWAS Aktif	Luas Kawasan Konservasi Laut dan Perairan : 162 Ha dan 176,67 kelompok POKMASWAS Aktif	Luas Kawasan Konservasi Laut dan Perairan : 550.000 Ha dan 35 kelompok POKMASWAS Aktif			Luas Kawasan Konservasi Laut dan Perairan : 550.000 Ha dan 35 kelompok POKMASWAS Aktif	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	5	2 Pengembangan Perikanan Budidaya	Peningkatan produksi perikanan budidaya (ton) dan Produksi Benih (Ekor)	Produksi Perikanan Budidaya 17.080 ton dan 50.000.000 ekor benih	Produksi Perikanan Budidaya 11.175 ton 25.000.000 ekor benih	Produksi Perikanan Budidaya 13.765 ton dan 31.000.000 ekor benih	Peningkatan produksi perikanan budidaya (ton): 16,21	Produksi Perikanan Budidaya 17.080 ton dan 50.000.000 ekor benih			Produksi Perikanan Budidaya 17.080 ton dan 50.000.000 ekor benih	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	5	3 Pengembangan Perikanan Tangkap	Peningkatan produksi perikanan tangkap (ton) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Produksi Perikanan Tangkap 181.000 ton, NTN : 111	Produksi Perikanan Tangkap 169.000 ton, NTN : 107	Produksi Perikanan Tangkap 175.000 ton, NTN : 109	Peningkatan produksi perikanan tangkap (ton): 104,06; NTN: 105,21	Produksi Perikanan Tangkap 181.000 ton, NTN : 111			Produksi Perikanan Tangkap 181.000 ton, NTN : 111	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	5	5 Pengembangan, Pengolahan, Pemasaran, Pengujian dan Pengendalian Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	Nilai konsumsi ikan (Kg/Kap/Tahun) dan Volume Produksi Olahan (ton)	Nilai Konsumsi Ikan : 49 (Kg/Kapita/Tahun) dan 24.000 Ton Produk Olahan	Nilai Konsumsi Ikan : 47 (Kg/Kapita/Tahun) dan 19.000 Ton Produk Olahan	Nilai Konsumsi Ikan : 48 (Kg/Kapita/Tahun) dan 21.000 Ton Produk Olahan	Nilai konsumsi ikan (Kg/Kap/Tahun): 105,21 dan Volume Produksi Olahan (ton): 97,84	Nilai Konsumsi Ikan : 49 (Kg/Kapita/Tahun) dan 24.000 Ton Produk Olahan			Nilai Konsumsi Ikan : 49 (Kg/Kapita/Tahun) dan 24.000 Ton Produk Olahan	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	6	<b>PERDAGANGAN</b>											
		<b>RUTIN</b>											
		Pelayanan Administrasi	Persentase pelayanan administrasi perkantoran									Perdagangan	Dinas Perindustrian

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2018	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2016	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016			TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RKPD TAHUN BERJALAN (2018)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD S/D TAHUN BERJALAN (2018)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPD TAHUN 2017	REALISASI RKPD TAHUN 2017	TINGK AT REALIS ASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2018	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2018 (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
	Perkantoran												dan Perdagangan
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur										Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan disiplin aparatur pegawai										Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur										Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase peeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan										Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	<b>WAJIB</b>												
3 6	1 Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Perlindungan konsumen dan pengamanan komoditas perdagangan bahan pokok (%)	50	100%	-			50			50	Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			1%		1%			1%				Perdagangan	Biro Perekonomian
3 6	2 Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Meningkatnya penataan usaha perdagangan (%)	7	100%	-			7			7	Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3 6	3 Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Meningkatnya nilai ekspor komoditas unggulan daerah (US \$)		100%	-							Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3 7	<b>PERINDUSTRIAN</b>												
3 7	1 Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Meningkatnya asosiasi UMKM (%)	75	100%	-			75			75	Perindustrian	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3 7	2 Penataan Struktur Industri	Meningkatnya kelas struktur industri (%)	tinggi	100%	-			tinggi			tinggi	Perindustrian	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3 7	3 Pengembangan Sentra - sentra Industri Potensial	Meningkatnya jumlah sentra- sentra industri potensial (%)	2	1	-			2			2	Perindustrian	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3 7	4 Pengembangan Industri Berbasis Sumber Daya Alam (Agro dan Non Agro)	Meningkatnya nilai tambah industri berbasis sumber daya alam (%)	7	100%	-			7			7	Perindustrian	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3 7	5 Pengembangan	Meningkatnya nilai tambah		-	-							Perindustrian	Dinas

KODE	URUSAN/BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RPJMD TAHUN 2018	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2016	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2016			TARGET PROGRAM/ KEGIATAN RKPD TAHUN BERJALAN (2018)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RPJMD S/D TAHUN BERJALAN (2018)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
					TARGET RKPD TAHUN 2017	REALISASI RKPD TAHUN 2017	TINGK AT REALIS ASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2018	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET S/D TAHUN 2018 (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=(5+7+9)	11=10/4			12
		Industri Kecil dan Menengah Komoditi Kerajinan	industri berbasis komoditi kerajinan (%)										Perindustrian dan Perdagangan
3	7	6 Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Meningkatkan penggunaan teknologi industri (%)	-	-							Perindustrian	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	8	KETRANSMIGRASIAN											
3	8	1 Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Prosentase kawasan transmigrasi yang didukung oleh kebijakan/perencanaan		100%		0%	100%			600 KK	Ketransmigrasian	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		2 Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	Prosentase kawasan transmigrasi yang masyarakatnya dibina		100%		0%	100%			100%	Ketransmigrasian	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
JUMLAH													

**Tabel II.138**  
Rangkuman dan Keterkaitan Permasalahan terhadap  
Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2017

No	Perangkat Daerah	Nilai Capaian Kinerja	Rangkuman Hasil Evaluasi	Permasalahan Pembangunan	Ket
1	Dinas Pendidikan	95,82%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pencapaian kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2017 dikategorikan berpredikat Sangat Tinggi dengan jumlah rata rata capaian keseluruhannya mencapai 95,82%</li> <li>- Dari 5 (lima) target sasaran strategis yang ditetapkan, terdapat 4 (empat) sasaran strategis dengan indikatornya mencapai kinerja 75% - 100% atau sebesar 80% dari keseluruhan persentase. 1 (satu) sasaran strategis atau sebesar 20% dari keseluruhan persentase yaitu yang capaiannya 65,56% adalah sasaran strategis <i>Layanan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Berkualitas bagi seluruh masyarakat</i> masih terkategori Sedang dengan rincian 7 indikator telah melebihi target, 8 indikator sesuai target dan sebanyak 14 indikator belum mencapai target yang ditetapkan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan/Standar Pelayanan Minimal disetiap satuan pendidikan.</li> <li>- Masih rendahnya mutu dan relevansi pendidikan.</li> <li>- Masih belum meratanya pemahaman masyarakat tentang arti pentingnya pendidikan terutama bagi keluarga, orang tua dan masyarakat di daerah pedesaan.</li> </ul>	
2	Dinas Kesehatan	96,28%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2017 dikategorikan berpredikat Sangat Tinggi dengan jumlah rata rata capaian keseluruhannya mencapai 96,28%</li> <li>- Pengukuran, evaluasi dan analisis capaian sasaran strategi diukur melalui 6 (enam) indikator kinerja sasaran yang diperoleh dari 20 indikator kinerja program dan dilaksanakan melalui 17 (tujuh belas) program dan 22 (dua puluh dua) kegiatan. Dari 6 (enam) indikator kinerja kelompok sasaran yang ditetapkan, ada beberapa pencapaian indikator kinerja yang masih belum mencapai target seperti <i>Menurunnya angka kesakitan di masyarakat akibat penyakit menular, penyakit tidak menular, dan dampak lingkungan dan Meningkatnya sistem pengembangan manajemen yang tertata dan pemberdayaan SDM kesehatan melalui</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perilaku masyarakat yang tidak memperhatikan aspek kebersihan lingkungan,</li> <li>- Angka harapan hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang masih belum terlalu tinggi,</li> <li>- Masih tingginya angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian bayi yang terlihat dari jumlah kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015 berada pada angka 115,05.</li> <li>- Masih tingginya penyakit menular (kasus HIV/AIDS, Diare dan DBD)</li> <li>- Jumlah tenaga kesehatan yang jumlahnya masih belum optimal. Hal ini terlihat dari rasio dokter, perawat dan bidan per 100.000</li> </ul>	



No	Perangkat Daerah	Nilai Capaian Kinerja	Rangkuman Hasil Evaluasi	Permasalahan Pembangunan	Ket
			<i>standarisasi, sertifikasi dan pendidikan berkelanjutan</i> capaian sasaran strategis masih belum optimal.	penduduk masih belum optimal.	
3	Rumah Sakit Umum Provinsi	86,16%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pencapaian kinerja Rumah Sakit Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2017 dikategorikan berpredikat Tinggi dengan jumlah rata rata capaian keseluruhannya mencapai 86,16%</li> <li>- Dari 6 (enam) sasaran terdapat 3 (tiga) sasaran yang telah mencapai target dan 3 (tiga) sasaran yang belum tercapai. Untuk sasaran yang belum tercapai yaitu (1) <i>Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit</i>, (2) <i>Meningkatkan sarana dan prasarana rumah sakit sesuai standar kelas B</i> dan (3) <i>Meningkatnya kuantitas tenaga kesehatan rumah sakit</i>. Perlu dilakukan upaya maksimal untuk mencapai target indikator sasaran.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum optimalnya pelayanan yang telah ada karena keterbatasan peralatan, gedung dan prasarana untuk Rumah Sakit kelas B</li> <li>- Monitoring, evaluasi dan analisis terhadap Kebijakan, Program-Program, Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Prosedur Operasional (SPO) dan hasil kegiatan belum optimal</li> <li>- Kurangnya jumlah dan kualifikasi tenaga medis, keperawatan dan tenaga teknis lainnya untuk memenuhi standar pelayanan Rumah Sakit Rumah Sakit kelas B</li> <li>- Banyaknya Rumah Sakit Swasta di Provinsi Kep. Bangka Belitung yang mengikuti program BPJS Kesehatan yang merupakan pesaing dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan</li> </ul>	
4	Rumah Sakit Jiwa	94,78%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pencapaian kinerja Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2017 dikategorikan berpredikat Sangat Tinggi dengan jumlah rata rata capaian keseluruhannya mencapai 94,78%.</li> <li>- Dari 5 (lima) sasaran strategis yang hendak dicapai, sebagian besar mengalami peningkatan. Namun masih terdapat beberapa indikator belum dapat dicapai yaitu Sasaran Strategis <i>Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan rumah sakit</i> dengan capaian kinerja yang diperoleh 76%. Kemudian Sasaran Strategis <i>Meningkatkan sarana dan prasarana rumah sakit</i> capaian kinerja yang diperoleh 88%,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih banyaknya Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) serta korban penyalahgunaan NAPZA yang belum mendapatkan akses pelayanan kesehatan</li> <li>- Masih banyak ODGJ yang tidak memiliki jaminan kesehatan</li> <li>- Stigma di masyarakat yang masih malu untuk datang berobat ke rumah sakit jiwa</li> <li>- Fasilitas bangunan utama dan penunjang serta peralatan kesehatan yang belum memadai</li> </ul>	
5	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	83,75%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2017 dikategorikan berpredikat Tinggi dengan jumlah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum tersedianya database tentang sistem jaringan jalan dan jembatan yang valid dan lengkap serta pemanfaatan informasi tentang</li> </ul>	

No	Perangkat Daerah	Nilai Capaian Kinerja	Rangkuman Hasil Evaluasi	Permasalahan Pembangunan	Ket
			<p>rata rata capaian keseluruhannya mencapai 83,75%</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sasaran strategis pertama <i>Meningkatnya kualitas layanan jalan provinsi</i> dengan indikator persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap pada tahun 2017 dapat tercapai 93%. Sasaran strategis kedua <i>Meningkatnya kualitas layanan jaringan irigasi</i> dengan indikator Persentase daerah irigasi yang terairi hanya dapat tercapai 68,99%.</li> </ul>	<p>kondisi infrastruktur provinsi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penerimaan retribusi tidak seimbang dengan biaya operasional pemeliharaan jalan dan jembatan</li> <li>- Rendahnya realisasi rencana aksesibilitas jalan dalam rangka pengembangan ekonomi daerah dan masyarakat serta terbatasnya akses jalan bagi masyarakat daerah terpencil dan pesisir.</li> <li>- Masih lemahnya penegakan hukum dalam implementasi pengendalian pemanfaatan ruang</li> <li>- Belum maksimalnya perencanaan pemanfaatan penataan ruang</li> </ul>	
6	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	93,94%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pencapaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2017 dikategorikan berpredikat Sangat Tinggi dengan jumlah rata rata capaian keseluruhannya mencapai 93,94%</li> <li>- Untuk capaian sasaran strategis <i>Meningkatnya kualitas penataan bangunan dan lingkungan</i> masih belum sesuai dengan target.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum maksimalnya penataan perumahan Layak Huni bagi keluarga miskin.</li> <li>- Masih minim fasilitas ruang terbuka hijau</li> </ul>	
7	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah	97,83%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pencapaian kinerja Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2017 dikategorikan berpredikat Sangat Tinggi dengan jumlah rata rata capaian keseluruhannya mencapai 97,83%</li> <li>- Capaian atas indikator sasaran yang ditargetkan sudah diatas 90% dimana sasaran strategi yang dilaksanakan adalah <i>Meningkatnya sinkronisasi dan keselarasan antar dokumen perencanaan daerah; Meningkatkan kualitas data dan informasi pembangunan; Meningkatkan kualitas hasil pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah.</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih kurang tersedianya data informasi sebagai data pendukung perencanaan</li> <li>- Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi perencanaan</li> <li>- Belum optimalnya Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi (KISS) dalam perencanaan program pembangunan.</li> <li>- Masih rendahnya implikasi hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan</li> </ul>	

No	Perangkat Daerah	Nilai Capaian Kinerja	Rangkuman Hasil Evaluasi	Permasalahan Pembangunan	Ket
8	Dinas Perhubungan	90,68%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pencapaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2017 dikategorikan berpredikat Sangat Tinggi dengan jumlah rata rata capaian keseluruhannya mencapai 90,68%</li> <li>- Dari 3 (tiga) sasaran yang dimiliki Dinas Perhubungan terdapat 2 sasaran yang tercapai melebihi target dan 1 sasaran yang memiliki capaian 80%. Sasaran yang masih belum memenuhi target yaitu <i>Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan dalam rangka mendukung konektivitas, pertumbuhan ekonomi dan perkembangan wilayah</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rendahnya disiplin berlalu lintas pengguna jalan, sehingga sering mengakibatkan kemacetan dan kecelakaan;</li> <li>- Jumlah kecelakaan dan pelanggaran yang masih tinggi yang diakibatkan kurangnya fasilitas perlengkapan jalan, dan pertumbuhan jumlah penduduk serta kendaraan yang tidak sebanding dengan kapasitas jalan;</li> <li>- Jaringan trayek yang belum terstruktur , teratur, terpadu, mengakibatkan pelayanan angkutan umum belum efektif dan efisien;</li> <li>- Belum Optimalnya Pengembangan Bandara H.AS. Hanandjoeddin, Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung;</li> </ul>	
9	Dinas Lingkungan Hidup	74,56%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2017 dikategorikan berpredikat Sedang dengan jumlah rata rata capaian keseluruhannya mencapai 74,56%</li> <li>- Masih terdapat capaian sasaran strategis yang belum tercapai secara optimal yaitu <i>Meningkatnya Peran Aktif Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</i> serta sasaran strategis <i>Meningkatnya Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup sesuai dengan Standar Pelayanan Publik</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan seperti sumber daya tambang, yang masih mengabaikan kelestarian lingkungan akan mengakibatkan penurunan daya dukung lingkungan dan penurunan kualitas-kuantitas SDA;</li> <li>- Kurang berfungsinya aparaturnya penegak hukum dalam menindak permasalahan permasalahan lingkungan</li> <li>- Masih rendahnya tingkat kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup;</li> <li>- Permasalahan banjir;</li> <li>- Degradasi lingkungan sungai dan pantai akibat pertambangan;</li> <li>- Belum optimalnya pengelolaan lahan kritis.</li> </ul>	

No	Perangkat Daerah	Nilai Capaian Kinerja	Rangkuman Hasil Evaluasi	Permasalahan Pembangunan	Ket
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan, Pencatatan Sipil Dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana	65,36%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan, Pencatatan Sipil Dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2017 dikategorikan berpredikat Sedang dengan jumlah rata rata capaian keseluruhannya mencapai 65,36%</li> <li>- Untuk kinerja pencapaian sasaran di tahun 2017, masih terdapat sasaran kinerja yang belum optimal dicapai yaitu <i>Meningkatnya Penerapan PUG dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dalam Pembangunan</i>.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.</li> <li>- Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan.</li> <li>- Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.</li> <li>- Kurangnya partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak</li> <li>- Belum optimalnya pendayagunaan database kependudukan baik provinsi maupun kabupaten/kota.</li> </ul>	
11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pencapaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2017 dikategorikan berpredikat Sangat Tinggi dengan jumlah rata rata capaian keseluruhannya mencapai 100%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih kurangnya pelatihan tanggap darurat untuk bencana banjir</li> </ul>	

No	Perangkat Daerah	Nilai Capaian Kinerja	Rangkuman Hasil Evaluasi	Permasalahan Pembangunan	Ket
12	Dinas Sosial	86,74%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pencapaian kinerja Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2017 dikategorikan berpredikat Tinggi dengan jumlah rata rata capaian keseluruhannya mencapai 86,74%</li> <li>- Sasaran strategis yang belum tercapai secara optimal yaitu <i>Meningkatnya Bantuan social Bagi PMKS</i> dan sasaran <i>Meningkatnya partisipasi debitur yang berkomitmen untuk mengembalikancicilan kupem</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan BDT, data penerima bantuan, dan data PMKS yang masih belum dilakukan secara terintegrasi sehingga memperbesar <i>inclusion</i> dan <i>exclusion error</i>.</li> <li>- Kualitas dan akses layanan pelayanan dasar yang masih beragam dan belum terstandar.</li> <li>- Keterbatasan infrastruktur sosial yang sangat dibutuhkan dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.</li> <li>- Belum optimalnya pemberdayaan ekonomi penduduk miskin dan rentan</li> <li>- Belum optimalnya sertifikasi terhadap SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial dan akreditasi terhadap lembaga kesejahteraan sosial (LKS).</li> </ul>	
13	Dinas Tenaga Kerja	74,25%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pencapaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2017 dikategorikan berpredikat Sedang 74,25%</li> <li>- Dari 4 (empat) sasaran strategis yang hendak dicapai, masih terdapat 1 (satu) indikator belum dapat dicapai yaitu <i>Meningkatnya kualitas tenaga kerja</i> dengan nilai capaian sebesar 70,39% dari target.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rendahnya tingkat pendidikan</li> <li>- Kurangnya perhatian perusahaan terhadap pekerja</li> </ul>	
14	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	99,90%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2017 dikategorikan berpredikat Sangat Tinggi dengan jumlah rata rata capaian keseluruhannya mencapai 99,90%</li> <li>- Sasaran yang belum tercapai secara optimal adalah sebagai berikut: Sasaran strategis pertama <i>"Meningkatnya minat penanaman modal melalui efektifitas kegiatan promosi yang tepat sasaran"</i> dengan indikator Jumlah minat (calon investor) investasi yang dicatat melalui berbagai kegiatan promosi, pada tahun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum adanya penyederhanaan kebijakan kemudahan berusaha.</li> <li>- Data potensi investasi yang terbaru sektor komoditi belum terolah dengan baik.</li> <li>- Belum adanya peluang investasi yang siap ditawarkan pada setiap sektor.</li> <li>- Belum dilakukan pemberdayaan usaha melalui fasilitasi kemitraan usaha.</li> <li>- Belum optimalnya promosi investasi dalam dan luar negeri.</li> </ul>	

No	Perangkat Daerah	Nilai Capaian Kinerja	Rangkuman Hasil Evaluasi	Permasalahan Pembangunan	Ket
			<p>2017 tercapai 7 calon investor. Sasaran strategis kedua <i>"Meningkatnya nilai realisasi penanaman modal"</i> dengan indikator Persentase peningkatan nilai realisasi investasi PMA/PMDN, pada tahun 2017 tercapai hanya 29,11%. Sasaran strategis ketiga <i>"Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan terpadu"</i> dengan indikator Indeks kepuasan masyarakat (IKM), pada tahun 2017 mencapai 84,22.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih rendahnya kepatuhan perusahaan dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).</li> <li>- sistem aplikasi pelayanan</li> <li>- Kesulitan dalam pengawasan perusahaan.</li> </ul>	
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	93,75%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pencapaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2017 dikategorikan berpredikat Sangat Tinggi dengan jumlah rata rata capaian keseluruhannya mencapai 93,75%</li> <li>- Pencapaian sasaran strategis telah menunjukkan kinerja yang cukup baik, bahkan ada beberapa yang capaian indikatornya melebihi 100%. Namun masih ada sasaran strategis yang belum dicapai secara maksimal yaitu <i>Meningkatnya Pertumbuhan Koperasi</i> yang sebesar 15,5%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum optimalnya upaya pengembangan volume usaha baik koperasi maupun UKM;</li> <li>- Belum optimalnya fasilitasi akses sumber permodalan bagi Koperasi dan UKM;</li> <li>- Belum standarnya desain <i>packaging</i> produk KUKM;</li> <li>- Masih rendahnya akses anggota koperasi dan UKM terhadap perbankan</li> <li>- Belum optimalnya tata kelola koperasi dan UKM yang bergerak pada usaha-usaha untuk menopang sector pariwisata dan pengolahan hasil perikanan dan pertanian.</li> </ul>	
16	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	95,83%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pencapaian kinerja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2017 dikategorikan berpredikat Sangat Tinggi dengan jumlah rata rata capaian keseluruhannya mencapai 95,83%</li> <li>- Pencapaian untuk pelestarian warisan budaya benda menjadi terhambat dikarenakan untuk penetapan cagar budaya di daerah di perlukan Tim Ahli yang bersertifikasi dimana belum jelas kelengkapan teknis, seperti petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaannya menjadi permasalahan hampir di semua daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Sehingga sampai saat ini upaya pelestarian hanya dilakukan pada cagar budaya yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Secara keseluruhan capaian bidang kebudayaan adalah 56% atau hanya 9 warisan budaya yang dilestarikan dari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih kurangnya minat dan antusias para remaja terhadap pelestarian seni dan budaya lokal.</li> <li>- Kurangnya sinergi antar pemangku kepentingan kebudayaan dan pariwisata.</li> <li>- Kurangnya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kekayaan dan keragaman budaya.</li> <li>- Belum memadainya sebagian besar daya tarik wisata dan daya dukungnya yang berkualitas/berstandar pelayanan prima;</li> <li>- Rendahnya kualitas, kuantitas sebaran fasilitas</li> </ul>	

No	Perangkat Daerah	Nilai Capaian Kinerja	Rangkuman Hasil Evaluasi	Permasalahan Pembangunan	Ket
			target 16 warisan budaya.	<p>sarpras, fasilitas umum dan penunjang pariwisata (fasilitas akomodasi, restoran/rumah makan, layanan informasi, parkir,toilet, mushola, penerangan umum dsb)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rendahnya kuantitas dan kualitas produk promosi pemasaran pariwisata ke luar daerah/luar negeri;</li> <li>- Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM pemasaran pariwisata yang handal dan profesional baik pengetahuan, ketrampilan dan bahasa;</li> <li>- Belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi sebagai media promosi dalam pemasaran pariwisata.</li> </ul>	
17	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pencapaian kinerja Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2017 dikategorikan berpredikat Sangat Tinggi dengan jumlah rata rata capaian keseluruhannya mencapai 100%, namun masih perlu perhatian untuk Sasaran strategis yang belum optimal yaitu <i>Meningkatnya karakter jiwa kepemimpinan pemuda</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih minimnya dukungan pemuda dan olahraga terhadap pembangunan pariwisata</li> <li>- Masih minimnya lapangan pekerjaan bagi pemuda</li> <li>- Masih rendahnya budaya olahraga dan minimnya prestasi olahraga</li> </ul>	
18	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	94,69%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2017 dikategorikan berpredikat Sangat Tinggi dengan jumlah rata rata capaian keseluruhannya mencapai 94,69%</li> <li>- Ada beberapa capaian Sasaran strategis yang belum optimal dicapai yaitu <i>Menurunnya angka kesakitan terhadap pengaruh penyalahgunaan napza.</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap penyalahgunaan napza;</li> <li>- Rendahnya pemahaman dan pengamalan nilai – nilai pancasila di masyarakat;</li> <li>- Kurangnya Pemahaman dan Pendidikan Politik Masyarakat. Pendidikan politik masyarakat yang masih rendah dapat dilihat dari rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pilukada;</li> <li>- Belum optimalnya Peran dan Fungsi Lembaga Demokrasi;</li> </ul>	

No	Perangkat Daerah	Nilai Capaian Kinerja	Rangkuman Hasil Evaluasi	Permasalahan Pembangunan	Ket
19	Satuan Polisi Pamong Praja	95,20%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2017 dikategorikan berpredikat Sangat Tinggi dengan jumlah rata rata capaian keseluruhannya mencapai 95,20%</li> <li>- Walaupun ada peningkatan secara umum dapat dikatakan belum semua target kinerja tahun 2017 Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berhasil dicapai. Namun demikian terdapat target kinerja yang berhasil dicapai dan bahkan realisasi capaian dari target indikator dimaksud melebihi dari targetnya. Hal ini dapat kita lihat dengan realisasi indikator kinerja sasaran angka kriminalitas target di akhir renstra tahun 2017 sebesar 0,00207, sedangkan realisasinya sebesar 0,00104, sedangkan realisasi cakupan pembinaan aparatur Satpol PP sebesar 55,59 persen, dan cakupan penegakkan perda sebesar 89,19 persen belum memenuhi target di akhir tahun perencanaan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Minimnya cakupan penegakkan perda</li> <li>- Minimnya jumlah Satlinmas</li> </ul>	
20	Sekretariat Daerah	87,71%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2017 dikategorikan berpredikat Sangat Tinggi dengan jumlah rata rata capaian keseluruhannya mencapai 87,71%</li> <li>- Dari 9 sasaran strategis yang hendak dicapai, rata-rata semuanya tercapai. Sedangkan untuk sasaran strategis yang belum mencapai target 100% tetap akan ditingkatkan dalam upaya optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih kurangnya pemahaman Perangkat Daerah untuk mengimplementasikan akuntabilitas kinerja dalam melaksanakan kinerja organisasinya.</li> <li>- Masih kurangnya pemahaman pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan pembenahan dokumen SAKIP sehingga penilaian akuntabilitas kinerja daerahnya meningkat.</li> <li>- Masih terbatasnya jumlah SDM pegawai di SKPD-SKPD yang benar-benar memahami tentang SAKIP</li> <li>- Masih kurangnya unit pelayanan publik dalam menerapkan standar pelayanan</li> </ul>	
21	Sekretariat DPRD	79,43%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2017 dikategorikan berpredikat Tinggi dengan jumlah rata rata capaian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lambatnya penyelesaian tugas-tugas tertentu serta penyelesaian masalah pembangunan yang memerlukan koordinasi. Hal ini dipengaruhi oleh masih lemahnya jalinan</li> </ul>	



No	Perangkat Daerah	Nilai Capaian Kinerja	Rangkuman Hasil Evaluasi	Permasalahan Pembangunan	Ket
			<p>keseluruhannya mencapai 79,43%</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih ada beberapa sasaran strategis yang belum dicapai secara optimal yaitu <i>Meningkatnya fungsi legislasi lembaga DPRD dan alat kelengkapan lainnya.</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan dengan Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.</li> <li>- Masih Kurangnya koordinasi antara Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Perangkat Daerah terkait dalam melaksanakan kegiatan.</li> <li>- Masih Kurangnya pengawasan dalam rangka pembinaan pelaksanaan program kerja Perangkat Daerah.</li> </ul>	
22	Badan Keuangan Daerah	90%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pencapaian kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2017 dikategorikan berpredikat Sangat Tinggi dengan jumlah rata rata capaian keseluruhannya mencapai 90%</li> <li>- Pencapaian sasaran strategis telah menunjukkan kinerja yang cukup baik walaupun masih belum maksimal seperti yang diharapkan. Perlunya optimalisasi terhadap capaian sasaran strategis yaitu Terlaksananya Peningkatan Pajak Daerah dan retribusi daerah serta pendapatan lain-lain yang masih sebesar 89,52 %</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih belum optimal intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah</li> </ul>	
23	Inspektorat Daerah	87,71%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2017 dikategorikan berpredikat Tinggi dengan jumlah rata rata capaian keseluruhannya mencapai 87,71%</li> <li>- Pencapaian sasaran strategis telah menunjukkan kinerja yang cukup baik walaupun masih belum maksimal seperti yang diharapkan. Untuk capaian kinerja sasaran strategis <i>Terwujudnya tata pemerintahan yang baik dan bersih serta berwibawa</i> masih belum optimal yaitu sebesar 64,76%.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah belum optimal</li> </ul>	
24	Badan Penghubung	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pencapaian kinerja Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2017</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum optimalnya pemanfaatan data terpilah</li> </ul>	

No	Perangkat Daerah	Nilai Capaian Kinerja	Rangkuman Hasil Evaluasi	Permasalahan Pembangunan	Ket
	Provinsi		<p>dikategorikan berpredikat Sangat Tinggi dengan jumlah rata rata capaian keseluruhannya mencapai 100%</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dari analisis 4 (empat) sasaran, terdapat 11 (sebelas) indikator kinerja utama yang dipilih sebagai tolak ukur. Pada tahun 2017, 8 (delapan) indikator yang telah memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar 98.36% dari total indikator. Sementara itu, sebanyak 1 (satu) indikator atau sebesar 0% belum memenuhi target.</li> </ul>	<p>dalam proses perencanaan dan evaluasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum optimalnya peran serta kerjasama instansi pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terkait dalam memanfaatkan tugas dan fungsi Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta</li> <li>- Belum optimalnya sinkronisasi dan koordinasi antara Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Jakarta dengan SKPD lain dan Pemerintah Kabupaten / Kota</li> </ul>	
25	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	103,19%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pencapaian kinerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2017 dikategorikan berpredikat Sangat Tinggi dengan jumlah rata rata capaian keseluruhannya mencapai 103,19%</li> <li>- Dari analisis terhadap sasaran, pada tahun 2017, indikator kinerja utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah dapat mencapai target sebesar 100% dari target indikator yaitu sebesar 85%, meskipun demikian masih terdapat beberapa kegiatan yang tidak tercapainya target disebabkan oleh berbagai faktor kendala, baik dari dalam internal maupun eksternal Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kendala yang paling besar dan tidak dapat dihindarkan adalah adanya moratorium penerimaan pegawai dari pemerintah pusat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketidaksesuaian pendidikan, pelatihan, dan pengalaman terhadap jabatan</li> <li>- Sebagian besar P2KP tidak dinilai oleh atasan, serta hukuman disiplin mempengaruhi nilai prestasi kerja</li> <li>- Masih adanya kasus pelanggaran disiplin dan kode etik</li> <li>- Belum dilakukannya pengembangan berbasis kompetensi dan assesment kepada seluruh pegawai</li> <li>- Promosi terbuka terbatas pada posisi JPT Pratama</li> <li>- Capaian kinerja belum dijadikan dasar pembayaran tunjangan kinerja</li> </ul>	
26	Dinas Pangan	91,76%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pencapaian kinerja Dinas Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2017 dikategorikan berpredikat Sangat Tinggi dengan jumlah rata rata capaian keseluruhannya mencapai 91,76%</li> <li>- Untuk beberapa capaian kinerja sasaran strategis masih belum optimal yaitu capaian sasaran strategis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum terlaksananya diversifikasi produksi dan konsumsi pangan dengan baik.</li> <li>- Masih terdapatnya desa tertentu yang harus mendapatkan penanganan daerah rawan pangan.</li> </ul>	

No	Perangkat Daerah	Nilai Capaian Kinerja	Rangkuman Hasil Evaluasi	Permasalahan Pembangunan	Ket
			<i>Meningkatnya jumlah cadangan pemerintah sebesar 54% dan Menurunnya konsumsi beras per kapita per tahun sebesar 1,5% dengan capaian 93,05%</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perilaku masyarakat yang masih cenderung sulit merubah pola makan untuk mendapatkan pangan alternatif yang berasal dari sumber pangan lokal, karena kebiasaan sejak kecil.</li> <li>- Kelembagaan ketahanan pangan masyarakat yang kurang konsisten dalam berpartisipasi untuk mengelola proses produksi, pengolahan, pemasaran dan konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA).</li> <li>- Pola konsumsi masyarakat masih tergantung pada salah satu komoditi yaitu beras/padi.</li> <li>- Masih kurangnya sarana dan prasarana dalam menunjang aktifitas pekerjaan.</li> </ul>	
27	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	82,48%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2017 dikategorikan berpredikat Tinggi dengan jumlah rata rata capaian keseluruhannya mencapai 82,48%</li> <li>- Dari 5 sasaran strategis seluruhnya sudah tercapai.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tingkat pengelolaan dan pendayagunaan SDA serta TTG belum optimal.</li> <li>- Belum optimalnya pengembangan Potensi Unggulan yang ada di desa dalam sektor Pariwisata, Perkebunan, Perikanan yang berkelanjutan.</li> <li>- Tingkat pengangguran di desa lebih tinggi dari laju pertumbuhan ekonomi.</li> <li>- Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di desa yang masih rendah.</li> <li>- Kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup sehat masih rendah.</li> <li>- Tingkat pelayanan pemerintah desa terhadap public belum optimal.</li> </ul>	
28	Dinas Komunikasi Dan Informatika	90,00%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pencapaian kinerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2017 dikategorikan berpredikat Sangat Tinggi dengan jumlah rata rata capaian keseluruhannya mencapai 90,00%</li> <li>- Sasaran kinerja yang belum optimal yaitu Meningkatkan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum optimal sarana prasarana infrastruktur</li> <li>- Belum ada payung hukum tatakelola penyelenggaraan e-Gov</li> <li>- Banyak aplikasi belum terintegrasi karena</li> </ul>	

No	Perangkat Daerah	Nilai Capaian Kinerja	Rangkuman Hasil Evaluasi	Permasalahan Pembangunan	Ket
			penerapan e-Government di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk layanan public dan pemerintah.	belum adanya kebijakan pemanfaatan data bersama (interporabilitas data)	
29	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	99,51%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pencapaian kinerja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2017 dikategorikan berpredikat Sangat Tinggi dengan jumlah rata rata capaian keseluruhannya mencapai 99,51%</li> <li>- Sasaran strategis yang perlu menjadi perhatian yaitu <i>Memenuhi standarisasi kearsipan dan perpustakaan</i> dengan capaian kinerja sebesar 80,58% agar dapat memenuhi target.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih rendahnya sarana dan prasarana</li> <li>- Masih rendahnya penataan arsip yang sesuai dengan standar kearsipan</li> <li>- Masih rendahnya kesadaran masyarakat pentingnya pelestarian arsip</li> <li>- Kurangnya minat baca masyarakat</li> </ul>	
30	Dinas Pertanian	75%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pencapaian kinerja Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2017 dikategorikan berpredikat Sedang dengan jumlah rata rata capaian keseluruhannya mencapai 75%</li> <li>- Dinas Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 dari Pengukuran Pencapaian Sasaran kinerja yang menggambarkan kualitas capaian keluaran (output) atau hasil (outcome) melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2017 pada sasaran strategis Indikator Kinerja dapat dijelaskan bahwa <i>Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas sumber pangan</i>, dengan indikator kinerja yaitu Peningkatan produksi Padi Peningkatan produksi padi perlu ditingkatkan lagi agar mencapai target yang optimal. Selain itu sasaran strategis <i>Meningkatnya komoditas bernilai tambah, berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor serta bahan baku bioindustri dan bioenergi</i> juga perlu ditingkatkan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum optimalnya produksi dan produktivitas sub-sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, serta populasi dan produksi sub-sektor peternakan;</li> <li>- Standarisasi produk pertanian atau mutu/kualitas produk pertanian yang relatif masih rendah, yang berakibat rendahnya daya saing dan masih lemahnya jaringan informasi pasar menjadikan posisi tawar petani rendah.</li> <li>- Ketidakpastian status kepemilikan lahan.</li> <li>- Ketersediaan infrastruktur, sarana dan prasarana dalam pendukung produksi pertanian (irigasi, jalan usaha tani, alsin dan pupuk) masih terbatas;</li> <li>- Perubahan iklim global, berakibat terjadi perubahan musim, sehingga meningkatkan bencana alam dan perkembangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT);</li> <li>- Lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan penyerapan teknologi pertanian, mengakibatkan petani tidak memiliki nilai/posisi tawar produk;</li> <li>- Rendahnya minat generasi muda untuk mengembangkan dan terlibat dalam usaha di</li> </ul>	

No	Perangkat Daerah	Nilai Capaian Kinerja	Rangkuman Hasil Evaluasi	Permasalahan Pembangunan	Ket
				sektor pertanian;	
31	Dinas Kehutanan	87,94%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pencapaian kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2017 dikategorikan berpredikat Tinggi dengan jumlah rata rata capaian keseluruhannya mencapai 87,94%</li> <li>- Hasil pengukuran kinerja terhadap 4 (empat) sasaran, ditetapkan indikator kinerja sasaran sebanyak 11 (sebelas) indikator kinerja, Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menurut skala penilaian kinerja untuk realisasi fisik termasuk dalam kategori sangat baik dengan rentang nilai 97,35-100 sedangkan realisasi anggaran termasuk dalam kategori tinggi dengan rentang nilai 88,07-96,02.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih Rendahnya Kontribusi Sub Sektor Kehutanan Terhadap PDRB</li> <li>- Harmonisasi regulasi dan kebijakan pengelolaan SDA</li> <li>- Pengukuhan kawasan hutan</li> <li>- Resolusi konflik agrarian</li> <li>- Rendahnya Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem</li> <li>- Kemiskinan sekitar kawasan hutan</li> <li>- Rendahnya Pengelolaan Daerah Aliran Sungai</li> <li>- Masih luasnya lahan kritis</li> </ul>	
32	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	90%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pencapaian kinerja Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2017 dikategorikan berpredikat Sangat Tinggi dengan jumlah rata rata capaian keseluruhannya mencapai 90%</li> <li>- Dari 7 sasaran strategis dengan masing2 indikator ada 4 sasaran yang tercapai dan 3 sasaran yang belum tercapai salah satunya Sasaran strategis <i>Terjaganya kualitas lingkungan hidup dari sektor Energi</i> dengan indicator Persentase pembinaan dan pengawasan SPBU dan SPBE.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih kurangnya pembinaan dan pengawasan yang berkelanjutan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan</li> <li>- Belum optimalnya pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai sumber Energi</li> <li>- Masih kurangnya pembinaan dan pengawasan dalam pengendalian pendistribusian MIGAS</li> <li>- Belum optimalnya PAD dari sektor Energi dan Sumber Daya Mineral</li> <li>- Masih kurangnya data potensi sumber daya alam mineral logam, bukan logam dan batuan</li> <li>- Masih banyaknya tumpang tindih aturan, kebijakan dan kawasan pertambangan dengan sektor lainnya</li> <li>- Belum tersedianya data lahan terganggu dan lahan kritis akibat pertambangan</li> <li>- Masih kurangnya kesadaran perusahaan pertambangan dalam penempatan jaminan reklamasi</li> </ul>	

No	Perangkat Daerah	Nilai Capaian Kinerja	Rangkuman Hasil Evaluasi	Permasalahan Pembangunan	Ket
33	Dinas Kelautan Dan Perikanan	66,37%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pencapaian kinerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2017 dikategorikan berpredikat Sedang dengan jumlah rata rata capaian keseluruhannya mencapai 66,37%</li> <li>- Masih rendahnya tingkat capaian dari sasaran strategis perlu menjadi perhatian untuk meningkatkannya. Beberapa sasaran strategis yang belum optimal yaitu <i>Meningkatnya Pendapatan Masyarakat kelautan dan perikanan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Meningkatnya wilayah Kelautan dan Perikanan yang di awasi</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Maraknya kegiatan penangkapan ikan secara liar (<i>illegal fishing</i>)</li> <li>- permasalahan implementasi kebijakan tata ruang dan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, terbatasnya prasarana saluran irigasi, terbatasnya ketersediaan dan distribusi induk dan benih unggul serta permasalahan bahan baku pakan dan kestabilan harga.</li> <li>- masih adanya keterbatasan dukungan permodalan usaha dari pihak perbankan dan lembaga keuangan lainnya kepada para nelayan/pembudidaya/pengolah ikan.</li> <li>- Belum terpetakan dengan baiknya pengelolaan zonasi yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini, dimana dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil belum terealisasi.</li> </ul>	
34	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	90%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pencapaian kinerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2017 dikategorikan berpredikat Sangat Tinggi dengan jumlah rata rata capaian keseluruhannya mencapai 90%</li> <li>- Sasaran kinerja program yang belum tercapai seratus persen akan dievaluasi agar kendala yang dihadapi dapat dicari solusinya sedini mungkin. Beberapa sasaran yang belum tercapai optimal yaitu <i>Teroptimisasinya pasar dalam negeri sebesar 86,16 %, Terwujudnya tertib usaha dan tertib ukur di bidang Perdagangan sebesar 83,33 % dan Meningkatnya ekspor bangka Belitung sebesar 85,66%</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terbatasnya kemampuan inovasi dan diversifikasi produk, pengetahuan tentang manajemen usaha, pemasaran dan modal kerja.</li> <li>- Kurangnya pemahaman manfaat dari legalitas, standardisasi dan sertifikasi produk.</li> <li>- Belum Berkembangnya industri pengolahan yang berbahan baku potensi daerah</li> <li>- Belum optimalnya pengelolaan kawasan industri</li> <li>- Belum optimalnya pengawasan terhadap industri</li> <li>- Belum optimalnya pembentukan sentra industri.</li> </ul>	

No	Perangkat Daerah	Nilai Capaian Kinerja	Rangkuman Hasil Evaluasi	Permasalahan Pembangunan	Ket
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum optimalnya koordinasi penanganan ketersediaan dan harga pangan Kebutuhan Pokok Masyarakat (KEPOKMAS) antar tingkatan pemerintah (pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota);</li> <li>- Sinergitas daerah dalam memanfaatkan gudang dengan Sistem Resi Gudang di Provinsi Bangka Belitung;</li> <li>- Banyaknya sarana perdagangan terutama pasar tradisional dalam kondisi kurang baik.</li> <li>- Lemahnya sistem tata kelola perdagangan produk</li> </ul>	

## **2.3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH**

### **2.3.1. Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah**

Pada tahun 2019 Isu strategis yang menjadi permasalahan utama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki 13 (tiga belas) isu yaitu :

- Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang masih rendah.
- Kemandirian Pangan Rendah.
- Pengendalian inflasi.
- Belum optimalnya pengembangan Potensi Unggulan Daerah.
- Tingkat Investasi Rendah.
- Potensi sumber daya di kawasan strategis belum terbangun dengan baik.
- Kualitas infrastruktur dan konektivitas masih terbatas.
- Tingkat pendidikan SDM masih rendah.
- Mutu pelayanan kesehatan masih terbatas.
- Reformasi birokrasi dan pelayanan publik belum optimal.
- Pelaksanaan Pilpres dan Pemilu Legislatif.
- Rehabilitasi dan pengendalian lingkungan hidup.
- Penanggulangan bencana.

Permasalahan daerah yang dianggap prioritas utama dalam

### **PRIORITAS 1 : PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN AGROPOLITAN**

Sasaran pertanian, peternakan dan jasa perkebunan, dengan arah kebijakan :

- Penyusunan kebijakan dan implementasi perlindungan lahan pertanian berkelanjutan.
- Peningkatan sarana dan prasarana dan nilai tambah serta produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan Kehutanan.
- Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing sektor pertanian.
- Pembinaan hubungan industri sektor pertanian.
- Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing ektor pertanian.
- Pengembangan produk pertanian, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi sektor pertanian di daerah.
- Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dibidang pertanian.
- Pengembangan Kawasan Strategis.

### **PRIORITAS 2 : PENGEMBANGAN PARIWISATA**

Sasaran Meningkatnya pengembangan pembangunan pariwisata dengan arah kebijakan :

- Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, ekonomi kreatif, peran serta masyarakat dan kelembagaan pariwisata.
- Peningkatan infrastruktur, sarana dan prasarana pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata.
- Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing kepariwisataan daerah.
- Peningkatan kualitas, partisipasi dan prestasi pemuda di berbagai bidang pembangunan, dan peningkatan pengelolaan ke olah raga serta mengembangkan



- peran serta kebudayaan dalam mendukung pembangunan kepariwisataan.
- Pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja disektor pariwisata.
- Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing kepariwisataan.
- Pengembangan pariwisata daerah, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antar sektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di bidang pariwisata.
- Pengembangan Kawasan strategis pelabuhan.
- Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata.
- Pengembangan konektivitas.

### **PRIORITAS 3 : PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT**

Sasaran Menurunnya angka Pengangguran memiliki arah kebijakan :

- Penciptaan peluang kesempatan kerja bagi pencari kerja.
- Peningkatan kualitas hidup dan peran serta perempuan.

Sasaran Menurunnya angka kemiskinan dengan arah kebijakan :

- Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin.
- Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin.

Sasaran Menurunnya angka inflasi arah kebijakannya antara lain :

- Pengendalian Tingkat harga-harga komoditas penyumbang inflasi.
- Mengurangi ketergantungan pasokan dari luar terhadap komoditas penyumbang inflasi.

Sasaran terkendalinya pertumbuhan penduduk dengan arah kebijakan pengendalian tingkat kelahiran penduduk dan perpindahan penduduk untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang.

### **PRIORITAS 4 : PENGEMBANGAN ENERGI DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN**

Sasaran Pembangunan infrastruktur dan konektivitas mendukung pengembangan potensi daerah memiliki arah kebijakan :

- Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan jaringan irigasi serta cetak sawah pertanian yang modern.
- Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur air baku.

Sasaran meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat dengan arah kebijakan :

- Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur dasar yang layak bagi masyarakat.
- Peningkatan penataan permukiman pada kawasan strategis Provinsi
- Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi bagi masyarakat.

Sasaran Meningkatnya konektivitas antar wilayah, dengan arah kebijakan :

- Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan pelabuhan serta sarana prasarana pendukung pelabuhan.
- Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan terminal serta sarana prasarana pendukung terminal.
- Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan jalan dan jembatan.

## PRIORITAS 5 : PEMBANGUNAN BERDEMOKRASI

Sasaran peningkatan pembangunan berdemokrasi memiliki arah kebijakan :

- Peningkatan pemberian kesempatan Kebebasan sipil kepada masyarakat.
- Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan perda serta perlindungan masyarakat (Linmas).
- Peningkatan pelayanan terhadap Hak-hak politik masyarakat.
- Peningkatan pemberdayaan Lembaga-Lembaga Demokrasi.

### 2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Memperhatikan perkembangan dari realisasi sasaran pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 5 (lima) tahun terakhir, maka upaya yang dapat direspon atas perkembangan tersebut adalah sebagai berikut :

#### A. Urusan Wajib

##### 1. Pendidikan

Permasalahan di bidang pendidikan antara lain :

- a. Masih tingginya angka anak putus sekolah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada jenjang pendidikan menengah SMA sederajat yang terlihat dari meningkatnya angka DO (*Drop Off*) pendidikan menengah yang pada tahun 2014 berada diangka 1,16 % kemudian pada tahun 2015 meningkat menjadi 2,83 %. Faktor utama yang menyebabkan banyaknya anak-anak putus sekolah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah karena ketidakmampuan orangtua dalam membiayai pendidikan anaknya. Selain itu secara tidak langsung kondisi geografis juga sangat mempengaruhi dan sarana transportasi masih kurang sehingga anak-anak membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencapai sekolah mereka.
- b. Masih rendahnya rata-rata lama sekolah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang disumbang dari masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat yang sudah berusia kerja. Angka rata-rata lama sekolah Provinsi Bangka Belitung tahun 2015 berada pada angka 7,46 Tahun yang masih di katagorikan rendah yang diasumsikan Pendidikan SMP sederajat belum tamat untuk rata-rata lama sekolah masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- c. Kesempatan yang diberikan pemerintah setempat bagi guru untuk melanjutkan pendidikan formal masih kurang, hal ini terlihat dari data tahun 2015. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV mengajar pada tingkat SD sederajat 56,82 %, Tingkat SMP sederajat 75,54 % dan SMA Sederajat 86,96 %, hal ini akan sangat berpengaruh pada proses belajar mengajar di kelas.
- d. Masih belum optimalnya sistem dan proses belajar mengajar yang dilaksanakan oleh para pendidik sehingga tingkat kualitas dari peserta didik masih rendah. Serta tingkat keaktifan guru masih kurang dalam memberikan pelajaran di sekolah, sehingga murid menjadi lebih pasif. Hal ini dapat disebabkan oleh beban kerja guru yang cukup berat dan harus menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan yang harus mereka ajarkan. Serta masih tingginya perpindahan tenaga pengajar kepada jenjang jabatan struktural pada pemerintahan daerah hal ini akan mempengaruhi kepada ketersediaan tenaga pengajar yang dunia pendidikan.

## 2. Kesehatan

Permasalahan di bidang kesehatan antara lain :

- a. Perilaku masyarakat yang tidak memperhatikan aspek kebersihan lingkungan, misalnya kurang disiplinnya masyarakat dalam membuang sampah, dan pendirian rumah hunian yang kurang layak hal ini terlihat dari masih rendahnya persentase rumah sehat yang memenuhi syarat kesehatan yang pada tahun 2015 berada pada angka 75,62 % tetapi relatif lebih baik jika dibandingkan dengan angka tahun 2014 yang berada diangka 71,88%
- b. Angka harapan hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang masih belum terlalu tinggi yang berada pada angka 69,88 tahun pada tahun 2015 tetapi masih relatif lebih baik di bandingkan dengan angka tahun 2014 yang berada pada angka 69,72 tahun. Hal ini terjadi yang salah satunya banyak di sumbang dari tingginya angka kematian yang disebabkan oleh penyakit menular dan tidak menular.
- c. Masih tingginya angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian bayi yang terlihat dari jumlah kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015 berada pada angka 115,05 terjadi peningkatan di bandingkan dengan angka tahun 2014 yang berada pada angka 101,00. Sedangkan untuk angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2015 berada pada angka 7,05 terjadi peningkatan di bandingkan dengan angka tahun 2014 yang berada pada angka 4,00.
- d. Jumlah tenaga kesehatan yang jumlahnya masih belum optimal. Kondisi ini sangat meresahkan masyarakat, karena mereka tidak dapat dilayani dengan cepat. Penurunan ini disebabkan karena kondisi geografis yang cukup sulit dan kesejahteraan hidup mereka belum terpenuhi sehingga mereka pindah ke tempat lain yang lebih mudah dan terjamin kesejahteraannya. Hal ini terlihat dari rasio dokter per 100.000 penduduk pada tahun 2015 berada pada angka 0,000287, rasio perawat per 100.000 penduduk pada tahun 2015 berada pada angka 226,86 dan rasio bidan per 100.000 penduduk pada tahun 2015 berada pada angka 88,46.

## 3. Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Permasalahan di bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang antara lain :

- a. Untuk sarana dan prasarana transportasi menunjukkan bahwa secara umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih menghadapi kondisi jalan yang kurang mendukung, khususnya untuk jalan kabupaten dan masih perlunya tambahan jumlah jaringan jalan yang cukup untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.
- b. Belum optimalnya tindakan pemerintah untuk membuka jalur darat dalam rangka membuka keterisolasian wilayah, sehingga menyebabkan aktifitas ekonomi menjadi terganggu.
- c. Banyaknya kerusakan jalan yang menyebabkan terputusnya jaringan distribusi.
- d. Lemahnya jaringan jalan yang berakibat timbulnya ketidakmerataan distribusi barang dan orang, berpotensi munculnya konflik sosial antar penduduk dan antar kabupaten yang ada.
- e. Masih adanya ketidak sesuaian antara tata ruang dengan pembangunan yang dilakukan sehingga akan menimbulkan terjadinya tumpang tindih dalam pemanfaatan ruang dalam pembangunan.

## 4. Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permasalahan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan antara lain :

- a. Permasalahan dalam sektor bangunan/konstruksi adalah masih rendahnya perkembangan dunia usaha di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga belum

mengoptimalkan pertumbuhan sektor ini. Pertumbuhan yang dialami sektor ini terutama disebabkan oleh permintaan pembangunan sarana dan prasarana fisik untuk aktivitas pemerintah.

- b. Masih rendahnya kepemilikan rumah bagi masyarakat terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat miskin
- c. Belum terintegrasi penyediaan air minum dan sanitasi dalam penyediaan pengembangan perumahan

## 5. Ketentraman, ketertiban umum, dan Perlindungan Masyarakat

Permasalahan di bidang Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat antara lain:

- a. Masih lemahnya ketertiban dan ketentraman umum di masyarakat pada upaya untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib dan nyaman di masyarakat, sehingga masyarakat terjamin keamanannya dalam melakukan aktivitas ekonomi dan sosial.
- b. Masih tingginya tingkat kriminalitas dalam Peningkatan kenyamanan dan keamanan lingkungan, serta pemeliharaan kantrantibnas
- c. Belum optimalnya Pengembangan wawasan kebangsaan, peningkatan kesadaran dan pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungannya, peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat), pendidikan politik masyarakat.
- d. Masih lemahnya Pemahaman masyarakat tentang konsep Wawasan Kebangsaan sebagai respon terhadap beragamnya latar belakang sosial, agama dan budaya masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- e. Belum optimalnya Penguatan kelembagaan politik yang dapat menyerasikan penyaluran aspirasi berbagai kelompok kepentingan dalam masyarakat.

## 6. Sosial

Permasalahan di bidang Sosial antara lain :

- a. Masih belum optimalnya Pembangunan kesejahteraan sosial yang diarahkan pada peningkatan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas, hal ini terlihat dari data persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) penerima manfaat yang mampu melaksanakan peran dan fungsi sosial melalui pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi sosial hanya 11,01% pada tahun 2015 dan mengalami penurunan dibandingkan dengan angka tahun 2014 yang berada pada angka 14,27%.
- b. Masih belum optimalnya Pemberdayaan sosial yang tepat guna bagi masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dengan didukung oleh peraturan perundangan dan perlindungan sosial, peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial, penyusunan dan penyediaan sarana pelayanan sosial yang memadai. Hal tersebut terlihat dari angka Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) penerima manfaat yang dilayani dan diberdayakan masih relatif rendah berada pada angka 16,99 % pada tahun 2015 relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan angka tahun 2014 yang berada pada angka 13,88 %. Sedangkan berkaitan dengan angka persentase Potensi Sumber kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mampu berperan dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial melalui pelaksanaan pemberdayaan sosial berada pada angka 6,29% pada tahun 2015 mengalami penurunan jika di bandingkan dengan angka pada tahun 2014 yang berada pada angka 22,08 %.

- c. Masih lemahnya sistem perlindungan dan jaminan sosial yang disusun, ditata, dan dikembangkan untuk memastikan dan memantapkan pemenuhan hak-hak masyarakat akan pelayanan dasar publik. Hal ini terlihat dari angka persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mampu melaksanakan peran dan fungsi sosial melalui pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial hanya 50,63% pada tahun 2015 dan mengalami penurunan jika di bandingkan dengan angka tahun 2014 yang berada pada angka 66,34%.
- d. Masih tingginya disparitas tingkat kemiskinan dipedesaan dan diperkotaan. Hal ini terlihat dari angka kemiskinan di perkotaan sebesar 2,78 % pada bulan maret 2016 dan angka kemiskinan di pedesaan berada pada angka 7,72 %. hal ini terjadi karena garis kemiskinan di desa lebih tinggi berada pada angka 546.998 pada Maret 2016 jika di bandingkan dengan garis kemiskinan di perkotaan yang berada pada angka 521.773 . Garis kemiskinan yang tinggi ini disumbang dari masih tingginya tingkat harga komoditas pangan dan non pangan yang berada di pedesaan. Kemudian garis kemiskinan provinsi kepulauan Bangka Belitung juga merupakan garis kemiskinan tertinggi di indonesia yang berada pada angka 534.229. sehingga untuk menanggulangi hal tersebut perlu dilakukan dengan mengendalikan angka inflasi komoditas pangan dan non pangan.

## 7. Tenaga Kerja

Permasalahan di bidang Tenaga Kerja antara lain :

- a Meningkatkan tingkat pengangguran di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hal ini terlihat dari angka pengangguran pada Agustus 2015 berada pada angka 6,29 % dan mengalami peningkatan terus menerus jika dibandingkan dengan angka pengangguran pada Agustus 2013 dan Agustus 2014 yang masing-masing berada pada angka 3,70 % dan 5,14 %. Hal ini terjadi dikarenakan melambatnya pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh sektor pertambangan dan sektor pertanian dimana kedua sektor tersebut merupakan penyumbang tenaga kerja terbesar dalam menggerakkan perekonomian daerah. Hal ini terlihat dari data Februari 2016 sektor pertanian dan pertambangan masing-masing menyumbang tenaga kerja sebesar 32 % dan 11,27 %.
- b Masih rendahnya daya saing dan produktivitas tenaga kerja, keselamatan, serta kesejahteraan pekerja.
- c Masih kurangnya kualitas tenaga kerja, produktifitas tenaga kerja, kesempatan kerja, serta perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan.

## 8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak antara lain:

- a. Masih belum optimalnya Pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak yang diarahkan pada peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan serta memenuhi keadilan dan kesetaraan gender hal ini terlihat dari TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) penduduk perempuan tahun 2015 mencapai 56,26% naik dibandingkan tahun 2014 hanya sebesar 43,97%. Sedangkan tingkat pengangguran perempuan sebesar 8,21% lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat pengangguran laki-laki sebesar 5,27%. Kemudian juga terlihat dari masih adanya disparitas antara angka harapan hidup laki-laki dan perempuan dimana untuk laki-laki berada pada angka 68,01 Tahun dan perempuan berada pada angka 71,85 Tahun, sedangkan untuk rata-rata lama sekolah perempuan dan laki-laki terlihat laki-laki berada pada angka 7,99 Tahun dan Perempuan 7,14 tahun, dan

untuk pengeluaran perkapita antara perempuan dan laki-laki terjadi ketimpangan yang sangat tinggi di mana laki-laki berada pada angka Rp. 17.670.000/tahun dan perempuan berada pada angka Rp.8.232.000/tahun berdasarkan data.

- b. Masih adanya kesenjangan atau ketimpangan di dalam menjamin hak anak dalam mendapatkan kesejahteraan dan perlindungan anak di berbagai bidang pembangunan hal ini terlihat dari hak kelangsungan hidup anak berada pada angka 83,60, Hak Perlindungan anak berada pada angka 77,64; Hak Tumbuh Kembang Anak berada pada angka 65,74, hak partisipasi anak berada pada angka 80,23 dan hak identitas anak berada pada angka 93,05 berdasarkan data Indeks Komposit Kesejahteraan Anak (IKKA) tahun 2015.
- c. Masih tingginya tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi serta perdagangan terhadap perempuan dan anak;
- d. Masih lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender, termasuk ketersediaan data dan statistik gender.

## 9. Pangan

Permasalahan di bidang Pangan antara lain :

- a. Di sub sektor pertanian produksi padi masih tergantung pada musim (tadah hujan) dengan ladang dan gaga rancah pada musim hujan. diarahkan pada produksi padi ladang. Situasi ini membawa permasalahan tersendiri, yaitu: *pertama*, produktivitas relatif lebih rendah dari produktivitas padi sawah. Kondisi ini menggambarkan inefisiensi dalam pemanfaatan lahan untuk penanaman dengan menggunakan sistem padi ladang; *kedua*, sistem ladang berpindah yang dijalankan oleh mayoritas petani tradisional bisa mengganggu kelestarian dan produksi hutan karena pembukaan ladang baru dilakukan melalui pembabatan atau pembakaran hutan.
- b. Produksi bahan pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih jauh di bawah kebutuhan konsumsi masyarakat sehingga perlu mendatangkan dari daerah lain sehingga sewaktu-waktu bisa mengancam ketahanan pangan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- c. Belum adanya perhatian serius yang menyangkut diversifikasi vertikal dan horizontal atas tanaman palawija yang sebenarnya dapat dikembangkan dengan baik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- d. Adanya kesulitan ditingkat petani untuk melakukan akses ke pasar atas komoditi yang dihasilkannya maupun untuk memperoleh pupuk dan pestisida.
- e. Pembangunan prasarana fisik pendukung pertanian padi sawah yang dilakukan selama ini kurang memberi manfaat nyata dalam mendorong peningkatan produksi padi sawah.
- f. Masih lemahnya kemampuan produksi pangan lokal yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan di tingkat rumah tangga yang cukup, baik dalam jumlah maupun mutu dan gizinya, aman, merata, dan terjangkau.

## 10. Pertanahan

Permasalahan di bidang Pertanahan antara lain :

- a. Masih lemahnya jaminan kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah bagi masyarakat.
- b. Ketimpangan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah bagi kesejahteraan masyarakat



- c. Belum optimalnya pelayanan tata kelola pertanahan kepada masyarakat
- d. Masih kurangnya ketersediaan tanah bagi kepentingan pembangunan fasilitas umum untuk masyarakat

#### 11. Lingkungan Hidup

Permasalahan di bidang Lingkungan Hidup antara lain :

- a. Kurangnya pemahaman pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan alam, yang ditunjukkan dengan masih maraknya kegiatan penambangan liar/TI dan penebangan liar (*ilegallogging*).
- b. Kurangnya koordinasi dan kerjasama dalam menangani masalah-masalah perusakan alam yang lintas sektoral dan lintas wilayah. Hal tersebut ditunjukkan dengan belum adanya program atau kegiatan kerjasama dengan kabupaten atau provinsi lain.
- c. Perumusan kebijakan-kebijakan pembangunan yang tidak memperhatikan karakteristik wilayah. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah wilayah yang masih kaya akan SDA. Sumberdaya alam tersebut merupakan salah satu modal dasar bagi pengembangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Apabila kebijakan pembangunan yang dibuat hanya mengejar peningkatan ekonomi semata maka yang terjadi adalah perusakan lingkungan. Oleh sebab itu perumusan kebijakan pembangunan harus berwawasan lingkungan sehingga kelestarian sumberdaya alam tetap terjaga.
- d. Pengelolaan SDA seperti sumberdaya tambang, yang masih mengabaikan kelestarian lingkungan akan mengakibatkan penurunan daya dukung lingkungan dan penurunan kualitas-kuantitas SDA.
- e. Kurang berfungsinya aparaturnya penegak hukum dalam menindak para penjahat lingkungan dapat mengakibatkan makin maraknya kegiatan perusakan lingkungan hidup yang pada akhirnya dapat mengancam keberadaan SDA di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

#### 12. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Permasalahan di bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil antara lain :

- a. Masalah struktur penduduk didominasi oleh usia produktif, yaitu pada umur 15–64 tahun atau sekitar 66,25% dari total penduduk. Ini memberikan implikasi bahwa pada masa 20 tahun ke depan akan terjadi peningkatan beban penduduk usia tua, yaitu umur 60 tahun atau lebih.
- b. Dalam jangka panjang terjadi peningkatan kepada struktur penduduk yang semakin menua (*aging population*). Hal ini disebabkan usia harapan hidup semakin tinggi, sementara pertumbuhan kependudukan rendah.
- c. Masih rendahnya pemerataan pembangunan ekonomi dan wilayah dengan memperhatikan keragaman etnis dan budaya serta pembangunan berkelanjutan.
- d. Belum optimalnya sistem administrasi kependudukan akan dilakukan untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta mendorong terakomodasinya hak penduduk dan perlindungan sosial.

#### 13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa antara lain :

- a. Masih adanya desa tertinggal yang harus diintervensi untuk mengelurkannya dari ketertinggalannya hal ini terlihat dari data Indeks Pembangunan Desa (IPD) Tahun 2014 jumlah desa tertinggal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berjumlah 12 desa dan desa berkembang berjumlah 52 desa dari total desa berjumlah 309 desa
- b. Masih lemahnya kualitas dan kapasitas aparatur desa di dalam menjalankan pembangunan desa
- c. Belum optimalnya pengembangan ekonomi dan sumber daya alam desa dengan basis komoditas lokalnya masing-masing
- d. Belum maksimalnya pembangunan desa dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat.

#### 14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana antara lain :

- a. Masih tingginya laju pertumbuhan penduduk sehingga perlu lakukan pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk yang diarahkan pada peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang terjangkau, bermutu dan efektif menuju terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas.
- b. Permasalahan demografi yang selama ini dialami adalah terkait dengan kualitas, kemampuan, kepadatan penduduk yang semakin tinggi, terpusat di perkotaan dan penyebaran penduduk yang tidak merata serta tidak berkorelasi dengan perkembangan potensi ekonomi. Khusus untuk Kota Pangkalpinang yang merupakan wilayah terpadat berpotensi terhadap tingginya beban permasalahan perkotaan yang dihadapi.
- c. Masih rendahnya penataan persebaran dan mobilitas penduduk yang lebih seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan
- d. Permasalahan berkaitan dengan migrasi seperti yang terjadi di daerah lain selalu berkaitan dengan kesempatan kerja. Peluang pekerjaan merupakan magnet atau daya tarik terhadap terjadinya migrasi masuk ke suatu daerah.

#### 15. Perhubungan

Permasalahan di bidang Perhubungan antara lain :

- a. Belum optimalnya Pengembangan transportasi laut dan udara dalam mendukung pengendalian inflasi dan pengembangan pariwisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung karena karakteristik daerah yang tidak berbatasan darat secara langsung dengan daerah lain.
- b. Belum optimalnya penataan Transportasi darat termasuk angkutan umum perkotaan yang terjangkau dengan memperhatikan tata ruang, fungsi, dan mutu lingkungan hidup, sehingga wilayah perkotaan dan sekitarnya makin berfungsi, baik sebagai kawasan permukiman maupun sebagai pusat-pusat produksi, jasa, dan perdagangan.
- c. Masih sempitnya ruas jalan yang menghubungkan antar kabupaten-kota untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi jangka panjang. Lalu lintas antar kabupaten diprediksikan akan meningkat seiring dengan lancarnya arus barang dan jasa dari pelabuhan ke daerah yang jauh dari pelabuhan.
- d. Belum optimalnya tindakan pemerintah untuk membuka jalur darat dalam rangka membuka keterisolasian wilayah.



## 16. Komunikasi dan Informatika

Permasalahan di bidang Komunikasi dan Informatika antara lain :

- a. Kurangnya pertimbangan ekonomis untuk pengembangan jaringan komunikasi dengan melihat situasi lapangan di mana penduduknya tidak banyak dan sangat tersebar
- b. Masih belum optimalnya penggunaan teknologi informasi didalam memfasilitasi dan menjalankan pembangunan baik dari sisi pemerintahan maupun dunia usaha
- c. Masih lemahnya kualitas sumber daya manusia dalam menjalankan pembangunan dengan basis sistem informasi
- d. Masih adanya wilayah blank spot yang tidak terakses dengan jaringan komunikasi atau teknologi informasi
- e. Masih banyaknya desa yang belum melek terhadap terhadap teknologi informasi
- f. Masih belum optimalnya penyebaran informasi pembangunan daerah kepada masyarakat

## 17. Koperasi Usaha Kecil dan menengah

Permasalahan di bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah antara lain :

- a. Masih lemahnya Koperasi dan UKM pada upaya untuk menjadikan Koperasi dan UKM menjadi pelaku ekonomi yang berbasis TI (Teknologi Informasi) dan kuat secara kelembagaan serta jaringan kerja yang luas dalam upaya mendukung visi agri-bahari.
- b. Masih kurangnya stimulus-stimulus bantuan modal dari pemerintah, pendampingan teknis, pengawasan, dan pelatihan manajemen dalam pengembangan koperasi dan UMKM.
- c. Masih sedikitnya koperasi dan UKM yang bergerak pada usaha-usaha untuk menopang sektor pariwisata dan pengolahan hasil perikanan dan pertanian.
- d. Masih adanya koperasi yang tidak aktif dalam menggerakkan perekonomian masyarakat

## 18. Penanaman Modal

Permasalahan di bidang Penanaman Modal antara lain :

- a. Masih rendahnya tingkat investasi yang dilakukan oleh para investor dalam mendukung pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- b. Penciptaan iklim investasi yang kondusif dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) mutlak diciptakan.
- c. Belum optimalnya pemberian insentif dan kemudahan bagi para investor dalam berinvestasi di provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

## 19. Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan di bidang Kepemudaan dan Olahraga antara lain :

- a. Masih kurangnya kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan terutama di bidang ekonomi, sosial budaya, iptek dan politik.
- b. Masih belum optimalnya pembinaan organisasi kepemudaan di dalam mendukung pembangunan daerah;

- c. Masih lambatnya peningkatan budaya olahraga dan prestasi olahraga di kalangan masyarakat guna mendukung citra dan jati diri Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

#### 16. Statistik

Permasalahan di bidang Statistik antara lain :

- a. Masih belum tersedianya data yang valid dan tepat waktu dalam melihat hasil pembangunan dan merencanakan pembangunan Daerah
- b. Masih lemahnya kesadaran dan kualitas sumber daya manusia di dalam menyiapkan kebutuhan data untuk pembangunan Daerah
- c. Belum optimalnya koordinasi dan pemberian reward atau punishment didalam pelaksanaan penyediaan data untuk pembangunan Daerah

#### 17. Persandian

Permasalahan di bidang Persandian antara lain :

- a. Belum optimalnya pengelolaan tata kelola persandian dalam mendukung kinerja pemerintah daerah
- b. Belum teroprasionalnya secara maksimal koordinasi persandian antar pemerintah daerah dan pusat didalam menjalankan tugas pemerintahan daerah

#### 18. Kebudayaan

Permasalahan di bidang Kebudayaan antara lain :

- a. Masih belum optimalnya pengembangan budaya lokal yang diarahkan pada upaya untuk mewujudkan karakter lokal dan sistem sosial yang berakar, unik, modern dan unggul. serta masih lemahnya Nilai luhur yang berkembang di masyarakat seperti religius, kebersamaan, persatuan dan nilai modern yang universal seperti etos kerja dan prinsip tata pemerintahan yang baik.
- b. Masih kurangnya Pembangunan jatidiri melalui proses transformasi, revitalisasi, dan reaktualisasi tata nilai budaya dan adat istiadat leluhur yang mempunyai potensi unggul dan menerapkan nilai modern yang membangun dan tidak bertentangan dengan budaya dan adat istiadat yang berlaku di masyarakat.
- c. Masih lemahnya Pengembangan budaya inovatif yang berorientasi IPTEK dilakukan dengan tetap mempertahankan nilai-nilai dan budaya leluhur serta kurangnya minat masyarakat terhadap IPTEK melalui pengembangan budaya membaca dan menulis, masyarakat pembelajar, masyarakat yang cerdas, kritis, dan kreatif dalam rangka pengembangan tradisi IPTEK.
- d. Masih belum optimlanya Bentuk-bentuk pengungkapan kreativitas, antara lain melalui kesenian, tetap didorong untuk mewujudkan keseimbangan aspek material, spiritual dan emosional, Pengembangan IPTEK serta kesenian diletakkan dalam kerangka peningkatan harkat, martabat dan peradaban manusia.

#### 19. Perpustakaan

Permasalahan di bidang Perpustakaan antara lain :

- a. Belum optimalnya sistem tata kelola perpustakaan daerah, perpustakaan keliling, perpustakaan sekolah serta perpustakaan desa dalam mendukung pengentasan buta huruf, membudayakan gemar membaca serta peningkatan pengetahuan masyarakat

- b. Masih kurangnya tenaga pustakawan dan masih rendahnya kapasitas sumber daya manusia di bidang perpustakaan dalam mendukung pengembangan pembangunan perpustakaan

## 20. Kearsipan

Permasalahan di bidang Kearsipan antara lain :

- a. Belum optimalnya sistem tata kelola kearsipan daerah dalam mendukung penataan kearsipan pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan untuk mendukung pembangunan daerah.
- b. Masih kurangnya tenaga arsiparis dan masih rendahnya kapasitas sumber daya manusia di bidang kearsipan dalam mendukung pengembangan pembangunan perpustakaan.

## B. Urusan Pilihan

### 1. Kelautan dan Perikanan

- a. Masih rendahnya pendapatan, kesejahteraan, taraf hidup, kemampuan, dan kapasitas petani ikan dan nelayan dalam memenuhi kebutuhan mutu dan gizi pangan mereka.
- b. Masih rendahnya produksi perikanan untuk diekspor dalam meningkatkan penerimaan daerah.
- c. Masih rendahnya produktifitas dalam peningkatan produksi perikanan baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya.
- d. Belum optimalnya produksi, pengembangan dan penerapan teknologi budidaya ikan di daerah pantai, tambak, dan air tawar (jika memungkinkan di lahan-lahan bekas pertambangan), serta usaha penangkapan ikan di daerah lepas pantai.

### 2. Pertanian

- a. Pada sub sektor perkebunan, di luar perkebunan sawit, tidak menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, bahkan beberapa di antaranya menunjukkan penurunan. Perkebunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan potensi besar yang perlu digarap secara lebih intensif. Untuk maksud tersebut maka keberadaan perkebunan besar sangat dibutuhkan sehingga efisiensi pemanfaatan hasil perkebunan dan akses dapat diperoleh.
- b. Belum optimalnya populasi dan produksi ternak di semua kabupaten/kota yang ada. Di sisi lain produksi ternak secara komersil masih belum memadai. Kebanyakan masyarakat masih menempatkan peternakan sebagai aktivitas sampingan. Kondisi ini dapat menimbulkan kerawanan pangan bagi masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- c. Belum optimalnya Pembangunan bidang pertanian yang diarahkan pada upaya untuk menjadikan sektor pertanian dalam tahap awal sebagai motor penggerak aktivitas ekonomi masyarakat menggantikan sektor pertambangan.
- d. Masih rendahnya produktivitas usaha perkebunan, serta penerapan teknologi tepat guna dalam meningkatkan produksi hasil perkebunan.
- e. Masih rendahnya kesejahteraan petani yang terlihat dari nilai tukar petani serta masih rendahnya Peningkatan nilai tambah dan pemasaran produk pertanian dan perkebunan

- f. Masih lemahnya Pemberdayaan kelembagaan ekonomi masyarakat petani dan kelompok tani dalam meningkatkan kesejahteraan petani.

### 3. Pariwisata

- a. Rendahnya fasilitas kredit yang disediakan perbankan atau lembaga keuangan lainnya untuk menunjang kegiatan sektor pariwisata.
- b. Peran pemerintah daerah dalam upaya pengembangan kepariwisataan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari belum tersedianya fasilitas dan sarana yang mendukung pengembangan kepariwisataan seperti fasilitas pusat informasi pariwisata daerah, fasilitas dan jasa transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan untuk menuju ke obyek-obyek wisata dan sarana infrastruktur seperti jaringan listrik dan telekomunikasi.
- c. Peran serta masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan masih minim, di mana seharusnya masyarakat lokal diberikan kesempatan seluas-luasnya dan menjadi prioritas utama untuk berusaha dan terlibat langsung di dalamnya.
- d. Sebagian obyek wisata belum dikelola secara baik, dan belum memiliki fasilitas penunjang yang memadai. Serta aksesibilitas menuju ke obyek-obyek wisata masih terbatas dan jarak tempuh perjalanan yang jauh antara obyek wisata yang satu ke obyek yang lain membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang besar.
- e. Sumber daya manusia dalam bidang kepariwisataan belum dapat berperan secara maksimal baik dari segi jumlah maupun kualitas serta Belum optimalnya pembangunan citra daerah wisata yang akan memperluas kesempatan kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.
- f. Masih belum optimalnya Pengembangan kepariwisataan dilakukan secara arif dan berkelanjutan terutama memanfaatkan pesona keindahan alam dan potensi daerah sebagai wilayah bahari yang dikelilingi oleh pantai nan indah. Serta masih belum optimalnya pengembangan Potensi wisata yang di fokuskan kepada pengembangan wisata sejarah dan wisata budaya.

### 4. Kehutanan

- a. Masih rendahnya pendapatan daerah yang di sumbang dari sektor kehutanan
- b. Belum optimalnya pengelolaan hasil hutan dan kawasan hutan dalam meningkatkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat
- c. Belum berkembangnya industri hilir produk hasil kehutanan untuk meningkatkan pembangunan daerah

### 5. Energi dan Sumber daya Mineral

- a. Permasalahan utama dalam sektor pertambangan dan penggalian adalah berkaitan dengan sifat dari komoditas pertambangan dan penggalian, yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Dengan menipisnya deposit komoditas yang telah dieksploitasi seperti yang dialami pada komoditas timah, maka kontribusi sektor ini terhadap PDRB, pemberdayaan ekonomi rakyat dan penerimaan pemerintah dengan sendirinya menurun. Demikian juga, komoditas pertambangan lain untuk menggantikan komoditas unggulan selama ini, belum diperoleh secara ekonomis. Salah satu kendala dalam eksplorasi komoditas pertambangan yang baru adalah timbul dari masalah birokrasi perizinan.
- b. Permasalahan yang ada dalam sektor listrik, gas dan air adalah tidak meratanya pengembangan sektor ini di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Permasalahan ini merupakan konsekuensi logis antara besarnya investasi yang

dibutuhkan dalam sub sektor listrik dengan pendapatan yang diharapkan, meskipun PLN membawa misi-misi pembangunan tertentu. Pengembangan listrik di wilayah yang merupakan ibukota kabupaten terutama didorong untuk menunjang penambahan sarana dan prasarana pemerintah, bukan didorong oleh kegiatan usaha.

#### 6. Perdagangan

- a. Masih belum optimalnya perdagangan yang dilakukan dalam mendukung pemasaran produk-produk lokal keluar daerah maupun keluar negeri.
- b. Masih rendahnya kualitas produk daerah yang akan di pasarkan keluar daerah sehingga mempengaruhi daya saing produk lokal di luar.
- c. Masih lemahnya sistem tata kelola perdagangan dalam daerah untuk memasarkan produk-produk yang dihasilkan didaerah untuk dipasarkan kedalam daerah sendiri.
- d. Masih tingginya ketergantungan daerah terhadap produk-produk yang berasal dari luar daerah untuk kebutuhan konsumsi baik komoditas pangan mau pun komoditas non pangan.
- e. Masih kurangnya jiwa enterprenaur aparaturn pemerintah didalam memfasilitasi perdagangan dalam negeri maupun perdagangan luar negeri dalam memasarkan produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat.

#### 7. Perindustrian

- a. Sebagian besar masyarakat masih menganggap penjualan langsung bahan baku yang berasal dari sektor pertanian dan kehutanan lebih menguntungkan dan kurang beresiko dibanding mendirikan industri pengolahan.
- b. Masih rendahnya Pengembangan rantai pertambahan nilai melalui diversifikasi produk (pengembangan ke hilir), pendalaman struktur ke hulunya, atau pengembangan secara menyeluruh (hulu-hilir).
- c. Masih lemahnya hubungan antarindustri yang terkait secara horizontal termasuk industri pendukung dan industri komplemennya, serta penguatan hubungan dengan kegiatan sektor primer dan jasa yang mendukungnya.
- d. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menunjang keberadaan industri pengolahan yang berskala besar.
- e. Pengembangan industri yang masih terfokus kepada pengembangan industri smelter timah
- f. Masih belum optimalnya dalam pengembangan industri yang berbasis pariwisata.

#### 8. Transmigrasi

- a. Tidak tersedianya lagi lahan untuk pembukaan kawasan transmigrasi baru
- b. Masih belum optimalnya pengelolaan kawasan transmigrasi yang telah ada baik dalam hal penyediaan sarana dan prasaran dan pemberdayaan masyarakat di kawasan transmigrasi

**Tabel II.139**

Identifikasi Isu Strategis Dalam Penyusunan RKPD Tahun 2019

NO	PERANGKAT DAERAH	ISU STRATEGIS RENSTRA PERANGKAT DAERAH	ISU STRATEGIS RPJMD TAHUN 2017-2022
1	DINAS TENAGA KERJA	1 Rendahnya kompetensi dan kualitas pencari kerja untuk memasuki pasar kerja	1 <u>Isu Ekonomi</u>
		2 Kurang harmonisnya Hubungan Industrial di tempat kerja yang ditandai dengan tingginya pelanggaran norma ketenagakerjaan dan kasus perselisihan Hubungan Industrial;	2 Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang masih rendah
		3 Rendahnya kompetensi warga transmigrasi di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	3 Tingkat pengangguran lebih tinggi dari laju pertumbuhan ekonomi
2	DINAS KEHUTANAN	1 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan dan pengelolaan hutan melalui Pengembangan perhutanan sosial dengan skema HD, HTR, HKM, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan.	1 Nilai tambah dan daya saing produk UKM yang masih rendah
		2 Lebih meningkatkan peran KPH dalam pengelolaan hutan dalam menghasilkan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu unggulan	2 Kemandirian Pangan Rendah
		3 Percepatan upaya rehabilitasi kawasan hutan dan DAS kritis.	3 Tingginya tingkat inflasi
		4 Peningkatan penegakan hukum terhadap tindak pidana kehutanan.	4 Peran serta masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Mineral belum optimal
3	DINAS UKM	1 Belum optimalnya upaya pengembangan volume usaha baik koperasi maupun UKM;	1 Hilirisasi sumber daya mineral masih rendah
		2 Masih rendahnya kemampuan SDM Koperasi dan UKM;	2 Belum optimalnya pengembangan Potensi Unggulan Daerah sektor Pariwisata, Perkebunan, Perikanan dan Pertambangan yang berkelanjutan
		3 Minimnya jaringan usaha baik UKM maupun koperasi;	3 Tingkat Investasi Rendah
		4 Belum optimalnya fasilitasi akses sumber permodalan bagi Koperasi dan UKM;	4 Tingginya Laju Pertumbuhan Penduduk
		5 Belum standarnya desain <i>packaging</i> produk KUKM;	5 <u>Isu Infrastruktur dan Konektivitas</u>
		6 Masih terbatasnya fasilitasi pemasaran produk KUKM;	6 Kebutuhan akan energi tidak seimbang dengan pertumbuhan penyediaan sumber energi
		7 Belum terjalin sinergitas pembinaan dan pengembangan KUKM dengan OPD pada kabupaten/kota;	7 Konektivitas antar pulau sebagian besar sulit dijangkau
		8 Masih kurangnya pembinaan terhadap calon eksportir dan pelaku promosi/misi dagang ke luar negeri mengenai produk unggulan daerah;	8 Kesenjangan pembangunan infrastruktur antar wilayah masih tinggi

NO	PERANGKAT DAERAH	ISU STRATEGIS RENSTRA PERANGKAT DAERAH		ISU STRATEGIS RPJMD TAHUN 2017-2022	
		9	Masih rendahnya akses anggota koperasi dan UKM terhadap perbankan;	9	Potensi sumber daya di kawasan strategis belum terbangun dengan baik
		10	Belum adanya gedung pemasaran produk Koperasi dan UMKM yang representatif;	10	Kualitas infrastruktur dan konektivitas masih terbatas
		11	Lemahnya pengawasan terhadap koperasi yang ada, sehingga jumlah koperasi yang tidak aktif relatif banyak;	11	Keterbatasan infrastruktur komunikasi dan informatika
		12	Belum optimalnya tata kelola koperasi dan UKM yang bergerak pada usaha-usaha untuk menopang sektor pariwisata dan pengolahan hasil perikanan dan pertanian.	12	Isu Sumber Daya Manusia
4	DINAS KELAUTAN PERIKANAN	1	Masih rendahnya Pertumbuhan Ekonomi dan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan	1	Tingkat pendidikan SDM masih rendah
		2	Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan dalam mentaati peraturan	2	Isu Kesehatan
		3	Masih belum optimalnya pembangunan berbasis pengembangan kawasan kelautan dan perikanan.	3	Mutu pelayanan kesehatan masih terbatas
5	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1	Rendahnya tingkat kunjungan wisatawan	1	Kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup sehat masih rendah
		2	Rendahnya kualitas dan kuantitas Pemasaran Pariwisata	2	Pengguna narkoba dan penderita HIV AIDS meningkat
		3	Kurangnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana dan fasilitas umum di destinasi pariwisata	3	Isu Tata Kelola Pemerintahan dan Pembangunan Demokrasi
		4	Kurangnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Pariwisata	4	Reformasi birokrasi dan pelayanan publik belum optimal
		5	Kurangnya sinergi antar pemangku kepentingan kebudayaan dan pariwisata	5	Kondusivitas demokrasi belum stabil
		6	Kurangnya kualitas SDM Kebudayaan	6	Isu Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana
		7	Kurangnya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kekayaan dan keragaman budaya	7	Lingkungan hidup banyak yang rusak
6	DINAS PERTANIAN	1	Belum optimalnya produksi dan produktivitas sub-sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, serta populasi dan produksi sub-sektor peternakan;	1	Rawan bencana
		2	Sumber-sumber benih yang bermutu dan unggul belum tersedia dalam tepat jumlah, waktu dan tepat sasaran;	2	Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang belum konsisten
		3	Standarisasi produk pertanian atau mutu/kualitas produk pertanian yang relatif masih rendah, yang berakibat rendahnya daya saing dan masih		



NO	PERANGKAT DAERAH	ISU STRATEGIS RENSTRA PERANGKAT DAERAH	ISU STRATEGIS RPJMD TAHUN 2017-2022
		lemahnya jaringan informasi pasar menjadikan posisi tawar petani rendah.	
		4 Lahan Pertanian :	
		5 (a) Belum optimalnya pemanfaatan/produktivitas lahan yang tersedia untuk usaha pertanian; (b) Konversi lahan pertanian/perubahan fungsi lahan pertanian untuk kebutuhan non-pertanian; (c) Kecenderungan penurunan kualitas lahan, sebagai akibat pemakaian pupuk kimia serta pestisida yang tidak seimbang dan dilakukan secara terus menerus; (d) Rata-rata kepemilikan lahan yang sempit; (e) Lahan untuk usaha ternak yang belum cukup tersedia; (f) Ketidakpastian status kepemilikan lahan.	
		6 Ketersediaan infrastruktur, sarana dan prasarana dalam pendukung produksi pertanian (irigasi, jalan usaha tani, alsin dan pupuk) masih terbatas;	
		7 Perubahan iklim global, berakibat terjadi perubahan musim, sehingga meningkatkan bencana alam dan perkembangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT);	
		8 Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pertanian	
		(a) Terbatasnya dukungan sumber daya manusia, dari segi kualitas kompetensinya dalam menyerap/ mengadopsi serta menerapkan kemajuan teknologi dan informasi; (b) Lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan penyerapan teknologi pertanian, mengakibatkan petani tidak memiliki nilai/posisi tawar produk; (c) Rendahnya minat generasi muda untuk mengembangkan dan terlibat dalam usaha di sektor pertanian; (d) Belum optimalnya peran penyuluh pertanian dalam peningkatan kapasitas SDM pertanian dalam upaya	



NO	PERANGKAT DAERAH	ISU STRATEGIS RENSTRA PERANGKAT DAERAH		ISU STRATEGIS RPJMD TAHUN 2017-2022	
			pengembangan, pemberdayaan, dan penguatan kelembagaan petani serta pengembangan kapasitas petani dalam rangka meningkatkan daya saing petani;		
			Terbatasnya/lemahnya petani dalam mengakses sumber-sumber permodalan dalam upaya mengembangkan usaha tani baik dalam proses produksi, pengolahan dan pemasaran produk-produk pertanian.		
7	DINAS ESDM	1	Masih rendahnya tata kelola dan nilai tambah produk sumber daya mineral;		
		2	Belum tercapainya "Kemandirian Energi"		
		3	Belum maksimalnya pendataan dan penelitian potensi Geologi, Sumber Daya Mineral dan Air Tanah.		
8	DINAS PANGAN	1	Rentannya tingkat ketahanan pangan masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.		
9	BAKUDA	1	Kurang optimalnya kualitas pelayanan public;		
		2	Belum optimalnya penerimaan pendapatan daerah melalui PAD;		
		3	Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah;		
		4	Belum optimalnya pengelolaan asset daerah.		
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP				
11	DINAS PERINDAG	1	Belum ada unit Kerja Kemetrolagian Legal di Daerah Tk. II Kabupaten/Kota.		
		2	Belum terlaksananya pemisahan kewenangan antara kewenangan pelayanan dengan kewenangan pengawasan.		
		3	Belum optimalnya pengawasan mutu oleh Laboratorium Penguji Mutu di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.		
		4	Pengembangan standarisasi belum optimal.		
		5	Belum optimalnya penataan pasar tradisional.		
		6	Belum tertibnya pelaksanaan ketentuan Ekspor Timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.		
		7	Industri pengolahan potensi sumber daya alam masih bersifat hulu.		
		8	Belum optimalnya pengelolaan / pemanfaatan Kawasan Peruntukan Industri di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.		
		9	Belum terbentuknya <i>cluster</i> industri		

NO	PERANGKAT DAERAH	ISU STRATEGIS RENSTRA PERANGKAT DAERAH	ISU STRATEGIS RPJMD TAHUN 2017-2022
		prioritas.	
12	BP2TPM	1 Belum optimalnya penyediaan data konsep potensi dan peluang investasi yang siap ditawarkan.	
		2 Perlunya rebranding investasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	
		3 Belum optimalnya pengembangan kebijakan yang mendukung penanaman modal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	
		4 Perlunya dilakukan pemberdayaan usaha untuk meningkatkan fasilitas kemitraan.	
		5 Perlunya penguatan iklim usaha dan daya tarik penanaman modal daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	
		6 Masih kurangnya kerjasama promosi penanaman modal dan masih rendahnya minat investor untuk berinvestasi.	
		7 Perlunya Peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparatur.	
		8 Belum optimalnya pengembangan sistem informasi pelayanan perizinan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.	
13	DPMD	1 Tingkat Pelayanan Pemerintah desa terhadap publik belum optimal	1 Isu Ekonomi
		2 Belum optimalnya pengembangan sistem informasi pelayanan perizinan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.	2 Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang masih rendah
		3 Tingkat Kesejahteraan Masyarakat desa masih rendah	3 Tingkat pengangguran lebih tinggi dari laju pertumbuhan ekonomi
		4 Tingkat Kesejahteraan Masyarakat desa masih rendah	4 Nilai tambah dan daya saing produk UKM yang masih rendah
		5 Tingkat Sarana dan Prasarana fisik maupun non fisik di desa dan kawasan perdesaan yang belum memadai	5 Kemandirian Pangan Rendah
			6 Tingginya tingkat inflasi
			7 Peran serta masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Mineral belum optimal
			8 Hilirisasi sumber daya mineral masih rendah
14	PUPR	1 Isu strategis yang tertuang didalam renstra PUPR dijabarkan perbidang sehingga terlalu banyak isunya	1 Belum optimalnya pengembangan Potensi Unggulan Daerah sektor Pariwisata, Perkebunan, Perikanan dan Pertambangan yang berkelanjutan
			2 Tingkat Investasi Rendah
			3 Tingginya Laju Pertumbuhan Penduduk

NO	PERANGKAT DAERAH	ISU STRATEGIS RENSTRA PERANGKAT DAERAH	ISU STRATEGIS RPJMD TAHUN 2017-2022
15	DISHUB	1 Penguatan konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi multimoda dan antarmoda untuk mengurangi backlog maupun bottleneck kapasitas prasarana transportasi dan sarana transportasi antarmoda dan antar pulau sesuai dengan sistem transportasi nasional dan cetak biru transportasi multimoda dimana salah satu fokus pembangunan pada pengembangan pelabuhan pendukung tol laut	1 Isu Infrastruktur dan Konektivitas
		2 Pembangunan transportasi umum massal perkotaan:	2 Kebutuhan akan energi tidak seimbang dengan pertumbuhan penyediaan sumber energi
		a Meningkatkan pelayanan angkutan umum massal perkotaan	a Konektivitas antar pulau sebagian besar sulit dijangkau
		b Meningkatkan kinerja lalu lintas jalan perkotaan	b Kesenjangan pembangunan infrastruktur antar wilayah masih tinggi
		c Meningkatkan aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan dengan indikator penerapan pengaturan persimpangan dengan menggunakan teknologi informasi (ATCS)	c Potensi sumber daya di kawasan strategis belum terbangun dengan baik
		3 Pengembangan pembangunan infrastruktur perhubungan darat, laut dan udara serta modernisasi moda transportasi untuk membuka akses antar pulau, antar provinsi dan negara termasuk mendukung peningkatan aksesibilitas ke destinasi pariwisata daerahnugutan konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi multimoda dan antarmoda untuk mengurangi backlog maupun bottleneck kapasitas prasarana transportasi dan sarana transportasi antarmoda dan antar pulau sesuai dengan sistem transportasi nasional dan cetak biru transportasi multimoda dimana salah satu fokus pembangunan pada pengembangan pelabuhan pendukung tol laut	3 Kualitas infrastruktur dan konektivitas masih terbatas
		4 Meningkatkan aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan	4 Keterbatasan infrastruktur komunikasi dan informatika

NO	PERANGKAT DAERAH	ISU STRATEGIS RENSTRA PERANGKAT DAERAH	ISU STRATEGIS RPJMD TAHUN 2017-2022
		dengan indikator penerapan pengaturan persimpangan dengan menggunakan teknologi informasi (ATCS)	
16	PERKIM	Bidang Cipta Karya dan Kawasan Permukiman	Isu Kesehatan
		1 Belum optimalnya penyediaan infrastruktur di kawasan strategis Provinsi.	1 Mutu pelayanan kesehatan masih terbatas
		2 Bidang Cipta Karya dan Kawasan Permukiman	2 Kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup sehat masih rendah
		3 Belum optimalnya penyediaan infrastruktur di kawasan strategis Provinsi.	3 Pengguna narkoba dan penderita HIV AIDS meningkat
		4 Belum optimalnya penyediaan infrastruktur di kawasan permukiman.	4 Isu Tata Kelola Pemerintahan dan Pembangunan Demokrasi
		5 Belum tersedianya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional yang berwawasan lingkungan.	5 Reformasi birokrasi dan pelayanan publik belum optimal
		6 Penanganan permukiman kumuh yang belum holistik menyebabkan kondisi kekumuhan tidak dapat diatasi bahkan cenderung mengalami peningkatan luasan.	6 Kondusivitas demokrasi belum stabil
		Bidang Perumahan Rakyat	Isu Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana
		1 Keterbatasan masyarakat miskin dalam rangka pemenuhan kebutuhan rumah layak huni	1 Lingkungan hidup banyak yang rusak
		2 Belum tersedia dana murah jangka panjang untuk meningkatkan akses dan daya beli rumah bagi masyarakat berpenghasilan menengah kebawah terutama bagi masyarakat miskin dan berpenghasilan tidak tetap.	2 Rawan bencana
		3 Kerusakan lingkungan serta cuaca yang tidak menentu menyebabkan terjadinya bencana alam sehingga mengakibatkan kerusakan pada hunian penduduk.	3 Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang belum konsisten
17	BAPPEDA	1 Kualitas dokumen perencanaan yang dihasilkan belum cukup baik.	
		2 Belum optimalnya peran koordinasi, pembinaan dan pengendalian terhadap perencanaan dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Bappeda.	
		3 Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah yang telah dikembangkan;	
		4 Tingkat keterisian data pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang masih rendah.	

NO	PERANGKAT DAERAH	ISU STRATEGIS RENSTRA PERANGKAT DAERAH	ISU STRATEGIS RPJMD TAHUN 2017-2022
		5 Masih rendahnya tingkat ketaatan PD dan Kab/Kota dalam menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan, pelaksanaan dan hasil dari perencanaan yang sudah dilakukan.	
		6 Belum termanfaatkan sepenuhnya hasil penelitian dan pengembangan (termasuk inovasi daerah) yang sudah dilakukan dapat digunakan sebagai suatu referensi dalam pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan daerah.	
18	DISKOMINFO	1 Belum optimalnya pelayanan informasi dan komunikasi publik	
		2 Belum optimalnya penerapan e-Government di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
		3 Belum optimalnya penyediaan dan pengelolaan data dan informasi yang akurat dan handal	

**Tabel II.140**

Identifikasi Permasalahan Pembangunan dari Kebijakan Nasional/Provinsi dan Lingkungan Eksternal Lainnya

No.	Isu Penting dan Permasalahan Mendesak		
	Tingkat Nasional	Tingkat Provinsi	Lingkungan Eksternal lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)
	Partisipasi penduduk dlm pendidikan dan pelatihan keterampilan perlu terus ditingkatkan.	Tingginya angka anak putus sekolah ( <i>Drop Out</i> ) khususnya pendidikan menengah	Perkembangan Ekonomi Global
	Perlu upaya sinergis dalam peningkatan kualitas pendidikan kejuruan.	Rendahnya rata-rata lama sekolah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pengembangan Kawasan Strategis Nasional (KSN) bidang ekonomi
	Kompetensi guru masih harus ditingkatkan.	Kesempatan yang diberikan pemerintah setempat bagi guru untuk melanjutkan pendidikan formal masih kurang	
	Angka Kematian Ibu (AKI) Masih Tinggi	Masih tingginya angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian bayi	
	Disparitas Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap Masih Lebar	Angka harapan hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibawah rata-rata nasional	
	Stunting pada Balita dan Anemia pada Ibu Hamil Masih Tinggi	Rendahnya kesadaran dan perilaku masyarakat terhadap aspek kesehatan lingkungan.	
	Persyaratan pengajuan kredit kepemilikan rumah yang belum mengakomodir Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Masih rendahnya kepemilikan rumah bagi masyarakat terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat miskin	

No.	Isu Penting dan Permasalahan Mendesak		
	Tingkat Nasional	Tingkat Provinsi	Lingkungan Eksternal lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)
	Keterbatasan ketersediaan lahan untuk pembangunan perumahan, khususnya kelompok masyarakat berpenghasilan rendah	Penanganan kawasan kumuh yang belum terintegrasi antara sektoral serta pemerintah daerah kab/kota	
	Kapasitas & manajemen layanan air minum belum optimal	Masih rendahnya kinerja pelayanan air bersih dan Krisis air baku karena pencemaran yang cukup tinggi akibat aktivitas tambang timah rakyat	
	Kesadaran terhadap pentingnya sanitasi masih sangat rendah	Belum terintegrasi penyediaan air minum dan sanitasi dalam penyediaan pengembangan perumahan	
		Kondisi kemantapan menurun dengan meningkatnya Kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam & anomali cuaca	Dampak pemanasan Global (Global Warming)
	Kinerja sektor industri pengolahan dan ekspor mengalami penurunan	Belum optimalnya industri pengolahan berbasis sumber daya alam (karet lada sawit dll)	Meningkatkan ketahanan dan daya saing sektor keuangan dalam mendukung pembangunan/ pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
		Masih kurangnya kerjasama promosi penanaman modal serta rendahnya minat investor untuk berinvestasi	
	Masih rendahnya daya saing industri pengolahan yang didukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja yang produktif dan kompeten	Tingginya ketergantungan daerah terhadap produk-produk dan bahan baku yang berasal dari luar daerah untuk kebutuhan konsumsi baik komoditas pangan mau pun komoditas non pangan	Pengamanan produksi untuk kemandirian dan diversifikasi konsumsi pangan
		Lemahnya Pengembangan budaya inovatif yang berorientasi IPTEK dengan tetap mempertahankan nilai-nilai dan budaya leluhur serta kurangnya minat masyarakat terhadap IPTEK	
	Dibutuhkan penambahan kesempatan kerja > 2 juta dalam setahun	Kurangnya kualitas tenaga kerja, produktifitas tenaga kerja, kesempatan kerja, serta perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan.	Mencapai pertumbuhan yang tinggi dan mengutamakan penumbuhan usaha pemula di ekonomi kreatif
		Meningkatnya tingkat pengangguran di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	

No.	Isu Penting dan Permasalahan Mendesak		
	Tingkat Nasional	Tingkat Provinsi	Lingkungan Eksternal lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)
	Meningkatkan penyediaan subsidi operasi, memperluas area layanan, menambah trip perintis untuk Angkutan Laut, ASDP, Udara dan Kereta Api	Belum optimalnya Pengembangan transportasi laut dan udara yang murah dalam mendukung pengendalian inflasi dan pengembangan pariwisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
	Pembangunan sistem dan fasilitas angkutan umum massal yang modern, maju, aman, nyaman dan harga yang terjangkau.	Belum optimalnya penataan Transportasi darat termasuk angkutan umum perkotaan yang terjangkau dengan memperhatikan tata ruang, fungsi, dan mutu lingkungan hidup, sehingga wilayah perkotaan dan sekitarnya makin berfungsi, baik sebagai kawasan permukiman maupun sebagai pusat-pusat produksi, jasa, dan perdagangan	
	Pengurangan desa tertinggal menjadi desa berkembang	Adanya desa berkategori desa tertinggal. hal ini terlihat dari data Indeks Pembangunan Desa (IPD) Tahun 2014 jumlah desa tertinggal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berjumlah 12 desa dan desa berkembang berjumlah 52 desa dari total desa berjumlah 309 desa	
		Masih terjadi Kesenjangan pembangunan sosial dan pembangunan antar wilayah	
	Masih kurangnya peran DPRD dalam mewakili aspirasi masyarakat	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi masih berfluktuatif, pada tahun 2015 di 72,31 dan pada tahun 2014 pada 75,32	Terwujudnya Proses Positif Konsolidasi Demokrasi
		Reformasi birokrasi perlu ditingkatkan melalui peningkatan integritas, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik dengan mengoptimalkan kepedulian dan partisipasi masyarakat	

#### **2.4. POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD**

Merupakan masukan yang disampaikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Paripurna Penyampaian Hasil Reses Anggota DPRD yang dilaksanakan oleh masing-masing Anggota DPRD sesuai dengan Daerah Pemilihannya,

Selanjutnya hasil Reses ini akan dipilah berdasarkan kabupaten/kota, program dan kegiatan, SKPD penanggungjawab dan kewenangan dari program/kegiatan yang diusulkan. Secara lengkap pokok-pokok pikiran DPRD ini sebagaimana yang tersaji pada tabel II.139 berikut:



**Tabel II.141**  
Rumusan Usulan Program/Kegiatan  
Hasil Penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD dan Validasi  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Usulan Dewan				Hasil Verifikasi	
		Kegiatan	PD	Lokasi Detail	Keterangan	Status Usulan	Alasan Diterima/Ditolak
1	PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT	Bangku Permanen Untuk Sekolah	DINAS PENDIDIKAN	SMU dan SMK di Kab. Bangka Tengah	Bangku Permanen Untuk Sekolah SMU dan SMK di Kab. Bangka Tengah	Diakomodir	
2	PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT	Insentif bagi Guru TPA	SEKRETARIAT DAERAH	Desa Air Mesu. Kab. Bangka Tengah Umumnya	Insentif bagi Guru TPA Desa Air Mesu. Kab. Bangka Tengah Umumnya	Sedang Diverifikasi	
3	PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT	Beasiswa bagi masyarakat tidak mampu	SEKRETARIAT DAERAH	Kab. Bangka Tengah	Beasiswa bagi masyarakat tidak mampu Kab. Bangka Tengah	Sedang Diverifikasi	
4	PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT	Insentif Guru-Guru Honor PAUD s.d. SMU	DINAS PENDIDIKAN	Kota Pangkalpinang		Belum Diakomodir	melalui bantuan keuangan bidang pendidikan yang bersifat khusus, untuk insentif Pendidik PAUD. Untuk SD s.d SMU belum bisa diakomodir. (0 0)
5	PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT	Bantuan Buku Iqro dan Al Quran Nur Karim bagi anak-anak tak mampu	SEKRETARIAT DAERAH	Kota Pangkalpinang di TPA-TPA	Bantuan Buku Iqro dan Al Quran Nur Karim bagi anak-anak tak mampu	Sedang Diverifikasi	
6	PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT	Bantuan Sarana Pendidikan di PAUD dan Madrasah	DINAS PENDIDIKAN	Kota Pangkalpinang	Bantuan Sarana Pendidikan di PAUD dan Madrasah	Belum Diakomodir	keterbatasan anggaran (0 0)

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Usulan Dewan				Hasil Verifikasi	
		Kegiatan	PD	Lokasi Detail	Keterangan	Status Usulan	Alasan Diterima/Ditolak
7	PENINGKATAN PEMBANGUNAN DEMOKRASI	Sosialisasi BPJS	DINAS KESEHATAN	Kota Pangkalpinang	Banyaknya masyarakat yang belum mengetahui proses dan prosedur BPJS waktu sakit	Sedang Diverifikasi	Sudah ada di program kegiatan 2019
8	PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT	Pengadaan Lahan SMK	DINAS PENDIDIKAN	Kab. Bangka Tengah	Pengadaan lahan SMK di Bangka Tengah	Belum Diakomodir	untuk dibahas di Biro Pemerintahan (0 0)
9	PENGEMBANGAN ENERGI DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN	Sarana Aliran Air PAM	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Kota Pangkalpinang - Kelurahan Sriwijaya	Sarana Aliran Air PAM	Belum Diakomodir	Bukan kewenangan provinsi (0 0)
10	PENGEMBANGAN ENERGI DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN	Perbaikan Jalan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kelurahan Air Kepala Tujuh, Kelurahan Rejosari, Kelurahan Kejaksaan.	Perbaikan Jalan		Diusulkan melalui DABA
11	PENGEMBANGAN ENERGI DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN	Pembangunan jalan jembatan pasar pabrik	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Desa Lubuk Kab. Bangka Tengah	Pembangunan jalan jembatan pasar pabrik Desa Lubuk Kab. Bangka Tengah		Diusulkan melalui DABA
12	PENGEMBANGAN ENERGI DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN	Penerangan Lampu Jalan	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Kota Pangkalpinang	Penerangan Lampu Jalan di Kelurahan Air Kepala Tujuh, Kel. Sinar Bulan, Kelurahan Kejaksaan.	Belum Diakomodir	Bukan kewenangan DPRKP (0 0)
13	PENGEMBANGAN ENERGI DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN	Bandar/Siring di Jalan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kota Pangkalpinang	Agar dibuatkan Bandar/Siring yang baik agar jalan tidak cepat rusak.		Diusulkan melalui DABA

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Usulan Dewan				Hasil Verifikasi	
		Kegiatan	PD	Lokasi Detail	Keterangan	Status Usulan	Alasan Diterima/Ditolak
14	PENGEMBANGAN ENERGI DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN	Bank Sampah Lokal	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Kota Pangkalpinang	Pembuatan tempat penampungan sampah yang baik yang memudahkan masyarakat mengumpulkan sampah dan petugas mengambilnya.	Belum Diakomodir	Bukan kewenangan DPRKP (0 0)
15	PENGEMBANGAN ENERGI DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN	Pembuatan Siring sepanjang 6 km	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Desa Lubuk Kab. Bangka Tengah	Pembuatan Siring sepanjang 6 km Desa Lubuk Kab. Bangka Tengah	Diakomodir	Sudah Diakomodir pada Tahun 2018 dan Renja 2019 serta dilanjutkan di tahun berikutnya secara bertahap
16	PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT	Bantuan bagi TPA di Sampur	SEKRETARIAT DAERAH	Kota Pangkalpinang kelurahan Sampur	Bantuan pembangunan tempat mengajar TPA di Kel. Sampur	Sedang Diverifikasi	
17	PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT	Bantuan Pengadaan tanah Pekuburan	SEKRETARIAT DAERAH	Kota Pangkalpinang, Kelurahan Kejaksaan	Bantuan Penyediaan Lahan untuk Pekuburan di Kelurahan Kejaksaan	Sedang Diverifikasi	
18	PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT	Sosialisasi dan Bantuan Peralatan dan Modal Usaha Bagi UMKM	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Kota Pangkalpinang, Jalan Perbakin dan Kelurahan Sriwijaya	Sosialisasi dan Bantuan Peralatan dan Modal Usaha Bagi UMKM	Sedang Diverifikasi	
19	PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT	Bazar Sembako ataupun Operasi Pasar Sembako sebelum Lebaran	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Kota Pangkalpinang, Kelurahan Sriwijaya	Bazar Sembako ataupun Operasi Pasar Sembako sebelum Lebaran	Sedang Diverifikasi	
20	PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT	Operasi Pasar Gas Elpiji	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Kota Pangkalpinang	Operasi Pasar Gas Elpiji	Sedang Diverifikasi	

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Usulan Dewan				Hasil Verifikasi	
		Kegiatan	PD	Lokasi Detail	Keterangan	Status Usulan	Alasan Diterima/Ditolak
21	PENGEMBANGAN ENERGI DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN	Pengadaan Fasilitas Penerangan Jalan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kab. Bangka Tengah	Pengadaan Fasilitas Penerangan Jalan Kab. Bangka Tengah	Sedang Diverifikasi	Merupakan TUSI Dinas Perhubungan.
22	PENGEMBANGAN PARIWISATA	Kegiatan Konstruktif pemuda dan remaja melalui Olahraga dan Organisasi Kepemudaan	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Kota Pangkalpinang	Dapat berupa sosialisasi, pelatihan, pembinaan dll.		Diteruskan ke TAPD prov untuk pembahasan
23	PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT	Bantuan Pelayanan Kesehatan bagi penderita cacat permanen	DINAS KESEHATAN	Kab. Bangka Tengah		Sedang Diverifikasi	akan di tinjau ulang melalui prog keg Jamkesmas melalui pergub yang baru
24	PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT	Bantuan Rumah Layak Huni	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Kab. Bangka Tengah		Diakomodir	Lokasi disesuaikan dengan kewenangan provinsi yaitu di kawasan kumuh provinsi dan kawasan strategis provinsi. Pada tahun 2019 akan dilaksanakan di KSP tanjung berikat dan kawasan kumuh Padang Mulia dan Kawasan Kumuh Sungai Selan. Usulan sudah diakomodir oleh kabupaten Bangka Tengah

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Usulan Dewan				Hasil Verifikasi	
		Kegiatan	PD	Lokasi Detail	Keterangan	Status Usulan	Alasan Diterima/Ditolak
25	PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT	Bantuan sosial bagi masyarakat terdampak banjir	DINAS SOSIAL	Kota Pangkalpinang	Agar dapat diberikan dengan cermat dan tepat Bantuan sosial bagi masyarakat terdampak banjir	Diakomodir	
26	PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT	Bantuan penambahan armada mobil transportasi untuk sekolah	DINAS PERHUBUNGAN	Kab. Bangka Tengah		Sedang Diverifikasi	Pengadaan bis sekolah dilaksanakan menggunakan skema CSR
27	PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT	Sosialisasi informasi mengenai BPJS kesehatan	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Kab. Bangka Tengah		Diakomodir	
28	PENGEMBANGAN ENERGI DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN	Bantuan Lahan Lapangan Sepak Bola	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Desa Simpangkatis Kab. Bangka Tengah			Diteruskan ke TAPD prov untuk pembahasan
29	PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN AGROPOLITAN	Bantuan bibit super dan pupuk yang berkualitas untuk petani lada dan karet	DINAS PERTANIAN	Kab. Bangka Tengah		Diakomodir	Bantuan untuk komoditas lada seluas 200 Ha
30	PENGEMBANGAN ENERGI DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN	Pengaspalan jalan lingkar desa	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Desa Keretak Kab. Bangka Tengah			Diusulkan melalui DABA
31	PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT	Pembuatan Pagar Sekolah	DINAS PENDIDIKAN	SDN 12 dan SMPN 6 Keretak Kab. Bangka Tengah	Pembuatan Pagar Sekolah SDN 12 dan SMPN 6 Keretak Kab. Bangka Tengah	Belum Diakomodir	keterbatasan anggaran. (0 0)
32	PENGEMBANGAN ENERGI DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN	Pembangunan Sering	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	RT 2 Desa Keretak Kab. Bangka Tengah			Diusulkan melalui DABA

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Usulan Dewan				Hasil Verifikasi	
		Kegiatan	PD	Lokasi Detail	Keterangan	Status Usulan	Alasan Diterima/Ditolak
33	PENGEMBANGAN ENERGI DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN	Pengadaan Lampu Jalan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Desa Keretak Kab. Bangka Tengah		Sedang Diverifikasi	Merupakan TUSI Dinas Perhubungan.
34	PENGEMBANGAN ENERGI DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN	Pemasangan Talud Sungai Cikau	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Desa Keretak Kab. Bangka Tengah			Diusulkan melalui DABA.
35	PENGEMBANGAN ENERGI DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN	Pengaspalan Jalan Jurung Pucuk dan Jalan SD Air Itam	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Desa Keretak Kab. Bangka Tengah	Pengaspalan Jalan Jurung Pucuk dan Jalan SD Air Itam Desa Keretak Kab. Bangka Tengah		Diusulkan melalui DABA,
36	PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN AGROPOLITAN	Bantuan Bibit Lada	DINAS PERTANIAN	Desa Keretak Kab. Bangka Tengah		Diakomodir	Sudah terdapat di usulan Kab.Bateng berupa intensifikasi tanaman lada
37	PENGEMBANGAN PARIWISATA	Pengembangan Kawasan Wisata Air Panas Keteper	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Desa Keretak Kab. Bangka Tengah		Sedang Diverifikasi	
38	PENGEMBANGAN ENERGI DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN	Pembangunan Jalan Tanjung Pura - Sungaiselan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Desa Tanjung Pura Kab. Bangka Tengah	Pembangunan Jalan Tanjung Pura - Sungaiselan		Diusulkan melalui DABA
39	PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT	Reaksi Cepat Kelangkaan Bahan Pokok dan Elpiji 3 Kg.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Kota Pangkalpinang	Agar ada kegiatan Reaksi Cepat jika ada kelangkaan sembako dan elpiji 3 Kg agar tidak meresahkan masyarakat	Sedang Diverifikasi	

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Usulan Dewan				Hasil Verifikasi	
		Kegiatan	PD	Lokasi Detail	Keterangan	Status Usulan	Alasan Diterima/Ditolak
40	PENGEMBANGAN ENERGI DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN	Pembangunan Jalan dari pantai ke sungaiselan dan pembangunan jalan ke Batu Nek	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Desa Tanjung Pura Kab. Bangka Tengah	Pembangunan Jalan dari pantai ke sungaiselan dan pembangunan jalan ke Batu Nek Desa Tanjung Pura Kab. Bangka Tengah		Diusulkan melalui DABA
41	PENGEMBANGAN ENERGI DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN	Pembangunan Pelabuhan Nelayan dan transportasi	DINAS PERHUBUNGAN	Desa Tanjung Pura Kab. Bangka Tengah	Pembangunan Pelabuhan Nelayan dan transportasi Desa Tanjung Pura Kab. Bangka Tengah	Sedang Diverifikasi	Kewenangan Provinsi adalah Pelabuhan Pengumpan Regional (antar kabupaten)
42	PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT	Pelatihan bagi Remaja/Masyarakat Muda yang masih menganggur	DINAS TENAGA KERJA	Kota Pangkalpinang	Perbanyak intensitas Pelatihan bagi Remaja/Masyarakat Muda yang masih menganggur	Diakomodir	
43	PENGEMBANGAN ENERGI DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN	Penyambungan Dermaga Tanjung Pura untuk penambatan kapal dan menurunkan penumpang	DINAS PERHUBUNGAN	Desa Tanjung Pura Kab. Bangka Tengah	Penyambungan Dermaga Tanjung Pura untuk penambatan kapal dan menurunkan penumpang Desa Tanjung Pura Kab. Bangka Tengah	Sedang Diverifikasi	Akan dilakukan survey kondisi lapangan terlebih dahulu mengingat status aset agar tidak tumpang tindih
44	PENINGKATAN PEMBANGUNAN DEMOKRASI	Sosialisasi Bahaya Narkoba	DINAS SOSIAL	Kota Pangkalpinang	Sosialisasi Bahaya Narkoba	Diakomodir	
45	PENGEMBANGAN ENERGI DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN	Pembangunan Jembatan penghubung dari Pulau Nangka ke Tanjung Tedong	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Desa Tanjung Pura Kab. Bangka Tengah	Pembangunan Jembatan penghubung dari Pulau Nangka ke Tanjung Tedong Desa Tanjung Pura Kab. Bangka Tengah		Diusulkan melalui DABA

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Usulan Dewan				Hasil Verifikasi	
		Kegiatan	PD	Lokasi Detail	Keterangan	Status Usulan	Alasan Diterima/Ditolak
46	PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT	Bantuan Pengadaan Mobil Operasional Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Desa Tanjung Pura Kab. Bangka Tengah	Bantuan Pengadaan Mobil Operasional Desa Tanjung Pura Kab. Bangka Tengah	Belum Diakomodir	mohon kepada PMD kabupaten untuk menyampaikan surat permohonan pengadaan/ hibah mobil transportasi perdesaan ke Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dengan tembusan ke DPMD Provinsi dan Bappeda Provinsi untuk dapat menghibahkan kendaraan operasional milik Provinsi
47	PENGEMBANGAN ENERGI DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN	Pengadaan Sumur Bor	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Desa Tanjung Pura Kab. Bangka Tengah	Pengadaan Sumur Bor Desa Tanjung Pura Kab. Bangka Tengah	Sedang Diverifikasi	Di Usulkan melalui Dana APBN
48	PENGEMBANGAN ENERGI DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN	Pembangunan Jalan dari Kampung Seberang ke Dusun Pangkal Raya	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kel. Sungaiselan Kab. Bangka Tengah	Pembangunan Jalan dari Kampung Seberang ke Dusun Pangkal Raya Kel. Sungaiselan Kab. Bangka Tengah		Diusulkan melalui DABA
49	PENGEMBANGAN ENERGI DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN	Pembangunan Jalan Tembus Sungaiselan - Tanjung Pura	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kel. Sungaiselan Kab. Bangka Tengah	Pembangunan Jalan Tembus Sungaiselan - Tanjung Pura Kel. Sungaiselan Kab. Bangka Tengah		Diusulkan melalui DABA



No	Prioritas Pembangunan Daerah	Usulan Dewan				Hasil Verifikasi	
		Kegiatan	PD	Lokasi Detail	Keterangan	Status Usulan	Alasan Diterima/Ditolak
50	PENGEMBANGAN ENERGI DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN	Bantuan Pembangunan Masjid	SEKRETARIAT DAERAH	Desa Romadhon Kab. Bangka Tengah	Bantuan Pembangunan Masjid Desa Romadhon Bangka Tengah	Sedang Diverifikasi	
51	PENGEMBANGAN ENERGI DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN	Pengaspalan Jalan untuk masyarakat	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Desa Arung Dalam Kab. Koba	Pengaspalan Jalan untuk masyarakat Desa Arung Dalam Kab. Koba		Diusulkan melalui DABA
52	PENGEMBANGAN ENERGI DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN	Pembangunan Sering/Bandar RT. 09	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Desa Kulur Kab. Bangka Tengah			Diusulkan melalui DABA
53	PENINGKATAN PEMBANGUNAN DEMOKRASI	Sosialisasi BPJS	DINAS KESEHATAN	Kota Pangkalpinang	Masyarakat minta agar Pemerintah memberikan penjelasan BPJS yang bermasalah	Sedang Diverifikasi	Sudah ada di program kegiatan 2019
54	PENGEMBANGAN ENERGI DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN	Pembuatan Dermaga Tambatan Perahu di Selindung Lama	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Kota Pangkalpinang, Selindung Lama	Tempat Tambatan Perahu Nelayan	Belum Diakomodir	Belum diakomodir, karena belum jelasnya status lahan jetty tersebut, belum ada DED dan lokus pembangunan jetty hanya di celagen, kab. Bangka Selatan, disarankan koordinasi dengan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang (0 0)
55	PENGEMBANGAN ENERGI DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN	Rehab Tembok PDAM Parit Lalang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pangkalpinang	Rehab tembok PDAM Parit Lalang yang rusak karena Banjir	Sedang Diverifikasi	Merupakan TUSI Dinas PRKP Bidang Cipta Karya.

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Usulan Dewan				Hasil Verifikasi	
		Kegiatan	PD	Lokasi Detail	Keterangan	Status Usulan	Alasan Diterima/Ditolak
56	PENGEMBANGAN ENERGI DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN	Pembuatan Lapangan Sepak Bola di Paritlalang	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Pangkalpinang	Agar dibuatkan Lapangan sepakbola di Paritlalang untuk meminimilasi kenakalan remaja		Diteruskan ke TAPD prov untuk pembahasan
57	PENGEMBANGAN ENERGI DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN	Bantuan armada Transportasi mobil untuk anak sekolah	DINAS PERHUBUNGAN	Desa Batu Beriga Kab. Koba	Bantuan armada Transportasi mobil untuk anak sekolah	Sedang Diverifikasi	Pengadaan bis sekolah dilaksanakan menggunakan skema CSR
58	PENGEMBANGAN ENERGI DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN	Sarana Ambulance	DINAS KESEHATAN	Desa Batu Beriga Kab. Bangka Tengah	Ambulance untuk masyarakat	Sedang Diverifikasi	Daba
59	PENGEMBANGAN ENERGI DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN	Pembangunan Talud di bibir pantai	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Desa Batu Beriga Kab. Bangka Tengah	Pembangunan Talud di bibir pantai batu beriga	Sedang Diverifikasi	Diusulkan melalui APBN
60	PENGEMBANGAN ENERGI DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN	Pembangunan Siring	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dusun Air Jangkang Kab. Bangka Tengah	Pembangunan siring di dusun air jangkang		Diusulkan melalui DABA
61	PENGEMBANGAN ENERGI DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN	Pengaspalan Jalan dari pinggir pantai menuju pemukiman warga	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Desa Baskara Bakti Kab. Bangka Tengah			Diusulkan melalui DABA
62	PENGEMBANGAN ENERGI DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN	Penerangan Jalan Dusun Kedimpel dan Tanah Merah	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kab. Bangka Tengah		Sedang Diverifikasi	Merupakan tusi Dinas Perhubungan

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Usulan Dewan				Hasil Verifikasi	
		Kegiatan	PD	Lokasi Detail	Keterangan	Status Usulan	Alasan Diterima/Ditolak
63	PENGEMBANGAN ENERGI DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN	Lampu Trafic Light di Semabung Baru	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI	Kota Pangkalpinang	Agar dibuatkan Lampu Lalu Lintas yang baik khususnya di simpang 3 Hotel Griya Tirta terutama pada saat Jam Pergi dan Pulang Kantor	Sedang Diverifikasi	
64	PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT	Pemberdayaan Masyarakat melalui UKM	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Kota Pangkalpinang.	Pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan UKM yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.	Sedang Diverifikasi	
65	PENGEMBANGAN ENERGI DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN	Pengadaan Sumur Bor Besar	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Kota Pangkalpinang. Kelurahan Giri Maya	Masyarakat Minta dibuatkan Sumur Bor Besar untuk mengantisipasi kekeringan pada musim panas.	Sedang Diverifikasi	Di Usulkan melalui Dana APBN
66	PENGEMBANGAN PARIWISATA	Bantuan alat Tangkap Ikan	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Kota Pangkalpinang - Desa Temberan	Masyarakat minta bantuan alat tangkap ikan di Desa Temberan Pangkalpinang	Diakomodir	
67	PENGEMBANGAN PARIWISATA	Bantuan Tambak Ikan Lele	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Kota Pangkalpinang - Desa Parit Lalang	Bantuan Tambak Ikan Lele untuk pemberdayaan masyarakat	Belum Diakomodir	Belum diakomodir, karena kewenangan perikanan budidaya ada di kabupaten kota (0 0)
68	PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT	Penertiban Rumah Tidak Layak di Pasir Padi	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Pasir Padi - Pangkalpinang	Agar ditertibka sesuai peruntukan bagi rumah-rumah tidak layak di Pasir Padi.	Sedang Diverifikasi	Akan ditindaklanjuti setelah kordinasi dengan Satpol PP Kota Pangkalpinang

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Usulan Dewan				Hasil Verifikasi	
		Kegiatan	PD	Lokasi Detail	Keterangan	Status Usulan	Alasan Diterima/Ditolak
69	PENINGKATAN PEMBANGUNAN DEMOKRASI	Pembuatan Perda CSR	SEKRETARIAT DAERAH	Pangkalpinang - Bangka Belitung	Agar Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembuatan Perda CSR	Sedang Diverifikasi	
70	PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT	Kegiatan Bantuan bagi Kaum lanjut usia	DINAS SOSIAL	Pangkalpinang	Adanya kegiatan bantuan bagi kaum lanjut usia	Diakomodir	
71	PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT	Bantuan masyarakat yang disabilitas	DINAS SOSIAL	Kota Pangkalpinang	Bantuan Bagi masyarakat disabilitas di Kelurahan Selindung	Diakomodir	
72	PENGEMBANGAN ENERGI DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN	Penertiban Tambang Inkonsvensional	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Kota Pangkalpinang Khususnya di Pasir Putih	Penertiban Tambang Inkonsvensional di daerah pasir Putih	Sedang Diverifikasi	Akan ditindak lanjuti
73	PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT	Penertiban Pasar Rakyat	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pangkalpinang	Agar dibangun atau ditertibkan pasar tradisional yang sudah mengganggu jalan raya	Sedang Diverifikasi	
74	PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT	Pelatihan Kewirausahaan bagi masyarakat muda	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pangkalpinang	Pelatihan Kewirausahaan bagi masyarakat muda	Sedang Diverifikasi	
75	PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT	Fasilitasi dana KUBE di selindung lama	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Kota Pangkalpinang	Fasilitasi dana KUBE di selindung lama	Sedang Diverifikasi	
76	PENGEMBANGAN ENERGI DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN	Jalan Mantung - Telok Akek	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Mantung - telok Akek Bangka Barat	Perbaikan Jalan		Diusulkan melalui DABA

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Usulan Dewan				Hasil Verifikasi	
		Kegiatan	PD	Lokasi Detail	Keterangan	Status Usulan	Alasan Diterima/Ditolak
77	PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN AGROPOLITAN	Status Area Persawahan desa Pusuk	DINAS PERTANIAN	Bangka Barat	Status Area Persawahan desa Pusuk yang masih menggunakan hutan konservasi	Belum Diakomodir	Tidak ada kegiatan khusus di renja untuk menyelesaikan status lahan, kegiatan ini bisa diakomodir melalui pelayanan di Bidang PSP (0 0)
78	PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT	Fasilitasi kemudahan pembelian pakan hijau ternak	DINAS PERTANIAN	Bangka Barat	Fasilitasi kemudahan pembelian pakan hijau ternak di Bangka Barat yang semakin sulit	Belum Diakomodir	Kegiatan sudah diusulkan melalui APBN DItjen Peternakan (kegiatan hijauan pakan ternak) (0 0)
79	PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT	Perbaikan harga lada yang sedang anjlok	DINAS PERTANIAN	Bangka Barat	Perbaikan harga lada yang sedang anjlok	Belum Diakomodir	TUpoksi mengenai perbaikan harga komoditas dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (kegiatan resi gudang) (0 0)
80	PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT	Perbaikan Pasar Tanjung Pandan dan Drainase Jalan Depati Rakat	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kelurahan Kota Kab. Belitung	Perbaikan Pasar Tanjung Pandan dan Drainase Jalan Depati Rakat Kelurahan Kota Kabupaten Belitung	Sedang Diverifikasi	Perbaikan Pasar merupakan Tusi Dinas Perindustrian dan Perdagangan
81	PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT	Penguatan Posyandu	DINAS KESEHATAN	Kelurahan Tanjung Binga Kab. Belitung	Penguatan Posyandu Kelurahan Tanjung Binga Kab. Belitung	Belum Diakomodir	Usulkan melalui dana Desa (0 0)
82	PENGEMBANGAN ENERGI DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN	Pembangunan jalan ekonomi (jalan raya Membalong) menuju persawahan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kab. Belitung	Pembangunan jalan ekonomi (jalan raya Membalong) menuju persawahan Kabupaten Belitung		Diusulkan melalui DABA

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Usulan Dewan				Hasil Verifikasi	
		Kegiatan	PD	Lokasi Detail	Keterangan	Status Usulan	Alasan Diterima/Ditolak
83	PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT	Bantuan mobil dinas untuk tenaga pendidikan ke wilayah terpencil	DINAS PENDIDIKAN	Kab. Belitung	Bantuan mobil dinas untuk tenaga pendidikan ke wilayah terpencil di Cabang dinas pendidikan belitung	Belum Diakomodir	keterbatasan anggaran. (0 0)
84	PENGEMBANGAN ENERGI DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN	Perbaikan Jalan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Saidan RT 01 Kelurahan Aik Kolong Kab. Belitung		Sedang Diverifikasi	Diusulkan melalui Dana APBN karena merupakan jalan nasional
85	PENGEMBANGAN ENERGI DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN	Penerangan Lampu Jalan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Desa Tanjung Binga Kab. Belitung		Sedang Diverifikasi	Merupakan tusi Dinas Perhubungan
86	PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT	Bantuan Peralatan Nelayan	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Desa Tanjung Binga Kab. Belitung		Diakomodir	
87	PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT	Pembangunan SMA	DINAS PENDIDIKAN	Desa Tanjung Binga Kab. Belitung	Perlu ada SMA di Desa Tanjung Binga Kab. Belitung	Belum Diakomodir	diperlukan analisis kebutuhan sekolah terlebih dahulu. Sampai saat ini masyarakat di desa Tanjung Binga masih terlayani di SMA Negeri 1 Sijuk dan SMA/SMK di Tanjung Pandan. (0 0)

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Usulan Dewan				Hasil Verifikasi	
		Kegiatan	PD	Lokasi Detail	Keterangan	Status Usulan	Alasan Diterima/Ditolak
88	PENGEMBANGAN ENERGI DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN	Pembangunan jalan menuju TPI/sentra nelayan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Desa Tanjung Binga Kab. Belitung			Diusulkan melalui DABA
89	PENGEMBANGAN ENERGI DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN	Repitalisasi aspal jalan dan drainase	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	ujung tanjung RT 05 s.d RT 15 Desa Tanjung Binga Kab. Belitung			Diusulkan melalui DABA
90	PENGEMBANGAN ENERGI DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN	Perbaikan dan Penambahan bangunan dermaga	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kab. Belitung	Perbaikan dan Penambahan bangunan dermaga Kabupaten Belitung	Sedang Diverifikasi	Merupakan tusi dinas Kelautan dan Perikanan
91	PENGEMBANGAN ENERGI DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN	Perbaikan jalan Tanjung Pandan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tanjung Pandan Kab., Belitung			Diusulkan melalui DABA
92	PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT	Bantuan Kesehatan anak cacat fisik	DINAS KESEHATAN	Kel. Pangkallalang RT. 46 RW. 13 Kec. Tanjung Pandan Kab. Belitung		Sedang Diverifikasi	akan di tinjau ulang melalui prog keg Jamkesmas melalui pergub yang baru
93	PENGEMBANGAN ENERGI DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN	Lampu Penerangan Jalan dan pelebaran Jalan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	RT. 45 Kel. Pangkallalang Kec. Tanjung Pandan Kab. Belitung			Diusulkan melalui DABA
94	PENGEMBANGAN ENERGI DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN	Pengaspalan Jalan, Pembangunan Siring serta Pembangunan Jembatan tambatan perahu	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Ganteng RT. 43 Kel. Pangkallalang Kec. Tanjung Pandan Kab. Belitung			Diusulkan melalui DABA

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Usulan Dewan				Hasil Verifikasi	
		Kegiatan	PD	Lokasi Detail	Keterangan	Status Usulan	Alasan Diterima/Ditolak
95	PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT	Pembangunan Gedung TPA	DINAS PENDIDIKAN	Desa Air Rayak RT. 35 Kec. Tanjung Pandan Kab. Belitung		Belum Diakomodir	keterbatasan anggaran, memungkinkan melalui belanja hibah, dengan catatan harus ada proposal awal sebelum tanggal 31 Mei 2018. (0 0)
96	PENGEMBANGAN ENERGI DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN	Pembangunan dan Pelebaran jalan Gang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Desa Air Rayak RT. 35 Kec. Tanjung Pandan Kab. Belitung			Diusulkan melalui DABA
97	PENGEMBANGAN ENERGI DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN	Pembangunan Siring Jalan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Desa Air Rayak RT. 19 Kec. Tanjung Pandan Kab. Belitung			Diusulkan melalui DABA
98	PENGEMBANGAN ENERGI DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN	Pembangunan Tempat Penampungan Sampah dan Pengadaan Motor Sampah	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Kab. Belitung		Belum Diakomodir	Tidak disetujui, Mengingat Pengadaan Sarana Prasarana Persampahan di Kabupaten/Kota bukan merupakan kewenangan Provinsi (0 0)
99	PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT	Pembangunan Sarana Olahraga (GOR)	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Kab. Belitung			Diteruskan ke TAPD prov untuk pembahasan
100	PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT	Pembangunan Pagar Sekolah	DINAS PENDIDIKAN	SMKN 1 Desa Badau Kab. Belitung		Diakomodir	



No	Prioritas Pembangunan Daerah	Usulan Dewan				Hasil Verifikasi	
		Kegiatan	PD	Lokasi Detail	Keterangan	Status Usulan	Alasan Diterima/Ditolak
101	PENGEMBANGAN ENERGI DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN	Perbaikan Jalan Desa Badau - Dendang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Desa Badau Kab. Belitung		Diakomodir	Penanganan ruas Badau-Gantung dilakukan pada APBD 2018 dan diusulkan melalui Renja 2019
102	PENGEMBANGAN ENERGI DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN	Perbaikan Jalan Utama	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Desa Petaling - Pelabuhan Suak Kemang Kec. Selat Nasik Kab. Belitung			Diusulkan melalui DABA
103	PENGEMBANGAN ENERGI DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN	Pembangunan Talud Pantai dan Pelabuhan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kec. Selat Nasik Kab. Belitung			Diusulkan melalui DABA
104	PENGEMBANGAN ENERGI DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN	Pembangunan Jalan merah trans meranteh dan Saluran Irigas Persawahan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Desa Trans Meranteh Kab. Belitung Timur		Sedang Diverifikasi	Diusulkan melalui Dana APBN karena DI Selinsing merupakan kewenangan pusat
105	PENGEMBANGAN ENERGI DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN	Pembangunan Gorong-gorong dan Hot Mix Jalan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan Air Gengang Dusun Bira Desa Kelubi Kec. Manggar Kab. Belitung Timur			Diusulkan melalui DABA
106	PENGEMBANGAN ENERGI DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN	PDAM	SEKRETARIAT DAERAH	Kab. Belitung Timur		Sedang Diverifikasi	
107	PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT	Peningkatan Fasilitas Kesehatan dan Dokter Spesialis	DINAS KESEHATAN	Desa Baru Kec. Manggar Kab. Belitung Timur		Belum Diakomodir	Supaya di arahkan ke APBD2 (0 0)

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Usulan Dewan				Hasil Verifikasi	
		Kegiatan	PD	Lokasi Detail	Keterangan	Status Usulan	Alasan Diterima/Ditolak
108	PENGEMBANGAN ENERGI DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN	Pembangunan Jalan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Desa Baru Kec. Manggar Kab. Belitung Timur			Diusulkan melalui DABA
109	PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT	Pengadaan Kendaraan Dinas bagi Pengawas Sekolah	DINAS PENDIDIKAN	SMKN 1 Tanjung Pandan Kab. Belitung		Diakomodir	
110	PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT	Bantuan Lahan untuk Pembangunan Masjid	SEKRETARIAT DAERAH	Desa Mentawak Kec. Kelapa Kampit Kab. Belitung Timur		Sedang Diverifikasi	
111	PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT	Pemasangan Konblok halaman sekolah	DINAS PENDIDIKAN	SMKN1 Manggar Kab. Belitung Timur		Diakomodir	
112	PENGEMBANGAN ENERGI DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN	Perbaikan Gedung Sekolah	DINAS PENDIDIKAN	SMA Gantung Kab. Belitung Timur		Diakomodir	
113	PENGEMBANGAN ENERGI DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN	Pembangunan musholla dan pagar sekolah	DINAS PENDIDIKAN	SMA 1 dan SMK Renggang Kab. Belitung Timur		Diakomodir	
114	PENGEMBANGAN ENERGI DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN	Pembangunan Talud	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dusun Assalam Desa Baru Kec. Manggar Kab. Belitung Timur			Diusulkan melalui DABA
115	PENGEMBANGAN ENERGI DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN	Pembangunan Talud sungai manggar	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dusun Batu Utara I Kab. Belitung Timur			Diusulkan melalui DABA

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Usulan Dewan				Hasil Verifikasi	
		Kegiatan	PD	Lokasi Detail	Keterangan	Status Usulan	Alasan Diterima/Ditolak
116	PENGEMBANGAN ENERGI DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN	Pembangunan Pemecah Gelombang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Pantai Serdang Kab. Belitung Timur			Diusulkan melalui DABA
117	PENGEMBANGAN ENERGI DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN	Pembangunan Drainase Jalan Sudirman dan Pembuatan Plat Deker	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dusun Assalam Kab. Belitung Timur			Diusulkan melalui DABA
118	PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT	Peningkatan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit	DINAS KESEHATAN	Kab. Belitung Timur		Sedang Diverifikasi	di arahkan ke APBD 2 atau dana DAK (0 0)
119	PENGEMBANGAN ENERGI DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN	Pengadaan Lab Komputer Sekolah	DINAS PENDIDIKAN	Kab. Belitung Timur		Belum Diakomodir	usulan tidak jelas jenjang pendidikannya. (0 0)
120	PENGEMBANGAN ENERGI DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN	Pembangunan DAM Kolong Badung	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dusun Selatan Kab. Belitung Timur			Diusulkan melalui DABA
121	PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT	Pengadaan Proyektor/Infokus	DINAS PENDIDIKAN	SMK 1 Kelapa Kampit Kab. Belitung Timur		Diakomodir	
122	PENGEMBANGAN ENERGI DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN	Pembangunan Tower Komunikasi	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DesaPenyok Kab. Belitung Timur		Belum Diakomodir	Bukan merupakan kewenangan provinsi tapi merupakan kewenangan Kementerian Kominfo. Disarankan Belitung Timur mengusulkan proposal ke Kementerian Kominfo yang ditembuskan ke Bappppeda Provinsi. (0 0)

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Usulan Dewan				Hasil Verifikasi	
		Kegiatan	PD	Lokasi Detail	Keterangan	Status Usulan	Alasan Diterima/Ditolak
123	PENGEMBANGAN ENERGI DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN	Pengadaan Gedung SMK	DINAS PENDIDIKAN	Kab. Belitung		Belum Diakomodir	usulan tidak jelas untuk SMK mana? (0 0)
124	PENGEMBANGAN ENERGI DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN	Renovasi dan sarana/prasarana sekolah	DINAS PENDIDIKAN	Pondok Madrasah Kec. Mendo Barat Kab. Bangka		Belum Diakomodir	keterbatasan anggaran. memungkinkan untuk dialokasikan melalui belanja hibah dengan ketentuan mengajukan proposal awal sebelum tanggal 31 Mei 2018. (0 0) (0 0)
125	PENGEMBANGAN ENERGI DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN	Pembangunan Pagar Sekolah	DINAS PENDIDIKAN	SD 27 Mendo Barat Kab. Bangka		Belum Diakomodir	keterbatasan anggaran. agar mengoptimalkan penggunaan APBD Kabupaten. (0 0)
126	PENGEMBANGAN ENERGI DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN	Perbaikan Dermaga	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Desa Penagan Kec. Mendo Barat Kab. Bangka		Sedang Diverifikasi	Merupakan Tusi Dinas Kelautan dan Perikanan
127	PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN AGROPOLITAN	Bantuan Bibit dan Pupuk	DINAS PERTANIAN	Kec. Mendo Barat Kab. Bangka		Diakomodir	Bibit dialokasikan melalui dana APBN
128	PENGEMBANGAN ENERGI DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN	Pengaspalan Jalan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dusun Tutut Desa Penyamun Kab. Bangka			Diusulkan melalui DABA
129	PENGEMBANGAN ENERGI DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN	Bantuan Sarana dan Prasarana Majelis Taklim	SEKRETARIAT DAERAH	Dusun Tutut Desa Penyamun Kab. Bangka		Sedang Diverifikasi	

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Usulan Dewan				Hasil Verifikasi	
		Kegiatan	PD	Lokasi Detail	Keterangan	Status Usulan	Alasan Diterima/Ditolak
130	PENGEMBANGAN ENERGI DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN	Pembangunan SMP/SLTP	DINAS PENDIDIKAN	Dusun Tanjung Ratu Desa Rebo Kec. Sungailiat Kab. Bangka		Belum Diakomodir	keterbatasan anggaran, disarankan agar kabupaten setempat untuk mengajukan melalui DAK. (0 0)
131	PENGEMBANGAN ENERGI DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN	Pengaspalan Jalan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dusun Tanjung Ratu Desa Rebo Kec. Sungailiat Kab. Bangka			Diusulkan melalui DABA
132	PENGEMBANGAN ENERGI DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN	Bantuan armada Transportasi mobil untuk anak sekolah	DINAS PERHUBUNGAN	Dusun Tanjung Ratu Desa Rebo Kec. Sungailiat dan Desa Nibung Kec. Puding Besar Kab. Bangka		Sedang Diverifikasi	Pengadaan bis sekolah dilaksanakan menggunakan skema CSR
133	PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN AGROPOLITAN	Bantuan Bibit Sapi	SEKRETARIAT DAERAH	Desa Nibung Kec. Puding Besar dan Desa Silip Kec. Riau Silip Kab. Bangka Barat		Sedang Diverifikasi	
134	PENGEMBANGAN ENERGI DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN	Bantuan Mobil Ambulance	DINAS KESEHATAN	Desa Nibung Kec. Puding Besar Kab. Bangka Barat		Sedang Diverifikasi	Daba
135	PENGEMBANGAN ENERGI DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN	Pembangunan Gedung Serba Guna	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Desa Nibung Kec. Puding Besar Kab. Bangka Barat			Diusulkan melalui DABA
136	PENGEMBANGAN ENERGI DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN	Pengaspalan Jalan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Desa Nibung Kec. Puding Besar Kab. Bangka Barat	terutama jalan menuju sekolah		Diusulkan melalui DABA

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Usulan Dewan				Hasil Verifikasi	
		Kegiatan	PD	Lokasi Detail	Keterangan	Status Usulan	Alasan Diterima/Ditolak
137	PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN AGROPOLITAN	Pengadaan Bibit Ikan	SEKRETARIAT DAERAH	Desa Air Anyir Kec. Merawang Kab. Bangka		Sedang Diverifikasi	
138	PENGEMBANGAN ENERGI DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN	Pengaspalan Jalan	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	Jalan Menuju jalan ujung Dusun Mudel Air Anyir dan Jalan menuju pantai Pukan Dusun Mudel Air Anyir	Desa Air Anyir Kec. Merawang Kab. Bangka	Belum Diakomodir	Ditolak karena Usulan yang diajukan merupakan kewenangan / urusan Dinas Pekerjaan Umum (0 0)
139	PENGEMBANGAN ENERGI DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN	Pembangunan Dermaga Tambahan Perahu	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Selindung Lama Kota Pangkalpinang		Sedang Diverifikasi	Merupakan tusi Dinas Kelautan dan Perikanan
140	PENGEMBANGAN ENERGI DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN	Pembangunan Talud dan Gorong-gorong	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	Kampung Asam, Tambaran RT. 05, Selindung Lama RW. 09, Pasir Putih RT. 01 , 02 dan TPA Kota Pangkalpinang	untuk mengatasi banjir	Belum Diakomodir	Ditolak karena Usulan yang diajukan merupakan kewenangan / urusan Dinas Pekerjaan Umum (0 0)
141	PENGEMBANGAN ENERGI DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN	Pembangunan/Rehab Jalan Setapak dan Konblok	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Tambaran RT. 10, Gandaria RT. 01 dan Jalan Ratna V Semabung Baru, RT. 04 RW. 02 Kampung Asam dan Pasir Putih Kota Pangkalpinang		Sedang Diverifikasi	Merupakan Tusi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
142	PENGEMBANGAN ENERGI DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN	Pembangunan Siring dan Selokan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Parit Lalang Kota Pangkalpinang	mengatasi banjir		Diusulkan melalui DABA

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Usulan Dewan				Hasil Verifikasi	
		Kegiatan	PD	Lokasi Detail	Keterangan	Status Usulan	Alasan Diterima/Ditolak
143	PENGEMBANGAN ENERGI DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN	Pengadaan Kotak Sampah	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Pasir Putih, Air Itam, Semabung Baru Kota Pangkalpinang		Belum Diakomodir	Tidak disetujui, Mengingat Pengadaan Sarana Prasarana Persampahan di Kabupaten/Kota bukan merupakan kewenangan Provinsi (30)
144	PENGEMBANGAN ENERGI DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN	Pemasangan/Penggantian Lampu Jalan dan Traffic Light	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jembatan Masjid Istiqlal Cempedak, Gimimaya, Simpang Greenland-Kerabut Selindung Baru, RT. 06 dan Jalan Kotabumi I Pasir Putih, Dok Kapal ke Pkl.Balam Selindung Lama Kota Pangkalpinang	Traffic Light di Jalan Irian Pasir Putih	Sedang Diverifikasi	Merupakan Tusi Dinas Perhubungan
145	PENGEMBANGAN ENERGI DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN	Pengadaan Sumur Bor Besar	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Girimaya Kota Pangkalpinang	mengatasi kekurangan air bersih	Sedang Diverifikasi	Merupakan tusi Dinas ESDM
146	PENGEMBANGAN ENERGI DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN	Bantuan Peralatan Nelayan	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Tambaran, Selindung Lama Kota Pangkalpinang		Diakomodir	

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Usulan Dewan				Hasil Verifikasi	
		Kegiatan	PD	Lokasi Detail	Keterangan	Status Usulan	Alasan Diterima/Ditolak
147	PENGEMBANGAN ENERGI DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN	Pengadaan Sumur Bor	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Desa Sidoarjo Kab. Bangka Selatan	sulit mendapatkan air bersih	Sedang Diverifikasi	Merupakan Tusi Dinas ESDM
148	PENGEMBANGAN ENERGI DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN	Bantuan Mobil Sampah	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Desa Sidoarjo Kab. Bangka Selatan	untuk pengangkutan sampah dari pasar ke tempat pembuangan sampah	Belum Diakomodir	Tidak disetujui, Mengingat Pengadaan Sarana Prasarana Persampahan di Kabupaten/Kota bukan merupakan kewenangan Provinsi (3 0)
149	PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN AGROPOLITAN	Bantuan Bibit Sapi dan Kambing dan pelatihan	DINAS PERTANIAN	Desa Sidoarjo Kab. Bangka Selatan	beserta pelatihan peternakan	Diakomodir	Sudah diakomodir di usulan kab. Basel tapi hanya sapi tidak termasuk kambing
150	PENGEMBANGAN ENERGI DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN	Pembangunan Talud	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Desa Gadung Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan	Talud pemecah gelombang		Diusulkan melalui DABA
151	PENGEMBANGAN ENERGI DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN	Perbaikan dan Pelebaran Jalan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Kec. Pulau Besar Kab. Bangka Selatan	Jalan menuju Pulau Besar	Diakomodir	Sudah diakomodir pada APBD 2018 dan Renja 2019 namun kendala di lapangan belum ada surat pernyataan penyerahan lahan dari warga untuk pelebaran jalan
152	PENGEMBANGAN ENERGI DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN	Pembangunan Bendungan sawah	DINAS PANGAN	Kec. Pulau Besar Kab. Bangka Tengah	sawah sering gagal panen karena banjir	Belum Diakomodir	Bukan kewenangan Dinas Pangan tetapi Dinas Pertanian (0 0)



No	Prioritas Pembangunan Daerah	Usulan Dewan				Hasil Verifikasi	
		Kegiatan	PD	Lokasi Detail	Keterangan	Status Usulan	Alasan Diterima/Ditolak
153	PENGEMBANGAN ENERGI DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN	Bantuan transportasi umum dan transportasi anak sekolah	DINAS PERHUBUNGAN	Kec. Pulau Besar Kab. Bangka Selatan	transportasi umum yang melewati pulau besar dan transportasi anak sekolah terutama SMA 1 Pulau besar	Sedang Diverifikasi	Akan dikomunikasikan ke Dinas Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan karena untuk usulan ini berpeluang didanai melalui skema DAK Afimasi Transpotasi
154	PENGEMBANGAN ENERGI DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN	Pembangunan Pagar sekolah dan Sumur Bor	DINAS PENDIDIKAN	SMA 1 Pulau Besar Kab. Bangka Selatan		Diakomodir	
155	PENGEMBANGAN PARIWISATA	Perbaikan/penataan kawasan wisata	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Pelabuhan Sungai Ulin dan Kawasan Wisata Religi Batin Tikal Kab. Bangka Selatan		Sedang Diverifikasi	
156	PENGEMBANGAN ENERGI DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN	Perbaikan/Rehab Talud	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Desa Rajik Kab. Bangka Selatan	Talud Pemecah gelombang		Diusulkan melalui DABA
157	PENGEMBANGAN ENERGI DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN	Pelebaran Jalan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Jalan menuju SMK 1 Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan	jalan terlalu sempit		Diusulkan melalui DABA
158	PENGEMBANGAN ENERGI DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN	Bantuan lahan tempat akhir pembuangan sampah	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Desa Rajik Kab. Bangka Selatan		Sedang Diverifikasi	
159	PENGEMBANGAN ENERGI DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN	Pembangunan Siring Jalan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Desa Rias Kab. Bangka Selatan			Diusulkan melalui DABA

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Usulan Dewan				Hasil Verifikasi	
		Kegiatan	PD	Lokasi Detail	Keterangan	Status Usulan	Alasan Diterima/Ditolak
160	PENGEMBANGAN ENERGI DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN	Pembangunan Saluran Air	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Desa Rias Kab. Bangka Selatan	Saluran air tembus dari Sungai Gusung ke laut	Sedang Diverifikasi	Diusulkan melalui Dana APBN.
161	PENGEMBANGAN ENERGI DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN	bantuan Perbaikan/rehab Masjid	SEKRETARIAT DAERAH	Desa Rias Kab. Bangka Selatan	Masjid Baitul Rahman	Sedang Diverifikasi	
162	PENGEMBANGAN ENERGI DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN	Pembangunan Pagar Sekolah	DINAS PENDIDIKAN	SMK 1 Toboali Kab. Bangka Selatan		Diakomodir	
163	PENGEMBANGAN ENERGI DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN	Pemasangan Lampu Jalan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Desa Jelutung Kab. Bangka	Penerangan Jalan	Sedang Diverifikasi	Merupakan Tusi Dinas Perhubungan
164	PENGEMBANGAN ENERGI DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN	Pelebaran Jalan Nasional	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Desa Kace Kab. Bangka	Lalu Lintas terlalu ramai	Sedang Diverifikasi	Diusulkan melalui Dana APBN karena merupakan jalan nasional
165	PENGEMBANGAN ENERGI DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN	Pembangunan Jembatan Penghubung	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Desa Kace Timur Kab. Bangka	Jalan Penghubung Desa Kace Timur dan Kota Pangkalpinang		Diusulkan melalui DABA
166	PENGEMBANGAN ENERGI DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN	Bantuan Sarana dan Prasarana Madrasah dan Beasiswa	DINAS PENDIDIKAN	Madrasah Paya Benua/Yayasan Darunnah Paya Benua Kab. Bangka	Pengadaan Gedung, Perluasan Lahan, Fasilitas Olahraga, Lab Komputer	Belum Diakomodir	keterbatasan anggaran. memungkinkan untuk dialokasikan melalui belanja hibah dengan ketentuan mengajukan proposal awal sebelum tanggal 31 Mei 2018. (0 0)

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Usulan Dewan				Hasil Verifikasi	
		Kegiatan	PD	Lokasi Detail	Keterangan	Status Usulan	Alasan Diterima/Ditolak
167	PENGEMBANGAN ENERGI DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN	Renovasi Gedung/Bangunan TK/TPA	DINAS PENDIDIKAN		Desa Mendo Kab. Bangka	Belum Diakomodir	keterbatasan anggaran. memungkinkan untuk dialokasikan melalui belanja hibah dengan ketentuan mengajukan proposal awal sebelum tanggal 31 Mei 2018. (0 0) (0 0)
168	PENGEMBANGAN ENERGI DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN	Pembangunan Posyandu	DINAS KESEHATAN	Desa Jelutung Kab. Bangka		Belum Diakomodir	Diusulkan melalui dana Desa (0 0)
169	PENGEMBANGAN ENERGI DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN	Pengadaan Sumur Bor	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Desa Mendo dan Dusun Rambang Kab. Bangka	sulit mendapatkan air bersih	Belum Diakomodir	Tidak diakomodir, disebabkan bukan merupakan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup, melainkan kewenangan Dinas Perumahan dan Pemukiman (0 0)
170			DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Rehab lapangan bola dan pembuatan podium	Desa Kace Kab. Bangka		Diteruskan ke TAPD prov untuk pembahasan

No	Prioritas Pembangunan Daerah	Usulan Dewan				Hasil Verifikasi	
		Kegiatan	PD	Lokasi Detail	Keterangan	Status Usulan	Alasan Diterima/Ditolak
171	PENGEMBANGAN ENERGI DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN	Pengaspalan Jalan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Desa Jada Bahrin Kab. Bangka			Diusulkan melalui DABA
172	PENGEMBANGAN ENERGI DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN	Pengaspalan dan Penambahan Siring Jalan	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dusun Jelutung Sinar Jaya			Diusulkan melalui DABA
173	PENGEMBANGAN ENERGI DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN	Pembangunan Pagar Sekolah	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	SMKN 2 Sungailiat Kab. Bangka		Sedang Diverifikasi	Merupakan Tusi Dinas Pendidikan
174	PENGEMBANGAN ENERGI DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN	Pembuatan Drainase dan Jalan Setapak	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Desa Paya Benua Kab. Bangka	Jalan Menuju Madrasah Paya Benua		Diusulkan melalui DABA
175	PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN AGROPOLITAN	Bantuan Bibit dan Pupuk	DINAS PERTANIAN	Desa-desa di Kab. Bangka		Diakomodir	
176	PENGEMBANGAN ENERGI DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN	Rehab Masjid	SEKRETARIAT DAERAH	Desa Mendo Kab. Bangka		Sedang Diverifikasi	
TOTAL (Rp)							

## 2.5. CAPAIAN INOVASI DAERAH

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan provinsi dengan daerah kepulauan yang mempunyai karakteristik geografis yang berbeda dengan provinsi daratan pada umumnya. Indonesia sebagai Negara beriklim tropis merupakan negara yang rawan serta beresiko tinggi terhadap berkembangnya penyakit menular seperti penyakit demam berdarah dengue (DBD).

Dari data tabel distribusi angka kasus penyakit DBD menurut Kabupaten/Kota se- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung teranalisa bahwa pada tahun 2013 angka kasus DBD di Kabupaten/Kota berjumlah 741 kasus dengan *Insiden Rate*: 58,51 per 100.000 penduduk dengan CFR/angka kematian 2,70 % (20 orang meninggal), sedangkan pada tahun 2014 angka kasus DBD di Kabupaten/Kota semakin menurun menjadi

321 kasus dengan *Insiden Rate*: 23,60 per 100.000 penduduk dengan CFR/angka kematian 3,4 % (11 orang meninggal), serta tahun 2015 angka kasus DBD di Kabupaten/Kota semakin menurun menjadi 708 kasus dengan *Insiden Rate*: 52,63 per 100.000 penduduk dengan CFR/angka kematian 0,99 % (7 orang meninggal). Pada tahun 2016, jumlah kasus DBD sebesar 490 kasus penyakit DBD dengan 3 kematian.

Untuk mengatasi masalah DBD yang utama, Kementerian Kesehatan RI telah mengeluarkan peraturan Menteri Kesehatan RI nomor: 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis-jenis penyakit menular tertentu yg dapat menimbulkan wabah, serta buku pedoman 1 rumah 1 jumantik. Berdasarkan analisis masalah diatas, untuk mengatasi masalah DBD yang utama adalah membasmi jentik nyamuk pada sarangnya di setiap penampungan air di dalam maupun diluar bangunan setiap seminggu sekali kali. Untuk memperkuat kegiatan tersebut diperlukan suatu inovasi kegiatan “SATU RUMAH SATU JUMANTIK PLUS” sebagai langkah memutuskan mata rantai penularan DBD di masyarakat sehingga masyarakat terlindungi dari kesakitan dan kematian karena DBD.

Jika dilaksanakan dengan baik, akan mampu memutuskan mata rantai penularan DBD dengan dilaksanakan seminggu sekali oleh kepala/anggota setiap rumah keluarga atau kepala bangunan/tempat ibadah dengan melakukan “SATU RUMAH SATU JUMANTIK PLUS”.

# **BAB III**

## **KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH**

# BAB III

## KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

### 3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 terfokus pada prioritas nasional di bidang ekonomi, yaitu Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif, dengan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Meningkatkan ekspor dan nilai tambah pertanian melalui peningkatan produktivitas, kualitas, serta dukungan kelembagaan dan sarana prasarana.
2. Mendorong percepatan peningkatan nilai tambah industri pengolahan melalui perbaikan iklim usaha, peningkatan investasi, penguatan rantai pasok/ nilai, dan pemanfaatan inovasi.
3. Meningkatkan nilai tambah jasa produktif antara lain melalui pengembangan destinasi wisata, ekonomi kreatif dan digital, peningkatan ekspor terutama produk hilirisasi, dan penguatan kemitraan.
4. Mendorong percepatan peningkatan keahlian tenaga kerja melalui penguatan vokasi dan kompetensi, pengembangan kerja sama dunia usaha dan kewirausahaan.
5. Mengembangkan iptek dan inovasi untuk peningkatan produktivitas antara lain melalui peningkatan SDM iptek, pengembangan litbang keilmuan strategis, dan pengembangan teknologi frontier.

Sejalan dengan prioritas nasional tersebut, kebijakan ekonomi daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diarahkan pada pengembangan potensi ekonomi lokal berbasis agri-bahari. Hal ini sesuai dengan misi Pertama RPJPD Perubahan Tahun 2005-2025, di mana kebijakannya diarahkan pada :

1. Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja serta pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja;
2. Penempatan tenaga kerja dan penciptaan lapangan pekerjaan bagi pencari kerja pada semua sektor pembangunan;
3. Mendorong pengembangan standarisasi SDM, produk dan jasa KUKM untuk meningkatkan daya saing;
4. Peningkatan produktifitas, kualitas dan daya saing produk daerah;
5. Peningkatkan dan pengembangan Sumber Daya Manusia dan industri pengolahan Sumber Daya Alam;
6. Pemenuhan energi listrik dan peningkatan rasio elektrifikasi;
7. Peningkatan tata kelola dan nilai tambah produk sumber daya mineral;
8. Pengembangan produk unggulan daerah, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah;

9. Pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang laut serta penegakan perundang-undangan kelautan dan perikanan;
10. Peningkatan potensi ekonomi lokal berbasis agri-bahari yang berwawasan lingkungan dan berdaya saing global;
11. Pemantapan ketahanan pangan yang menjamin ketersediaan, distribusi, keterjangkauan, keamanan dan mutu pangan;
12. Penyusunan kebijakan dan implementasi perlindungan lahan pertanian berkelanjutan;
13. Peningkatan sarana dan prasarana, produksi dan nilai tambah produk serta peningkatan fungsi kelembagaan pertanian;
14. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, ekonomi kreatif, peran serta masyarakat dan kelembagaan industri pariwisata;
15. Peningkatan sarana dan prasarana pengembangan promosi, destinasi dan pemasaran pariwisata;
16. Peningkatkan Nilai Tambah atas Pemanfaatan Sumber Daya Alam berbasis kehutanan.

Periode implementasi dari RPJPD tersebut, sampai saat ini sudah memasuki akhir tahap lima tahun ketiga. Pada akhir tahap ketiga ini, kondisi perekonomian daerah diharapkan dapat terus meningkat, pertumbuhan PDRB sebagai indikator dari kondisi perekonomian daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditargetkan dapat tumbuh sebesar 5,20 persen. Dalam rangka mencapai target sasaran pokok pembangunan tersebut, arah kebijakan di bidang ekonomi sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meliputi :

1. Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja serta pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja;
2. Penempatan tenaga kerja dan penciptaan lapangan pekerjaan bagi pencari kerja pada semua sektor pembangunan;
3. Mendorong pengembangan standarisasi SDM, produk dan jasa KUKM untuk meningkatkan daya saing;
4. Peningkatan produktifitas, kualitas dan daya saing produk daerah;
5. Peningkatkan dan pengembangan Sumber Daya Manusia dan industri pengolahan Sumber Daya Alam;
6. Pemenuhan energi listrik dan peningkatan rasio elektrifikasi;
7. Peningkatan tata kelola dan nilai tambah produk sumber daya mineral;
8. Pengembangan produk unggulan daerah, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah;
9. Pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang laut serta penegakan perundang-undangan kelautan dan perikanan;
10. Peningkatan potensi ekonomi lokal berbasis agri-bahari yang berwawasan lingkungan dan berdaya saing global;
11. Pemantapan ketahanan pangan yang menjamin ketersediaan, distribusi, keterjangkauan, keamanan dan mutu pangan;
12. Penyusunan kebijakan dan implementasi perlindungan lahan pertanian berkelanjutan;



13. Peningkatan sarana dan prasarana, produksi dan nilai tambah produk serta peningkatan fungsi kelembagaan pertanian;
14. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, ekonomi kreatif, kebudayaan, peran serta masyarakat dan kelembagaan pariwisata;
15. Peningkatan sarana dan prasarana pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata.

Guna menyusun rumusan kebijakan pembangunan ekonomi sebagai upaya untuk mewujudkan keberhasilan dari misi Pertama RPJPD Perubahan dan target sasaran pokok pembangunan dalam dokumen RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka perlu dilihat terlebih dahulu gambaran umum tentang perkembangan perekonomian Bangka Belitung serta proyeksinya untuk tahun 2018 dan 2019.

### 3.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pertumbuhan Ekonomi

#### 3.1.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator makro yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah pada suatu periode tertentu. PDRB digunakan sebagai dasar perhitungan laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Selain itu juga untuk melihat struktur ekonomi suatu wilayah, sebagai indikator tingkat kesejahteraan masyarakat dan disparitas sosial. PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah/wilayah dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya, sehingga besarnya PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi di daerah/wilayah tersebut.

PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggambarkan kemampuan daerah tersebut dalam mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa. Besarannya tergantung pada hasil penggunaan potensi faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, sumberdaya manusia, modal dan teknologi serta semangat berwirausaha masyarakatnya dalam melakukan kegiatan ekonomi.

Perkembangan PDRB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sepanjang tahun 2014-2017 sebagaimana diperlihatkan pada tabel III.1 menunjukkan trend yang meningkat. Secara nominal PDRB pada tahun 2015 sebesar Rp45.962,3 milyar, meningkat menjadi sebesar Rp47.850,8 milyar pada tahun 2016 dan sebesar Rp50.007,8 milyar pada tahun 2017.

**Tabel III.1**

PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015-2019 (juta rupiah)

Lapangan Usaha		2015	2016	2017	2018*)	2019*)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8.743.508	9.116.853	9.083.781	9.533.428	10.024.400
B.	Pertambangan dan Penggalian	6.458.090	6.491.063	6.633.039	6.666.205	6.799.202
C.	Industri Pengolahan	10.400.640	10.688.366	11.363.050	11.666.443	11.984.937
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	38.904	43.742	45.864	53.817	64.360

Lapangan Usaha		2015	2016	2017	2018*)	2019*)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8.119	8.567	9.406	10.502	11.726
F.	Konstruksi	3.760.126	4.021.606	4.252.102	4.574.411	4.929.843
G.	Perdagangan Besar dan Eceran Motor	6.402.145	6.727.660	7.259.823	7.993.065	8.801.164
H.	Transportasi dan Pergudangan	1.662.270	1.752.264	1.892.222	2.056.637	2.235.565
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.034.806	1.086.468	1.136.528	1.196.196	1.260.518
J.	Informasi dan Komunikasi	848.950	926.926	1.002.849	1.085.885	1.175.796
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	807.921	859.976	881.268	912.465	944.908
L.	Real Estate	1.441.959	1.494.832	1.572.538	1.656.512	1.736.024
M, N.	Jasa Perusahaan	120.342	120.419	127.462	134.957	143.729
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.337.095	2.478.742	2.604.173	2.785.163	2.951.716
P.	Jasa Pendidikan	1.059.002	1.139.349	1.183.335	1.239.543	1.298.422
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	533.850	559.579	605.385	663.260	726.734
R, S, T, U	Jasa Lainnya	304.577	334.409	354.926	380.126	407.153
<b>PDRB</b>		<b>45.962.304</b>	<b>47.850.821</b>	<b>50.007.751</b>	<b>52.608.923</b>	<b>55.397.196</b>

Sumber: 2015-2017 BPS Prov. Kep. Bangka Belitung,

\*)2018 -2019 Proyeksi Bappelitbangda

Dilihat dari perkembangan sektoral, sektor-sektor ekonomi utama seperti sektor Pertanian, Kehutanan dan perikanan, sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan besar dan eceran, secara nominal juga nilainya semakin meningkat. Sektor industri pengolahan yang merupakan sektor dengan kontribusi terbesar terhadap PDRB, yaitu rata-rata sebesar 22 persen meningkat nilainya dari sebesar Rp10.400,6 milyar pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp10.688,3 milyar pada tahun 2016 dan sebesar Rp11.363,0 milyar pada tahun 2017. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebagai sektor dominan kedua (19 persen terhadap PDRB) juga mengalami perkembangan yang sama, yaitu dari sebesar Rp8.743,5 milyar pada tahun 2015 meningkat menjadi sebesar Rp9.116,9 milyar pada tahun 2016 dan sebesar Rp9.083,8 milyar pada tahun 2017.

Sejalan dengan perkembangan kedua sektor di atas, sektor pertambangan dan penggalian sebagai salah satu sektor dominan dalam perekonomian daerah juga mengalami peningkatan, di mana pada tahun 2015 sebesar Rp6.458,1 milyar menjadi sebesar Rp6.491,1 milyar dan Rp6.633,0 milyar pada tahun 2016 dan 2017. Untuk sektor perdagangan besar dan eceran yang rata-rata berkontribusi sebesar 13 persen terhadap PDRB juga mengalami peningkatan, yaitu dari sebesar Rp6.402,1 milyar pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp6.727,7 milyar pada tahun 2016 dan sebesar Rp7.259,8 milyar pada tahun 2017.

Dengan demikian, kontribusi dari keempat sektor terhadap PDRB rata-rata sebesar 70 persen atau rata-rata mencapai sebesar Rp34.339,7 milyar, sedangkan kontribusi sektor-sektor lainnya rata-rata hanya sebesar 30 persen atau rata-rata sebesar Rp15.668,1 milyar. Hal ini mengindikasikan bahwa perekonomian daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sangatlah dipengaruhi oleh perkembangan dan kemajuan dari sektor industri pengolahan;

sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor perdagangan besar dan eceran, sehingga sektor-sektor ekonomi lainnya sebagai pendukung dan perkembangan serta kemajuannya sangatlah ditentukan oleh perkembangan dan kemajuan dari keempat sektor dominan.

Dengan arah kebijakan pembangunan ekonomi yang semakin berpihak kepada masyarakat dan dunia usaha, diperkirakan perekonomian daerah sepanjang tahun 2018 dan 2019 akan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2018, diperkirakan PDRB akan meningkat menjadi sebesar Rp52.608,9 milyar dan pada tahun 2019 meningkat menjadi sebesar Rp55.397,2 milyar.

Trend peningkatan PDRB sepanjang tahun 2018 dan 2019, diperkirakan masih dipengaruhi oleh trend peningkatan pada sektor industri pengolahan; sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor perdagangan besar dan eceran dan sektor pertambangan dan penggalian. Sedangkan sektor-sektor ekonomi lainnya diperkirakan masih sebagai sektor pendukung dari keempat sektor dominan tersebut.

Sementara itu, dilihat dari nilai nominal PDRB berdasarkan pengeluaran atau penggunaan yang menjelaskan bagaimana PDRB suatu wilayah (region) digunakan atau dimanfaatkan, baik untuk memenuhi kebutuhan permintaan di dalam wilayah maupun untuk memenuhi kebutuhan di luar wilayah sepanjang tahun 2015-2017 juga menunjukkan peningkatan. Sebagaimana diperlihatkan pada tabel III.2 dapat dijelaskan bahwa komponen pengeluaran pembentuk PDRB masih didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga, di mana pada tahun 2015 sebesar Rp23.627,5 milyar meningkat menjadi sebesar Rp25.020,5 milyar pada tahun 2016 dan sebesar Rp26.293,0 milyar pada tahun 2017.

Komponen pengeluaran terbesar kedua yang berkontribusi terhadap PDRB adalah ekspor, namun sejalan dengan penurunan harga komoditas ekspor di pasar dunia seperti karet dan CPO memberikan dampak negatif terhadap perkembangan ekspor Kepulauan Bangka Belitung, di mana pada tahun 2015 nilai ekspor mencapai sebesar Rp21.882,0 milyar menurun menjadi sebesar Rp18.204,3 milyar pada tahun 2016 dan pada tahun 2017 kembali meningkat menjadi sebesar Rp22.570,0 milyar.

**Tabel III.2**

PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan 2010  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015-2019 (Juta rupiah)

	Pengeluaran	2015	2016	2017	2018*)	2019*)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	23.627.484	25.020.548	26.292.977	27.739.091	29.264.741
2	Pengeluaran Konsumsi LNPR	280.836	302.278	319.233	337.365	356.528
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	4.668.367	4.861.639	5.147.546	5.450.505	5.771.540
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	9.823.533	10.438.595	11.057.095	11.722.732	12.428.441
5	Perubahan Inventori	880.047	628.513	632.552	636.853	641.184
6	Ekspor Luar Negeri	21.882.041	18.204.314	22.569.970	24.330.871	26.233.789
7	Impor Luar Negeri	1.107.712	1.705.634	1.428.455	1.664.864	1.942.564

	Pengeluaran	2015	2016	2017	2018*)	2019*)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8	Net Ekspor Antar Daerah	(14.092.292)	(9.899.432)	(14.583.167)	(15.943.631)	(17.356.460)
	<b>PDRB</b>	<b>45.962.304</b>	<b>47.850.821</b>	<b>50.007.751</b>	<b>52.608.923</b>	<b>55.397.196</b>

Sumber: 2015-2017 BPS Prov. Kep. Bangka Belitung,

\*)2018-2019 Proyeksi Bappelitbangda

Untuk komponen investasi (dilihat dari nilai pembentukan modal tetap bruto) secara nominal juga mengalami peningkatan sepanjang periode tahun 2015-2017, yaitu masing-masing sebesar Rp9.823,5 milyar, sebesar Rp10.438,6 milyar dan sebesar Rp11.057,1 milyar. Sejalan dengan peningkatan komponen investasi, komponen konsumsi pemerintah juga mengalami peningkatan sepanjang periode yang sama, yaitu sebesar Rp4.668,4 milyar pada tahun 2015 meningkat menjadi sebesar Rp4.861,6 milyar pada tahun 2016 dan kembali meningkat menjadi sebesar Rp5.147,5 milyar pada tahun 2017.

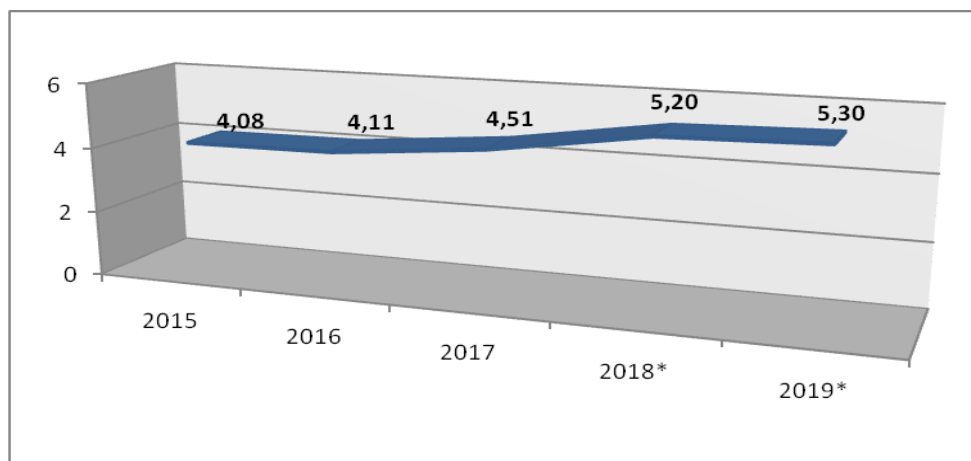
Pada tahun 2018 dan 2019 diperkirakan konsumsi rumah tangga dan investasi masih terus menguat, hal ini diindikasikan dengan masih kuatnya tingkat keyakinan konsumen dan pelaku usaha yang masih terlihat optimisme. Peningkatan harga beberapa komoditi unggulan pada tahun 2018 dan 2019 diperkirakan akan terjadi, sehingga akan meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya juga akan mempengaruhi konsumsi rumah tangga. Adanya kebijakan pemerintah terkait dengan pelarangan ekspor *rowmaterials* sumber daya mineral, juga berdampak positif terhadap investasi di Kepulauan Bangka Belitung. Di samping itu, potensi sumber daya alam yang melimpah juga menjadi salah satu daya tarik investasi, sehingga dengan adanya penambahan kapasitas kegiatan produksi dan bisnis akan memperkuat konsumsi rumah tangga. Sejalan dengan penguatan konsumsi rumah tangga dan investasi, ekspor diperkirakan juga akan mengalami kenaikan seiring dengan membaiknya perekonomian dunia. Penjualan beberapa komoditas unggulan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2018 dan 2019 diperkirakan mulai tumbuh secara positif. Untuk memperkuat perkembangan beberapa komponen pengeluaran tersebut, pengendalian terhadap neraca perdagangan juga harus dilakukan dengan menjaga aktivitas impor lebih rendah dari pada ekspor.

### 3.1.1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator dari keberhasilan pembangunan ekonomi yang paling mendasar dan digunakan sampai saat ini. Umumnya pertumbuhan ekonomi diukur dengan perubahan atau kenaikan PDRB, yaitu keseluruhan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah dalam satu tahun. Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sepanjang periode tahun 2015-2017 sebagaimana diperlihatkan pada gambar III.1 cenderung mengalami peningkatan, di mana pada tahun 2015 laju pertumbuhan ekonomi mencapai sebesar 4,08 persen meningkat menjadi sebesar 4,11 persen pada tahun 2016 dan kembali meningkat menjadi sebesar 4,51 persen pada tahun 2017. Kondisi ini dipengaruhi oleh mulai membaiknya ekonomi global dan meningkatnya harga beberapa komoditas ekspor seperti karet dan CPO. Disamping itu,

kenaikan harga minyak mentah dunia juga membawa dampak bagi perekonomian wilayah Kepulauan Bangka Belitung.

**Gambar III.1**  
Laju Pertumbuhan Ekonomi  
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015-2019



Sumber : 2015-2017 BPS Prov. Kep. Bangka Belitung,  
\*)2018-2019 Proyeksi Bappelitbangda

Pada tahun 2018 dan 2019, sebagaimana diperlihatkan pada tabel III.3, laju pertumbuhan ekonomi Kepulauan Bangka Belitung diperkirakan akan tumbuh sebesar 5,20 persen dan 5,30 persen. Pertumbuhan utama masih ditopang oleh pertumbuhan sektor industri pengolahan yang tumbuh rata-rata sekitar 5,25 persen, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang diperkirakan tumbuh rata-rata sebesar 4,88 persen, diikuti oleh pertumbuhan di sektor perdagangan besar dan eceran rata-rata sebesar 7,10 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi daerah masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang diperkirakan tumbuh rata-rata sebesar 5,50 persen, diikuti oleh investasi yang tumbuh positif sebesar 6,02 persen. Sejalan dengan perbaikan harga komoditas ekspor, komponen ekspor juga diperkirakan akan tumbuh positif rata-rata sebesar 7.80 persen.

**Tabel III.3**  
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 – 2019

	Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018*)	2019*)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,93	4,27	-0,36	4,95	5,15
B.	Pertambangan dan Penggalian	1,64	0,51	2,19	0,50	0,51
C.	Industri Pengolahan	1,27	2,77	6,31	2,67	2,73
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	9,21	12,44	4,85	17,34	19,59
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,Limbah dan Daur Ulang	5,75	5,52	9,79	11,65	11,66
F.	Konstruksi	5,85	6,95	5,73	7,58	7,77
G.	Perdagangan Besar dan EceranMotor	4,28	5,08	7,91	10,10	10,11
H.	Transportasi dan Pergudangan	5,82	5,41	7,99	8,69	8,70
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,42	4,99	4,61	5,28	5,35
J.	Informasi dan Komunikasi	7,34	9,18	8,19	8,28	8,28

	Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018*)	2019*)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,38	6,44	2,48	3,54	3,56
L.	Real Estate	2,71	3,67	5,20	5,34	4,80
M, N.	Jasa Perusahaan	4,02	0,06	5,85	5,88	6,50
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,71	6,06	5,06	6,95	5,98
P.	Jasa Pendidikan	9,75	7,59	3,86	4,75	4,75
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,65	4,82	8,19	9,56	9,57
R,S,T,U	Jasa Lainnya	8,12	9,79	6,14	7,10	7,11
	<b>PDRB</b>	<b>4.08</b>	<b>4,11</b>	<b>4,51</b>	<b>5,20</b>	<b>5,30</b>

Sumber : 2014-2017 BPS Prov. Kep. Bangka Belitung,

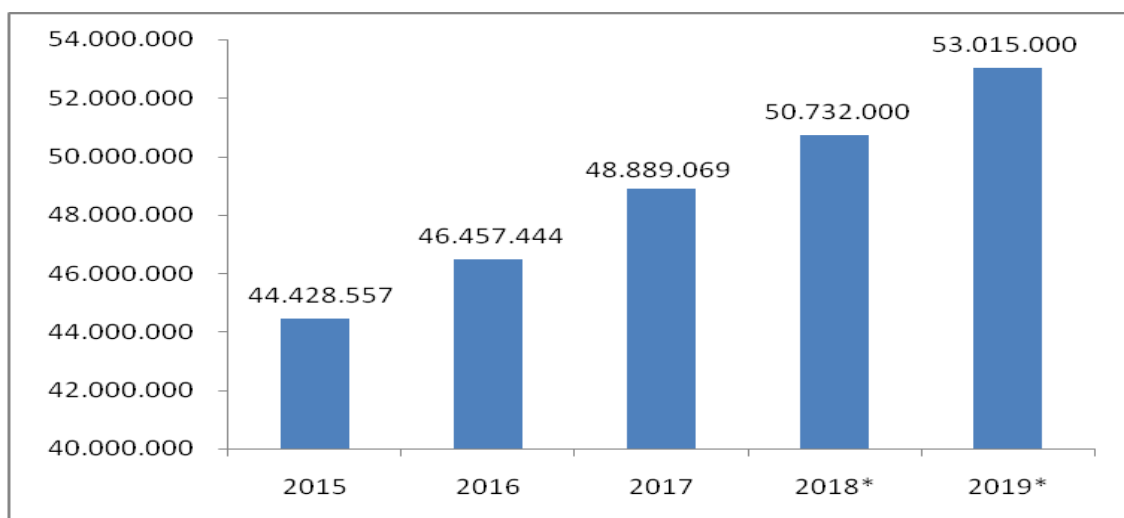
\*)2018-2019 Proyeksi Bappelitbangda

### 3.1.1.3 PDRB Perkapita

PDRB perkapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah. Data statistik ini merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu wilayah/daerah. PDRB perkapita diperoleh dari hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang bersangkutan. Jadi besarnya PDRB perkapita tersebut sangat dipengaruhi oleh kedua variabel diatas

Dalam kurun waktu 2015-2017, sebagaimana diperlihatkan pada gambar III.2 PDRB per kapita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas dasar harga berlaku terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2015, PDRB perkapita sebesar Rp44.428.557,- meningkat menjadi sebesar Rp46.457.444,- pada tahun 2016 dan meningkat menjadi sebesar Rp48.889.069,- pada tahun 2017. Sejalan dengan perkembangan perekonomian daerah yang tumbuh positif, PDRB perkapita pada tahun 2018-2019 diperkirakan akan lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp51.617.080,- dan sebesar Rp54.843.147,-.

**Gambar III.2**  
PDRB Per Kapita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015-2019  
(dalam Rupiah)



Sumber : 2015-2017 BPS Prov. Kep. Bangka Belitung,

\*)2018 - 2019 Proyeksi Bappelitbangda

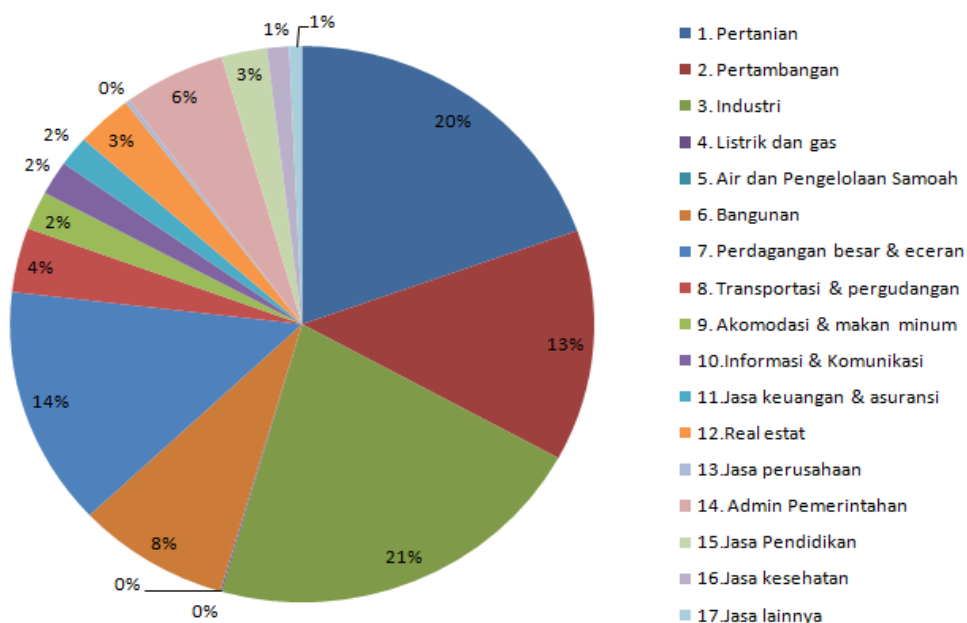
#### 3.1.1.4 Struktur Perekonomian Daerah

Untuk melihat seberapa besar peranan masing-masing sektor ekonomi dan seberapa jauh terjadi pergeseran peranan antara sektor-sektor ekonomi pembentuk PDRB dapat dilihat dari perkembangan struktur ekonomi daerah. Dengan mengetahui struktur perekonomian dapat diperoleh informasi terkait sektor-sektor mana saja yang paling dominan dan potensial untuk dikembangkan.

Struktur perekonomian daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana diperlihatkan pada gambar III.3 dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2017 sektor industri pengolahan masih memberikan kontribusi tertinggi yaitu sebesar 21,46 persen, namun sedikit mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2016 yang mencapai sebesar 22,34 persen. Sektor yang memberikan kontribusi paling tinggi setelah sektor industri pengolahan adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yaitu sebesar 19,54 persen, diikuti oleh sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 13,89 persen serta sektor pertambangan dan penggalian sebesar 13,45 persen.

Apabila dicermati secara mendalam memperlihatkan bahwa struktur perekonomian daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mengalami pergeseran struktur dari yang sebelumnya didominasi oleh sektor primer (sektor pertanian, kehutanan dan perikanan serta sektor pertambangan dan penggalian), bergeser menjadi didominasi oleh sektor tersier (sektor jasa-jasa) dengan kontribusi terhadap PDRB mencapai sebesar 45,56 persen. Sedangkan kontribusi sektor sekunder (sektor industri pengolahan) meskipun secara relatif lebih besar dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya, namun cenderung mengalami peran yang menurun.

**Gambar III.3**  
Struktur Perekonomian Menurut Lapangan Usaha  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017



Sumber: Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (data diolah)



Selanjutnya, sepanjang tahun 2018 dan 2019, diperkirakan struktur perekonomian daerah masih tetap sama seperti yang terjadi pada tahun 2017. Namun sektor industri pengolahan dan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan sektor ekonomi yang memiliki peran relatif dominan dengan rata-rata kontribusi terhadap PDRB masing-masing sekitar 20 persen.

**Tabel III.4**

Distribusi Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015–2019 (dalam persen)

	Lapangan Usaha	2015	2016	2017	2018*)	2019*)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	19,02	19,05	19,54	20,08	20,08
B.	Pertambangan dan Penggalian	14,05	13,57	13,45	12,82	12,82
C.	Industri Pengolahan	22,63	22,34	21,46	20,95	20,95
D.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,09	0,08	0,08	0,08
E.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
F.	Konstruksi	8,18	8,40	8,42	8,58	8,58
G.	Perdagangan Besar dan Eceran Motor	13,93	14,06	13,89	13,87	13,87
H.	Transportasi dan Pergudangan	3,62	3,66	3,74	3,79	3,79
I.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,25	2,27	2,23	2,25	2,25
J.	Informasi dan Komunikasi	1,85	1,94	1,97	2,01	2,01
K.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,76	1,80	1,76	1,82	1,82
L.	Real Estate	3,14	3,12	3,10	3,16	3,16
M, N.	Jasa Perusahaan	0,26	0,25	0,26	0,26	0,26
O.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,08	5,18	5,61	5,78	5,78
P.	Jasa Pendidikan	2,30	2,38	2,52	2,58	2,58
Q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,16	1,17	1,22	1,24	1,24
R, S, T, U	Jasa Lainnya	0,66	0,70	0,71	0,73	0,73
	<b>PDRB</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: 2015-2017 BPS Prov. Kep. Bangka Belitung,

\*)2018-2019 Proyeksi Bappelitbangda

### 3.1.1.5 Struktur Pengeluaran dalam PDRB

Distribusi PDRB dari sisi pengeluaran sepanjang periode tahun 2015-2017 masih didominasi oleh komponen konsumsi rumah tangga dengan kontribusi terhadap PDRB rata-rata di atas 50 persen, diikuti oleh komponen ekspor dan investasi yang masing-masing berkontribusi di atas 40 persen dan di atas 20 persen terhadap PDRB. Selain ketiga komponen tersebut, konsumsi pemerintah juga menjadi komponen pengeluaran penentu bagi perkembangan perekonomian daerah dengan rata-rata kontribusi terhadap PDRB di atas 10 persen.

Sejalan dengan uraian di atas, diperkirakan motor penggerak perekonomian daerah pada tahun 2018 dan 2019 masih didominasi oleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga yang didorong oleh kekuatan ekspor dan investasi serta konsumsi pemerintah. Secara lengkap, gambaran mengenai struktur pengeluaran dalam PDRB Kepulauan Bangka Belitung pada 2015 – 2019 diperlihatkan pada Tabel III.5 di bawah ini.



**Tabel III.5**

Distribusi PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan 2010  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015–2019 (dalam persen)

	Pengeluaran	2015	2016	2017	2018*)	2019*)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	51,41	52,20	52,58	52,73	52,83
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,61	0,63	0,64	0,64	0,64
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	10,16	10,16	10,29	10,36	10,42
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	21,37	21,81	22,11	22,28	22,44
5	Perubahan Inventori	1,91	1,31	1,26	1,21	1,16
6	Ekspor Luar Negeri	47,61	38,48	45,13	46,25	47,36
7	Impor Luar Negeri	2,41	3,56	2,86	3,16	3,51
8	Net Ekspor Antar Daerah	(30,66)	(20,69)	(29,16)	(30,31)	(31,33)
	<b>PDRB</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : 2015-2017 BPS Prov. Kep. Bangka Belitung,

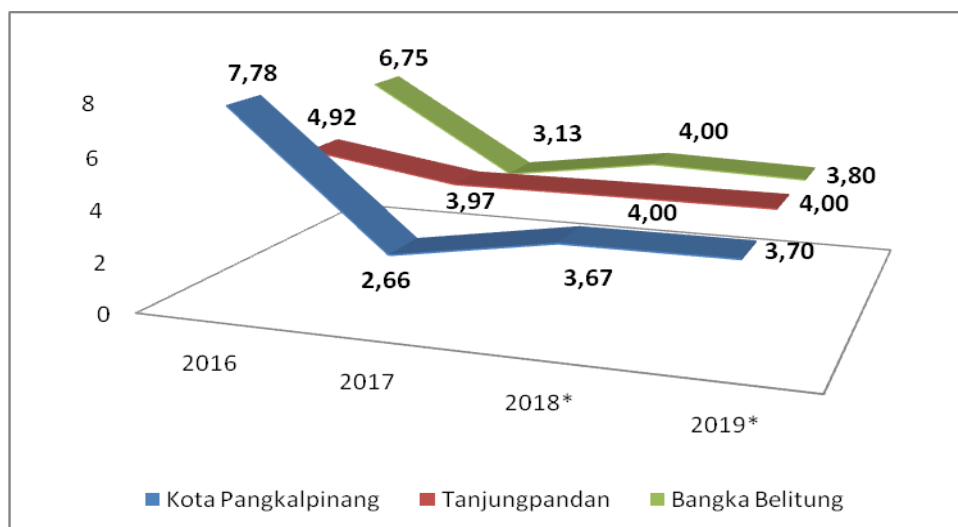
\*)2018 dan 2019 Proyeksi Bappeda

### 3.1.1.6 Tingkat Inflasi

Pada tahun 2016, Kota Pangkalpinang mengalami inflasi sebesar 2,66 persen dan Tanjungpandan mengalami inflasi sebesar 3,97 persen *year on year*, sehingga inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017 sebesar 3,13 persen. Dengan memperhatikan kondisi inflasi Kota Pangkalpinang dan Tanjungpandan tahun 2017 serta laju inflasi sampai dengan bulan Juni 2018, dimana masing-masing kota mengalami inflasi sebesar 2,56 persen dan 1,43 persen yang lebih tinggi dari tahun 2017 yaitu sebesar 2,24 dan 0,86, sehingga proyeksi target inflasi tahun 2018 untuk Kota Pangkalpinang dan Kota Tanjungpandan masing-masing sebesar 3,67 persen untuk Kota Pangkalpinang dan 4,00 persen untuk Tanjungpandan serta target inflasi untuk Bangka Belitung sebesar 4,00 persen. Sedangkan proyeksi tahun 2019 untuk Kota Pangkalpinang, Tanjungpandan, dan Bangka Belitung masing-masing sebesar 3,70 persen, 4,00 persen dan 3,80 persen.

**Gambar III.4**

Laju Inflasi Kota Pangkalpinang dan Tanjung Pandan Tahun 2016-2019



Sumber : 2016-2017 (BPS),

\*)2018-2019 (Proyeksi Bappeda Provinsi)

**Tabel III.6**

Laju Inflasi Tahunan Kota Pangkalpinang Menurut Kelompok Pengeluaran  
Tahun 2013-2017

Kelompok Pengeluaran	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Umum</b>	8,71	6,81	4,66	7,78	2,66
1. Bahan Makanan	11,08	3,39	6,63	3,49	0,52
2. Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	6,82	8,63	7,92	0,91	0,16
3. Perumahan	9,20	8,85	3,74	0,90	1,26
4. Sandang	1,63	6,61	2,60	0,33	0,08
5. Kesehatan	5,08	8,13	5,50	0,18	0,08
6. Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga	3,77	6,56	8,62	0,27	0,21
7. Transportasi dan Komunikasi	11,17	6,98	-2,04	1,70	0,35

Sumber: BPS Prov. Kep. Bangka Belitung, 2018

Pada tahun 2018 dan 2019, diharapkan tingkat inflasi dapat ditekan hingga mencapai kisaran 7,70 - 7,65 persen untuk kota Pangkalpinang dan 4,75 - 4,63 persen untuk kota Tanjungpandan. Inflasi merupakan cerminan dari kestabilan nilai mata uang. Stabilitas tersebut tercermin dari stabilitas tingkat harga yang kemudian berpengaruh terhadap realisasi pencapaian tujuan pembangunan ekonomi suatu daerah, seperti pemenuhan kebutuhan dasar, pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan, perluasan kesempatan kerja serta stabilitas ekonomi.

**Tabel III.7**

Laju Inflasi Tahunan Kota Tanjung Pandan Menurut Kelompok Pengeluaran  
Tahun 2014-2017

Kelompok Pengeluaran	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Umum</b>	13,14	0,88	4,92	3,97
1. Bahan Makanan	21,36	-4,52	2,26	0,37
2. Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	6,91	4,63	2,01	1,36
3. Perumahan	6,87	2,91	0,17	1,42
4. Sandang	12,03	1,26	0,15	0,16
5. Kesehatan	4,11	3,87	0,10	0,27
6. Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga	15,35	8,07	0,18	0,19
7. Transportasi dan Komunikasi	20,47	0,42	0,05	0,20

Sumber: BPS Prov. Kep. Bangka Belitung, 2018

### 3.1.1.7 Tingkat Investasi

Investasi di daerah diharapkan dapat memacu pertumbuhan perekonomian daerah sekaligus pemerataan pendapatan masyarakat. Dengan banyaknya investasi yang ditanamkan oleh dunia usaha di daerah maka diharapkan semakin bertambahnya lapangan kerja yang dapat menampung angkatan kerja. Sejalan dengan kewenangan daerah berdasarkan kebijakan Otonomi Daerah, maka Pemerintah Daerah juga berkewajiban untuk membina dan mengembangkan dunia usaha daerah sebagai pilar pertumbuhan

perekonomian di daerah. Untuk itu langkah utama yang harus dilakukan adalah pemberdayaan investasi daerah.

Pemberdayaan investasi daerah adalah suatu upaya yang harus dilakukan secara sistematis untuk mendorong peningkatan investasi di daerah. Realisasi investasi PMA di Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017 adalah sebesar US\$ 52.737,10 ribu dan investasi PMDN sebesar Rp 2.201.963,60 juta. Hal tersebut sebagaimana yang tergambar pada tabel III.8.

**Tabel III.8**  
Perkembangan Realisasi Investasi  
Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012–2017

Investasi		2012	2013	2014	2015	2016
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PMA	Jumlah Proyek	30	50	34	72	93
	Nilai (US \$ ribu)	59.183,38	112.392,59	105.043,80	82.663,10	52.737,10
PMDN	Jumlah Proyek	4	11	7	28	60
	Nilai (Rp juta)	533.460,80	608.204,40	615.407,90	1.023.739,80	2.201.963,60

Sumber : BPS, 2017

Pada tahun 2018 dan 2019 diperkirakan investasi di Kepulauan Bangka Belitung terus mengalami peningkatan, namun harus diikuti dengan langkah kebijakan diversifikasi dan penyebaran investasi harus secara intensif dilakukan, disesuaikan dengan potensi atau sumber daya spesifik yang dimiliki daerah atau industri.

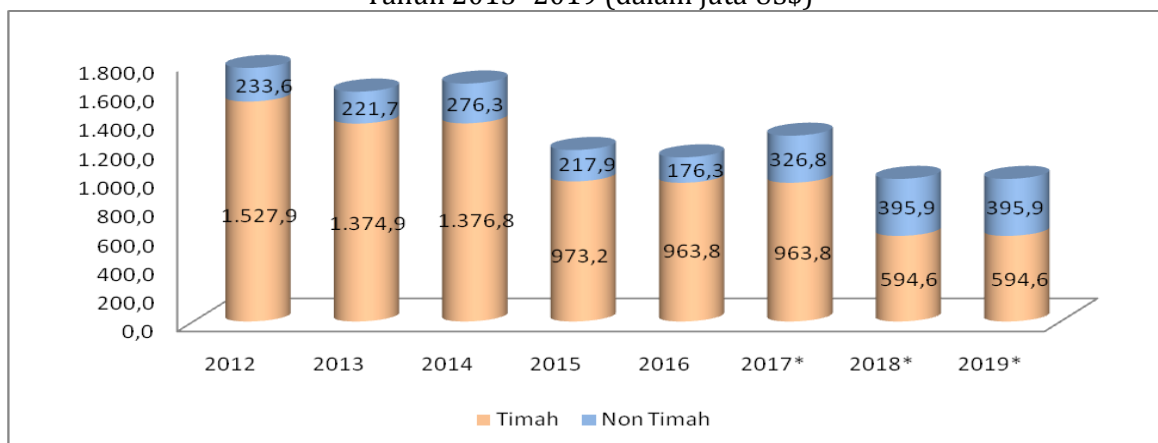
Beberapa kebijakan strategis yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka meningkatkan penanaman modal di Bangka Belitung antara lain adalah; peningkatan kapasitas kelembagaan, menjaga stabilitas sosial dan politik, menjaga stabilitas perekonomian daerah, pengembangan Sumber Daya Manusia dan pembangunan/pengembangan infrastruktur fisik. Selain hal tersebut, upaya dalam rangka menarik investor yang terkait dengan sektor produksi yang menjadi unggulan daerah harus terus dilakukan. Hilirisasi dan industrialisasi terhadap sektor pertambangan, pertanian, perikanan dan pariwisata merupakan hal yang menjadi prioritas utama.

### 3.1.1.8 Ekspor dan Impor

Ekspor yang dilakukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagian besar merupakan ekspor logam timah. Namun sepanjang tahun 2012-2016 trend ekspor tersebut cenderung mengalami penurunan, di mana pada tahun 2012 nilai ekspor timah sebesar US\$ 1.527,9 juta terus mengalami penurunan menjadi hanya sebesar US\$ 963,8 juta. Sejalan dengan penurunan ekspor timah, ekspor barang-barang non timah juga cenderung mengalami hal yang sama, yaitu dari sebesar US\$ 233,6 juta pada tahun 2012 menjadi sebesar US\$ 176,3 juta pada tahun 2016. Dengan penurunan kedua jenis komoditas tersebut mempengaruhi total ekspor Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari sebesar US\$ 1.761,5 juta pada tahun 2012 menjadi sebesar US\$ 1.140,1 juta pada tahun 2016.

Ringkasan mengenai perkembangan ekspor Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2012 s.d. 2016, sebagaimana tersaji pada gambar III.5 berikut ini.

**Gambar III. 5**  
Perkembangan Ekspor Kepulauan Bangka Belitung  
Tahun 2015- 2019 (dalam juta US\$)



Sumber : 2012-2016 BPS Prov. Kep. Bangka Belitung,  
\*2017, 2018 dan 2019 Proyeksi Bappeda

Sebaliknya, untuk impor Provinsi Kepulauan Bangka sepanjang tahun 2012-2016 cenderung meningkat untuk komoditas migas, yaitu dari sebesar US\$ 15,30 juta pada tahun 2012 meningkat menjadi sebesar US\$ 41,41 juta pada tahun 2016. Sedangkan impor untuk komoditas non migas cenderung fluktuatif, yaitu dari sebesar US\$ 73,60 juta pada tahun 2012 turun menjadi sebesar US\$ 34,83 juta pada tahun 2014, kemudian kembali mengalami peningkatan sebesar US\$ 38,70 juta pada tahun 2014 dan turun menjadi sebesar US\$ 18,29 pada tahun 2015 dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2016 menjadi sebesar US\$ 90,60 juta. Kondisi ini mempengaruhi nilai total impor Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mengalami fluktuatif sepanjang periode yang sama, yaitu dari sebesar US\$ 88,90 juta pada tahun 2012 turun menjadi sebesar US\$ 49,89 juta pada tahun 2015 dan meningkat menjadi sebesar US\$ 132,01 juta pada tahun 2016. Secara rinci perkembangan impor Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada gambar III.6 di bawah ini.

**Gambar III. 6**  
Perkembangan Impor Kepulauan Bangka Belitung  
Tahun 2012-2019 (dalam juta US\$)

Sumber : 2012-2016 BPS Prov. Kep. Bangka Belitung,  
\*2017, 2018 dan 2019 Proyeksi Bappeda

### 3.1.2 Indikator Pembangunan Bidang Kesejahteraan

#### 3.1.2.1 Pengangguran

Persentase pengangguran terbuka (TPT) pada tahun 2017 sebesar 3,78 persen. Pada tahun 2018 dan 2019, angka pengangguran diperkirakan dapat ditekan seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pemberlakuan Undang-Undang tentang Minerba yang melarang ekspor *rowmaterials* akan menyebabkan industri pengolahan akan semakin tumbuh dan berkembang yang akhirnya akan berdampak terhadap penciptaan lapangan pekerjaan baru. Demikian juga

bertumbuhnya sektor pertanian, pariwisata, kelautan serta membaiknya infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan dan listrik akan mempercepat pertumbuhan ekonomi, yang mampu menyerap peningkatan angkatan kerja. Sehingga tingkat pengangguran terbuka tahun 2018 dan 2019 masing-masing sebesar 3,60 persen dan 3,54 persen.

**Tabel III.9**  
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014–2019 (dalam persen)

Kegiatan Utama	2014	2015	2016	2017	2018*	2019*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tingkat Pengangguran Terbuka	5,14	6,29	2,60	3,78	3,60	3,54

Sumber : 2014 – 2017 (BPS Prov. Kep. Bangka Belitung)

\*) 2018 - 2019 Proyeksi Bappelitbangda

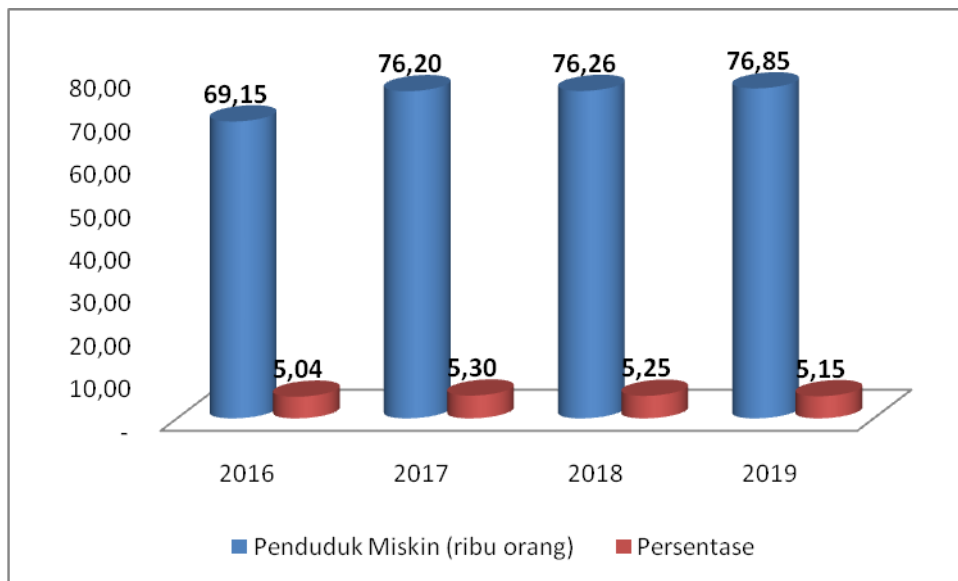
Pada tahun 2018 dan 2019, angka pengangguran diperkirakan dapat ditekan seiring dengan semakin tumbuhnya sektor industri pengolahan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pemberlakuan UU tentang Minerba yang melarang ekspor *rowmaterials* akan menyebabkan industri pengolahan akan semakin tumbuh dan berkembang yang akhirnya akan berdampak terhadap penciptaan lapangan pekerjaan baru.

### 3.1.2.2 Kemiskinan

Dengan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basicneedsapproach*), kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Garis kemiskinan adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari ditambah kebutuhan minimum non makanan yang mencakup perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Dengan pendekatan ini, dapat dihitung penduduk yang hidup di bawah Garis Kemiskinan dinyatakan sebagai penduduk miskin atau persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan.

Penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sepanjang periode tahun 2016 - 2017 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2016 jumlah penduduk miskin sebanyak 69,15 ribu orang atau sebanyak 5,04 persen dari total jumlah penduduk, naik menjadi 76,20 ribu orang atau 5,30 persen pada tahun 2017 dan diproyeksi menurun pada tahun 2018 dan tahun 2019 menjadi sebanyak 76,26 ribu orang atau sebanyak 5,25 persen dan 76,85 ribu orang atau sebesar 5,15 persen.

**Gambar III.7**  
Penduduk Miskin Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 – 2019  
(dalam persen)



Sumber : 2014 – 2017 (BPS Prov. Kep. Bangka Belitung)  
\*) 2018 – 2019 (Proyeksi Bappelitbangda)

Sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi daerah yang semakin cepat, diperkirakan angka kemiskinan pada tahun 2018 dan 2019 terus mengalami penurunan. Kondisi ini diharapkan dapat terwujud melalui penguatan sektor-sektor ekonomi dan program-program pemerintah dalam penanggulangan masalah kemiskinan. Upaya pengentasan kemiskinan difokuskan di daerah perdesaan mengingat angka kemiskinan tertinggi di Kepulauan Bangka Belitung terjadi di daerah perdesaan.

### 3.1.2.3 Ketimpangan Regional

Tingkat ketimpangan antara daerah yang diukur dengan menggunakan pendekatan indeks ketimpangan Williamson, dimana semakin besar angka indeks tersebut berarti ketimpangan antar daerah semakin tinggi. Adapun Interpretasi dari indeks ketimpangan Williamson adalah:

Besarnya IW adalah  $0 < IW < 1$

Jika IW = 0, maka pembangunan wilayah sangat merata,

Jika IW = 1, maka pembangunan wilayah sangat tidak merata (kesenjangan merata,

IW mendekati 0, berarti pembangunan wilayah semakin mendekati merata,

IW mendekati 1 berarti pembangunan wilayah semakin mendekati tidak merata.

Ketimpangan regional di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diukur menggunakan perhitungan Indeks Williamson menunjukkan angka yang fluktuatif. Pada

tahun 2012 angka indeks sebesar 0,284 meningkat menjadi sebesar 0,304 pada tahun 2013, kemudian cenderung turun menjadi sebesar 0,294 pada tahun 2014 dan sebesar 0,291 pada tahun 2015. Berdasarkan angka indeks tersebut, mengindikasikan bahwa angka indeks ketimpangan Williamson Provinsi Kepulauan Bangka Belitung cenderung mendekati 0, hal ini berarti bahwa pembangunan wilayah semakin mendekati merata atau dengan kata lain menunjukkan bahwa adanya peningkatan pemerataan pembangunan regional antar kabupaten/kota se-provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Untuk tahun 2018 dan 2019, indeks williamson diperkirakan cenderung turun, hal ini diupayakan melalui kebijakan pemerintah dengan melakukan pembangunan secara merata antar kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Secara lebih rinci, gambaran indeks wiliamson Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana diilustrasikan pada Tabel III.10 di bawah ini.

**Tabel III.10**  
Indeks Williamson Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2012–2019)

Tahun	Indeks Ketimpangan Willamson
2012	0,284
2013	0,304
2014	0,294
2015	0,291
2016 *)	0,288
2017 *)	0,251
2018 *)	0,248
2019 *)	0,245

Sumber: 2012-2015(BPS)

\*) 2016-2019 (Proyeksi Bappeda)

#### 3.1.2.4 Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Koefisien Gini adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan pendapatan agregat yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Apabila Koefisien Gini mendekati nol menunjukkan adanya ketimpangan yang rendah dan bila Koefisien Gini mendekati satu menunjukkan ketimpangan yang tinggi. Pada prakteknya, angka ketimpangan untuk daerah-daerah yang ketimpangan distribusi pendapatannya tajam berkisar antara 0,50 hingga 0,70. Sedangkan untuk daerah-daerah yang distribusi pendapatannya relatif paling merata berkisar antara 0,20 sampai 0,35.

Koefisien Gini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana yang ditampilkan pada table III.11, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2013 adalah sebesar 0,307, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2014 menjadi 0,295. Angka tersebut menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung relatif rendah. Namun demikian, adanya peningkatankoefisien gini pada tahun 2014 perlu disikapi dengan bijak oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar semakin meratakan distribusi pendapatan masyarakat. Pada tahun 2015 koefisien gini provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 0,275, angka tersebut merupakan yang paling rendah sepanjang tahun 2013-2017. Selanjutnya, koefisien Gini untuk tahun 2018 dan 2019 diperkirakan akan

cenderung mengalami penurunan. Hal ini mengindikasikan bahwa distribusi pendapatan masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan semakin merata.

**Tabel III.11**  
Koefisien Gini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (2013–2019)

<b>Tahun</b>	<b>Koefisien Gini</b>
(1)	(2)
2013	0,307
2014	0,295
2015	0,275
2016	0,288
2017	0,276
2018*	0,278
2019*	0,269

Sumber: 2013-2017 BPS Prov. Kep. Bangka Belitung 2015

\*) 2018 - 2019 Proyeksi Bappeda

### 3.1.3 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2018 dan 2019

#### 3.1.3.1 Tantangan Perekonomian Global dan Nasional 2018 dan 2019

Tantangan perekonomian global diperkirakan akan berasal dari pelemahan ekonomi China. Dengan pelemahan tersebut akan mengurangi permintaan terhadap barang dan jasa dari Indonesia. Ekonomi Indonesia sendiri diperkirakan masih belum seutuhnya terlepas dari tantangan pada 2017 akibat harga minyak dunia yang belum bisa diprediksi, kondisi perekonomian dunia belum sepenuhnya pulih serta dampak kebijakan presiden Amerika Serikat Donald Trump (efek Trump) yang juga mempengaruhi stabilitas perekonomian dunia.

Namun demikian, melemahnya perekonomian global mendapatkan response yang positif bagi perekonomian Indonesia. Bergesernya status Indonesia sebagai Negara tujuan investasi dunia, tentu berimplikasi positif bagi pengembangan industri dalam negeri. Tetapi, di sisi lain perlu diwaspadai bahwa dampak negatif dari melemahnya perekonomian dunia dapat mengancam stabilitas ekonomi Indonesia. Untuk itu, dalam menjawab tantangan perekonomian global, Indonesia perlu menentukan langkah-langkah antisipatif dengan memperkuat perekonomian domestik. Faktor integral yang menentukan kekuatan ekonomi domestik Indonesia antara lain adalah: 1) pengelolaan konsumsi yang efektif; 2) pengetuan sektor pangan; 3) penggunaan energi yang efisien; 4) Investasi dan perdagangan Internasional. Keempat faktor tersebut bersifat komplementer, sehingga penanganannya harus simultan dan terkoordinasi dengan baik.

Pada intinya, kelemahan-kelemahan di sektor daya saing, rendahnya kapasitas produksi pangan, minimnya penguasaan R&D dan inovasi serta faktor politis yang terkait dengan kepemimpinan dan efektivitas implementasi kebijakan perlu segera dibenahi. Sementara, kekuatan yang dimiliki Indonesia berupa semakin tingginya pertumbuhan kelas menengah, momentum untuk mempertahankan daya beli masyarakat yang cukup tinggi,



serta aspek demografis dan kemajemukan bangsa, perlu terus dipertahankan guna mendorong berbagai kebijakan di bidang energi, moneter, fiskal, pangan dan kerjasama internasional yang efektif.

### **3.1.3.2 Tantangan Perekonomian Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 dan 2019**

Pada tahun 2018 dan 2019 diperkirakan perekonomian Kepulauan Bangka Belitung masih akan dihadapkan pada sejumlah tantangan akibat pengaruh dari dinamika internal maupun lingkungan perekonomian global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Beragam tantangan dimaksud perlu disikapi secara arif dan komprehensif dengan langkah-langkah yang lebih nyata.

Terdapat beberapa isu yang menjadi perhatian dalam pembangunan perekonomian Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 dan 2019, yaitu:

1. Belum pulihnya perekonomian global;
2. Harga beberapa komoditas unggulan yang masih belum membaik;
3. Faktor cuaca yang kurang kondusif berpengaruh terhadap distribusi pasokan bahan pangan, tangkapan ikan dan jumlah wisatawan yang akan berkunjung;
4. Depresiasi Nilai Tukar Rupiah terus menerus;
5. Kapasitas pengolahan CPO yang ada di Kepulauan Bangka Belitung relatif masih sangat terbatas.

Sementara itu, tingkat inflasi diperkirakan masih terdapat potensi terjadinya resiko peningkatan akibat gangguan pasokan bahan makanan baik dari sisi produksi maupun distribusi yang dipengaruhi oleh gangguan cuaca dan faktor alam. Dari sisi permintaan, trend meningkatnya harga lada serta perayaan hari besar keagamaan dan momen pemilukada Gubernur juga dapat berpotensi mendorong laju inflasi.

Tantangan lain yang mempengaruhi prospek pembangunan ekonomi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2019 juga mencakup tantangan terkait dengan persaingan ekonomi regional yang saat ini terus berlangsung, meliputi antara lain:

- 1) Laju peningkatan ekspor dan impor. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, ekspor Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan, namun hal tersebut diikuti pula dengan meningkatnya laju impor, sehingga neraca perdagangan selama kurun waktu tersebut terus mengalami penurunan. Apabila kondisi daya saing produk tidak segera ditingkatkan, maka dalam era perdagangan bebas kedepan dengan masuknya berbagai produk dari luar dengan kualitas yang lebih baik dan harga lebih terjangkau akan membuat produk lokal akan semakin terpinggirkan.
- 2) Laju Inflasi. Karakteristik provinsi kepulauan yang dimiliki oleh Bangka Belitung menjadi salah satu penyebab daerah ini menjadi daerah dengan angka inflasi tertinggi di Indonesia. Angka inflasi yang tinggi, dikhawatirkan akan memberikan dampak yang negatif terhadap penilaian daya saing daerah yang pada akhirnya mengurangi daya tarik investasi.
- 3) Pengembangan sektor unggulan Kepulauan Bangka Belitung harus terus ditangani dengan serius, khususnya pada sektor-sektor industri untuk dikembangkan dalam

rangka mengisi pasar ASEAN. Di antaranya, industri berbasis agro (CPO, kakao dan karet), industri produk olahan ikan, industri TPT, industri makanan minuman serta industri logam.

- 4) Daya saing Sumber Daya Manusia. Mobilitas tenaga kerja (*movement of natural persons*) intra ASEAN akan diberlakukan pada beberapa sektor, oleh karena itu, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus mampu meningkatkan kualitas tenaga kerjanya sehingga dapat bersaing di daerah maupun pada level ASEAN. Hal ini juga dilakukan untuk mencegah banyaknya tenaga asing yang masuk ke daerah.
- 5) Percepatan pertumbuhan ekonomi akan terus diupayakan dengan mengembangkan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dominan. Pertumbuhan ekonomi dengan percepatan yang lebih tinggi, terjaganya stabilitas ekonomi makro, diharapkan akan dapat mendorong peningkatan investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas dengan fokus utama untuk menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Dalam hal ini diperlukan strategi kebijakan yang tepat dengan menempatkan prioritas pengembangan pada sektor-sektor yang mempunyai efek pengganda tinggi dalam menciptakan kesempatan kerja.
- 6) Menyediakan infrastruktur yang cukup dan berkualitas. Hal ini merupakan prasyarat agar dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan. Ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai akan menjadi kendala bagi masuknya investasi. Selain itu infrastruktur sangat dibutuhkan karena mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Infrastruktur tersebut dapat menyokong banyak aspek ekonomi dan kegiatan sosial. Lemahnya Infrastruktur, khususnya bidang transportasi dan energi menyebabkan biaya ekonomi tinggi.
- 7) Disparitas pembangunan antara wilayah di Kepulauan Bangka Belitung menjadi tantangan tersendiri untuk dijadikan pemicu dalam meningkatkan daya saing antara wilayah. Upaya mempercepat pembangunan pusat-pusat pertumbuhan sangat diperlukan dalam memperkuat jaringan distribusi produk-produk unggulan daerah. Hal ini merupakan suatu keniscayaan agar daya saing setiap wilayah dapat terus ditingkatkan.
- 8) Meningkatkan partisipasi swasta melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta (*public-privatepartnership*). Tantangan ini menjadi cukup penting karena terbatasnya sumber daya pemerintah dalam pembiayaan pembangunan, terutama terkait dengan efisiensi pembiayaan investasi dan penyediaan infrastruktur yang bervariasi dan berkualitas.

### 3.1.3.3 Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2019

Mulai pulihnya perekonomian secara global diharapkan akan terus mampu untuk mendorong meningkatnya permintaan dunia terhadap komoditas primer. Kondisi ini berdampak positif terhadap peningkatan ekspor Kepulauan Bangka Belitung dan meningkatkan pendapatan masyarakat dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Momentum terbukanya pasar regional dapat memberikan prospek yang cerah bagi pembangunan ekonomi Kepulauan Bangka Belitung. Beberapa peluang yang dapat

dioptimalkan dalam rangka pembangunan ekonomi di Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2019 antara lain adalah:

- 1) Kepulauan Bangka Belitung dikenal dengan daerah yang memiliki potensi sumber daya yang besar. Membaiknya perekonomian global menyebabkan meningkatnya harga beberapa komoditi unggulan. Hal ini juga diharapkan dapat meningkatkan kinerja ekspor Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2018 dan 2019.
- 2) Potensi sumber daya yang dimiliki oleh Kepulauan Bangka Belitung dapat menjadikan daya tarik bagi masuknya investasi, namun hal ini harus didukung oleh penciptaan iklim yang kondusif.
- 3) Kepulauan Bangka Belitung harus mampu memanfaatkan momentum beralihnya fokus investor ke negara-negara Asia dan dapat menyerap aliran modal menyusul krisis yang melanda kawasan Eropa dan Amerika. Beberapa kawasan dengan daya dukung infrastruktur yang memadai masih akan menjadi tujuan utama arus modal. Serapan investasi ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berpeluang lebih besar jika daya dukung infrastruktur diperkuat.
- 4) Liberalisasi perdagangan ASEAN menyebabkan arus keluar masuk barang untuk pasokan bahan baku maupun bahan jadi. Kondisi pasar bebas dapat menyebabkan produsen untuk memproduksi barang yang berkualitas dan mampu bersaing dengan produk dari daerah/negara lain.

Kinerja perekonomian daerah yang masih tumbuh positif pada tahun 2017 serta besarnya ekspektasi masyarakat pada perbaikan ekonomi daerah, diharapkan akan memberi dampak positif pada perekonomian Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2018 dan 2019. Peningkatan konsumsi rumah tangga yang diikuti dengan pertumbuhan investasi dan ekspor, diperkirakan akan tetap menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi dari sisi permintaan. Sedangkan dari sisi produksi, peranan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan yang semakin menonjol diikuti oleh perkembangan sektor industri pengolahan, sektor perdagangan besar dan eceran, serta sektor pertambangan dan penggalian diperkirakan akan memainkan peranan penting dalam perekonomian Kepulauan Bangka Belitung di masa yang akan datang.

#### **3.1.4 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang terjadi dan berkembang serta memperhatikan kerangka ekonomi makro pada kurun waktu 2014-2017 dan program Nawacita Presiden Republik Indonesia, kebijakan pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019 akan difokuskan pada beberapa tujuan, antara lain :

- 1) Pengembangan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan Koperasi dan UMKM;
- 2) Peningkatan nilai ekspor melalui peningkatan produksi dan nilai tambah produk serta industrialisasi komoditi unggulan;
- 3) Pengendalian angka inflasi melalui peningkatan ketahanan pangan daerah dengan cara perbaikan sistem perbenihan, intensifikasi, proteksi, pengolahan hasil, fasilitasi sarana produksi, perbaikan infrastruktur pertanian (irigasi dan jalan).

- 4) Peningkatan daya saing daerah melalui pembangunan dan pengembangan infrastruktur wilayah;
- 5) penyediaan lapangan kerja dan penurunan angka kemiskinan, serta peningkatan daya beli masyarakat;
- 6) Peningkatan daya saing Sumber Daya Manusia yang diarahkan kepada peningkatan daya saing tenaga kerja untuk menyambut diberlakukannya *Asean Community* tahun 2015 (untuk memanfaatkan potensi jumlah tenaga kerja dan peluang pasar tenaga kerja dan usaha).
- 7) Mengurangi disparitas pembangunan antar wilayah dengan mendorong laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota yang relatif rendah dengan memacu sektor unggulan masing-masing kabupaten/kota tersebut.
- 8) Pengembangan kemitraan Pemerintah Daerah dengan Swasta terutama peningkatan peran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (peningkatan pendanaan kontribusi dana CSR dan peningkatan sinergitas pembangunan).

### 3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, dengan komponen pokoknya adalah pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Meningkatnya tuntutan kebutuhan dana sebagai konsekuensi penyerahan wewenang pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, melalui otonomi daerah, menuntut berbagai upaya penyesuaian manajemen keuangan daerah termasuk arah pengelolaan pendapatan dan belanja daerah.

Penyusunan APBD sesuai dengan peraturan perundangan diawali dengan proses musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang hasilnya dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), selanjutnya dipergunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Daerah adalah salah satu wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab serta sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Penyusunan APBD harus disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah yang dinamis diseimbangkan dengan prioritas pembangunan yang relevan berdasarkan kemampuan keuangan daerah, sinkronisasi dan integrasi kebijakan pemerintah pusat, provinsi sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Kebijakan dalam pengelolaan APBD memegang peranan yang sangat strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah karena APBD merupakan salah satu instrument penting kebijakan fiskal daerah. Kebijakan Desentralisasi Fiskal Daerah mengandung tiga misi utama yaitu :

- 1) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumberdaya;

- 2) meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat;
- 3) serta memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan.

Sedangkan tiga fungsi utama kebijakan fiskal yaitu sebagai alat stabilisasi ekonomi, alat distribusi pendapatan, dan alat alokasi anggaran. Sebagai alat stabilisasi ekonomi, kebijakan fiskal memainkan perannya dalam menjaga stabilitas nilai tukar dan laju inflasi yang pada gilirannya berpengaruh positif dalam pencapaian ekspansi ekonomi tinggi. Sebagai alat distribusi pendapatan, fungsi kebijakan fiskal tercermin sebagai media dalam penarikan pajak dari masyarakat dimana orang kaya akan membayar pajak lebih tinggi dibandingkan orang miskin. Sedangkan, fungsi kebijakan fiskal sebagai alat alokasi anggaran tercermin dari kualitas anggaran dalam APBD.

Selain terus memprioritaskan pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal, pemerintah hendaknya juga mendukung dan melaksanakan kebijakan reformasi dalam administrasi keuangan daerah, dimana antara lain tercermin dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja, sebagai salah satu langkah perubahan dalam upaya membangun sebuah pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu pengelolaan APBD harus melalui tiga tahapan penting yaitu mulai dari penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan/pengendalian. Dalam paradigma baru dalam manajemen pengelolaan keuangan daerah, perencanaan harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- 1) Berorientasi pada kepentingan publik / masyarakat luas;
- 2) Disusun berdasarkan pendekatan kinerja;
- 3) Mempunyai keterkaitan yang erat antara pengambil kebijakan (*decisionmaker*) di DPRD dengan perencanaan operasional oleh Pemerintah Daerah dan penganggaran pada unit kerja (PD);
- 4) Terdapat upaya-upaya untuk mensinergikan hubungan antara APBD, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, lembaga pengelola keuangan daerah dan unit-unit pengelola layanan publik dalam pengambilan keputusan.

Pengelolaan keuangan di daerah meliputi mobilisasi pendapatan, penetapan alokasi belanja daerah, dan mobilisasi pembiayaan. Untuk memenuhi *sufficient condition* bagi pengelolaan keuangan daerah yang baik, maka daerah perlu memahami dan menggali potensi/keunggulan daerah serta mengidentifikasi pokok-pokok permasalahan yang ada. Daerah juga perlu menentukan arah pembangunannya dalam rencana tahunan, jangka menengah hingga jangka panjang yang masing-masing dituangkan ke dalam RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang), RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) daerah, RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah). Selain ketersediaan sumber-sumber pembiayaan yang ideal, alokasi belanja daerah sangat ditentukan oleh prioritas-prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam ketiga dokumen perencanaan tersebut.

Dalam upaya untuk mencapai seluruh rencana tindak yang ada pada dokumen perencanaan lima tahunan dan satu tahunan, perlu ditetapkan arah pengelolaan keuangan daerah. Arah pengelolaan ini dimaksudkan agar seluruh sumber daya keuangan daerah dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan efisien. Arah pengelolaan tersebut meliputi arah pengelolaan pendapatan daerah, arah pengelolaan belanja daerah dan arah pengelolaan pembiayaan daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas serta dalam rangka mendukung upaya percepatan pertumbuhan ekonomi dan pemantapan stabilitas ekonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta pelayanan umum kepada masyarakat, maka kebijakan keuangan (anggaran) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2018 diarahkan untuk :

- 1) Memberikan dorongan terhadap pertumbuhan perekonomian daerah dengan melanjutkan dan memantapkan langkah-langkah konsolidasi fiskal daerah, guna mewujudkan APBD yang sehat dan berkelanjutan (*fiscalsustainability*) dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan karakteristik, kondisi obyektif dan isu-isu strategis di daerah, di samping memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- 2) Langkah konsolidasi fiskal daerah tersebut, antara lain ditempuh melalui optimalisasi pengumpulan sumber-sumber pendapatan daerah, peningkatan efisiensi dan efektifitas belanja daerah serta peningkatan dan perbaikan manajemen keuangan daerah;
- 3) Memantapkan kondisi ketahanan fiskal daerah yang berkelanjutan dengan cara : (1) melanjutkan langkah-langkah konsolidasi fiskal dengan menjaga tingkat defisit yang terkendali dari aspek pembiayaan daerah, (2) peningkatan manajemen keuangan daerah yang lebih efektif dan efisien;
- 4) Menyelesaikan masalah-masalah mendasar yang menjadi prioritas pembangunan tahun 2017-2022.

### **3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan**

Pendapatan daerah menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 1 ayat 13 merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun terkait.

Berdasarkan ketentuan di atas, dijelaskan bahwa sumber pendapatan daerah Provinsi terdiri atas : 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; 2) Dana Perimbangan yang meliputi : Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, meliputi : Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus, Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi/Kabupaten/Kota Lainnya, Lain-lain Penerimaan, Dana Transfer Pusat dan Dana Insentif Daerah. Sedangkan penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah (DCD), dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pendapatan Daerah menurut Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan dikelompokkan atas : a) PAD, yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD pada umumnya terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang Sah; b) Dana Perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari dana penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan

kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan Daerah. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; c) Lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi Hibah, Dana Darurat, DBH Pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota, Dana Penyesuaian dan Otsus, serta Bantuan Keuangan dari provinsi atau dari pemda lainnya.

Dari berbagai komponen Pendapatan Daerah, sumber utama penerimaan Daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok. Hal ini sebagai pertanda bahwa perlu segera dilakukan upaya-upaya terobosan untuk mencari sumber-sumber alternatif pendapatan lainnya yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi sumber penerimaan daerah, sehingga mengurangi ketergantungan terhadap penerimaan dari pajak daerah yang bersifat *“limitative”*. Hal yang sama juga terjadi pada penerimaan dana perimbangan yang menunjukkan kecenderungan menurun. Hal ini, antara lain disebabkan oleh hilangnya potensi komponen Dana Bagi Hasil Pajak bersumber dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan yang diserahkan kepada Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan serta prospek perekonomian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana telah diuraikan pada sub bab sebelumnya, maka dapat disajikan analisa dan proyeksi sumber-sumber pendapatan daerah sebagaimana tertuang di dalam tabel Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah pada Tabel III.12 berikut ini.



**Tabel III.12**

Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 s.d tahun 2020

NO	Uraian	Jumlah			
		Realisasi Tahun 2017 (N-2)	Target 2018 (N-1)	Proyeksi / Target 2019 (N)	Proyeksi / Target 2020 (N+1)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan asli daerah</b>	<b>737.192.092.935,16</b>	<b>776.196.230.613,87</b>	<b>807.979.195.742,98</b>	<b>803.227.198.735,00</b>
1.1.1	Pajak daerah	578.237.062.209,57	649.190.101.400,00	703.658.305.512,35	650.149.561.530,00
1.1.2	Retribusi daerah	19.409.736.914,87	23.810.905.014,87	20.127.100.000,00	28.616.192.926,00
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	8.500.000.000,00	8.500.000.000,00	5.500.000.000,00	8.925.000.000,00
1.1.4	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	131.045.293.810,72	94.695.224.199,00	78.693.99..230,23	96.585.478.203,00
<b>1.2</b>	<b>Dana perimbangan</b>	<b>1.666.665.913.570,00</b>	<b>1.684.392.043.000,00</b>	<b>1.236.625.904.000,00</b>	<b>1.206.400.785.233,00</b>
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak	175.828.126.000,00	187.759.686.000,00	187.759.686.000,00	177.088.605.533,00
1.2.2	Dana alokasi umum	1.035.119.230.570,00	1.018.673.218.000,00	1.018.673.218.000,00	1.029.312.179.700,00
1.2.3	Dana alokasi khusus	455.718.557.000,00	477.959.139.000,00	30.193.000.000,00	-
<b>1.3</b>	<b>Lain-lain pendapatan daerah yang sah</b>	<b>30.000.000.000,00</b>	<b>30.000.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>17.850.000.000,00</b>
1.3.1	Hibah	-	-	-	-
1.3.2	Dana darurat	-	-	-	-
1.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	-	-	-
1.3.4	Sumbangan Pihak Ketiga	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	-	17.850.000.000
1.3.5	Pendapatan Lainnya (sumbangan pihak ketiga)	-	-	-	-
	<b>Jumlah Pendapatan Daerah</b>	<b>2.433.858.006.505,16</b>	<b>2.490.588.273.613,87</b>	<b>2.044.605.299.742,98</b>	<b>2.027.477.983.968,04</b>



### **3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Kebijakan keuangan daerah meliputi kebijakan peningkatan pendapatan daerah dan kebijakan belanja daerah. Dalam rangka meningkatkan kinerja pendapatan daerah, kinerja belanja daerah dan kinerja pembiayaan daerah, kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana diuraikan berikut ini.

#### **3.2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah**

Dalam rangka menggali dan menghimpun potensi pendapatan daerah, kebijakan pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2019 diarahkan melalui optimalisasi sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah seperti pajak dan retribusi daerah, pendayagunaan aset daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; peningkatan dana perimbangan dari Dana Alokasi Umum dan bagi hasil pajak, bukan pajak serta peningkatan kerjasama Pemerintah dan Swasta.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah dilakukan dengan cara :

- 1) Memperluas basis penerimaan antara lain yaitu dengan mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan;
- 2) Memperkuat proses pemungutan dengan mempercepat penyusunan Peraturan-peraturan Daerah, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM yang melaksanakan pemungutan dan pengelolaan pajak dan retribusi tersebut.
- 3) Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
- 4) Meningkatkan pengawasan dengan melakukan pemeriksaan secara insidentil dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pembayar pajak;
- 5) Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan dengan memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.
- 6) Meningkatkan peran dan fungsi UPT, UPPD dan Balai Penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan.
- 7) Meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan daerah.

Adapun kebijakan untuk meningkatkan Dana Perimbangan sebagai upaya memperkuat kapasitas fiskal daerah dilakukan dengan cara :

- 1) Mengoptimalkan penerimaan dari : Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21, Pajak Ekspor, dan PPh Badan;
- 2) Meningkatkan akurasi data Sumber Daya Alam sebagai dasar perhitungan Bagi Hasil dalam Dana Perimbangan;

3) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota.

Dalam rangka pencapaian upaya peningkatan pendapatan daerah tersebut, beberapa strategi yang harus diimplementasikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain adalah :

1) Strategi Pencapaian Target Peningkatan PAD:

- a) Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan;
- b) Pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
- c) Pemenuhan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
- d) Melaksanakan pelayanan secara khusus untuk lebih memperhatikan masyarakat pembayar pajak, serta memberikan kemudahan masyarakat dalam membayar pajak melalui *drivethru*, Gerai Samsat dan Samsat Mobile, layanan SMS, dan pengembangan *SamsatOutlet*;
- e) Mengembangkan penerapan standar pelayanan kepuasan publik di beberapa Kantor Bersama;
- f) Penyebarluasan informasi dan program sosialisasi di bidang Pendapatan Daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat;
- g) Revitalisasi BUMD melalui berbagai upaya agar dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah, serta mengoptimalkan peran Badan Pengawas, agar BUMD berjalan sesuai dengan peraturan;
- h) Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
- i) Melakukan pembinaan secara teknis fungsional dalam upaya peningkatan fungsi dan peran PD sebagai unit kerja penghasil di bidang Pendapatan Daerah;
- j) Melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan pada tataran kebijakan, dengan POLRI dan Kabupaten/Kota termasuk dengan daerah perbatasan, dalam operasional pemungutan dan pelayanan Pendapatan Daerah, serta mengembangkan sinergitas pelaksanaan tugas dengan PD penghasil.

2) Strategi Pencapaian Target Dana Perimbangan:

- a) Sosialisasi secara terus menerus mengenai pungutan Pajak Penghasilan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak;
- b) Peningkatan akurasi data potensi baik potensi pajak maupun potensi sumber daya alam bekerja sama dengan Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak sebagai dasar perhitungan Bagi Hasil.

- c) Peningkatan keterlibatan Pemerintah Daerah dalam perhitungan lifting migas dan perhitungan sumber daya alam lainnya agar memperoleh proporsi pembagian yang sesuai dengan potensi;
- d) Peningkatan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian teknis, Badan Anggaran DPR RI dan DPD RI untuk mengupayakan peningkatan besaran Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, DAU, dan DAK.

### 3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah terlebih dahulu memprioritaskan alokasi belanja untuk pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain meliputi : belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, serta belanja barang dan jasa pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat diberikan sebagai pagu indikatif kepada setiap Perangkat Daerah (PD). Belanja penyelenggaraan pembangunan diprioritaskan untuk memenuhi kewajiban daerah dalam upaya melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja yang diukur berdasarkan pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Struktur belanja dalam APBD mengalami perubahan yang sebelumnya dikelompokkan menurut Belanja Aparatur dan Belanja Pelayanan Publik (Berdasarkan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002) berubah menjadi kelompok Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung (Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan juga Permendagri Nomor 59 Tahun 2007) dengan uraian sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja:
  - a) Belanja Pegawai berupa penyediaan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
  - b) Belanja bunga digunakan untuk pembayaran atas pinjaman Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat. Dalam Pemenuhan Pendanaan sejalan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya pengalokasian anggaran dalam APBD.
  - c) Belanja Hibah digunakan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka pemerintah daerah dapat melakukan pemberian hibah kepada instansi vertikal (seperti untuk kegiatan TMMD dan penyelenggaraan pemilukada yang dilaksanakan KPUD), dan instansi semipemerintah (PMI, KONI, dan Pramuka), pemberian hibah kepada pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, sepanjang dianggarkan dalam APBD. Pemberian hibah harus dilakukan secara selektif sesuai dengan urgensi dan kepentingan daerah serta kemampuan keuangan daerah, sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan urusan

wajib dan tugas-tugas pemerintahan daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat.

- d) Belanja Bantuan Sosial digunakan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, bantuan sosial diberikan kepada kelompok/anggota masyarakat yang dilakukan secara selektif/tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi.
  - e) Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kota atau pendapatan kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan belanja daerah yang dimiliki.
  - f) Belanja Bantuan Keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus seperti Program Satam Emas dari pemerintah daerah kepada pemerintah kabupaten/kota. Bantuan keuangan yang bersifat umum diberikan dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan bagi penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dapat dianggarkan dalam rangka untuk membantu capaian program prioritas pemerintah daerah yang dilaksanakan sesuai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
  - g) Belanja Tidak Terduga ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan perkiraan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta sifatnya tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program/kegiatan.
2. Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari :
- a) Belanja pegawai merupakan pengeluaran untuk honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan Perangkat Daerah.
  - b) Belanja barang dan jasa merupakan pengeluaran untuk pembelian/pengadaan barang yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan Perangkat Daerah.
  - c) Belanja modal merupakan pengeluaran untuk pengadaan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan membutuhkan biaya pemeliharaan untuk digunakan dalam kegiatan belanja investasi daerah.

Berdasarkan analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah, maka arah kebijakan yang terkait dengan belanja daerah adalah sebagaimana tertuang pada Tabel III.13.

**Tabel III.13**

Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 s.d Tahun 2020

NO	Uraian	Jumlah			
		Realisasi 2017 (N-2)	Proyeksi / Target 2018 (N-1)	Proyeksi / Target 2019 (N)	Proyeksi / Target 2020 (N+1)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>2.1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>1.426.029.877.299,96</b>	<b>1.641.780.174.964,33</b>	<b>1.232.012.228.161,92</b>	<b>1.644.609.584.506,13</b>
2.1.1	Belanja pegawai	669.619.558.349,36	679.784.535.748,41	702.147.724.299,00	746.186.798.794,97
2.1.2	Belanja bunga	-	-	-	-
2.1.3	Belanja subsidi	-	812.500.000,00	-	-
2.1.4	Belanja hibah	269.214.900.000,00	334.069.809.969,00	65.043.769.060,00	356.409.569.217,45
2.1.5	Belanja bantuan social	943.000.000,00	718.910.000,00	750.000.000,00	990.150.000,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada /Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa*	362.199.953.426,60	331.112.656.477,93	376.095.255.630,92	356.211.328.455,22
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi / Kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa*	116.755.422.524,00	287.998.044.172,00	85.475.479.172,00	180.755.446.380,60
2.1.8	Belanja tidak terduga	7.297.043.000,00	5.000.000.000,00	2.500.000.000,00	5.000.000.000,00
<b>2.2</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>1.220.520.155.935,26</b>	<b>1.358.219.825.035,67</b>	<b>1.124.961.390.870,00</b>	<b>1.467.889.624.742,37</b>
	<b>Jumlah Belanja Daerah</b>	<b>2.646.550.033.235,22</b>	<b>3.000.000.000.000,00</b>	<b>2.356.973.619.031,92</b>	<b>3.112.499.209.248,50</b>

Kebijakan belanja daerah tahun 2019 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, antara lain melalui :

- 1) Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan masyarakat. Esensi utama penggunaan dana APBD adalah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat oleh karena itu akan terus dilakukan peningkatan program-program yang berorientasi pada masyarakat dan berupaya melaksanakan realisasi belanja daerah tepat waktu dengan mendorong proses penetapan Perda APBD secara tepat waktu pula.
- 2) Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai sistem pelaporan yang makin akuntabel.
- 3) Mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sebesar 20% dari total belanja daerah (APBD) tahun 2019 dalam rangka peningkatan indeks pendidikan meliputi Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah (AMH dan RLS). Sesuai dengan UUD Tahun 1945 ayat (4) menyatakan “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja Negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional” Selain itu, UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 49 ayat (1) menyatakan “Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 % dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20 % dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- 4) Mengalokasikan anggaran untuk kesehatan sebesar 10% sesuai perintah UU Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 171 ayat (2) menyatakan:”Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji”, guna peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan.
- 5) Mengalokasikan kebutuhan belanja *fixed cost*, *regular cost*, dan *variable cost* secara terukur dan terarah, yaitu:
  - a) Pemenuhan kebutuhan dasar dalam menjamin keberlangsungan operasional kantor (biaya listrik, telepon, air bersih, BBM, internet, dan perawatan mobil);
  - b) Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan TUPOKSI Perangkat Daerah, yang meliputi kegiatan koordinasi, fasilitasi, konsultasi, sosialisasi, Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian & evaluasi;
  - c) Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program-program pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan Perangkat Daerah,
  - d) program/kegiatan yang telah menjadi komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (*committed budget*).
- 6) Meningkatkan alokasi anggaran yang makin diorientasikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 7) Penggunaan anggaran berbasis pada prioritas pembangunan dalam penentuan anggaran belanja dengan visi dan misi 2017-2025, serta anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur.

### 3.2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar atau yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan tahun yang lalu, dari pinjaman, dan dari hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain dapat digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Kebijakan penerimaan pembiayaan melalui, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA).

Pengeluaran pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Arah kebijakan penerimaan pembiayaan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 sebagaimana yang tergambar pada Tabel III.14, diarahkan pada :

- 1) Meningkatkan pembentukan dana cadangan untuk mengantisipasi apabila terjadi kejadian luar biasa pada Tahun 2019;
- 2) Menggunakan SiLPA untuk pembayaran pembentukan dana cadangan;
- 3) SiLPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran.
- 4) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

Tabel III.14

Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun 2016 s.d Tahun 2020

NO	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Jumlah			
		Realisasi Tahun 2017 (N-2)	Target 2018 (N-1)	Proyeksi/Target 2019 (N)	Proyeksi / Target 2020 (N+1)
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>3.1</b>	<b>Penerimaan pembiayaan</b>	<b>337.693.794.849,61</b>	<b>449.980.153.230,77</b>	<b>337.368.319.288,95</b>	<b>299.448.978.141</b>
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	337.693.794.849,61	109.638.515.332,00	211.010.958.289,38	299.448.978.141
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah	-	-	126.357.360.999,57	-
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	-	-	-	-
3.1.6	Penerimaan piutang daerah	-	-	-	-
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>337.693.794.849,61</b>	<b>217.692.026.730,06</b>	<b>337.368.319.288,95</b>	<b>299.448.978.141</b>
<b>3.2</b>	<b>Pengeluaran pembiayaan</b>	-	-	<b>25.000.000.000,00</b>	-
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	-	-	-	-
3.2.2	Penyertaan modal (Investasi) daerah	-	5.000.000.000,00	25.000.000.000,00	-
3.2.3	Pembayaran pokok utang	-	-	-	-
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah	-	-	-	-
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	-	-	<b>25.000.000.000,00</b>	-
	<b>Jumlah Pembiayaan Netto</b>	<b>337.693.794.849,61</b>	<b>212.692.026.730,06</b>	<b>312.368.319.288,95</b>	<b>299.448.978.141</b>
<b>3.3</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)</b>	<b>337.693.794.849,61</b>	<b>109.638.515.332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.448.978.141</b>



An orange scroll banner with a dark orange border and decorative scroll ends on the left and right sides.

## **BAB IV**

### **SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

# BAB IV

## SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

### 4.1. TEMA, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

#### 4.1.1 Tema Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2019

Tema Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 ditentukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025

Pembangunan Daerah Tahun 2019 adalah bagian dari tahap ke III (2017–2022) Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025. Prioritas pembangunan pada tahap ke III ini adalah **meningkatnya ekonomi daerah dan terpenuhinya kapasitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)**.

**Gambar IV.1**

Posisi Dokumen RKPD Tahun 2019 Terhadap RPJPD Tahun 2005 – 2025 dan RPJMD Tahun 2017 – 2022



b. Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi (RTRWP) Tahun 2014-2034

Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034, tujuan penataan ruang provinsi yaitu **"Mewujudkan Tata Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Terpadu, Berimbang dan Berkeadilan berbasis Agro-Bahari untuk menunjang Pariwisata serta Pengendalian Wilayah Pertambangan untuk menjamin Pembangunan yang Berkelanjutan"** maka pembangunan Daerah tahun 2017 dilaksanakan dalam rangka:

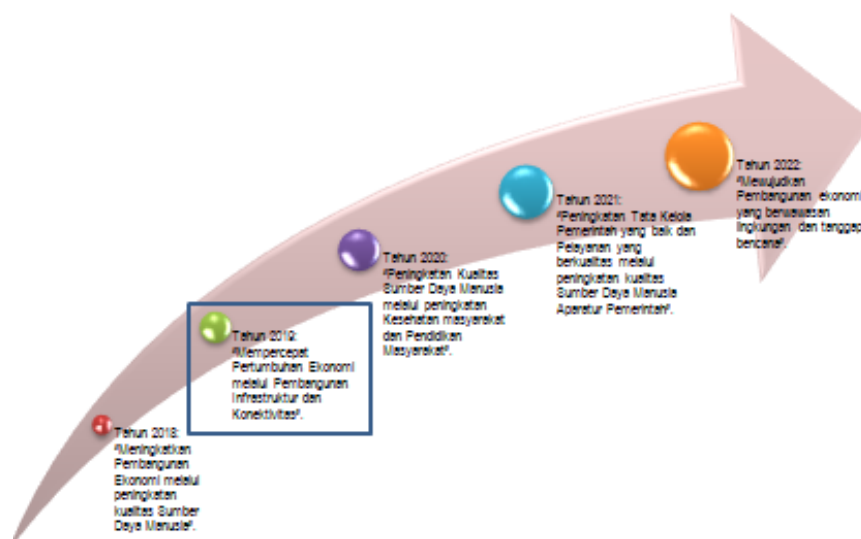
1. Pemantapan Sistem Perkotaan
2. Perwujudan Sistem Prasarana Wilayah
3. Perwujudan Rencana Pola Ruang
4. Perwujudan Kawasan Strategis

c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022

Tahun 2019 merupakan tahun Kedua dari RPJMD Tahun 2017-2022. Sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD tersebut tema prioritas pembangunan tahun 2019 adalah **"Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi melalui Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas"**.

**Gambar IV.2**

Tema Prioritas Pembangunan Tahun 2019 dalam dokumen RPJMD 2017-2022



d. Dinamika dan Realita Kondisi Umum Daerah

Dinamika dan realita kondisi umum daerah tercakup dalam hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2017 dan capaian kinerja tahun-tahun yang direncanakan dalam RPJMD periode sebelumnya (sebagaimana diuraikan pada bab II). Kesenjangan antara realita dan capaian menjadi permasalahan yang kemudian dirumuskan sebagai isu strategis dan masalah mendesak yang harus segera ditangani pada tahun 2019 sebagai

pertimbangan dalam penentuan tema RKPD tahun 2019. Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

Isu Ekonomi

- Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang masih rendah
- Tingkat pengangguran lebih tinggi dari laju pertumbuhan ekonomi
- Kemandirian Pangan Rendah
- Tingginya tingkat inflasi
- Belum optimalnya pengembangan Potensi Unggulan Daerah sektor Pariwisata, Perkebunan, Perikanan dan Pertambangan yang berkelanjutan
- Tingkat Investasi Rendah

Isu Infrastruktur dan Konektivitas

- Potensi sumber daya di kawasan strategis belum terbangun dengan baik
- Kualitas infrastruktur dan konektivitas masih terbatas

Isu Sumber Daya Manusia

- Tingkat pendidikan SDM masih rendah

Isu Kesehatan

- Mutu pelayanan kesehatan masih terbatas

Isu Tata Kelola Pemerintahan dan Pembangunan Demokrasi

- Reformasi birokrasi dan pelayanan publik belum optimal
- Pelaksanaan Pilpres dan Pemilu Legislatif

Isu Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana

- Rehabilitasi dan pengendalian lingkungan hidup
- Rawan bencana

e. Rencana Kerja Pemerintah RI Tahun 2019

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019 merupakan penjabaran tahun kelima atau tahun terakhir dalam pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan. Penyusunan RKP merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan terutama, oleh Pemerintah, dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel untuk mewujudkan visi misi Presiden Republik Indonesia. Sampai dengan Rancangan Awal RKPD ini disusun Rancangan RKP 2019 mengangkat tema **“Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas”**.

Penyusunan RKP dengan prinsip *money follows program* menggunakan pendekatan Holistik-Tematik, Integratif, dan Spasial dengan penajaman substansi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi. Pendekatan secara holistik, tematik, terintegratif, dan spasial dalam perencanaan pembangunan diharapkan mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan.

- Holistik-Tematik: untuk mencapai sasaran prioritas nasional, perlu koordinasi multi kementerian/lembaga.

- Integratif: pencapaian sasaran prioritas nasional perlu dilakukan secara terintegrasi dari berbagai sektor pembangunan dan jenjang pemerintahan.
- Spasial: perlu sinkronisasi lokasi pembangunan untuk meningkatkan manfaat dan daya ungkit pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat.

RKP menjabarkan lebih rinci Prioritas Nasional (PN) ke dalam Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP), dan Proyek Prioritas Nasional (ProPN).

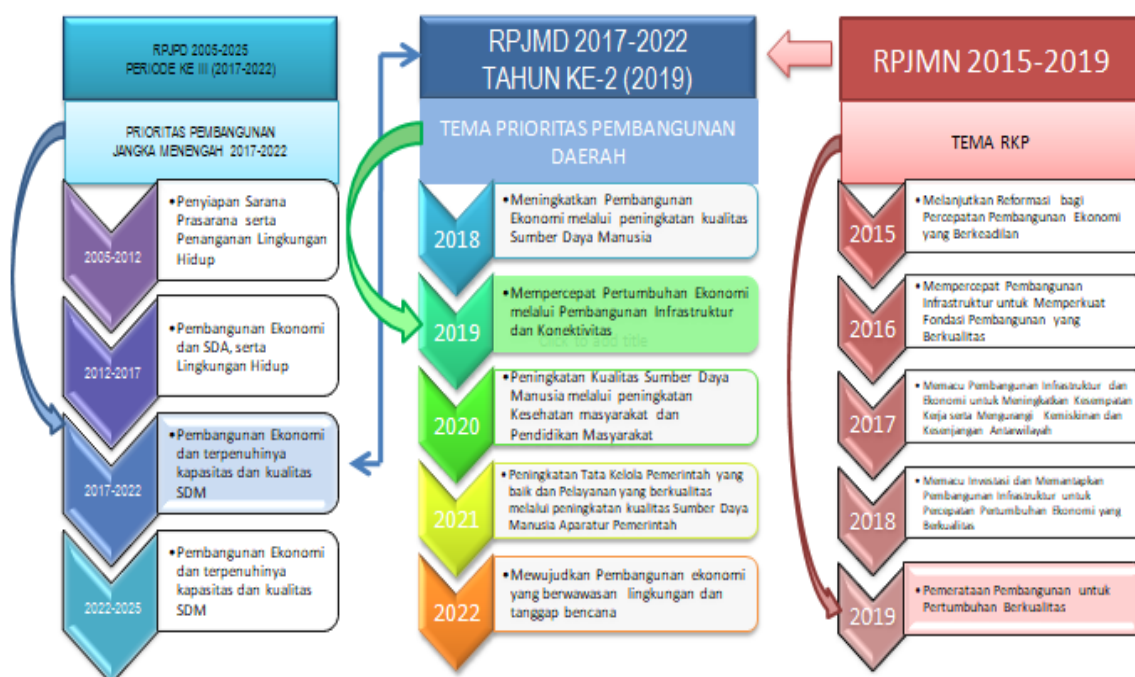
Dengan mempertimbangan hal-hal di atas dan terutama dengan telah dimuatnya tema prioritas pembangunan tahun 2019 dalam RPJMD 2017-2022 maka ditetapkan tema pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2019 adalah “**Mempercepat Pertumbuhan Ekonomi melalui Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas**”.

Makna tema:

- 1) **Pertumbuhan** menunjukkan bahwa pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu.
- 2) **Ekonomi** adalah konsep pembangunan yang dilakukan melalui kebijakan dan upaya pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan, pengembangan potensi ekonomi yang berdampak kuat pada pembangunan agri-bahari, seperti perkebunan, perikanan, pariwisata, serta pengembangan industri pengolahan yang dapat memberikan nilai tambah pada hasil produk unggulan dengan mengedepankan azas pemerataan dan memiliki kesempatan yang sama bagi seluruh wilayah untuk maju dan berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki, terutama untuk percepatan pembangunan dan pertumbuhan sentra - sentra ekonomi, wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh (zona pertumbuhan) termasuk upaya penanganan dan penataan kembali kerusakan lingkungan hidup pasca pertambangan)
- 3) **Pembangunan Infrastruktur** dimaknai sebagai upaya melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam proses pembangunan dan adanya keterkaitan yang erat, intensif dan menyeluruh antarlevel pemerintahan melalui peningkatan ketersediaan infrastruktur atau sarana-prasarana yang memadai di perkotaan dan perdesaan.
- 4) **Konektivitas** dimaknai sebagai keterhubungan antar wilayah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung.

**Gambar IV.3**

Posisi Tema Pembangunan RKP Tahun 2019 Terhadap Tema RKP dan RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



#### 4.1.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2019

Sebagai upaya untuk mewujudkan tercapainya visi misi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung periode 2017-2022, maka pembangunan daerah tahun 2019 difokuskan untuk mencapai tujuan pembangunan: meningkatnya pertumbuhan ekonomi, meningkatnya pendapatan pemerintah dan masyarakat, serta meningkatnya infrastruktur dan konektivitas mendukung pengembangan potensi daerah. Hubungan antara visi-misi dan tujuan-sasaran pembangunan 2017-2022 disajikan pada Tabel IV.1.

**Tabel IV.1**

Hubungan Visi-Misi dan Tujuan-Sasaran Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022

**Visi RPJMD 2017-2022: “Babel Sejahtera, Provinsi Maju yang Unggul di Bidang Inovasi Agropolitan dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat Berbasis Teknologi”.**

No.	Tujuan	Sasaran
1	2	3
<b>Misi I. Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah</b>		
1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	1 Meningkatkan produksi sub sektor pertanian, peternakan dan jasa perkebunan
		2 Meningkatkan produksi sub sektor perikanan
		3 Meningkatkan Kunjungan Wisatawan
		4 Meningkatkan produksi sektor pertambangan

No.	Tujuan	Sasaran
1	2	3
		5 Meningkatkan pembangunan berbasis industri
		6 Terwujudnya kemandirian energi
2	Meningkatnya pendapatan Pemerintah dan masyarakat	1 Meningkatkan belanja pemerintah Daerah
		2 Menurunnya angka Pengangguran
		3 Menurunnya angka kemiskinan
		4 Menurunnya angka Inflasi
		5 Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk
<b>Misi II.Mewujudkan infrastruktur dan konektifitas daerah yang berkualitas</b>		
3	Meningkatnya Infrastruktur dan konektivitas Daerah yang berkualitas	1 Meningkatkan Pemenuhan infrastruktur pengembangan potensi daerah;
		2 Meningkatkan pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat
		3 Meningkatkan konektivitas antar wilayah
<b>Misi III.Meningkatkan sumber daya manusia unggul dan handal</b>		
4	Meningkatnya Lama sekolah masyarakat	1 Meningkatkan pendidikan bagi masyarakat
<b>Misi IV.Meningkatkan kesehatan masyarakat</b>		
5	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	1. Meningkatkan kesehatan masyarakat
<b>Misi V.Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi</b>		
6	Terwujudnya reformasi birokrasi yang berkualitas	1 Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel
		2 Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien
		3 Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas
7	Terwujudnya pembangunan demokrasi	1 Meningkatkan Kebebasan sipil, hak politik dan lembaga demokrasi masyarakat
<b>Misi VI . Pengendalian bencana dankualitas lingkungan hidup</b>		
8	Meningkatnya tata kelola kebencanaan	1 Meningkatkan kapasitas terhadap penanggulangan bencana
9	Meningkatnya tata kelola lingkungan hidup	1 Meningkatkan Pengendalian Lingkungan Hidup

Berdasarkan Tabel IV.1 di atas, diketahui bahwa untuk mewujudkan visi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung periode 2017-2022 akan dilaksanakan melalui 6 (enam) misi yang diharapkan dapat mencapai 9 (sembilan) tujuan yang ditandai dengan 21 sasaran. Indikasi keberhasilan dari pelaksanaan misi dapat dilihat dari target capaian indikator sasaran pembangunan. Adapun target sasaran makro pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disandingkan dengan target Nasional yang akan dicapai pada Tahun 2018 dan 2019 dapat dilihat pada Tabel IV.2.

**Tabel IV.2**  
Target Tujuan dan Sasaran Pembangunan  
Nasional dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 dan 2019

Indikator	Tahun 2018		Tahun 2019						
	Nasional	Babel	Nasional		Babel				
	RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018		RPJMN 2015-2019	Bappenas, 24 Januari 2018	RPJMN 2015-2019	RPJPD-P 2005-2025	RPJMD 2017-2022	RKPD 2019	Proyeksi, Bappenas 24 Januari 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)
Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,1	6,26	8,0	5,4-5,8	7,5	5,25	4,40	4,60	5,34
Tingkat Kemiskinan %	9,95	4,42	7,0-8,0	7,0-8,0	2,7	-	5,15	5,20	-
Tingkat Pengangguran %	4,6-5,1	4,17	4,0-5,0	4,0-5,0	2,7	-	5,6	5,6	-
Gini Ratio	0,35	0,27	0,36	0,36	-	0,258	0,269	0,275	-
IPM	75,7	69,92	76,3	71,98	-	70,33	70,33	70,00	-
Laju Inflasi (%)	3,5	3,8	3,5	2,5-4,5	-	-	6,31	6,31	-

Target tujuan dan sasaran makro tersebut lebih lanjut diturunkan menjadi sasaran-sasaran prioritas daerah sebagaimana yang dijabarkan dalam dokumen RPJMD. Dari dokumen RPJMD diketahui sasaran dan target sasaran tahun 2019 yang akan dicapai, sebagaimana disajikan pada Tabel IV.3 dan IV.4.

**Tabel IV.3**  
Target Tujuan Tahun 2019

NO.	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	TARGET TAHUN 2019
1	2	3	4
1.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	1. Persentase Pertumbuhan PDRB	4,40
2.	Meningkatnya pendapatan Pemerintah dan masyarakat	2. Pengeluaran pemerintah perkapita, (dalam ribuan)	1.940
		3. Pendapatan perkapita, (dalam ribuan)	53.015
3.	Meningkatnya Infrastruktur dan konektivitas daerah yang berkualitas	4. Pertumbuhan subsektor jasa konstruksi	7,00
4.	Meningkatnya Lama sekolah masyarakat	5. Rata-rata lama sekolah, (Rata-rata lama sekolah laki-laki, rata-rata lama sekolah perempuan)	7,83
			L=7,94
			P=6,98
5.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	6. Angka Usia Harapan Hidup, (Angka Usia Harapan Hidup Laki-laki, Angka Usia Harapan Hidup Perempuan)	70,16
			L=68,37
			P=72,12
6.	Terwujudnya reformasi birokrasi yang berkualitas	7. Indeks Reformasi Birokrasi	65,39



NO.	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	TARGET TAHUN 2019
1	2	3	4
7.	Terwujudnya pembangunan demokrasi	8. Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi	75,24
8.	Meningkatnya tata kelola kebencanaan	9. Indeks Resiko Bencana	156
9.	Meningkatnya tata kelola lingkungan hidup	10. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	59,32

**Tabel IV.4**  
Target Sasaran Tahun 2019

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET TAHUN 2019
1	2	3	4
1.	Meningkatnya produksi sub sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian	1. Persentase Pertumbuhan Produksi sub sektor pertanian, peternakan, dan jasa perkebunan	4,90
2.	Meningkatnya produksi Sub Sektor perikanan	2. Persentase Pertumbuhan Produksi sub sektor perikanan	3,85
3.	Meningkatnya pengembangan Pembangunan pariwisata	3. jumlah kunjungan wisatawan domestik	389.009
4.	Meningkatnya Produksi sektor pertambangan	4. Persentase Pertumbuhan Produksi sektor pertambangan dan penggalian	0.57
5.	Meningkatnya pembangunan berbasis industri	5. Persentase Pertumbuhan Produksi sektor industri pengolahan	2.65
6.	Terwujudnya kemandirian energi	6. Persentase Pertumbuhan Produksi sub sektor ketenagalistrikan	12.83
7.	Meningkatnya belanja pemerintah Daerah	7. Persentase pertumbuhan pengeluaran Pemerintah daerah	5.65
8.	Menurunnya angka Pengangguran	8. Persentase Angka Pengangguran	5.60
9.	Menurunnya angka kemiskinan	9. Persentase AngkaKemiskinan	5.15
10.	Menurunnya angka Inflasi	10. Persentase Tingkat Inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	6.31
11.	Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk	11. Persentase laju pertumbuhan Penduduk	2,09
12.	Meningkatkan pemenuhan infrastruktur pengembangan potensi daerah	12. Terbangunnya Daerah irigasi (ha)	1.135
		13. Ketersediaan air baku (m3)	N,A
13.	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat	14. Persentase lingkungan yang tertata	34
		15. Persentase bangunan yang tertata	38
		16. Persentase desa yang terlayani jaringan telekomunikasi	85
14.	Meningkatkan konektivitas antar wilayah	17. Persentase kunjungan kapal di pelabuhan laut	0.18
		18. Persentase armada pengangkutan	0.34
		19. Persentase jalan kondisi mantap	94.50
15.	Meningkatnya kesempatan pendidikan bagi masyarakat	20. Angka harapan lama sekolah , (Angka harapan lama sekolah laki-laki, Angka harapan lama sekolah perempuan)	11.89 L=12.37 P=12.46

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET TAHUN 2019
1	2	3	4
16.	Peningkatan pembangunan kesehatan masyarakat	21. Angka Kesehatan Masyarakat	77,58
17.	Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	22. Opini Audit BPK Atas Laporan Keuangan	WTP
		23. Tingkat kematangan Maturitas SPIP	3
		24. Nilai Akuntabilitas Kinerja Provinsi Meningkat	70
		25. Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Meningkat	2,78
18.	Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien	26. Nilai rata-rata delapan area perubahan	35
		27. Indeks Profesionalitas ASN	67.5
19.	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas	28. Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	5
		29. Rata-Rata Tingkat Kepuasan Masyarakat	B
20.	Meningkatnya Kebebasan sipil, hak politik dan lembaga demokrasi masyarakat	30. Skor aspek kebebasan sipil	87,76
		31. Skor aspek hak-hak politik	81,76
		32. Skor aspek lembaga demokrasi	80,33
21.	Meningkatkan kapasitas terhadap penanggulangan bencana	33. Indeks kapasitas bencana daerah	0,20
22.	Peningkatan Pengendalian Lingkungan Hidup	34. Indeks kualitas air sungai	67,80
		35. Indeks kualitas udara	87,86
		36. Indeks tutupan lahan	38,26
		37. Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	7.280,85

Sumber: RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022

#### 4.1.3. Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2019

Untuk mencapai sasaran pembangunan tahun 2019 maka Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2019 disusun berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran Pembangunan Nasional. Hubungan antara sasaran pembangunan 2017-2022 dengan Strategi dan arah kebijakan disajikan pada Tabel IV.4 berikut ini.

**Tabel IV.5**  
Hubungan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019

No.	Sasaran	Indikator sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
<b>Misi I. Meningkatkan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah</b>				
1	Meningkatnya produksi sub	Persentase Pertumbuhan	1 Meningkatkan pengendalian dan	1 Penyusunan kebijakan dan implementasi

No.	Sasaran	Indikator sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
	sektor pertanian, peternakan dan jasa perkebunan	Produksi sub sektor pertanian, peternakan, dan jasa perkebunaan	pengawasan terhadap wilayah pertanian berkelanjutan	perlindungan lahan pertanian berkelanjutan
			2 Meningkatkan produksi dan pengelolaan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan Kehutanan	1 Peningkatan sarana dan prasarana dan nilai tambah serta produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan Kehutanan
				2 Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing sektor pertanian
				3 Pembinaan hubungan industri sektor pertanian
				4 Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing sektor pertanian
				5 Pengembangan produk pertanian, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi sektor pertanian di daerah
				6 Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dibidang pertanian
			3 Mengembangkan kawasan berbasis pertanian, perkebunan dan peternakan	1 Pengembangan Kawasan Strategis KTM Batu Betumpang
				2 Pengembangan Kawasan Strategis Kota Terpadu Mandiri Gantung
				3 Pengembangan Kawasan Strategis Kota Terpadu Mandiri Gantung
				4 Pengembangan Kawasan Budidaya Pertanian dan peternakan

No.	Sasaran	Indikator sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
2	Meningkatnya produksi sub sektor perikanan	Persentase Pertumbuhan Produksi sub sektor perikanan	1 Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	1 Pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang laut serta penegakan perundang-undangan kelautan dan perikanan
			2 Meningkatkan produksi dan pengelolaan hasil perikanan tangkap serta perikanan budidaya	2 Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing sektor Kelautan dan Perikanan
				3 Peningkatan Produksi, Kualitas dan produktifitas tenaga kerja sektor Kelautan dan perikanan
				4 Pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja sektor kelautan dan perikanan
				5 Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing sektor kelautan dan perikanan
				6 Pengembangan produk Kelautan dan perikanan, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di sektor kelautan dan perikanan
			3 Mengembangkan kawasan sentra Kelautan dan Perikanan	1 Pengembangan Kawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok
				2 Pengembangan Kawasan Strategis etalase Perikanan Selat Nasik
				3 Pengembangan Kawasan Strategis Industri Perikanan Tanjung Binga
				4 Pengembangan Kawasan Pedesaan Minapolitan Manggar

No.	Sasaran	Indikator sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
3	Meningkatnya pengembangan pembangunan pariwisata	Tingkat kunjungan wisatawan	1 Meningkatkan sinergisitas pembangunan lintas sektor dalam mengembangkan pembangunan pariwisata	<p>1 Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, ekonomi kreatif, peran serta masyarakat dan kelembagaan pariwisata</p> <p>2 Peningkatan infrastruktur, sarana dan prasarana pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata.</p> <p>3 Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing kepariwisataan daerah</p> <p>4 Peningkatan kualitas, partisipasi dan prestasi pemuda di berbagai bidang pembangunan, dan peningkatan pengelolaan ke olah raga serta mengembangkan peran serta kebudayaan dalam mendukung pembangunan kepariwisataa</p> <p>5 Peningkatan kualitas, partisipasi dan prestasi pemuda di berbagai bidang pembangunan, dan peningkatan pengelolaan ke olah raga serta mengembangkan peran serta kebudayaan dalam mendukung pembangunan kepariwisataa</p> <p>6 Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing kepariwisataan</p> <p>7 Pengembangan pariwisata daerah, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antar sektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di bidang pariwisata</p>

No.	Sasaran	Indikator sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
			2 Mengembangkan kawasan pendukung pembangunan pariwisata	1 Pengembangan Kawasan pelabuhan penyeberangan Tanjung Kalian
				2 Pengembangan Kawasan strategis Pelabuhan ASDP Manggar – Ketapang
				3 Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Tanjung gunung dan kawasan lintas timur Pulau Bangka
				4 Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan ekonomi khusus (KEK) Tanjung kelayang
				5 Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan Kota Tua Mentok
				6 Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan gunung Permisan Simpang Rimba
				7 Pengembangan Kawasan peruntukan Pariwisata Museum Nasional Maritim Belitung
				8 Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Gunung Menumbing
			3 Mengembangkan pulau-pulau kecil dan daerah perbatasan	1 Pengembangan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan pulau sumatera
				2 Pengembangan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil
4	Meningkatnya produksi sektor pertambangan	Persentase Pertumbuhan Produksi sektor pertambangan dan penggalian	1 Meningkatkan hasil produksi pertambangan dan nilai tambah pertambangan yang berwawasan lingkungan	1 Peningkatan tata kelola dan nilai tambah produk sumber daya mineral
				2 Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing Produk Sumber daya mineral

No.	Sasaran	Indikator sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
				3 Pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja sektor sumber daya mineral
				4 Pengembangan produk sumber daya mineral, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di sektor sumber daya mineral
5	Meningkatnya pembangunan berbasis industri	Persentase Pertumbuhan Produksi sektor industri pengolahan	1 Mengembangkan Kawasan industri berbasis potensi daerah	1 Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular 2 Pengembangan Kawasan Strategis Industri Terpadu Air Kelik (KIAK) 3 Pengembangan Pelabuhan dan Kawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung Berikat 4 Pengembangan Kawasan Strategis Industri Sadai 5 Pengembangan Kawasan strategis Industri Terpadu di Teluk Klabat Belinyu 6 Peningkatan Pembangunan Kawasan Industri
6	Terwujudnya kemandirian energi	Persentase Pertumbuhan Produksi sub sektor ketenagalistrikan	1 Meningkatkan produksi dan pasokan energi listrik di daerah	1 Pemenuhan Energi listrik untuk mendorong pengembangan industri berbasis potensi daerah serta peningkatan rasio elektrifikasi
7	Meningkatnya belanja pemerintah Daerah	Persentase pertumbuhan pengeluaran pemerintah daerah	1 Meningkatkan pendapatan asli daerah	1 Pemenuhan Energi listrik untuk mendorong pengembangan industri berbasis potensi daerah serta peningkatan rasio elektrifikasi
8	Menurunnya angka Pengangguran	Persentase Angka Pengangguran	1 Meningkatkan pembangunan yang dapat	1 Penciptaan peluang kesempatan kerja bagi pencari kerja

No.	Sasaran	Indikator sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
			menciptakan lapangan pekerjaan	2 Peningkatan kualitas hidup dan peran serta perempuan
9	Menurunnya angka kemiskinan	Persentase Angka Kemiskinan	1 Penanggulangan kemiskinan diarahkan pada penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar penduduk miskin secara bertahap dengan mengutamakan prinsip demokrasi, partisipasi, kesetaraan dan non diskriminasi serta peningkatan pendapatan penduduk miskin dan pengendalian tingkat harga komoditas pangan dan non pangan dalam menurunkan angka kemiskinan	1 Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin
				2 Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin
10	Menurunnya angka Inflasi	Angka Inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap komoditas penyumbang inflasi	1 Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin
				2 Mengurangi ketergantungan pasokan dari luar terhadap komoditas penyumbang inflasi
11	Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju pertumbuhan penduduk	1 Mengendalikan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk	1 Pengendalian tingkat kelahiran penduduk dan perpindahan penduduk untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang
<b>Misi II. Mewujudkan infrastruktur dan konektifitas daerah yang berkualitas</b>				
12	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur pengembangan potensi daerah	Persentase Luas Daerah irigasi (ha)	1 Meningkatkan ketersediaan dan berfungsinya infrastruktur pertanian	1 Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan jaringan irigasi serta cetak sawah pertanian yang modern
		Ketersediaan air baku (m3)	1 Meningkatkan ketersediaan dan berfungsinya infrastruktur air baku	1 Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur air baku



No.	Sasaran	Indikator sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
13	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat	Persentase akses jalan lingkungan yang memadai	1 Meningkatkan ketersediaan jalan lingkungan yang layak bagi masyarakat	1 Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur dasar yang layak bagi masyarakat
		Persentase kawasan permukiman yang tertata	1 Meningkatkan penataan kawasan permukiman	1 Peningkatan penataan permukiman pada kawasan strategis Provinsi
		Persentase Desa yang Terlayani Jaringan Telekomunikasi	1 Meningkatkan ketersediaan pelayanan jaringan telekomunikasi bagi masyarakat	1 Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi bagi masyarakat
14	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Persentase kunjungan kapal di pelabuhan laut	1 Meningkatkan dan mengembangkan konektivitas perhubungan laut	1 Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan pelabuhan serta sarana prasarana pendukung pelabuhan
		Persentase armada angkutan	1 Meningkatkan dan mengembangkan konektivitas perhubungan darat	1 Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan terminal serta sarana prasarana pendukung terminal
		Persentase jalan kondisi mantap	1 Meningkatkan aksesibilitas	1 Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan jalan dan jembatan
Misi III. Meningkatkan sumber daya manusia unggul dan handal				
15	Meningkatnya Pendidikan bagi Masyarakat	Angka harapan lama sekolah (Angka harapan lama sekolah, Angka harapan lama sekolah laki-laki, Angka harapan lama sekolah perempuan)	1 Meningkatkan partisipasi sekolah untuk masyarakat	1 peningkatan akses pelayanan pendidikan
			2 Meningkatkan Kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat	1 peningkatan mutu layanan pendidika
				2 Peningkatan relevansi pendidikan vokasi dalam mendukung pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal
				3 Peningkatan Pembangunan kultur masyarakat yang bertaqwa dan bermoral
Misi IV. Meningkatkan kesehatan masyarakat				
16	Meningkatkan kesehatan masyarakat	Angka Kesehatan Masyarakat	1 Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	1 Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan
				2 peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat

No.	Sasaran	Indikator sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
				3 peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat
				4 Meningkatkan Pengendalian Penyalahgunaan Napza
				5 Meningkatkan Pengendalian Penyalahgunaan Napza
Misi V. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi				
17	Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Opini Audit BPK atas Laporan Keuangan	1 Meningkatkan tata kelola aset dan laporan keuangan daerah	1 Peningkatan manajemen aset dan pencatatan pelaporan aset serta laporan realisasi anggaran
		Tingkat kapabilitas APIP	1 Meningkatkan tata kelola pengawasan	1 Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara transparan dan akuntabel
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Provinsi Meningkat	1 Meningkatkan kualitas manajemen pemerintah daerah berbasis kinerja	1 Peningkatan kesesuaian antar dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja
				2 Peningkatan efektivitas pelaksanaan urusan
			2 Meningkatkan tata kelola penataan peraturan perundang-undangan	1 Peningkatan Penataan peraturan perundang-undangan
			3 Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa	1 Peningkatan akses data dan informasi layanan pengadaan barang dan jasa
18	Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien	Nilai rata-rata delapan area perubahan	1 Meningkatkan faktor pengungkit dan faktor hasil pencapaian reformasi birokrasi	1 Peningkatan Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur
				2 Peningkatan Penguatan Sistem Manajemen Pemerintahan
		Indeks Profesionalitas ASN	2 Meningkatkan tata kelola manajemen SDM aparatur pemerintah daerah	1 Peningkatan kompetensi dan profesional aparatur
19	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki Pelayanan publik yang berkualitas	Rata-rata Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (KSM)	1 Meningkatkan kepuasan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik	1 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan memberikan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien

No.	Sasaran	Indikator sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
				berbasis teknologi informasi bagi masyarakat
		Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	1 Meningkatkan pelayanan pemerintah dan pelayanan publik yang efektif dan efisien	1 Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih serta pelayanan publik yang efektif dan efisien 2 Meningkatkan pelayanan pemerintah dan pelayanan publik yang efektif dan efisien 3 Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan pada peningkatan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas 4 Sistem pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial disusun, ditata, dan dikembangkan untuk memastikan dan memantapkan pemenuhan hak-hak masyarakat akan pelayanan dasar publik 5 Menekan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak 6 Menjamin hak anak dalam pembangunan
20	Meningkatnya Kebebasan sipil, hak politik dan lembaga demokrasi masyarakat	Skor aspek kebebasan sipil	1 Menciptakan iklim berdemokrasi yang kondusif	1 Peningkatan pemberian kesempatan Kebebasan sipil kepada masyarakat 2 Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan perda serta perlindungan masyarakat (Linmas)
		Skor aspek hak-hak politik	1 Meningkatkan partisipasi politik masyarakat	1 Peningkatan pelayanan terhadap Hak-hak politik masyarakat
		Skor aspek lembaga demokrasi	1 Meningkatkan pengembangan lembaga demokrasi	1 Peningkatan pemberdayaan Lembaga-Lembaga Demokrasi

No.	Sasaran	Indikator sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
<b>Misi VI . Pengendalian bencana dankualitas lingkungan hidup</b>				
21	Meningkatkan kapasitas terhadap penanggulangan bencana	Indeks kapasitas bencana daerah	1 Meningkatkan kemampuan pencegahan dan penanggulangan bencana melalui penambahan sarana, SDM dan Pelatihan	1 Peningkatan penyelenggaraan penanggulangan bencana
			2 Mengembangkan kawasan berbasis penanggulangan bencana	1 Pengembangan Pengelolaan kawasan rawan bencana alam
				2 Pengembangan Pengelolaan kawasan hilir daerah rawan bencana teluk bayur
22	Meningkatnya Kualitas Lingkungan	Indeks Kualitas Air Sungai	1 Meningkatkan kualitas air	1 Pengendalian kualitas air
		Indeks Udara	1 Meningkatkan kualitas udara	1 pengendalian kualitas udara
		Indeks Tutupan Lahan	1 Meningkatkan pengendalian dan pengawasan hutan	1 Peningkatan tutupan lahan
				2 Peningkatan tutupan lahan
		Indeks Gas Rumah Kaca (GRK)	1 meningkatkan pengendalian terhadap lingkungan	1 Peningkatan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
				2 Pengembangan TPA Regional

#### 4.1.4. Prioritas Pembangunan Daerah Dalam Mendukung Prioritas Pembangunan Nasional

Sebagaimana dimuat dalam Buku III (Agenda Pembangunan Wilayah) dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Prioritas Program Pembangunan sampai dengan tahun 2019 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

**Tabel IV.6**

Kegiatan Strategis Jangka Menengah Nasional di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

#### PERHUBUNGAN UDARA

1. Pengembangan Bandara H.A.S. Hananjoeddin
2. Pengembangan Bandara Depati Amir

#### PERHUBUNGAN LAUT

1. Pengembangan Pelabuhan Samudera Tj. Berikat – Bangka Tengah
2. Pengembangan Pelabuhan Munto – Pelabuhan Tj. Berikat (P. Bangka) Ruas Tj. Batu – Manggar (P. Belitung)
3. Pengembangan Pelabuhan Tanjung Pandan\* (menjadi entry point masuknya yacht)
4. Pengembangan Pelabuhan Tanjung Batu
5. Pengembangan Pelabuhan Tanjung Gudang
6. Pengembangan Pelabuhan Pangkal Sadai
7. Pengembangan Pelabuhan Pangkal Balam
8. Pengembangan Pelabuhan Manggar
9. Pengembangan Pelabuhan Tanjung Ular
10. Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Kelian

#### JALAN

1. Pembangunan Jalan Tanjung Gudang-Paritiga-Jebus-Ibul
  2. Pembangunan Jembatan Teluk Belinyu
  3. Pembangunan Jalan Tanjung Kelian – Petaling – Pangkalpinang
  4. Pembangunan Jalan Petaling – Namang – Toboali
  5. Pembangunan Jalan Koba – Lubuk Besar – Tanjung Berikat
- Pembangunan Jalan Mendukung KSPN Belitung

#### ASDP

1. Pengembangan Dermaga Penyeberangan P. Lepar
2. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Mendanau
3. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Tjg. Ru
4. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Manggar
5. Pengembangan Dermaga Penyeberangan Pulau Liat

#### KETENAGALISTRIKAN

1. PLTG/MG Bangka Peaker 100 MW
2. PLTG/MG Mobile PP Bangka (Air Anyir) 50 MW
3. PLTG/MG Belitung Peaker 30 MW
4. Pengembangan jaringan transmisi dan distribusi
5. Pembangunan PLTS di Pulau-Pulau Kecil
6. Pembangunan Instalasi Listrik di Pulau Karantina (P. Naduk – Belitung)

#### TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1. Pembangunan Serat Optik antar seluruh kabupaten/kota
2. Pengembangan transmisi penyiaran TVRI

#### SUMBER DAYA AIR

1. Pembangunan Bendung Pice Besar D.I. Selingsing di Kab. Belitung Timur
2. Rehab jaringan D.I. Selingsing PKT I Belitung Timur

#### PENDIDIKAN

1. Pembentukan Fak. Kedokteran Univ. Bangka Belitung
2. Pembentukan Prodi Ilmu Kelautan Univ. Bangka Belitung
3. Peningkatan status STAIN Abdurrahman Sidiq menjadi IAIN Abdurrahman Sidiq Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4. Pengembangan institusi riset yang fokus pada Pengelolaan Logam Tanah Jarang
5. Pengembangan Technopark berbasis Lada di Air Gegas (Bangka Selatan)
6. Pengembangan Technopark berbasis Bahan Tambang di Muntok (Bangka Barat)
7. Pendirian Sekolah Tinggi Pariwisata

#### KESEHATAN

1. Pengembangan RSUP Soekarno
2. Pengadaan sarana prasarana RSUD H. Mursidi Joedono, pengadaan sarana prasarana RSUD Depati Hamzah.

*Sumber: Buku III RPJMN 2015-2019*

Selanjutnya berdasarkan paparan berjudul “Prioritas Nasional dan Program Prioritas RKP 2019” oleh Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional pada Temu Konsultasi Triwulan I Bappenas-Bappeda di Jakarta tanggal 24 Januari 2018, telah disampaikan Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas dan Proyek Prioritas Nasional. Terdapat 5 (lima) Prioritas Nasional Tahun 2019, yaitu:

- 1) Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar;
- 2) Pengurangan kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman;
- 3) Peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri, dan jasa produktif;
- 4) Pemantapan ketahanan energi, pangan dan sumberdaya air, dan
- 5) Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan Pemilu.

Prioritas Nasional tersebut dijabarkan lebih lanjut dengan Program Prioritas, Kegiatan Prioritas dan Proyek Prioritas Nasional sebagaimana Tabel IV.4. Matrik ini menjadi salah satu acuan bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menetapkan program dan kegiatan yang selaras dengan rencana pembangunan nasional tahun 2019.

**Tabel IV.7**  
Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas dan Proyek Prioritas Nasional

No	Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Kegiatan (Proyek) Daerah	Program Daerah	Perangkat Daerah	Output/ Target	Pagu (APBD) (Rupiah)	Lokasi	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI PENGURANGAN KEMISKINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN DASAR								
	1 Percepatan Pengurangan Kemiskinan								
	a Penguatan pelaksanaan bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran	Bantuan Pendidikan bagi Siswa dan Mahasiswa Miskin	Kegiatan Pemberian Beasiswa Siswa SMA	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH ATAS	DINAS PENDIDIKAN	2,485 orang	2.982.000.000	7 Kab/Kota	
			Kegiatan Pemberian Beasiswa Siswa SMK	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KEJURUAN	DINAS PENDIDIKAN	1,809 Orang	2.170.800.000	7 Kab/Kota	
		Perluasan Bantuan Pangan Non Tunai							
		Penyaluran Bantuan PKH Secara Non Tunai	Pendampingan dan Dukungan Program Keluarga Harapan (PKH)	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	DINAS SOSIAL	45 keluarga	1.000.000.000	7 Kab/Kota	
		Subsidi listrik daya 450 VA dan 900 VA							
		Subsidi elpiji 3 kg							
		Dukungan TIK penyaluran non tunai (E-sosial)							

No	Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Kegiatan (Proyek) Daerah	Program Daerah	Perangkat Daerah	Output/ Target	Pagu (APBD) (Rupiah)	Lokasi	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	b Penguatan sistem jaminan sosial .	Penguatan tata kelola Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Kesehatan dan harmonisasi SJSN Ketenagakerjaan	Pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN	DINAS KESEHATAN	59.926 peserta	19.263.583.086	7 Kab/Kota	
		Perluasan cakupan penerima Jaminan Kesehatan Nasional dan Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan							
	c Penguatan literasi untuk . kesejahteraan	Literasi informasi terapan dan inklusif							
		Pendampingan masyarakat untuk literasi sosial	Kegiatan Pengembangan Minat dan Budaya Baca	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN PUSTAKA DAN LAYANAN PERPUSTAKAAN	DKPUS	1060 orang	528.750.000	7 Kab/Kota	
		Pemerataan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial							
	d Pelaksanaan reforma agraria .	Penguatan Kerangka Regulasi dan Penyelesaian Konflik Agraria							
		Penataan Penguasaan dan PemilikanTORA (termasuk pelepasan kawasan hutan)							
		Peningkatan Kualitas Data Pertanahan dan LegalisasiTORA							



No	Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Kegiatan (Proyek) Daerah	Program Daerah	Perangkat Daerah	Output/ Target	Pagu (APBD) (Rupiah)	Lokasi	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggunaan, Pemanfaatan dan Produksi asTORA							
		Kelembagaan Pelaksana Reforma Agraria Pusat dan Daerah							
	e Percepatan pemberian akses kelola . sumber daya alam kepada masyarakat melalui perhutanan sosial	Penyiapan prakondisi masyarakat pedesaan dan kawasan							
		Pengelolaan kolaboratif sumber daya hutan bersama masyarakat desa dan pengembangan usahanya	Peningkatan Usaha Hasil Hutan Kayu	PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA HUTAN	DINAS KEHUTANAN	20%	300.000.000,00	7 Kab/Kota	
			Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu	PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA HUTAN	DINAS KEHUTANAN	20%	1.600.000.000,00	7 Kab/Kota	
		Peningkatan kapasitas institusi dan masyarakat dalam usaha perhutanan sosial	Pengembangan Perhutanan Sosial	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN DAS DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	DINAS KEHUTANAN	2%	1.726.000.000,00	7 Kab/Kota	
			Penyelenggaraan Penyuluhan Kehutanan	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN DAS DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	DINAS KEHUTANAN	95 Kelompok	676.000.000,00	7 Kab/Kota	

No	Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Kegiatan (Proyek) Daerah	Program Daerah	Perangkat Daerah	Output/ Target	Pagu (APBD) (Rupiah)	Lokasi	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Penumbuhan dan pengembangan kelompok pecinta alam/pramuka	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN DAS DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	DINAS KEHUTANAN	2 kelompok	250.000.000,00	7 Kab/Kota	
	2 Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat								
	a Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	Penyediaan fasilitas kesehatan dasar, rujukan berkualitas dan e-kesehatan	Peningkatan pelayanan kesehatan primer	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN	DINKES	38 Kecamatan	1.312.846.340	7 Kab/Kota	
			Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN	DINKES	10 RSUD	1.436.346.780	7 Kab/Kota	
		Pemenuhan SDM Kesehatan	Pengembangan sumberdaya kesehatan/SDK	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KESEHATAN	DINKES	4.028 orang	2.180.232.600	7 Kab/Kota	
		Penyediaan dan peningkatan mutu farmasi dan alat kesehatan	Peningkatan pelayanan kefarmasian	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KESEHATAN	DINKES	94%	1.323.954.757	7 Kab/Kota	
		Peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan							
	b Peningkatan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana	Penurunan kematian ibu di fasyankes	Penurunan kematian Ibu	PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT	DINKES	22/KH	1.429.148.908	7 Kab/Kota	
		Penurunan kematian bayi	Penurunan angka kematian bayi	PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT	DINKES	7,18/1000 KH	1.179.280.740	7 Kab/Kota	

No	Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Kegiatan (Proyek) Daerah	Program Daerah	Perangkat Daerah	Output/ Target	Pagu (APBD) (Rupiah)	Lokasi	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Peningkatan pelayanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana							
	c Pencegahan dan pengendalian . penyakit	Pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS, TB dan Malaria	Pencegahan dan pengendalian penyakit menular TB	PRORAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	DINKES	100 orang; 14 kasus; 1 laporan	207.189.180	7 Kab/Kota	
			Peningkatan pencegahan dan pengendalian HIV	PRORAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	DINKES	210 orang	589.826.380	7 Kab/Kota	
			Peningkatan pengendalian penyakit malaria	PRORAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	DINKES	85,71 % desa yang tereleminasi malaria	205.578.450		
		Pengendalian penyakit tropis terabaikan		PRORAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	DINKES				
		Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular	Peningkatan pencegahan penyakit tidak menular lainnya	PRORAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	DINKES	86%	221.777.600	7 Kab/Kota	
			Peningkatan pengendalian dan pencegahan penyakit kanker	PRORAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	DINKES	22,50% perempuan usia 30-50 th yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara	94.418.500	7 Kab/Kota	
		Imunisasi dasar lengkap	Peningkatan surveilans imunisasi dan kesehatan situasi	PRORAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN	DINKES	80%	2.418.856.220	7 Kab/Kota	

No	Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Kegiatan (Proyek) Daerah	Program Daerah	Perangkat Daerah	Output/ Target	Pagu (APBD) (Rupiah)	Lokasi	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			husus	PENYAKIT					
	d Percepatan penurunan stunting .	Peningkatan pendidikan gizi							
		Penguatan surveilans gizi							
		Pemberian suplementasi gizi	Peningkatan kesehatan gizi anak	PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT	DINKES	200 paket	2.320.500.000	7 Kab/Kota	
	e Penguatan “Gerakan Masyarakat . Hidup Sehat”	Peningkatan kualitas lingkungan sehat	Peningkatan Penyehatan lingkungan	PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT	DINKES	81,96%	1.081.151.203	7 Kab/Kota	
		Peningkatan konsumsi pangan sehat	Promosi Konsumsi dan Keamanan Pangan termasuk gerakan makan sayur, buah, kacang-kacangan dan ayam merawang (GEMA SABUK AMANG)	PROGRAM PENINGKATAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN	DINAS PANGAN	3 event	500.000.000	7 Kab/Kota	
			Gelar Pangan Daerah dan Lomba Cipta Menu Pangan B2SA Provinsi dan Nasional	PROGRAM PENINGKATAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN	DINAS PANGAN	2 Event	500.000.000	7 Kab/Kota	
		Peningkatan aktivitas fisik	Peningkatan kesehatan kerja dan olah raga	PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT	DINKES	65%	286.720.830		

No	Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Kegiatan (Proyek) Daerah	Program Daerah	Perangkat Daerah	Output/ Target	Pagu (APBD) (Rupiah)	Lokasi	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Pembudayaan dan Pemassalan Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Olahraga Layanan Khusus	PROGRAM PENINGKATAN PEMBUDAYAAN DAN PENINGKATAN PRESTASI OLAH RAGA	DISKEPORA	60 PESERTA	386.140.224		
	3 Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas								
	a Penyediaan pendidik yang berkualitas dan merata	Pendidikan/Pelatihan Kompetensi Pendidik	Peningkatan Mutu PTK SMA	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN KUANTITAS DAN KUALITAS GURU SERTA TENAGA KEPENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN	15 Orang	2.500.000.000,00	7 Kab/Kota	
			Peningkatan Mutu PTK SMK	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN KUANTITAS DAN KUALITAS GURU SERTA TENAGA KEPENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN	15 orang	3.000.000.000,00	7 Kab/Kota	
			Peningkatan Mutu PTK SLB	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN KUANTITAS DAN KUALITAS GURU SERTA TENAGA KEPENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN	10	2.000.000.000,00	7 Kab/Kota	
		Penilaian Kinerja Pendidik							
		Distribusi dan Pemerataan Pendidik							
		Sertifikasi Pendidik							

No	Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Kegiatan (Proyek) Daerah	Program Daerah	Perangkat Daerah	Output/ Target	Pagu (APBD) (Rupiah)	Lokasi	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	b Penyediaan afirmasi pendidikan .	Bantuan biaya Pendidikan bagi siswa dan mahasiswa di daerah 3T dan Papua							
		E-learning dan Sarana Prasarana di Daerah 3T dan PT Luar Jawa							
		Pembelajaran kontekstual daerah							
	c Penguatan kelembagaan satuan . pendidikan								
		Penilaian Mutu Satuan Pendidikan							
		Peningkatan Kapasitas Pengelola Satuan Pendidikan							
		Pengelolaan Pendidikan Berbasis Satuan Pendidikan							
	d Peningkatan kualitas pembelajaran . dan akademik								
		Hasil Penelitian, Publikasi Dosen, dan Pengembangan Bidang Unggulan							
		Penerapan Kurikulum dan Pendidikan Karakter	Pengembangan Kurikulum SMA	PROGRAM PENINGKATAN DAN PEGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN	DINAS PENDIDIKAN	67 sekolah	3.500.000.000,00	7 Kab/Kota	

No	Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Kegiatan (Proyek) Daerah	Program Daerah	Perangkat Daerah	Output/ Target	Pagu (APBD) (Rupiah)	Lokasi	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				MENENGAH ATAS					
			Pengembangan Kurikulum SMK	PROGRAM PENINGKATAN DAN PEGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH ATAS	DINAS PENDIDIKAN	57 sekolah	3.000.000.000,00	7 Kab/Kota	
			Pengembangan kurikulum pendidikan khusus	PROGRAM PENINGKATANAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KHUSUS	DINAS PENDIDIKAN	9 sekolah	850.000.000,00	7 Kab/Kota	
	4 Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Perumahan dan Permukiman Layak								
	a Penyediaan akses hunian Layak dan terjangkau	Penyediaan hunian layak dan terjangkau	Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni	PROGRAM KECIPTAKARYAAN DAN PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	300 unit	22.620.000.000		
		Peningkatan kualitas hunian	Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni	PROGRAM KECIPTAKARYAAN DAN PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	300 unit	22.620.000.000		
		Fasilitasi pembiayaan perumahan MBR							
		Pengentasan perumahan dan permukiman kumuh							

No	Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Kegiatan (Proyek) Daerah	Program Daerah	Perangkat Daerah	Output/ Target	Pagu (APBD) (Rupiah)	Lokasi	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	b Penyediaan akses infrastruktur . dasar permukiman layak	Penyediaan akses air minum layak	Peningkatan/perluasan jaringan distribusi Air Minum dan sambungan rumah	PROGRAM KECIPTAKARYAAN DAN PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	670 SR	1.090.000.000,00	7 Kab/Kota	
			Peningkatan/perluasan jaringan distribusi air minum di Kawasan permukiman kumuh	PROGRAM KECIPTAKARYAAN DAN PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	2 Lokasi	550.000.000,00	7 Kab/Kota	
		Penyediaan akses sanitasi layak	Peningkatan/penyediaan sarana air limbah di Permukiman kumuh	PROGRAM KECIPTAKARYAAN DAN PERMUKIMAN	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	2 unit IPAL	900.000.000,00	7 Kab/Kota	
	c Peningkatan kualitas lingkungan di . permukiman	Penanganan dan penyediaan infrastruktur B3							
		Peningkatan kualitas udara dan pengurangan emisi GRK perkotaan	Identifikasi kualitas Udara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN DAN PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	21 Titik Pantau	287.500.000,00	7 Kab/Kota	
			Inventarisasi dan identifikasi sumber Sumber pencemaran Kualitas Udara Ambien Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN DAN PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1 Dokumen	150.000.000,00	7 Kab/Kota	
			Pengendalian Beban Pencemaran Udara dari sektor Industri	PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN DAN PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	.. Ton	30.000.000,00	7 Kab/Kota	
		Restorasi lingkungan tercemar B3							



No	Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Kegiatan (Proyek) Daerah	Program Daerah	Perangkat Daerah	Output/ Target	Pagu (APBD) (Rupiah)	Lokasi	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Peningkatan kualitas air dan tutupan lahan perkotaan	Identifikasi Kualitas Air Sungai di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN DAN PENAATAN LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	81 Titik Pantau	200.000.000,00	7 Kab/Kota	
			Pengendalian Beban Pencemaran Air		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	.. Ton	30.000.000,00	7 Kab/Kota	
			Inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran dan Kerusakan air Sungai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1 Dokumen	750.000.000,00	7 Kab/Kota	
		Pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam pengelolaan limbah							
	5 Peningkatan Tata Kelola Layanan Dasar								
	a Penguatan layanan dan rujukan . satu pintu	Pengaduan program terpadu							
		Verifikasi-Validasi Data Penduduk	Sosialisasi Kebijakan Pencatatan Akta Kelahiran	PROGRAM PENGADMINISTRASIAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB	2 kali	50.000.000,00	7 Kab/Kota	
			Peningkatan Kapasitas Aparatur Bidang Pencatatan Akta Kelahiran	PROGRAM PENGADMINISTRASIAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB	2 kali	110.000.000,00	7 Kab/Kota	

No	Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Kegiatan (Proyek) Daerah	Program Daerah	Perangkat Daerah	Output/ Target	Pagu (APBD) (Rupiah)	Lokasi	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pendampingan Masyarakat							
	b Penguatan integrasi sistem administrasi kependudukan dan catatan sipil								
		Percepatan kepemilikan akta kelahiran	Pembinaan Kepemilikan Akta Kelahiran	PROGRAM PENGADMINISTRASIAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB	2 kali	110.000.000,00	7 Kab/Kota	
		Peningkatan pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik							
		Peningkatan ketersediaan dan kualitas statistik hayati yang akurat bagi pembangunan lintas sektor							
	c Percepatan Pencapaian SPM di daerah								
		Penataan regulasi dan kelembagaan untuk implementasi SPM							
		Peningkatan kapasitas aparatur daerah							
		Pengelolaan dan pemanfaatan sumber-sumber pendanaan untuk SPM							

No	Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Kegiatan (Proyek) Daerah	Program Daerah	Perangkat Daerah	Output/ Target	Pagu (APBD) (Rupiah)	Lokasi	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Monitoring dan evaluasi SPM							
II.	PENGURANGAN KESENJANGAN ANTARWILAYAH MELALUI PENGUATAN KONEKTIVITAS DAN KEMARITIMAN								
	1 Peningkatan Konektivitas								
	a. Pengembangan pelabuhan hub dan feedertol laut	Pelabuhan Batam							
		Pelabuhan Belawan/Kuala Tanjung							
		Pelabuhan Tanjung Priok							
		Pelabuhan Tanjung Perak							
		Pelabuhan Makassar							
		Pelabuhan Bitung							
	b. Pembangunan transportasimultimoda	Jalan Akses Ke Pelabuhan dan Bandara							
		Pembangunan dan Pengembangan Transportasi Perkeretaapian							
		Pembangunan Jalan Tol							

No	Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Kegiatan (Proyek) Daerah	Program Daerah	Perangkat Daerah	Output/ Target	Pagu (APBD) (Rupiah)	Lokasi	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	c. Pembangunan bandara	Wamena, Timika, Sorong, Manokwari, Nabire, Jayapura, Dekai, Oksibil, Merauke							
		Penyediaan Sarana Transportasi hasil produk dalam negeri (N-219)							
		Penyediaan Sarana Transportasi Ampibi (N-219A)							
	d. Pembangunan transportasi perkotaan	MRT, LRT Jadtetabek, LRT Medan, LRT Palembang							
	e. Keselamatan transportasi	-							
2	Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika								
	a. Penyediaan infrastruktur telekomunikasi	Penyediaan Akses Internet	Penguatan Jaringan Komunikasi Data Pemerintah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI	DISKOMINFO	6 interkoneksi, 1 server, 1 lisensi aplikasi pendukung pemeliharaan jaringan OPD	375.000.000,00		
			Pengembangan dan Optimalisasi Layanan Publik dan Pemerintah Berbasis e-Government	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI	DISKOMINFO	20%	1.145.190.000,00		

No	Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Kegiatan (Proyek) Daerah	Program Daerah	Perangkat Daerah	Output/ Target	Pagu (APBD) (Rupiah)	Lokasi	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pembangunan BTS							
	b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Informatika	Peluncuran Satelit Mikro LAPAN A-4 Oleh LAPAN							
	c. Pengembangan Infrastruktur TIK menuju e-Digital								
3	Pengembangan Pusat Kegiatan Ekonomi di Wilayah Timur dan Pembangunan Desa								
	a. Pengembangan pusat kegiatan ekonomi di wilayah Timur	Percepatan Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan penghubung Kab/Kota							
		Percepatan Pembangunan dan rehabilitasi jembatan penghubung Kab/Kota							
		Pembangunan Pelabuhan/Dermaga							
		Penyediaan Akses Internet							
	b. Peningkatan Aksesibilitas di Desa	Pendampingan dan Pembinaan keDesa							
		Penguatan Kelembagaan Desadan Kerjasama Desa							
		Penyediaan dan Perluasan Aksesibilitas Desa kepada Pusat Kegiatan Ekonomi, Pusat Pemerintahan dan							

No	Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Kegiatan (Proyek) Daerah	Program Daerah	Perangkat Daerah	Output/ Target	Pagu (APBD) (Rupiah)	Lokasi	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pelayanan Dasar							
	c. Pengembangan Kawasan Perdesaan, termasuk Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) dan Kawasan Transmigrasi	Fasilitasi Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan	Perencanaan pembangunan prasarana penyediaan air baku	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	DINAS PUPR	1 Dokumen		KTM BATU BETUMPANG Kabupaten Bangka Selatan	
			Penyusunan RDTR/RRTR Kawasan Strategis Provinsi	PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	DINAS PUPR	2 Dokumen		KTM Mandiri Gantung Belitung Timur	
			Penyusunan RTR Kawasan Strategis Provinsi	PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	DINAS PUPR	1 Dokumen		kawasan Agropolitan dan Teknopark Pertanian Lada Air Gegas	
			Penyusunan KLHS Agropolitan Berbasis Demonstration Farming Sawah Mekanisasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanaman perkebunan	PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1 Dokumen	650.000.000,00	kKawasan Budidaya Pertanian	
		Fasilitasi Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan	peningkatan fungsi POKJA KTM tingkat provinsi	PROGRAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN KAWASAN TRANSMIGRASI	DISNAKER	1 laporan	81.520.000,00	KTM BATU BETUMPANG (Transmig	

No	Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Kegiatan (Proyek) Daerah	Program Daerah	Perangkat Daerah	Output/ Target	Pagu (APBD) (Rupiah)	Lokasi	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								rasi)	
			peningkatan kapaitas SDM bidang transmigrasi	PROGRAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN KAWASAN TRANSMIGRASI	DISNAKER	150 orang		KTM BATU BETUMPANG (Transmigrasi)	
			peningkatan kapaitas SDM bidang transmigrasi	PROGRAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN KAWASAN TRANSMIGRASI	DISNAKER	90 Orang	185.000.000,00	KTM Mandiri Gantung Belitung Timur	
		Pembangunan Jalan dan Jembatan di Dalam dan AntarKawasan	Peningkatan/pembangunan Jalan	PROGRAM KEBINAMARGAAN	DINAS PUPR	3 Km	13.800.000.000,00	KTM BATU BETUMPANG (Transmigrasi)	
			Pemeliharaan Berkala Jalan	PROGRAM KEBINAMARGAAN	DINAS PUPR	3 Km	8.280.000.000,00	KTM BATU BETUMPANG (Transmigrasi)	
			Peningkatan/pembangunan Jalan	PROGRAM KEBINAMARGAAN	DINAS PUPR	3 Km	13.800.000.000,00	KTM Mandiri Gantung Belitung Timur	

No	Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Kegiatan (Proyek) Daerah	Program Daerah	Perangkat Daerah	Output/ Target	Pagu (APBD) (Rupiah)	Lokasi	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Sentra Produksi, Industri Pengolahan, dan Pemasaran	Fasilitasi penerapan budidaya padi di KTM Batu Betumpang	PROGRAM PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	DINAS PERTANIAN	600 Ha	600.000.000,00	KTM BATU BETUMPA NG (Transmig rasi)	
			Fasilitasi penerapan budidaya padi di KTM gantung	PROGRAM PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	DINAS PERTANIAN	400 Ha	400.000.000,00	KTM Mandiri Gantung Belitung Timur	
			Fasilitasi penerapan budidaya cabai di KTM Batu Betumpang	PROGRAM PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	DINAS PERTANIAN	30 Ha	150.000.000,00	KTM BATU BETUMPA NG (Transmig rasi)	
			Fasilitasi penerapan budidaya bawang merah di KTM Batu Betumpang	PROGRAM PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	DINAS PERTANIAN	15 Ha	500.000.000,00	KTM BATU BETUMPA NG (Transmig rasi)	
			Fasilitasi teknis pengembangan tanaman perkebunan	Fasilitasi teknis pengembangan tanaman perkebunan	DINAS PERTANIAN		570.000.000	kawasan Agropolita n dan Tekno park Pertanian Lada Air Gegas	



No	Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Kegiatan (Proyek) Daerah	Program Daerah	Perangkat Daerah	Output/ Target	Pagu (APBD) (Rupiah)	Lokasi	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Perumahan dan Permukiman Kawasan							
		Peningkatan Kapasitas SDM untuk Pengembangan Inovasi dan Kreativitas Lokal							
		Fasilitasi pengembangan kerjasama antardaerah dan kerjasama pemerintah dan swasta							
		Pengembangan Kelembagaan Perdesaan, Kerjasama Antar Desa, dan Kerjasama Antar Kawasan Perdesaan							
	4	Pembangunan Daerah Afirmasi							
	a.	Percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat	Penyediaan Energi Baru Terbarukan						
		Pengembangan Ekonomi Kawasan Perbatasan dan Daerah Tertinggal							
		Pengelolaan PLBN							
		Penyusunan Rencana Detil Tata Ruang Kawasan Perbatasan							

No	Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Kegiatan (Proyek) Daerah	Program Daerah	Perangkat Daerah	Output/ Target	Pagu (APBD) (Rupiah)	Lokasi	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Penyelesaian Ruas Jalan Trans Papua dan Papua Barat							
		Hilirisasi komoditas unggulan lokal Papua							
		Pengembangan moda transportasi untuk pelayanan pendidikan dan kesehatan secara mobile							
		Akses Pengembangan Energi Skala Kecil							
	b. Pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan	Pembangunan Jalan Pararel Perbatasan							
		Pembangunan Jalan Non Status							
		Pembangunandan Pengembangan							
		Simpul-simpul Transportasi							
		Penyediaan Sarana Transportasi dan Keperintisan							
		Pembangunan BTS							
		Penyediaan Akses Internet							

No	Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Kegiatan (Proyek) Daerah	Program Daerah	Perangkat Daerah	Output/ Target	Pagu (APBD) (Rupiah)	Lokasi	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Penyelenggaraan Penyiaran Radio dan Televisi							
	c. Perluasan Aksesibilitas di Wilayah Kepulauan	Pembangunan Angkutan Penyeberangan							
		Pembangunan Pelabuhan dan Poros Penghubung							
		Subsidi Keperintisan							
	d. Penangan Kawasan Rawan Bencana	Pembangunan Serta Penyediaan Logistik dan Peralatan Kebencanaan	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	DINAS SOSIAL	25 orang	735.000.000,00	7 Kab/Kota	
			Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	DINAS SOSIAL	50 orang	350.000.000,00	7 Kab/Kota	
			Pengembangan Cadangan Provinsi	PROGRAM PENGEMBANGAN DISTRIBUSI, STABILITAS, DAN CADANGAN PANGAN	DINAS PANGAN	50 Ton	575.000.000,00	7 Kab/Kota	
			Penyediaan Perlengkapan Tanggap Darurat	PROGRAM KEDARURATAN DAN LOGISTIK PENANGGULANGAN BENCANA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	55 Orang	200.000.000,00	7 Kab/Kota	
			Pengadaan/Penyediaan Logistik untuk Penanggulangan Bencana	PROGRAM KEDARURATAN DAN LOGISTIK PENANGGULANGAN BENCANA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	4 paket	200.000.000,00	7 Kab/Kota	
			Pengambilan Serta Pendistribusian Logistik Dan	PROGRAM KEDARURATAN DAN LOGISTIK	BADAN PENANGGULA	1paket	100.000.000,00	7 Kab/Kota	

No	Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Kegiatan (Proyek) Daerah	Program Daerah	Perangkat Daerah	Output/ Target	Pagu (APBD) (Rupiah)	Lokasi	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Peralatan Penanggulangan Bencana	PENANGGULANGAN BENCANA	NGAN BENCANA				
			Kegiatan obat dan perbekalan kesehatan	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS MEDIS DAN PENUNJANG MEDIS	RSUP	100%	5.500.000.000,00	7 Kab/Kota	
		Pembangunan infrastruktur mitigasi bencana	Pengadaan, Peningkatan Dan Pemeliharaan / Perawatan Sarana Dan Sarana Gudang Dan Tempat Penyimpanan	PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN PENANGGULANGAN BENCANA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	1 paket	250.000.000,00	7 Kab/Kota	
			persentase Panjang Talud yang direhabilitasi dan direkonstruksi yang berfungsi dengan baik untuk menahan tanah	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	DINAS PUPR	830 M	1.000.000.000,00	7 Kab/Kota	
			Panjang Sungai /saluran yang dinormalisasi dan befungsi memperlancar aliran air sungai akibat bencana	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	DINAS PUPR	24.300 m	13.400.000.000,00	7 Kab/Kota	
			Peningkatan, pembersihan dan pengerukan sungai/kali	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	DINAS PUPR	39.000 M	15.830.522.253,00	7 Kab/Kota	
			Persentase Panjang Penahan Abrasi Pantai	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	DINAS PUPR	810 M	2.900.000.000,00	7 Kab/Kota	
			Pembangunan turap / talud / bronjong	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	DINAS PUPR	1.560 M	5.462.500.000,00	7 Kab/Kota	

No	Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Kegiatan (Proyek) Daerah	Program Daerah	Perangkat Daerah	Output/ Target	Pagu (APBD) (Rupiah)	Lokasi	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Pembinaan dan Pegelolaan Daerah Aliran Sungai	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN DAS DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	DINAS KEHUTANAN	200 Ha	300.000.000,00	7 Kab/Kota	
		Penyediaan Sistem Peringatan Dini	Identifikasi Daerah Rawan Bencana Dalam Rangka Pengurangan Risiko Bencana	PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN PENANGGULANGAN BENCANA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	25 Unit	225.000.000,00	7 Kab/Kota	
		Penyediaan Layanan Dasar Data dan Informasi Bencana	Pembangunan Jaringan Informasi Kebencanaan Terpusat	PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN PENANGGULANGAN BENCANA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	1 paket	367.500.000,00	7 Kab/Kota	
			Publikasi Panduan Standar Minimum Penyelamatan Dini Saat Terjadi Bencana	PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN PENANGGULANGAN BENCANA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	10 media	325.000.000,00	7 Kab/Kota	
			Pengelolaan Saluran Komunikasi Pemerintah Daerah dan Non Pemerintah Daerah	PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	DISKOMINFO		290.000.000,00	7 Kab/Kota	
		Pengembangan teknologi kebencanaan							
		Penataan ruang kawasan rawan bencana untuk meningkatkan kapasitas kawasan							

No	Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Kegiatan (Proyek) Daerah	Program Daerah	Perangkat Daerah	Output/ Target	Pagu (APBD) (Rupiah)	Lokasi	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pembentukan Masyarakat Tangguh Bencana pada daerah risiko bencana tinggi	Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencegahan Banjir di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN PENANGGULANGAN BENCANA	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	100 orang	710.000.000,00	7 Kab/Kota	
		Harmonisasi kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana							
5	Pembangunan Konektivitas untuk Mendukung Pembangunan Sektor Unggulan Hulu-Hilir Perikanan								
	a. Pembentukan sistem logistik ikan nasional	Pengembangan sistem logistik dan jaringan pasar komoditas perikanan di lokasi produksi perikananTerpilih							
		Penyediaan infrastruktur energi, air dan sarana transportasi mendukung sistem logistik							
		Penguatanklaster produksi unggulan berbasis komoditas perikanan terpilih di daerah							
	b. Operasionalisasi Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) terpilih	Operasionalisasi Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Natuna							

No	Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Kegiatan (Proyek) Daerah	Program Daerah	Perangkat Daerah	Output/ Target	Pagu (APBD) (Rupiah)	Lokasi	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Operasionalisasi Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Sabang							
		Operasionalisasi Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Talaud							
		Operasionalisasi Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Biak							
		Pengembangan Infrastruktur pendukung di lokasi SKPT terpilih							
	c. Rehabilitasi dan peningkatan layanan pelabuhan perikanan	Rehabilitasi sarana dan prasarana pelabuhan perikanan strategis dan perbaikan manajemen pelabuhan di wilayah Timur Indonesia							
		Integrasi pelabuhan perikanan dengan infrastruktur transportasi pendukung							
	d. Pengadaan kapal angkut ikan berpendingin dan garam	Penguatan industri galangan kapal perikanan Daerah dan pengembangan kapal angkut berpendingin							

No	Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Kegiatan (Proyek) Daerah	Program Daerah	Perangkat Daerah	Output/ Target	Pagu (APBD) (Rupiah)	Lokasi	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Penyediaan sarana pengangkutan produk perikanan dan garam dari wilayah Timur ke Barat							
	e. Pembentukan kelembagaan 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penyelesaian rencana zonasi pesisir dan laut	Pembentukan manajemen regional untuk pengelolaan WPP di 11 lokasi							
		Penyelesaian Rencana Tata Ruang dan Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau kecil di 10 Propinsi, sebagai basis pengelolaan ruang untuk pembangunan							
III.	PENINGKATAN NILAI TAMBAH EKONOMI MELALUI PERTANIAN, INDUSTRI, DAN JASA PRODUKTIF								
	1. Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian								
	a. Peningkatan Hasil Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Jasa Lingkungan	Pengembangan Kawasan Jeruk, Mangga, Nenas, Manggis, Salak dan Pisang	Pemberdayaan pekebun dan penguatan kelembagaan tanaman perkebunan	PROGRAM PENGEMBANGAN PERKEBUNAN	DINAS PERTANIAN	Kelembagaan pekebun lada dan karet, 400	1.000.000.000	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
		Pengembangan Tanaman Kelapa Sawit, Karet, Kakao, Teh, Kopi, Kelapa, Lada, Pala, & Cengkeh	Pengembangan pengolahan tanaman perkebunan	PROGRAM PENGEMBANGAN PERKEBUNAN	DINAS PERTANIAN	pengembangan pengolahan tanaman perkebunan (Unit)	1.200.000.000	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	



No	Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Kegiatan (Proyek) Daerah	Program Daerah	Perangkat Daerah	Output/ Target	Pagu (APBD) (Rupiah)	Lokasi	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pengembangan Benih Ternak Unggul	Peningkatan Populasi Ternak	PROGRAM PENGEMBANGAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	DINAS PERTANIAN	Jumlah kelompok penerima bantuan (sapi dan unggas), 20	15.000.000.000	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
		Pengembangan Budidaya Laut (Marikultur) dan Rantai PasokTuna, Udang dan Rumput Laut	Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN BUDIDAYA DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran yang diadakan bagi masyarakat berupa alat pengolahan (Pasar)	300.000.000	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
		Peningkatan Produktivitas Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Hutan	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS TATA KELOLA DISHUT	DINAS KEHUTANAN	Jumlah dokumen pengelolaan kawasan hutan	497.042.000	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
		Peningkatan Jasa Ekowisata sebagai Obyek Pariwisata Nasional	Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Sarana di Destinasi Pariwisata	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	700%	2.836.240.000	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
		Peningkatan Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati (Tumbuhan dan Satwa)	Peningkatan pemasaran komoditas strategis perkebunan	PROGRAM PENGEMBANGAN PERKEBUNAN	DINAS PERTANIAN	pemasaran komoditas strategis perkebunan	500.000.000	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	

No	Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Kegiatan (Proyek) Daerah	Program Daerah	Perangkat Daerah	Output/ Target	Pagu (APBD) (Rupiah)	Lokasi	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						(%)			
	b. Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Pertanian, Perikanan, & Kehutanan	Pengolahan Hasil Perkebunan dan Hortikultura	Pembinaan kelembagaan usaha perkebunan (PPHP)	PROGRAM PENGEMBANGAN PERKEBUNAN	DINAS PERTANIAN	pembinaan kelembagaan usaha perkebunan (PPHP)	300.000.000	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
		Pengolahan Hasil Hutan	Peningkatan Usaha Hasil Hutan Kayu	PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA HUTAN	DINAS KEHUTANAN	Jumlah izin usaha hasil hutan kayu (Izin)	300.000.000	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
		Pengolahan Hasil Peternakan	Peningkatan pengolahan dan pemasaran hasil produksi subsektor Peternakan (Kontes Ternak)	PROGRAM PENGEMBANGAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	DINAS PERTANIAN	Meningkatnya pengolahan dan pemasaran hasil produksi subsektor peternakan (%)	300.000.000	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
		Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan Untuk Industri Berbasis Bofarmaka Dan Bio Prospecting	Peningkatan kapasitas pengujian mutu hasil produk kelautan dan perikanan	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LABORATORIUM PENGUJIAN DAN PENGENDALIAN MUTU HASIL PERIKANAN	UPTD LABORATORIUM PENGUJIAN DAN PENGENDALIAN MUTU HASIL PERIKANAN	Jumlah sampel yang diuji untuk keamanan pangan produk kelautan dan perikanan	5.500.000.000	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	

No	Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Kegiatan (Proyek) Daerah	Program Daerah	Perangkat Daerah	Output/ Target	Pagu (APBD) (Rupiah)	Lokasi	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						dari bahan berbahaya (sampel)			
		Integrasi Rantai Pasok Berbasis Produksi dan Pengolahan Perikanan dan Kelautan	Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN BUDIDAYA DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran yang diadakan bagi masyarakat berupa alat pengolahan (Pasar)	300.000.000	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
	c. Peningkatan Mutu, Sertifikasi, dan Standarisasi Hasil Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	Sertifikasi Standar dan Mutu Hasil dan Produk Olahan Perkebunan dan Hortikultura	Pemeliharaan dan penambahan status akreditasi laboratorium	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS SERTIFIKASI DAN PENGENDALIAN MUTU PRODUK	UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PENGENDALIAN MUTU	Jumlah ruang lingkup	114.700.000	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
		Penerapan Standarisasi dan Mutu Hasil dan Produk Olahan Peternakan	pengembangan kompetensi SDM di desa produktif	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	UPTD BALAI PRODUKTIFITAS	jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan peningkatan produksi sektor perikanan, 30 orang	57.857.000	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	

No	Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Kegiatan (Proyek) Daerah	Program Daerah	Perangkat Daerah	Output/ Target	Pagu (APBD) (Rupiah)	Lokasi	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Penerapan Standarisasi dan Mutu Hasil dan Produk Olahan Kehutanan	Standarisasi dan penerapan standar mutu hasil perkebunan	PROGRAM PENGEMBANGAN PERKEBUNAN	DINAS PERTANIAN	standarisasi dan standar mutu hasil perkebunan (%), 88	450.000.000	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
		Standarisasi Unit Pengolah Ikan dan Sertifikasi Produk Olahan Kelautan dan Perikanan	Pendampingan pemasaran, kemitraan, permodalan dan jaringan usaha	PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI	DINAS KUMKM	jumlah koperasi yang mendapatkan pendampingan kemitraan usaha	125.000.000	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
	d. Penguatan Kelembagaan dan Usaha Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	Konsolidasi dan Penguatan Kelembagaan Usaha Nelayan dan Petani	Peningkatan Produksi UPTD Balai Benih Ikan Laut (BBIL) Tanjung Rusa	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PEMBENIHAN IKAN LAUT	UPTD BALAI BENIH IKAN LAUT (BBIL) TANJUNG RUSA	Jumlah produksi benih (Juta Ekor)	440.000.000	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
		Peningkatan Promosi dan Advokasi	Studi Kelayakan Potensi Investasi Sektor Potensi	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Jumlah kajian potensi investasi sektor potensi	400.000.000	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
		Penguatan Litbang dan Inovasi untuk Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah	Peningkatan Layanan Usaha Terpadu	PROGRAM PENINGKATAN PUSAT PELAYANAN USAHA TERPADU KUKM	DINAS KUMKM	jumlah pelaku usaha yang mengalami peningkatan produktivitas	385.000.000	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	

No	Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Kegiatan (Proyek) Daerah	Program Daerah	Perangkat Daerah	Output/ Target	Pagu (APBD) (Rupiah)	Lokasi	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	e. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Nilai Tambah Pertanian dan Perikanan	Fasilitas Pasca Panen Tanaman Perkebunan dan Hortikultura	Pelatihan teknis budidaya, penanganan panen dan pasca panen komoditi pangan dan hortikultura	PROGRAM PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	DINAS PERTANIAN	Jumlah kelompok tani yang mengalami peningkatan kualitas SDM pertanian	65.000.000	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
		Sarana Pengembangan Pelabuhan Perikanan Memenuhi Standar Internasional	peningkatan fungsi syahbandar pelabuhan perikanan	PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah bulan layanan fungsi syahbandar pelabuhan perikanan (Bulan)	120.000.000	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
		Revitalisasi Sarana Pengolahan Produk Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN BUDIDAYA DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran yang diadakan bagi masyarakat berupa alat pengolahan (Pasar)	300.000.000	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
2.	Percepatan Peningkatan Nilai Tambah Industri Pengolahan								

No	Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Kegiatan (Proyek) Daerah	Program Daerah	Perangkat Daerah	Output/ Target	Pagu (APBD) (Rupiah)	Lokasi	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	a. Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi	Perbaikan Regulasi, Harmonisasi & Simplifikasi Perizinan	Sosialisasi Informasi terkini regulasi kebijakan di Bidang Penanaman Modal	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Jumlah peserta sosialisasi	25.000.000	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
		Fasilitasi Investasi	Peningkatan Pelayanan Peluang Investasi	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Jumlah calon investor yang di fasilitasi	31.250.000	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
		Perlindungan Konsumen	Pegawasan barang beredar dan jasa	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN KEMETROLOGIAN	DISPERINDAG	Produk SNI wajib (barang/Jasa)	896.000.000	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
		Persaingan Usaha yang Sehat	Pengawasan Tertib niaga	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN KEMETROLOGIAN	DISPERINDAG	Jumlah pengawasan (kali)	700.000.000	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
		Iklim Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial	pemeriksaan norma kerja dan norma K3	PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN, PEMBINAAN HUB. INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL	DINAS TENAGA KERJA	jumlah perusahaan bidang lain yang diperiksa dan dibina	161.070.000	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
	b. Perbaikan Struktur Industri	Debottlenecking & Harmonisasi Regulasi & Perpajakan dalam Rantai Pasok/Nilai	Peningkatan Partisipasi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan Perkoperasian	PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI	DINAS KUMKM	jumlah koperasi yang mendapatkan	54.000.000	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	

No	Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Kegiatan (Proyek) Daerah	Program Daerah	Perangkat Daerah	Output/ Target	Pagu (APBD) (Rupiah)	Lokasi	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						pendampingan penyusunan regulasi internal			
		Fasilitasi Pengembangan Industri Hulu dan Pendukung	Pengembangan kawasan strategis/kawasan industri/sentra	PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH DAN PENGAWASAN INDUSTRI	DISPERINDAG	Jumlah dokumen tersusun (dokumen)	400.000.000	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
		Perbaikan Logistik						Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
		Penguatan Industri Kecil & Menengah	Pembinaan dan penyuluhan pembentukan Sentra Industri	PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH DAN PENGAWASAN INDUSTRI	DISPERINDAG	Jumlah lokasi pembinaan dan penyuluhan terhadap industri (lokasi)	150.000.000	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
	c. Peningkatan Daya Saing Industri	Akses Bahan Baku & Energi	Koordinasi kegiatan MIGAS dengan Pemerintah Pusat dan Partisipasi ADPM	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ENERGI	DINAS ESDM	Jumlah lifting MIGAS Babel, 440 Ribu	300.000.000	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
		Inovasi Industri & Pemanfaatan Tik	rumah pengembangan produk	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA, FASILITASI DAN AKSES INDUSTRI	DISPERINDAG	jumlah pelaku industri yang terfasilitasi,	542.586.000	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	

No	Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Kegiatan (Proyek) Daerah	Program Daerah	Perangkat Daerah	Output/ Target	Pagu (APBD) (Rupiah)	Lokasi	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						430 pelaku			
		Peningkatan Desain, Standar,&Branding						Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
		Peningkatan Penggunaan Produk Manufaktur Lokal	Peningkatan pemahaman penggunaan produk dalam negeri	PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN	DISPERINDAG	Jumlah pelaku usaha	100.320.000	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
	d. Fasilitas Pengembangan 7 Kawasan Industri dan 6 KEK Industri/ Logistik	Dukungan Regulasi, Perizinan dan Kelembagaan Untuk 7 Kawasan Industri: Kuala Tanjung, Palu, Konawe, TelukBintuni, SeiMangkei, BantaengdanMorowali						Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
		DukunganRegulasi, Perizinan, danKelembagaanuntuk6 KEK Industri/Logistik: MBTK, Sorong, Bitung, Arun, GalangBatang, TanjungApi-api	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan pada Jalan Provinsi menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Kelayang	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN DARAT	DISHUB	Persentase perlengkap an jalan yang terpasang (Guard Rail), Paku Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas(APIL L), Lampu Peringatan (WL), Deliniator,	5.500.000.000	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	



No	Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Kegiatan (Proyek) Daerah	Program Daerah	Perangkat Daerah	Output/ Target	Pagu (APBD) (Rupiah)	Lokasi	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Marka Jalan, Rambu-rambu lalu lintas dan Lampu Penerangan Jalan Umum menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Kelayang			
		Dukungan Infrastruktur untuk 7 KI dan 6 KEK Industri/Logistik	Pembangunan/Peningkatan Jalan	PROGRAM KEBINAMARGAAN	PUPR	Panjang jalan yang terpelihara	4.140.000.000	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
		Dukungan Investasi Penumbuhan Usaha di 7 KI dan 6 KEK Industri/Logistik							
	3. Peningkatan Nilai Tambah Jasa Produktif								

No	Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Kegiatan (Proyek) Daerah	Program Daerah	Perangkat Daerah	Output/ Target	Pagu (APBD) (Rupiah)	Lokasi	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Percepatan Pengembangan 7 Kawasan Pariwisata, dan 2 KEK Pariwisata	Dukungan Infrastruktur untuk 7 Destinasi Wisata Prioritas (Labuan Bajo, Wakatobi, Bromo-Tengger-Semeru, Tanjung Kelayang, Danau Toba, Borobudur dan sekitarnya, Mandalika) dan 2 KEK Pariwisata (Tanjung Lesung dan Morotai)							
		Penguatan Kelembagaan, Industri dan Usaha pariwisata di 7 Destinasi Wisata Prioritas	Penyusunan RDTR/RRTR Kawasan Strategis Provinsi	PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	PUPR	Jumlah Dokumen Regulasi KSP Kawasan Pariwisata Tanjung Kelayang	1.000.000.000	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
		Perluasan & Diversifikasi Pemasaran	Pelayanan Informasi Pariwisata	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	BUDPAR	4	134.728.000		
			Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Pemasaran Pariwisata Bangka Belitung			2	179.740.000		
			Peningkatan Pencitraan Pariwisata Kepulauan Bangka Belitung (Bahan Promosi)			6	537.350.000		
		Penerapan Sustainable Tourism Practices							

No	Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Kegiatan (Proyek) Daerah	Program Daerah	Perangkat Daerah	Output/ Target	Pagu (APBD) (Rupiah)	Lokasi	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pengembangan Statistik Pariwisata							
	b. Penguatan Struktur Ekonomi Kreatif	Pengembangan Bakat & Kompetensi SDM	Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Bagi Sumber Daya Pariwisata	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA, EKONOMI KREATIF DAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN	BUDPAR	350	875.000.000	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
			Penyelenggaraan Sertifikasi bagi Sumber Daya Pariwisata			175	732.217.500	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
			Penyelenggaraan sertifikasi Lanjutan bagi Sumber Daya Pariwisata			250	700.000.000	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
			Kerjasama Pengembangan sistem sertifikasi bagi sumber daya pariwisata dengan asosiasi profesi dan LSP			2	367.500.000	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
			Penyelenggaraan Lokakarya pelatihan dan sertifikasi sumber daya pariwisata			50	250.000.000	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
			penerapan sistem magang berbasis kompetensi bagi pelajar sektor kepariwisataan			20	440.000.000	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
			pemantauan dan evaluasi			1	148.610.000	Provinsi	

No	Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Kegiatan (Proyek) Daerah	Program Daerah	Perangkat Daerah	Output/ Target	Pagu (APBD) (Rupiah)	Lokasi	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			penyelenggaraan dan hasil sertifikasi bagi sumber daya pariwisata					Kepulauan Bangka Belitung	
		Penguatan Ekosistem (Regulasi, Infrastruktur, Investasi, & HaKI)							
		Pengembangan Industri Seni Budaya	Kajian Tradisi Bangka Belitung	PROGRAM PELESTARIAN BUDAYA	BUDPAR	2	200.000.000	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
			Penulisan Sejarah Bangka Belitung			1	250.000.000	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
			Pengembangan Data Pokok Sejarah dan Tradisi Bangka Belitung			80	75.000.000	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
			Pendokumentasian Sejarah dan Tradisi Bangka Belitung			0	-	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
			Partisipasi dan penghargaan serta kerjasama di bidang budaya			1 LAM, 1 DK, 25 duk event & 6 Kombud	2.500.000.000	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
			Pengelolaan cagar budaya			1	89.000.000	Provinsi Kepulauan Bangka	

No	Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Kegiatan (Proyek) Daerah	Program Daerah	Perangkat Daerah	Output/ Target	Pagu (APBD) (Rupiah)	Lokasi	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								Belitung	
			Pendokumentasian dan publikasi koleksi museum daerah			1	150.000.000	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
			Registrasi Cagar Budaya Bangka Belitung			50	200.000.000	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
			Pentas Seni Budaya			35	450.000.000	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
			Pembinaan Drum Band Serumpun Sebalai			60	281.470.000	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
		Pengembangan Statistik Ekonomi Kreatif							
c.	Pengembangan Kemitraan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan Usaha Menengah dan Besar (UMB)	Pengembangan Kapasitas Usaha							
		Perluasan Kemitraan Usaha							
		Penguatan Kapasitas Kelembagaan Kemitraan							

No	Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Kegiatan (Proyek) Daerah	Program Daerah	Perangkat Daerah	Output/ Target	Pagu (APBD) (Rupiah)	Lokasi	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	d. Peningkatan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri	Peningkatan Ekspor Produk Indonesia							
		Peningkatan Fasilitas Produk dan Pelaku Usaha Perdagangan Luar Negeri							
		Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana Perdagangan							
		Peningkatan Aktivitas Perdagangan Dalam Negeri, Usaha Perdagangan dan Tertib Niaga							
		Pengelolaan Stok dan Harga							
		Pengembangan E-commerce							
		Penguatan 4 Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB): Batam, Bintan, Karimun, dan Sabang							
	e. Perluasan Akses Keuangan/ Pembiayaan	Peningkatan Akses Pembiayaan Ultra Mikro							
		Peningkatan Akses Pembiayaan Start-up							

No	Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Kegiatan (Proyek) Daerah	Program Daerah	Perangkat Daerah	Output/ Target	Pagu (APBD) (Rupiah)	Lokasi	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Peningkatan Akses Pembiayaan Usaha							
4.	Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja								
a.	Peningkatan Kerja Sama dengan Dunia Usaha	Penyusunan Standar Kompetensi dan Kurikulum							
		Pemetaan Kebutuhan Keahlian							
		Pengembangan Skema Kerja Sama Vokasi dengan Dunia Usaha							
b.	Penguatan Penyelenggaraan Diklat Vokasi	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Instruktur Vokasi							
		Sarana dan Prasarana Diklat Vokasi							
		Pelaksanaan Diklat Vokasi							
		Pemagang di Industri							
c.	Pemantapan Sistem Sertifikasi Kompetensi	Penguatan Kelembagaan Sertifikasi Profesi							
		Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi							
d.	Peningkatan Keterampilan	Pemasyarakatan							

No	Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Kegiatan (Proyek) Daerah	Program Daerah	Perangkat Daerah	Output/ Target	Pagu (APBD) (Rupiah)	Lokasi	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Wirausaha	Kewirausahaan							
		Kewirausahaan							
		Pelatihan							
		Kewirausahaan							
5.	Pengembangan Iptek dan Inovasi untuk Meningkatkan Produktivitas								
a.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Keilmuan Strategis penunjang produktivitas	Penelitian dan Pengembangan Metrologi							
		Penelitian dan Pengembangan ilmu genomik							
		Penelitian dan Pengembangan material maju							
		Penelitian dan Pengembangan life sciences							
b.	Pengembangan dan Pemanfaatan teknologi pengungkit produktivitas	Pengembangan Teknologi dan Pemanfaatan Data Penginderaan Jauh							
		Pengembangan Teknologi							



No	Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Kegiatan (Proyek) Daerah	Program Daerah	Perangkat Daerah	Output/ Target	Pagu (APBD) (Rupiah)	Lokasi	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		T dan Digital							
		Teknologi dan Manajemen Transportasi							
		PengkajiandanPenerapan TeknologiMaterial							
		Pengembangan dan Pemanfaatan Bioteknologi							
	c. Penyiapan SDM Iptek (Peneliti, Perekayasa)	Penyiapan Peneliti Bidang Ilmu Strategis							
		Pengembangan Keahlian bagi Para Peneliti untuk Bidang-bidang Strategis							
		PenguatanKelembagaan(L embagaIptek, PerguruanTinggi, Pusat Penelitian) untukPengembanganBida ngStrategis							
	d. Penguatan inovasi dan penguasaan teknologi frontier	Penguatan Kerjasama Triple Helix							
		Rintisan Pengembangan Teknologi Frontier Dalam Rangka Penguatan Produktivitas Industri							

No	Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Kegiatan (Proyek) Daerah	Program Daerah	Perangkat Daerah	Output/ Target	Pagu (APBD) (Rupiah)	Lokasi	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IV.	<b>PEMANTAPAN KETAHANAN ENERGI, PANGAN DAN SUMBER DAYA AIR</b>								
	1 Peningkatan Produksi dan Pemenuhan Kebutuhan Energi								
	a. Peningkatan Produksi dan Cadangan Minyak dan Gas Bumi	Penawaran WK Migas Konvensional dan Non Konvensional							
		Eksplorasi dan Eksploitasi (KKKS) Konvensional							
		Survei Sumber Daya Migas Konvensional dan Non-konvensional							
		Peningkatan pemanfaatan teknologi EOR							
	b. Pembangunan Pembangkit, Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik	Pembangunan pembangkit listrik, besertajaringan transmisi dan gardu induk							
		Perluasan jaringan distribusi dan penyambungan listrik untuk rumah tangga tidak mampu							
	c. Pengembangan EBT	Pembangunan PLT Berbasis Hidro							
		Pembangunan Infrastruktur Bioenergi							

No	Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Kegiatan (Proyek) Daerah	Program Daerah	Perangkat Daerah	Output/ Target	Pagu (APBD) (Rupiah)	Lokasi	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) dan Sarana Umum menggunakan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Prov. Kep. Babel	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ENERGI	DINAS ENERGI	20.000 W	15.000.000.000		
		Pembangunan PLTP							
		Pembangunan PLTS							
	d. Peningkatan Pemanfaatan Batubara dan Gas Bumi Dalam Negeri	Pemantauan dan pengawasan penyediaan Batubara untuk Kebutuhan Dalam Negeri							
		Penyediaan Alokasi Gas Domestik							
	e. Peningkatan Efisiensi Energi	Penyusunan Pedoman Penghematan Energi dan Bantuan Teknis pada Instansi Pemerintah/Pemda							
		Peningkatan Capacity Building bagi Pemerintah Daerah untuk Peningkatan Efisiensi Energi							
		Audit Pelaksanaan Efisiensi Energi							
2	Peningkatan Produksi, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan								

No	Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Kegiatan (Proyek) Daerah	Program Daerah	Perangkat Daerah	Output/ Target	Pagu (APBD) (Rupiah)	Lokasi	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	a. Peningkatan Penyediaan Pangan Hasil Pertanian dan Perikanan	Revitalisasi Sarana Prasarana Rumah Potong Hewan (RPH)							
		Pembangunan Bangsal Pascapanen dan Teknik Pengemasan							
		Pembangunan Cold Storage Pertanian							
		Revitalisasi Sistem Rantai Distribusi Perikanan							
		Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Pertanian dan Perikanan							
	b. Peningkatan Sistem Logistik Pertanian dan Perikanan	Peningkatan Konsumsi Ikan Nasional dan Diversifikasi Produk Perikanan							
		Pengembangan Sistem Ketelurusan Produk Perikanan							
		Peningkatan Diversifikasi Konsumsi Pangan							
		Peningkatan Kualitas Gizi Masyarakat	Gerakan pemenuhan Gizi 1000 hari Pertama kehidupan	PROGRAM KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN	DINAS PANGAN	320	250.000.000		
		Bantuan Pangan untuk Masyarakat Miskin	Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)	PROGRAM PENGEMBANGAN DISTRIBUSI, STABILITAS, DAN CADANGAN PANGAN	DINAS PANGAN	5	300.000.000		

No	Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Kegiatan (Proyek) Daerah	Program Daerah	Perangkat Daerah	Output/ Target	Pagu (APBD) (Rupiah)	Lokasi	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Penanganan Daerah Rawan Pangan	PROGRAM KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN	DINAS PANGAN	1.000	400.000.000		
		Peningkatan Keamanan dan Mutu Pangan	Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Segar	PROGRAM PENINGKATAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN	DINAS PANGAN	7	400.000.000		
			Pengembangan Pelaku usaha produk PSAT Lokal (Sertifikat Prima 3, Sertifikat Prima 2 dan Registrasi PSAT)	PROGRAM PENINGKATAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN	DINAS PANGAN	50	400.000.000		
			Penguatan Sarana dan Prasarana Pengawasan Keamanan Pangan Segar	PROGRAM PENINGKATAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN	DINAS PANGAN	7	500.000.000		
			Bimtek Peningkatan kualitas SDM di bidang pengawasan keamanan pangan	PROGRAM PENINGKATAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN	DINAS PANGAN	1	150.000.000		
			Pengadaan Mobil Lab Keliling Pengawasan Keamanan Pangan	PROGRAM PENINGKATAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN	DINAS PANGAN	1	470.000.000		
			Penguatan kerjasama dalam investigasi Pengawasan Penyelenggaraan Keamanan Pangan Daerah (Tim Jejaring Keamanan Pangan)	PROGRAM PENINGKATAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN	DINAS PANGAN	1	400.000.000		
		Penguatan Karantina Pertanian dan Perikanan							

No	Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Kegiatan (Proyek) Daerah	Program Daerah	Perangkat Daerah	Output/ Target	Pagu (APBD) (Rupiah)	Lokasi	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	c. Peningkatan Kualitas Konsumsi Pangan dan Gizi Masyarakat	Pembangunan dan Rehabilitasi Bendungan dan Embung							
		Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi sawah dan tambak	Perencanaan pembangunan jaringan irigasi	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	DINAS PUPR	1 Dok	400.000.000		
			Pembangunan jaringan irigasi			51 ha	1.225.000.000		
			Penyusunan regulasi irigasi			1 Dokumen Perda	400.000.000		
			Inspeksi Kondisi Jaringan Irigasi			1 Dok	100.000.000		
			Pembangunan jaringan irigasi tersier	PROGRAM PENGEMBANGAN PRASARANA, SARANA PERTANIAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN	DINAS PERTANIAN	1000 ha	3.500.000.000		
		Optimasi dan Perluasan Lahan	Pengembangan optimasi lahan	PROGRAM PENGEMBANGAN PRASARANA, SARANA PERTANIAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN	DINAS PERTANIAN	1 LP	3.250.000.000		
			Audit lahan pertanian	PROGRAM PENGEMBANGAN PRASARANA, SARANA PERTANIAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN	DINAS PERTANIAN				

No	Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Kegiatan (Proyek) Daerah	Program Daerah	Perangkat Daerah	Output/ Target	Pagu (APBD) (Rupiah)	Lokasi	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Alat dan mesin pertanian	Pengembangan pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian	PROGRAM PENGEMBANGAN PRASARANA, SARANA PERTANIAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN	DINAS PERTANIAN	2	600.000.000		
		Peningkatan sarana dan prasarana perbibitan							
		Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan hewan							
	d. Penyediaan Sarana Prasarana Pertanian dan Perikanan	Kebijakan Harga Bahan Pangan							
		Penjaminan Cadangan Pangan Pemerintah							
		Efektivitas Operasi Pasar							
		Kebijakan Perdagangan Luar Negeri Bahan Pangan							
		Cadangan Pangan Masyarakat							
	e. Penguatan Cadangan dan Stabilisasi Harga Pangan	Peningkatan Produksi Padi	Fasilitasi penerapan budidaya padi	PROGRAM PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	DINAS PERTANIAN	2.000	750.000.000		
		Peningkatan Produksi jagung	Pengembangan Komoditi pangan dengan penerapan GP-PTT Jagung	PROGRAM PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	DINAS PERTANIAN	200 Ha	2.250.000.000		

No	Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Kegiatan (Proyek) Daerah	Program Daerah	Perangkat Daerah	Output/ Target	Pagu (APBD) (Rupiah)	Lokasi	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		PeningkatanProduksiKedelai							
		PeningkatanProduksiGula							
		PeningkatanProduksiDaging							
		PeningkatanProduksiAneka Cabai	Fasilitasi penerapan budidaya cabai di KTM Batu Betumpang	PROGRAM PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	DINAS PERTANIAN	30	1.500.000.000		
		PeningkatanProduksiBawangMerah	Fasilitasi penerapan budidaya bawang merah di KTM Batu Betumpang	PROGRAM PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	DINAS PERTANIAN	15	500.000.000		
		PeningkatanProduksiikan danUdang							
		PeningkatanProduksiGaram							
3	Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas SD Air								
	a. Perlindungan Sumber Air dan Ekosistemnya	Pembangunan BangunanKonservasiTana h danAir (KTA) SipilTeknis							
		PengendalianErosi, SedimentasisertaAbrasi melaluiKonservasiTanah danAir (KTA) secaraVegetatif							



No	Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Kegiatan (Proyek) Daerah	Program Daerah	Perangkat Daerah	Output/ Target	Pagu (APBD) (Rupiah)	Lokasi	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Perlindungan Sumber Air Berbasis Masyarakat							
	b. Pembangunan Sarana Prasarana Sumber Daya Air	Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur Tampung Air							
		Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur Pengendalian Bencana Terkait Air (Banjir dan Kekeringan)							
		Pengembangan dan Pengelolaan Daerah Pesisir Terpadu.							
		Penyediaan dan Peningkatan Infrastruktur Air Baku.							
	c. Pemulihan dan Pengendalian Air Permukaan dan Air Tanah	Pemulihan dan Pengendalian Air Tanah	DED dan pembangunan fasilitas pemakaian Air Tanah	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN GEOLOGI DAN AIR TANAH	DINAS ESDM				
		Pemulihan dan Pengendalian Perairan Darat (Sungai, Pantai, Rawa, Lahan Basah, Situ Dll)							
		Pengendalian Sedimentasi di Waduk dan Danau Prioritas							
		Restorasi Badan Air Danau Prioritas Nasional							

No	Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Kegiatan (Proyek) Daerah	Program Daerah	Perangkat Daerah	Output/ Target	Pagu (APBD) (Rupiah)	Lokasi	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	d. Peningkatan Kesadaran Masyarakat dan Penegakan Hukum dalam Pengelolaan Sumber Daya Air	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Daerah Tangkapan Air							
		Early Warning System Berbasis Tata Ruang, Pengelolaan DAS, Tingkat Bahaya Longsor, Banjir, dan Kekeringan							
		Penegakan Hukum Pelanggaran Pengelolaan Air Permukaan dan Air Tanah							
4	Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan								
	a. Pencegahan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SDA DAN EKOSISTEM	DINAS KEHUTANAN	3.164	500.000.000		
		Peningkatan kesadaran dan kapasitas pemerintah, swasta dan masyarakat terhadap lingkungan hidup	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SDA DAN EKOSISTEM	DINAS KEHUTANAN	80	852.073.000		
			Pembangunan sumber benih dan konservasi ex situ Gaharu dan Pelawan			20	400.000.000		
			Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan			20	177.515.000		

No	Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Kegiatan (Proyek) Daerah	Program Daerah	Perangkat Daerah	Output/ Target	Pagu (APBD) (Rupiah)	Lokasi	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pencegahan perikanan ilegal tidak dilaporkan dan tidak dicatat							
	b. Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Hidup	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Penyusunan Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH)	PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1 Dokumen	150.000.000		
			Penyusunan Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup			100%	1.500.000.000		
			Penyusunan Dokumen Reviu Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup						
		Pengelolaan dan Peningkatan Kualitas Informasi Cuaca, Iklim, Dan Kegempaan							
	c. Rehabilitasi dan pemulihan kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Restorasi Kerusakan Lingkungan Hidup							
		Pemulihan Kualitas Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup	Evaluasi Kinerja Penilaian AMDAL dan Pemeriksaan UKL-UPL serta Penerbitan Izin Lingkungan yang dilakukan Kabupaten/Kota	PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN DAN PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	7 Rekomendasi	121.912.000		
			Penyediaan informasi AMDAL, UKL-UPL dan Izin Lingkungan			1 Kali	150.000.000		
		Rehabilitasi Dan Konservasi Pesisir Dan							

No	Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Kegiatan (Proyek) Daerah	Program Daerah	Perangkat Daerah	Output/ Target	Pagu (APBD) (Rupiah)	Lokasi	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Laut							
	d. Penguatan ketahanan terhadap bencana	Pengelolaan dan Peningkatan Kualitas Data dan Informasi, dan Proyeksi Kebencanaan							
		Penguatan Regulasi dan Kapasitas Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, serta Masyarakat untuk Ketangguhan Bencana							
		Peningkatan Kesiapsiagaan dan Mitigasi dalam Pengurangan Risiko Bencana							
		Penanganandan PemulihanSaranaPrasaranaPascabencana							
5	Pemantapan Regulasi dan Penguatan Kelembagaan Energi, Pangan dan SD Air								
	a. Penyempurnaan Regulasi Migas dan Pertambangan	Revisi Undang-Undang Migas							
		Revisi Undang-Undang Minerba							
	b. Penguatan Pembiayaan Pertanian dan Perikanan	Fasilitasi Kredit PertaniandanPerikanan							

No	Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Kegiatan (Proyek) Daerah	Program Daerah	Perangkat Daerah	Output/ Target	Pagu (APBD) (Rupiah)	Lokasi	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Asuransi Pertanian dan Nelayan							
		Subsidi Pupuk							
		Bantuan Gagal Panen							
		Pemanfaatan Sistem Resi Gudang							
	c. Pemanfaatan Inovasi Teknologi dan Penguatan Penyuluhan-pendampingan Pertanian dan Perikanan	Penelitian Pertanian dan Riset Perikanan							
		Diseminasi Hasil Penelitian							
		Penguatan Infrastruktur Litbang							
		Penyuluhan dan Pendampingan Perikanan							
		Penguatan Kelembagaan Pertanian dan Perikanan							
		Penyempurnaan Statistik Pertanian dan Perikanan							
		Pelatihan Petani, Nelayan, Dan Aparatur Pertanian dan Perikanan							
		Penyuluhan dan Pendampingan Petani di							

No	Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Kegiatan (Proyek) Daerah	Program Daerah	Perangkat Daerah	Output/ Target	Pagu (APBD) (Rupiah)	Lokasi	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Sentra Produksi Pangan							
	d. Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Sumber Daya Air	Penyelarasan Tata Ruang dengan Pengelolaan DAS							
		Peningkatan Data Hidrologi, Hidrogeologi, dan Hidrometeorologi yang Terintegrasi							
		Sinergi Kelembagaan Pengelolaan DAS dan Sumber Daya Air							
		Percepatan Penyusunan Regulasi Sumber Daya Air							
	e. Penguatan Kelembagaan di bidang Lingkungan Hidup	Penguatan Kelembagaan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup di Daerah							
		Pengawasan Izin Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup							
<b>V.</b>	<b>Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu</b>								
	1 Kamtibmas dan Keamanan Siber								

No	Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Kegiatan (Proyek) Daerah	Program Daerah	Perangkat Daerah	Output/ Target	Pagu (APBD) (Rupiah)	Lokasi	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	a. Penciptaan Kondisi Aman yang Cepat dan Tanggap	Peningkatan Pelayanan Kepolisian yang Bermartabat							
		Pencegahan Proaktif Gangguan Kejahatan dan Ketertiban Masyarakat							
		Penanganan Gangguan Kejahatan dan Ketertiban Masyarakat							
	b. Penanganan Konflik Sosial	Pemantapan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (PKS) dan Pelaksanaan Renaksi di Pusat dan Daerah	Penyelenggaraan Penanganan Konflik Sosial	PROGRAM PENGUATAN KEWASPADAAN NASIONAL	KESBANGPOL	1 Paket	600.000.000,00		
			Penguatan Ruang Publik bagi Pencegahan dan Penyelesaian Konflik dalam Rangka Ketahanan Masyarakat.	PROGRAM PENGUATAN KEWASPADAAN NASIONAL	KESBANGPOL	4 dokumen	90.000.000		
			Pemetaan Situasi dan kondisi Konflik sosial di daerah	PROGRAM PENGUATAN KEWASPADAAN NASIONAL	KESBANGPOL	1 laporan	195.000.000		
	c. Penanganan Penyalahgunaan Narkoba	Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba	Kegiatan Penyuluhan Pencegahan dan Penanggulangan Narkotika.	PROGRAM KETAHANAN EKONOMI, SENI, BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN	KESBANGPOL	350 orang	303.000.000		
			Kegiatan Penyuluhan Pekat Terhadap Masyarakat	PROGRAM KETAHANAN EKONOMI, SENI, BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN	KESBANGPOL	400 orang	275.000.000		

No	Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Kegiatan (Proyek) Daerah	Program Daerah	Perangkat Daerah	Output/ Target	Pagu (APBD) (Rupiah)	Lokasi	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Forum komunikasi dan koordinasi pencegahan penyalahgunaan narkoba	PROGRAM KETAHANAN EKONOMI, SENI, BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN	KESBANGPOL	4 dokumen	110.000.000		
			Kegiatan Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Narkotika	PROGRAM KETAHANAN EKONOMI, SENI, BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN	KESBANGPOL	1 laporan	231.000.000		
	d. Penguatan Kelembagaan Siber serta Identifikasi, Deteksi, Proteksi, Penanggulangan, dan Pemulihan Dampak Kejahatan Siber	Penguatan Kelembagaan Siber dan Pengamanan Aktivitas Siber Nasional							
	e. Penanggulangan Terorisme	Peningkatan Pelibatan Masyarakat dalam Pencegahan Terorisme							
		Optimalisasi Peran K/L/D dalam Penanggulangan Terorisme	Penguatan Kerjasama Intelijen lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pencegahan Konflik Sosial dan Aksi Terorisme di Bangka Belitung.	PROGRAM PENGUATAN KEWASPADAAN NASIONAL	KESBANGPOL	4 laporan	300.000.000,00		
			Penguatan Kewaspadaan dan Deteksi Dini serta Pengawasan Orang Asing di Bangka Belitung.	PROGRAM PENGUATAN KEWASPADAAN NASIONAL	KESBANGPOL	4 laporan	105.000.000		
			Peningkatan Kewaspadaan dan Deteksi Dini bagi Pemuda dan Pelajar terhadap Potensi Terorisme dan Radikalisme.			350 orang	330.000.000		
		Rehabilitasi Eks-							



No	Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Kegiatan (Proyek) Daerah	Program Daerah	Perangkat Daerah	Output/ Target	Pagu (APBD) (Rupiah)	Lokasi	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		kombatan dan Individu Terpapar Paham Radikal							
		Counter Narrative Strategy dan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan							
2	Kesuksesan Pemilu								
	a. Penguatan Lembaga Demokrasi	Peningkatan kualitas tahapan Pemilu 2019							
		Penguatan Pengawasan Partisipatif Masyarakat							
		Pemutakhiran Data Pemilih							
		Penguatan Pokja IDI di Daerah							
		Bantuan Keuangan kepada Parpol							
	b. Peningkatan HakHak Politik dan Kebebasan Sipil	Pendidikan Pemilih							
		Pendidikan dan Dialog Politik							
		Pemberdayaan Organisasi Masyarakat	Evaluasi dan Verifikasi Data Ormas.	PROGRAM KETAHANAN EKONOMI, SENI, BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN	KESBANGPOL	22 ormas	165.000.000		

No	Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Kegiatan (Proyek) Daerah	Program Daerah	Perangkat Daerah	Output/ Target	Pagu (APBD) (Rupiah)	Lokasi	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Forum Komunikasi dan Kerjasama Antar Umat Beragama.			3 rekomendasi	110.000.000		
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Ormas.			80 orang	77.000.000		
			Strategi Peningkatan Pemantapan Ketahanan Ekonomi.			4 rekomendasi	160.000.000		
			Tim Terpadu Pengawasan Ormas dan Ormas Asing (NGO) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			4 laporan	275.000.000		
		Peningkatan Kualitas dan Keterbukaan Informasi							
	c. Netralitas Birokrasi dalam Pemilu 2019	Pengawasan Kode Etik dan Kode Perilaku ASN	Pembinaan dan penyelesaian kasus pelanggaran disiplin ASN	PROGRAM PENILAIAN KINERJA, DISIPLIN, INFORMASI DAN KESEJAHTERAAN ASN	BKPSDM	1200 orang	1.270.000.000		
		Pembinaan Integritas dan Penegakan Disiplin ASN	Monitoring dan evaluasi kinerja ASN	PROGRAM PENILAIAN KINERJA, DISIPLIN, INFORMASI DAN KESEJAHTERAAN ASN	BKPSDM	3500 orang	175.000.000		
			Peningkatan kesejahteraan, pemberian penghargaan dan pengembangan profesi ASN	PROGRAM PENILAIAN KINERJA, DISIPLIN, INFORMASI DAN KESEJAHTERAAN ASN	BKPSDM	85 orang	9.929.020.000		

No	Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Kegiatan (Proyek) Daerah	Program Daerah	Perangkat Daerah	Output/ Target	Pagu (APBD) (Rupiah)	Lokasi	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Penguatan Manajemen Data Disiplin ASN	Perencanaan dan pengadaan ASN	PROGRAM PENGADAAN PEGAWAI, MUTASI, PROMOSI, DAN KEPANGKATAN	BKPSDM	150 orang	1.286.094.000		
			Pengelolaan administrasi kepegangatan dan pensiun	PROGRAM PENGADAAN PEGAWAI, MUTASI, PROMOSI, DAN KEPANGKATAN	BKPSDM	900 orang	200.000.000		
		Penegakan Peraturan Netralitas							
	d. Pengamanan Pemilu	Pengamanan Pemilu	Bimtek pengamanan pemilu dan pemilukada bagi satlinmas se Provinsi Kep. Bangka Belitung	PROGRAM PERLINDUNGAN MASYARAKAT	SATPOL PP	100 orang satlinmas	236.076.000		
	3 Pertahanan Wilayah Nasional								
	a. Pengamanan Wilayah Laut	Pengamanan dan Pengawasan Wilayah dan Sumber Daya Laut							
	b. Pengamanan Kawasan Perbatasan dan Kedaulatan Negara	Pertahanan Wilayah Perbatasan (Darat dan Pulau Terdepan)							
		Pengamanan Wilayah Udara Nasional							
	c. Penguatan Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi	Pemenuhan MEF II							
	4 Kepastian Hukum dan Reformasi Birokrasi								

No	Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Kegiatan (Proyek) Daerah	Program Daerah	Perangkat Daerah	Output/ Target	Pagu (APBD) (Rupiah)	Lokasi	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	a. Penegakan Hukum	Pengembangan Kapasitas SDM Apgakum melalui pendidikan dan pelatihan Terpadu							
		Optimalisasi penerapan kebijakan keadilan restoratif dalam Penanganan Perkara Pidana							
		Pengembangan Implementasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi							
		Peningkatan Kualitas Penanganan Perkara Pemilihan Umum							
		Implementasi Pencegahan Dan Penanganan Pelanggaran HAM							
		Optimalisasi Pemenuhan Akses Terhadap Keadilan							
		Peningkatan Kualitas Regulasi							
		Penanganan Overcrowded di Lembaga Masyarakat							

No	Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Kegiatan (Proyek) Daerah	Program Daerah	Perangkat Daerah	Output/ Target	Pagu (APBD) (Rupiah)	Lokasi	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	b. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Integrasi Upaya Anti Korupsi	Penyusunan Laporan Tim Aksi PPK Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PEMERINTAHAN DAN APARATUR	INSPEKTORAT	4 laporan	125.000.000		
			Penilaian Internal Zona Integritas			4	200.000.000		
			Monev Laporan Gratifikasi			12 laporan	150.000.000		
			Penanganan whistle Blower System			12 laporan	128.000.000		
		Transparansi Kepemilikan Manfaat (BO)*							
		Optimalisasi Pengelolaan Aset Hasil Tipikor							
	c. Pelaksanaane-Governmentyang Terintegrasi	Penerapan aplikasi e-manajemen kepegawaian yang terintegrasi di pemerintah pusat dan daerah							
		Penerapan aplikasi e-arsip yang terintegrasi di pemerintah pusat dan daerah							
		Penerapan aplikasi e-planning, e-budgeting, e-procurement, e-monev, e-performance yang	Peningkatan Layanan dan Dukungan Pengadaan Secara Elektronik	PROGRAM PENINGKATAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK	BIRO PELAYANAN PENGADAAN	2%	962.824.500		

No	Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Kegiatan (Proyek) Daerah	Program Daerah	Perangkat Daerah	Output/ Target	Pagu (APBD) (Rupiah)	Lokasi	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		terintegrasi di pemerintah pusat dan daerah							
			Peningkatan Pelayanan dan Registrasi dan Verifikasi			1 Aplikasi	781.825.000		
			Pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik			12	1.159.235.000		
			Peningkatan Fungsi LPSE			12 bulan	2.116.136.000		
			Peningkatan Fungsi Pelayanan Aplikasi SIMDA BMD	Peningkatan Fungsi Pelayanan Aplikasi SIMDA BMD	BAKUDA	1 laporan	450.000.000		
		Penerapan aplikasi e-services dan e-pengaduan yang terintegrasi di pemerintah pusat dan daerah							
	d. Talent Management Nasional	Integrasi Data Kepegawaian							
		Pembangunan kelembagaan pengelolaan manajemen talenta nasional							
	e. Pengawasan Program Prioritas Nasional 2019	Pengawasan Intern PSN							

No	Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Kegiatan (Proyek) Daerah	Program Daerah	Perangkat Daerah	Output/ Target	Pagu (APBD) (Rupiah)	Lokasi	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pengawasan Prioritas Nasional							
5	Efektivitas Diplomasi								
	a. Perlindungan dan Pelayanan WNI di Luar Negeri	Memperkuat Perlindungan dan Pelayanan WNI di Luar Negeri							
		Integrasi Database WNI di Luar Negeri sesuai Kebijakan Satu Data							
		Dukungan terhadap Pelaksanaan Pemilu 2019 di Luar Negeri							
	b. Penguatan Diplomasi Maritim, Politik, dan Keamanan	Perundingan Batas Laut dan Darat Indonesia dengan Negara Prioritas Terpilih							
		Kerjasama Teknis dan Fungsional Kemaritiman							
		Optimalisasi Keanggotaan Indonesia pada Dewan Keamanan PBB Tahun 2019							
		Pencapaian Visi 4,000 Peacekeepers							
		Penyelesaian Penamaan Pulau pada Tahun 2019							

No	Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Kegiatan (Proyek) Daerah	Program Daerah	Perangkat Daerah	Output/ Target	Pagu (APBD) (Rupiah)	Lokasi	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	c. Penguatan Diplomasi Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Internasional								
		Penguatan Kelembagaan Pusat-Daerah serta Efektifitas Diplomasi Perundingan Batas Antar Negara (Kemendagri)							
		Penyediaan Data Dan Informasi Geospasial Dalam Perundingan Batas Laut dan Darat Indonesia dengan Negara Prioritas Terpilih (BIG)							
		Identifikasi/Inventarisasi Pilar Titik Referensi Batas Negara Wilayah Laut Dan Udara(BNPP)							
		Penataan Tata Ruang Kawasan Perbatasan (Kementerian ATR/BPN)							
	d. Pemantapan Peran Indonesia di ASEAN	Penguatan Peran Swasta dalam KSST							
		Indonesia-Africa Infrastructure Dialogue							
		Diplomasi Perikanan Regional							



No	Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Kegiatan (Proyek) Daerah	Program Daerah	Perangkat Daerah	Output/ Target	Pagu (APBD) (Rupiah)	Lokasi	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Penyelesaian dan Implementasi Perundingan CEPA (EFTA, EU, Turki, Chile, dan Australia)							
		Optimalisasi Keanggotaan Indonesia pada Dewan Keamanan PBB Tahun 2019							
		Penguatan Kerja Sama Pembangunan Internasional untuk Mendukung Peningkatan Perdagangan dan Investasi (KSST, Reverse Linkage, Kerja Sama Global, dan lain-lain di Aspasaf)							

## 4.2. PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2019

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017, disusun dengan memperhatikan Visi dan Misi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung yang termuat dalam RPJMD Tahun 2017-2022 serta Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019. Agar tercapainya Visi dan Misi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, diperlukan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan.

Prioritas pembangunan daerah merupakan rumusan yang disusun sebagai upaya untuk mencapai target sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Perumusan prioritas pembangunan didasari dari: 1) hasil evaluasi capaian pembangunan sampai dengan tahun sebelumnya dan tahun berjalan, 2) isu strategis global/nasional/daerah, 3) arahan pemerintah pusat yang relevan dengan kondisi daerah dan, 4) arahan RPJMD 2017-2022 untuk tahun 2019.

Penyusunan prioritas dilakukan dengan memperhatikan beberapa kriteria, terutama yang berkorelasi dengan upaya untuk:

- 1) pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, seperti terhadap SDG's, Standar Pelayanan Minimal, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan pekerjaan;
- 2) pencapaian visi dan misi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022;
- 3) pengembangan sektor/bidang yang terkait dengan prioritas dan keunggulan kompetitif daerah; dan
- 4) penyelesaian isu-isu strategis daerah.

Prioritas pembangunan daerah berisi program-program unggulan yang paling tinggi korelasinya (*leading indicators*) bagi tercapainya target sasaran pembangunan daerah pada tahun 2019. Dalam penentuan prioritas pembangunan, telah diidentifikasi beberapa permasalahan pembangunan daerah yang bersifat internal dan eksternal, sebagaimana telah diuraikan pada bab II. Dengan demikian suatu program pembangunan daerah merupakan program atau kumpulan program unggulan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022 yang didasarkan pada hasil perumusan secara teknokratis.

Adapun prioritas pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019, yaitu:

### 1. PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN AGROPOLITAN

Fokus kegiatan Memperluas lahan produksi lada di Bangka Belitung dalam rangka Mengembalikan lada sebagai produk agrobisnis andalan Bangka Belitung sehingga kejayaan Babel sebagai-Provinsi Lada bisa dicapai kembali; Membangun pusat penelitian dan pengembangan rekayasa lada maupun produk perkebunan lainnya seperti karet dan sawit di Provinsi Bangka Belitung; Memberikan pelatihan agrobisnis profesional kepada petani-petani di Bangka Belitung sehingga petani mampu memproduksi produk pertanian (khususnya lada) dengan kualitas unggul; Memberikan bantuan bibit dan sarana pendukung pengembangan agrobisnis lainnya agar petani memperoleh hasil optimal.

## **2. PENGEMBANGAN PARIWISATA**

Fokus kegiatan Menjadikan Bangka Belitung sebagai destinasi pariwisata bertaraf internasional melalui event-event seni - budaya atau olahraga bernuansa bahari level nasional/internasional seperti, Festival Budaya Melayu, Festival Kuliner Bangka-Belitung, Karnaval Budaya serumpun Sebalai, Triathlon, Maraton, dll; Rebranding pantai-pantai di Babel melalui desain PR yang menarik seperti cerita atau sejarah keunggulan pantai tersebut dibanding lainnya; Memberikan insentif kepada investor pariwisata untuk membangun bisnis pariwisatanya di Bangka Belitung melalui pembangunan infrastruktur (jalan, listrik, air, internet, dll) secara memadai demi pengembangan konsep waterfront city

## **3. PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT**

Fokus kegiatan Mengembangkan bisnis UMKM di Bangka Belitung agar tetap kompetitif di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) melalui Bantuan Promosi (Gelar Pameran UMKM), temu investor atau buyer (Business Gathering), dan pendampingan pelatihan kapasitas UMKM (Training); Memberikan kemudahan bagi UMKM untuk mengakses kredit pengembangan usaha; Melakukan revitalisasi pasar-pasar tradisional di Bangka Belitung menjadi pasar yang bersih sehingga bisa bersaing dengan pasar swalayan modern; Pendirian dan Optimalisasi peran koperasi untuk membantu para petani dan pedagang kecil untuk mencegah penghisapan para tengkulak dan rentenir

## **4. PENGEMBANGAN ENERGI DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN**

Fokus kegiatan Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur secara rutin, jalan penghubung antar Kabupaten yang menjadi tanggung jawab Gubernur harus dibangun dengan kondisi baik sehingga arus barang, jasa dan manusia bisa optimal; Pembangunan pelabuhan Batu Beriga dan jembatan penghubung antara pulau Bangka-Belitung untuk menyeimbangkan sektor pariwisata kedua daerah; Pembangunan Masjid Terapung sebagai ikon baru Bangka Belitung sekaligus implementasi masyarakat melayu religius dan pengembangan sektor wisata unggulan; Pembangunan Museum GMT di Bangka dan Belitung untuk mendokumentasikan peristiwa alam tersebut secara lengkap sekaligus menguatkan brand babel sebagai tempat GMT paling bersejarah; Meningkatkan status bandara Depati Amir ( Bangka Tengah) dan HAS Hanandjoedin (Belitung) sebagai bandara udara internasional dalam rangka mendukung Provisi Bangka Belitung sebagai destinasi Pariwisata level Internasional; Melakukan inisiasi koordinatif yang intensif antara Provinsi Babel, kemen ESDM, PLN dan Investor swasta dalam membangun PLTU sehingga PLTU di Babel bisa segera direalisasikan untuk membangun kemandirian Energi;

## **5. PENINGKATAN PEMBANGUNAN DEMOKRASI**

Fokus kegiatan mengoptimalkan pembuatan perda inisiatif DPRD; mendorong keterwakilan perempuan dalam lembaga politik; meningkatkan kebebasan sipil masyarakat; meningkatkan hak politik masyarakat; meningkatkan pembinaan lembaga demokrasi.

Prioritas daerah tersebut diselesaikan melalui program dan kegiatan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

- 1) Memenuhi kriteria holistik-tematik, integratif dan spasial;

- 2) Program/kegiatan harus merupakan kewenangan Provinsi dan Pemerintah Pusat, serta sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah bersangkutan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
- 3) Memiliki korelasi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2017-2022;
- 4) Merupakan respon relevan terhadap isu strategis dan masalah yang mendesak dan faktual yang dihadapi pada tahun 2019;
- 5) Program dan kegiatan terpilih merupakan program/kegiatan yang menyentuh secara langsung bagi usaha pemecahan masalah mendasar yang dihadapi oleh masyarakat;
- 6) Selaras dan konsisten dengan kebijakan pemerintah pusat untuk mengantisipasi dan penyelesaian target-target pembangunan nasional; dan
- 7) Sesuai dengan pagu anggaran indikatif sementara.

#### 4.2.1. Penyelarasan Permasalahan Pembangunan, Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Daerah

**Tabel IV.8**

Keselarasan Permasalahan pembangunan, Isu Strategis dan Prioritas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019

No.	Permasalahan	Isu Strategis	Prioritas Daerah
1	2	3	4
1	Rendahnya harga komoditi pertanian seperti sawit, Karet. Dan lada	1 Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang masih rendah	1 Pengembangan Pembangunan Agropolitan
2	Masih rendahnya kesejahteraan petani yang terlihat dari nilai tukar petani		
3	Brlum optimalnya produktivitas perikanan baik dari perikanan tangkap maupun perikanan budidaya		2 Pengembangan pariwisata
4	Belum optimalnya penerapatan teknologi budidaya ikan di daerah pantai, tambak, dan air tawar		
5	Objek dan destinasi wisata belum dikelola dengan baik		3 Peningkatan Ekonomi Masyarakat
6	Belum memadainya sarana dan prasana penunjang untuk pengembangan sektor pariwisata		
7	Rendahnya kualitas Sumber daya manusia dalam bidang kepariwisataan		

No.	Permasalahan	Isu Strategis	Prioritas Daerah
1	2	3	4
8	Belum tersusunnya peraturan yang mengatur zonasi untuk bagi wilayah penambangan Rakyat (WPR)		
9	Masih rendahnya tata kelola dan nilai tambah produk sumber daya mineral;		
10	Belum optimalnya peningkatan pendapatan daerah dari sumber-sumber pembiayaan yang sah		
11	Terbatasnya sumber-sumber pendapatan baru		
12	Produktivitas bahan pangan terutama padi masih jauh di bawah konsumsi masyarakat	2 Kemandirian Pangan Rendah	1 Pengembangan Pembangunan Agropolitan
13	Tingginya ketergantungan daerah terhadap produk-produk dan bahan baku yang berasal dari luar daerah untuk kebutuhan konsumsi baik komoditas pangan mau pun komoditas non pangan		
14	Belum optimalnya Pengembangan transportasi laut dan udara dalam mendukung pengendalian inflasi	3 Pengendalian inflasi	1 Peningkatan Ekonomi Masyarakat
15	Belum optimalnya pengembangan sektor unggulan daerah	4 Belum optimalnya pengembangan Potensi Unggulan Daerah	1 Pengembangan Pembangunan Agropolitan
			3 Pengembangan pariwisata
16	Belum optimalnya penyediaan data konsep potensi dan peluang investasi yang siap ditawarkan.	5 Tingkat Investasi Rendah	1 Peningkatan Ekonomi Masyarakat
17	Belum optimalnya pengembangan sistem informasi pelayanan perizinan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.		
18	Belum optimalnya pemberian insentif dan kemudahan bagi para investor dalam berinvestasi di provinsi Kepulauan Bangka Belitung		

No.	Permasalahan	Isu Strategis	Prioritas Daerah
1	2	3	4
19	Belum memadainya ketersediaan infrastruktur strategis (energi, pelabuhan, air bersih)		
20	Belum optimalnya pengelolaan / pemanfaatan Kawasan Peruntukan Industri di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	6 Potensi sumber daya di kawasan strategis belum terbangun dengan baik	1 Pengembangan Pembangunan Agropolitan
			2 Pengembangan pariwisata
21	Kondisi kemantapan menurun dengan meningkatnya Kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam & anomali cuaca	7 Kualitas infrastruktur dan konektivitas masih terbatas	1 Pengembangan Energi dan Infrastruktur Kewilayahan
22	Angka Rata-rata lama sekolah yang masih rendah dimana tahun 2017 sebesar 7,78 tahun	8 Tingkat pendidikan SDM masih rendah	1 Pembangunan Berdemokrasi
23	Tingginya angka anak putus sekolah (Drop Out) khususnya pendidikan menengah		
24	Usia harapan hidup yang masih rendah dimana tahun 2017 sebesar 69,99 tahun	9 Mutu pelayanan kesehatan masih terbatas	
25	Angka kematian ibu yang masih tinggi dimana tahun 2016 sebesar 92,23		
26	Kurangnya penerapan perda yang diterbitkan.	10 Reformasi birokrasi dan pelayanan publik belum optimal	
27	Kurangnya penerapan Pergub dan Keputusan Gubernur yang diterbitkan		
28	Rendahnya tingkat pelayanan publik		
29	Rendahnya pengawasan terhadap pelaksanaan apbd		
30		11 Pelaksanaan Pilpres dan Pemilu Legislatif	
31	Kurangnya pemahaman pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan alam, yang ditunjukkan dengan masih maraknya kegiatan penambangan liar/TI dan penebangan liar (ilegallogging)	12 Rehabilitasi dan pengendalian lingkungan hidup	1 Peningkatan Ekonomi Masyarakat

No.	Permasalahan	Isu Strategis	Prioritas Daerah
1	2	3	4
32	Kurangnya koordinasi dan kerjasama dalam menangani masalah-masalah perusakan alam yang lintas sektoral dan lintas wilayah		
33	Masih lemahnya koordinasi dalam penanganan bidang kebencanaan baik pra, saat terjadi bencana maupun pasca bencana	13 Penanggulangan bencana	1 Peningkatan Ekonomi Masyarakat

#### 4.2.2. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Prioritas Nasional

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2019 (RPJMN 2015-2019): **“Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas”**, maka sasaran yang harus dicapai pada akhir tahun 2019, sesuai dengan (RPJMN 2015-2019), antara lain:

1. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen (\*); dengan sasaran per wilayah; Sumatera sebesar 7,9 persen; Jawa-bali sebesar 7,4-8,2 persen; Nusa Tenggara sebesar 7,3-8,1 persen; Kalimantan sebesar 7,3-8,0 persen; Sulawesi sebesar 8,7-9,6 persen; Maluku sebesar 7,8-8,6 persen dan Papua sebesar 16,5-18,2 persen;
2. Pencapaian target tingkat kemiskinan sebesar 7,0-8,0 persen (\*); dengan sasaran Tingkat Kemiskinan Per Wilayah: Sumatera sebesar 7,3 persen; Jawa-bali sebesar 5,5-5,0 persen; Nusa Tenggara sebesar 9,6-8,7 persen; Kalimantan sebesar 3,4-3,1 persen; Sulawesi sebesar 5,8-5,3 persen; Maluku sebesar 7,6-6,9 persen dan Papua sebesar 15,9-14,4 persen;
3. Pencapaian target tingkat pengangguran sebesar 4,0-5,0 persen (\*); dengan sasaran Tingkat Pengangguran Per Wilayah: Sumatera sebesar 5,0-4,5 persen; Jawa-bali sebesar 5,8-5,2 persen; Nusa Tenggara sebesar 3,3-3,0 persen; Kalimantan sebesar 4,2-3,8 persen; Sulawesi sebesar 4,1-3,7 persen; Maluku sebesar 4,9-4,4 persen dan Papua sebesar 2,9-2,6 persen; dan
4. Sasaran laju inflasi 3,5.

Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Prioritas Nasional dapat dilihat dari kesamaan indikator makro yang digunakan untuk menjadi target pembangunan secara makro baik di tingkat nasional, regional dan daerah yang tertuang dalam tabel IV.9 dibawah.

**Tabel IV.9**

Keselarasan target indikator pembangunan makro antara target Nasional, Regional Sumatera dan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019

Indikator	Tahun 2019		
	Nasional	Sumatera	Babel
(1)	(2)	(3)	(4)
Pertumbuhan Ekonomi (%)	8	7,2-8,0	4,40
Tingkat Kemiskinan %	7,0-8,0	5,6-5,1	5.15
Tingkat Pengangguran %	4,0-5,0	5,0-4,5	5,6
Laju Inflasi (%)	3,5	*	6,31

*\*) data tidak tersedia*

Sumber: RKP 2019, RPJMN 2015-2019, RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2022

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Penyusunan sasaran dan prioritas Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2019 harus diselaraskan untuk mendukung pencapaian 3 (tiga) dimensi pembangunan sebagai berikut:

1. Dimensi Pembangunan Manusia, yang terdiri dari: a) revolusi mental; b) pembangunan pendidikan; c) pembangunan kesehatan; dan d) pembangunan perumahan dan permukiman.
2. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan, yang terdiri dari: a) kedaulatan pangan; b) kedaulatan energi dan ketenagalistrikan; c) kemaritiman dan kelautan; d) pariwisata; dan kawasan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
3. Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan, yang terdiri dari: a) pemerataan antarkelompok pendapatan; b) perbatasan negara dan daerah tertinggal; c) pembangunan perdesaan dan perkotaan; dan d) pengembangan konektivitas nasional.

Untuk mencapai 3 (tiga) dimensi pembangunan, diperlukan kondisi yang kondusif yang terkait pembangunan politik, hukum, pertahanan dan keamanan. Penyelarasan 3 (tiga) dimensi pembangunan dengan 13 (tiga belas) prioritas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut sebagaimana disajikan dalam Tabel IV.10.



**Tabel IV.10**  
Keselarasan antara Dimensi Pembangunan, Prioritas dan Sasaran Daerah  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019

Dimensi Pembangunan (Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional 2019)		Prioritas Daerah	Sasaran Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Dimensi pembangunan manusia dan masyarakat	1. Revolusi Mental	Peningkatan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik	Birokrasi yang bersih dan akuntabel
			Birokrasi yang efektif dan efisien
			Birokrasi yang memiliki Pelayanan publik yang berkualitas
	2. Pembangunan Pendidikan	Pembangunan Berdemokrasi	Peningkatan Pembangunan Berdemokrasi
		Pembangunan Pendidikan	Meningkatnya kesempatan pendidikan bagi masyarakat
		Pembangunan Kesehatan	Peningkatan pembangunan kesehatan masyarakat
		4. Pembangunan Perumahan dan Permukiman	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan
2. Dimensi pembangunan sektor unggulan	1. Kedaulatan Pangan	Pengembangan Pembangunan Agropolitan	Meningkatnya produksi sub sektor pertanian, peternakan, dan perkebunan
	2. Kedaulatan Energi dan Ketenagalistrikan	Pengembangan Energi dan Infrastruktur Kewilayahan	Meningkatkan pemenuhan infrastruktur pengembangan potensi daerah
			Meningkatnya konektivitas antar wilayah
	3. Kemaritiman dan Kelautan	Pembangunan bahari	Meningkatnya produksi Sub Sektor perikanan
	4. Pariwisata	Pengembangan pariwisata	Meningkatnya pengembangan Pembangunan pariwisata
	5. Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)		Berkembangnya daerah Kawasan Ekonomi Khusus, wilayah strategis, dan cepat tumbuh
3. Dimensi pemerataan dan kewilayahan	1. Pemerataan Antarkelompok Pendapatan	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Menurunnya angka Pengangguran
			Menurunnya angka kemiskinan
			Menurunnya angka Inflasi
			Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk
		Peningkatan Pendapatan Pemerintah	Meningkatnya belanja pemerintah daerah
		Pengembangan Tata	Meningkatnya Produksi

Dimensi Pembangunan (Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional 2019)		Prioritas Daerah	Sasaran Daerah
(1)	(2)	(3)	(4)
		Kelola Pertambangan	sektor pertambangan
			Meningkatnya pembangunan berbasis industri
			Terwujudnya kemandirian energi
	2. Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan	Peningkatan Pembangunan Bidang Kebencanaan	Meningkatnya kapasitas terhadap penanggulangan bencana
		Pengendalian Lingkungan Hidup	Peningkatan Kualitas Lingkungan

Berdasarkan Tabel IV.10 di atas, maka terlihat bahwa satu prioritas daerah dapat didukung beberapa sasaran daerah. Pemilihan prioritas daerah dimaksudkan agar didalam implementasinya dapat lebih fokus dan lebih terarah dan dapat dilaksanakan oleh perangkat daerah maupun *stakeholder* lainnya. Kemudian dalam mendukung arah kebijakan RKP 2019 dapat dilihat dari keselarasan antara Arah Kebijakan, Program Prioritas dan kegiatan Prioritas RKPD 2019 Dalam Rangka Mendukung Arah Kebijakan RKP 2019 yang disajikan pada Tabel IV.11 sebagai berikut:

**Tabel IV.11**

Arah Kebijakan, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas RKPD 2019 Dalam Rangka Mendukung Arah Kebijakan RKP 2019

NO	RKP 2019	RKPD 2019				
	PRIORITAS NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	KINERJA PROGRAM		PERANGKAT DAERAH
				INDIKATOR (OUT COME)	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7
1	Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin	PROGRAM PENANGANAN FARKIR MISKIN	Persentase PMKS yang mendapatkan Bantuan Beras Sejahtera	19.64	DINSOS
	- Percepatan Pengurangan Kemiskinan	Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin	PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN	Persentase debitur yang membayar tunggakan kredit usaha peningkatan ekonomi masyarakat yang disetorkan ke Kas daerah	22	DINAS SOSIAL
			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN	Persentase Kepala Keluarga perempuan miskin yang diberdayakan	9.47	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
			PROGRAM PENANGANAN FARKIR MISKIN	Persentase PMKS (farkir miskin) yang mendapatkan Bantuan Usaha	18.15	DINSOS
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN	Persentase rumah tangga miskin yang bekerja disektor perdagangan	10%	DISPERINDAG
			PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase informasi berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan yang dapat diakses oleh masyarakat	25%	DISKOMONFO
			PROGRAM PENGENDALIAN	Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I	10.08	DINAS PPA, DUKCAPIL,

NO	RKP 2019	RKPD 2019				
	PRIORITAS NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	KINERJA PROGRAM		PERANGKAT DAERAH
				INDIKATOR (OUT COME)	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7
			PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			PENGENDALIAN PENDUDUK KB
				persentase penyelesaian kasus tenaga kerja	65%	DISNAKER
				persentase penurunan kecelakaan kerja	0.32	DISNAKER
	- Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN	Persentase kepesertaan JKN	92	DINAS KESEHATAN
			PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Masyarakat Miskin yang mendapat bantuan Pangan dan Gizi	72.07%	DINAS KESEHATAN
		Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan	PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase status kesehatan masyarakat	72.07%	DINKES
		Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan	PRORAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	Persentase angka kesakitan penyakit menular dan penyakit tidak menular	77.60%	DINKES
			PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN, KB, PEMUDA DAN PARIWISATA	Persentase Sekolah yang mengikuti lomba UKS	35 sekolah	BIRO KESRA
			PROGRAM KECIPTAKARYAAN DAN PERMUKIMAN	Persentase cakupan pelayanan akses air minum di kawasan strategis provinsi	9%	DINAS PRKP

NO	RKP 2019	RKPD 2019				
	PRIORITAS NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	KINERJA PROGRAM		PERANGKAT DAERAH
				INDIKATOR (OUT COME)	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7
				Persentase cakupan pelayanan akses air minum di kawasan permukiman kumuh Provinsi	50%	DINAS PRKP
				Persentase sarana air limbah yang layak di kawasan kumuh Provinsi	85%	DINAS PRKP
				Persentase pengurangan titik genangan air di Kawasan kumuh Provinsi	30%	DINAS PRKP
				Persentase sarana pelayanan persampahan di Kawasan permukiman kumuh Provinsi	40%	DINAS PRKP
			PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI KEBIJAKAN SOSIAL, KESEHATAN, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Prosentase Jumlah kebijakan sosial, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi yang diimplementasikan	75	BIRO KESRA
			PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase informasi tentang kesehatan masyarakat	25%	KOMINFO
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA, FASILITASI DAN AKSES INDUSTRI	Persentase kandungan nutrisi industri olahan pangan.	4.68	DISPERINDAG
			PROGRAM PENINGKATAN	Persentase perusahaan	2.73	UPTD HYPERKES

NO	RKP 2019	RKPD 2019				
	PRIORITAS NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	KINERJA PROGRAM		PERANGKAT DAERAH
				INDIKATOR (OUT COME)	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7
			PELAYANAN TEKNIS HYGIENIS PERUSAHAAN DAN KESEHATAN KERJA	yang menerapkan norma kesehatan kerja		
			PROGRAM PENINGKATAN PEMBUDAYAAN DAN PENINGKATAN PRESTASI OLAH RAGA	Persentase peserta yang mengikuti olahraga rekreasi dan tradisional	0.00%	DISKEPORA
		peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN	Persentase standarisasi pelayanan kesehatan	77.12%	DINKES
			PROGRAM PELAYANAN TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN	Jumlah pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan sesuai standar	14	UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS MEDIS DAN PENUNJANG MEDIS	Persentase Ketersediaan pelayanan di Rumah Sakit	80%	RSUP
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA RUMAH SAKIT UMUM	Persentase sarana dan prasarana yang tersedia di RSUP	80%	RSUP
			PROGRAM BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUP	Persentase dana BLUD RSUP yang digunakan untuk pelayanan langsung kemasyarakat	100%	RSUP
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS MEDIS KEJIWAAN DAN NAPZA	Persentase Penduduk yang mengalami gangguan jiwa dan mendapatkan pelayanan kesehatan	90	RSJ
			PROGRAM PENINGKATAN	Rata-rata Lama Rawat/	95	RSJ

NO	RKP 2019	RKPD 2019				
	PRIORITAS NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	KINERJA PROGRAM		PERANGKAT DAERAH
				INDIKATOR (OUT COME)	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7
			PELAYANAN TEKNIS KEPERAWATAN JIWA DAN NAPZA	Average Length of Stay (ALOS)		
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT JIWA	Persentase sarana dan prasarana yang tersedia di RSJ	95	RSJ
				Persentase peralatan kesehatan dan peralatan lainnya sesuai klasifikasi rumah sakit jiwa kelas A	95	RSJ
			PROGRAM BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSJ	Persentase dana BLUD RSJ yang digunakan untuk pelayanan langsung masyarakat	80	RSJ
			PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase informasi berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang dapat diakses masyarakat	25%	DISKOMINFO
				persentase pangan yang aman dikonsumsi	83	DINAS PANGAN
			PROGRAM KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN	Kenaikan Skor PPH Ketersediaan	81.9	DINAS PANGAN
				Persentase jumlah penduduk rawan pangan yang keluar dari katagori penduduk rawan pangan	1.1	DINAS PANGAN
			PROGRAM PENINGKATAN	Peningkatan Skor PPH	81	DINAS PANGAN

NO	RKP 2019	RKPD 2019				
	PRIORITAS NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	KINERJA PROGRAM		PERANGKAT DAERAH
				INDIKATOR (OUT COME)	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7
			KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN	konsumsi jadi 92,50		
		Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan pada peningkatan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas,	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial	19.01	DINSOS
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PANTI SOSIAL	Persentase PMKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial melalui Pelayanan Teknis Panti Sosial	18.28	UPTD PANTI SOSIAL
			PROGRAM PENGUATAN PENYELENGGARAAN PANTI SOSIAL	Persentase PMKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial melalui Penguatan Penyelenggaraan pelayanan Panti Sosial	80.62	UPTD PANTI SOSIAL
		Menjamin hak anak dalam pembangunan	PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita dalam mendukung hak anak untuk mendapatkan hak kesehatan	14.30%	DINAS KESEHATAN
		Pemenuhan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KESEHATAN	Persentase kualitas dan kuantitas sumberdaya kesehatan	83.39%	DINKES



NO	RKP 2019	RKPD 2019				
	PRIORITAS NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	KINERJA PROGRAM		PERANGKAT DAERAH
				INDIKATOR (OUT COME)	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7
		Meningkatkan Pengendalian Penyalahgunaan Napza	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS MEDIS KEJIWAAN DAN NAPZA	Persentase penyalahgunaan Napza yang mendapatkan pelayanan medis rehabilitasi	30	RSJ
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS KEPERAWATAN JIWA DAN NAPZA	Persentase penyalahgunaan Napza yang mendapatkan pelayanan keperawatan rehabilitasi	20	RSJ
			PROGRAM KETAHANAN EKONOMI, SENI, BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN	Pertumbuhan masyarakat yang mendapatkan pemahaman penyalahgunaan napza	500	KESBANGPOL
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase korban nazpza	21.28	DINAS SOSIAL
	- Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH ATAS	Persentase Siswa SMA miskin yang mendapatkan beasiswa miskin	100	DINAS PENDIDIKAN
			PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KEJURUAN	Persentase siswa SMK miskin yang mendapatkan beasiswa miskin	100	DINAS PENDIDIKAN
		Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan pada peningkatan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas,	PROGRAM PENINGKATAN PEMBUDAYAAN DAN PENINGKATAN PRESTASI OLAH RAGA	Persentase lansia yang aktif yang mengikuti pelayanan olah raga khusus lansia	0.19%	DISKEPORA
				Persentase Pelajar	4.02%	DISKEPORA

NO	RKP 2019	RKPD 2019				
	PRIORITAS NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	KINERJA PROGRAM		PERANGKAT DAERAH
				INDIKATOR (OUT COME)	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7
				Penyandang Disabilitas yang berprestasi di bidang keolahragaan		
				Persentase Sumber Daya Tenaga Keolahragaan yang memiliki standar Nasional	2.67%	DISKEPORA
			PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN KEAGAMAAN	Persentase lansia yang berkompetensi keagamaan	80%	BIRO KESRA
			PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN KEAGAMAAN	Prosentase jumlah masyarakat yang kompeten di bidang keagamaan	80	BIRO KESRA
		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan memberikan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi bagi masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN FUNGSI PELAYANAN PENDIDIKAN WILAYAH PANGKALPINANG DAN BANGKA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pendidikan SMA, SMK, SLB di wilayah Pangkalpinang dan Bangka	79.29%	DINAS PENDIDIKAN
			PROGRAM PENINGKATAN FUNGSI PELAYANAN PENDIDIKAN WILAYAH BANGKA BARAT	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pendidikan SMA, SMK, SLB di wilayah Bangka Barat	79.29%	DINAS PENDIDIKAN
			PROGRAM PENINGKATAN FUNGSI PELAYANAN PENDIDIKAN WILAYAH BANGKA TENGAH DAN BANGKA SELATAN	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pendidikan SMA, SMK, SLB di wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan	79.29%	DINAS PENDIDIKAN

NO	RKP 2019	RKPD 2019				
	PRIORITAS NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	KINERJA PROGRAM		PERANGKAT DAERAH
				INDIKATOR (OUT COME)	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7
			PROGRAM PENINGKATAN FUNGSI PELAYANAN PENDIDIKAN WILAYAH BELITUNG DAN BELITUNG TIMUR	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pendidikan SMA, SMK, SLB di wilayah Belitung dan Belitung Timur	79.29%	DINAS PENDIDIKAN
			peningkatan akses pelayanan pendidikan	PROGRAM PENINGKATAN DAN PEGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH ATAS APK SMA	38.88%	DINAS PENDIDIKAN
				PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KEJURUAN APK SMK	38.38%	DINAS PENDIDIKAN
		peningkatan mutu layanan pendidikan.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN KUANTITAS DAN KUALITAS GURU SERTA TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru Berkualifikasi S1/D4	97%	DINAS PENDIDIKAN
			PROGRAM PENINGKATAN DAN PEGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH ATAS	Persentase SMA terakreditasi A	42.42%	DINAS PENDIDIKAN
				Rata-rata nilai UN SMA	6.5	DINAS PENDIDIKAN
			PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN	Persentase SMK terakreditasi A	38.60%	DINAS PENDIDIKAN

NO	RKP 2019	RKPD 2019				
	PRIORITAS NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	KINERJA PROGRAM		PERANGKAT DAERAH
				INDIKATOR (OUT COME)	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7
			KEJURUAN			
				Rata-rata nilai UN SMK	6.5	DINAS PENDIDIKAN
			PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KHUSUS	Persentase SLB terakreditasi A	100%	DINAS PENDIDIKAN
			PROGRAM PENINGKATAN PEMBUDAYAAN DAN PENINGKATAN PRESTASI OLAH RAGA	Persentase Atlet pelajar Berprestasi yang dibina ditingkat provinsi yang memperoleh medali	5.08%	DISKEPORA
			PROGRAM PENINGKATAN PEMBUDAYAAN DAN PENINGKATAN PRESTASI OLAH RAGA	Persentase Insan Olahraga yang berprestasi	5.08%	DISKEPORA
			PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA	Persentase Pemuda Berprestasi	22.87%	DISKEPORA
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PERPUSTAKAAN	presentase perpustakaan terakreditasi;	160	DKPUS
			PROGRAM PENGEMBANGAN STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KEPEMUDAAN DAN	Presentase jumlah sarana dan prasaran kepemudaan yang terbangun yang difungsikan	16.67%	DISKEPORA

NO	RKP 2019	RKPD 2019				
	PRIORITAS NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	KINERJA PROGRAM		PERANGKAT DAERAH
				INDIKATOR (OUT COME)	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7
			OLAHRAGA			
			PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA	Persentase Insan Kepemudaan yang berprestasi dan berdedikasi yang dibantu	6.41%	DISKEPORA
			PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN DARAT	Rasio Jumlah Bus sekolah dengan Jumlah Murid	5%	DINAS PERHUBUNGAN
				Persentase sekolah di ruas jalan Provinsi yang dilengkapi dengan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	4%	DINAS PERHUBUNGAN
			PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase informasi berkaitan dengan pendidikan yang dapat akses oleh masyarakat	25%	DISKOMINFO
			PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI	Persentase SMA dan SMK yang telah berbasis IT	80%	DISKOMINFO
			PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN, KB, DAN PEMUDA	Prosentase jumlah kebijakan pengembangan pendidikan, keluarga berencana, pemuda dan pariwisata yang diimplementasikan	80	BIRO KESRA
				Persentase Jumlah Sekolah	35 sekolah	BIRO KESRA

NO	RKP 2019	RKPD 2019				
	PRIORITAS NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	KINERJA PROGRAM		PERANGKAT DAERAH
				INDIKATOR (OUT COME)	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7
				agama yang dinilai sesuai standar		
			PROGRAM PENGELOLAAN BANTUAAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) (DAK Non Fisik)	Persentase Sekolah penerima BOS	100%	DINAS PENDIDIKAN
		Peningkatan relevansi pendidikan vokasi dalam mendukung pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAAN PENDIDIKAN KEJURUAAN	Persentase SMK yang memiliki sertifikasi profesi	38.60%	DINAS PENDIDIKAN
	- Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Perumahan dan Permukiman Layak	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin	PROGRAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN	Persentase peningkatan kuantitas dan kualitas rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin	22.51	DINAS PRKP
	- Peningkatan Tata Kelola Layanan Dasar	Sistem pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial disusun, ditata, dan dikembangkan untuk memastikan dan memantapkan pemenuhan hak-hak masyarakat akan pelayanan dasar publik.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan perlindungan dan jaminan sosial yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial	22.84	DINSOS
		Peningkatan Penataan peraturan perundang-undangan		Persentase jumlah masyarakat yang mendapat Pelayanan bantuan Hukum	85%	BIRO HUKUM
		Sistem pemberdayaan, perlindungan dan jaminan	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan	17	DINSOS

NO	RKP 2019	RKPD 2019				
	PRIORITAS NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	KINERJA PROGRAM		PERANGKAT DAERAH
				INDIKATOR (OUT COME)	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7
		sosial disusun, ditata, dan dikembangkan untuk memastikan dan memantapkan pemenuhan hak-hak masyarakat akan pelayanan dasar publik.		pemberdayaan sosial yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial		
				Persentase PSKS yang mendapatkan pelayanan pemberdayaan sosial yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial	15.63	DINSOS
		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan memberikan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi bagi masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS MEDIS DAN PENUNJANG MEDIS	Nilai Tingkat kelulusan Akreditasi RSUP yang memenuhi standar akreditasi	Persiapan Akreditasi Paripurna (50%)	RSUP
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap sarana dan prasarana pelayanan Rumah Sakit	80%	RSUP
			PELAYANAN TEKNIS KEPERAWATAN JIWA DAN NAPZA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pelayanan Teknis Medik Kejiwaan	85	RSJ
		Peningkatan penyelenggaraan penanggulangan bencana	PROGRAM PERUMAHAN RAKYAT	Persentase rekonstruksi dan rehabilitasi rumah akibat bencana	51%	PRKP

NO	RKP 2019	RKPD 2019				
	PRIORITAS NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	KINERJA PROGRAM		PERANGKAT DAERAH
				INDIKATOR (OUT COME)	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7
		Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur dasar yang layak bagi masyarakat	PROGRAM KECIPTAKARYAAN DAN PERMUKIMAN	Persentase peningkatan aksesibilitas Kawasan permukiman	33%	DINAS PRKP
		Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan pelabuhan serta sarana prasarana pendukung pelabuhan	PROGRAM PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN LAUT	Persentase Jumlah pulau yang memiliki pelabuhan/dermaga yang layak	17%	DINAS PERHUBUNGAN
		Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan terminal serta sarana prasarana pendukung terminal	PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN, OPRASIONAL DAN KEBANDARUDARAAN	Persentase sarana dan prasarana fasilitas bandara kewenangan provinsi yang tersedia dan beroperasi	10%	DISHUB
		Peningkatan penyelenggaraan penanggulangan bencana	PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Daerah Rawan Bencana yang Diintervensi Dalam Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	74	BPBD
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase korban bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	20	DINSOS
			PROGRAM PENGEMBANGAN DISTRIBUSI, STABILITAS, DAN CADANGAN PANGAN	Persentase Cadangan Pangan	2.7	DINAS PANGAN
			PROGRAM PENGEMBANGAN	Persentase informasi berkaitan dengan	15%	KOMINFO



NO	RKP 2019	RKPD 2019				
	PRIORITAS NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	KINERJA PROGRAM		PERANGKAT DAERAH
				INDIKATOR (OUT COME)	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7
			INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	penanggulangan bencana yang dapat di akses oleh masyarakat		
			PRORAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	Persentase Kab/kota yang melaksanakan kewaspadaan dini dan respon	80%	DINKES
			PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Persentase peningkatan kualitas linmas dalam penanganan bencana dan kebakaran	4.24%	SATPOL PP
			PROGRAM KEDARURATAN DAN LOGISTIK PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Daerah Rawan Bencana yang Diintervensi Dalam Penanggulangan Bencana	80	BPBD
			PRORAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	Persentase penduduk terdampak krisis kesehatan yang mendapat pelayanan kesehatan akibat bencana atau berpotensi bencana dalam satu provinsi	15%	DINKES
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS MEDIS DAN PENUNJANG MEDIS	Persentase korban bencana yang mendapat pelayanan rujukan	100%	RSUP
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER	persentase Panjang Talud yang direhabilitasi dan	25%	PUPR

NO	RKP 2019	RKPD 2019				
	PRIORITAS NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	KINERJA PROGRAM		PERANGKAT DAERAH
				INDIKATOR (OUT COME)	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7
			DAYA AIR	direkonstruksi yang berfungsi dengan baik untuk menahan tanah		
				Persentase Panjang Sungai /saluran yang dinormalisasi dan berfungsi memperlancar aliran air sungai akibat bencana	26.80%	PUPR
			PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Panjang jalan yang direhabilitasi dan direkonstruksi akibat bencana	0.86%	PUPR
				Persentase panjang jembatan yang direhabilitasi dan direkonstruksi akibat bencana	0.12%	PUPR
			PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Daerah Rawan Bencana yang Diintervensi Dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	75	BPBD
			PRORAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	Persentase penduduk pada kondisi kejadian luarbiasa (KLB) yang mendapat pelayanan kesehatan dalam satu Provinsi	100%	DINKES
		Pengembangan Pengelolaan	PROGRAM	Persentase Panjang	41.40%	DINAS PUPR

NO	RKP 2019	RKPD 2019				
	PRIORITAS NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	KINERJA PROGRAM		PERANGKAT DAERAH
				INDIKATOR (OUT COME)	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7
		kawasan rawan bencana alam	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	Penahan Abrasi Pantai		
				Panjang sungai yang dinormalisasi pada daerah rawan bencana	40.00%	DINAS PUPR
				panjang penahan tanah akibat erosi	49.00%	DINAS PUPR
			PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN DAS DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Persentase DAS kritis yang di kelola	7	DINAS KEHUTANAAN
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS TATA KELOLA DISHUT	Persentase kegiatan pengelolaan hutan oleh UPTD KPH (%)	100%	DINAS KEHUTANAAN
				Persentase Panjang pengerukan Normalisasi sungai dan kawasan hilir daerah rawan bencana teluk bayur	30%	PUPR
		Pengembangan Pengelolaan kawasan hilir daerah rawan bencana teluk bayur	PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap di kawasan hilir daerah rawan bencana teluk bayur	96%	PUPR
				Persentase panjang jembatan dalam kondisi baik di kawasan hilir daerah rawan bencana teluk bayur	82%	PUPR

NO	RKP 2019	RKPD 2019				
	PRIORITAS NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	KINERJA PROGRAM		PERANGKAT DAERAH
				INDIKATOR (OUT COME)	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7
			PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	Persentase luas lahan yang bersertifikat untuk kepentingan di kawasan hilir daerah rawan bencana teluk bayur	100%	PUPR
			PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN DAN PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase BOD, COD dan TSS	2%	DLH
			PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SDA DAN EKOSISTEM	Persentase Kawasan ekosistem essensial (%)	100%	DINAS KEHUTANAAN
		pengendalian kualitas udara	PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN DAN PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penurunan Konsentrasi SO2 dan NO2 yang melebihi Nilai Ambang Batas	2%	DLH
			PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SDA DAN EKOSISTEM	Persentase penurunan Kawasan Hutan yang terbakar	100%	DINAS KEHUTANAAN
		Peningkatan tutupan lahan	PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SDA DAN EKOSISTEM	Persentase luas kawasan hutan yang bervegetasi (%)	1%	DINAS KEHUTANAAN
		Pengembangan Perhutanan Sosial	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN DAS DAN PEMBERDAYAAN	Persentase luas kawasan Perhutanan Sosial (%)	2%	DINAS KEHUTANAAN

NO	RKP 2019	RKPD 2019				
	PRIORITAS NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	KINERJA PROGRAM		PERANGKAT DAERAH
				INDIKATOR (OUT COME)	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7
			MASYARAKAT			
2	Pengurangan Kesenjangan antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman					
	- Peningkatan Konektivitas	Pengembangan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan pulau Sumatera	PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Sumatera	91.25%	DINAS PUPR
				Persentase Jembatan Provinsi dalam kondisi baik di kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Sumatera	82.00%	DINAS PUPR
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	Persentase panjang talud yang terbangun di kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Sumatera	5%	DINAS PUPR
				Persentase volume air baku yang tersedia dapat digunakan di kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Sumatera	5%	DINAS PUPR
			PROGRAM PENGELOLAAN RUANG LAUT	Persentase Usulan Pemanfaatan Ruang Laut yang terekomendasi sesuai dengan peruntukannya	65.00%	DKP

NO	RKP 2019	RKPD 2019				
	PRIORITAS NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	KINERJA PROGRAM		PERANGKAT DAERAH
				INDIKATOR (OUT COME)	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7
		Pengembangan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil	PROGRAM KEBINAMARGAAN	pada kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Sumatera		
				Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil	0%	DINAS PUPR
				Persentase panjang talud yang terbangun di kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil	5%	DINAS PUPR
				Persentase volume air baku yang tersedia dapat digunakan di kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil	5%	DINAS PUPR
				Persentase pulau-pulau berpenduduk yang terkoneksi kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil	30%	DISHUB
				Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi	0%	DINAS PUPR
		Pengembangan Kawasan strategis Pelabuhan ASDP	PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi	0%	DINAS PUPR

NO	RKP 2019	RKPD 2019				
	PRIORITAS NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	KINERJA PROGRAM		PERANGKAT DAERAH
				INDIKATOR (OUT COME)	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7
		Manggar – Ketapang		mantap di kawasan strategis ASDP Manggar dan Ketapang		
				Persentase Jembatan Provinsi dalam kondisi baik di Kawasan strategis Pelabuhan ASDP Manggar – Ketapang	0%	DINAS PUPR
		Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Tanjung gunung dan kawasan lintas timur Pulau Bangka	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	persentase sarana dan prasarana Pariwisata di kawasan pariwisata Tanjung Gunung yang terbangun dan terkelola	32%	BUDPAR
				Persentase sarana dan prasarana pariwisata di kawasan Lintas Timur Pulau Bangka yang terbangun dan terkelola	32%	BUDPAR
			PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN DARAT	Persentase pemenuhan sarana parasarana penunjang Jalan Kawasan Peruntukan Pariwisata Tanjung gunung dan kawasan lintas timur Pulau Bangka	30%	DISHUB
			PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di kawasan Peruntukan Pariwisata	95.44%	DINAS PUPR

NO	RKP 2019	RKPD 2019				
	PRIORITAS NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	KINERJA PROGRAM		PERANGKAT DAERAH
				INDIKATOR (OUT COME)	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7
		Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan Kota Tua Mentok	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	Tanjung gunung dan kawasan lintas timur Pulau Bangka		
				Persentase sarana dan prasarana pariwisata di kawasan Kota Tua Muntok	32%	BUDPAR
				Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di Kawasan Kota Tua Mentok	0%	PUPR
				Persentase pemenuhan sarana parasarana penunjang perhubungan darat di Kawasan Kota Tua Muntok	20%	DISHUB
		Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan gunung Permisan Simpang Rimba	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN DARAT	Persentase pemenuhan sarana parasarana penunjang perhubungan darat di kawasan pariwisata gunung Permisan Simpang Rimba	20%	DISHUB
		Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Gunung Menumbing	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN DARAT	Persentase pemenuhan sarana parasarana penunjang perhubungan darat di Kawasan Pariwisata Gunung Menumbing	20%	DISHUB
		Pengembangan Kawasan	PROGRAM	Persentase Panjang Jalan	0%	PUPR



NO	RKP 2019	RKPD 2019				
	PRIORITAS NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	KINERJA PROGRAM		PERANGKAT DAERAH
				INDIKATOR (OUT COME)	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7
		Peruntukan Pariwisata Kawasan ekonomi khusus (KEK) Tanjung kelayang	KEBINAMARGAAN	Provinsi dalam kondisi mantap di kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan ekonomi khusus (KEK) Tanjung kelayang		
			PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	Persentase Jumlah Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Strategis Nasional (KSN) Pariwisata Tanjung Kelayang yang diimplementasikan	50	PUPR
			PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN DARAT	Persentase pemenuhan sarana parasarana penunjang perhubungan darat di Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang	25%	DISHUB
		Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular	PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	Persentase Tersedianya Lahan bersertifikat untuk kepentingan di kawasan industri dan pelabuhan terpadu Tanjung Ular	50	DINAS PUPR
				Persentase Jumlah Regulasi Penataan Ruang di kawasan industri dan pelabuhan terpadu Tanjung Ular	1,000,000,000	DINAS PUPR
			PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di kawasan industri dan pelabuhan Tanjung ular	0%	DINAS PUPR

NO	RKP 2019	RKPD 2019				
	PRIORITAS NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	KINERJA PROGRAM		PERANGKAT DAERAH
				INDIKATOR (OUT COME)	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	Persentase panjang talud yang terbangun di kawasan ndustri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular	5%	DINAS PUPR
			PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH DAN PENGAWASAN INDUSTRI	Pertumbuhan Jumlah Industri di kawasan Industri Terpadu (KIPT) Tanjung Ular	1	DISPERINDAG
			PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN LAUT	Prosentase sarana dan prasana perhubungan laut Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular yang terbangun serta digunakan	30%	DISHUB
		Pengembangan Kawasan Strategis Industri Terpadu Air Kelik (KIAK)	PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di kawasan strategis industri terpadu air kelik	0%	DINAS PUPR
				Persentase Jembatan Provinsi dalam kondisi baik di kawasan strategis industri terpadu air kelik	0%	DINAS PUPR
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	Persentase panjang talud yang terbangun di kawasan strategis industri terpadu air kelik	5%	DINAS PUPR

NO	RKP 2019	RKPD 2019				
	PRIORITAS NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	KINERJA PROGRAM		PERANGKAT DAERAH
				INDIKATOR (OUT COME)	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7
		Pengembangan Pelabuhan dan Kawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung Berikat		Persentase penyediaan volume air baku di kawasan strategis industri terpadu air kelik	5%	DINAS PUPR
				Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di Kawasan strategis Ekonomi khusus Tanjung Berikat	90.78%	DINAS PUPR
				Persentase Jembatan Provinsi dalam kondisi baik di Kawasan strategis Ekonomi khusus Tanjung Berikat	87.00%	DINAS PUPR
			PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP	Tersedianya Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Kawasan Industri dan pelabuhan Terpadu Tanjung Berikat yang digunakan dalam perencanaan kawasan	Ada	DLH
			PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN LAUT	Prosentase pemenuhan Sarana dan Prasarana pendukung Perhubungan Laut di Kawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung Berikat	20%	DISHUB
			PROGRAM PENGEMBANGAN DAN	Prosentase pemenuhan Sarana dan Prasarana	25%	DISHUB

NO	RKP 2019	RKPD 2019				
	PRIORITAS NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	KINERJA PROGRAM		PERANGKAT DAERAH
				INDIKATOR (OUT COME)	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7
			PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN DARAT	pendukung Perhubungan Darat menuju Kawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung Berikat		
			PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	Persentase jumlah Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Industri dan pelabuhan Terpadu Tanjung Berikat yang diimplementasikan	100%	DINAS PUPR
		Pengembangan Kawasan Strategis Industri Sadai	PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap di kawasan strategis industri sadai	0%	DINAS PUPR
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	Persentase panjang talud yang terbangun di kawasan Strategis Industri Sadai	5%	DINAS PUPR
				Persentase penyediaan volume air baku di kawasan Strategis Industri Sadai	5%	DINAS PUPR
			PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	Persentase Tersedianya Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Strategis Provinsi (KSP) KIPT Sadai	100%	DINAS PUPR
			PROGRAM	Pertumbuhan Jumlah	1	DISPERINDAG

NO	RKP 2019	RKPD 2019				
	PRIORITAS NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	KINERJA PROGRAM		PERANGKAT DAERAH
				INDIKATOR (OUT COME)	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7
			PENGEMBANGAN WILAYAH DAN PENGAWASAN INDUSTRI	Industri di kawasan strategis Industri Sadai		
			PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP	Tersedianya Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi KIPT Sadai yang digunakan untuk perencanaan kawasan	Ada	DLH
		Pengembangan Kawasan strategis Industri Terpadu di Teluk Klabat Belinyu	PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Panjang jalan provinsi menuju dan dikawasan Strategis Industri Perikanaan Terpadu Teluk Klabat Belinyu dalam kondisi mantap	89.36%	DINAS PUPR
			PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN PENAWASAN KOPERASI	Persentase koperasi aktif di kawasan strategis Teluk Kelabat Belinyu	1%	DINAS KUMKM
			PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN USAHA KECIL	persentase Usaha Kecil dikawasan Sentra Teluk Kelabat Belinyu yang mendapatkan Izin Usaha	10%	DINAS KUMKM
				persentase Usaha Kecil dikawasan Sentra Teluk Kelabat Belinyu yang mendapatkan Diseminasi dan pendampingan akses	1%	DINAS KUMKM

NO	RKP 2019	RKPD 2019				
	PRIORITAS NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	KINERJA PROGRAM		PERANGKAT DAERAH
				INDIKATOR (OUT COME)	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7
				permodalan		
			PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH DAN PENGAWASAN INDUSTRI	Pertumbuhan Jumlah Industri di kawasan strategis Industri Perikanaan Terpadu di Teluk Klabat Belinyu	1	DISPERINDAG
			PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	Persentase Tersedianya Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan StrategisProvinsi (KSP) Pelabuhan dan Industri Teluk Kelabat	100%	DINAS PUPR
			PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP	Tersedianya Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi pelabuhan dan Industri Teluk Kelabat yang digunakan untuk perencanaan kawasan	Ada	DLH
	- Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi bagi masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI	Persentase dana pendamping desa yang terlayani jaringan Internet	66%	KOMINFO
	- Pengembangan Pusat Kegiatan Ekonomi di Wilayah Timur dan Pembangunan Desa	Pengembangan Kawasan peruntukan Pariwisata Museum Nasional Maritim Belitung	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN DARAT	Persentase pemenuhan sarana parasarana penunjang perhubungan darat di Kawasan Pariwisata Museum Nasional Maritim Beltung	25%	DISHUB

NO	RKP 2019	RKPD 2019				
	PRIORITAS NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	KINERJA PROGRAM		PERANGKAT DAERAH
				INDIKATOR (OUT COME)	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7
			PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di Kawasan Pariwisata Museum Nasional Maritim Beltung	2%	PUPR
		Pemberdayaan masyarakat secara langsung dilakukan melalui skema pemberian bantuan ke desa-desa, termasuk jaminan pelayanan publik, penguatan keterkaitan kegiatan ekonomi dan peningkatan kapasitas aparatur desa	PROGRAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah Profil Desa dan Kelurahan yang tersusun dan terbina	21 Desa/ Kel	DPMD
			PROGRAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase desa di kawasan transmigrasi yang diberdayakan	10	DISNAKER
		Peningkatan insfrastruktur, sarana dan prasarana pengembangan destinasi pemasaran pariwisata.	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	Presentase objek wisata yang terkelola	12%	BUDPAR
			PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	Persentase tingkat kunjungan wisatawan	6	BUDPAR
			PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN LAUT	Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasana Perhubungan Laut di lokasi wisata	30%	DISHUB

NO	RKP 2019	RKPD 2019				
	PRIORITAS NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	KINERJA PROGRAM		PERANGKAT DAERAH
				INDIKATOR (OUT COME)	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7
			PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN DARAT	Persentase pemenuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan darat dalam menunjang Daerah Tujuan Wisata	20%	DISHUB
			PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di daerah pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata.	94.51%	DINAS PUPR
				Persentase Jembatan Provinsi dalam kondisi baik di daerah pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata.	86.00%	DINAS PUPR
		Peningkatan insfrastruktur, sarana dan prasarana pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata.	PROGRAM PENINGKATAN PUSAT PELAYANAN USAHA TERPADU KUKM	Pertumbuhan produk parekraf	10%	DINAS KUMKM
			PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase informasi berkaitan dengan pemasaran pariwisata yang dapat diakses masyarakat	25%	DISKOMINFO
		Peningkatan kualitas, partisipasi dan prestasi pemuda di berbagai bidang pembangunan, dan peningkatan pengelolaan ke olah raga serta	PROGRAM PENINGKATAN PEMBUDAYAAN DAN PENINGKATAN PRESTASI OLAH RAGA	Pertumbuhan Jumlah peserta yang mengikuti babel sport tourism	4.00%	DISKEPORA



NO	RKP 2019	RKPD 2019				
	PRIORITAS NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	KINERJA PROGRAM		PERANGKAT DAERAH
				INDIKATOR (OUT COME)	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7
		mengembangkan peran serta kebudayaan dalam mendukung pembangunan kepariwisataan				
			PROGRAM PENGEMBANGAN STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Presentase jumlah sarana dan prasaran olahraga yang terbangun dalam mendukung event olahraga regional dan nasional	16.67%	DISKEPORA
			PROGRAM PELESTARIAN BUDAYA	Persentase budaya lokal yang dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan dan dibina	14.87%	BUDPAR
			PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI BUMD, PENANAMAN MODAL, PARIWISATA DAN BUDAYA	Prosentase Jumlah Kebijakan BUMD, Penanaman Modal, Pariwisata dan Budaya yang di implementasikan	72	BIRO EKONOMI
				Pertambahan Jumlah UKM pariwisata yang bermitra dengan investor	1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Pengembangan pariwisata daerah, serta mendorong terwujudnya koordinasi,	PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI PENANAMAN MODAL	Pertambahan Jumlah Investor Pariwisata	3	DINAS PENANAMAN MODAL DAN

NO	RKP 2019	RKPD 2019				
	PRIORITAS NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	KINERJA PROGRAM		PERANGKAT DAERAH
				INDIKATOR (OUT COME)	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7
		sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antar sektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di bidang pariwisata.				PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DAN SISTEM INFORMASI	Presentase perusahaan yang sesuai realisasi investasi disektor pariwisata dengan rencana investasi	0.44%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Pengendalian tingkat kelahiran penduduk dan perpindahan penduduk untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang	PROGRAM PENGADMINISTRASIAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	Persentase jumlah masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mempunyai KTP	N.A	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
				Persentase jumlah masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sudah meninggal yang memiliki akte kematian	N.A	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
			PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Persentase unmeet need	7.48	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
				presentase KB MKJP	8.9	DINAS PPA, DUKCAPIL,

NO	RKP 2019	RKPD 2019				
	PRIORITAS NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	KINERJA PROGRAM		PERANGKAT DAERAH
				INDIKATOR (OUT COME)	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7
						PENGENDALIAN PENDUDUK KB
	- Pembangunan Daerah Afirmasi	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur dasar yang layak bagi masyarakat		Persentase peningkatan aksesibilitas di Kawasan permukiman kumuh Provinsi	26%	DINAS PRKP
		Pemberdayaan masyarakat secara langsung dilakukan melalui skema pemberian bantuan ke desa-desa, termasuk jaminan pelayanan publik, penguatan keterkaitan kegiatan ekonomi dan peningkatan kapasitas aparatur desa	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN	Persentase kawasan perdesaan yang terbangun	40%	DPMD
	- Pembangunan Konektivitas untuk Mendukung Pembangunan Sektor Unggulan Hulu – Hilir Perikanan	Mengurangi ketergantungan pasokan dari luar terhadap komoditas penyumbang inflasi	PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase kontribusi komoditas ikan dalam menyumbang inflasi	22.22	DINAS KELAUTAN PERIKANAN
		Peningkatan potensi penggalan sumber-sumber Pendapatan asli daerah untuk pemanfaatan sebesar besarnya bagi kemakmuran masyarakat.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	Pertambahan pendapatan asli daerah dari layanan fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) (Juta Rupiah)	420 juta	DKP
		Pengembangan Kawasan strategis Industri Terpadu di Teluk Klabat Belinyu	PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN BUDIDAYA DAN PENGOLAHAN HASIL	Pertumbuhan Volume Produksi Olahan dikawasan Strategis Industri Perikanan Terpadu Teluk	120	DKP

NO	RKP 2019	RKPD 2019				
	PRIORITAS NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	KINERJA PROGRAM		PERANGKAT DAERAH
				INDIKATOR (OUT COME)	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7
			PERIKANAN	Klabat (Ton)		
		Penciptaan peluang kesempatan kerja bagi pencari kerja	PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase penduduk yang bekerja di sektor perikanan tangkap	6.82%	DISKEPORA
			PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN BUDIDAYA DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	Persentase penduduk yang bekerja di sektor perikanan budidaya dan Usaha Pengolahan & Pemasaran	1.14%	DKP
		Pengendalian Tingkat harga-harga komoditas penyumbang inflasi	PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN	Persentase Pertumbuhan jumlah volume ekspor (ton)	862,000	DISPERINDAG
		Pengembangan Kawasan strategis Industri Terpadu di Teluk Klabat Belinyu	PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap dikawasan Strategis Industri Perikanan Terpadu Teluk Klabat	2,750	DKP
3	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif					
	- Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian	Pengendalian Tingkat harga-harga komoditas penyumbang inflasi	PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN	Persentase Pertumbuhan jumlah volume ekspor (ton)	862,000	DISPERINDAG
		Mengurangi ketergantungan pasokan dari luar terhadap komoditas penyumbang inflasi	PROGRAM PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	Pertambahan jumlah volume produksi komoditas cabai besar	2,813.28	DINAS PERTANIAN
				Pertambahan jumlah	2,651.13	DINAS

NO	RKP 2019	RKPD 2019				
	PRIORITAS NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	KINERJA PROGRAM		PERANGKAT DAERAH
				INDIKATOR (OUT COME)	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7
				volume produksi komoditas cabai rawit		PERTANIAN
				Pertambahan jumlah volume produksi komoditas bawang merah	98.11	DINAS PERTANIAN
	- Percepatan Peningkatan Nilai Tambah Industri Pengolahan	Pemenuhan Energi listrik untuk mendorong pengembangan industri berbasis potensi daerah serta peningkatan rasio elektrifikasi;	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ENERGI	Persentase penggunaan EBT	6.83%	ESDM
				Persentase perusahaan yang Pendistribusian Minyak dan Gas sesuai standar	60%	ESDM
				Persentase perusahaan di bidang ketenagalistrikan yang sesuai standar yang diinginkan	60%	ESDM
	- Peningkatan Nilai Tambah Jasa Produktif	Peningkatan tata kelola dan nilai tambah produk sumber daya mineral;	PROGRAM PENGEMBANGAN PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	Persentase Perusahaan pertambangan non logam yang menerapkan good mining practices	65%	DINAS ESDM
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM	Persentase Perusahaan pertambangan logam yang menerapkan good mining practices	60%	DINAS ESDM

NO	RKP 2019	RKPD 2019				
	PRIORITAS NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	KINERJA PROGRAM		PERANGKAT DAERAH
				INDIKATOR (OUT COME)	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7
			PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN GEOLOGI DAN AIR TANAH	Persentase cadangan Mineral bukan logam dan batuan yang potensial	33%	DINAS ESDM
				pertumbuhan industri turunaan Potensi Sumber Daya Mineral yang dikembangkan	4	DISPERINDAG
		Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing Produk Sumber daya mineral	PROGRAM PENGEMBANGAN PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase peningkatan tenaga kerja sektor sumber daya mineral bersertifikat kompetensi	17.54	DISNAKER
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LATIHAN KERJA INDUSTRI	Persentase tenaga kerja bidang sumber daya mineral yang mendapat pelatihan pertambangan berkelanjutan	0.14	UPD BLKI
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase peningkatan produksi per tenaga kerja sektor sumber daya mineral	0.05	UPTD BALAI PRODUKTIFITAS
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LATIHAN PERKOPERASIAN, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	Persentase SDM Koperasi sektor sumber daya mineral terlatih	2.06%	UPTD BALAI LATIHAN PERKOPERASIAN, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

NO	RKP 2019	RKPD 2019				
	PRIORITAS NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	KINERJA PROGRAM		PERANGKAT DAERAH
				INDIKATOR (OUT COME)	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7
				Persentase SDM Usaha Kecil sektor sumber daya mineral terlatih	0.18%	UPTD BALAI LATIHAN PERKOPERASIAN, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
			PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN USAHA KECIL	persentase Usaha Kecil sektor pertambangan yang mendapatkan Izin Usaha	0	DINAS UMKM
		Peningkatan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	PROGRAM PENINGKATAN PENGOLAHAN SAMPAH, PEMELIHARAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP	Pertumbuhan volume pengolahan sampah yang ramah lingkungan	0%	DLH
		Pengendalian Tingkat harga-harga komoditas penyumbang inflasi	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN KEMETROLOGIAN	Persentase jumlah Barang Beredar, Jasa dan Tertib Niaga yang diawasi sesuai standar (112 barang SNI wajib; 140 pelaku usaha Tertib Niaga)	14	DISPERINDAG
				Indeks Keberdayaan Konsumen (0 - 20 = Tahu; 21 - 40 = Paham)	22	DISPERINDAG
				Persentase jumlah Standarisasi Lab. Kemetrolagian yang memenuhi standar	20	DISPERINDAG

NO	RKP 2019	RKPD 2019				
	PRIORITAS NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	KINERJA PROGRAM		PERANGKAT DAERAH
				INDIKATOR (OUT COME)	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7
				Persentase jumlah barang kebutuhan pokok dan barang penting (18 bahan pokok) yang tersedia setiap waktu	83	DISPERINDAG
				Persentase peningkatan sarana dan prasarana perdagangan yang dibangun dan dimanfaatkan	63	DISPERINDAG
				Persentase Pertumbuhan nilai omzet yang memanfaatkan resi gudang	20	DISPERINDAG
				Pertumbuhan komoditi yang terjual melalui Pasar Lelang	1	DISPERINDAG
				Persentase peningkatan promosi produk dalam negeri	10	DISPERINDAG
		Pengendalian Tingkat harga-harga komoditas penyumbang inflasi	PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI KEBIJAKAN PEREKONOMIAN	Persentase rekomendasi komoditas penyumbang inflasi yang paling tinggi dengan intervensi program/kebijakan	100%	BIRO EKONOMI
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN LAUT	Persentase infrastruktur perhubungan laut dalam kondisi baik terhadap kondisi optimal	20%	DINAS PERHUBUNGAN
			PROGRAM	Persentase Panjang jalan	94.51%	DINAS PUPR



NO	RKP 2019	RKPD 2019				
	PRIORITAS NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	KINERJA PROGRAM		PERANGKAT DAERAH
				INDIKATOR (OUT COME)	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7
		Mengurangi ketergantungan pasokan dari luar terhadap komoditas penyumbang inflasi	KEBINAMARGAAN	dan jembatan yang dapat dilewati dengan lancar yang menuju pusat-pusat distribusi komoditas penyumbang inflasi		
			PROGRAM PENGEMBANGAN DISTRIBUSI, STABILITAS, DAN CADANGAN PANGAN	Koefisien varian harga pangan strategis di tingkat produsen dan konsumen	CV Beras ≤ 5%	DINAS PANGAN
					CV Cabe ≤ 35%	DINAS PANGAN
					CV Daging Ayam 10%	DINAS PANGAN
	- Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja	Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing kepariwisataan	PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN USAHA KECIL	Peningkatan produk Usaha kecil sektor pariwisata yang tersertifikasi	250	DINAS KUMKM
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBERDAYA, FASILITASI DAN AKSES INDUSTRI	Persentase Tenaga Kerja yang terserap di industri pariwisata	0.31%	DISPERINDAG
		Penciptaan peluang kesempatan kerja bagi pencari kerja	PROGRAM PENGEMBANGAN PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	17.14	DISNAKER
			PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA	Persentase pemuda yang bekerja	10.20%	DISKEPORA

NO	RKP 2019	RKPD 2019				
	PRIORITAS NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	KINERJA PROGRAM		PERANGKAT DAERAH
				INDIKATOR (OUT COME)	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7
			PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase jumlah informasi berkaitan dengan penciptaan lapangan pekerjaan yang diakses oleh pencari kerja	25%	DISKOMINFO
			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN	Persentase perempuan yang bekerja	7.73	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
				Pertambahan Jumlah Masyarakat Desa yang terlatih dalam Kewirausahaan	100 Orang	DINAS PMD
			PROGRAM PENGEMBANGAN PENDAYAGUNAAN SDA, TEKNOLOGI TEPAT GUNA DAN PELATIHAN MASYARAKAT	Persentase KPM yang aktif	3.24	DINAS PMD
				Persentase sarana prasarana penunjang peningkatan pemberdayaan masyarakat desa	34%	DPMD
			PROGRAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Persentase PKK aktif	15.5	DPMD
				Persentase aparaturnya desa dan BPD yang meningkat	42%	DPMD

NO	RKP 2019	RKPD 2019				
	PRIORITAS NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	KINERJA PROGRAM		PERANGKAT DAERAH
				INDIKATOR (OUT COME)	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7
		Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan pada peningkatan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas,	PROGRAM PENGEMBANGAN PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA	kompetensinya		
				Pesentase lansia potensial yang memiliki kompetensi ketenagakerjaan	0.28	DISNAKER
				Persentase Exs korban Napza yang memiliki kompetensi ketenagakerjaan	10.64	DISNAKER
				Persentase wanita Tunasosial yang memiliki kompetensi ketenagakerjaan	8.62	DISNAKER
				Persentase penyandang disabilitas yang memiliki kompetensi ketenagakerjaan	0.78	DISNAKER
		Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, ekonomi kreatif, peran serta masyarakat dan kelembagaan pariwisata	PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI	Pertumbuhan kelembagaan koperasi aktif pendukung pariwisata	2.70%	KUMKM
				Persentase SDM Koperasi sektor pariwisata terlatih	2.06%	KUMKM
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LATIHAN			

NO	RKP 2019	RKPD 2019				
	PRIORITAS NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	KINERJA PROGRAM		PERANGKAT DAERAH
				INDIKATOR (OUT COME)	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7
			PERKOPERASIAN, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH			
				persentase SDM Usaha Kecil sektor pariwisata terlatih	0.25%	KUMKM
			PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN USAHA KECIL	persentase Usaha Kecil sektor pariwisata yang menggunakan Aplikasi Mobile Platform (Lalaper)	1	KUMKM
				persentase Usaha Kecil sektor pariwisata yang mendapatkan Izin Usaha	1	KUMKM
				persentase Usaha Kecil sektor pariwisata yang mendapatkan mendapatkan Diseminasi dan pendampingan akses permodalan	0	KUMKM
		Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing kepariwisataan daerah	PROGRAM PENGEMBANGAN PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase peningkatan tenaga kerja pariwisata bersertifikat kompetensi	17.54	DISNAKER
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LATIHAN KERJA INDUSTRI	Persentase pencari kerja pariwisata yang mendapat pelatihan	0.15	UPD BLKI
			PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN	persentase peningkatan volume usaha koperasi	1%	KUMKM

NO	RKP 2019	RKPD 2019				
	PRIORITAS NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	KINERJA PROGRAM		PERANGKAT DAERAH
				INDIKATOR (OUT COME)	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7
			PENGEMBANGAN KOPERASI	disektor pariwisata		
		Penciptaan peluang kesempatan kerja bagi pencari kerja	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA, FASILITASI DAN AKSES INDUSTRI	Persentase Tenaga Kerja Industri terhadap total tenaga kerja (%)	5.17%	DISPERINDAG
			PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase panjang jalan dan jembatan yang dapat dilewati dengan lancar dikerjakan dengan pendekatan padat karya	94.51%	DINAS PUPR
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	Persentase panjang jaringan irigasi yang dapat dilalui air dengan lancar dilakukan dengan pendekatan padat karya	12%	DINAS PUPR
			PROGRAM PEINGKATAN PEMBERDAYAAN USAHA KECIL	Persentase wirausaha	15%	DINAS KUMKM
	- Pengembangan Iptek dan Inovasi untuk Meningkatkan Produktivitas	Pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja disektor pariwisata	PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN, PEMBINAAN HUB. INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL	persentase Jumlah perusahaan dibidang pariwisata yang diperiksa dan dibina sesuai standar pemeriksaan perusahaan	1.6	DISNAKER
		Peningkatan potensi penggalan sumber-sumber Pedapatan asli daerah untuk	PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA PENDAPATAN PAJAK	Prosentase kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Daerah	24.19%	BAKUDA

NO	RKP 2019	RKPD 2019				
	PRIORITAS NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	KINERJA PROGRAM		PERANGKAT DAERAH
				INDIKATOR (OUT COME)	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7
		pemanfaatan sebesar besarnya bagi kemakmuran masyarakat.	DAERAH			
			PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH DAN PENDAPATAN LAIN LAIN YANG SAH	Prosentase kontribusi retribusi daerah dan pendapatan lain-lain terhadap pendapatan asli daerah	75.81%	BAKUDA
			PROGRAM PENGEMBANGAN PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pertumbuhan pendapatan asli daerah dari tenaga kerja Asing	150%	DISNAKER
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN	Persentase Pertumbuhan pendapatan asli daerah dari Lab lingkungan	1%	DLH
			PROGRAM PELAYANAN TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN	Persentase Pertumbuhan pendapatan asli daerah dari Lab Kesehatan	100%	DINKES
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ASN	Persentase kontribusi penyelenggaraan diklat terhadap Retribusi Daerah	15.54%	BKPSDM
			PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	Persentase Pertumbuhan pendapatan asli daerah dari peralatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	20%	PUPR

NO	RKP 2019	RKPD 2019				
	PRIORITAS NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	KINERJA PROGRAM		PERANGKAT DAERAH
				INDIKATOR (OUT COME)	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7
			PROGRAM PENGAWASAN DAN PERALATAN	Persentase Pertumbuhan pendapatan asli daerah dari Lab Pengujian Bina Marga	20%	UPTD PENGAWASAN DAN PERALATAN BELITUNG
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM	Pertambahan Jumlah DBH (Dana Bagi Hasil) SDA (Sumber Daya Alam) Mineral Logam	80 Miliar	DINAS ESDM
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ENERGI	Pertambahan Jumlah lifting MIGAS Babel	440 Ribu Barel	DINAS ESDM
			PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN GEOLOGI DAN AIR TANAH	Persentase pertumbuhan pendapatan Daerah dari retribusi pergantian biaya cetak peta	1,7 Miliar	DINAS ESDM
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PEMBENIHAN IKAN AIR PAYAU	Pertambahan Jumlah pendapatan dari layanan fungsi produksi dan penanganan hama dan penyakit (Juta Rupiah)	26,25 juta	UPTD BALAI BENIH IKAN AIR PAYAU (BBIAP) TANJUNG KRASAK
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PEMBENIHAN IKAN LAUT	Pertambahan Jumlah pendapatan dari layanan fungsi produksi dan penanganan hama dan penyakit (Juta Rupiah)	165 juta	UPTD BALAI BENIH IKAN LAUT (BBIL) TANJUNG RUSA
			PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN, OPRASIONAL DAN	Prosentase pertambahan pendapatan dari pengelolaan perhubungan	20%	DISHUB

NO	RKP 2019	RKPD 2019				
	PRIORITAS NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	KINERJA PROGRAM		PERANGKAT DAERAH
				INDIKATOR (OUT COME)	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7
			KEBANDARUDARAAN	udara		
				persentase Usaha Kecil sektor pertambangan yang difasilitasi promosi/ pemasaran produknya melalui even pameran	0	DINAS UMKM
				persentase Usaha kecil sektor pertambangan yang difasilitasi promosi/ pemasaran produknya melalui web	2	DINAS UMKM
				persentase Usaha Kecil sektor pertambangan yang mendapatkan mendapatkan Diseminasi dan pendampingan akses permodalan	0	DINAS UMKM
		Pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja sektor sumber daya mineral	PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN, PEMBINAAN HUB. INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase perusahaan sumber daya mineral yang diperiksa dan dibina sesuai standar pemeriksaan perusahaan	4.8	DISNAKER
		Pengembangan produk sumber daya mineral, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar	PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI KEBIJAKAN SUMBER DAYA ALAM	Prosentase Jumlah Kebijakan pembangunan Sumber Daya Mineral yang diimplementasikan	72	BIRO EKONOMI



NO	RKP 2019	RKPD 2019				
	PRIORITAS NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	KINERJA PROGRAM		PERANGKAT DAERAH
				INDIKATOR (OUT COME)	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7
		pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di sektor sumber daya mineral				
			PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Pertambahan Jumlah profil investasi sumber daya mineral yang digunakan untuk promosi investasi disektor sumber daya mineral	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI PENANAMAN MODAL	Pertambahan jumlah investor sumber daya mineral	3	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DAN SISTEM INFORMASI	Presentase perusahaan sumber daya mineral yang sesuai realisasi investasi dengan rencana investasi	0.44%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	Presentase ketepatan waktu penerbitan perizinan sumber daya mineral	79%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	RKP 2019	RKPD 2019				
	PRIORITAS NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	KINERJA PROGRAM		PERANGKAT DAERAH
				INDIKATOR (OUT COME)	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7
4	Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air					
	- Peningkatan Produksi dan Pemenuhan Kebutuhan Energi					
	- Peningkatan Produksi, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan					
	- Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas SD Air	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan jaringan irigasi serta cetak sawah pertanian yang modern	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	Persentase luas jaringan irigasi yang berfungsi	55%	DINAS PUPR
			PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	Persentase kesesuaian lokasi cetak sawah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP)	50	DINAS PUPR
	- Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur air baku	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	Pertumbuhan volume air baku	10%	DINAS PUPR
		Peningkatan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP	Persentase jumlah kebijakan berkaitan pengelolaan lingkungan berkelanjutan yang diimplementasikan	100%	DLH
			PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN DAN PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP	persentase perusahaan yang mengimplementasikan kajian lingkungan hidup	18%	DLH

NO	RKP 2019	RKPD 2019				
	PRIORITAS NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	KINERJA PROGRAM		PERANGKAT DAERAH
				INDIKATOR (OUT COME)	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN	Persentase Parameter Kualitas Lingkungan yang terakreditasi	100%	UPTB LABORATORIUM LINGKUNGAN
				Nilai jaminan reklamasi	10 Miliar	DINAS ESDM
				Persentase luas lahan yang tidak terganggu di areal ULP	43%	DINAS ESDM
			PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN GEOLOGI DAN AIR TANAH	Persentase cadangan air tanah yang potensial yang dapat dimanfaatkan	40.91%	DINAS ESDM
				Jumlah obyek geologi yang diusulkan menjadi kawasan cagar alam geologi	10 Obyek	DINAS ESDM
			PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN DARAT	Prosentase Penurunan Emisi dari Sektor Transportasi	0.70%	DISHUB
			PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN, OPRASIONAL DAN KEBANDARUDARAAN	Prosentase Angkutan Umum bandara udara yang layak jalan	20.00%	DISHUB
	- Pemantapan Regulasi dan Penguatan Kelembagaan Energi, Pangan dan SD Air	Pengembangan TPA Regional	PROGRAM KECIPTA KARYAAN DAN PERMUKIMAN	Persentase drainase dalam kondisi baik/aliran air tidak tersumbat di KPengembangan TPA Regional	0%	PRKP
				Persentase jalan lingkungan	0%	PRKP

NO	RKP 2019	RKPD 2019				
	PRIORITAS NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	KINERJA PROGRAM		PERANGKAT DAERAH
				INDIKATOR (OUT COME)	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7
				permukiman dalam kondisi baik di Pengembangan TPA Regional		
				Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap di TPA Regional	0%	PUPR
				Persentase panjang jembatan dalam kondisi baik di TPA Regional	0%	PUPR
				Persentase luas lahan yang bersertifikat untuk kepentingan di TPA Regional	0%	PUPR
				Persentase penyediaan volume air baku untuk pengembangan TPA Regional	5%	PUPR
				Panjang saluran / sungai yang dinormalisasi pada kawasan kumuh	5%	PUPR
5	Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu					
	- Kamtibmas dan Keamanan Siber	Peningkatan efektivitas pelaksanaan urusan	PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN TIK, STATISTIK DAN PERSANDIAN	Kualitas layanan persandian yang dimanfaatkan untuk pengamanan informasi berklasifikasi dan strategis milik pemerintah daerah di ling pemprov Babel sesuai	Baik	DISKOMINFO

NO	RKP 2019	RKPD 2019				
	PRIORITAS NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	KINERJA PROGRAM		PERANGKAT DAERAH
				INDIKATOR (OUT COME)	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7
				standar persandian		
				Jumlah kasus Konflik Sara Yang Dapat Diantisipasi	2	KESBANGPOL
		Peningkatan pemberian kesempatan Kebebasan sipil kepada masyarakat	PROGRAM PENGUATAN KEWASPADAAN NASIONAL	Tingkat Kerawanan Konflik Kabupaten/kota	9	KESBANGPOL
			PROGRAM KETAHANAN EKONOMI, SENI, BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas/LSM dan OKP yang ikut serta dalam kegiatan Pembangunan	35	KESBANGPOL
				Persentase Jumlah sanggar/paguyuban yang melestarikan seni budaya dalam mendukung ketahanan budaya	40	KESBANGPOL
		Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan perda serta perlindungan masyarakat (Linmas)	PROGRAM PENINGKATAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT	Prosentase jumlah pelanggaran Tibumtranmas yang ditindak sesuai dengan aturan	100%	SATPOL PP
			PROGRAM PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Persentase jumlah linmas yang berkompeten dalam penyelenggaraan kantrantibmas	6.05%	SATPOL PP
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERSONIL SATPOL PP	Prosentase jumlah personil Satpol PP yang melaksanakan penyelenggaraan	16.23%	SATPOL PP

NO	RKP 2019	RKPD 2019				
	PRIORITAS NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	KINERJA PROGRAM		PERANGKAT DAERAH
				INDIKATOR (OUT COME)	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7
				kanrantibmas		
			PROGRAM PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA	Cakupan penegakan perda	100%	SATPOL PP
	- Kesuksesan Pemilu	Peningkatan pelayanan terhadap Hak-hak politik masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN	Persentase jumlah perempuan yang berkompetensi dilembaga politik	27.77	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
				Persentase Jumlah organisasi dan lembaga masyarakat yang berbasis gender	30	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
				Pertumbuhan Cakupan Pembinaan Politik Daerah	7	KESBANGPOL
				persentase rekomendasi pengembangan berdemokrasi yg ditindak lanjuti	50	KESBANGPOL
	- Pertahanan Wilayah Nasional					
	- Kepastian Hukum dan Reformasi Birokrasi	Peningkatan kesesuaian antar dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja	PROGRAM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN APBN	Prosentase PD Provinsi dan Kab/Kota yang realisasi fisiknya 100 % pelaksanaan sumber dana APBN	80%	BIRO PEMBANGUNAN
				Persentase kasus pelanggaran disiplin minimal sedang	0.15%	BKPSDM
				prosentase bendahara	100%	BAKUDA

NO	RKP 2019	RKPD 2019				
	PRIORITAS NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	KINERJA PROGRAM		PERANGKAT DAERAH
				INDIKATOR (OUT COME)	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7
		aset dan pencatatan pelaporan aset serta laporan realisasi anggaran	PELAYANAN VERIFIKASI DAN PERBENDAHARAAN	perangkat daerah yang berkompeten		
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN AKUTANSI DAN PELAPORAN	persentase laporan keuangan PD yang sesuai dengan SAP	100%	BAKUDA
			PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA ASET DAERAH	Nilai aset daerah yang dapat diyakini kewajarannya	WTP	BAKUDA
				Peningkatan persentase kontribusi kemanfaatan aset daerah terhadap PAD	0.34%	BAKUDA
		Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara transparan dan akuntabel	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PEMERINTAHAN DAN APARATUR	Peningkatan Nilai Penguatan Pengawasan pada komponen proses IRB	7	INSPEKTORAT
				Prosentase jumlah pengembalian uang yang disetorkan ke kas daerah.	94	INSPEKTORAT
				Prosentase penyelesaian kasus pengaduan masyarakat	100	INSPEKTORAT
			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PEMBANGUNAN, SOSIAL, EKONOMI DAN BUDAYA	Tingkat capaian Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3	INSPEKTORAT
				Peningkatan capaian Level	3	INSPEKTORAT

NO	RKP 2019	RKPD 2019				
	PRIORITAS NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	KINERJA PROGRAM		PERANGKAT DAERAH
				INDIKATOR (OUT COME)	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7
		Peningkatan kesesuaian antar dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja		Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)		
			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) dalam APBD	3.55	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
			PROGRAM PENGANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundangan dan jadwal penetapan APBD dan Perubahan APBD (Ket: 3 = sesuai, 2 = kurang sesuai, 1 = tidak sesuai)	3	BAKUDA
				Prosentase kesesuaian antara RAPBD dengan dokumen KUA-PPAS	100%	BAKUDA
			PROGRAM PERENCANAAN SETDA	Nilai Lakip Setda Provinsi	80%	BIRO PEMBANGUNAN
				Persentase data dan informasi yang digunakan untuk mengambil kebijakan dan perencanaan	200 data	DISKOMINFO
		Peningkatan Penataan peraturan perundang-undangan	PROGRAM PENINGKATAN PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Persentase Produk hukum daerah yang tidak tumpang tindih	85%	BIRO HUKUM
				Persentase jumlah masyarakat yang mendapat	85%	BIRO HUKUM



NO	RKP 2019	RKPD 2019				
	PRIORITAS NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	KINERJA PROGRAM		PERANGKAT DAERAH
				INDIKATOR (OUT COME)	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7
				Pelayanan bantuan Hukum		
			PROGRAM PENGEMBANGAN DOKUMENTASI HUKUM DAN INFORMASI HUKUM	Persentase produk hukum daerah yang dapat di akses oleh masyarakat	85%	BIRO HUKUM
			PROGRAM PENGEMBANGAN RISALAH RAPAT DAN KAJIAN PRODUK HUKUM PERUNDANG-UNDANGAN	Presentase peningkatan fungsi legislasi lembaga DPRD dan alat kelengkapan lainnya	80	SETWAN
		Peningkatan Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur	PROGRAM PENINGKATAN PUBLIKASI, PENGUMPULAN DAN PENYARINGAN INFORMASI	Persentase kesesuaian antar informasi yang dikelola dengan arah kebijakan pembangunan pemerintah daerah	100	BIRO HUMAS
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEHUMASAN, DOKUMENTASI, PUBLIKASI MEDIA DAN IT	Persentase kesesuaian antar informasi yang dipublikasikan dengan arah kebijakan pembangunan pemerintah daerah	100	BIRO HUMAS
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PROTOKOLER	Persentase kesesuaian antar agenda kepala daerah yang layani dengan arah kebijakan pembangunan daerah	100	BIRO HUMAS
			PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI, INFORMASI DAN PELAYANAN SERTA	Persentase kesesuaian antara Promosi dan Informasi dengan arah	100%	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI

NO	RKP 2019	RKPD 2019				
	PRIORITAS NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	KINERJA PROGRAM		PERANGKAT DAERAH
				INDIKATOR (OUT COME)	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7
			HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA	kebijakan pembangunan daerah		
				Persentase kesesuaian antar agenda kepala daerah di Jakarta yang layani dengan arah kebijakan pembangunan daerah	100%	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
				Persentase kesesuaian antara Peningkatan Hubungan Antar Lembaga dengan arah kebijakan pembangunan daerah	100%	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
		Peningkatan Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KERUMAHTANGGAAN, KEHUMASAN DAN PROTOKOLER DEWAN	Persentase kesesuaian antar informasi yang dipublikasikan dan layanan keprotokoler dewan dengan arah kebijakan pembangunan pemerintah daerah	95%	SETWAN
				Persentase jumlah sarana prasarana lembaga DPRD	76%	SETWAN
		Peningkatan Penguatan Sistem Manajemen Pemerintahan	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN SERTA ANALISIS JABATAN	Persentase jumlah Organisasi perangkat daerah yang sesuai antar beban kerja organisasi dengan ukuran kelembagaannya	75%	BIRO ORGANISASI
				Persentase Jumlah Pejabat	46%	BIRO

NO	RKP 2019	RKPD 2019				
	PRIORITAS NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	KINERJA PROGRAM		PERANGKAT DAERAH
				INDIKATOR (OUT COME)	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7
				Struktural ASN yang memiliki kinerja yang baik		ORGANISASI
				Persentase Jumlah ASN yang sesuai antara beban kerja dengan kompetensi dan jabatannya	80%	BIRO ORGANISASI
			PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN TATA LAKSANA PEMERINTAH DAERAH	Peningkatan kepuasan masyarakat	B	BIRO ORGANISASI
			PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH	Persentase peningkatan pengembangan kinerja ASN dan Pemerintah Daerah	75	BIRO ORGANISASI
		Peningkatan kompetensi dan profesional aparatur	PROGRAM PENGADAAN PEGAWAI, MUTASI, PROMOSI, DAN KEPANGKATAN	Persentase Pemenuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan dan formasi	87%	BKPSDM
				Persentase pegawai ASN Naik Pangkat dan Pensiun Tepat Waktu	92%	BKPSDM
				Persentase pegawai ASN yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi	74%	BKPSDM
				Persentase ASN yang menerima penghargaan	2.19%	BKPSDM
			PROGRAM PENILAIAN KINERJA, DISIPLIN, INFORMASI DAN KESEJAHTERAAN ASN			

NO	RKP 2019	RKPD 2019				
	PRIORITAS NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	KINERJA PROGRAM		PERANGKAT DAERAH
				INDIKATOR (OUT COME)	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7
				Persentase ASN yang SKP nya dinilai tepat waktu	65%	BKPSDM
				Persentase akurasi data dan informasi kepegawaian	84%	BKPSDM
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ASN	Persentase Pegawai ASN yang meningkat kompetensi teknis dan fungsional	42%	BKPSDM
				Persentase Pegawai ASN yang meningkat pendidikan formalnya;	39.90%	BKPSDM
				Persentase Pegawai ASN yang memenuhi kompetensi dasar dan manajerial	96%	BKPSDM
				Nilai akreditasi Diklat	81	BKPSDM
				Persentase Pegawai ASN yang mempunyai Profil Kompetensi sesuai dengan standar penilaian	30.67%	BKPSDM
		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan memberikan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi bagi masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA PENDAPATAN PAJAK DAERAH	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Publik Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah	B	BAKUDA
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PUSAT LAYANAN USAHA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pusat	92%	DINAS KUMKM

NO	RKP 2019	RKPD 2019				
	PRIORITAS NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	KINERJA PROGRAM		PERANGKAT DAERAH
				INDIKATOR (OUT COME)	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7
			TERPADU PLUT KUMKM	Layanan Usaha Terpadu PLUT KUMKM		
		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih serta pelayanan publik yang efektif dan efisien	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA INFORMASI LAYANAN PENGADAAN	Nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap pengembangan data informasi layanan pengadaan	80	BIRO LAYANAN PENGADAAN
			PROGRAM PENINGKATAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengadaan Barang dan Jasa	80	BIRO LAYANAN PENGADAAN
			PROGRAM PENINGKATAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK	Nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengadaan secara elektronik	80	BIRO LAYANAN PENGADAAN
			PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	Presentase jumlah administrasi kewilayahan yang terselesaikan	9 bidang tanah	BIRO PEMERINTAHAN
				Persentase luas Bidang Tanah Pemerintah Provinsi Yang bersertifikat	1	BIRO PEMERINTAHAN
				Persentase jumlah kasus sengketa batas wilayah administrasi yang diselesaikan	1	BIRO PEMERINTAHAN
			PROGRAM PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH	Presentase jumlah kebijakan penyelenggaraan otonomi daerah yang		BIRO PEMERINTAHAN

NO	RKP 2019	RKPD 2019				
	PRIORITAS NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	KINERJA PROGRAM		PERANGKAT DAERAH
				INDIKATOR (OUT COME)	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7
				diimplementasikan		
			PROGRAM PENGEMBANGAN KERJA SAMA PEMERINTAH DAERAH	Persentase jumlah kerjasama pemerintah daerah/swasta/luar negeri yang diimplementasikan	75	BIRO PEMERINTAHAN
			PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEARSIPAN	Persentase kelembagaan kearsipan yang melaksanakan tertib arsip	20	DKPUS
			PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN ARSIP	Pertambahan jumlah arsip yang dikelola sesuai standar (Dinamis dan Statis)	350	DKPUS
				Pertambahan jumlah koleksi bahan pustakaan ;	350	DKPUS
				Pertambahan pengunjung perpustakaan	11,500	DKPUS
			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN PUSTAKA DAN LAYANAN PERPUSTAKAAN	Pertambahan jumlah koleksi buku perpustakaan ;		DKPUS
			PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN TIK, STATISTIK DAN PERSANDIAN	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Birokrasi	30%	DISKOMINFO
			PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN	Persentase sistem informasi pemerintah daerah yang	40%	DISKOMINFO

NO	RKP 2019	RKPD 2019				
	PRIORITAS NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	KINERJA PROGRAM		PERANGKAT DAERAH
				INDIKATOR (OUT COME)	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7
			PEMERINTAH BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI	aman		
			PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	Persentase rekomendasi Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang	25%	DINAS PUPR
			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNKASI PUBLIK	persentase kesesuaian antara Kuantitas Berita dengan Informasi yang dipublikasi	60%	KOMINFO
			PROGRAM PENGADMINISTRASIAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	Persentase Jumlah data base kependudukan tingkat provnsi yang akurat	100	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
				Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan NIK Data base kependudukan dan KTP dalam meningkatkan pelayananan ke masyarakat	14.28	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
			PROGRAM PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI	Persentase jumlah tenaga konstruksi yang bersertifikasi profesi	71%	DINAS PUPR
				Persentase jumlah kelembagaan jasa konstruksi yang berkompetensi	40%	DINAS PUPR
				Persentase Jumlah layanan	70%	DINAS PUPR

NO	RKP 2019	RKPD 2019				
	PRIORITAS NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	KINERJA PROGRAM		PERANGKAT DAERAH
				INDIKATOR (OUT COME)	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7
				informasi jasa konstruksi		
		Menekan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak	PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Menurunkan Rasio Perempuan Korban Kekerasan per 100.000 penduduk usia 18 Tahun keatas di tingkat daerah provinsi	37.97	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
				Menurunkan Rasio Anak yang memerlukan perlindungan khusus per 100.000 anak usia 0-18 Tahun tingkat daerah Provinsi	0.43	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Perempuan korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial	20.67	DINAS SOSIAL
			PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase informasi berkaitan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dapat di akses oleh masyarakat	25%	DISKOMINFO
		Menjamin hak anak dalam pembangunan	PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Persentase Kab/Kota Layak Anak	42.85	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB



NO	RKP 2019	RKPD 2019				
	PRIORITAS NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	KINERJA PROGRAM		PERANGKAT DAERAH
				INDIKATOR (OUT COME)	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7
			PROGRAM PENGADMINISTRASIAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	Persentase anak yang memiliki akte kelahiran dalam mendukung hak anak untuk mendapat hak identitas	N.A	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase anak yang mendapatkan hak dalam pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial	18.99	DINAS SOSIAL
		Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara transparan dan akuntabel	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PEMERINTAHAN DAN APARATUR	Peningkatan Nilai Penguatan Pengawasan pada komponen proses IRB	7	INSPEKTORAT
			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH	Prosentase jumlah rekomendasi temuan pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti	95	INSPEKTORAT
				Prosentase jumlah pengembalian uang yang disetorkan ke kas daerah.	94	INSPEKTORAT
				Prosentase penyelesaian kasus pengaduan masyarakat	100	INSPEKTORAT
			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PEMBANGUNAN, SOSIAL, EKONOMI DAN BUDAYA	Tingkat capaian Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3	INSPEKTORAT

NO	RKP 2019	RKPD 2019				
	PRIORITAS NASIONAL	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM PERANGKAT DAERAH	KINERJA PROGRAM		PERANGKAT DAERAH
				INDIKATOR (OUT COME)	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7
				Peningkatan capaian Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	3	INSPEKTORAT
	- Efektivitas Diplomasi	Peningkatan kualitas, partisipasi dan prestasi pemuda di berbagai bidang pembangunan, dan peningkatan pengelolaan ke olah raga serta mengembangkan peran serta kebudayaan dalam mendukung pembangunan kepariwisataan	PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Pemuda Lintas Negara	6.67%	DISKEPORA

#### 4.2.3. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan SDGs

Setelah pelaksanaan *MilleniumDevelopment Goals (MDGs)* periode 2010-2015 yang berfokus pada aspek pembangunan manusia dan dalam penyusunannya bersifat top down, saat ini perumusan target berkelanjutan yaitu *SustainabilityDevelopment Goals (SDGs)* sedang digagas untuk melengkapi kekurangan yang belum dapat dicapai oleh *MDGs*. *SDGs* memiliki ruang lingkup lebih luas dan lebih kompleks. Prinsip penjabaran konkrit pelaksanaan *SDGs* untuk agenda paska 2015, yaitu: (1) *SDGs* tidak melemahkan komitmen internasional terhadap pencapaian *MDGs* pada tahun 2015, namun bahkan akan memperbarui komitmen dan melanjutkan komitmen *MDGs* yang masih belum selesai, dengan penyesuaian selaras dengan dinamika yang terjadi; (2) *SDGs* akan dilaksanakan berdasarkan Agenda 21, *Johannesburg Plan of Implementation* dan *Rio Principles*, serta mempertimbangkan perbedaan kondisi, kapasitas dan prioritas nasional; (3) *SDGs* akan difokuskan pada pencapaian tiga dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu dimensi pembangunan manusia (*human development*), dimensi ekonomi (*economic development*) dan dimensi lingkungan (*environtment development*). Sampai dengan saat ini, konsep *SDGs* akan meliputi 17 goal, 169 target, dan lebih dari 300 indikator yang saat ini masih dalam proses perumusan akhir. Berikut ini tabel IV.5 yang menyajikan keterkaitan antara prioritas pembangunan provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam upaya untuk mendukung pencapaian tujuan *SDGs*.

**Tabel IV.12**

Arah Kebijakan, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas RKPD 2019 Dalam Rangka Mendukung Pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)*

No	Tujuan Pembangunan SDGs	RKPD 2019				
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	11
1	Mengentaskan segala bentuk kemiskinan	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin	PROGRAM PENANGANAN FARKIR MISKIN	Persentase PMKS yang mendapatkan Bantuan Beras Sejahtera	19,64	DINSOS
			PROGRAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN	Persentase peningkatan kuantitas dan kualitas rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin	22.51	DINAS PRKP
			PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH ATAS	Persentase Siswa SMA miskin yang mendapatkan beasiswa miskin	100	DINAS PENDIDIKAN
			PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KEJURUAN	Persentase siswa SMK miskin yang mendapatkan beasiswa miskin	100	DINAS PENDIDIKAN
			PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN	Persentase kepesertaan JKN	92	DINAS KESEHATAN
			PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Masyarakat Miskin yang mendapat bantuan Pangan dan Gizi	72.07%	DINAS KESEHATAN
		Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN	Persentase Kepala Keluarga perempuan miskin yang diberdayakan	09.47	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
			PROGRAM PENANGANAN FARKIR MISKIN	Persentase PMKS (farkir miskin) yang mendapatkan Bantuan Usaha	18.15	DINSOS
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN	Persentase rumah tangga miskin yang bekerja disektor perdagangan	10%	DISPERINDAG
				Persentase Pemantauan dan Pengawasan distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting (18 bahan Pokok)		DISPERINDAG
			PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase informasi berkaitan dengan penanggulangan Kemiskinan yang dapat diakses oleh masyarakat	25%	DISKOMONFO
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I	10.08	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
			PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN, PEMBINAAN HUB.	Pertumbuhan kenaikan upah tenaga kerja		DISNAKER

No	Tujuan Pembangunan SDGs	RKPD 2019				
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	11
			INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL			
				persentase penyelesaian kasus tenaga kerja	65%	DISNAKER
				persentase penurunan kecelakaan kerja	00.32	DISNAKER
2	Mengentaskan kelaparan ketahanan pangan dan meningkatkan gizi serta mempromosikan <i>agriculture</i> berkelanjutan	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan	PROGRAM PENINGKATAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN	Peningkatan Skor PPH konsumsi jadi 92,50	81	DINAS PANGAN
				persentase pangan yang aman dikonsumsi	83	DINAS PANGAN
			PROGRAM KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN	Kenaikan Skor PPH Ketersediaan	81.09.00	DINAS PANGAN
				Persentase jumlah penduduk rawan pangan yang keluar dari katagori penduduk rawan pangan	01.01	DINAS PANGAN
			PROGRAM KECIPTAKARYAAN DAN PERMUKIMAN	Persentase cakupan pelayanan akses air minum di kawasan strategis provinsi	9%	DINAS PRKP
				Persentase cakupan pelayanan akses air minum di kawasan permukiman kumuh Provinsi	50%	DINAS PRKP
		Menjamin hak anak dalam pembangunan	PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita dalam mendukung hak anak untuk mendapatkan hak kesehatan	14.30%	DINAS KESEHATAN
		Pengembangan Kawasan Budidaya Pertanian	PROGRAM PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	Tersedianya Kawasan budidaya komoditas padi	-	DINAS PERTANIAN
				Tersedianya Kawasan budidaya komoditi cabai	-	DINAS PERTANIAN
				Tersedianya Kawasan budidaya bawang merah	-	DINAS PERTANIAN
			PROGRAM PENGEMBANGAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	Tersedianya Kawasan pengembangan ternak sapi	-	DINAS PERTANIAN
			PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP	Tersedianya Dokumen KLHS Agropolitan Berbasis Demonstration Farming Sawah Mekanisasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang digunakan dalam perencanaan kawasan	1 Dokumen	DLH
3	Menjamin hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan untuk	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap	PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase status kesehatan masyarakat	72.07%	DINKES

No	Tujuan Pembangunan SDGs	RKPD 2019				
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	11
	semua dan segala usia	kesehatan				
			PRORAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	Persentase angka kesakitan penyakit menular dan penyakit tidak menular	77.60%	DINKES
			PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase informasi tentang kesehatan masyarakat	25%	KOMINFO
		Meningkatkan Pengendalian Penyalahgunaan Napza	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIK MEDIS KEJIWAAN DAN NAPZA	Persentase penyalahgunaan Napza yang mendapatkan pelayanan medis rehabilitasi	30	RSJ
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIK KEPERAWATAN JIWA DAN NAPZA	Persentase penyalahgunaan Napza yang mendapatkan pelayanan keperawatan rehabilitasi	20	RSJ
			PROGRAM KETAHANAN EKONOMI, SENI, BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN	Pertumbuhan masyarakat yang mendapatkan pemahaman penyalahgunaan napza	500	KESBANGPOL
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase korban napza	21.28	DINAS SOSIAL
		Pengendalian tingkat kelahiran penduduk dan perpindahan penduduk untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang	PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Persentase unmeet need	07.48	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
4	Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan adil serta mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup bagi semua	peningkatan akses pelayanan pendidikan	PROGRAM PENINGKATAN DAN PEGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH ATAS	APK SMA	38.88%	DINAS PENDIDIKAN
			PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KEJURUAN	APK SMK	38.38%	DINAS PENDIDIKAN
			PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KHUSUS	APK SLB		DINAS PENDIDIKAN
		peningkatan mutu layanan pendidikan.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN KUANTITAS DAN KUALITAS GURU SERTA TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru Berkualifikasi S1/D4	97%	DINAS PENDIDIKAN
				Persentase Guru Bersertifikat Pendidik	40%	DINAS PENDIDIKAN
				Persentase guru dengan nilai rata-rata uji kompetensi diatas 50	90%	DINAS PENDIDIKAN
			PROGRAM PENINGKATAN DAN PEGEMBANGAN PELAYANAN	Persentase SMA terakreditasi A	42.42%	DINAS PENDIDIKAN

No	Tujuan Pembangunan SDGs	RKPD 2019				
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	11
			PENDIDIKAN MENENGAH ATAS			
				Rata-rata nilai UN SMA	06.05	DINAS PENDIDIKAN
			PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KEJURUAN	Persentase SMK terakreditasi A	38.60%	DINAS PENDIDIKAN
				Rata-rata nilai UN SMK	06.05	DINAS PENDIDIKAN
			PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KHUSUS	Persentase SLB terakreditasi A	100%	DINAS PENDIDIKAN
			PROGRAM PENINGKATAN PEMBUDAYAAN DAN PENINGKATAN PRESTASI OLAH RAGA	Persentase Atlet pelajar Berprestasi yang dibina ditingkat provinsi yang memperoleh medali	5.08%	DISKEPORA
			PROGRAM PENINGKATAN PEMBUDAYAAN DAN PENINGKATAN PRESTASI OLAH RAGA	Persentase Insan Olahraga yang berprestasi	5.08%	DISKEPORA
			PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA	Persentase Pemuda Berprestasi	22.87%	DISKEPORA
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PERPUSTAKAAN	presentase perpustakaan terakreditasi;	160	DKPUS
			PROGRAM PENGEMBANGAN STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Presentase jumlah sarana dan prasaran kepemudaan yang terbangun yang difungsikan	16.67%	DISKEPORA
			PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA	Persentase Insan Kepemudaan yang berprestasi dan berdedikasi yang dibantu	6.41%	DISKEPORA
			PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN DARAT	Rasio Jumlah Bus sekolah dengan Jumlah Murid	5%	DINAS PERHUBUNGAN
				Persentase sekolah di ruas jalan Provinsi yang dilengkapi dengan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	4%	DINAS PERHUBUNGAN
			PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase informasi berkaitan dengan pendidikan yang dapat akses oleh masyarakat	25%	DISKOMINFO
			PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI	Persentase SMA dan SMK yang telah berbasis IT	80%	DISKOMINFO
			PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN, KB, DAN PEMUDA	Prosentase jumlah kebijakan pengembangan pendidikan, keluarga berencana, pemuda dan pariwisata yang diimplementasikan	80	BIRO KESRA

No	Tujuan Pembangunan SDGs	RKPD 2019				
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	11
				Persentase Jumlah Sekolah agama yang dinilai sesuai standar	35 sekolah	BIRO KESRA
			PROGRAM PENGELOLAAN BANTUAAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) (DAK Non Fisik)	Persentase Sekolah penerima BOS	100%	DINAS PENDIDIKAN
			PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAAN PENDIDIKAN KEJURUAAN	Persentase SMK yang memiliki sertifikasi profesi	38.60%	DINAS PENDIDIKAN
			PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KEJURUAN	Persentase SMK Kejuruan yang mendukung pengembangan pekonomi berbasis potensi lokal	100%	DINAS PENDIDIKAN
5	Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan.	Peningkatan kualitas hidup dan peran serta perempuan	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN	Persentase perempuan yang bekerja	0,342361111	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
		Peningkatan kesesuaian antar dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) dalam APBD	03.55	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
		Menekan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak	PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Menurunkan Rasio Perempuan Korban Kekerasan per 100.000 penduduk usia 18 Tahun keatas di tingkat daerah provinsi	37.97	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
				Menurunkan Rasio Anak yang memerlukan perlindungan khusus per 100.000 anak usia 0-18 Tahun tingkat daerah Provinsi	00.43	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
			PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Puskesmas yang melayani kekerasan terhadap perempuan dan anak		DINKES
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Perempuan korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial	0,879861111	DINAS SOSIAL
			PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase informasi berkaitan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dapat di akses oleh masyarakat	25%	DISKOMINFO
		Menjamin hak anak dalam pembangunan	PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Persentase Kab/Kota Layak Anak	42.85	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase anak yang mendapatkan	0,81875	DINAS SOSIAL



No	Tujuan Pembangunan SDGs	RKPD 2019				
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	11
				hak dalam pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial		
			PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita dalam mendukung hak anak untuk mendapatkan hak kesehatan	14.30%	DINAS KESEHATAN
		Peningkatan pelayanan terhadap Hak-hak politik masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN	Persentase jumlah perempuan yang berkompetensi dilembaga politik	27.77	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
				Persentase Jumlah organisasi dan lembaga masyarakat yang berbasis gender	30	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
6	Menjamin ketersediaan dan manajemen air serta sanitasi yang berkelanjutan untuk semua	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan	PROGRAM KECIPTAKARYAAN DAN PERMUKIMAN	Persentase cakupan pelayanan akses air minum di kawasan strategis provinsi	9%	DINAS PRKP
				Persentase cakupan pelayanan akses air minum di kawasan permukiman kumuh Provinsi	50%	DINAS PRKP
				Persentase sarana air limbah yang layak di kawasan strategis Provinsi		DINAS PRKP
				Persentase sarana air limbah yang layak di kawasan kumuh Provinsi	85%	DINAS PRKP
		Pengendalian kualitas air	PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN DAN PENAATAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase BOD, COD dan TSS	2%	DLH
			PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SDA DAN EKOSISTEM	Persentase Kawasan ekosistem essensial (%)	100%	DINAS KEHUTANAAN
7	Menjamin akses energy yang terjangkau, handal, berkelanjutan dan modern untuk semua	Peningkatan tata kelola dan nilai tambah produk sumber daya mineral;	PROGRAM PENGEMBANGAN PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	Persentase Perusahaan pertambangan non logam yang menerapkan good mining practices	65%	DINAS ESDM
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM	Persentase Perusahaan pertambangan logam yang menerapkan good mining practices	60%	DINAS ESDM
			PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN GEOLOGI DAN AIR TANAH	Persentase cadangan Mineral bukan logam dan batuan yang potensial	33%	DINAS ESDM
		Pemenuhan Energi listrik untuk mendorong pengembangan industri berbasis potensi daerah	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ENERGI	Persentase penggunaan EBT	6.83%	ESDM

No	Tujuan Pembangunan SDGs	RKPD 2019				
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	11
		serta peningkatan rasio elektrifikasi;				
				Persentase perusahaan yang Pendistribusian Minyak dan Gas sesuai standar	60%	ESDM
		Peningkatan potensi penggalan sumber-sumber Pedapatan asli daerah untuk pemanfaatan sebesar besarnya bagi kemakmuran masyarakat.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ENERGI	Pertambahan Jumlah lifting MIGAS Babel	440 Ribu Barel	DINAS ESDM
8	Mempromosikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang menyeluruh produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua	Pengembangan pariwisata daerah, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antar sektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di bidang pariwisata.	PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI BUMD, PENANAMAN MODAL, PARIWISATA DAN BUDAYA	Prosentase Jumlah Kebijakan BUMD, Penanaman Modal, Pariwisata dan Budaya yang di implementasikan	72	BIRO EKONOMI
				Pertambahan Jumlah UKM pariwisata yang bermitra dengan investor	1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI PENANAMAN MODAL	Pertambahan Jumlah Investor Pariwisata	3	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DAN SISTEM INFORMASI	Presentase perusahaan yang sesuai realisasi investasi disektor pariwisata dengan rencana investasi	0.44%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Penciptaan peluang kesempatan kerja bagi pencari kerja	PROGRAM PENGEMBANGAN PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	17.14	DISNAKER
		Penciptaan peluang kesempatan kerja bagi pencari kerja	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA, FASILITASI DAN AKSES INDUSTRI	Persentase Tenaga Kerja Industri terhadap total tenaga kerja (%)	5.17%	DISPERINDAG

No	Tujuan Pembangunan SDGs	RKPD 2019				
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	11
			PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA	Persentase pemuda yang bekerja	10.20%	DISKEPORA
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase penduduk yang bekerja di sektor perikanan tangkap	6.82%	DISKEPORA
			PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN BUDIDAYA DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	Persentase penduduk yang bekerja di sektor perikanan budidaya dan Usaha Pengolahan & Pemasaran	1.14%	DKP
			PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase jumlah informasi berkaitan dengan penciptaan lapangan pekerjaan yang diakses oleh pencari kerja	25%	DISKOMINFO
			PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase panjang jalan dan jembatan yang dapat dilewati dengan lancar dikerjakan dengan pendekatan padat karya	94.51%	DINAS PUPR
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	Persentase panjang jaringan irigasi yang dapat dilalui air dengan lancar dilakukan dengan pendekatan padat karya	12%	DINAS PUPR
			PROGRAM PEINGKATAN PEMBERDAYAAN USAHA KECIL	Persentase wirausaha	15%	DINAS KUMKM
			PROGRAM PENGEMBANGAN PENDAYAGUNAAN SDA, TEKNOLOGI TEPAT GUNA DAN PELATIHAN MASYARAKAT	Pertambahan Jumlah Masyarakat Desa yang terlatih dalam Kewirausahaan	100 Orang	DINAS PMD
				Persentase KPM yang aktif	03.24	DINAS PMD
9	Membangun infrastruktur yang tangguh, mempromosikan industry yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan jaringan irigasi serta cetak sawah pertanian yang modern	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	Persentase luas jaringan irigasi yang berfungsi	55%	DINAS PUPR
		Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan jaringan irigasi serta cetak sawah pertanian yang modern	PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	Persentase kesesuaian lokasi cetak sawah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP)	50	DINAS PUPR
		Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur air baku	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	Pertumbuhan volume air baku	10%	DINAS PUPR
		Peningkatan,	PROGRAM PENINGKATAN	Persentase dana pendamping desa	66%	KOMINFO

No	Tujuan Pembangunan SDGs	RKPD 2019				
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	11
		pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi bagi masyarakat	PENYELENGGARAAN PEMERINTAH BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI	yang terlayani jaringan Internet		
		Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan terminal serta sarana prasarana pendukung terminal	PROGRAM PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN DARAT	Persentase desa yang terlayani oleh angkutan perintis lintas kabupaten dalam provinsi		DINAS PERHUBUNGAN
		Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan terminal serta sarana prasarana pendukung terminal	PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN, OPERASIONAL DAN KEBANDARUDARAAN	Persentase sarana dan prasarana fasilitas bandara kewenangan provinsi yang tersedia dan beroprasional	10%	DISHUB
10	Mengurangi kesenjangan di dalam dan luar negeri					
11	Membuat kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan					
		Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur dasar yang layak bagi masyarakat	PROGRAM KECIPTAKARYAAN DAN PERMUKIMAN	Persentase peningkatan aksesibilitas Kawasan permukiman	33%	DINAS PRKP
				Persentase peningkatan aksesibilitas di Kawasan permukiman kumuh Provinsi	26%	DINAS PRKP
		Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi bagi masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI	Persentase dana pendamping desa yang terlayani jaringan Internet	66%	KOMINFO
12	Menjamin pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan	Peningkatan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berwawasan	PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP	Persentase jumlah kebijakan berkaitan pengelolaan lingkungan berkelanjutan yang diimplementasikan	100%	DLH

No	Tujuan Pembangunan SDGs	RKPD 2019				
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	11
		lingkungan dan berkelanjutan				
		Peningkatan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN DAN PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP	persentase perusahaan yang mengimplementasikan kajian lingkungan hidup	18%	DLH
		Peningkatan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	PROGRAM PENINGKATAN PENGOLAHAN SAMPAH, PEMELIHARAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP	Pertumbuhan volume pengolahan sampah yang ramah lingkungan	0%	DLH
		Peningkatan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN DAS DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	persentase penanganan tindak pidana kehutanan		DINAS KEHUTANAAN
		Peningkatan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN	Persentase Parameter Kualitas Lingkungan yang terakreditasi	100%	UPTB LABORATORIUM LINGKUNGAN
		Peningkatan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	PROGRAM PENGEMBANGAN PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM	Persentase lahan kritis di arel IUP yang di reklamasi,	13%	DINAS ESDM
		Peningkatan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berwawasan lingkungan dan		Nilai jaminan reklamasi	10 Miliar	DINAS ESDM

No	Tujuan Pembangunan SDGs	RKPD 2019				
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	11
		berkelanjutan				
		Peningkatan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan		Persentase luas lahan yang tidak terganggu di areal ULP	43%	DINAS ESDM
		Peningkatan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN GEOLOGI DAN AIR TANAH	Persentase cadangan air tanah yang potensial yang dapat dimanfaatkan	40.91%	DINAS ESDM
		Peningkatan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan		Persentase pemenuhan Air Tanah dilokasi yang rawan air		DINAS ESDM
		Peningkatan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan		Jumlah obyek geologi yang diusulkan menjadi kawasan cagar alam geologi	10 Obyek	DINAS ESDM
		Peningkatan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	PROGRAM PENINGKATAN PELAYAN TEKNIK TATA KELOLA DISHUT	Jumlah Kawasan Hutan yang dikelola		DINAS KEHUTANAAN
		Peningkatan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN DARAT	Prosentase Penurunan Emisi dari Sektor Transportasi	0.70%	DISHUB

No	Tujuan Pembangunan SDGs	RKPD 2019				
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	11
		Peningkatan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN, OPERASIONAL DAN KEBANDARUDARAAN	Prosentase Angkutan Umum bandara udara yang layak jalan	20.00%	DISHUB
		Pengembangan TPA Regional	PROGRAM KECIPTA KARYAAN DAN PERMUKIMAN	Persentase drainase dalam kondisi baik/aliran air tidak tersumbat di KPengembangan TPA Regional		PRKP
		Pengembangan TPA Regional		Persentase jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik di Pengembangan TPA Regional		PRKP
		Pengembangan TPA Regional	PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap di TPA Regional	0%	PUPR
		Pengembangan TPA Regional	PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	Persentase luas lahan yang bersertifikat untuk kepentingan di TPA Regional		PUPR
		Pengembangan TPA Regional	PROGRAM PENGEMBANGAN SDA	Persentase penyediaan volume air baku untuk pengembangan TPA Regional	5%	PUPR
13	Membuat langkah aksi untuk menghadapi perubahan iklim dan dampaknya	Peningkatan penyelenggaraan penanggulangan bencana	PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Daerah Rawan Bencana yang Diintervensi Dalam Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	74	BPBD
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase korban bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	20	DINSOS
			PROGRAM PENGEMBANGAN DISTRIBUSI, STABILITAS, DAN CADANGAN PANGAN	Persentase Cadangan Pangan	02.07	DINAS PANGAN
			PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase informasi berkaitan dengan penanggulangan bencana yang dapat di akses oleh masyarakat	15%	KOMINFO
			PRORAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	Persentase Kab/kota yang melaksanakan kewaspadaan dini dan respon	80%	DINKES
			PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Persentase peningkatan kualitas linmas dalam penanganan bencana dan kebakaran	4.24%	SATPOL PP
			PROGRAM KEDARURATAN DAN LOGISTIK PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Daerah Rawan Bencana yang Diintervensi Dalam Penanggulangan Bencana	80	BPBD

No	Tujuan Pembangunan SDGs	RKPD 2019				
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	11
			PRORAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	Persentase penduduk terdampak krisis kesehatan yang mendapat pelayanan kesehatan akibat bencana atau berpotensi bencana dalam satu provinsi	15%	DINKES
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIK MEDIS DAN PENUNJANG MEDIS	Persentase korban bencana yang mendapat pelayanan rujukan	100%	RSUP
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	persentase Panjang Talud yang direhabilitasi dan direkonstruksi yang berfungsi dengan baik untuk menahan tanah	25%	PUPR
				Persentase Panjang Sungai /saluran yang dinormalisasi dan befungsi memperlancar aliran air sungai akibat bencana	26.80%	PUPR
			PROGRAM PERUMAHAN RAKYAT	Persentase rekonstruksi dan rehabilitasi rumah akibat bencana	51%	PRKP
			PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Panjang jalan yang direhabilitasi dan direkonstruksi akibat bencana	0.86%	PUPR
				Persentase panjang jembatan yang direhabilitasi dan direkonstruksi akibat bencana	0.12%	PUPR
			PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Daerah Rawan Bencana yang Diintervensi Dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	75	BPBD
			PRORAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	Persentase penduduk pada kondisi kejadian luarbiasa (KLB) yang mendapat pelayanan kesehatan dalam satu Provinsi	100%	DINKES
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIK MEDIS KEJIWAAN DAN NAPZA	Persentase korban bencana yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa	80	RSJ
		Pengembangan Pengelolaan kawasan rawan bencana alam	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	Persentase Panjang Penahan Abrasi Pantai	41.40%	DINAS PUPR
				Panjang sungai yang dinormalisasi pada daerah rawan bencana	40.00%	DINAS PUPR
				panjang penahan tanah akibat erosi	49.00%	DINAS PUPR
			PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN DAS DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Persentase DAS kritis yang di kelola	7	DINAS KEHUTANAAN



No	Tujuan Pembangunan SDGs	RKPD 2019				
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	11
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS TATA KELOLA DISHUT	Persentase kegiatan pengelolaan hutan oleh UPTD KPH (%)	100%	DINAS KEHUTANAAN
		Pengembangan Pengelolaan kawasan hilir daerah rawan bencana teluk bayur	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	Persentase Panjang Talud penahan banjir kawasan hilir daerah rawan bencana teluk bayur		PUPR
				Persentase Panjang pengerukan Normalisasi sungai dan kawasan hilir daerah rawan bencana teluk bayur	30%	PUPR
			PROGRAM PERUMAHAN RAKYAT	Persentase relokasi kawasan hilir daerah rawan bencana teluk bayur		PRKP
			PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap di kawasan hilir daerah rawan bencana teluk bayur	96%	PUPR
			PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	Persentase luas lahan yang bersertifikat untuk kepentingan di kawasan hilir daerah rawan bencana teluk bayur	100%	PUPR
14	Melakukan konservasi dan pemanfaatan laut, samudra dan sumberdaya maritime yang berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan.	Pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang laut serta penegakan perundang-undangan kelautan dan perikanan.	PROGRAM PENGEMBANGAN PENGELOLAAN RUANG LAUT	Luas Kawasan Konservasi yang dicadangkan (Ha)	820,077	DKP
		Pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang laut serta penegakan perundang-undangan kelautan dan perikanan.	PROGRAM PENGEMBANGAN PENGELOLAAN RUANG LAUT	Persentase sarana dan prasarana yang terbangun di Desa Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	02.13	DKP
				Persentase Usulan Pemanfaatan Ruang Laut yang terekomendasi (%)	65	DKP
			PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Pelaku Usaha yang Taat Aturan (%)	70	DKP
			PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN LAUT	Prosentase Pelabuhan Khusus (Pelsus) dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) yang memiliki izin	15.00%	DISHUB
		Peningkatan Produksi, Kualitas dan produktifitas tenaga kerja sektor Kelautan dan perikanan	PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	Volume Produksi Perikanan Tangkap (Ton/Tahun)	215,3	DKP

No	Tujuan Pembangunan SDGs	RKPD 2019				
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	11
		Peningkatan Produksi, Kualitas dan produktifitas tenaga kerja sektor Kelautan dan perikanan		Nilai Tukar Nelayan (Indeks)	109	DKP
		Pengembangan Kawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok	PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap dikawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok	19,5	DKP
			PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP	Tersedianya Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Minapolitan Lepar Pongok yang digunakan untuk perencanaan kawasan	ada	DLH
			PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN LAUT	Prosentase pemenuhan Sarana dan Prasarana pendukung Perhubungan Laut Kawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok	30%	DISHUB
			PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	Persentase jumlah Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kawasan Minapolitan Lepar Pongok yang di implementasikan	C	DINAS PUPR
		Pengembangan Kawasan Strategis etalase Perikanan Selat Nasik	PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap dikawasan Strategis Etalase Perikanan Selat Nasik	33	DKP
			PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN LAUT	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung perhubungan laut kawasan strategis etalase perikanan Selat Nasik	30%	DISHUB
			PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	Persentase Jumlah Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kawasan Etalase Perikanan Selat Nasik yang diimplementasikan	50	DINAS PUPR
		Pengembangan Kawasan Strategis Industri Perikanan Tanjung Binga	PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap dikawasan Strategis Industri Perikanan Tanjung Binga	10	DKP
			PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	Persentase Jumlah Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kawasan Industri Perikanan Tanjung Binga yang diimplementasikan	50	DINAS PUPR
		Pengembangan Kawasan	PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN	Pertumbuhan Produksi Perikanan	5	DKP

No	Tujuan Pembangunan SDGs	RKPD 2019				
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	11
		Pedesaan Minapolitan Manggar	TANGKAP	Tangkap di Kawasan Pedesaan Minapolitan Manggar		
15	Melindungi, mengembalikan, dan mempromosikan pemanfaatan ekosistem darat yang berkelanjutan, manajemen hutan yang lestari, memerangi kekeringan, menghentikan dan mengembalikan degradasi lahan serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati	Peningkatan tutupan lahan	PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP	Persentase jumlah kebijakan berkaitan dengan tutupan lahan yang diimplementasikan	1 Dok	DLH
			PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SDA DAN EKOSISTEM	Persentase luas kawasan hutan yang bervegetasi (%)	1%	DINAS KEHUTANAAN
		Pengembangan Perhutanan Sosial	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN DAS DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Persentase luas kawasan Perhutanan Sosial (%)	2%	DINAS KEHUTANAAN
16	Melindungi kedamaian dan masyarakat yang inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif untuk semua tingkatan.	Menekan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak	PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Menurunkan Rasio Perempuan Korban Kekerasan per 100.000 penduduk usia 18 Tahun keatas di tingkat daerah provinsi	37.97	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
		Menekan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak		Menurunkan Rasio Anak yang memerlukan perlindungan khusus per 100.000 anak usia 0-18 Tahun tingkat daerah Provinsi	00.43	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Perempuan korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial	0,879861111	DINAS SOSIAL
			PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase informasi berkaitan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dapat diakses oleh masyarakat	25%	DISKOMINFO
		Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara transparan dan akuntabel	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PEMERINTAHAN DAN APARATUR	Peningkatan Nilai Penguatan Pengawasan pada komponen proses IRB	7	INSPEKTORAT
			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN	Prosentase jumlah rekomendasi temuan pemeriksaan yang selesai	95	INSPEKTORAT

No	Tujuan Pembangunan SDGs	RKPD 2019				
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	11
			DAN ASSET DAERAH	ditindaklanjuti		
				Prosentase jumlah pengembalian uang yang disetorkan ke kas daerah.	94	INSPEKTORAT
				Prosentase penyelesaian kasus pengaduan masyarakat	100	INSPEKTORAT
			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PEMBANGUNAN, SOSIAL, EKONOMI DAN BUDAYA	Tingkat capaian Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3	INSPEKTORAT
				Peningkatan capaian Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	3	INSPEKTORAT
		Peningkatan pelayanan terhadap Hak-hak politik masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN	Persentase jumlah perempuan yang berkompetensi dilembaga politik	27.77	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
				Persentase Jumlah organisasi dan lembaga masyarakat yang berbasis gender	30	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih serta pelayanan publik yang efektif dan efisien	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA INFORMASI LAYANAN PENGADAAN	Nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap pengembangan data informasi layanan pengadaan	80	BIRO LAYANAN PENGADAAN
			PROGRAM PENINGKATAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengadaan Barang dan Jasa	80	BIRO LAYANAN PENGADAAN
			PROGRAM PENINGKATAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK	Nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengadaan secara elektronik	80	BIRO LAYANAN PENGADAAN
17	Penguatan moi dan revitalisasi kerjasama global untuk pembangunan berkelanjutan					

#### 4.2.4. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM)

Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2019 disusun berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan sosial serta beberapa prioritas lainnya. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2019 menggunakan target dan capaian Standar Pelayanan Minimal 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar disesuaikan dengan rencana capaian target sasaran terukur dari output kegiatan, sebagai berikut:

- a. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Pendidikan
  - 1) Pendidikan menengah; setiap Warga Negara Indonesia usia 16 s.d. 18 tahun berhak mendapatkan pendidikan menengah sesuai dengan standar nasional pendidikan.
  - 2) Pendidikan Khusus; setiap Warga Negara Indonesia usia 4 s.d. 18 tahun yang berkebutuhan khusus berhak mendapatkan pendidikan khusus sesuai dengan standar nasional pendidikan.

**Tabel IV.13**

Arah Kebijakan dan Program Prioritas RKPD 2019 Dalam Rangka Mendukung Pencapaian SPM 2019 Bidang Pendidikan

No	Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	RKPD 2019				
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	7
1	Pendidikan menengah	peningkatan akses pelayanan pendidikan	PROGRAM PENINGKATAN DAN PEGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH ATAS	APK SMA	38,88%	DINAS PENDIDIKAN
	Pendidikan Khusus		PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KEJURUAN	APK SMK	38,38%	DINAS PENDIDIKAN
2			PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN KUANTITAS DAN KUALITAS GURU SERTA TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru Berkualifikasi S1/D4	97%	DINAS PENDIDIKAN
				Persentase guru dengan nilai rata-rata uji kompetensi diatas 50	90%	DINAS PENDIDIKAN
			PROGRAM PENINGKATAN DAN PEGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH ATAS	Persentase SMA terakreditasi A	42,42%	DINAS PENDIDIKAN
				Rata-rata nilai UN SMA	6,5	DINAS PENDIDIKAN
			PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN	Persentase SMK terakreditasi A	38,60%	DINAS PENDIDIKAN

No	Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	RKPD 2019				
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	7
			KEJURUAN			
				Rata-rata nilai UN SMK	6,5	DINAS PENDIDIKAN
			PROGRAM PENINGKATAN PEMBUDAYAAN DAN PENINGKATAN PRESTASI OLAH RAGA	Persentase Atlet pelajar Berprestasi yang dibina ditingkat provinsi yang memperoleh medali	5,08%	DISKEPORA
			PROGRAM PENINGKATAN PEMBUDAYAAN DAN PENINGKATAN PRESTASI OLAH RAGA	Persentase Insan Olahraga yang berprestasi	5,08%	DISKEPORA
			PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA	Persentase Pemuda Berprestasi	22,87%	DISKEPORA
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PERPUSTAKAAN	presentase perpustakaan terakreditasi;	160	DKPUS
			PROGRAM PENGEMBANGAN STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Presentase jumlah sarana dan prasaran kepemudaan yang terbangun yang difungsikan	16,67%	DISKEPORA
			PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA	Persentase Insan Kepemudaan yang berprestasi dan berdedikasi yang dibantu	6,41%	DISKEPORA
			PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN DARAT	Rasio Jumlah Bus sekolah dengan Jumlah Murid	5%	DINAS PERHUBUNGAN
				Persentase sekolah di ruas jalan Provinsi yang dilengkapi dengan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	4%	DINAS PERHUBUNGAN
			PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase informasi berkaitan dengan pendidikan yang dapat akses oleh masyarakat	25%	DISKOMINFO
			PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI	Persentase SMA dan SMK yang telah berbasis IT	80%	DISKOMINFO
			PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN, KB, DAN PEMUDA	Prosentase jumlah kebijakan pengembangan pendidikan, keluarga berencana, pemuda dan pariwisata yang diimplementasikan	80	BIRO KESRA
				Persentase Jumlah Sekolah agama yang dinilai sesuai standar	35 sekolah	BIRO KESRA
		Peningkatan relevansi pendidikan vokasi dalam mendukung pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAAN PENDIDIKAN KEJURUAAN	Persentase SMK yang memiliki sertifikasi profesi	38,60%	DINAS PENDIDIKAN
		peningkatan mutu layanan pendidikan.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KHUSUS	Persentase SLB terakreditasi A	100%	DINAS PENDIDIKAN

No	Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	RKPD 2019				
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	7
			PROGRAM PENGELOLAAN BANTUAAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) (DAK Non Fisik)	Persentase Sekolah penerima BOS	100%	DINAS PENDIDIKAN

- b. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Kesehatan 1) Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar. 2) Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar. 3) Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. 4) Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. 5) Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar. 6) Setiap warga negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar. 7) Setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar. 8) Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. 9) Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. 10) Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar. 11) Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar. 12) Setiap orang di satuan pendidikan dasar mendapatkan pelayanan higiene sanitasi pangan sesuai standar.

**Tabel IV.14**

Arah Kebijakan dan Program Prioritas RKPD 2019 Dalam Rangka Mendukung Pencapaian SPM 2019 Bidang Kesehatan

No	Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	RKPD 2019				
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	7
1	pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan	PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase status kesehatan masyarakat	72,07%	DINKES
2	pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi		PRORAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	Persentase angka kesakitan penyakit menular dan penyakit tidak menular	77,60%	DINKES
			PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN, KB, PEMUDA DAN	Persentase Sekolah yang mengikuti lomba UKS	35 sekolah	BIRO KESRA

No	Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	RKPD 2019				
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (outcome)	Target	
1	2	3	4	5	6	7
			PARIWISATA			
			PROGRAM KECIPTAKARYAAN DAN PERMUKIMAN	Persentase cakupan pelayanan akses air minum di kawasan strategis provinsi	9%	DINAS PRKP
				Persentase cakupan pelayanan akses air minum di kawasan permukiman kumuh Provinsi	50%	DINAS PRKP
				Persentase sarana air limbah yang layak di kawasan kumuh Provinsi	85%	DINAS PRKP
				Persentase pengurangan titik genangan air di Kawasan kumuh Provinsi	30%	DINAS PRKP
				Persentase sarana pelayanan persampahan di Kawasan permukiman kumuh Provinsi	40%	DINAS PRKP
			PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI KEBIJAKAN SOSIAL, KESEHATAN, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Prosentase Jumlah kebijakan sosial, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi yang diimplementasikan	75	BIRO KESRA
			PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase informasi tentang kesehatan masyarakat	25%	KOMINFO
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA, FASILITASI DAN AKSES INDUSTRI	Persentase kandungan nutrisi industri olahan pangan.	4,68	DISPERINDA G
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS HYGIENIS PERUSAHAAN DAN KESEHATAN KERJA	Persentase perusahaan yang menerapkan norma kesehatan kerja	2,73	UPTD HYPERKES
			PROGRAM PENINGKATAN PEMBUDAYAAN DAN PENINGKATAN PRESTASI OLAH RAGA	Persentase peserta yang mengikuti olahraga rekreasi dan tradisional	0,00%	DISKEPORA
		peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN	Persentase standarisasi pelayanan kesehatan	77,12%	DINKES
			PROGRAM PELAYANAN TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN	Jumlah pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan sesuai standar	14	UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS MEDIS DAN PENUNJANG MEDIS	Presentase Ketersediaan pelayanan di Rumah Sakit	80%	RSUP



No	Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	RKPD 2019				
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (outcome)	Target	
1	2	3	4	5	6	7
			PROGRAM BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUP	Persentase dana BLUD RSUP yang digunakan untuk pelayanan langsung kemasyarakat	100%	RSUP
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS MEDIS KEJIWAAN DAN NAPZA	Prosentase Penduduk yang mengalami gangguan jiwa dan mendapatkan pelayanan kesehatan	90	RSJ
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS KEPERAWATAN JIWA DAN NAPZA	Rata-rata Lama Rawat/ Average Length of Stay (ALOS)	95	RSJ
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT JIWA	Persentase sarana dan prasarana yang tersedia di RSJ	95	RSJ
				Persentase peralatan kesehatan dan peralatan lainnya sesuai klasifikasi rumah sakit jiwa kelas A	95	RSJ
			PROGRAM BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSJ	Persentase dana BLUD RSJ yang digunakan untuk pelayanan langsung kemasyarakat	80	RSJ
			PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase informasi berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang dapat diakses masyarakat	25%	DISKOMINFO
		Pemenuhan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KESEHATAN	Persentase kualitas dan kuantitas sumberdaya kesehatan	83,39%	DINKES
		Meningkatkan Pengendalian Penyalahgunaan Napza	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS MEDIS KEJIWAAN DAN NAPZA	Persentase penyalahgunaan Napza yang mendapatkan pelayanan medis rehabilitasi	30	RSJ
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS KEPERAWATAN JIWA DAN NAPZA	Persentase penyalahgunaan Napza yang mendapatkan pelayanan keperawatan rehabilitasi	20	RSJ
			PROGRAM KETAHANAN EKONOMI, SENI, BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN	Pertumbuhan masyarakat yang mendapatkan pemahaman penyalahgunaan napza	500	KESBANGPOL
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase korban napza	21,28	DINAS SOSIAL

- c. Penyeragaman Prioritas Pembangunan Daerah dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1) Setiap warga negara berhak memperoleh air bersih untuk kebutuhan rumah tangga sesuai dengan standar air bersih 2) Setiap warga negara berhak memperoleh pengelolaan air limbah rumah tangga sesuai dengan standard.

**Tabel IV.15**

Arah Kebijakan dan Program Prioritas RKPD 2019 Dalam Rangka Mendukung Pencapaian SPM 2019 Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	RKPD 2019				
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	7
1  2	pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan	PROGRAM KECIPTAKARYAAN DAN PERMUKIMAN	Persentase cakupan pelayanan akses air minum di kawasan strategis provinsi	9%	DINAS PRKP
	penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota			Persentase cakupan pelayanan akses air minum di kawasan permukiman kumuh Provinsi	50%	DINAS PRKP
				Persentase sarana air limbah yang layak di kawasan kumuh Provinsi	85%	DINAS PRKP
		Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur air baku	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	Pertumbuhan volume air baku	10%	DINAS PUPR
		Pengembangan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan pulau Sumatera		Persentase volume air baku yang tersedia dapat digunakan di kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Sumatera	5%	DINAS PUPR
		Pengembangan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil		Persentase volume air baku yang tersedia dapat digunakan di kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil	5%	DINAS PUPR
		Pengembangan Kawasan Strategis Industri Sadai		Persentase penyediaan volume air baku di kawasan Strategis Industri Sadai	5%	DINAS PUPR
		Peningkatan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN GEOLOGI DAN AIR TANAH	Persentase cadangan air tanah yang potensial yang dapat dimanfaatkan	40,91%	DINAS ESDM

d. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana yang punya rumah; setiap korban bencana berhak memperoleh rumah sesuai dengan standar rumah layak huni. Selain itu, beberapa kegiatan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang diperhatikan dalam penyusunan RKPD tahun 2017 antara lain sebagai berikut: 1) Penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan dengan fokus tersedianya dokumen perencanaan penanganan kawasan permukiman kumuh daerah yang mengacu pada Pedoman Umum Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Nasional, dengan luasan kawasan kumuh yang mengacu pada SK kawasan permukiman kumuh yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota. Penanganan kawasan permukiman kumuh akan fokus pada: a) Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat b) penguatan kelembagaan di level nasional dan daerah terkait perumahan dan permukiman 2) Data dan profil perumahan di daerah; 3) Penyediaan layanan sanitasi untuk mencapai universal access melalui Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP), yaitu pembagian 85% penduduk dengan akses layak yang terdiri dari sistem setempat dan terpusat dan 15% akses dasar untuk penduduk di kawasan berkepadatan rendah dan kawasan dengan tingkat resiko sanitasi rendah.

**Tabel IV.16**

Arah Kebijakan dan Program Prioritas RKPD 2019 Dalam Rangka Mendukung Pencapaian SPM 2019 Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	RKPD 2019				
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (outcome)	Target	
1	2	3	4	5	6	7
1	penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin	PROGRAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN	Persentase peningkatan kuantitas dan kualitas rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin	22,51	DINAS PRKP
2	fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi	Peningkatan penyelenggaraan penanggulangan bencana	PROGRAM PERUMAHAN RAKYAT	Persentase rekonstruksi dan rehabilitasi rumah akibat bencana	51%	PRKP

e. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 1) Setiap warga negara yang menjadi korban dan terdampak kebakaran menerima layanan sesuai standar. 2) Setiap warga negara yang menjadi korban dan terdampak kebakaran memerlukan pertolongan. 3) Setiap warga negara yang menjadi korban dan terdampak bencana menerima layanan sesuai standar. 4) Setiap warga negara korban bencana berhak mendapatkan layanan pemenuhan kebutuhan dasar (sandang, pangan dan papan). 5) Setiap warga negara berhak mendapatkan layanan

akibat gangguan trantibum. 6) Setiap warga negara berhak mendapatkan layanan trantibum dalam semua aktivitas.

**Tabel IV.17**

Arah Kebijakan dan Program Prioritas RKPD 2019 Dalam Rangka Mendukung Pencapaian SPM 2019 Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	RKPD 2019				
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	7
1	pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi	Peningkatan penyelenggaraan penanggulangan bencana	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase korban bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	20	DINSOS
			PROGRAM PENGEMBANGAN DISTRIBUSI, STABILITAS, DAN CADANGAN PANGAN	Persentase Cadangan Pangan	2,7	DINAS PANGAN
			PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase informasi berkaitan dengan penanggulangan bencana yang dapat diakses oleh masyarakat	15%	KOMINFO
			PRORAM Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Persentase Kab/kota yang melaksanakan kewaspadaan dini dan respon	80%	DINKES
			PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Persentase peningkatan kualitas linmas dalam penanganan bencana dan kebakaran	4,24%	SATPOL PP
			PROGRAM KEDARURATAN DAN LOGISTIK PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Daerah Rawan Bencana yang Diintervensi Dalam Penanggulangan Bencana	80	BPBD
			PRORAM Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Persentase penduduk terdampak krisis kesehatan yang mendapat pelayanan kesehatan akibat bencana atau berpotensi bencana dalam satu provinsi	15%	DINKES
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS MEDIS DAN PENUNJANG MEDIS	Persentase korban bencana yang mendapat pelayanan rujukan	100%	RSUP
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	persentase Panjang Talud yang direhabilitasi dan direkonstruksi yang berfungsi dengan baik untuk menahan tanah	25%	PUPR
				Persentase Panjang Sungai /saluran yang dinormalisasi dan befungsi memperlancar aliran air sungai akibat bencana	26,80%	PUPR
			PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Panjang jalan yang	0,86%	PUPR

No	Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	RKPD 2019				
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	7
				direhabilitasi dan direkonstruksi akibat bencana		
				Persentase panjang jembatan yang direhabilitasi dan direkonstruksi akibat bencana	0,12%	PUPR
			PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Daerah Rawan Bencana yang Diintervensi Dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	75	BPBD
			PRORAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	Persentase penduduk pada kondisi kejadian luarbiasa (KLB) yang mendapat pelayanan kesehatan dalam satu Provinsi	100%	DINKES
		Pengembangan Pengelolaan kawasan rawan bencana alam	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	Persentase Panjang Penahan Abrasi Pantai	41,40%	DINAS PUPR
				Panjang sungai yang dinormalisasi pada daerah rawan bencana	40,00%	DINAS PUPR
				panjang penahan tanah akibat erosi	49,00%	DINAS PUPR
			PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN DAS DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Persentase DAS kritis yang di kelola	7	DINAS KEHUTANAAN
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS TATA KELOLA DISHUT	Persentase kegiatan pengelolaan hutan oleh UPTD KPH (%)	100%	DINAS KEHUTANAAN
		Pengembangan Pengelolaan kawasan hilir daerah rawan bencana teluk bayur		Persentase Panjang pengerukan Normalisasi sungai dan kawasan hilir daerah rawan bencana teluk bayur	30%	PUPR
			PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap di kawasan hilir daerah rawan bencana teluk bayur	96%	PUPR
				Persentase panjang jembatan dalam kondisi baik di kawasan hilir daerah rawan bencana teluk bayur	82%	PUPR
			PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	Persentase luas lahan yang bersertifikat untuk kepentingan di kawasan hilir daerah rawan bencana teluk bayur	100%	PUPR

- f. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Sosial (Pemerintah Provinsi) 1) Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dalam panti dan/atau lembaga; setiap penyandang disabilitas berhak mendapatkan rehabilitasi sosial dalam panti dan/atau lembaga sesuai standar. 2) Rehabilitasi sosial anak dalam panti dan/atau lembaga; setiap anak berhak mendapatkan rehabilitasi sosial dalam panti dan/atau lembaga sesuai standar. 3) Rehabilitasi sosial lanjut usia dalam panti dan/atau lembaga; setiap lanjut usia berhak mendapatkan rehabilitasi sosial dalam panti dan/atau lembaga sesuai standar. 4) Rehabilitasi sosial tuna sosial dalam panti dan/atau lembaga; setiap tuna sosial berhak mendapatkan rehabilitasi sosial dalam panti dan/atau lembaga. 5) Pemenuhan kebutuhan dasar dan layanan dukungan psikososial korban bencana pada saat tanggap darurat dan pasca bencana; setiap korban bencana berhak mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar dan layanan dukungan psikososial sesuai standar pada saat tanggap darurat dan pasca bencana.

**Tabel IV.18**

Arah Kebijakan dan Program Prioritas RKPD 2019 Dalam Rangka Mendukung Pencapaian SPM 2019 Bidang Sosial

No	Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial	RKPD 2019				
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	7
1	rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan pada peningkatan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas,	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial	19,01	DINSOS
2	rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti					DINSOS
3	rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti					DINSOS
4	rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti					DINSOS
5	perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIK PANTI SOSIAL	Persentase PMKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial melalui Pelayanan Teknis Panti Sosial	18,28	UPTD PANTI SOSIAL
			PROGRAM PENGUATAN PENYELENGGARAAN PANTI SOSIAL	Persentase PMKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial melalui Penguatan Penyelenggaraan pelayanan Panti Sosial	80,62	UPTD PANTI SOSIAL
			PROGRAM PENINGKATAN PEMBUDAYAAN DAN	Persentase lansia yang aktif yang mengikuti pelayanan olah raga khusus lansia	0,19%	DISKEPORA

No	Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial	RKPD 2019				
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	7
			PENINGKATAN PRESTASI OLAH RAGA			
				Persentase Pelajar Penyandang Disabilitas yang berprestasi di bidang keolahragaan	4,02%	DISKEPORA
				Persentase Sumber Daya Tenaga Keolahragaan yang memiliki standar Nasional	2,67%	DISKEPORA
			PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN KEAGAMAAN	Persentase lansia yang berkompentensi keagamaan	80%	BIRO KESRA
				Prosentase jumlah masyarakat yang kompeten di bidang keagamaan	80	BIRO KESRA
			PROGRAM PENGEMBANGAN PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pesentase lansia potensial yang memiliki kompetensi ketenagakerjaan	0,28	DISNAKER
				Persentase Exs korban Napza yang memiliki kompetensi ketenagakerjaan	10,64	DISNAKER
				Persentase wanita Tunasosial yang memilik kompetensi ketenagakerjaan	8,62	DISNAKER
				Persentase penyandang disabilitas yang memiliki kompetensi ketenagakerjaan	0,78	DISNAKER
		Sistem pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial disusun, ditata, dan dikembangkan untuk memastikan dan memantapkan pemenuhan hak-hak masyarakat akan pelayanan dasar publik.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan perlindungan dan jaminan sosial yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial	22,84	DINSOS
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan pemberdayaan sosial yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial	17	DINSOS
				Persentase PSKS yang mendapatkan pelayanan pemberdayaan sosial yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial	15,63	DINSOS
		Menekan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak	PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Menurunkan Rasio Perempuan Korban Kekerasan per 100.000 penduduk usia 18 Tahun keatas di tingkat daerah provinsi	37,97	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB

No	Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial	RKPD 2019				
		Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	7
				Menurunkan Rasio Anak yang memerlukan perlindungan khusus per 100.000 anak usia 0-18 Tahun tingkat daerah Provinsi	0,43	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Perempuan korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial	20,67	DINAS SOSIAL
			PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase informasi berkaitan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dapat di akses oleh masyarakat	25%	DISKOMINFO
		Menjamin hak anak dalam pembangunan	PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Persentase Kab/Kota Layak Anak	42,85	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase anak yang mendapatkan hak dalam pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial	18,99	DINAS SOSIAL
		Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan pada peningkatan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas,	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial	19,01	DINSOS
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PANTI SOSIAL	Persentase PMKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial melalui Pelayanan Teknis Panti Sosial	18,28	UPTD PANTI SOSIAL
			PROGRAM PENGUATAN PENYELENGGARAAN PANTI SOSIAL	Persentase PMKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial melalui Penguatan Penyelenggaraan pelayanan Panti Sosial	80,62	UPTD PANTI SOSIAL
		Menjamin hak anak dalam pembangunan	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase anak yang mendapatkan hak dalam pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial	18,99	DINAS SOSIAL
		Meningkatkan Pengendalian Penyalahgunaan Napza	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase korban napza	21,28	DINAS SOSIAL



#### 4.2.5. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Pengentasan Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Pengentasan Kemiskinan merupakan upaya untuk mengubah suatu keadaan atau kondosi masyarakat yang standar hidupnya sangat rendah pada kondisi yang lebih baik dalam arti ekonomi, sosial budaya dan politik. Upaya pengentasan kemiskinan mencakup banyak bidang, seperti tren kemiskinan, bantuan sosial, jaminan sosial, program berbasis masyarakat, serta penciptaan lapangan kerja yang lebih banyak dan lebih baik. Untuk itu Pengentasan kemiskinan menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang perlu diselaraskan dengan arah kebijakan, program dan kegiatan. Seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel IV.19**

Arah Kebijakan, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas RKPD 2019 Dalam Rangka Mendukung Arah Kebijakan Pengentasan Kemiskinan RKP 2019

NO.	Arah Kebijakan Pengentasan Kemiskinan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	7
		Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin	PROGRAM PENANGANAN FARKIR MISKIN	Persentase PMKS yang mendapatkan Bantuan Beras Sejahtera	19,64	DINSOS
			PROGRAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN	Persentase peningkatan kuantitas dan kualitas rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin	22,51	DINAS PRKP
			PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH ATAS	Persentase Siswa SMA miskin yang mendapatkan beasiswa miskin	100	DINAS PENDIDIKAN
			PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KEJURUAN	Persentase siswa SMK miskin yang mendapatkan beasiswa miskin	100	DINAS PENDIDIKAN
			PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN	Persentase kepesertaan JKN	92	DINAS KESEHATAN
			PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Masyarakat Miskin yang mendapat bantuan Pangan dan Gizi	72,07%	DINAS KESEHATAN
		Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN	Persentase Kepala Keluarga perempuan miskin yang diberdayakan	9,47	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
			PROGRAM PENANGANAN FARKIR MISKIN	Persentase PMKS (farkir miskin) yang mendapatkan Bantuan Usaha	18,15	DINSOS
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN	Persentase rumah tangga miskin yang bekerja disektor perdagangan	10%	DISPERINDAG

NO.	Arah Kebijakan Pengentasan Kemiskinan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	7
				Persentase Pemantauan dan Pengawasan distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting (18 bahan Pokok)		DISPERINDAG
			PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase informasi berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan yang dapat diakses oleh masyarakat	25%	DISKOMONFO
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I	10,08	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
			PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN, PEMBINAAN HUB. INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL	Pertumbuhan kenaikan upah tenaga kerja		DISNAKER
				persentase penyelesaian kasus tenaga kerja	65%	DISNAKER
				persentase penurunan kecelakaan kerja	0,32	DISNAKER

#### 4.2.6. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Penciptaan Lapangan Pekerjaan

Semakin meningkatnya angka pengangguran menjadi salah satu masalah sosial yang membutuhkan penyelesaian. Sedikinya lapangan pekerjaan yang ada saat ini menjadi alasan utama bertambahnya angka pengangguran. Kondisi ini dapat dikurangi jika kita berusaha menciptakan lapangan pekerjaan. Untuk itu penciptaan lapangan pekerjaan menjadi prioritas pembangunan daerah sehingga perlu penyelarasan arah kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2019. Seperti yang ditampilkan dalam tabel berikut ini :

**Tabel IV.20**

Arah Kebijakan, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas RKPD 2019 Dalam Rangka Mendukung Arah Kebijakan Penciptaan Lapangan Pekerjaan RKP 2019

NO.	Arah Kebijakan Penciptaan Lapangan Pekerjaan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	11
		Penciptaan peluang kesempatan kerja bagi pencari kerja	PROGRAM PENGEMBANGAN PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	17,14	DISNAKER
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA,	Persentase Tenaga Kerja Industri terhadap total	5,17%	DISPERINDAG

NO.	Arah Kebijakan Penciptaan Lapangan Pekerjaan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (outcome)	Target	
1	2	3	4	5	6	11
			FASILITASI DAN AKSES INDUSTRI	tenaga kerja (%)		
			PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA	Persentase pemuda yang bekerja	10,20%	DISKEPORA
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase penduduk yang bekerja di sektor perikanan tangkap	6,82%	DISKEPORA
			PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN BUDIDAYA DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	Persentase penduduk yang bekerja di sektor perikanan budidaya dan Usaha Pengolahan & Pemasaran	1,14%	DKP
			PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase jumlah informasi berkaitan dengan penciptaan lapangan pekerjaan yang diakses oleh pencari kerja	25%	DISKOMINFO
			PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase panjang jalan dan jembatan yang dapat dilewati dengan lancar dikerjakan dengan pendekatan padat karya	94,51%	DINAS PUPR
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	Persentase panjang jaringan irigasi yang dapat dilalui air dengan lancar dilakukan dengan pendekatan padat karya	12%	DINAS PUPR
			PROGRAM PEINGKATAN PEMBERDAYAAN USAHA KECIL	Persentase wirausaha	15%	DINAS KUMKM
			PROGRAM PENGEMBANGAN PENDAYAGUNAAN SDA, TEKNOLOGI TEPAT GUNA DAN PELATIHAN MASYARAKAT	Pertambahan Jumlah Masyarakat Desa yang terlatih dalam Kewirausahaan	100 Orang	DINAS PMD
				Persentase KPM yang aktif	3,24	DINAS PMD
		Peningkatan kualitas hidup dan peran serta perempuan	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN	Persentase perempuan yang bekerja	7,73	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB

#### 4.2.7. Penyeragaman Prioritas Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Revolusi Mental

Pembangunan Revolusi Mental dimaksudkan untuk mengubah cara pandang, pola pikir, sikap dan perilaku yang mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong untuk membangun budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, mandiri, dan sejahtera. Pelaksanaan Revolusi Mental merupakan Kebijakan Nasional yang termuat di dalam sasaran RPJMN 2015-2019 dan bersifat lintas bidang pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang pengukurannya menggunakan indikator yang dikelompokkan ke dalam lima kategori, yaitu: Indonesia Melayani, Indonesia Bersih, Indonesia Tertib, Indonesia Mandiri, dan Indonesia Bersatu (sesuai Inpres nomor 12 tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental). Untuk itu Pembangunan Revolusi Mental menjadi prioritas pembangunan daerah sehingga perlu penyeragaman arah kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2019. Seperti yang ditampilkan dalam tabel berikut ini :

**Tabel IV.21**

Arah Kebijakan, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas RKPD 2019 Dalam Rangka Mendukung Arah Kebijakan Pembangunan Revolusi Mental RKP 2019

NO.	Arah Kebijakan Revolusi Mental	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	7
		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan memberikan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi bagi masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA PENDAPATAN PAJAK DAERAH	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Publik Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah	B	BAKUDA
			PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN TATA LAKSANA PEMERINTAH DAERAH	Persentase instansi pelayanan publik Provinsi yang bersertifikat ISO	3 Unit	BIRO ORGANISASI
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan PTSP	N.A	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			PROGRAM PENINGKATAN FUNGSI PELAYANAN PENDIDIKAN WILAYAH PANGKALPINANG DAN BANGKA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pendidikan SMA, SMK, SLB di wilayah Pangkalpinang dan Bangka	79.29%	DINAS PENDIDIKAN
			PROGRAM PENINGKATAN FUNGSI PELAYANAN PENDIDIKAN WILAYAH BANGKA BARAT	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pendidikan SMA, SMK, SLB di wilayah Bangka Barat	79.29%	DINAS PENDIDIKAN
			PROGRAM PENINGKATAN FUNGSI PELAYANAN PENDIDIKAN WILAYAH	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pendidikan	79.29%	DINAS PENDIDIKAN

NO.	Arah Kebijakan Revolusi Mental	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	7
			BANGKA TENGAH DAN BANGKA SELATAN	SMA, SMK, SLB di wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan		
			PROGRAM PENINGKATAN FUNGSI PELAYANAN PENDIDIKAN WILAYAH BELITUNG DAN BELITUNG TIMUR	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pendidikan SMA, SMK, SLB di wilayah Belitung dan Belitung Timur	79.29%	DINAS PENDIDIKAN
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU PLUT KUMKM	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pusat Layanan Usaha Terpadu PLUT KUMKM	92%	DINAS KUMKM
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS MEDIS DAN PENUNJANG MEDIS	Nilai Tingkat kelulusan Akreditasi RSUP yang memenuhi standar akreditasi	Persiapan Akreditasi Paripurna (50%)	RSUP
			PELAYANAN TEKNIS KEPERAWATAN JIWA DAN NAPZA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pelayanan Teknis Medik Kejiwaan	85	RSJ
			PROGRAM PELAYANAN TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN	Nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan labkes	N.A	UPTD DINKES
		Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih serta pelayanan publik yang efektif dan efisien	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA INFORMASI LAYANAN PENGADAAN	Nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap pengembangan data informasi layanan pengadaan	80	BIRO LAYANAN PENGADAAN
			PROGRAM PENINGKATAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengadaan Barang dan Jasa	80	BIRO LAYANAN PENGADAAN
			PROGRAM PENINGKATAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK	Nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengadaan secara elektronik	80	BIRO LAYANAN PENGADAAN
			PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	Presentase jumlah administrasi kewilayahan yang terselesaikan	9 bidang tanah	BIRO PEMERINTAHAN
				Persentase luas Bidang Tanah Pemerintah Provinsi Yang bersertifikat	1	BIRO PEMERINTAHAN
				Persentase jumlah kasus sengketa batas wilayah administrasi yang diselesaikan	100.00%	BIRO PEMERINTAHAN
			PROGRAM PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH	Presentase jumlah kebijakan penyelenggaraan otonomi daerah yang diimplementasikan	N.A	BIRO PEMERINTAHAN
			PROGRAM PENGEMBANGAN KERJA SAMA PEMERINTAH DAERAH	Persentase jumlah kerjasama pemerintah daerah/swasta/luar negeri yang diimplementasikan	75	BIRO PEMERINTAHAN

NO.	Arah Kebijakan Revolusi Mental	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	7
			PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEARSIPAN	Persentase kelembagaan kearsipan yang melaksanakan tertib arsip	20	DKPus
			PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN ARSIP	Pertambahan jumlah arsip yang dikelola sesuai standar (Dinamis dan Statis)	350	DKPus
				Pertambahan jumlah koleksi bahan pustaka ;	350	DKPus
				Pertambahan pengunjung perpustakaan	11,500	DKPus
			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN PUSTAKA DAN LAYANAN PERPUSTAKAAN	Pertambahan jumlah koleksi buku perpustakaan ;	160	DKPus
			PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN TIK, STATISTIK DAN PERSANDIAN	Persentase masyarakat yang memanfaatkan layanan interaktif	30%	DISKOMINFO
			Meningkatkan sistem informasi pemerintah daerah yang aman	Urusan Komunikasi dan Informatika	40.00%	DISKOMINFO
			Meningkatkan rekomendasi Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	25.00%	DINAS PUPR
			Meningkatkan peningkatan pemberdayaan teknologi informasi dan komunikasi untuk birokrasi	Urusan Komunikasi dan Informatika	40.00%	KOMINFO
			PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	persentase Informasi dan berita terkait sektoral yang dipublikasikan	20.00%	KOMINFO
			PROGRAM PENGADMINISTRASIAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	Persentase Jumlah data base kependudukan tingkat provnsi yang akurat	100	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
		Peningkatan kompetensi dan profesional aparatur	PROGRAM PENGADAAN PEGAWAI, MUTASI, PROMOSI, DAN KEPANGKATAN	Persentase Pemenuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan dan formasi	87.00%	BKPSDM
				Persentase pegawai ASN Naik Pangkat dan Pensiun Tepat Waktu	92.00%	BKPSDM
				Persentase pegawai ASN yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi	74.00%	BKPSDM
			PROGRAM PENILAIAN KINERJA, DISIPLIN, INFORMASI DAN KESEJAHTERAAN ASN	Persentase ASN yang menerima penghargaan	2.19%	BKPSDM
				Persentase kasus pelanggaran disiplin minimal sedang	0.15%	BKPSDM
				Persentase ASN yang SKP nya dinilai tepat waktu	65.00%	BKPSDM

NO.	Arah Kebijakan Revolusi Mental	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	7
				Persentase akurasi data dan informasi kepegawaian	84.00%	BKPSDM
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ASN	Persentase Pegawai ASN yang meningkat kompetensi teknis dan fungsional	42.00%	BKPSDM
				Persentase Pegawai ASN yang meningkat pendidikan formalnya;	39.90%	BKPSDM
				Persentase Pegawai ASN yang memenuhi kompetensi dasar dan manajerial	96.00%	BKPSDM
				Nilai akreditasi Diklat	8100.00%	BKPSDM
			PROGRAM PENILAIAN DAN PEMETAAN KOMPETENSI ASN	Persentase Pegawai ASN yang mempunyai Profil Kompetensi sesuai dengan standar penilaian	30.67%	BKPSDM
		Peningkatan Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur	PROGRAM PENINGKATAN PUBLIKASI, PENGUMPULAN DAN PENYARINGAN INFORMASI	Persentase kesesuaian antar informasi yang dikelola dengan arah kebijakan pembangunan pemerintah daerah	100	BIRO HUMAS
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEHUMASAN, DOKUMENTASI, PUBLIKASI MEDIA DAN IT	Persentase kesesuaian antar informasi yang dipublikasikan dengan arah kebijakan pembangunan pemerintah daerah	100	BIRO HUMAS
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PROTOKOLER	Persentase kesesuaian antar agenda kepala daerah yang layani dengan arah kebijakan pembangunan daerah	100	BIRO HUMAS
			PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI, INFORMASI DAN PELAYANAN SERTA HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA	Persentase kesesuaian antara Promosi dan Informasi dengan arah kebijakan pembangunan daerah	100%	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
				Persentase kesesuaian antar agenda kepala daerah di Jakarta yang layani dengan arah kebijakan pembangunan daerah	100%	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
				Persentase kesesuaian antara Peningkatan Hubungan Antar Lembaga dengan arah kebijakan pembangunan daerah	100%	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KERUMAHTANGGAAN, KEHUMASAN DAN PROTOKOLER DEWAN	Persentase kesesuaian antar informasi yang dipublikasikan dan layanan keprotokoler dewan dengan arah kebijakan pembangunan pemerintah daerah	95.00%	SETWAN
				Persentase jumlah sarana prasarana lembaga DPRD	76.00%	SETWAN
		Peningkatan Penataan peraturan	PROGRAM PENINGKATAN	Persentase Produk hukum daerah yang	85%	BIRO HUKUM

NO.	Arah Kebijakan Revolusi Mental	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	7
		perundang-undangan	PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	tidak tumpang tindih		
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN HUKUM PEMERINTAH DAERAH	Persentase jumlah masyarakat yang mendapat Pelayanan bantuan Hukum	85%	BIRO HUKUM
			PROGRAM PENGEMBANGAN DOKUMENTASI HUKUM DAN INFORMASI HUKUM	Persentase produk hukum daerah yang dapat di akses oleh masyarakat	85%	BIRO HUKUM
			PROGRAM PENGEMBANGAN RISALAH RAPAT DAN KAJIAN PRODUK HUKUM PERUNDANG-UNDANGAN	Presentase peningkatan fungsi legislasi lembaga DPRD dan alat kelengkapan lainnya	80	SETWAN
		Peningkatan pemberian kesempatan Kebebasan sipil kepada masyarakat	PROGRAM BINA IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN	Jumlah kasus penistaan terhadap simbol negara	N.A	KESBANGPOL
				Jumlah kasus Konflik Sara Yang Dapat Diantisipasi	2	KESBANGPOL
			PROGRAM PENGUATAN KEWASPADAAN NASIONAL	Tingkat Kerawanan Konflik Kabupaten/kota	9	KESBANGPOL
			PROGRAM KETAHANAN EKONOMI, SENI, BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas/LSM dan OKP yang ikut serta dalam kegiatan Pembangunan	35	KESBANGPOL
				Persentase Jumlah sanggar/paguyuban yang melestarikan seni budaya dalam mendukung ketahanan budaya	40	KESBANGPOL
		Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan perda serta perlindungan masyarakat (Linmas)	PROGRAM PENINGKATAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT	Prosentase jumlah pelanggaran Tibumtranmas yang ditindak sesuai dengan aturan	100%	SATPOL PP
			PROGRAM PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Persentase jumlah linmas yang berkompeten dalam penyelenggaraan kantrantibmas	6.05%	SATPOL PP
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERSONIL SATPOL PP	Prosentase jumlah personil Satpol PP yang melaksanakan penyelenggaraan kantrantibmas	16.23%	SATPOL PP
			PROGRAM PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA	Cakupan penegakan perda	100%	SATPOL PP



#### 4.2.8. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Pengarusutamaan Gender (PUG)

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan suatu strategi yang digunakan untuk mencapaip tujuan pembangunan nasional terkait keadilan dan kesetaraan gender. PUG dilaksanakan dengan mengintegrasikan perspektif gender menjadi bagian integral dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan. Secara umum kesetaraan gender di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung semakin membaik atau kesenjangan pencapaian pembangunan manusia berbasis gender semakin mengecil. Hal ini ditunjukkan oleh meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IPG) dari 88,37 pada tahun 2015 menjadi 88,90 pada tahun 2016 dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) meningkat dari 56,12 pada tahun 2014 menjadi 56,29 pada tahun 2015. Untuk itu Pembangunan Pengarusutamaan Gender (PUG) menjadi prioritas pembangunan daerah sehingga perlu penyesuaian arah kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2019. Seperti yang ditampilkan dalam tabel berikut ini :

**Tabel IV.22**

Arah Kebijakan, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas RKPD 2019 Dalam Rangka Mendukung Arah Kebijakan Pembangunan Pengarusutamaan Gender RKP 2019

NO.	Arah Kebijakan Pengarusutamaan Gender	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (outcome)	Target	
1	2	3	4	5	6	7
	Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan	Peningkatan kualitas hidup dan peran serta perempuan	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN	Persentase perempuan yang bekerja	7.73	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
		Peningkatan kesesuaian antar dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) dalam APBD	3.55	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
	Meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk TPPO	Menekan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak	PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Menurunkan Rasio Perempuan Korban Kekerasan per 100.000 penduduk usia 18 Tahun keatas di tingkat daerah provinsi	37.97	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
				Menurunkan Rasio Anak yang memerlukan perlindungan khusus per 100.000 anak usia 0-18 Tahun tingkat daerah Provinsi	0.43	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
		Menjamin hak anak dalam pembangunan	PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Persentase Kab/Kota Layak Anak	42,85	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB

NO.	Arah Kebijakan Pengarusutamaan Gender	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	7
			PROGRAM PENGADMINISTRASIAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPI	Persentase anak yang memiliki akte kelahiran dalam mendukung hak anak untuk mendapat hak identitas	N.A	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
		Peningkatan pelayanan terhadap Hak-hak politik masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN	Persentase jumlah perempuan yang berkompetensi dilembaga politik	27.77	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
				Persentase Jumlah organisasi dan lembaga masyarakat yang berbasis gender	30%	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB

#### 4.2.9. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Perubahan Iklim

Perubahan iklim merupakan fenomena global yang dipicu oleh kegiatan manusia terutama yang berkaitan dengan penggunaan bahan bakar fosil dan pembakaran hutan, yang berakibat menumpuknya gas-gas seperti koarbon dioksida (CO<sub>2</sub>), Metana (CH<sub>4</sub>) dan nitro Oksida (N<sub>2</sub>O) pada atmosfer. Hal ini menyebabkan suhu permukaan bumi semakin panas atau lebih dikenal dengan istilah Gas Rumah Kaca. Untuk menurunkan efek dari gas rumah kaca, pemerintah provinsi focus pada penurunan gas rumah kaca dengan arah kebijakan Peningkatan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Program dan kegiatan yang diarahkan untuk menurunkan efek gas rumah kaca dapat dilihat pada table di bawah ini.

**Tabel IV.23**

Arah Kebijakan, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas RKPD 2019 Dalam Rangka Mendukung Arah Kebijakan Perubahan Iklim RKP 2019

No.	Arah Kebijakan Pembangunan Perubahan Iklim	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	7
1	Mengintegrasikan upaya penurunan emisi GRK ke dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah	Peningkatan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP	Persentase jumlah kebijakan berkaitan pengelolaan lingkungan berkelanjutan yang diimplementasikan	100%	DLH
			PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN DAN PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP	persentase perusahaan yang mengimplementasikan kajian lingkungan hidup	18%	DLH

No.	Arah Kebijakan Pembangunan Perubahan Iklim	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	7
			PROGRAM PENINGKATAN PENGOLAHAN SAMPAH, PEMELIHARAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP	Pertumbuhan volume pengolahan sampah yang ramah lingkungan	0%	DLH
			PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN DAS DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	persentase penanganan tindak pidana kehutanan		DINAS KEHUTANAA N
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN	Persentase Parameter Kualitas Lingkungan yang terakreditasi	100%	UPTB LABORATORI UM LINGKUNGA N
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM	Persentase lahan kritis di arel IUP yang di reklamasi,	13%	DINAS ESDM
				Nilai jaminan reklamasi	10 Miliar	DINAS ESDM
				Persentase luas lahan yang tidak terganggu di areal ULP	43%	DINAS ESDM
			PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN GEOLOGI DAN AIR TANAH	Persentase cadangan air tanah yang potensial yang dapat dimanfaatkan	40,91%	DINAS ESDM
				Persentase pemenuhan Air Tanah dilokasi yang rawan air		DINAS ESDM
				Jumlah obyek geologi yang diusulkan menjadi kawasan cagar alam geologi	10 Obyek	DINAS ESDM
		Pengembangan TPA Regional	PROGRAM PENINGKATAN PELAYAN TEKNIS TATA KELOLA DISHUT	Jumlah Kawasan Hutan yang dikelola		DINAS KEHUTANAA N
			PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN DARAT	Prosentase Penurunan Emisi dari Sektor Transportasi	0,70%	DISHUB
			PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN, OPRASIONAL DAN KEBANDARUDARAAN	Prosentase Angkutan Umum bandara udara yang layak jalan	20,00%	DISHUB
2	Menurunkan emisi GRK dan intensitas emisi melalui bidang-bidang utama dalam Pembangunan Rendah Karbon		PROGRAM PENINGKATAN PENGOLAHAN SAMPAH, PEMELIHARAAN DAN PENINGKATAN	Pertumbuhan volume pengolahan sampah yang ramah lingkungan pada TPA Regional	-	DLH

No.	Arah Kebijakan Pembangunan Perubahan Iklim	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	7
			KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP			
			PROGRAM KECIPTA KARYAAN DAN PERMUKIMAN	Persentase drainase dalam kondisi baik/aliran air tidak tersumbat di KPengembangan TPA Regional		PRKP
				Persentase jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik di Pengembangan TPA Regional		PRKP
			PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap di TPA Regional	0%	PUPR
				Persentase panjang jembatan dalam kondisi baik di TPA Regional	0%	PUPR
			PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	Persentase luas lahan yang bersertifikat untuk kepentingan di TPA Regional		PUPR
			PROGRAM PENGEMBANGAN SDA	Persentase penyediaan volume air baku untuk pengembangan TPA Regional	5%	PUPR
				Panjang saluran / sungai yang dinormalisasi pada kawasan kumuh	5%	PUPR

#### 4.2.10. Penyeragaman Prioritas Pembangunan Daerah dengan Tata Kelola Pemerintahan yang baik

**Tabel IV.24**

Arah Kebijakan, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas RKPD 2019 Dalam Rangka Mendukung Arah Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan yang baik RKP 2019

No.	Arah Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan kualitas pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan memberikan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi	PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA PENDAPATAN PAJAK DAERAH	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Publik Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah	B	BAKUDA

No.	Arah Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	7
		bagi masyarakat				
			PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN TATA LAKSANA PEMERINTAH DAERAH	Persentase instansi pelayanan publik Provinsi yang bersertifikat ISO	3 Unit	BIRO ORGANISASI
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan PTSP	N.A	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			PROGRAM PENINGKATAN FUNGSI PELAYANAN PENDIDIKAN WILAYAH PANGKALPINANG DAN BANGKA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pendidikan SMA, SMK, SLB di wilayah Pangkalpinang dan Bangka	79,29%	DINAS PENDIDIKAN
			PROGRAM PENINGKATAN FUNGSI PELAYANAN PENDIDIKAN WILAYAH BANGKA BARAT	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pendidikan SMA, SMK, SLB di wilayah Bangka Barat	79,29%	DINAS PENDIDIKAN
			PROGRAM PENINGKATAN FUNGSI PELAYANAN PENDIDIKAN WILAYAH BANGKA TENGAH DAN BANGKA SELATAN	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pendidikan SMA, SMK, SLB di wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan	79,29%	DINAS PENDIDIKAN
			PROGRAM PENINGKATAN FUNGSI PELAYANAN PENDIDIKAN WILAYAH BELITUNG DAN BELITUNG TIMUR	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pendidikan SMA, SMK, SLB di wilayah Belitung dan Belitung Timur	79,29%	DINAS PENDIDIKAN
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU PLUT KUMKM	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pusat Layanan Usaha Terpadu PLUT KUMKM	92%	DINAS KUMKM
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS MEDIS DAN PENUNJANG MEDIS	Nilai Tingkat kelulusan Akreditasi RSUP yang memenuhi standar akreditasi	Persiapan Akreditasi Paripurna (50%)	RSUP

No.	Arah Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	7
			PELAYANAN TEKNIS KEPERAWATAN JIWA DAN NAPZA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pelayanan Teknis Medik Kejiwaan	85	RSJ
			PROGRAM PELAYANAN TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN	Nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan labkes	N.A	UPTD DINKES
2	Meningkatkan kapasitas birokrasi	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih serta pelayanan publik yang efektif dan efisien	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA INFORMASI LAYANAN PENGADAAN	Nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap pengembangan data informasi layanan pengadaan	80	BIRO LAYANAN PENGADAAN
			PROGRAM PENINGKATAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengadaan Barang dan Jasa	80	BIRO LAYANAN PENGADAAN
			PROGRAM PENINGKATAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK	Nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengadaan secara elektronik	80	BIRO LAYANAN PENGADAAN
			PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	Presentase jumlah administrasi kewilayahan yang terselesaikan	9 bidang tanah	BIRO PEMERINTAHAN
				Persentase luas Bidang Tanah Pemerintah Provinsi Yang bersertifikat	1	BIRO PEMERINTAHAN
				Persentase jumlah kasus sengketa batas wilayah administrasi yang diselesaikan	100,00%	BIRO PEMERINTAHAN
			PROGRAM PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH	Presentase jumlah kebijakan penyelenggaraan otonomi daerah yang diimplementasikan	N.A	BIRO PEMERINTAHAN
			PROGRAM PENGEMBANGAN KERJA SAMA PEMERINTAH DAERAH	Persentase jumlah kerjasama pemerintah daerah/swasta/luar negeri yang diimplementasikan	75	BIRO PEMERINTAHAN
			PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEARSIPAN	Persentase kelembagaan kearsipan yang melaksanakan tertib arsip	20	DKPus
			PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN DAN	Pertambahan jumlah arsip yang dikelola sesuai standar	350	DKPus

No.	Arah Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (outcome)	Target	
1	2	3	4	5	6	7
			PELESTARIAN ARSIP	(Dinamis dan Statis)		
				Pertambahan jumlah koleksi bahan pustaka ;	350	DKPus
				Pertambahan pengunjung perpustakaan	11.500	DKPus
			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN PUSTAKA DAN LAYANAN PERPUSTAKAAN	Pertambahan jumlah koleksi buku perpustakaan ;	160	DKPus
			PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN TIK, STATISTIK DAN PERSANDIAN	Persentase masyarakat yang memanfaatkan layanan interaktif	30%	DISKOMINFO
			Meningkatkan sistem informasi pemerintah daerah yang aman	Urusan Komunikasi dan Informatika	40,00%	DISKOMINFO
			Meningkatkan rekomendasi Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	25,00%	DINAS PUPR
			Meningkatkan peningkatan pemberdayaan teknologi informasi dan komunikasi untuk birokrasi	Urusan Komunikasi dan Informatika	40,00%	KOMINFO
			PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	persentase Informasi dan berita terkait sektoral yang dipublikasikan	20,00%	KOMINFO
			PROGRAM PENGADMINISTRASIAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	Persentase Jumlah data base kependudukan tingkat provinsi yang akurat	100	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB

#### 4.2.11. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas serta meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan mengedepankan pemanfaatan sumber daya yang efisien dan lingkungan hidup yang lestari. Fokus pembangunan berkelanjutan yang akan dicapai diukur melalui pencapaian sasaran meningkatnya pengendalian lingkungan hidup dengan indikator Indeks kualitas air sungai, Indeks kualitas udara dan indeks tutupan lahan dengan arah kebijakan (1) Pengendalian kualitas air, (2) Pengendalian kualitas udara dan (3) Peningkatan tutupan lahan.

**Tabel IV.25**

Arah Kebijakan, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas RKPD 2019 Dalam Rangka  
Mendukung Arah Kebijakan Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan  
RKP 2019

No.	Arah Kebijakan Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	7
1	Menjaga kualitas lingkungan hidup dan pelestarian Sumber Daya Alam	Pengendalian kualitas air sungai	PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN DAN PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase BOD, COD dan TSS	2%	DLH
			PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SDA DAN EKOSISTEM	Persentase Kawasan ekosistem essensial (%)	100%	DINAS KEHUTANA AN
		pengendalian kualitas udara	PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN DAN PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penurunan Konsentrasi SO2 dan NO2 yang melebihi Nilai Ambang Batas	2%	DLH
			PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SDA DAN EKOSISTEM	Persentase penurunan Kawasan Hutan yang terbakar	100%	DINAS KEHUTANA AN
		Peningkatan tutupan lahan	PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SDA DAN EKOSISTEM	Persentase luas kawasan hutan yang bervegetasi (%)	1%	DINAS KEHUTANA AN
		Pengembangan Perhutanan Sosial	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN DAS DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Persentase luas kawasan Perhutanan Sosial (%)	2%	DINAS KEHUTANA AN
			PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA HUTAN	Persentase hasil hutan bukan kayu yang dikembangkan	20%	DINAS KEHUTANA AN

#### 4.2.12. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Pemerataan Antar Kelompok Pendapatan

Arah Kebijakan dalam pemerataan antar kelompok pendapatan pada tahun 2019 adalah sesuai dengan yang tercantum dalam RPJMD 2017-2022 yaitu (1) Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, (2) Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin untuk sasaran menurunnya angka Kemiskinan. Sedangkan untuk sasaran menurunnya angka pengangguran diintervensi melalui arah kebijakan (1) Penciptaan peluang kesempatan kerja bagi pencari kerja, (2) Peningkatan kualitas hidup dan peran serta perempuan. Untuk keselarasan arah kebijakan pemerintah daerah dengan arah kebijakan pemerintah pusat dapat dilihat pada tabel berikut ini.



**Tabel IV.26**

Arah Kebijakan, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas RKPD 2019 Dalam Rangka Mendukung Arah Kebijakan Pemerataan Antar Kelompok Pendapatan RKP 2019

No.	Arah Kebijakan Pemerataan antar Kelompok pendapatan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	7
		Penciptaan peluang kesempatan kerja bagi pencari kerja	PROGRAM PENGEMBANGAN PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	17,14	DISNAKER
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA, FASILITASI DAN AKSES INDUSTRI	Persentase Tenaga Kerja Industri terhadap total tenaga kerja (%)	5,17%	DISPERINDAG
			PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA	Persentase pemuda yang bekerja	10,20%	DISKEPORA
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase penduduk yang bekerja di sektor perikanan tangkap	6,82%	DKP
			PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN BUDIDAYA DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	Persentase penduduk yang bekerja di sektor perikanan budidaya dan Usaha Pengolahan & Pemasaran	1,14%	DKP
			PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase jumlah informasi berkaitan dengan penciptaan lapangan pekerjaan yang diakses oleh pencari kerja	25%	DISKOMINFO
			PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase panjang jalan dan jembatan yang dapat dilewati dengan lancar dikerjakan dengan pendekatan padat karya	94,51%	DINAS PUPR
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	Persentase panjang jaringan irigasi yang dapat dilalui air dengan lancar dilakukan dengan pendekatan padat karya	12%	DINAS PUPR
			PROGRAM PEINGKATAN PEMBERDAYAAN USAHA KECIL	Persentase wirausaha	15%	DINAS KUMKM
			PROGRAM PENGEMBANGAN PENDAYAGUNAAN SDA, TEKNOLOGI TEPAT GUNA DAN PELATIHAN MASYARAKAT	Pertambahan Jumlah Masyarakat Desa yang terlatih dalam Kewirausahaan	100 Orang	DINAS PMD

No.	Arah Kebijakan Pemerataan antar Kelompok pendapatan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	7
				Persentase KPM yang aktif	3,24	DINAS PMD
		Peningkatan kualitas hidup dan peran serta perempuan	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN	Persentase perempuan yang bekerja	7,73	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
		Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin	PROGRAM PENANGANAN FARKIR MISKIN	Persentase PMKS yang mendapatkan Bantuan Beras Sejahtera	19,64	DINSOS
			PROGRAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN	Persentase peningkatan kuantitas dan kualitas rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin	22,51	DINAS PRKP
			PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH ATAS	Persentase Siswa SMA miskin yang mendapatkan beasiswa miskin	100	DINAS PENDIDIKAN
			PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KEJURUAN	Persentase siswa SMK miskin yang mendapatkan beasiswa miskin	100	DINAS PENDIDIKAN
			PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN	Persentase kepesertaan JKN	92	DINAS KESEHATAN
			PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Masyarakat Miskin yang mendapat bantuan Pangan dan Gizi	72,07%	DINAS KESEHATAN
			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN	Persentase Kepala Keluarga perempuan miskin yang diberdayakan	9,47	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
		Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin	PROGRAM PENANGANAN FARKIR MISKIN	Persentase PMKS (farkir miskin) yang mendapatkan Bantuan Usaha	18,15	DINSOS
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN	Persentase rumah tangga miskin yang bekerja disektor perdagangan	10%	DISPERINDAG
				Persentase Pemantauan dan Pengawasan distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting (18 bahan Pokok)	12,50%	DISPERINDAG
			PROGRAM PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	NTP subsektor Tanaman Pangan	95,08	DINAS PERTANIAN

No.	Arah Kebijakan Pemerataan antar Kelompok pendapatan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	7
			PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase informasi berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan yang dapat diakses oleh masyarakat	25%	DISKOMINFO
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I	10,08	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
			PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN, PEMBINAAN HUB. INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL	Pertumbuhan kenaikan upah tenaga kerja		DISNAKER
				persentase penyelesaian kasus tenaga kerja	65%	DISNAKER
				persentase penurunan kecelakaan kerja	0,32	DISNAKER

#### 4.2.13. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Ketahanan Energi

Pembangunan Energi di Provinsi kepulauan Bangka Belitung hanya difokuskan pada pengembangan Energi Baru terbarukan (EBT) sesuai dengan kewenangan Provinsi sedangkan untuk energi Primer (Minyak dan Gas) menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, sehingga agak sulit bagi provinsi untuk mengembangkan ketahanan energi di wilayahnya. Untuk pengembangan EBT permasalahan yang dihadapi adalah masih sulit dan mahalnya teknologi yang akan digunakan seperti energi hydro (angin) sedangkan energi geotermal atau panas bumi terkendala kecilnya potensi yang di miliki Provinsi Bangka Belitung, untuk energi nuklir (thorium) masih dalam kajian sehingga untuk EBT hanya dapat menggunakan tenaga Surya dengan jumlah penggunaan yang masih terbatas. Namun untuk mendukung kebijakan Pemerintah Pusat tahun 2019 terkait Ketahanan Energi Pemerintah Provinsi menentukan arah kebijakan dan program yang mendukung ketahanan energi seperti yang ditampilkan dalam tabel berikut ini :

**Tabel IV.27**

Arah Kebijakan, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas RKPD 2019 Dalam Rangka Mendukung Arah Kebijakan Ketahanan Energi RKP 2019

No.	Arah Kebijakan Ketahanan Energi	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	7
	Meningkatkan peranan energi baru terbarukan dalam bauran energi	Pemenuhan Energi listrik untuk mendorong pengembangan industri berbasis potensi daerah serta peningkatan rasio elektrifikasi;	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ENERGI	Persentase penggunaan EBT	6,83%	ESDM
				Persentase perusahaan yang Pendistribusian Minyak dan Gas sesuai standar	60%	ESDM
				Persentase perusahaan di bidang ketenagalistrikan yang sesuai standar yang diinginkan	60%	ESDM
			PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI KEBIJAKAN SUMBER DAYA ALAM	Prosentase Jumlah Kebijakan Sumber daya energi yang diimplementasikan	80%	BIRO EKONOMI

#### 4.2.14. Penyeragaman Prioritas Pembangunan Daerah dengan Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan rumah tangga (RT) yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau sesuai dengan Undang-Undang (UU) No.7 Tahun 1996 tentang pangan, Pasal 1 Ayat 17. Fokus Ketahanan pangan dan kemandirian pangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah (1) Peningkatan Produktivitas tanaman pangan seperti Padi dan tanaman hortikultura sebagai salah satu tujuan untuk mengurangi ketergantungan bahan kebutuhan pokok dari luar, (2) Menjaga angka inflasi yang stabil pada kisaran 4% - 5 % melalui distribusi bahan pangan yang terjaga terutama Beras. Untuk itu arah kebijakan dan ketahanan pangan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel IV.28**

Arah Kebijakan, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas RKPD 2019 Dalam Rangka Mendukung Arah Kebijakan Ketahanan Pangan RKP 2019

No.	Arah Kebijakan Ketahanan Pangan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	7
	Meningkatkan layanan pertanian antara lain melalui penyediaan sarpras, pembiayaan, penyuluhan dan pendampingan	Penyusunan kebijakan dan implementasi perlindungan lahan pertanian berkelanjutan	PROGRAM PENGEMBANGAN PRASARANA, SARANA PERTANIAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN	Pertambahan Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan yang di implementasikan	2	DINAS PERTANIAN

No.	Arah Kebijakan Ketahanan Pangan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	7
		Peningkatan sarana dan prasarana dan nilai tambah serta produksi pertanian, perkebunan, perternakan dan Kehutanan	PROGRAM PENGEMBANGAN PRASARANA, SARANA PERTANIAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase ketersediaan sarana prasarana pertanian	15	DINAS PERTANIAN
				Persentase Pertambahan Kelompok tani yang melakukan pemberdayaan disektor pertanian	10	DINAS PERTANIAN
				Persentase Kelembagaan pertanian aktif	10	DINAS PERTANIAN
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI MUTU BENIH	Persentase Pertambahan Jumlah benih lada yang bersertifikat dan berlabel	655.000	UPTD PENGAWAS DAN SERTIFIKASI MUTU BENIH PERTANIAN
				Persentase Pertambahan Jumlah benih karet yang bersertifikat dan berlabel,	655.000	UPTD PENGAWAS DAN SERTIFIKASI MUTU BENIH PERTANIAN
				Pertambahan Jumlah benih padi yang bersertifikat dan berlabel	150	UPTD PENGAWAS DAN SERTIFIKASI MUTU BENIH PERTANIAN
				Pertambahan Jumlah benih hortikultura yang bersertifikat dan berlabel,	1.500	UPTD PENGAWAS DAN SERTIFIKASI MUTU BENIH PERTANIAN
				Persentase varietas unggul lokal yang didaftarkan menjadi unggul Nasional	2	UPTD PENGAWAS DAN SERTIFIKASI MUTU BENIH PERTANIAN
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PROTEKSI TANAMAN	Persentase penurunan areal tanam yang terserang OPT	5	UPTD BALAI PROTEKSI TANAMAN PERTANIAN
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PENGEMBANGAN BENIH PERTANIAN	Pertambahan Ketersediaan bibit lada	50.000	UPTD BALAI BENIH PERTANIAN
				Pertambahan Ketersediaan bibit karet	40.000	UPTD BALAI BENIH PERTANIAN

No.	Arah Kebijakan Ketahanan Pangan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	7
				Pertambahan Ketersediaan benih sumber padi	4	UPTD BALAI BENIH PERTANIAN
				Pertambahan Ketersediaan bibit ayam	6.000	UPTD BALAI BENIH PERTANIAN
				Pertambahan Ketersediaan anakan sapi	20	UPTD BALAI BENIH PERTANIAN
				Pertambahan Ketersediaan kandang ternak, gudang pakan, gedung pertemuan dan sarana prasarana	1	UPTD BALAI BENIH PERTANIAN
			PROGRAM PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	Persentase peningkatan produksi dan produktifitas komoditi strategis tanaman pangan padi	43.135,00	DINAS PERTANIAN
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERKEBUNAN	Peningkatan produksi lada	43.577	DINAS PERTANIAN
				Peningkatan produksi karet	60.173	DINAS PERTANIAN
			PROGRAM PENGEMBANGAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	Pertambahan Jumlah populasi ternak besar sapi	14.399	DINAS PERTANIAN
				Pertambahan Jumlah populasi ternak ayam	12.678.800	DINAS PERTANIAN
			PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA HUTAN	Persentase izin usaha hasil hutan kayu (%)	20%	DINAS KEHUTANAAN
				Persentase hasil hutan bukan kayu yang dikembangkan (%)	20%	DINAS KEHUTANAAN
			PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP	Tersedianya Dokumen KLHS Pengembangan Balai Benih Pertanian Terpadu yang digunakan dalam perencanaan kawasan	1 Dok	DLH
			PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase informasi berkaitan dengan peningkatan produksi pertanian yang dapat diakses masyarakat	25%	KOMINFO
	Memperkuat distribusi dan stabilisasi harga pangan dalam rangka meningkatkan akses pangan masyarakat	Pengendalian Tingkat harga-harga komoditas penyumbang inflasi	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN KEMETROLOGIAN	Persentase jumlah Barang Beredar, Jasa dan Tertib Niaga yang diawasi sesuai standar (112 barang SNI wajib; 140 pelaku usaha Tertib Niaga)	14	DISPERINDAG
				Indeks Keberdayaan Konsumen (0 - 20 = Tahu; 21 - 40 = Paham)	22	DISPERINDAG

No.	Arah Kebijakan Ketahanan Pangan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	7
				Persentase jumlah Standarisasi Lab. Kemetrolagian yang memenuhi standar	20	DISPERINDAG
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN	Persentase Pertumbuhan jumlah volume ekspor (ton)	862.000	DISPERINDAG
				Persentase jumlah barang kebutuhan pokok dan barang penting (18 bahan pokok) yang tersedia setiap waktu	83	DISPERINDAG
				Persentase peningkatan sarana dan prasarana perdagangan yang dibangun dan dimanfaatkan	63	DISPERINDAG
				Persentase Pertumbuhan nilai omzet yang memanfaatkan resi gudang	20	DISPERINDAG
				Pertumbuhan komoditi yang terjual melalui Pasar Lelang	1	DISPERINDAG
				Persentase peningkatan promosi produk dalam negeri	10	DISPERINDAG
			PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI KEBIJAKAN PEREKONOMIAN	Persentase rekomendasi komoditas penyumbang inflasi yang paling tinggi dengan intervensi program/kebijakan	100%	BIRO EKONOMI
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN LAUT	Prosentase infrastruktur perhubungan laut dalam kondisi baik terhadap kondisi optimal	20%	DINAS PERHUBUNGAN
			PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Panjang jalan dan jembatan yang dapat dilewati dengan lancar yang menuju pusat-pusat distribusi komoditas penyumbang inflasi	94,51%	DINAS PUPR
		Mengurangi ketergantungan pasokan dari luar terhadap komoditas penyumbang inflasi	PROGRAM PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	Pertambahan jumlah volume produksi komoditas cabai besar	2.813,28	DINAS PERTANIAN
				Pertambahan jumlah volume produksi komoditas cabai rawit	2.651,13	DINAS PERTANIAN
				Pertambahan jumlah volume produksi komoditas bawang merah	98,11	DINAS PERTANIAN

No.	Arah Kebijakan Ketahanan Pangan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	7
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase kontribusi komoditas ikan dalam menyumbang inflasi	22,22	DINAS KELAUTAN PERIKANAN
			PROGRAM PENGEMBANGAN DISTRIBUSI, STABILITAS, DAN CADANGAN PANGAN	Koefisien varian harga pangan strategis di tingkat produsen dan konsumen	CV Beras ≤ 5%	DINAS PANGAN
					CV Cabe ≤ 35%	DINAS PANGAN
					CV Daging Ayam 10%	DINAS PANGAN

#### 4.2.15. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Pengembangan Dunia usaha dan Pariwisata

Pengembangan Pariwisata merupakan salah satu prioritas pembangunan daerah dengan fokus peningkatan sarana dan prasarana penunjang pada objek wisata dan peningkatan sumber daya manusia atau tenaga kerja pada sektor pariwisata. Selama lima tahun terakhir jumlah kunjungan wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri berfluktuatif dimana pada tahun 2013 jumlah kunjungan wisatawan sebesar 238.405 orang meningkat menjadi 369.422 pada tahun 2017. Disamping kunjungan wisatawan, jumlah hotel berbintang dan non berbintang juga meningkat, tahun 2016 jumlah hotel berbintang sebanyak 135 buah meningkat menjadi 166 tahun 2017.

**Tabel IV.29**

Arah Kebijakan, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas RKPD 2019 Dalam Rangka Mendukung Arah Kebijakan Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata RKP 2019

No.	Arah Kebijakan Pengembangan Dunia usaha dan pariwisata	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	7
	Meningkatkan nilai tambah jasa produktif antara lain melalui pengembangan destinasi wisata, ekonomi kreatif dan digital, peningkatan ekspor terutama produk hilirisasi, dan penguatan kemitraan	Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, ekonomi kreatif, peran serta masyarakat dan kelembagaan pariwisata	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA, EKONOMI KREATIF DAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN	Persentase sumber daya pariwisata yang terlatih dan tersertifikasi	7,20%	BUDPAR
				Presentase pelaku ekonomi kreatif yang terlatih	8,00%	BUDPAR
				Pertumbuhan kelembagaan pariwisata	11	BUDPAR



No.	Arah Kebijakan Pengembangan Dunia usaha dan pariwisata	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	7
			PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI	Pertumbuhan kelembagaan koperasi aktif pendukung pariwisata	2,70%	KUMKM
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LATIHAN PERKOPERASIAN, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	Persentase SDM Koperasi sektor pariwisata terlatih	2,06%	KUMKM
				persentase SDM Usaha Kecil sektor pariwisata terlatih	0,25%	KUMKM
			PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN USAHA KECIL	persentase Usaha Kecil sektor pariwisata yang menggunakan Aplikasi Mobile Platform (Lalaper)		KUMKM
				persentase Usaha Kecil sektor pariwisata yang mendapatkan Izin Usaha	1	KUMKM
				persentase Usaha Kecil sektor pariwisata yang mendapatkan Diseminasi dan pendampingan akses permodalan	0	KUMKM
			PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KEJURUAN	Persentase SMK pariwisata Terkreditasi A	100	DINAS PENDIDIKAN
		Peningkatan infrastruktur, sarana dan prasarana pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata.	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	Presentase objek wisata yang terkelola	12%	BUDPAR
			PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	Persentase tingkat kunjungan wisatawan	6	BUDPAR
			PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN LAUT	Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasana Perhubungan Laut di lokasi wisata	20%	DISHUB

No.	Arah Kebijakan Pengembangan Dunia usaha dan pariwisata	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	7
			PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN DARAT	Persentase pemenuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan darat dalam menunjang Daerah Tujuan Wisata	20%	DISHUB
			PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di daerah pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata.	94,51%	DINAS PUPR
				Persentase Jembatan Provinsi dalam kondisi baik di daerah pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata.	86,00%	DINAS PUPR
			PROGRAM PENINGKATAN PUSAT PELAYANAN USAHA TERPADU KUKM	Pertumbuhan produk parekraf	10%	DINAS KUMKM
			PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase informasi berkaitan dengan pemasaran pariwisata yang dapat diakses masyarakat	25%	DISKOMINFO
	Mendorong percepatan peningkatan keahlian tenaga kerja melalui penguatan vokasi dan kompetensi, pengembangan kerja sama dunia usaha dan kewirausahaan	Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing kepariwisataan daerah	PROGRAM PENGEMBANGAN PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase peningkatan tenaga kerja pariwisata bersertifikat kompetensi	17,54	DISNAKER
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LATIHAN KERJA INDUSTRI	Persentase pencari kerja pariwisata yang mendapat pelatihan	0,15	UPD BLKI
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase peningkatan produksi per tenaga kerja bidang pariwisata	0,05	UPTD BALAI PRODUKTIVITAS
			PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KEJURUAN	Persentase Jumlah SMK Program Keahlian Pariwisata yang mengeluarkan sertifikat Profesi pihak 1 (LSP-P1)	33,33	DINDIK

No.	Arah Kebijakan Pengembangan Dunia usaha dan pariwisata	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	7
			PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI	persentase peningkatan volume usaha koperasi disektor pariwisata	1%	KUMKM
		Peningkatan kualitas, partisipasi dan prestasi pemuda di berbagai bidang pembangunan, dan peningkatan pengelolaan ke olah raga serta mengembangkan peran serta kebudayaan dalam mendukung pembangunan kepariwisataan	PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Pemuda Lintas Negara	6,67%	DISKEPORA
			PROGRAM PENINGKATAN PEMBUDAYAAN DAN PENINGKATAN PRESTASI OLAH RAGA	Pertumbuhan Jumlah peserta yang mengikuti babel sport tourism	4,00%	DISKEPORA
			PROGRAM PENGEMBANGAN STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Presentase jumlah sarana dan prasaran olahraga yang terbangun dalam mendukung event olahraga regional dan nasional	16,67%	DISKEPORA
			PROGRAM PELESTARIAN BUDAYA	Persentase budaya lokal yang dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan dan dibina	14,87%	BUDPAR
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, INDUSTRI DAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN	Rasio Penyelenggaraan event penunjang kepariwisataan dengan priode waktu satu tahun	13,5	BUDPAR
		Pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja disektor pariwisata	PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN, PEMBINAAN HUB. INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL	persentase Jumlah perusahaan dibidang pariwisata yang diperiksa dan dibina sesuai standar pemeriksaan perusahaan	1,6	DISNAKER
		Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUMKM dalam meningkatkan daya saing kepariwisataan	PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN USAHA KECIL	Peningkatan produk Usaha kecil sektor pariwisata yang tersertifikasi	250	DINAS KUMKM

No.	Arah Kebijakan Pengembangan Dunia usaha dan pariwisata	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	7
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBERDAYA, FASILITASI DAN AKSES INDUSTRI	Persentase Tenaga Kerja yang terserap di industri pariwisata	0,31%	DISPERINDA G
			PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH DAN PENGAWASAN INDUSTRI	Persentase industri yang memenuhi standar	2	DISPERINDA G
		Pengembangan pariwisata daerah, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antar sektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di bidang pariwisata.	PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI BUMD, PENANAMAN MODAL, PARIWISATA DAN BUDAYA	Prosentase Jumlah Kebijakan BUMD, Penanaman Modal, Pariwisata dan Budaya yang di implementasikan	72	BIRO EKONOMI
			PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Pertambahan Jumlah Profil Investasi Pariwisata yang digunakan untuk promosi investasi di sektor pariwisata	-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
				Pertambahan Jumlah UKM pariwisata yang bermitra dengan investor	1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI PENANAMAN MODAL	Pertambahan Jumlah Investor Pariwisata	3	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DAN SISTEM INFORMASI	Presentase perusahaan yang sesuai realisasi investasi disektor pariwisata dengan rencana investasi	0,44%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

#### 4.2.16. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Pengembangan Infrastruktur, Konektivitas dan kemaritiman

Sesuai dengan Misi ketiga RPJMD 2017-2022 yaitu Mewujudkan infrastruktur dan konektivitas daerah maka pada tahun 2019 arah kebijakan pembangunan Infrastruktur masih focus pada (1) Penyediaan sarana dan prasarana pada pelayanan dasar, (2) Penyediaan Infrastruktur pada sector unggulan seperti Pembangunan dan Pemeliharaan jalan dan jembatan menuju kawasan wisata serta meningkatkan sarana penunjang penggunaan internet ke daerah terpencil (3) Penyediaan sarana irigasi dan air baku untuk peningkatan produktivitas pertanian. Untuk itu Pembangunan Infrastruktur, Konektivitas dan kemaritiman menjadi prioritas pembangunan daerah sehingga perlu penyelarasan arah kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2019. Seperti yang ditampilkan dalam tabel berikut ini :

**Tabel IV.30**

Arah Kebijakan, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas RKPD 2019 Dalam Rangka Mendukung Arah Kebijakan Pengembangan Infrastruktur, Konektivitas dan kemaritiman RKP 2019

No.	Arah Kebijakan Infrastruktur, Konektivitas dan Kemaritiman	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan Konektivitas	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan jaringan irigasi serta cetak sawah pertanian yang modern	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	Persentase luas jaringan irigasi yang berfungsi	55%	DINAS PUPR
			PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	Persentase kesesuaian lokasi cetak sawah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP)	50	DINAS PUPR
		Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur air baku	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	Pertumbuhan volume air baku	10%	DINAS PUPR
		Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur dasar yang layak bagi masyarakat	PROGRAM KECIPTAKARYAAN DAN PERMUKIMAN	Persentase peningkatan aksesibilitas Kawasan permukiman	33%	DINAS PRKP
				Persentase peningkatan aksesibilitas di Kawasan permukiman kumuh Provinsi	26%	DINAS PRKP
		Peningkatan penataan permukiman pada kawasan strategis Provinsi	PROGRAM KECIPTAKARYAAN DAN PERMUKIMAN	Persentase peningkatan kualitas pengelolaan Bangunan Gedung Dan Lingkungan	25%	DINAS PRKP
		Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan	PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN	Persentase dana pendamping desa yang terlayani jaringan	66%	KOMINFO

No.	Arah Kebijakan Infrastruktur, Konektivitas dan Kemaritiman	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	7
		infrastruktur jaringan telekomunikasi bagi masyarakat	PEMERINTAH BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI	Internet		
		Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan pelabuhan serta sarana prasarana pendukung pelabuhan	PROGRAM PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN LAUT	Persentase Jumlah pulau yang memiliki pelabuhan/dermaga yang layak	-	DINAS PERHUBUNGAN
		Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan terminal serta sarana prasarana pendukung terminal	PROGRAM PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN DARAT	Persentase desa yang terlayani oleh angkutan perintis lintas kabupaten dalam provinsi	20%	DINAS PERHUBUNGAN
			PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN, OPRASIONAL DAN KEBANDARUDARAAN	Persentase sarana dan prasarana fasilitas bandara kewenangan provinsi yang tersedia dan beroperasi	30%	DISHUB
		Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan jalan dan jembatan	PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase jalan provinsi diluar kawasan Strategis Provinsi dan Prioritas Propinsi dalam kondisi mantap		DINAS PUPR
				Persentase Jembatan Provinsi diluar kawasan Strategis Provinsi dan Prioritas Propinsi dalam kondisi mantap		DINAS PUPR

#### 4.2.17. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Wilayah

Pembangunan kewilayahan difokuskan pada pengembangan kawasan strategis yang telah ditentukan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2014-2034 dan diperkuat pada RPJMD tahun 2017-2022 dengan membagi kawasan strategis ke dalam misi-misi kepala daerah. Untuk fokus tahun 2019 adalah pengembangan kawasan strategis sektor Pertanian, Bahari, Pariwisata dan Industri.

**Tabel IV.31**

Arah Kebijakan, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas RKPD 2019 Dalam Rangka Mendukung Arah Kebijakan Pembangunan wilayah RKP 2019

No.	Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come )	Target	
1	2	3	4	5	6	7
		Pengembangan Kawasan Strategis KTM Batu Betumpang	PROGRAM PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	Tersedianya Kawasan budiaya komoditas padi di KTM Batu Betumpang	1	DINAS PERTANIAN
				Tersedianya Kawasan	1	DINAS

No.	Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come )	Target	
1	2	3	4	5	6	7
				budiya komoditas cabai di KTM Batu Betumpang		PERTANIAN
				Tersedianya Kawasan budiaya bawang merah di KTM Batu Betumpang	1	DINAS PERTANIAN
				Tingkat produktifitas petani dikawasan KTM Batu Betumpang	1	DINAS PERTANIAN
			PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di Kawasan Strategis KTM Batu Betumpang	95,50%	DINAS PUPR
				Persentase Jembatan Provinsi dalam kondisi baik di Kawasan Strategis KTM Batu Betumpang	89,00%	DINAS PUPR
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	Persentase penyediaan volume air baku di Kawasan Strategis KTM Batu Betumpang	0	DINAS PUPR
				Persentase penyediaan volume air baku di Kawasan Strategis KTM Batu Betumpang	0	DINAS PUPR
			PROGRAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Tingkat kesejahteraan petani masyarakat transmigrasi di kawasan KTM Batu Betumpang		DISNAKER
		Pengembangan Kawasan Strategis Kota Terpadu Mandiri Gantung	PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	Persentase Tersedianya Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan StrategisProvinsi (KSP) Kota Terpadu Mandiri Gantung	0	DINAS PUPR
				Tersedianya Regulasi Penataan Ruang Untuk kawasan Agropolitan dan Tekno park Pertanian Lada Air Gegas yang di implementasikan	50%	DINAS PUPR
			PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di kawasan Kota terpadu mandiri Gantung	92,95%	DINAS PUPR
				Persentase Jembatan Provinsi dalam kondisi baik di kawasan Kota terpadu mandiri Gantung	85,00%	DINAS PUPR
			PROGRAM PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	Tersedianya Kawasan budidaya komoditas padi di kawasan kota terpadu mandiri Gantung	1	DINAS PERTANIAN
				Tersedianya Kawasan Budidaya komoditas cabai di Kawasan kota Terpadu mandiri Gantung	1	DINAS PERTANIAN
				Tersedianya Kawasan Budidaya bawang merah di	1	DINAS PERTANIAN

No.	Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come )	Target	
1	2	3	4	5	6	7
				Kawasan Kota Terpadu Mandiri Gantung		
				Tingkat produktifitas petani dikawasan KTM Gantung	1	DINAS PERTANIAN
			PROGRAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Tingkat kesejahteraan petani masyarakat transmigrasi di kawasan KTM Gantung	0,36	DISNAKER
		Pengembangan kawasan Agropolitan dan Tekno park Pertanian Lada Air Gegas	PROGRAM PENGEMBANGAN PERKEBUNAN	Tersedianya kawasan Pengembangan budidaya lada	1	DINAS PERTANIAN
			PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	Tersedianya Regulasi Penataan Ruang Untuk kawasan Agropolitan dan Tekno park Pertanian Lada Air Gegas yang di implementasikan	ada	DINAS PUPR
		Pengembangan Kawasan Budidaya Pertanian	PROGRAM PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	Tersedianya Kawasan budidaya komoditas padi	-	DINAS PERTANIAN
				Tersedianya Kawasan budidaya komoditi cabai	-	DINAS PERTANIAN
				Tersedianya Kawasan budidaya bawang merah	-	DINAS PERTANIAN
			PROGRAM PENGEMBANGAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	Tersedianya Kawasan pengembangan ternak sapi	-	DINAS PERTANIAN
			PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP	Tersedianya Dokumen KLHS Agropolitan Berbasis Demonstration Farming Sawah Mekanisasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang digunakan dalam perencanaan kawasan	1 Dokumen	DLH
		Pengembangan Kawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok	PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap dikawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok	19.500	DKP
			PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN BUDIDAYA DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya dikawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok	220	DKP
			PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI	Persentase koperasi aktif di kawasan strategis minapolitan Lepar Pongok	1%	DINAS KUMKM
			PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN USAHA KECIL	persentase Usaha Kecil dikawasan Minapolitan Lepar Pongok yang mendapatkan Izin Usaha	10%	DINAS KUMKM



No.	Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come )	Target	
1	2	3	4	5	6	7
				persentase Usaha Kecil dikawasan Minapolitan Lepar Pongok yang mendapatkan Diseminasi dan pendampingan akses permodalan	1%	DINAS KUMKM
			PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH DAN PENGAWASAN INDUSTRI	Pertumbuhan Jumlah Industri perikanan dikawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok	3	DISPERINDAG
			PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP	Tersedianya Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Minapolitan Lepar Pongok yang digunakan untuk perencanaan kawasan	ada	DLH
			PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN LAUT	Prosentase pemenuhan Sarana dan Prasarana pendukung Perhubungan Laut Kawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok	30%	DISHUB
			PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	Persentase jumlah Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kawasan Minapolitan Lepar Pongok yang di implementasikan	C	DINAS PUPR
			PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di Kawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok	0%	DINAS PUPR
				Persentase Jembatan Provinsi dalam kondisi baik di Kawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok	0%	DINAS PUPR
		Pengembangan Kawasan Strategis etalase Perikanan Selat Nasik	PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN BUDIDAYA DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya dikawasan Strategis etalase perikanan selat nasik	121	DKP
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap dikawasan Strategis Etalase Perikanan Selat Nasik	33.000	DKP
			PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI	Persentase koperasi aktif di kawasan strategis etalase perikanan selat nasik	10	DINAS KUMKM
			PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN USAHA KECIL	persentase Usaha Kecil dikawasan strategis etalase perikanan selat nasik yang mendapatkan Izin Uaha	10%	DINAS KUMKM
				persentase Usaha Kecil dikawasan Sentra Selat	1%	DINAS KUMKM

No.	Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come )	Target	
1	2	3	4	5	6	7
				Nasik yang mendapatkan mendapatkan Diseminasi dan pendampingan akses permodalan		
			PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH DAN PENGAWASAN INDUSTRI	Pertumbuhan Jumlah Industri perikanan dikawasan Strategis Etalase Perikanan Selat Nasik	2	DISPERINDAG
			PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di Kawasan Strategis etalase Perikanan Selat Nasik	0%	DINAS PUPR
				Persentase Jembatan Provinsi dalam kondisi baik di Kawasan Strategis etalase Perikanan Selat Nasik	0%	DINAS PUPR
			PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP	Tersedianya Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Etalase Perikanan Selat Nasik yang digunakan dalam perencanaan kawasan		DLH
			PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN LAUT	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung perhubungan laut kawasan strategis etalase perikanan Selat Nasik	30%	DISHUB
			PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	Persentase Jumlah Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kawasan Etalase Perikanan Selat Nasik yang diimplementasikan	50	DINAS PUPR
		Pengembangan Kawasan Strategis Industri Perikanan Tanjung Binga	PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI	Persentase koperasi aktif di kawasan strategis industri perikanan Tanjung Binga	1%	DINAS KUMKM
			PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN USAHA KECIL	persentase Usaha Kecil dikawasan strategis industri perikanan Tanjung Binga yang mendapatkan Izin Usaha	10%	DINAS KUMKM
				persentase Usaha Kecil dikawasan strategis industri perikanan Tanjung Binga yang mendapatkan Diseminasi dan pendampingan akses permodalan	1%	DINAS KUMKM
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	Pertumbuhan panjang bangunan pemecah gelombang atau penahan abrasi di kawasan Strategis Industri Perikanan Tanjung Binga	5%	DINAS PUPR

No.	Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come )	Target	
1	2	3	4	5	6	7
				Persentase penyediaan volume air baku di kawasan Strategis Industri Perikanan Tanjung Binga	5%	DINAS PUPR
			PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di Kawasan Strategis Industri Perikanan Tanjung Binga	97,85%	DINAS PUPR
				Persentase Jembatan Provinsi dalam kondisi baik di Kawasan Strategis Industri Perikanan Tanjung Binga	95,00%	DINAS PUPR
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap di kawasan Strategis Industri Perikanan Tanjung Binga	10.000	DKP
			PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN LAUT	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung perhubungan laut kawasan strategis Industri Perikanan Tanjung Binga		DISHUB
			PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	Persentase Jumlah Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kawasan Industri Perikanan Tanjung Binga yang diimplementasikan	50	DINAS PUPR
		Pengembangan Kawasan Pedesaan Minapolitan Manggar	PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap di Kawasan Pedesaan Minapolitan Manggar	5.000	DKP
			PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI	Persentase koperasi aktif di Kawasan Pedesaan Minapolitan Manggar		DINAS KUMKM
			PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN LAUT	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung perhubungan laut Kawasan Pedesaan Minapolitan Manggar		DISHUB
		Pengembangan Kawasan pelabuhan penyeberangan Tanjung Kalian	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN LAUT	Persentase pemenuhan sarana prasarana penunjang Pelabuhan Tanjung Kalian		DISHUB
			PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN DARAT	Persentase pemenuhan sarana prasarana perhubungan di Kawasan Strategis Tanjung Kalian		DISHUB
		Pengembangan Kawasan strategis Pelabuhan ASDP Manggar – Ketapang	PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	Persentase jumlah Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Strategis Provinsi (KSP) ASDP Manggar-Ketapang yang diimplementasikan		DINAS PUPR

No.	Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come )	Target	
1	2	3	4	5	6	7
			PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di kawasan strategis ASDP Manggar dan Ketapang	0%	DINAS PUPR
				Persentase Jembatan Provinsi dalam kondisi baik di Kawasan strategis Pelabuhan ASDP Manggar – Ketapang	0%	DINAS PUPR
			PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP	Tersedianya Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi ASDP - Manggar yang digunakan dalam perencanaan Kawasan		DLH
			PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN LAUT	Persentase pemenuhan sarana parasarana penunjang Pelabuhan ASDP Manggar - Ketapang		DISHUB
		Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Tanjung gunung dan kawasan lintas timur Pulau Bangka	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	persentase sarana dan prasarana Pariwisata di kawasan pariwisata Tanjung Gunung yang terbangun dan dikelola	32%	BUDPAR
				Persentase sarana dan prasarana pariwisata di kawasan Lintas Timur Pulau Bangka yang terbangun dan dikelola	32%	BUDPAR
			PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN DARAT	Persentase pemenuhan sarana parasarana penunjang Jalan Kawasan Peruntukan Pariwisata Tanjung gunung dan kawasan lintas timur Pulau Bangka	30%	DISHUB
			PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di kawasan Peruntukan Pariwisata Tanjung gunung dan kawasan lintas timur Pulau Bangka	95,44%	DINAS PUPR
				Persentase Jembatan Provinsi dalam kondisi baik di kawasan Peruntukan Pariwisata Tanjung gunung dan kawasan lintas timur Pulau Bangka	89,00%	DINAS PUPR
			PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	Persentase Jumlah Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Pariwisata Tanjung Gunung dan Lintas Timur Pulau Bangka yang diimplementasikan	75	DINAS PUPR
		Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan ekonomi khusus (KEK) Tanjung	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN DARAT	Persentase pemenuhan sarana parasarana penunjang Jalan di dan menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata	10%	DISHUB

No.	Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come )	Target	
1	2	3	4	5	6	7
		kelayang		Tanjung Kelayang		
			PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan ekonomi khusus (KEK) Tanjung kelayang	0%	PUPR
				Persentase Jembatan Provinsi dalam kondisi baik di kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan ekonomi khusus (KEK) Tanjung kelayang	0%	PUPR
			PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	Persentase Jumlah Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Strategis Nasional (KSN) Pariwisata Tanjung Kelayang yang diimplementasikan	50	PUPR
			PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN DARAT	Persentase pemenuhan sarana parasarana penunjang perhubungan darat di Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang	25%	DISHUB
			PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP	Tersedianya Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Pariwisata Tanjung Kelayang yang digunakan dalam perencanaan kawasan		DLH
		Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan Kota Tua Mentok	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	Persentase sarana dan prasarana pariwisata di kawasan Kota Tua Muntok	32%	BUDPAR
			PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di Kawasan Kota Tua Mentok	0%	PUPR
				Persentase Jembatan Provinsi dalam kondisi baik di Kawasan Kota Tua Mentok	0%	PUPR
			PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	Persentase Jumlah Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kawasan Kota Tua Mentok yang diimplementasikan		PUPR
			PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN DARAT	Persentase pemenuhan sarana parasarana penunjang perhubungan darat di Kawasan Kota Tua Muntok	20%	DISHUB
			PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP	Tersedianya Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Kota Tua Mentok yang digunakan dalam perencanaan kawasan		DLH
		Pengembangan	PROGRAM	Persentase jumlah Regulasi		PUPR

No.	Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come )	Target	
1	2	3	4	5	6	7
		Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan gunung Permisian Simpang Rimba	PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	Penataan Ruang Untuk Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan gunung Permisian Simpang Rimba yang diimplementasikan		
			PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	Persentase sarana dan prasarana pariwisata di Kawasan gunung Permisian Simpang Rimba		BUDPAR
			PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN DARAT	Persentase pemenuhan sarana parasarana penunjang perhubungan darat di kawasan pariwisata gunung Permisian Simpang Rimba	10%	DISHUB
			PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP	Tersedianya Dokumen KLHS di Kawasan pariwisata gunung Permisian Simpang Rimba yang digunakan dalam perencanaan kawasan		DLH
			PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di Kawasan pariwisata gunung Permisian Simpang Rimba		PUPR
				Persentase Jembatan Provinsi dalam kondisi baik di Kawasan pariwisata gunung Permisian Simpang Rimba		PUPR
		Pengembangan Kawasan peruntukan Pariwisata Museum Nasional Maritim Belitung	PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	Persentase Jumlah Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Pariwisata Museum Nasional Maritim Belitung yang diimplementasikan	25%	PUPR
			PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	Persentase sarana dan prasarana pariwisata di Kawasan Pariwisata Museum Nasional Maritim Belitung		BUDPAR
			PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN DARAT	Persentase pemenuhan sarana parasarana penunjang perhubungan darat di Kawasan Pariwisata Museum Nasional Maritim Beltung	15%	DISHUB
			PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP	Tersedianya Dokumen KLHS di Kawasan Pariwisata Museum Nasional Maritim Beltung yang digunakan dalam perencanaan kawasan		DLH
			PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di Kawasan Pariwisata Museum Nasional Maritim Beltung	2%	PUPR
				Persentase Jembatan	2%	PUPR

No.	Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come )	Target	
1	2	3	4	5	6	7
				Provinsi dalam kondisi baik di Kawasan Pariwisata Museum Nasional Maritim Beltung		
		Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Gunung Menumbing	PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	Persentase Tersedianya Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Pariwisata Gunung Menumbing yang di implementasikan		PUPR
			PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	Persentase sarana dan prasarana pariwisata di Kawasan Pariwisata Gunung Menumbing		BUDPAR
			PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN DARAT	Persentase pemenuhan sarana parasarana penunjang perhubungan darat di Kawasan Pariwisata Gunung Menumbing	5%	DISHUB
			PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP	Tersedianya Dokumen KLHS di Kawasan Pariwisata Gunung Menumbing yang digunakan dalam perencanaan kawasan		DLH
			PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di Kawasan Pariwisata Gunung Menumbing		PUPR
				Persentase Jembatan Provinsi dalam kondisi baik di Kawasan Pariwisata Gunung Menumbing		PUPR
		Pengembangan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan pulau sumatera	PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di kawasan konektifitas Pulau Bangka dengan Pulau Sumatera	91,25%	DINAS PUPR
				Persentase Jembatan Provinsi dalam kondisi baik di kawasan konektifitas Pulau Bangka dengan Pulau Sumatera	82,00%	DINAS PUPR
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	Persentase panjang talud yang terbangun di kawasan konektifitas Pulau Bangka dengan Pulau Sumatera	5%	DINAS PUPR
				Persentase volume air baku yang tersedia dapat digunakan di kawasan konektifitas Pulau Bangka dengan Pulau Sumatera	5%	DINAS PUPR
			PROGRAM PENGELOLAAN RUANG LAUT	Persentase Usulan Pemanfaatan Ruang Laut yang terekomendasi sesuai dengan peruntukannya pada kawasan konektifitas Pulau Bangka dengan Pulau Sumatera	65,00%	DKP

No.	Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come )	Target	
1	2	3	4	5	6	7
			PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN LAUT	Presentase sarana dan prasarana perhubungan laut kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Sumatera	-	DISHUB
			PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP	Tersedianya Dokumen KLHS kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Sumatera yang digunakan untuk perencanaan kawasan		DLH
			PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	Persentase tersedianya lahan bersertifikat untuk kepentingan umum di kawasan konektivitas pulau bangka dan pulau sumatera		DINAS PUPR
		Pengembangan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil	PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil	0%	DINAS PUPR
				Persentase Jembatan Provinsi dalam kondisi baik di kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil	0%	DINAS PUPR
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	Persentase panjang talud yang terbangun di kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil	5%	DINAS PUPR
				Persentase volume air baku yang tersedia dapat digunakan di kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil	5%	DINAS PUPR
			PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN LAUT	Persentase pulau-pulau berpenduduk yang terkoneksi kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil	20%	DISHUB
				Jumlah armada pengangkutan	-	DISHUB
		Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular	PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	Persentase Tersedianya Lahan bersertifikat untuk kepentingan di kawasan industri dan pelabuhan terpadu Tanjung Ular	50	DINAS PUPR
				Persentase Jumlah Regulasi Penataan Ruang di kawasan industri dan pelabuhan terpadu Tanjung Ular	0%	DINAS PUPR
			PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi	0%	DINAS PUPR



No.	Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come )	Target	
1	2	3	4	5	6	7
				mantap di kawasan industri dan pelabuhan Tanjung ular		
				Persentase Jembatan Provinsi dalam kondisi baik di kawasan industri dan pelabuhan Tanjung ular	0%	DINAS PUPR
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	Persentase panjang talud yang terbangun di kawasan ndustri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular	5%	DINAS PUPR
			PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH DAN PENGAWASAN INDUSTRI	Pertumbuhan Jumlah Industri di kawasan Industri Terpadu (KIPT) Tanjung Ular	1	DISPERINDAG
			PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN LAUT	Prosentase sarana dan prasana perhubungan laut Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular yang terbangun serta digunakan	5%	DISHUB
		Pengembangan Kawasan Strategis Industri Terpadu Air Kelik (KIAK)	PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di kawasan strategis industri terpadu air kelik	0%	DINAS PUPR
				Persentase Jembatan Provinsi dalam kondisi baik di kawasan strategis industri terpadu air kelik	0%	DINAS PUPR
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	Persentase panjang talud yang terbangun di kawasan strategis industri terpadu air kelik	5%	DINAS PUPR
				Persentase penyediaan volume air baku di kawasan strategis industri terpadu air kelik	5%	DINAS PUPR
			PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP	Tersedianya Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Industri Air Kelik yang digunakan untuk perencanaan kawasan		DLH
			PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN LAUT	Prosentase pemenuhan Sarana dan Prasarana pendukung Perhubungan Laut di Kawasan Strategis Industri Terpadu Air Kelik	0%	DISHUB
			PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	Persentase Jumlah Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kawasan Industri Air Kelik yang diimplementasikan		DINAS PUPR
		Pengembangan Pelabuhan dan Kawasan Strategis	PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di Kawasan	90,78%	DINAS PUPR

No.	Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come )	Target	
1	2	3	4	5	6	7
		Ekonomi Khusus Tanjung Berikat		strategis Ekonomi khusus Tanjung Berikat		
				Persentase Jembatan Provinsi dalam kondisi baik di Kawasan strategis Ekonomi khusus Tanjung Berikat	87,00%	DINAS PUPR
			PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA HUTAN	Presentase luas areal kawasan hutan yang dikelola didi Kawasan strategis Ekonomi khusus Tanjung Berikat		DINAS KEHUTANAAN
			PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP	Tersedianya Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Kawasan Industri dan pelabuhan Terpadu Tanjung Berikat yang digunakan dalam perencanaan kawasan	Ada	DLH
			PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN LAUT	Prosentase pemenuhan Sarana dan Prasarana pendukung Perhubungan Laut di Kawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung Berikat	10%	DISHUB
			PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN DARAT	Prosentase pemenuhan Sarana dan Prasarana pendukung Perhubungan Darat menuju Kawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung Berikat	0%	DISHUB
			PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	Persentase jumlah Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan StrategisProvinsi (KSP)Industri dan pelabuhan Terpadu Tanjung Berikat yang diimplementasikan	100%	DINAS PUPR
				Persentase tersedianya lahan bersertifikat untuk kepentingan umum di kawasan Industri dan pelabuhan tanjung Berikat		DINAS PUPR
		Pengembangan Kawasan Strategis Industri Sadai	PROGRAM KEBINAMARGAAN	Presentase panjang jalan dalam kondisi mantap di kawasan strategis industri sadai	0%	DINAS PUPR
				Presentase panjang jembatan dalam kondisi mantap di kawasan strategis industri sadai	0%	DINAS PUPR
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	Persentase panjang talud yang terbangun di kawasaan Strategis Industri Sadai	5%	DINAS PUPR
				Persentase penyediaan volume air baku di kawasan Strategis Industri Sadai	5%	DINAS PUPR
			PROGRAM PENGEMBANGAN	Prosentase peningkatan sarana dan prasana	0%	DISHUB

No.	Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come )	Target	
1	2	3	4	5	6	7
			DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN LAUT	perhubungan laut Kawasan Strategis Industri Sadai		
		Pengembangan Kawasan Strategis Industri Sadai	PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	Persentase Tersedianya Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Strategis Provinsi (KSP) KIPT Sadai	100%	DINAS PUPR
				Persentase Tersediannya lahan bersertifikat untuk kepentingan umum diKIPT sadai		DINAS PUPR
			PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH DAN PENGAWASAN INDUSTRI	Pertumbuhan Jumlah Industri di kawasan strategis Industri Sadai	1	DISPERINDAG
			PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP	Tersedianya Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi KIPT Sadai yang digunakan untuk perencanaan kawasan	Ada	DLH
		Pengembangan Kawasan strategis Industri Terpadu di Teluk Klabat Belinyu	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN LAUT	Prosentase pemenuhan Sarana dan Prasarana pendukung Perhubungan Laut Kawasan strategis Industri Terpadu di Teluk Klabat Belinyu	0	DISHUB
			PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Panjang jalan provinsi menuju dan dikawasan Strategis Industri Perikanaan Terpadu Teluk Klabat Belinyu dalam kondisi mantap	89,36%	DINAS PUPR
				Persentase Panjang jembatan provinsi menuju dan dikawasan Strategis Industri Perikanaan Terpadu Teluk Klabat Belinyu dalam kondisi mantap		DINAS PUPR
			PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN BUDIDAYA DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	Pertumbuhan Volume Produksi Olahan dikawasan Strategis Industri Perikanaan Terpadu Teluk Klabat (Ton)	120	DKP
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap dikawasan Strategis Industri Perikanaan Terpadu Teluk Klabat	2.750	DKP
			PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN PENAWASAN KOPERASI	Persentase koperasi aktif di kawasan strategis Teluk Kelabat Belinyu	1%	DINAS KUMKM
			PROGRAM PENINGKATAN	persentase Usaha Kecil dikawasan Sentra Teluk	10%	DINAS KUMKM

No.	Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come )	Target	
1	2	3	4	5	6	7
			PEMBERDAYAAN USAHA KECIL	Kelabat Belinyu yang mendapatkan Izin Usaha		
				persentase Usaha Kecil dikawasan Sentra Teluk Kelabat Belinyu yang mendapatkan Diseminasi dan pendampingan akses permodalan	1%	DINAS KUMKM
			PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH DAN PENGAWASAN INDUSTRI	Pertumbuhan Jumlah Industri di kawasan strategis Industri Perikanaan Terpadu di Teluk Klabat Belinyu	1	DISPERINDAG
			PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	Persentase Tersedianya Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan StrategisProvinsi (KSP) Pelabuhan dan Industri Teluk Kelabat	100%	DINAS PUPR
			PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP	Tersedianya Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi pelabuhan dan Industri Teluk Kelabat yang digunakan untuk perencanaan kawasan	Ada	DLH
		Peningkatan Pembangunan Kawasan Industri	PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH DAN PENGAWASAN INDUSTRI	Pertumbuhan Industri/Sentra/Kawasan Industri	2	DISPERINDAG

#### 4.2.18. Penyeragaman Prioritas Pembangunan Daerah dengan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan

**Tabel IV.32**

Arah Kebijakan, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas RKPD 2019 Dalam Rangka Mendukung Arah Kebijakan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan RKP 2019

NO.	Arah Kebijakan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	7
	Meningkatkan Kamtibmas dan keamanan siber	Peningkatan pemberian kesempatan kebebasan sipil kepada masyarakat	PROGRAM BINA IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN	Jumlah kasus penistaan terhadap simbol negara	-	KESBANGPOL
				Jumlah kasus Konflik Sara Yang Dapat Diantisipasi	2	KESBANGPOL
			PROGRAM PENGUATAN KEWASPADAAN NASIONAL	Tingkat Kerawanan Konflik Kabupaten/kota	9	KESBANGPOL

NO.	Arah Kebijakan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	7
			PROGRAM KETAHANAN EKONOMI, SENI, BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas/LSM dan OKP yang ikut serta dalam kegiatan Pembangunan	35	KESBANGPOL
				Persentase Jumlah sanggar/paguyuban yang melestarikan seni budaya dalam mendukung ketahanan budaya	40	KESBANGPOL
		Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan perda serta perlindungan masyarakat (Linmas)	PROGRAM PENINGKATAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT	Prosentase jumlah pelanggaran Tibumtranmas yang ditindak sesuai dengan aturan	100%	SATPOL PP
			PROGRAM PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Persentase jumlah linmas yang berkompeten dalam penyelenggaraan kantrantibmas	6,05%	SATPOL PP
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERSONIL SATPOL PP	Prosentase jumlah personil Satpol PP yang melaksanakan penyelenggaraan kantrantibmas	16,23%	SATPOL PP
			PROGRAM PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA	Cakupan penegakan perda	100%	SATPOL PP
		Peningkatan pelayanan terhadap Hak-hak politik masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN	Persentase jumlah perempuan yang berkompetensi dilembaga politik	27,77	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
				Persentase Jumlah organisasi dan lembaga masyarakat yang berbasis gender	30	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
			PROGRAM PEMBINAAN POLITIK DALAM NEGERI	Pertumbuhan Cakupan Pembinaan Politik Daerah	7	KESBANGPOL
		Peningkatan pemberdayaan Lembaga-Lembaga Demokrasi	PROGRAM PEMBINAAN POLITIK DALAM NEGERI	persentase rekomendasi pengembangan berdemokrasi yg ditindak lanjuti	50	KESBANGPOL

#### 4.2.19. Penyelarasan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Peningkatan Sumber Daya Manusia

**Tabel IV.33**

Arah Kebijakan, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas RKPD 2019 Dalam Rangka Mendukung Arah Kebijakan Peningkatan Sumber Daya Manusia RKP 2019

NO.	Arah Kebijakan Peningkatan Sumber Daya manusia	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	7
	Menyediakan Pendidikan yang berkualitas dan merata	peningkatan akses pelayanan pendidikan	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH ATAS	APK SMA	38,88%	DINAS PENDIDIKAN
			PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KEJURUAN	APK SMK	38,38%	DINAS PENDIDIKAN
			PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KHUSUS	APK SLB	22,95	DINAS PENDIDIKAN
	Menyediakan afirmasi pendidikan	peningkatan mutu layanan pendidikan.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN KUANTITAS DAN KUALITAS GURU SERTA TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru Berkualifikasi S1/D4	97%	DINAS PENDIDIKAN
				Persentase Guru Bersertifikat Pendidik	40%	DINAS PENDIDIKAN
				Persentase guru dengan nilai rata-rata uji kompetensi diatas 50	90%	DINAS PENDIDIKAN
			PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH ATAS	Persentase SMA terakreditasi A	42,42%	DINAS PENDIDIKAN
				Rata-rata nilai UN SMA	6,5	DINAS PENDIDIKAN
			PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KEJURUAN	Persentase SMK terakreditasi A	38,60%	DINAS PENDIDIKAN
				Rata-rata nilai UN SMK	6,5	DINAS PENDIDIKAN

NO.	Arah Kebijakan Peningkatan Sumber Daya manusia	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	7
			PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KHUSUS	Persentase SLB terakreditasi A	100%	DINAS PENDIDIKAN
			PROGRAM PENINGKATAN PEMBUDAYAAN DAN PENINGKATAN PRESTASI OLAH RAGA	Persentase Atlet pelajar Berprestasi yang dibina ditingkat provinsi yang memperoleh medali	5,08%	DISKEPORA
			PROGRAM PENINGKATAN PEMBUDAYAAN DAN PENINGKATAN PRESTASI OLAH RAGA	Persentase Insan Olahraga yang berprestasi	5,08%	DISKEPORA
			PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA	Persentase Pemuda Berprestasi	22,87%	DISKEPORA
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PERPUSTAKAAN	presentase perpustakaan terakreditasi;	18,18	DKPUS
			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN PUSTAKA DAN LAYANAN PERPUSTAKAAN	Pertambahan jumlah koleksi buku perpustakaan sekolah ;		DKPUS
			PROGRAM PENGEMBANGAN STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Presentase jumlah sarana dan prasaran kepemudaan yang terbangun yang difungsikan	16,67%	DISKEPORA
			PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA	Persentase Insan Kepemudaan yang berprestasi dan berdedikasi yang dibantu	6,41%	DISKEPORA
				Persentase Peran Masyarakat Dalam Menjaga Nilai-Nilai Kepemudaan		DISKEPORA
			PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN DARAT	Rasio Jumlah Bus sekolah dengan Jumlah Murid	5%	DINAS PERHUBUNGAN
				Persentase sekolah di ruas jalan Provinsi yang dilengkapi dengan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	4%	DINAS PERHUBUNGAN
			PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase informasi berkaitan dengan pendidikan yang dapat akses oleh masyarakat	25%	DISKOMINFO

NO.	Arah Kebijakan Peningkatan Sumber Daya manusia	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	7
			PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI	Persentase SMA dan SMK yang telah berbasis IT	80%	DISKOMINFO
			PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN, KB, DAN PEMUDA	Persentase jumlah kebijakan pengembangan pendidikan, keluarga berencana, pemuda dan pariwisata yang diimplementasikan	80	BIRO KESRA
			PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN, KB, DAN PEMUDA	Persentase Jumlah Sekolah agama yang dinilai sesuai standar	35 sekolah	BIRO KESRA
			PROGRAM PENGELOLAAN BANTUAAAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) (DAK Non Fisik)	Persentase Sekolah penerima BOS	100%	DINAS PENDIDIKAN
	Meningkatkan Kualitas pembelajaran dan akademik	Peningkatan relevansi pendidikan vokasi dalam mendukung pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAAN PENDIDIKAN KEJURUAAN	Persentase SMK yang memiliki sertifikasi profesi	38,60%	DINAS PENDIDIKAN
			PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KEJURUAN	Persentase SMK Kejuruan yang mendukung pengembangan pekonomi berbasis potensi lokal	100%	DINAS PENDIDIKAN
		Peningkatan Pembangunan kultur masyarakat yang bertaqwa dan bermoral	PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN KEAGAMAAN	APK sekolah keagamaan		BIRO KESRA
	Meningkatkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan	PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase status kesehatan masyarakat	72,07%	DINKES
	Meningkatkan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana		PRORAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	Persentase angka kesakitan penyakit menular dan penyakit tidak menular	77,60%	DINKES
	Mempercepat penurunan stunting		PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN, KB, PEMUDA DAN PARIWISATA	Persentase Sekolah yang mengikuti lomba UKS	35 sekolah	BIRO KESRA



NO.	Arah Kebijakan Peningkatan Sumber Daya manusia	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	7
	Mencegah dan pengendalian penyakit		PROGRAM KECIPTAKARYAAN DAN PERMUKIMAN	Persentase cakupan pelayanan akses air minum di kawasan strategis provinsi	9%	DINAS PRKP
			PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI KEBIJAKAN SOSIAL, KESEHATAN, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Prosentase Jumlah kebijakan sosial, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi yang diimplementasikan	75	BIRO KESRA
			PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase informasi tentang kesehatan masyarakat	25%	KOMINFO
			PROGRAM PENINGKATAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN	Peningkatan Skor PPH konsumsi jadi 92,50	81	DINAS PANGAN
				persentase pangan yang aman dikonsumsi	83	DINAS PANGAN
			PROGRAM KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN	Kenaikan Skor PPH Ketersediaan	81,9	DINAS PANGAN
				Persentase jumlah penduduk rawan pangan yang keluar dari katagori penduduk rawan pangan	1,1	DINAS PANGAN
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA, FASILITASI DAN AKSES INDUSTRI	Persentase kandungan nutrisi industri olahan pangan.	4,68	DISPERINDAG
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS HYGIENIS PERUSAHAAN DAN KESEHATAN KERJA	Persentase perusahaan yang menerapkan norma kesehatan kerja	2,73	UPTD HYPERKES
			PROGRAM PENINGKATAN PEMBUDAYAAN DAN PENINGKATAN PRESTASI OLAH RAGA	Persentase peserta yang mengikuti olahraga rekreasi dan tradisional	0,00%	DISKEPORA
			PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN DARAT	Persentase penurunan korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas		DISHUB
	Meningkatkan Akses dan mutu pelayanan kesehatan	peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN	Persentase standarisasi pelayanan kesehatan	77,12%	DINKES
			PROGRAM PELAYANAN TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN	Jumlah pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan sesuai standar	14	UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN

NO.	Arah Kebijakan Peningkatan Sumber Daya manusia	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	7
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS MEDIS DAN PENUNJANG MEDIS	Presentase Ketersediaan pelayanan di Rumah Sakit	80%	RSUP
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS KEPERAWATAN	LOS (Length of Stay)	6-9 hari	RSUP
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA RUMAH SAKIT UMUM	Persentase sarana dan prasarana yang tersedia di RSUP	80%	RSUP
			PROGRAM BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUP	Persentase dana BLUD RSUP yang digunakan untuk pelayanan langsung kemasyarakat	100%	RSUP
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS KEPERAWATAN JIWA DAN NAPZA	Persentase ketersediaan pelayanan sesuai standar	90	RSJ
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS KEPERAWATAN JIWA DAN NAPZA	Rata-rata Lama Rawat/ Average Length of Stay (ALOS)	95	RSJ
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT JIWA	Persentase sarana dan prasarana yang tersedia di RSJ	95	RSJ
				Persentase peralatan kesehatan dan peralatan lainnya sesuai klasifikasi rumah sakit jiwa kelas A	95	RSJ
			PROGRAM BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSJ	Persentase dana BLUD RSJ yang digunakan untuk pelayanan langsung kemasyarakat	80	RSJ
			PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase informasi berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang dapat diakses masyarakat	25%	DISKOMINFO
		Pemenuhan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KESEHATAN	Persentase kualitas dan kuantitas sumberdaya kesehatan	83,39%	DINKES
			PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KEJURUAN	Persentase jumlah SMK Program Keahlian Kesehatan yang memiliki akreditasi A	100%	DINAS PENDIDIKAN

NO.	Arah Kebijakan Peningkatan Sumber Daya manusia	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	7
				Persentase jumlah SMK Program Keahlian Kesehatan yang mengeluarkan Sertifikasi Profesi pihak 1 (LSP-P1)	0	DINAS PENDIDIKAN

#### 4.2.20. Penyelesaian Prioritas Pembangunan Daerah dengan Pengembangan Sumber daya Air

**Tabel IV.34**

Arah Kebijakan, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas RKPD 2019 Dalam Rangka Mendukung Arah Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Air RKP 2019

NO.	Arah Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Air	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
				Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	6	7
		Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan jaringan irigasi serta cetak sawah pertanian yang modern	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	Persentase luas jaringan irigasi yang berfungsi	55%	DINAS PUPR
			PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	Persentase kesesuaian lokasi cetak sawah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP)	50	DINAS PUPR
		Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur air baku	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	Pertumbuhan volume air baku	10%	DINAS PUPR

#### 4.2.21. Penyelesaian Prioritas Pembangunan Daerah dengan Dokumen RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Dengan memperhatikan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 korelasi prioritas RPJMD dan prioritas pembangunan untuk tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel IV.23

**Tabel IV. 35**

Korelasi Prioritas RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 dengan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2019

Prioritas Tahun 2017-2022 (RPJMD)		Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) 2019	
(1)		(2)	
1	PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN AGROPOLITAN	1	PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN AGROPOLITAN
2	PEMBANGUNAN BAHARI	2	PENGEMBANGAN PARIWISATA
3	PENGEMBANGAN PARIWISATA	3	PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT
4	PENGEMBANGAN TATA KELOLA PERTAMBANGAN	4	PENGEMBANGAN ENERGI DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN
5	PENINGKATAN PENDAPATAAN PEMERINTAH	5	PEMBANGUNAN DEMOKRASI
6	PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT		
7	PENGEMBANGAN ENERGI DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN		
8	PEMBANGUNAN PENDIDIKAN		
9	PEMBANGUNAN KESEHATAN		
10	PENINGKATAN TATA KELOLA BIROKRASI DAN PELAYANAAN PUBLIK		
11	PEMBANGUNAAN BERDEMOKRASI		
12	PENINGKATAN PEMBANGUNAN BIDANG KEBENCANAAN		
13	PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP		

Berdasarkan Tabel IV.23 di atas, prioritas RPJMD2017-2022 dan prioritas RKPD 2019 dapat di uraikan dalam tabel berikut ini:

**Tabel IV.36**

Arah Kebijakan, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas RKPD 2019 Dalam Rangka Mendukung Prioritas RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022

NO	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019			
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target 2019	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
1	PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN AGROPOLITAN	Penyusunan kebijakan dan implementasi perlindungan lahan pertanian berkelanjutan	PROGRAM PENGEMBANGAN PRASARANA, SARANA PERTANIAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN	Pertambahan Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan yang di implementasikan	2	DINAS PERTANIAN
		Peningkatan sarana dan prasarana dan nilai tambah serta produksi pertanian,	PROGRAM PENGEMBANGAN PRASARANA, SARANA PERTANIAN DAN	Persentase ketersediaan sarana prasarana pertanian	15	DINAS PERTANIAN

NO	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019			
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target 2019	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
		perkebunan, peternakan dan Kehutanan	PENYULUHAN PERTANIAN			
				Persentase Pertambahan Kelompok tani yang melakukan pemberdayaan disektor pertanian	10	DINAS PERTANIAN
				Persentase Kelembagaan pertanian aktif	10	DINAS PERTANIAN
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI MUTU BENIH	Persentase Pertambahan Jumlah benih lada yang bersertifikat dan berlabel	655	UPTD PENGAWAS DAN SERTIFIKASI MUTU BENIH PERTANIAN
				Persentase Pertambahan Jumlah benih karet yang bersertifikat dan berlabel,	655	UPTD PENGAWAS DAN SERTIFIKASI MUTU BENIH PERTANIAN
				Pertambahan Jumlah benih padi yang bersertifikat dan berlabel	150	UPTD PENGAWAS DAN SERTIFIKASI MUTU BENIH PERTANIAN
				Pertambahan Jumlah benih hortikultura yang bersertifikat dan berlabel,	1.5	UPTD PENGAWAS DAN SERTIFIKASI MUTU BENIH PERTANIAN
				Persentase varietas unggul lokal yang didaftarkan menjadi unggul Nasional	2	UPTD PENGAWAS DAN SERTIFIKASI MUTU BENIH PERTANIAN
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PROTEKSI TANAMAN	Persentase penurunan areal tanam yang terserang OPT	5	UPTD BALAI PROTEKSI TANAMAN PERTANIAN
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PENGEMBANGAN BENIH PERTANIAN	Pertambahan Ketersediaan bibit lada	50	UPTD BALAI BENIH PERTANIAN
				Pertambahan Ketersediaan bibit karet	40	UPTD BALAI BENIH PERTANIAN
				Pertambahan Ketersediaan benih sumber padi	4	UPTD BALAI BENIH PERTANIAN
				Pertambahan Ketersediaan bibit ayam	6	UPTD BALAI BENIH PERTANIAN
				Pertambahan Ketersediaan anakan sapi	20	UPTD BALAI BENIH PERTANIAN

NO	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019			
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target 2019	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				Pertambahan Ketersediaan kandang ternak, gudang pakan, gedung pertemuan dan sarana prasarana	1	UPTD BALAI BENIH PERTANIAN
			PROGRAM PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	Persentase peningkatan produksi dan produktifitas komoditi strategis tanaman pangan padi	43.135,00	DINAS PERTANIAN
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERKEBUNAN	Peningkatan produksi lada	43.577	DINAS PERTANIAN
				Peningkatan produksi karet	60.173	DINAS PERTANIAN
			PROGRAM PENGEMBANGAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	Pertambahan Jumlah populasi ternak besar sapi	14.399	DINAS PERTANIAN
				Pertambahan Jumlah populasi ternak ayam	12.678.800	DINAS PERTANIAN
			PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA HUTAN	Persentase izin usaha hasil hutan kayu (%)	20%	DINAS KEHUTANAAN
				Persentase hasil hutan bukan kayu yang dikembangkan (%)	20%	DINAS KEHUTANAAN
			PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP	Tersedianya Dokumen KLHS Pengembangan Balai Benih Pertanian Terpadu yang digunakan dalam perencanaan kawasan	1 Dokumen	DLH
			PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase informasi berkaitan dengan peningkatan produksi pertanian yang dapat diakses masyarakat	25%	KOMINFO
		Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing sektor pertanian	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LATIHAN KERJA INDUSTRI	Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan tentang pertanian yang berkompentensi	0,14	UPD BLKI
			PROGRAM PENGEMBANGAN PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase peningkatan tenaga kerja pertanian yang bersertifikasi	18	DISNAKER
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase peningkatan produktifitas tenaga kerja sektor pertanian	0,02	UPTD BALAI PRODUKTIFITAS
			PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN	Persentase Jumlah SMK dengan program keahlian pertanian,	100	DINAS PENDIDIKAN

NO	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019			
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target 2019	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
			PELAYANAN PENDIDIKAN KEJURUAN	perkebunan dan peternakan yang memiliki akreditasi A		
				Persentase SMK Pertanian dan Peternakan yang mengeluarkan Sertifikasi Profesi pihak 1 (LSP-P1)	50	DINAS PENDIDIKAN
			PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI	persentase peningkatan volume usaha koperasi pertanian	3%	DINAS KUMKM
				persentase peningkatan volume usaha koperasi sapi	1%	DINAS KUMKM
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LATIHAN PERKOPERASIAN, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	Persentase SDM Koperasi sektor pertanian terlatih	3,09%	UPTD BALAI LATIHAN PERKOPERASIAN, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
				persentase SDM Usaha Kecil sektor pertanian terlatih	0,34%	UPTD BALAI LATIHAN PERKOPERASIAN, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
		Pembinaan hubungan industri sektor pertanian	PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN, PEMBINAAN HUB. INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase perusahaan pertanian yang diperiksa dan dibina sesuai standar pemeriksaan perusahaan	2	DISNAKER
		Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing sektor pertanian	PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI	Persentase pertumbuhan kelembagaan koperasi aktif sektor pertanian	5%	DINAS KUMKM
				persentase koperasi sektor pertanian berkualitas sesuai standar	2%	DINAS KUMKM
			PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN USAHA KECIL	Persentase produk Usaha kecil sektor pertanian yang tersertifikasi	77%	DINAS KUMKM
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBERDAYA, FASILITASI DAN AKSES INDUSTRI	Presentase Tenaga Kerja Industri pada sektor pertanian	10,28%	DISPERINDAG
			PROGRAM PENINGKATAN	Persentase komoditi unggulan daerah diuji	2	UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN

NO	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019			
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target 2019	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
			PELAYANAN TEKNIS SERTIFIKASI DAN PENGENDALIAN MUTU PRODUK	yang memenuhi standar pengujian		PENGENDALIAN MUTU
		Pengembangan produk pertanian, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi sektor pertanian	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Pertambahan Jumlah profil investasi Sektor Pertanian yang digunakan untuk promosi investasi daerah di sektor pertanian		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI PENANAMAN MODAL	Pertambahan Jumlah investor Sektor Pertanian	3	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DAN SISTEM INFORMASI	Presentase perusahaan sektor pertanian yang sesuai realisasi investasi dengan rencana investasi	0,44%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			PROGRAM PEINGKATAN PEMBERDAYAAN USAHA KECIL	Pertambahan jumlah pelaku usaha kecil sektor pertanian yang menandatangani kesepakatan kemitraan dengan dunia usaha dalam daerah	90	DINAS KUMKM
				persentase pelaku usaha kecil sektor pertanian, perkebunan dan peternakan yang menandatangani kesepakatan kemitraan dengan dunia usaha luar daerah	0	DINAS KUMKM
				persentase Usaha Kecil sektor pertanian, perkebunan dan peternakan yang mendapatkan izin usaha	0	DINAS KUMKM
				persentase Usaha Kecil sektor pertanian, peternakan dan perkebunan yang difasilitasi promosi/	0	DINAS KUMKM



NO	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019			
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target 2019	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				pemasaran produknya melalui even pameran		
				persentase Usaha Kecil sektor pertanian, peternakan dan perkebunan yang difasilitasi promosi/pemasaran produknya melalui web	1	DINAS KUMKM
				persentase Usaha Kecil sektor pertanian, perkebunan dan peternakan yang mendapatkan Diseminasi dan pendampingan akses permodalan	0	DINAS KUMKM
		Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dibidang pertanian	PROGRAM PENGEMBANGAN PENDAYAGUNAAN SDA, TEKNOLOGI TEPAT GUNA DAN PELATIHAN MASYARAKAT	Persentase kelompok masyarakat yang mendayagunakan teknologi tepat guna (TTG) di sektor pertanian	42%	DINAS PMD
			PROGRAM PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	Pertambahan Jumlah kelompok yang menerapkan peningkatan mutu, daya saing, dan nilai tambah hasil tanaman pangan dan hortikultura	40	DINAS PMD
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERKEBUNAN	Pertambahan Jumlah kelompok yang menerapkan peningkatan mutu, daya saing, dan nilai tambah hasil perkebunan	56	DINAS PERTANIAN
			PROGRAM PENGEMBANGAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	Pertambahan Jumlah kelompok yang menerapkan peningkatan mutu, daya saing, dan nilai tambah hasil peternakan	14	DINAS PERTANIAN
		Pengembangan Kawasan Strategis KTM Batu Betumpang	PROGRAM PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	Tersedianya Kawasan budiaya komoditas padi di KTM Batu Betumpang	1	DINAS PERTANIAN
				Tersedianya Kawasan budiya komoditas cabai di KTM Batu Betumpang	1	DINAS PERTANIAN
				Tersedianya Kawasan budiaya bawang merah di KTM Batu Betumpang	1	DINAS PERTANIAN
				Tingkat produktifitas	1	DINAS

NO	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019			
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target 2019	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				petani dikawasan KTM Batu Betumpang		PERTANIAN
			PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di Kawasan Strategis KTM Batu Betumpang	95,50%	DINAS PUPR
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	Persentase penyediaan volume air baku di Kawasan Strategis KTM Batu Betumpang	0	DINAS PUPR
				Persentase penyediaan volume air baku di Kawasan Strategis KTM Batu Betumpang	0	DINAS PUPR
			PROGRAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Tingkat kesejahteraan petani masyarakat transmigrasi di kawasan KTM Batu Betumpang		DISNAKER
		Pengembangan Kawasan Strategis Kota Terpadu Mandiri Gantung	PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	Persentase Tersedianya Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kota Terpadu Mandiri Gantung	0	DINAS PUPR
			PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di kawasan Kota terpadu mandiri Gantung	92,95%	DINAS PUPR
			PROGRAM PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	Tersedianya Kawasan budidaya komoditas padi di kawasan kota terpadu mandiri Gantung	1	DINAS PERTANIAN
				Tersedianya Kawasan Budidaya komoditas cabai di Kawasan kota Terpadu mandiri Gantung	1	DINAS PERTANIAN
				Tersedianya Kawasan Budidaya bawang merah di Kawasan Kota Terpadu Mandiri Gantung	1	DINAS PERTANIAN
				Tingkat produktifitas petani dikawasan KTM Gantung	1	DINAS PERTANIAN
			PROGRAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Tingkat kesejahteraan petani masyarakat transmigrasi di kawasan KTM Gantung	0,36	DISNAKER
		Pengembangan kawasan Agropolitan dan Tekno park	PROGRAM PENGEMBANGAN PERKEBUNAN	Tersedianya kawasan Pengembangan budidaya lada	1	DINAS PERTANIAN

NO	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019			
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target 2019	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
		Pertanian Lada Air Gegas				
			PROGRAM PENGEMBANGAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	Tersedianya Kawasan pengembangan ternak sapi	-	DINAS PERTANIAN
			PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP	Tersedinya Dokumen KLHS Agropolitan Berbasis Demonstration Farming Sawah Mekanisasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang digunakan dalam perencanaan kawasan	1 Dokumen	DLH
2	PENGEMBANGAN PARIWISATA	Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, ekonomi kreatif, peran serta masyarakat dan kelembagaan pariwisata	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA, EKONOMI KREATIF DAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN	Persentase sumber daya pariwisata yang terlatih dan tersertifikasi		BUDPAR
				Persentase pelaku ekonomi kreatif yang terlatih		BUDPAR
		Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, ekonomi kreatif, peran serta masyarakat dan kelembagaan pariwisata		Pertumbuhan kelembagaan pariwisata	11	BUDPAR
		Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, ekonomi kreatif, peran serta masyarakat dan kelembagaan pariwisata	PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI	Pertumbuhan kelembagaan koperasi aktif pendukung pariwisata	2,70%	KUMKM
		Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, ekonomi kreatif, peran serta masyarakat dan kelembagaan pariwisata	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LATIHAN PERKOPERASIAN, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	Persentase SDM Koperasi sektor pariwisata terlatih	2,06%	KUMKM
		Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, ekonomi kreatif, peran serta masyarakat dan kelembagaan pariwisata		persentase SDM Usaha Kecil sektor pariwisata terlatih	0,25%	KUMKM
			PROGRAM	persentase Usaha Kecil	1	KUMKM

NO	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019			
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target 2019	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
			PENINGKATAN PEMBERDAYAAN USAHA KECIL	sektor pariwisata yang mendapatkan Izin Usaha		
				persentase Usaha Kecil sektor pariwisata yang mendapatkan mendapatkan Diseminasi dan pendampingan akses permodalan	0	KUMKM
		Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, ekonomi kreatif, peran serta masyarakat dan kelembagaan pariwisata	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KEJURUAN	Persentase SMK pariwisata Terkreditasi A	100	DINAS PENDIDIKAN
		Peningkatan infrastruktur, sarana dan prasarana pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata.	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	Presentase objek wisata yang terkelola	12%	BUDPAR
			PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	Persentase tingkat kunjungan wisatawan	6	BUDPAR
			PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN LAUT	Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasana Perhubungan Laut di lokasi wisata	30%	DISHUB
			PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN DARAT	Persentase pemenuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan darat dalam menunjang Daerah Tujuan Wisata	20%	DISHUB
			PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di daerah pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata.	94,51%	DINAS PUPR
				Persentase Jembatan Provinsi dalam kondisi baik di daerah pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata.	86,00%	DINAS PUPR
			PROGRAM PENINGKATAN PUSAT PELAYANAN USAHA TERPADU KUKM	Pertumbuhan produk parekraf	10%	DINAS KUMKM
			PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN	Persentase informasi berkaitan dengan pemasaran pariwisata	25%	DISKOMINFO

NO	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019			
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target 2019	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
			KOMUNIKASI PUBLIK	yang dapat diakses masyarakat		
		Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing kepariwisataan daerah	PROGRAM PENGEMBANGAN PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase peningkatan tenaga kerja pariwisata bersertifikat kompetensi	17,54	DISNAKER
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LATIHAN KERJA INDUSTRI	Persentase pencari kerja pariwisata yang mendapat pelatihan	0,15	UPD BLKI
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase peningkatan produksi per tenaga kerja bidang pariwisata	0,05	UPTD BALAI PRODUKTIFITAS
			PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KEJURUAN	Persentase Jumlah SMK Program Keahlian Pariwisata yang mengeluarkan sertifikat Profesi pihak 1 (LSP-P1)	33,33	DINDIK
			PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI	persentase peningkatan volume usaha koperasi disektor pariwisata	1%	KUMKM
		Peningkatan kualitas, partisipasi dan prestasi pemuda di berbagai bidang pembangunan, dan peningkatan pengelolaan ke olah raga serta mengembangkan peran serta kebudayaan dalam mendukung pembangunan kepariwisataan	PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Pemuda Lintas Negara	6,67%	DISKEPORA
			PROGRAM PENINGKATAN PEMBUDAYAAN DAN PENINGKATAN PRESTASI OLAH RAGA	Pertumbuhan Jumlah peserta yang mengikuti babel sport tourism	4,00%	DISKEPORA
			PROGRAM PENGEMBANGAN STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Presentase jumlah sarana dan prasaran olahraga yang terbangun dalam mendukung event olahraga regional dan nasional	16,67%	DISKEPORA
			PROGRAM PELESTARIAN BUDAYA	Persentase budaya lokal yang dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan dan	14,87%	BUDPAR

NO	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019			
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target 2019	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				dibina		
		Pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja disektor pariwisata	PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN, PEMBINAAN HUB. INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL	persentase Jumlah perusahaan dibidang pariwisata yang diperiksa dan dibina sesuai standar pemeriksaan perusahaan	1,6	DISNAKER
		Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing kepariwisataan	PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN USAHA KECIL	Peningkatan produk Usaha kecil sektor pariwisata yang tersertifikasi	250	DINAS KUMKM
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBERDAYA, FASILITASI DAN AKSES INDUSTRI	Persentase Tenaga Kerja yang terserap di industri pariwisata	0,31%	DISPERINDAG
			PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH DAN PENGAWASAN INDUSTRI	Persentase industri yang memenuhi standar		DISPERINDAG
		Pengembangan pariwisata daerah, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antar sektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di bidang pariwisata.	PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI BUMD, PENANAMAN MODAL, PARIWISATA DAN BUDAYA	Prosentase Jumlah Kebijakan BUMD, Penanaman Modal, Pariwisata dan Budaya yang di implementasikan	72	BIRO EKONOMI
			PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Pertambahan Jumlah Profil Investasi Pariwisata yang digunakan untuk promosi investasi di sektor pariwisata		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
				Pertambahan Jumlah UKM pariwisata yang bermitra dengan investor	1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI PENANAMAN MODAL	Pertambahan Jumlah Investor Pariwisata	3	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			PROGRAM	Presentase perusahaan	0,44%	DINAS

NO	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019			
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target 2019	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
			PENINGKATAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DAN SISTEM INFORMASI	yang sesuai realisasi investasi disektor pariwisata dengan rencana investasi		PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Pengembangan Kawasan pelabuhan penyeberangan Tanjung Kalian	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN LAUT	Persentase pemenuhan sarana parasarana penunjang Pelabuhan Tanjung Kalian		DISHUB
			PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN DARAT	Persentase pemenuhan sarana parasarana perhubungan di Kawasan Strategis Tanjung Kalian		DISHUB
		Pengembangan Kawasan strategis Pelabuhan ASDP Manggar – Ketapang	PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	Persentase jumlah Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Strategis Provinsi (KSP) ASDP Manggar-Ketapang yang diimplementasikan		DINAS PUPR
			PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di kawasan strategis ASDP Manggar dan Ketapang	0%	DINAS PUPR
				Persentase Jembatan Provinsi dalam kondisi baik di Kawasan strategis Pelabuhan ASDP Manggar – Ketapang	0%	DINAS PUPR
			PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN LAUT	Persentase pemenuhan sarana parasarana penunjang Pelabuhan ASDP Manggar - Ketapang		DISHUB
		Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Tanjung gunung dan kawasan lintas timur Pulau Bangka	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	persentase sarana dan prasarana Pariwisata di kawasan pariwisata Tanjung Gunung yang terbangun dan terkelola	32%	BUDPAR
				Persentase sarana dan prasarana pariwisata di kawasan Lintas Timur Pulau Bangka yang terbangun dan terkelola	32%	BUDPAR
			PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN DARAT	Persentase pemenuhan sarana parasarana penunjang Jalan Kawasan Peruntukan Pariwisata Tanjung gunung dan kawasan lintas timur Pulau Bangka	30%	DISHUB

NO	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019			
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target 2019	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
			PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di kawasan Peruntukan Pariwisata Tanjung gunung dan kawasan lintas timur Pulau Bangka	95,44%	DINAS PUPR
		Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan ekonomi khusus (KEK) Tanjung kelayang	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN DARAT	Persentase pemenuhan sarana parasarana penunjang Jalan di dan menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Kelayang		DISHUB
			PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan ekonomi khusus (KEK) Tanjung kelayang	0%	PUPR
			PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	Persentase Jumlah Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Strategis Nasional (KSN) Pariwisata Tanjung Kelayang yang diimplementasikan	50	PUPR
			PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN DARAT	Persentase pemenuhan sarana parasarana penunjang perhubungan darat di Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang	25%	DISHUB
		Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan Kota Tua Mentok	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	Persentase sarana dan prasarana pariwisata di kawasan Kota Tua Muntok	32%	BUDPAR
			PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di Kawasan Kota Tua Mentok	0%	PUPR
				Persentase Jembatan Provinsi dalam kondisi baik di Kawasan Kota Tua Mentok	0%	PUPR
			PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN DARAT	Persentase pemenuhan sarana parasarana penunjang perhubungan darat di Kawasan Kota Tua Muntok	20%	DISHUB
		Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan gunung Permisan Simpang Rimba	PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	Persentase jumlah Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan gunung		PUPR



NO	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019			
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target 2019	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				Permisian Simpang Rimba yang diimplementasikan		
			PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN DARAT	Persentase pemenuhan sarana parasarana penunjang perhubungan darat di kawasan pariwisata gunung Permisian Simpang Rimba	20%	DISHUB
			PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di Kawasan pariwisata gunung Permisian Simpang Rimba		PUPR
		Pengembangan Kawasan peruntukan Pariwisata Museum Nasional Maritim Belitung	PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	Persentase Jumlah Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Pariwisata Museum Nasional Maritim Belitung yang diimplementasikan	25%	PUPR
			PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN DARAT	Persentase pemenuhan sarana parasarana penunjang perhubungan darat di Kawasan Pariwisata Museum Nasional Maritim Beltung	25%	DISHUB
			PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di Kawasan Pariwisata Museum Nasional Maritim Beltung	2%	PUPR
		Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Gunung Menumbing	PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	Persentase Tersedianya Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Pariwisata Gunung Menumbing yang di implementasikan		PUPR
			PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	Persentase sarana dan prasarana pariwisata di Kawasan Pariwisata Gunung Menumbing		BUDPAR
			PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN DARAT	Persentase pemenuhan sarana parasarana penunjang perhubungan darat di Kawasan Pariwisata Gunung Menumbing	20%	DISHUB
			PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di Kawasan Pariwisata Gunung Menumbing		PUPR

NO	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019			
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target 2019	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
		Pengembangan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan pulau sumatera	PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Sumatera	91,25%	DINAS PUPR
				Persentase Jembatan Provinsi dalam kondisi baik di kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Sumatera	82,00%	DINAS PUPR
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	Persentase panjang talud yang terbangun di kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Sumatera	5%	DINAS PUPR
				Persentase volume air baku yang tersedia dapat digunakan di kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Sumatera	5%	DINAS PUPR
			PROGRAM PENGELOLAAN RUANG LAUT	Persentase Usulan Pemanfaatan Ruang Laut yang terekomendasi sesuai dengan peruntukannya pada kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Sumatera	65,00%	DKP
			PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN LAUT	Presentase sarana dan prasarana perhubungan laut kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Sumatera		DISHUB
			PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP	Tersedianya Dokumen KLHS kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Sumatera yang digunakan untuk perencanaan kawasan		DLH
		Pengembangan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil	PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil	0%	DINAS PUPR
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	Persentase panjang talud yang terbangun di kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil	5%	DINAS PUPR

NO	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019			
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target 2019	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				Persentase volume air baku yang tersedia dapat digunakan di kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil	5%	DINAS PUPR
			PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN LAUT	Persentase pulau-pulau berpenduduk yang terkoneksi kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil	30%	DISHUB
3	PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT	Penciptaan peluang kesempatan kerja bagi pencari kerja	PROGRAM PENGEMBANGAN PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	17,14	DISNAKER
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA, FASILITASI DAN AKSES INDUSTRI	Persentase Tenaga Kerja Industri terhadap total tenaga kerja (%)	5,17%	DISPERINDAG
			PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA	Persentase pemuda yang bekerja	10,20%	DISKEPORA
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase penduduk yang bekerja di sektor perikanan tangkap	6,82%	DISKEPORA
			PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN BUDIDAYA DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	Persentase penduduk yang bekerja di sektor perikanan budidaya dan Usaha Pengolahan & Pemasaran	1,14%	DKP
			PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase jumlah informasi berkaitan dengan penciptaan lapangan pekerjaan yang diakses oleh pencari kerja	25%	DISKOMINFO
			PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase panjang jalan dan jembatan yang dapat dilewati dengan lancar dikerjakan dengan pendekatan padat karya	94,51%	DINAS PUPR
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	Persentase panjang jaringan irigasi yang dapat dilalui air dengan lancar dilakukan dengan pendekatan padat karya	12%	DINAS PUPR
			PROGRAM	Persentase wirausaha	15%	DINAS KUMKM

NO	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019			
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target 2019	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
			PEINGKATAN PEMBERDAYAAN USAHA KECIL			
			PROGRAM PENGEMBANGAN PENDAYAGUNAAN SDA, TEKNOLOGI TEPAT GUNA DAN PELATIHAN MASYARAKAT	Pertambahan Jumlah Masyarakat Desa yang terlatih dalam Kewirausahaan	100 Orang	DINAS PMD
				Persentase KPM yang aktif	3,24	DINAS PMD
		Peningkatan kualitas hidup dan peran serta perempuan	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN	Persentase perempuan yang bekerja	7,73	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
		Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin	PROGRAM PENANGANAN FARKIR MISKIN	Persentase PMKS yang mendapatkan Bantuan Beras Sejahtera	19,64	DINSOS
			PROGRAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN	Persentase peningkatan kuantitas dan kualitas rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin	22,51	DINAS PRKP
			PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH ATAS	Persentase Siswa SMA miskin yang mendapatkan beasiswa miskin	100	DINAS PENDIDIKAN
			PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KEJURUAN	Persentase siswa SMK miskin yang mendapatkan beasiswa miskin	100	DINAS PENDIDIKAN
			PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN	Persentase kepesertaan JKN	92	DINAS KESEHATAN
			PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Masyarakat Miskin yang mendapat bantuan Pangan dan Gizi	72,07%	DINAS KESEHATAN
		Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN	Persentase Kepala Keluarga perempuan miskin yang diberdayakan	9,47	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
			PROGRAM PENANGANAN FARKIR MISKIN	Persentase PMKS (farkir miskin) yang mendapatkan Bantuan Usaha	18,15	DINSOS
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN	Persentase rumah tangga miskin yang bekerja disektor perdagangan	10%	DISPERINDAG
				Persentase Pemantauan dan		DISPERINDAG

NO	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019			
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target 2019	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				Pengawasan distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting (18 bahan Pokok)		
			PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase informasi berkaitan dengan penanggulangan Kemiskinan yang dapat diakses oleh masyarakat	25%	DISKOMONFO
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I	10,08	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
			PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN, PEMBINAAN HUB. INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL	Pertumbuhan kenaikan upah tenaga kerja		DISNAKER
				persentase penyelesaian kasus tenaga kerja	65%	DISNAKER
				persentase penurunan kecelakaan kerja	0,32	DISNAKER
		Pengendalian Tingkat harga-harga komoditas penyumbang inflasi	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN KEMETROLOGIAN	Persentase jumlah Barang Beredar, Jasa dan Tertib Niaga yang diawasi sesuai standar (112 barang SNI wajib; 140 pelaku usaha Tertib Niaga)	14	DISPERINDAG
				Indeks Keberdayaan Konsumen (0 - 20 = Tahu; 21 - 40 = Paham)	22	DISPERINDAG
				Persentase jumlah Standarisasi Lab. Kemetrollogian yang memenuhi standar	20	DISPERINDAG
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN	Persentase Pertumbuhan jumlah volume ekspor (ton)	862	DISPERINDAG
				Persentase jumlah barang kebutuhan pokok dan barang penting (18 bahan pokok) yang tersedia setiap waktu	83	DISPERINDAG
				Persentase peningkatan sarana dan prasarana perdagangan yang dibangun dan termanfaatkan	63	DISPERINDAG

NO	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019			
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target 2019	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				Persentase Pertumbuhan nilai omzet yang memanfaatkan resi gudang	20	DISPERINDAG
				Pertumbuhan komoditi yang terjual melalui Pasar Lelang	1	DISPERINDAG
			PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI KEBIJAKAN PEREKONOMIAN	Persentase rekomendasi komoditas penyumbang inflasi yang paling tinggi dengan intervensi program/kebijakan	100%	BIRO EKONOMI
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN LAUT	Prosentase infrastruktur perhubungan laut dalam kondisi baik terhadap kondisi optimal	20%	DINAS PERHUBUNGAN
			PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Panjang jalan dan jembatan yang dapat dilewati dengan lancar yang menuju pusat-pusat distribusi komoditas penyumbang inflasi	94,51%	DINAS PUPR
		Mengurangi ketergantungan pasokan dari luar terhadap komoditas penyumbang inflasi	PROGRAM PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	Pertambahan jumlah volume produksi komoditas cabai besar	2.813,28	DINAS PERTANIAN
				Pertambahan jumlah volume produksi komoditas cabai rawit	2.651,13	DINAS PERTANIAN
				Pertambahan jumlah volume produksi komoditas bawang merah	98,11	DINAS PERTANIAN
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase kontribusi komoditas ikan dalam menyumbang inflasi	22,22	DINAS KELAUTAN PERIKANAN
			PROGRAM PENGEMBANGAN DISTRIBUSI, STABILITAS, DAN CADANGAN PANGAN	Koefisien varian harga pangan strategis di tingkat produsen dan konsumen	CV Beras ≤ 5%	DINAS PANGAN
					CV Cabe ≤ 35%	DINAS PANGAN
					CV Daging Ayam 10%	DINAS PANGAN
		Pengendalian tingkat kelahiran penduduk dan perpindahan penduduk untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang	PROGRAM PENGADMINISTRASIAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	Persentase jumlah masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mempunyai KTP	N.A	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
				Persentase jumlah	N.A	DINAS PPA,

NO	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019			
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target 2019	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sudah meninggal yang memiliki akte kematian		DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
			PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Persentase unmeet need	7,48	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
			PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Persentase grand design kependudukan se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
				presentase KB MKJP	8,9	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
4	PENGEMBANGAN KONEKTIVITAS DAN INFRASTRUKTUR	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan jaringan irigasi serta cetak sawah pertanian yang modern	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	Persentase luas jaringan irigasi yang berfungsi	55%	DINAS PUPR
			PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	Persentase kesesuaian lokasi cetak sawah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP)	50	DINAS PUPR
		Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur air baku	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	Pertumbuhan volume air baku	10%	DINAS PUPR
		Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur dasar yang layak bagi masyarakat	PROGRAM KECIPTAKARYAAN DAN PERMUKIMAN	Persentase peningkatan aksesibilitas Kawasan permukiman	33%	DINAS PRKP
				Persentase peningkatan aksesibilitas di Kawasan permukiman kumuh Provinsi	26%	DINAS PRKP
		Peningkatan penataan permukiman pada kawasan strategis Provinsi	PROGRAM KECIPTAKARYAAN DAN PERMUKIMAN	Prosentase peningkatan kualitas pengelolaan Bangunan Gedung Dan Lingkungan	25%	DINAS PRKP
		Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur	PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH	Persentase dana pendamping desa yang terlayani jaringan Internet	66%	KOMINFO

NO	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019			
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target 2019	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
		jaringan telekomunikasi bagi masyarakat	BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI			
		Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan pelabuhan serta sarana prasarana pendukung pelabuhan	PROGRAM PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN LAUT	Persentase Jumlah pulau yang memiliki pelabuhan/dermaga yang layak	17%	DINAS PERHUBUNGAN
		Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan terminal serta sarana prasarana pendukung terminal	PROGRAM PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN DARAT	Persentase desa yang terlayani oleh angkutan perintis lintas kabupaten dalam provinsi		DINAS PERHUBUNGAN
			PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN, OPERASIONAL DAN KEBANDARUDARAAN	Persentase sarana dan prasarana fasilitas bandara kewenangan provinsi yang tersedia dan beroperasi	10%	DISHUB
		Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan jalan dan jembatan	PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase jalan provinsi diluar kawasan Strategis Provinsi dan Prioritas Propinsi dalam kondisi mantap		DINAS PUPR
5	PEMBANGUNAN DEMOKRASI	Peningkatan pemberian kesempatan Kebebasan sipil kepada masyarakat	PROGRAM BINA IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN	Jumlah kasus penistaan terhadap simbol negara	-	KESBANGPOL
				Jumlah kasus Konflik Sara Yang Dapat Diantisipasi	2	KESBANGPOL
			PROGRAM PENGUATAN KEWASPADAAN NASIONAL	Tingkat Kerawanan Konflik Kabupaten/kota	9	KESBANGPOL
			PROGRAM KETAHANAN EKONOMI, SENI, BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas/LSM dan OKP yang ikut serta dalam kegiatan Pembangunan	35	KESBANGPOL
				Persentase Jumlah sanggar/paguyuban yang melestarikan seni budaya dalam mendukung ketahanan budaya	40	KESBANGPOL
		Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, penegakan perda serta perlindungan masyarakat (Linmas)	PROGRAM PENINGKATAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT	Prosentase jumlah pelanggaran Tibumtranmas yang ditindak sesuai dengan aturan	100%	SATPOL PP
			PROGRAM PERLINDUNGAN	Persentase jumlah linmas yang	6,05%	SATPOL PP



NO	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019			
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target 2019	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
			MASYARAKAT	berkompeten dalam penyelenggaraan kantrantibmas		
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERSONIL SATPOL PP	Prosentase jumlah personil Satpol PP yang melaksanakan penyelenggaraan kantrantibmas	16,23%	SATPOL PP
			PROGRAM PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA	Cakupan penegakan perda	100%	SATPOL PP
		Peningkatan pelayanan terhadap Hak-hak politik masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN	Persentase jumlah perempuan yang berkompetensi dilembaga politik	27,77	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
				Persentase Jumlah organisasi dan lembaga masyarakat yang berbasis gender	30	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
			PROGRAM PEMBINAAN POLITIK DALAM NEGERI	Pertumbuhan Cakupan Pembinaan Politik Daerah	7	KESBANGPOL
		Peningkatan pemberdayaan Lembaga-Lembaga Demokrasi	PROGRAM PEMBINAAN POLITIK DALAM NEGERI	persentase rekomendasi pengembangan berdemokrasi yg ditindak lanjuti	50	KESBANGPOL
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	persentase rekomendasi kajian tentang demokrasi yang digunakan dalam perencanaan dan pangambil kebijakan	30%	BAPPEDA
			PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL,BUDAYA DAN PEMERINTAHAN	Persentase kesesuaian perencanaan yang mendukung pembangunan berdemokrasi yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan renstra dan renja PD	30%	BAPPEDA

#### 4.3. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN LINTAS BIDANG MELALUI PENDEKATAN HOLISTIK-TEMATIK, INTEGRATIF DAN SPASIAL

Dengan adanya perubahan paradigma penganggaran dari prinsip money follow fuction menjadi money follow priority programmedan upaya percepatan pencapaian tujuan pembangunan melalui Pembangunan Lintas Bidang 2017-2022, maka pada tahun 2019 dilakukan pendekatan pendekatan holistik – tematik, Integratif dan spasial dalam proses perencanaan.

Dalam hal mengimplementasikan pendekatan holistik – tematik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadikan 8 prioritas Lintas Bidang provinsi menjadi fokus.

Sementara itu, pada pendekatan integratif, telah dilakukan proses identifikasi sasaran dan indikator sasaran pembangunan yang mendukung setiap prioritas tersebut yang diikuti dengan proses identifikasi dan inventarisasi program dan Perangkat Daerah penanggungjawab program sebagai fokus pendekatan.

Selanjutnya pada pendekatan spasial, telah dilakukan identifikasi terhadap lokasi dari pelaksanaan aktivitas/kegiatan dari program yang dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah guna mencapai sasaran pembangunan sebagaimana dimaksud.

Adapun poses dan tahapan implementasi pendekatan holistik – tematik, Integratif dan spasial yang dilakukan didalam perumusan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019, adalah sebagaimana yang diuraikan sebagai berikut:

#### 4.3.1. Pengembangan Pembangunan Agropolitan

Sasaran yang ingin diwujudkan pada prioritas ini adalah Meningkatnya produksi sub sector pertanian, peternakan dan jasa perkebunan. Selanjutnya sasaran, target sasaran, strategi dan arah kebijakan disajikan pada tabel IV.37 berikut:

**Tabel IV.37**  
Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Lintas Bidang Pengembangan  
Pembangunan Agropolitan

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Strategi dan Arah Kebijakan
1	2	3	4
1 Meningkatnya produksi sub sektor pertanian, peternakan, dan pekerbunaan	1 Persentase Pertumbuhan Produksi sub sektor pertanian, peternakan, dan jasa perkebunaan	4,9	1 Meningkatan pengendalian dan pengawasan terhadap wilayah pertanian berkelanjutan
			a Penyusunan kebijakan dan implementasi perlindungan lahan pertanian berkelanjutan
			2 Meningkatkan produksi dan pengelolaan hasil pertanian, perkebunaan, peternakan dan Kehutanan
			a Peningkatan sarana dan prasarana dan nilai tambah serta produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan Kehutanan
			b Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing sektor pertanian
			c Pembinaan hubungan industri sektor pertanian

Sasaran	Indikator Sasaran	Terget	Strategi dan Arah Kebijakan
1	2	3	4
		d	Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing sektor pertanian
		e	Pengembangan produk pertanian, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi sektor pertanian di daerah
		f	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dibidang pertanian
		3	Pengembangan kawasan berbasis pertanian, perkebunan dan perternakan
		a	Pengembangan Kawasan Strategis KTM Batu Betumpang
		b	Pengembangan Kawasan Strategis Kota Terpadu Mandiri Gantung
		c	Pengembangan kawasan Agropolitan dan Tekno park Pertanian Lada Air Gegas
		d	Pengembangan Kawasan Budidaya Pertanian

Upaya pencapaian target kinerja sasaran tahun 2019 untuk prioritas ini dilakukan melalui koordinasi beberapa Perangkat Daerah secara menyeluruh dari berbagai sektor pembangunan guna meningkatkan manfaat dan daya ungkit pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat dengan rencana program pembangunan dan target indikator kinerja program baik yang prioritas maupun program pendukung sebagaimana disajikan pada tabel IV.38 berikut:

**Tabel IV.38**

**Program Pembangunan Perangkat Daerah Yang Mendukung Prioritas  
Pengembangan Pembangunan Agropolitan**

NO	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019			
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target 2019	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
1	PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN AGROPOLITAN	Penyusunan kebijakan dan implementasi perlindungan lahan pertanian berkelanjutan	PROGRAM PENGEMBANGAN PRASARANA, SARANA PERTANIAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN	Pertambahan Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan yang di implementasikan	2	DINAS PERTANIAN
		Peningkatan sarana dan prasarana dan nilai tambah serta produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan Kehutanan	PROGRAM PENGEMBANGAN PRASARANA, SARANA PERTANIAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase ketersediaan sarana prasarana pertanian	15	DINAS PERTANIAN
				Persentase Pertambahan Kelompok tani yang melakukan pemberdayaan disektor pertanian	10	DINAS PERTANIAN
				Persentase Kelembagaan pertanian aktif	10	DINAS PERTANIAN
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI MUTU BENIH	Persentase Pertambahan Jumlah benih lada yang bersertifikat dan berlabel	655	UPTD PENGAWAS DAN SERTIFIKASI MUTU BENIH PERTANIAN
				Persentase Pertambahan Jumlah benih karet yang bersertifikat dan berlabel,	655	UPTD PENGAWAS DAN SERTIFIKASI MUTU BENIH PERTANIAN
				Pertambahan Jumlah benih padi yang bersertifikat dan berlabel	150	UPTD PENGAWAS DAN SERTIFIKASI MUTU BENIH PERTANIAN
				Pertambahan Jumlah benih hortikultura yang bersertifikat dan berlabel,	1.5	UPTD PENGAWAS DAN SERTIFIKASI MUTU BENIH PERTANIAN
				Persentase varietas unggul lokal yang didaftarkan menjadi unggul Nasional	2	UPTD PENGAWAS DAN SERTIFIKASI MUTU BENIH PERTANIAN
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PROTEKSI TANAMAN	Persentase penurunan areal tanam yang terserang OPT	5	UPTD BALAI PROTEKSI TANAMAN PERTANIAN
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PENGEMBANGAN BENIH PERTANIAN	Pertambahan Ketersediaan bibit lada	50	UPTD BALAI BENIH PERTANIAN

NO	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019			
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target 2019	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				Pertambahan Ketersediaan bibit karet	40	UPTD BALAI BENIH PERTANIAN
				Pertambahan Ketersediaan benih sumber padi	4	UPTD BALAI BENIH PERTANIAN
				Pertambahan Ketersediaan bibit ayam	6	UPTD BALAI BENIH PERTANIAN
				Pertambahan Ketersediaan anakan sapi	20	UPTD BALAI BENIH PERTANIAN
				Pertambahan Ketersediaan kandang ternak, gudang pakan, gedung pertemuan dan sarana prasarana	1	UPTD BALAI BENIH PERTANIAN
			PROGRAM PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	Persentase peningkatan produksi dan produktifitas komoditi strategis tanaman pangan padi	43.135,00	DINAS PERTANIAN
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERKEBUNAN	Peningkatan produksi lada	43.577	DINAS PERTANIAN
				Peningkatan produksi karet	60.173	DINAS PERTANIAN
			PROGRAM PENGEMBANGAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	Pertambahan Jumlah populasi ternak besar sapi	14.399	DINAS PERTANIAN
				Pertambahan Jumlah populasi ternak ayam	12.678.800	DINAS PERTANIAN
			PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA HUTAN	Persentase izin usaha hasil hutan kayu (%)	20%	DINAS KEHUTANAAN
				Persentase hasil hutan bukan kayu yang dikembangkan (%)	20%	DINAS KEHUTANAAN
			PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP	Tersedianya Dokumen KLHS Pengembangan Balai Benih Pertanian Terpadu yang digunakan dalam perencanaan kawasan	1 Dokumen	DLH
			PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase informasi berkaitan dengan peningkatan produksi pertanian yang dapat diakses masyarakat	25%	KOMINFO
		Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing sektor pertanian	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LATIHAN KERJA INDUSTRI	Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan tentang pertanian yang berkompetensi	0,14	UPD BLKI
			PROGRAM PENGEMBANGAN PELATIHAN DAN PENEMPATAN	Persentase peningkatan tenaga kerja pertanian yang bersertifikasi	18	DISNAKER

NO	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019			
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target 2019	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
			TENAGA KERJA			
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase peningkatan produktifitas tenaga kerja sektor pertanian	0,02	UPTD BALAI PRODUKTIFITAS
			PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KEJURUAN	Persentase Jumlah SMK dengan program keahlian pertanian, perkebunan dan peternakan yang memiliki akreditasi A	100	DINAS PENDIDIKAN
				Persentase SMK Pertanian dan Peternakan yang mengeluarkan Sertifikasi Profesi pihak 1 (LSP-P1)	50	DINAS PENDIDIKAN
			PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI	persentase peningkatan volume usaha koperasi pertanian	3%	DINAS KUMKM
				persentase peningkatan volume usaha koperasi sapi	1%	DINAS KUMKM
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LATIHAN PERKOPERASIAN, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	Persentase SDM Koperasi sektor pertanian terlatih	3,09%	UPTD BALAI LATIHAN PERKOPERASIAN, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
				persentase SDM Usaha Kecil sektor pertanian terlatih	0,34%	UPTD BALAI LATIHAN PERKOPERASIAN, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
		Pembinaan hubungan industri sektor pertanian	PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN, PEMBINAAN HUB. INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase perusahaan pertanian yang diperiksa dan dibina sesuai standar pemeriksaan perusahaan	2	DISNAKER
		Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUMKM dalam meningkatkan daya saing sektor pertanian	PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI	Persentase pertumbuhan kelembagaan koperasi aktif sektor pertanian	5%	DINAS KUMKM
				persentase koperasi sektor pertanian berkualitas sesuai standar	2%	DINAS KUMKM

NO	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019			
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target 2019	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
			PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN USAHA KECIL	Persentase produk Usaha kecil sektor pertanian yang tersertifikasi	77%	DINAS KUMKM
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBERDAYA, FASILITASI DAN AKSES INDUSTRI	Presentase Tenaga Kerja Industri pada sektor pertanian	10,28%	DISPERINDAG
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS SERTIFIKASI DAN PENGENDALIAN MUTU PRODUK	Persentase komoditi unggulan daerah diuji yang memenuhi standar pengujian	2	UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PENGENDALIAN MUTU
		Pengembangan produk pertanian, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi sektor pertanian	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Pertambahan Jumlah profil investasi Sektor Pertanian yang digunakan untuk promosi investasi daerah di sektor pertanian		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI PENANAMAN MODAL	Pertambahan Jumlah investor Sektor Pertanian	3	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DAN SISTEM INFORMASI	Presentase perusahaan sektor pertanian yang sesuai realisasi investasi dengan rencana investasi	0,44%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			PROGRAM PEINGKATAN PEMBERDAYAAN USAHA KECIL	Pertambahan jumlah pelaku usaha kecil sektor pertanian yang menandatangani kesepakatan kemitraan dengan dunia usaha dalam daerah	90	DINAS KUMKM
				persentase pelaku usaha kecil sektor pertanian, perkebunan dan peternakan yang menandatangani kesepakatan kemitraan dengan dunia usaha luar daerah	0	DINAS KUMKM

NO	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019			
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target 2019	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				persentase Usaha Kecil sektor pertanian, perkebunan dan peternakan yang mendapatkan izin usaha	0	DINAS KUMKM
				persentase Usaha Kecil sektor pertanian, peternakan dan perkebunan yang difasilitasi promosi/pemasaran produknya melalui even pameran	0	DINAS KUMKM
				persentase Usaha Kecil sektor pertanian, peternakan dan perkebunan yang difasilitasi promosi/pemasaran produknya melalui web	1	DINAS KUMKM
				persentase Usaha Kecil sektor pertanian, perkebunan dan peternakan yang mendapatkan Diseminasi dan pendampingan akses permodalan	0	DINAS KUMKM
		Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dibidang pertanian	PROGRAM PENGEMBANGAN PENDAYAGUNAAN SDA, TEKNOLOGI TEPAT GUNA DAN PELATIHAN MASYARAKAT	Persentase kelompok masyarakat yang mendayagunakan teknologi tepat guna (TTG) di sektor pertanian	42%	DINAS PMD
			PROGRAM PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	Pertambahan Jumlah kelompok yang menerapkan peningkatan mutu, daya saing, dan nilai tambah hasil tanaman pangan dan hortikultura	40	DINAS PMD
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERKEBUNAN	Pertambahan Jumlah kelompok yang menerapkan peningkatan mutu, daya saing, dan nilai tambah hasil perkebunan	56	DINAS PERTANIAN
			PROGRAM PENGEMBANGAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	Pertambahan Jumlah kelompok yang menerapkan peningkatan mutu, daya saing, dan nilai tambah hasil peternakan	14	DINAS PERTANIAN
		Pengembangan Kawasan Strategis KTM Batu Betumpang	PROGRAM PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	Tersedianya Kawasan budiaya komoditas padi di KTM Batu Betumpang	1	DINAS PERTANIAN
				Tersedianya Kawasan budiaya komoditas cabai di KTM Batu Betumpang	1	DINAS PERTANIAN
				Tersedianya Kawasan budiaya bawang merah di KTM Batu Betumpang	1	DINAS PERTANIAN
				Tingkat produktifitas petani dikawasan KTM Batu Betumpang	1	DINAS PERTANIAN



NO	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019			
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target 2019	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
			PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di Kawasan Strategis KTM Batu Betumpang	95,50%	DINAS PUPR
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	Persentase penyediaan volume air baku di Kawasan Strategis KTM Batu Betumpang	0	DINAS PUPR
				Persentase penyediaan volume air baku di Kawasan Strategis KTM Batu Betumpang	0	DINAS PUPR
			PROGRAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Tingkat kesejahteraan petani masyarakat transmigrasi di kawasan KTM Batu Betumpang		DISNAKER
		Pengembangan Kawasan Strategis Kota Terpadu Mandiri Gantung	PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	Persentase Tersedianya Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kota Terpadu Mandiri Gantung	0	DINAS PUPR
			PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di kawasan Kota terpadu mandiri Gantung	92,95%	DINAS PUPR
			PROGRAM PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	Tersedianya Kawasan budidaya komoditas padi di kawasan kota terpadu mandiri Gantung	1	DINAS PERTANIAN
				Tersedianya Kawasan Budidaya komoditas cabai di Kawasan kota Terpadu mandiri Gantung	1	DINAS PERTANIAN
				Tersedianya Kawasan Budidaya bawang merah di Kawasan Kota Terpadu Mandiri Gantung	1	DINAS PERTANIAN
				Tingkat produktifitas petani di kawasan KTM Gantung	1	DINAS PERTANIAN
			PROGRAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Tingkat kesejahteraan petani masyarakat transmigrasi di kawasan KTM Gantung	0,36	DISNAKER
		Pengembangan kawasan Agropolitan dan Tekno park Pertanian Lada Air Gegas	PROGRAM PENGEMBANGAN PERKEBUNAN	Tersedianya kawasan Pengembangan budidaya lada	1	DINAS PERTANIAN
			PROGRAM PENGEMBANGAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	Tersedianya Kawasan pengembangan ternak sapi	-	DINAS PERTANIAN

NO	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019			
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target 2019	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
			PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP	Tersedianya Dokumen KLHS Agropolitan Berbasis Demonstration Farming Sawah Mekanisasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang digunakan dalam perencanaan kawasan	1 Dokumen	DLH

Upaya pencapaian target kinerja sasaran tahun 2019 untuk prioritas ini dilakukan juga melalui intervensi lintas sektor melibatkan para stakeholder secara menyeluruh dari berbagai sektor pembangunan guna meningkatkan manfaat dan daya ungkit pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat sebagaimana disajikan pada tabel IV.38.a berikut:

**Tabel IV.38.a**

Stakeholder Yang Mendukung Pengembangan Pembangunan Agropolitan

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Strategi yang perlu Dukungan dari Stakeholder		Stakeholder
1	2	3	4	5	
Meningkatnya produksi sub sektor pertanian, peternakan, dan pekerbunaan	Persentase Pertumbuhan Produksi sub sektor pertanian, peternakan, dan jasa perkebunaan	4,9	1 Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap wilayah pertanian berkelanjutan		Lembaga Swadaya Pemberdayaan Ekonomi Rakyat
			2 Meningkatkan produksi dan pengelolaan hasil pertanian, perkebunaan, peternakan dan Kehutanan		Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), KADIN, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI)
			3 Pengembangan kawasan berbasis pertanian, perkebunaan dan perternakan		Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Ikatan Konsultan Indonesia, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi

#### 4.3.2. Pembangunan Bahari

Sasaran yang ingin diwujudkan pada prioritas ini adalah Meningkatkan produksi Sub Sektor perikanan. Selanjutnya sasaran, target sasaran, strategi dan arah kebijakan disajikan pada tabel IV.39 berikut:

**Tabel IV.39**  
Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Lintas Bidang  
Pembangunan bahari

Sasaran		Indikator Sasaran	Target	Strategi dan Arah Kebijakan
1		2	3	4
1	Meningkatnya produksi Sub Sektor perikanan	1 Persentase Pertumbuhan Produksi sub sektor perikanan	4.1	<p>1 Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil</p> <p>a Pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang laut serta penegakan perundang-undangan kelautan dan perikanan.</p> <p>2 Meningkatkan produksi dan pengelolaan hasil perikanan tangkap serta perikanan budidaya</p> <p>a Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing sektor Kelautan dan Perikanan</p> <p>b Peningkatan Produksi, Kualitas dan produktifitas tenaga kerja sektor Kelautan dan perikanan</p> <p>c Pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja sektor kelautan dan perikanan</p> <p>d Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing sektor kelautan dan perikanan</p> <p>e Pengembangan produk Kelautan dan perikanan, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di sektor kelautan dan perikanan</p> <p>3 Mengembangkan kawasan sentra Kelautan dan Perikanan</p> <p>a Pengembangan Kawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok</p> <p>b Pengembangan Kawasan Strategis etalase Perikanan Selat Nasik</p> <p>c Pengembangan Kawasan Strategis Industri Perikanan Tanjung Binga</p> <p>d Pengembangan Kawasan Pedesaan Minapolitan Manggar</p>

Upaya pencapaian target kinerja sasaran tahun 2019 untuk prioritas ini dilakukan melalui koordinasi beberapa Perangkat Daerah secara menyeluruh dari berbagai sektor pembangunan guna meningkatkan manfaat dan daya ungkit pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat dengan rencana program pembangunan dan target indikator kinerja

program baik yang prioritas maupun program pendukung sebagaimana disajikan pada tabel IV.40 berikut:

**Tabel IV.40**  
Program Pembangunan Perangkat Daerah Yang Mendukung Prioritas  
Pembangunan Bahari

Arah Kebijakan		Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
			Indikator (Outcome)	Target	
1		2	3	4	5
1	Pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang laut serta penegakan perundang-undangan kelautan dan perikanan.	PROGRAM PENGEMBANGAN PENGELOLAAN RUANG LAUT	Luas Kawasan Konservasi yang dicadangkan (Ha)	820,077	DKP
			Persentase sarana dan prasarana yang terbangun di Desa Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	2.13	DKP
			Persentase Usulan Pemanfaatan Ruang Laut yang terekomendasi (%)	65	DKP
		PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Pelaku Usaha yang Taat Aturan (%)	70	DKP
		PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN LAUT	Persentase Pelabuhan Khusus (Pelsus) dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) yang memiliki izin	15.00%	DISHUB
2	Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing sektor Kelautan dan Perikanan	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LATIHAN KERJA INDUSTRI	Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan tentang Kelautan dan perikanan yang berkompetensi	0.11%	UPTD BLKI
		PROGRAM PENGEMBANGAN PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase peningkatan tenaga kerja kelautan dan perikanan bersertifikat kompetensi	17.54	DISNAKER
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase peningkatan produktifitas tenaga kerja sektor Perikanan	00.12	UPTD BALAI PRODUKTIFITAS
		PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KEJURUAN	Persentase Jumlah SMK dengan program keahlian perikanan yang memiliki akreditasi A	100	DINAS PENDIDIKAN
			Persentase Jumlah SMK Program Keahlian Kelautan dan Perikanan yang mengeluarkan Sertifikasi Profesi pihak 1 (LSP-P1)	100	DINAS PENDIDIKAN
3	Peningkatan Produksi, Kualitas dan produktifitas tenaga kerja sektor Kelautan dan perikanan	PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI	persentase peningkatan volume usaha sektor kelautan dan perikanan	5%	DINAS KUMKM
		PROGRAM PENINGKATAN	persentase pelaku usaha kecil	-	DINAS KUMKM

Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
		Indikator (Outcome)	Target	
1	2	3	4	5
	PEMBERDAYAAN USAHA KECIL	sektor kelautan dan perikanan yang menandatangani kesepakatan kemitraan dengan dunia usaha luar daerah		
		persentase Usaha Kecil sektor kelautan dan perikanan yang mendapatkan Izin Usaha	-	DINAS KUMKM
		persentase Usaha Kecil sektor kelautan dan perikanan yang difasilitasi promosi/ pemasaran produknya melalui even pameran	-	DINAS KUMKM
		persentase Usaha Kecil sektor kelautan dan perikanan yang mendapatkan Diseminasi dan pendampingan akses permodalan	-	DINAS KUMKM
		persentase Usaha kecil sektor kelautan dan perikanan yang difasilitasi promosi/ pemasaran produknya melalui web	1	DINAS KUMKM
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LATIHAN PERKOPERASIAN, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	Persentase SDM Koperasi sektor perikanan terlatih	3%	UPTD BALAI LATIHAN PERKOPERASIAN, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
		persentase SDM Usaha Kecil sektor perikanan terlatih	0%	UPTD BALAI LATIHAN PERKOPERASIAN, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBERDAYA, FASILITASI DAN AKSES INDUSTRI	Persentase Tenaga Kerja yang terserap di Industri Kelautan dan Perikanan	0.70%	DISPERINDAG
	PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN BUDIDAYA DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	Volume Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	12,12	DKP
		Angka Konsumsi Ikan (Kg/Org/Tahun)	54	DKP
		Volume Produksi Olahan (ton)	21,11	DKP
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	Volume Produksi Perikanan Tangkap (Ton/Tahun)	215,3	DKP
		Nilai Tukar Nelayan (Indeks)	109	DKP
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PEMBENIHAN IKAN AIR PAYAU	Pertambahan Jumlah Produksi Benih Ikan yang unggul (Juta Ekor)	0,41875	UPTD BALAI BENIH IKAN AIR PAYAU (BBIAP) TANJUNG KRASAK
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PEMBENIHAN IKAN LAUT	Pertambahan Jumlah Produksi Benih Ikan yang unggul (Juta Ekor)	00.06	UPTD BALAI BENIH IKAN LAUT (BBIL) TANJUNG RUSA
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS	Pertambahan Jumlah Produksi Benih Ikan yang unggul (Juta	00.33	UPTD BALAI BENIH IKAN SENTRAL

Arah Kebijakan		Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
			Indikator (Outcome)	Target	
1		2	3	4	5
		PEMBENIHAN IKAN AIR TAWAR	Ekor)		(BBIS) PEMALI
4	Pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja sektor kelautan dan perikanan	PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN, PEMBINAAN HUB. INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL	persentase perusahaan kelautan perikanan yang diperiksa dan dibina sesuai standar pemeriksaan perusahaan	01.02	DISNAKER
5	Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing sektor kelautan dan perikanan	PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI	Persentase jumlah koperasi bidang Kelautan dan Perikanan yang berkualitas sesuai standar	3.60%	DINAS KUMKM
			Persentase pertumbuhan kelembagaan koperasi aktif sektor kelautan dan perikanan	5%	DINAS KUMKM
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LABORATORIUM PENGUJIAN DAN PENGENDALIAN MUTU HASIL PERIKANAN	Persentase Produk Hasil Kelautan dan Perikanan yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan	84.00%	UPTD LABORATORIUM PENGUJIAN DAN PENGENDALIAN MUTU HASIL PERIKANAN
6	Pengembangan produk Kelautan dan perikanan, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di sektor kelautan dan perikanan.	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Pertambahan Jumlah profil investasi Sektor perikanan dan kelautan yang digunakan untuk promosi investasi di sektor perikanan dan Kelautan	5	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			Pertambahan Jumlah UKM Sektor kelautan dan perikanan yang bermitra dengan investor	1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI PENANAMAN MODAL	Pertambahan Jumlah Investor sektor kelautan dan perikanan	2	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DAN SISTEM INFORMASI	Presentase perusahaan sektor kelautan dan perikanan yang sesuai realisasi investasi dengan rencana investasi	0.44%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN USAHA KECIL	Peningkatan produk Usaha kecil sektor kelautan dan perikanan yang tersertifikasi	550	DINAS KUMKM
			pertambahan jumlah pelaku usaha kecil sektor kelautan dan perikanan yang menandatangani kesepakatan kemitraan dengan dunia usaha dalam daerah	160	DINAS KUMKM

Arah Kebijakan		Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
			Indikator (Outcome)	Target	
1		2	3	4	5
7	Pengembangan Kawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok	PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap dikawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok	19,5	DKP
		PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN BUDIDAYA DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya dikawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok	220	DKP
		PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI	Persentase koperasi aktif di kawasan strategis minapolitan Lepar Pongok	1%	DINAS KUMKM
		PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN USAHA KECIL	persentase Usaha Kecil dikawasan Minapolitan Lepar Pongok yang mendapatkan Izin Usaha	10%	DINAS KUMKM
			persentase Usaha Kecil dikawasan Minapolitan Lepar Pongok yang mendapatkan Diseminasi dan pendampingan akses permodalan	1%	DINAS KUMKM
		PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH DAN PENGAWASAN INDUSTRI	Pertumbuhan Jumlah Industri perikanan dikawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok	0	DISPERINDAG
		PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP	Tersedianya Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Minapolitan Lepar Pongok yang digunakan untuk perencanaan kawasan	ada	DLH
		PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN LAUT	Prosentase pemenuhan Sarana dan Prasarana pendukung Perhubungan Laut Kawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok	30%	DISHUB
		PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	Persentase jumlah Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kawasan Minapolitan Lepar Pongok yang di implementasikan	C	DINAS PUPR
		PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di Kawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok	0%	DINAS PUPR
8	Pengembangan Kawasan Strategis etalase Perikanan Selat Nasik	PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN BUDIDAYA DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya dikawasan Strategis etalase perikanan selat nasik	121	DKP
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap dikawasan Strategis Etalase Perikanan Selat Nasik	33	DKP
		PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN	Persentase koperasi aktif di kawasan strategis etalase perikanan selat nasik	10	DINAS KUMKM

Arah Kebijakan		Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
			Indikator (Outcome)	Target	
1	2	3	4	5	
		PENGAWASAN KOPERASI			
		PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN USAHA KECIL	persentase Usaha Kecil dikawasan strategis etalase perikanan selat nasik yang mendapatkan Izin Uaha	10%	DINAS KUMKM
			persentase Usaha Kecil dikawasan Sentra Selat Nasik yang mendapatkan mendapatkan Diseminasi dan pendampingan akses permodalan	1%	DINAS KUMKM
		PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH DAN PENGAWASAN INDUSTRI	Pertumbuhan Jumlah Industri perikanaan dikawasan Strategis Etalase Perikanaan Selat Nasik		DISPERINDAG
		PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di Kawasan Strategis etalase Perikanan Selat Nasik	0%	DINAS PUPR
		PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP	Tersedianya Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Etalase Perikanan Selat Nasik yang digunakan dalam perencanaan kawasan		DLH
		PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN LAUT	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung perhubungan laut kawasan strategis etalase perikanan Selat Nasik	30%	DISHUB
		PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	Persentase Jumlah Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kawasan Etalase Perikanan Selat Nasik yang diimplementasikan	50	DINAS PUPR
9	Pengembangan Kawasan Strategis Industri Perikanan Tanjung Binga	PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI	Persentase koperasi aktif di kawasan strategis industri perikanan Tanjung Binga	1%	DINAS KUMKM
		PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN USAHA KECIL	persentase Usaha Kecil dikawasan strategis industri perikanan Tanjung Binga yang mendapatkan Izin Usaha	10%	DINAS KUMKM
			persentase Usaha Kecil dikawasan strategis industri perikanan Tanjung Binga yang mendapatkan mendapatkan Diseminasi dan pendampingan akses permodalan	1%	DINAS KUMKM
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	Pertumbuhan panjang bangunan pemecah gelombang atau penahan abrasi di kawasan Strategis Industri Perikanan Tanjung Binga	5%	DINAS PUPR
			Persentase penyediaan volume air baku di kawasan Strategis Industri Perikanan Tanjung Binga	5%	DINAS PUPR
		PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap	97.85%	DINAS PUPR



Arah Kebijakan		Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
			Indikator (Outcome)	Target	
1	2	3	4	5	
			di Kawasan Strategis Industri Perikanan Tanjung Binga		
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap di kawasan Strategis Industri Perikanan Tanjung Binga	10	DKP
		PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN LAUT	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung perhubungan laut kawasan strategis Industri Perikanan Tanjung Binga		DISHUB
		PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	Persentase Jumlah Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kawasan Industri Perikanan Tanjung Binga yang diimplementasikan	50	DINAS PUPR
10	Pengembangan Kawasan Pedesaan Minapolitan Manggar	PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap di Kawasan Pedesaan Minapolitan Manggar	5	DKP
		PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN LAUT	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung perhubungan laut Kawasan Pedesaan Minapolitan Manggar		DISHUB

Upaya pencapaian target kinerja sasaran tahun 2019 untuk prioritas ini dilakukan juga melalui intervensi lintas sektor melibatkan para stakeholder secara menyeluruh dari berbagai sektor pembangunan guna meningkatkan manfaat dan daya ungkit pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat sebagaimana disajikan pada tabel IV.39.a berikut:

**Tabel IV.40.a**  
Stakeholder Yang Mendukung Pembangunan Lintas Bidang  
Pembangunan bahari

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Strategi Yang Perlu Dukungan Stakeholder	Stakeholder
1	2	3	4	
1 Meningkatkan produksi Sub Sektor perikanan	Persentase Pertumbuhan Produksi sub sektor perikanan	4.1	1 Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Lembaga Swadaya Masyarakat
			2 Meningkatkan produksi dan pengelolaan hasil perikanan tangkap serta perikanan budidaya	Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), Himpunan Nelayan Seluruh

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Strategi Yang Perlu Dukungan Stakeholder	Stakeholder
1	2	3	4	
				Indonesia (HNSI), KADIN, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI)
		3 Mengembangkan kawasan sentra Kelautan dan Perikanan		Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Ikatan Konsultan Indonesia, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi

#### 4.3.3. Pengembangan Pariwisata

Sasaran yang ingin diwujudkan pada prioritas ini adalah Meningkatnya Kunjungan Wisatawan. Selanjutnya sasaran, target sasaran, strategi dan arah kebijakan disajikan pada tabel IV.41 berikut:

**Tabel IV. 41**  
Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Prioritas Pengembangan Pariwisata

Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun	Strategi
1	2	3	4
1 Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	1 jumlah kunjungan wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara)	389.009	1 Meningkatkan sinergisitas pembangunan lintas sektor dalam mengembangkan pembangunan pariwisata
			a Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, ekonomi kreatif, peran serta masyarakat dan kelembagaan pariwisata
			b Peningkatan infrastruktur, sarana dan prasarana pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata.
			c Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing kepariwisataan daerah
			d Peningkatan kualitas, partisipasi dan prestasi pemuda di berbagai bidang pembangunan, dan peningkatan pengelolaan ke

Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun	Strategi
1	2	3	4
			olah raga serta mengembangkan peran serta kebudayaan dalam mendukung pembangunan kepariwisataan
		e	Pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja disektor pariwisata
		f	Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing kepariwisataan
		g	Pengembangan pariwisata daerah, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antar sektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di bidang pariwisata.
		1	Mengembangkan kawasan pendukung pembangunan pariwisata
		a	Pengembangan Kawasan pelabuhan penyeberangan Tanjung Kalian
		b	Pengembangan Kawasan strategis Pelabuhan ASDP Manggar – Ketapang
		c	Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Tanjung gunung dan kawasan lintas timur Pulau Bangka
		d	Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan ekonomi khusus (KEK) Tanjung kelayang
		e	Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan Kota Tua Mentok
		f	Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan gunung Permisan Simpang Rimba
		g	Pengembangan Kawasan peruntukan Pariwisata Museum Nasional

Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun	Strategi
1	2	3	4
			Maritim Belitung
		h	Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Gunung Menumbing
		3	Pengembangan pulau-pulau kecil dan daerah perbatasan
		a	Pengembangan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan pulau sumatera
		b	Pengembangan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil

Upaya pencapaian target kinerja sasaran tahun 2019 untuk prioritas ini dilakukan melalui koordinasi beberapa Perangkat Daerah secara menyeluruh dari berbagai sektor pembangunan guna meningkatkan manfaat dan daya ungkit pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat dengan rencana program pembangunan dan target indikator kinerja program baik yang prioritas maupun program pendukung sebagaimana disajikan pada tabel IV.42 berikut:

**Tabel. IV. 42**  
Program Pembangunan Perangkat Daerah Yang Mendukung Pembangunan Lintas Bidang Pengembangan Pariwisata

NO	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019			
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target 2019	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
2	PENGEMBANGAN PARIWISATA	Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, ekonomi kreatif, peran serta masyarakat dan kelembagaan pariwisata	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA, EKONOMI KREATIF DAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN	Persentase sumber daya pariwisata yang terlatih dan tersertifikasi		BUDPAR
				Presentase pelaku ekonomi kreatif yang terlatih		BUDPAR
		Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, ekonomi kreatif, peran serta masyarakat dan kelembagaan pariwisata		Pertumbuhan kelembagaan pariwisata	11	BUDPAR
		Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, ekonomi kreatif, peran serta	PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN	Pertumbuhan kelembagaan koperasi aktif pendukung pariwisata	2,70%	KUMKM

NO	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019			
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target 2019	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
		masyarakat dan kelembagaan pariwisata	KOPERASI			
		Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, ekonomi kreatif, peran serta masyarakat dan kelembagaan pariwisata	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LATIHAN PERKOPERASIAN, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	Persentase SDM Koperasi sektor pariwisata terlatih	2,06%	KUMKM
		Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, ekonomi kreatif, peran serta masyarakat dan kelembagaan pariwisata		persentase SDM Usaha Kecil sektor pariwisata terlatih	0,25%	KUMKM
			PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN USAHA KECIL	persentase Usaha Kecil sektor pariwisata yang mendapatkan Izin Usaha	1	KUMKM
				persentase Usaha Kecil sektor pariwisata yang mendapatkan Diseminasi dan pendampingan akses permodalan	0	KUMKM
		Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, ekonomi kreatif, peran serta masyarakat dan kelembagaan pariwisata	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KEJURUAN	Persentase SMK pariwisata Terkreditasi A	100	DINAS PENDIDIKAN
		Peningkatan infrastruktur, sarana dan prasarana pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata.	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	Presentase objek wisata yang terkelola	12%	BUDPAR
			PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	Persentase tingkat kunjungan wisatawan	6	BUDPAR
			PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN LAUT	Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasana Perhubungan Laut di lokasi wisata	30%	DISHUB
			PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN DARAT	Persentase pemenuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan darat dalam menunjang Daerah Tujuan Wisata	20%	DISHUB

NO	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019			
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target 2019	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
			PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di daerah pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata.	94,51%	DINAS PUPR
				Persentase Jembatan Provinsi dalam kondisi baik di daerah pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata.	86,00%	DINAS PUPR
			PROGRAM PENINGKATAN PUSAT PELAYANAN USAHA TERPADU KUKM	Pertumbuhan produk parekraf	10%	DINAS KUMKM
			PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase informasi berkaitan dengan pemasaran pariwisata yang dapat diakses masyarakat	25%	DISKOMINFO
		Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing kepariwisataan daerah	PROGRAM PENGEMBANGAN PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase peningkatan tenaga kerja pariwisata bersertifikat kompetensi	17,54	DISNAKER
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LATIHAN KERJA INDUSTRI	Persentase pencari kerja pariwisata yang mendapat pelatihan	0,15	UPD BLKI
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase peningkatan produksi per tenaga kerja bidang pariwisata	0,05	UPTD BALAI PRODUKTIVITAS
			PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KEJURUAN	Persentase Jumlah SMK Program Keahlian Pariwisata yang mengeluarkan sertifikat Profesi pihak 1 (LSP-P1)	33,33	DINDIK
			PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI	persentase peningkatan volume usaha koperasi disektor pariwisata	1%	KUMKM
		Peningkatan kualitas, partisipasi dan prestasi pemuda di berbagai bidang pembangunan, dan peningkatan pengelolaan ke olah raga serta mengembangkan peran serta	PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Pemuda Lintas Negara	6,67%	DISKEPORA

NO	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019			
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target 2019	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
		kebudayaan dalam mendukung pembangunan kepariwisataan				
			PROGRAM PENINGKATAN PEMBUDAYAAN DAN PENINGKATAN PRESTASI OLAH RAGA	Pertumbuhan Jumlah peserta yang mengikuti babel sport tourism	4,00%	DISKEPORA
			PROGRAM PENGEMBANGAN STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Presentase jumlah sarana dan prasaran olahraga yang terbangun dalam mendukung event olahraga regional dan nasional	16,67%	DISKEPORA
			PROGRAM PELESTARIAN BUDAYA	Persentase budaya lokal yang dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan dan dibina	14,87%	BUDPAR
		Pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja disektor pariwisata	PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN, PEMBINAAN HUB. INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL	persentase Jumlah perusahaan dibidang pariwisata yang diperiksa dan dibina sesuai standar pemeriksaan perusahaan	1,6	DISNAKER
		Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing kepariwisataan	PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN USAHA KECIL	Peningkatan produk Usaha kecil sektor pariwisata yang tersertifikasi	250	DINAS KUMKM
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBERDAYA, FASILITASI DAN AKSES INDUSTRI	Persentase Tenaga Kerja yang terserap di industri pariwisata	0,31%	DISPERINDAG
			PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH DAN PENGAWASAN INDUSTRI	Persentase industri yang memenuhi standar		DISPERINDAG
		Pengembangan pariwisata daerah, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antar sektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang	PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI BUMD, PENANAMAN MODAL, PARIWISATA DAN BUDAYA	Prosentase Jumlah Kebijakan BUMD, Penanaman Modal, Pariwisata dan Budaya yang di implementasikan	72	BIRO EKONOMI

NO	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019			
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target 2019	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
		berusaha dan investasi di bidang pariwisata.				
			PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Pertambahan Jumlah Profil Investasi Pariwisata yang digunakan untuk promosi investasi di sektor pariwisata		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
				Pertambahan Jumlah UKM pariwisata yang bermitra dengan investor	1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI PENANAMAN MODAL	Pertambahan Jumlah Investor Pariwisata	3	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DAN SISTEM INFORMASI	Persentase perusahaan yang sesuai realisasi investasi disektor pariwisata dengan rencana investasi	0,44%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Pengembangan Kawasan pelabuhan penyeberangan Tanjung Kalian	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN LAUT	Persentase pemenuhan sarana parasarana penunjang Pelabuhan Tanjung Kalian		DISHUB
			PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN DARAT	Persentase pemenuhan sarana parasarana perhubungan di Kawasan Strategis Tanjung Kalian		DISHUB
		Pengembangan Kawasan strategis Pelabuhan ASDP Manggar - Ketapang	PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	Persentase jumlah Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Strategis Provinsi (KSP) ASDP Manggar-Ketapang yang diimplementasikan		DINAS PUPR
			PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di kawasan strategis ASDP Manggar dan Ketapang	0%	DINAS PUPR
				Persentase Jembatan Provinsi dalam kondisi baik di Kawasan strategis Pelabuhan ASDP Manggar - Ketapang	0%	DINAS PUPR
			PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase pemenuhan sarana parasarana penunjang Pelabuhan ASDP Manggar - Ketapang		DISHUB



NO	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019			
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target 2019	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
			PERHUBUNGAN LAUT			
		Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Tanjung gunung dan kawasan lintas timur Pulau Bangka	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	persentase sarana dan prasarana Pariwisata di kawasan pariwisata Tanjung Gunung yang terbangun dan dikelola	32%	BUDPAR
				Persentase sarana dan prasarana pariwisata di kawasan Lintas Timur Pulau Bangka yang terbangun dan dikelola	32%	BUDPAR
			PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN DARAT	Persentase pemenuhan sarana parasarana penunjang Jalan Kawasan Peruntukan Pariwisata Tanjung gunung dan kawasan lintas timur Pulau Bangka	30%	DISHUB
			PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di kawasan Peruntukan Pariwisata Tanjung gunung dan kawasan lintas timur Pulau Bangka	95,44%	DINAS PUPR
		Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan ekonomi khusus (KEK) Tanjung kelayang	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN DARAT	Persentase pemenuhan sarana parasarana penunjang Jalan di dan menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Kelayang		DISHUB
			PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan ekonomi khusus (KEK) Tanjung kelayang	0%	PUPR
			PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	Persentase Jumlah Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Strategis Nasional (KSN) Pariwisata Tanjung Kelayang yang diimplementasikan	50	PUPR
			PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN DARAT	Persentase pemenuhan sarana parasarana penunjang perhubungan darat di Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang	25%	DISHUB
		Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan Kota Tua Mentok	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	Persentase sarana dan prasarana pariwisata di kawasan Kota Tua Muntok	32%	BUDPAR

NO	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019			
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target 2019	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
			PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di Kawasan Kota Tua Mentok	0%	PUPR
				Persentase Jembatan Provinsi dalam kondisi baik di Kawasan Kota Tua Mentok	0%	PUPR
			PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN DARAT	Persentase pemenuhan sarana parasarana penunjang perhubungan darat di Kawasan Kota Tua Muntok	20%	DISHUB
		Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan gunung Permisian Simpang Rimba	PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	Persentase jumlah Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan gunung Permisian Simpang Rimba yang diimplementasikan		PUPR
			PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN DARAT	Persentase pemenuhan sarana parasarana penunjang perhubungan darat di kawasan pariwisata gunung Permisian Simpang Rimba	20%	DISHUB
			PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di Kawasan pariwisata gunung Permisian Simpang Rimba		PUPR
		Pengembangan Kawasan peruntukan Pariwisata Museum Nasional Maritim Belitung	PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	Persentase Jumlah Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Pariwisata Museum Nasional Maritim Belitung yang diimplementasikan	25%	PUPR
			PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN DARAT	Persentase pemenuhan sarana parasarana penunjang perhubungan darat di Kawasan Pariwisata Museum Nasional Maritim Beltung	25%	DISHUB
			PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di Kawasan Pariwisata Museum Nasional Maritim Beltung	2%	PUPR
		Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Gunung Menumbing	PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	Persentase Tersedianya Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Pariwisata Gunung Menumbing yang di implementasikan		PUPR
			PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	Persentase sarana dan prasarana pariwisata di Kawasan Pariwisata Gunung Menumbing		BUDPAR

NO	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019			
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target 2019	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
			PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN DARAT	Persentase pemenuhan sarana parasarana penunjang perhubungan darat di Kawasan Pariwisata Gunung Menumbing	20%	DISHUB
			PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di Kawasan Pariwisata Gunung Menumbing		PUPR
		Pengembangan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan pulau sumatera	PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Sumatera	91,25%	DINAS PUPR
				Persentase Jembatan Provinsi dalam kondisi baik di kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Sumatera	82,00%	DINAS PUPR
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	Persentase panjang talud yang terbangun di kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Sumatera	5%	DINAS PUPR
				Persentase volume air baku yang tersedia dapat digunakan di kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Sumatera	5%	DINAS PUPR
			PROGRAM PENGELOLAAN RUANG LAUT	Persentase Usulan Pemanfaatan Ruang Laut yang terekomendasi sesuai dengan peruntukannya pada kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Sumatera	65,00%	DKP
			PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN LAUT	Persentase sarana dan prasarana perhubungan laut kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Sumatera		DISHUB
			PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP	Tersedianya Dokumen KLHS kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Sumatera yang digunakan untuk perencanaan kawasan		DLH
		Pengembangan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil	PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil	0%	DINAS PUPR
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	Persentase panjang talud yang terbangun di kawasan konektivitas	5%	DINAS PUPR

NO	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019			
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target 2019	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil		
				Persentase volume air baku yang tersedia dapat digunakan di kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil	5%	DINAS PUPR
			PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN LAUT	Persentase pulau-pulau berpenduduk yang terkoneksi kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil	30%	DISHUB

Upaya pencapaian target kinerja sasaran tahun 2019 untuk prioritas ini dilakukan juga melalui intervensi lintas sektor melibatkan para stakeholder secara menyeluruh dari berbagai sektor pembangunan guna meningkatkan manfaat dan daya ungkit pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat sebagaimana disajikan pada tabel IV.41.a berikut:

**Tabel IV.42.a**  
Stakeholder yang mendukung Prioritas Pengembangan Pariwisata

Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun	Strategi Yang Perlu Dukungan Stakeholder		Stakeholder
1	2	3	4	5	
1 Meningkatkan Kunjungan Wisatawan	1 jumlah kunjungan wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara)	389.009	1 Meningkatkan sinergisitas pembangunan lintas sektor dalam mengembangkan pembangunan pariwisata		PHRI, ASITA, Dewan Kerajinan, Forum Wirausaha Melayu, KADIN, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI)
			2 Mengembangkan kawasan pendukung pembangunan pariwisata		PHRI, ASITA, Dewan Kerajinan, Forum Wirausaha Melayu, KADIN, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Ikatan Konsultan Indonesia, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
			3 Pengembangan pulau-pulau kecil dan daerah perbatasan		PHRI, ASITA, Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), Himpunan Nelayan

Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun	Strategi Yang Perlu Dukungan Stakeholder	Stakeholder
1	2	3	4	5
				Seluruh Indonesia (HNSI), Ikatan Konsultan Indonesia, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi

#### 4.3.4. Pengembangan Tata Kelola Pertambangan

Sasaran yang ingin diwujudkan pada prioritas ini adalah Meningkatnya Produksi sektor pertambangan, Meningkatnya pembangunan berbasis industri dan Terwujudnya kemandirian energy. Selanjutnya sasaran, target sasaran, strategi dan arah kebijakan disajikan pada tabel IV.43 berikut:

**Tabel IV. 43**

Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Prioritas Pengembangan Tata Kelola Pertambangan

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Strategi dan Arah Kebijakan
1	2	3	4
1 Meningkatnya Produksi sektor pertambangan	1 Persentase Pertumbuhan Produksi sektor pertambangan dan penggalan	0.51	1 Meningkatkan hasil produksi pertambangan dan nilai tambah pertambangan yang berwawasan lingkungan
			a Peningkatan tata kelola dan nilai tambah produk sumber daya mineral;
			b Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing Produk Sumber daya mineral
			c Pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja sektor sumber daya mineral
			d Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing sektor sumber daya mineral
			e Pengembangan produk sumber daya mineral, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Strategi dan Arah Kebijakan
1	2	3	4
			dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di sektor sumber daya mineral
2 Meningkatkan pembangunan berbasis industri	Persentase Pertumbuhan Produksi sektor industri pengolahan	2	Mengembangkan Kawasan industri berbasis potensi daerah
		a	Mengembangkan Kawasan industri berbasis potensi daerah
		b	Pengembangan Kawasan Strategis Industri Terpadu Air Kelik (KIAK)
		c	Pengembangan Pelabuhan dan Kawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung Berikat
		d	Pengembangan Kawasan Strategis Industri Sadai
		e	Pengembangan Kawasan strategis Industri Terpadu di Teluk Klabat Belinyu
		f	Peningkatan Pembangunan Kawasan Industri
3 Terwujudnya kemandirian energi	Persentase Pertumbuhan Produksi sub sektor ketenagalistrikan	19.59	3 Meningkatkan produksi dan pasokan energi listrik daerah
		a	Pemenuhan Energi listrik untuk mendorong pengembangan industri berbasis potensi daerah serta peningkatan rasio elektrifikasi;

Upaya pencapaian target kinerja sasaran tahun 2019 untuk prioritas ini dilakukan melalui koordinasi beberapa Perangkat Daerah secara menyeluruh dari berbagai sektor pembangunan guna meningkatkan manfaat dan daya ungkit pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat dengan rencana program pembangunan dan target indikator kinerja program baik yang prioritas maupun program pendukung sebagaimana disajikan pada tabel IV.44 berikut:

**Tabel. IV. 44**

**Program Pembangunan Perangkat Daerah Yang Mendukung Pembangunan Lintas Bidang Pengembangan Tata Kelola Pertambangan**

Arah Kebijakan		Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
			Indikator (Outcome)	Target	
1	2	3	4	5	
1	Peningkatan tata kelola dan nilai tambah produk sumber daya mineral;	PROGRAM PENGEMBANGAN PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	Persentase Perusahaan pertambangan non logam yang menerapkan good mining practices	65%	DINAS ESDM
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM	Persentase Perusahaan pertambangan logam yang menerapkan good mining practices	60%	DINAS ESDM
		PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN GEOLOGI DAN AIR TANAH	Persentase cadangan Mineral bukan logam dan batuan yang potensial	33%	DINAS ESDM
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA, FASILITASI DAN AKSES INDUSTRI	Persentase Tenaga Kerja yang terserap di bidang industri turunan sumber daya mineral;		DISPERINDAG
			pertumbuhan industri turunaan Potensi Sumber Daya Mineral yang dikembangkan	4	DISPERINDAG
		PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH DAN PENGAWASAN INDUSTRI	Persentase industri yang memenuhi standar		DISPERINDAG
2	Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing Produk Sumber daya mineral	PROGRAM PENGEMBANGAN PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase peningkatan tenaga kerja sektor sumber daya mineral bersertifikat kompetensi	17.54	DISNAKER
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LATIHAN KERJA INDUSTRI	Persentase tenaga kerja bidang sumber daya mineral yang mendapat pelatihan pertambangan berkelanjutan	00.14	UPD BLKI
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase peningkatan produksi per tenaga kerja sektor sumber daya mineral	00.05	UPTD BALAI PRODUKTIFITAS
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LATIHAN PERKOPERASIAN, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	Persentase SDM Koperasi sektor sumber daya mineral terlatih	2.06%	UPTD BALAI LATIHAN PERKOPERASIAN, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
			Persentase SDM Usaha Kecil sektor sumber daya mineral terlatih	0.18%	UPTD BALAI LATIHAN PERKOPERASIAN, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
		PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN USAHA KECIL	persentase Usaha Kecil sektor pertambangan yang mendapatkan Izin Usaha	0	DINAS UMKM
			persentase Usaha Kecil sektor pertambangan yang difasilitasi promosi/ pemasaran produknya	0	DINAS UMKM

Arah Kebijakan		Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
			Indikator (Outcome)	Target	
1	2	3	4	5	
			melalui even pameran		
			persentase Usaha kecil sektor pertambangan yang difasilitasi promosi/ pemasaran produknya melalui web	2	DINAS UMKM
			persentase Usaha Kecil sektor pertambangan yang mendapatkan Diseminasi dan pendampingan akses permodalan	0	DINAS UMKM
3	Pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja sektor sumber daya mineral	PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN, PEMBINAAN HUB. INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase perusahaan sumber daya mineral yang diperiksa dan dibina sesuai standar pemeriksaan perusahaan	04.08	DISNAKER
4	Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing sektor sumber daya mineral	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS SERTIFIKASI DAN PENGENDALIAN MUTU PRODUK	Persentase produk sumber daya mineral yang disertifikasi	00.07	UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PENGENDALIAN MUTU
5	Pengembangan produk sumber daya mineral, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di sektor sumber daya mineral	PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI KEBIJAKAN SUMBER DAYA ALAM	Prosentase Jumlah Kebijakan pembangunan Sumber Daya Mineral yang diimplementasikan	72	BIRO EKONOMI
		PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Pertambahan Jumlah profil investasi sumber daya mineral yang digunakan untuk promosi investasi disektor sumber daya mineral	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI PENANAMAN MODAL	Pertambahan jumlah investor sumber daya mineral	3	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DAN SISTEM INFORMASI	Presentase perusahaan sumber daya mineral yang sesuai realisasi investasi dengan rencana investasi	0.44%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	Presentase ketepatan waktu penerbitan perizinan sumber daya mineral	79%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
6	Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular	PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	Persentase Tersedianya Lahan bersertifikat untuk kepentingan di kawasan industri dan pelabuhan	50	DINAS PUPR



Arah Kebijakan		Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
			Indikator (Outcome)	Target	
1	2	3	4	5	
			terpadu Tanjung Ular		
			Persentase Jumlah Regulasi Penataan Ruang di kawasan industri dan pelabuhan terpadu Tanjung Ular	1.000.000.000	DINAS PUPR
		PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di kawasan industri dan pelabuhan Tanjung ular	0%	DINAS PUPR
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	Persentase panjang talud yang terbangun di kawasan industri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular	5%	DINAS PUPR
		PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH DAN PENGAWASAN INDUSTRI	Pertumbuhan Jumlah Industri di kawasan Industri Terpadu (KIPT) Tanjung Ular	1	DISPERINDAG
		PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN LAUT	Prosentase sarana dan prasana perhubungan laut Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular yang terbangun serta digunakan	30%	DISHUB
7	Pengembangan Kawasan Strategis Industri Terpadu Air Kelik (KIAK)	PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di kawasan strategis industri terpadu air kelik	0%	DINAS PUPR
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	Persentase panjang talud yang terbangun di kawasan strategis industri terpadu air kelik	5%	DINAS PUPR
			Persentase penyediaan volume air baku di kawasan strategis industri terpadu air kelik	5%	DINAS PUPR
8	Pengembangan Pelabuhan dan Kawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung Berikat	PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di Kawasan strategis Ekonomi khusus Tanjung Berikat	90.78%	DINAS PUPR
			Persentase Jembatan Provinsi dalam kondisi baik di Kawasan strategis Ekonomi khusus Tanjung Berikat	87.00%	DINAS PUPR
		PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA HUTAN	Presentase luas areal kawasan hutan yang dikelola didi Kawasan strategis Ekonomi khusus Tanjung Berikat		DINAS KEHUTANAAN
		PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP	Tersedianya Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Kawasan Industri dan pelabuhan Terpadu Tanjung Berikat yang digunakan dalam perencanaan kawasan	Ada	DLH
		PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN LAUT	Prosentase pemenuhan Sarana dan Prasarana pendukung Perhubungan Laut di Kawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung	20%	DISHUB

Arah Kebijakan		Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
			Indikator (Outcome)	Target	
1	2	3	4	5	
			Berikat		
		PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN DARAT	Prosentase pemenuhan Sarana dan Prasarana pendukung Perhubungan Darat menuju Kawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung Berikat	25%	DISHUB
		PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	Persentase jumlah Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Industri dan pelabuhan Terpadu Tanjung Berikat yang diimplementasikan	100%	DINAS PUPR
9	Pengembangan Kawasan Strategis Industri Sadai	PROGRAM KEBINAMARGAAN	Presentase panjang jalan dalam kondisi mantap di kawasan strategis industri sadai	0%	DINAS PUPR
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	Persentase panjang talud yang terbangun di kawasan Strategis Industri Sadai	5%	DINAS PUPR
			Persentase penyediaan volume air baku di kawasan Strategis Industri Sadai	5%	DINAS PUPR
		PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN LAUT	Prosentase peningkatan sarana dan prasana perhubungan laut Kawasan Strategis Industri Sadai		DISHUB
		PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	Persentase Tersedianya Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Strategis Provinsi (KSP) KIPT Sadai	100%	DINAS PUPR
		PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH DAN PENGAWASAN INDUSTRI	Pertumbuhan Jumlah Industri di kawasan strategis Industri Sadai	1	DISPERINDAG
		PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP	Tersedianya Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi KIPT Sadai yang digunakan untuk perencanaan kawasan	Ada	DLH
		PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Panjang jalan provinsi menuju dan dikawasan Strategis Industri Perikanaan Terpadu Teluk Klabat Belinyu dalam kondisi mantap	89.36%	DINAS PUPR
		PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN BUDIDAYA DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	Pertumbuhan Volume Produksi Olahan dikawasan Strategis Industri Perikanaan Terpadu Teluk Klabat (Ton)	120	DKP
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap dikawasan Strategis Industri Perikanaan Terpadu Teluk Klabat	2,75	DKP
		PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN PENAWASAN KOPERASI	Persentase koperasi aktif di kawasan strategis Teluk Kelabat Belinyu	1%	DINAS KUMKM
		PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN USAHA	persentase Usaha Kecil dikawasan Sentra Teluk	10%	DINAS KUMKM

Arah Kebijakan		Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
			Indikator (Outcome)	Target	
1	2	3	4	5	
		KECIL	Kelabat Belinyu yang mendapatkan Izin Usaha		
			persentase Usaha Kecil dikawasan Sentra Teluk Kelabat Belinyu yang mendapatkan Diseminasi dan pendampingan akses permodalan	1%	DINAS KUMKM
		PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH DAN PENGAWASAN INDUSTRI	Pertumbuhan Jumlah Industri di kawasan strategis Industri Perikanaan Terpadu di Teluk Klabat Belinyu	1	DISPERINDAG
		PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	Persentase Tersedianya Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Pelabuhan dan Industri Teluk Kelabat	100%	DINAS PUPR
		PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP	Tersedianya Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi pelabuhan dan Industri Teluk Kelabat yang digunakan untuk perencanaan kawasan	Ada	DLH
10	Peningkatan Pembangunan Kawasan Industri	PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH DAN PENGAWASAN INDUSTRI	Pertumbuhan Industri/Sentra/Kawasan Industri		DISPERINDAG
11	Pemenuhan Energi listrik untuk mendorong pengembangan industri berbasis potensi daerah serta peningkatan rasio elektrifikasi;	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ENERGI	Persentase penggunaan EBT	6.83%	ESDM
			Persentase perusahaan yang Pendistribusian Minyak dan Gas sesuai standar	60%	ESDM
			Persentase perusahaan di bidang ketenagalistrikan yang sesuai standar yang diinginkan	60%	ESDM

Upaya pencapaian target kinerja sasaran tahun 2019 untuk prioritas ini dilakukan juga melalui intervensi lintas sektor melibatkan para stakeholder secara menyeluruh dari berbagai sektor pembangunan guna meningkatkan manfaat dan daya ungkit pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat sebagaimana disajikan pada tabel IV.44.a berikut:

**Tabel IV.44.a**

Stakeholder yang mendukung Prioritas Pengembangan Tata Kelola Pertambangan

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Strategi Yang Perlu Dukungan Stakeholder	Stakeholder
1	2	3	4	5
1 Meningkatnya Produksi sektor pertambangan	Persentase Pertumbuhan Produksi sektor pertambangan dan penggalan	0.51	1 Meningkatkan hasil produksi pertambangan dan nilai tambah pertambangan yang berwawasan lingkungan	PT. Timah, Pengusaha Pertambangan, Asosiasi Tambang Timah Rakyat (ASTAMITRA), KADIN

**4.3.5. Peningkatan Pendapatan Pemerintah daerah**

Sasaran yang ingin diwujudkan pada prioritas ini adalah Meningkatnya belanja pemerintah Daerah. Selanjutnya sasaran, target sasaran, strategi dan arah kebijakan disajikan pada tabel IV.45 berikut:

**Tabel IV.45**

Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Lintas Bidang Peningkatan Pendapatan Pemerintah daerah

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Strategi dan Arah Kebijakan
1	2	3	4
1 Meningkatnya belanja pemerintah Daerah	1 Persentase pertumbuhan pengeluaran pemerintah daerah	5.65	1 Meningkatkan pendapatan asli daerah  a Peningkatan potensi penggalan sumber-sumber Pendapatan asli daerah untuk pemanfaatan sebesar besarnya bagi kemakmuran masyarakat.

Upaya pencapaian target kinerja sasaran tahun 2019 untuk prioritas ini dilakukan melalui koordinasi beberapa Perangkat Daerah secara menyeluruh dari berbagai sektor pembangunan guna meningkatkan manfaat dan daya ungkit pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat dengan rencana program pembangunan dan target indikator kinerja program baik yang prioritas maupun program pendukung sebagaimana disajikan pada tabel IV.46 berikut:

**Tabel. IV.46**

**Program Pembangunan Perangkat Daerah Yang Mendukung Pembangunan Lintas Bidang  
Peningkatan Pendapatan Pemerintah daerah**

Arah Kebijakan		Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
			Indikator (Outcome)	Target	
1		2	3	4	5
1	Peningkatan potensi penggalan sumber-sumber Pedapatan asli daerah untuk pemanfaatan sebesar besarnya bagi kemakmuran masyarakat.	PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA PENDAPATAN PAJAK DAERAH	Prosentase kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Daerah	24.19%	BAKUDA
		PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH DAN PENDAPATAN LAIN LAIN YANG SAH	Prosentase kontribusi retribusi daerah dan pendapatan lain-lain terhadap pendapatan asli daerah	75.81%	BAKUDA
		PROGRAM PENGEMBANGAN PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pertumbuhan pendapatan asli daerah dari tenaga kerja Asing	150%	DISNAKER
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN	Persentase Pertumbuhan pendapatan asli daerah dari Lab lingkungan	1%	DLH
		PROGRAM PELAYANAN TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN	Persentase Pertumbuhan pendapatan asli daerah dari Lab Kesehatan	100%	DINKES
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ASN	Persentase kontribusi penyelenggaraan diklat terhadap Retribusi Daerah	15.54%	BKPSDM
		PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	Persentase Pertumbuhan pendapatan asli daerah dari peralatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	20%	PUPR
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PERALATAN	Persentase Pertumbuhan pendapatan asli daerah dari Lab Pengujian Bina Marga	20%	UPTD PENGAWASAN DAN PERALATAN BELITUNG
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM	Pertambahan Jumlah DBH (Dana Bagi Hasil) SDA (Sumber Daya Alam) Mineral Logam	80 Miliar	DINAS ESDM
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ENERGI	Pertambahan Jumlah lifting MIGAS Babel	440 Ribu Barel	DINAS ESDM
		PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN GEOLOGI DAN AIR TANAH	Persentase pertumbuhan pendapatan Daerah dari retribusi pergantian biaya cetak peta	1,7 Miliar	DINAS ESDM
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	Pertambahan pendapatan asli daerah dari layanan fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) (Juta Rupiah)	420 juta	DKP
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PEMBENIHAN IKAN AIR PAYAU	Pertambahan Jumlah pendapatan dari layanan fungsi produksi dan penanganan hama dan penyakit (Juta Rupiah)	26,25 juta	UPTD BALAI BENIH IKAN AIR PAYAU (BBIAP) TANJUNG KRASAK

Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
		Indikator (Outcome)	Target	
1	2	3	4	5
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PEMBENIHAN IKAN LAUT	Pertambahan Jumlah pendapatan dari layanan fungsi produksi dan penanganan hama dan penyakit (Juta Rupiah)	165 juta	UPTD BALAI BENIH IKAN LAUT (BBIL) TANJUNG RUSA
	PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN, OPRASIONAL DAN KEBANDARUDARAAN	Prosentase pertambahan pendapatan dari pengelolaan perhubungan udara	20%	DISHUB

Upaya pencapaian target kinerja sasaran tahun 2019 untuk prioritas ini dilakukan juga melalui intervensi lintas sektor melibatkan para stakeholder secara menyeluruh dari berbagai sektor pembangunan guna meningkatkan manfaat dan daya ungkit pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat sebagaimana disajikan pada tabel IV.46.a berikut:

**Tabel. IV.46.a**

Stakeholder Yang Mendukung Pembangunan Lintas Bidang Peningkatan Pendapatan Pemerintah daerah

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Strategi Yang Perlu Dukungan Stakeholder	Stakeholder
1	2	3	4	
1 Meningkatnya belanja pemerintah Daerah	Persentase pertumbuhan pengeluaran pemerintah daerah	5.65	Meningkatkan pendapatan asli daerah	Lembaga Swadaya MasyarakatForum Kajian Kebijakan Pemerintah daerah, KADIN, Kepolisian, Dunia Usaha

#### 4.3.6. Peningkatan Ekonomi Masyarakat

Sasaran yang ingin diwujudkan pada prioritas ini adalah Menurunnya angka Pengangguran, Menurunnya angka kemiskinan, Menurunnya angka Inflasi dan Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk. Selanjutnya sasaran, target sasaran, strategi dan arah kebijakan disajikan pada tabel IV.47 berikut:

**Tabel IV. 47**  
**Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Lintas Bidang**  
**Peningkatan Ekonomi Masyarakat**

Sasaran		Indikator Sasaran	Tahun	Strategi dan Arah Kebijakan	
1		2	3	4	
1	Menurunnya angka Pengangguran	1 Persentase Angka Pengangguran	5.6	1	Meningkatkan pembangunan yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan
				a	Penciptaan peluang kesempatan kerja bagi pencari kerja
				b	Peningkatan kualitas hidup dan peran serta perempuan
2	Menurunnya angka kemiskinan	2 Persentase Angka Kemiskinan	5.15	2	Penanggulangan kemiskinan diarahkan pada penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar penduduk miskin secara bertahap dengan mengutamakan prinsip demokrasi, partisipasi, kesetaraan dan non diskriminasi serta peningkatan pendapatan penduduk miskin dan pengendalian tingkat harga komoditas pangan dan non pangan dalam menurunkan angka kemiskinan.
				a	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin
				b	Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin
3	Menurunnya angka Inflasi	3 Angka Inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	6.31	3	Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap komoditas penyumbang inflasi
				a	Pengendalian Tingkat harga-harga komoditas penyumbang inflasi
				b	Mengurangi ketergantungan pasokan dari luar terhadap komoditas penyumbang inflasi
4	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	4 Laju pertumbuhan penduduk	2,09	4	Mengendalikan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk

Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun	Strategi dan Arah Kebijakan
1	2	3	4
			a Pengendalian tingkat kelahiran penduduk dan perpindahan penduduk untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang

Upaya pencapaian target kinerja sasaran tahun 2019 untuk prioritas ini dilakukan melalui koordinasi beberapa Perangkat Daerah secara menyeluruh dari berbagai sektor pembangunan guna meningkatkan manfaat dan daya ungkit pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat dengan rencana program pembangunan dan target indikator kinerja program baik yang prioritas maupun program pendukung sebagaimana disajikan pada tabel IV.48 berikut:

**Tabel. IV.48**  
Program Pembangunan Daerah Yang Mendukung Pembangunan Lintas Bidang  
Peningkatan Ekonomi Masyarakat

NO	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019			
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target 2019	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
3	PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT	Penciptaan peluang kesempatan kerja bagi pencari kerja	PROGRAM PENGEMBANGAN PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	17,14	DISNAKER
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA, FASILITASI DAN AKSES INDUSTRI	Persentase Tenaga Kerja Industri terhadap total tenaga kerja (%)	5,17%	DISPERINDAG
			PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA	Persentase pemuda yang bekerja	10,20%	DISKEPORA
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase penduduk yang bekerja di sektor perikanan tangkap	6,82%	DISKEPORA
			PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN BUDIDAYA DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	Persentase penduduk yang bekerja di sektor perikanan budidaya dan Usaha Pengolahan & Pemasaran	1,14%	DKP
			PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase jumlah informasi berkaitan dengan penciptaan lapangan pekerjaan yang diakses oleh pencari kerja	25%	DISKOMINFO
			PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase panjang jalan dan jembatan yang dapat dilewati dengan lancar dikerjakan dengan pendekatan padat karya	94,51%	DINAS PUPR



NO	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019			
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target 2019	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	Persentase panjang jaringan irigasi yang dapat dilalui air dengan lancar dilakukan dengan pendekatan padat karya	12%	DINAS PUPR
			PROGRAM PEINGKATAN PEMBERDAYAAN USAHA KECIL	Persentase wirausaha	15%	DINAS KUMKM
			PROGRAM PENGEMBANGAN PENDAYAGUNAAN SDA, TEKNOLOGI TEPAT GUNA DAN PELATIHAN MASYARAKAT	Pertambahan Jumlah Masyarakat Desa yang terlatih dalam Kewirausahaan	100 Orang	DINAS PMD
				Persentase KPM yang aktif	3,24	DINAS PMD
		Peningkatan kualitas hidup dan peran serta perempuan	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN	Persentase perempuan yang bekerja	7,73	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
		Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin	PROGRAM PENANGANAN FARKIR MISKIN	Persentase PMKS yang mendapatkan Bantuan Beras Sejahtera	19,64	DINSOS
			PROGRAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN	Persentase peningkatan kuantitas dan kualitas rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin	22,51	DINAS PRKP
			PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH ATAS	Persentase Siswa SMA miskin yang mendapatkan beasiswa miskin	100	DINAS PENDIDIKAN
			PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KEJURUAN	Persentase siswa SMK miskin yang mendapatkan beasiswa miskin	100	DINAS PENDIDIKAN
			PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN	Persentase kepesertaan JKN	92	DINAS KESEHATAN
			PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Masyarakat Miskin yang mendapat bantuan Pangan dan Gizi	72,07%	DINAS KESEHATAN
		Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN	Persentase Kepala Keluarga perempuan miskin yang diberdayakan	9,47	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
			PROGRAM PENANGANAN FARKIR MISKIN	Persentase PMKS (farkir miskin) yang mendapatkan Bantuan Usaha	18,15	DINSOS
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN	Persentase rumah tangga miskin yang bekerja disektor perdagangan	10%	DISPERINDAG
				Persentase Pemantauan dan Pengawasan distribusi dan ketersediaan barang		DISPERINDAG

NO	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019			
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target 2019	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				kebutuhan pokok dan barang penting (18 bahan Pokok)		
			PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase informasi berkaitan dengan penanggulangan Kemiskinan yang dapat diakses oleh masyarakat	25%	DISKOMONFO
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I	10,08	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
			PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN, PEMBINAAN HUB. INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL	Pertumbuhan kenaikan upah tenaga kerja		DISNAKER
				persentase penyelesaian kasus tenaga kerja	65%	DISNAKER
				persentase penurunan kecelakaan kerja	0,32	DISNAKER
		Pengendalian Tingkat harga-harga komoditas penyumbang inflasi	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN KEMETROLOGIAN	Persentase jumlah Barang Beredar, Jasa dan Tertib Niaga yang diawasi sesuai standar (112 barang SNI wajib; 140 pelaku usaha Tertib Niaga)	14	DISPERINDAG
				Indeks Keberdayaan Konsumen (0 - 20 = Tahu; 21 - 40 = Paham)	22	DISPERINDAG
				Persentase jumlah Standarisasi Lab. Kemetrollogian yang memenuhi standar	20	DISPERINDAG
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN	Persentase Pertumbuhan jumlah volume ekspor (ton)	862	DISPERINDAG
				Persentase jumlah barang kebutuhan pokok dan barang penting (18 bahan pokok) yang tersedia setiap waktu	83	DISPERINDAG
				Persentase peningkatan sarana dan prasarana perdagangan yang dibangun dan dimanfaatkan	63	DISPERINDAG
				Persentase Pertumbuhan nilai omzet yang memanfaatkan resi gudang	20	DISPERINDAG
				Pertumbuhan komoditi yang terjual melalui Pasar Lelang	1	DISPERINDAG
			PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI	Persentase rekomendasi komoditas penyumbang inflasi yang paling tinggi	100%	BIRO EKONOMI

NO	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019			
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target 2019	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
			KEBIJAKAN PEREKONOMIAN	dengan intervensi program/kebijakan		
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN LAUT	Prosentase infrastruktur perhubungan laut dalam kondisi baik terhadap kondisi optimal	20%	DINAS PERHUBUNGAN
			PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Panjang jalan dan jembatan yang dapat dilewati dengan lancar yang menuju pusat-pusat distribusi komoditas penyumbang inflasi	94,51%	DINAS PUPR
		Mengurangi ketergantungan pasokan dari luar terhadap komoditas penyumbang inflasi	PROGRAM PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	Pertambahan jumlah volume produksi komoditas cabai besar	2.813,28	DINAS PERTANIAN
				Pertambahan jumlah volume produksi komoditas cabai rawit	2.651,13	DINAS PERTANIAN
				Pertambahan jumlah volume produksi komoditas bawang merah	98,11	DINAS PERTANIAN
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase kontribusi komoditas ikan dalam menyumbang inflasi	22,22	DINAS KELAUTAN PERIKANAN
			PROGRAM PENGEMBANGAN DISTRIBUSI, STABILITAS, DAN CADANGAN PANGAN	Koefisien varian harga pangan strategis di tingkat produsen dan konsumen	CV Beras $\leq 5\%$	DINAS PANGAN
					CV Cabe $\leq 35\%$	DINAS PANGAN
					CV Daging Ayam 10%	DINAS PANGAN
		Pengendalian tingkat kelahiran penduduk dan perpindahan penduduk untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang	PROGRAM PENGADMINISTRASIAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	Persentase jumlah masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mempunyai KTP	N.A	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
				Persentase jumlah masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sudah meninggal yang memiliki akte kematian	N.A	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
			PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Persentase unmeet need	7,48	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
			PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN	Persentase grand design kependudukan se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN

NO	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019			
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target 2019	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
			PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			PENDUDUK KB
				presentase KB MKJP	8,9	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB

Upaya pencapaian target kinerja sasaran tahun 2019 untuk prioritas ini dilakukan juga melalui intervensi lintas sektor melibatkan para stakeholder secara menyeluruh dari berbagai sektor pembangunan guna meningkatkan manfaat dan daya ungkit pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat sebagaimana disajikan pada tabel IV.48.a berikut:

**Tabel. IV.48.a**  
Stakeholder Yang Mendukung Pembangunan Lintas Bidang  
Peningkatan Ekonomi Masyarakat

Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun	Strategi Yang Perlu Dukungan Stakeholder	Stakeholder
1	2	3	4	5
1 Menurunnya angka Pengangguran	1 Persentase Angka Pengangguran	5.6	1 Meningkatkan pembangunan yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan	KADIN, Dunia Usaha, Persatuan Wartawan Indonesia (PW)
2 Menurunnya angka kemiskinan	2 Persentase Angka Kemiskinan	5.15	2 Penanggulangan kemiskinan diarahkan pada penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar penduduk miskin secara bertahap dengan mengutamakan prinsip demokrasi, partisipasi, kesetaraan dan non diskriminasi serta peningkatan pendapatan penduduk miskin dan pengendalian tingkat harga komoditas pangan dan non pangan dalam menurunkan angka kemiskinan.	Lembaga Swadaya Masyarakat, Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS), Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)

Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun	Strategi Yang Perlu Dukungan Stakeholder	Stakeholder
1	2	3	4	5
3 Menurunnya angka Inflasi	3 Angka Inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	6,31	3 Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap komoditas penyumbang inflasi	Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen, KADIN
4 Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	4 Laju pertumbuhan penduduk	2,09	4 Mengendalikan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk	Yayasan Babel peduli Dukungan Sebaya, Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI)

#### 4.3.7. Pembangunan Konektivitas dan Infrastruktur

Sasaran yang ingin diwujudkan pada prioritas ini adalah Meningkatkan pemenuhan infrastruktur pengembangan potensi daerah, Meningkatnya konektivitas antar wilayah. Selanjutnya sasaran, target sasaran, strategi dan arah kebijakan disajikan pada tabel IV.49 berikut:

**Tabel IV. 49**  
Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Lintas Bidang  
Pembangunan Konektivitas dan Infrastruktur

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Strategi
1	2	3	4
1 Meningkatkan pemenuhan infrastruktur pengembangan potensi daerah	1 Terbangunnya Daerah irigasi (ha)	1.135	1 Meningkatkan ketersediaan dan keberfungsian infrastruktur pertanian
			a Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan jaringan irigasi serta cetak sawah pertanian yang modern
	2 Ketersediaan air baku (m3)	N,A	2 Meningkatkan ketersediaan dan keberfungsian infrastruktur air baku
			a Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur air baku
	3 Persentase lingkungan yang tertata	34%	3 Meningkatkan ketersediaan jalan lingkungan yang layak bagi masyarakat
			a Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Strategi
1	2	3	4
			infrastruktur dasar yang layak bagi masyarakat
	4 Persentase bangunan yang tertata	38%	4 Meningkatkan penataan kawasan permukiman
			a Peningkatan penataan permukiman pada kawasan strategis Provinsi
	5 Persentase Desa yang Terlayani Jaringan Telekomunikasi	85%	5 Meningkatkan ketersediaan pelayanan jaringan telekomunikasi bagi masyarakat
			a Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi bagi masyarakat
2 Meningkatnya konektivitas antar wilayah	1 Persentase kunjungan kapal di pelabuhan laut	0,17%	6 Meningkatkan dan mengembangkan konektivitas perhubungan laut
			a Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan pelabuhan serta sarana prasarana pendukung pelabuhan
	2 Persentase armada pengangkutan	0,34%	7 Meningkatkan dan mengembangkan konektivitas perhubungan darat
			a Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan terminal serta sarana prasarana pendukung terminal
	3 Persentase jalan kondisi mantap	94.50	8 Meningkatkan aksesibilitas
			a Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan jalan dan jembatan

Upaya pencapaian target kinerja sasaran tahun 2019 untuk prioritas ini dilakukan melalui koordinasi beberapa Perangkat Daerah secara menyeluruh dari berbagai sektor pembangunan guna meningkatkan manfaat dan daya ungkit pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat dengan rencana program pembangunan dan target indikator kinerja program baik yang prioritas maupun program pendukung sebagaimana disajikan pada tabel IV.50 berikut:

**Tabel. IV.50**  
Program Pembangunan Daerah Yang Mendukung Pembangunan Lintas Bidang  
Pengembangan Konektivitas dan Infrastruktur

NO	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019			
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target 2019	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
4	PENGEMBANGAN KONEKTIVITAS DAN INFRASTRUKTUR	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan jaringan irigasi serta cetak sawah pertanian yang modern	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	Persentase luas jaringan irigasi yang berfungsi	55%	DINAS PUPR
			PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	Persentase kesesuaian lokasi cetak sawah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP)	50	DINAS PUPR
		Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur air baku	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	Pertumbuhan volume air baku	10%	DINAS PUPR
		Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur dasar yang layak bagi masyarakat	PROGRAM KECIPTAKARYAAN DAN PERMUKIMAN	Persentase peningkatan aksesibilitas Kawasan permukiman	33%	DINAS PRKP
				Persentase peningkatan aksesibilitas di Kawasan permukiman kumuh Provinsi	26%	DINAS PRKP
		Peningkatan penataan permukiman pada kawasan strategis Provinsi	PROGRAM KECIPTAKARYAAN DAN PERMUKIMAN	Prosentase peningkatan kualitas pengelolaan Bangunan Gedung Dan Lingkungan	25%	DINAS PRKP
		Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi bagi masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI	Persentase dana pendamping desa yang terlayani jaringan Internet	66%	KOMINFO
		Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan pelabuhan serta sarana prasarana pendukung pelabuhan	PROGRAM PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN LAUT	Persentase Jumlah pulau yang memiliki pelabuhan/dermaga yang layak	17%	DINAS PERHUBUNGAN
		Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan terminal serta	PROGRAM PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN DARAT	Persentase desa yang terlayani oleh angkutan perintis lintas kabupaten dalam provinsi		DINAS PERHUBUNGAN

NO	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019			
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target 2019	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
		sarana prasarana pendukung terminal				
			PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN, OPERASIONAL DAN KEBANDARUDARAAN	Persentase sarana dan prasarana fasilitas bandara kewenangan provinsi yang tersedia dan beroperasi	10%	DISHUB
		Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan jalan dan jembatan	PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase jalan provinsi diluar kawasan Strategis Provinsi dan Prioritas Propinsi dalam kondisi mantap		DINAS PUPR

Upaya pencapaian target kinerja sasaran tahun 2019 untuk prioritas ini dilakukan juga melalui intervensi lintas sektor melibatkan para stakeholder secara menyeluruh dari berbagai sektor pembangunan guna meningkatkan manfaat dan daya ungkit pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat sebagaimana disajikan pada tabel IV.50.a berikut:

**Tabel. IV.50.a**  
Stakeholder Yang Mendukung Pembangunan Lintas Bidang Pengembangan Konektivitas dan Infrastruktur

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Strategi Yang perlu Dukungan Stakeholder		Stakeholder
1	2	3	4	5	
Meningkatkan pemenuhan infrastruktur pengembangan potensi daerah	1 Terbangunnya Daerah irigasi (ha)	1.135	1 Meningkatkan ketersediaan dan keberfungsian infrastruktur pertanian		Ikatan Konsultan Indonesia, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, LPJK, Kelompok TANI
	2 Ketersediaan air baku (m3)	N/A	2 Meningkatkan ketersediaan dan keberfungsian infrastruktur air baku		Ikatan Konsultan Indonesia, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, LPJK, PDAM
	3 Persentase lingkungan yang tertata	34%	3 Meningkatkan ketersediaan jalan lingkungan yang layak bagi masyarakat		Ikatan Konsultan Indonesia, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, LPJK
	4 Persentase bangunan yang tertata	38%	4 Meningkatkan penataan kawasan permukiman		Ikatan Konsultan Indonesia, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, LPJK



Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Strategi Yang perlu Dukungan Stakeholder		Stakeholder
1	2	3	4	5	
2 Meningkatnya konektivitas antar wilayah	5 Persentase Desa yang Terlayani Jaringan Telekomunikasi	85%	5 Meningkatkan ketersediaan pelayanan jaringan telekomunikasi bagi masyarakat		Provider Telokomunikasi, Balai Loka Monitor
	1 Persentase kunjungan kapal di pelabuhan laut	0,17%	6 Meningkatkan dan mengembangkan konektivitas perhubungan laut		PELINDO, Perusahaan Perkapalan
	2 Persentase armada pengangkutan	0,34%	7 Meningkatkan dan mengembangkan konektivitas perhubungan darat		Organda
	3 Persentase jalan kondisi mantap	94.50	8 Meningkatkan aksesibilitas		Ikatan Konsultan Indonesia, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, LPJK

#### 4.3.8. Pembangunan Pendidikan

Sasaran yang ingin diwujudkan pada prioritas ini adalah Meningkatkan kesempatan pendidikan bagi masyarakat. Selanjutnya sasaran, target sasaran, strategi dan arah kebijakan disajikan pada tabel IV.51 berikut:

**Tabel IV. 51**  
Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Lintas Bidang  
Pembangunan Pendidikan

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Strategi dan Arah Kebijakan
1	2	3	4
Meningkatnya kesempatan pendidikan bagi masyarakat	Angka harapan lama sekolah , (Angka harapan lama sekolah laki-laki, Angka harapan lama sekolah perempuan)	11,89; L: 12,37; P:12,46	1. Meningkatkan partisipasi sekolah masyarakat dengan arah kebijakan peningkatan akses pelayanan pendidikan
			2. Meningkatkan Kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat dengan arah kebijakan sebagai berikut :
			a. Peningkatan mutu layanan pendidikan.
			b. Peningkatan relevansi pendidikan vokasi dalam mendukung pembangunan

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Strategi dan Arah Kebijakan
1	2	3	4
			ekonomi berbasis potensi lokal
			c. Peningkatan Pembangunan kultur masyarakat yang bertaqwa dan bermoral

Upaya pencapaian target kinerja sasaran tahun 2019 untuk prioritas ini dilakukan melalui koordinasi beberapa Perangkat Daerah secara menyeluruh dari berbagai sektor pembangunan guna meningkatkan manfaat dan daya ungkit pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat dengan rencana program pembangunan dan target indikator kinerja program baik yang prioritas maupun program pendukung sebagaimana disajikan pada tabel IV.52 berikut:

**Tabel. IV.52**  
Program Pembangunan Daerah Yang Mendukung Pembangunan Lintas Bidang  
Pembangunan Pendidikan

No	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
			Indikator (out come)	Target	
	1	2	3	4	5
1	peningkatan akses pelayanan pendidikan	PROGRAM PENINGKATAN DAN PEGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH ATAS	APK SMA	38,88%	DINAS PENDIDIKAN
		PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KEJURUAN	APK SMK	38,38%	DINAS PENDIDIKAN
		PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KHUSUS	APK SLB		DINAS PENDIDIKAN
		PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN KUANTITAS DAN KUALITAS GURU SERTA TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru Berkualifikasi S1/D4	97%	DINAS PENDIDIKAN
			Persentase Guru Bersertifikat Pendidik	40%	DINAS PENDIDIKAN
			Persentase guru dengan nilai rata-rata uji kompetensi diatas 50	90%	DINAS PENDIDIKAN
		PROGRAM PENINGKATAN DAN PEGEMBANGAN	Persentase SMA terakreditasi A	42,42%	DINAS PENDIDIKAN

No	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
			Indikator (out come)	Target	
	1	2	3	4	5
		PELAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH ATAS			
			Rata-rata nilai UN SMA	6,5	DINAS PENDIDIKAN
		PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KEJURUAN	Persentase SMK terakreditasi A	38,60%	DINAS PENDIDIKAN
			Rata-rata nilai UN SMK	6,5	DINAS PENDIDIKAN
		PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KHUSUS	Persentase SLB terakreditasi A	100%	DINAS PENDIDIKAN
		PROGRAM PENINGKATAN PEMBUDAYAAN DAN PENINGKATAN PRESTASI OLAH RAGA	Persentase Atlet pelajar Berprestasi yang dibina ditingkat provinsi yang memperoleh medali	5,08%	DISKEPORA
		PROGRAM PENINGKATAN PEMBUDAYAAN DAN PENINGKATAN PRESTASI OLAH RAGA	Persentase Insan Olahraga yang berprestasi	5,08%	DISKEPORA
		PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA	Persentase Pemuda Berprestasi	22,87%	DISKEPORA
2	peningkatan mutu layanan pendidikan.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PERPUSTAKAAN	presentase perpustakaan terakreditasi;	160	DKPUS
		PROGRAM PENGEMBANGAN STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Presentase jumlah sarana dan prasaran kepemudaan yang terbangun yang difungsikan	16,67%	DISKEPORA
		PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA	Persentase Insan Kepemudaan yang berprestasi dan berdedikasi yang dibantu	6,41%	DISKEPORA
		PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN DARAT	Rasio Jumlah Bus sekolah dengan Jumlah Murid	5%	DINAS PERHUBUNGAN
			Persentase sekolah di ruas jalan Provinsi yang dilengkapi dengan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	4%	DINAS PERHUBUNGAN
		PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase informasi berkaitan dengan pendidikan yang dapat akses oleh masyarakat	25%	DISKOMINFO
		PROGRAM PENINGKATAN	Persentase SMA dan SMK yang telah	80%	DISKOMINFO

No	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
			Indikator (out come)	Target	
	1	2	3	4	5
		PENYELENGGARAAN PEMERINTAH BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI	berbasis IT		
		PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN, KB, DAN PEMUDA	Prosentase jumlah kebijakan pengembangan pendidikan, keluarga berencana, pemuda dan pariwisata yang diimplementasikan	80	BIRO KESRA
			Persentase Jumlah Sekolah agama yang dinilai sesuai standar	35 sekolah	BIRO KESRA
		PROGRAM PENGELOLAAN BANTUAAAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) (DAK Non Fisik)	Persentase Sekolah penerima BOS	100%	DINAS PENDIDIKAN
3	Peningkatan relevansi pendidikan vokasi dalam mendukung pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KEJURUAAN	Persentase SMK yang memiliki sertifikasi profesi	38,60%	DINAS PENDIDIKAN
		PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KEJURUAN	Persentase SMK Kejuruan yang mendukung pengembangan pekonomi berbasis potensi lokal	100%	DINAS PENDIDIKAN
4	Peningkatan Pembangunan kultur masyarakat yang bertaqwa dan bermoral	PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN KEAGAMAAN	APK sekolah keagamaan		BIRO KESRA

Upaya pencapaian target kinerja sasaran tahun 2019 untuk prioritas ini dilakukan juga melalui intervensi lintas sektor melibatkan para stakeholder secara menyeluruh dari berbagai sektor pembangunan guna meningkatkan manfaat dan daya ungkit pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat sebagaimana disajikan pada tabel IV.52.a berikut:

**Tabel. IV.52.a**  
Stakeholder Yang Mendukung Pembangunan Lintas Bidang  
Pembangunan Pendidikan

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Strategi Yang Perlu Dukungan Stakeholder	Stakeholder
1	2	3	4	5
Meningkatnya kesempatan pendidikan bagi masyarakat	Angka harapan lama sekolah , (Angka harapan lama sekolah laki-laki, Angka harapan lama sekolah perempuan)	11,89; L: 12,37; P:12,46	1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dengan arah kebijakan peningkatan akses sekolah	Dewan Pendidikan, Lembaga Pendidikan, Badan Akreditasi sekolah, PGRI

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Strategi Yang Perlu Dukungan Stakeholder	Stakeholder
1	2	3	4	5
			pelayanan pendidikan	
			2. Meningkatkan Kualitas pelayanan pendidikan masyarakat dengan arah kebijakan sebagai berikut :	Dewan Pendidikan, Lembaga Pendidikan, Badan Akreditasi sekolah, PGRI

#### 4.3.9. Pembangunan Kesehatan

Sasaran yang ingin diwujudkan pada prioritas ini adalah Peningkatan pembangunan kesehatan masyarakat. Selanjutnya sasaran, target sasaran, strategi dan arah kebijakan disajikan pada tabel IV.53 berikut:

**Tabel IV.53**  
Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Lintas Bidang  
Pembangunan Kesehatan

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan
(1)	(2)	(3)
Peningkatan pembangunan kesehatan masyarakat	Angka Kesehatan Masyarakat	Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dengan arah kebijakan sebagai berikut: Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Pemenuhan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan Meningkatkan Pengendalian Penyalahgunaan Napza

Upaya pencapaian target kinerja sasaran tahun 2019 untuk prioritas ini dilakukan melalui koordinasi beberapa Perangkat Daerah secara menyeluruh dari berbagai sektor pembangunan guna meningkatkan manfaat dan daya ungkit pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat dengan rencana program pembangunan dan target indikator kinerja program baik yang prioritas maupun program pendukung sebagaimana disajikan pada tabel IV.54 berikut:

**Tabel. IV.54**

**Program Pembangunan Perangkat Daerah Yang Mendukung Pembangunan Lintas Bidang  
Pembangunan Kesehatan**

No	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
			Indikator (out come)	Target	
1		2	3	4	5
1	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan	PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase status kesehatan masyarakat	72,07%	DINKES
		PRORAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	Persentase angka kesakitan penyakit menular dan penyakit tidak menular	77,60%	DINKES
		PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN, KB, PEMUDA DAN PARIWISATA	Persentase Sekolah yang mengikuti lomba UKS	35 sekolah	BIRO KESRA
		PROGRAM KECIPTAKARYAAN DAN PERMUKIMAN	Persentase cakupan pelayanan akses air minum di kawasan strategis provinsi	9%	DINAS PRKP
			Persentase cakupan pelayanan akses air minum di kawasan permukiman kumuh Provinsi	50%	DINAS PRKP
			Persentase sarana air limbah yang layak di kawasan strategis Provinsi		DINAS PRKP
			Persentase sarana air limbah yang layak di kawasan kumuh Provinsi	85%	DINAS PRKP
			Persentase pengurangan titik genangan air di Kawasan Strategis Provinsi		DINAS PRKP
			Persentase pengurangan titik genangan air di Kawasan kumuh Provinsi	30%	DINAS PRKP
			Persentase sarana pelayanan persampahan di Kawasan Strategis Provinsi		DINAS PRKP
			Persentase sarana pelayanan persampahan di Kawasan permukiman kumuh Provinsi	40%	DINAS PRKP
		PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI KEBIJAKAN SOSIAL, KESEHATAN, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Prosentase Jumlah kebijakan sosial, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi yang diimplementasikan	75	BIRO KESRA

No	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
			Indikator (out come)	Target	
1		2	3	4	5
		PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase informasi tentang kesehatan masyarakat	25%	KOMINFO
		PROGRAM PENINGKATAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN	Peningkatan Skor PPH konsumsi jadi 92,50	81	DINAS PANGAN
			persentase pangan yang aman dikonsumsi	83	DINAS PANGAN
		PROGRAM KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN	Kenaikan Skor PPH Ketersediaan	81,9	DINAS PANGAN
			Persentase jumlah penduduk rawan pangan yang keluar dari katagori penduduk rawan pangan	1,1	DINAS PANGAN
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA, FASILITASI DAN AKSES INDUSTRI	Persentase kandungan nutrisi industri olahan pangan.	4,68	DISPERINDAG
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS HYGIENIS PERUSAHAAN DAN KESEHATAN KERJA	Persentase perusahaan yang menerapkan norma kesehatan kerja	2,73	UPTD HYPERKES
		PROGRAM PENINGKATAN PEMBUDAYAAN DAN PENINGKATAN PRESTASI OLAH RAGA	Persentase peserta yang mengikuti olahraga rekreasi dan tradisional	0,00%	DISKEPORA
2	peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN	Persentase standarisasi pelayanan kesehatan	77,12%	DINKES
		PROGRAM PELAYANAN TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN	Jumlah pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan sesuai standar	14	UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS MEDIS DAN PENUNJANG MEDIS	Presentase Ketersediaan pelayanan di Rumah Sakit	80%	RSUP
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA RUMAH SAKIT UMUM	Persentase sarana dan prasarana yang tersedia di RSUP	80%	RSUP
		PROGRAM BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUP	Persentase dana BLUD RSUP yang digunakan untuk pelayanan langsung kemasyarakat	100%	RSUP
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS MEDIS KEJIWAAN DAN NAPZA	Prosentase Penduduk yang mengalami gangguan jiwa dan mendapatkan pelayanan kesehatan	90	RSJ

No	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
			Indikator (out come)	Target	
1		2	3	4	5
2	peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS KEPERAWATAN JIWA DAN NAPZA	Rata-rata Lama Rawat/ Average Length of Stay (ALOS)	95	RSJ
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT JIWA	Persentase sarana dan prasarana yang tersedia di RSJ	95	RSJ
			Persentase peralatan kesehatan dan peralatan lainnya sesuai klasifikasi rumah sakit jiwa kelas A	95	RSJ
		PROGRAM BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSJ	Persentase dana BLUD RSJ yang digunakan untuk pelayanan langsung kemasyarakat	80	RSJ
		PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase informasi berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang dapat diakses masyarakat	25%	DISKOMINFO
3	Pemenuhan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KESEHATAN	Persentase kualitas dan kuantitas sumberdaya kesehatan	83,39%	DINKES
		PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KEJURUAN	Persentase jumlah SMK Program Keahlian Kesehatan yang memiliki akreditasi A	100%	DINAS PENDIDIKAN
			Persentase jumlah SMK Program Keahlian Kesehatan yang mengeluarkan Sertifikasi Profesi pihak 1 (LSP-P1)	0	DINAS PENDIDIKAN
4	Meningkatkan Pengendalian Penyalahgunaan Napza	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS MEDIS KEJIWAAN DAN NAPZA	Persentase penyalahgunaan Napza yang mendapatkan pelayanan medis rehabilitasi	30	RSJ
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS KEPERAWATAN JIWA DAN NAPZA	Persentase penyalahgunaan Napza yang mendapatkan pelayanan keperawatan rehabilitasi	20	RSJ
		PROGRAM KETAHANAN EKONOMI, SENI, BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN	Pertumbuhan masyarakat yang mendapatkan pemahaman penyalahgunaan napza	500	KESBANGPOL
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase korban nappza	21,28	DINAS SOSIAL



Upaya pencapaian target kinerja sasaran tahun 2019 untuk prioritas ini dilakukan juga melalui intervensi lintas sektor melibatkan para stakeholder secara menyeluruh dari berbagai sektor pembangunan guna meningkatkan manfaat dan daya ungkit pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat sebagaimana disajikan pada tabel IV.54.a berikut:

**Tabel. IV.54.a**

Stakeholder Yang Mendukung Pembangunan Lintas Bidang Pembangunan Kesehatan

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Strategi Yang Perlu Dukungan Stakeholder	Stakeholder
(1)	(2)	(3)	(4)
Peningkatan pembangunan kesehatan masyarakat	Angka Kesehatan Masyarakat	Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Pemenuhan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan	IDI, IBI, Badan Pengawas RS

#### 4.3.10. Peningkatkan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik

Sasaran yang ingin diwujudkan pada prioritas ini adalah Birokrasi yang bersih dan akuntabel, Birokrasi yang efektif dan efisien, Birokrasi yang memiliki Pelayanan publik yang berkualitas, Peningkatan pembangunan berdemokrasi. Selanjutnya sasaran, target sasaran, strategi dan arah kebijakan disajikan pada tabel IV.55 berikut:

**Tabel IV.55**

Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Lintas Bidang Peningkatkan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Strategi Dan Arah Kebijakan
1	2	3
Birokrasi yang bersih dan akuntabel	1 Opini Audit BPK Atas Laporan Keuangan	1. Meningkatkan tata kelola aset dan laporan keuangan daerah dengan arah kebijakan Peningkatan manajemen aset dan pencatatan pelaporan aset serta laporan realisasi anggaran
		2. Peningkatan tata kelola pengawasan dengan arah kebijakan Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah secara transparan dan akuntabel
		3. Meningkatkan manajemen pemerintah daerah berbasis kinerja dengan arah kebijakan Peningkatan kesesuaian antar dokumen

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Strategi Dan Arah Kebijakan
1	2	3
		perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja
	2 Tingkat kematangan Maturitas SPIP	1. Meningkatkan manajemen pelaksanaan urusan pemerintah daerah dengan arah kebijakan Peningkatan efektivitas pelaksanaan urusan
	3 Nilai Akuntabilitas Kinerja Provinsi Meningkat	1. Meningkatkan tata kelola penataan peraturan perundang-undangan dengan arah kebijakan Peningkatan Penataan peraturan perundang-undangan
	4 Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa dengan arah kebijakan Peningkatan akses data dan informasi layanan pengadaan barang dan jasa
Birokrasi yang efektif dan efisien	Indeks Profesionalitas ASN	1. Meningkatkan faktor pengungkit dan faktor hasil pencapaian reformasi birokrasi dengan arah kebijakan sebagai berikut :
		a. Peningkatan Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur
		b. Peningkatan Penguatan Sistem Manajemen Pemerintahan
		Meningkatkan tata kelola manajemen SDM aparatur pemerintah daerah dengan arah kebijakan Peningkatan integritas, kompetensi dan profesional aparatur
Birokrasi yang memiliki Pelayanan public yang berkualitas	1 Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	1. Meningkatkan kepuasan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan arah kebijakan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan memberikan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi bagi masyarakat
	2 Rata-Rata Tingkat Kepuasan Masyarakat	2. Meningkatkan pelayanan pemerintah dan pelayanan publik yang efektif dan efisien dengan arah kebijakan sebagai berikut:
		a. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih serta pelayanan publik yang efektif dan efisien

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Strategi Dan Arah Kebijakan
1	2	3
		b. Pemberdayaan masyarakat secara langsung dilakukan melalui skema pemberian bantuan ke desa-desa, termasuk jaminan pelayanan publik, penguatan keterkaitan kegiatan ekonomi dan peningkatan kapasitas aparatur desa
		c. Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan pada peningkatan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas,
		d. Sistem pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial disusun, ditata, dan dikembangkan untuk memastikan dan memantapkan pemenuhan hak-hak masyarakat akan pelayanan dasar publik.
		e. Menekan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak
		f. Menjamin hak anak dalam pembangunan

Upaya pencapaian target kinerja sasaran tahun 2019 untuk prioritas ini dilakukan melalui koordinasi beberapa Perangkat Daerah secara menyeluruh dari berbagai sektor pembangunan guna meningkatkan manfaat dan daya ungkit pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat dengan rencana program pembangunan dan target indikator kinerja program baik yang prioritas maupun program pendukung sebagaimana disajikan pada tabel IV.56 berikut:

**Tabel. IV. 56**  
Program Pembangunan Daerah Yang Mendukung Pembangunan Lintas Bidang  
Peningkatkan Tata Kelola Birokrasi dan Pelayanan Publik

No	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
			Indikator (out come)	Target	
	1	2	3	4	5
1	Peningkatan manajemen aset dan pencatatan pelaporan aset serta laporan realisasi anggaran	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN VERIFIKASI DAN PERBENDAHARAAN	prosentase bendahara perangkat daerah yang berkompeten	100%	BAKUDA
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN AKUTANSI DAN PELAPORAN	persentase laporan keuangan PD yang sesuai dengan SAP	100%	BAKUDA
		PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA ASET DAERAH	Nilai aset daerah yang dapat diyakini kewajarannya		BAKUDA
			Peningkatan persentase	0,34%	BAKUDA

No	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
			Indikator (out come)	Target	
	1	2	3	4	5
			kontribusi kemanfaatan aset daerah terhadap PAD		
		PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN	Persentase debitur yang membayar tunggakan kredit usaha peningkatan ekonomi masyarakat yang disetorkan ke Kas daerah	22	DINAS SOSIAL
2	Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara transparan dan akuntabel	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PEMERINTAHAN DAN APARATUR	Peningkatan Nilai Penguatan Pengawasan pada komponen proses IRB	7	INSPEKTORAT
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH	Prosentase jumlah rekomendasi temuan pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti	95	INSPEKTORAT
			Prosentase jumlah pengembalian uang yang disetorkan ke kas daerah.	94	INSPEKTORAT
			Prosentase penyelesaian kasus pengaduan masyarakat	100	INSPEKTORAT
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PEMBANGUNAN, SOSIAL, EKONOMI DAN BUDAYA	Tingkat capaian Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3	INSPEKTORAT
			Peningkatan capaian Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	3	INSPEKTORAT
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Provinsi Meningkat	82	
3	Peningkatan kesesuaian antar dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja	PROGRAM PERENCANAAN, EVALUASI DAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Kesesuaian antar dokumen perencanaan dan penganggaran (RKPD, KUA-PPAS)	30%	BAPPEDA
			Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun sesuai dengan kaidah peraturan yang berlaku		BAPPEDA
			Persentase kesesuaian antara dokumen perencanaan (RPJMD dengan RKPD)	30%	BAPPEDA
			Tingkat kesesuaian jadwal penetapan APBD dan Perubahan APBD	30%	BAPPEDA
		PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	Persentase Kesesuaian antar Renja PD mitra kerja bidang perekonomian dan sumberdaya alam dengan RKPD	30%	BAPPEDA
		PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN KEWILAYAHAN	Persentase Kesesuaian antar Renja PD mitra kerja bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah	30%	BAPPEDA

No	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
			Indikator (out come)	Target	
	1	2	3	4	5
			dengan RKPd		
		PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL, BUDAYA DAN PEMERINTAHAN	Persentase Kesesuaian antar RenjaPD mitra kerja bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan dengan RKPd	30%	BAPPEDA
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	persentase rekomendasi kajian yang digunakan dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan	30%	BAPPEDA
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) dalam APBD	3,55	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
		PROGRAM PENGANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundangan dan jadwal penetapan APBD dan Perubahan APBD (Ket: 3 = sesuai, 2 = kurang sesuai, 1 = tidak sesuai)	3	BAKUDA
			Prosentase kesesuaian antara RAPBD dengan dokumen KUA-PPAS	100%	BAKUDA
		PROGRAM PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan program kegiatan sesuai dengan perencanaan.	85%	BIRO PEMBANGUNAN
		PROGRAM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN APBD	Prosentase PD Provinsi dan Kab/Kota yang realisasi fisiknya 100% pelaksanaan sumber dana APBD	9500%	BIRO PEMBANGUNAN
		PROGRAM PERENCANAAN SETDA	Nilai Lakip Setda Provinsi	80%	BIRO PEMBANGUNAN
		PROGRAM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN APBN	Prosentase PD Provinsi dan Kab/Kota yang realisasi fisiknya 100 % pelaksanaan sumber dana APBN	80%	BIRO PEMBANGUNAN
		PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN TIK, STATISTIK DAN PERSANDIAN	Kualitas layanan persandian yang dimanfaatkan untuk pengamanan informasi berklasifikasi dan strategis milik pemerintah daerah di ling pemprov Babel sesuai standar persandian	Baik	DISKOMINFO
			Persentase data dan informasi yang digunakan untuk mengambil kebijakan dan perencanaan	200 data	DISKOMINFO
5	Peningkatan Penataan peraturan perundang-undangan	PROGRAM PENINGKATAN PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Persentase Produk hukum daerah yang tidak tumpang tindih	85%	BIRO HUKUM
			Persentase jumlah masyarakat yang mendapat Pelayanan bantuan Hukum	85%	BIRO HUKUM

No	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
			Indikator (out come)	Target	
	1	2	3	4	5
		PROGRAM PENGEMBANGAN DOKUMENTASI HUKUM DAN INFORMASI HUKUM	Persentase produk hukum daerah yang dapat di akses oleh masyarakat	85%	BIRO HUKUM
		PROGRAM PENGEMBANGAN RISALAH RAPAT DAN KAJIAN PRODUK HUKUM PERUNDANG-UNDANGAN	Presentase peningkatan fungsi legislasi lembaga DPRD dan alat kelengkapan lainnya	80	SETWAN
6	Peningkatan akses data dan informasi layanan pengadaan barang dan jasa	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA INFORMASI LAYANAN PENGADAAN	Persentase data dan informasi pengadaan barang/jasa yang dikelola dan dipublikasikan berbasis IT yang dapat di akses masyarakat	92%	BIRO LAYANAN PENGADAAN
		PROGRAM PENINGKATAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Persentase RPP siap lelang yang selesai ditangani ULP yang berhasil dilelangkan sesuai peraturan	94%	BIRO LAYANAN PENGADAAN
		PROGRAM PENINGKATAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK	Persentase Penggunaan e-Procurement terhadap belanja pengadaan yang dapat diakses masyarakat	44%	BIRO LAYANAN PENGADAAN
7	Peningkatan Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur	PROGRAM PENINGKATAN PUBLIKASI, PENGUMPULAN DAN PENYARINGAN INFORMASI	Persentase kesesuaian antar informasi yang dikelola dengan arah kebijakan pembangunan pemerintah daerah	100	BIRO HUMAS
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEHUMASAN, DOKUMENTASI, PUBLIKASI MEDIA DAN IT	Persentase kesesuaian antar informasi yang dipublikasikan dengan arah kebijakan pembangunan pemerintah daerah	100	BIRO HUMAS
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PROTOKOLER	Persentase kesesuaian antar agenda kepala daerah yang layani dengan arah kebijakan pembangunan daerah	100	BIRO HUMAS
		PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI, INFORMASI DAN PELAYANAN SERTA HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA	Persentase kesesuaian antara Promosi dan Informasi dengan arah kebijakan pembangunan daerah	100%	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
			Persentase kesesuaian antar agenda kepala daerah di Jakarta yang layani dengan arah kebijakan pembangunan daerah	100%	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
			Persentase kesesuaian antara Peningkatan Hubungan Antar Lembaga dengan arah kebijakan pembangunan daerah	100%	BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KERUMAHTANGGAAN, KEHUMASAN DAN PROTOKOLER DEWAN	Persentase kesesuaian antar informasi yang dipublikasikan dan layanan keprotokoler dewan dengan arah kebijakan pembangunan pemerintah daerah	95%	SETWAN
			Persentase jumlah sarana prasarana lembaga DPRD	76%	SETWAN

No	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
			Indikator (out come)	Target	
	1	2	3	4	5
		PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN SERTA ANALISIS JABATAN	Persentase jumlah Organisasi perangkat daerah yang sesuai antar beban kerja organisasi dengan ukuran kelembagaannya	75%	BIRO ORGANISASI
8	Peningkatan Penguatan Sistem Manajemen Pemerintahan		Persentase Jumlah Pejabat Struktural ASN yang memiliki kinerja yang baik	46%	BIRO ORGANISASI
			Persentase Jumlah ASN yang sesuai antara beban kerja dengan kompetensi dan jabatannya	80%	BIRO ORGANISASI
		PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN TATA LAKSANA PEMERINTAH DAERAH	Peningkatan kepuasan masyarakat	B	BIRO ORGANISASI
		PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH	Persentase peningkatan pengembangan kinerja ASN dan Pemerintah Daerah	75	BIRO ORGANISASI
9	Peningkatan kompetensi dan profesional aparatur	PROGRAM PENGADAAN PEGAWAI, MUTASI, PROMOSI, DAN KEPANGKATAN	Persentase Pemenuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan dan formasi	87%	BKPSDM
			Persentase pegawai ASN Naik Pangkat dan Pensiun Tepat Waktu	92%	BKPSDM
			Persentase pegawai ASN yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi	74%	BKPSDM
		PROGRAM PENILAIAN KINERJA, DISIPLIN, INFORMASI DAN KESEJAHTERAAN ASN	Persentase ASN yang menerima penghargaan	2,19%	BKPSDM
			Persentase kasus pelanggaran disiplin minimal sedang	0,15%	BKPSDM
			Persentase ASN yang SKP nya dinilai tepat waktu	65%	BKPSDM
			Persentase akurasi data dan informasi kepegawaian	84%	BKPSDM
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ASN	Persentase Pegawai ASN yang meningkat kompetensi teknis dan fungsional	42%	BKPSDM
			Persentase Pegawai ASN yang meningkat pendidikan formalnya;	39,90%	BKPSDM
			Persentase Pegawai ASN yang memenuhi kompetensi dasar dan manajerial	96%	BKPSDM
			Nilai akreditasi Diklat	81	BKPSDM
		PROGRAM PENILAIAN DAN PEMETAAN KOMPETENSI ASN	Persentase Pegawai ASN yang mempunyai Profil Kompetensi sesuai dengan standar penilaian	30,67%	BKPSDM

No	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
			Indikator (out come)	Target	
1	2	3	4	5	
10	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan memberikan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi bagi masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA PENDAPATAN PAJAK DAERAH	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Publik Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah	B	BAKUDA
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan PTSP		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		PROGRAM PENINGKATAN FUNGSI PELAYANAN PENDIDIKAN WILAYAH PANGKALPINANG DAN BANGKA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pendidikan SMA, SMK, SLB di wilayah Pangkalpinang dan Bangka	79,29%	DINAS PENDIDIKAN
		PROGRAM PENINGKATAN FUNGSI PELAYANAN PENDIDIKAN WILAYAH BANGKA BARAT	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pendidikan SMA, SMK, SLB di wilayah Bangka Barat	79,29%	DINAS PENDIDIKAN
		PROGRAM PENINGKATAN FUNGSI PELAYANAN PENDIDIKAN WILAYAH BANGKA TENGAH DAN BANGKA SELATAN	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pendidikan SMA, SMK, SLB di wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan	79,29%	DINAS PENDIDIKAN
		PROGRAM PENINGKATAN FUNGSI PELAYANAN PENDIDIKAN WILAYAH BELITUNG DAN BELITUNG TIMUR	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pendidikan SMA, SMK, SLB di wilayah Belitung dan Belitung Timur	79,29%	DINAS PENDIDIKAN
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU PLUT KUMKM	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pusat Layanan Usaha Terpadu PLUT KUMKM	92%	DINAS KUMKM
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIK MEDIS DAN PENUNJANG MEDIS	Nilai Tingkat kelulusan Akreditasi RSUP yang memenuhi standar akreditasi	Persiapan Akreditasi Paripurna (50%)	RSUP
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap sarana dan prasarana pelayanan Rumah Sakit	80%	RSUP
		PELAYANAN TEKNIK KEPERAWATAN JIWA DAN NAPZA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pelayanan Teknis Medik Kejiwaan	85	RSJ
		PROGRAM PELAYANAN TEKNIK LABORATORIUM KESEHATAN	Nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan labkes		UPTD DINKES
11	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih serta pelayanan publik	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA INFORMASI LAYANAN PENGADAAN	Nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap pengembangan data informasi layanan	80	BIRO LAYANAN PENGADAAN



No	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
			Indikator (out come)	Target	
	1	2	3	4	5
	yang efektif dan efisien		pengadaan		
		PROGRAM PENINGKATAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengadaan Barang dan Jasa	80	BIRO LAYANAN PENGADAAN
		PROGRAM PENINGKATAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK	Nilai Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengadaan secara elektronik	80	BIRO LAYANAN PENGADAAN
		PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN	Presentase jumlah administrasi kewilayahan yang terselesaikan	9 bidang tanah	BIRO PEMERINTAHAN
			Persentase luas Bidang Tanah Pemerintah Provinsi Yang bersertifikat	1	BIRO PEMERINTAHAN
			Persentase jumlah kasus sengketa batas wilayah administrasi yang diselesaikan	1	BIRO PEMERINTAHAN
		PROGRAM PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH	Presentase jumlah kebijakan penyelenggaraan otonomi daerah yang diimplementasikan		BIRO PEMERINTAHAN
		PROGRAM PENGEMBANGAN KERJA SAMA PEMERINTAH DAERAH	Persentase jumlah kerjasama pemerintah daerah/swasta/luar negeri yang diimplementasikan	75	BIRO PEMERINTAHAN
		PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEARSIPAN	Persentase kelembagaan kearsipan yang melaksanakan tertib arsip	20	DKPUS
		PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN ARSIP	· Pertambahan jumlah arsip yang dikelola sesuai standar (Dinamis dan Statis)	350	DKPUS
			Pertambahan jumlah koleksi bahan pustakaan ;	350	DKPUS
			Pertambahan pengunjung perpustakaan	11.500	DKPUS
		PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN PUSTAKA DAN LAYANAN PERPUSTAKAAN	Pertambahan jumlah koleksi buku perpustakaan ;		DKPUS
		PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN TIK, STATISTIK DAN PERSANDIAN	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk Birokrasi	30%	DISKOMINFO
		PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI	Persentase sistem informasi pemerintah daerah yang aman	40%	DISKOMINFO
		PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	Persentase rekomendasi Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang	25%	DINAS PUPR
		PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNKASI PUBLIK	persentase kesesuaian antara Kuantitas Berita dengan Informasi yang dipublikasi	60%	KOMINFO

No	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
			Indikator (out come)	Target	
	1	2	3	4	5
		PROGRAM PENGADMINISTRASIAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	Persentase Jumlah data base kependudukan tingkat provnsi yang akurat	100	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
			Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan NIK Data base kependudukan dan KTP dalam meningkatkan pelayananan ke masyarakat	14,28	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
		PROGRAM PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI	Persentase jumlah tenaga konstruksi yang bersertifikasi profesi	71%	DINAS PUPR
			Persentase jumlah kelembagaan jasa konstruksi yang berkompetensi	40%	DINAS PUPR
			Persentase Jumlah layanan informasi jasa konstruksi	70%	DINAS PUPR
12	Pemberdayaan masyarakat secara langsung dilakukan melalui skema pemberian bantuan ke desa-desa, termasuk jaminan pelayanan publik, penguatan keterkaitan kegiatan ekonomi dan peningkatan kapasitas aparatur desa	PROGRAM PENINGKATAN PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Persentase sarana prasarana penunjang peningkatan pemberdayaan masyarakat desa	34%	DPMD
			Persentase Posyandu aktif	100 Pokjanal Posyandu	DPMD
			Persentase PKK aktif	#####	DPMD
		PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN	Persentase kawasan perdesaan yang terbangun	40%	DPMD
		PROGRAM PEMBINAAN PEMERINTAH DESA	Persentase aparatur desa dan BPD yang meningkat kompetensinya	42%	DPMD
			Jumlah Profil Desa dan Kelurahan yang tersusun dan terbina	21 Desa/ Kel	DPMD
		PROGRAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase desa di kawasan transmigrasi yang diberdayakan	10	DISNAKER
13	Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan pada peningkatan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas,	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial	19,01	DINSOS
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PANTI SOSIAL	Persentase PMKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial melalui Pelayanan Teknis Panti Sosial	18,28	UPTD PANTI SOSIAL

No	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
			Indikator (out come)	Target	
	1	2	3	4	5
		PROGRAM PENGUATAN PENYELENGGARAAN PANTI SOSIAL	Persentase PMKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial melalui Penguatan Penyelenggaraan pelayanan Panti Sosial	80,62	UPTD PANTI SOSIAL
		PROGRAM PENINGKATAN PEMBUDAYAAN DAN PENINGKATAN PRESTASI OLAH RAGA	Persentase lansia yang aktif yang mengikuti pelayanan olah raga khusus lansia	0,19%	DISKEPORA
			Persentase Pelajar Penyandang Disabilitas yang berprestasi di bidang keolahragaan	4,02%	DISKEPORA
			Persentase Sumber Daya Tenaga Keolahragaan yang memiliki standar Nasional	2,67%	DISKEPORA
		PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase lansia yang dilayani sesuai standar kesehatan		DINKES
		PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN KEAGAMAAN	Persentase lansia yang berkompentensi keagamaan	80%	BIRO KESRA
			Prosentase jumlah masyarakat yang kompeten di bidang keagamaan	80	BIRO KESRA
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LATIHAN KERJA INDUSTRI	Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan kompetensi		DISNAKER
		PROGRAM PENGEMBANGAN PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pesentase lansia potensial yang memiliki kompetensi ketenagakerjaan	0,28	DISNAKER
			Persentase Exs korban Napza yang memiliki kompetensi ketenagakerjaan	10,64	DISNAKER
			Persentase wanita Tunasosial yang memilik kompetensi ketenagakerjaan	8,62	DISNAKER
			Persentase penyandang disabilitas yang memiliki kompetensi ketenagakerjaan	0,78	DISNAKER
14	Sistem pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial disusun, ditata, dan dikembangkan untuk memastikan dan memantapkan pemenuhan hak-hak masyarakat akan pelayanan dasar publik.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan perlindungan dan jaminan sosial yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial	22,84	DINSOS
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan pemberdayaan sosial yang mampu melaksanakan	17	DINSOS

No	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Kinerja Program		Perangkat Daerah
			Indikator (out come)	Target	
	1	2	3	4	5
			peranan dan fungsi sosial		
			Persentase PSKS yang mendapatkan pelayanan pemberdayaan sosial yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial	15,63	DINSOS
15	Menekan tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak	PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Menurunkan Rasio Perempuan Korban Kekerasan per 100.000 penduduk usia 18 Tahun keatas di tingkat daerah provinsi	37,97	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
			Menurunkan Rasio Anak yang memerlukan perlindungan khusus per 100.000 anak usia 0-18 Tahun tingkat daerah Provinsi	0,43	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
		PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Puskesmas yang melayani kekerasan terhadap perempuan dan anak		DINKES
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Perempuan korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial	20,67	DINAS SOSIAL
		PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase informasi berkaitan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dapat di akses oleh masyarakat	25%	DISKOMINFO
16	Menjamin hak anak dalam pembangunan	PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Persentase Kab/Kota Layak Anak	42,85	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
		PROGRAM PENGADMINISTRASIAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	Persentase anak yang memiliki akte kelahiran dalam mendukung hak anak untuk mendapat hak identitas	N.A	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase anak yang mendapatkan hak dalam pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial	18,99	DINAS SOSIAL
		PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita dalam mendukung hak anak untuk mendapatkan hak kesehatan	14,30%	DINAS KESEHATAN

#### 4.3.11. Pembangunan Demokrasi

Sasaran yang ingin diwujudkan pada prioritas ini adalah Peningkatan Pembangunan Berdemokrasi. Selanjutnya sasaran, target sasaran, strategi dan arah kebijakan disajikan pada tabel IV.57 berikut:

**Tabel IV.57**

Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Prioritas Peningkatan Pembangunan Bidang Pembangunan Demokrasi

Sasaran		Indikator Sasaran	Target	Strategi
1		2	3	4
1	Peningkatan Pembangunan Berdemokrasi	1	Skor aspek kebebasan sipil	87,76
			1	Menciptakan iklim berdemokrasi yang kondusif
				Peningkatan pemberian kesempatan Kebebasan sipil kepada masyarakat
				Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan perda serta perlindungan masyarakat (Linmas)
		2	Skor aspek hak-hak politik	81,76
			2	Meningkatkan partisipasi politik masyarakat
				Peningkatan pelayanan terhadap Hak-hak politik masyarakat
		3	Skor aspek lembaga demokrasi	80,33
			3	Meningkatkan pengembangan lembaga demokrasi
				Peningkatan pemberdayaan Lembaga-Lembaga Demokrasi

Upaya pencapaian target kinerja sasaran tahun 2019 untuk prioritas ini dilakukan melalui koordinasi beberapa Perangkat Daerah secara menyeluruh dari berbagai sektor pembangunan guna meningkatkan manfaat dan daya ungkit pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat dengan rencana program pembangunan dan target indikator kinerja program baik yang prioritas maupun program pendukung sebagaimana disajikan pada tabel IV.58 berikut:

**Tabel. IV. 58**

Program Perangkat Daerah Yang Mendukung Prioritas Pembangunan Demokrasi

NO	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019			
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target 2019	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
1	PEMBANGUNAN DEMOKRASI	Peningkatan pemberian kesempatan Kebebasan sipil kepada masyarakat	PROGRAM BINA IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN	Jumlah kasus penistaan terhadap simbol negara	-	KESBANGPOL

NO	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019			
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target 2019	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				Jumlah kasus Konflik Sara Yang Dapat Diantisipasi	2	KESBANGPOL
			PROGRAM PENGUATAN KEWASPADAAN NASIONAL	Tingkat Kerawanan Konflik Kabupaten/kota	9	KESBANGPOL
			PROGRAM KETAHANAN EKONOMI, SENI, BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas/LSM dan OKP yang ikut serta dalam kegiatan Pembangunan	35	KESBANGPOL
				Persentase Jumlah sanggar/paguyuban yang melestarikan seni budaya dalam mendukung ketahanan budaya	40	KESBANGPOL
		Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan perda serta perlindungan masyarakat (Linmas)	PROGRAM PENINGKATAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT	Prosentase jumlah pelanggaran Tibumtranmas yang ditindak sesuai dengan aturan	100%	SATPOL PP
			PROGRAM PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Persentase jumlah linmas yang berkompeten dalam penyelenggaraan kanrantibmas	6,05%	SATPOL PP
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERSONIL SATPOL PP	Prosentase jumlah personil Satpol PP yang melaksanakan penyelenggaraan kanrantibmas	16,23%	SATPOL PP
			PROGRAM PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA	Cakupan penegakan perda	100%	SATPOL PP
		Peningkatan pelayanan terhadap Hak-hak politik masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN	Persentase jumlah perempuan yang berkompetensi dilembaga politik	27,77	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
				Persentase Jumlah organisasi dan lembaga masyarakat yang berbasis gender	30	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
			PROGRAM PEMBINAAN POLITIK DALAM NEGERI	Pertumbuhan Cakupan Pembinaan Politik Daerah	7	KESBANGPOL
		Peningkatan pemberdayaan Lembaga-Lembaga Demokrasi	PROGRAM PEMBINAAN POLITIK DALAM NEGERI	persentase rekomendasi pengembangan berdemokrasi yg ditindak lanjuti	50	KESBANGPOL
			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	persentase rekomendasi kajian tentang demokrasi yang digunakan dalam perencanaan dan pangambil	30%	BAPPEDA

NO	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019			
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target 2019	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7
				kebijakan		
			PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL,BUDAYA DAN PEMERINTAHAN	Persentase kesesuaian perencanaan yang mendukung pembangunan berdemokrasi yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan renstra dan renja PD	30%	BAPPEDA

#### 4.3.12. Peningkatan Pembangunan Bidang Kebencanaan

Sasaran yang ingin diwujudkan pada prioritas ini adalah meningkatnya Kapasitas terhadap penanggulangan bencana.Selanjutnya sasaran, target sasaran, strategi dan arah kebijakan disajikan pada tabel IV.59 berikut:

**Tabel IV.59**  
Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Prioritas Peningkatan Pembangunan Bidang Kebencanaan

Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2019	Strategi
1	2	3	4
Meningkanya kapasitas terhadap penanggulangan bencana	Indeks kapasitas bencana daerah	0,2	1. Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan bencana
			Peningkatan penyelenggaraan penanggulangan bencana
			2. Mengembangkan kawasan berbasis penanggulangan bencana
			Pengembangan Pengelolaan kawasan rawan bencana alam
			Pengembangan Pengelolaan kawasan hilir daerah rawan bencana teluk bayur

Upaya pencapaian target kinerja sasaran tahun 2019 untuk prioritas ini dilakukan melalui koordinasi beberapa Perangkat Daerah secara menyeluruh dari berbagai sektor pembangunan guna meningkatkan manfaat dan daya ungkit pembangunan

yang dirasakan oleh masyarakat dengan rencana program pembangunan dan target indikator kinerja program baik yang prioritas maupun program pendukung sebagaimana disajikan pada tabel IV.60 berikut:

**Tabel. IV. 60**  
Program Perangkat Daerah Yang Mendukung Prioritas  
Peningkatan Pembangunan Bidang Kebencanaan

No.	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target 2019	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
01.00	Peningkatan penyelenggaraan penanggulangan bencana	PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Daerah Rawan Bencana yang Diintervensi Dalam Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	74	BPBD
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase korban bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	20	DINSOS
		PROGRAM PENGEMBANGAN DISTRIBUSI, STABILITAS, DAN CADANGAN PANGAN	Persentase Cadangan Pangan	2,7	DINAS PANGAN
		PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase informasi berkaitan dengan penanggulangan bencana yang dapat di akses oleh masyarakat	15%	KOMINFO
		PRORAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	Persentase Kab/kota yang melaksanakan kewaspadaan dini dan respon	80%	DINKES
		PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Persentase peningkatan kualitas linmas dalam penanganan bencana dan kebakaran	4,24%	SATPOL PP
		PROGRAM KEDARURATAN DAN LOGISTIK PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Daerah Rawan Bencana yang Diintervensi Dalam Penanggulangan Bencana	80	BPBD
		PRORAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	Persentase penduduk terdampak krisis kesehatan yang mendapat pelayanan kesehatan akibat bencana atau berpotensi bencana dalam satu provinsi	15%	DINKES
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS MEDIS DAN PENUNJANG MEDIS	Persentase korban bencana yang mendapat pelayanan rujukan	100%	RSUP
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	persentase Panjang Talud yang direhabilitasi dan direkonstruksi yang berfungsi dengan baik untuk menahan tanah	25%	PUPR
			Persentase Panjang Sungai /saluran yang dinormalisasi dan berfungsi memperlancar aliran air sungai akibat bencana	26,80%	PUPR
		PROGRAM PERUMAHAN RAKYAT	Persentase rekonstruksi dan rehabilitasi rumah akibat bencana	51%	PRKP
		PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Panjang jalan yang direhabilitasi dan direkonstruksi akibat bencana	0,86%	PUPR



No.	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target 2019	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6
			Persentase panjang jembatan yang direhabilitasi dan direkonstruksi akibat bencana	0,12%	PUPR
		PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Daerah Rawan Bencana yang Diintervensi Dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	75	BPBD
		PRORAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	Persentase penduduk pada kondisi kejadian luarbiasa (KLB) yang mendapat pelayanan kesehatan dalam satu Provinsi	100%	DINKES
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS MEDIS KEJIWAAN DAN NAPZA	Persentase korban bencana yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa	80	RSJ
02.00	Pengembangan Pengelolaan kawasan rawan bencana alam	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	Persentase Panjang Penahan Abrasi Pantai	41,40%	DINAS PUPR
			Panjang sungai yang dinormalisasi pada daerah rawan bencana	40,00%	DINAS PUPR
			panjang penahan tanah akibat erosi	49,00%	DINAS PUPR
		PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN DAS DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Persentase DAS kritis yang di kelola	7	DINAS KEHUTANAAN
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS TATA KELOLA DISHUT	Persentase kegiatan pengelolaan hutan oleh UPTD KPH (%)	100%	DINAS KEHUTANAAN
03.00	Pengembangan Pengelolaan kawasan hilir daerah rawan bencana teluk bayur	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	Persentase Panjang Talud penahan banjir kawasan hilir daerah rawan bencana teluk bayur		PUPR
			Persentase Panjang pengerukan Normalisasi sungai dan kawasan hilir daerah rawan bencana teluk bayur	30%	PUPR
		PROGRAM PERUMAHAN RAKYAT	Persentase relokasi kawasan hilir daerah rawan bencana teluk bayur		PRKP
		PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap di kawasan hilir daerah rawan bencana teluk bayur	96%	PUPR
			Persentase panjang jembatan dalam kondisi baik di kawasan hilir daerah rawan bencana teluk bayur	82%	PUPR
		PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	Persentase luas lahan yang bersertifikat untuk kepentingan di kawasan hilir daerah rawan bencana teluk bayur	100%	PUPR

### 4.3.13. Pengendalian Lingkungan Hidup

Sasaran yang ingin diwujudkan pada prioritas ini adalah peningkatan kualitas lingkungan. Selanjutnya sasaran, target sasaran, strategi dan arah kebijakan disajikan pada tabel IV.61 berikut:

**Tabel IV.61**

Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Lintas Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup

Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2019	Strategi dan Arah Kebijakan
1	2	3	4
Peningkatan Kualitas Lingkungan	1. Indeks Air	57,25	1 Meningkatkan kualitas air
			Pengendalian kualitas air
	2. Indeks Udara	89,9	2 Meningkatkan kualitas Udara
			pengendalian kualitas udara
	3. Indeks Tutupan Lahan	34,9	3 Meningkatkan pengendalian dan pengawasan hutan
			Peningkatan tutupan lahan
			Pengembangan Perhutanan Sosial
	4. Indeks Gas Rumah Kaca (GRK)	4.203,34	4 meningkatkan pengendalian terhadap lingkungan
			Peningkatan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan

Upaya pencapaian target kinerja sasaran tahun 2019 untuk prioritas ini dilakukan melalui koordinasi beberapa Perangkat Daerah secara menyeluruh dari berbagai sektor pembangunan guna meningkatkan manfaat dan daya ungkit pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat dengan rencana program pembangunan dan target indikator kinerja program baik yang prioritas maupun program pendukung sebagaimana disajikan pada tabel IV.62 berikut:

**Tabel. IV.62**  
Program Perangkat Daerah Yang Mendukung Pembangunan Lintas Bidang  
Pengendalian Lingkungan Hidup

No.	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target 2019	Perangkat Daerah
	1	2	3	4	5
1	Pengendalian kualitas air	PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN DAN PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase BOD, COD dan TSS	2%	DLH
		PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SDA DAN EKOSISTEM	Persentase Kawasan ekosistem essensial (%)	100%	DINAS KEHUTANAAN
2	pengendalian kualitas udara	PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN DAN PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penurunan Konsentrasi SO2 dan NO2 yang melebihi Nilai Ambang Batas	2%	DLH
		PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SDA DAN EKOSISTEM	Persentase penurunan Kawasan Hutan yang terbakar	100%	DINAS KEHUTANAAN
3	Peningkatan tutupan lahan	PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP	Persentase jumlah kebijakan berkaitan dengan tutupan lahan yang diimplementasikan	1 Dok	DLH
		PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SDA DAN EKOSISTEM	Persentase luas kawasan hutan yang bervegetasi (%)	1%	DINAS KEHUTANAAN
4	Pengembangan Perhutanan Sosial	PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN DAS DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Persentase luas kawasan Perhutanan Sosial (%)	2%	DINAS KEHUTANAAN
		PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA HUTAN	Persentase hasil hutan bukan kayu yang dikembangkan	20%	DINAS KEHUTANAAN
5	Peningkatan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP	Persentase jumlah kebijakan berkaitan pengelolaan lingkungan berkelanjutan yang diimplementasikan	100%	DLH
		PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN DAN PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP	persentase perusahaan yang mengimplementasikan kajian lingkungan hidup	18%	DLH
		PROGRAM PENINGKATAN PENGOLAHAN SAMPAH, PEMELIHARAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP	Pertumbuhan volume pengolahan sampah yang ramah lingkungan	0%	DLH
		PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN DAS DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	persentase penanganan tindak pidana kehutanan		DINAS KEHUTANAAN
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LABORATORIUM	Persentase Parameter Kualitas Lingkungan yang terakreditasi	100%	UPTB LABORATORIUM LINGKUNGAN

No.	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target 2019	Perangkat Daerah
	1	2	3	4	5
		LINGKUNGAN			
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM	Persentase lahan kritis di arel IUP yang di reklamasi,	13%	DINAS ESDM
			Nilai jaminan reklamasi	10 Miliar	DINAS ESDM
			Persentase luas lahan yang tidak terganggu di areal ULP	43%	DINAS ESDM
		PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN GEOLOGI DAN AIR TANAH	Persentase cadangan air tanah yang potensial yang dapat dimanfaatkan	40,91%	DINAS ESDM
			Persentase pemenuhan Air Tanah dilokasi yang rawan air		DINAS ESDM
			Jumlah obyek geologi yang diusulkan menjadi kawasan cagar alam geologi	10 Obyek	DINAS ESDM
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYAN TEKNIS TATA KELOLA DISHUT	Jumlah Kawasan Hutan yang dikelola		DINAS KEHUTANAAN
		PROGRAM TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP	Rasio jumlah perusahaan dengan jumlah Dokumen kajian lingkungan hidup yang diimplementasikan	15 Dok	DLH
		PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN DARAT	Prosentase Penurunan Emisi dari Sektor Transportasi	0,70%	DISHUB
		PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN, OPRASIONAL DAN KEBANDARUDARAAN	Prosentase Angkutan Umum bandara udara yang layak jalan	20,00%	DISHUB
		PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	Persentase kesesuaian perencanaan yang mendukung sektor lingkungan hidup yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan renstra dan Renja PD	30%	BAPPEDA
		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Persentase hasil penelitian dan pengembangan bidang lingkungan hidup yang digunakan sebagai rekomendasi kebijakan	30%	BAPPEDA
6	Pengembangan TPA Regional	PROGRAM PEMELIHARAAN LINGKUNGAN HIDUP, PENGELOLAAN SAMPAH DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP	Pertumbuhan volume pengolahan sampah yang ramah lingkungan pada TPA Regional	-	DLH
		PROGRAM KECIPTA KARYAAN DAN PERMUKIMAN	Persentase drainase dalam kondisi baik/aliran air tidak tersumbat di KPengembangan TPA Regional		PRKP
			Persentase jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik di Pengembangan TPA		PRKP

No.	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Target 2019	Perangkat Daerah
	1	2	3	4	5
			Regional		
		PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap di TPA Regional	0%	PUPR
			Persentase panjang jembatan dalam kondisi baik di TPA Regional	0%	PUPR
		PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH	Persentase kesesuaian perencanaan yang mendukung pengembangan TPA Regional yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan renstra dan renja PD	30%	BAPPEDA
		PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	Persentase luas lahan yang bersertifikat untuk kepentingan di TPA Regional		PUPR
		PROGRAM PENGEMBANGAN SDA	Persentase penyediaan volume air baku untuk pengembangan TPA Regional	5%	PUPR
			Panjang saluran / sungai yang dinormalisasi pada kawasan kumuh	5%	PUPR

#### 4.4. PAGU INDIKATIF PER PRIORITAS DAERAH TAHUN 2019

Pagu Indikatif merupakan batasan anggaran yang telah ditentukan untuk masing-masing Prioritas Pembangunan yang mencakup program dan kegiatan yang ada di Organisasi Perangkat daerah untuk tahun 2019 dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Penentuan pagu indikatif untuk masing-masing Prioritas Pembangunan Tahun 2019 dapat dilihat pada table IV.41 di bawah ini :

**Tabel. IV.63**  
Pagu Indikatif per-prioritas Daerah Tahun 2019

NO.	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019						
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2019	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN AGROPOLITAN	Penyusunan kebijakan dan implementasi perlindungan lahan pertanian berkelanjutan	PROGRAM PENGEMBANGAN PRASARANA, SARANA PERTANIAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN	Pertambahan Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan yang di implementasikan	Pemetaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Draf Perda	1	1.000.000.000	DINAS PERTANIAN
		Peningkatan sarana dan prasarana dan nilai tambah serta produksi pertanian, perkebunan, perternakan dan Kehutanan	PROGRAM PENGEMBANGAN PRASARANA, SARANA PERTANIAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase ketersediaan sarana prasarana pertanian	Pembangunan jaringan irigasi tersier	Luasan jaringan irigasi pertanian	1	3.500.000.000	DINAS PERTANIAN
					Pembangunan jalan produksi pertanian	Jalan produksi pertanian	10	1.200.000.000	DINAS PERTANIAN
					Pembangunan gudang alsintan	Gudang alsintan	10	2.750.000.000	DINAS PERTANIAN
					Pengembangan optimasi lahan	Luasan peningkatan indeks pertanaman (IP)	1	3.250.000.000	DINAS PERTANIAN
					Pengembangan pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian	Pengawalan ketersediaan pupuk,pestisida dan alat mesin pertanian	2	600.000.000	DINAS PERTANIAN
					Penyusunan Rencana Desain Kawasan,dan DED berbasis Demonstration Farmin Sawah Mekanisasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Rencana Desain Kawasan dan DED Agropolitan berbasis Demosntration Farmin Sawah Mekanisasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	0	0	DINAS PERTANIAN
				Persentase Pertambahan Kelompok tani yang melakukan pemberdayaan disektor pertanian	Pemberdayaan petani dan penyuluh pertanian	Petani dan penyuluh dibidang pertanian	3000	850.000.000	DINAS PERTANIAN
					Fasilitasi asuransi peternakan	Polis asuransi ternak sapi	2	200.000.000	DINAS PERTANIAN
					Fasilitasi asuransi pertanian	Polis asuransi lahan	3.5	300.000.000	DINAS

NO.	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019						
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2019	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						sawah			PERTANIAN
				Persentase Kelembagaan pertanian aktif	Rembug Tani Nasional	Rembug Tani Nasional (Event)	1	250.000.000	DINAS PERTANIAN
					Peningkatan kapabilitas penyuluhan dan SDM pertanian	Penyuluh pertanian	300	1.350.000.000	DINAS PERTANIAN
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI MUTU BENIH	Persentase Pertambahan Jumlah benih lada yang bersertifikat dan berlabel	Pengawasan peredaran benih dan pembinaan produsen	Pengawasan dan pembinaan produsen benih yang mengedarkan benih	44	230.000.000	UPTD PENGAWAS DAN SERTIFIKASI MUTU BENIH PERTANIAN
				Persentase Pertambahan Jumlah benih karet yang bersertifikat dan berlabel,	Sertifikasi Benih/Bibit Pertanian	Jumlah benih pangan yang tersertifikasi	150	200.000.000	UPTD PENGAWAS DAN SERTIFIKASI MUTU BENIH PERTANIAN
				Pertambahan Jumlah benih padi yang bersertifikat dan berlabel	Penilaian kultivar/ varietas unggul lokal	Jumlah varietas unggul lokal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	2	250.000.000	UPTD PENGAWAS DAN SERTIFIKASI MUTU BENIH PERTANIAN
				Pertambahan Jumlah benih hortikultura yang bersertifikat dan berlabel,	Peningkatan fungsi pelayanan UPTD BPSMB	UPTD BPSMB (UPTD)	1	200.000.000	UPTD PENGAWAS DAN SERTIFIKASI MUTU BENIH PERTANIAN
				Persentase varietas unggul lokal yang didaftarkan menjadi unggul Nasional	Pembinaan produsen benih	Jumlah komoditas terbina	3	150.000.000	UPTD PENGAWAS DAN SERTIFIKASI MUTU BENIH PERTANIAN
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PROTEKSI TANAMAN	Persentase penurunan areal tanam yang terserang OPT	Peningkatan pelayanan teknis proteksi tanaman	Terkendalinya areal tanam yang terserang OPT dan DPI	5	250.000.000	UPTD BALAI PROTEKSI TANAMAN PERTANIAN

NO.	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019						
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2019	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Peningkatan fungsi pelayanan UPTD Balai Proteksi Tanaman	UPTD Balai Proteksi Tanaman	1	325.000.000	UPTD BALAI PROTEKSI TANAMAN PERTANIAN
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PENGEMBANGAN BENIH PERTANIAN	Pertambahan Ketersediaan bibit lada	Penyediaan benih sumber dan benih sebar	Jumlah bibit lada	50	0	UPTD BALAI BENIH PERTANIAN
				Pertambahan Ketersediaan bibit karet	Penyediaan benih sumber dan benih sebar	Jumlah bibit karet	40	0	UPTD BALAI BENIH PERTANIAN
				Pertambahan Ketersediaan benih sumber padi	Penyediaan benih sumber dan benih sebar	Jumlah benih padi	4	1.350.000.000	UPTD BALAI BENIH PERTANIAN
				Pertambahan Ketersediaan bibit ayam	Pengembangan perbibitan ternak ruminansia	Jumlah bibit ayam	6	700.000.000	UPTD BALAI BENIH PERTANIAN
				Pertambahan Ketersediaan anakan sapi	Pengembangan perbibitan ternak ruminansia	Jumlah bibit sapi	20	0	UPTD BALAI BENIH PERTANIAN
				Pertambahan Ketersediaan kandang ternak, gudang pakan, gedung pertemuan dan sarana prasarana	Integrasi jagung dan sapi	Alat pengolah pakan	0	0	UPTD BALAI BENIH PERTANIAN
						Luasan tanaman jagung	10	75.000.000	UPTD BALAI BENIH PERTANIAN
			PROGRAM PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	Persentase peningkatan produksi dan produktifitas komoditi strategis tanaman pangan padi	Penanganan organisme pengganggu tanaman pangan dan hortikultura	Jumlah luasan areal terserang OPT yang tertangani	100	800.000.000	DINAS PERTANIAN
					Fasilitasi penerapan budidaya padi	Penerapan budidaya padi	2	750.000.000	DINAS PERTANIAN
					Pengembangan komoditi hortikultura melalui penerapan budidaya tanaman yang baik	Produksi Cabai (120 Ton) dan Bawang Merah (20 Ton)	28	1.450.000.000	DINAS PERTANIAN
					Pengembangan Komoditi	Pelaksanaan GP-PTT	700	2.250.000.000	DINAS



NO.	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019						
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2019	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					pangan dengan penerapan GP-PTT (padi dan jagung)	tanaman padi (400 Ha) dan jagung (200 Ha)			PERTANIAN
					Pengelolaan sistem penyediaan benih bermutu	Jumlah benih komoditi pangan	150	600.000.000	DINAS PERTANIAN
					Penerapan prinsip pengendalian hama terpadu (PHT) komoditi pangan	Jumlah Kelompok tani yang mengikuti SL - PHT	10	700.000.000	DINAS PERTANIAN
					Pelatihan teknis budidaya, penanganan panen dan pasca panen komoditi pangan dan hortikultura	Jumlah kelompok tani yang mengalami peningkatan kualitas SDM pertanian	3	65.000.000	DINAS PERTANIAN
					Pengembangan komoditas hortikultura lokal yang unggul	Jumlah komoditas hortikultura lokal yang unggul (Ha)	30	1.000.000.000	DINAS PERTANIAN
					Registrasi kebun pelaku usaha dalam menjamin mutu dan keamanan hasil	Jumlah pelaku usaha/kelompok tani yang kebunnya teregistrasi	28	400.000.000	DINAS PERTANIAN
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERKEBUNAN	Peningkatan produksi lada	Intensifikasi tanaman perkebunan	Peningkatan produktivitas tanaman perkebunan	1.5	6.000.000.000	DINAS PERTANIAN
					Pengembangan model klaster/kawasan agribisnis lada putih	Pengembangan model klaster/kawasan agribisnis lada di kabupaten/kota	1	1.500.000.000	DINAS PERTANIAN
					Pemberdayaan pekebun dan penguatan kelembagaan tanaman perkebunan	Kelembagaan pekebun lada dan karet	400	1.000.000.000	DINAS PERTANIAN
					Pengembangan kelembagaan perbenihan	Lembaga yang bergerak dalam usaha perbenihan tanaman lada	6	120.000.000	DINAS PERTANIAN
					Pengembangan sumber benih unggul perkebunan	Pengembangan kebun sumber lada di 6 kabupaten	4	600.000.000	DINAS PERTANIAN
					Sekolah lapang iklim (SLI) lada	Sekolah lapang iklim di tingkat lapang	6	570.000.000	DINAS PERTANIAN
					Penanganan organisme Pengganggu Tanaman perkebunan	penerapan penanggulangan OPT perkebunan	300	500.000.000	DINAS PERTANIAN

NO.	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019						
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2019	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Sekolah lapang pengamatan hama terpadu (SLPHT) lada	SLPHT lada	10	950.000.000	DINAS PERTANIAN
					Penanganan gangguan usaha pencegahan kebakaran lahan kebun dan konflik perkebunan	operasional brigade proteksi	2	120.000.000	DINAS PERTANIAN
					Peremajaan tanaman perkebunan	peremajaan tanaman perkebunan di kabupaten	300	4.500.000.000	DINAS PERTANIAN
					Ekstensifikasi/Perluasan areal tanaman perkebunan	Perluasan tanaman perkebunan pada kawasan Agropolitan dan Tekno park Pertanian Lada Air Gegas	50	950.000.000	DINAS PERTANIAN
				Peningkatan produksi karet					DINAS PERTANIAN
			PROGRAM PENGEMBANGAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	Pertambahan Jumlah populasi ternak besar sapi	Peningkatan Populasi Ternak	Jumlah kelompok penerima bantuan (sapi dan unggas)	20	15.000.000.000	DINAS PERTANIAN
					Peningkatan Fungsi Pelayanan Laboratorium Keswan dan Klinik Hewan	Meningkatnya fungsi pelayanan laboratorium keswan dan klinik hewan	1	450.000.000	DINAS PERTANIAN
					Pembinaan dan pengawasan lalu lintas hewan dan produk asal hewan	Jumlah rekomendasi yang diterbitkan (Surat izin)	400	150.000.000	DINAS PERTANIAN
				Pertambahan Jumlah populasi ternak ayam		Jumlah populasi ternak ayam	603.8	0	DINAS PERTANIAN
			PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA HUTAN	Persentase izin usaha hasil hutan kayu (%)	Peningkatan Usaha Hasil Hutan Kayu	Jumlah izin usaha hasil hutan kayu (Izin)	12	300.000.000	DINAS KEHUTANAAN
				Persentase hasil hutan bukan kayu yang dikembangkan (%)	Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu	Jumlah hasil hutan bukan kayu yang dikembangkan	2	500.000.000	DINAS KEHUTANAAN
					Pemanfaatan Kawasan Hutan	Jumlah izin pemanfaatan kawasan	13	450.000.000	DINAS KEHUTANAAN
					Expo Pengembangan dan Promosi Hasil Hutan	Jumlah expo/promosi hasil hutan yang diikuti	1	650.000.000	DINAS KEHUTANAAN
			PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA LINGKUNGAN	Tersedianya Dokumen KLHS Pengembangan Balai Benih Pertanian Terpadu yang	Penyusunan Dokumen KLHS Pengembangan Balai Benih Pertanian Terpadu	Jumlah Dokumen KLHS Pengembangan Balai Benih Pertanian Terpadu	1 Dokumen	500.000.000	DLH

NO.	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019						
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2019	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			HIDUP	digunakan dalam perencanaan kawasan					
			PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase informasi berkaitan dengan peningkatan produksi pertanian yang dapat diakses masyarakat	Pengelolaan Saluran Komunikasi Pemerintah Daerah dan Non Pemerintah Daerah	Jumlah saluran komunikasi yang dikelola		290.000.000	KOMINFO
					Pengelolaan Konten	Jumlah pengemasan dan pengelolaan konten		140.000.000	KOMINFO
					Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah data/informasi publik pemda		165.000.000	KOMINFO
					Pengelolaan Kemitraan	Jumlah mitra yang terfasilitasi		190.000.000	KOMINFO
					Pengelolaan Aspirasi Publik Lingkup Pemerintah Daerah	Jumlah aspirasi publik lingkup pemerintah daerah		125.000.000	KOMINFO
					Pengelolaan Komunikasi Publik	Jumlah konferensi pers dan wartawan		95.000.000	KOMINFO
		Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing sektor pertanian	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LATIHAN KERJA INDUSTRI	Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan tentang pertanian yang berkompetensi	pelatihan keterampilan bagi pencari kerja di Kabupaten/Kota	jumlah paket pelatihan bagi pencari kerja bidang pertanian	2 paket	250.000.000	UPD BLKI
			PROGRAM PENGEMBANGAN PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase peningkatan tenaga kerja pertanian yang bersertifikasi	Sertifikasi tenaga kerja	jumlah tenaga kerja pertanian bersertifikat kompetensi	80 orang	420.000.000	DISNAKER
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase peningkatan produktifitas tenaga kerja sektor pertanian	pengembangan kompetensi SDM di desa produktif	jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan peningkatan produksi sektor perkebunan	30 orang	57.857.000	UPTD BALAI PRODUKTIFITAS
			PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN	Persentase Jumlah SMK dengan program keahlian pertanian, perkebunan dan peternakan yang memiliki akreditasi A	Kegiatan Peningkatan Sarana/Prasarana dan Pengembangan Kelembagaan SMK	Jumlah SMK Pertanian dan Peternakan Bekerja Memiliki Unit Produksi	1		DINAS PENDIDIKAN

NO.	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019						
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2019	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			KEJURUAN						
				Persentase SMK Pertanian dan Peternakan yang mengeluarkan Sertifikasi Profesi pihak 1 (LSP-P1)		Jumlah SMK Pertanian dan Peternakan Bekerja sama dengan DUDI	1		DINAS PENDIDIKAN
			PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI	persentase peningkatan volume usaha koperasi pertanian	Pendampingan pemasaran, kemitraan, permodalan dan jaringan usaha	jumlah koperasi yang mendapatkan pendampingan kemitraan usaha		125.000.000	DINAS KUMKM
						jumlah pengurus koperasi yang memahami manajemen pengembangan usaha		80.300.000	DINAS KUMKM
						Jumlah anggota koperasi yang mengelola hasil produksi SDA menjadi produk olahan yang diikutkan pada even pameran lokal dan /atau nasional		130.000.000	DINAS KUMKM
						jumlah produk/usaha koperasi yang dikembangkan pada kawasan strategis provinsi		90.000.000	DINAS KUMKM
					Pengembangan, penguatan dan perlindungan koperasi	jumlah pengawas koperasi yang memahami teknis pengawasan intern koperasi		45.000.000	DINAS KUMKM
						Jumlah pengurus koperasi yang mendapatkan Bimtek Penyusunan SOP Usaha Koperasi		37.000.000	DINAS KUMKM
						Aplikasi pengolah data koperasi		12.500.000	DINAS KUMKM
					Peningkatan Kualitas SDM Koperasi	jumlah Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) yang diberdayakan di 7 (tujuh)		148.000.000	DINAS KUMKM

NO.	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019						
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2019	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						kabupaten/kota			
						Jumlah pembina koperasi dan PPKL yang mendapatkan pembekalan tentang Perkoperasian		75.000.000	DINAS KUMKM
						jumlah pengurus koperasi yang mendapatkan pemahaman kewirausahaan		71.850.000	DINAS KUMKM
				persentase peningkatan volume usaha koperasi sapi	Pendampingan pemasaran, kemitraan, permodalan dan jaringan usaha	jumlah koperasi yang mendapatkan pendampingan kemitraan usaha		15.000.000	DINAS KUMKM
						jumlah pengurus koperasi yang memahami manajemen pengembangan usaha		30.000.000	DINAS KUMKM
						Jumlah anggota koperasi yang mengelola hasil produksi SDA menjadi produk olahan yang diikuti pada even pameran lokal dan /atau nasional		30.000.000	DINAS KUMKM
						jumlah produk/usaha koperasi yang dikembangkan pada kawasan strategis provinsi		20.000.000	DINAS KUMKM
					Pengembangan, penguatan dan perlindungan koperasi	jumlah pengawas koperasi yang memahami teknis pengawasan intern koperasi		25.000.000	DINAS KUMKM
						Jumlah pengurus koperasi yang mendapatkan Bimtek Penyusunan SOP Usaha Koperasi		25.000.000	DINAS KUMKM
						Aplikasi pengolah data koperasi		12.500.000	

NO.	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019						
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2019	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Peningkatan Kualitas SDM Koperasi	jumlah Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) yang diberdayakan di 7 (tujuh) kabupaten/kota		87.050.000	DINAS KUMKM
						Jumlah pembina koperasi dan PPKL yang mendapatkan pembekalan tentang Perkoperasian		15.000.000	DINAS KUMKM
						jumlah pengurus koperasi yang mendapatkan pemahaman kewirausahaan		12.000.000	DINAS KUMKM
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LATIHAN PERKOPERASIAN, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	Persentase SDM Koperasi sektor pertanian terlatih	Penyelenggaraan Pelatihan Perkoperasian dan UKM	jumlah SDM Koperasi sektor pertanian terlatih	0	244.500.000	UPTD BALAI LATIHAN PERKOPERASIAN, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
				persentase SDM Usaha Kecil sektor pertanian terlatih	Penyelenggaraan Pelatihan Perkoperasian dan UKM	jumlah SDM Usaha Kecil sektor pertanian terlatih	0	946.880.000	UPTD BALAI LATIHAN PERKOPERASIAN, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
		Pembinaan hubungan industri sektor pertanian	PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN, PEMBINAAN HUB. INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase perusahaan pertanian yang diperiksa dan dibina sesuai standar pemeriksaan perusahaan	pemeriksaan norma kerja dan norma K3	jumlah perusahaan perkebunan dan pertanian yang diperiksa dan dibina	45 perusahaan	34.515.000	DISNAKER
		Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing sektor	PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI	Persentase pertumbuhan kelembagaan koperasi aktif sektor pertanian	Peningkatan Kelembagaan dan Perizinan Koperasi	jumlah kelompok strategis yang mendapatkan sosialisasi mengenai pendirian koperasi	11	110.000.000	DINAS KUMKM

NO.	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019						
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2019	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		pertanian							
						jumlah akta notaris pendirian koperasi baru	6	80.000.000	DINAS KUMKM
						jumlah pembina/pengurus/notaris yang mendapatkan pembekalan mengenai perkuatan kelembagaan koperasi	10	20.000.000	DINAS KUMKM
				persentase koperasi sektor pertanian berkualitas sesuai standar	Peningkatan Partisipasi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan Perkoperasian	jumlah koperasi yang mendapatkan pendampingan penyusunan regulasi internal	15	27.000.000	DINAS KUMKM
						jumlah koperasi yang mendapatkan pembinaan Keanggotaan dan Penerapan Peraturan	15	27.000.000	DINAS KUMKM
						jumlah koperasi yang mendapatkan bimbingan teknis SOP koperasi	10	35.000.000	DINAS KUMKM
						jumlah koperasi yang mendapatkan bimbingan teknis manajemen pengelolaan koperasi	10	40.000.000	DINAS KUMKM
						jumlah koperasi yang mendapatkan bimbingan teknis tentang partisipasi keanggotaan koperasi	10	25.000.000	DINAS KUMKM
						jumlah koperasi yang mengikuti kegiatan konsep good cooperative governance (GCG)	10	25.000.000	DINAS KUMKM
						jumlah koperasi yang melakukan kerja sama dengan lembaga lain	10	85.650.000	DINAS KUMKM
					Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan Koperasi	jumlah koperasi yang mendapatkan Pengawasan,	15	32.000.000	DINAS KUMKM

NO.	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019						
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2019	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan			
						jumlah calon penerima penghargaan koperasi berprestasi tingkat nasional	2	43.800.000	DINAS KUMKM
						jumlah calon penerima penghargaan tokoh penggerak koperasi	2	43.800.000	DINAS KUMKM
						Jumlah koperasi/pembina koperasi yang mengikuti rakor penguatan stake holder koperasi	20	37.500.000	DINAS KUMKM
						jumlah koperasi yang mengikuti kegiatan konsep good cooperative governance (GCG)	10	20.000.000	DINAS KUMKM
						jumlah pengawas/pembina koperasi yang mendapatkan pembekalan mengenai penilaian kesehatan KSP/USP	10	20.000.000	DINAS KUMKM
						jumlah koperasi yang mendapatkan pengawasan/pemeriksaan (KSP/USP)	10	30.000.000	DINAS KUMKM
			PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN USAHA KECIL	Persentase produk Usaha kecil sektor pertanian yang tersertifikasi	Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil	jumlah produk Usaha kecil sektor pertanian yang tersertifikasi	200	900.000.000	DINAS KUMKM
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBERDAYA, FASILITASI DAN AKSES INDUSTRI	Presentase Tenaga Kerja Industri pada sektor pertanian	Fasilitasi Teknologi Industri	Jumlah Website	1 website	375.000.000	DISPERINDAG
					Pemetaan dan Penetapan SDA industri Pertanian	Jumlah Dokumen SDA industri pertanian	1 Dokumen	120.000.000	DISPERINDAG



NO.	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019						
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2019	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Peningkatan kemampuan teknologi Tepat Guna Produk Olahan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah teknologi Tepat Guna	3 TTG	150.000.000	DISPERINDAG
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS SERTIFIKASI DAN PENGENDALIAN MUTU PRODUK	Persentase komoditi unggulan daerah diuji yang memenuhi standar pengujian	Pemeliharaan dan penambahan status akreditasi laboratorium	Jumlah ruang lingkup	3	114.700.000	UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PENGENDALIAN MUTU
					Pembelian alat laboratorium UPTD BSPM	jumlah alat (unit)	5	2.000.000.000	UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PENGENDALIAN MUTU
					Jejaring kerjasama antar lab	jumlah laporan	1	65.000.000	UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PENGENDALIAN MUTU
					Pelatihan teknis personil laboratorium UPTD BSPM	jumlah personil (aparatur)	10	104.712.000	UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PENGENDALIAN MUTU
					Monitoring Mutu Pengujian	jumlah laporan	1	196.822.000	UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PENGENDALIAN MUTU
					Sosialisasi mutu produk unggulan daerah	jumlah peserta (aparatur dan masyarakat)	50	200.000.000	UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PENGENDALIAN MUTU
					Jejaring kerjasama antar lab	jumlah laporan	1	65.000.000	UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PENGENDALIAN MUTU

NO.	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019						
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2019	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Peningkatan Pelayanan pemerintah UPTD BSPM	jumlah orang (aparatur)	23	845.195.000	UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PENGENDALIAN MUTU
					Monitoring Mutu Pengujian	jumlah laporan	1	196.822.000	UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PENGENDALIAN MUTU
					Pemeliharaan dan penambahan status akreditasi laboratorium	Jumlah ruang lingkup	3	114.700.000	UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PENGENDALIAN MUTU
		Pengembangan produk pertanian, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi sektor pertanian di	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Pertambahan Jumlah profil investasi Sektor Pertanian yang digunakan untuk promosi investasi daerah di sektor pertanian	Pemutakhiran Data Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID)	Jumlah pengelola data SIPID yang terlatih	10 orang	37.500.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
					Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal Daerah (RKPPMD)	Jumlah peserta yang mengikuti rapat koordinasi	10 orang	25.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
					Sosialisasi Informasi terkini regulasi kebijakan di Bidang Penanaman Modal	Jumlah peserta sosialisasi	10 orang	25.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

NO.	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019						
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2019	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									TERPADU SATU PINTU
					Forum Komunikasi Pemberdayaan usaha daerah	Jumlah peserta forum komunikasi	10 peserta	25.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
					Peningkatan Pelayanan Peluang Investasi	Jumlah calon investor yang di fasilitasi	2 calon investor	31.250.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI PENANAMAN MODAL	Pertambahan Jumlah investor Sektor Pertanian	Penyelenggaraan Pameran Investasi	Jumlah pameran investasi	1 pameran sektor pertanian	175.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
					Pembuatan Bahan Promosi	Jumlah sektor bahan promosi	bahan promosi 1 sektor pertanian	50.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DAN SISTEM INFORMASI	Presentase perusahaan sektor pertanian yang sesuai realisasi investasi dengan rencana investasi	Digitalisasi data dan informasi penanaman modal	jumlah data dan informasi penanaman modal berdasarkan sektor	1 data dan informasi penanaman modal sektor pertanian	50.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
					Pemantauan Pelaksanaan Ketentuan Penanaman Modal	Nilai realisasi PMA/PMDN	700 (Miliar) sektor pertanian	-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
					Monitoring dan Evaluasi	Jumlah perusahaan yang	20		DINAS

NO.	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019						
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2019	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Perizinan Penanaman Modal	telah dilakukan pembinaan berdasarkan sektor	Perusahaan Sektor Pertanian	120.000.000	PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
					Workshop Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	jumlah perusahaan yang mengikuti workshop	15 perusahaan sektor pertanian	25.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
					Penyusunan Data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	Jumlah perusahaan yang melaporkan data LKPM	15 perusahaan sektor pertanian	30.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
					Sosialisasi Peraturan terkait Penanaman Modal		10 perusahaan sektor pertanian	22.500.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
					Penyusunan standar operasional prosedur (SOP) pelayanan persetujuan penanaman modal	jumlah SOP pelayanan persetujuan penanaman modal berdasarkan sektor	1 SOP sektor pertanian	12.500.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			PROGRAM PEINGKATAN PEMBERDAYAAN USAHA KECIL	Pertambahan jumlah pelaku usaha kecil sektor pertanian yang menandatangani kesepakatan kemitraan dengan dunia usaha dalam daerah	Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil	jumlah pelaku usaha kecil sektor pertanian, perkebunan dan peternakan yang menandatangani kesepakatan kemitraan dengan dunia usaha dalam daerah	90	76.500.000	DINAS KUMKM
				persentase pelaku usaha kecil sektor pertanian, perkebunan dan peternakan yang menandatangani kesepakatan	Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil	jumlah pelaku usaha kecil sektor pertanian, perkebunan dan peternakan yang	10	150.000.000	DINAS KUMKM

NO.	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019						
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2019	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				kemitraan dengan dunia usaha luar daerah		menandatangani kesepakatan kemitraan dengan dunia usaha luar daerah			
				persentase Usaha Kecil sektor pertanian, perkebunan dan peternakan yang mendapatkan izin usaha	Pendampingan dan Promosi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil sektor pertanian, perkebunan dan peternakan yang mendapatkan IUMK	500	50.000.000	DINAS KUMKM
				persentase Usaha Kecil sektor pertanian, peternakan dan perkebunan yang difasilitasi promosi/ pemasaran produknya melalui even pameran	Pendampingan dan Promosi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil sektor pertanian, peternakan dan perkebunan yang difasilitasi promosi/ pemasaran produknya melalui even pameran	5	210.000.000	DINAS KUMKM
				persentase Usaha Kecil sektor pertanian, peternakan dan perkebunan yang difasilitasi promosi/ pemasaran produknya melalui web	Pendampingan dan Promosi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil sektor pertanian, peternakan dan perkebunan yang difasilitasi promosi/ pemasaran produknya melalui web	35	50.000.000	DINAS KUMKM
				persentase Usaha Kecil sektor pertanian, perkebunan dan peternakan yang mendapatkan Diseminasi dan pendampingan akses permodalan	Pendampingan dan Promosi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil sektor pertanian, perkebunan dan peternakan yang mendapatkan Diseminasi dan pendampingan akses permodalan	8	32.000.000	DINAS KUMKM
		Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dibidang pertanian	PROGRAM PENGEMBANGAN PENDAYAGUNAAN SDA, TEKNOLOGI TEPAT GUNA DAN PELATIHAN MASYARAKAT	Persentase kelompok masyarakat yang mendayagunakan teknologi tepat guna (TTG) di sektor pertanian	Pengembangan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Peserta Lomba dan gelar TTG yangikutsertakan	4 Peserta	851.884.283	DINAS PMD
						Jumlah Peserta workshop TTG yang hadir	30 Orang		DINAS PMD
						Jumlah alat TTG yang diberikan kepada POKMAS	0%		DINAS PMD
			PROGRAM PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN	Pertambahan Jumlah kelompok yang menerapkan peningkatan mutu, daya saing, dan nilai			40	2.480.000	DINAS PMD

NO.	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019						
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2019	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			DAN HORTIKULTURA	tambah hasil tanaman pangan dan hortikultura					
					Kajian mutu beras dalam peningkatan mutu beras di provinsi kepulauan bangka belitung	Jumlah pelaku usaha yang di kaji mutu hasil produksi (Pelaku usaha.kelompok tani)	28	350	DINAS PERTANIAN
					Peningkatan penerapan penanganan pascapanen tanaman pangan dan hortikultura	Jumlah kelompok tani yang menerapkan penanganan pascapanen berkualitas baik (Kelompok tani)	5	1.500.000	DINAS PERTANIAN
					Promosi produk pangan dan hortikultura yang bermutu dan berdaya saing	Jumlah promosi produk pangan dan hortikultura (Kegiatan)	3	30	DINAS PERTANIAN
					Peningkatan pelayanan informasi pasar pada produk tanaman pangan dan hortikultura	Jumlah pelaku usaha/kelompok tani yang meningkatnya informasi pasar (Pelaku usaha/kelompok tani)	40	600	DINAS PERTANIAN
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERKEBUNAN	Pertambahan Jumlah kelompok yang menerapkan peningkatan mutu, daya saing, dan nilai tambah hasil perkebunan		Jumlah kelompok yang menerapkan peningkatan mutu, daya saing, dan nilai tambah hasil perkebunan	56	9.600.000	DINAS PERTANIAN
					Penanganan pasca panen tanaman perkebunan	sarana pascapanen lada dan karet melalui poktan/gapoktan (Unit)	12	2.100.000	DINAS PERTANIAN
					Peningkatan pemasaran komoditas strategis perkebunan	pemasaran komoditas strategis perkebunan (%)	100	500	DINAS PERTANIAN
					Pembinaan kelembagaan usaha perkebunan (PPHP)	pembinaan kelembagaan usaha perkebunan (PPHP) (Unit)	48	3.000.000	DINAS PERTANIAN
					Standarisasi dan penerapan standar mutu hasil perkebunan	standarisasi dan standar mutu hasil perkebunan (%)	88	450	DINAS PERTANIAN
					Pengembangan pengolahan tanaman perkebunan	pengembangan pengolahan tanaman perkebunan (Unit)	12	1.200.000	DINAS PERTANIAN

NO.	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019						
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2019	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Pelayanan informasi pemasaran hasil perkebunan	informasi pemasaran hasil perkebunan (Dokumen)	36	850	DINAS PERTANIAN
					Fasilitasi pengembangan akses pasar	fasilitasi pengembangan akses pasar (Unit)	1	1.500.000	DINAS PERTANIAN
			PROGRAM PENGEMBANGAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	Pertambahan Jumlah kelompok yang menerapkan peningkatan mutu, daya saing, dan nilai tambah hasil peternakan		Jumlah kelompok yang menerapkan peningkatan mutu, daya saing, dan nilai tambah hasil peternakan	14	1.450.000	DINAS PERTANIAN
					Peningkatan pengolahan dan pemasaran hasil produksi subsektor Peternakan (Kontes Ternak)	Meningkatnya pengolahan dan pemasaran hasil produksi subsektor peternakan (%)	100	300	DINAS PERTANIAN
					Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Hewan Menular Strategis Zoonosis dan Gangguan Reproduksi	Menurunnya angka kesakitan dan kematian ternak akibat penyakit menular/zoonosis pada ternak (%)	100	450	DINAS PERTANIAN
					Pengawasan mutu hasil ternak (Kesmavet)	Terlaksananya pengawasan mutu hasil ternak (Pelaku usaha)	80	200	DINAS PERTANIAN
					Pengawasan dan bimtek pengolahan limbah ternak / pupuk kompos / organik	Terlaksananya pengawasan dan bimtek pengolahan limbah ternak / pupuk kompos / organik (Kelompok)	30	500	DINAS PERTANIAN
		Pengembangan Kawasan Strategis KTM Batu Betumpang	PROGRAM PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	Tersedianya Kawasan budiaya komoditas padi di KTM Batu Betumpang	Fasilitasi penerapan budidaya padi di KTM Batu Betumpang	Penerapan budidaya padi	600	600	DINAS PERTANIAN
				Tersedianya Kawasan budiaya komoditas cabai di KTM Batu Betumpang	Fasilitasi penerapan budidaya cabai di KTM Batu Betumpang	Penerapan budidaya cabai	30	1.500.000	DINAS PERTANIAN
				Tersedianya Kawasan budiaya bawang merah di KTM Batu Betumpang	Fasilitasi penerapan budidaya bawang merah di KTM Batu Betumpang	Penerapan budidaya bawang merah	15	500	DINAS PERTANIAN
				Tingkat produktifitas petani dikawasan KTM Batu	Pengembangan komoditi tanaman pangan dan	Jumlah kelompok tani yang mengalami	6	65	DINAS PERTANIAN

NO.	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019						
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2019	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Betumpang	hortikultura melalui penerapan budidaya tanaman yang baik di KTM Batu Betumpang	peningkatan kualitas SDM pertanian			
			PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di Kawasan Strategis KTM Batu Betumpang	Peningkatan/pembangunan Jalan	Panjang jalan yang ditingkatkan / dibangun di kawasan KTM batu betumpang	3 Km	13.800.000.000	DINAS PUPR
					Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan yang terpelihara di kawasan KTM batu betumpang	3 Km	8.280.000.000	DINAS PUPR
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	Persentase penyediaan volume air baku di Kawasan Strategis KTM Batu Betumpang	Perencanaan pembangunan prasarana penyediaan air baku	Jumlah dokumen yang tersusun di kawasan KTM batu betumpang			DINAS PUPR
				Persentase penyediaan volume air baku di Kawasan Strategis KTM Batu Betumpang	Pembangunan Prasarana penyediaan air baku	Jumlah kapasitas tampungan air baku di kawasan KTM batu betumpang			DINAS PUPR
			PROGRAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Tingkat kesejahteraan petani masyarakat transmigrasi di kawasan KTM Batu Betumpang	peningkatan fungsi POKJA KTM tingkat provinsi	jumlah laporan hasil rapat dengan Tim POKJA KTM	1 laporan	81.520.000	DISNAKER
					peningkatan kapaitas SDM bidang transmigrasi	jumlah warga transmigrasi yang mendapat peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam meningkatkan kualitas hidup di kawasan transmigrasi	150 orang	-	DISNAKER
		Pengembangan Kawasan Strategis Kota Terpadu Mandiri Gantung	PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	Persentase Tersedianya Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kota Terpadu Mandiri Gantung	Penyusunan RDTR/RRTR Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah Dokumen Regulasi RRTR KSP KTM Mandiri Gantung	0%	-	DINAS PUPR
			PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di kawasan Kota terpadu mandiri Gantung	Peningkatan/pembangunan Jalan	Panjang jalan yang ditingkatkan / dibangun di KSP KTM Mandiri Gantung	3 Km	13.800.000.000	DINAS PUPR



NO.	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019						
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2019	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			PROGRAM PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	Tersedianya Kawasan budidaya komoditas padi di kawasan kota terpadu mandiri Gantung	Fasilitasi penerapan budidaya padi di KTM gantung	Penerapan budidaya padi	400	400.000.000	DINAS PERTANIAN
				Tersedianya Kawasan Budidaya komoditas cabai di Kawasan kota Terpadu mandiri Gantung	Fasilitasi penerapan budidaya cabai di KTM gantung	Penerapan budidaya cabai	30	1.500.000.000	DINAS PERTANIAN
				Tersedianya Kawasan Budidaya bawang merah di Kawasan Kota Terpadu Mandiri Gantung	Fasilitasi penerapan budidaya bawang merah di KTM gantung	Penerapan budidaya bawang merah	15	500.000.000	DINAS PERTANIAN
				Tingkat produktifitas petani dikawasan KTM Gantung	Pengembangan komoditi tanaman pangan dan hortikultura melalui penerapan budidaya tanaman yang baik di KTM gantung	Jumlah kelompok tani yang mengalami peningkatan kualitas SDM pertanian	6	65.000.000	DINAS PERTANIAN
			PROGRAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Tingkat kesejahteraan petani masyarakat transmigrasi di kawasan KTM Gantung	peningkatan kapaitas SDM bidang transmigrasi	jumlah warga transmigrasi yang mendapat peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam meningkatkan kualitas hidup di kawasan transmigrasi	90 orang	185.000.000	DISNAKER
		Pengembangan kawasan Agropolitan dan Tekno park Pertanian Lada Air Gegas	PROGRAM PENGEMBANGAN PERKEBUNAN	Tersedianya kawasan Pengembangan budidaya lada	Ekstensifikasi/Perluasan areal tanaman perkebunan	Perluasan tanaman perkebunan pada kawasan Agropolitan dan Tekno park Pertanian Lada Air Gegas	50	950.000.000	DINAS PERTANIAN
					Fasilitasi teknis pengembangan tanaman perkebunan	sarana prasarana mendukung pengembangan tanaman perkebunan	2	570.000.000	DINAS PERTANIAN
			PROGRAM PENGEMBANGAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	Tersedianya Kawasan pengembangan ternak sapi	Pemantapan kawasan budidaya ternak Prov.Kep.Bangka Belitung	tertetapkannya kawasan budidya padi Prov.Kep.Bangka Belitung	-	3.590.000.000	DINAS PERTANIAN
			PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA LINGKUNGAN	Tersedinya Dokumen KLHS Agropolitan Berbasis Demonstration Farming Sawah	Dokumen KLHS Agropolitan Berbasis Demonstration Farming Sawah Mekanisasi	Jumlah Dokumen KLHS Agropolitan Berbasis Demonstration Farming	1 Dokumen	650.000.000	DLH

NO.	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019						
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2019	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			HIDUP	Mekanisasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang digunakan dalam perencanaan kawasan	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Sawah Mekanisasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			
2	PEMBANGUNAN BAHARI	Pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang laut serta penegakan perundang-undangan kelautan dan perikanan.	PROGRAM PENGEMBANGAN PENGELOLAAN RUANG LAUT	Luas Kawasan Konservasi yang dicadangkan (Ha)	Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah	Luas kawasan konservasi Perairan Daerah yang ditetapkan (Ha)	544	500.000.000	DKP
					Review Profil Pulau Pulau Kecil	Jumlah pulau-pulau kecil yang terdata (Pulau)	120	1.600.000.000	DKP
				Persentase sarana dan prasarana yang terbangun di Desa Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	Pembangunan Dermaga Jetty	Jumlah sarana dan prasarana yang dimanfaatkan oleh masyarakat pesisir (Jetty)	4,00	8.856.000.000,00	DKP
					Desalinasi Air Laut	Jumlah sarana dan prasarana yang dimanfaatkan oleh masyarakat pesisir (Unit)	3,00	600.000.000,00	DKP
				Persentase Usulan Pemanfaatan Ruang Laut yang terekomendasi (%)	Peningkatan Fungsi Pengelolaan Ruang Laut	Jumlah Rekomendasi Teknis Penerbitan Perizinan (Rekomendasi Izin)	5,00	180.000.000,00	DKP
					Identifikasi dan Survey Pengembangan dan Pemanfaatan Ruang Laut	Jumlah rekomendasi teknis penerbitan perizinan (Rekomendasi Izin)	7,00	276.000.000,00	DKP
			PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Pelaku Usaha yang Taat Aturan (%)	Pengawasan sumber daya kelautan	Jumlah hari operasi kapal pengawas (Hari Operasi)	160,00	1.450.000.000	DKP
					Pengawasan sumber daya perikanan	Jumlah Pokmaswas aktif (Kelompok)	55,00	450.000.000	DKP
					Pengawasan tindak pidana kelautan dan perikanan	Jumlah perkara tindak pidana kelautan dan perikanan yang selesai	10,00	200.000.000	DKP

NO.	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019						
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2019	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						disidik secara akuntabel dan tepat waktu serta data dan informasi tindak pidana kelautan dan perikanan di kab/kota yang akuntabel (Berkas)			
					Peningkatan fungsi BOOST Center	Jumlah Bulan layanan fungsi BOOST Center (Bulan Layanan)	12,00	240.000.000	DKP
					Peningkatan Kualitas SDM Pengawasan	Jumlah SDM Pengawasan yang dibina (Orang)	50,00	210.000.000	DKP
			PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN LAUT	Prosentase Pelabuhan Khusus (Pelsus) dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) yang memiliki izin	Pengawasan atas Rekomendasi Pelabuhan Khusus / Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS)	Jumlah Pelabuhan Khusus / Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) diawasi.	35 Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri	300.000.000	DISHUB
					Sosialisasi Keselamatan Pelayaran untuk Pengguna Jasa Pelayaran	Jumlah Pengguna Jasa Pelayaran yang mendapatkan Sosialisasi Keselamatan Pelayaran	100 orang	180.000.000	DISHUB
					Survey dan Inventarisasi kebutuhan sektor perhubungan laut	Jumlah Dokumen Survey dan Inventarisasi kebutuhan sektor perhubungan laut	1 Dok	150.000.000	DISHUB
					Pembinaan bagi Stakeholder Sektor Perhubungan Laut	Jumlah Peserta Pembinaan bagi stake holder transportasi laut mengenai Peraturan-peraturan Bidang Transportasi Laut.	40 orang	104.260.200	DISHUB
					Pengadaan Peralatan Survey (Drone, GPS, Sounder, HT, Camera, Peta)	Jumlah pengadaan Peralatan Survey (Drone, GPS, Sounder, HT, Camera, Peta)	1 paket (5 unit alat survey dan 6 lembar peta)	160.146.000	DISHUB
		Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LATIHAN KERJA	Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan tentang Kelautan dan perikanan yang berkompetensi	pelatihan keterampilan bagi pencari kerja di Kabupaten/Kota	jumlah paket pelatihan bagi pencari kerja bidang Kelautan dan perikanan yang mendapat pelatihan	2 paket	250.000.000	UPTD BLKI

NO.	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019						
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2019	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		saing sektor Kelautan dan Perikanan	INDUSTRI						
			PROGRAM PENGEMBANGAN PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase peningkatan tenaga kerja kelautan dan perikanan bersertifikat kompetensi	Sertifikasi tenaga kerja	jumlah tenaga kerja kelautan dan perikanan bersertifikat kompetensi	30 orang	300.000.000	DISNAKER
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase peningkatan produktifitas tenaga kerja sektor Perikanan	pengembangan kompetensi SDM di desa produktif	jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan peningkatan produksi sektor perikanan	30 orang	57.857.000	UPTD BALAI PRODUKTIFITAS
			PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KEJURUAN	Persentase Jumlah SMK dengan program keahlian perikanan yang memiliki akreditasi A	Kegiatan Peningkatan Sarana/Prasarana dan Pengembangan Kelembagaan SMK	Jumlah SMK Kelautan dan Perikanan Bekerja Memiliki Unit Produksi	1		DINAS PENDIDIKAN
				Persentase Jumlah SMK Program Keahlian Kelautan dan Perikanan yang mengeluarkan Sertifikasi Profesi pihak 1 (LSP-P1)		Jumlah SMK Kelautan dan Perikanan Bekerja sama dengan DUDI	1		DINAS PENDIDIKAN
		Peningkatan Produksi, Kualitas dan produktifitas tenaga kerja sektor Kelautan dan perikanan	PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI	persentase peningkatan volume usaha sektor kelautan dan perikanan	Pendampingan pemasaran, kemitraan, permodalan dan jaringan usaha	jumlah koperasi yang mendapatkan pendampingan kemitraan usaha		185.000.000	DINAS KUMKM
						jumlah pengurus koperasi yang memahami manajemen pengembangan usaha		124.300.000	DINAS KUMKM
						Jumlah anggota koperasi yang mengelola hasil produksi SDA menjadi produk olahan yang diikutkan pada even		230.000.000	DINAS KUMKM

NO.	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019						
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2019	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						pameran lokal dan /atau nasional			
						jumlah produk/usaha koperasi yang dikembangkan pada kawasan strategis provinsi		190.000.000	DINAS KUMKM
					Pengembangan, penguatan dan perlindungan koperasi	jumlah pengawas koperasi yang memahami teknis pengawasan intern koperasi		110.000.000	DINAS KUMKM
						Jumlah pengurus koperasi yang mendapatkan Bimtek Penyusunan SOP Usaha Koperasi		94.500.000	DINAS KUMKM
						Aplikasi pengolah data koperasi		12.500.000	DINAS KUMKM
					Peningkatan Kualitas SDM Koperasi	jumlah Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) yang diberdayakan di 7 (tujuh) kabupaten/kota		148.000.000	DINAS KUMKM
						Jumlah pembina koperasi dan PPKL yang mendapatkan pembekalan tentang Perkoperasian		135.000.000	DINAS KUMKM
						jumlah pengurus koperasi yang mendapatkan pemahaman kewirausahaan		135.000.000	DINAS KUMKM
			PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN USAHA KECIL	persentase pelaku usaha kecil sektor kelautan dan perikanan yang menandatangani kesepakatan kemitraan dengan dunia usaha luar daerah	Pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha kecil	jumlah pelaku usaha kecil sektor kelautan dan perikanan yang menandatangani kesepakatan kemitraan dengan dunia usaha luar daerah	10	150.000.000	DINAS KUMKM
				persentase Usaha Kecil sektor kelautan dan perikanan yang	Pendampingan dan Promosi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil sektor kelautan dan perikanan	950	95.000.000	DINAS KUMKM

NO.	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019						
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2019	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				mendapatkan Izin Usaha		yang mendapatkan IUMK			
				persentase Usaha Kecil sektor kelautan dan perikanan yang difasilitasi promosi/ pemasaran produknya melalui even pameran	Pendampingan dan Promosi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil sektor kelautan dan perikanan yang difasilitasi promosi/ pemasaran produknya melalui even pameran	13	342.000.000	DINAS KUMKM
				persentase Usaha Kecil sektor kelautan dan perikanan yang mendapatkan Diseminasi dan pendampingan akses permodalan	Pendampingan dan Promosi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil sektor kelautan dan perikanan yang mendapatkan Diseminasi dan pendampingan akses permodalan	20	80.000.000	DINAS KUMKM
				persentase Usaha kecil sektor kelautan dan perikanan yang difasilitasi promosi/ pemasaran produknya melalui web	Pendampingan dan Promosi Usaha Kecil	Jumlah Usaha kecil sektor kelautan dan perikanan yang difasilitasi promosi/ pemasaran produknya melalui web	55	100.000.000	DINAS KUMKM
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LATIHAN PERKOPERASIAN, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH		Penyelenggaraan Pelatihan Perkoperasian dan UKM	jumlah SDM Koperasi sektor perikanan terlatih	0	244.500.000	UPTD BALAI LATIHAN PERKOPERASIAN, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
				persentase SDM Usaha Kecil sektor perikanan terlatih	Penyelenggaraan Pelatihan Perkoperasian dan UKM	jumlah SDM Usaha Kecil sektor perikanan terlatih	0	650.980.000	UPTD BALAI LATIHAN PERKOPERASIAN, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBERDAYA, FASILITASI DAN AKSES INDUSTRI	Persentase Tenaga Kerja yang terserap di Industri Kelautan dan Perikanan	Peningkatan kapasitas SDM industri sektor kelautan dan perikanan melalui pelatihan	Jumlah SDM yang terlatih	20	160.000.000	DISPERINDAG
					Pemetaan dan Penetapan SDA industri Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen SDA industri Kelautan dan Perikanan	1	120.000.000	DISPERINDAG
			PROGRAM	Volume Produksi Perikanan	Pengadaan Vaksinasi dan Cara	Jumlah Pembudidaya	200	230.000.000	DKP

NO.	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019						
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2019	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN BUDIDAYA DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	Budidaya (Ton)	Pemberian Vaksinasi Perikanan Budidaya	yang dibantu Vaksinasi Perikanan (Orang)			
					Pengadaan Mesin Pembuat Pakan Ikan	Jumlah sarana dan prasarana perikanan budidaya yang diadakan bagi masyarakat (Unit)	7	400.000.000	DKP
					Percontohan Budidaya Perikanan	Jumlah Luasan Areal Budidaya (Paket)	4	350.000.000	DKP
				Angka Konsusmsi Ikan (Kg/Org/Tahun)	Pengembangan dan Pembinaan Promosi serta Kerjasama Pemasaran	Jumlah promosi usaha perikanan (Kegiatan)	5	731.000.000	DKP
					Pameran Sektor Kelautan dan Perikanan	Jumlah promosi usaha perikanan (Pameran)	4	715.000.000	DKP
				Volume Produksi Olahan (ton)	Pembinaan Pra-Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP) untuk Unit Pengolahan Ikan	Jumlah pelaku usaha yang dibina untuk mendapatkan penerbitan SKP pada UPI skala menengah-besar maupun skala mikro-kecil (Pelaku Usaha)	30	175.000.000	DKP
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	Volume Produksi Perikanan Tangkap (Ton/Tahun)	Peningkatan dan Pengembangan PPI	Jumlah PPI yang ditingkatkan dan dikembangkan (PPI)	4	6.300.000.000	DKP
					Pengadaan Kapal Perikanan Tangkap Lengkap	Jumlah sarana dan prasarana perikanan tangkap yang diadakan bagi masyarakat (Kapal)	20	10.500.000.000	DKP
					pengadaan sarana dan prasarana perikanan tangkap	Jumlah sarana dan prasarana perikanan tangkap yang diadakan bagi masyarakat (Unit)	1.02	3.660.000.000	DKP
					Pemantauan dan evaluasi kesesuaian sarana dengan aktivitas nelayan	Jumlah Nelayan yang dipantau dan dievaluasi kesesuaian sarana dengan Aktivitas perikanan Tangkap (Orang)	85	90.000.000	DKP

NO.	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019						
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2019	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Peningkatan Pelayanan Perizinan Perikanan Tangkap	Jumlah Rekomendasi Teknis Penerbitan Perizinan (Rekomendasi)	300	275.000.000	DKP
					peningkatan fungsi syahbandar pelabuhan perikanan	Jumlah bulan layanan fungsi syahbandar pelabuhan perikanan (Bulan)	12	120.000.000	DKP
				Nilai Tukar Nelayan (Indeks)	Peningkatan Kesejahteraan Nelayan	Jumlah Nelayan yang dibantu sarana dan prasarannya (Orang)	700	2.400.000.000	DKP
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PEMBENIHAN IKAN AIR PAYAU	Pertambahan Jumlah Produksi Benih Ikan yang unggul (Juta Ekor)	Peningkatan Produksi UPTD Balai Benih Ikan Air Payau (BBIAP)	Jumlah produksi benih (Juta Ekor)	2.640,00	750.000.000	UPTD BALAI BENIH IKAN AIR PAYAU (BBIAP) TANJUNG KRASAK
					Penanganan Hama dan Penyakit Ikan Air Payau	Tingkat survival rate benih (%)	30	135.000.000	UPTD BALAI BENIH IKAN AIR PAYAU (BBIAP) TANJUNG KRASAK
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PEMBENIHAN IKAN LAUT	Pertambahan Jumlah Produksi Benih Ikan yang unggul (Juta Ekor)	Peningkatan Produksi UPTD Balai Benih Ikan Laut (BBIL) Tanjung Rusa	Jumlah produksi benih (Juta Ekor)	0,065	440.000.000	UPTD BALAI BENIH IKAN LAUT (BBIL) TANJUNG RUSA
					Penanganan Hama dan Penyakit Ikan Laut	Tingkat Survival Rate Benih (%)	30	100.000.000	UPTD BALAI BENIH IKAN LAUT (BBIL) TANJUNG RUSA
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PEMBENIHAN IKAN AIR TAWAR	Pertambahan Jumlah Produksi Benih Ikan yang unggul (Juta Ekor)	Peningkatan Fungsi Pelayanan Balai Benih Ikan Sentral (BBIS)	Jumlah layanan fungsi produksi dan penanganan hama dan penyakit (Bulan Layanan)	12	115.500.000	UPTD BALAI BENIH IKAN SENTRAL (BBIS) PEMALI
		Pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja sektor kelautan dan	PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN,	persentase perusahaan kelautan perikanan yang diperiksa dan dibina sesuai standar pemeriksaan perusahaan	pemeriksaan norma kerja dan norma K3	jumlah perusahaan kelautan perikanan yang diperiksa dan dibina	10 perusahaan	7.670.000	DISNAKER



NO.	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019						
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2019	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		perikanaan	PEMBINAAN HUB. INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL						
		Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing sektor kelautan dan perikanaan	PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI	Persentase jumlah koperasi bidang Kelautan dan Perikanaan yang berkualitas sesuai standar	Peningkatan Partisipasi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan Perkoperasian	jumlah koperasi yang mendapatkan pendampingan penyusunan regulasi internal	30	54.000.000	DINAS KUMKM
						jumlah koperasi yang mendapatkan pembinaan Keanggotaan dan Penerapan Peraturan	30	45.000.000	DINAS KUMKM
						jumlah koperasi yang mendapatkan bimbingan teknis SOP koperasi	10	35.000.000	DINAS KUMKM
						jumlah koperasi yang mendapatkan bimbingan teknis manajemen pengelolaan koperasi	10	40.000.000	DINAS KUMKM
						jumlah koperasi yang mendapatkan bimbingan teknis tentang partisipasi keanggotaan koperasi	10	25.000.000	DINAS KUMKM
						jumlah koperasi yang mengikuti kegiatan konsep good cooperative governance (GCG)	10	25.000.000	DINAS KUMKM
						jumlah koperasi yang melakukan kerja sama dengan lembaga lain	10	85.650.000	DINAS KUMKM
					Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan Koperasi	jumlah koperasi yang mendapatkan Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan	20	70.000.000	DINAS KUMKM
						jumlah calon penerima penghargaan koperasi	2	43.800.000	DINAS KUMKM

NO.	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019						
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2019	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						berprestasi tingkat nasional			
						jumlah calon penerima penghargaan tokoh penggerak koperasi	2	43.800.000	DINAS KUMKM
						Jumlah koperasi/pembina koperasi yang mengikuti rakor penguatan stake holder koperasi	40	65.000.000	DINAS KUMKM
						jumlah koperasi yang mengikuti kegiatan konsep good cooperative governance (GCG)	10	20.000.000	DINAS KUMKM
						jumlah pengawas/pembina koperasi yang mendapatkan pembekalan mengenai penilaian kesehatan KSP/USP	10	20.000.000	DINAS KUMKM
						jumlah koperasi yang mendapatkan pengawasan/pemeriksaan (KSP/USP)	20	60.000.000	DINAS KUMKM
				Persentase pertumbuhan kelembagaan koperasi aktif sektor kelautan dan perikanan	Peningkatan Kelembagaan dan Perizinan Koperasi	jumlah kelompok strategis yang mendapatkan sosialisasi mengenai pendirian koperasi	11	110.000.000	DINAS KUMKM
						jumlah akta notaris pendirian koperasi baru	6	80.000.000	DINAS KUMKM
						jumlah pembina/pengurus/notaris yang mendapatkan pembekalan mengenai perkuatan kelembagaan koperasi	10	20.000.000	DINAS KUMKM
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS	Persentase Produk Hasil Kelautan dan Perikanan yang memenuhi standar mutu dan	Peningkatan kapasitas pengujian mutu hasil produk kelautan dan perikanan	Jumlah sampel yang diuji untuk keamanan pangan produk kelautan dan	650,00	5.500.000.000	UPTD LABORATORIUM PENGUJIAN

NO.	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019						
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2019	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			LABORATORIUM PENGUJIAN DAN PENGENDALIAN MUTU HASIL PERIKANAN	keamanan pangan		perikanan dari bahan berbahaya (sampel)			DAN PENGENDALIA N MUTU HASIL PERIKANAN
					Pembinaan, Supervisi dan Sosialisasi Penerapan Standar Mutu dan Keamanan Pangan Produk Hasil Kelautan dan Perikanan	Jumlah UPI yang dibina dalam rangka memenuhi standar sertifikasi mutu dan keamanan pangan hasil produk kelautan dan perikanan (UPI)	75,00	150.000.000	UPTD LABORATORIUM PENGUJIAN DAN PENGENDALIA N MUTU HASIL PERIKANAN
					Peningkatan fungsi laboratorium pengujian dan pengendalian mutu hasil perikanan	jumlah Bulan layanan fungsi pengujian dan pengendalian mutu hasil perikanan (Bulan Layanan)	12,00	900.000.000	UPTD LABORATORIUM PENGUJIAN DAN PENGENDALIA N MUTU HASIL PERIKANAN
		Pengembangan produk Kelautan dan perikanan, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di sektor kelautan dan perikanan.	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Pertambahan Jumlah profil investasi Sektor perikanan dan kelautan yang digunakan untuk promosi investasi di sektor perikanan dan Kelautan	Studi Kelayakan Potensi Investasi Sektor Potensi	Jumlah kajian potensi investasi sektor potensi	1 Kajian	400.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
					Pemutakhiran Data Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID)	Jumlah pengelola data SIPID yang terlatih	10 orang	37.500.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

NO.	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019						
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2019	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									SATU PINTU
					Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal Daerah (RKPPMD)	Jumlah peserta yang mengikuti rapat koordinasi	10 orang	25.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
					Sosialisasi Informasi terkini regulasi kebijakan di Bidang Penanaman Modal	Jumlah peserta sosialisasi	10 orang	25.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
				Pertambahan Jumlah UKM Sektor kelautan dan perikanan yang bermitra dengan investor	Pelaksanaan Matchmaking daerah	Jumlah UMK potensial dan PMA/PMDN yang melaksanakan kemitraan usaha	1 UMKM	375.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
					Workshop Pengembangan Usaha Daerah	Jumlah pelaksanaan workshop	1 kali	125.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
					Forum Komunikasi Pemberdayaan usaha daerah	Jumlah peserta forum komunikasi	10 peserta	25.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
					Peningkatan Pelayanan Peluang Investasi	Jumlah calon investor yang di fasilitasi	2 calon investor	31.250.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI PENANAMAN	Pertambahan Jumlah Investor sektor kelautan dan perikanan	Penyelenggaraan Pameran Investasi	Jumlah pameran investasi	1 pameran sektor kelautan dan	180.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN

NO.	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019						
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2019	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			MODAL				perikanan		PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
					Pembuatan Bahan Promosi	Jumlah sektor bahan promosi	bahan promosi 1 sektor kelautan dan perikanan	55.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DAN SISTEM INFORMASI	Presentase perusahaan sektor kelautan dan perikanan yang sesuai realisasi investasi dengan rencana investasi	Digitalisasi data dan informasi penanaman modal	jumlah data dan informasi penanaman modal berdasarkan sektor	1 data dan informasi penanaman modal sektor kelautan dan perikanan	50.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
					Monitoring dan Evaluasi Perizinan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang telah dilakukan pembinaan berdasarkan sektor	15 Perusahaan Sektor Kelautan	100.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
					Workshop Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	jumlah perusahaan yang mengikuti workshop	10 perusahaan sektor kelautan dan perikanan	25.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
					Penyusunan Data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	Jumlah perusahaan yang melaporkan data LKPM	15 perusahaan sektor kelautan dan perikanan	41.250.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
					Sosialisasi Peraturan terkait Penanaman Modal		10 perusahaan sektor kelautan dan perikanan	22.500.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO.	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019						
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2019	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Penyusunan standar operasional prosedur (SOP) pelayanan persetujuan penanaman modal	jumlah SOP pelayanan persetujuan penanaman modal berdasarkan sektor	1 SOP sektor kelautan dan perikanan	12.500.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN USAHA KECIL	Peningkatan produk Usaha kecil sektor kelautan dan perikanan yang tersertifikasi	Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil	jumlah produk Usaha kecil sektor kelautan dan perikanan yang tersertifikasi	550	2.475.000.000	DINAS KUMKM
				pertambahan jumlah pelaku usaha kecil sektor kelautan dan perikanan yang menandatangani kesepakatan kemitraan dengan dunia usaha dalam daerah	Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil	jumlah pelaku usaha kecil sektor kelautan dan perikanan yang menandatangani kesepakatan kemitraan dengan dunia usaha luar daerah	160	173.500.000	DINAS KUMKM
		Pengembangan Kawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok	PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap dikawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok	pengadaan sarana dan prasarana perikanan tangkap	Jumlah sarana dan prasarana perikanan tangkap yang diadakan bagi masyarakat (Unit)	170	610.000.000	DKP
			PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN BUDIDAYA DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya dikawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya	Jumlah sarana dan prasarana perikanan budidaya yang diadakan bagi masyarakat (Paket)	1	73.000.000	DKP
			PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI	Persentase koperasi aktif di kawasan strategis minapolitan Lepar Pongok	Peningkatan Kelembagaan dan Perizinan Koperasi	jumlah koperasi yang mendapatkan pendampingan mengenai penerapan prinsip dasar perkoperasian	5	17.000.000	DINAS KUMKM
						jumlah koperasi yang memahami pembuatan laporan RAT	5	17.000.000	DINAS KUMKM
			PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN USAHA KECIL	persentase Usaha Kecil dikawasan Minapolitan Lepar Pongok yang mendapatkan Izin Usaha	Pendampingan dan Promosi usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil dikawasan Minapolitan Lepar Pongok yang mendapatkan IUMK	25	2.500.000	DINAS KUMKM

NO.	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019						
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2019	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				persentase Usaha Kecil dikawasan Minapolitan Lepar Pongok yang mendapatkan pendampingan akses permodalan	Pendampingan dan Promosi usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil dikawasan Minapolitan Lepar Pongok yang mendapatkan Diseminasi dan pendampingan akses permodalan	2	8.000.000	DINAS KUMKM
			PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH DAN PENGAWASAN INDUSTRI	Pertumbuhan Jumlah Industri perikanaan dikawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok	Pengembangan kawasan strategis/kawasan industri/sentra	Jumlah dokumen tersusun (dokumen)	1	400.000.000	DISPERINDAG
					Pembinaan dan penyuluhan pembentukan Sentra Industri	Jumlah lokasi pembinaan dan penyuluhan terhadap industri (lokasi)	2	150.000.000	DISPERINDAG
					Monev kawasan strategis/ kawasan industri/ sentra	Jumlah dokumen tersusun (dokumen)	1	300.000.000	DISPERINDAG
					Pembinaan kawasan strategis/ kawasan industri/ sentra	Jumlah lokasi pembinaan (lokasi)	2	250.000.000	DISPERINDAG
			PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP	Tersedianya Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Minapolitan Lepar Pongok yang digunakan untuk perencanaan kawasan	Penyusunan Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Minapolitan Lepar Pongok	Jumlah Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Minapolitan Lepar Pongok	1 Dokumen	1.000.000.000	DLH
			PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN LAUT	Prosentase pemenuhan Sarana dan Prasarana pendukung Perhubungan Laut Kawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok	SID dan DED Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	Jumlah Dokumen SID dan DED Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) di Kawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok	2 dokumen	450.000.000	DISHUB
			PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	Persentase jumlah Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kawasan Minapolitan Lepar Pongok yang di implementasikan	Penyusunan RDTR/RRTR Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah Dokumen Regulasi RRTR KSP Kawasan Minapolitan Lepar Pongok	1 Dokumen RRTR KSP Kawasan Minapolitan Lepar Pongok	1.500.000.000	DINAS PUPR
			PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap	Peningkatan/pembangunan Jalan	Panjang jalan yang ditingkatkan / dibangun	1,5 Km	6.900.000.000	DINAS PUPR

NO.	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019						
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2019	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				di Kawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok		di KSP Kawasan Minapolitan Lepar Pongok			
					Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan yang terpelihara di KSP Kawasan Minapolitan Lepar Pongok	1,5 Km	3.450.000.000	DINAS PUPR
		Pengembangan Kawasan Strategis etalase Perikanan Selat Nasik	PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN BUDIDAYA DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya dikawasan Strategis etalase perikanan selat nasik	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya	Jumlah sarana dan prasarana perikanan budidaya yang diadakan bagi masyarakat (Paket)	1	73.000.000	DKP
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap dikawasan Strategis Etalase Perikanan Selat Nasik	pengadaan sarana dan prasarana perikanan tangkap	Jumlah sarana dan prasarana perikanan tangkap yang diadakan bagi masyarakat (Unit)	170	610.000.000	DKP
			PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI	Persentase koperasi aktif di kawasan strategis etalase perikanan selat nasik	Peningkatan Kelembagaan dan Perizinan Koperasi	jumlah koperasi yang mendapatkan pendampingan mengenai penerapan prinsip dasar perkoperasian	5	17.000.000	DINAS KUMKM
						jumlah koperasi yang memahami pembuatan laporan RAT	5	17.000.000	DINAS KUMKM
			PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN USAHA KECIL	persentase Usaha Kecil dikawasan strategis etalase perikanan selat nasik yang mendapatkan Izin Uaha	Pendampingan dan Promosi usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil dikawasan strategis etalase perikanan selat nasik yang mendapatkan IUMK	25	2.500.000	DINAS KUMKM
				persentase Usaha Kecil dikawasan Sentra Selat Nasik yang mendapatkan pendampingan akses permodalan	Pendampingan dan Promosi usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil dikawasan Sentra Selat Nasik yang mendapatkan pendampingan akses permodalan	2	8.000.000	DINAS KUMKM
			PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH DAN	Pertumbuhan Jumlah Industri perikanan dikawasan Strategis Etalase Perikanan Selat Nasik	Pengembangan kawasan strategis/kawasan industri/sentra	Jumlah dokumen tersusun (dokumen)	1	400.000.000	DISPERINDAG



NO.	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019						
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2019	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			PENGAWASAN INDUSTRI						
					Pembinaan dan penyuluhan pembentukan Sentra Industri	Jumlah lokasi pembinaan dan penyuluhan terhadap industri (lokasi)	2	150.000.000	DISPERINDAG
					Monev kawasan strategis/ kawasan industri/ sentra	Jumlah dokumen tersusun (dokumen)	1	300.000.000	DISPERINDAG
					Pembinaan kawasan strategis/ kawasan industri/ sentra	Jumlah lokasi pembinaan (lokasi)	2	250.000.000	DISPERINDAG
			PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di Kawasan Strategis etalase Perikanan Selat Nasik	Peningkatan/pembangunan Jalan	Panjang jalan yang terpelihara di Kawasan Strategis etalase Perikanan Selat Nasik			DINAS PUPR
			PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN LAUT	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung perhubungan laut kawasan strategis etalase perikanan Selat Nasik	SID dan DED Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	Jumlah Dokumen SID dan DED Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	2 dokumen	450.000.000	DISHUB
			PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	Persentase Jumlah Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kawasan Etalase Perikanan Selat Nasik yang diimplementasikan	Penyusunan RDTR/RRTR Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah Dokumen Regulasi RRTR KSP Kawasan Etalase Perikanan Selat Nasik	1 Dokumen RRTR KSP Kawasan Etalase Perikanan Selat Nasik	1.500.000.000	DINAS PUPR
		Pengembangan Kawasan Strategis Industri Perikanan Tanjung Binga	PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI	Persentase koperasi aktif di kawasan strategis industri perikanan Tanjung Binga	Peningkatan Kelembagaan dan Perizinan Koperasi	jumlah koperasi yang mendapatkan pendampingan mengenai penerapan prinsip dasar perkoperasian	5	17.000.000	DINAS KUMKM
						jumlah koperasi yang memahami pembuatan laporan RAT	5	17.000.000	DINAS KUMKM
						jumlah koperasi yang memahami revitalisasi fungsi kelembagaan koperasi			DINAS KUMKM
			PROGRAM	persentase Usaha Kecil	Pendampingan dan Promosi	Jumlah Usaha Kecil	25		DINAS KUMKM

NO.	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019						
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2019	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			PENINGKATAN PEMBERDAYAAN USAHA KECIL	dikawasan strategis industri perikanan Tanjung Binga yang mendapatkan Izin Usaha	usaha Kecil	dikawasan strategis industri perikanan Tanjung Binga yang mendapatkan IUMK		2.500.000	
				persentase Usaha Kecil dikawasan strategis industri perikanan Tanjung Binga yang mendapatkan Diseminasi dan pendampingan akses permodalan	Pendampingan dan Promosi usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil dikawasan strategis industri perikanan Tanjung Binga yang mendapatkan Diseminasi dan pendampingan akses permodalan	2	8.000.000	DINAS KUMKM
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	Pertumbuhan panjang bangunan pemecah gelombang atau penahan abrasi di kawasan Strategis Industri Perikanan Tanjung Binga	Perencanaan pembangunan prasarana pengaman pantai	Jumlah dokumen yang tersusun	1 Dok	750.000.000	DINAS PUPR
				Persentase penyediaan volume air baku di kawasan Strategis Industri Perikanan Tanjung Binga	Perencanaan pembangunan prasarana penyediaan air baku	Jumlah dokumen yang tersusun	1 Dok	250.000.000	DINAS PUPR
			PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di Kawasan Strategis Industri Perikanan Tanjung Binga	Pembangunan/Peningkatan Jalan	Panjang jalan yang ditingkatkan / dibangun Kawasan Strategis Industri Perikanan Tanjung Binga			DINAS PUPR
					Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan yang terpelihara Kawasan Strategis Industri Perikanan Tanjung Binga	1,5 Km	4.140.000.000	DINAS PUPR
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap dikawasan Strategis Industri Perikanan Tanjung Binga	pengadaan sarana dan prasarana perikanan tangkap	Jumlah sarana dan prasarana perikanan tangkap yang diadakan bagi masyarakat (Unit)	120	457.500.000	DKP
			PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN LAUT	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung perhubungan laut kawasan strategis Industri Perikanan Tanjung Binga	SID dan DED Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	Jumlah Dokumen SID dan DED Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	-	0%	DISHUB
			PROGRAM PENATAAN	Persentase Jumlah Regulasi	Penyusunan RDTR/RRTR	Jumlah Dokumen Regulasi	1 Dokumen		DINAS PUPR

NO.	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019						
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2019	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			RUANG DAN PERTANAHAN	Penataan Ruang Untuk Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kawasan Industri Perikanan Tanjung Binga yang diimplemtasikan	Kawasan Strategis Provinsi	RRTR KSP Kawasan Industri Perikanan Tanjung Binga	RRTR KSP Kawasan Kawasan Industri Perikanan Tanjung Binga	1.500.000.000	
		Pengembangan Kawasan Pedesaan Minapolitan Manggar	PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap di Kawasan Pedesaan Minapolitan Manggar	pengadaan sarana dan prasarana perikanan tangkap	Jumlah sarana dan prasarana perikanan tangkap yang diadakan bagi masyarakat (Unit)	50	152.500.000	DKP
			PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN LAUT	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung perhubungan laut Kawasan Pedesaan Minapolitan Manggar	SID dan DED Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	Jumlah Dokumen SID dan DED Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	-	0%	DISHUB
3	PENGEMBANGAN PARIWISATA	Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, ekonomi kreatif, peran serta masyarakat dan kelembagaan pariwisata	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA, EKONOMI KREATIF DAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN	Persentase sumber daya pariwisata yang terlatih dan tersertifikasi	Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Bagi Sumber Daya Pariwisata		350	875.000.000	BUDPAR
					Penyelenggaraan Sertifikasi bagi Sumber Daya Pariwisata		175	732.217.500	BUDPAR
					Penyelenggaraan sertifikasi Lanjutan bagi Sumber Daya Pariwisata		250	700.000.000	BUDPAR
					Kerjasama Pengembangan sistem sertifikasi bagi sumber daya pariwisata dengan asosiasi profesi dan LSP		2	367.500.000	BUDPAR
					Penyelenggaraan Lokakarya pelatihan dan sertifikasi sumber daya pariwisata		50	250.000.000	BUDPAR
					penerapan sistem magang berbasis kompetensi bagi pelajar sektor kepariwisataan		20	440.000.000	BUDPAR
					pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan dan hasil		1	148.610.000	BUDPAR

NO.	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019						
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2019	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					sertifikasi bagi sumber daya pariwisata				
				Presentase pelaku ekonomi kreatif yang terlatih	penyelenggaraan kegiatan wisata kuliner		50	184.800.000	BUDPAR
					pengembangan seni pertunjukan dan industri musik		1	201.363.000	BUDPAR
					Pengembangan Seni Rupa dan Seni Kriya		0	-	BUDPAR
					Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Aplikasi dan Pengembangan Permainan		1	302.500.000	BUDPAR
					Pengembangan Desain dan Arsitektur		1	385.000.000	BUDPAR
					Fasilitasi Pengembangan Sentra Inovasi dan pusat kreatif		1	611.105.000	BUDPAR
					Pengembangan Cenderamata Khas Kepulauan Bangka Belitung		2	495.000.000	BUDPAR
					pelatihan pengembangan industri Ekonomi Kreatif		30	298.431.000	BUDPAR
					Dukungan Event Festival Nusantara		30	523.551.000	BUDPAR
		Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, ekonomi kreatif, peran serta masyarakat dan kelembagaan pariwisata		Pertumbuhan kelembagaan pariwisata	Penyelenggaraan pemilihan putra-putri kepariwisataan provinsi kepulauan Bangka Belitung		1	521.850.000	BUDPAR
					Fasilitasi Penguatan Kapasitas Pengelolaan Kelembagaan Kepariwisata		1	500.000.000	BUDPAR
					Peningkatan serta kelembagaan dalam pengembangan pariwisata		1	157.500.000	BUDPAR

NO.	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019						
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2019	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					daerah				
					Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Pariwisata dalam Pembangunan Kepariwisata Daerah		1	184.485.000	BUDPAR
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan lintas sektor pariwisata		1	105.000.000	BUDPAR
					kajian peran kelembagaan dan pelaku pariwisata dalam pelaksanaan pembangunan kepariwisataan		2	492.200.000	BUDPAR
					pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan kelembagaan kepariwisataan		4	148.600.000	BUDPAR
		Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, ekonomi kreatif, peran serta masyarakat dan kelembagaan pariwisata	PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI	Pertumbuhan kelembagaan koperasi aktif pendukung pariwisata	Peningkatan Kelembagaan dan Perizinan Koperasi	jumlah kelompok strategis yang mendapatkan sosialisasi mengenai pendirian koperasi	6	55.000.000	KUMKM
						jumlah akta notaris pendirian koperasi baru	2	30.000.000	KUMKM
						jumlah pembina/pengurus/notaris yang mendapatkan pembekalan mengenai perkuatan kelembagaan koperasi	10	20.000.000	KUMKM
		Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, ekonomi kreatif, peran serta masyarakat dan kelembagaan pariwisata	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LATIHAN PERKOPERASIAN, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	Persentase SDM Koperasi sektor pariwisata terlatih	Penyelenggaraan Pelatihan Perkoperasian dan UKM	jumlah SDM Koperasi sektor pariwisata terlatih	0	163.000.000	KUMKM

NO.	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019						
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2019	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, ekonomi kreatif, peran serta masyarakat dan kelembagaan pariwisata		persentase SDM Usaha Kecil sektor pariwisata terlatih	Penyelenggaraan Pelatihan Perkoperasian dan UKM	jumlah SDM Usaha Kecil sektor pariwisata terlatih	0	650.980.000	KUMKM
			PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN USAHA KECIL	persentase Usaha Kecil sektor pariwisata yang mendapatkan Izin Usaha	Pendampingan dan Promosi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil sektor pariwisata yang mendapatkan IUMK	940	94.000.000	KUMKM
				persentase Usaha Kecil sektor pariwisata yang mendapatkan Diseminasi dan pendampingan akses permodalan	Pendampingan dan Promosi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil sektor pariwisata yang mendapatkan Diseminasi dan pendampingan akses permodalan	12	48.000.000	KUMKM
		Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, ekonomi kreatif, peran serta masyarakat dan kelembagaan pariwisata	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KEJURUAN	Persentase SMK pariwisata Terkreditasi A	Kegiatan Peningkatan Sarana/Prasarana dan Pengembangan Kelembagaan SMK	Jumlah SMK Pariwisata Bekerja Memiliki Unit Produksi	100,00%		DINAS PENDIDIKAN
		Peningkatan infrastruktur, sarana dan prasarana pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata.	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	Presentase objek wisata yang terkelola	Penyusunan Kalender Event Pariwisata dan Budaya Bangka Belitung		100%	157.500.000	BUDPAR
					Penyusunan Paket Wisata		100%	157.500.000	BUDPAR
					Pelaksanaan Forum Koordinasi Pengembangan Destinasi Pariwisata		100%	250.000.000	BUDPAR
					Studi pengembangan pada		100%		BUDPAR

NO.	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019						
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2019	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					100 daya tarik wisata (DTW) dan Interpretasi Pariwisata			284.024.000	
					Penyusunan RIRD Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPPP) Toboali dan Sekitarnya		100%	704.750.000	BUDPAR
					Penyusunan RIRD Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPPP) Selat Gaspar dan Sekitarnya		100%	704.750.000	BUDPAR
					Pemberdayaan Masyarakat di Destinasi Pariwisata		500%	189.654.000	BUDPAR
					Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Sarana di Destinasi Pariwisata		700%	2.836.240.000	BUDPAR
					Penyusunan DED Kawasan Agrowisata Unik Bangka Belitung		100%	250.000.000	BUDPAR
					Pembangunan Kawasan Agrowisata Unik Bangka Belitung		100%	776.018.000	BUDPAR
					Pembuatan Papan Informasi di Daya Tarik Wisata		1000%	200.000.000	BUDPAR
					Penyusunan Kajian Geopark Bangka dan Belitung		0%	-	BUDPAR
		Peningkatan infrastruktur, sarana dan prasarana pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata.	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	Persentase tingkat kunjungan wisatawan	Peningkatan Pencitraan Pariwisata Kepulauan Bangka Belitung (Bahan Promosi)		6	537.350.000	BUDPAR
					Pelayanan Informasi Pariwisata		4	134.728.000	BUDPAR
					Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Pemasaran Pariwisata Bangka Belitung		2	179.740.000	BUDPAR
					Pembuatan Bahan Publikasi		1	100.000.000	BUDPAR

NO.	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019						
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2019	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Publikasi Pariwisata		5	250.000.000	BUDPAR
					Kajian Pemasaran Pariwisata Bangka Belitung		1	142.000.000	BUDPAR
					Pelaksanaan Promosi Pariwisata dalam Negeri		4	273.350.000	BUDPAR
					Rapat Koordinasi Pemasaran Pariwisata Bangka Belitung		1	75.000.000	BUDPAR
					Partisipasi Event Promosi Pariwisata		15	2.750.000.000	BUDPAR
					Pelaksanaan Fam Trip		1	223.668.000	BUDPAR
					Pelaksanaan Tour d' Bangka Belitung Island		1	900.000.000	BUDPAR
					Pelaksanaan Promosi Pariwisata melalui Media		10	330.000.000	BUDPAR
					Roadshow Stakeholder Pariwisata		5	583.000.000	BUDPAR
					Pelaksanaan Promosi Pariwisata Luar Negeri		2	600.000.000	BUDPAR
					Penyusunan Profil Pasar Pariwisata Bangka Belitung		1	288.750.000	BUDPAR
					Babel Tourism Run		1	700.000.000	BUDPAR
		Peningkatan infrastruktur, sarana dan prasarana pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata.	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN LAUT	Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut di lokasi wisata	Penyusunan Study Kelayakan Pembangunan Pelabuhan Pulau -Pulau destinasi wisata	Jumlah Dokumen Pembangunan Pelabuhan Pulau -Pulau destinasi wisata	2 Dokumen (P.Lengkuas dan P.Ketawai)	900.000.000	DISHUB
					SID dan DED Pembangunan Pelabuhan Pulau -Pulau destinasi wisata	Jumlah Dokumen SID dan DED Pembangunan Pelabuhan	2 Dokumen (P.Mendanau )	750.000.000	DISHUB
		Peningkatan infrastruktur, sarana dan prasarana pengembangan destinasi dan	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN DARAT	Persentase pemenuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan darat dalam menunjang Daerah Tujuan Wisata	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan pada Jalan Provinsi di daerah destinasi wisata	Persentase perlengkapan jalan yang terpasang (Guard Rail), Paku Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL), Lampu Peringatan (WL),	20%	1.200.000.000	DISHUB



NO.	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019						
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2019	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		pemasaran pariwisata.				Deliniator, Marka Jalan, Rambu-rambu lalu lintas dan Lampu Penerangan Jalan (LPJU) di daerah destinasi wisata			
		Peningkatan infrastruktur, sarana dan prasarana pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata.	PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di daerah pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata.	Perencanaan Jalan	tersedianya dokumen perencanaan jalan di destinasi dan pemasaran pariwisata	4 dok	3.220.000.000	DINAS PUPR
					Pembangunan/Peningkatan Jalan	Panjang jalan yang ditingkatkan / dibangun di destinasi dan pemasaran pariwisata	23 km	105.800.000.000	DINAS PUPR
					Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan yang terpelihara di destinasi dan pemasaran pariwisata	30 km	69.000.000.000	DINAS PUPR
					Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan yang terpelihara di destinasi dan pemasaran pariwisata	846,33 km	29.198.385.000	DINAS PUPR
					Inspeksi Kondisi Jalan	tersedianya dokumen Data kondisi jalan di destinasi dan pemasaran pariwisata	1 dok	244.970.700	DINAS PUPR
					Pemeliharaan Alat-alat Laboratorium	Terpeliharanya alat-alat laboratorium kebinamargaan	1 paket	132.192.500	DINAS PUPR
					Pengadaan Alat-alat Berat	Tersedianya alat-alat berat	3 unit	4.000.000.000	DINAS PUPR
					Pengadaan Alat-alat Laboratorium	Tersedianya alat-alat laboratorium kebinamargaan	1 paket	200.000.000	DINAS PUPR
		Peningkatan infrastruktur, sarana dan		Persentase Jembatan Provinsi dalam kondisi baik di daerah pengembangan destinasi dan	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang jembatan dalam kondisi baik di destinasi dan pemasaran	216 unit	2.455.789.350	DINAS PUPR

NO.	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019						
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2019	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		prasarana pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata.		pemasaran pariwisata.		pariwisata			
					Perencanaan Pembangunan Jembatan	tersedianya dokumen perencanaan jembatan di destinasi dan pemasaran pariwisata	1 dok	1.674.147.000	DINAS PUPR
					Inspeksi Kondisi Jembatan	tersedianya dokumen Data kondisi jembatan di destinasi dan pemasaran pariwisata	1 dok	244.971.352	DINAS PUPR
					Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan dalam kondisi baik yang terbangun di destinasi dan pemasaran pariwisata	6 unit	24.000.000.000	DINAS PUPR
					Pengadaan Jembatan Bailey	Panjang Jembatan Bailey yang tersedia	2 unit	3.905.335.193	DINAS PUPR
					Operasional Jembatan Baturusa II	Terpeliharanta jembatan Baturusa II	784 m	2.390.620.000	DINAS PUPR
		Peningkatan infrastruktur, sarana dan prasarana pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata.	PROGRAM PENINGKATAN PUSAT PELAYANAN USAHA TERPADU KUMKM	Pertumbuhan produk parekras	Peningkatan Layanan Usaha Terpadu	jumlah pelaku usaha yang melakukan penjualan secara online	35	220.000.000	DINAS KUMKM
						jumlah kelembagaan sentra usaha	7	235.000.000	DINAS KUMKM
						jumlah pelaku usaha yang mengalami peningkatan produktivitas	35	385.000.000	DINAS KUMKM
		Peningkatan infrastruktur, sarana dan prasarana pengembangan	PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase informasi berkaitan dengan pemasaran pariwisata yang dapat diakses masyarakat	Pengelolaan Saluran Komunikasi Pemerintah Daerah dan Non Pemerintah Daerah	Jumlah saluran komunikasi yang dikelola		290.000.000	DISKOMINFO

NO.	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019						
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2019	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		destinasi dan pemasaran pariwisata.							
					Pengelolaan Konten	Jumlah pengemasan dan pengelolaan konten		140.000.000	DISKOMINFO
					Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah data/informasi publik pemda		165.000.000	DISKOMINFO
					Pengelolaan Kemitraan	Jumlah mitra yang terfasilitasi		190.000.000	DISKOMINFO
					Pengelolaan Aspirasi Publik Lingkup Pemerintah Daerah	Jumlah aspirasi publik lingkup pemerintah daerah		125.000.000	DISKOMINFO
					Pengelolaan Konten	Jumlah pengemasan dan pengelolaan konten		140.000.000	DISKOMINFO
					Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah data/informasi publik pemda		165.000.000	DISKOMINFO
					Pengelolaan Kemitraan	Jumlah mitra yang terfasilitasi		190.000.000	DISKOMINFO
					Pengelolaan Aspirasi Publik Lingkup Pemerintah Daerah	Jumlah aspirasi publik lingkup pemerintah daerah		125.000.000	DISKOMINFO
					Pengelolaan Komunikasi Publik	Jumlah konferensi pers dan wartawan		95.000.000	DISKOMINFO
		Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing kepariwisataan daerah	PROGRAM PENGEMBANGAN PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase peningkatan tenaga kerja pariwisata bersertifikat kompetensi	Sertifikasi tenaga kerja	jumlah tenaga kerja pariwisata bersertifikat kompetensi	30 orang	300.000.000	DISNAKER
		Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing kepariwisataan daerah	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LATIHAN KERJA INDUSTRI	Persentase pencari kerja pariwisata yang mendapat pelatihan	pelatihan keterampilan bagi pencari kerja di Kabupaten/Kota	jumlah paket pelatihan bagi pencari kerja bidang pariwisata yang mendapat pelatihan	9 paket	1.125.000.000	UPD BLKI
		Pengembangan standarisasi SDM	PROGRAM PENINGKATAN	Persentase peningkatan produksi per tenaga kerja	pengembangan kompetensi SDM di desa produktif	jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan	40 orang	77.143.000	UPTD BALAI PRODUKTIFITA

NO.	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019						
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2019	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		dalam meningkatkan daya saing kepariwisataan daerah	PELAYANAN TEKNIS PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	bidang pariwisata		peningkatan produksi sektor pariwisata			S
		Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing kepariwisataan daerah	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KEJURUAN	Persentase Jumlah SMK Program Keahlian Pariwisata yang mengeluarkan sertifikat Profesi pihak 1 (LSP-P1)	Kegiatan Peningkatan Sarana/Prasarana dan Pengembangan Kelembagaan SMK	Jumlah SMK Pariwisata Bekerja sama dengan DUDI	2		DINDIK
		Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing kepariwisataan daerah	PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI	persentase peningkatan volume usaha koperasi disektor pariwisata	Pendampingan pemasaran, kemitraan, permodalan dan jaringan usaha	jumlah koperasi yang mendapatkan pendampingan kemitraan usaha		20.000.000	KUMKM
						jumlah pengurus koperasi yang memahami manajemen pengembangan usaha		20.000.000	KUMKM
						Jumlah anggota koperasi yang mengelola hasil produksi SDA menjadi produk olahan yang diikuti pada even pameran lokal dan /atau nasional		30.000.000	KUMKM
						jumlah produk/usaha koperasi yang dikembangkan pada kawasan strategis provinsi		15.000.000	KUMKM
					Pengembangan, penguatan dan perlindungan koperasi	jumlah pengawas koperasi yang memahami teknis pengawasan intern koperasi		15.000.000	KUMKM
						Jumlah pengurus koperasi			KUMKM

NO.	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019						
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2019	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						yang mendapatkan Bimtek Penyusunan SOP Usaha Koperasi		24.500.000	
						Aplikasi pengolah data koperasi		12.500.000	KUMKM
					Peningkatan Kualitas SDM Koperasi	jumlah Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) yang diberdayakan di 7 (tujuh) kabupaten/kota		48.000.000	KUMKM
						Jumlah pembina koperasi dan PPKL yang mendapatkan pembekalan tentang Perkoperasian		7.500.000	KUMKM
						jumlah pengurus koperasi yang mendapatkan pemahaman kewirausahaan		7.000.000	KUMKM
		Peningkatan kualitas, partisipasi dan prestasi pemuda di berbagai bidang pembangunan, dan peningkatan pengelolaan ke olah raga serta mengembangkan peran serta kebudayaan dalam mendukung pembangunan kepariwisataan	PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Pemuda Lintas Negara	Pemberdayaan Pemuda Lintas Negara	Jumlah Pemuda luar negri yang mengikuti Pemberdayaan Pemuda Lintas Negara di Bangka Belitung	32 Pemuda	456.500.000	DISKEPORA
			PROGRAM PENINGKATAN PEMBUDAYAAN DAN PENINGKATAN PRESTASI OLAH RAGA	Pertumbuhan Jumlah peserta yang mengikuti babel sport tourism	Bangka Belitung Sport Tourism	Jumlah event olahraga tingkat nasional dan regional	1000 peserta	550.000.000	DISKEPORA
			PROGRAM	Presentase jumlah sarana dan	Pengadaan Sarana	Jumlah pengadaan sarana	1 Sarana	1.500.000.000	DISKEPORA

NO.	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019						
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2019	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			PENGEMBANGAN STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	prasaran olahraga yang terbangun dalam mendukung event olahraga regional dan nasional	Kepemudaan dan Olahraga	Olahraga			
					Pembangunan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Pembangunan Prasarana Olahraga	5 Prasarana	1.500.000.000	DISKEPORA
					Jasa Konsultansi dan Kontruksi Prasarana Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah dokumen prasarana olahraga	4 Dokumen DED	500.000.000	DISKEPORA
					Revitalisasi dan Rehabilitasi Prasarana Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Prasarana olahraga yang di Revitalisasi dan Rehabilitasi	3 Prasarana	1.500.000.000	DISKEPORA
					Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi Prasarana Olahraga	Jumlah Prasarana yang dilakukan penilaian	1 Laporan	350.000.000	DISKEPORA
					Revisi Amdal dan Perizinan lainnya Sport Center Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah dokumen Amdal dan perizinannya	1 Dokumen	500.000.000	DISKEPORA
			PROGRAM PELESTARIAN BUDAYA	Persentase budaya lokal yang dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan dan dibina	Kajian Tradisi Bangka Belitung		2	200.000.000	BUDPAR
					Penulisan Sejarah Bangka Belitung		1	250.000.000	BUDPAR
					Pengembangan Data Pokok Sejarah dan Tradisi Bangka Belitung		80	75.000.000	BUDPAR
					Partisipasi dan penghargaan serta kerjasama di bidang budaya		1 LAM, 1 DK, 25 duk event & 6 Kombud	2.500.000.000	BUDPAR
					Pelatihan sejarah dan tradisi Bangka Belitung		50	200.000.000	BUDPAR
					Pagelaran pameran sejarah dan tradisi Bangka Belitung		6	120.000.000	BUDPAR
					Seminar Revitalisasi dan reaktualisasi sejarah dan tradisi Bangka Belitung		200	450.000.000	BUDPAR

NO.	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019						
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2019	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Gita Bahana dan Aubade Kemerdekaan RI		300	436.947.000	BUDPAR
					Lawatan Sejarah dan kemah budaya		200	450.000.000	BUDPAR
					Pengelolaan cagar budaya		1	89.000.000	BUDPAR
					Pendokumentasian dan publikasi koleksi museum daerah		1	150.000.000	BUDPAR
					Registrasi Cagar Budaya Bangka Belitung		50	200.000.000	BUDPAR
					Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah		1	682.500.000	BUDPAR
					Pengiriman Misi Kesenian Daerah		2	386.460.000	BUDPAR
					Pelaksanaan Workshop kesenian daerah		2	315.000.000	BUDPAR
					Pentas Seni Budaya		35	450.000.000	BUDPAR
					Pembinaan Drum Band Serumpun Sebalai		60	281.470.000	BUDPAR
					Bantuan Sarana dan prasarana Seni Tradisional		14	315.000.000	BUDPAR
					Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengembangan Lagu Daerah		20	150.000.000	BUDPAR
					Pengembangan Seni Kriya Tradisional		5	125.000.000	BUDPAR
					Penyelenggaraan Perlindungan Seni Tradisi (Perekaman Digitalisasi & Penulisan Naskah)		5	250.000.000	BUDPAR
					Festival Budaya Melayu		1	997.500.000	BUDPAR
		Pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja disektor pariwisata	PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN, PEMBINAAN HUB. INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL	persentase Jumlah perusahaan dibidang pariwisata yang diperiksa dan dibina sesuai standar pemeriksaan perusahaan	pemeriksaan norma kerja dan norma K3	jumlah perusahaan pariwisata yang diperiksa dan dibina	45 perusahaan	34.515.000	DISNAKER

NO.	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019						
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2019	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing kepariwisataan	PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN USAHA KECIL	Peningkatan produk Usaha kecil sektor pariwisata yang tersertifikasi	Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil	Jumlah usaha kecil sektor pariwisata yang tersertifikasi	250	1.125.000.000	DINAS KUMKM
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBERDAYA, FASILITASI DAN AKSES INDUSTRI	Persentase Tenaga Kerja yang terserap di industri pariwisata	Seminar Halal Nasional	Jumlah Peserta	100	210.000.000	DISPERINDAG
					Lomba Industri Kreatif	Jumlah Produk Kreatif	30	99.016.200	DISPERINDAG
					Peningkatan kapasitas SDM Kawasan Wisata melalui pelatihan	Jumlah SDM yang Terlatih	10	120.000.000	DISPERINDAG
			PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH DAN PENGAWASAN INDUSTRI	Persentase industri yang memenuhi standar	Peningkatan pemahaman Standar Produk Industri	Jumlah peserta yang memahami standar produk industri (peserta)	85	200.000.000	DISPERINDAG
					Sistem Informasi Industri Provinsi (SIIProv)	Jumlah industri besar dan SIKIM yang terintegrasi (unit)	1	450.000.000	DISPERINDAG
					Pelaksanaan Pengawasan dan pengendalian industri	Jumlah industri yang diawasi (industri)	50	500.000.000	DISPERINDAG
		Pengembangan pariwisata daerah, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antar sektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam	PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI BUMD, PENANAMAN MODAL, PARIWISATA DAN BUDAYA	Prosentase Jumlah Kebijakan BUMD, Penanaman Modal, Pariwisata dan Budaya yang di implementasikan	Koordinasi Program CSR	Jumlah Rekomendasi/Kesepakatan Program CSR	3 Rekomendasi	150.000.000	BIRO EKONOMI



NO.	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019						
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2019	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		mendukung peluang berusaha dan investasi di bidang pariwisata.							
					Monitoring dan Evaluasi Penyertaan Modal di Prov.Kep.Babel	Jumlah penyertaan Modal	1 Berkas	130.000.000	BIRO EKONOMI
					Pembentukan Bank Umum Syariah Bangka Belitung	Jumlah kesepakatan bersama terbentuknya bank umum syariah Bangka Belitung	1 Kesepakatan	120.000.000	BIRO EKONOMI
					Monitoring dan Evaluasi tata kelola BUMD di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Dokumen tata laksana BUMD se-Provinsi Kep.Babel yang aktif	1 Berkas	100.000.000	BIRO EKONOMI
					Pemetaan Potensi Investasi Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah data potensi investasi	1 Laporan	100.000.000	BIRO EKONOMI
					Koordinasi dan Monev Kajian Penyertaan Kebijakan Destinasi wisata baru di Prov.Kep.Babel	Jumlah laporan pengembangan Destinasi wisata baru	1 Laporan	109.500.000	BIRO EKONOMI
					Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi kajian dan penyusunan perlindungan benda cagar budaya (BCB) atau benda diduga cagar budaya	jumlah BCB dan Benda diduga BCB yang dilindungi	1 Laporan	120.000.000	BIRO EKONOMI
			PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Pertambahan Jumlah Profil Investasi Pariwisata yang digunakan untuk promosi investasi di sektor pariwisata	Pemutakhiran Data Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID)	Jumlah pengelola data SIPID yang terlatih	10 orang	37.500.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
					Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal Daerah (RKPPMD)	Jumlah peserta yang mengikuti rapat koordinasi	10 orang	25.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
					Sosialisasi Informasi terkini	Jumlah peserta sosialisasi	10 orang	25.000.000	DINAS

NO.	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019						
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2019	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					regulasi kebijakan di Bidang Penanaman Modal				PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
				Pertambahan Jumlah UKM pariwisata yang bermitra dengan investor	Pelaksanaan Matchmaking daerah	Jumlah UMK potensial dan PMA/PMDN yang melaksanakan kemitraan usaha	1 umkm	250.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
					Workshop Pengembangan Usaha Daerah	Jumlah pelaksanaan workshop	1 kali	125.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
					Forum Komunikasi Pemberdayaan usaha daerah	Jumlah peserta forum komunikasi	10 peserta	25.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
					Peningkatan Pelayanan Peluang Investasi	Jumlah calon investor yang di fasilitasi	2 calon investor	31.250.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI PENANAMAN MODAL	Pertambahan Jumlah Investor Pariwisata	Penyelenggaraan Pameran Investasi	Jumlah pameran investasi	2 pameran sektor pariwisata	250.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
					Pembuatan Bahan Promosi	Jumlah sektor bahan promosi	bahan promosi 1 sektor pariwisata	55.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO.	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019						
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2019	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Promosi investasi melalui media massa	Jumlah media massa untuk informasi investasi	2 media massa sektor pariwisata	250.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
					Business Gathering Investment	jumlah sektor investasi	1 sektor investasi pariwisata	125.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DAN SISTEM INFORMASI	Presentase perusahaan yang sesuai realisasi investasi disektor pariwisata dengan rencana investasi	Digitalisasi data dan informasi penanaman modal	jumlah data dan informasi penanaman modal berdasarkan sektor	1 data dan informasi penanaman modal sektor pariwisata	50.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
					Monitoring dan Evaluasi Perizinan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang telah dilakukan pembinaan berdasarkan sektor	20 Perusahaan Sektor Pariwisata	130.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
					Workshop Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	jumlah perusahaan yang mengikuti workshop	10 perusahaan sektor pariwisata	25.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
					Penyusunan Data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	Jumlah perusahaan yang melaporkan data LKPM	15 perusahaan sektor pariwisata	35.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
					Sosialisasi Peraturan terkait Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang memiliki peraturan terkait penanaman modal	10 perusahaan sektor pariwisata	22.500.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

NO.	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019						
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2019	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									TERPADU SATU PINTU
					Penyusunan standar operasional prosedur (SOP) pelayanan persetujuan penanaman modal	jumlah SOP pelayanan persetujuan penanaman modal berdasarkan sektor	1 SOP sektor pariwisata	12.500.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Pengembangan Kawasan pelabuhan penyeberangan Tanjung Kalian	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN LAUT	Persentase pemenuhan sarana parasarana penunjang Pelabuhan Tanjung Kalian	SID dan DED Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	Jumlah Dokumen SID dan DED Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	0%	0%	DISHUB
			PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN DARAT	Persentase pemenuhan sarana parasarana perhubungan di Kawasan Strategis Tanjung Kalian	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan pada Jalan Provinsi di Kawasan Strategis Tanjung Kalian	Persentase perlengkapan jalan yang terpasang (Guard Rail), Paku Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL), Lampu Peringatan (WL), Deliniator, Marka Jalan, Rambu-rambu lalu lintas di Kawasan Strategis Tanjung Kalian	20%	2.257.581.000	DISHUB
		Pengembangan Kawasan strategis Pelabuhan ASDP Manggar – Ketapang	PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	Persentase jumlah Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Strategis Provinsi (KSP) ASDP Manggar-Ketapang yang diimplementasikan	Penyusunan RDTR/RRTR Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah Dokumen Regulasi RRTR KSP Kawasan ASDP Manggar-Ketapang			DINAS PUPR
			PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di kawasan strategis ASDP Manggar dan Ketapang	Pembangunan/Peningkatan Jalan	Panjang jalan yang ditingkatkan / dibangun di Kawasan strategis Pelabuhan ASDP Manggar – Ketapang	3 Km	13.800.000.000	DINAS PUPR
					Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan yang terpelihara di Kawasan strategis Pelabuhan ASDP Manggar – Ketapang	3 Km	8.280.000.000	DINAS PUPR
				Persentase Jembatan Provinsi dalam kondisi baik di Kawasan strategis Pelabuhan ASDP Manggar – Ketapang	Perencanaan Pembangunan Jembatan	Dokumen Jembatan yang terbangun di Kawasan strategis Pelabuhan ASDP Manggar – Ketapang			DINAS PUPR

NO.	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019						
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2019	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN LAUT	Persentase pemenuhan sarana parasarana penunjang Pelabuhan ASDP Manggar - Ketapang	Study Kelayakan Pengganti Pelabuhan ASDP Manggar Kabupaten Belitung Timur	Jumlah Dokumen Study Kelayakan Pengganti Pelabuhan ASDP Manggar Kabupaten Belitung Timur	1 dokumen	400.000.000	DISHUB
		Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Tanjung gunung dan kawasan lintas timur Pulau Bangka	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	persentase sarana dan prasarana Pariwisata di kawasan pariwisata Tanjung Gunung yang terbangun dan terkelola	Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Sarana di kawasan Pariwisata Tanjung Gunung		2,00	723.000.000,00	BUDPAR
				Persentase sarana dan prasarana pariwisata di kawasan Lintas Timur Pulau Bangka yang terbangun dan terkelola	Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Sarana di Kawasan Pariwisata Lintas Timur Pulau Bangka		2,00	723.000.000,00	BUDPAR
			PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN DARAT	Persentase pemenuhan sarana parasarana penunjang Jalan Kawasan Peruntukan Pariwisata Tanjung gunung dan kawasan lintas timur Pulau Bangka	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan pada Jalan Provinsi Peruntukan Pariwisata Tanjung gunung dan kawasan lintas timur Pulau Bangka	Persentase perlengkapan jalan yang terpasang (Guard Rail), Paku Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL), Lampu Peringatan (WL), Deliniator, Marka Jalan, Rambu-rambu lalu lintas dan Lampu Penerangan Jalan Umum Peruntukan Pariwisata Tanjung gunung dan kawasan lintas timur Pulau Bangka	50%	5.500.000.000	DISHUB
			PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di kawasan Peruntukan Pariwisata Tanjung gunung dan kawasan lintas timur Pulau Bangka	Pembangunan/Peningkatan Jalan	Panjang jalan yang ditingkatkan / dibangun di Kawasan Peruntukan Pariwisata Tanjung gunung dan kawasan lintas timur Pulau Bangka	3 Km	13.800.000.000	DINAS PUPR
					Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan yang terpelihara di Kawasan Peruntukan Pariwisata Tanjung gunung dan kawasan lintas timur	6 Km	16.560.000.000	DINAS PUPR

NO.	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019						
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2019	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Pulau Bangka			
		Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan ekonomi khusus (KEK) Tanjung kelayang	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN DARAT	Persentase pemenuhan sarana parasarana penunjang Jalan di dan menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Kelayang	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan pada Jalan Provinsi menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Kelayang	Persentase perlengkapan jalan yang terpasang (Guard Rail), Paku Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL), Lampu Peringatan (WL), Deliniator, Marka Jalan, Rambu-rambu lalu lintas dan Lampu Penerangan Jalan Umum menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Kelayang	50%	5.500.000.000	DISHUB
			PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan ekonomi khusus (KEK) Tanjung kelayang	Pembangunan/Peningkatan Jalan	Panjang jalan yang terpelihara	1,5 Km	4.140.000.000	PUPR
			PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	Persentase Jumlah Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Strategis Nasional (KSN) Pariwisata Tanjung Kelayang yang diimplementasikan	Penyusunan RDTR/RRTR Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah Dokumen Regulasi KSP Kawasan Pariwisata Tanjung Kelayang	1 Dokumen RRTR KSP Kawasan Pariwisata Tanjung Kelayang	1.000.000.000	PUPR
			PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN DARAT	Persentase pemenuhan sarana parasarana penunjang perhubungan darat di Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang	Subsidi Angkutan Pariwisata di KEK Tanjung Kelayang	Jumlah Bus yang disubsidi melayani angkutan pariwisata di KEK Tanjung Kelayang	25%	3.000.000.000	DISHUB
		Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan Kota Tua Mentok	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	Persentase sarana dan prasarana pariwisata di kawasan Kota Tua Muntok	Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Sarana di Kawasan Pariwisata Kota Tua Muntok		1	361.500.000	BUDPAR
			PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di Kawasan Kota Tua Mentok	Pembangunan/Peningkatan Jalan	Panjang jalan yang ditingkatkan / dibangun di Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan Kota Tua Mentok	3 Km	13.800.000.000	PUPR

NO.	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019						
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2019	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan yang terpelihara di Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan Kota Tua Mentok	3 Km	8.280.000.000	PUPR
				Persentase Jembatan Provinsi dalam kondisi baik di Kawasan Kota Tua Mentok					PUPR
			PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN DARAT	Persentase pemenuhan sarana parasarana penunjang perhubungan darat di Kawasan Kota Tua Muntok	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan pada Jalan Provinsi menuju Kawasan Kota Tua Muntok	Persentase perlengkapan jalan yang terpasang (Guard Rail), Paku Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL), Lampu Peringatan (WL), Deliniator, Marka Jalan, Rambu-rambu lalu lintas dan Lampu Penerangan Jalan Umum menuju Kawasan Kota Tua Muntok	20%	2.257.000.000	DISHUB
			PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP	Tersedianya Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Kota Tua Mentok yang digunakan dalam perencanaan kawasan	Penyusunan Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Kota Tua Mentok	Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Kota Tua Mentok yang tersusun	0	-	DLH
		Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan gunung Permisan Simpang Rimba	PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	Persentase jumlah Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan gunung Permisan Simpang Rimba yang diimplementasikan	Penyusunan RRTR Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah Dokumen Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan gunung Permisan Simpang Rimba			PUPR
			PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN DARAT	Persentase pemenuhan sarana parasarana penunjang perhubungan darat di kawasan pariwisata gunung Permisan Simpang Rimba	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan pada Jalan Provinsi menuju kawasan pariwisata gunung Permisan Simpang Rimba	Persentase perlengkapan jalan yang terpasang (Guard Rail), Paku Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL), Lampu Peringatan (WL), Deliniator, Marka Jalan, Rambu-rambu lalu lintas dan Lampu Penerangan Jalan Umum menuju	10%	1.570.000.000	DISHUB

NO.	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019						
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2019	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						kawasan pariwisata gunung Permisan Simpang Rimba			
			PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di Kawasan pariwisata gunung Permisan Simpang Rimba	Pembangunan/Peningkatan Jalan	Panjang Jalan yang ditingkatkan/dibangun di Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan gunung Permisan Simpang Rimba	1,5 Km	6.900.000.000	PUPR
					Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan yang terpelihara di Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan gunung Permisan Simpang Rimba	1,5 Km	4.140.000.000	PUPR
		Pengembangan Kawasan peruntukan Pariwisata Museum Nasional Maritim Belitung	PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	Persentase Jumlah Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Pariwisata Museum Nasional Maritim Belitung yang diimplementasikan	Penyusunan RRTR Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah Dokumen Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Pariwisata Museum Nasional Maritim Belitung			PUPR
			PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN DARAT	Persentase pemenuhan sarana parasarana penunjang perhubungan darat di Kawasan Pariwisata Museum Nasional Maritim Beltung	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan pada Jalan Provinsi menuju Kawasan Pariwisata Museum Nasional Maritim Beltung	Persentase perlengkapan jalan yang terpasang (Guard Rail), Paku Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas(APILL), Lampu Peringatan (WL), Deliniator, Marka Jalan, Rambu-rambu lalu lintas dan Lampu Penerangan Jalan Umum menuju Kawasan Pariwisata Museum Nasional Maritim Beltung	15%	1.780.000.000	DISHUB
			PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di Kawasan Pariwisata Museum Nasional Maritim Beltung	Pembangunan/Peningkatan Jalan	Panjang Jalan yang ditingkatkan/dibangun di Kawasan peruntukan Pariwisata Museum Nasional Maritim Belitung	1,5 Km	6.900.000.000	PUPR
					Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan yang terpelihara di Kawasan peruntukan Pariwisata	1,5 Km	4.140.000.000	PUPR



NO.	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019						
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2019	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Museum Nasional Maritim Belitung			
		Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Gunung Menumbing	PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	Persentase Tersedianya Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Pariwisata Gunung Menumbing yang di implementasikan	Penyusunan RRTR Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah Dokumen Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Pariwisata Gunung Menumbing			PUPR
			PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	Persentase sarana dan prasarana pariwisata di Kawasan Pariwisata Gunung Menumbing	Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Sarana di Kawasan Pariwisata Gunung Menumbing		-	-	BUDPAR
			PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN DARAT	Persentase pemenuhan sarana prasarana penunjang perhubungan darat di Kawasan Pariwisata Gunung Menumbing	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan pada Jalan Provinsi menuju Kawasan Pariwisata Gunung Menumbing	Persentase jumlah perlengkapan jalan yang terpasang (Guard Rail), Paku Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL), Lampu Peringatan (WL), Deliniator, Marka Jalan, Rambu-rambu lalu lintas dan Lampu Penerangan Jalan Umum menuju Kawasan Pariwisata Gunung Menumbing	5%	1.200.000.000	DISHUB
			PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP	Tersedianya Dokumen KLHS di Kawasan Pariwisata Gunung Menumbing yang digunakan dalam perencanaan kawasan	Penyusunan Dokumen KLHS di Kawasan Pariwisata Gunung Menumbing	Jumlah Dokumen KLHS di Kawasan Pariwisata Gunung Menumbing yang tersusun	0	-	DLH
			PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di Kawasan Pariwisata Gunung Menumbing	Pembangunan/Peningkatan Jalan	Panjang Jalan yang ditingkatkan/dibangun di Kawasan Peruntukan Pariwisata Gunung Menumbing	1,5 Km	6.900.000.000	PUPR
					Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan yang terpelihara di Kawasan Peruntukan Pariwisata Gunung Menumbing	1,5 Km	4.140.000.000	PUPR
		Pengembangan kawasan konektivitas Pulau	PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di kawasan konektivitas Pulau	Pembangunan/Peningkatan Jalan	Panjang jalan yang ditingkatkan / dibangun di Kawasan konektivitas	10 km	46.000.000.000	DINAS PUPR

NO.	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019						
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2019	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Bangka dengan pulau sumatera		Bangka dengan Pulau Sumatera		Pulau Bangka dengan pulau sumatera			
					Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan yang terpelihara di Kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan pulau sumatera	10,5 km	24.150.000.000	DINAS PUPR
				Persentase Jembatan Provinsi dalam kondisi baik di kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Sumatera	Perencanaan Pembangunan Jembatan	Jumlah Dokumen perencanaan jembatan di Kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan pulau sumatera	1 dok	1.000.000.000	DINAS PUPR
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	Persentase panjang talud yang terbangun di kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Sumatera	Perencanaan turap / talud / bronjong	Jumlah dokumen yang tersusun	1 Dok	350.000.000	DINAS PUPR
				Persentase volume air baku yang tersedia dapat digunakan di kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Sumatera	Perencanaan pembangunan prasarana penyediaan air baku	Jumlah dokumen yang tersusun	1 Dok	250.000.000	DINAS PUPR
			PROGRAM PENGELOLAAN RUANG LAUT	Persentase Usulan Pemanfaatan Ruang Laut yang terekomendasi sesuai dengan peruntukannya pada kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Sumatera	Peningkatan Fungsi Pengelolaan Ruang Laut	Jumlah Rekomendasi Teknis Penerbitan Perizinan (Rekomendasi Izin)	2,00	60.000.000,00	DKP
			PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN LAUT	Presentase sarana dan prasarana perhubungan laut kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Sumatera	SID dan DED Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Sumatera	Jumlah Dokumen SID dan DED Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	-	0%	DISHUB
			PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP	Tersedianya Dokumen KLHS kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Sumatera yang digunakan untuk perencanaan kawasan	Penyusunan Dokumen KLHS kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Sumatera	Jumlah Dokumen KLHS kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Sumatera yang tersusun	0	-	DLH
		Pengembangan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan	PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung	Pembangunan/Peningkatan Jalan	Panjang jalan yang ditingkatkan / dibangun di Kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan	3 Km	13.800.000.000	DINAS PUPR

NO.	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019						
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2019	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil		serta pulau-pulau kecil		Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil			
					Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan yang terpelihara di Kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil	3 Km	8.280.000.000	DINAS PUPR
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	Persentase panjang talud yang terbangun di kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil	Perencanaan turap / talud / bronjong	Jumlah dokumen yang tersusun	1 Dok	350.000.000	DINAS PUPR
					Pembangunan turap / talud / bronjong	Panjang pengaman pantai yang terbangun			DINAS PUPR
				Persentase volume air baku yang tersedia dapat digunakan di kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil	Perencanaan pembangunan prasarana penyediaan air baku	Jumlah dokumen yang tersusun	1 Dok	250.000.000	DINAS PUPR
			PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN LAUT	Persentase pulau-pulau berpenduduk yang terkoneksi kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil	Penyusunan Study Kelayakan Pembangunan Pelabuhan/Dermaga di kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil	Jumlah Dokumen Study Kelayakan Pembangunan Pelabuhan/Dermaga di kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil	5 Dokumen (lepar, sekunyit, sumedang, pulau batun dan buku limau)	2.250.000.000	DISHUB
					Penyusunan SID dan DED Pembangunan Pelabuhan/Dermaga di kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil	Jumlah Dokumen SID dan DED Pembangunan Pelabuhan/Dermaga di kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil	6 Dokumen (Liat, Gresik, Seliu)	2.250.000.000	DISHUB
					Kajian Lingkungan Pembangunan Pelabuhan/Dermaga di kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil	Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Pembangunan Pelabuhan/Dermaga di kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan	-	0%	DISHUB

NO.	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019						
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2019	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil			
				Jumlah armada pengangkutan	Pengadaan Kapal Ro-Ro 200 GT	Jumlah unit Kapal Roro yang dibangun	-	0%	DISHUB
4	PENGEMBANGAN TATA KELOLA PERTAMBANGAN	Peningkatan tata kelola dan nilai tambah produk sumber daya mineral;	PROGRAM PENGEMBANGAN PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	Persentase Perusahaan pertambangan non logam yang menerapkan good mining practices	Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Logam	Jumlah IUP mineral bukan logam dan batuan yang dibina dan diawasi	163,00	450.000.000	DINAS ESDM
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM	Persentase Perusahaan pertambangan logam yang menerapkan good mining practices	Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah IUP mineral logam yang dibina dan diawasi	523,00	550.000.000	DINAS ESDM
			PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN GEOLOGI DAN AIR TANAH	Persentase cadangan Mineral bukan logam dan batuan yang potensial	Penyelidikan kebumian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah cadangan mineral yang diselidiki	200 Juta Ton	500.000.000	DINAS ESDM
				pertumbuhan industri turunan Potensi Sumber Daya Mineral yang dikembangkan	Peningkatan Kapasitas SDM industri turunan sumber daya mineral melalui pelatihan/pendampingan	Jumlah SDM yang Terlatih	15	140.000.000	DISPERINDAG
					Pemetaan dan penetapan SDA industri pertambangan timah	Jumlah Dokumen SDA industri Pertambangan Timah	1	120.000.000	DISPERINDAG
			PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH DAN PENGAWASAN INDUSTRI	Persentase industri yang memenuhi standar	Peningkatan pemahaman Standar Produk Industri	Jumlah peserta yang memahami standar produk industri (peserta)	85	200.000.000	DISPERINDAG
					Sistem Informasi Industri Provinsi (SIIProv)	Jumlah industri besar dan SIKIM yang terintegrasi (unit)	1	450.000.000	DISPERINDAG
					Pelaksanaan Pengawasan dan pengendalian industri	Jumlah industri yang diawasi (industri)	50	500.000.000	DISPERINDAG
		Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya	PROGRAM PENGEMBANGAN PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA	Persentase peningkatan tenaga kerja sektor sumber daya mineral bersertifikat kompetensi	Sertifikasi tenaga kerja	jumlah tenaga kerja sektor pertambangan Timah bersertifikat kompetensi	30 orang	300.000.000	DISNAKER

NO.	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019						
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2019	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		saing Produk Sumber daya mineral	KERJA						
		Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing Produk Sumber daya mineral	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LATIHAN KERJA INDUSTRI	Persentase tenaga kerja bidang sumber daya mineral yang mendapat pelatihan pertambangan berkelanjutan	pelatihan keterampilan bagi pencari kerja di Kabupaten/Kota	jumlah paket pelatihan bagi pencari kerja bidang pertambangan Timah yang mendapat pelatihan pertambangan berkelanjutan	2 paket	250.000.000	UPD BLKI
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase peningkatan produksi per tenaga kerja sektor sumber daya mineral	pengembangan kompetensi SDM di desa produktif	jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan peningkatan produksi sektor pertambangan timah	40 orang	77.143.000	UPTD BALAI PRODUKTIFITAS
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LATIHAN PERKOPERASIAN, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	Persentase SDM Koperasi sektor sumber daya mineral terlatih	Penyelenggaraan Pelatihan Perkoperasian dan UKM	jumlah SDM Koperasi sektor sumber daya mineral terlatih	0	163.000.000	UPTD BALAI LATIHAN PERKOPERASIAN, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
				Persentase SDM Usaha Kecil sektor sumber daya mineral terlatih	Penyelenggaraan Pelatihan Perkoperasian dan UKM	jumlah SDM Usaha Kecil sektor sumber daya mineral terlatih	0,18%	443.850.000	UPTD BALAI LATIHAN PERKOPERASIAN, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
			PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN USAHA KECIL	persentase Usaha Kecil sektor pertambangan yang mendapatkan Izin Usaha	Pendampingan dan Promosi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil sektor pertambangan yang mendapatkan IUMK	1000,00%	1.000.000	DINAS UMKM
				persentase Usaha Kecil sektor pertambangan yang difasilitasi promosi/ pemasaran produknya melalui even pameran	Pendampingan dan Promosi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil sektor pertambangan yang difasilitasi promosi/ pemasaran produknya melalui even pameran	200,00%	58.000.000	DINAS UMKM
				persentase Usaha kecil sektor	Pendampingan dan Promosi	Jumlah Usaha kecil sektor	1000,00%	20.000.000	DINAS UMKM

NO.	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019						
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2019	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				pertambangan yang difasilitasi promosi/ pemasaran produknya melalui web	Usaha Kecil	pertambangan yang difasilitasi promosi/ pemasaran produknya melalui web			
				persentase Usaha Kecil sektor pertambangan yang mendapatkan Diseminasi dan pendampingan akses permodalan	Pendampingan dan Promosi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil sektor pertambangan yang mendapatkan Diseminasi dan pendampingan akses permodalan	200,00%	8.000.000	DINAS UMKM
		Pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja sektor sumber daya mineral	PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN, PEMBINAAN HUB. INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase perusahaan sumber daya mineral yang diperiksa dan dibina sesuai standar pemeriksaan perusahaan	pemeriksaan norma kerja dan norma K3	jumlah perusahaan pertambangan yang diperiksa dan dibina	25 perusahaan	19.175.000	DISNAKER
		Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing sektor sumber daya mineral	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS SERTIFIKASI DAN PENGENDALIAN MUTU PRODUK	Persentase produk sumber daya mineral yang disertifikasi					UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PENGENDALIAN MUTU
		Pengembangan produk sumber daya mineral, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di sektor sumber daya	PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI KEBIJAKAN SUMBER DAYA ALAM	Prosentase Jumlah Kebijakan pembangunan Sumber Daya Mineral yang diimplementasikan	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Distribusi Penggunaan subsidi listrik di Provinsi Kep.Babel	Jumlah Rekomendasi bidang energi dengan Rekomendasi yang di tindak lanjuti	1 rekomendasi	135.000.000	BIRO EKONOMI

NO.	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019						
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2019	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		mineral							
					Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penataan serta pengembangan lahan kritis di Prov.Kep.Babel	Jumlah Rekomendasi kebijakan kerjasama investasi pertambangan Timah dengan yang ditindaklanjuti	1 Rekomendasi	100.000.000	BIRO EKONOMI
					Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi komoditi pangan di Prov.Kep.Babel	Jumlah laporan komoditi pangan	1 Laporan	100.000.000	BIRO EKONOMI
					Koordinasi dan Evaluasi Tim Terpadu penanganan penambangan timah di Prov.Kep.Babel	Jumlah Rekomendasi penanganan masalah pertambangan timah	2 Rekomendasi	380.000.000	BIRO EKONOMI
					Koordinasi dan Monitoring pengembangan potensi energi baru terbarukan di Prov.Kep.Babel	Jumlah potensi energi baru terbarukan	1 Laporan	100.000.000	BIRO EKONOMI
			PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Pertambahan Jumlah profil investasi sumber daya mineral yang digunakan untuk promosi investasi disektor sumber daya mineral	Pemutakhiran Data Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID)	Jumlah pengelola data SIPID yang terlatih	10 orang	37.500.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
					Rapat Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Penanaman Modal Daerah (RKPPMD)	Jumlah peserta yang mengikuti rapat koordinasi	10 orang	25.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
					Sosialisasi Informasi terkini regulasi kebijakan di Bidang Penanaman Modal	Jumlah peserta sosialisasi	10 orang	25.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
					Forum Komunikasi Pemberdayaan usaha daerah	Jumlah peserta forum komunikasi	10 peserta	25.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

NO.	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019						
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2019	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									SATU PINTU
					Peningkatan Pelayanan Peluang Investasi	Jumlah calon investor yang di fasilitasi	1 calon investor	31.250.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI PENANAMAN MODAL	Pertambahan jumlah investor sumber daya mineral	Penyelenggaraan Pameran Investasi	Jumlah pameran investasi	1 pameran sektor sumber daya mineral	200.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
					Pembuatan Bahan Promosi	Jumlah sektor bahan promosi	bahan promosi 1 sektor sumber daya mineral	55.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
					Business Gathering Investment	jumlah sektor investasi	1 sektor investasi sumber daya mineral	125.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DAN SISTEM INFORMASI	Presentase perusahaan sumber daya mineral yang sesuai realisasi investasi dengan rencana investasi	Digitalisasi data dan informasi penanaman modal	jumlah data dan informasi penanaman modal berdasarkan sektor	1 data dan informasi penanaman modal sektor sumber daya mineral	50.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
					Monitoring dan Evaluasi Perizinan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan yang telah dilakukan pembinaan berdasarkan sektor	15 Perusahaan Sektor sumber daya mineral	130.692.452	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
					Workshop Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	jumlah perusahaan yang mengikuti workshop	15 perusahaan	25.000.000	DINAS PENANAMAN



NO.	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019						
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2019	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							sektor sumber daya mineral		MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
					Penyusunan Data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	Jumlah perusahaan yang melaporkan data LKPM	15 perusahaan sektor sumber daya mineral	41.500.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
					Sosialisasi Peraturan terkait Penanaman Modal		10 perusahaan sektor sumber daya mineral	22.500.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
					Penyusunan standar operasional prosedur (SOP) pelayanan persetujuan penanaman modal	jumlah SOP pelayanan persetujuan penanaman modal berdasarkan sektor	1 SOP sektor sumber daya mineral	12.500.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	Presentase ketepatan waktu penerbitan perizinan sumber daya mineral	Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah izin yang diterbitkan	1100 izin	1.365.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular	PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	Persentase Tersedianya Lahan bersertifikat untuk kepentingan di kawasan industri dan pelabuhan terpadu Tanjung Ular	Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Luas lahan yang dibebaskan		25.000.000.000	DINAS PUPR
			PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di kawasan industri dan pelabuhan Tanjung ular	Pembangunan/Peningkatan Jalan	Panjang jalan yang ditingkatkan / dibangun di Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular	3 Km	13.800.000.000	DINAS PUPR
					Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan yang terpelihara di Kawasan Industri dan Pelabuhan	3 Km	8.280.000.000	DINAS PUPR

NO.	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019						
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2019	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						Terpadu (KIPT) Tanjung Ular			
				Persentase Jembatan Provinsi dalam kondisi baik di kawasan industri dan pelabuhan Tanjung ular	Perencanaan Jembatan	Dokumentasi Perencanaan jembatan yang dibangun di Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular			DINAS PUPR
					Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun di Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular			DINAS PUPR
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	Persentase panjang talud yang terbangun di kawasaan ndustri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular	Perencanaan turap / talud / bronjong	Jumlah dokumen yang tersusun	1 Dok	350.000.000	DINAS PUPR
			PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH DAN PENGAWASAN INDUSTRI	Pertumbuhan Jumlah Industri di kawasan Industri Terpadu (KIPT) Tanjung Ular	Pengembangan kawasan strategis/kawasan industri/sentra	Jumlah dokumen tersusun (dokumen)	1	400.000.000	DISPERINDAG
					Pembinaan dan penyuluhan pembentukan Sentra Industri	Jumlah lokasi pembinaan dan penyuluhan terhadap industri (lokasi)	2	150.000.000	DISPERINDAG
					Monev kawasan strategis/ kawasan industri/ sentra	Jumlah dokumen tersusun (dokumen)	1	300.000.000	DISPERINDAG
					Pembinaan kawasan strategis/ kawasan industri/ sentra	Jumlah lokasi pembinaan (lokasi)	2	250.000.000	DISPERINDAG
			PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN LAUT	Prosentase sarana dan prasana perhubungan laut Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular yang terbangun serta digunakan	SID dan DED Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	Jumlah Dokumen SID dan DED Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	2 dokumen	450.000.000	DISHUB
		Pengembangan Kawasan Strategis Industri Terpadu Air Kelik (KIAK)	PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di kawasan strategis industri terpadu air kelik	Pembangunan/Peningkatan Jalan	Panjang jalan yang ditingkatkan / dibangun di Kawasan Strategis Industri Terpadu Air Kelik (KIAK)	1,5 Km	6.900.000.000	DINAS PUPR

NO.	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019						
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2019	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan yang terpelihara di Kawasan Strategis Industri Terpadu Air Kelik (KIAK)	1,5 Km	4.140.000.000	DINAS PUPR
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	Persentase panjang talud yang terbangun di kawasan strategis industri terpadu air kelik	Perencanaan turap / talud / bronjong	Jumlah dokumen yang tersusun	1 Dok	350.000.000	DINAS PUPR
				Persentase penyediaan volume air baku di kawasan strategis industri terpadu air kelik	Perencanaan pembangunan prasarana penyediaan air baku	Jumlah dokumen yang tersusun	1 Dok	250.000.000	DINAS PUPR
					Pembangunan Prasarana penyediaan air baku	Jumlah kapasitas tampungan air baku			DINAS PUPR
			PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN LAUT	Prosentase pemenuhan Sarana dan Prasarana pendukung Perhubungan Laut di Kawasan Strategis Industri Terpadu Air Kelik	Penyusunan Study Kelayakan Pembangunan Pelabuhan/Dermaga di Kawasan Strategis Industri Terpadu Air Kelik	Jumlah Dokumen Study Kelayakan Pembangunan Pelabuhan/Dermaga di Kawasan Strategis Industri Terpadu Air Kelik	-		DISHUB
			PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	Persentase Jumlah Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kawasan Industri Air Kelik yang diimplementasikan	Penyusunan RDTR/RRTR Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah Dokumen Regulasi KSP Kawasan Kawasan Industri Air Kelik (KIAK)			DINAS PUPR
		Pengembangan Pelabuhan dan Kawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung Berikat	PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di Kawasan strategis Ekonomi khusus Tanjung Berikat	Pembangunan/Peningkatan Jalan	Panjang jalan yang ditingkatkan / dibangun di Kawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung Berikat	2 km	9.200.000.000	DINAS PUPR
					Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan yang terpelihara di Kawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung Berikat	3 km	6.900.000.000	DINAS PUPR
				Persentase Jembatan Provinsi dalam kondisi baik di Kawasan strategis Ekonomi khusus Tanjung Berikat	Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun di Kawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung Berikat	2 unit	10.000.000.000	DINAS PUPR
			PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA HUTAN	Presentase luas areal kawasan hutan yang dikelola didi Kawasan strategis Ekonomi khusus Tanjung Berikat	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Hutan	Jumlah dokumen pengelolaan kawasan hutan	5	497.042.000	DINAS KEHUTANAAN

NO.	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019						
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2019	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Penyelesaian usulan perubahan status kawasan hutan / TORA	Luas perubahan status kawasan hutan/TORA	3.6	250.000.000	DINAS KEHUTANAAN
			PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP	Tersedianya Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Kawasan Industri dan pelabuhan Terpadu Tanjung Berikat yang digunakan dalam perencanaan kawasan	Penyusunan Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Kawasan Industri dan pelabuhan Terpadu Tanjung Berikat	Jumlah Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Kawasan Industri dan pelabuhan Terpadu Tanjung Berikat yang tersusun	1 Dokumen	900.000.000	DLH
			PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN LAUT	Prosentase pemenuhan Sarana dan Prasarana pendukung Perhubungan Laut di Kawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung Berikat	Penyusunan SID dan DED Pembangunan Pelabuhan/Dermaga di Kawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung Berikat	Jumlah Dokumen SID dan DED Pembangunan Pelabuhan/Dermaga di Kawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung Berikat	1 Dokumen	1.400.000.000	DISHUB
					Kajian Lingkungan Pembangunan Pelabuhan/Dermaga di Kawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung Berikat	Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Pembangunan Pelabuhan/Dermaga di Kawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung Berikat	-	0%	DISHUB
			PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	Persentase jumlah Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Industri dan pelabuhan Terpadu Tanjung Berikat yang diimplementasikan	Penyusunan RDTR/RRTR Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah Dokumen Regulasi RRTR KSP Tanjung Berikat	1 Dokumen Perda RRTR KSP Tanjung Berikat	1.000.000.000	DINAS PUPR
		Pengembangan Kawasan Strategis Industri Sadai	PROGRAM KEBINAMARGAAN	Presentase panjang jalan dalam kondisi mantap di kawasan strategis industri sadai	Pembangunan/Peningkatan Jalan	Panjang jalan yang ditingkatkan / dibangun di Kawasan Strategis Industri Sadai	7,5 km	34.500.000.000	DINAS PUPR
					Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan yang terpelihara di Kawasan Strategis Industri Sadai	10 km	23.000.000.000	DINAS PUPR
				Presentase panjang jembatan dalam kondisi mantap di kawasan strategis industri sadai					DINAS PUPR
			PROGRAM PENGEMBANGAN	Persentase panjang talud yang terbangun di kawasan Strategis	Perencanaan turap / talud / bronjong	Jumlah dokumen yang tersusun	1 Dok	350.000.000	DINAS PUPR

NO.	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019						
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2019	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			SUMBER DAYA AIR	Industri Sadai					
				Persentase penyediaan volume air baku di kawasan Strategis Industri Sadai	Perencanaan pembangunan prasarana penyediaan air baku	Jumlah dokumen yang tersusun	1 Dok	250.000.000	DINAS PUPR
					Pembangunan Prasarana penyediaan air baku	Jumlah kapasitas tampungan air baku			DINAS PUPR
			PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN LAUT	Prosentase peningkatan sarana dan prasana perhubungan laut Kawasan Strategis Industri Sadai	SID dan DED Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) Kawasan Strategis Industri Sadai	Jumlah Dokumen SID dan DED Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	-	0	DISHUB
			PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	Persentase Tersedianya Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Strategis Provinsi (KSP) KIPT Sadai	Penyusunan RDTR/RRTR Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah Dokumen Regulasi RRTR KSP Sadai	1 Dokumen Perda RRTR KSP Sadai	1.000.000.000	DINAS PUPR
			PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH DAN PENGAWASAN INDUSTRI	Pertumbuhan Jumlah Industri di kawasan strategis Industri Sadai	Pengembangan kawasan strategis/kawasan industri/sentra	Jumlah dokumen tersusun (dokumen)	1	400.000.000	DISPERINDAG
					Pembinaan dan penyuluhan pembentukan Sentra Industri	Jumlah lokasi pembinaan dan penyuluhan terhadap industri (lokasi)	2	150.000.000	DISPERINDAG
					Monev kawasan strategis/kawasan industri/ sentra	Jumlah dokumen tersusun (dokumen)	1	300.000.000	DISPERINDAG
					Pembinaan kawasan strategis/ kawasan industri/ sentra	Jumlah lokasi pembinaan (lokasi)	2	250.000.000	DISPERINDAG
			PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP	Tersedianya Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi KIPT Sadai yang digunakan untuk perencanaan kawasan	Penyusunan Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi KIPT Sadai	Jumlah Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi KIPT Sadai yang tersusun	1 Dokumen	900.000.000	DLH
		Pengembangan Kawasan strategis Industri Terpadu di Teluk Klabat Belinyu	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN LAUT	Prosentase pemenuhan Sarana dan Prasarana pendukung Perhubungan Laut Kawasan strategis Industri Terpadu di Teluk Klabat Belinyu	Penyusunan Study Kelayakan Pembangunan Pelabuhan/Dermaga di Kawasan strategis Industri Terpadu di Teluk Klabat Belinyu	Jumlah Dokumen Study Kelayakan Pembangunan Pelabuhan/Dermaga di Kawasan strategis Industri Terpadu di Teluk Klabat Belinyu	-	0%	DISHUB
			PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Panjang jalan provinsi menuju dan dikawasan	Peningkatan/pembangunan Jalan	Panjang jalan yang ditingkatkan / dibangun	3 Km	13.800.000.000	DINAS PUPR

NO.	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019						
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2019	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Strategis Industri Perikanan Terpadu Teluk Klabat Belinyu dalam kondisi mantap		di Kawasan strategis Industri Terpadu di Teluk Klabat Belinyu			
					Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang jalan yang terpelihara di Kawasan strategis Industri Terpadu di Teluk Klabat Belinyu	3 Km	8.280.000.000	DINAS PUPR
			PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN BUDIDAYA DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	Pertumbuhan Volume Produksi Olahan dikawasan Strategis Industri Perikanan Terpadu Teluk Klabat (Ton)	Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	Jumlah sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran yang diadakan bagi masyarakat berupa alat pengolahan (Pasar)	1	300.000.000	DKP
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap dikawasan Strategis Industri Perikanan Terpadu Teluk Klabat	pengadaan sarana dan prasarana perikanan tangkap	Jumlah sarana dan prasarana perikanan tangkap yang diadakan bagi masyarakat (Unit)	170	610.000.000	DKP
			PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN PENAWASAN KOPERASI	Persentase koperasi aktif di kawasan strategis Teluk Kelabat Belinyu	Peningkatan Kelembagaan dan Perizinan Koperasi	Jumlah koperasi yang mendapatkan sosialisasi/pendampingan mengenai penerapan prinsip dasar perkoperasian	3	34.000.000	DINAS KUMKM
			PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN USAHA KECIL	persentase Usaha Kecil dikawasan Sentra Teluk Kelabat Belinyu yang mendapatkan Izin Usaha	Pendampingan dan Promosi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil dikawasan Sentra Teluk Kelabat Belinyu yang mendapatkan IUMK	25	2.500.000	DINAS KUMKM
				persentase Usaha Kecil dikawasan Sentra Teluk Kelabat Belinyu yang mendapatkan Diseminasi dan pendampingan akses permodalan	Pendampingan dan Promosi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil dikawasan Sentra Teluk Kelabat Belinyu yang mendapatkan Diseminasi dan pendampingan akses permodalan	2	8.000.000	DINAS KUMKM
			PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH DAN PENGAWASAN INDUSTRI	Pertumbuhan Jumlah Industri di kawasan strategis Industri Perikanan Terpadu di Teluk Klabat Belinyu	Pengembangan kawasan strategis/kawasan industri/sentra	Jumlah dokumen tersusun (dokumen)	1	400.000.000	DISPERINDAG
					Pembinaan dan penyuluhan	Jumlah lokasi pembinaan	2	150.000.000	DISPERINDAG

NO.	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019						
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2019	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					pembentukan Sentra Industri	dan penyuluhan terhadap industri (lokasi)			
					Monev kawasan strategis/ kawasan industri/ sentra	Jumlah dokumen tersusun (dokumen)	1	300.000.000	DISPERINDAG
					Pembinaan kawasan strategis/ kawasan industri/ sentra	Jumlah lokasi pembinaan (lokasi)	2	250.000.000	DISPERINDAG
			PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	Persentase Tersedianya Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Pelabuhan dan Industri Teluk Kelabat	Penyusunan RDTR/RRTR Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah Dokumen Regulasi RRTR KSP Teluk Kelabat	1 Dokumen Perda RRTR KSP Teluk Kelabat	750.000.000	DINAS PUPR
			PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP	Tersedianya Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi pelabuhan dan Industri Teluk Kelabat yang digunakan untuk perencanaan kawasan	Penyusunan Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi pelabuhan dan Industri Teluk Kelabat	Jumlah Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi pelabuhan dan Industri Teluk Kelabat yang tersusun	1 Dokumen	1.000.000.000	DLH
		Peningkatan Pembangunan Kawasan Industri	PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH DAN PENGAWASAN INDUSTRI	Pertumbuhan Industri/Sentra/Kawasan Industri	Peningkatan pengembangan pembangunan kawasan strategis	Jumlah dokumen tersusun (dokumen)	1	300.000.000	DISPERINDAG
					Pengembangan kawasan strategis/kawasan industri/sentra	Jumlah dokumen tersusun (dokumen)	1	400.000.000	DISPERINDAG
					Pembinaan dan penyuluhan pembentukan Sentra Industri	Jumlah lokasi pembinaan dan penyuluhan terhadap industri (lokasi)	2	150.000.000	DISPERINDAG
					Monev kawasan strategis/ kawasan industri/ sentra	Jumlah dokumen tersusun (dokumen)	1	300.000.000	DISPERINDAG
					Pembinaan kawasan strategis/ kawasan industri/ sentra	Jumlah lokasi pembinaan (lokasi)	2	250.000.000	DISPERINDAG
					Penyusunan profil kawasan strategis/ kawasan industri/ sentra	Jumlah profil yang tersusun (buku)	1	250.000.000	DISPERINDAG
		Pemenuhan Energi listrik untuk mendorong	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ENERGI	Persentase penggunaan EBT	Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) dan Sarana Umum menggunakan Energi	Jumlah kapasitas daya listrik menggunakan energi baru terbarukan	20.000 W	15.000.000.000	ESDM

NO.	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019						
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2019	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		pengembangan industri berbasis potensi daerah serta peningkatan rasio elektrifikasi;			Baru Terbarukan (EBT) di Prov. Kep. Babel				
				Persentase perusahaan yang Pendistribusian Minyak dan Gas sesuai standar	Pembinaan dan Pengendalian Pendistribusian BBM dan Gas	Jumlah pelaku usaha di bidang pendistribusian MIGAS yang diawasi dan dibina	7500%	250.000.000	ESDM
				Persentase perusahaan di bidang ketenagalistrikan yang sesuai standar yang diinginkan	Pembinaan dan Pengawasan di bidang Ketenagalistrikan di Prov. Kep. Babel	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan oleh aparaturnya dan inspektur ketenagalistrikan	9000%	200.000.000	ESDM
5	PENINGKATAN PENDAPATAN PEMERINTAH DAERAH	Peningkatan potensi penggalan sumber-sumber Pendapatan asli daerah untuk pemanfaatan sebesar besarnya bagi kemakmuran masyarakat.	PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA PENDAPATAN PAJAK DAERAH	Prosentase kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Daerah	Sosialisasi Pajak Daerah	jumlah peserta Sosialisasi Perda Pajak Daerah ; Jumlat spot sosialisasi pada media massa cetak dan elektronik ; jumlah hari pameran yang diikuti	280;30;7	64500000000,00%	BAKUDA
					Rapat Koordinasi PKB dan BBNKB dengan instansi Terkait	Jumlah penyelenggaraan Rapat Koordinasi PKB dan BBNKB dengan instansi Terkait	2,00	112.657.750	BAKUDA
					Peningkatan Fungsi Pelayanan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pajak Daerah	Jumlah Bulan Layanan Fungsi Pelayanan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pajak Daerah	12,00	834.186.000	BAKUDA
					Penyusunan Pedoman tentang Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB	Jumlah Peraturan Gubernur tentang Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB yang disusun	3,00	102.684.500	BAKUDA
					Intensifikasi Sumber-sumber Pajak Daerah	realisasi penerimaan pendapatan pajak daerah melalui PKB, BBNKB dan Pajak Air Permukaan, PPBKB dan Pajak Rokok		812.005.000	BAKUDA



NO.	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019						
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2019	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH DAN PENDAPATAN LAIN LAIN YANG SAH	Prosentase kontribusi retribusi daerah dan pendapatan lain-lain terhadap pendapatan asli daerah	Rapat Kerja Restribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain	Jumlah penyelenggaraan Rapat Kerja Restribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain	10,00	60.530.825	BAKUDA
					Rakor Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	Jumlah penyelenggaraan Rakor Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	1,00	187.000.000	BAKUDA
					Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Penerimaan Restribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain	jumlah Perangkat Daerah dan pihak terkait penerimaan retribusi dan pendapatan lain-lain	45,00	443.900.000	BAKUDA
					Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain	Jumlah Peraturan Daerah Tentang Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain	3,00	270.000.000	BAKUDA
					Tim peningkatan pengawasan pendapatan daerah	Realisasi pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		550.000.000	BAKUDA
			PROGRAM PENGEMBANGAN PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pertumbuhan pendapatan asli daerah dari tenaga kerja Asing	pembinaan dan pengendalian TKA	jumlah pembinaan terhadap perusahaan pengguna TKA	25 perusahaan	100.000.000	DISNAKER
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN	Persentase Pertumbuhan pendapatan asli daerah dari Lab lingkungan	Peningkatan Fungsi Pelayanan Laboratorium	Jumlah sampel yang dilayani dalam 1 tahun	1225 Sampel	1.100.000.000	DLH
					Peningkatan Mutu dan Pengembangan Laboatorium Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Usulan Parameter Lingkungan untuk akreditasi	32 Parameter Usulan	310.000.000	DLH
					Pembinaan laboratorium lingkungan Kabupaten/kota dalam rangka peningkatan pengawasan lingkungan	Jumlah Laboratorium Lingkungan Kabupaten/kota yang dibina	5 Laboratorium	100.000.000	DLH
					Peningkatan Kapasitas SDM UPTD Laboratorium	Jumlah SDM yang terlatih	40 SDM	120.000.000	DLH

NO.	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019						
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2019	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Lingkungan				
					Layanan Sampling Parameter Kualitas Lingkungan bagi sektor usaha	Jumlah Titik Sampling Parameter Kualitas Lingkungan yang dilayani	35 Titik Sampling	100.000.000	DLH
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Laboratorium	Jumlah Paket Pengadaan Sarana dan Prasarana Laboratorium	2 Paket	1.000.000.000	DLH
					Peningkatan Eksistensi Laboratorium	Jumlah promosi dan Publikasi yang dilaksanakan dalam 1 tahun	1 Kali	65.000.000	DLH
					Penyusunan Dokumen Lingkungan Laboratorium	Jumlah Dokumen UKL dan UPL Laboratorium	1 Dokumen	150.000.000	DLH
			PROGRAM PELAYANAN TEKNIK LABORATORIUM KESEHATAN	Persentase Pertumbuhan pendapatan asli daerah dari Lab Kesehatan	Peningkatan dan pengembangan pelayanan Laboratorium kesehatan	Jumlah PAD dari layanan lab kesehatan	100%	550.000.000	DINKES
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ASN	Persentase kontribusi penyelenggaraan diklat terhadap Retribusi Daerah	Retribusi Umum dan Jasa Usaha	Jumlah penyelenggaraan diklat; jumlah sewa aula/ruang kelas; Jumlah pemakaian komputer	3 Diklat; 10 ruangan/kelas; 100 unit komputer	2.400.000.000	BKPSDM
			PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	Persentase Pertumbuhan pendapatan asli daerah dari peralatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pertumbuhan pendapatan asli daerah dari alat-alat berat DINAS PUPR	Retribusi Alat-alat Berat	253.161.000		PUPR
			PROGRAM PENGAWASAN DAN PERALATAN	Persentase Pertumbuhan pendapatan asli daerah dari Lab Pengujian Bina Marga	Peningkatan Fungsi UPTD Pengawasan dan Peralatan	Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani	30 Orang	971.685.000	UPTD PENGAWASAN DAN PERALATAN BELITUNG
					Pengadaan alat-alat UPR	Tersedianya alat-alat UPR	5 unit	4.000.000.000	UPTD PENGAWASAN DAN PERALATAN BELITUNG
					Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat	Alat berat yang dipelihara	1 paket	317.757.000	UPTD PENGAWASAN DAN PERALATAN

NO.	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019						
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2019	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									BELITUNG
					Monitoring dan evaluasi peralatan workshop	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi	1 dok	55.000.000	UPTD PENGAWASAN DAN PERALATAN BELITUNG
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM	Pertambahan Jumlah DBH (Dana Bagi Hasil) SDA (Sumber Daya Alam) Mineral Logam	Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara	Jumlah DBH SDA Mineral	80 Miliar	250.000.000	DINAS ESDM
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ENERGI	Pertambahan Jumlah lifting MIGAS Babel	Koordinasi kegiatan MIGAS dengan Pemerintah Pusat dan Partisipasi ADPM	Jumlah lifting MIGAS Babel	440 Ribu	300.000.000	DINAS ESDM
			PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN GEOLOGI DAN AIR TANAH	Persentase pertumbuhan pendapatan Daerah dari retribusi pergantian biaya cetak peta	Pengadaan sarana pendukung pelayanan cetak peta	Jumlah pendapatan daerah dari retribusi pergantian biaya cetak peta	1,7 Miliar	200.000.000	DINAS ESDM
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	Pertambahan pendapatan asli daerah dari layanan fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) (Juta Rupiah)	Peningkatan Fungsi Pelayanan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)	jumlah layanan fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) (Bulan Layanan)	12	2.200.000.000	DKP
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PEMBENIHAN IKAN AIR PAYAU	Pertambahan Jumlah pendapatan dari layanan fungsi produksi dan penanganan hama dan penyakit (Juta Rupiah)	Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD Balai Benih Ikan Air Payau (BBIAP) Tanjung Krasak	Jumlah Bulan layanan fungsi produksi dan penanganan hama dan penyakit (Bulan Layanan)	12	1.850.000.000	UPTD BALAI BENIH IKAN AIR PAYAU (BBIAP) TANJUNG KRASAK
			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PEMBENIHAN IKAN LAUT	Pertambahan Jumlah pendapatan dari layanan fungsi produksi dan penanganan hama dan penyakit (Juta Rupiah)	Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD Balai Benih Ikan Laut (BBIL) Tanjung Rusa	Jumlah Bulan layanan fungsi produksi dan penanganan hama dan penyakit (Bulan Layanan)	12	1.200.000.000	UPTD BALAI BENIH IKAN LAUT (BBIL) TANJUNG RUSA
			PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN, OPRASIONAL DAN KEBANDARUDARAAN	Prosentase pertambahan pendapatan dari pengelolaan perhubungan udara	Pekerjaan Konsultansi Penilaian/ Appraisal Harga Tanah untuk Pengembangan daerah Komersil Bandara Depati Amir	Jumlah dokumen jasa konsultansi Penilaian/ Appraisal Harga Tanah untuk Pengembangan daerah Komersil Bandara Depati Amir	1 Dok	400.000.000	DISHUB
					DED Pembangunan daerah	Jumlah Dokumen DED	-	0%	DISHUB

NO.	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019						
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2019	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					komersil di bandara Depati Amir Pangkalpinang.	Pembangunan daerah komersil di bandara Depati Amir Pangkalpinang.			
					Pembebasan lahan daerah komersil di bandara depati amir pangkalpinang	Jumlah pengadaan lahan daerah komersil di bandara depati amir pangkalpinang.	-	0%	DISHUB
					Pembuatan papan reklame di area gedung VIP bandara depati amir pangkalpinang	Jumlah unit papan reklame di area gedung VIP bandara depati amir pangkalpinang yang dibangun	3 Unit	240.000.000	DISHUB
6	PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT	Penciptaan peluang kesempatan kerja bagi pencari kerja	PROGRAM PENGEMBANGAN PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	sosialisasi informasi pasar kerja	jumlah peserta sosialisasi yang mendapat informasi tentang IPK	160 perusahaan	190.000.000	DISNAKER
					penyuluhan bimbingan jabatan siswa SMK	jumlah peserta bimbingan	10 SMK	200.000.000	DISNAKER
					peningkatan dan pengembangan BKK (bursa kerja khusus)	jumlah tenaga kerja yang ditempatkan	20 TK	110.000.000	DISNAKER
					job fair	jumlah tenaga kerja yang ditempatkan	600 orang	300.000.000	DISNAKER
					job convassing	jumlah pencari kerja yang ditempatkan	80 perusahaan	90.000.000	DISNAKER
					pengembangan dan perluasan kesempatan kerja melalui TKM	Jumlah tenaga kerja yang memiliki kemampuan manajerial dan teknis enterpreunership	5 paket	500.000.000	DISNAKER
					workshop jejaring kerjasama dibidang pelayanan penempatan tenaga kerja	Jumlah orang yang mengikuti Workshop	50 orang	120.000.000	DISNAKER
					sosialisasi program pemagangan dalam dan luar negeri	jumlah peserta pemagangan	30 orang	165.000.000	DISNAKER
					selekda asean skill competition XIII	jumlah calon peserta yang mengikuti seleksi di	80 orang	260.000.000	DISNAKER

NO.	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019						
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2019	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						tingkat Daerah			
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA, FASILITASI DAN AKSES INDUSTRI	Persentase Tenaga Kerja Industri terhadap total tenaga kerja (%)	Pengembangan SDM melalui pelatihan	Jumlah SDM yang terlatih	100 Pelaku Industri/masyarakat	400.000.000	DISPERINDAG
					Inkubator wirausaha baru	Jumlah Kelompok	3 Kelompok	245.112.000	DISPERINDAG
					pemberdayaan dekranasda	Jumlah Pelaku Industri/masyarakat	500 Pelaku Usaha/Masyarakat	824.937.750	DISPERINDAG
					rumah pengembangan produk	jumlah pelaku industri yang terfasilitasi	430 pelaku	542.586.000	DISPERINDAG
					penyuluh, pendampingan dan pemetaan database pelaku industri oleh PFPP & TPL	jumlah pelaku industri	324 Pelaku Industri	240.699.000	DISPERINDAG
					promosi/gelar produk industri	jumlah event	9 Event	1.803.443.250	DISPERINDAG
					pembinaan dan pengembangan produk	jumlah ovop	9 OVOP	180.000.000	DISPERINDAG
					Fasilitasi magang SDM pelaku industri	jumlah pelaku industri yang terfasilitasi	5 Pelaku Industri	150.000.000	DISPERINDAG
					Visualisasi pengembangan industri melalui media elektronik	jumlah program/pelaku industri	52 Program/pelaku industri	250.000.000	DISPERINDAG
					peningkatan kerja sama dan perluasan akses industri	jumlah dokumen	1 dokumen	135.000.000	DISPERINDAG
					Sosialisasi, Fasilitasi dan Digitalisasi Industri	jumlah peserta	20 Pelaku Industri	180.000.000	DISPERINDAG
			PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA	Persentase pemuda yang bekerja	Pengembangan dan Penumbuhan Kewirausahaan Pemuda	Jumlah Pemuda yang mengikuti pengembangan dan penumbuhan kewirausahaan pemuda	98 Pemuda	330.847.117	DISKEPORA
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase penduduk yang bekerja di sektor perikanan tangkap	peningkatan kualitas SDM perikanan tangkap	Jumlah SDM Perikanan Tangkap yang dibina (Orang)	70,00	250.000.000	DISKEPORA
					Peningkatan Pengelolaan	Jumlah Nelayan yang	70,00		DISKEPORA

NO.	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019						
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2019	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Sumber Daya Ikan	dibina (Orang)		250.000.000	
			PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN BUDIDAYA DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	Persentase penduduk yang bekerja di sektor perikanan budidaya dan Usaha Pengolahan & Pemasaran	Pembinaan Pasar Hasil Perikanan se- Bangka Belitung	Jumlah pasar hasil perikanan yang dibina (Pasar)	7,00	70.000.000	DKP
					Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha	Jumlah sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran yang diadakan bagi masyarakat berupa alat pengolahan (Pasar)	12,00	2.400.000.000	DKP
					Pengolahan Hasil Perikanan				
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya	Jumlah sarana dan prasarana perikanan budidaya yang diadakan bagi masyarakat (Paket)	5,00	584.000.000	DKP
			PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase jumlah informasi berkaitan dengan penciptaan lapangan pekerjaan yang diakses oleh pencari kerja	Pengelolaan Saluran Komunikasi Pemerintah Daerah dan Non Pemerintah Daerah	Jumlah saluran komunikasi yang dikelola	-	290.000.000	DISKOMINFO
					Pengelolaan Konten	Jumlah pengemasan dan pengelolaan konten		140.000.000	DISKOMINFO
					Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah data/informasi publik pemda		165.000.000	DISKOMINFO
					Pengelolaan Kemitraan	Jumlah mitra yang terfasilitasi		190.000.000	DISKOMINFO
					Pengelolaan Aspirasi Publik Lingkup Pemerintah Daerah	Jumlah aspirasi publik lingkup pemerintah daerah		125.000.000	DISKOMINFO
					Pengelolaan Komunikasi Publik	Jumlah konferensi pers dan wartawan		95.000.000	DISKOMINFO
			PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase panjang jalan dan jembatan yang dapat dilewati dengan lancar dikerjakan dengan pendekatan padat karya	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan dalam kondisi mantap	846,33 km	29.198.385.000	DINAS PUPR
					Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang jembatan dalam	216 unit		DINAS PUPR

NO.	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019						
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2019	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						kondisi baik		2.455.789.350	
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	Persentase panjang jaringan irigasi yang dapat dilalui air dengan lancar dilakukan dengan pendekatan padat karya	Pembersihan/Rehabilitasi/Normalisasi/Sungai/Kali	Panjang saluran / sungai	7.500 m	1.853.271.843	DINAS PUPR
					Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang telah dibangun	Luasan jaringan irigasi	323 ha	646.728.156	DINAS PUPR
			PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN USAHA KECIL	Persentase wirausaha	Peningkatan Kualitas Kewirausahaan	jumlah wirausaha pemula yang mendapatkan pembinaan		-	DINAS KUMKM
						jumlah wirausaha yang mendapatkan pemahaman dan motivasi berwirausaha	250	100.000.000	DINAS KUMKM
						jumlah wirausaha yang bertambah pengetahuan teknis berwirausaha	250	100.000.000	DINAS KUMKM
						terpilihnya pelaku usaha berprestasi tingkat provinsi	10	270.000.000	DINAS KUMKM
					Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil	jumlah dokumen kesepakatan Pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Kecil	1	100.000.000	DINAS KUMKM
						jumlah dokumen data usaha kecil	1	250.000.000	DINAS KUMKM
					Pembangunan Gedung Pemasaran Produk KUKM	Terbangunnya 1 (satu) unit Gedung Pemasaran Produk KUKM	Tahap 2	17.650.000.000	DINAS KUMKM
			PROGRAM PENGEMBANGAN PENDAYAGUNAAN SDA, TEKNOLOGI TEPAT GUNA DAN PELATIHAN MASYARAKAT	Pertambahan Jumlah Masyarakat Desa yang terlatih dalam Kewirausahaan	Pelatihan kewirausahaan masyarakat	Jumlah Masyarakat Desa yang terlatih dalam Kewirausahaan	100 orang	734.383.002	DINAS PMD
				Persentase KPM yang aktif	Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Kader KPM yang dibina	50 Kader	257.034.051	DINAS PMD

NO.	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019						
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2019	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Peningkatan kualitas hidup dan peran serta perempuan	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN	Persentase perempuan yang bekerja	Kegiatan Pemetaan industri rumahan di kab/kota	Jumlah kab/kota yang terpetakan untuk program iR	1	Rp101.000.000	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
					Kegiatan Pelatihan dan Pendampingan dan pemberian batuan bagi pelaku IR	Jumlah IR yang mendapatkan pelatihan, pendampingan dan bantuan modal usaha	50	Rp148.280.000	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
					Kegiatan Pembinaan dan Monev Pelaksanaan Program IR Perempuan di Kab/Kota	Jumlah Pembinaan dan Monev	14	Rp150.000.000	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
					Kegiatan Pameran hasil karya perempuan	Jumlah kab/kota yang ikut serta dalam pameran hasil karya perempuan	7	Rp170.000.000	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
					Kegiatan TOT kewirausahaan bagi perempuan produktif dan remaja perempuan putus sekolah	Jumlah perempuan produktif dan remaja perempuan putus sekolah yang mengikuti pelatihan kewirausahaan	30	Rp170.000.000	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
					Pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja perempuan	Jumlah peserta Pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja perempuan	16	Rp150.000.000	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
					Pembinaan Organisasi Perempuan	Terlaksananya Pembinaan Organisasi Perempuan Prov. Kep. Bangka Belitung	12	Rp400.000.000	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
		Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin	PROGRAM PENANGANAN FARKIR MISKIN	Persentase PMKS yang mendapatkan Bantuan Beras Sejahtera	Pemberian Bantuan Sosial Subsidi Beras Kepada Keluarga Miskin Secara Gratis	Jumlah Keluarga Miskin yang mendapatkan Bantuan Sosial Subsidi Beras Secara Gratis	43,019	15.131.000.000	DINSOS
			PROGRAM	Persentase peningkatan	Peningkatan kualitas rumah	Jumlah RTLH Yang di	300 unit	22.620.000.000	DINAS PRKP



NO.	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019						
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2019	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			PEMBANGUNAN PERUMAHAN	kuantitas dan kualitas rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin	tidak layak huni	renovasi			
					Rapat koordinasi bidang perumahan	Jumlah peserta rapat bidang perumahan	50 peserta	172.500.000	DINAS PRKP
					Sosialisasi Pembiayaan Perumahan Kab/Kota	Jumlah peserta yang tersosialisasi Pembiayaan Perumahan Kab/Kota	50 peserta	172.500.000	DINAS PRKP
					Survey Pembiayaan Mikro Perumahan Bagi Masyarakat berpenghasilan tidak tetap	Jumlah laporan Pembiayaan Mikro Perumahan Bagi Masyarakat berpenghasilan tidak tetap yang tersusun	1 lap	133.486.250	DINAS PRKP
					survey dan pendataan rumah tidak layak huni	Jumlah laporan survey dan pendataan rumah tidak layak huni yang tersusun	1 lap	150.000.000	DINAS PRKP
					Monitoring dan evaluasi pelaksanaan satu juta rumah	Jumlah MBR yang termonitor dan terevaluasi	1000 unit	100.000.000	DINAS PRKP
			PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH ATAS	Persentase Siswa SMA miskin yang mendapatkan beasiswa miskin	Kegiatan Pemberian Beasiswa Siswa SMA	Jumlah Siswa SMA tidak mampu menerima beasiswa	2,485	2.982.000.000	DINAS PENDIDIKAN
			PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KEJURUAN	Persentase siswa SMK miskin yang mendapatkan beasiswa miskin	Kegiatan Pemberian Beasiswa Siswa SMA	Jumlah Siswa SMK tidak mampu menerima beasiswa	1,809	2.170.800.000	DINAS PENDIDIKAN
			PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN	Persentase kepesertaan JKN	Pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat	Persentase kepesertaan JKN	65,50%	19.263.583.086	DINAS KESEHATAN
			PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Masyarakat Miskin yang mendapat bantuan Pangan dan Gizi	Peningkatan kesehatan gizi anak dan keluarga	Prevalensi kekurangan gizi underweight pada anak balita	14,30%	1.884.962.948	DINAS KESEHATAN
		Meningkatkan	PROGRAM	Persentase Kepala Keluarga	Kegiatan Pembinaan usaha	Jumlah kelompok kepala	35	193.137.450	DINAS PPA,

NO.	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019						
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2019	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		pendapatan masyarakat miskin	PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN	perempuan miskin yang diberdayakan	kelompok ekonomi produktif perempuan (percontohan)	keluarga perempuan miskin yang diberikan pembinaan usaha kelompok ekonomi produktif			DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
					Kegiatan peningkatan nilai-nilai keuangan perempuan indonesia	Jumlah peserta kegiatan peningkatan nilai-nilai keuangan perempuan indonesia	2	209.050.050	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
			PROGRAM PENANGANAN FARKIR MISKIN	Persentase PMKS (farkir miskin) yang mendapatkan Bantuan Usaha	Stimulan Penguatan Sosial Ekonomi Keluarga Fakir Miskin di Wilayah Perdesaan	Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan stimulan UEP dan KUBE	400	1.600.000.000	DINSOS
					Penanganan Fakir Miskin Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah keluarga miskin penerima pelayanan program penanganan Fakir miskin	200	700.000.000	DINSOS
					Pelatihan Keterampilan dan Manajemen Usaha bagi Keluarga Miskin	Jumlah Keluarga Miskin yang mendapatkan pelatihan manajemen usaha	180	400.000.000	DINSOS
					Stimulan penguatan sosial ekonomi keluarga miskin dan rentan	Jumlah Keluarga miskin dan rentan yang mendapatkan stimulan penguatan sosial ekonomi	115	700.000.000	DINSOS
					Peningkatan kualitas dukungan program pusat	Jumlah dukungan terhadap peningkatan kualitas program pusat	13	100.000.000	DINSOS
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN	Persentase rumah tangga miskin yang bekerja disektor perdagangan	Peningkatan kemampuan SDM perdagangan dan produk	Jumlah orang (masyarakat)	180	400.000.000	DISPERINDAG
					Peningkatan pemahaman penggunaan produk dalam negeri	Jumlah pelaku usaha	55	100.320.000	DISPERINDAG
					pengadaan gerobak	Jumlah gerobak (unit)	20 Unit	160.000.000	DISPERINDAG
				Persentase Pemantauan dan Pengawasan distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting (18	Pelaksanaan pasar murah	Jumlah Pelaksanaan (kali)	45	500.000.000	DISPERINDAG

NO.	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019						
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2019	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				bahan Pokok)					
					Operasi pasar murah	Jumlah Masyarakat (KK)	30	3.800.000.000	DISPERINDAG
			PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase informasi berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan yang dapat diakses oleh masyarakat	Pengelolaan Saluran Komunikasi Pemerintah Daerah dan Non Pemerintah Daerah	Jumlah saluran komunikasi yang dikelola	0%	290.000.000	DISKOMONFO
					Pengelolaan Konten	Jumlah pengemasan dan pengelolaan konten		140.000.000	DISKOMONFO
					Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah data/informasi publik pemda		165.000.000	DISKOMONFO
					Pengelolaan Kemitraan	Jumlah mitra yang terfasilitasi		190.000.000	DISKOMONFO
					Pengelolaan Aspirasi Publik Lingkup Pemerintah Daerah	Jumlah aspirasi publik lingkup pemerintah daerah		125.000.000	DISKOMONFO
					Pengelolaan Komunikasi Publik	Jumlah konferensi pers dan wartawan		95.000.000	
			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I	TOT bagi kader BKB Holistik Integrasi tingkat provinsi	Jumlah Peserta TOT bagi kader BKB Holistik Integrasi tingkat provinsi	35	150.000.000	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
					Kegiatan pelatihan konselor dan pendidik sebaya	Jumlah Peserta pelatihan konselor dan pendidik sebaya	14	150.000.000	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
					Pembinaan dan peningkatan keterampilan dan kemampuan kepada pengelola kader BKB,BKR dan BKL	Jumlah kader yang mampu dan terampil dalam membina BKB BKR dan BKL	126	100.000.000	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
					Kegiatan Promosi Penguatan Bina Keluarga Lansia	Jumlah Peserta	350	150.000.000	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
					Kegiatan pembinaan peningkatan kapasitas UPPKS	Kelompok UPPKS yang mendapatkan pembinaan	65	150.000.000	DINAS PPA, DUKCAPIL,

NO.	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019						
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2019	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						dan pelatihan			PENGENDALIA N PENDUDUK KB
					Kegiatan pembinaan peningkatan peran serta perempuan dalam kehidupan keluarga	Jumlah pemenang lomba dalam rangka hari keluarga	4	385.000.000	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIA N PENDUDUK KB
					Kegiatan Pembinaan dan Monev Penyelenggaraan Program Pembangunan Keluarga di Kab/Kota	Jumlah kunjungan pembinaan dan monev kab/kota yang dievaluasi	28	75.000.000	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIA N PENDUDUK KB
					Pendampingan kemah nasional konselor sebaya 2018	Jumlah Peserta Pendampingan kemah nasional konselor sebaya 2018	1500	800.000.000	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIA N PENDUDUK KB
			PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN, PEMBINAAN HUB. INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL	Pertumbuhan kenaikan upah tenaga kerja	peningkatan fungsi Dewan Pengupahan, pembahasan UMP, UMP/UMSK dan sosialisasi UMP	jumlah rapat pembahasan UMP	4 kali	300.000.000	DISNAKER
				persentase penyelesaian kasus tenaga kerja	pemeriksaan norma kerja dan norma K3	jumlah perusahaan bidang lain yang diperiksa dan dibina	210 perusahaan	161.070.000	DISNAKER
					bimtek tatacara pembentukan lembaga kerjasama LKS bipartit	jumlah LKS bipartit yang terbentuk di perusahaan	100 lks bipartit	100.000.000	DISNAKER
					pemetaan kerawanan kondisi HI	jumlah kondisi kerawanan HI	175 perusahaan	100.000.000	DISNAKER
					peningkatan fungsi LKS tripartit dan pembahasan masalah ketenagakerjaan	jumlah rapat LKS tripartit dan pembahasan masalah ketenagakerjaan	4 kali	300.000.000	DISNAKER
					penegekan hukum ketenagakerjaan	jumlah penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan di perusahaan	2 kasus	117.470.000	DISNAKER

NO.	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019						
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2019	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					pembinaan dan penyelesaian PHK pekerja di luar pengadilan HI	jumlah kasus PHK pekerja yang dibina dan diselesaikan di luar pengadilan HI	170 perusahaan	175.000.000	DISNAKER
					perlindungan tenaga kerja	jumlah alat yang di uji dan diperiksa	190 alat uji	350.000.000	DISNAKER
					peningkatan sarana Hubungan Industrial	jumlah peserta yang mengikuti bimtek PP/PKB	0%	-	DISNAKER
				persentase penurunan kecelakaan kerja	upgrading pengetahuan K3 personil	jumlah personil K3 yang di upgrading	20 orang	90.800.000	DISNAKER
					sosialisasi BPJS bagi non tenaga kerja non formal	jumlah tenaga kerja non formal yang mendapatkan perlindungan BPJS	300 tenaga kerja	250.000.000	DISNAKER
					Peningkatan Kapasitas Ahli K3 di perusahaan	Jumlah peserta yang mengikuti bimtek peningkatan ahli k3	30 orang	90.000.000	DISNAKER
					gema bulan bhakti K3	jumlah perusahaan yang mendapat penghargaan	3 perusahaan	150.000.000	DISNAKER
		Pengendalian Tingkat harga-harga komoditas penyumbang inflasi	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN KEMETROLOGIAN	Persentase jumlah Barang Beredar, Jasa dan Tertib Niaga yang diawasi sesuai standar (112 barang SNI wajib; 140 pelaku usaha Tertib Niaga)	Pegawasan barang beredar dan jasa	Produk SNI wajib (barang/Jasa)	10	896.000.000	DISPERINDAG
					Pengembangan SDM dalam rangka pengawasan barang beredar, jasa dan tertib niaga	Pelaku usaha dan instansi terkait	150	250.000.000	DISPERINDAG
					peningkatan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka pengawasan barang beredar dan jasa serta tertib niaga	Laporan Rapat dan Koordinasi (dokumen)	2	135.000.000	DISPERINDAG
					pemetaan produk dalam pengawasan barang beredar dan jasa serta tertib niaga	informasi atau data yang teridentifikasi (jenis barang dan jasa)	8	150.000.000	DISPERINDAG
					pelaksanaan penentuan penegakan hukum pelanggaran dalam rangka pengawasan barang beredar dan jasa serta tertib niaga	Jumlah pelanggaran yang ditindaklanjuti secara hukum (kasus)	2	400.000.000	DISPERINDAG

NO.	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019						
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2019	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					pengembangan SDM penyidik pegawai negeri sipil perlindungan konsumen (PPNS-PK), petugas pegawai barang beredar dan jasa (PPBJ), Penyidik pegawai negeri sipil perdagangan (PPNS Dag) dan petugas pengawasan Tertib Niaga (PPTS)	Jumlah PPNSPK, PPBJ, PPNS Dag dan PPTN (orang)	13	180.000.000	DISPERINDAG
					Pengawasan Tertib niaga	Jumlah pengawasan (kali)	14	700.000.000	DISPERINDAG
				Indeks Keberdayaan Konsumen (0 - 20 = Tahu; 21 - 40 = Paham)	Peringatan hari konsumen nasional	jumlah Peserta (orang)	250	150.000.000	DISPERINDAG
					sosialisasi kelembagaan dan perlindungan konsumen	jumlah peserta sosialisasi (orang)	100	150.000.000	DISPERINDAG
					pos layanan pengaduan konsumen	jumlah lokasi/pengaduan	36	360.000.000	DISPERINDAG
					Tim Koordinasi Badan Penyelesaian Sengketa konsumen (BPSK)	Jumlah kab/Kota	7	355.000.000	DISPERINDAG
					Survey pengukuran indeks keberdayaan konsumen	jumlah Responden	400	135.000.000	DISPERINDAG
					Bimbingan teknis kelembagaan dan pemberdayaan konsumen	jumlah peserta	90	500.000.000	DISPERINDAG
					Diseminasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen di berbagai media cetak	jumlah media publikasi	3	100.000.000	DISPERINDAG
					klitik konsumen terpadu bagi pelajar	jumlah sekolah yang dibuka klinik	4	200.000.000	DISPERINDAG
					forum dialog dengan perguruan tinggi	jumlah peserta forum dialog	100	150.000.000	DISPERINDAG
					Peningkatan Fungsi BPSK	jumlah BPSK	4	600.000.000	DISPERINDAG
				Persentase jumlah Standarisasi Lab. Kemetrolagian yang memenuhi standar	Penyediaan informasi dan publikasi standarisasi dan kemetrolagian	Jumlah sarana/media informasi (sarana/media)	1	70.000.000	DISPERINDAG
					Monitoring pelayanan	Laporan monitoring	1	110.000.000	DISPERINDAG

NO.	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019						
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2019	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					kemetrologian legal	(dokumen)			
					Penyusunan Daftar jumlah jenis dan massa berlaku standar ukur	Dokumen Daftar Jumlah jenis dan massa berlaku standar ukur (dokumen)	1	50.000.000	DISPERINDAG
					kalibrasi standar ukur	Jumlah alat yang terkalibrasi (alat)	3	40.000.000	DISPERINDAG
					penyediaan sarana dan prasarana lab kemetrolgion	Jumlah sarana dan prasarana	2	160.000.000	DISPERINDAG
					verifikasi dan interkomparasi standar ukur	Jumlah standar ukur (alat)	3	75.000.000	DISPERINDAG
					bimbingan teknis dan diklat penguji mutu dan pranata lab	Jumlah Orang (orang)	2	50.000.000	DISPERINDAG
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN	Persentase Pertumbuhan jumlah volume ekspor (ton)	Verifikasi dan pengawasan perdagangan sumber daya mineral	Jumlah Pelaku usaha	45	500.000.000	DISPERINDAG
					Peningkatan dan Perluasan Akses Pasar	Jumlah Pelaksanaan	10 Kali	1.000.000.000	DISPERINDAG
					Partisipasi Papper Day	Jumlah UKM (Unit Usaha)	0	-	DISPERINDAG
					peningkatan kompetensi pelaku usaha sektor perikanan	Jumlah Pelaku usaha	40	100.000.000	DISPERINDAG
					peningkatan kompetensi pelaku usaha sektor pertanian	Jumlah Pelaku usaha	40	100.000.000	DISPERINDAG
					Verifikasi dan pengawasan perdagangan sumber daya mineral	Jumlah Pelaku usaha	45	500.000.000	DISPERINDAG
				Persentase jumlah barang kebutuhan pokok dan barang penting (18 bahan pokok) yang tersedia setiap waktu	Pelaksanaan pasar murah	Jumlah Pelaksanaan (kali)	45	500.000.000	DISPERINDAG
					Operasi pasar murah	Jumlah Masyarakat (KK)	30	3.800.000.000	DISPERINDAG
					Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pelaku usaha	Jumlah Pelaku Usaha (Pelaku Usaha)	50	250.000.000	DISPERINDAG
					Informasi perdagangan Dalam Negeri	Jumlah Komoditi (Komoditi)	20	160.000.000	DISPERINDAG
				Persentase peningkatan sarana dan prasarana perdagangan yang dibangun dan	Pengadaan Lahan Untuk PUJASERA	Jumlah Lahan yang dibebaskan (lahan PUJASERA)	1	5.000.000.000	DISPERINDAG

NO.	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019						
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2019	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				termanfaatkan					
					Pembangunan PUJASERA	Jumlah pujasera yang dibangun (PUJASERA)	4	25.000.000.000	DISPERINDAG
				Persentase Pertumbuhan nilai omzet yang memanfaatkan resi gudang	Pengadaan lahan untuk Gudang	Jumlah lahan yang dibebaskan (lahan)	2	3.000.000.000	DISPERINDAG
					Pembangunan Gudang	Jumlah Gudang yang dibangun (gudang)	1	4.000.000.000	DISPERINDAG
					Peningkatan kemampuan pengelola Resi Gudang	Jumlah Orang (orang)	10 Orang	200.000.000	DISPERINDAG
				Pertumbuhan komoditi yang terjual melalui Pasar Lelang	Penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditi	Jumlah Penyelenggaraan	3 Kali	156.000.000	DISPERINDAG
			PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI KEBIJAKAN PEREKONOMIAN	Persentase rekomendasi komoditas penyumbang inflasi yang paling tinggi dengan intervensi program/kebijakan	Koordinasi, Monev Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) serta penguatan kerjasama di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah Rekomendasi Pengendalian Inflasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	6 Rekomendasi	330.000.000	BIRO EKONOMI
					Pengendalian Evaluasi Koperasi, UKM dan UMKM di Prov.Kep.Babel	jumlah laporan pengendalian dan evaluasi Koperasi, UKM dan UMKM di Prov.Kep.Babel	1 Laporan	126.000.000	BIRO EKONOMI
					Pengawasan Supply, Demand dan Evaluasi Makro dan Mikro Ekonomi di Prov.Kep.Babel	Jumlah Rekomendasi Makro dan Mikro Ekonomi	2 Rekomendasi	130.000.000	BIRO EKONOMI
					Promosi potensi produk unggulan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah laporan perkembangan destinasi wisata baru	1 Laporan	200.000.000	BIRO EKONOMI
					Pengendalian Evaluasi Industri Hilirisasi di Prov.Kep.Babel	Jumlah laporan pengendalian, evaluasi industri Hilirisasi di Prov.Kep.Babel	1 Laporan	160.000.000	BIRO EKONOMI
					Peningkatan Sarana, Prasarana dan Evaluasi Resi Gudang di Prov. Kep. Babel	Jumlah Laporan peningkatan sarana prasarana perekonomian yang Representative	1 Laporan	170.000.000	BIRO EKONOMI
					Forum Pengembangan Ekonomi	Jumlah Rekomendasi data perkembangan ekonomi daerah	1 rekomendasi	200.000.000	BIRO EKONOMI



NO.	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019						
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2019	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN LAUT	Prosentase infrastruktur perhubungan laut dalam kondisi baik terhadap kondisi optimal	Studi Kelayakan Pengganti Pelabuhan Pangkal Balam	Jumlah Dokumen Studi Kelayakan Pelabuhan Pangkal Balam	-	0%	DINAS PERHUBUNGAN
					Penyusunan SID dan DED Pembangunan PelabuhanPengganti Pelabuhan Pangkal Balam	Jumlah Dokumen SID dan DED Pembangunan Pelabuhan Pengganti Pelabuhan Pangkal Balam	2 Dokumen	2.000.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
					Penyusunan kajian Lingkungan Pembangunan Pelabuhan Pengganti Pelabuhan Pangkal Balam	Jumlah Dokumen kajian Lingkungan Pembangunan Pelabuhan Pengganti Pelabuhan Pangkal Balam	-	0%	DINAS PERHUBUNGAN
			PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Panjang jalan dan jembatan yang dapat dilewati dengan lancar yang menuju pusat-pusat distribusi komoditas penyumbang inflasi	Pembangunan/Peningkatan Jalan	Panjang jalan dalam kondisi mantap yang terbangun	23 km	105.800.000.000	DINAS PUPR
					Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan dalam kondisi baik yang terbangun	2 unit	8.050.000.000	DINAS PUPR
		Mengurangi ketergantungan pasokan dari luar terhadap komoditas penyumbang inflasi	PROGRAM PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	Pertambahan jumlah volume produksi komoditas cabai besar	Fasilitasi penerapan budidaya cabai besar di Prov.Kep.Bangka Belitung	Penerapan budidaya cabai	2.813,28	1.046.477.500	DINAS PERTANIAN
				Pertambahan jumlah volume produksi komoditas cabai rawit	Fasilitasi penerapan budidaya cabai rawit di Prov.Kep.Bangka Belitung	Penerapan budidaya cabai	2.651,13	1.046.477.500	DINAS PERTANIAN
				Pertambahan jumlah volume produksi komoditas bawang merah	Fasilitasi penerapan budidaya bawang merah di Prov.Kep.Bangka Belitung	Penerapan budidaya cabai	98,11	1.046.477.500	DINAS PERTANIAN
			PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase kontribusi komoditas ikan dalam menyumbang inflasi	Pengadaan Coldstorage	Jumlah sarana dan prasarana yang dimanfaatkan oleh masyarakat (Unit)	2,00	5.100.000.000	DINAS KELAUTAN PERIKANAN
			PROGRAM PENGEMBANGAN DISTRIBUSI, STABILITAS, DAN	Koefisien varian harga pangan strategis di tingkat produsen dan konsumen	Pengendalian Distribusi pangan	Jumlah Pengawasan pemantauan harga pangan pokok di tingkat produsen, konsumen dan	4	200.000.000	DINAS PANGAN

NO.	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019						
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2019	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			CADANGAN PANGAN			pasokan di 6 pelabuhan (Pengawasan)			
					Database harga dan Stock pangan tingkat distributor	Jumlah Dokumen Database Harga dan Stock Pangan Tingkat Distributor (Dokumen)	1	110.000.000	DINAS PANGAN
					Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)	Jumlah Gapoktan yang difasilitasi (GAPOKTAN)	5	300.000.000	DINAS PANGAN
					Penindakan hukum kasus penyimpangan pangan	Jumlah Kasus Penyimpangan Pangan yang ditangani (Kasus)	1	75.000.000	DINAS PANGAN
					Penyusunan Neraca Prognosa Pangan	Jumlah Dokumen Neraca Prognosa Pangan (laporan)	1	50.000.000	DINAS PANGAN
					Pelatihan peningkatan mutu hasil gabah dan beras	Jumlah pelaksanaan pelatihan untuk kelompok masyarakat (Angkatan)	1	140.000.000	DINAS PANGAN
		Pengendalian tingkat kelahiran penduduk dan perpindahan penduduk untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang	PROGRAM PENGADMINISTRASIAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	Persentase jumlah masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mempunyai KTP	Sosialisasi Tertib Administrasi Kependudukan Melalui Media	Jumlah Laporan dan media sosialisasi	1	100.000.000	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
					Peningkatan Kapasitas Aparatur Bidang Pendaftaran Penduduk	Jumlah pelaksanaan bimbingan teknis	2	50.000.000	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
					Peningkatan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	Jumlah Sosialisasi/Rapat Peningkatan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	2	110.000.000,00	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
				Persentase jumlah masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sudah meninggal yang memiliki akte kematian	Sosialisasi Kebijakan Pencatatan Akte Kematian	Jumlah pelaksanaan sosialisasi	2	50.000.000,00	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB

NO.	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019						
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2019	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Peningkatan Kapasitas Aparatur Bidang Pencatatan Akta Kematian	Jumlah pelaksanaan bimbingan teknis	2	110.000.000,00	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
					Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kematian	Jumlah rapat	2	110.000.000,00	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
			PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Persentase unmeet need	Kegiatan workshop peningkatan kualitas penggerakan Motivator KB Pria	Jumlah peserta yang bersedia menjadi motivator KB pria	30	110.000.000,00	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
					Kegiatan Pembinaan dan peningkatan Peserta KB	Persentase peserta yang menjadi akseptor MKJP	98,13 %	700.000.000,00	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
					Kegiatan Penggerakan KB MKJP	Jumlah Aksi Penggerakan KB MKJP	14	170.000.000,00	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
					Kegiatan peningkatan promosi program KB melalui kerjasama dengan media informasi (media cetak, media elektronik)	Jumlah Poster, leaflet dan brosur	1000	50.000.000,00	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
					Kegiatan peningkatan kapasitas PLKB dalam mengelola Kampung KB	Jumlah PKB yang mendapatkan pelatihan	30	250.000.000,00	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
					Kegiatan Peningkatan Peran Serta TOMA, TOGA dalam mendukung Program KKBPK	jumlah TOMA TOGA yang mendapatkan AKIE program KKBPK di 7 Kab/Kota	150	250.000.000,00	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK

NO.	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019						
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2019	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									KB
					Kegiatan Peningkatan Kualitas Penggerakan Pelayanan KBKR	Jumlah penggerakan	2 kali (2 Kab/Kota)	200.000.000,00	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
					Kegiatan Penguatan Komitmen Peningkatan Kinerja Lini Lapangan	Jumlah Peserta	100	250.000.000,00	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
					Kegiatan sosialisasi pendewasaan Usia Perkawinan kepada Pelajar dan Mahasiswa	Jumlah peserta (OPD KB dan Mitra Kerja) yang menerima informasi tentang PUP	30	150.000.000,00	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
					Kegiatan peningkatan promosi melalui berbagai media tentang Pendewasaan Usia Perkawinan, Reproduksi Sehat, GENRE	Jumlah Advokasi	2	150.000.000,00	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
					Kegiatan Advokasi dan KIE Program KKBPK	Jumlah Advokasi	4	50.000.000,00	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
					Kegiatan Pelatihan Penyegaran bagi PIK R Sekolah dan Masyarakat (Jambore PIK R) Prov.Kep.Babel	Jumlah Peserta Pelatihan Penyegaran bagi PIK R Sekolah dan Masyarakat (Jambore PIK R) Prov.Kep.Babel	70	300.000.000,00	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
					Penguatan Pembinaan dan Pelayanan Keluarga Berencana (fasilitasi KB Muspida)	Jumlah masyarakat yang menerima pelayanan di Kab/Kota	1400	80.000.000,00	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
			PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN	Persentase grand design kependudukan se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Kegiatan pendampingan penyusunan kebijakan (grand design kependudukan) tk Kab/Kota	Tersusunnya kebijakan (grand design Kependudukan) tk Kab/Kota	1	250.000.000,00	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK

NO.	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019						
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2019	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			KELUARGA BERENCANA						KB
				presentase KB MKJP	Kegiatan Advokasi dan Pendampingan Kampung KB	Jumlah peserta advokasi dan pendampingan kampung KB	50	100.000.000,00	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
					Kegiatan Pembinaan dan Penguatan Kampung KB	Jumlah Kampung KB	6	300.000.000,00	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
					Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang dilakukan Monev	7	100.000.000,00	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
7	PENGEMBANGAN KONEKTIVITAS DAN INFRASTRUKTUR	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan jaringan irigasi serta cetak sawah pertanian yang modern	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	Persentase luas jaringan irigasi yang berfungsi	Perencanaan pembangunan jaringan irigasi	Jumlah Dokumen perencanaan pembangunan jaringan irigasi	1 Dok	400.000.000	DINAS PUPR
					Pembangunan jaringan irigasi	Luas layanan irigasi	51 ha	1.225.000.000	DINAS PUPR
					Penyusunan regulasi irigasi	Jumlah regulasi daerah terkait irigasi	1 Dokumen Perda	400.000.000	DINAS PUPR
					Inspeksi Kondisi Jaringan Irigasi	Jumlah dokumen	1 Dok	100.000.000	DINAS PUPR
			PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	Persentase kesesuaian lokasi cetak sawah dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP)	Survey pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTRWP	jumlah dokumen dan alat survey pengawasan pemanfaatan ruang	1 Dokumen	400.000.000	DINAS PUPR
					Kajian Peninjauan Kembali Perda RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Jumlah dokumen regulasi Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP)	1 dokumen PK RTRWP	1.500.000.000	DINAS PUPR

NO.	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019						
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2019	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Koordinasi Penyelenggaraan Tata Ruang	Jumlah dokumen arahan teknis pemanfaatan ruang	1 dokumen	400.000.000	DINAS PUPR
		Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur air baku	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	Pertumbuhan volume air baku	Pembangunan embung dan bangunan penampung sumber air lainnya	Jumlah kapasitas tampungan air baku	15.600 m3	3.900.000.000	DINAS PUPR
					Inspeksi kondisi prasarana penyediaan air baku	Jumlah dokumen	1 Dok	100.000.000	DINAS PUPR
					Konservasi sumber air baku	luar area yang tertata	2 ha	1.000.000.000	DINAS PUPR
		Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur dasar yang layak bagi masyarakat	PROGRAM KECIPTAKARYAAN DAN PERMUKIMAN	Persentase peningkatan aksesibilitas Kawasan permukiman	Pembanguna/peningkatan jalan lingkungan permukiman di Kawasan Strategis Provinsi	panjang jalan lingkungan permukiman yang terbangun di Kawasan Strategis Provinsi	0%	14.8	DINAS PRKP
				Persentase peningkatan aksesibilitas di Kawasan permukiman kumuh Provinsi	Pembangunan/peningkatan jalan lingkungan permukiman di Kawasan Permukiman kumuh	Panjang jalan lingkungan permukiman yang terbangun di Kawasan kumuh	5454 m'	1.363.500.000	DINAS PRKP
		Peningkatan penataan permukiman pada kawasan strategis Provinsi	PROGRAM KECIPTAKARYAAN DAN PERMUKIMAN	Prosentase peningkatan kualitas pengelolaan Bangunan Gedung Dan Lingkungan	Penyusunan DED Cluster Melayu di Kawasan Kota Tua Mentok	Dokumen DED Cluster Melayu Kawasan Kota Tua Mentok yang tersusun	0%		DINAS PRKP
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Kawasan Permukiman	Dokumen Perencanaan Kawasan Permukiman yang tersusun	5 Dok	300.000.000	DINAS PRKP
					Bimbingan Teknis pengelola bangunan gedung negara	jumlah peserta Bimbingan Teknis pengelola bangunan gedung negara	20 peserta	150.000.000	DINAS PRKP
		Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi bagi masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI	Persentase dana pendamping desa yang terlayani jaringan Internet	Pengembangan dan pengelolaan infrastruktur dan teknologi	Jumlah dana pendampingan kapasitas layanan infrastruktur dan teknologi di daerah	51%	341.460.000	KOMINFO

NO.	RPJMD 2017-2022		RKPD 2019						
	Prioritas Pembangunan	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2019	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan pelabuhan serta sarana prasarana pendukung pelabuhan	PROGRAM PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN LAUT	Persentase Jumlah pulau yang memiliki pelabuhan/dermaga yang layak	Pemeliharaan pelabuhan/dermaga	Jumlah unit pelabuhan/dermaga yang dipelihara	-	0%	DINAS PERHUBUNGAN
					Pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	Jumlah Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) yang dipelihara	3 unit (S.Selan)	780.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
		Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan terminal serta sarana prasarana pendukung terminal	PROGRAM PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN DARAT	Persentase desa yang terlayani oleh angkutan perintis lintas kabupaten dalam provinsi	Subsidi Angkutan Perintis	Jumlah trayek yang disubsidi	2 trayek	1.000.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
					Survey Kebutuhan Angkutan Umum.	Jumlah Dokumen Survey Kebutuhan Angkutan Umum	1 dokumen	350.000.000	DISHUB
					Study Kelayakan Pembangunan Terminal type B	Jumlah Dokumen Study Kelayakan Pembangunan Terminal type B	1 Dokumen	650.000.000	DISHUB
					Rencana Induk Jaringan Trayek Angkutan Umum	Jumlah Dokumen Rencana Induk Jaringan Trayek Angkutan Umum	1 dokumen	650.000.000	DISHUB
			PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN, OPERASIONAL DAN KEBANDARUDARAAN	Persentase sarana dan prasarana fasilitas bandara kewenangan provinsi yang tersedia dan beroperasi	Pekerjaan Konsultansi Penilaian/ Appraisal Pengembangan Bandara Depati Amir	Jumlah dokumen jasa konsultansi Penilaian/ Appraisal Harga Tanah untuk Pengembangan Bandara Depati Amir	-	0%	DISHUB
					Pengadaan Tanah untuk Pengembangan di Bandara Depati Amir	Luas Tanah yang dibebaskan	10 Ha	35.000.000.000	DISHUB
		Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan jalan dan jembatan	PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase jalan provinsi diluar kawasan Strategis Provinsi dan Prioritas Propinsi dalam kondisi mantap					DINAS PUPR

# **BAB V**

## **ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA**



# BAB V

## ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

### 5.1. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

Dokumen perencanaan pemerintah akan memuat penjabaran rencana pembangunan menurut wilayah. Pembangunan kewilayahan dilakukan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Prioritas pengembangan wilayah yang diarahkan pada pengembangan potensi lokal yang dimiliki oleh masing-masing kabupaten/kota yang juga sebagai upaya untuk mendukung prioritas pembangunan provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

**Gambar V.1**

Perkembangan indikator Makro Pembangunan Kabupaten/Kota  
Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016

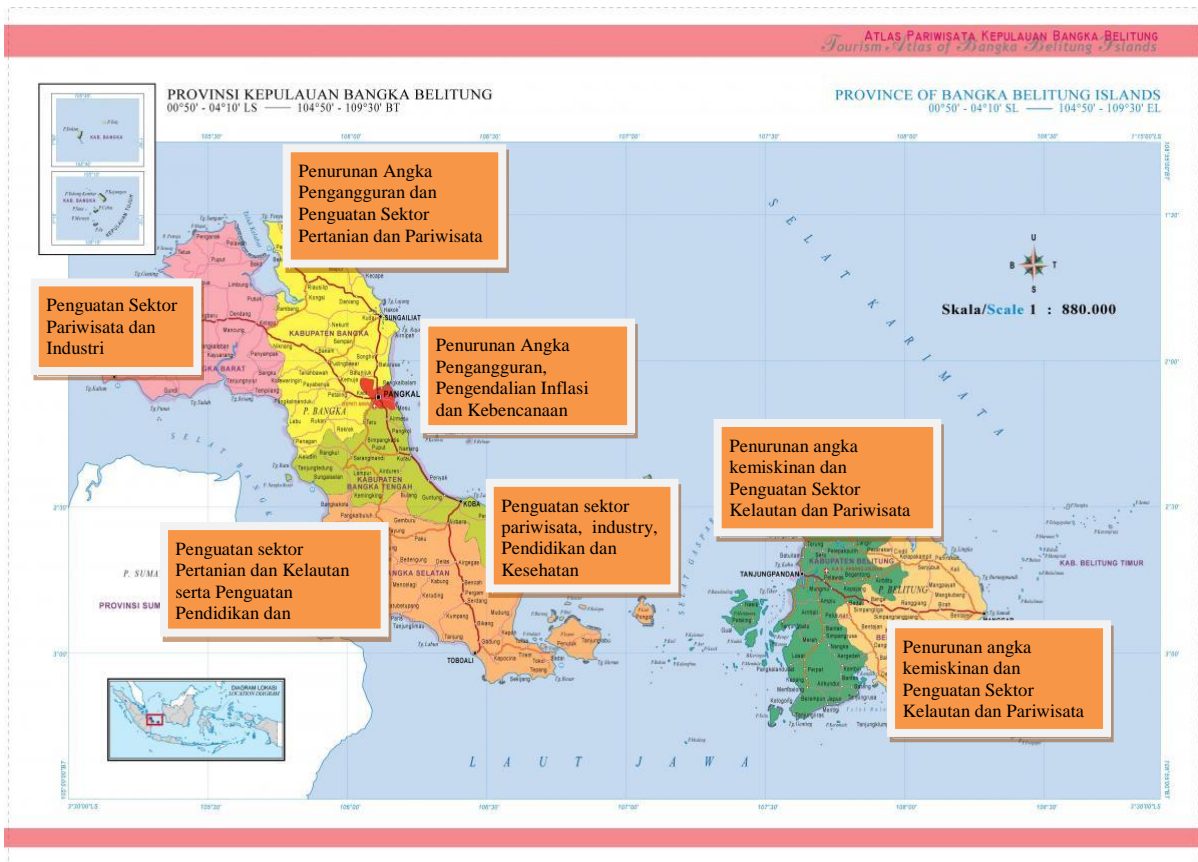


Sumber: Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, (diolah)

Berdasarkan Gambar V.I dan Gambar V.II, maka prioritas dan fokus pembangunan wilayah pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2019 diarahkan pada:

**Gambar V.2**

**Sasaran Pembangunan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019  
Di Kabupaten/Kota tahun 2019**



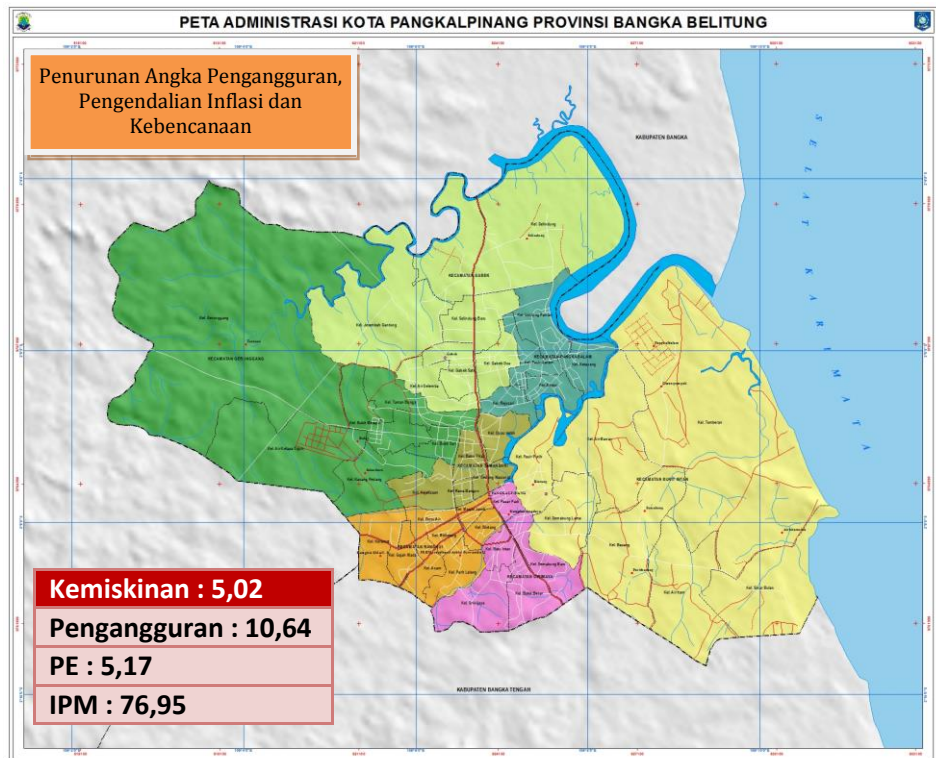
Sumber: Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (diolah)

#### 5.1.1. Arah Kebijakan Pembangunan Kota Pangkalpinang

Pembangunan Kota Pangkalpinang diarahkan berdasarkan sasaran pokok 3 (tiga) sasaran meliputi: pertama kesejahteraan masyarakat dengan 2 (dua) indikator, yaitu: kemiskinan dan pengangguran, kedua meningkatnya ekonomi daerah melalui indikator pertumbuhan PDRB dan ketiga terpenuhinya kapasitas dan kualitas SDM, dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia. Berdasarkan 3 (tiga) sasaran dan 4 (indikator) tersebut maka pembangunan Kota Pangkalpinang tahun 2019 diarahkan pada menurunkan angka Pengangguran dan pengendalian laju inflasi.

**Gambar V.3**

Sasaran Pembangunan Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2019



Pembangunan Kota Pangkalpinang tahun 2019 diarahkan pada Penurunan angka Pengangguran dengan kebijakan Penciptaan peluang kesempatan kerja bagi pencari kerja dan Peningkatan kualitas hidup dan peran serta perempuan. Sedangkan untuk pengendalian laju inflasi diarahkan dengan kebijakan Pengendalian Tingkat harga-harga komoditas penyumbang inflasi, Mengurangi ketergantungan pasokan dari luar terhadap komoditas penyumbang inflasi,

**Tabel V.1**

Arah Kebijakan, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas RKPD 2019 Dalam Rangka Mendukung Arah Kebijakan Pembangunan Kota Pangkalpinang

Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Program (Outcome)	2019	PD yang Bertanggung Jawab
			Target	
1	2	3	4	5
1 Penciptaan peluang kesempatan kerja bagi pencari kerja	PROGRAM PENGEMBANGAN PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	17,14	DISNAKER
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA, FASILITASI DAN AKSES INDUSTRI	Persentase Tenaga Kerja Industri terhadap total tenaga kerja (%)	5,17%	DISPERINDAG
	PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA	Persentase pemuda yang bekerja	10,20%	DISKEPORA
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase penduduk yang bekerja di sektor perikanan tangkap	6,82%	DISKEPORA
	PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN BUDIDAYA DAN PENGOLAHAN HASIL	Persentase penduduk yang bekerja di sektor perikanan budidaya dan Usaha Pengolahan &	1,14%	DKP

Arah Kebijakan		Program Perangkat Daerah	Indikator Program (Outcome)	2019	PD yang Bertanggung Jawab
				Target	
1		2	3	4	5
		PERIKANAN	Pemasaran		
		PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase jumlah informasi berkaitan dengan penciptaan lapangan pekerjaan yang diakses oleh pencari kerja	25%	DISKOMINFO
		PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase panjang jalan dan jembatan yang dapat dilewati dengan lancar dikerjakan dengan pendekatan padat karya	94,51%	DINAS PUPR
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	Persentase panjang jaringan irigasi yang dapat dilalui air dengan lancar dilakukan dengan pendekatan padat karya	12%	DINAS PUPR
		PROGRAM PEINGKATAN PEMBERDAYAAN USAHA KECIL	Persentase wirausaha	15%	DINAS KUMKM
		PROGRAM PENGEMBANGAN PENDAYAGUNAAN SDA, TEKNOLOGI TEPAT GUNA DAN PELATIHAN MASYARAKAT	Pertambahan Jumlah Masyarakat Desa yang terlatih dalam Kewirausahaan	100 Orang	DINAS PMD
			Persentase KPM yang aktif	3,24	DINAS PMD
2	Peningkatan kualitas hidup dan peran serta perempuan	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN	Persentase perempuan yang bekerja	7,73	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
3	Pengendalian Tingkat harga-harga komoditas penyumbang inflasi	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN KEMETROLOGIAN	Persentase jumlah Barang Beredar, Jasa dan Tertib Niaga yang diawasi sesuai standar (112 barang SNI wajib; 140 pelaku usaha Tertib Niaga)	14	DISPERINDAG
			Indeks Keberdayaan Konsumen (0 - 20 = Tahu; 21 - 40 = Paham)	22	DISPERINDAG
			Persentase jumlah Standarisasi Lab. Kemetrolagian yang memenuhi standar	20	DISPERINDAG
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN	Persentase Pertumbuhan jumlah volume ekspor (ton)	862.000	DISPERINDAG
			Persentase jumlah barang kebutuhan pokok dan barang penting (18 bahan pokok) yang tersedia setiap waktu	83	DISPERINDAG
			Persentase peningkatan sarana dan prasarana perdagangan yang dibangun dan dimanfaatkan	63	DISPERINDAG
			Persentase Pertumbuhan nilai omzet yang memanfaatkan resi gudang	20	DISPERINDAG
			Pertumbuhan komoditi yang terjual melalui Pasar Lelang	1	DISPERINDAG
		PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI KEBIJAKAN PEREKONOMIAN	Persentase rekomendasi komoditas penyumbang inflasi yang paling tinggi dengan intervensi program/kebijakan	100%	BIRO EKONOMI
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN LAUT	Prosentase infrastruktur perhubungan laut dalam kondisi baik terhadap	20%	DINAS PERHUBUNGAN

Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Program (Outcome)	2019	PD yang Bertanggung Jawab	
			Target		
1	2	3	4	5	
		kondisi optimal			
	PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Panjang jalan dan jembatan yang dapat dilewati dengan lancar yang menuju pusat-pusat distribusi komoditas penyumbang inflasi	94,51%	DINAS PUPR	
4	Mengurangi ketergantungan pasokan dari luar terhadap komoditas penyumbang inflasi	PROGRAM PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	Pertambahan jumlah volume produksi komoditas cabai besar	2.813,28	DINAS PERTANIAN
			Pertambahan jumlah volume produksi komoditas cabai rawit	2.651,13	DINAS PERTANIAN
			Pertambahan jumlah volume produksi komoditas bawang merah	98,11	DINAS PERTANIAN
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase kontribusi komuditas ikan dalam menyumbang inflasi	22,22	DINAS KELAUTAN PERIKANAN	
	PROGRAM PENGEMBANGAN DISTRIBUSI, STABILITAS, DAN CADANGAN PANGAN	Koefisien varian harga pangan strategis di tingkat produsen dan konsumen	CV Beras ≤ 5%	DINAS PANGAN	
			CV Cabe≤ 35%	DINAS PANGAN	
5	Pengendalian tingkat kelahiran penduduk dan perpindahan penduduk untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang	PROGRAM PENGADMINISTRASIAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	Persentase jumlah masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mempunyai KTP	N.A	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
			Persentase jumlah masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sudah meninggal yang memiliki akte kematian	N.A	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
		PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Persentase unmeet need	7,48	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
	PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Persentase grand design kependudukan se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB	
		presentase KB MKJP	8,9	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB	
6	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur dasar yang layak bagi masyarakat	Persentase peningkatan aksesibilitas di Kawasan permukiman kumuh Provinsi	26%	DINAS PRKP	
7	Peningkatan penataan permukiman pada kawasan strategis Provinsi	PROGRAM KECIPTAKARYAAN DAN PERMUKIMAN	Prosentase peningkatan kualitas pengelolaan Bangunan Gedung Dan Lingkungan	25%	DINAS PRKP
8	Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan terminal serta sarana prasarana pendukung terminal	PROGRAM PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN DARAT	Persentase desa yang terlayani oleh angkutan perintis lintas kabupaten dalam provinsi		DINAS PERHUBUNGAN
9	Peningkatan penyelenggaraan penanggulangan bencana	PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Daerah Rawan Bencana yang Diintervensi Dalam Pencegahan Dan Kesiansiagaan	74	BPBD



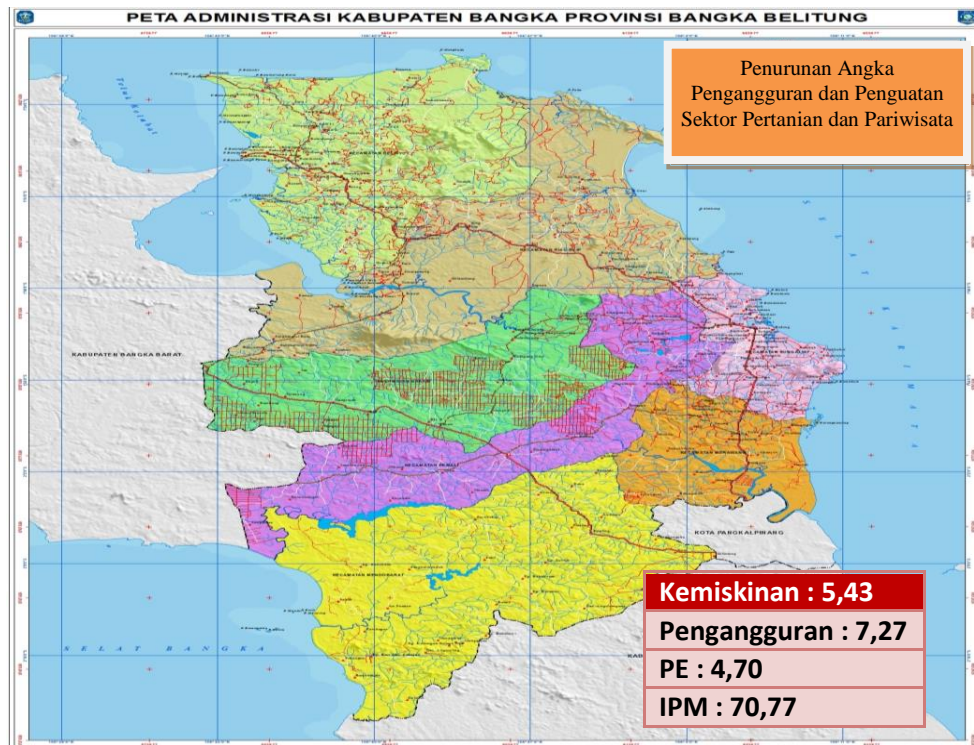
Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Program (Outcome)	2019	PD yang Bertanggung Jawab
			Target	
1	2	3	4	5
		Penanggulangan Bencana		
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase korban bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	20	DINSOS
	PROGRAM PENGEMBANGAN DISTRIBUSI, STABILITAS, DAN CADANGAN PANGAN	Persentase Cadangan Pangan	2,7	DINAS PANGAN
	PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase informasi berkaitan dengan penanggulangan bencana yang dapat diakses oleh masyarakat	15%	KOMINFO
	PRORAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	Persentase Kab/kota yang melaksanakan kewaspadaan dini dan respon	80%	DINKES
	PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Persentase peningkatan kualitas linmas dalam penanganan bencana dan kebakaran	4,24%	SATPOL PP
	PROGRAM KEDARURATAN DAN LOGISTIK PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Daerah Rawan Bencana yang Diintervensi Dalam Penanggulangan Bencana	80	BPBD
	PRORAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	Persentase penduduk terdampak krisis kesehatan yang mendapat pelayanan kesehatan akibat bencana atau berpotensi bencana dalam satu provinsi	15%	DINKES
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS MEDIS DAN PENUNJANG MEDIS	Persentase korban bencana yang mendapat pelayanan rujukan	100%	RSUP
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	persentase Panjang Talud yang direhabilitasi dan direkonstruksi yang berfungsi dengan baik untuk menahan tanah	25%	PUPR
		Persentase Panjang Sungai /saluran yang dinormalisasi dan berfungsi memperlancar aliran air sungai akibat bencana	26,80%	PUPR
	PROGRAM PERUMAHAN RAKYAT	Persentase rekonstruksi dan rehabilitasi rumah akibat bencana	51%	PRKP
	PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Panjang jalan yang direhabilitasi dan direkonstruksi akibat bencana	0,86%	PUPR
		Persentase panjang jembatan yang direhabilitasi dan direkonstruksi akibat bencana	0,12%	PUPR
	PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Daerah Rawan Bencana yang Diintervensi Dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	75	BPBD
	PRORAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	Persentase penduduk pada kondisi kejadian luarbiasa (KLB) yang mendapat pelayanan kesehatan dalam satu Provinsi	100%	DINKES

Arah Kebijakan		Program Perangkat Daerah	Indikator Program (Outcome)	2019	PD yang Bertanggung Jawab
				Target	
1		2	3	4	5
10	Pengembangan Pengelolaan kawasan rawan bencana alam	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS MEDIS KEJIWAAN DAN NAPZA	Persentase korban bencana yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa	80	RSJ
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	Persentase Panjang Penahan Abrasi Pantai	41,40%	DINAS PUPR
			Panjang sungai yang dinormalisasi pada daerah rawan bencana	40,00%	DINAS PUPR
			panjang penahan tanah akibat erosi	49,00%	DINAS PUPR
		PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN DAS DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Persentase DAS kritis yang di kelola	7	DINAS KEHUTANAAN
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS TATA KELOLA DISHUT	Persentase kegiatan pengelolaan hutan oleh UPTD KPH (%)	100%	DINAS KEHUTANAAN
11	Pengembangan Pengelolaan kawasan hilir daerah rawan bencana teluk bayur	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	Persentase Panjang Talud penahan banjir kawasan hilir daerah rawan bencana teluk bayur		PUPR
			Persentase Panjang pengerukan Normalisasi sungai dan kawasan hilir daerah rawan bencana teluk bayur	30%	PUPR
		PROGRAM PERUMAHAN RAKYAT	Persentase relokasi kawasan hilir daerah rawan bencana teluk bayur		PRKP
		PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap di kawasan hilir daerah rawan bencana teluk bayur	96%	PUPR
		PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	Persentase luas lahan yang bersertifikat untuk kepentingan di kawasan hilir daerah rawan bencana teluk bayur	100%	PUPR

### 5.1.2. Arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Bangka

Pembangunan Kabupaten Bangka diarahkan berdasarkan sasaran pokok 3 (tiga) sasaran meliputi: pertama kesejahteraan masyarakat dengan 2 (dua) indikator, yaitu: kemiskinan dan pengangguran, kedua meningkatnya ekonomi daerah melalui indikator pertumbuhan PDRB dan ketiga terpenuhinya kapasitas dan kualitas SDM, dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia. Berdasarkan 3 (tiga) sasaran dan 4 (indikator) tersebut maka pembangunan Kabupaten Bangka tahun 2019 diarahkan pada menurunkan angka Pengangguran dan peningkatan pertumbuhan PDRB melalui penguatan sektor Pertanian dan Pariwisata.

**Gambar V.4**  
**Sasaran Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun 2019**



Pembangunan Kota Pangkalpinang tahun 2019 diarahkan pada Penurunan angka Pengangguran dengan kebijakan Penciptaan peluang kesempatan kerja bagi pencari kerja dan Peningkatan kualitas hidup dan peran serta perempuan. Sedangkan untuk penguatan sektor pariwisata difokuskan pada Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Tanjung gunung dan kawasan lintas timur Pulau Bangka.

**Tabel V.2**

Arah Kebijakan, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas RKPD 2019 Dalam Rangka Mendukung Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bangka

Arah Kebijakan		Program Perangkat Daerah	Indikator Program (Outcome)	2019 Target	PD yang Bertanggung Jawab
1		2	3	4	9
1	Penyusunan kebijakan dan implementasi perlindungan lahan pertanian berkelanjutan	PROGRAM PENGEMBANGAN PRASARANA, SARANA PERTANIAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN	Pertambahan Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan yang di implementasikan	2	DINAS PERTANIAN
2	Peningkatan sarana dan prasarana dan nilai tambah serta produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan Kehutanan	PROGRAM PENGEMBANGAN PRASARANA, SARANA PERTANIAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase ketersediaan sarana prasarana pertanian	15	DINAS PERTANIAN
			Persentase Pertambahan Kelompok tani yang melakukan pemberdayaan disektor pertanian	10	DINAS PERTANIAN



Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Program (Outcome)	2019 Target	PD yang Bertanggung Jawab
1	2	3	4	9
		Persentase Kelembagaan pertanian aktif	10	DINAS PERTANIAN
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI MUTU BENIH	Pertambahan Jumlah benih lada yang bersertifikat dan berlabel	655,000	UPTD PENGAWAS DAN SERTIFIKASI MUTU BENIH PERTANIAN
		Pertambahan Jumlah benih karet yang bersertifikat dan berlabel,	655,000	UPTD PENGAWAS DAN SERTIFIKASI MUTU BENIH PERTANIAN
		Pertambahan Jumlah benih padi yang bersertifikat dan berlabel	150	UPTD PENGAWAS DAN SERTIFIKASI MUTU BENIH PERTANIAN
		Pertambahan Jumlah benih hortikultura yang bersertifikat dan berlabel,	1,500	UPTD PENGAWAS DAN SERTIFIKASI MUTU BENIH PERTANIAN
		Persentase varietas unggul lokal yang didaftarkan menjadi unggul Nasional	2	UPTD PENGAWAS DAN SERTIFIKASI MUTU BENIH PERTANIAN
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PROTEKSI TANAMAN	Persentase penurunan areal tanam yang terserang OPT	5	UPTD BALAI PROTEKSI TANAMAN PERTANIAN
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PENGEMBANGAN BENIH PERTANIAN	Pertambahan Ketersediaan bibit lada	50,000	UPTD BALAI BENIH PERTANIAN
		Pertambahan Ketersediaan bibit karet	40,000	UPTD BALAI BENIH PERTANIAN
		Pertambahan Ketersediaan benih sumber padi	4	UPTD BALAI BENIH PERTANIAN
		Pertambahan Ketersediaan bibit ayam	6,000	UPTD BALAI BENIH PERTANIAN
		Pertambahan Ketersediaan anakan sapi	20	UPTD BALAI BENIH PERTANIAN
	PROGRAM PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	Pertambahan produksi dan produktifitas komoditi strategis tanaman pangan padi	43,135.00	DINAS PERTANIAN
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERKEBUNAN	Peningkatan produksi lada	43,577	DINAS PERTANIAN
	PROGRAM PENGEMBANGAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	Pertambahan Jumlah populasi ternak besar sapi	14,399	DINAS PERTANIAN
		Pertambahan Jumlah populasi ternak ayam	12,678,800	DINAS PERTANIAN
	PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA HUTAN	Persentase izin usaha hasil hutan kayu (%)	20%	DINAS KEHUTANAAN
		Persentase hasil hutan bukan kayu yang dikembangkan (%)	20%	DINAS KEHUTANAAN
	PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP	Tersedianya Dokumen KLHS Pengembangan Balai Benih Pertanian Terpadu yang digunakan dalam perencanaan kawasan	1 Dokumen	DLH
	PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase informasi berkaitan dengan peningkatan produksi pertanian yang dapat diakses masyarakat	25%	KOMINFO

Arah Kebijakan		Program Perangkat Daerah	Indikator Program (Outcome)	2019	PD yang Bertanggung Jawab
				Target	
1		2	3	4	9
3	Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing sektor pertanian	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LATIHAN KERJA INDUSTRI	Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan tentang pertanian yang berkompetensi	0.14	UPD BLKI
		PROGRAM PENGEMBANGAN PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase peningkatan tenaga kerja pertanian yang bersertifikasi	18	DISNAKER
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase peningkatan produktifitas tenaga kerja sektor pertanian	0.02	UPTD BALAI PRODUKTIFITAS
		PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KEJURUAN	Persentase Jumlah SMK dengan program keahlian pertanian, perkebunan dan peternakan yang memiliki akreditasi A	100	DINAS PENDIDIKAN
			Persentase SMK Pertanian dan Peternakan yang mengeluarkan Sertifikasi Profesi pihak 1 (LSP-P1)	50	DINAS PENDIDIKAN
		PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI	persentase peningkatan volume usaha koperasi pertanian	3%	DINAS KUMKM
			persentase peningkatan volume usaha koperasi sapi	1%	DINAS KUMKM
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LATIHAN PERKOPERASIAN, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	Persentase SDM Koperasi sektor pertanian terlatih	3.09%	UPTD BALAI LATIHAN PERKOPERASIAN, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
			persentase SDM Usaha Kecil sektor pertanian terlatih	0.34%	UPTD BALAI LATIHAN PERKOPERASIAN, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
		4	Pembinaan hubungan industri sektor pertanian	PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN, PEMBINAAN HUB. INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase perusahaan pertanian yang diperiksa dan dibina sesuai standar pemeriksaan perusahaan
PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI	Persentase pertumbuhan kelembagaan koperasi aktif sektor pertanian			5%	DINAS KUMKM
5	Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing sektor pertanian		persentase koperasi sektor pertanian berkualitas sesuai standar	2%	DINAS KUMKM
		PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN USAHA KECIL	Persentase produk Usaha kecil sektor pertanian yang tersertifikasi	77%	DINAS KUMKM
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBERDAYA, FASILITASI DAN	Presentase Tenaga Kerja Industri pada sektor pertanian	10.28%	DISPERINDAG

Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Program (Outcome)	2019	PD yang Bertanggung Jawab	
			Target		
1	2	3	4	9	
6	AKSES INDUSTRI				
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS SERTIFIKASI DAN PENGENDALIAN MUTU PRODUK	Persentase komoditi unggulan daerah diuji yang memenuhi standar pengujian	2	UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PENGENDALIAN MUTU	
	Pengembangan produk pertanian, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi sektor pertanian di daerah	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Pertambahan Jumlah profil investasi Sektor Pertanian yang digunakan untuk promosi investasi daerah di sektor pertanian	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			Pertambahan Jumlah UKM pertanian yang bermitra dengan investor	1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI PENANAMAN MODAL	Pertambahan Jumlah investor Sektor Pertanian	3	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DAN SISTEM INFORMASI	Presentase perusahaan sektor pertanian yang sesuai realisasi investasi dengan rencana investasi	0.44%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		PROGRAM PEINGKATAN PEMBERDAYAAN USAHA KECIL	Pertambahan jumlah pelaku usaha kecil sektor pertanian yang menandatangani kesepakatan kemitraan dengan dunia usaha dalam daerah	90	DINAS KUMKM
			persentase pelaku usaha kecil sektor pertanian, perkebunan dan peternakan yang menandatangani kesepakatan kemitraan dengan dunia usaha luar daerah	0	DINAS KUMKM
			persentase Usaha Kecil sektor pertanian, perkebunan dan peternakan yang mendapatkan izin usaha	0	DINAS KUMKM
			persentase Usaha Kecil sektor pertanian, peternakan dan perkebunan yang difasilitasi promosi/ pemasaran produknya melalui even pameran	0	DINAS KUMKM

Arah Kebijakan		Program Perangkat Daerah	Indikator Program (Outcome)	2019	PD yang Bertanggung Jawab
				Target	
1		2	3	4	9
			persentase Usaha Kecil sektor pertanian, peternakan dan perkebunan yang difasilitasi promosi/ pemasaran produknya melalui web	1	DINAS KUMKM
			persentase Usaha Kecil sektor pertanian, perkebunan dan peternakan yang mendapatkan Diseminasi dan pendampingan akses permodalan	0	DINAS KUMKM
7	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dibidang pertanian	PROGRAM PENGEMBANGAN PENDAYAGUNAAN SDA, TEKNOLOGI TEPAT GUNA DAN PELATIHAN MASYARAKAT	Persentase kelompok masyarakat yang mendayagunakan teknologi tepat guna (TTG) di sektor pertanian	42%	DINAS PMD
		PROGRAM PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	Pertambahan Jumlah kelompok yang menerapkan peningkatan mutu, daya saing, dan nilai tambah hasil tanaman pangan dan hortikultura	40	DINAS PMD
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERKEBUNAN	Pertambahan Jumlah kelompok yang menerapkan peningkatan mutu, daya saing, dan nilai tambah hasil perkebunan	56	DINAS PERTANIAN
8	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dibidang pertanian	PROGRAM PENGEMBANGAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	Pertambahan Jumlah kelompok yang menerapkan peningkatan mutu, daya saing, dan nilai tambah hasil peternakan	14	DINAS PERTANIAN
9	Pengembangan Kawasan Budidaya Pertanian	PROGRAM PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	Tersedianya Kawasan budidaya komoditas padi	-	DINAS PERTANIAN
		PROGRAM PENGEMBANGAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	Tersedianya Kawasan pengembangan ternak sapi	-	DINAS PERTANIAN
		PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP	Tersedinya Dokumen KLHS Agropolitan Berbasis Demonstration Farming Sawah Mekanisasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang digunakan dalam perencanaan kawasan	1 Dokumen	DLH
10	Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, ekonomi kreatif, peran serta masyarakat dan kelembagaan pariwisata	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA, EKONOMI KREATIF DAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN	Persentase sumber daya pariwisata yang terlatih dan tersertifikasi		BUDPAR
			Presentase pelaku ekonomi kreatif yang terlatih		BUDPAR
			Pertumbuhan kelembagaan pariwisata	11	BUDPAR
		PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN	Pertumbuhan kelembagaan koperasi aktif pendukung pariwisata	2.70%	KUMKM

Arah Kebijakan		Program Perangkat Daerah	Indikator Program (Outcome)	2019 Target	PD yang Bertanggung Jawab		
1		2	3	4	9		
		KOPERASI					
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LATIHAN PERKOPERASIAN, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	Persentase SDM Koperasi sektor pariwisata terlatih	2.06%	KUMKM		
			persentase SDM Usaha Kecil sektor pariwisata terlatih	0.25%	KUMKM		
		PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN USAHA KECIL	persentase Usaha Kecil sektor pariwisata yang menggunakan Aplikasi Mobile Platform (Lalaper)		KUMKM		
			persentase Usaha Kecil sektor pariwisata yang mendapatkan Izin Usaha	1	KUMKM		
			persentase Usaha Kecil sektor pariwisata yang mendapatkan Diseminasi dan pendampingan akses permodalan	0	KUMKM		
		PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KEJURUAN	Persentase SMK pariwisata Terkreditasi A	100	DINAS PENDIDIKAN		
		11	Peningkatan infrastruktur, sarana dan prasarana pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata.	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	Presentase objek wisata yang terkelola	12%	BUDPAR
				PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	Persentase tingkat kunjungan wisatawan	6	BUDPAR
				PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN LAUT	Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasana Perhubungan Laut di lokasi wisata	30%	DISHUB
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN DARAT	Persentase pemenuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan darat dalam menunjang Daerah Tujuan Wisata			20%	DISHUB		
PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di daerah pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata.			94.51%	DINAS PUPR		
	Persentase Jembatan Provinsi dalam kondisi baik di daerah pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata.			86.00%	DINAS PUPR		
PROGRAM PENINGKATAN PUSAT PELAYANAN USAHA TERPADU KUKM	Pertumbuhan produk parekraf			10%	DINAS KUMKM		
PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN	Persentase informasi berkaitan dengan pemasaran pariwisata yang	25%	DISKOMINFO				

Arah Kebijakan		Program Perangkat Daerah	Indikator Program (Outcome)	2019	PD yang Bertanggung Jawab
				Target	
1		2	3	4	9
		KOMUNIKASI PUBLIK	dapat diakses masyarakat		
12	Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing kepariwisataan daerah	PROGRAM PENGEMBANGAN PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase peningkatan tenaga kerja pariwisata bersertifikat kompetensi	17.54	DISNAKER
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LATIHAN KERJA INDUSTRI	Persentase pencari kerja pariwisata yang mendapat pelatihan	0.15	UPD BLKI
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase peningkatan produksi per tenaga kerja bidang pariwisata	0.05	UPTD BALAI PRODUKTIVITAS
		PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KEJURUAN	Persentase Jumlah SMK Program Keahlian Pariwisata yang mengeluarkan sertifikat Profesi pihak 1 (LSP-P1)	33.33	DINDIK
		PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI	persentase peningkatan volume usaha koperasi disektor pariwisata	1%	KUMKM
		13	Peningkatan kualitas, partisipasi dan prestasi pemuda di berbagai bidang pembangunan, dan peningkatan pengelolaan ke olah raga serta mengembangkan peran serta kebudayaan dalam mendukung pembangunan kepariwisataan	PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Pemuda Lintas Negara
PROGRAM PENINGKATAN PEMBUDAYAAN DAN PENINGKATAN PRESTASI OLAH RAGA	Pertumbuhan Jumlah peserta yang mengikuti babel sport tourism			4.00%	DISKEPORA
PROGRAM PENGEMBANGAN STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Presentase jumlah sarana dan prasaran olahraga yang terbangun dalam mendukung event olahraga regional dan nasional			16.67%	DISKEPORA
PROGRAM PELESTARIAN BUDAYA	Persentase budaya lokal yang dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan dan dibina			14.87%	BUDPAR
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, INDUSTRI DAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN	Rasio Penyelenggaraan event penunjang kepariwisataan dengan priode waktu satu tahun				BUDPAR

Arah Kebijakan		Program Perangkat Daerah	Indikator Program (Outcome)	2019	PD yang Bertanggung Jawab
				Target	
1		2	3	4	9
14	Pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja disektor pariwisata	PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN, PEMBINAAN HUB. INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL	persentase Jumlah perusahaan dibidang pariwisata yang diperiksa dan dibina sesuai standar pemeriksaan perusahaan	1.6	DISNAKER
15	Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing kepariwisataan	PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN USAHA KECIL	Peningkatan produk Usaha kecil sektor pariwisata yang tersertifikasi	250	DINAS KUMKM
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBERDAYA, FASILITASI DAN AKSES INDUSTRI	Persentase Tenaga Kerja yang terserap di industri pariwisata	0.31%	DISPERINDAG
		PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH DAN PENGAWASAN INDUSTRI	Persentase industri yang memenuhi standar		DISPERINDAG
16	Pengembangan pariwisata daerah, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antar sektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di bidang pariwisata.	PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI BUMD, PENANAMAN MODAL, PARIWISATA DAN BUDAYA	Prosentase Jumlah Kebijakan BUMD, Penanaman Modal, Pariwisata dan Budaya yang di implementasikan	72	BIRO EKONOMI
17	Pengembangan pariwisata daerah, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antar sektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di bidang pariwisata.	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Pertambahan Jumlah Profil Investasi Pariwisata yang digunakan untuk promosi investasi di sektor pariwisata	-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			Pertambahan Jumlah UKM pariwisata yang bermitra dengan investor	1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI PENANAMAN MODAL	Pertambahan Jumlah Investor Pariwisata	3	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DAN SISTEM INFORMASI	Presentase perusahaan yang sesuai realisasi investasi disektor pariwisata dengan rencana investasi	0.44%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Arah Kebijakan		Program Perangkat Daerah	Indikator Program (Outcome)	2019	PD yang Bertanggung Jawab
				Target	
1		2	3	4	9
18	Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Tanjung gunung dan kawasan lintas timur Pulau Bangka	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	persentase sarana dan prasarana Pariwisata di kawasan pariwisata Tanjung Gunung yang terbangun dan terkelola	32%	BUDPAR
			Persentase sarana dan prasarana pariwisata di kawasan Lintas Timur Pulau Bangka yang terbangun dan terkelola	32%	BUDPAR
		PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN DARAT	Persentase pemenuhan sarana parasarana penunjang Jalan Kawasan Peruntukan Pariwisata Tanjung gunung dan kawasan lintas timur Pulau Bangka	30%	DISHUB
		PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di kawasan Peruntukan Pariwisata Tanjung gunung dan kawasan lintas timur Pulau Bangka	95.44%	DINAS PUPR
		PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	Persentase Jumlah Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Pariwisata Tanjung Gunung dan Lintas Timur Pulau Bangka yang diimplementasikan	75	DINAS PUPR
19	Penciptaan peluang kesempatan kerja bagi pencari kerja	PROGRAM PENGEMBANGAN PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	17.14	DISNAKER
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA, FASILITASI DAN AKSES INDUSTRI	Persentase Tenaga Kerja Industri terhadap total tenaga kerja (%)	5.17%	DISPERINDAG
		PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA	Persentase pemuda yang bekerja	10.20%	DISKEPORA
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase penduduk yang bekerja di sektor perikanan tangkap	6.82%	DISKEPORA
		PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN BUDIDAYA DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	Persentase penduduk yang bekerja di sektor perikanan budidaya dan Usaha Pengolahan & Pemasaran	1.14%	DKP
		PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase jumlah informasi berkaitan dengan penciptaan lapangan pekerjaan yang diakses oleh pencari kerja	25%	DISKOMINFO
		PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase panjang jalan dan jembatan yang dapat dilewati dengan lancar dikerjakan dengan pendekatan padat karya	94.51%	DINAS PUPR
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	Persentase panjang jaringan irigasi yang dapat dilalui air dengan lancar dilakukan dengan	12%	DINAS PUPR

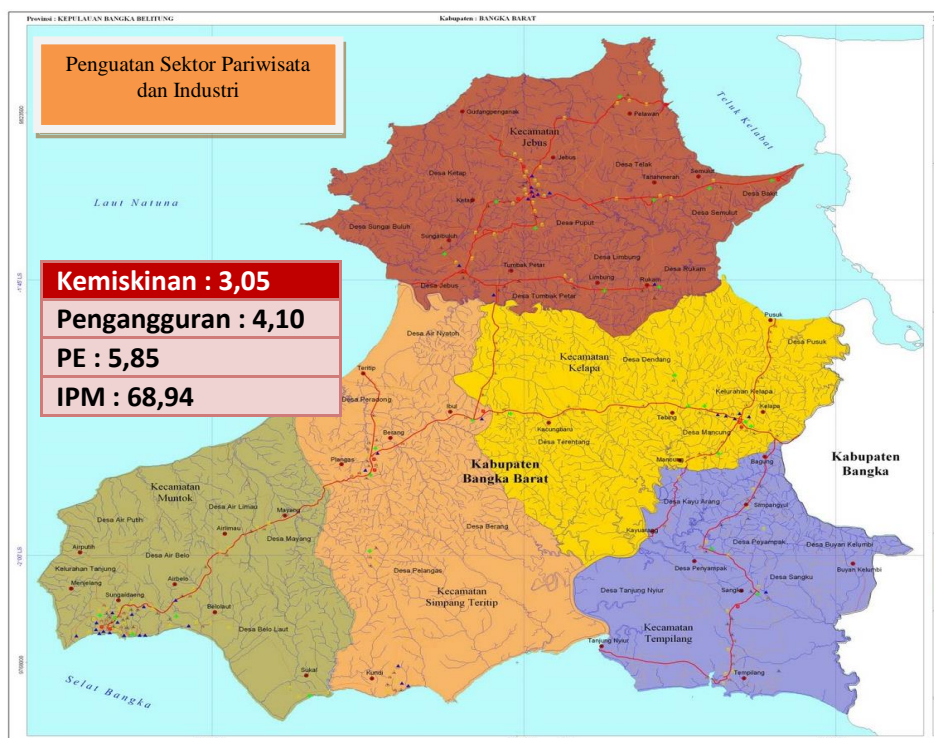


Arah Kebijakan		Program Perangkat Daerah	Indikator Program (Outcome)	2019 Target	PD yang Bertanggung Jawab
1		2	3	4	9
pendekatan padat karya					
20	Peningkatan kualitas hidup dan peran serta perempuan	PROGRAM PEINGKATAN PEMBERDAYAAN USAHA KECIL	Persentase wirausaha	15%	DINAS KUMKM
		PROGRAM PENGEMBANGAN PENDAYAGUNAAN SDA, TEKNOLOGI TEPAT GUNA DAN PELATIHAN MASYARAKAT	Pertambahan Jumlah Masyarakat Desa yang terlatih dalam Kewirausahaan	100 Orang	DINAS PMD
			Persentase KPM yang aktif	3.24	DINAS PMD
		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN	Persentase perempuan yang bekerja	7.73	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB

### 5.1.3. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bangka Barat

Pembangunan Kabupaten Bangka Barat diarahkan berdasarkan sasaran pokok 3 (tiga) sasaran meliputi: pertama kesejahteraan masyarakat dengan 2 (dua) indikator, yaitu: kemiskinan dan pengangguran, kedua meningkatnya ekonomi daerah melalui indikator pertumbuhan PDRB dan ketiga terpenuhinya kapasitas dan kualitas SDM, dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia. Berdasarkan 3 (tiga) sasaran dan 4 (indikator) tersebut maka pembangunan Kabupaten Bangka Barat tahun 2019 diarahkan pada Pertumbuhan PDRB melalui penguatan sektor Pariwisata dan Industri.

**Gambar V.5**  
Sasaran Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019



Pembangunan Kabupaten Bangka Barat tahun 2019 diarahkan pada Pertumbuhan PDRB melalui penguatan sektor Pariwisata dan Industri dengan kebijakan percepatan pengembangan kawasan strategis provinsi di wilayah Kabupaten Bangka Barat yang difokuskan pada pengembangan kawasan Kota Tua Muntok, Pengembangan Kawasan Gunung Menumbing dan pengembangan kawasan industri Tanjung Ular

**Tabel V.3**

Arah Kebijakan, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas RKPD 2019 Dalam Rangka Mendukung Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bangka Barat

Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Program (Outcome)	2019	PD yang Bertanggung Jawab	
			Target		
1	2	3	4	5	
1	Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, ekonomi kreatif, peran serta masyarakat dan kelembagaan pariwisata	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA, EKONOMI KREATIF DAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN	Persentase sumber daya pariwisata yang terlatih dan tersertifikasi	BUDPAR	
			Presentase pelaku ekonomi kreatif yang terlatih	BUDPAR	
			Pertumbuhan kelembagaan pariwisata	11	BUDPAR
		PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI	Pertumbuhan kelembagaan koperasi aktif pendukung pariwisata	2.70%	KUMKM
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LATIHAN PERKOPERASIAN, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	Persentase SDM Koperasi sektor pariwisata terlatih	2.06%	KUMKM
			persentase SDM Usaha Kecil sektor pariwisata terlatih	0.25%	KUMKM
			persentase Usaha Kecil sektor pariwisata yang mendapatkan Izin Usaha	1	KUMKM
			persentase Usaha Kecil sektor pariwisata yang mendapatkan Diseminasi dan pendampingan akses permodalan	0	KUMKM
			PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KEJURUAN	Persentase SMK pariwisata Terkareditasi A	100
		2	Peningkatan insfrastruktur, sarana dan prasarana pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata.	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	Presentase objek wisata yang terkelola
PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	Persentase tingkat kunjungan wisatawan			6	BUDPAR
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN LAUT	Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasana Perhubungan Laut di lokasi wisata			30%	DISHUB
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN DARAT	Persentase pemenuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan darat dalam menunjang Daerah Tujuan Wisata			20%	DISHUB

Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Program (Outcome)	2019	PD yang Bertanggung Jawab	
			Target		
1	2	3	4	5	
3	PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di daerah pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata.	94.51%	DINAS PUPR	
		Persentase Jembatan Provinsi dalam kondisi baik di daerah pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata.	86.00%	DINAS PUPR	
	PROGRAM PENINGKATAN PUSAT PELAYANAN USAHA TERPADU KUKM	Pertumbuhan produk parekraf	10%	DINAS KUMKM	
	PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase informasi berkaitan dengan pemasaran pariwisata yang dapat diakses masyarakat	25%	DISKOMINFO	
	PROGRAM PENGEMBANGAN PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase peningkatan tenaga kerja pariwisata bersertifikat kompetensi	17.54	DISNAKER	
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LATIHAN KERJA INDUSTRI	Persentase pencari kerja pariwisata yang mendapat pelatihan	0.15	UPD BLKI
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		Persentase peningkatan produksi per tenaga kerja bidang pariwisata	0.05	UPTD BALAI PRODUKTIVITAS	
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KEJURUAN		Persentase Jumlah SMK Program Keahlian Pariwisata yang mengeluarkan sertifikat Profesi pihak 1 (LSP-P1)	33.33	DINDIK	
PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI	persentase peningkatan volume usaha koperasi disektor pariwisata	1%	KUMKM		
4	PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Pemuda Lintas Negara	6.67%	DISKEPORA	
		PROGRAM PENINGKATAN PEMBUDAYAAN DAN PENINGKATAN PRESTASI OLAH RAGA	Pertumbuhan Jumlah peserta yang mengikuti babel sport tourism	4.00%	DISKEPORA
		PROGRAM PENGEMBANGAN STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Presentase jumlah sarana dan prasaran olahraga yang terbangun dalam mendukung event olahraga regional dan nasional	16.67%	DISKEPORA
		PROGRAM PELESTARIAN BUDAYA	Persentase budaya lokal yang dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan dan dibina	14.87%	BUDPAR
5	Pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja disektor	PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN,	persentase Jumlah perusahaan dibidang pariwisata yang diperiksa	1.6	DISNAKER

Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Program (Outcome)	2019	PD yang Bertanggung Jawab	
			Target		
1	2	3	4	5	
pariwisata	PEMBINAAN HUB. INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL	dan dibina sesuai standar pemeriksaan perusahaan			
6	Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing kepariwisataan	PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN USAHA KECIL	Peningkatan produk Usaha kecil sektor pariwisata yang tersertifikasi	250	DINAS KUMKM
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBERDAYA, FASILITASI DAN AKSES INDUSTRI	Persentase Tenaga Kerja yang terserap di industri pariwisata	0.31%	DISPERINDAG
		PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH DAN PENGAWASAN INDUSTRI	Persentase industri yang memenuhi standar		DISPERINDAG
7	Pengembangan pariwisata daerah, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antar sektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di bidang pariwisata.	PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI BUMD, PENANAMAN MODAL, PARIWISATA DAN BUDAYA	Prosentase Jumlah Kebijakan BUMD, Penanaman Modal, Pariwisata dan Budaya yang di implementasikan	72	BIRO EKONOMI
		PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Pertambahan Jumlah Profil Investasi Pariwisata yang digunakan untuk promosi investasi di sektor pariwisata	-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			Pertambahan Jumlah UKM pariwisata yang bermitra dengan investor	1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI PENANAMAN MODAL	Pertambahan Jumlah Investor Pariwisata	3	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DAN SISTEM INFORMASI	Presentase perusahaan yang sesuai realisasi investasi disektor pariwisata dengan rencana investasi	0.44%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
8	Pengembangan Kawasan pelabuhan penyeberangan Tanjung Kalian	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN LAUT	Persentase pemenuhan sarana parasarana penunjang Pelabuhan Tanjung Kalian		DISHUB
		PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN DARAT	Persentase pemenuhan sarana parasarana perhubungan di Kawasan Strategis Tanjung Kalian		DISHUB
9	Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan Kota Tua Mentok	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	Persentase sarana dan prasarana pariwisata di kawasan Kota Tua Muntok	32%	BUDPAR
		PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di Kawasan Kota	0%	PUPR

Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Program (Outcome)	2019	PD yang Bertanggung Jawab	
			Target		
1	2	3	4	5	
		Tua Mentok			
10	Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Gunung Menumbing	PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	Persentase Jumlah Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kawasan Kota Tua Mentok yang diimplementasikan	PUPR	
		PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN DARAT	Persentase pemenuhan sarana parasarana penunjang perhubungan darat di Kawasan Kota Tua Muntok	20% DISHUB	
		PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	Persentase Tersedianya Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Pariwisata Gunung Menumbing yang di implementasikan	PUPR	
		PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	Persentase sarana dan prasarana pariwisata di Kawasan Pariwisata Gunung Menumbing	BUDPAR	
		PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN DARAT	Persentase pemenuhan sarana parasarana penunjang perhubungan darat di Kawasan Pariwisata Gunung Menumbing	20% DISHUB	
		PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP	Tersedianya Dokumen KLHS di Kawasan Pariwisata Gunung Menumbing yang digunakan dalam perencanaan kawasan	DLH	
		PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di Kawasan Pariwisata Gunung Menumbing	PUPR	
	11	Pengembangan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan pulau sumatera	PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di kawasan konektifitas Pulau Bangka dengan Pulau Sumatera	91.25% DINAS PUPR
				Persentase Jembatan Provinsi dalam kondisi baik di kawasan konektifitas Pulau Bangka dengan Pulau Sumatera	82.00% DINAS PUPR
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	Persentase panjang talud yang terbangun di kawasaan konektifitas Pulau Bangka dengan Pulau Sumatera	5% DINAS PUPR
				Persentase volume air baku yang tersedia dapat digunakan di kawasan konektifitas Pulau Bangka dengan Pulau Sumatera	5% DINAS PUPR
			PROGRAM PENGELOLAAN RUANG LAUT	Persentase Usulan Pemanfaatan Ruang Laut yang terekomendasi sesuai dengan peruntukannya pada kawasan konektifitas Pulau Bangka dengan Pulau Sumatera	65.00% DKP
			PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	Persentase tersedianya lahan bersertifikat untuk kepentingan umum di kawasan konektivitas pulau bangka dan pulau sumatera	DINAS PUPR

Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Program (Outcome)	2019	PD yang Bertanggung Jawab
			Target	
1	2	3	4	5
12 Pengembangan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil	PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil	0%	DINAS PUPR
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	Persentase panjang talud yang terbangun di kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil	5%	DINAS PUPR
		Persentase volume air baku yang tersedia dapat digunakan di kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil	5%	DINAS PUPR
	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN LAUT	Persentase pulau-pulau berpenduduk yang terkoneksi kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil	30%	DISHUB
13 Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular	PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	Persentase Tersedianya Lahan bersertifikat untuk kepentingan di kawasan industri dan pelabuhan terpadu Tanjung Ular	50	DINAS PUPR
		Persentase Jumlah Regulasi Penataan Ruang di kawasan industri dan pelabuhan terpadu Tanjung Ular	1,000,000,000	DINAS PUPR
	PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di kawasan industri dan pelabuhan Tanjung ular	0%	DINAS PUPR
		Persentase Jembatan Provinsi dalam kondisi baik di kawasan industri dan pelabuhan Tanjung ular	0%	DINAS PUPR
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	Persentase panjang talud yang terbangun di kawasan ndustri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular	5%	DINAS PUPR
	PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH DAN PENGAWASAN INDUSTRI	Pertumbuhan Jumlah Industri di kawasan Industri Terpadu (KIPT) Tanjung Ular	1	DISPERINDAG
	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN LAUT	Prosentase sarana dan prasana perhubungan laut Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular yang terbangun serta digunakan	30%	DISHUB
14 Peningkatan Pembangunan Kawasan Industri	PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH DAN PENGAWASAN INDUSTRI	Pertumbuhan Industri/Sentra/Kawasan Industri		DISPERINDAG
15 Peningkatan, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur dasar yang layak bagi masyarakat		Persentase peningkatan aksesibilitas di Kawasan permukiman kumuh Provinsi	26%	DINAS PRKP
16 Peningkatan penataan permukiman pada kawasan strategis Provinsi	PROGRAM KECIPTAKARYAAN DAN PERMUKIMAN	Prosentase peningkatan kualitas pengelolaan Bangunan Gedung Dan Lingkungan	25%	DINAS PRKP



#### 5.1.4. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bangka Tengah

Pembangunan Kabupaten Bangka Tengah diarahkan berdasarkan sasaran pokok 3 (tiga) sasaran meliputi: pertama kesejahteraan masyarakat dengan 2 (dua) indikator, yaitu: kemiskinan dan pengangguran, kedua meningkatnya ekonomi daerah melalui indikator pertumbuhan PDRB dan ketiga terpenuhinya kapasitas dan kualitas SDM, dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia. Berdasarkan 3 (tiga) sasaran dan 4 (indikator) tersebut maka pembangunan Kabupaten Bangka Tengah tahun 2019 diarahkan pada Pertumbuhan PDRB melalui penguatan sektor Pariwisata dan industri serta Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

**Gambar V.6**  
Sasaran Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2019



Pembangunan Kabupaten Bangka Tengah tahun 2019 diarahkan pada Pertumbuhan PDRB melalui penguatan sektor pariwisata dan Industri dengan kebijakan percepatan pengembangan kawasan strategis provinsi di wilayah Kabupaten Bangka tengah yang meliputi Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Tanjung gunung dan kawasan lintas timur Pulau Bangka serta Pengembangan Pelabuhan dan Kawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung Berikat Sedangkan untuk peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di fokuskan pada peningkatan sektor Pendidikan dan Kesehatan.

**Tabel V.4**

Arah Kebijakan, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas RKPD 2019 Dalam Rangka Mendukung Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bangka Tengah

Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Program (Outcome)	2019	PD yang Bertanggung Jawab
			Target	
1	2	3	4	5
1 Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, ekonomi kreatif, peran serta masyarakat dan kelembagaan pariwisata	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA, EKONOMI KREATIF DAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN	Persentase sumber daya pariwisata yang terlatih dan tersertifikasi		BUDPAR
		Persentase pelaku ekonomi kreatif yang terlatih		BUDPAR
		Pertumbuhan kelembagaan pariwisata	11	BUDPAR
	PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI	Pertumbuhan kelembagaan koperasi aktif pendukung pariwisata	2.70%	KUMKM
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LATIHAN PERKOPERASIAN, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	Persentase SDM Koperasi sektor pariwisata terlatih	2.06%	KUMKM
		persentase SDM Usaha Kecil sektor pariwisata terlatih	0.25%	KUMKM
	PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN USAHA KECIL	persentase Usaha Kecil sektor pariwisata yang mendapatkan Izin Usaha	1	KUMKM
		persentase Usaha Kecil sektor pariwisata yang mendapatkan Diseminasi dan pendampingan akses permodalan	0	KUMKM
	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KEJURUAN	Persentase SMK pariwisata Terkreditasi A	100	DINAS PENDIDIKAN
2 Peningkatan insfrastruktur, sarana dan prasarana pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata.	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	Persentase objek wisata yang terkelola	12%	BUDPAR
	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	Persentase tingkat kunjungan wisatawan	6	BUDPAR
	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN LAUT	Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasana Perhubungan Laut di lokasi wisata	30%	DISHUB
	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN DARAT	Persentase pemenuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan darat dalam menunjang Daerah Tujuan Wisata	20%	DISHUB
	PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di daerah pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata.	94.51%	DINAS PUPR



Arah Kebijakan		Program Perangkat Daerah	Indikator Program (Outcome)	2019	PD yang Bertanggung Jawab
				Target	
1		2	3	4	5
3	Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing kepariwisataan daerah		Persentase Jembatan Provinsi dalam kondisi baik di daerah pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata.	86.00%	DINAS PUPR
		PROGRAM PENINGKATAN PUSAT PELAYANAN USAHA TERPADU KUMKM	Pertumbuhan produk parekraf	10%	DINAS KUMKM
		PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase informasi berkaitan dengan pemasaran pariwisata yang dapat diakses masyarakat	25%	DISKOMINFO
		PROGRAM PENGEMBANGAN PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase peningkatan tenaga kerja pariwisata bersertifikat kompetensi	17.54	DISNAKER
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LATIHAN KERJA INDUSTRI	Persentase pencari kerja pariwisata yang mendapat pelatihan	0.15	UPD BLKI
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase peningkatan produksi per tenaga kerja bidang pariwisata	0.05	UPTD BALAI PRODUKTIFITAS
		PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KEJURUAN	Persentase Jumlah SMK Program Keahlian Pariwisata yang mengeluarkan sertifikat Profesi pihak 1 (LSP-P1)	33.33	DINDIK
4	Peningkatan kualitas, partisipasi dan prestasi pemuda di berbagai bidang pembangunan, dan peningkatan pengelolaan ke olah raga serta mengembangkan peran serta kebudayaan dalam mendukung pembangunan kepariwisataan	PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI	persentase peningkatan volume usaha koperasi disektor pariwisata	1%	KUMKM
		PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Pemuda Lintas Negara	6.67%	DISKEPORA
		PROGRAM PENINGKATAN PEMBUDAYAAN DAN PENINGKATAN PRESTASI OLAH RAGA	Pertumbuhan Jumlah peserta yang mengikuti babel sport tourism	4.00%	DISKEPORA
		PROGRAM PENGEMBANGAN STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Presentase jumlah sarana dan prasaran olahraga yang terbangun dalam mendukung event olahraga regional dan nasional	16.67%	DISKEPORA
		PROGRAM PELESTARIAN BUDAYA	Persentase budaya lokal yang dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan dan dibina	14.87%	BUDPAR
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, INDUSTRI DAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN	Rasio Penyelenggaraan event penunjang kepariwisataan dengan priode waktu satu tahun		BUDPAR

Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Program (Outcome)	2019	PD yang Bertanggung Jawab	
			Target		
1	2	3	4	5	
5	Pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja disektor pariwisata	PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN, PEMBINAAN HUB. INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL	persentase Jumlah perusahaan dibidang pariwisata yang diperiksa dan dibina sesuai standar pemeriksaan perusahaan	1.6	DISNAKER
6	Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing kepariwisataan	PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN USAHA KECIL	Peningkatan produk Usaha kecil sektor pariwisata yang tersertifikasi	250	DINAS KUMKM
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBERDAYA, FASILITASI DAN AKSES INDUSTRI	Persentase Tenaga Kerja yang terserap di industri pariwisata	0.31%	DISPERINDAG
		PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH DAN PENGAWASAN INDUSTRI	Persentase industri yang memenuhi standar		DISPERINDAG
7	Pengembangan pariwisata daerah, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antar sektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di bidang pariwisata.	PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI BUMD, PENANAMAN MODAL, PARIWISATA DAN BUDAYA	Prosentase Jumlah Kebijakan BUMD, Penanaman Modal, Pariwisata dan Budaya yang di implementasikan	72	BIRO EKONOMI
		PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Pertambahan Jumlah Profil Investasi Pariwisata yang digunakan untuk promosi investasi di sektor pariwisata	-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			Pertambahan Jumlah UKM pariwisata yang bermitra dengan investor	1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI PENANAMAN MODAL	Pertambahan Jumlah Investor Pariwisata	3	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DAN SISTEM INFORMASI	Presentase perusahaan yang sesuai realisasi investasi disektor pariwisata dengan rencana investasi	0.44%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
8	Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Tanjung gunung dan kawasan lintas timur Pulau Bangka	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	persentase sarana dan prasarana Pariwisata di kawasan pariwisata Tanjung Gunung yang terbangun dan terkelola	32%	BUDPAR
			Persentase sarana dan prasarana pariwisata di kawasan Lintas Timur Pulau Bangka yang terbangun dan terkelola	32%	BUDPAR
		PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN DARAT	Persentase pemenuhan sarana parasarana penunjang Jalan Kawasan Peruntukan Pariwisata Tanjung gunung dan kawasan lintas timur	30%	DISHUB

Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Program (Outcome)	2019	PD yang Bertanggung Jawab
			Target	
1	2	3	4	5
Pulau Bangka				
	PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di kawasan Peruntukan Pariwisata Tanjung gunung dan kawasan lintas timur Pulau Bangka	95.44%	DINAS PUPR
	PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	Persentase Jumlah Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Pariwisata Tanjung Gunung dan Lintas Timur Pulau Bangka yang diimplementasikan	75	DINAS PUPR
9	PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil	0%	DINAS PUPR
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	Persentase panjang talud yang terbangun di kawasaan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil	5%
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	Persentase volume air baku yang tersedia dapat digunakan di kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil	5%	DINAS PUPR
		PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN LAUT	Persentase pulau-pulau berpenduduk yang terkoneksi kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil	30%
	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN LAUT		Jumlah armada pengangkutan	-
		10	PROGRAM PENGEMBANGAN PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	Persentase Perusahaan pertambangan non logam yang menerapkan good mining practices
PROGRAM PENGEMBANGAN PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM	Persentase Perusahaan pertambangan logam yang menerapkan good mining practices		60%	DINAS ESDM
PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN GEOLOGI DAN AIR TANAH	Persentase cadangan Mineral bukan logam dan batuan yang potensial		33%	DINAS ESDM
	pertumbuhan industri turunan Potensi Sumber Daya Mineral yang dikembangkan		4	DISPERINDAG
PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH DAN PENGAWASAN INDUSTRI	Persentase industri yang memenuhi standar			DISPERINDAG
11	PROGRAM PENGEMBANGAN PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase peningkatan tenaga kerja sektor sumber daya mineral bersertifikat kompetensi	17.54	DISNAKER
	Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing Produk Sumber daya mineral			

Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Program (Outcome)	2019	PD yang Bertanggung Jawab		
			Target			
1	2	3	4	5		
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LATIHAN KERJA INDUSTRI	Persentase tenaga kerja bidang sumber daya mineral yang mendapat pelatihan pertambangan berkelanjutan	0.14	UPD BLKI		
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase peningkatan produksi per tenaga kerja sektor sumber daya mineral	0.05	UPTD BALAI PRODUKTIFITAS		
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LATIHAN PERKOPERASIAN, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	Persentase SDM Koperasi sektor sumber daya mineral terlatih	2.06%	UPTD BALAI LATIHAN PERKOPERASIAN, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH		
		Persentase SDM Usaha Kecil sektor sumber daya mineral terlatih	0.18%	UPTD BALAI LATIHAN PERKOPERASIAN, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH		
	PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN USAHA KECIL	persentase Usaha Kecil sektor pertambangan yang mendapatkan Izin Usaha	0	DINAS UMKM		
		persentase Usaha Kecil sektor pertambangan yang difasilitasi promosi/ pemasaran produknya melalui even pameran	0	DINAS UMKM		
		persentase Usaha kecil sektor pertambangan yang difasilitasi promosi/ pemasaran produknya melalui web	2	DINAS UMKM		
		persentase Usaha Kecil sektor pertambangan yang mendapatkan Diseminasi dan pendampingan akses permodalan	0	DINAS UMKM		
	12	Pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja sektor sumber daya mineral	PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN, PEMBINAAN HUB. INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase perusahaan sumber daya mineral yang diperiksa dan dibina sesuai standar pemeriksaan perusahaan	4.8	DISNAKER
	13	Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing sektor sumber daya mineral	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS SERTIFIKASI DAN PENGENDALIAN MUTU PRODUK	Persentase produk sumber daya mineral yang disertifikasi	0.7	UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PENGENDALIAN MUTU
14	Pengembangan produk sumber daya mineral, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di sektor sumber daya mineral	PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI KEBIJAKAN SUMBER DAYA ALAM	Prosentase Jumlah Kebijakan pembangunan Sumber Daya Mineral yang diimplementasikan	72	BIRO EKONOMI	
		PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN IKLIM	Pertambahan Jumlah profil investasi sumber daya mineral yang digunakan	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN	

Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Program (Outcome)	2019	PD yang Bertanggung Jawab
			Target	
1	2	3	4	5
	PENANAMAN MODAL	untuk promosi investasi disektor sumber daya mineral		TERPADU SATU PINTU
		Pertambahan Jumlah UKM yang bermitra dengan investor sumber daya mineral		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI PENANAMAN MODAL	Pertambahan jumlah investor sumber daya mineral	3	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DAN SISTEM INFORMASI	Presentase perusahaan sumber daya mineral yang sesuai realisasi investasi dengan rencana investasi	0.44%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	Presentase ketepatan waktu penerbitan perizinan sumber daya mineral	79%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
15	Pengembangan Pelabuhan dan Kawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung Berikat	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di Kawasan strategis Ekonomi khusus Tanjung Berikat	90.78%	DINAS PUPR
		Persentase Jembatan Provinsi dalam kondisi baik di Kawasan strategis Ekonomi khusus Tanjung Berikat	87.00%	DINAS PUPR
	PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA HUTAN	Persentase luas areal kawasan hutan yang dikelola didi Kawasan strategis Ekonomi khusus Tanjung Berikat		DINAS KEHUTANAAN
	PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP	Tersedianya Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Kawasan Industri dan pelabuhan Terpadu Tanjung Berikat yang digunakan dalam perencanaan kawasan	Ada	DLH
	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN LAUT	Prosentase pemenuhan Sarana dan Prasarana pendukung Perhubungan Laut di Kawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung Berikat	20%	DISHUB
	PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	Persentase jumlah Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan StrategisProvinsi (KSP)Industri dan pelabuhan Terpadu Tanjung Berikat yang diimplementasikan	100%	DINAS PUPR
16	Peningkatan Pembangunan Kawasan Industri	Pertumbuhan Industri/Sentra/Kawasan Industri		DISPERINDAG
17	Pemenuhan Energi listrik untuk medorong pengembangan industri berbasis potensi dearah serta peningkatan rasio elektrifikasi;	Persentase penggunaan EBT	6.83%	ESDM

Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Program (Outcome)	2019	PD yang Bertanggung Jawab
			Target	
1	2	3	4	5
		Persentase perusahaan yang Pendistribusian Minyak dan Gas sesuai standar	60%	ESDM
		Persentase perusahaan di bidang ketenagalistrikan yang sesuai standar yang diinginkan	60%	ESDM
18	peningkatan akses pelayanan pendidikan	PROGRAM PENINGKATAN DAN PEGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH ATAS APK SMA	38.88%	DINAS PENDIDIKAN
		PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KEJURUAN APK SMK	38.38%	DINAS PENDIDIKAN
		PROGRAM PENINGKATANAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KHUSUS APK SLB		DINAS PENDIDIKAN
19	peningkatan mutu layanan pendidikan.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN KUANTITAS DAN KUALITAS GURU SERTA TENAGA KEPENDIDIKAN Persentase Guru Berkualifikasi S1/D4	97%	DINAS PENDIDIKAN
		PROGRAM PENINGKATAN DAN PEGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH ATAS Persentase SMA terakreditasi A	42.42%	DINAS PENDIDIKAN
		Rata-rata nilai UN SMA	6.5	DINAS PENDIDIKAN
		PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KEJURUAN Persentase SMK terakreditasi A	38.60%	DINAS PENDIDIKAN
		Rata-rata nilai UN SMK	6.5	DINAS PENDIDIKAN
		PROGRAM PENINGKATANAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KHUSUS Persentase SLB terakreditasi A	100%	DINAS PENDIDIKAN
		PROGRAM PENINGKATAN PEMBUDAYAAN DAN PENINGKATAN PRESTASI OLAH RAGA Persentase Atlet pelajar Berprestasi yang dibina ditingkat provinsi yang memperoleh medali	5.08%	DISKEPORA
		PROGRAM PENINGKATAN PEMBUDAYAAN DAN PENINGKATAN PRESTASI OLAH RAGA Persentase Insan Olahraga yang berprestasi	5.08%	DISKEPORA
		PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA Persentase Pemuda Berprestasi	22.87%	DISKEPORA
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PERPUSTAKAAN presentase perpustakaan terakreditasi;	160	DKPUS
		PROGRAM PENGEMBANGAN STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Presentase jumlah sarana dan prasaran kepemudaan yang terbangun yang difungsikan	16.67%	DISKEPORA
		PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA Persentase Insan Kepemudaan yang berprestasi dan berdedikasi yang dibantu	6.41%	DISKEPORA

Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Program (Outcome)	2019	PD yang Bertanggung Jawab	
			Target		
1	2	3	4	5	
		Persentase Peran Masyarakat Dalam Menjaga Nilai-Nilai Kepemudaan		DISKEPORA	
	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN DARAT	Rasio Jumlah Bus sekolah dengan Jumlah Murid	5%	DINAS PERHUBUNGAN	
		Persentase sekolah di ruas jalan Provinsi yang dilengkapi dengan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	4%	DINAS PERHUBUNGAN	
	PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase informasi berkaitan dengan pendidikan yang dapat akses oleh masyarakat	25%	DISKOMINFO	
	PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI	Persentase SMA dan SMK yang telah berbasis IT	80%	DISKOMINFO	
	PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN, KB, DAN PEMUDA	Prosentase jumlah kebijakan pengembangan pendidikan, keluarga berencana, pemuda dan pariwisata yang diimplementasikan	80	BIRO KESRA	
		Persentase Jumlah Sekolah agama yang dinilai sesuai standar	35 sekolah	BIRO KESRA	
		PROGRAM PENGELOLAAN BANTUAAAN OPRASIONAL SEKOLAH (BOS) (DAK Non Fisik)	Persentase Sekolah penerima BOS	100%	DINAS PENDIDIKAN
20	Peningkatan relevansi pendidikan vokasi dalam mendukung pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAAN PENDIDIKAN KEJURUAAN	Persentase SMK yang memiliki sertifikasi profesi	38.60%	DINAS PENDIDIKAN
		PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KEJURUAN	Persentase SMK Kejuruan yang mendukung pengembangan pekonomi berbasis potensi lokal	100%	DINAS PENDIDIKAN
21	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan	PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase status kesehatan masyarakat	72.07%	DINKES
		PRORAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	Persentase angka kesakitan penyakit menular dan penyakit tidak menular	77.60%	DINKES
		PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN, KB, PEMUDA DAN PARIWISATA	Persentase Sekolah yang mengikuti lomba UKS	35 sekolah	BIRO KESRA
		PROGRAM KECIPTAKARYAAN DAN PERMUKIMAN	Persentase cakupan pelayanan akses air minum di kawasan strategis provinsi	9%	DINAS PRKP
			Persentase cakupan pelayanan akses air minum di kawasan permukiman kumuh Provinsi	50%	DINAS PRKP
			Persentase sarana air limbah yang layak di kawasan strategis Provinsi		DINAS PRKP
		Persentase sarana air limbah vang layak di	85%	DINAS PRKP	



Arah Kebijakan		Program Perangkat Daerah	Indikator Program (Outcome)	2019	PD yang Bertanggung Jawab
				Target	
1	2	3	4	5	
		kawasan kumuh Provinsi			
		Persentase pengurangan titik genangan air di Kawasan Strategis Provinsi			DINAS PRKP
		Persentase pengurangan titik genangan air di Kawasan kumuh Provinsi	30%		DINAS PRKP
		Persentase sarana pelayanan persampahan di Kawasan Strategis Provinsi			DINAS PRKP
		Persentase sarana pelayanan persampahan di Kawasan permukiman kumuh Provinsi	40%		DINAS PRKP
	PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI KEBIJAKAN SOSIAL, KESEHATAN, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Prosentase Jumlah kebijakan sosial, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi yang diimplementasikan	75		BIRO KESRA
	PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase informasi tentang kesehataan masyarakat	25%		KOMINFO
	PROGRAM PENINGKATAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN	Peningkatan Skor PPH konsumsi jadi 92,50	81		DINAS PANGAN
		persentase pangan yang aman dikonsumsi	83		DINAS PANGAN
	PROGRAM KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN	Kenaikan Skor PPH Ketersediaan	81.9		DINAS PANGAN
		Persentase jumlah penduduk rawan pangan yang keluar dari katagori penduduk rawan pangan	1.1		DINAS PANGAN
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA, FASILITASI DAN AKSES INDUSTRI	Persentase kandungan nutrisi industri olahan pangan.	4.68		DISPERINDAG
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS HYGIENIS PERUSAHAAN DAN KESEHATAN KERJA	Persentase perusahaan yang menerapkan norma kesehatan kerja	2.73		UPTD HYPERKES
	PROGRAM PENINGKATAN PEMBUDAYAAN DAN PENINGKATAN PRESTASI OLAH RAGA	Persentase peserta yang megikuti olahraga rekreasi dan tradisional	0.00%		DISKEPORA
	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN DARAT	Persentase penurunan korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas			DISHUB
22	peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN	Persentase standarisasi pelayanan kesehatan	77.12%	DINKES
		PROGRAM PELAYANAN TEKNIS LABORATORUIM KESEHATAN	Jumlah pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan sesuai standar	14	UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN
		PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase informasi berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang dapat diakses masyarakat	25%	DISKOMINFO
23	Pemenuhan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KESEHATAN	Persentase kualitas dan kuantitas sumberdaya kesehatan	83.39%	DINKES



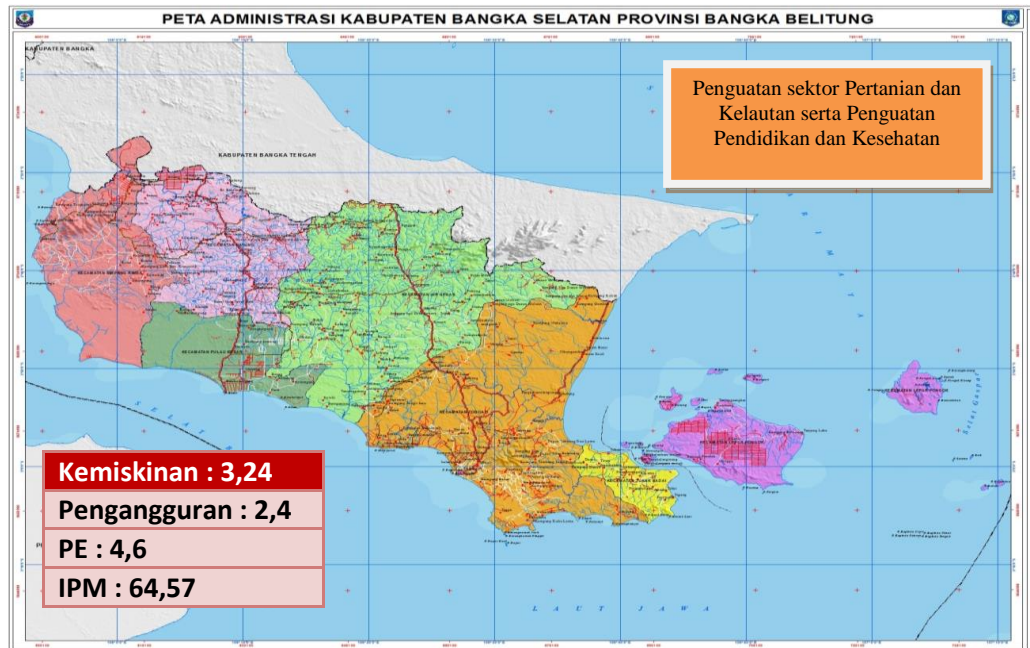
Arah Kebijakan		Program Perangkat Daerah	Indikator Program (Outcome)	2019 Target	PD yang Bertanggung Jawab
1		2	3	4	5
25	Pengembangan TPA Regional	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KEJURUAN	Persentase jumlah SMK Program Keahlian Kesehatan yang memiliki akreditasi A	100%	DINAS PENDIDIKAN
			Persentase jumlah SMK Program Keahlian Kesehatan yang mengeluarkan Sertifikasi Profesi pihak 1 (LSP-P1)	0	DINAS PENDIDIKAN
		PROGRAM KECIPTA KARYAAN DAN PERMUKIMAN	Persentase drainase dalam kondisi baik/aliran air tidak tersumbat di KPengembangan TPA Regional		PRKP
			Persentase jalan lingkungan permukiman dalam kondisi baik di Pengembangan TPA Regional		PRKP
		PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap di TPA Regional	0%	PUPR
		PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	Persentase luas lahan yang bersertifikat untuk kepentingan di TPA Regional		PUPR
		PROGRAM PENGEMBANGAN SDA	Persentase penyediaan volume air baku untuk pengembangan TPA Regional	5%	PUPR
			Panjang saluran / sungai yang dinormalisasi pada kawasan kumuh	5%	PUPR

#### 5.1.5. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bangka Selatan

Pembangunan Kabupaten Bangka Selatan diarahkan berdasarkan sasaran pokok 3 (tiga) sasaran meliputi: pertama kesejahteraan masyarakat dengan 2 (dua) indikator, yaitu: kemiskinan dan pengangguran, kedua meningkatnya ekonomi daerah melalui indikator pertumbuhan PDRB dan ketiga terpenuhinya kapasitas dan kualitas SDM, dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia. Berdasarkan 3 (tiga) sasaran dan 4 (indikator) tersebut maka pembangunan Kabupaten Bangka Tengah tahun 2019 diarahkan pada Pertumbuhan PDRB melalui penguatan sektor Pertanian dan Kelautan serta Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia.

**Gambar V.7**

Sasaran Pembangunan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2019



Pembangunan Kabupaten Bangka Selatan tahun 2019 diarahkan pada Pertumbuhan PDRB melalui penguatan sektor Pertanian, Kelautan dan Pariwisata dengan kebijakan percepatan pengembangan kawasan strategis provinsi di wilayah Kabupaten Bangka Selatan yang meliputi Pengembangan Kawasan Strategis KTM Batu Betumpang, Pengembangan kawasan Agropolitan dan Tekno park Pertanian Lada Air Gegas, Pengembangan Kawasan Budidaya Pertanian dan Pengembangan Kawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok Sedangkan untuk peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di fokuskan pada peningkatan sektor Pendidikan dan Kesehatan.

**Tabel V.5**

Arah Kebijakan, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas RKPD 2019 Dalam Rangka Mendukung Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bangka Selatan

Arah Kebijakan		Program Perangkat Daerah	Indikator Program (Outcome)	2019 Target	PD yang Bertanggung Jawab
1		2	3	4	5
1	Penyusunan kebijakan dan implementasi perlindungan lahan pertanian berkelanjutan	PROGRAM PENGEMBANGAN PRASARANA, SARANA PERTANIAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN	Pertambahan Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan yang di implementasikan	2	DINAS PERTANIAN
	Peningkatan sarana dan prasarana dan nilai tambah serta produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan Kehutanan	PROGRAM PENGEMBANGAN PRASARANA, SARANA PERTANIAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase ketersediaan sarana prasarana pertanian	15	DINAS PERTANIAN
2			Persentase Pertambahan Kelompok tani yang melakukan pemberdayaan disektor pertanian	10	DINAS PERTANIAN
			Persentase Kelembagaan pertanian aktif	10	DINAS PERTANIAN

Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Program (Outcome)	2019	PD yang Bertanggung Jawab
			Target	
1	2	3	4	5
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI MUTU BENIH	Pertambahan Jumlah benih lada yang bersertifikat dan berlabel	655,000	UPTD PENGAWAS DAN SERTIFIKASI MUTU BENIH PERTANIAN
		Pertambahan Jumlah benih karet yang bersertifikat dan berlabel,	655,000	UPTD PENGAWAS DAN SERTIFIKASI MUTU BENIH PERTANIAN
		Pertambahan Jumlah benih padi yang bersertifikat dan berlabel	150	UPTD PENGAWAS DAN SERTIFIKASI MUTU BENIH PERTANIAN
		Pertambahan Jumlah benih hortikultura yang bersertifikat dan berlabel,	1,500	UPTD PENGAWAS DAN SERTIFIKASI MUTU BENIH PERTANIAN
		Persentase varietas unggul lokal yang didaftarkan menjadi unggul Nasional	2	UPTD PENGAWAS DAN SERTIFIKASI MUTU BENIH PERTANIAN
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PROTEKSI TANAMAN	Persentase penurunan areal tanam yang terserang OPT	5	UPTD BALAI PROTEKSI TANAMAN PERTANIAN
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PENGEMBANGAN BENIH PERTANIAN	Pertambahan Ketersediaan bibit lada	50,000	UPTD BALAI BENIH PERTANIAN
		Pertambahan Ketersediaan bibit karet	40,000	UPTD BALAI BENIH PERTANIAN
		Pertambahan Ketersediaan benih sumber padi	4	UPTD BALAI BENIH PERTANIAN
		Pertambahan Ketersediaan bibit ayam	6,000	UPTD BALAI BENIH PERTANIAN
		Pertambahan Ketersediaan anakan sapi	20	UPTD BALAI BENIH PERTANIAN
		Pertambahan Ketersediaan kandang ternak, gudang pakan, gedung pertemuan dan sarana prasarana	1	UPTD BALAI BENIH PERTANIAN
	PROGRAM PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	Pertambahan produksi dan produktifitas komoditi strategis tanaman pangan padi	43,135.00	DINAS PERTANIAN
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERKEBUNAN	Peningkatan produksi lada	43,577	DINAS PERTANIAN
		Peningkatan produksi karet	60,173	DINAS PERTANIAN
	PROGRAM PENGEMBANGAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	Pertambahan Jumlah populasi ternak besar sapi	14,399	DINAS PERTANIAN
		Pertambahan Jumlah populasi ternak ayam	12,678,800	DINAS PERTANIAN
	PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA HUTAN	Persentase izin usaha hasil hutan kayu (%)	20%	DINAS KEHUTANAAN
		Persentase hasil hutan bukan kayu yang dikembangkan (%)	20%	DINAS KEHUTANAAN
	PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP	Tersedianya Dokumen KLHS Pengembangan Balai Benih Pertanian Terpadu yang digunakan dalam	1 Dokumen	DLH

Arah Kebijakan		Program Perangkat Daerah	Indikator Program (Outcome)	2019	PD yang Bertanggung Jawab
				Target	
1	2	3	4	5	
		perencanaan kawasan			
		PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase informasi berkaitan dengan peningkatan produksi pertanian yang dapat diakses masyarakat	25%	KOMINFO
3	Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing sektor pertanian	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LATIHAN KERJA INDUSTRI	Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan tentang pertanian yang berkompetensi	0.14	UPD BLKI
		PROGRAM PENGEMBANGAN PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase peningkatan tenaga kerja pertanian yang bersertifikasi	18	DISNAKER
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase peningkatan produktifitas tenaga kerja sektor pertanian	0.02	UPTD BALAI PRODUKTIFITAS
		PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KEJURUAN	Persentase Jumlah SMK dengan program keahlian pertanian, perkebunan dan peternakan yang memiliki akreditasi A	100	DINAS PENDIDIKAN
			Persentase SMK Pertanian dan Peternakan yang mengeluarkan Sertifikasi Profesi pihak 1 (LSP-P1)	50	DINAS PENDIDIKAN
		PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI	persentase peningkatan volume usaha koperasi pertanian	3%	DINAS KUMKM
			persentase peningkatan volume usaha koperasi sapi	1%	DINAS KUMKM
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LATIHAN PERKOPERASIAN, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	Persentase SDM Koperasi sektor pertanian terlatih	3.09%	UPTD BALAI LATIHAN PERKOPERASIAN, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
			persentase SDM Usaha Kecil sektor pertanian terlatih	0.34%	UPTD BALAI LATIHAN PERKOPERASIAN, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
		4	Pembinaan hubungan industri sektor pertanian	PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN, PEMBINAAN HUB. INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase perusahaan pertanian yang diperiksa dan dibina sesuai standar pemeriksaan perusahaan
5	Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing sektor pertanian	PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI	Persentase pertumbuhan kelembagaan koperasi aktif sektor pertanian	5%	DINAS KUMKM
			persentase koperasi sektor pertanian berkualitas sesuai standar	2%	DINAS KUMKM
		PROGRAM	Persentase produk Usaha	77%	DINAS KUMKM

Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Program (Outcome)	2019	PD yang Bertanggung Jawab
			Target	
1	2	3	4	5
6	PENINGKATAN PEMBERDAYAAN USAHA KECIL	kecil sektor pertanian yang tersertifikasi		
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBERDAYA, FASILITASI DAN AKSES INDUSTRI	Presentase Tenaga Kerja Industri pada sektor pertanian	10.28%	DISPERINDAG
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS SERTIFIKASI DAN PENGENDALIAN MUTU PRODUK	Persentase komoditi unggulan daerah diuji yang memenuhi standar pengujian	2	UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PENGENDALIAN MUTU
	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Pertambahan Jumlah profil investasi Sektor Pertanian yang digunakan untuk promosi investasi daerah di sektor pertanian	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Pertambahan Jumlah UKM pertanian yang bermitra dengan investor	1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Pertambahan Jumlah investor Sektor Pertanian	3	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Presentase perusahaan sektor pertanian yang sesuai realisasi investasi dengan rencana investasi	0.44%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Pertambahan jumlah pelaku usaha kecil sektor pertanian yang menandatangani kesepakatan kemitraan dengan dunia usaha dalam daerah	90	DINAS KUMKM
		persentase pelaku usaha kecil sektor pertanian, perkebunan dan peternakan yang menandatangani kesepakatan kemitraan dengan dunia usaha luar daerah	0	DINAS KUMKM
		persentase Usaha Kecil sektor pertanian, perkebunan dan peternakan yang mendapatkan izin usaha	0	DINAS KUMKM
		persentase Usaha Kecil sektor pertanian, peternakan dan perkebunan yang difasilitasi promosi/pemasaran produknya melalui even pameran	0	DINAS KUMKM

Arah Kebijakan		Program Perangkat Daerah	Indikator Program (Outcome)	2019	PD yang Bertanggung Jawab
				Target	
1	2	3	4	5	
		persentase Usaha Kecil sektor pertanian, peternakan dan perkebunan yang difasilitasi promosi/ pemasaran produknya melalui web	1	DINAS KUMKM	
		persentase Usaha Kecil sektor pertanian, perkebunan dan peternakan yang mendapatkan Diseminasi dan pendampingan akses permodalan	0	DINAS KUMKM	
7	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dibidang pertanian	PROGRAM PENGEMBANGAN PENDAYAGUNAAN SDA, TEKNOLOGI TEPAT GUNA DAN PELATIHAN MASYARAKAT	Persentase kelompok masyarakat yang mendayagunakan teknologi tepat guna (TTG) di sektor pertanian	42%	DINAS PMD
		PROGRAM PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	Pertambahan Jumlah kelompok yang menerapkan peningkatan mutu, daya saing, dan nilai tambah hasil tanaman pangan dan hortikultura	40	DINAS PMD
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERKEBUNAN	Pertambahan Jumlah kelompok yang menerapkan peningkatan mutu, daya saing, dan nilai tambah hasil perkebunan	56	DINAS PERTANIAN
		PROGRAM PENGEMBANGAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	Pertambahan Jumlah kelompok yang menerapkan peningkatan mutu, daya saing, dan nilai tambah hasil peternakan	14	DINAS PERTANIAN
8	Pengembangan Kawasan Strategis KTM Batu Betumpang	PROGRAM PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	Tersedianya Kawasan budiaya komoditas padi di KTM Batu Betumpang	1	DINAS PERTANIAN
			Tersedianya Kawasan budiya komoditas cabai di KTM Batu Betumpang	1	DINAS PERTANIAN
			Tersedianya Kawasan budiaya bawang merah di KTM Batu Betumpang	1	DINAS PERTANIAN
			Tingkat produktifitas petani dikawasan KTM Batu Betumpang	1	DINAS PERTANIAN
		PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di Kawasan Strategis KTM Batu Betumpang	95.50%	DINAS PUPR
			Persentase Jembatan Provinsi dalam kondisi baik di Kawasan Strategis KTM Batu Betumpang	89.00%	DINAS PUPR
		PROGRAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Tingkat kesejahteraan petani masyarakat transmigrasi di kawasan KTM Batu Betumpang		DISNAKER
9	Pengembangan kawasan Agropolitan dan Tekno park Pertanian Lada Air Gegas	PROGRAM PENGEMBANGAN PERKEBUNAN	Tersedianya kawasan Pengembangan budidaya lada	1	DINAS PERTANIAN

Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Program (Outcome)	2019	PD yang Bertanggung Jawab
			Target	
1	2	3	4	5
		Tersedianya Regulasi Penataan Ruang Untuk kawasan Agropolitan dan Tekno park Pertanian Lada Air Gegas yang di implementasikan	ada	DINAS PUPR
10	Pengembangan Kawasan Budidaya Pertanian	PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN		
		PROGRAM PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA		- DINAS PERTANIAN
		PROGRAM PENGEMBANGAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN		DINAS PERTANIAN
		PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP	1 Dokumen	DLH
11	Pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang laut serta penegakan perundang-undangan kelautan dan perikanan.	PROGRAM PENGEMBANGAN PENGELOLAAN RUANG LAUT		
		Luas Kawasan Konservasi yang dicadangkan (Ha)	820,077	DKP
		Persentase sarana dan prasarana yang terbangun di Desa Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	2.13	DKP
		Persentase Usulan Pemanfaatan Ruang Laut yang terekomendasi (%)	65	DKP
		PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		
		Persentase Pelaku Usaha yang Taat Aturan (%)	70	DKP
		PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN LAUT	15.00%	DISHUB
12	Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing sektor Kelautan dan Perikanan	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LATIHAN KERJA INDUSTRI		
		Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan tentang Kelautan dan perikanan yang berkompetensi	0.11%	UPTD BLKI
		PROGRAM PENGEMBANGAN PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA		
		Persentase peningkatan tenaga kerja kelautan dan perikanan bersertifikat kompetensi	17.54	DISNAKER
13	Peningkatan Produksi, Kualitas dan produktifitas tenaga kerja sektor Kelautan dan perikanan	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		
		Persentase peningkatan produktifitas tenaga kerja sektor Perikanan	0.12	UPTD BALAI PRODUKTIFITAS
		PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI		
		persentase peningkatan volume usaha sektor kelautan dan perikanan	5%	DINAS KUMKM
		PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN		
		persentase pelaku usaha kecil sektor kelautan dan perikanan yang	-	DINAS KUMKM



Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Program (Outcome)	2019	PD yang Bertanggung Jawab
			Target	
1	2	3	4	5
14	Peningkatan Produksi, Kualitas dan produktifitas tenaga kerja sektor Kelautan dan perikanan	USAHA KECIL		
		menandatangani kesepakatan kemitraan dengan dunia usaha luar daerah		
		persentase Usaha Kecil sektor kelautan dan perikanan yang mendapatkan Izin Usaha	-	DINAS KUMKM
		persentase Usaha Kecil sektor kelautan dan perikanan yang difasilitasi promosi/ pemasaran produknya melalui even pameran	-	DINAS KUMKM
		persentase Usaha Kecil sektor kelautan dan perikanan yang mendapatkan Diseminasi dan pendampingan akses permodalan	-	DINAS KUMKM
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LATIHAN PERKOPERASIAN, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	persentase Usaha kecil sektor kelautan dan perikanan yang difasilitasi promosi/ pemasaran produknya melalui web	1	DINAS KUMKM
			3%	UPTD BALAI LATIHAN PERKOPERASIAN, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
		persentase SDM Usaha Kecil sektor perikanan terlatih	0.4%	UPTD BALAI LATIHAN PERKOPERASIAN, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBERDAYA, FASILITASI DAN AKSES INDUSTRI	0.70%	DISPERINDAG
		PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN BUDIDAYA DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	12,120	DKP
		Angka Konsumsi Ikan (Kg/Org/Tahun)	54	DKP
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	215,300	DKP
		Nilai Tukar Nelayan (Indeks)	109	DKP
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PEMBENIHAN IKAN AIR PAYAU	9.63	UPTD BALAI BENIH IKAN AIR PAYAU (BBIAP) TANJUNG KRASAK
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PEMBENIHAN IKAN LAUT	0.06	UPTD BALAI BENIH IKAN LAUT (BBIL) TANJUNG RUSA
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS	0.33	UPTD BALAI BENIH IKAN SENTRAL (BBIS) PEMALI



Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Program (Outcome)	2019	PD yang Bertanggung Jawab
			Target	
1	2	3	4	5
	PEMBENIHAN IKAN AIR TAWAR			
15	Pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja sektor kelautan dan perikanan	PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN, PEMBINAAN HUB. INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL persentase perusahaan kelautan perikanan yang diperiksa dan dibina sesuai standar pemeriksaan perusahaan	1.2	DISNAKER
16	Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing sektor kelautan dan perikanan	PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI Persentase jumlah koperasi bidang Kelautan dan Perikanan yang berkualitas sesuai standar	3.60%	DINAS KUMKM
		Persentase pertumbuhan kelembagaan koperasi aktif sektor kelautan dan perikanan	5%	DINAS KUMKM
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LABORATORIUM PENGUJIAN DAN PENGENDALIAN MUTU HASIL PERIKANAN Persentase Produk Hasil Kelautan dan Perikanan yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan	84.00%	UPTD LABORATORIUM PENGUJIAN DAN PENGENDALIAN MUTU HASIL PERIKANAN
17	Pengembangan produk Kelautan dan perikanan, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di sektor kelautan dan perikanan.	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Pertambahan Jumlah profil investasi Sektor perikanan dan kelautan yang digunakan untuk promosi investasi di sektor perikanan dan Kelautan	5	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Pertambahan Jumlah UKM Sektor kelautan dan perikanan yang bermitra dengan investor	1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI PENANAMAN MODAL Pertambahan Jumlah Investor sektor kelautan dan perikanan	2	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DAN SISTEM INFORMASI Presentase perusahaan sektor kelautan dan perikanan yang sesuai realisasi investasi dengan rencana investasi	0.44%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN USAHA KECIL Peningkatan produk Usaha kecil sektor kelautan dan perikanan yang tersertifikasi	550	DINAS KUMKM
		pertambahan jumlah pelaku usaha kecil sektor kelautan dan perikanan yang menandatangani kesepakatan kemitraan dengan dunia usaha dalam daerah	160	DINAS KUMKM
18	Pengembangan Kawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok	PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap dikawasan Strategis	19,500	DKP

Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Program (Outcome)	2019	PD yang Bertanggung Jawab	
			Target		
1	2	3	4	5	
		Minapolitan Lepar Pongok			
	PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN BUDIDAYA DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya dikawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok	220	DKP	
	PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI	Persentase koperasi aktif di kawasan strategis minapolitan Lepar Pongok	1%	DINAS KUMKM	
	PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN USAHA KECIL	persentase Usaha Kecil dikawasan Minapolitan Lepar Pongok yang mendapatkan Izin Usaha	10%	DINAS KUMKM	
		persentase Usaha Kecil dikawasan Minapolitan Lepar Pongokyang mendapatkan Diseminasi dan pendampingan akses permodalan	1%	DINAS KUMKM	
	PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH DAN PENGAWASAN INDUSTRI	Pertumbuhan Jumlah Industri perikanaan dikawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok	0	DISPERINDAG	
	PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP	Tersedianya Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Minapolitan Lepar Pongok yang digunakan untuk perencanaan kawasan	ada	DLH	
	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN LAUT	Prosentase pemenuhan Sarana dan Prasarana pendukung Perhubungan Laut Kawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok	30%	DISHUB	
	PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	Persentase jumlah Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kawasan Minapolitan Lepar Pongok yang di implementasikan	C	DINAS PUPR	
		PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di Kawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok	0%	DINAS PUPR
19	Peningkatan tata kelola dan nilai tambah produk sumber daya mineral;	PROGRAM PENGEMBANGAN PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	Persentase Perusahaan pertambangan non logam yang menerapkan good mining practices	65%	DINAS ESDM
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM	Persentase Perusahaan pertambangan logam yang menerapkan good mining practices	60%	DINAS ESDM
		PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN GEOLOGI DAN AIR TANAH	Persentase cadangan Mineral bukan logam dan batuan yang potensial	33%	DINAS ESDM
		PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI	Prosentase jumlah Kebijakan Perekonomian yang diimplementasikan	72	BIRO EKONOMI

Arah Kebijakan		Program Perangkat Daerah	Indikator Program (Outcome)	2019	PD yang Bertanggung Jawab
				Target	
1	2	3	4	5	
	KEBIJAKAN PEREKONOMIAN				
		pertumbuhan industri turunaan Potensi Sumber Daya Mineral yang dikembangkan	4		DISPERINDAG
	PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH DAN PENGAWASAN INDUSTRI	Persentase industri yang memenuhi standar			DISPERINDAG
20	Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing Produk Sumber daya mineral	PROGRAM PENGEMBANGAN PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase peningkatan tenaga kerja sektor sumber daya mineral bersertifikat kompetensi	17.54	DISNAKER
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LATIHAN KERJA INDUSTRI	Persentase tenaga kerja bidang sumber daya mineral yang mendapat pelatihan pertambangan berkelanjutan	0.14	UPD BLKI
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase peningkatan produksi per tenaga kerja sektor sumber daya mineral	0.05	UPTD BALAI PRODUKTIFITAS
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LATIHAN PERKOPERASIAN, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	Persentase SDM Koperasi sektor sumber daya mineral terlatih	2.06%	UPTD BALAI LATIHAN PERKOPERASIAN, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
			Persentase SDM Usaha Kecil sektor sumber daya mineral terlatih	0.18%	UPTD BALAI LATIHAN PERKOPERASIAN, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
		PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN USAHA KECIL	persentase Usaha Kecil sektor pertambangan yang mendapatkan Izin Usaha	0	DINAS UMKM
			persentase Usaha Kecil sektor pertambangan yang difasilitasi promosi/ pemasaran produknya melalui even pameran	0	DINAS UMKM
			persentase Usaha kecil sektor pertambangan yang difasilitasi promosi/ pemasaran produknya melalui web	2	DINAS UMKM
persentase Usaha Kecil sektor pertambangan yang mendapatkan Diseminasi dan pendampingan akses permodalan	0		DINAS UMKM		
21	Pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja sektor sumber daya mineral	PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN, PEMBINAAN HUB. INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase perusahaan sumber daya mineral yang diperiksa dan dibina sesuai standar pemeriksaan perusahaan	4.8	DISNAKER
22	Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatakan	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS	Persentase produk sumber daya mineral yang disertifikasi	0.7	UPTD BALAI SERTIFIKASI DAN PENGENDALIAN

Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Program (Outcome)	2019	PD yang Bertanggung Jawab
			Target	
1	2	3	4	5
daya saing sektor sumber daya mineral	SERTIFIKASI DAN PENGENDALIAN MUTU PRODUK			MUTU
23 Pengembangan produk sumber daya mineral, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di sektor sumber daya mineral	PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI KEBIJAKAN SUMBER DAYA ALAM	Presentase Jumlah Kebijakan pembangunan Sumber Daya Mineral yang diimplementasikan	72	BIRO EKONOMI
	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Pertambahan Jumlah profil investasi sumber daya mineral yang digunakan untuk promosi investasi disektor sumber daya mineral	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Pertambahan Jumlah UKM yang bermitra dengan investor sumber daya mineral		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI PENANAMAN MODAL	Pertambahan jumlah investor sumber daya mineral	3	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DAN SISTEM INFORMASI	Presentase perusahaan sumber daya mineral yang sesuai realisasi investasi dengan rencana investasi	0.44%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	Presentase ketepatan waktu penerbitan perizinan sumber daya mineral	79%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	PROGRAM KEBINAMARGAAN	Presentase panjang jalan dalam kondisi mantap di kawasan strategis industri sadai	0%	DINAS PUPR
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	Persentase panjang talud yang terbangun di kawasan Strategis Industri Sadai	5%	DINAS PUPR
24 Pengembangan Kawasan Strategis Industri Sadai		Persentase penyediaan volume air baku di kawasan Strategis Industri Sadai	5%	DINAS PUPR
	PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	Persentase Tersedianya Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan StrategisProvinsi (KSP) KIPT Sadai	100%	DINAS PUPR
		Persentase Tersediannya lahan bersertifikat untuk kepentingan umum diKIPT sadai		DINAS PUPR
	PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH DAN PENGAWASAN INDUSTRI	Pertumbuhan Jumlah Industri di kawasan strategis Industri Sadai	1	DISPERINDAG
	PROGRAM	Tersedianya Dokumen	Ada	DLH

Arah Kebijakan		Program Perangkat Daerah	Indikator Program (Outcome)	2019 Target	PD yang Bertanggung Jawab
1		2	3	4	5
		PENINGKATAN TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP	KLHS Kawasan Strategis Provinsi KIPT Sadai yang digunakan untuk perencanaan kawasan		
25	Peningkatan Pembangunan Kawasan Industri	PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH DAN PENGAWASAN INDUSTRI	Pertumbuhan Industri/Sentra/Kawasan Industri		DISPERINDAG
26	peningkatan akses pelayanan pendidikan	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH ATAS	APK SMA	38.88%	DINAS PENDIDIKAN
		PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KEJURUAN	APK SMK	38.38%	DINAS PENDIDIKAN
		PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KHUSUS	APK SLB		DINAS PENDIDIKAN
27	peningkatan mutu layanan pendidikan.	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN KUANTITAS DAN KUALITAS GURU SERTA TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru Berkualifikasi S1/D4	97%	DINAS PENDIDIKAN
			Persentase Guru Bersertifikat Pendidik	40%	DINAS PENDIDIKAN
			Persentase guru dengan nilai rata-rata uji kompetensi diatas 50	90%	DINAS PENDIDIKAN
		PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH ATAS	Persentase SMA terakreditasi A	42.42%	DINAS PENDIDIKAN
			Rata-rata nilai UN SMA	6.5	DINAS PENDIDIKAN
		PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KEJURUAN	Persentase SMK terakreditasi A	38.60%	DINAS PENDIDIKAN
			Rata-rata nilai UN SMK	6.5	DINAS PENDIDIKAN
		PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KHUSUS	Persentase SLB terakreditasi A	100%	DINAS PENDIDIKAN
		PROGRAM PENINGKATAN PEMBUDAYAAN DAN PENINGKATAN PRESTASI OLAH RAGA	Persentase Atlet pelajar Berprestasi yang dibina ditingkat provinsi yang memperoleh medali	5.08%	DISKEPORA
		PROGRAM PENINGKATAN PEMBUDAYAAN DAN PENINGKATAN PRESTASI OLAH RAGA	Persentase Insan Olahraga yang berprestasi	5.08%	DISKEPORA
		PROGRAM	Persentase Pemuda	22.87%	DISKEPORA

Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Program (Outcome)	2019	PD yang Bertanggung Jawab
			Target	
1	2	3	4	5
	PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA	Berprestasi		
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PERPUSTAKAAN	presentase perpustakaan terakreditasi;	160	DKPUS
	PROGRAM PENGEMBANGAN STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Presentase jumlah sarana dan prasaran kepemudaan yang terbangun yang difungsikan	16.67%	DISKEPORA
	PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA	Persentase Insan Kepemudaan yang berprestasi dan berdedikasi yang dibantu	6.41%	DISKEPORA
		Persentase Peran Masyarakat Dalam Menjaga Nilai-Nilai Kepemudaan		DISKEPORA
	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN DARAT	Rasio Jumlah Bus sekolah dengan Jumlah Murid	5%	DINAS PERHUBUNGAN
		Persentase sekolah di ruas jalan Provinsi yang dilengkapi dengan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	4%	DINAS PERHUBUNGAN
	PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase informasi berkaitan dengan pendidikan yang dapat akses oleh masyarakat	25%	DISKOMINFO
	PROGRAM PENINGKATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI	Persentase SMA dan SMK yang telah berbasis IT	80%	DISKOMINFO
	PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN, KB, DAN PEMUDA	Prosentase jumlah kebijakan pengembangan pendidikan, keluarga berencana, pemuda dan pariwisata yang diimplementasikan	80	BIRO KESRA
		Persentase Jumlah Sekolah agama yang dinilai sesuai standar	35 sekolah	BIRO KESRA
	PROGRAM PENGELOLAAN BANTUAAAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) (DAK Non Fisik)	Persentase Sekolah penerima BOS	100%	DINAS PENDIDIKAN
28	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAAN PENDIDIKAN KEJURUAAN	Persentase SMK yang memiliki sertifikasi profesi	38.60%	DINAS PENDIDIKAN
	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN	Persentase SMK Kejuruan yang mendukung pengembangan pekonomi berbasis potensi lokal	100%	DINAS PENDIDIKAN

Arah Kebijakan		Program Perangkat Daerah	Indikator Program (Outcome)	2019	PD yang Bertanggung Jawab	
				Target		
1	2	3	4	5		
KEJURUAN						
29	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan	PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase status kesehatan masyarakat	72.07%	DINKES	
		PRORAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	Persentase angka kesakitan penyakit menular dan penyakit tidak menular	77.60%	DINKES	
		PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN, KB, PEMUDA DAN PARIWISATA	Persentase Sekolah yang mengikuti lomba UKS	35 sekolah	BIRO KESRA	
		PROGRAM KECIPTAKARYAAN DAN PERMUKIMAN	Persentase cakupan pelayanan akses air minum di kawasan strategis provinsi	9%	DINAS PRKP	
			Persentase cakupan pelayanan akses air minum di kawasan permukiman kumuh Provinsi	50%	DINAS PRKP	
			Persentase sarana air limbah yang layak di kawasan strategis Provinsi		DINAS PRKP	
			Persentase sarana air limbah yang layak di kawasan kumuh Provinsi	85%	DINAS PRKP	
			Persentase pengurangan titik genangan air di Kawasan Strategis Provinsi		DINAS PRKP	
			Persentase pengurangan titik genangan air di Kawasan kumuh Provinsi	30%	DINAS PRKP	
			Persentase sarana pelayanan persampahan di Kawasan Strategis Provinsi		DINAS PRKP	
			Persentase sarana pelayanan persampahan di Kawasan permukiman kumuh Provinsi	40%	DINAS PRKP	
			PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI KEBIJAKAN SOSIAL, KESEHATAN, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Prosentase Jumlah kebijakan sosial, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi yang diimplementasikan	75	BIRO KESRA
			PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase informasi tentang kesehataan masyarakat	25%	KOMINFO
		PROGRAM PENINGKATAN KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN	Peningkatan Skor PPH konsumsi jadi 92,50	81	DINAS PANGAN	
			persentase pangan yang aman dikonsumsi	83	DINAS PANGAN	
		PROGRAM KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN	Kenaikan Skor PPH Ketersediaan	81.9	DINAS PANGAN	
			Persentase jumlah penduduk rawan pangan yang keluar dari katagori penduduk rawan pangan	1.1	DINAS PANGAN	
		PROGRAM PENGEMBANGAN	Persentase kandungan nutrisi industri olahan	4.68	DISPERINDAG	

Arah Kebijakan		Program Perangkat Daerah	Indikator Program (Outcome)	2019	PD yang Bertanggung Jawab
				Target	
1	2	3	4	5	
	SUMBER DAYA, FASILITASI DAN AKSES INDUSTRI	pangan.			
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS HYGIENIS PERUSAHAAN DAN KESEHATAN KERJA	Persentase perusahaan yang menerapkan norma kesehatan kerja	2.73	UPTD HYPERKES	
	PROGRAM PENINGKATAN PEMBUDAYAAN DAN PENINGKATAN PRESTASI OLAH RAGA	Persentase peserta yang megikuti olahraga rekreasi dan tradisional	0.00%	DISKEPORA	
	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN DARAT	Persentase penurunan korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas		DISHUB	
30	peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN	Persentase standarisasi pelayanan kesehatan	77.12%	DINKES
		PROGRAM PELAYANAN TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN	Jumlah pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan sesuai standar	14	UPTD BALAI LABORATORIUM KESEHATAN
		PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase informasi berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang dapat diakses masyarakat	25%	DISKOMINFO
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KESEHATAN	Persentase kualitas dan kuantitas sumberdaya kesehatan	83.39%	DINKES
		PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KEJURUAN	Persentase jumlah SMK Program Keahlian Kesehatan yang memiliki akreditasi A	100%	DINAS PENDIDIKAN
			Persentase jumlah SMK Program Keahlian Kesehatan yang mengeluarkan Sertifikasi Profesi pihak 1 (LSP-P1)	0	DINAS PENDIDIKAN

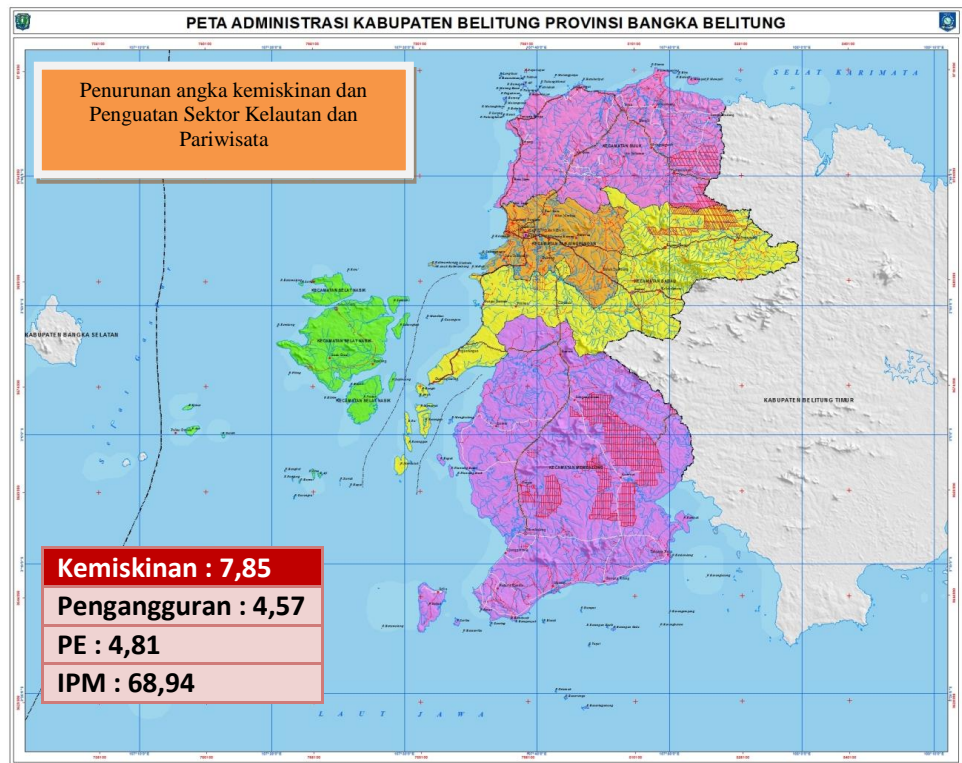
#### 5.1.6. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Belitung

Pembangunan Kabupaten Belitung diarahkan berdasarkan sasaran pokok 3 (tiga) sasaran meliputi: pertama kesejahteraan masyarakat dengan 2 (dua) indikator, yaitu: kemiskinan dan pengangguran, kedua meningkatnya ekonomi daerah melalui indikator pertumbuhan PDRB dan ketiga terpenuhinya kapasitas dan kualitas SDM, dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia. Berdasarkan 3 (tiga) sasaran dan 4 (indikator) tersebut maka pembangunan Kabupaten Belitung tahun 2019 diarahkan pada Penanggulangan Kemiskinan dan Pertumbuhan PDRB melalui penguatan sektor Kelautan dan Pariwisata.



**Gambar V.8**

Sasaran Pembangunan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2019



Pembangunan Kabupaten Belitung tahun 2019 diarahkan pada Penanggulangan Kemiskinan dengan kebijakan Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin sedangkan untuk pertumbuhan PDRB difokuskan pada sektor Kelautan terutama pada Pengembangan Kawasan Strategis etalase Perikanan Selat Nasik, Pengembangan Kawasan Strategis Industri Perikanan Tanjung Binga sedangkan pada sektor Pariwisata dengan Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan ekonomi khusus (KEK) Tanjung kelayang dan Pengembangan Kawasan peruntukan Pariwisata Museum Nasional Maritim Belitung,

**Tabel V,6**

Arah Kebijakan, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas RKPD 2019 Dalam Rangka Mendukung Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Belitung

Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Program (Outcome)	2019	PD yang Bertanggung Jawab
			Target	
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PENGELOLAAN RUANG LAUT	Pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang laut serta penegakan perundang-undangan kelautan dan perikanan.		
		Luas Kawasan Konservasi yang dicadangkan (Ha)	820,077	DKP
		Persentase sarana dan prasarana yang terbangun di Desa Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	2.13	DKP
		Persentase Usulan Pemanfaatan Ruang Laut	65	DKP

Arah Kebijakan		Program Perangkat Daerah	Indikator Program (Outcome)	2019	PD yang Bertanggung Jawab
				Target	
1	2	3	4	5	
yang terekomendasi (%)					
2	Pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang laut serta penegakan perundang-undangan kelautan dan perikanan.	PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Pelaku Usaha yang Taat Aturan (%)	70	DKP
3	Pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang laut serta penegakan perundang-undangan kelautan dan perikanan.	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN LAUT	Prosentase Pelabuhan Khusus (Pelsus) dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) yang memiliki izin	15.00%	DISHUB
4	Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing sektor Kelautan dan Perikanaan	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LATIHAN KERJA INDUSTRI	Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan tentang Kelautan dan perikanaan yang berkompetensi	0.11%	UPTD BLKI
		PROGRAM PENGEMBANGAN PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase peningkatan tenaga kerja kelautan dan perikanaan bersertifikat kompetensi	17.54	DISNAKER
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase peningkatan produktifitas tenaga kerja sektor Perikanaan	0.12	UPTD BALAI PRODUKTIFITAS
		PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KEJURUAN	Persentase Jumlah SMK dengan program keahlian perikanan yang memiliki akreditasi A	100	DINAS PENDIDIKAN
			Persentase Jumlah SMK Program Keahlian Kelautan dan Perikanaan yang mengeluarkan Sertifikasi Profesi pihak 1 (LSP-P1)	100	DINAS PENDIDIKAN
5	Peningkatan Produksi, Kualitas dan produktifitas tenaga kerja sektor Kelautan dan perikanaan	PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI	persentase peningkatan volume usaha sektor kelautan dan perikanan	5%	DINAS KUMKM
		PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN USAHA KECIL	persentase pelaku usaha kecil sektor kelautan dan perikanan yang menandatangani kesepakatan kemitraan dengan dunia usaha luar daerah	-	DINAS KUMKM
			persentase Usaha Kecil sektor kelautan dan perikanan yang mendapatkan Izin Usaha	-	DINAS KUMKM
			persentase Usaha Kecil sektor kelautan dan perikanan yang difasilitasi promosi/ pemasaran produknya melalui even pameran	-	DINAS KUMKM

Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Program (Outcome)	2019	PD yang Bertanggung Jawab
			Target	
1	2	3	4	5
6	Peningkatan Produksi, Kualitas dan produktifitas tenaga kerja sektor Kelautan dan perikanan	persentase Usaha Kecil sektor kelautan dan perikanan yang mendapatkan Diseminasi dan pendampingan akses permodalan	-	DINAS KUMKM
		persentase Usaha kecil sektor kelautan dan perikanan yang difasilitasi promosi/ pemasaran produknya melalui web	1	DINAS KUMKM
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LATIHAN PERKOPERASIAN, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	3%	UPTD BALAI LATIHAN PERKOPERASIAN, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
		persentase SDM Usaha Kecil sektor perikanan terlatih	0.4%	UPTD BALAI LATIHAN PERKOPERASIAN, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBERDAYA, FASILITASI DAN AKSES INDUSTRI	0.70%	DISPERINDAG
		PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN BUDIDAYA DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	12,120	DKP
		Angka Konsusmsi Ikan (Kg/Org/Tahun)	54	DKP
		Volume Produksi Olahan (ton)	21,110	DKP
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	215,300	DKP
		Nilai Tukar Nelayan (Indeks)	109	DKP
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PEMBENIHAN IKAN AIR PAYAU	9.63	UPTD BALAI BENIH IKAN AIR PAYAU (BBIAP) TANJUNG KRASAK
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PEMBENIHAN IKAN LAUT	0.06	UPTD BALAI BENIH IKAN LAUT (BBIL) TANJUNG RUSA
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PEMBENIHAN IKAN AIR TAWAR	0.33	UPTD BALAI BENIH IKAN SENTRAL (BBIS) PEMALI
		PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN, PEMBINAAN HUB. INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL	1.2	DISNAKER

Arah Kebijakan		Program Perangkat Daerah	Indikator Program (Outcome)	2019	PD yang Bertanggung Jawab
				Target	
1		2	3	4	5
16	Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing sektor kelautan dan perikanan	PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI	Persentase jumlah koperasi bidang Kelautan dan Perikanan yang berkualitas sesuai standar	3.60%	DINAS KUMKM
7	Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing sektor kelautan dan perikanan		Persentase pertumbuhan kelembagaan koperasi aktif sektor kelautan dan perikanan	5%	DINAS KUMKM
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LABORATORIUM PENGUJIAN DAN PENGENDALIAN MUTU HASIL PERIKANAN	Persentase Produk Hasil Kelautan dan Perikanan yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan	84.00%	UPTD LABORATORIUM PENGUJIAN DAN PENGENDALIAN MUTU HASIL PERIKANAN
8	Pengembangan produk Kelautan dan perikanan, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di sektor kelautan dan perikanan.	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Pertambahan Jumlah profil investasi Sektor perikanan dan kelautan yang digunakan untuk promosi investasi di sektor perikanan dan Kelautan	5	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			Pertambahan Jumlah UKM Sektor kelautan dan perikanan yang bermitra dengan investor	1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
9	Pengembangan produk Kelautan dan perikanan, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di sektor kelautan dan perikanan.	PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI PENANAMAN MODAL	Pertambahan Jumlah Investor sektor kelautan dan perikanan	2	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
10	Pengembangan produk Kelautan dan perikanan, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi,	PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DAN SISTEM INFORMASI	Presentase perusahaan sektor kelautan dan perikanan yang sesuai realisasi investasi dengan rencana investasi	0.44%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Program (Outcome)	2019	PD yang Bertanggung Jawab
			Target	
1	2	3	4	5
keterpaduan dan kerjasama antarsektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di sektor kelautan dan perikanan.	PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN USAHA KECIL	Peningkatan produk Usaha kecil sektor kelautan dan perikanan yang tersertifikasi	550	DINAS KUMKM
		pertambahan jumlah pelaku usaha kecil sektor kelautan dan perikanan yang menandatangani kesepakatan kemitraan dengan dunia usaha dalam daerah	160	DINAS KUMKM
11 Pengembangan Kawasan Strategis etalase Perikanan Selat Nasik	PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN BUDIDAYA DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya dikawasan Strategis etalase perikanan selat nasik	121	DKP
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap dikawasan Strategis Etalase Perikanan Selat Nasik	33,000	DKP
	PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI	Persentase koperasi aktif di kawasan strategis etalase perikanan selat nasik	10	DINAS KUMKM
	PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN USAHA KECIL	persentase Usaha Kecil dikawasan strategis etalase perikanan selat nasik yang mendapatkan Izin Uaha	10%	DINAS KUMKM
		persentase Usaha Kecil dikawasan Sentra Selat Nasik yang mendapatkan Diseminasi dan pendampingan akses permodalan	1%	DINAS KUMKM
	PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH DAN PENGAWASAN INDUSTRI	Pertumbuhan Jumlah Industri perikanan dikawasan Strategis Etalase Perikanan Selat Nasik		DISPERINDAG
	PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di Kawasan Strategis etalase Perikanan Selat Nasik	0%	DINAS PUPR
	PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP	Tersedianya Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Etalase Perikanan Selat Nasik yang digunakan dalam perencanaan kawasan		DLH
	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN LAUT	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung perhubungan laut kawasan strategis etalase perikanan Selat Nasik	30%	DISHUB

Arah Kebijakan		Program Perangkat Daerah	Indikator Program (Outcome)	2019	PD yang Bertanggung Jawab
				Target	
1		2	3	4	5
		PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	Persentase Jumlah Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kawasan Etalase Perikanan Selat Nasik yang diimplementasikan	50	DINAS PUPR
12	Pengembangan Kawasan Strategis Industri Perikanan Tanjung Binga	PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI	Persentase koperasi aktif di kawasan strategis industri perikanan Tanjung Binga	1%	DINAS KUMKM
		PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN USAHA KECIL	persentase Usaha Kecil dikawasan strategis industri perikanan Tanjung Binga yang mendapatkan Izin Usaha	10%	DINAS KUMKM
			persentase Usaha Kecil dikawasan strategis industri perikanan Tanjung Binga yang mendapatkan Diseminasi dan pendampingan akses permodalan	1%	DINAS KUMKM
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	Pertumbuhan panjang bangunan pemecah gelombang atau penahan abrasi di kawasan Strategis Industri Perikanan Tanjung Binga	5%
		PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase penyediaan volume air baku di kawasan Strategis Industri Perikanan Tanjung Binga	5%	DINAS PUPR
			Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di Kawasan Strategis Industri Perikanaan Tanjung Binga	97.85%	DINAS PUPR
			Persentase Jembatan Provinsi dalam kondisi baik di Kawasan Strategis Industri Perikanaan Tanjung Binga	95.00%	DINAS PUPR
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap dikawasan Strategis Industri Perikanaan Tanjung Binga	10,000	DKP
		PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN LAUT	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung perhubungan laut kawasan strategis Industri Perikanan Tanjung Binga		DISHUB
		PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	Persentase Jumlah Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kawasan Industri Perikanan Tanjung Binga yang diimplemtasikan	50	DINAS PUPR
		13	Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, ekonomi kreatif, peran serta masyarakat dan kelembagaan pariwisata	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA, EKONOMI KREATIF DAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN	Persentase sumber daya pariwisata yang terlatih dan tersertifikasi

Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Program (Outcome)	2019	PD yang Bertanggung Jawab
			Target	
1	2	3	4	5
14 Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, ekonomi kreatif, peran serta masyarakat dan kelembagaan pariwisata		Presentase pelaku ekonomi kreatif yang terlatih		BUDPAR
		Pertumbuhan kelembagaan pariwisata	11	BUDPAR
	PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI	Pertumbuhan kelembagaan koperasi aktif pendukung pariwisata	2.70%	KUMKM
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LATIHAN PERKOPERASIAN, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	Persentase SDM Koperasi sektor pariwisata terlatih	2.06%	KUMKM
		persentase SDM Usaha Kecil sektor pariwisata terlatih	0.25%	KUMKM
	PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN USAHA KECIL	persentase Usaha Kecil sektor pariwisata yang menggunakan Aplikasi Mobile Platform (Lalaper)		KUMKM
		persentase Usaha Kecil sektor pariwisata yang mendapatkan Izin Usaha	1	KUMKM
		persentase Usaha Kecil sektor pariwisata yang mendapatkan Diseminasi dan pendampingan akses permodalan	0	KUMKM
	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KEJURUAN	Persentase SMK pariwisata Terkreditasi A	100	DINAS PENDIDIKAN
	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	Presentase objek wisata yang terkelola	12%	BUDPAR
	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	Persentase tingkat kunjungan wisatawan	6	BUDPAR
	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN LAUT	Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasana Perhubungan Laut di lokasi wisata	30%	DISHUB
	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN DARAT	Persentase pemenuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan darat dalam menunjang Daerah Tujuan Wisata	20%	DISHUB
	PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di daerah pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata.	94.51%	DINAS PUPR
		Persentase Jembatan Provinsi dalam kondisi baik	86.00%	DINAS PUPR



Arah Kebijakan		Program Perangkat Daerah	Indikator Program (Outcome)	2019	PD yang Bertanggung Jawab
				Target	
1		2	3	4	5
			di daerah pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata.		
15	Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing kepariwisataan daerah	PROGRAM PENINGKATAN PUSAT PELAYANAN USAHA TERPADU KUMKM	Pertumbuhan produk parekraf	10%	DINAS KUMKM
		PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase informasi berkaitan dengan pemasaran pariwisata yang dapat diakses masyarakat	25%	DISKOMINFO
		PROGRAM PENGEMBANGAN PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase peningkatan tenaga kerja pariwisata bersertifikat kompetensi	17.54	DISNAKER
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LATIHAN KERJA INDUSTRI	Persentase pencari kerja pariwisata yang mendapat pelatihan	0.15	UPD BLKI
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase peningkatan produksi per tenaga kerja bidang pariwisata	0.05	UPTD BALAI PRODUKTIFITAS
		PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KEJURUAN	Persentase Jumlah SMK Program Keahlian Pariwisata yang mengeluarkan sertifikat Profesi pihak 1 (LSP-P1)	33.33	DINDIK
		PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI	persentase peningkatan volume usaha koperasi disektor pariwisata	1%	KUMKM
16	Peningkatan kualitas, partisipasi dan prestasi pemuda di berbagai bidang pembangunan, dan peningkatan pengelolaan ke olah raga serta mengembangkan peran serta kebudayaan dalam mendukung pembangunan kepariwisataan	PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Pemuda Lintas Negara	6.67%	DISKEPORA
		PROGRAM PENINGKATAN PEMBUDAYAAN DAN PENINGKATAN PRESTASI OLAH RAGA	Pertumbuhan Jumlah peserta yang mengikuti babel sport tourism	4.00%	DISKEPORA
		PROGRAM PENGEMBANGAN STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Presentase jumlah sarana dan prasaran olahraga yang terbangun dalam mendukung event olahraga regional dan nasional	16.67%	DISKEPORA
		PROGRAM PELESTARIAN BUDAYA	Persentase budaya lokal yang dilindungi, dikembangkan,	14.87%	BUDPAR



Arah Kebijakan		Program Perangkat Daerah	Indikator Program (Outcome)	2019	PD yang Bertanggung Jawab
				Target	
1	2	3	4	5	
dimanfaatkan dan dibina					
17	Pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja disektor pariwisata	PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN, PEMBINAAN HUB. INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL	persentase Jumlah perusahaan dibidang pariwisata yang diperiksa dan dibina sesuai standar pemeriksaan perusahaan	1.6	DISNAKER
18	Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing kepariwisataan	PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN USAHA KECIL	Peningkatan produk Usaha kecil sektor pariwisata yang tersertifikasi	250	DINAS KUMKM
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBERDAYA, FASILITASI DAN AKSES INDUSTRI	Persentase Tenaga Kerja yang terserap di industri pariwisata	0.31%	DISPERINDAG
		PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH DAN PENGAWASAN INDUSTRI	Persentase industri yang memenuhi standar		DISPERINDAG
19	Pengembangan pariwisata daerah, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antar sektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di bidang pariwisata.	PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI BUMD, PENANAMAN MODAL, PARIWISATA DAN BUDAYA	Prosentase Jumlah Kebijakan BUMD, Penanaman Modal, Pariwisata dan Budaya yang di implementasikan	72	BIRO EKONOMI
		PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Pertambahan Jumlah Profil Investasi Pariwisata yang digunakan untuk promosi investasi di sektor pariwisata	-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			Pertambahan Jumlah UKM pariwisata yang bermitra dengan investor	1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI PENANAMAN MODAL	Pertambahan Jumlah Investor Pariwisata	3	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DAN SISTEM INFORMASI	Presentase perusahaan yang sesuai realisasi investasi disektor pariwisata dengan rencana investasi	0.44%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
20	Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase pemenuhan sarana parasarana penunjang Jalan di dan		DISHUB

Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Program (Outcome)	2019	PD yang Bertanggung Jawab
			Target	
1	2	3	4	5
ekonomi khusus (KEK) Tanjung kelayang	PERHUBUNGAN DARAT	menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Kelayang		
	PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan ekonomi khusus (KEK) Tanjung kelayang	0%	PUPR
	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN DARAT	Persentase pemenuhan sarana parasarana penunjang perhubungan darat di Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang	25%	DISHUB
	PROGRAM PENINGKATAN TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP	Tersedianya Dokumen KLHS Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Pariwisata Tanjung Kelayang yang digunakan dalam perencanaan kawasan		DLH
21 Pengembangan Kawasan peruntukan Pariwisata Museum Nasional Maritim Belitung	PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	Persentase Jumlah Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Pariwisata Museum Nasional Maritim Belitung yang diimplementasikan	25%	PUPR
	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	Persentase sarana dan prasarana pariwisata di Kawasan Pariwisata Museum Nasional Maritim Beltung		BUDPAR
	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN DARAT	Persentase pemenuhan sarana parasarana penunjang perhubungan darat di Kawasan Pariwisata Museum Nasional Maritim Beltung	25%	DISHUB
	PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di Kawasan Pariwisata Museum Nasional Maritim Belitung	2%	PUPR
		Persentase Jembatan Provinsi dalam kondisi baik di Kawasan Pariwisata Museum Nasional Maritim Beltung	2%	PUPR
22 Pengembangan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan pulau sumatera	PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di kawasan konektifitas Pulau Bangka dengan Pulau Sumatera	91.25%	DINAS PUPR
		Persentase Jembatan Provinsi dalam kondisi baik di kawasan konektifitas Pulau Bangka dengan Pulau Sumatera	82.00%	DINAS PUPR
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	Persentase panjang talud yang terbangun di kawasan konektifitas Pulau Bangka dengan Pulau Sumatera	5%	DINAS PUPR
		Persentase volume air baku yang tersedia dapat digunakan di kawasan konektifitas Pulau Bangka dengan Pulau Sumatera	5%	DINAS PUPR
	PROGRAM PENGELOLAAN RUANG LAUT	Persentase Usulan Pemanfaatan Ruang Laut yang terekomendasi sesuai dengan peruntukannya pada kawasan konektifitas Pulau	65.00%	DKP

Arah Kebijakan		Program Perangkat Daerah	Indikator Program (Outcome)	2019	PD yang Bertanggung Jawab	
				Target		
1		2	3	4	5	
			Bangka dengan Pulau Sumatera			
23	Pengembangan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN LAUT	Presentase sarana dan prasarana perhubungan laut kawasan konektifitas Pulau Bangka dengan Pulau Sumatera		DISHUB	
		PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	Persentase tersedianya lahan bersertifikat untuk kepentingan umum di kawasan konektivitas pulau bangka dan pulau sumatera		DINAS PUPR	
		PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil	0%	DINAS PUPR	
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	Persentase panjang talud yang terbangun di kawasaan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil	5%	DINAS PUPR	
			Persentase volume air baku yang tersedia dapat digunakan di kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil	5%	DINAS PUPR	
		PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN LAUT	Persentase pulau-pulau berpenduduk yang terkoneksi kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil	30%	DISHUB	
	24	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin	PROGRAM PENANGANAN FARKIR MISKIN	Persentase PMKS yang mendapatkan Bantuan Beras Sejahtera	19.64	DINSOS
			PROGRAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN	Persentase peningkatan kuantitas dan kualitas rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin	22.51	DINAS PRKP
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH ATAS			Persentase Siswa SMA miskin yang mendapatkan beasiswa miskin	100	DINAS PENDIDIKAN	
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KEJURUAN			Persentase siswa SMK miskin yang mendapatkan beasiswa miskin	100	DINAS PENDIDIKAN	
	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN	Persentase kepesertaan JKN	92	DINAS KESEHATAN		
	PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Masyarakat Miskin yang mendapat bantuan Pangan dan Gizi	72.07%	DINAS KESEHATAN		
25	Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN	Persentase Kepala Keluarga perempuan miskin yang diberdayakan	9.47	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB	
		PROGRAM PENANGANAN FARKIR MISKIN	Persentase PMKS (farkir miskin) yang mendapatkan Bantuan Usaha	18.15	DINSOS	

Arah Kebijakan		Program Perangkat Daerah	Indikator Program (Outcome)	2019	PD yang Bertanggung Jawab
				Target	
1		2	3	4	5
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN	Persentase rumah tangga miskin yang bekerja disektor perdagangan	10%	DISPERINDAG
			Persentase Pemantauan dan Pengawasan distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting (18 bahan Pokok)		DISPERINDAG
		PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase informasi berkaitan dengan penanggulangan Kemiskinan yang dapat diakses oleh masyarakat	25%	DISKOMONFO
		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I	10.08	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
			persentase penurunan kecelakaan kerja	0.32	DISNAKER
26	Meningkatkan Pengendalian Penyalahgunaan Napza	PROGRAM PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR	Persentase Puskesmas/Rumah sakit yang melayani Institusi Pelayanan Wajib Lapor ( IPWL) Napza		DINKES
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS MEDIS KEJIWAAN DAN NAPZA	Persentase penyalahgunaan Napza yang mendapatkan pelayanan medis rehabilitasi	30	RSJ
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS KEPERAWATAN JIWA DAN NAPZA	Persentase penyalahgunaan Napza yang mendapatkan pelayanan keperawatan rehabilitasi	20	RSJ
		PROGRAM KETAHANAN EKONOMI, SENI, BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN	Pertumbuhan masyarakat yang mendapatkan pemahaman penyalahgunaan napza	500	KESBANGPOL
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase korban nazpza	21.28	DINAS SOSIAL
27	Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan pada peningkatan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas,	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial	19.01	DINSOS
28	Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan pada peningkatan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas,	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PANTI SOSIAL	Persentase PMKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial melalui Pelayanan Teknis Panti Sosial	18.28	UPTD PANTI SOSIAL
29	Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan pada peningkatan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas,	PROGRAM PENGUATAN PENYELENGGARAAN PANTI SOSIAL	Persentase PMKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial melalui Penguatan Penyelenggaraan pelayanan Panti Sosial	80.62	UPTD PANTI SOSIAL
		PROGRAM PENINGKATAN PEMBUDAYAAN DAN PENINGKATAN PRESTASI OLAH RAGA	Persentase lansia yang aktif yang mengikuti pelayanan olah raga khusus lansia	0.19%	DISKEPORA

Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Program (Outcome)	2019	PD yang Bertanggung Jawab	
			Target		
1	2	3	4	5	
		Persentase Pelajar Penyandang Disabilitas yang berprestasi di bidang keolahragaan	4.02%	DISKEPORA	
		Persentase Sumber Daya Tenaga Keolahragaan yang memiliki standar Nasional	2.67%	DISKEPORA	
	PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase lansia yang dilayani sesuai standar kesehatan		DINKES	
	PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN KEAGAMAAN	Persentase lansia yang berkompetensi keagamaan	80%	BIRO KESRA	
		Prosentase jumlah masyarakat yang kompeten di bidang keagamaan	80	BIRO KESRA	
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LATIHAN KERJA INDUSTRI	Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan kompetensi		DISNAKER	
	PROGRAM PENGEMBANGAN PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pesentase lansia potensial yang memiliki kompetensi ketenagakerjaan	0.28	DISNAKER	
		Persentase Exs korban Napza yang memiliki kompetensi ketenagakerjaan	10.64	DISNAKER	
		Persentase wanita Tunasosial yang memilik kompetensi ketenagakerjaan	8.62	DISNAKER	
		Persentase penyandang disabilitas yang memiliki kompetensi ketenagakerjaan	0.78	DISNAKER	
30	Sistem pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial disusun, ditata, dan dikembangkan untuk memastikan dan memantapkan pemenuhan hak-hak masyarakat akan pelayanan dasar publik.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan perlindungan dan jaminan sosial yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial	22.84	DINSOS
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan pemberdayaan sosial yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial	17
			Persentase PSKS yang mendapatkan pelayanan pemberdayaan sosial yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial	15.63	DINSOS

#### 5.1.7. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Belitung Timur

Pembangunan Kabupaten Belitung Timur diarahkan berdasarkan sasaran pokok 3 (tiga) sasaran meliputi: pertama kesejahteraan masyarakat dengan 2 (dua) indikator, yaitu: kemiskinan dan pengangguran, kedua meningkatnya ekonomi daerah melalui indikator pertumbuhan PDRB dan ketiga terpenuhinya kapasitas dan kualitas SDM, dengan indikator

Indeks Pembangunan Manusia. Berdasarkan 3 (tiga) sasaran dan 4 (indikator) tersebut maka pembangunan Kabupaten Belitung Timur tahun 2019 diarahkan pada Penanggulangan Kemiskinan dan Pertumbuhan PDRB melalui penguatan sektor Kelautan dan Pariwisata

**Gambar V.9**

Sasaran Pembangunan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019



Pembangunan Kabupaten Belitung Timur tahun 2019 diarahkan pada Penanggulangan Kemiskinan melalui kebijakan Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin sedangkan Pertumbuhan PDRB melalui penguatan sektor Kelautan terutama Pengembangan Kawasan Pedesaan Minapolitan Manggar dan sektor Pariwisata terutama Pengembangan Kawasan strategis Pelabuhan ASDP Manggar – Ketapang

**Tabel V.7**

Arah Kebijakan, Program Prioritas, dan Kegiatan Prioritas RKPD 2019 Dalam Rangka Mendukung Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Belitung Timur

Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Program (Outcome)	2019	PD yang Bertanggung Jawab
			Target	
1	2	3	4	
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PENGELOLAAN RUANG LAUT	Luas Kawasan Konservasi yang dicadangkan (Ha)	820,077	DKP
		Persentase sarana dan prasarana yang terbangun di Desa Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (%)	2.13	DKP
		Persentase Usulan Pemanfaatan Ruang Laut yang terekomendasi (%)	65	DKP
2	PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Pelaku Usaha yang Taat Aturan (%)	70	DKP

Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Program (Outcome)	2019	PD yang Bertanggung Jawab	
			Target		
1	2	3	4		
perikanan.					
3	Pengelolaan dan pemanfaatan tata ruang laut serta penegakan perundang-undangan kelautan dan perikanan.	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN LAUT	Prosentase Pelabuhan Khusus (Pelsus) dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) yang memiliki izin	15.00%	DISHUB
4	Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing sektor Kelautan dan Perikanan	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LATIHAN KERJA INDUSTRI	Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan tentang Kelautan dan perikanan yang berkompentensi	0.11%	UPTD BLKI
		PROGRAM PENGEMBANGAN PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase peningkatan tenaga kerja kelautan dan perikanan bersertifikat kompetensi	17.54	DISNAKER
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase peningkatan produktifitas tenaga kerja sektor Perikanan	0.12	UPTD BALAI PRODUKTIFITAS
		PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KEJURUAN	Persentase Jumlah SMK dengan program keahlian perikanan yang memiliki akreditasi A	100	DINAS PENDIDIKAN
			Persentase Jumlah SMK Program Keahlian Kelautan dan Perikanan yang mengeluarkan Sertifikasi Profesi pihak 1 (LSP-P1)	100	DINAS PENDIDIKAN
5	Peningkatan Produksi, Kualitas dan produktifitas tenaga kerja sektor Kelautan dan perikanan	PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI	persentase peningkatan volume usaha sektor kelautan dan perikanan	5%	DINAS KUMKM
		PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN USAHA KECIL	persentase pelaku usaha kecil sektor kelautan dan perikanan yang menandatangani kesepakatan kemitraan dengan dunia usaha luar daerah	-	DINAS KUMKM
		persentase Usaha Kecil sektor kelautan dan perikanan yang mendapatkan Izin Usaha	-	DINAS KUMKM	
		persentase Usaha Kecil sektor kelautan dan perikanan yang difasilitasi promosi/ pemasaran produknya melalui even pameran	-	DINAS KUMKM	
		persentase Usaha Kecil sektor kelautan dan perikanan yang mendapatkan Diseminasi dan pendampingan akses permodalan	-	DINAS KUMKM	
		persentase Usaha kecil sektor kelautan dan perikanan yang difasilitasi promosi/ pemasaran produknya melalui web	1	DINAS KUMKM	



Arah Kebijakan		Program Perangkat Daerah	Indikator Program (Outcome)	2019	PD yang Bertanggung Jawab
				Target	
1	2	3	4		
6	Peningkatan Produksi, Kualitas dan produktifitas tenaga kerja sektor Kelautan dan perikanaan	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LATIHAN PERKOPERASIAN, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH		3%	UPTD BALAI LATIHAN PERKOPERASIAN, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
			persentase SDM Usaha Kecil sektor perikanan terlatih	0.4%	UPTD BALAI LATIHAN PERKOPERASIAN, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBERDAYA, FASILITASI DAN AKSES INDUSTRI	Persentase Tenaga Kerja yang terserap di Industri Kelautan dan Perikanaan	0.70%	DISPERINDAG
		PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA PERIKANAN BUDIDAYA DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	Volume Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	12,120	DKP
			Angka Konsumsmi Ikan (Kg/Org/Tahun)	54	DKP
			Volume Produksi Olahan (ton)	21,110	DKP
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	Volume Produksi Perikanan Tangkap (Ton/Tahun)	215,300	DKP
			Nilai Tukar Nelayan (Indeks)	109	DKP
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PEMBENIHAN IKAN AIR PAYAU	Pertambahan Jumlah Produksi Benih Ikan yang unggul (Juta Ekor)	9.63	UPTD BALAI BENIH IKAN AIR PAYAU (BBIAP) TANJUNG KRASAK
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PEMBENIHAN IKAN LAUT	Pertambahan Jumlah Produksi Benih Ikan yang unggul (Juta Ekor)	0.06	UPTD BALAI BENIH IKAN LAUT (BBIL) TANJUNG RUSA
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PEMBENIHAN IKAN AIR TAWAR	Pertambahan Jumlah Produksi Benih Ikan yang unggul (Juta Ekor)	0.33	UPTD BALAI BENIH IKAN SENTRAL (BBIS) PEMALI
		PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN, PEMBINAAN HUB. INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL	persentase perusahaan kelautan perikanan yang diperiksa dan dibina sesuai standar pemeriksaan perusahaan	1.2	DISNAKER
6	Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing sektor kelautan dan perikanaan	PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI	Persentase jumlah koperasi bidang Kelautan dan Perikanaan yang berkualitas sesuai standar	3.60%	DINAS KUMKM
			Persentase pertumbuhan kelembagaan koperasi aktif sektor kelautan dan perikanan	5%	DINAS KUMKM
7	Peningkatan standarisasi Produk dan jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing sektor kelautan dan perikanaan	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LABORATORIUM PENGUJIAN DAN PENGENDALIAN MUTU HASIL PERIKANAN	Persentase Produk Hasil Kelautan dan Perikanan yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan	84.00%	UPTD LABORATORIUM PENGUJIAN DAN PENGENDALIAN MUTU HASIL PERIKANAN



Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Program (Outcome)	2019	PD yang Bertanggung Jawab
			Target	
1	2	3	4	
8	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Pertambahan Jumlah profil investasi Sektor perikanan dan kelautan yang digunakan untuk promosi investasi di sektor perikanan dan Kelautan	5	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Pertambahan Jumlah UKM Sektor kelautan dan perikanan yang bermitra dengan investor	1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
9	PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI PENANAMAN MODAL	Pertambahan Jumlah Investor sektor kelautan dan perikanan	2	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
10	PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DAN SISTEM INFORMASI	Presentase perusahaan sektor kelautan dan perikanan yang sesuai realisasi investasi dengan rencana investasi	0.44%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		Peningkatan produk Usaha kecil sektor kelautan dan perikanan yang tersertifikasi	550	DINAS KUMKM
		pertambahan jumlah pelaku usaha kecil sektor kelautan dan perikanan yang menandatangani kesepakatan kemitraan dengan dunia usaha dalam daerah	160	DINAS KUMKM
11	PROGRAM PENGEMBANGAN	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap di	5,000	DKP

Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Program (Outcome)	2019	PD yang Bertanggung Jawab
			Target	
1	2	3	4	
Minapolitan Manggar	PERIKANAN TANGKAP	Kawasan Pedesaan Minapolitan Manggar		
12	Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, ekonomi kreatif, peran serta masyarakat dan kelembagaan pariwisata	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA, EKONOMI KREATIF DAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN		BUDPAR
	Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM, ekonomi kreatif, peran serta masyarakat dan kelembagaan pariwisata	Presentase pelaku ekonomi kreatif yang terlatih		BUDPAR
		Pertumbuhan kelembagaan pariwisata	11	BUDPAR
	PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI	Pertumbuhan kelembagaan koperasi aktif pendukung pariwisata	2.70%	KUMKM
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LATIHAN PERKOPERASIAN, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	Persentase SDM Koperasi sektor pariwisata terlatih	2.06%	KUMKM
		persentase SDM Usaha Kecil sektor pariwisata terlatih	0.25%	KUMKM
	PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN USAHA KECIL	persentase Usaha Kecil sektor pariwisata yang menggunakan Aplikasi Mobile Platform (Lalaper)		KUMKM
		persentase Usaha Kecil sektor pariwisata yang mendapatkan Izin Usaha	1	KUMKM
		persentase Usaha Kecil sektor pariwisata yang mendapatkan Diseminasi dan pendampingan akses permodalan	0	KUMKM
	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KEJURUAN	Persentase SMK pariwisata Terkreditasi A	100	DINAS PENDIDIKAN
	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	Presentase objek wisata yang terkelola	12%	BUDPAR
	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	Persentase tingkat kunjungan wisatawan	6	BUDPAR
	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN LAUT	Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasana Perhubungan Laut di lokasi wisata	30%	DISHUB
	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN DARAT	Persentase pemenuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan darat dalam menunjang Daerah Tujuan Wisata	20%	DISHUB
	PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di daerah pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata.	94.51%	DINAS PUPR
		Persentase Jembatan Provinsi dalam kondisi baik di daerah pengembangan	86.00%	DINAS PUPR

Arah Kebijakan		Program Perangkat Daerah	Indikator Program (Outcome)	2019 Target	PD yang Bertanggung Jawab
1		2	3	4	
			destinasi dan pemasaran pariwisata.		
		PROGRAM PENINGKATAN PUSAT PELAYANAN USAHA TERPADU KUMKM	Pertumbuhan produk parekraf	10%	DINAS KUMKM
		PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase informasi berkaitan dengan pemasaran pariwisata yang dapat diakses masyarakat	25%	DISKOMINFO
13	Pengembangan standarisasi SDM dalam meningkatkan daya saing kepariwisataan daerah	PROGRAM PENGEMBANGAN PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase peningkatan tenaga kerja pariwisata bersertifikat kompetensi	17.54	DISNAKER
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LATIHAN KERJA INDUSTRI	Persentase pencari kerja pariwisata yang mendapat pelatihan	0.15	UPD BLKI
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PENGEMBANGAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase peningkatan produksi per tenaga kerja bidang pariwisata	0.05	UPTD BALAI PRODUKTIFITAS
		PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KEJURUAN	Persentase Jumlah SMK Program Keahlian Pariwisata yang mengeluarkan sertifikat Profesi pihak 1 (LSP-P1)	33.33	DINDIK
		PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI	persentase peningkatan volume usaha koperasi disektor pariwisata	1%	KUMKM
14	Peningkatan kualitas, partisipasi dan prestasi pemuda di berbagai bidang pembangunan, dan peningkatan pengelolaan ke olah raga serta mengembangkan peran serta kebudayaan dalam mendukung pembangunan kepariwisataan	PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Pemuda Lintas Negara	6.67%	DISKEPORA
		PROGRAM PENINGKATAN PEMBUDAYAAN DAN PENINGKATAN PRESTASI OLAH RAGA	Pertumbuhan Jumlah peserta yang mengikuti babel sport tourism	4.00%	DISKEPORA
		PROGRAM PENGEMBANGAN STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Presentase jumlah sarana dan prasaran olahraga yang terbangun dalam mendukung event olahraga regional dan nasional	16.67%	DISKEPORA
		PROGRAM PELESTARIAN BUDAYA	Persentase budaya lokal yang dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan dan dibina	14.87%	BUDPAR
15	Pembinaan hubungan industri dan kesehatan kerja disektor pariwisata	PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN, PEMBINAAN HUB. INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL	persentase Jumlah perusahaan dibidang pariwisata yang diperiksa dan dibina sesuai standar pemeriksaan perusahaan	1.6	DISNAKER
16	Peningkatan standarisasi Produk	PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN USAHA	Peningkatan produk Usaha kecil sektor pariwisata	250	DINAS KUMKM

Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Program (Outcome)	2019	PD yang Bertanggung Jawab	
			Target		
1	2	3	4		
dan jasa KUKM dalam meningkatkan daya saing kepariwisataan	KECIL	yang tersertifikasi			
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBERDAYA, FASILITASI DAN AKSES INDUSTRI	Persentase Tenaga Kerja yang terserap di industri pariwisata	0.31%	DISPERINDAG	
	PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH DAN PENGAWASAN INDUSTRI	Persentase industri yang memenuhi standar		DISPERINDAG	
17	Pengembangan pariwisata daerah, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antar sektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di bidang pariwisata.	PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI BUMD, PENANAMAN MODAL, PARIWISATA DAN BUDAYA	Prosentase Jumlah Kebijakan BUMD, Penanaman Modal, Pariwisata dan Budaya yang di implementasikan	72	BIRO EKONOMI
		PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Pertambahan Jumlah Profil Investasi Pariwisata yang digunakan untuk promosi investasi di sektor pariwisata	-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			Pertambahan Jumlah UKM pariwisata yang bermitra dengan investor	1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI PENANAMAN MODAL	Pertambahan Jumlah Investor Pariwisata	3	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DAN SISTEM INFORMASI	Presentase perusahaan yang sesuai realisasi investasi disektor pariwisata dengan rencana investasi	0.44%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
22	Pengembangan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan pulau sumatera	PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di kawasan konektifitas Pulau Bangka dengan Pulau Sumatera	91.25%	DINAS PUPR
			Persentase Jembatan Provinsi dalam kondisi baik di kawasan konektifitas Pulau Bangka dengan Pulau Sumatera	82.00%	DINAS PUPR
		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	Persentase panjang talud yang terbangun di kawasaan konektifitas Pulau Bangka dengan Pulau Sumatera	5%	DINAS PUPR
			Persentase volume air baku yang tersedia dapat digunakan di kawasan konektifitas Pulau Bangka dengan Pulau Sumatera	5%	DINAS PUPR
		PROGRAM PENGELOLAAN RUANG LAUT	Persentase Usulan Pemanfaatan Ruang Laut	65.00%	DKP

Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Program (Outcome)	2019	PD yang Bertanggung Jawab	
			Target		
1	2	3	4		
		yang terekomendasi sesuai dengan peruntukannya pada kawasan konektifitas Pulau Bangka dengan Pulau Sumatera			
	PROGRAM PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	Persentase tersedianya lahan bersertifikat untuk kepentingan umum di kawasan konektivitas pulau bangka dan pulau sumatera		DINAS PUPR	
23	Pengembangan kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil	PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam kondisi mantap di kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil	0%	DINAS PUPR
			Persentase Jembatan Provinsi dalam kondisi baik di kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil	0%	DINAS PUPR
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR		Persentase panjang talud yang terbangun di kawasaan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil	5%	DINAS PUPR
			Persentase volume air baku yang tersedia dapat digunakan di kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil	5%	DINAS PUPR
	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN LAUT		Persentase pulau-pulau berpenduduk yang terkoneksi kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil	30%	DISHUB
			Jumlah armada pengangkutan	-	DISHUB
24	Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin	PROGRAM PENANGANAN FARKIR MISKIN	Persentase PMKS yang mendapatkan Bantuan Beras Sejahtera	19.64	DINSOS
		PROGRAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN	Persentase peningkatan kuantitas dan kualitas rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin	22.51	DINAS PRKP
	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN MENENGAH ATAS	Persentase Siswa SMA miskin yang mendapatkan beasiswa miskin	100	DINAS PENDIDIKAN	
	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENDIDIKAN KEJURUAN	Persentase siswa SMK miskin yang mendapatkan beasiswa miskin	100	DINAS PENDIDIKAN	
	PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN	Persentase kepesertaaan JKN	92	DINAS KESEHATAN	
	PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Masyarakat Miskin yang mendapat bantuan Pangan dan Gizi	72.07%	DINAS KESEHATAN	
25	Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP PEREMPUAN	Persentase Kepala Keluarga perempuan miskin yang diberdayakan	9.47	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB
		PROGRAM PENANGANAN FARKIR MISKIN	Persentase PMKS (farkir miskin) yang mendapatkan	18.15	DINSOS

Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Program (Outcome)	2019	PD yang Bertanggung Jawab	
			Target		
1	2	3	4		
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERDAGANGAN	Bantuan Usaha			
		Persentase rumah tangga miskin yang bekerja disektor perdagangan	10%	DISPERINDAG	
		Persentase Pemantauan dan Pengawasan distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting (18 bahan Pokok)		DISPERINDAG	
	PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase informasi berkaitan dengan penanggulangan Kemiskinaan yang dapat diakses oleh masyarakat	25%	DISKOMONFO	
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I	10.08	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB	
	PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN, PEMBINAAN HUB. INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL	Pertumbuhan kenaikan upah tenaga kerja		DISNAKER	
		persentase penyelesaian kasus tenaga kerja	65%	DISNAKER	
		persentase penurunan kecelakaan kerja	0.32	DISNAKER	
26		Meningkatkan Pengendalian Penyalahgunaan Napza	Persentase Puskesmas/Rumah sakit yang melayani Institusi Pelayanan Wajib Lapor ( IPWL) Napza		DINKES
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS MEDIS KEJIWAAN DAN NAPZA	Persentase penyalahgunaan Napza yang mendapatkan pelayanan medis rehabilitasi	30	RSJ	
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS KEPERAWATAN JIWA DAN NAPZA	Persentase penyalahgunaan Napza yang mendapatkan pelayanan keperawatan rehabilitasi	20	RSJ	
	PROGRAM KETAHANAN EKONOMI, SENI, BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN	Pertumbuhan masyarakat yang mendapatkan pemahaman penyalahgunaan napza	500	KESBANGPOL	
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase korban nazpza	21.28	DINAS SOSIAL	
	27	Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan pada peningkatan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas,	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial	19.01
28	Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan pada peningkatan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas,	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS PANTI SOSIAL	Persentase PMKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial melalui Pelayanan Teknis Panti Sosial	18.28	UPTD PANTI SOSIAL
29	Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan pada peningkatan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial	PROGRAM PENGUATAN PENYELENGGARAAN PANTI SOSIAL	Persentase PMKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial melalui Penguatan Penyelenggaraan	80.62	UPTD PANTI SOSIAL

Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Program (Outcome)	2019	PD yang Bertanggung Jawab	
			Target		
1	2	3	4		
yang berkualitas,		pelayanan Panti Sosial			
	PROGRAM PENINGKATAN PEMBUDAYAAN DAN PENINGKATAN PRESTASI OLAH RAGA	Persentase lansia yang aktif yang mengikuti pelayanan olah raga khusus lansia	0.19%	DISKEPORA	
		Persentase Pelajar Penyandang Disabilitas yang berprestasi di bidang keolahragaan	4.02%	DISKEPORA	
		Persentase Sumber Daya Tenaga Keolahragaan yang memiliki standar Nasional	2.67%	DISKEPORA	
	PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase lansia yang dilayani sesuai standar kesehatan		DINKES	
	PROGRAM PENINGKATAN PEMBINAAN KEAGAMAAN	Persentase lansia yang berkompentensi keagamaan	80%	BIRO KESRA	
		Prosentase jumlah masyarakat yang kompeten di bidang keagamaan	80	BIRO KESRA	
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS LATIHAN KERJA INDUSTRI	Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan kompetensi		DISNAKER	
	PROGRAM PENGEMBANGAN PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pesentase lansia potensial yang memiliki kompetensi ketenagakerjaan	0.28	DISNAKER	
		Persentase Exs korban Napza yang memiliki kompetensi ketenagakerjaan	10.64	DISNAKER	
		Persentase wanita Tunasosial yang memilik kompetensi ketenagakerjaan	8.62	DISNAKER	
		Persentase penyandang disabilitas yang memiliki kompetensi ketenagakerjaan	0.78	DISNAKER	
	30	Sistem pemberdayaan, perlindungan dan jaminan sosial disusun, ditata, dan dikembangkan untuk memastikan dan memantapkan pemenuhan hak-hak masyarakat akan pelayanan dasar publik.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan perlindungan dan jaminan sosial yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial	22.84
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan pemberdayaan sosial yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial	17	DINSOS
			Persentase PSKS yang mendapatkan pelayanan pemberdayaan sosial yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial	15.63	DINSOS
31	Peningkatan penyelenggaraan penanggulangan bencana	PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Daerah Rawan Bencana yang Diintervensi Dalam Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	74	BPBD



Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Program (Outcome)	2019	PD yang Bertanggung Jawab
			Target	
1	2	3	4	
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase korban bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	20	DINSOS
	PROGRAM PENGEMBANGAN DISTRIBUSI, STABILITAS, DAN CADANGAN PANGAN	Persentase Cadangan Pangan	2.7	DINAS PANGAN
	PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase informasi berkaitan dengan penanggulangan bencana yang dapat di akses oleh masyarakat	15%	KOMINFO
	PRORAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	Persentase Kab/kota yang melaksanakan kewaspadaan dini dan respon	80%	DINKES
	PROGRAM PENINGKATAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Persentase peningkatan kualitas linmas dalam penanganan bencana dan kebakaran	4.24%	SATPOL PP
	PROGRAM KEDARURATAN DAN LOGISTIK PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Daerah Rawan Bencana yang Diintervensi Dalam Penanggulangan Bencana	80	BPBD
	PRORAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	Persentase penduduk terdampak krisis kesehatan yang mendapat pelayanan kesehatan akibat bencana atau berpotensi bencana dalam satu provinsi	15%	DINKES
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS MEDIS DAN PENUNJANG MEDIS	Persentase korban bencana yang mendapat pelayanan rujukan	100%	RSUP
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	persentase Panjang Talud yang direhabilitasi dan direkonstruksi yang berfungsi dengan baik untuk menahan tanah	25%	PUPR
		Persentase Panjang Sungai /saluran yang dinormalisasi dan befungsi memperlancar aliran air sungai akibat bencana	26.80%	PUPR
	PROGRAM PERUMAHAN RAKYAT	Persentase rekonstruksi dan rehabilitasi rumah akibat bencana	51%	PRKP
	PROGRAM KEBINAMARGAAN	Persentase Panjang jalan yang direhabilitasi dan direkonstruksi akibat bencana	0.86%	PUPR
		Persentase panjang jembatan yang direhabilitasi dan direkonstruksi akibat bencana	0.12%	PUPR
	PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Daerah Rawan Bencana yang Diintervensi Dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	75	BPBD
	PRORAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	Persentase penduduk pada kondisi kejadian luarbiasa (KLB) yang mendapat pelayanan kesehatan dalam satu Provinsi	100%	DINKES



Arah Kebijakan		Program Perangkat Daerah	Indikator Program (Outcome)	2019 Target	PD yang Bertanggung Jawab
1		2	3	4	
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS MEDIS KEJIWAAN DAN NAPZA	Persentase korban bencana yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa	80	RSJ
32	Pengembangan Pengelolaan kawasan rawan bencana alam	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR	Persentase Panjang Penahan Abrasi Pantai	41.40%	DINAS PUPR
			Panjang sungai yang dinormalisasi pada daerah rawan bencana	40.00%	DINAS PUPR
			panjang penahan tanah akibat erosi	49.00%	DINAS PUPR
		PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN DAS DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Persentase DAS kritis yang di kelola	7	DINAS KEHUTANAAN
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TEKNIS TATA KELOLA DISHUT	Persentase kegiatan pengelolaan hutan oleh UPTD KPH (%)	100%	DINAS KEHUTANAAN

## 5.2. RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan pedoman perencanaan yang harus diacu dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Di dalam dokumen RTRW telah ditetapkan Rencana Pola Ruang, Rencana Struktur Ruang, serta Rencana Kawasan Strategis.

### a) Rencana Pola Ruang

- A. Kawasan Lindung
- B. Kawasan Budidaya

Di dalam rencana pola ruang telah ditetapkan rencana pengembangan kawasan lindung yang meliputi :

1. Kawasan hutan lindung;
2. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya;
3. Kawasan perlindungan setempat;
4. kawasan suaka alam,
5. pelestarian alam, situs dan kawasan cagar budaya;
6. kawasan rawan bencana alam.

### b) Rencana Struktur Ruang Wilayah

- A. Rencana Sistem Perkotaan;
- B. Rencana Sistem Jaringan Transportasi;
- C. Rencana Sistem Jaringan Energi;
- D. Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi;
- E. Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air;
- F. Sistem Prasarana Lingkungan

### c) Rencana Kawasan Strategis

- A. Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi:
- B. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya
- C. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup

#### **5.2.1. Indikasi Program Utama Lima Tahunan RTRW Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034**

Bahwa dalam perencanaan pembangunan, diharuskan adanya suatu keselarasan antara pembangunan sektoral dan pembangunan spasial. Oleh karenanya, didalam dokumen RKPD yang merupakan dokumen perencanaan sektoral harus mengacu kepada dokumen RTRW yang merupakan dokumen perencanaan spasial sehingga dapat dihasilkan perencanaan yang berorientasi pada kesesuaian antara sektoral dan spasial.

Adapun indikasi program dan kegiatan utama didalam RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagaimana yang tertuang didalam Tabel V.8

**Tabel V.8**  
Indikasi Program Utama Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2014-2034

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
A	Pemantapan Sistem Perkotaan												
A1	Perwujudan PKNP Pangkal Pinang	Penyusunan RDTR Kota Pangkal Pinang	Dinas Pekerjaan Umum									APBD Kokab	Dinas Pekerjaan Umum
		Pengembangan kantor Provinsi dan permukiman di Bukit Intan	Dinas Pekerjaan Umum									APBD Prov	Dinas Pekerjaan Umum
		Pembangunan Kawasan Industri di Pangkalbalam	Dinas Perindag									APBD Kokab	Dinas Perindag
		Pengembangan inner ringroad dan outer ring road	Dinas Pekerjaan Umum									APBD Prov	Dinas Pekerjaan Umum
		Pengembangan taman kota	Dinas Pekerjaan Umum									APBD Kokab	Dinas Pekerjaan Umum
		Pemanfaatan kolong dan lahan genangan secara lebih bermanfaat	Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD)									APBD Kokab	Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD)
		Mengembangkan Pelabuhan Pangkalbalam	Dinas Perhubungan									APBD Prov	Dinas Perhubungan
		Pengembangan kawasan wisata kota di Pasirpadi	Dinas Budpar									APBD Kokab	Dinas Budpar
		Peningkatan terminal	Dinas Perhubungan									APBD Prov	Dinas Perhubungan

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
A2	Perwujudan PKW Muntok	Pemantapan tata batas kawasan kota tua	BPN										BPN
		Penyusunan RDTR Kota tua	Dinas Pekerjaan Umum									APBD Kokab	Dinas Pekerjaan Umum
		Melakukan restorasi dan revitalisasi bangunan bersejarah	Dinas Pekerjaan Umum									APBN/APBD	Dinas Pekerjaan Umum
		Perbaikan dan pembangunan jalan antar pusat kegiatan	Dinas Pekerjaan Umum									APBD Kokab	Dinas Pekerjaan Umum
		Pembangunan sistem penyediaan air minum	Dinas Pekerjaan Umum									APBD Kokab	Dinas Pekerjaan Umum
		Pembangunan fasiltias kesehatan rumah sakit tipe B	Dinas Kesehatan									APBD Prov	Dinas Kesehatan
		Pembangunan IPAL pada pusat perdagangan, fasilitas sosial/umum dan kawasan wisata	Badan Lingkungan Hidup Daerah									APBD Kokab	Badan Lingkungan Hidup Daerah
A3	Perwujudan PKW Tanjung Pandan	Pembangunan kawasan ekonomi khusus Tanjung Batu	Disperindag									APBD Prov	Disperindag
		Pengembangan kawasan wisata	Disbudpar									APBD Kokab	Disbudpar
		Pembangunan infrastruktur pendukung wisata bahari	Dinas Pekerjaan Umum									APBD Kokab	Dinas Pekerjaan Umum
		Pembangunan fasilitas perdagangan berskala	Disperindag									APBD Prov	Disperindag

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		regional (pulau)											
		Pembangunan museum bahari	Disbudpar									APBD Prov	Disbudpar
		Pembangunan terminal tipe B	Dinas Pekerjaan Umum									APBD Prov	Dinas Pekerjaan Umum
		Pembangunan sistem penyediaan air minum	Dinas Pekerjaan Umum									APBD Kokab	Dinas Pekerjaan Umum
		Pembangunan fasiltias kesehatan rumah sakit tipe B	Dinas Kesehatan									APBD Prov	Dinas Kesehatan
		Pembangunan IPAL pada pusat perdagangan, fasilitas sosial/umum dan kawasan wisata	BHLD									APBD Kokab	BHLD
A4	Perwujudan <b>PKW Manggar</b>	Penyusunan RDTR kawasan perkotaan Manggar	Dinas Pekerjaan Umum									APBD Kokab	Dinas Pekerjaan Umum
		Rehabilitasi dan Refungsionalisasi Kolong	BHLD									APBD Prov/ APBD Kokab	BHLD
		Pembangunan fasilitas pendukung pelabuhan Manggar	Dinas Perhubungan									APBN/ APBD Prov	Dinas Perhubungan
		Pembangunan terminal tipe B Pembangunan sistem penyediaan ari minum	Dinas Perhubungan									APBD Prov	Dinas Perhubungan
		Pembangunan fasiltias kesehatan rumah sakit tipe B	Dinas Kesehatan									APBD Prov	Dinas Kesehatan

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Pembangunan IPAL pada pusat perdagangan, fasilitas sosial/umum dan kawasan wisata	Dinas PU									APBD Kokab	Dinas PU
A5	Perwujudan PKL Kelapa	Penetapan kawasan permukiman dan kelengkapan fasilitas pendukung	Dinas PU									APBD Kokab	Dinas PU
		Penyusunan masterplan kawasan perdagangan	Disperindag									APBD Kokab	Disperindag
		Pembangunan fasilitas wisata air panas	Disbudpar									APBD Kokab	Disbudpar
		Pembangunan industri pengolahan sawit	Diperindag									APBD Prov/ APBD Kokab	Diperindag
		Perbaikan dan peningkatan jalan ke pusat permukiman perdesaan	Dinas PU									APBD Kokab	Dinas PU
		Pembangunan IPAL pada pusat perdagangan, fasilitas sosial/umum dan kawasan wisata	BLHD									APBD Prov/ APBD Kokab	BLHD
A6	Perwujudan PKL Puding Besar	Pembangunan fasilitas rest area	Dinas Perhubungan									APBD Kokab	Dinas Perhubungan
		Rehabilitasi dan Refungsionalisasi Kolong	BLHD									APBD Kokab	BLHD
		Pembangunan fasilitas	Disperindag									APBD Kokab	Disperindag

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		perdagangan											
		Perbaikan dan peningkatan jalan ke pusat permukiman perdesaan	Dinas PU									APBD Kokab	Dinas PU
		Perbaikan lingkungan kawasan permukiman	Dinas PU									APBD Kokab	Dinas PU
		Peningkatan daya layan fasilitas kesehatan dan pendidikan	Dinas Kesehatan Dinas Pendidikan									APBD Kokab	Dinas Kesehatan Dinas Pendidikan
A7	Perwujudan <b>PKL Sungai Selan</b>	Perbaikan dan peningkatan jalan ke pusat permukiman perdesaan	Dinas PU									APBD Kokab	Dinas PU
		Perbaikan lingkungan kawasan permukiman	Dinas PU										Dinas PU
		Peningkatan daya layan fasilitas kesehatan dan pendidikan	Dinas Kesehatan Dinas Pendidikan									APBD Kokab	Dinas Kesehatan Dinas Pendidikan
A8	Perwujudan <b>PKL Payung</b>	Perbaikan dan peningkatan jalan ke pusat permukiman perdesaan	Dinas PU									APBD Kokab	Dinas PU
		Rehabilitasi dan Refungsionalisasi Kolong	BLHD									APBD Kokab	BLHD
		Pembangunan fasilitas perdagangan	Disperindag									APBD Kokab	Disperindag
		Perbaikan dan peningkatan jalan ke pusat permukiman perdesaan	Dinas PU									APBD Kokab	Dinas PU

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Perbaikan lingkungan kawasan permukiman	Dinas PU									APBN/APBD Prov/ APBD Kokab	Dinas PU
		Peningkatan daya layan fasilitas kesehatan dan pendidikan	Dinas Kesehatan Dinas Pendidikan									APBN/APBD Prov/ APBD Kokab	Dinas Kesehatan Dinas Pendidikan
A9	Perwujudan <b>PKL Sungailiat</b>	Penyusunan RDTR kawasan perkotaan Sungailiat	Dinas PU									APBD Kokab	Dinas PU
		Rehabilitasi dan Refungsionalisasi Kolong	BLHD									APBN/APBD Prov/ APBD Kokab	BLHD
		Pembangunan terminal tipe C	Dishub									APBD Kokab	Dishub
		Pembangunan fasilitas pelayanan wisatawan	Dibudpar									APBD Kokab	Dibudpar
		Peningkatan penyediaan sistem air bersih	Dinas PU										Dinas PU
		Pembangunan IPAL pada pusat perdagangan, fasilitas sosial/umum dan kawasan wisata	BLHD									APBN/APBD Prov/ APBD Kokab	BLHD
A10	Perwujudan <b>PKWp Koba</b>	Penyusunan RDTR kawasan perkotaan Koba	Dinas PU									APBD Kokab	Dinas PU
		Rehabilitasi dan Refungsionalisasi Kolong	BLHD									APBN/APBD Prov/ APBD Kokab	BLHD
		Pembangunan Pembangunan	Dishub									APBD Kokab	Dishub



NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		terminal tipe C											
		Pembangunan fasilitas pelayanan wisatawan	Disbudpar									APBD Kokab	Disbudpar
		Peningkatan penyediaan sistem air bersih	Dinas PU									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas PU
		Pembangunan IPAL pada pusat perdagangan, fasilitas sosial/umum dan kawasan wisata	BLHD									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	BLHD
A11	Perwujudan PKWp Toboali	Penyusunan RDTR kawasan perkotaan Toboali	Dinas PU									APBD Kokab	Dinas PU
		Rehabilitasi dan Refungsionalisasi Kolong	BLHD									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	BLHD
		Pembangunan Pembangunan terminal tipe C	Dinas Perhubungan									APBD Kokab	Dinas Perhubungan
		Pembangunan fasilitas pelayanan wisatawan	Disbudpar									APBD Kokab	Disbudpar
		Peningkatan penyediaan sistem air bersih	Dinas PU									APBD Kokab	Dinas PU
		Pembangunan IPAL pada pusat perdagangan, fasilitas sosial/umum dan kawasan wisata	BLHD									APBD Kokab	BLHD

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
B	Perwujudan Sistem Prasarana Wilayah												
B1	Perwujudan Sistem Transportasi												
a	Sistem Transportasi Darat	Peningkatan kondisi dan daya layan jalan kolektor primer	Dinas PU									APBN	Dinas PU
		Pembangunan jalan kolektor dan lokal primer yang menghubungkan PKL dengan PPK di seluruh wilayah kota/kabupaten	Dinas PU									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas PU
		Peningkatan dan pembangunan terminal B di Muntok, Sungailiat, Tanjung Pandan dan Manggar.	Dinas PU									APBD Prov	Dinas PU
b	Sistem Transportasi Laut	Percepatan penyelesaian pembangunan fasilitas penunjang pelabuhan utama Tanjung Batu	Dinas Perhubungan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Perhubungan
		Perbaikan dan peningkatan daya layan pelabuhan Tanjung Gudang (Belinyu), Tanjung Kelian (Muntok),	Dinas Perhubungan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Perhubungan

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Pangkal Balam (Pangkal Pinang), Tanjung Pandan (Tanjung Pandan), Pelabuhan Pangkal Sadai (Toboali) dan Pelabuhan Manggar (Manggar)											
		Pembangunan fasilitas dan infrastruktur penunjang pelabuhan laut	Dinas Perhubungan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Perhubungan
c	Sistem Transportasi Udara	Peningkatan daya dan kualitas layanan bandara Depati Amir	Dinas Perhubungan									APBN/APBD Prov	Dinas Perhubungan
		Peningkatan daya dan kualitas layanan H. AS Hanandjoeddin	Dinas Perhubungan									APBN/APBD Prov	Dinas Perhubungan
		Pengembangan fasilitas pendukung bandara	Dinas Perhubungan									APBN/APBD Prov	Dinas Perhubungan
		Penetapan dan sosialisasi kawasan keamanan operasi penerbangan (KKOP) setiap bandara	Dinas Perhubungan									APBN/APBD Prov	Dinas Perhubungan
B2	Perwujudan Sistem Jaringan Energi/Listrik	Pengembangan jaringan sampai pada kawasan perdesaan yang belum terlayani aliran listrik	PLN									APBN/APBD Prov/Masyarakat	PLN
		Pengembangan sumber	Dinas									APBN/APBD	Dinas

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		pembangkit listrik tenaga batubara, mikrohidro dan nuklir	Pertambangan dan Energi									Prov/Masyarakat	Pertambangan dan Energi
		Peningkatan pelayanan dan penyediaan gardu induk di seluruh PKW dan PKL	Dinas Pertambangan dan Energi									APBN/APBD Prov/Masyarakat	Dinas Pertambangan dan Energi
		Mendorong pengembangan energi terbarukan dengan sumber tenaga yang berasal dari angin, udara dan sinar matahari	Dinas Pertambangan dan Energi									APBN/APBD Prov/Masyarakat	Dinas Pertambangan dan Energi
		Penyediaan sumber energi listrik secara memadai untuk kawasan pariwisata, industri, bandara, pelabuhan laut dan rumah sakit	Dinas Pertambangan dan Energi									APBN/APBD Prov/Masyarakat	Dinas Pertambangan dan Energi
B3	Perwujudan Sistem Telekomunikasi	Pemanfaatan jaringan optik secara optimal, karena provinsi Kep. Bangka Belitung dilintasi jaringan telekomunikasi serat optik internasional	Dinas Kominfo									APBN/APBD Prov/Swasta	Dinas Kominfo

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		pengaturan penempatan menara telekomunikasi secara efektif dan efisien dengan mendorong penggunaan menara bersama antara operator <i>(join operation)</i>	Dinas Kominfo									Swasta	Dinas Kominfo
		pengembangan jaringan dan pelayanan informasi dan telekomunikasi sampai pada kawasan perdesaan.	Dinas Kominfo									APBN/Swasta	Dinas Kominfo
		Pengembangan dan peningkatan pelayanan telekomunikasi dan informasi untuk pelayanan publik dan usaha	Dinas Kominfo									APBN/ Swasta	Dinas Kominfo
B4	Perwujudan Sistem Sumber Daya Air	Pemanfaatan sumber daya air untuk; pembangkit tenaga listrik mikrohidro	Dinas PU									APBN/APBD Prov	Dinas PU
		Pemanfaatan sumber daya air untuk; bahan baku air minum	Dinas PU									APBN/APBD Prov	Dinas PU
		Pemanfaatan sumber daya air untuk; bahan baku pengarian sawah (irigasi) dan industri	Dinas PU									APBN/APBD Prov	Dinas PU

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Pemanfaatan sumber daya air untuk; air baku pelabuhan laut	Dinas PU										Dinas PU
		Pemanfaatan sumber daya air untuk; budidaya perikanan air tawar Pembangunan sistem drainase pada kawasan permukiman, areal rawan banjir dan sepanjang sisi jalan	Dinas PU									APBN/APBD Prov	Dinas PU
		Pembangunan cekdam pada hulu sungai	Dinas PU									APBN/APBD Prov	Dinas PU
		Sistem pengamanan pantai dari abrasi dilakukan melalui pendekatan struktur dan non struktur	Dinas PU									APBN/APBD Prov	Dinas PU
B5	Perwujudan Sistem Prasarana Permukiman	Penyusunan masterplan dan pembangunan sistem drainase pada seluruh wilayah perkotaan (PKNp, PKW dan PKL)	Dinas PU									APBN/APBD Prov	Dinas PU
		Pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) untuk kawasan	Dinas PU									APBN/APBD Prov	Dinas PU

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		perkotaan Pangkalpinang, Muntok, Tanjung Pandan dan Manggar											
		Pembangunan IPAL pada kawasan perkotaan Pangkalpinang, Muntok, Tanjung Pandan dan Manggar, kawasan wisata, komersial dan kawasan industri (IPAL industri) serta instalasi pengolah limbah beracun dan berbahaya (B3)	BLHD									APBN/APBD Prov	BLHD
		Penyediaan air bersih untuk setiap pusat permukiman, kawasan wisata, industri dan pelabuhan.	Dinas PU									APBN/APBD Prov	Dinas PU
C	Perwujudan Rencana Pola Ruang												
C1	Perwujudan Kawasan Lindung												
	Perwujudan Kawasan Hutan Lindung	Rehabilitasi dan konservasi lahan di kawasan lindung guna mengembalikan/meningkatk an fungsi lindung;	Dinas Kerhutanan									APBN/APBD Prov	Dinas Kerhutanan

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan lindung;	Dinas Kerhutanan									APBN/APBD Prov/LSM	Dinas Kerhutanan
		Peningkatan pemanfaatan potensi sumberdaya hutan;	Dinas Kerhutanan									APBN/APBD Prov/LSM	Dinas Kerhutanan
		Pengembangan pola insentif dan disinsentif pengelolaan kawasan lindung;	Dinas Kerhutanan									APBN/APBD Prov/LSM	Dinas Kerhutanan
		Pengawasan kawasan lindung.	Dinas Kerhutanan									APBN/APBD Prov/LSM	Dinas Kerhutanan
		Pengamanan kawasan lindung	Dinas Kerhutanan									APBN/APBD Prov/LSM	Dinas Kerhutanan
	Pengelolaan kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya	Mencegah timbulnya erosi, bencana banjir, sedimentasi, dan menjaga fungsi hidrologis tanah di kawasan hutan lindung;	Dinas PU									APBN/APBD Prov/LSM	Dinas PU
		Memberikan ruang yang cukup bagi resapan air hujan pada kawasan resapan air untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir.	Dinas PU									APBD Prov	Dinas PU
	Pengelolaan kawasan perlindungan	Sosialisasi batas sempadan dan manfaat serta resiko kerusakan sempadan	BLHD									APBN/APBD Prov/LSM	BLHD



NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	setempat												
		Rehabilitasi dan penghijauan sempadan	BLHD									APBN/APBD Prov/LSM	BLHD
		Pengembangan sempadan sebagai jalur hijau produktif sehingga mempunyai nilai tambah	BLHD									APBN/APBD Prov/LSM	BLHD
		Penguatan legalitas sempadan melalui peraturan daerah	BLHD									APBN/APBD Prov/LSM	BLHD
		Pengembangan kerjasama penguatan fungsi sempadan dengan lembaga usaha dan atau lembaga masyarakat	BLHD									APBN/APBD Prov/LSM	BLHD
		Pemasangan batas fisik pemelihara sempadan	BLHD									APBN/APBD Prov/Masyar akat	BLHD
	Pengelolaan kawasan cagar budaya	(penjelasan pada kawasan strategis Kota Tua Muntok)	-									-	-
	Pengelolaan kawasan rawan bencana alam	Menginventarisir kawasan rawan bencana alam di Kepulauan Bangka Belitung secara lebih akurat	BLHD									APBN/APBD Prov/LSM	BLHD

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Pengaturan kegiatan manusia di kawasan rawan bencana alam untuk melindungi manusia dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung oleh perbuatan manusia	BLHD									APBN/APBD	BLHD
		Melakukan upaya untuk mengurangi/ meniadakan resiko bencana alam seperti melakukan penghijauan pada lahan kritis	BLHD									APBN/APBD/ LSM	BLHD
		Melakukan sosialisasi bencana alam pada masyarakat, terutama masyarakat yang berada pada/dekat dengan daerah rawan bencana alam	BLHD									APBN/APBD/ LSM	BLHD
	Pengelolaan kawasan lindung lainnya	pengembangan dan pemeliharaan kawasan konservasi laut daerah (KKLD) yang berlokasi di Kabupaten Bangka Tengah.	BLHD									APBN/APBD/ LSM	BLHD

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
C2	Perwujudan Kawasan Budidaya												
a	Perwujudan Kawasan Hutan Produksi	Pemantapan tata batas hutan produksi sehingga terdapat kepastian dalam pengelolaan dan investasi jangka panjang	Dinas Kehutanan									APBN	Dinas Kehutanan
		Penyusunan pemetakan (siteplan) hutan dan rencana usaha (business plan)	Dinas Kehutanan									APBN	Dinas Kehutanan
		Pembangunan jalan produksi	Dinas Kehutanan									APBN/APBD Prov	Dinas Kehutanan
		Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (seperti komoditi rotan, tanaman obat, atau sutera alam)	Dinas Kehutanan									APBN	Dinas Kehutanan
		Pengembangan tanaman hutan atau tanaman obat-obatan pada lahan hutan rakyat	Dinas Kehutanan									APBN	Dinas Kehutanan
b	Perwujudan Kawasan Hutan Rakyat	Pemantapan tata batas hutan rakyat sehingga terdapat kepastian dalam pengelolaan dan investasi jangka panjang	Dinas Kehutanan									APBD Prov	Dinas Kehutanan
		Melakukan rehabilitasi hutan yang mengalami kerusakan	Dinas Kehutanan									APBD Prov	Dinas Kehutanan

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Penyusunan pemetakan (siteplan) hutan dan rencana usaha (business plan)	Dinas Kehutanan									APBD Prov	Dinas Kehutanan
		Pembangunan jalan produksi dean inspeksi	Dinas Kehutanan									APBD Prov	Dinas Kehutanan
		Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (seperti komoditi rotan, tanaman obat, atau sutera alam)	Dinas Kehutanan									APBD Prov	Dinas Kehutanan
		Pengembangan tanaman hutan atau tanaman obat-obatan pada lahan hutan rakyat	Dinas Kehutanan									APBD Prov	Dinas Kehutanan
c	Perwujudan Kawasan Peruntukan Pertanian	Menetapkan kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagai bagian dari pertahanan pangan nasional	Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan									APBD Kokab	Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan
		Meningkatkan pemanfaatan lahan kering kurang produktif sebagai lahan pertanian pangan dan pertanian hortikultur	Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan									APBD Kokab	Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Pengembangan pertanian dapat dilakukan dengan pendekatan agropolitan	Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan									APBN/APBD Prov/ APBD Kokab	Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan
		Menetapkan tata batas kawasan perkebunan komoditas unggulan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan	Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan									APBD Kokab	Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan
		Mengembangkan bibit unggul komoditas unggulan pertanian dan atau perkebunan dan melakukan peremajaan secara berkala	Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan									APBN/APBD Prov/ APBD Kokab	Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan
		Menetapkan kawasan sentra peternakan ternak besar, kecil dan unggas secara integratif dengan kegiatan pertanian hortikultur dan atau perkebunan	Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan									APBD Kokab	Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan
		Membangun prasarana dan sarana pertanian/perkebunan guna peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk	Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan									APBD Kokab	Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
d	Perwujudan Sentra Perikanan	Menetapkan kawasan sentra perikanan budidaya dan perikanan tangkap dengan pendekatan minapolitan	Dinas Kelautan dan Perikanan									APBD Kokab	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Menyusun masterplan minapolitan perikanan budidaya dan perikanan tangkap	Dinas Kelautan dan Perikanan									APBD Kokab	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Pengelolaan sumber daya air secara optimal bagi pengembangan perikanan budidaya	Dinas Kelautan dan Perikanan									APBN/APBD Prov/ APBD Kokab	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Pembangunan sarana dan prasarana peningkatan produktivitas perikanan budidaya	Dinas Kelautan dan Perikanan									APBN/APBD Prov/ APBD Kokab	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Penyediaan perlengkapan dan prasarana penunjang untuk peningkatan produktivitas perikanan tangkap	Dinas Kelautan dan Perikanan									APBN/APBD Prov/ APBD Kokab	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Pengembangan kegiatan pengolahan (industri) perikanan terutama perikanan tangkap	Dinas Kelautan dan Perikanan									APBN/APBD Prov/ APBD Kokab	Dinas Kelautan dan Perikanan
e	Perwujudan	Pemantapan tata batas	Dinas									APBN/APBD	Dinas

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Kawasan Peruntukan Pertambangan	wilayah pertambangan (WP) dan wilayah pertambangan rakyat (WPR)	Pertambangan dan Energi									Prov/ APBD Kokab	Pertambangan dan Energi
		Menyusun dan menyepakati pola dan teknik pertambangan timah yang ramah lingkungan	Dinas Pertambangan dan Energi									APBN/APBD Prov/ APBD Kokab	Dinas Pertambangan dan Energi
		Mendorong bertumbuhnya industri rakyat pengolahan timah yang ramah lingkungan	Dinas Pertambangan dan Energi									APBN/APBD Prov/ APBD Kokab	Dinas Pertambangan dan Energi
		Pembangunan prasarana dan sarana penunjang kegiatan pertambangan, terutama pertambangan rakyat	Dinas Pertambangan dan Energi									APBN/APBD Prov/ APBD Kokab	Dinas Pertambangan dan Energi
		Mendorong pembangunan dan penyediaan peralatan pengolahan limbah yang ramah lingkungan	Dinas Pertambangan dan Energi									APBD Kokab	Dinas Pertambangan dan Energi
		Mengembangkan seluruh bentuk kegiatan pertambangan dengan skenario hijau	Dinas Pertambangan dan Energi									APBN/APBD Prov/ APBD Kokab	Dinas Pertambangan dan Energi
		Pemanfaatan kolong sebagai wahana budidaya perikanan dan wisata air	Dinas Pertambangan dan Energi									APBN/APBD Prov/ APBD Kokab	Dinas Pertambangan dan Energi

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
f	Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri	Menetapkan dan menyepakati kawasan-kawasan industri di Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Perindag									APBD Kokab	Dinas Perindag
		Membangun sistem transportasi terpadu antara darat dan laut untuk mendukung kegiatan industri	Dinas Perindag									APBN/APBD Prov/ APBD Kokab	Dinas Perindag
		Membangun instalasi penyediaan air bersih dan air baku untuk kebutuhan industri	Dinas Perindag									APBN/APBD Prov/ APBD Kokab	Dinas Perindag
		Penyediaan sumber energi (listrik) dengan mengembangkan energi terbarukan	Dinas Perindag									APBN	Dinas Perindag
		Mendorong dan memastikan pembangunan atau penyediaan instalasi pengolahan limbah industri secara aman dan ramah lingkungan.	Dinas Perindag									APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Perindag
g	Perwujudan Kawasan Peruntukan Pariwisata	Identifikasi kawasan potensial dan kawasan wisata yang sudah bertumbuh	Dinas Budaya dan Pariwisata									APBD Kokab	Dinas Budaya dan Pariwisata



NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Penyusunan masterplan (rencana induk pengembangan pariwisata daerah) Kepulauan Bangka Belitung	Dinas Budaya dan Pariwisata									APBD Kokab	Dinas Budaya dan Pariwisata
		Revitalisasi, restorasi dan perbaikan bangunan dan kawasan wisata yang ada	Dinas Budaya dan Pariwisata									APBN/ APBD Prov/APBD Kokab/Masya rakat	Dinas Budaya dan Pariwisata
		Pengembangan kawasan potensial menjadi kawasan wisata strategis provinsi	Dinas Budaya dan Pariwisata									APBD Kokab	Dinas Budaya dan Pariwisata
		Peningkatan aksesibilitas pada kawasan-kawasan pariwisata yang potensial dalam satu kesatuan sistem perjalanan wisata ( <i>trip</i> )	Dinas Budaya dan Pariwisata									APBN/ APBD Prov/APBD Kokab/Masya rakat	Dinas Budaya dan Pariwisata
h	Perwujudan Kawasan Peruntukan Permukiman	Penetapan kawasan permukiman perkotaan maupun perdesaan	Dinas PU									APBD Kokab	Dinas PU
		Penyusunan rencana strategis dan pengembangan perumahan dan infrastruktur kota	Dinas PU									APBN/APBD Prov	Dinas PU
		Penyusunan masterpal	Dinas PU									APBD Kokab	Dinas PU

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		perencanaa kota yang ditetapkan											
		Identifikasi dan perbaikan perumahan yang tidak layak huni	Dinas PU									APBD Kokab	Dinas PU
		Peningaktan kualitas lingkungan permukiman (desa/kota)	Dinas PU									APBN/ APBD Prov/APBD Kokab/Masya rakat	Dinas PU
D	Perwujudan Kawasan Strategis												
D1	Perwujudan Kawasan Tanjung Kalian	Penyusunan rencana rinci dan rencana teknis kawasan	Dinas PU									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas PU
		Penyusunan masterplan dan businnes plan setiap komponen kegiatan	Dinas PU									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas PU
		Pembangunan infrastruktur pendukung	Dinas PU									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas PU
		Pembangunan komponen utama seperti PLTU, Stockpile, pelabuhan, terminal, kawasan wisata dan prasarana lainnya.	Dinas Pertambangan dan Energi; PU; Perhubungan; Perindag									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Pertambangan dan Energi; PU; Perhubungan; Perindag

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
D2	Perwujudan Kawasan Industri Perikanan Terpadu di Teluk Klabat Belinyu	Penyusunan masterplan kawasan industri	Dinas Perindag									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Perindag
		Penyusunan masterplan pelabuhan Belinyu	Dinas Perhubungan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Perhubungan
		Penguasaan lahan untuk lahan industri dan pelabuhan dan pengembangannya	Dinas Perhubungan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Perhubungan
		Pembangunan prasarana dan sarana penunjang	Dinas Perhubungan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Perhubungan
		Pembangunan jalan akses dari Belinyu ke pelabuhan	Dinas Perhubungan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Perhubungan
		Pembangunan dermaga & terminal	Dinas Perhubungan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Perhubungan
		Pembangunan pabrik pengolahan ikan	Dinas Kelautan dan Perikanan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Kelautan dan Perikanan

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
D3	Perwujudan Pelabuhan dan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Berikat	Penyusunan masterplan kawasan	Dinas Perindag									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Perindag
		Penyusunan proposal dan syarat pembangunan kawasan ekonomi khusus	Dinas Perindag									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Perindag
		Pengusulan kawasan ekonomi khusus Tanjung Berikat	Dinas Perindag									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Perindag
		Legalisasi kawasan ekonomi khusus tanjung Berikat	Dinas Perindag									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Perindag
		Pembangunan jalan akses dari Koba – Tanjung Berikat	Dinas Perindag									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Perindag
		Pembangunan kawasan wisata	Dinas Perindag									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Perindag
		Pembangunan pelabuhan (dermaga dan terminal)	Dinas Perindag									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Perindag
		Pembagunan sub kawasan industri (pabrik pengolahan)	Dinas Perindag									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Perindag
D4	Perwujudan	Penyusunan RDTR KTM Batu	Dinas PU									APBN/APBD	Dinas PU

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	KTM Batu Betumpang	Betumpang										Prov/APBD Kokab	
		Penyusunan DED Infrastruktur dan permukiman kawasan	Dinas PU									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas PU
		Pembangunan infrastruktur permukiman	Dinas PU									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas PU
		Pembangunan sarana sosial budaya	Dinas PU									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas PU
		Pengembangan kawasan pertanian	Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Pertanian, Perkebunan & Peternakan
		Pengembangan kawasan lindung dan RTH	BLHD									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	BLHD
D5	Perwujudan Kawasan Minapolitan Lepar Pongok	Penyusunan masterplan Minapolitan Lepar Pongok	Dinas Kelautan & Perikanan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Kelautan & Perikanan
		Penyiapan kelembagaan pengelola minapolitan	Dinas Kelautan & Perikanan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Kelautan & Perikanan
		Pengesahan kawasan minapolitan	Dinas Kelautan & Perikanan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Kelautan & Perikanan

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Pembangunan sarana penunjang utama kegaitan Minapolitan	Dinas Kelautan & Perikanan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Kelautan & Perikanan
		Pembangunan infrastruktur pendukung	Dinas PU/ Dinas Kelautan & Perikanan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas PU/ Dinas Kelautan & Perikanan
		Pembangunan kawasan industri pengolahan ikan	Dinas Kelautan &Perikanan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Kelautan &Perikanan
D6	Perwujudan Kawasan etalase Perikanan Selat Nasik	Penyusunan masterplan kawasan industri perikanan tangkap dan budidaya	Dinas Kelautan & Perikanan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Kelautan & Perikanan
		Pembangunan pabrik pengolahan ikan	Dinas Kelautan & Perikanan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Kelautan & Perikanan
		Pembangunan kawasan habitat ikan alami dengan mangrove	BLHD/ Dinas Kelautan & Perikanan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	BLHD/ Dinas Kelautan & Perikanan
		Pembangunan tambak ikan	Dinas Kelautan & Perikanan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Kelautan & Perikanan
		Pembangunan rumah ikan (pengolahan, budidaya dan hias)	Dinas Kelautan & Perikanan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Kelautan & Perikanan

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
D7	Perwujudan Kawasan Industri Perikanan Tanjung Binga	Penyusunan masterplan kawasan industri	Dinas Perindag									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Perindag
		Penguasaan lahan untuk lahan industri dan pelabuhan dan pengembangannya	Dinas Perindag									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Perindag
		Pembangunan prasarana dan sarana penunjang	Dinas Perindag/PU									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Perindag/PU
		Pembangunan jalan akses ke Tanjung Binga (pabrik)	Dinas PU									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas PU
		Pembangunan dermaga & terminal	Dinas PU									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas PU
		Pembangunan pabrik pengolahan ikan	Dinas Kelautan dan Perikanan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Kelautan dan Perikanan
D8	Perwujudan Kawasan Kota Terpadu Mandiri	Penyusunan RDTR KTM Gantung	Dinas PU									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas PU
		Penyusunan DED Infrastruktur dan permukiman kawasan	Dinas PU									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas PU
		Pembangunan infrastruktur	Dinas PU									APBN/APBD	Dinas PU

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		permukiman										Prov/APBD Kokab	
		Pembangunan kampung budaya Laskar Pelangi	Dinas Budpar									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Budpar
		Pengembangan kawasan pertanian	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan
		Pengembangan kawasan lindung dan RTH	BHLD									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	BHLD
D9	Perwujudan Kawasan Industri Terpadu Air Kelik (KIAK)	Penyusunan masterplan kawasan	Dinas Perindag									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Perindag
		Penyiapan lahan	Dinas Perindag									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Perindag
		Pembangunan jalan askes	Dinas PU									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas PU
		Pembangunan infrastruktur penunjang	Dinas PU									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas PU
		Pembangunan sistem pengolahan ikan ekspor	Dinas Perindag									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Perindag



NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Pembangunan dermaga dan terminal (pelabuhan)	Dinas Perhubungan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Perhubungan
		Pembangunan kawasan wisata	Dinas Budpar									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Budpar
		Pembangunan prasarana penunjang lainnya	Dinas PU									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas PU
D10	Perwujudan Pelabuhan ASDP Manggar - Kepang	Penyusunan masterplan pengembangan ASDP Manggar	Dinas Perhubungan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Perhubungan
		Penyediaan lahan	Dinas Perhubungan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Perhubungan
		Pembangunan infrastruktur pendukung Perbaikan dan peningkatan kapasitas dermaga dan terminal	Dinas PU									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas PU
		Pengadaan kapal penumpang	Dinas Perhubungan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Perhubungan
		Penyediaan sistem air baku dan air minum	Dinas PU									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas PU
D11	Perwujudan	Identifikasi dan klasifikasi	Dinas Budpar									APBN/APBD	Dinas Budpar

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Kota Tua Muntok	lokasi dan jenis bangunan <i>heritage</i>										Prov/APBD Kokab	
		Penyusunan proposal pengajuan Kota Tua Muntok sebagai Kawasan Pusaka Nasional, <i>Asian Herritage</i> dan diupayakan menjadi <i>World Heritage</i>	Dinas Budpar									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Budpar
		Penataan kawasan dan restorasi bangunan	Dinas Budpar									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Budpar
		Pengesahan Kota Tua Muntok sebagai kawasan <i>heritage</i> (nasional/dunia)	Dinas Budpar									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Budpar
		Penyusunan <i>heritage map</i> dan promosi kawasan	Dinas Budpar									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Budpar
		Penyusunan agenda tahunan	Dinas Budpar									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Budpar
		Penyelenggaraan atraksi budaya (reguler)	Dinas Budpar									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Budpar
		Pengembangan kota Muntok dengan banchmark kota tua	Dinas Budpar									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Budpar

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Pelestariaan dan pemeliharaan bangunan/kawasan tua	Dinas Budpar									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Budpar
D12	Perwujudan Kawasan Universitas Bangka Belitung (UBB), STAIN, Kota Tua Muntok & Museum Nasional Maritim	Pengembangan kawasan pendidikan	Dinas Pendidikan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Pendidikan
		penetapan kawasan sekitar UUB dan STAIN adalah kawasan (aglomerasi) pendidikan	Dinas Pendidikan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Pendidikan
		penyusunan masterplan kawasan pendidikan terpadu skala regional, masterplan kawasan Kota Tua Muntok, dan masterplan Museum Nasional Maritim	Dinas Pendidikan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Pendidikan
		pembangunan sarana penunjang pendidikan	Dinas PU									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas PU

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		pembangunan kawasan wisata pendidikan dan laboratorium alam										APBN/APBD Prov/APBD Kokab	
		pengembangan kerjasama pendidikan dengan universitas luar negeri	Dinas Pendidikan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Pendidikan
		pembangunan infrastruktur pendukung kawasan pendidikan terpadu skala regional, kawasan Kota Tua Muntok, dan Museum Nasional Maritim	Dinas Pendidikan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Pendidikan

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
D14	Pengelolaan Cagar Alam Gunung Lalang (Belitung), Gunung Menumbing (Bangka Barat), Hutan Konservasi Gunung Maras (Bangka), Gunung Mangkol (Bangka Tengah), Gunung Permisan (Bangka Selatan), Jering Menduyung (Bangka Barat), Kota Kapur (Bangka), Kawasan Kepulauan Buku Limau (Belitung Timur), Taman Kehati (Belitung ); dan Karantina Hewan (Pulau Nadu, Kabupaten Belitung)	Pemantapan tata batas kawasan Cagar Alam & Hutan Konservasi	Dinas Kehutanan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Kehutanan

NO	RENCANA PEMANFAATAN RUANG		PENANGGUNG JAWAB	TAHUN PELAKSANAAN								SUMBER DANA	PELAKSANA
	INDIKASI PROGRAM	KEGIATAN		Tahap I					Tahap II	Tahap III	Tahap IV		
				2015	2016	2017	2018	2019	20-24	25-29	30-34		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Identifikasi kawasan/areal kritis yang mengalami deforestasi dan kerusakan lingkungan	Dinas Kehutanan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Kehutanan
		Rehabilitasi kawasan melalui reboisasi dan perbaikan tanah	Dinas Kehutanan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Kehutanan
		Perbaikan fasilitas penunjang	Dinas Kehutanan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Kehutanan
		Penguatan perlindungan cagar alam, baik yang bersifat fisik maupun non fisik	Dinas Kehutanan									APBN/APBD Prov/APBD Kokab	Dinas Kehutanan
		Peningkatan fasilitas karantina hewan											

Sumber: Hasil Analisis Tim RTRW 2010

Berdasarkan indikasi program yang tertuang di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034 tentunya korelasi perencanaan kewilayahan yang tertuang pada periode 2014-2020 harus menjadi acuan khususnya dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2019.

Indikasi program kegiatan yang mendukung Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah, sebagaimana yang disajikan pada Tabel V.9

**Tabel V.9**  
Indikasi Program Pengembangan Pariwisata Daerah

ASPEK PENGEMBANGAN	STRATEGI PENGEMBANGAN	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN PENGEMBANGAN						
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	Tahun 7
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1. Pengembangan Perwilayahan Pariwisata	Pengembangan kawasan wisata unggulan provinsi	Penyusunan rencana pengembangan kawasan wisata unggulan sesuai tema yang ditetapkan							
	Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan kawasan wisata unggulan provinsi	Penentuan pusat pertumbuhan pariwisata pada setiap kawasan wisata unggulan							
		Penyusunan rencana detail pengembangan pusat pertumbuhan kawasan wisata unggulan							
2. Pengembangan Produk Wisata	Pengembangan pariwisata bahari dan pulau-pulau kecil yang memunculkan keunikan/ identitas lokal dan berdaya saing sebagai tema pengembangan pariwisata	Penyusunan pedoman perencanaan dan pengelolaan pariwisata bahari dan pulau-pulau kecil yang spesifik Kepulauan Bangka Belitung							
		Penataan ruang dan pengelolaan daya tarik wisata bahari dan pulau-pulau kecil yang menjadi unggulan							
	Pengembangan daya tarik wisata difokuskan pada daya tarik wisata yang mendukung tema pengembangan kawasan wisata unggulan yang berkelanjutan	Sosialisasi tema pengembangan pariwisata provinsi dan kawasan wisata unggulan							
		Pengemasan budaya pesisir dan budaya etnis Cina sebagai daya tarik wisata							
	Pengembangan wisata buatan yang mendukung tema pengembangan pariwisata provinsi dengan memanfaatkan lahan bekas penambangan timah	Penelitian mengenai pengembangan bekas galian tambang menjadi wisata buatan yang mendukung tema wisata bahari dan pulau-pulau kecil							



ASPEK PENGEMBANGAN	STRATEGI PENGEMBANGAN	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN PENGEMBANGAN						
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	Tahun 7
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Pengembangan program interpretasi pariwisata pada lahan-lahan bekas penambangan timah							
	Pengembangan wisata terpadu antar kawasan wisata unggulan dan dengan daerah tujuan wisata internasional yang dekat dg Kep. Bangka Belitung	Penyelenggaraan program pengembangan dan paket wisata terpadu antara kawasan wisata unggulan							
		Penyelenggaraan program pengembangan dan paket wisata terpadu dengan daerah tujuan wisata internasional yang dekat dg Kepulauan Bangka Belitung							
3. Pengembangan Transportasi dan Infrastruktur	Peningkatan aksesibilitas ke kawasan wisata unggulan provinsi	Pengembangan dan pemeliharaan jaringan jalan antar kawasan wisata unggulan provinsi							
		Penyediaan angkutan umum menuju dan antar kawasan wisata unggulan yang aman dan nyaman							
	Peningkatan kemudahan aksesibilitas antar provinsi dan antar kota, khususnya yang mendukung aksesibilitas antara ibukota provinsi, PKW, PKL, dan kawasan wisata unggulan	Peningkatan kapasitas dan jumlah lalu lintas penumpang dengan menggunakan moda transportasi udara dari dan ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (antara lain melalui perpanjangan landasan pacu (runway)).							
		Pengkajian terhadap permintaan perjalanan dengan berbagai moda transportasi bagi wisatawan ke dan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.							

ASPEK PENGEMBANGAN	STRATEGI PENGEMBANGAN	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN PENGEMBANGAN						
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	Tahun 7
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Peningkatan dan perbaikan kondisi fisik dan pelayanan pelabuhan laut untuk kemudahan dan kenyamanan bagi wisatawan.							
		Perencanaan pengembangan transportasi terpadu yang memperhatikan pola pergerakan dan kebutuhan perjalanan.							
	Peningkatan aksesibilitas antar daya tarik wisata unggulan disetiap kawasan wisata unggulan provinsi	Peningkatan kualitas pelayanan jalan antar daya tarik wisata unggulan dan daya tarik wisata pendukung disetiap kawasan wisata unggulan							
		Penyediaan angkutan wisata yang menghubungkan daya tarik wisata unggulan disetiap kawasan wisata unggulan provinsi							
	Peningkatan penyediaan dan pelayanan infrastruktur air bersih dan listrik untuk mendukung pengembangan pariwisata, khususnya di kawasan wisata unggulan	Pengkajian analisis kebutuhan air bersih dan penyediaan sumber air bersih di kawasan wisata unggulan provinsi							
		Penyediaan pemenuhan kebutuhan jaringan listrik di daerah tujuan wisata melalui penambahan jaringan dan atau pengembangan sumber-sumber tenaga listrik yang potensial untuk dikembangkan							
4. Pengembangan Pasardan Pemasaran	Pengembangan pasar wisnus dengan memanfaatkan masyarakat Kep. Bangka Belitung sebagai sumber pasar utama dan menjaring wisnus dari daerah sumber pasar terdekat	Penelitian profil dan preferensi wisnus Bangka Belitung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Sumatera Selatan, dan Jambi terhadap produk wisata Kepulauan Bangka Belitung							

ASPEK PENGEMBANGAN	STRATEGI PENGEMBANGAN	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN PENGEMBANGAN						
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	Tahun 7
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pengembangan pasar wisman dengan menjaring wisman dari daerah sumber pasar terdekat	Penelitian profil dan preferensi wisman yang datang ke Kepulauan Bangka Belitung							
		Penelitian profil dan preferensi potensi wisman yang berkunjung ke daerah sumber pasar terdekat							
	Pengembangan pasar wisatawan yang memiliki ketertarikan dengan budaya pesisir dan budaya/ etnis Cina	Penelitian profil dan preferensi potensi pasar dan pasar wisata waneksisting terhadap budaya pesisir dan etnis Cina							
	Maupun kabupaten/kota, antara lembaga pemerintah dg swasta dan masyarakat dalam pengembangan pariwisata Kep. Bangka Belitung	Penyelenggaraan forum koordinasi rutin untuk pengembangan pariwisata Kep. Bangka Belitung							
	Pengembangan kemitraan/kerjasama dengan negara-negara tetangga, organisasi dunia, maupun ahli-ahli dalam negeri dalam pengembangan wisata bahari dan pulau-pulau kecil serta pengembangan bekas penambangan timah untuk menjadi daya tarik wisata	Pembuatan MoU dengan negara-negara maupun organisasi dunia tentang pengembangan pariwisata bahari dan pulau-pulau kecil di Kepulauan Bangka Belitung							
		Penyelenggaraan forum diskusi internasional tentang pengembangan lahan bekas penambangan timah menjadi daya tarik wisata							
		Pengadaan kerjasama dengan negara-negara yang berpengalaman dalam pemanfaatan bekas penambangan dan ahli-ahli lingkungan dan pariwisata Indonesia							
	Pengembangan lembaga pendidikan dan pelatihan pariwisata sebagai pencetak SDM pariwisata yg kompeten/berkualitas dan	Pembentukan lembaga pendidikan dan pelatihan pariwisata yang berkualitas dan sesuai tuntutan pasar							

ASPEK PENGEMBANGAN	STRATEGI PENGEMBANGAN	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN PENGEMBANGAN						
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	Tahun 7
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	sesuai dg tuntutan pasar	Pengembangan kurikulum pendidikan kepariwisataan yang sesuai dengan tuntutan pasar							
5. Pengelolaan Lingkungan	Peningkatan pengawasan terhadap kegiatan pelanggaran lingkungan, termasuk membatasi kegiatan penambangan	Perumusan peraturan daerah mengenai pengendalian kegiatan penambangan timah inkonvensional							
		Perumusan peraturan daerah mengenai pengelolaan lingkungan di Kepulauan Bangka Belitung							
	Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengelolaan dan penanganan permasalahan lingkungan	Pembentukan tim pengelolaan dan penanganan permasalahan lingkungan di Kepulauan Bangka Belitung							
		Penyelenggaraan forum koordinasi rutin antara instansi terkait dalam pengelolaan dan penanganan permasalahan lingkungan							
	Peningkatan upaya pengelolaan permasalahan lingkungan di kawasan wisata unggulan dan sekitarnya	Pembinaan sadar lingkungan pada masyarakat, terutama masyarakat di kawasan wisata unggulan provinsi							
		Penyelenggaraan gerakan cinta lingkungan di kawasan wisata unggulan provinsi							

# **BAB VI**

## **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

# BAB VI

---

## RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

### 6.1. Rencana Program Prioritas

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program prioritas daerah. Adapun program prioritas berdasarkan masing-masing urusan adalah sebagai berikut :

#### A. Program yang dilaksanakan setiap PD :

1. Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan;
2. Pelayanan Administrasi Perkantoran;
3. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
4. Peningkatan Disiplin Aparatur;
5. Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS;
6. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur;
7. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
8. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

#### B. Urusan Wajib

Program Prioritas Pembangunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

##### 1. Urusan Pendidikan

- a. Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Menengah Atas
- b. Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Khusus
- c. Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Kejuruan
- d. Program Peningkatan dan Pengembangan Kuantitas dan Kualitas Guru serta Tenaga Kependidikan
- e. Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (DAK Non Fisik)
- f. Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Belitung dan Belitung Timur
- g. Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Pangkalpinang dan Bangka
- h. Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan
- i. Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Barat

##### 2. Urusan Kesehatan

- a. Program Pelayanan Kesehatan
- b. Program Kesehatan Masyarakat

- c. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
- d. Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan
- e. Program Pelayanan Teknis Laboratorium Kesehatan
- f. Program Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular
- g. Program Peningkatan Pelayanan Teknis Medis dan Penunjang Medis
- h. Program Peningkatan Pelayanan Teknis Keperawatan
- i. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Umum
- j. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD RSUP
- k. Program Peningkatan Pelayanan Teknis Medis Kejiwaan dan Napza
- l. Program Pelayanan Teknis Keperawatan Jiwa dan Napza
- m. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Jiwa
- n. Program Badan Layanan Umum Daerah RSJ

### **3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

- a. Program Kebinamargaan
- b. Program Penataan Ruang dan Pertanahan
- c. Program Pengembangan Sumber Daya Air
- d. Program Pembinaan Jasa Konstruksi
- e. Program Pengawasan dan Peralatan PUPR

### **4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

- a. Program Keciaptakaryaan dan Permukiman
- b. Program Pembangunan Perumahan Rakyat

### **5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

- a. Program Pembinaan dan Pengembangan Personil Satuan Polisi Pamong Praja
- b. Program Penegakan Perda dan Perkada
- c. Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat
- d. Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
- e. Program Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan
- f. Program Penguatan Kewaspadaan Nasional
- g. Program Pembinaan Politik Dalam Negeri
- h. Program Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

### **6. Urusan Kesbangpol**

- a. Program Ketahanan Ekonomi, seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan
- b. Program Penguatan Kewaspadaan Nasional
- c. Program Pembinaan Politik Dalam Negeri
- d. Program Bina Ideologi dan wawasan Kebangsaan

### **7. Urusan Sosial**

- a. Program Rehabilitasi Sosial
- b. Program Penanganan Fakir Miskin
- c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
- d. Program Pemberdayaan Sosial
- e. Program Peningkatan Pelayanan Teknis Panti Sosial

- f. Program Penguatan Penyelenggaraan Panti Sosial
- g. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana
- h. Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana
- i. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana

#### **8. Urusan Penanggulan Bencana**

- a. Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulan Bencana
- b. Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulan Bencana
- c. Program Rehabilitasi dan Rekontruksi dan Penanggulan Bencana

#### **9. Urusan Ketenagakerjaan**

- a. Program Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja
- b. Program Pengembangan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja
- c. Program Peningkatan Pelayanan Teknis Latihan Kerja Industri
- d. Program Peningkatan Pengawasan Ketenagakerjaan, Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
- e. Program Peningkatan Pelayanan Teknis Hygienis Perusahaan dan Kesehatan Kerja

#### **10. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

- a. Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan
- b. Program Perlindungan Perempuan dan Anak

#### **11. Urusan Pangan**

- a. Program Peningkatan Konsumsi dan Keamanan Pangan
- b. Program Peningkatan Ketersediaan Pangan
- c. Program Pengembangan Distribusi, Stabilitas dan Cadangan Pangan

#### **12. Urusan Pertahanan**

- a. Program Penataan Ruang dan Pertanahan

#### **13. Urusan Lingkungan Hidup**

- a. Program Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup
- b. Program Peningkatan Pelayanan Teknis Laboratorium Lingkungan Hidup
- c. Program Peningkatan Pengendalian dan Penataan Lingkungan Hidup
- d. Program Peningkatan Pengolahan Sampah, Pemeliharaan dan Peningkatan kapasitas Lingkungan Hidup

#### **14. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

- a. Program Pengadministrasian Kependudukan dan Catatan Sipil

#### **15. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

- a. Program Peningkatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat
- b. Program Pembangunan Kawasan Perdesaan
- c. Program Pembinaan Pemerintah Desa
- d. Program Pengembangan Pendayagunaan Sumber Daya Alam, Teknoogi Tepat Guna dan Pelatihan Masyarakat



**16. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

- a. Program Pengendalian Penduduk dan KB

**17. Urusan Perhubungan**

- a. Program Pengembangan dan Pembangunan Perhubungan Darat
- b. Program Pengembangan dan Pembangunan Perhubungan Laut
- c. Program Peningkatan Pengendalian, Operasional dan Kebandar Udaraan

**18. Urusan Komunikasi dan Informatika**

- a. Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik
- b. Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Teknologi Informasi
- c. Program Peningkatan Pemberdayaan TIK, Statistik dan Persandian

**19. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

- a. Program Peningkatan Pembinaan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi
- b. Program Peningkatan Pemberdayaan Usaha Kecil
- c. Program Peningkatan Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi
- d. Program Peningkatan Pelayanan Teknis Latihan Perkoperasian, Usaha Mikro dan Menengah
- e. Program Peningkatan Pusat Layanan Usaha Terpadu KUMKM

**20. Urusan Penanaman Modal**

- a. Program Peningkatan Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal
- b. Program Peningkatan Promosi Penanaman Modal
- c. Program Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi
- d. Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu

**21. Urusan Kepemudaan dan Olahraga**

- a. Program Peningkatan Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda
- b. Program Peningkatan Pembudayaan dan Peningkatan Prestasi Olah Raga
- c. Program Pengembangan Standarisasi Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga

**22. Urusan Statistik**

- a. Program Peningkatan Pemberdayaan TIK, Statistik dan Persandian

**23. Urusan Persandian**

- a. Program Peningkatan Pemberdayaan TIK, Statistik dan Persandian

**24. Urusan Kebudayaan**

- a. Program Pelestarian Budaya

**25. Urusan Perpustakaan**

- a. Program Pengembangan Bahan Pustaka dan Layanan Perpustakaan

- b. Program Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan

## **26. Urusan Kearsipan**

- a. Program Peningkatan Pengelolaan dan Pelestarian Arsip

## **27. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan**

### **1) Urusan Perencanaan**

- a. Program Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah
- b. Program Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam
- c. Program Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan
- d. Program Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan
- e. Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

### **2) Urusan Keuangan**

- a. Program Peningkatan Tata Kelola Pendapatan Pajak Daerah
- b. Program Peningkatan Tata Kelola Pendapatan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain yang Sah
- c. Program Penganggaran Pembangunan Daerah
- d. Program Peningkatan Fungsi Perbendaharaan dan Verifikasi
- e. Program Peningkatan Pelayanan Akuntansi dan Pelaporan
- f. Program Peningkatan Tata Kelola Aset Daerah

### **3) Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan**

- a. Program Perencanaan dan Pengadaan ASN serta Pelayanan Promosi Kepangkatan dan Pensiun
- b. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara
- c. Program Penilaian Kinerja, Disiplin, Informasi dan Kesejahteraan Aparatur Sipil Negara
- d. Program Penilaian dan Pemetaan Kompetensi ASN

### **4) Urusan Penelitian dan Pengembangan**

- a. Program Penelitian dan Pengembangan

### **5) Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**

- a. Program Pengembangan Risalah Rapat dan Kajian Produk Hukum Perundang-Undangan
- b. Program Peningkatan Pelayanan Kerumahtanggaan, Kehumasan dan Protokoler Dewan
- c. Program Pengawasan dan Pembinaan Pemerintahan dan Aparatur
- d. Program Pengawasan dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- e. Program Pengawasan dan Pembinaan Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Budaya

### **6) Urusan Sekretariat Daerah**

- a. Program Perencanaan Setda

- b. Program Pengendalian Pembangunan Daerah
- c. Program Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan APBD
- d. Program Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan APBN
- e. Program Peningkatan Pembinaan Keagamaan
- f. Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Pendidikan, KB, Pemuda dan Pariwisata
- g. Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- h. Program Peningkatan Pelayanan dan Protokoler
- i. Program Peningkatan Pelayanan Kehumasan, Dokumentasi, Publikasi Media dan IT
- j. Program Peningkatan Publikasi, Pengumpulan dan Penyaringan Informasi
- k. Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Perekonomian
- l. Program Peningkatan Koordinasi BUMD, Penanaman Modal, Pariwisata dan Budaya
- m. Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Sumber Daya Alam
- n. Program Peningkatan dan Pengembangan Kelembagaan Serta Analisis Jabatan
- o. Program Peningkatan Dan Pengembangan Tata Laksana Pemerintah Daerah
- p. Program Peningkatan dan Pengembangan Kinerja Pemerintah Daerah
- q. Program Pengembangan Data Informasi Layanan Pengadaan
- r. Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
- s. Program Peningkatan Pengadaan Secara Elektronik
- t. Program Peningkatan Penataan Peraturan Perundang Undangan
- u. Program Pengembangan Dokumentasi Hukum dan Informasi Hukum
- v. Program Peningkatan Pelayanan Hukum Pemerintahan Daerah
- w. Program Pengembangan Otonomi Daerah
- x. Program Peningkatan Administrasi Kewilayahan
- y. Program Pengembangan Kerja Sama Pemerintah Daerah

#### **7) Urusan Penunjang Lainnya**

- a. Program Peningkatan Promosi, Informasi dan Pelayanan Serta Hubungan Antar Lembaga

### **C. Urusan Pilihan**

Program Prioritas Pembangunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2019 untuk urusan pilihan adalah sebagai berikut :

#### **1. Urusan Kelautan dan Perikanan**

- a. Program Pengembangan Pengelolaan Ruang Laut
- b. Program Pengembangan Perikanan Tangkap
- c. Program Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan
- d. Program Peningkatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
- e. Program Peningkatan Pelayanan Teknis dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan
- f. Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pembenihan Ikan Air Payau
- g. Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pembenihan Ikan Laut

- h. Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pembenihan Ikan Air Tawar

## **2. Urusan Pariwisata**

- a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
- b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
- c. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kelembagaan Kepariwisataan

## **3. Urusan Pertanian**

- a. Program Pengembangan Peternakan dan Kesehatan Hewan
- b. Program Peningkatan Pelayanan Teknis Proteksi Tanaman
- c. Program Pengembangan Tanaman Pangan dan Holtikultura
- d. Program Pengembangan Perkebunan
- e. Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Benih
- f. Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pengembangan Benih Pertanian
- g. Program Pengembangan Prasarana, Sarana Pertanian dan Penyuluh Pertanian

## **4. Urusan Kehutanan**

- a. Program Peningkatan Perlindungan dan Konservasi SDA dan Ekosistem
- b. Program Peningkatan Pelayanan Teknis Tata Kelola Kehutanan
- c. Program Peningkatan Tata Kelola dan Pemanfaatan Kawasan Hutan
- d. Program Peningkatan Pengelolaan DAS dan Pemberdayaan Masyarakat

## **5. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral**

- a. Program Pengembangan Pertambangan Mineral Logam
- b. Program Pengembangan Sumber Daya Energi
- c. Program Peningkatan Pengelolaan Geologi dan Air Tanah
- d. Program Pengembangan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan

## **6. Urusan Perdagangan**

- a. Program Pengembangan Perdagangan

## **7. Urusan Perindustrian**

- a. Program Pengembangan Wilayah dan Pengawasan Industri
- b. Program Pengembangan Sumber Daya, Fasilitas dan Akses Industri
- c. Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Kemetrolgian
- d. Program Peningkatan Pelayanan Teknis Sertifikasi dan Pengendalian Mutu Produk

## **8. Urusan Transmigrasi**

- a. Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi

### **6.2. Pagu Indikatif**

Pagu Indikatif merupakan batasan anggaran yang diberikan kepada masing-masing OPD untuk merencanakan program/kegiatan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Berdasarkan Tabel VI.1 penentuan pagu indikatif tidak lagi menganut “*money follow function*” akan tetapi berasaskan “*money follow priority programme*”.

**Tabel VI.1**  
Pagu Indikatif Perangkat Daerah  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019

NO	PERANGKAT DAERAH	Pagu Belanja Langsung 2019
1	2	3
1	Dinas Pendidikan	172.704.784.000,00
2	Dinas Kesehatan	45.611.757.970,00
3	Rumah Sakit Umum Provinsi	90.589.776.000,00
4	Rumah Sakit Jiwa	37.646.080.000,00
5	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	172.633.542.000,00
6	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	12.373.289.950,00
7	Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah	14.499.997.000,00
8	Dinas Perhubungan	30.501.743.000,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	9.348.939.500,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan, Pencatatan Sipil Dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana	7.875.813.500,00
11	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.614.529.000,00
12	Dinas Sosial	13.708.907.000,00
13	Dinas Tenaga Kerja	14.687.557.000,00
14	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	12.104.265.000,00
15	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	20.189.000.000,00
16	Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata	32.310.401.950,00
17	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	19.395.469.500,00
18	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	7.844.516.300,00
19	Satuan Polisi Pamong Praja	11.323.347.000,00
20	Sekretariat Daerah	73.160.314.510,00
21	Sekretariat DPRD	88.990.947.570,00
22	Badan Keuangan Daerah	27.267.345.050,00
23	Inspektorat Daerah	10.846.205.000,00
24	Badan Penghubung Provinsi	14.644.807.500,00
25	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	26.302.348.350,00
26	Dinas Pangan	9.224.620.000,00
27	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	8.924.307.000,00
28	Dinas Komunikasi Dan Informatika	14.555.937.300,00

NO	PERANGKAT DAERAH	Pagu Belanja Langsung 2019
29	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	7.176.802.820,00
30	Dinas Pertanian	29.602.619.500,00
31	Dinas Kehutanan	11.864.672.000,00
32	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	17.090.670.000,00
33	Dinas Kelautan Dan Perikanan	33.386.106.000,00
34	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	16.959.972.600,00
	<b>TOTAL</b>	<b>1.124.961.390.870,00</b>

## 5.2. Dukungan Rencana Program Terhadap Prioritas Provinsi

Memperhatikan bahwa tahun 2019 merupakan tahun kedua dari RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka salah satu arah kebijakan belanja keuangan daerah yang telah ditetapkan adalah dalam rangka mendukung 13 (tiga belas) prioritas pembangunan provinsi.

Adapun secara lengkap, gambaran mengenai dukungan anggaran terhadap masing-masing prioritas pembangunan provinsi dapat dilihat pada Tabel VI.2 berikut:

**Tabel VI.2**  
Dukungan Anggaran terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi

Prioritas	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Pagu Indikatif 2019	PD Yang Bertanggung Jawab
<b>Pengembangan 1 Pembangunan Agropolitan</b>				<b>150.763.873.558</b>	
	1 Penyusunan Kebijakan Dan Implementasi Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan	Program Pengembangan Prasarana, Sarana Pertanian Dan Penyuluhan Pertanian	Pertambahan Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan Yang Di Implementasikan	1.000.000.000	Dinas Pertanian
	2 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Dan Nilai Tambah Serta Produksi Pertanian, Perkebunan, Perternakan Dan Kehutanan	Program Pengembangan Prasarana, Sarana Pertanian Dan Penyuluhan Pertanian	Persentase Ketersediaan Sarana Prasarana Pertanian	1.350.000.000	Dinas Pertanian
			Persentase Pertambahan Kelompok Tani Yang Melakukan Pemberdayaan Disektor Pertanian	1.350.000.000	Dinas Pertanian
			Persentase Kelembagaan Pertanian Aktif	1.600.000.000	Dinas Pertanian
		Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pengawasan Dan Sertifikasi Mutu Benih	Persentase Pertambahan Jumlah Benih Lada Yang Bersertifikat Dan Berlabel	230.000.000	Uptd Pengawas Dan Sertifikasi Mutu Benih Pertanian

Prioritas	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Pagu Indikatif 2019	PD Yang Bertanggung Jawab
			Persentase Pertambahan Jumlah Benih Karet Yang Bersertifikat Dan Berlabel,	200.000.000	Uptd Pengawas Dan Sertifikasi Mutu Benih Pertanian
			Pertambahan Jumlah Benih Padi Yang Bersertifikat Dan Berlabel	250.000.000	Uptd Pengawas Dan Sertifikasi Mutu Benih Pertanian
			Pertambahan Jumlah Benih Hortikultura Yang Bersertifikat Dan Berlabel,	200.000.000	Uptd Pengawas Dan Sertifikasi Mutu Benih Pertanian
			Persentase Varietas Unggul Lokal Yang Didaftarkan Menjadi Unggul Nasional	150.000.000	Uptd Pengawas Dan Sertifikasi Mutu Benih Pertanian
		Program Peningkatan Pelayanan Teknis Proteksi Tanaman	Persentase Penurunan Areal Tanam Yang Terseang OPT	575.000.000	Uptd Balai Proteksi Tanaman Pertanian
			Pertambahan Ketersediaan Benih Sumber Padi	1.350.000.000	Uptd Balai Benih Pertanian
			Pertambahan Ketersediaan Bibit Ayam	700.000.000	Uptd Balai Benih Pertanian
			Pertambahan Ketersediaan Kandang Ternak, Gudang Pakan, Gedung Pertemuan Dan Sarana Prasarana	75.000.000	Uptd Balai Benih Pertanian
		Program Pengembangan Tanaman Pangan Dan Holtikultura	Persentase Peningkatan Produksi Dan Produktifitas Komoditi Strategis Tanaman Pangan Padi	8.015.000.000	Dinas Pertanian
		Program Pengembangan Perkebunan	Peningkatan Produksi Lada	16.810.000.000	Dinas Pertanian
			Peningkatan Produksi Karet	5.396.000.000	Dinas Pertanian
		Program Pengembangan Peternakan Dan Kesehatan Hewan	Pertambahan Jumlah Populasi Ternak Besar Sapi	15.600.000.000	Dinas Pertanian
		Program Peningkatan Tata Kelola Hutan	Persentase Izin Usaha Hasil Hutan Kayu (%)	300.000.000	Dinas Kehutanan
			Persentase Hasil Hutan Bukan Kayu Yang Dikembangkan (%)	1.600.000.000	Dinas Kehutanan
		Program Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup	Tersedianya Dokumen KLHS Pengembangan Balai Benih Pertanian Terpadu Yang Digunakan Dalam Perencanaan Kawasan	500.000.000	DLH
		Program Pengembangan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Informasi Berkaitan Dengan Peningkatan Produksi Pertanian Yang Dapat Diakses Masyarakat	1.005.000.000	Kominfo
	3 Pengembangan Standarisasi SDM Dalam Meningkatkan Daya Saing Sektor Pertanian	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Latihan Kerja Industri	Persentase Pencari Kerja Yang Mendapat Pelatihan Tentang Pertanian Yang Berkompetensi	250.000.000	UPD BLKI

Prioritas	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Pagu Indikatif 2019	PD Yang Bertanggung Jawab
		Program Pengembangan Pelatihan Dan Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Peningkatan Tenaga Kerja Pertanian Yang Bersertifikasi	420.000.000	Disnaker
		Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja Sektor Pertanian	57.857.000	Uptd Balai Produktifitas
		Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Kejuruan	Persentase Jumlah SMK Dengan Program Keahlian Pertanian, Perkebunan Dan Perternakan Yang Memiliki Akreditasi A	627.511.765	Dinas Pendidikan
			Persentase SMK Pertanian Dan Peternakan Yang Mengeluarkan Sertifikasi Profesi Pihak 1 (LSP-P1)	627.511.765	Dinas Pendidikan
		Program Peningkatan Pemberdayaan Dan Pengembangan Koperasi	Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi Pertanian	814.650.000	Dinas KUMKM
			Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi Sapi	271.550.000	Dinas KUMKM
		Program Peningkatan Pelayanan Teknis Latihan Perkoperasian, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah	Persentase SDM Koperasi Sektor Pertanian Terlatih	244.500.000	Uptd Balai Latihan Perkoperasian, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah
			Persentase SDM Usaha Kecil Sektor Pertanian Terlatih	946.880.000	Uptd Balai Latihan Perkoperasian, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah
	4 Pembinaan Hubungan Industri Sektor Pertanian	Program Peningkatan Pengawasan Ketenagakerjaan, Pembinaan Hub. Industrial Dan Jaminan Sosial	Persentase Perusahaan Pertanian Yang Diperiksa Dan Dibina Sesuai Standar Pemeriksaan Perusahaan	34.515.000	Disnaker
	5 Peningkatan Standarisasi Produk Dan Jasa KUKM Dalam Meningkatkan Daya Saing Sektor Pertanian	Program Peningkatan Pembinaan Kelembagaan Dan Pengawasan Koperasi	Persentase Pertumbuhan Kelembagaan Koperasi Aktif Sektor Pertanian	210.000.000	Dinas KUMKM
			Persentase Koperasi Sektor Pertanian Berkualitas Sesuai Standar	491.750.000	Dinas Kumkm
		Program Peningkatan Pemberdayaan Usaha Kecil	Persentase Produk Usaha Kecil Sektor Pertanian Yang Tersertifikasi	900.000.000	Dinas Kumkm
		Program Pengembangan Sumberdaya, Fasilitasi Dan Akses Industri	Presentase Tenaga Kerja Industri Pada Sektor Pertanian	645.000.000	Disperindag



Prioritas	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Pagu Indikatif 2019	PD Yang Bertanggung Jawab
		Program Peningkatan Pelayanan Teknis Sertifikasi Dan Pengendalian Mutu Produk	Persentase Komoditi Unggulan Daerah Diuji Yang Memenuhi Standar Pengujian	3.902.951.000	Uptd Balai Sertifikasi Dan Pengendalian Mutu
		Program Peningkatan Perencanaan Dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Pertambahan Jumlah Profil Investasi Sektor Pertanian Yang Digunakan Untuk Promosi Investasi Daerah Di Sektor Pertanian	87.500.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Pertambahan Jumlah UKM Pertanian Yang Bermitra Dengan Investor	56.250.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Peningkatan Promosi Penanaman Modal	Pertambahan Jumlah Investor Sektor Pertanian	225.000.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Dan Sistem Informasi	Persentase Perusahaan Sektor Pertanian Yang Sesuai Realisasi Investasi Dengan Rencana Investasi	260.000.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Peningkatan Pemberdayaan Usaha Kecil	Pertambahan Jumlah Pelaku Usaha Kecil Sektor Pertanian Yang Menandatangani Kesepakatan Kemitraan Dengan Dunia Usaha Dalam Daerah	76.500.000	Dinas KUMKM
			Persentase Pelaku Usaha Kecil Sektor Pertanian, Perkebunan Dan Peternakan Yang Menandatangani Kesepakatan Kemitraan Dengan Dunia Usaha Luar Daerah	150.000.000	Dinas KUMKM
			Persentase Usaha Kecil Sektor Pertanian, Perkebunan Dan Peternakan Yang Mendapatkan Izin Usaha	50.000.000	DINAS KUMKM
			Persentase Usaha Kecil Sektor Pertanian, Peternakan Dan Perkebunan Yang Difasilitasi Promosi/ Pemasaran Produknya Melalui Even Pameran	210.000.000	Dinas KUMKM
			Persentase Usaha Kecil Sektor Pertanian, Peternakan Dan Perkebunan Yang Difasilitasi Promosi/ Pemasaran Produknya Melalui Web	50.000.000	Dinas KUMKM

Prioritas	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Pagu Indikatif 2019	PD Yang Bertanggung Jawab
			Persentase Usaha Kecil Sektor Pertanian, Perkebunan Dan Peternakan Yang Mendapatkan Diseminasi Dan Pendampingan Akses Permodalan	32.000.000	Dinas KUMKM
	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Dibidang Pertanian	Program Pengembangan Pendayagunaan Sda, Teknologi Tepat Guna Dan Pelatihan Masyarakat	Persentase Kelompok Masyarakat Yang Mendayagunakan Teknologi Tepat Guna (Ttg) Di Sektor Pertanian	1.843.301.336	Dinas PMD
		Program Pengembangan Tanaman Pangan Dan Holtikultura	Pertambahan Jumlah Kelompok Yang Menerapkan Peningkatan Mutu, Daya Saing, Dan Nilai Tambah Hasil Tanaman Pangan Dan Hortikultura	2.752.480.000	Dinas Pertanian
		Program Pengembangan Perkebunan	Pertambahan Jumlah Kelompok Yang Menerapkan Peningkatan Mutu, Daya Saing, Dan Nilai Tambah Hasil Perkebunan	9.609.600.000	Dinas Pertanian
		Program Pengembangan Peternakan Dan Kesehatan Hewan	Pertambahan Jumlah Kelompok Yang Menerapkan Peningkatan Mutu, Daya Saing, Dan Nilai Tambah Hasil Peternakan	2.900.000.000	Dinas Pertanian
	Pengembangan Kawasan Strategis KTM Batu Betumpang	Program Pengembangan Tanaman Pangan Dan Holtikultura	Tersedianya Kawasan Budiaya Komoditas Padi Di Ktm Batu Betumpang	600.000.000	Dinas Pertanian
			Tersedianya Kawasan Budiaya Komoditas Cabai Di KTM Batu Betumpang	1.500.000.000	Dinas Pertanian
			Tersedianya Kawasan Budiaya Bawang Merah Di KTM Batu Betumpang	500.000.000	Dinas Pertanian
			Tingkat Produktifitas Petani Di kawasan KTM Batu Betumpang	65.000.000	Dinas Pertanian
		Program Kebinamargaan	Persentase Panjang Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap Di Kawasan Strategis Ktm Batu Betumpang	13.800.000.000	Dinas PUPR
			Persentase Jembatan Provinsi Dalam Kondisi Baik Di Kawasan Strategis KTM Batu Betumpang	332.739.256	Dinas PUPR
		Program Pengembangan Masyarakat Dan Kawasan Transmigrasi	Tingkat Kesejahteraan Petani Masyarakat Transmigrasi Di Kawasan Ktm Batu Betumpang	81.520.000	Disnaker

Prioritas	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Pagu Indikatif 2019	PD Yang Bertanggung Jawab
	9 Pengembangan Kawasan Strategis Kota Terpadu Mandiri Gantung	Program Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tersedianya Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Agropolitan Dan Tekno Park Pertanian Lada Air Gegas Yang Di Implementasikan	750.000.000	Dinas PUPR
		Program Kebinamargaan	Persentase Panjang Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap Di Kawasan Kota Terpadu Mandiri Gantung	20.522.005.508	Dinas PUPR
			Persentase Jembatan Provinsi Dalam Kondisi Baik Di Kawasan Kota Terpadu Mandiri Gantung	16.449.300.928	Dinas PUPR
		Program Pengembangan Tanaman Pangan Dan Holtikultura	Tersedianya Kawasan Budidaya Komoditas Padi Di Kawasan Kota Terpadu Mandiri Gantung	400.000.000	Dinas Pertanian
			Tersedianya Kawasan Budidaya Komoditas Cabai Di Kawasan Kota Terpadu Mandiri Gantung	1.500.000.000	Dinas Pertanian
			Tersedianya Kawasan Budidaya Bawang Merah Di Kawasan Kota Terpadu Mandiri Gantung	500.000.000	Dinas Pertanian
			Tingkat Produktifitas Petani Di kawasan KTM Gantung	65.000.000	Dinas Pertanian
		Program Pengembangan Masyarakat Dan Kawasan Transmigrasi	Tingkat Kesejahteraan Petani Masyarakat Transmigrasi Di Kawasan Ktm Gantung	185.000.000	Disnaker
		Program Pengembangan Perkebunan	Tersedianya Kawasan Pengembangan Budidaya Lada	1.520.000.000	Dinas Pertanian
	10 Pengembangan Kawasan Agropolitan Dan Tekno Park Pertanian Lada Air Gegas	Program Penataan Ruang Dan Pertanahan	Tersedianya Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Agropolitan Dan Tekno Park Pertanian Lada Air Gegas Yang Di Implementasikan	750.000.000	Dinas PUPR
		Program Pengembangan Peternakan Dan Kesehatan Hewan	Tersedianya Kawasan Pengembangan Ternak Sapi	3.590.000.000	Dinas Pertanian
		Program Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup	Tersedinya Dokumen Klhs Agropolitan Berbasis Demonstration Farming Sawah Mekanisasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Yang Digunakan Dalam Perencanaan Kawasan	650.000.000	DLH
			Persentase Pertumbuhan Produksi Sub Sektor Perikanan	62.189.904.350	

Prioritas	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Pagu Indikatif 2019	PD Yang Bertanggung Jawab
<b>2</b>	<b>Pembangunan Bahari</b>			<b>119.592.537.182</b>	
	12 Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tata Ruang Laut Serta Penegakan Perundang-Undangan Kelautan Dan Perikanan.	Program Pengembangan Pengelolaan Ruang Laut	Luas Kawasan Konservasi Yang Dicapadangkan (Ha)	2.100.000.000	DKP
			Persentase Sarana Dan Prasarana Yang Terbangun Di Desa Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (%)	9.456.000.000	DKP
			Persentase Usulan Pemanfaatan Ruang Laut Yang Terekomendasi (%)	456.000.000	DKP
		Program Peningkatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Persentase Pelaku Usaha Yang Taat Aturan (%)	2.550.000.000	DKP
		Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Laut	Prosentase Pelabuhan Khusus (Pelsus) Dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) Yang Memiliki Izin	399.898.000	DISHUB
	13 Pengembangan Standarisasi SDM Dalam Meningkatkan Daya Saing Sektor Kelautan Dan Perikanan	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Latihan Kerja Industri	Persentase Pencari Kerja Yang Mendapat Pelatihan Tentang Kelautan Dan Perikanan Yang Berkompetensi	250.000.000	UPTD BLKI
		Program Pengembangan Pelatihan Dan Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Peningkatan Tenaga Kerja Kelautan Dan Perikanan Bersertifikat Kompetensi	300.000.000	Disnaker
		Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja Sektor Perikanan	57.857.000	UPTD Balai Produktifitas
		Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Kejuruan	Persentase Jumlah SMK Dengan Program Keahlian Perikanan Yang Memiliki Akreditasi A	627.511.765	Dinas Pendidikan
			Persentase Jumlah SMK Program Keahlian Kelautan Dan Perikanan Yang Mengeluarkan Sertifikasi Profesi Pihak 1 (LSP-P1)	627.511.765	Dinas Pendidikan
	14 Peningkatan Produksi, Kualitas Dan Produktifitas Tenaga Kerja Sektor Kelautan Dan Perikanan	Program Peningkatan Pemberdayaan Dan Pengembangan Koperasi	Persentase Peningkatan Volume Usaha Sektor Kelautan Dan Perikanan	1.364.300.000	Dinas KUMKM

Prioritas	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Pagu Indikatif 2019	PD Yang Bertanggung Jawab
		Program Peningkatan Pemberdayaan Usaha Kecil	Persentase Pelaku Usaha Kecil Sektor Kelautan Dan Perikanan Yang Menandatangani Kesepakatan Kemitraan Dengan Dunia Usaha Luar Daerah	150.000.000	Dinas KUMKM
			Persentase Usaha Kecil Sektor Kelautan Dan Perikanan Yang Mendapatkan Izin Usaha	95.000.000	Dinas KUMKM
			Persentase Usaha Kecil Sektor Kelautan Dan Perikanan Yang Difasilitasi Promosi/ Pemasaran Produknya Melalui Even Pameran	342.000.000	Dinas KUMKM
			Persentase Usaha Kecil Sektor Kelautan Dan Perikanan Yang Mendapatkan Mendapatkan Diseminasi Dan Pendampingan Akses Permodalan	80.000.000	Dinas KUMKM
			Persentase Usaha Kecil Sektor Kelautan Dan Perikanan Yang Difasilitasi Promosi/ Pemasaran Produknya Melalui Web	100.000.000	Dinas KUMKM
		Program Peningkatan Pelayanan Teknis Latihan Perkoperasian, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah	Persentase Sdm Koperasi Sektor Perikanan Terlatih	244.500.000	Uptd Balai Latihan Perkoperasian, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah
			Persentase SDM Usaha Kecil Sektor Perikanan Terlatih	650.980.000	Uptd Balai Latihan Perkoperasian, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah
		Program Pengembangan Sumberdaya, Fasilitasi Dan Akses Industri	Persentase Tenaga Kerja Yang Terserap Di Industri Kelautan Dan Perikanan	280.000.000	Disperindag
		Program Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya Dan Pengolahan Hasil Perikanan	Volume Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	980.000.000	Dkp
			Angka Konsumsi Ikan (Kg/Org/Tahun)	1.446.000.000	Dkp
			Volume Produksi Olahan (Ton)	175.000.000	Dkp
		Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Volume Produksi Perikanan Tangkap (Ton/Tahun)	20.945.000.000	Dkp
			Nilai Tukar Nelayan (Indeks)	2.400.000.000	Dkp
		Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pembenihan Ikan Air Payau	Pertambahan Jumlah Produksi Benih Ikan Yang Unggul (Juta Ekor)	885.000.000	Uptd Balai Benih Ikan Air Payau (Bbiap) Tanjung Krasak

Prioritas	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Pagu Indikatif 2019	PD Yang Bertanggung Jawab
		Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pembenihan Ikan Laut	Pertambahan Jumlah Produksi Benih Ikan Yang Unggul (Juta Ekor)	540.000.000	Uptd Balai Benih Ikan Laut (Bbil) Tanjung Rusa
		Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pembenihan Ikan Air Tawar	Pertambahan Jumlah Produksi Benih Ikan Yang Unggul (Juta Ekor)	115.500.000	Uptd Balai Benih Ikan Sentral (Bbis) Pemali
	15 Pembinaan Hubungan Industri Dan Kesehatan Kerja Sektor Kelautan Dan Perikanan	Program Peningkatan Pengawasan Ketenagakerjaan, Pembinaan Hub. Industrial Dan Jaminan Sosial	Persentase Perusahaan Kelautan Perikanan Yang Diperiksa Dan Dibina Sesuai Standar Pemeriksaan Perusahaan	7.670.000	Disnaker
	16 Peningkatan Standarisasi Produk Dan Jasa KUKM Dalam Meningkatkan Daya Saing Sektor Kelautan Dan Perikanan	Program Peningkatan Pembinaan Kelembagaan Dan Pengawasan Koperasi	Persentase Jumlah Koperasi Bidang Kelautan Dan Perikanan Yang Berkualitas Sesuai Standar	632.250.000	Dinas KUMKM
			Persentase Pertumbuhan Kelembagaan Koperasi Aktif Sektor Kelautan Dan Perikanan	210.000.000	Dinas KUMKM
		Program Peningkatan Pelayanan Teknis Laboratorium Pengujian Dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan	Persentase Produk Hasil Kelautan Dan Perikanan Yang Memenuhi Standar Mutu Dan Keamanan Pangan	6.550.000.000	Uptd Laboratorium Pengujian Dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan
	17 Pengembangan Produk Kelautan Dan Perikanan, Serta Mendorong Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, Keterpaduan Dan Kerjasama Antarsektor, Antar Pemerintah, Dunia Usaha, Dan Masyarakat Dalam Mendukung Peluang Berusaha Dan Investasi Di Sektor Kelautan Dan Perikanan.	Program Peningkatan Perencanaan Dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Pertambahan Jumlah Profil Investasi Sektor Perikanan Dan Kelautan Yang Digunakan Untuk Promosi Investasi Di Sektor Perikanan Dan Kelautan	487.500.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Pertambahan Jumlah UKM Sektor Kelautan Dan Perikanan Yang Bermitra Dengan Investor	556.250.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Peningkatan Promosi Penanaman Modal	Pertambahan Jumlah Investor Sektor Kelautan Dan Perikanan	235.000.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Prioritas	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Pagu Indikatif 2019	PD Yang Bertanggung Jawab
		Program Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Dan Sistem Informasi	Presentase Perusahaan Sektor Kelautan Dan Perikanan Yang Sesuai Realisasi Investasi Dengan Rencana Investasi	251.250.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Peningkatan Pemberdayaan Usaha Kecil	Peningkatan Produk Usaha Kecil Sektor Kelautan Dan Perikanan Yang Tersertifikasi	2.475.000.000	Dinas KUMKM
			Pertambahan Jumlah Pelaku Usaha Kecil Sektor Kelautan Dan Perikanan Yang Menandatangani Kesepakatan Kemitraan Dengan Dunia Usaha Dalam Daerah	173.500.000	Dinas KUMKM
	Pengembangan Kawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap Dikawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok	610.000.000	Dkp
		Program Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya Dan Pengolahan Hasil Perikanan	Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya Dikawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok	73.000.000	Dkp
		Program Peningkatan Pembinaan Kelembagaan Dan Pengawasan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif Di Kawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok	34.000.000	Dinas KUMKM
		Program Peningkatan Pemberdayaan Usaha Kecil	Persentase Usaha Kecil Dikawasan Minapolitan Lepar Pongok Yang Mendapatkan Izin Usaha	2.500.000	Dinas KUMKM
			Persentase Usaha Kecil Dikawasan Minapolitan Lepar Pongok yang Mendapatkan Diseminasi Dan Pendampingan Akses Permodalan	8.000.000	Dinas KUMKM
		Program Pengembangan Wilayah Dan Pengawasan Industri	Pertumbuhan Jumlah Industri Perikanan Dikawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok	1.100.000.000	Disperindag
		Program Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup	Tersedianya Dokumen Klhs Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Minapolitan Lepar Pongok Yang Digunakan Untuk Perencanaan Kawasan	1.000.000.000	DLH
		Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Laut	Prosentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Pendukung Perhubungan Laut Kawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok	2.200.000.000	DISHUB
		Program Penataan Ruang Dan Pertanahan	Persentase Jumlah Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Strategis Provinsi (Ksp)	1.500.000.000	Dinas PUPR

Prioritas	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Pagu Indikatif 2019	PD Yang Bertanggung Jawab
			Kawasan Minapolitan Lepar Pongok Yang Di Implementasikan		
	Pengembangan Kawasan Strategis Etalase Perikanan Selat Nasik	Program Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya Dan Pengolahan Hasil Perikanan	Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya Dikawasan Strategis Etalase Perikanan Selat Nasik	73.000.000	Dkp
		Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap Dikawasan Strategis Etalase Perikanan Selat Nasik	610.000.000	Dkp
		Program Peningkatan Pembinaan Kelembagaan Dan Pengawasan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif Di Kawasan Strategis Etalase Perikanan Selat Nasik	34.000.000	Dinas KUMKM
		Program Peningkatan Pemberdayaan Usaha Kecil	Persentase Usaha Kecil Dikawasan Strategis Etalase Perikanan Selat Nasik Yang Mendapatkan Izin Uaha	2.500.000	Dinas KUMKM
			Persentase Usaha Kecil Dikawasan Sentra Selat Nasik Yang Mendapatkan Mendapatkan Diseminasi Dan Pendampingan Akses Permodalan	8.000.000	Dinas KUMKM
		Program Pengembangan Wilayah Dan Pengawasan Industri	Pertumbuhan Jumlah Industri Perikanan Dikawasan Strategis Etalase Perikanan Selat Nasik	1.100.000.000	Disperindag
		Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Laut	Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Pendukung Perhubungan Laut Kawasan Strategis Etalase Perikanan Selat Nasik	2.250.000.000	DISHUB
		Program Penataan Ruang Dan Pertanahan	Persentase Jumlah Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Strategis Provinsi (Ksp) Kawasan Etalase Perikanan Selat Nasik Yang Diimplementasikan	1.500.000.000	Dinas PUPR
	Pengembangan Kawasan Strategis Industri Perikanan Tanjung Binga	Program Peningkatan Pembinaan Kelembagaan Dan Pengawasan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif Di Kawasan Strategis Industri Perikanan Tanjung Binga	34.000.000	Dinas KUMKM
		Program Peningkatan Pemberdayaan Usaha Kecil	Persentase Usaha Kecil Dikawasan Strategis Industri Perikanan Tanjung Binga Yang Mendapatkan Izin Usaha	2.500.000	Dinas KUMKM
			Persentase Usaha Kecil Dikawasan Strategis Industri Perikanan Tanjung Binga Yang Mendapatkan Mendapatkan Diseminasi Dan	8.000.000	Dinas KUMKM



Prioritas	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Pagu Indikatif 2019	PD Yang Bertanggung Jawab
			Pendampingan Akses Permodalan		
		Program Pengembangan Sumber Daya Air	Pertumbuhan Panjang Bangunan Pemecah Gelombang Atau Penahan Abrasi Di Kawasan Strategis Industri Perikanan Tanjung Binga	750.000.000	Dinas PUPR
			Persentase Penyediaan Volume Air Baku Di Kawasan Strategis Industri Perikanan Tanjung Binga	250.000.000	Dinas PUPR
		Program Kebinamargaan	Persentase Panjang Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap Di Kawasan Strategis Industri Perikanan Tanjung Binga	2.436.783.800	Dinas PUPR
			Persentase Jembatan Provinsi Dalam Kondisi Baik Di Kawasan Strategis Industri Perikanan Tanjung Binga	259.040.020	Dinas PUPR
		Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap Di Kawasan Strategis Industri Perikanan Tanjung Binga	457.500.000	Dkp
		Program Penataan Ruang Dan Pertanahan	Persentase Jumlah Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Strategis Provinsi (Ksp) Kawasan Industri Perikanan Tanjung Binga Yang Diimplementasikan	1.500.000.000	Dinas PUPR
	21 Pengembangan Kawasan Pedesaan Minapolitan Manggar	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap Di Kawasan Pedesaan Minapolitan Manggar	152.500.000	Dkp
			Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik Dan Wisatawan Mancanegara)	42.440.734.832	
<b>3</b>	<b>Pengembangan Pariwisata</b>			<b>306.973.344.450</b>	
	22 Peningkatan Kuantitas Dan Kualitas SDM, Ekonomi Kreatif, Peran Serta Masyarakat Dan Kelembagaan Pariwisata	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata, Ekonomi Kreatif Dan Kelembagaan Kepariwisata	Persentase Sumber Daya Pariwisata Yang Terlatih Dan Tersertifikasi	3.513.327.500	Budpar
			Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif Yang Terlatih	3.001.750.000	Budpar
			Pertumbuhan Kelembagaan Pariwisata	2.109.635.000	Budpar

Prioritas	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Pagu Indikatif 2019	PD Yang Bertanggung Jawab
		Program Peningkatan Pembinaan Kelembagaan Dan Pengawasan Koperasi	Pertumbuhan Kelembagaan Koperasi Aktif Pendukung Pariwisata	105.000.000	KUMKM
		Program Peningkatan Pelayanan Teknis Latihan Perkoperasian, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah	Persentase Sdm Koperasi Sektor Pariwisata Terlatih	163.000.000	KUMKM
			Persentase SDM Usaha Kecil Sektor Pariwisata Terlatih	650.980.000	KUMKM
			Persentase Usaha Kecil Sektor Pariwisata Yang Mendapatkan Izin Usaha	94.000.000	KUMKM
			Persentase Usaha Kecil Sektor Pariwisata Yang Mendapatkan Mendapatkan Diseminasi Dan Pendampingan Akses Permodalan	48.000.000	KUMKM
		Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Kejuruan	Persentase Smk Pariwisata Terkreditasi A	627.511.765	Dinas Pendidikan
	23 Peningkatan Insfrastruktur, Sarana Dan Prasarana Pengembangan Destinasi Dan Pemasaran Pariwisata.	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Presentase Objek Wisata Yang Terkelola	6.510.436.000	Budpar
		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Persentase Tingkat Kunjungan Wisatawan	8.067.586.000	Budpar
		Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Laut	Prosentase Pemenuhan Sarana Dan Prasana Perhubungan Laut Di Lokasi Wisata	2.200.000.000	DISHUB
		Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Darat	Persentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Perhubungan Darat Dalam Menunjang Daerah Tujuan Wisata	1.200.000.000	DISHUB
		Program Kebinamargaan	Persentase Panjang Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap Di Daerah Pengembangan Destinasi Dan Pemasaran Pariwisata.	175.539.390.280	Dinas PUPR
			Persentase Jembatan Provinsi Dalam Kondisi Baik Di Daerah Pengembangan Destinasi Dan Pemasaran Pariwisata.	34.540.863.108	Dinas PUPR
		Program Peningkatan Pusat Pelayanan Usaha Terpadu Kukm	Pertumbuhan Produk Parekraf	840.000.000	Dinas KUMKM
		Program Pengembangan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Informasi Berkaitan Dengan Pemasaran Pariwisata Yang Dapat Diakses Masyarakat	1.005.000.000	Diskominfo

Prioritas	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Pagu Indikatif 2019	PD Yang Bertanggung Jawab
	Pengembangan Standarisasi SDM Dalam Meningkatkan Daya Saing Kepariwisata Daerah	Program Pengembangan Pelatihan Dan Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Peningkatan Tenaga Kerja Pariwisata Bersertifikat Kompetensi	300.000.000	Disnaker
		Program Peningkatan Pelayanan Teknis Latihan Kerja Industri	Persentase pencari Kerja Pariwisata Yang Mendapat Pelatihan	1.125.000.000	Upd Blki
		Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Peningkatan Produksi Per Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	77.143.000	Uptd Balai Produktifitas
		Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Kejuruan	Persentase Jumlah Smk Program Keahlian Pariwisata Yang Mengeluarkan Sertifikat Profesi Pihak 1 (Lsp-P1)	627.511.765	Dindik
		Program Peningkatan Pemberdayaan Dan Pengembangan Koperasi	Persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi Disektor Pariwisata	20.000.000	KUMKM
	Peningkatan Kualitas, Partisipasi Dan Prestasi Pemuda Di Berbagai Bidang Pembangunan, Dan Peningkatan Pengelolaan Ke Olah Raga Serta Mengembangkan Peran Serta Kebudayaan Dalam Mendukung Pembangunan Kepariwisata	Program Peningkatan Pemberdayaan Dan Pengembangan Pemuda	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Pemuda Lintas Negara	456.500.000	Diskepora
		Program Peningkatan Pembudayaan Dan Peningkatan Prestasi Olah Raga	Pertumbuhan Jumlah Peserta Yang Mengikuti Babel Sport Tourism	550.000.000	Diskepora
		Program Pengembangan Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kepemudaan Dan Olahraga	Presentase Jumlah Sarana Dan Prasaran Olahraga Yang Terbangun Dalam Mendukung Event Olahraga Regional Dan Nasional	1.500.000.000	Diskepora
		Program Pelestarian Budaya	Persentase Budaya Lokal Yang Dilindungi, Dikembangkan, Dimanfaatkan Dan Dibina	9.073.877.000	Budpar
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Industri Dan Kelembagaan Kepariwisata	Rasio Penyelenggaraan Event Penunjang Kepariwisata Dengan Priode Waktu Satu Tahun	2.394.317.000	Budpar

Prioritas	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Pagu Indikatif 2019	PD Yang Bertanggung Jawab
	26 Pembinaan Hubungan Industri Dan Kesehatan Kerja Disektor Pariwisata	Program Peningkatan Pengawasan Ketenagakerjaan, Pembinaan Hub. Industrial Dan Jaminan Sosial	Persentase Jumlah Perusahaan Dibidang Pariwisata Yang Diperiksa Dan Dibina Sesuai Standar Pemeriksaan Perusahaan	34.515.000	Disnaker
	27 Peningkatan Standarisasi Produk Dan Jasa KUKM Dalam Meningkatkan Daya Saing Kepariwisata	Program Peningkatan Pemberdayaan Usaha Kecil	Peningkatan Produk Usaha Kecil Sektor Pariwisata Yang Tersertifikasi	1.125.000.000	Dinas KUMKM
		Program Pengembangan Sumberdaya, Fasilitasi Dan Akses Industri	Persentase Tenaga Kerja Yang Terserap Di Industri Pariwisata	429.016.200	Disperindag
		Program Pengembangan Wilayah Dan Pengawasan Industri	Persentase Industri Yang Memenuhi Standar	1.150.000.000	Disperindag
	28 Pengembangan Pariwisata Daerah, Serta Mendorong Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, Keterpaduan Dan Kerjasama Antar Sektor, Antar Pemerintah, Dunia Usaha, Dan Masyarakat Dalam Mendukung Peluang Berusaha Dan Investasi Di Bidang Pariwisata.	Program Peningkatan Koordinasi Bumd, Penanaman Modal, Pariwisata Dan Budaya	Prosentase Jumlah Kebijakan Bumd, Penanaman Modal, Pariwisata Dan Budaya Yang Di Implementasikan	829.500.000	Biro Ekonomi
		Program Peningkatan Perencanaan Dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Pertambahan Jumlah Profil Investasi Pariwisata Yang Digunakan Untuk Promosi Investasi Di Sektor Pariwisata	87.500.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Pertambahan Jumlah UKM Pariwisata Yang Bermitra Dengan Investor	431.250.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Peningkatan Promosi Penanaman Modal	Pertambahan Jumlah Investor Pariwisata	680.000.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Dan Sistem Informasi	Presentase Perusahaan Yang Sesuai Realisasi Investasi Disektor Pariwisata Dengan Rencana Investasi	275.000.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Prioritas	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Pagu Indikatif 2019	PD Yang Bertanggung Jawab
	29 Pengembangan Kawasan Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Kalian	Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Darat	Persentase Pemenuhan Sarana Parasarana Perhubungan Di Kawasan Strategis Tanjung Kalian	2.257.581.071	DISHUB
	30 Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Tanjung Gunung Dan Kawasan Lintas Timur Pulau Bangka	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase Sarana Dan Prasarana Pariwisata Di Kawasan Pariwisata Tanjung Gunung Yang Terbangun Dan Terkelola	723.000.000	Budpar
			Persentase Sarana Dan Prasarana Pariwisata Di Kawasan Lintas Timur Pulau Bangka Yang Terbangun Dan Terkelola	723.000.000	Budpar
		Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Darat	Persentase Pemenuhan Sarana Parasarana Penunjang Jalan Kawasan Peruntukan Pariwisata Tanjung Gunung Dan Kawasan Lintas Timur Pulau Bangka	3.750.000.000	DISHUB
		Program Kebinamargaan	Persentase Panjang Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap Di Kawasan Peruntukan Pariwisata Tanjung Gunung Dan Kawasan Lintas Timur Pulau Bangka	11.140.819.800	Dinas PUPR
			Persentase Jembatan Provinsi Dalam Kondisi Baik Di Kawasan Peruntukan Pariwisata Tanjung Gunung Dan Kawasan Lintas Timur Pulau Bangka	5.119.419.256	Dinas PUPR
		Program Penataan Ruang Dan Pertanahan	Persentase Jumlah Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Pariwisata Tanjung Gunung Dan Lintas Timur Pulau Bangka Yang Diimplementasikan	500.000.000	Dinas PUPR
	31 Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Kelayang	Program Penataan Ruang Dan Pertanahan	Persentase Jumlah Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Strategis Nasional (Ksn) Pariwisata Tanjung Kelayang Yang Diimplementasikan	1.000.000.000	Pupr
		Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Darat	Persentase Pemenuhan Sarana Parasarana Penunjang Perhubungan Darat Di Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang	3.000.000.000	DISHUB
	32 Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase Sarana Dan Prasarana Pariwisata Di Kawasan Kota Tua Muntok	361.500.000	Budpar

Prioritas	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Pagu Indikatif 2019	PD Yang Bertanggung Jawab
	Kawasan Kota Tua Mentok				
		Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Darat	Persentase Pemenuhan Sarana Parasarana Penunjang Perhubungan Darat Di Kawasan Kota Tua Muntok	2.257.581.071	DISHUB
	33 Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan Gunung Permisian Simpang Rimba	Program Penataan Ruang Dan Pertanahan	Persentase Jumlah Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Peruntukan Pariwisata Kawasan Gunung Permisian Simpang Rimba Yang Diimplementasikan		Pupr
		Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Darat	Persentase Pemenuhan Sarana Parasarana Penunjang Perhubungan Darat Di Kawasan Pariwisata Gunung Permisian Simpang Rimba	525.000.000	DISHUB
	34 Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Museum Nasional Maritim Belitung	Program Penataan Ruang Dan Pertanahan	Persentase Jumlah Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Pariwisata Museum Nasional Maritim Belitung Yang Diimplementasikan	500.000.000	Pupr
		Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Darat	Persentase Pemenuhan Sarana Parasarana Penunjang Perhubungan Darat Di Kawasan Pariwisata Museum Nasional Maritim Beltung	500.000.000	DISHUB
		Program Kebinamargaan	Persentase Panjang Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap Di Kawasan Pariwisata Museum Nasional Maritim Beltung	750.000.000	Pupr
			Persentase Jembatan Provinsi Dalam Kondisi Baik Di Kawasan Pariwisata Museum Nasional Maritim Beltung	350.000.000	PUPR
	35 Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata Gunung Menumbing	Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Darat	Persentase Pemenuhan Sarana Parasarana Penunjang Perhubungan Darat Di Kawasan Pariwisata Gunung Menumbing	525.000.000	DISHUB
	36 Pengembangan Kawasan Konektivitas Pulau Bangka Dengan Pulau Sumatera	Program Kebinamargaan	Persentase Panjang Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap Di Kawasan Konektifitas Pulau Bangka Dengan Pulau Sumatera	5.917.931.800	Dinas PUPR
			Persentase Jembatan Provinsi Dalam Kondisi Baik Di Kawasan Konektifitas Pulau Bangka Dengan Pulau Sumatera	2.204.901.834	Dinas PUPR

Prioritas	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Pagu Indikatif 2019	PD Yang Bertanggung Jawab
		Program Pengembangan Sumber Daya Air	Persentase Panjang Talud Yang Terbangun Di Kawasan Konektifitas Pulau Bangka Dengan Pulau Sumatera	350.000.000,00	Dinas PUPR
			Persentase Volume Air Baku Yang Tersedia Dapat Digunakan Di Kawasan Konektifitas Pulau Bangka Dengan Pulau Sumatera	250.000.000,00	Dinas PUPR
		Program Pengelolaan Ruang Laut	Persentase Usulan Pemanfaatan Ruang Laut Yang Terekomendasi Sesuai Dengan Peruntukannya Pada Kawasan Konektifitas Pulau Bangka Dengan Pulau Sumatera	60.000.000	Dkp
	37 Pengembangan Kawasan Konektivitas Pulau Bangka Dengan Pulau Belitung Serta Pulau-Pulau Kecil	Program Pengembangan Sumber Daya Air	Persentase Panjang Talud Yang Terbangun Di Kawasan Konektivitas Pulau Bangka Dengan Pulau Belitung Serta Pulau-Pulau Kecil	350.000.000,00	Dinas PUPR
			Persentase Volume Air Baku Yang Tersedia Dapat Digunakan Di Kawasan Konektivitas Pulau Bangka Dengan Pulau Belitung Serta Pulau-Pulau Kecil	250.000.000,00	Dinas PUPR
		Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Laut	Persentase Pulau-Pulau Berpenduduk Yang Terkoneksi Kawasan Konektivitas Pulau Bangka Dengan Pulau Belitung Serta Pulau-Pulau Kecil	2.225.000.000	DISHUB
<b>Pengembangan 4 Tata Kelola Pertambangan</b>				<b>210.538.570.428</b>	
	38 Peningkatan Tata Kelola Dan Nilai Tambah Produk Sumber Daya Mineral;	Program Pengembangan Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan	Persentase Perusahaan Pertambangan Non Logam Yang Menerapkan Good Mining Practices	450.000.000	Dinas Esdm
		Program Pengembangan Pertambangan Mineral Logam	Persentase Perusahaan Pertambangan Logam Yang Menerapkan Good Mining Practices	550.000.000	Dinas Esdm
		Program Peningkatan Pengelolaan Geologi Dan Air Tanah	Persentase Cadangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan Yang Potensial	500.000.000	Dinas Esdm
		Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Perekonomian	Prosentase Jumlah Kebijakan Perekonomian Yang Diimplementasikan	1.316.000.000	Biro Ekonomi
			Pertumbuhan Industri Turunan Potensi Sumber Daya Mineral Yang Dikembangkan	140.000.000	Disperindag
		Program Pengembangan Wilayah Dan	Persentase Industri Yang Memenuhi Standar	1.150.000.000	Disperindag

Prioritas	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Pagu Indikatif 2019	PD Yang Bertanggung Jawab
		Pengawasan Industri			
	39 Pengembangan Standarisasi SDM Dalam Meningkatkan Daya Saing Produk Sumber Daya Mineral	Program Pengembangan Pelatihan Dan Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Peningkatan Tenaga Kerja Sektor Sumber Daya Mineral Bersertifikat Kompetensi	300.000.000	Disnaker
		Program Peningkatan Pelayanan Teknis Latihan Kerja Industri	Persentase Tenaga Kerja Bidang Sumber Daya Mineral Yang Mendapat Pelatihan Pertambangan Berkelanjutan	250.000.000	Upd Blki
		Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Peningkatan Produksi Per Tenaga Kerja Sektor Sumber Daya Mineral	77.143.000	Uptd Balai Produktifitas
		Program Peningkatan Pelayanan Teknis Latihan Perkoperasian, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah	Persentase Sdm Koperasi Sektor Sumber Daya Mineral Terlatih	163.000.000	Uptd Balai Latihan Perkoperasian, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah
			Persentase SDM Usaha Kecil Sektor Sumber Daya Mineral Terlatih	443.850.000	Uptd Balai Latihan Perkoperasian, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah
		Program Peningkatan Pemberdayaan Usaha Kecil	Persentase Usaha Kecil Sektor Pertambangan Yang Mendapatkan Izin Usaha	1.000.000	Dinas Umkm
			Persentase Usaha Kecil Sektor Pertambangan Yang Difasilitasi Promosi/ Pemasaran Produknya Melalui Even Pameran	58.000.000	DINAS UMKM
			Persentase Usaha Kecil Sektor Pertambangan Yang Difasilitasi Promosi/ Pemasaran Produknya Melalui Web	20.000.000	DINAS UMKM
			Persentase Usaha Kecil Sektor Pertambangan Yang Mendapatkan Mendapatkan Diseminasi Dan Pendampingan Akses Permodalan	8.000.000	DINAS UMKM
	40 Pembinaan Hubungan Industri Dan Kesehatan Kerja Sektor Sumber Daya Mineral	Program Peningkatan Pengawasan Ketenagakerjaan, Pembinaan Hub. Industrial Dan Jaminan Sosial	Persentase Perusahaan Sumber Daya Mineral Yang Diperiksa Dan Dibina Sesuai Standar Pemeriksaan Perusahaan	19.175.000	Disnaker



Prioritas	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Pagu Indikatif 2019	PD Yang Bertanggung Jawab
	41 Pengembangan Produk Sumber Daya Mineral, Serta Mendorong Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi, Keterpaduan Dan Kerjasama Antarsektor, Antar Pemerintah, Dunia Usaha, Dan Masyarakat Dalam Mendukung Peluang Berusaha Dan Investasi Di Sektor Sumber Daya Mineral	Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Sumber Daya Alam	Prosentase Jumlah Kebijakan Pembangunan Sumber Daya Mineral Yang Diimplementasikan	830.000.000	Biro Ekonomi
		Program Peningkatan Perencanaan Dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Pertambahan Jumlah Profil Investasi Sumber Daya Mineral Yang Digunakan Untuk Promosi Investasi Disektor Sumber Daya Mineral	87.500.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Pertambahan Jumlah UKM Yang Bermitra Dengan Investor Sumber Daya Mineral	56.250.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Peningkatan Promosi Penanaman Modal	Pertambahan Jumlah Investor Sumber Daya Mineral	380.000.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Dan Sistem Informasi	Presentase Perusahaan Sumber Daya Mineral Yang Sesuai Realisasi Investasi Dengan Rencana Investasi	282.192.452	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu	Presentase Ketepatan Waktu Penerbitan Perizinan Sumber Daya Mineral	1.365.000.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Persentase Pertumbuhan Produksi Sektor Industri Pengolahan	85.595.729.988	
	42 Kawasan Industri Dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular	Program Penataan Ruang Dan Pertanahan	Persentase Tersedianya Lahan Bersertifikat Untuk Kepentingan Di Kawasan Industri Dan Pelabuhan Terpadu Tanjung Ular	25.000.000.000	Dinas Pupr
		Program Pengembangan Sumber Daya Air	Persentase Panjang Talud Yang Terbangun Di Kawasan Ndustri Dan Pelabuhan Terpadu (Kipt) Tanjung Ular	350.000.000,00	Dinas Pupr

Prioritas	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Pagu Indikatif 2019	PD Yang Bertanggung Jawab
		Program Pengembangan Wilayah Dan Pengawasan Industri	Pertumbuhan Jumlah Industri Di Kawasan Industri Terpadu (Kipt) Tanjung Ular	1.100.000.000	Disperindag
		Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Laut	Prosentase Sarana Dan Prasana Perhubungan Laut Kawasan Industri Dan Pelabuhan Terpadu (Kipt) Tanjung Ular Yang Terbangun Serta Digunakan	2.250.000.000	DISHUB
	Pengembangan Kawasan Strategis Industri Terpadu Air Kelik (KIAK)	Program Pengembangan Sumber Daya Air	Persentase Panjang Talud Yang Terbangun Di Kawasan Strategis Industri Terpadu Air Kelik	350.000.000	Dinas Pupr
			Persentase Penyediaan Volume Air Baku Di Kawasan Strategis Industri Terpadu Air Kelik	250.000.000	DINAS PUPR
		Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Laut	Prosentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Pendukung Perhubungan Laut Di Kawasan Strategis Industri Terpadu Air Kelik	375.000.000	DISHUB
	Pengembangan Pelabuhan Dan Kawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung Berikat	Program Kebinamargaan	Persentase Panjang Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap Di Kawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung Berikat	13.870.579.800	Dinas Pupr
			Persentase Jembatan Provinsi Dalam Kondisi Baik Di Kawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung Berikat	11.208.518.388	Dinas Pupr
		Program Peningkatan Tata Kelola Hutan	Persentase Luas Areal Kawasan Hutan Yang Dikelola Didi Kawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung Berikat	747.042.000	Dinas Kehutanan
		Program Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup	Tersedianya Dokumen Klls Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Kawasan Industri Dan Pelabuhan Terpadu Tanjung Berikat Yang Digunakan Dalam Perencanaan Kawasan	900.000.000	F
		Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Laut	Prosentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Pendukung Perhubungan Laut Di Kawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung Berikat	1.800.000.000	DISHUB
		Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Darat	Prosentase Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Pendukung Perhubungan Darat Menuju Kawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung Berikat	3.000.000.000	DISHUB

Prioritas	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Pagu Indikatif 2019	PD Yang Bertanggung Jawab
		Program Penataan Ruang Dan Pertanahan	Persentase Jumlah Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Strategis provinsi (Ksp) Industri Dan Pelabuhan Terpadu Tanjung Berikat Yang Diimplementasikan	1.000.000.000	Dinas Pupr
	45 Pengembangan Kawasan Strategis Industri Sadai	Program Pengembangan Sumber Daya Air	Persentase Panjang Talud Yang Terbangun Di Kawasan Strategis Industri Sadai	350.000.000	Dinas Pupr
			Persentase Penyediaan Volume Air Baku Di Kawasan Strategis Industri Sadai	250.000.000	DINAS PUPR
		Program Penataan Ruang Dan Pertanahan	Persentase Tersedianya Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Strategis provinsi (Ksp) Kipt Sadai	1.000.000.000	Dinas Pupr
		Program Pengembangan Wilayah Dan Pengawasan Industri	Pertumbuhan Jumlah Industri Di Kawasan Strategis Industri Sadai	1.100.000.000	Disperindag
		Program Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup	Tersedianya Dokumen Klhs Kawasan Strategis Provinsi Kipt Sadai Yang Digunakan Untuk Perencanaan Kawasan	900.000.000	DLH
	46 Pengembangan Kawasan Strategis Industri Terpadu Di Teluk Klabat Belinyu	Program Kebinarmagaan	Persentase Panjang Jalan Provinsi Menuju Dan Dikawasan Strategis Industri Perikanaan Terpadu Teluk Klabat Belinyu Dalam Kondisi Mantap	14.590.089.800	Dinas Pupr
		Program Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya Dan Pengolahan Hasil Perikanan	Pertumbuhan Volume Produksi Olahan Dikawasan Strategis Industri Perikanaan Terpadu Teluk Klabat (Ton)	300.000.000	Dkp
		Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap Dikawasan Strategis Industri Perikanaan Terpadu Teluk Klabat	610.000.000	Dkp
		Program Peningkatan Pembinaan Kelembagaan Dan Penawasan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif Di Kawasan Strategis Teluk Kelabat Belinyu	34.000.000	Dinas KUMKM
		Program Peningkatan Pemberdayaan Usaha Kecil	Persentase Usaha Kecil Dikawasan Sentra Teluk Kelabat Belinyu Yang Mendapatkan Izin Usaha	2.500.000,00	Dinas KUMKM
			Persentase Usaha Kecil Dikawasan Sentra Teluk Kelabat Belinyu Yang Mendapatkan Mendapatkan Diseminasi Dan Pendampingan Akses Permodalan	8.000.000,00	DINAS KUMKM
		Program Pengembangan Wilayah Dan Pengawasan Industri	Pertumbuhan Jumlah Industri Di Kawasan Strategis Industri Perikanaan Terpadu Di	1.100.000.000	Disperindag

Prioritas	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Pagu Indikatif 2019	PD Yang Bertanggung Jawab
			Teluk Klabat Belinyu		
		Program Penataan Ruang Dan Pertanahan	Persentase Tersedianya Regulasi Penataan Ruang Untuk Kawasan Strategis provinsi (Ksp) Pelabuhan Dan Industri Teluk Kelabat	750.000.000	Dinas Pupr
		Program Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup	Tersedianya Dokumen Klhs Kawasan Strategis Provinsi Pelabuhan Dan Industri Teluk Kelabat Yang Digunakan Untuk Perencanaan Kawasan	750.000.000	DLH
	47 Peningkatan Pembangunan Kawasan Industri	Program Pengembangan Wilayah Dan Pengawasan Industri	Pertumbuhan Industri/Sentra/Kawasan Industri	1.650.000.000	Disperindag
			Persentase Pertumbuhan Produksi Sub Sektor Ketenagalistrikan	15.450.000.000	
	48 Pemenuhan Energi Listrik Untuk Medorong Pengembangan Industri Berbasis Potensi Dearah Serta Peningkatan Rasio Elektrifikasi;	Program Pengembangan Sumber Daya Energi	Persentase Penggunaan Ebt	15.000.000.000	Esdm
			Persentase Perusahaan Yang Pendistribusian Minyak Dan Gas Sesuai Standar	250.000.000	ESDM
			Persentase Perusahaan Di Bidang Ketenagalistrikan Yang Sesuai Standar Yang Diinginkan	200.000.000	ESDM
<b>5</b>	<b>Peningkatan Pendapatan Pemerintah Daerah</b>			<b>51.116.838.284</b>	
	49 Peningkatan Potensi Penggalan Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Untuk Pemanfaatan Sebesar Besarnya Bagi Kemakmuran Masyarakat.	Program Peningkatan Tata Kelola Pendapatan Pajak Daerah	Prosentase Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Daerah	2.506.533.250	Bakuda
		Program Peningkatan Tata Kelola Pendapatan Retribusi Daerah Dan Pendapatan Lain Lain Yang Sah	Prosentase Kontribusi Retribusi Daerah Dan Pendapatan Lain-Lain Terhadap Pendapatan Asli Daerah	1.511.430.825,00	Bakuda
		Program Pengembangan Pelatihan Dan Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Dari Tenaga Kerja Asing	200.000.000	Disnaker

Prioritas	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Pagu Indikatif 2019	PD Yang Bertanggung Jawab
		Program Peningkatan Pelayanan Teknis Laboratorium Lingkungan	Persentase Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Dari Lab Lingkungan	2.323.874.209	DLH
		Program Pelayanan Teknis Laboratorium Kesehatan	Persentase Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Dari Lab Kesehatan	550.000.000	Dinkes
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Asn	Persentase Kontribusi Penyelenggaraan Diklat Terhadap Retribusi Daerah	2.400.000.000	Bkpsdm
		Program Penataan Ruang Dan Pertanahan	Persentase Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Dari Peralatan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	220.000.000	Pupr
		Program Pengawasan Dan Peralatan	Persentase Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Dari Lab Pengujian Bina Marga	165.000.000	Uptd Pengawasan Dan Peralatan Belitung
		Program Pengembangan Pertambangan Mineral Logam	Pertambahan Jumlah Dbh (Dana Bagi Hasil) Sda (Sumber Daya Alam) Mineral Logam	250.000.000	Dinas Esdm
		Program Pengembangan Sumber Daya Energi	Pertambahan Jumlah Lifting Migas Babel	300.000.000	Dinas Esdm
		Program Peningkatan Pengelolaan Geologi Dan Air Tanah	Persentase Pertumbuhan Pendapatan Daerah Dari Retribusi Pergantian Biaya Cetak Peta	200.000.000	Dinas Esdm
		Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Pertambahan Pendapatan Asli Daerah Dari Layanan Fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan (Ppi) (Juta Rupiah)	2.200.000.000	Dkp
		Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pembenihan Ikan Air Payau	Pertambahan Jumlah Pendapatan Dari Layanan Fungsi Produksi Dan Penanganan Hama Dan Penyakit (Juta Rupiah)	1.850.000.000	Uptd Balai Benih Ikan Air Payau (Bbiap) Tanjung Krasak
		Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pembenihan Ikan Laut	Pertambahan Jumlah Pendapatan Dari Layanan Fungsi Produksi Dan Penanganan Hama Dan Penyakit (Juta Rupiah)	1.200.000.000	Uptd Balai Benih Ikan Laut (Bbil) Tanjung Rusa
		Program Peningkatan Pengendalian, Oprasional Dan Kemandarudaraan	Prosentase Pertambahan Pendapatan Dari Pengelolaan Perhubungan Udara	35.240.000.000	DISHUB
<b>Peningkatan 6 Ekonomi Masyarakat</b>				<b>398.205.448.182</b>	
	50 Penciptaan Peluang Kesempatan Kerja Bagi Pencari Kerja	Program Pengembangan Pelatihan Dan Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja Yang Ditempatkan	1.935.000.000	Disnaker
		Program Pengembangan Sumber Daya,	Persentase Tenaga Kerja Industri Terhadap Total Tenaga	4.951.778.000	Disperindag

Prioritas	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Pagu Indikatif 2019	PD Yang Bertanggung Jawab
		Fasilitasi Dan Akses Industri	Kerja (%)		
		Program Peningkatan Pemberdayaan Dan Pengembangan Pemuda	Persentase Pemuda Yang Bekerja	330.847.117	Diskepora
		Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Persentase Penduduk Yang Bekerja Di Sektor Perikanan Tangkap	500.000.000	Diskepora
		Program Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya Dan Pengolahan Hasil Perikanan	Persentase Penduduk Yang Bekerja Di Sektor Perikanan Budidaya Dan Usaha Pengolahan & Pemasaran	3.054.000.000	Dkp
		Program Pengembangan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Jumlah Informasi Berkaitan Dengan Penciptaan Lapangan Pekerjaan Yang Diakses Oleh Pencari Kerja	1.005.000.000	Diskominfo
		Program Kebinamargaan	Persentase Panjang Jalan Dan Jembatan Yang Dapat Dilewati Dengan Lancar Dikerjakan Dengan Pendekatan Padat Karya	15.693.703.448	Dinas Pupr
		Program Pengembangan Sumber Daya Air	Persentase Panjang Jaringan Irigasi Yang Dapat Dilalui Air Dengan Lancar Dilakukan Dengan Pendekatan Padat Karya	2.500.000.000,00	Dinas Pupr
		Program Peingkatan Pemberdayaan Usaha Kecil	Persentase Wirausaha	18.470.000.000	Dinas KUMKM
		Program Pengembangan Pendayagunaan Sda, Teknologi Tepat Guna Dan Pelatihan Masyarakat	Pertambahan Jumlah Masyarakat Desa Yang Terlatih Dalam Kewirausahaan	734.383.002	Dinas Pmd
			Persentase KPM Yang Aktif	257.034.051	Dinas Pmd
	51 Peningkatan Kualitas Hidup Dan Peran Serta Perempuan	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Persentase Perempuan Yang Bekerja	819.280.000,00	Dinas Ppa, Dukcapil, Pengendalian Penduduk Kb
			Persentase Angka Kemiskinan	72.711.331.034	
	52 Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin	Program Penanganan Farkir Miskin	Persentase Pmks Yang Mendapatkan Bantuan Beras Sejahtera	15.131.000.000	Dinsos
		Program Pembangunan Perumahan	Persentase Peningkatan Kuantitas Dan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin	22.620.000.000	Dinas Prkp
		Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Menengah Atas	Persentase Siswa Sma Miskin Yang Mendapatkan Beasiswa Miskin	2.982.000.000	Dinas Pendidikan
		Program Peningkatan Dan Pengembangan	Persentase Siswa Smk Miskin Yang	2.170.800.000	Dinas Pendidikan

Prioritas	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Pagu Indikatif 2019	PD Yang Bertanggung Jawab
		Pelayanan Pendidikan Kejuruan	Mendapatkan Beasiswa Miskin		
		Program Pelayanan Kesehatan	Persentase Kepesertaan Jkn	19.263.583.086	Dinas Kesehatan
		Program Kesehatan Masyarakat	Persentase Masyarakat Miskin Yang Mendapat Bantuan Pangan Dan Gizi	1.884.962.948	Dinas Kesehatan
	53 Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Miskin	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Persentase Kepala Keluarga Perempuan Miskin Yang Diberdayakan	402.187.500	Dinas Ppa, Dukcapil, Pengendalian Penduduk Kb
		Program Pengembangan Perdagangan	Persentase Rumah Tangga Miskin Yang Bekerja Disektor Perdagangan	660.320.000	Disperindag
			Persentase Pemantauan Dan Pengawasan Distribusi Dan Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (18 Bahan Pokok)	4.300.000.000,00	Disperindag
		Program Pengembangan Tanaman Pangan Dan Holtikultura	Ntp Subsektor Tanaman Pangan	1.046.477.500,00	Dinas Pertanian
		Program Pengembangan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Informasi Berkaitan Dengan Penanggulangan Kemiskinan Yang Dapat Diakses Oleh Masyarakat	290.000.000	Diskominfo
		Program Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Persentase Keluarga Pra Sejahtera Dan Sejahtera I	1.960.000.000	Dinas Ppa, Dukcapil, Pengendalian Penduduk Kb
		Program Peningkatan Pengawasan Ketenagakerjaan, Pembinaan Hub. Industrial Dan Jaminan Sosial	Pertumbuhan Kenaikan Upah Tenaga Kerja	300.000.000	Disnaker
			Persentase Penyelesaian Kasus Tenaga Kerja	1.303.540.000	Disnaker
			Persentase Penurunan Kecelakaan Kerja	430.800.000	Disnaker
			Angka Inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	96.208.710.248	
	54 Pengendalian Tingkat Harga-Harga Komoditas Penyumbang Inflasi	Program Perlindungan Konsumen Dan Kemetrolagian	Persentase Jumlah Barang Beredar, Jasa Dan Tertib Niaga Yang Diawasi Sesuai Standar (112 Barang Sni Wajib; 140 Pelaku Usaha Tertib Niaga)	2.711.000.000	Disperindag
			Indeks Keberdayaan Konsumen (0 - 20 = Tahu; 21 - 40 = Paham)	2.700.000.000	Disperindag
			Persentase Jumlah Standarisasi Lab. Kemetrolagian Yang Memenuhi Standar	555.000.000	Disperindag
		Program Pengembangan Perdagangan	Persentase Pertumbuhan Jumlah Volume Ekspor (Ton)	2.200.000.000	Disperindag

Prioritas	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Pagu Indikatif 2019	PD Yang Bertanggung Jawab
			Persentase Jumlah Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (18 Bahan Pokok) Yang Tersedia Setiap Waktu	4.710.000.000	Disperindag
			Persentase Peningkatan Sarana Dan Prasarana Perdagangan Yang Dibangun Dan Termanfaatkan	30.000.000.000	Disperindag
			Persentase Pertumbuhan Nilai Omzet Yang Memanfaatkan Resi Gudang	7.200.000.000	Disperindag
			Pertumbuhan Komoditi Yang Terjual Melalui Pasar Lelang	156.000.000	Disperindag
			Persentase Peningkatan Promosi Produk Dalam Negeri	-	Disperindag
		Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Perekonomian	Persentase Rekomendasi Komoditas Penyumbang Inflasi Yang Paling Tinggi Dengan Intervensi Program/Kebijakan	1.316.000.000	Biro ekonomi
		Program Pengembangan Perhubungan Laut	Persentase Infrastruktur Perhubungan Laut Dalam Kondisi Baik Terhadap Kondisi Optimal	1.400.000.000	Dinas perhubungan
		Program Kebinamargaan	Persentase Panjang Jalan Dan Jembatan Yang Dapat Dilewati Dengan Lancar Yang Menuju Pusat-Pusat Distribusi Komoditas Penyumbang Inflasi	34.146.277.748	Dinas pupr
	Mengurangi Ketergantungan Pasokan Dari Luar Terhadap Komoditas Penyumbang Inflasi	Program Pengembangan Tanaman Pangan Dan Holtikultura	Pertambahan Jumlah Volume Produksi Komoditas Cabai Besar	1.046.477.500	Dinas pertanian
			Pertambahan Jumlah Volume Produksi Komoditas Cabai Rawit	1.046.477.500	Dinas pertanian
			Pertambahan Jumlah Volume Produksi Komoditas Bawang Merah	1.046.477.500	Dinas pertanian
		Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Persentase Kontribusi Komoditas Ikan Dalam Menyumbang Inflasi	5.100.000.000	Dinas kelautan perikanan
		Program Pengembangan Distribusi, Stabilitas, Dan Cadangan Pangan	Koefisien Varian Harga Pangan Strategis Di Tingkat Produsen Dan Konsumen	875.000.000	Dinas pangan
			Laju Pertumbuhan Penduduk	4.040.000.000	



Prioritas	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Pagu Indikatif 2019	PD Yang Bertanggung Jawab
	56 Pengendalian Tingkat Kelahiran Penduduk Dan Perpindahan Penduduk Untuk Mencapai Penduduk Tumbuh Seimbang	Program Pengadministrasian Kependudukan Dan Catatan Sipil	Persentase Jumlah Masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Yang Mempunyai Ktp	310.000.000	Dinas ppa, dukcapil, pengendalian penduduk kb
			Persentase Jumlah Masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Yang Sudah Meninggal Yang Memiliki Akte Kematian	270.000.000,00	Dinas ppa, dukcapil, pengendalian penduduk kb
		Program Peningkatan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Persentase Unmeet Need	2.960.000.000,00	Dinas Ppa, Dukcapil, Pengendalian Penduduk Kb
		Program Peningkatan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Persentase Grand Design Kependudukan Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		Dinas Ppa, Dukcapil, Pengendalian Penduduk Kb
			Presentase KB MKJP	500.000.000	Dinas Ppa, Dukcapil, Pengendalian Penduduk Kb
<b>7</b>	<b>Pengembangan Konektivitas Dan Infrastruktur</b>			<b>427.120.852.183</b>	
	57 Peningkatan, Pemeliharaan Dan Pembangunan Jaringan Irigasi Serta Cetak Sawah Pertanian Yang Modern	Program Pengembangan Sumber Daya Air	Persentase Luas Jaringan Irigasi Yang Berfungsi	19.500.000.000	Dinas Pupr
		Program Penataan Ruang Dan Pertanahan	Persentase Kesesuaian Lokasi Cetak Sawah Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (Rtrwp)	800.000.000	Dinas Pupr
			Ketersediaan Air Baku (M3)	4.000.000.000	
	58 Peningkatan, Pemeliharaan Dan Pembangunan Infrastruktur Air Baku	Program Pengembangan Sumber Daya Air	Pertumbuhan Volume Air Baku	4.000.000.000,00	Dinas Pupr
			Persentase Akses Jalan Lingkungan Yang Memadai	3.862.260.000	
	59 Peningkatan, Pemeliharaan Dan Pembangunan Infrastruktur Dasar Yang Layak Bagi Masyarakat	Program Keciptakarya Dan Permukiman	Persentase Peningkatan Aksesibilitas Kawasan Permukiman	450.000.000	Dinas Prkp
			Persentase Peningkatan Aksesibilitas Di Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi	1.363.500.000	DINAS PRKP
			Persentase Kawasan Permukiman Yang	1.024.380.000	

Prioritas	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Pagu Indikatif 2019	PD Yang Bertanggung Jawab
			Tertata		
			Persentase Desa Yang Terlayani Jaringan Telekomunikasi	341.460.000	
	60 Peningkatan, Pemeliharaan Dan Pembangunan Infrastruktur Jaringan Telekomunikasi Bagi Masyarakat	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Teknologi Informasi	Persentase Dana Pendamping Desa Yang Terlayani Jaringan Internet	341.460.000	Kominfo
			Persentase Kunjungan Kapal Di Pelabuhan Laut	2.150.000.000	
	61 Peningkatan, Pemeliharaan Dan Pembangunan Pelabuhan Serta Sarana Prasarana Pendukung Pelabuhan	Program Pengembangan Perhubungan Laut	Persentase Jumlah Pulau Yang Memiliki Pelabuhan/Dermaga Yang Layak	2.150.000.000	Dinas Perhubungan
			Persentase Armada Pengangkutan	800.000.000	
	62 Peningkatan, Pemeliharaan Dan Pembangunan Terminal Serta Sarana Prasarana Pendukung Terminal	Program Peningkatan Pengendalian, Oprasional Dan Kebandarudaraan	Persentase Sarana Dan Prasarana Fasilitas Bandara Kewenangan Provinsi Yang Tersedia Dan Beroprasional	800.000.000	DISHUB
			Persentase Jalan Kondisi Mantap	70.830.650.000	
	63 Peningkatan, Pemeliharaan Dan Pembangunan Jalan Dan Jembatan	Program Kebinamargaan	Persentase Jalan Provinsi Diluar Kawasan Strategis Provinsi Dan Prioritas Propinsi Dalam Kondisi Mantap	50.830.650.000	Dinas Pupr
			Persentase Jembatan Provinsi Diluar Kawasan Strategis Provinsi Dan Prioritas Propinsi Dalam Kondisi Mantap	20.000.000.000	Dinas Pupr
			Angka Harapan Lama Sekolah (Angka Harapan Lama Sekolah, Angka Harapan Lama Sekolah Laki-Laki, Angka Harapan Lama Sekolah Perempuan)	243.876.492.183	
<b>8</b>	<b>Pembangunan Pendidikan</b>			<b>263.230.492.183</b>	
	64 Peningkatan Akses Pelayanan Pendidikan	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Menengah Atas	Apk Sma	12.500.000.000	Dinas Pendidikan
		Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Kejuruan	Apk Smk	4.000.000.000	Dinas Pendidikan
		Program Peningkatan Dan Pengembangan	Apk Slb	2.854.000.000	Dinas Pendidikan

Prioritas	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Pagu Indikatif 2019	PD Yang Bertanggung Jawab
		Pelayanan Pendidikan Khusus			
	65 Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan.	Program Peningkatan Dan Pengembangan Kuantitas Dan Kualitas Guru Serta Tenaga Kependidikan	Persentase Guru Berkualifikasi S1/D4	7.500.000.000	Dinas Pendidikan
		Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Menengah Atas	Persentase Sma Terakreditasi A	37.000.000.000	Dinas Pendidikan
		Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Kejuruan	Persentase Smk Terakreditasi A	40.500.000.000	Dinas Pendidikan
		Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Khusus	Persentase Slb Terakreditasi A	55.600.000.000	Dinas Pendidikan
		Program Peningkatan Pembudayaan Dan Peningkatan Prestasi Olah Raga	Persentase Atlet Pelajar Berprestasi Yang Dibina Ditingkat Provinsi Yang Memperoleh Medali	6.208.984.183	Diskepora
		Program Peningkatan Pembudayaan Dan Peningkatan Prestasi Olah Raga	Persentase Insan Olahraga Yang Berprestasi	165.000.000	Diskepora
		Program Peningkatan Pemberdayaan Dan Pengembangan Pemuda	Persentase Pemuda Berprestasi	4.099.069.700	Diskepora
		Program Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan	Presentase Perpustakaan Terakreditasi;	3.810.850.000	Dkpus
			Pertambahan Pengelola Perpustakaan Yang Dapat Menerapkan Perpustakaan Sesuai Standar	5.337.177.300	Dkpus
		Program Peningkatan Pemberdayaan Dan Pengembangan Pemuda	Persentase Insan Kepemudaan Yang Berprestasi Dan Berdedikasi Yang Dibantu	110.000.000	Diskepora
		Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Darat	Rasio Jumlah Bus Sekolah Dengan Jumlah Murid	12.000.000.000	Dinas Perhubungan
			Persentase Sekolah Di Ruas Jalan Provinsi Yang Dilengkapi Dengan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	1.800.000.000	Dinas Perhubungan
		Program Pengembangan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Informasi Berkaitan Dengan Pendidikan Yang Dapat Akses Oleh Masyarakat	1.005.000.000	Diskominfo
		Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Teknologi Informasi	Persentase Sma Dan Smk Yang Telah Berbasis It	461.153.000	Diskominfo

Prioritas	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Pagu Indikatif 2019	PD Yang Bertanggung Jawab
		Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Pendidikan, Kb, Dan Pemuda	Prosentase Jumlah Kebijakan Pengembangan Pendidikan, Keluarga Berencana, Pemuda Dan Pariwisata Yang Diimplementasikan	3.119.258.000	Biro Kesra
			Persentase Jumlah Sekolah Agama Yang Dinilai Sesuai Standar	300.000.000	BIRO KESRA
		Program Pengelolaan Bantuan Oprasional Sekolah (Bos) (Dak Non Fisik)	Persentase Sekolah Penerima Bos	63.860.000.000	Dinas Pendidikan
	66 Peningkatan Relevansi Pendidikan Vokasi Dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Kejuruaan	Persentase Smk Yang Memiliki Sertifikasi Profesi	1000000000	Dinas Pendidikan
<b>9</b>	<b>Pembangunan Kesehatan</b>			<b>70.683.112.291</b>	
	67 Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Kesehatan	Program Kesehatan Masyarakat	Persentase Status Kesehatan Masyarakat	844.150.098	Dinkes
		Proram Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit	Persentase Angka Kesakitan Penyakit Menular Dan Penyakit Tidak Menular	207.189.180	Dinkes
		Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Pendidikan, Kb, Pemuda Dan Pariwisata	Persentase Sekolah Yang Mengikuti Lomba Uks	300.000.000	Biro Kesra
		Program Keciaptakarya Dan Permukiman	Persentase Cakupan Pelayanan Akses Air Minum Di Kawasan Strategis Provinsi	1.090.000.000	Dinas Prkp
			Persentase Cakupan Pelayanan Akses Air Minum Di Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi	550.000.000	Dinas Prkp
			Persentase Sarana Air Limbah Yang Layak Di Kawasan Kumuh Provinsi	900.000.000	Dinas Prkp
			Persentase Pengurangan Titik Genangan Air Di Kawasan Kumuh Provinsi	2.380.700.000	Dinas Prkp
			Persentase Sarana Pelayanan Persampahan Di Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi	640.000.000	Dinas Prkp
		Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Prosentase Jumlah Kebijakan Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Yang Diimplementasikan	600.000.000	Biro Kesra

Prioritas	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Pagu Indikatif 2019	PD Yang Bertanggung Jawab
		Program Pengembangan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Informasi Tentang Kesehatan Masyarakat	290.000.000	Kominfo
		Program Peningkatan Konsumsi Dan Keamanan Pangan	Peningkatan Skor Pph Konsumsi Jadi 92,50	2.900.000.000	Dinas Pangan
			Persentase Pangan Yang Aman Dikonsumsi	3.070.000.000	DINAS PANGAN
		Program Ketersediaan Dan Kerawanan Pangan	Kenaikan Skor Pph Ketersediaan	2.115.000.000	Dinas Pangan
			Persentase Jumlah Penduduk Rawan Pangan Yang Keluar Dari Katagori Penduduk Rawan Pangan	1.495.000.000	DINAS PANGAN
		Program Pengembangan Sumber Daya, Fasilitasi Dan Akses Industri	Persentase Kandungan Nutrisi Industri Olahan Pangan.	893.638.500	Disperindag
		Program Peningkatan Pelayanan Teknis Hygienis Perusahaan Dan Kesehatan Kerja	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Norma Kesehatan Kerja	245.023.309	Uptd Hyperkes
		Program Peningkatan Pembudayaan Dan Peningkatan Prestasi Olah Raga	Persentase Peserta Yang Megikuti Olahraga Rekreasi Dan Tradisional	386.140.224	Diskepora
		Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Darat	Persentase Penurunan Korban Meninggal Akibat Kecelakaan Lalu Lintas	393.660.000	DISHUB
	68 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Program Pelayanan Kesehatan	Persentase Standarisasi Pelayanan Kesehatan	3.151.387.880	Dinkes
		Program Pelayanan Teknis Laboratoruim Kesehatan	Jumlah Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Sesuai Standar	1.151.542.370	Uptd Balai Laboratorium Kesehatan
		Program Peningkatan Pelayanan Teknis Medis Dan Penunjang Medis	Presentase Ketersediaan Pelayanan Di Rumah Sakit	17.950.000.000	Rsup
		Program Peningkatan Pelayanan Teknis Keperawatan	Los (Length Of Stay)	2.000.000.000	Rsup
		Program Peningkatan Sarana Prasarana Rumah Sakit Umum	Persentase Sarana Dan Prasarana Yang Tersedia Di Rsup	7.938.665.600	Rsup
		Program Badan Layanan Umum Daerah Rsup	Persentase Dana Blud Rsup Yang Digunakan Untuk Pelayanan Langsung Kemasyarakat	3.500.000.000	Rsup
		Program Peningkatan Pelayanan Teknis Medis Kejiwaan Dan Napza	Prosentase Penduduk Yang Mengalami Gangguan Jiwa Dan Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	661.809.000	Rsj
		Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit Jiwa	Persentase Sarana Dan Prasarana Yang Tersedia Di Rsj	940.950.000	Rsj

Prioritas	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Pagu Indikatif 2019	PD Yang Bertanggung Jawab
			Persentase Peralatan Kesehatan Dan Peralatan Lainnya Sesuai Klasifikasi Rumah Sakit Jiwa Kelas A	90.000.000	Rsj
		Program Badan Layanan Umum Daerah Rsj	Persentase Dana Blud Rsj Yang Digunakan Untuk Pelayanan Langsung Kemasyarakatan	8.000.000.000	Rsj
		Program Pengembangan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Informasi Berkaitan Dengan Pelayanan Kesehatan Yang Dapat Diakses Masyarakat	1.005.000.000	Diskominfo
	69 Pemenuhan Kuantitas Dan Kualitas Tenaga Kesehatan	Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan	Persentase Kualitas Dan Kuantitas Sumberdaya Kesehatan	2.180.232.600	Dinkes
		Program Peningkatan Dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Kejuruan	Persentase Jumlah Smk Program Keahlian Kesehatan Yang Memiliki Akreditasi A	627.511.765	Dinas Pendidikan
			Persentase Jumlah SMK Program Keahlian Kesehatan Yang Mengeluarkan Sertifikasi Profesi Pihak 1 (LSP-P1)	627.511.765	Dinas Pendidikan
	70 Meningkatkan Pengendalian Penyalahgunaan Napza	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Medis Kejiwaan Dan Napza	Persentase Penyalahgunaan Napza Yang Mendapatkan Pelayanan Medis Rehabilitasi	370.000.000	Rsj
		Program Peningkatan Pelayanan Teknis Keperawatan Jiwa Dan Napza	Persentase Penyalahgunaan Napza Yang Mendapatkan Pelayanan Keperawatan Rehabilitasi	150.000.000	Rsj
		Program Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama Dan Kemasyarakatan	Pertumbuhan Masyarakat Yang Mendapatkan Pemahaman Penyalahgunaan Napza	688.000.000	Kesbangpol
		Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Korban Napza	350.000.000	Dinas Sosial
<b>Peningkatan Tata Kelola 10 Birokrasi Dan Pelayanan Publik</b>				<b>747.356.021.089</b>	
	71 Peningkatan Manajemen Aset Dan Pencatatan Pelaporan Aset Serta Laporan Realisasi Anggaran	Program Peningkatan Pelayanan Verifikasi Dan Perbendaharaan	Prosentase Bendahara Perangkat Daerah Yang Berkompeten	753.793.700	Bakuda
		Program Peningkatan Pelayanan Akutansi Dan Pelaporan	Persentase Laporan Keuangan Pd Yang Sesuai Dengan Sap	1.520.000.000	Bakuda
		Program Peningkatan Tata Kelola Aset Daerah	Nilai Aset Daerah Yang Dapat Diyakini Kewajarannya	2.509.318.850	Bakuda
			Peningkatan Persentase Kontribusi Kemanfaatan Aset	396.580.000	Bakuda

Prioritas	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Pagu Indikatif 2019	PD Yang Bertanggung Jawab
			Daerah Terhadap PAD		
		Program Penanganan Fakir Miskin	Persentase Debitur Yang Membayar Tunggalan Kredit Usaha Peningkatan Ekonomi Masyarakat Yang Disetorkan Ke Kas Daerah	100.000.000	Dinas Sosial
			Tingkat Kapabilitas APIP	14.031.186.000	
	Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Transparan Dan Akuntabel	Program Pengawasan Dan Pembinaan Pemerintahan Dan Aparatur	Peningkatan Nilai Penguatan Pengawasan Pada Komponen Proses Irb	1.199.000.000	Inspektorat
		Program Pengawasan Dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah	Prosentase Jumlah Rekomendasi Temuan Pemeriksaan Yang Selesai Ditindaklanjuti	4.641.436.000	Inspektorat
			Prosentase Jumlah Pengembalian Uang Yang Disetorkan Ke Kas Daerah.	582.000.000	Inspektorat
			Prosentase Penyelesaian Kasus Pengaduan Masyarakat	6.541.250.000	Inspektorat
		Program Pengawasan Dan Pembinaan Pembangunan, Sosial, Ekonomi Dan Budaya	Tingkat Capaian Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Spip)	907.500.000	Inspektorat
			Peningkatan Capaian Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)	160.000.000	Inspektorat
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Provinsi Meningkat	110.585.604.240	
	Peningkatan Kesesuaian Antar Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Pelaporan Kinerja	Program Peningkatan Dan Pengembangan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase Jumlah Pegawai Yang Menyampaikan Lhkpn	325.000.000	Biro Organisasi
			Peningkatan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	4.785.000.000	Biro Organisasi
		Program Perencanaan, Evaluasi Dan Informasi Pembangunan Daerah	Persentase Kesesuaian Antar Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran (Rkpd, Kua-Ppas)	1.235.000.000	Bappeda
			Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Yang Disusun Sesuai Dengan Kaidah Peraturan Yang Berlaku	175.000.000	Bappeda
			Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Yang Disusun Sesuai Dengan	1.304.050.000	Bappeda

Prioritas	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Pagu Indikatif 2019	PD Yang Bertanggung Jawab
			Kaidah Peraturan Yang Berlaku		
			Persentase Kesesuaian Antara Dokumen Perencanaan (RPJMD Dengan RKPd)	449.994.673	Bappeda
			Tingkat Kesesuaian Jadwal Penetapan APBD Dan Perubahan APBD	149.998.224	Bappeda
		Program Perencanaan Perekonomian Dan Sumber Daya Alam	Persentase Kesesuaian Antar Renja Pd Mitra Kerja Bidang Perekonomian Dan Sumberdaya Alam Dengan Rkpd	213.018.500	Bappeda
		Program Perencanaan Infrastruktur Dan Pengembangan Kewilayahan	Persentase Kesesuaian Antar Renja Pd Mitra Kerja Bidang Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah Dengan Rkpd	440.000.000	Bappeda
		Program Perencanaan Sosial,Budaya Dan Pemerintahan	Persentase Kesesuaian Antar Renjapd Mitra Kerja Bidang Sosial Budaya Dan Pemerintahan Dengan Rkpd	52.500.000	Bappeda
		Program Penelitian Dan Pengembangan	Persentase Rekomendasi Kajian Yang Digunakan Dalam Perencanaan Dan Pangambil Kebijakan	52.500.000	Bappeda
		Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Persentase Anggaran Responsif Gender (Arg) Dalam Apbd	715.000.000	Dinas Ppa, Dukcapil, Pengendalian Penduduk Kb
		Program Penganggaran Pembangunan Daerah	Tingkat Kesesuaian Dengan Ketentuan Peraturan Perundangan Dan Jadwal Penetapan Apbd Dan Perubahan Apbd (Ket: 3 = Sesuai, 2 = Kurang Sesuai, 1 = Tidak Sesuai)	2.550.000.000	Bakuda
			Prosentase Kesesuaian Antara RAPBD Dengan Dokumen KUA-PPAS	2.310.192.500	Bakuda
		Program Pengendalian Pembangunan Daerah	Persentase Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Program Kegiatan Sesuai Dengan Perencanaan.	1.518.304.194	Biro Pembangunan
		Program Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Apbd	Prosentase Pd Provinsi Dan Kab/Kota Yang Realisasi Fisiknya 100% Pelaksanaan Sumber Dana Apbd	1.624.461.606	Biro Pembangunan
		Program Perencanaan Setda	Nilai Lakip Setda Provinsi	428.313.000	Biro Pembangunan
		Program Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Apbn	Prosentase Pd Provinsi Dan Kab/Kota Yang Realisasi Fisiknya 100 % Pelaksanaan Sumber Dana Apbn	778.849.623	Biro Pembangunan



Prioritas	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Pagu Indikatif 2019	PD Yang Bertanggung Jawab
	74 Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Urusan	Program Peningkatan Pemberdayaan Tik, Statistik Dan Persandian	Kualitas Layanan Persandian Yang Dimanfaatkan Untuk Pengamanan Informasi Berklasifikasi Dan Strategis Milik Pemerintah Daerah Di Ling Pemprov Babel Sesuai Standar Persandian	68.405.485	Diskominfo
			Persentase Data Dan Informasi Yang Digunakan Untuk Mengambil Kebijakan Dan Perencanaan	1.836.606.765	Diskominfo
	75 Peningkatan Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Program Peningkatan Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase Produk Hukum Daerah Yang Tidak Tumpang Tindih	3.000.000.000	Biro Hukum
			Persentase Jumlah Masyarakat Yang Mendapat Pelayanan Bantuan Hukum	1.680.000.000	BIRO HUKUM
		Program Pengembangan Dokumentasi Hukum Dan Informasi Hukum	Persentase Produk Hukum Daerah Yang Dapat Di Akses Oleh Masyarakat	1.510.000.000	Biro Hukum
		Program Pengembangan Risalah Rapat Dan Kajian Produk Hukum Perundang-Undangan	Presentase Peningkatan Fungsi Legislasi Lembaga Dprd Dan Alat Kelengkapan Lainnya	71.881.831.670	Setwan
	76 Peningkatan Akses Data Dan Informasi Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa	Program Pengembangan Data Informasi Layanan Pengadaan	Persentase Data Dan Informasi Pengadaan Barang/Jasa Yang Dikelola Dan Dipublikasikan Berbasis It Yang Dapat Di Akses Masyarakat	1.446.989.500	Biro Layanan Pengadaan
		Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa	Persentase Rpp Siap Lelang Yang Selesai Ditangani Ulp Yang Berhasil Dilelangkan Sesuai Peraturan	5.034.568.000	Biro Layanan Pengadaan
		Program Peningkatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase Penggunaan E-Procurement Terhadap Belanja Pengadaan Yang Dapat Diakses Masyarakat	5.020.020.500	Biro Layanan Pengadaan
			Nilai Rata-Rata Delapan Area Perubahan	37.050.178.900	
	77 Peningkatan Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Program Peningkatan Publikasi, Pengumpulan Dan Penyaringan Informasi	Persentase Kesesuaian Antar Informasi Yang Dikelola Dengan Arah Kebijakan Pembangunan Pemerintah Daerah	1.975.838.255	Biro Humas
		Program Peningkatan Pelayanan Kehumasan, Dokumentasi, Publikasi Media Dan It	Persentase Kesesuaian Antar Informasi Yang Dipublikasikan Dengan Arah Kebijakan Pembangunan Pemerintah Daerah	3.503.023.340	Biro Humas

Prioritas	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Pagu Indikatif 2019	PD Yang Bertanggung Jawab
		Program Peningkatan Pelayanan Protokoler	Persentase Kesesuaian Antar Agenda Kepala Daerah Yang Layani Dengan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah	535.354.305	Biro Humas
		Program Peningkatan Promosi, Informasi Dan Pelayanan Serta Hubungan Antar Lembaga	Persentase Kesesuaian Antara Promosi Dan Informasi Dengan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah	1.200.000.000	Badan Penghubung Provinsi
			Persentase Kesesuaian Antar Agenda Kepala Daerah Di Jakarta Yang Layani Dengan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah	175.000.000	Badan Penghubung Provinsi
			Persentase Kesesuaian Antara Peningkatan Hubungan Antar Lembaga Dengan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah	7.125.000.000	Badan Penghubung Provinsi
		Program Peningkatan Pelayanan Kerumahtanggaan, Kehumasan Dan Protokoler Dewan	Persentase Kesesuaian Antar Informasi Yang Dipublikasikan Dan Layanan Keprotokoler Dewan Dengan Arah Kebijakan Pembangunan Pemerintah Daerah	7.785.811.000	Setwan
			Persentase Jumlah Sarana Prasarana Lembaga DPRD	4.530.152.000	Setwan
	78 Peningkatan Penguatan Sistem Manajemen Pemerintahan	Program Peningkatan Dan Pengembangan Kelembagaan Serta Analisis Jabatan	Persentase Jumlah Organisasi Perangkat Daerah Yang Sesuai Antar Beban Kerja Organisasi Dengan Ukuran Kelembagaannya	150.000.000	Biro Organisasi
			Persentase Jumlah Pejabat Struktural ASN Yang Memiliki Kinerja Yang Baik	160.000.000	Biro Organisasi
			Persentase Jumlah ASN Yang Sesuai Antara Beban Kerja Dengan Kompetensi Dan Jabatannya	4.245.000.000	Biro Organisasi
		Program Peningkatan Dan Pengembangan Tata Laksana Pemerintah Daerah	Peningkatan Kepuasan Masyarakat	1.990.000.000	Biro Organisasi
		Program Peningkatan Dan Pengembangan Kinerja Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Pengembangan Kinerja Asn Dan Pemerintah Daerah	3.675.000.000	Biro Organisasi
			Indeks Profesionalitas ASN	30.484.204.000	
	79 Peningkatan Kompetensi Dan Profesional Aparatur	Program Pengadaan Pegawai, Mutasi, Promosi, Dan Kepangkatan	Persentase Pemenuhan Pegawai Sesuai Dengan Kebutuhan Dan Formasi	1.286.094.000	Bkpsdm
			Persentase Pegawai ASN Naik Pangkat Dan Pensiun Tepat Waktu	200.000.000	Bkpsdm
			Persentase Pegawai ASN Yang Ditempatkan	930.000.000	Bkpsdm

Prioritas	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Pagu Indikatif 2019	PD Yang Bertanggung Jawab
			Sesuai Dengan Kompetensi		
		Program Penilaian Kinerja, Disiplin, Informasi Dan Kesejahteraan Asn	Persentase Asn Yang Menerima Penghargaan	9.929.020.000	Bkpsdm
			Persentase Kasus Pelanggaran Disiplin Minimal Sedang	1.270.000.000	BKPSDM
			Persentase ASN Yang SKP Nya Dinilai Tepat Waktu	175.000.000	BKPSDM
			Persentase Akurasi Data Dan Informasi Kepegawaian	703.540.000	BKPSDM
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Asn	Persentase Pegawai Asn Yang Meningkatkan Kompetensi Teknis Dan Fungsional	6.954.000.000	Bkpsdm
			Persentase Pegawai ASN Yang Meningkatkan Pendidikan Formalnya;	2.858.100.000	Bkpsdm
			Persentase Pegawai ASN Yang Memenuhi Kompetensi Dasar Dan Manajerial	3.850.000.000	Bkpsdm
			Nilai Akreditasi Diklat	415.000.000	Bkpsdm
		Program Penilaian Dan Pemetaan Kompetensi Asn	Persentase Pegawai Asn Yang Mempunyai Profil Kompetensi Sesuai Dengan Standar Penilaian	1.913.450.000	Bkpsdm
			Rata-Rata Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (KSM)	102.254.921.250	
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Memberikan Pelayanan Yang Cepat, Efektif Dan Efisien Berbasis Teknologi Informasi Bagi Masyarakat	Program Peningkatan Tata Kelola Pendapatan Pajak Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah	5.908.511.250	Bakuda
		Program Peningkatan Dan Pengembangan Tata Laksana Pemerintah Daerah	Persentase Instansi Pelayanan Publik Provinsi Yang Bersertifikat Iso	430.000.000	Biro Organisasi
		Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Ptspp	800.000.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Wilayah Pangkalpinang Dan Bangka	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pendidikan Sma, Smk, Slb Di Wilayah Pangkalpinang Dan Bangka	29.368.000.000	Dinas Pendidikan
		Program Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Barat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pendidikan Sma, Smk, Slb Di Wilayah Bangka	11.315.200.000	Dinas Pendidikan

Prioritas	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Pagu Indikatif 2019	PD Yang Bertanggung Jawab
			Barat		
		Program Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Tengah Dan Bangka Selatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pendidikan Sma, Smk, Slb Di Wilayah Bangka Tengah Dan Bangka Selatan	25.479.000.000	Dinas Pendidikan
		Program Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Wilayah Belitung Dan Belitung Timur	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pendidikan Sma, Smk, Slb Di Wilayah Belitung Dan Belitung Timur	21.271.000.000	Dinas Pendidikan
		Program Peningkatan Pelayanan Pusat Layanan Usaha Terpadu Plut KUMKM	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pusat Layanan Usaha Terpadu Plut KUMKM	840.000.000	Dinas KUMKM
		Program Peningkatan Pelayanan Teknis Medis Dan Penunjang Medis	Nilai Tingkat Kelulusan Akreditasi Rsup Yang Memenuhi Standar Akreditasi	6.000.000.000	Rsup
		Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit Umum Provinsi	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Sarana Dan Prasarana Pelayanan Rumah Sakit	251.710.000	Rsup
		Pelayanan Teknis Keperawatan Jiwa Dan Napza	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pelayanan Teknis Medik Kejiwaan	591.500.000	Rsj
			Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM)	76.632.069.878	
	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan 81 Yang Bersih Serta Pelayanan Publik Yang Efektif Dan Efisien	Program Pengembangan Data Informasi Layanan Pengadaan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pengembangan Data Informasi Layanan Pengadaan	1.446.989.500	Biro Layanan Pengadaan
		Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa	5.034.568.000	Biro Layanan Pengadaan
		Program Peningkatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik	5.020.020.500	Biro Layanan Pengadaan
		Program Peningkatan Administrasi Kewilayahan	Persentase Jumlah Administrasi Kewilayahan Yang terselesaikan	105.000.000	Biro Pemerintahan
			Persentase Luas Bidang Tanah Pemerintah Provinsi Yang Bersertifikat	118.345.000	Biro Pemerintahan
			Persentase Jumlah Kasus Sengketa Batas Wilayah Administrasi Yang Diselesaikan	223.345.000	Biro Pemerintahan

Prioritas	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Pagu Indikatif 2019	PD Yang Bertanggung Jawab
		Program Pengembangan Otonomi Daerah	Persentase Jumlah Kebijakan Penyelenggaraan Otonomi Daerah Yang Diimplementasikan	2.562.826.000	Biro Pemerintahan
		Program Pengembangan Kerja Sama Pemerintah Daerah	Persentase Jumlah Kerjasama Pemerintah Daerah/Swasta/Luar Negeri Yang Diimplementasikan	1.676.177.000	Biro Pemerintahan
		Program Peningkatan Pembinaan Dan Pengawasan Kearsipan	Persentase Kelembagaan Kearsipan Yang Melaksanakan Tertib Arsip	1.909.137.300	Dkpup
		Program Peningkatan Pengelolaan Dan Pelestarian Arsip	Pertambahan Jumlah Arsip Yang Dikelola Sesuai Standar (Dinamis Dan Statis)	1.931.250.000	Dkpup
			Pertambahan Jumlah Koleksi Bahan Pustaka ;	6.080.950.000	DKPUS
			Pertambahan Pengunjung Perpustakaan	2.668.750.000	DKPUS
		Program Pengembangan Bahan Pustaka Dan Layanan Perpustakaan	Pertambahan Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan ;	500.000.000	Dkpup
			Pertambahan Jumlah Jenis Koleksi Bahan Pustaka	247.930.000	DKPUS
			Pertambahan Pengunjung Perpustakaan	1.689.755.000	DKPUS
		Program Peningkatan Pemberdayaan Tik, Statistik Dan Persandian	Persentase Perangkat Daerah Yang Mengimplementasikan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Untuk Birokrasi	619.516.272	Diskominfo
		Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Teknologi Informasi	Persentase Sistem Informasi Pemerintah Daerah Yang Aman	180.000.000	Diskominfo
		Program Penataan Ruang Dan Pertanahan	Persentase Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Yang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang	150.000.000	Dinas Pupr
		Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Kesesuaian Antara Kuantitas Berita Dengan Informasi Yang Dipublikasi	10.964.567.500	Kominfo
		Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Kesesuaian Antara Kuantitas Berita Dengan Informasi Yang Dipublikasi	1.005.000.000	Diskominfo
		Program Pengadministrasian Kependudukan Dan Catatan Sipil	Persentase Jumlah Data Base Kependudukan Tingkat Provnsi Yang Akurat	540.000.000	Dinas Ppa, Dukcapil, Pengendalian Penduduk Kb
			Persentase Perangkat Daerah Yang Memanfaatkan NIK Data Base Kependudukan Dan KTP Dalam	840.000.000	DINAS PPA, DUKCAPIL, PENGENDALIAN PENDUDUK KB

Prioritas	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Pagu Indikatif 2019	PD Yang Bertanggung Jawab
			Meningkatkan Pelayanan Ke Masyarakat		
		Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Persentase Jumlah Tenaga Konstruksi Yang Bersertifikasi Profesi	250.000.000,00	Dinas PUPR
			Persentase Jumlah Kelembagaan Jasa Konstruksi Yang Berkompetensi	1.000.000.000,00	DINAS PUPR
			Persentase Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi	137.500.000,00	DINAS PUPR
	Pemberdayaan Masyarakat Secara Langsung Dilakukan Melalui Skema Pemberian Bantuan Ke Desa-Desa, Termasuk Jaminan Pelayanan Publik, Penguatan Keterkaitan Kegiatan Ekonomi Dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Program Peningkatan Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Sarana Prasarana Penunjang Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	2.077.702.338	Dpmd
			Persentase Posyandu Aktif	186.925.585	Dpmd
			Persentase PKK Aktif	3,07	Dpmd
		Program Pengembangan Kawasan Perdesaan	Persentase Kawasan Perdesaan Yang Terbangun	1.373.296.215	Dpmd
		Program Pembinaan Pemerintah Desa	Persentase Aparatur Desa Dan Bpd Yang Meningkatkan Kompetensinya	863.000.000	Dpmd
			Jumlah Profil Desa Dan Kelurahan Yang Tersusun Dan Terbina	961.427.668	Dpmd
		Program Pengembangan Masyarakat Dan Kawasan Transmigrasi	Persentase Desa Di Kawasan Transmigrasi Yang Diberdayakan	676.439.000	Disnaker
	Pembangunan Kesejahteraan Sosial Diarahkan Pada Peningkatan Jangkauan Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Yang Berkualitas,	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Pmks Yang Mendapatkan Pelayanan, Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Yang Mampu Melaksanakan Peranan Dan Fungsi Sosial	300.000.000	Dinsos
		Program Peningkatan Pelayanan Teknis Panti Sosial	Persentase Pmks Penerima Manfaat Yang Mampu Melaksanakan Peranan Dan Fungsi Sosial Melalui Pelayanan Teknis Panti Sosial	600.000.000	Uptd Panti Sosial

Prioritas	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Pagu Indikatif 2019	PD Yang Bertanggung Jawab
		Program Penguatan Penyelenggaraan Panti Sosial	Persentase Pmks Penerima Manfaat Yang Mampu Melaksanakan Peranan Dan Fungsi Sosial Melalui Penguatan Penyelenggaraan Pelayanan Panti Sosial	40.000.000	Uptd Panti Sosial
		Program Peningkatan Pembudayaan Dan Peningkatan Prestasi Olah Raga	Persentase Lansia Yang Aktif Yang Mengikuti Pelayanan Olah Raga Khusus Lansia	82.500.000	Diskepora
			Persentase Pelajar Penyandang Disabilitas Yang Berprestasi Di Bidang Keolahragaan	284.900.000	DISKEPORA
			Persentase Sumber Daya Tenaga Keolahragaan Yang Memiliki Standar Nasional	132.000.000	DISKEPORA
		Program Kesehatan Masyarakat	Persentase Lansia Yang Dilayani Sesuai Standar Kesehatan	1.108.096.500	Dinkes
		Program Peningkatan Pembinaan Keagamaan	Persentase Lansia Yang Berkompetensi Keagamaan	1.500.000.000	Biro Kesra
			Prosentase Jumlah Masyarakat Yang Kompeten Di Bidang Keagamaan	8.954.600.000	BIRO KESRA
		Program Peningkatan Pelayanan Teknis Latihan Kerja Industri	Persentase Pencari Kerja Yang Mendapat Pelatihan Kompetensi	1.250.000.000	Disnaker
		Program Pengembangan Pelatihan Dan Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Lansia Potensial Yang Memiliki Kompetensi Ketenagakerjaan	160.000.000	Disnaker
			Persentase Exs Korban Napza Yang Memiliki Kompetensi Ketenagakerjaan	180.000.000	DISNAKER
			Persentase Wanita Tunasosial Yang Memiliki Kompetensi Ketenagakerjaan	190.000.000	DISNAKER
			Persentase Penyandang Disabilitas Yang Memiliki Kompetensi Ketenagakerjaan	170.000.000	DISNAKER
84	Sistem Pemberdayaan, Perlindungan Dan Jaminan Sosial Disusun, Ditata, Dan Dikembangkan Untuk Memastikan Dan Memantapkan Pemenuhan Hak-Hak Masyarakat Akan Pelayanan Dasar Publik.	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Pmks Yang Mendapatkan Pelayanan Perlindungan Dan Jaminan Sosial Yang Mampu Melaksanakan Peranan Dan Fungsi Sosial	500.000.000	Dinsos

Prioritas	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Pagu Indikatif 2019	PD Yang Bertanggung Jawab
		Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Pmks Yang Mendapatkan Pelayanan Pemberdayaan Sosial Yang Mampu Melaksanakan Peranan Dan Fungsi Sosial	200.000.000	Dinsos
			Persentase PSKS Yang Mendapatkan Pelayanan Pemberdayaan Sosial Yang Mampu Melaksanakan Peranan Dan Fungsi Sosial	100.000.000	Dinsos
	85 Menekan Tingkat Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak	Program Peningkatan Perlindungan Perempuan Dan Anak	Menurunkan Rasio Perempuan Korban Kekerasan Per 100.000 Penduduk Usia 18 Tahun Keatas Di Tingkat Daerah Provinsi	1.929.055.500	Dinas Ppa, Dukcapil, Pengendalian Penduduk Kb
			Menurunkan Rasio Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Per 100.000 Anak Usia 0-18 Tahun Tingkat Daerah Provinsi	1.000.000.000	Dinas Ppa, Dukcapil, Pengendalian Penduduk Kb
		Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Perempuan Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Pelayanan, Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial	250.000.000	Dinas Sosial
		Program Pengembangan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Informasi Berkaitan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Yang Dapat Di Akses Oleh Masyarakat	1.005.000.000	Diskominfo
	86 Menjamin Hak Anak Dalam Pembangunan	Program Peningkatan Perlindungan Perempuan Dan Anak	Persentase Kab/Kota Layak Anak	975.000.000	Dinas Ppa, Dukcapil, Pengendalian Penduduk Kb
		Program Pengadministrasian Kependudukan Dan Catatan Sipil	Persentase Anak Yang Memiliki Akte Kelahiran Dalam Mendukung Hak Anak Untuk Mendapat Hak Identitas	270.000.000	Dinas Ppa, Dukcapil, Pengendalian Penduduk Kb
		Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Anak Yang Mendapatkan Hak Dalam Pelayanan, Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial	90.000.000	Dinas Sosial
		Program Kesehatan Masyarakat	Prevalensi Kekurangan Gizi (Underweight) Pada Anak Balita Dalam Mendukung Hak Anak Untuk Mendapatkan Hak Kesehatan	2.320.500.000	Dinas Kesehatan
<b>11</b>	<b>Pembangunan Berdemokrasi</b>			<b>62.205.278.509</b>	
	87 Peningkatan Pemberian Kesempatan Kebebasan Sipil Kepada Masyarakat	Program Bina Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Kasus Penistaan Terhadap Simbol Negara	3.022.000.000	Kesbangpol



Prioritas	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Pagu Indikatif 2019	PD Yang Bertanggung Jawab
			Jumlah Kasus Konflik Sara Yang Dapat Diantisipasi	810.000.000	Kesbangpol
		Program Penguatan Kewaspadaan Nasional	Tingkat Kerawanan Konflik Kabupaten/Kota	3.010.000.000	Kesbangpol
		Program Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama Dan Kemasyarakatan	Persentase Ormas/Lsm Dan Okp Yang Ikut Serta Dalam Kegiatan Pembangunan	1.764.000.000	Kesbangpol
			Persentase Jumlah Sanggar/Paguyuban Yang Melestarikan Seni Budaya Dalam Mendukung Ketahanan Budaya	231.000.000	Kesbangpol
	88 Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat, Penegakan Perda Serta Perlindungan Masyarakat (Linmas)	Program Peningkatan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat	Prosentase Jumlah Pelanggaran Tibumtranmas Yang Ditindak Sesuai Dengan Aturan	2.861.797.500	Satpol Pp
		Program Perlindungan Masyarakat	Persentase Jumlah Linmas Yang Berkompeten Dalam Penyelenggaraan Kantrantibmas	817.829.000	Satpol Pp
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Personil Satpol Pp	Prosentase Jumlah Personil Satpol Pp Yang Melaksanakan Penyelenggaraan Kantrantibmas	1.473.699.500	Satpol Pp
		Program Penegakan Perda Dan Perkada	Cakupan Penegakan Perda	580.382.500	Satpol Pp
			Skor Aspek Hak-Hak Politik	2.068.000.000	
	89 Peningkatan Pelayanan Terhadap Hak-Hak Politik Masyarakat	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Persentase Jumlah Perempuan Yang Berkompetensi Dilembaga Politik	473.000.000	Dinas Ppa, Dukcapil, Pengendalian Penduduk Kb
			Persentase Jumlah Organisasi Dan Lembaga Masyarakat Yang Berbasis Gender	150.000.000	Dinas Ppa, Dukcapil, Pengendalian Penduduk Kb
		Program Pembinaan Politik Dalam Negeri	Pertumbuhan Cakupan Pembinaan Politik Daerah	1.445.000.000	Kesbangpol
			Skor Aspek Lembaga Demokrasi	709.000.000	
	90 Peningkatan Pemberdayaan Lembaga-Lembaga Demokrasi	Program Pembinaan Politik Dalam Negeri	Persentase Rekomendasi Pengembangan Berdemokrasi Yg Ditindak Lanjuti	709.000.000	Kesbangpol
			Indeks Kapasitas Bencana Daerah	42.080.570.009	
12 Peningkatan Pembangunan Bidang Kebencanaan				111.905.619.229	

Prioritas	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Pagu Indikatif 2019	PD Yang Bertanggung Jawab
	91 Peningkatan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Program Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Persentase Daerah Rawan Bencana Yang Diintervensi Dalam Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	3.774.252.000	BPBD
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Korban Bencana Yang Mendapat Perlindungan Dan Jaminan Sosial	735.000.000	Dinsos
		Program Pengembangan Distribusi, Stabilitas, Dan Cadangan Pangan	Persentase Cadangan Pangan	875.000.000	Dinas Pangan
		Program Pengembangan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Informasi Berkaitan Dengan Penanggulangan Bencana Yang Dapat Di Akses Oleh Masyarakat	290.000.000	Kominfo
		Proram Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit	Persentase Kab/Kota Yang Melaksanakan Kewaspadaan Dini Dan Respon	2.000.000.000	Dinkes
		Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat	Persentase Peningkatan Kualitas Linmas Dalam Penanganan Bencana Dan Kebakaran	450.000.000	Satpol Pp
		Program Kedaruratan Dan Logistik Penanggulangan Bencana	Persentase Daerah Rawan Bencana Yang Diintervensi Dalam Penanggulangan Bencana	4.565.000.000	Bpbd
		Proram Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit	Persentase Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Akibat Bencana Atau Berpotensi Bencana Dalam Satu Provinsi	1.300.000.000	Dinkes
		Program Peningkatan Pelayanan Teknis Medis Dan Penunjang Medis	Persentase Korban Bencana Yang Mendapat Pelayanan Rujukan	14.400.000.000	Rsup
		Program Pengembangan Sumber Daya Air	Persentase Panjang Talud Yang Direhabilitasi Dan Direkonstruksi Yang Berfungsi Dengan Baik Untuk Menahan Tanah	1.000.000.000	Pupr
			Persentase Panjang Sungai /Saluran Yang Dinormalisasi Dan Befungsi Memperlancar Aliran Air Sungai Akibat Bencana	13.400.000.000	PUPR
		Program Perumahan Rakyat	Persentase Rekonstruksi Dan Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana	5.077.000.000	Prkp
		Program Kebinamargaan	Persentase Panjang Jalan Yang Direhabilitasi Dan Direkonstruksi Akibat Bencana	3.063.797.220,00	PUPR

Prioritas	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Pagu Indikatif 2019	PD Yang Bertanggung Jawab
			Persentase Panjang Jembatan Yang Direhabilitasi Dan Direkonstruksi Akibat Bencana	660.000.000,00	PUPR
		Program Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana	Persentase Daerah Rawan Bencana Yang Diintervensi Dalam Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana	4.685.000.000	Bpbd
		Proram Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit	Persentase Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luarbiasa (Klb) Yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Dalam Satu Provinsi	350.000.000	Dinkes
	92 Pengembangan Pengelolaan Kawasan Rawan Bencana Alam	Program Pengembangan Sumber Daya Air	Persentase Panjang Penahan Abrasi Pantai	3.000.000.000,00	Dinas PUPR
			Panjang Sungai Yang Dinormalisasi Pada Daerah Rawan Bencana	15.930.522.254	Dinas PUPR
			Panjang Penahan Tanah Akibat Erosi	5.462.500.000,00	Dinas PUPR
		Program Peningkatan Pengelolaan Das Dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Das Kritis Yang Di Kelola	530.750.000	Dinas Kehutanaan
		Program Peningkatan Pelayanan Teknis Tata Kelola Dishut	Persentase Kegiatan Pengelolaan Hutan Oleh Uptd Kph (%)	497.042.000	Dinas Kehutanaan
	93 Pengembangan Pengelolaan Kawasan Hilir Daerah Rawan Bencana Teluk Bayur	Program Pengembangan Sumber Daya Air	Persentase Panjang Pengerukan Normalisasi Sungai Dan Kawasan Hilir Daerah Rawan Bencana Teluk Bayur	1.000.000.000	PUPR
		Program Perumahan Rakyat	Persentase Relokasi Kawasan Hilir Daerah Rawan Bencana Teluk Bayur		Prkp
		Program Kebinamargaan	Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap Di Kawasan Hilir Daerah Rawan Bencana Teluk Bayur	9.021.558.332	PUPR
			Persentase Panjang Jembatan Dalam Kondisi Baik Di Kawasan Hilir Daerah Rawan Bencana Teluk Bayur	6.638.197.423	PUPR
		Program Penataan Ruang Dan Pertanahan	Persentase Luas Lahan Yang Bersertifikat Untuk Kepentingan Di Kawasan Hilir Daerah Rawan Bencana Teluk Bayur	13.200.000.000	PUPR
<b>Penegndalian 13 Lingkungan Hidup</b>				<b>43.144.911.000</b>	
	94 Pengendalian Kualitas Air	Program Peningkatan Pengendalian Dan Penaatan Lingkungan Hidup	Persentase Bod, Cod Dan Tss	980.000.000	DLH

Prioritas	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/ Outcome)	Pagu Indikatif 2019	PD Yang Bertanggung Jawab
		Program Peningkatan Perlindungan Dan Konservasi Sda Dan Ekosistem	Persentase Kawasan Ekosistem Essensial (%)	319.527.000	Dinas Kehutanaan
			Indeks Udara	967.500.000	
	95 Pengendalian Kualitas Udara	Program Peningkatan Pengendalian Dan Penataan Lingkungan Hidup	Persentase Penurunan Konsentrasi So2 Dan No2 Yang Melebihi Nilai Ambang Batas	467.500.000	DLH
		Program Peningkatan Perlindungan Dan Konservasi Sda Dan Ekosistem	Persentase Penurunan Kawasan Hutan Yang Terbakar	500.000.000	Dinas Kehutanaan
			Indeks Tutupan Lahan	6.183.088.000	
	96 Peningkatan Tutupan Lahan	Program Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup	Persentase Jumlah Kebijakan Berkaitan Dengan Tutupan Lahan Yang Diimplementasikan	250.000.000	DLH
		Program Peningkatan Pengendalian Dan Penataan Lingkungan Hidup	Persentase Ketaatan Usaha/Kegiatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Bidang Lingkungan Hidup	877.500.000	DLH
		Program Peningkatan Perlindungan Dan Konservasi Sda Dan Ekosistem	Persentase Luas Kawasan Hutan Yang Bervegetasi (%)	1.729.588.000	Dinas Kehutanaan
	97 Pengembangan Perhutanan Sosial	Program Peningkatan Pengelolaan Das Dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Luas Kawasan Perhutanan Sosial (%)	1.726.000.000	Dinas Kehutanaan
		Program Peningkatan Tata Kelola Hutan	Persentase Hasil Hutan Bukan Kayu Yang Dikembangkan	1.600.000.000	Dinas Kehutanaan
			Indeks Gas Rumah Kaca (GRK)	13.647.104.000	
	98 Peningkatan Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Yang Berwawasan Lingkungan Dan Berkelanjutan	Program Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup	Persentase Jumlah Kebijakan Berkaitan Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan Yang Diimplementasikan	1.768.116.000	DLH
		Program Peningkatan Pengendalian Dan Penataan Lingkungan Hidup	Persentase Perusahaan Yang Mengimplementasikan Kajian Lingkungan Hidup	262.212.000,00	DLH
		Program Peningkatan Pengolahan Sampah, Pemeliharaan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Pertumbuhan Volume Pengolahan Sampah Yang Ramah Lingkungan	450.000.000	DLH
		Program Peningkatan Pengelolaan Das Dan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Penanganan Tindak Pidana Kehutanan	1.900.000.000	Dinas Kehutanaan
		Program Peningkatan Pelayanan Teknis Laboratorium Lingkungan	Persentase Parameter Kualitas Lingkungan Yang Terakreditasi	505.000.000	Uptb Laboratorium Lingkungan
			Nilai Jaminan Reklamasi	350.000.000	Dinas Esdm

Prioritas	Arah Kebijakan	Program Perangkat Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Pagu Indikatif 2019	PD Yang Bertanggung Jawab
			Persentase Luas Lahan Yang Tidak Terganggu Di Areal ULP	2.250.000.000	Dinas Esdm
		Program Peningkatan Pengelolaan Geologi Dan Air Tanah	Persentase Cadangan Air Tanah Yang Potensial Yang Dapat Dimanfaatkan	200.000.000	Dinas Esdm
			Jumlah Obyek Geologi Yang Diusulkan Menjadi Kawasan Cagar Alam Geologi	150.000.000	Dinas Esdm
		Program Peningkatan Pelayan Teknis Tata Kelola Dishut	Jumlah Kawasan Hutan Yang Dikelola	1.950.000.000	Dinas Kehutanaan
		Program Tata Kelola Lingkungan Hidup	Rasio Jumlah Perusahaan Dengan Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Yang Diimplementasikan	368.116.000	DLH
		Program Pengembangan Dan Pembangunan Perhubungan Darat	Prosentase Penurunan Emisi Dari Sektor Transportasi	1.500.000.000	DISHUB
		Program Peningkatan Pengendalian, Oprasional Dan Kebandarudaraan	Prosentase Angkutan Umum Bandara Udara Yang Layak Jalan	478.660.000	DISHUB
	99 Pengembangan TPA Regional	Program Pemeliharaan Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Pertumbuhan Volume Pengolahan Sampah Yang Ramah Lingkungan Pada Tpa Regional	665.000.000	DLH
		Program Kecipta Karya Dan Permukiman	Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/Aliran Air Tidak Tersumbat Di Kpengembangan Tpa Regional	300.000.000	PRKP
			Persentase Jalan Lingkungan Permukiman Dalam Kondisi Baik Di Pengembangan TPA Regional	300.000.000	PRKP
		Program Pengembangan Sda	Persentase Penyediaan Volume Air Baku Untuk Pengembangan Tpa Regional	250.000.000	PUPR
			Panjang Saluran / Sungai Yang Dinormalisasi Pada Kawasan Kumuh	250.000.000	PUPR
<b>JUMLAH</b>				<b>2.962.836.898.568</b>	

# **BAB VII**

## **KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

# BAB VII

## KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

### A. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Berkenaan dengan penerapan akuntabilitas di daerah, ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pemerintahan di daerah diselenggarakan berdasarkan sejumlah asas, dimana salah satunya adalah asas akuntabilitas. Dengan demikian, Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah harus mampu menerapkan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut lembaga pemerintah harus mampu menerapkan sistem yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan, pelaksanaan, hingga proses evaluasi. Prinsip *Good Governance* atau pemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, dan berorientasi hasil.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja maka setiap instansi pemerintah dituntut untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama dilingkungan instansi masing-masing. Tuntutan demikian sangat beralasan karena sering kali terjadi ketidakselarasan dalam penetapan indikator kinerja sehingga menyebabkan hasil yang disajikan tidak sesuai dengan perencanaan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan dan menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD.

Tujuan perumusan dan penetapan IKU adalah:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 sebagaimana disajikan pada Tabel VII.1.

**Tabel VII.1**  
Indikator Kinerja Utama  
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	Kondisi Awal RPJMD	TARGET	Kondisi akhir RPJMD
				2019	
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya produksi sub sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian	1 Persentase Pertumbuhan Produksi sub sektor pertanian, peternakan, dan jasa perkebunan	4,76	4.90	5,15
2	Meningkatnya produksi Sub Sektor perikanan	2 Persentase Pertumbuhan Produksi sub sektor perikanan	3,74	3.85	4.00
3	Meningkatnya kunjungan wisatawan	3 Tingkat kunjungan wisatawan	330.322	389.009	477.181
4	Meningkatnya Produksi sektor pertambangan	4 Persentase Pertumbuhan Produksi sektor pertambangan dan penggalian	0,49	0.57	0.73
5	Meningkatnya pembangunan berbasis industri	5 Persentase Pertumbuhan Produksi sektor industri pengolahan	2,62	2.65	2.86
6	Terwujudnya kemandirian energi	6 Persentase Pertumbuhan Produksi sub sektor ketenagalistrikan	15,35	12.83	12.95
7	Meningkatnya belanja pemerintah Daerah	7 Persentase pertumbuhan pengeluaran pemerintah daerah	5,50	5.65	5.80
8	Menurunnya angka Pengangguran	8 Persentase Angka Pengangguran	3.7	5.6	5.3
9	Menurunnya angka kemiskinan	9 Persentase Angka Kemiskinan	5,04	5.15	5.0
10	Menurunnya angka Inflasi	10 Persentase Tingkat Inflasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	6,75	6.31	6.02
11	Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	11 Persentase laju pertumbuhan Penduduk	2,11	2,09	2,08
12	Meningkatkan pemenuhan infrastruktur pengembangan potensi daerah	12 Terbangunnya Daerah irigasi (ha)	1.034	1.135	1.294
		13 Ketersediaan air baku (m3)	N.A	N,A	175.000
13	Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat	14 Persentase lingkungan yang tertata	N.A	34	100
		15 Persentase bangunan yang tertata	N.A	38	100
		16 Persentase Desa yang Terlayani Jaringan Telekomunikasi	80	85	92
14	Meningkatkan konektivitas antar wilayah	17 Persentase kunjungan kapal di pelabuhan laut	0.17	0.18	0.21
		18 Persentase armada pengangkutan	N.A	0.34	0.37
		19 Persentase jalan kondisi mantap	92,2	94.50	96.50
15	Meningkatnya pendidikan bagi masyarakat	20 Angka harapan lama sekolah , (Angka harapan lama sekolah laki-laki, Angka harapan lama sekolah perempuan)	11,71	11.89	12.00
			L=11.93	L=12,37	L=12,81
			P=12.07	P=12,46	P=12,93
16	Meningkatnya kesehatan masyarakat	21 Angka Kesehatan Masyarakat	76,94	77,58	89,98



NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	Kondisi Awal RPJMD	TARGET	Kondisi akhir RPJMD
				2019	
1	2	3	4	5	6
17	Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	22 Opini Audit BPK Atas Laporan Keuangan	WDP	WTP	WTP
		23 Tingkat kematangan Maturitas SPIP	3	3	4
		24 Nilai Akuntabilitas Kinerja Provinsi Meningkat	63	70	75
		25 Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Meningkat	N.A	2,78	2,9
18	Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien	26 Nilai rata-rata delapan area perubahan	N.A	35	50
		27 Indeks Profesionalitas ASN	60	67.5	90
19	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki Pelayanan publik yang berkualitas	28 Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	N.A	5	7
		29 Rata-Rata Tingkat Kepuasan Masyarakat	N.A	B	B
20	Meningkatnya Kebebasan sipil, hak politik dan lembaga demokrasi masyarakat	30 Skor aspek kebebasan sipil	81.70	87,76	87.82
		31 Skor aspek hak-hak politik	80.25	81.76	81,85
		32 Skor aspek lembaga demokrasi	80,10	80,33	80,54
21	Meningkatkan kapasitas terhadap penanggulangan bencana	33 Indeks kapasitas bencana daerah	0,10	0,20	0,35
22	Meningkatnya Pengendalian Lingkungan Hidup	34 Indeks kualitas air sungai	64,56	67,80	69,88
		35 Indeks kualitas udara	82,81	87,86	96,01
		36 Indeks tutupan lahan	37,51	38,26	39,81
		37 Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	N.A	7.280,85	6.047,35

## B. INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja utama yang mencerminkan keberhasilan atas penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Indikator Kinerja Kunci disusun oleh Tim Nasional Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) berdasarkan usulan Indikator Kinerja Kunci yang diterima dari menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non departemen yang dilakukan setiap bulan Desember. IKK disusun untuk menilai aspek pada tataran pengambil kebijakan daerah dan aspek pada tataran pelaksana kebijakan daerah untuk masing-masing urusan pemerintahan.

Penetapan Indikator Kinerja Kunci Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 sebagaimana disajikan pada Tabel VII.2.

**Tabel VII.2**  
 Penetapan Indikator Kinerja Kunci  
 Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUSAN/PERSAMAAN	RENCANA CAPAIAN KINERJA KUNCI TAHUN 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>URUSAN WAJIB</b>					
1	PENDIDIKAN	1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak	89,80%
				----- x 100 % Jumlah anak usia 4 – 6 tahun	
		2	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	Jumlah Penduduk usia 15 tahun keatas dapat baca tulis	98,07%
				----- x 100 % Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas	
		3	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Jumlah siswa usia 7-12 tahun dijenjang SD/MI/Paket A	95,50%
				----- x 100 % Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 thn	
		4	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Jumlah siswa usia 13-15 tahun dijenjang SMP/MTs/Paket B	74%
				----- x 100 % Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	
		5	Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C	Jumlah siswa usia 16-18 tahun dijenjang SMA/SMK/MA/Paket C	57.45%
				----- x 100 % Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 thn	
		6	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	Jumlah putus sekolah pd tingkat & jenjang SD/MI	0,09%
				----- x 100 % Jumlah siswa pd tingkat yg sama	

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUSAN/PERSAMAAN	RENCANA CAPAIAN KINERJA KUNCI TAHUN 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				dan jenjang SD/MI pd tahun ajaran sebelumnya	
		7	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	$\frac{\text{Jumlah putus sekolah pd tingkat \& jenjang SMP/MTs}}{\text{Jumlah siswa pd tingkat yg sama dan jenjang SMP/MTs}} \times 100 \%$	0,42%
		8	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	$\frac{\text{Jumlah putus sekolah pada jenjang SMA/SMK/MA}}{\text{Jumlah siswa pada jenjang SMA/SMK/MA pd tahun ajaran sebelumnya}} \times 100 \%$	0,85%
		9	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	$\frac{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI}}{\text{Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya}} \times 100 \%$	100%
		10	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	$\frac{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs}}{\text{Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya}} \times 100 \%$	100%
		11	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	$\frac{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA}}{\text{Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMA/SMK/MA pada tahun ajaran sebelumnya}} \times 100 \%$	100%
		12	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	$\frac{\text{Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs}}{\text{Jumlah lulusan pd jenjang SD/MI}} \times 100 \%$	89,25%

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUSAN/PERSAMAAN	RENCANA CAPAIAN KINERJA KUNCI TAHUN 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				tahun ajaran sebelumnya	
		13	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMA/SMK/MA ----- x 100 %	92,50%
				Jumlah lulusan pd jenjang SMP/MTs tahun ajaran sebelumnya	
		14	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	Jumlah guru berijasah kualifikasi S1/D-IV ----- x 100 % % Jumlah Guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA	86,50%
2	KESEHATAN	15	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	Jumlah komplikasi kebidanan yg mendpt penanganan difinitif di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertetu ----- x 100 % Jumlah ibu dgn komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja Pada kurun waktu yg sama	97,24%
		16	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Jumlah ibu bersalin yg ditolong oleh tenaga kesehatan Di satu wilayah kerja pd kurun waktu tertentu ----- x 100 % Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah Kerja dalam kurun waktu yang sama	94,81%
		17	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Jumlah Desa / Kelurahan UCI x 100 % % Jumlah Seluruh Desa / Kelurahan	97,99%
		18	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana Pelay. Kes. Di satu wil. Kerja pd kurun	100%

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUSAN/PERSAMAAN	RENCANA CAPAIAN KINERJA KUNCI TAHUN 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				wkt tertentu ----- x 100 % Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan Di satu wilayah kerja dalam waktu yang sama	
		19	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang Ditemukan dan diobati di satu wil. Kerja selama 1 thn ----- x 100 % Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam Kurun wkt yang sama	15,25%
		20	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wil. Kerja selama 1 thn ----- x 100% Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam Kurun wkt yang sama	.....%
		21	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	Jumlah kunjungan pasien maskin di sarana kesehatan Strata 1 ----- ----- x 100% Jumlah seluruh maskin di Kab/Kota	.....%
		22	Cakupan kunjungan bayi	Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kes. sesuai standar di satu wilayah kerja pd Kurun waktu tertentu ----- x 100 % Jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu	99,65%

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUSAN/PERSAMAAN	RENCANA CAPAIAN KINERJA KUNCI TAHUN 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				wilayah kerja pd Kurun waktu yang sama	
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	23	Jalan provinsi dalam kondisi mantap	Jalan provinsi dalam kondisi mantap ----- x 100 % Panjang seluruh jalan provinsi	94%
		24	Luas irigasi provinsi dalam kondisi baik	Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik ----- x 100 % Luas irigasi kabupaten	26,32%
		25	Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	Luas ruang terbuka hijau ----- x 100 % Luas wilayah ber HPL/HGB	19,43%
4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	26	Rumah tangga pengguna air bersih	Jumlah rumah tangga pengguna air bersih ----- x 100 % Jumlah seluruh rumah tangga	66,59%
		27	Lingkungan pemukiman kumuh	Luas lingkungan permukiman kumuh ----- x 100 % % Luas wilayah	0,00%
		28	Rumah layak huni	Jumlah rumah layak huni ----- x 100% Jumlah seluruh rumah di wilayah pmda ybs.	96,42%
		29	Sanitasi Layak	Jumlah rumah sanitasi layak ----- x 100% Jumlah seluruh rumah tangga	79,69%
5	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	30	Kegiatan pembinaan politik daerah	Menunjukkan Jumlah Kegiatan pembinaan politik daerah	7 Keg.
		31	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan	Menunjukkan Jumlah Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan	3 Keg.

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUSAN/PERSAMAAN	RENCANA CAPAIAN KINERJA KUNCI TAHUN 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			OKP	OKP	
6	SOSIAL	32	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	Menunjukkan jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah singgah dll yang terdapat di suatu daerah	2 buah
		33	Persentase penyandang cacat baik fisik dan mental, serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam satu tahun ----- x 100 % Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial dalam satu tahun	18,60%
		34	PMKS yg memperoleh bantuan sosial	Jumlah PMKS yg diberikan bantuan ----- x 100 % Jumlah PMKS yg seharusnya menerima bantuan	19,71%
7	TENAGA KERJA	35	Pelayanan kepesertaan Jaminan Sosial bagi pekerja/buruh	Jumlah pekerja/buruh peserta pogram Jamsostek aktif ----- x 100 % Jumlah pekerja/buruh	.....%
		36	Pencari kerja yang ditempatkan	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan ----- x 100 % Jumlah pencari kerja yang mendaftar	.....%
8	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	37	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	Pekerja perempuan di lembaga pemerintah ----- x 100 % Jumlah pekerja perempuan	0,14 %
		38	Angka melek huruf perempuan usia 15 th keatas	Jumlah anak perempuan usia > 15 yg melek huruf	.....%

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUSAN/PERSAMAAN	RENCANA CAPAIAN KINERJA KUNCI TAHUN 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				----- x 100 % Jumlah anak perempuan usia > 15 tahun	
		39	Partisipasi angkatan kerja perempuan	Jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan ----- x 100 % Jumlah angkatan kerja perempuan	0,47 %
9	PANGAN	40	Regulasi ketahanan pangan	Ada/tidak peraturan tentang kebijakan ketahanan pangan dalam bentuk perda,perkada, dsb.	Ada (2 Pergub)
		41	Ketersediaan pangan utama	Rata2 jumlah ketersediaan pangan utama per tahun (kg) ----- x 1000 Jumlah penduduk	18,13
10	PERTANAHAN	42	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	Jumlah kasus yang diselesaikan ----- x 100 % Jumlah kasus yang terdaftar	68%
		43	Penyelesaian Ijin Lokasi	Jumlah Ijin Lokasi ----- x 100 % Jumlah permohonan ijin	40%
11	LINGKUNGAN HIDUP	44	Penanganan sampah	Volume sampah yang ditangani (m3) ----- ----- x 100 % Volume produksi sampah (m3)	.....%
		45	Kebersihan	Jumlah pasar tradisional yang tergolong baik ----- -- x 100 % Jumlah seluruh pasar tradisional	.....%
		46	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	Jumlah daya tampung TPS (m3) ----- x 1000 Jumlah penduduk	.....
		47	Penegakan hukum lingkungan	Jumlah kasus lingkungan yang	.....%



NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUSAN/PERSAMAAN	RENCANA CAPAIAN KINERJA KUNCI TAHUN 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				diselesaikan pemda ----- x 100 % Jumlah kasus lingkungan yang ada	
12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	48	Kepemilikan KTP	Jumlah Penduduk yang memiliki KTP ----- - x 100 % Jumlah penduduk wajib KTP (>17 dan atau Pernah/sudah menikah)	92 %
		49	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	Jumlah penduduk memiliki akta kelahiran ----- x 1000 Jumlah penduduk	85
		50	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	sudah/belum	Sudah
13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	51	PKK aktif	Jumlah PKK aktif ----- x 100 % Jumlah PKK	3,07%
		52	Posyandu	Jumlah Posyandu Aktif ----- x 100 % Total Posyandu	4,66%
14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	53	Prevalensi peserta KB aktif	Jumlah peserta program KB aktif ----- x 100 % Jumlah pasangan usia subur	92 %
		54	Rasio petugas lapangan KB/penyuluh KB (PLKB/PKB) di setiap desa/kelurahan	Jumlah desa/kelurahan ----- x 100 % PLKB/PKB	85 %
15	PERHUBUNGAN	55	Angkutan darat	Jumlah angkutan darat ----- x 100% Jumlah penumpang angkutan darat	24,56%
16	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	56	Web site milik pemerintah daerah	Ada / tidak	Ada
		57	Pameran/expo	Menunjukkan Jumlah pameran/expo	2 Kali

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUSAN/PERSAMAAN	RENCANA CAPAIAN KINERJA KUNCI TAHUN 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				per tahun	
17	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	58	Koperasi aktif	Jumlah Koperasi aktif ----- x 100 % Jumlah seluruh koperasi	15,50%
		59	Usaha Mikro dan Kecil	Jumlah usaha mikro dan kecil ----- x 100 % Jumlah seluruh UKM	15%
18	PENANAMAN MODAL	60	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	Realisasi PMDN tahun berkenaan – Realisasi PMDN tahun sebelumnya ----- x 100 % Realisasi PMDN tahun sebelumnya	8,82%
19	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	61	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	Jumlah gelanggang/balai remaja di kabupaten ----- x 1000 Jumlah penduduk	0,00%
		62	Lapangan olahraga .	Jumlah lapangan olahraga di kabupaten ----- x 1000 Jumlah penduduk Lapangan olah raga adalah: 1. Lapangan sepakbola = 388 lap 2. Lapangan basket = 103 lap 3. Lapangan volley = 381 lap 4. Lapangan bulu tangkis = 288 lap 5. Kolam renang = 8 kolam Jumlah = 1.168 lap	0,08%
20	STATISTIK	63	Buku "kabupaten dalam angka"	Ada atau tidak	Ada
		64	Buku "PDRB kabupaten"	Ada atau tidak	Ada
21	PERSANDIAN	65			
22	KEBUDAYAAN	66	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	67 kali
		67	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	10 buah

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUSAN/PERSAMAAN	RENCANA CAPAIAN KINERJA KUNCI TAHUN 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan ----- x 100 % Total Benda, situs & kawasan yang dimiliki daerah	19,23%
23	PERPUSTAKAAN	68	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Jumlah koleksi judul buku yg tersedia di perpustakaan daerah ----- - Jumlah koleksi jumlah buku yg tersedia di perpustakaan daerah	0,5
		69	Pengunjung perpustakaan	Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun ----- -- Jumlah orang dalam populasi yg harus dilayani (10-58 thn)	0,011302919
24	KEARSIPAN	70	Penerapan pengelolaan arsip secara baku	Jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara bak ----- x 100 % Jumlah SKPD	31%
		71	Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan	Menunjukkan jumlah Kegiatan pemningkatan SDM pengelola kearsipan	1 kegiatan
		72			
<b>URUSAN PILIHAN</b>					
1	KELAUTAN DAN PERIKANAN	73	Produksi perikanan	Jumlah Produksi Ikan (Ton) ----- x 100% Target Daerah (Ton)	215,30%
		74	Konsumsi ikan	Jumlah Konsumsi Ikan (Kg) ----- x 100% Target Daerah (Kg)	54%
2	PARIWISATA	75	Kunjungan wisata	Menunjukkan total jumlah wisatawan	449.996 orang

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUSAN/PERSAMAAN	RENCANA CAPAIAN KINERJA KUNCI TAHUN 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				per tahun	
		76	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Tahun 2015	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Pariwisata ----- x 100% Jumlah total PDRB	.....%
3	PERTANIAN	77	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ton) ----- --- Luas areal tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ha)	3,3 ton/ha
		78	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Tahun 2015	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian ----- x 100% Jumlah total PDRB	DM = 19,45% TM = 20,2%
4	KEHUTANAN	79	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi ----- x 100% Luas total hutan dan lahan kritis	5247%
		80	Kerusakan Kawasan Hutan	Luas Kerusakan Kawasan Hutan ----- x 100% Luas Kawasan Hutan	0.480%
5	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	81	Pertambangan tanpa ijin	Luas Penambangan Liar yang ditertibkan ----- x 100% luas area penambangan yang liar	.....%
		82	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Tahun 2015	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertambangan ----- x 100% Jumlah total PDRB	.....%
6	PERDAGANGAN	83	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Tahun 2015	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor perdagangan ----- x 100% Jumlah total PDRB	15,20%

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUSAN/PERSAMAAN	RENCANA CAPAIAN KINERJA KUNCI TAHUN 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		84	Ekspor Bersih Perdagangan	Nilai ekspor bersih = nilai ekspor – nilai impor	US\$ 1.186,19
7	PERINDUSTRIAN	85	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Tahun 2015	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor Industri ----- x 100% Jumlah total PDRB	20,45%
		86	Pertumbuhan Industri	Jumlah Industri tahun 2015 - Jumlah Industri tahun 2014 ----- x 100% Jumlah Industri s/d tahun 2015	5,00%
8	TRANSMIGRASI	87	Transmigran swakarsa	Jumlah transmigran swakarsa ----- x 100% Jumlah transmigran	.....%
<b>FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>					
1	PERENCANAAN PEMBANGUNAN	88	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	Ada/tidak	Ada
		89	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	Ada/tidak	Ada
		90	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	Ada/tidak	Ada
		91	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	Jumlah program RKPD tahun berkenaan ----- x 100 % Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan	<u>205X100</u> 205            = 100
2	FUNGSI LAIN SESUAI DENGAN KETENTUAN	92	Sistem Informasi Manajemen Pemda	Menunjukkan Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemda yang telah dibuat	.....buah

NO	URUSAN	NO	IKK	RUMUSAN/PERSAMAAN	RENCANA CAPAIAN KINERJA KUNCI TAHUN 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN			oleh pemda ybs	
		93	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Ada atau tidaknya survey IKM di Pemda	Ada/tidak*)

An orange scroll banner with a brown border and decorative scroll ends. The text is centered on the banner.

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

# BAB VIII

## PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 merupakan Dokumen Perencanaan tahunan dengan prioritas pembangunan terarah dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 Tahap III dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022. Disamping itu prioritas pembangunan daerah secara prinsip tetap mengacu pada sasaran-sasaran pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2015-2019, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034, memperhatikan Program Pembangunan Nasional 9 Agenda Nawa Cita, serta percepatan pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan kesepakatan-kesepakatan pembangunan SDG's Rencana Kerja Pemerintah Daerah memuat arah kebijakan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan. Oleh karena itu, untuk implementasinya diperlukan koordinasi antar instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan partisipasi masyarakat serta seluruh pelaku pembangunan (*stakeholder*) melalui Forum Gabungan Perangkat Daerah serta musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan terutama sinkronisasi dan penyesuaian rencana program dan kegiatan yang telah ditentukan.

Dokumen RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019 ini dimaksudkan sebagai acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dan juga sebagai acuan dan pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) penyelenggaraan urusan pemerintahan baik urusan wajib maupun urusan pilihan, sekaligus mendorong masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya, serta dijadikan pedoman dalam rangka melakukan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dimaksud. Keberhasilan dalam pencapaian prioritas pembangunan nasional, diantaranya sangat tergantung dengan sinergitas kebijakan antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dengan pemerintah pusat. Sinkronisasi kebijakan diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan sesuai kewenangan masing-masing yang diorientasikan melalui pencapaian strategi pembangunan dengan prinsip *money follow program*. Dengan demikian usulan kegiatan yang diajukan telah mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sehingga selain kerangka pendanaannya diusulkan ke APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun ke Pemerintah Pusat melalui APBN baik dalam bentuk usulan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Dalam kerangka pendanaan program dan kegiatan melalui APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maka Dokumen RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun 2019 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Keberhasilan pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selain dilaksanakan jajaran



Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten/Kota juga ditentukan oleh dukungan masyarakat untuk menjawab tantangan dan mengurangi permasalahan yang ada. Adapun Kaidah pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

1. RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019, tidak hanya memuat kegiatan-kegiatan dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan publik, tetapi juga memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
2. Perangkat Daerah dan seluruh stakeholders pembangunan termasuk masyarakat luas, dunia usaha, berkewajiban dan berperan serta untuk melaksanakan program-program RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 dengan sebaik-baiknya
3. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergisitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maupun dari APBN, maka setiap Perangkat Daerah perlu membuat Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2019 sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah ( Renstra-PD ) dengan mempedomani RKPD ini.
4. Pelaksanaan Forum SKPD serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD ditujukan untuk mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat serta merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan.
5. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019, Badan Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Penelitian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan menganalisa terhadap penjabaran dan sinergisitas RKPD tahun 2019 ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dan Kebijakan Umum APBD 2019 serta Prioritas dan Pagu Indikatif PD Tahun 2019.

An orange scroll graphic with a dark orange border and rounded corners. It has a vertical strip on the left side and a small circular detail on the top right corner.

# **LAMPIRAN**

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS  
TAHUN 2019  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
TAHUN 2019**

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2019**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	PEMBANGUNAAN DEMOKRASI	Peningkatan Pembangunan Demokrasi	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah		Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah; Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan	4 Nilai; 100 %					DINAS PENDIDIKAN	
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	SKPD			Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan 100 %	100%	1.835.000.000	2.150.000.000		
			Pelaksanaan Kegiatan Siswa dan PTK Tingkat Nasional	Provinsi, SKPD			Jenis Kegiatan Siswa dan PTK Tk. Nasional dilaksanakan di Prov.Kep.Babel 1 Jenis	1 Jenis	1.500.000.000	3.000.000.000		
			Peningkatan Pelaksanaan Pendidikan PAUD oleh Kab/Kota	Provinsi			Terbinanya Pendidikan PAUD oleh Kab/Kota 7 Kab/Kota Tersedianya Majalah Pendidikan PAUD Tk. Provinsi 120.000 Eksemplar	7 Kab/Kota 120.000 Eksemplar	900.000.000	2.000.000.000		
			Studi Kelayakan Pendirian Perguruan Tinggi	Provinsi			Tersedianya Dokumen Studi Kelayakan Pendirian Perguruan Tinggi 1 Dok	1 Dok	-	100.000.000		
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	SKPD			Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan 100 %	100%	2.735.000.000	1.500.000.000		
			Peningkatan Disiplin Aparatur	SKPD			Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat disiplinnya 100 %	100%	-	220.000.000		
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	SKPD			Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya 100 %	100%	300.000.000	425.000.000		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	SKPD			Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan	2 dokumen	200.000.000	800.000.000		

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85% 2 dokumen				
			Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	SKPD			Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target diatas 90% 5 laporan	5 laporan	75.000.000	280.000.000	
			Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN)	Provinsi, SKPD, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat			Terlaksananya Ujian Nasional dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional 3 Jenjang	3 Jenjang	-	1.100.000.000	
			Pelaksanaan Lomba-Lomba Siswa dan PTK Tingkat Provinsi	Provinsi			Terseleksinya anggota tim lomba Siswa dan PTK Tk. Provinsi 10 Tim	10 Tim	6.000.000.000	7.400.000.000	
			Pemberian Beasiswa Kepada Siswa/Mahasiswa Tidak Mampu dan/atau berprestasi	Luar Daerah, Provinsi			Masyarakat berprestasi menerima beasiswa ke luar negeri 10 Orang Lulusan sekolah menengah yang tidak mampu dan/atau berprestasi menerima beasiswa 550 Orang	10 Orang 550 Orang	8.000.000.000	10.000.000.000	
			<b>Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah</b>		Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Provinsi; Persentase tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah Dinas kesehatan Provinsi dan balai Labkes	80 NILAI; 75 %					DINAS KESEHATAN
			pelayanan administrasi perkantoran	SKPD			Persentase capaian Kinerja Perangkat Daerah 77,5 %	77,5 %	2.766.970.700	2.861.645.335	
			Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	SKPD			Persentase capaian Kinerja Perangkat Daerah 77,5 %	77,5 %	500.403.200	550.443.520	
			Peningkatan Disiplin Aparatur	SKPD			Persentase capaian Kinerja Perangkat Daerah 77,5 %	77,5 %	-	188.106.600	
			Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	SKPD			Persentase capaian Kinerja Perangkat Daerah 77,5 %	77,5 %	206.363.600	227.000.029	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	SKPD			Persentase capaian Kinerja Perangkat Daerah	77,5 %	384.756.400	423.232.130		

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Daerah				77,5 %				
			Penyusunan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	SKPD			Persentase capaian Kinerja Perangkat Daerah 77,5 %	77,5 %	71.636.900	78.800.621	
			Peningkatan Pelayanan UPTD Balai Labkes	SKPD			Persentase capaian Kinerja Perangkat Daerah 77,5 %	77,5 %	1.638.178.400	1.819.420.246	
			<b>Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah</b>		Peningkatan Pelayanan Pemerintahan; Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah	100 persen; 100 persen					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	SKPD			Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani 160 orang	160 orang	2.764.274.500	2.340.496.950	
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	SKPD			Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan 160 orang	160 orang	1.854.351.044	2.039.785.637	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	SKPD			Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85% 2 Laporan	2 Laporan	200.000.000	596.378.750	
			Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	SKPD			Jumlah laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah 5 Laporan	5 Laporan	77.000.000	84.700.000	
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	SKPD			Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya 50 orang	50 orang	160.000.000	217.800.000	
			Peningkatan Disiplin Aparatur	SKPD			Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat disiplinnya 310 orang	310 orang	-	330.000.000	
			<b>Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah</b>		Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan; Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah	100 %; 82 %					DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	Luar Daerah, Provinsi			Jumlah Aparatur PD yang terlayani selama 12 bulan (%) 66 Orang	66 Orang	1.575.765.000	1.751.053.000	
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Provinsi, SKPD			Persentase aparatur PD yang memanfaatkan sarana	100%	1.081.007.700	1.662.108.572		

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							dan prasarana perkantiran selama 12 bulan (%) 100 %				
			Peningkatan Disiplin Aparatur	Provinsi, SKPD			Jumlah Aparatur PD yang meningkat disiplinnya (%) 66 Orang	66 Orang	-	88.330.000	
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah Aparatur PD yang meningkat kapasitasnya 48 Orang	48 Orang	271.491.000	298.640.100	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi, SKPD			Jumlah Dokumen Perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap Perencanaan Jangka Menengah Perangkat Daerah diatas 85% 3 Dokumen	3 Dokumen	620.250.000	120.000.000	
			Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Provinsi, SKPD			Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target diatas 90% 7 Laporan	7 Laporan	240.000.000	250.000.000	
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah		Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan; Predikat SAKIP Bappeda	71,25 Predikat; 72,5 Predikat					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
			Pelayanan Administrasi Perkantorann	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah pegawai (ASN dan THL) Perangkat Daerah yang terlayani 100 Orang	100 Orang	2.985.370.000	3.300.000.000	
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Provinsi, SKPD			Jumlah Paket Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran 13 Paket	13 Paket	2.386.780.000	3.127.876.000	
			Peningkatan Disiplin Aparatur	Provinsi, SKPD			, Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal PinangJumlah Seragam Pegawai (ASN dan THL) Perangkat Daerah 200 Stel	200 Stel	-	125.000.000	
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya 60 Orang	60 Orang	474.950.000	575.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85% 2 dokumen	2 dokumen	239.977.000	100.000.000	
			Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Provinsi, SKPD			Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah 7 laporan	7 laporan	138.675.000	100.000.000	
			Rapat Koordinasi Nasional Perencanaan Pembangunan	Provinsi, SKPD			Jumlah Rakomas Perencanaan Pembangunan yang diselenggarakan 0 Kegiatan Jumlah Rakomas Kelitbangan yang diselenggarakan 1	0 Kegiatan 1	646.660.000	-	
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah		Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah; Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan; Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan bidang Perhubungan	4 Nilai; 100 %; 75 %					DINAS PERHUBUNGAN
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	SKPD			Presentase aparatur perangkat daerah yangmemanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana aparatur 100 %	100%	2.670.000.000	1.000.000.000	
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	SKPD			Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan 100 %	100%	2.406.100.000	2.736.405.000	
			Survey Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di bidang perhubungan	Provinsi			Jumlah Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan bidang perhubungan. 1 Dokumen	1 Dokumen	85.000.000	90.000.000	
			Diklat Pemberdayaan Masyarakat di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP)	Luar Daerah			Pendaftaran dan seleksi diklat pemberdayaan masyarakat di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran 40 orang	40 orang	370.500.000	428.600.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Pengelolaan dan Pengembangan Website Dinas Perhubungan	SKPD			Pengelolaan website Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 12 bulan	12 bulan	65.500.000	70.600.000		
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	SKPD			Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya 15 orang	15 orang	150.000.000	180.000.000		
			Pengumpulan Data Dan Monitoring Pelayanan Jasa Perhubungan	Provinsi			Tersedianya Data Base Pelayanan Jasa Perhubungan 30 Buku	30 Buku	55.000.000	65.000.000		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	SKPD			Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat daerah diatas 85 % 4 Dokumen	4 Dokumen	258.000.000	164.000.000		
			Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	SKPD			Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target diatas 90% 5 Dokumen	5 Dokumen	74.363.625	78.081.806		
			Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Melalui Kerjasama dengan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD)	Provinsi			Pendaftaran dan Seleksi Calon Taruna/i STTD Tahun 2019 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; beasiswa bagi Taruna/i STTD Tahun 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019 dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 100 orang	100 orang	1.800.000.000	2.150.000.000		
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah			Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah; Tingkat Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	4 Nilai; 100 %					DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	Luar Daerah, SKPD, Pangkal Pinang, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka Barat, Belitung, Belitung Timur				Jumlah pegawai (ASN dan THL) Dinas Lingkungan Hidup yang terlayani 95 Orang	95 Orang	1.633.000.000	1.852.000.000	
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Provinsi, SKPD				Jumlah Paket Pemenuhan Sarana dan Prasarana	10 Paket	950.000.000	3.000.000.000		



No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD		
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)						
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
							Perkantoran 10 Paket						
			Peningkatan Disiplin Aparatur	SKPD			Jumlah Seragam Pegawai (ASN danTHL) Dinas Lingkungan Hidup yang terpenuhi 95 Orang	95 Orang		-	140.000.000		
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya 35 Orang	35 Orang	200.000.000		486.000.000		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	SKPD			Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85% 3 Dokumen	3 Dokumen	280.000.000		396.750.000		
			Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	SKPD			Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target diatas 90% 4 Laporan	4 Laporan	48.000.000		50.000.000		
			Penyusunan dan Penetapan Kebijakan Daerah di Bidang Lingungan Hidup	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang			Jumlah Peraturan dan Kebijakan Daerah di Bidang Lingkungan Hidup yang Tersusun 1 Jenis Peraturan Daerah	1 Jenis Peraturan Daerah	140.000.000		325.000.000		
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah			Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah; Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan	5 Nilai; 100 %					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA	
			Pelayanan administrasi perkantoran	Provinsi, SKPD				Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan 100 %	100%	1.600.000.000		1.712.000.000	
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Provinsi, SKPD				Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran	100%	182.110.000		183.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
							selama 12 bulan 100 %					
			Peningkatan Disiplin Aparatur	Provinsi, SKPD			Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat disiplinnya 100 %	100%	-	82.000.000		
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Luar Daerah			Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya 100 %	100%	56.456.000	57.000.000		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi, SKPD			Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85% 2 dokumen	2 dokumen	170.280.000	146.059.000		
			Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Provinsi, SKPD			Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target diatas 90% 5 DokumenJumlah buku dan DVD Profil gender dan Anak 100 PaketJumlah Informasi yang di publikasikan melalui website 100 Informasi	5 Dokumen100 Paket100 Informasi	200.000.000	297.318.000		
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah			Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %					DINAS SOSIAL
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	SKPD				Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan 100% 100 Pegawai	100 Pegawai	2.583.140.000	2.809.540.000	
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	SKPD				Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan 100 pegawai	100 pegawai	1.942.650.000	1.942.650.000	
			Peningkatan Disiplin Aparatur	SKPD				Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat disiplinnya 100 pegawai	100 pegawai	-	288.800.000	
			Peningkatan dan Pengembangan Perencanaan, Pelaporan,	SKPD				Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan	100 dokumen 100 dokumen	-	978.130.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Evaluasi, Pendataan, Informasi serta Keuangan Perangkat Daerah				realisasi target diatas 90% 100 dokumen Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah 100 dokumen				
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi			Jumlah dokumen Perencanaan perangkat daerah yang tersusun 4 Dokumen	4 Dokumen	678.130.000	890.000.000	
			Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Provinsi			Jumlah Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah 5 Dokumen	5 Dokumen	200.000.000	200.000.000	
			<b>Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah</b>		Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan; Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah	100 %; 3 nilai					DINAS TENAGA KERJA
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Tengah, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Pangkal Pinang, Belitung, Belitung Timur			Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan 100 %	100%	2.682.375.565	3.940.371.600	
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Provinsi, SKPD			Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan 100 %	100%	557.874.599	557.874.599	
			Peningkatan Disiplin Aparatur	Provinsi, SKPD			Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat disiplinnya 100 %	100%	-	157.630.000	
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	SKPD			Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya 100 %	100%	150.000.000	300.000.000	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	SKPD			Renja PD 2019 dan Perubahan PD 2019 90 Dokumen Perencanaan	90 Dokumen Perencanaan	97.215.300	100.000.000	
			Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	SKPD			Laporan Triwulan Pengendalian dan Evaluasi Renja PD, Lakip PD, LPPD PD, LKPJ PD, Laporan	100%	109.376.536	109.376.536	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Semesteran Keuangan PD 100 %				
			Peningkatan Fungsi Pelayanan Pemerintah pada UPTD Balai Latihan Kerja Industri (BLKI)	Provinsi, Luar Daerah, SKPD			Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani pada UPTD Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) selama 12 bulan 100 %	100%	1.500.000.000	1.752.675.000	
			<b>Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah</b>		Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah; Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan	3 Nilai; 100 %					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	SKPD			persentase Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan 100 %	100%	2.480.000.000	2.600.000.000	
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	SKPD			Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan 100 %	100%	600.000.000	800.000.000	
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Luar Daerah, SKPD			Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya 100 %	100%	150.000.000	180.000.000	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	SKPD			Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85% 1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000	160.000.000	
			<b>Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah</b>		Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah; Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan	3 Nilai; 100 %					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	SKPD, Pangkal Pinang			Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan 100 %	100%	1.859.950.000	1.800.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	SKPD, Pangkal Pinang			Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan 100 %	100%	4.256.850.000	800.000.000		
			Peningkatan Disiplin Aparatur	SKPD, Pangkal Pinang			Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat disiplinnya 100 %	100%	-	150.000.000		
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Luar Daerah			Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya 100 %	100%	50.000.000	80.000.000		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pangkal Pinang			Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85% 4 Dokumen	4 Dokumen	100.000.000	120.000.000		
			Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	SKPD, Pangkal Pinang			Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target diatas 90% 3 Dokumen/laporan	3 Dokumen/laporan	40.000.000	50.000.000		
			Peningkatan Pelayanan Kantor UPTD PTSP	Provinsi, Belitung			Operasional Cabang Dinas/UPTD PTSP Wilayah Kerja Belitung 12 Bulan	12 Bulan	119.200.000	1.000.000.000		
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah			Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah; Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan	4 nilai; 100 %				DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
			Pembelian Rumah Peninggalan Sejarah							5.000.000.000	-	
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	SKPD				Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan 90 %	90%	2.378.081.000	2.835.889.000	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Provinsi, SKPD				Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran yang tersusun 6 dokumen	6 dokumen	218.687.000	275.702.500	
		Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program	Luar Daerah, Provinsi, Bangka,				Meningkatnya pengembangan Kawasan	3 kawasan	-	284.736.000		

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			pengembangan destinasi pemasaran pariwisata pada Sekretariat Dewan Kawasan KEK	Bangka Tengah, Belitung			Ekonomi Khusus Pariwisata 3 kawasan					
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Provinsi, SKPD, Bangka Barat			Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan 90 %	90%	2.908.000.000	1.426.037.000		
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka, Pangkal Pinang, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur			Meningkatnya kualitas SDM Pariwisata 10 orang	10 orang	157.425.700	163.296.500		
			Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Capaian Kinerja dan Keuangan	Provinsi, Luar Daerah, SKPD, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung			Meningkatnya kinerja perencanaan pembangunan kebudayaan dan pariwisata daerah yang berkualitas 5 dokumen	5 dokumen	157.361.000	426.455.500		
			Peningkatan Fungsi UPT Disbudpar di Belitung	Provinsi, Luar Daerah, SKPD, Belitung			Persentase pelayanan administrasi perkantoran UPT Disbudpar 90 %	90%	775.000.000	861.250.000		
			Penyusunan Neraca Satelit Pariwisata Daerah	Provinsi, Luar Daerah, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Pangkal Pinang, Belitung Timur			Tersusunnya buku Neraca Satelit Pariwisata Daerah Bangka Belitung 200 buku	200 buku	378.447.050	439.369.000		
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah			Persentase Tingkat Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Terhadap Pelayanan Kesekretariatan; Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olahraga	80 %; 70 Nilai					DINAS KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	Provinsi, SKPD				Persentase aparatur perangkat daerah yang terlayani selama 12 bulan	100%	2.926.084.500	2.823.393.475	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							100 %				
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	SKPD			Persentase aparatur perangkat daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan 75 %	75%	222.825.000	773.024.175	
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Provinsi, Luar Daerah, SKPD			Jumlah aparatur perangkat daerah yang meningkat kapasitasnya 10 Pegawai	10 Pegawai	82.500.000	73.810.835	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi, SKPD			Jumlah dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah perangkat daerah diatas 85% 6 Dokumen	6 Dokumen	274.150.000	205.936.500	
			Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Provinsi, SKPD			Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah dengan realisasi target diatas 90% 5 Dokumen	5 Dokumen	139.920.000	246.592.000	
			Verifikasi dan Evaluasi Bantuan Keuangan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Provinsi, Bangka Tengah, Belitung, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan			Jumlah Proposal yang diverifikasi dan dievaluasi 6 Proposal	6 Proposal	109.990.000	127.050.000	
			Pendataan Informasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Kepemudaan dan Olahraga	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Kepemudaan dan Olahraga 1 Laporan	1 Laporan	-	114.950.000	
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah		Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan	100 %					SEKRETARIAT DAERAH
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Tengah, Pangkal Pinang, Belitung, Belitung Timur, Bangka, Bangka Selatan, Bangka Barat			Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan 100 %	100%	20.488.718.000	32.181.720.900	
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Provinsi, SKPD			Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang	100%	13.813.004.160	14.453.654.368		

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan 100 %				
			Peningkatan Disiplin Aparatur	Provinsi, SKPD			Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat disiplinnya 100 %	100%	-	1.083.448.800	
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Provinsi			Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya 150 Orang	150 Orang	-	630.000.000	
			Peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Daerah	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Belitung Timur, Bangka, Pangkal Pinang, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung			Persentase pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah 100 %	100%	2.203.900.000	2.314.095.000	
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah		Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan (); Predikat SAKIP Sekretariat DPRD	90 %; 76 Predikat					SEKRETARIAT DPRD
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	SKPD			Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85% 3 dokumen	3 dokumen	50.000.000	50.000.000	
			Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	SKPD			Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah (laporan) 7 laporan	7 laporan	50.000.000	50.000.000	
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Luar Daerah, SKPD			Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya 77 orang	77 orang	699.600.000	769.560.000	
			Peningkatan Disiplin Aparatur	SKPD			Jumlah Seragam Anggota DPRD 450 stel	450 stel	782.475.000	967.685.400	
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	SKPD			Jumlah Anggota DPRD dan pegawai (ASN dan THL) Perangkat Daerah yang terlayani (Orang) 255 orang	255 orang	10.746.888.900	11.821.577.790	
		Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah		Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan; Skor	75 %; 75 Skor					INSPEKTORAT DAERAH	



No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					(Nilai) SAKIP Perangkat daerah						
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang			Prosentase Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan 100 %	100%	1.852.000.000	2.050.000.000	
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Luar Daerah, SKPD			Prosentase Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan 100 %	100%	1.613.960.000	7.961.000.000	
			Peningkatan Disiplin Aparatur	SKPD			Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat disiplinnya 95 Orang PNS/Honoror	95 Orang PNS/Honoror	-	95.256.000	
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Prosentase Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya 100 %	100%	646.000.000	689.000.000	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	SKPD			Jumlah dokumen terhadap perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85% 4 Dokumen	4 Dokumen	31.000.000	32.000.000	
			Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	SKPD			Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target diatas 90% 7 Dokumen	7 Dokumen	62.000.000	84.000.000	
			<b>Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah</b>		Tingkat Kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap Pelayanan Kesekretariatan; Nilai SAKIP Perangkat Daerah; Persentase Sarana dan Prasarana Yang Layak Fungsi; Persentase Kenaikan Nilai Indeks Profesionalitas ASN	92 %; 62 ; 90 %; 7					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	SKPD			Jumlah Pegawai BKPSDMD yang terlayani	179 Orang	5.013.980.000	6.082.857.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							179 Orang				
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	SKPD			Jumlah Paket Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kantor 11 Paket Jumlah Kendaraan Yang Terpelihara 46 Unit Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor Yang Terpelihara 9 Paket	11 Paket 46 Unit 9 Paket	2.245.792.640	2.124.793.000	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	SKPD			Jumlah Dokumen Rencana Kerja 2 Dokumen Jumlah Dokumen PPRG 5 Dokumen	2 Dokumen 5 Dokumen	247.585.200	278.184.500	
			Penguatan Kelembagaan / Organisasi	SKPD			Jumlah Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen	-	200.219.800	
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	SKPD			Jumlah Aparatur yang meningkat kapasitasnya 1.092 Orang	1.092 Orang	850.000.000	1.009.778.000	
			Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	SKPD			Jumlah Laporan 9 Laporan	9 Laporan	157.000.000	182.655.000	
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah		Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah; Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan	3 nilai; 100 %					BADAN KEUANGAN DAERAH
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	SKPD			Persentase Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan 100 %	100%	8.878.680.000	12.724.369.518	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	SKPD			Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85% 3 dokumen	3 dokumen	47.250.000	49.600.000	
			Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	SKPD			Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya setelah mengikuti Bimtek/Diklat 28 orang	28 orang	315.000.000	330.750.000	
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	SKPD			Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran	100%	3.308.724.550	5.160.462.808		

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							selama 12 bulan 100 %				
			Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	SKPD			Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target diatas 90% 7 laporan	7 laporan	47.250.000	49.600.000	
			Pengelolaan Kehumasan pada Bakuda	Provinsi			Jumlah bulan layanan Pengelolaan Kehumasan pada BAKUDA 12 bulan	12 bulan	75.000.000	153.300.000	
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah		Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan; Predikat nilai SAKIP perangkat daerah	100 %; 0 B					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	Provinsi, SKPD			Jumlah aparatur perangkat daerah yang terlayani selama 12 bulan 203 orang	203 orang	5.465.543.300	6.224.232.200	
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	SKPD			Jumlah aparatur perangkat daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan 203 orang	203 orang	618.749.000	2.048.597.000	
			Peningkatan Disiplin Aparatur	SKPD			Jumlah aparatur yang meningkat disiplinnya 203 orang	203 orang	-	60.000.000	
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Provinsi, SKPD			Jumlah aparatur perangkat daerah yang meningkat kapasitasnya 65 orang	65 orang	94.702.000	185.503.100	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah 2 dokumen	2 dokumen	70.000.000	75.000.000	
			Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Provinsi, Luar Daerah, SKPD			Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan perangkat daerah 6 dokumen/laporan	6 dokumen/laporan	109.560.000	109.560.000	
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah		Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah; Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	3 Nilai; 100 %					DINAS PANGAN
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	Luar Daerah, Provinsi, SKPD,			Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang	100 Persen	1.189.620.000	1.700.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang			terlayani selama 12 bulan 100 Persen				
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	SKPD			Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan 100 Persen	100 Persen	900.000.000	900.000.000	
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	SKPD			Persentase Penyediaan Pemeliharaan Sarana prasarana aparatur 100 Persen	100 Persen	150.000.000	250.000.000	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	SKPD			Persentase capaian dokumen perencanaan 91 persen	91 persen	250.000.000	300.000.000	
			Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	SKPD			Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target diatas 90% 95 persen	95 persen	50.000.000	95.000.000	
			<b>Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah</b>		Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan; Predikat Sakip Badan Penghubung	71 Predikat; 70 Predikat					BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	Luar Daerah, SKPD			Jumlah Pegawai (ASN dan PHL) Perangkat Daerah yang Terlayani 70 Orang	70 Orang	5.484.257.000	7.000.000.000	
			Penyediaan Jasa Konsultasi Perencanaan untuk Rehabilitasi Berat Asrama Dayang Putri Bangka Belitung di Jogjakarta	Luar Daerah			Tersedianya Jasa Konsultasi Perencanaan untuk Rehabilitasi Berat Asrama Dayang Putri Bangka Belitung di Jogjakarta 1 paket	1 paket	144.642.500	-	
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Luar Daerah, SKPD			Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur 100 %	100%	2.998.045.000	1.000.000.000	
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya 35 Orang	35 Orang	300.000.000	800.000.000	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Luar Daerah, SKPD			Jumlah Dokumen Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan	3 Dokumen	70.000.000	90.000.000		

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85% 3 Dokumen				
			Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Luar Daerah, SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Perangkat Daerah 5 Laporan	5 Laporan	80.000.000	100.000.000	
			<b>Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah</b>		Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran; Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah; Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan	3 Nilai; 3 NILAI; 100 %					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	Luar Daerah, SKPD, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Bangka			Persentase aparatur perangkat daerah yang terlayani selama 12 bulan 100 %	100%	1.788.874.947	2.320.211.250	
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	SKPD			Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur 100 %	100%	641.550.000	673.627.500	
			Peningkatan Disiplin Aparatur	SKPD			Persentase Peningkatan Disiplin Paratur 100 %	100%	-	66.150.000	
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Luar Daerah, SKPD			Persentase Kapasitas Aparatur DPMD yang Terbina 15 orang	15 orang	105.000.000	110.250.000	
			Peningkatan Pengembangan Perencanaan, Pelaporan, Evaluasi, Pendataan, Informasi Serta Keuangan Perangkat Daerah	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah			Persentase Capaian Kinerja dan Keuangan 100 %	100%	455.500.000	2.224.845.000	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi, SKPD			Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85% 2 dokumen	2 dokumen	-	290.000.000	
			Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan	Provinsi, SKPD			umlah laporan capaian kinerja dan keuangan	5 laporan	170.850.000	190.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Keuangan				Perangkat Daerah 5 laporan				
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah		Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah; Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan	3 Nilai; 75 %					DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
			Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	SKPD			Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan 60 Orang	60 Orang	2.493.900.000	2.500.156.490	
			Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	SKPD			Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan 60 Orang	60 Orang	1.579.430.000	85.008.089.350	
			Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	SKPD			Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya 10 Orang	10 Orang	64.734.180	107.548.875	
			Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	SKPD			Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target diatas 90% 5 Laporan	5 Laporan	62.013.700	140.980.000	
			Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	SKPD			Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85% 2 Dokumen	2 Dokumen	45.127.240	208.168.538	
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah		Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan; Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah	100 %; 3 Nilai					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	SKPD			Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan 53 orang	53 orang	2.180.786.204	2.382.148.723	
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	SKPD			Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan 53 orang	53 orang	299.778.199	314.767.108	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Peningkatan Disiplin Aparatur	SKPD			Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat disiplinnya 53 orang	53 orang	-	99.886.500		
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	SKPD			Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya 200 orang	200 orang	250.000.000	482.310.675		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	SKPD			Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85% 2 Dokumen	2 Dokumen	250.000.000	52.000.000		
			Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	SKPD			Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target diatas 90% 5 Laporan	5 Laporan	60.000.000	63.000.000		
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah			Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah; Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan pelayanan Kesekretariatan	5 Nilai; 90 %				DINAS PERTANIAN	
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	Provinsi, SKPD				Persentase aparatur perangkat daerah yang terlayani 100 %	100%	5.247.489.000	5.318.230.000	
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	SKPD				Penyediaan sarana dan prasarana pendukung bagi operasional satuan kerja perangkat daerah 100 %	100%	1.146.788.000	1.302.300.000	
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	SKPD				Meningkatnya kemampuan aparatur PNS 100 %	100%	204.365.000	350.000.000	
			Peningkatan disiplin aparatur	SKPD				Persentase peningkatan disiplin aparatur 100 %	100%	-	270.000.000	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Pertanian							325.530.000	387.535.000	
			Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan							388.471.500	472.465.000	
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah			Persentase Pelayanan Dinas Kehutanan	100 %					DINAS KEHUTANAN
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Tengah, Belitung, Belitung				Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan 100 %	100%	1.840.000.000	2.150.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan							
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Provinsi, SKPD, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan			Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan 100 %	100%	1.781.078.187	2.050.000.000	
			Peningkatan Disiplin Aparatur	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat			Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat disiplinnya 158 Orang	158 Orang	-	300.000.000	
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang			Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya 30 Orang	30 Orang	280.000.000	300.000.000	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi, SKPD			Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85% 90 %	90%	80.000.000	125.000.000	
			Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Provinsi, SKPD			Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target diatas 90% 95 %	95%	47.000.000	50.000.000	
			Penyusunan Sistem Database Kehutanan Berbasis IT	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang			Tersedianya sistem informasi pembangunan kehutanan 1 Unit	1 Unit	220.000.000	250.000.000	



No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah		Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah; Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan	4 ; 100 %					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	SKPD, Pangkal Pinang			Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan 100 %	100%	1.650.000.000	4.000.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan Cabang Dinas Wilayah Belitung Timur	Provinsi, Luar Daerah, Belitung Timur			Operasional Cabang Dinas Wilayah Belitung Timur 12 Bulan	12 Bulan	650.000.000	750.000.000	
			Pendataan Aset SKPD	Provinsi, SKPD, Bangka Barat, Bangka, Bangka Selatan, Belitung, Bangka Tengah, Belitung Timur			Pendataan Aset Dinas 1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	200.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan Cabang Dinas Wilayah Bangka	Luar Daerah, Provinsi, Bangka			Operasional Cabang Dinas wilayah Bangka 12 Bulan	12 Bulan	650.000.000	650.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan Cabang Dinas Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan	Luar Daerah, Provinsi, Bangka Selatan, Bangka Tengah			Operasional Fungsi Pelayanan Cabang Dinas Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan 12 Bulan	12 Bulan	600.000.000	650.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan Cabang Dinas Wilayah Bangka Barat	Luar Daerah, Provinsi, Bangka Barat			Operasional Cabang Dinas Wilayah Bangka Barat 12 Bulan	12 Bulan	600.000.000	650.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan Cabang Dinas Wilayah Belitung	Luar Daerah, Provinsi, Belitung Timur, Belitung			Operasional Cabang Dinas Wilayah Belitung 12 Bulan	12 Bulan	650.000.000	750.000.000	
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	SKPD, Pangkal Pinang			Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan 100 %	100%	1.300.000.000	3.200.000.000	
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Provinsi, Pangkal Pinang			Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang mengikt Pelatihan 30 Orang	30 Orang	150.000.000	350.000.000	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi, Pangkal Pinang			Persentase perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah 87 %	87%	120.000.000	250.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Provinsi, Pangkal Pinang			Persentase capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi 95 %	95%	100.000.000	300.000.000	
			Penyebaran data informasi bidang Energi dan sumber daya mineral (ESDM)	Luar Daerah, Provinsi			Jumlah Pameran bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 3 Pameran	3 Pameran	215.000.000	280.000.000	
			DED Pengembangan dan Pembangunan Gedung Kantor	Provinsi			Jumlah DED 2 DED	2 DED	110.000.000	-	
			Monitoring dan Evaluasi Program Kinerja SKPD	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Monitoring dan Evaluasi Kinerja SKPD 1 Laporan	1 Laporan	150.000.000	150.000.000	
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah		Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah; Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan	4 Nilai; 100 %					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan 100 %	100%	2.819.905.960	3.485.901.258	
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Provinsi, SKPD			Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan 100 %	100%	3.000.000.000	3.000.000.000	
			Peningkatan Disiplin Aparatur	SKPD			Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat disiplinnya 100 %	100%	-	235.000.000	
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya 100 %	100%	400.000.000	1.623.695.850	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85% 3 Dokumen	3 Dokumen	668.000.000	459.800.000	
		Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target diatas 90% 4 Dokumen	4 Dokumen	210.000.000	231.000.000		

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah		Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah; Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan pelayanan Kesekretariatan	3 Nilai; 100 %					DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan 132 orang	132 orang	2.200.293.000	2.408.587.650	
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	SKPD			Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan 132 orang	132 orang	581.880.000	591.880.000	
			Peningkatan Disipilin Aparatur	SKPD			Jumlah Pegawai 134 orang	134 orang	-	-	
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Luar Daerah, SKPD			Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya 39 orang	39 orang	148.400.000	152.000.000	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi, SKPD			Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85% 2 dokumen	2 dokumen	173.830.000	237.000.000	
			Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah dengan Realisasi Target diatas 90% 5 Jenis Dokumen	5 Jenis Dokumen	179.850.000	74.363.625	
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah		Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah; Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan	2 nilai; 100 %					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	Provinsi, Luar Daerah, SKPD, Belitung Timur, Belitung, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Bangka Barat, Bangka, Pangkal Pinang			Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan 59 Orang	59 Orang	1.511.996.100	1.889.896.800	
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Provinsi, SKPD			Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana	59 orang	482.630.000	2.448.600.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							prasarana perkantoran selama 12 bulan 59 orang				
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka, Bangka Barat, Pangkal Pinang, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur			Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah diatas 85% 4 Dokumen	4 Dokumen	150.000.000	330.000.000	
			Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Provinsi, SKPD, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang			Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target diatas 90% 5 laporan	5 laporan	115.850.000	149.688.000	
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah		Predikat (Nilai) SAKIP Perangkat Daerah; Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan pelayanan Kesekretariatan	2 Nilai; 85 %					BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	SKPD			Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan 85 %	85%	1.750.000.000	1.780.735.950	
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	SKPD			Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan 100 %	100%	1.148.329.000	1.990.150.000	
			Peningkatan Disiplin Aparatur	SKPD			Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat disiplinnya 100 %	100%	-	115.000.000	
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Luar Daerah, Provinsi			Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya 75 %	75%	150.000.000	300.000.000	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	SKPD, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung			Jumlah Dokumen Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah Dengan Tingkat Konsistensinya Terhadap Perencanaan Jangka Menengah Perangkat Daerah Diatas	3 Dokumen	250.000.000	400.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							85% 3 Dokumen				
			Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	SKPD, Belitung, Pangkal Pinang, Belitung Timur, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah			Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target diatas 90% 4 Dokumen	4 Dokumen	150.000.000	250.000.000	
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah		Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	85 persen					RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	Provinsi			Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan 85 persen	85 persen	12.435.059.000	13.000.000.000	
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Provinsi			Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur 85 persen	85 persen	2.356.895.000	4.734.000.000	
			Peningkatan Disiplin Aparatur	Provinsi			Persentase peningkatan disiplin aparatur pegawai 95 persen	95 persen	-	175.000.000	
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Provinsi			persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 85 persen	85 persen	1.480.445.000	2.300.000.000	
			Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Provinsi			persentase peningkatan pengembangan capaian kinerja dan keuangan 90 persen	90 persen	42.150.000	210.000.000	
			penyusunan dokumen perencanaan	Provinsi, Bangka			dokumen perencanaan 3 dokumen	3 dokumen	22.150.000	30.000.000	
			Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Provinsi, Bangka			jumlah fasilitas kesehatan yang mendapatkan promosi 6 fasilitas kesehatan	6 fasilitas kesehatan	50.000.000	251.710.000	
			Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah		Tingkat Kepuasan Aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	85 persen					RUMAH SAKIT JIWA
			Pelayanan Administrasi Perkantoran	SKPD, Bangka, Sungai Liat			Jumlah aparatur perangkat daerah yang dilayani selama 12 bulan 12 bulan	12 bulan	3.167.880.000	4.999.374.000	
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	SKPD, Bangka, Sungai Liat			Jumlah aparatur perangkat daerah yang memanfaatkan sarana dan	12 bulan	2.052.260.000	3.266.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							prasama perkantoran selama 12 bulan 12 bulan				
			Peningkatan Disiplin Aparatur	SKPD, Bangka, Sungai Liat			Jumlah Aparatur daerah yang meningkatkan disiplinnya 1 tahun	1 tahun	-	280.000.000	
			Peningkatan Kapasitas Aparatur	SKPD, Bangka, Sungai Liat			Persentase peningkatan kapasitas aparatur 85 persen	85 persen	861.600.000	900.000.000	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	SKPD, Bangka, Sungai Liat			Jumlah Dokumen Perencanaan tahunan perangkat daerah dan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah perangkat daerah diatas 85% 2 Dokumen	2 Dokumen	55.000.000	65.000.000	
			Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	SKPD, Bangka, Sungai Liat			Jumlah Laporan Kinerja dan keuangan perangkat daerah dengan realisasi target diatas 90% 5 Laporan	5 Laporan	60.000.000	75.000.000	
			Pendidikan								
	PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN AGROPOLITAN	Meningkatnya produksi sub sektor pertanian, peternakan dan jasa perkebunan	Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Kejuruan-		Persentase SMK Kejuruan yang mendukung pengembangan pekonomi berbasis potensi lokal; Persentase SMK Pertanian Terkareditasi A; Persentase SMK Pertanian dan Peternakan memiliki lembaga Sertifikasi Profesi pihak 1 (LSP-P1) ; Persentase SMK Kelautan dan perikanaan Terkareditasi I A; Persentase SMK Program Keahlian Kelautan dan Perikanan memiliki lembaga Sertifikasi Profesi pihak 1 (LSP-P1) ; Persentase SMK pariwisata Terkareditasi A; Persentase SMK Program Keahlian Pariwisata memiliki lembaga Sertifikasi Profesi pihak 1 (LSP-P1) : Persentase	100 Persen; 100 Persen; 50 %; 100 Persen; 100 Persen; 100 Persen; 33,33 Persen; 100 Persen; 38,38 Persen; 6,5 Poin; 100 Persen; 100 Persen; 0 Persen; 39,27 Persen; 37,44 Persen					DINAS PENDIDIKAN

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					siswa SMK miskin yang mendapatkan beasiswa miskin; APK SMK; Rata-rata nilai UN SMA; Persentase SMK Kejuruan yang mendukung pengembangan pekonomi berbasis potensi lokal; Persentase SMK Program Keahlian Kesehatan Terkreditasi A; Persentase SMK Program Keahlian Kesehatan memiliki lembaga Sertifikasi Profesi pihak 1 (LSP-P1) ; APK SMK Laki-laki; APK SMK Perempuan						
			Peningkatan Sarana/Prasarana dan Pengembangan Klembagaan SMK	Provinsi, SKPD			Terlaksananya Rehabilitasi SMK 20 PaketTerlaksananya Gebyar SMK 1 KaliSekolah yang siap di akreditasi 100 %Terbangunnya RKB SMK 10 RuangTersedianya Meubelair SMK 15 SetTerbangunnya RPS SMK 7 RuangTersedianya Peralatan Praktik Siswa 15 PaketTersedianya Bengkel Produktif SMK 2 UnitTerlaksananya Revitalisasi Prodi SMK 57 Sek	20 Paket1 Kali100 %10 Ruang15 Set7 Ruang15 Paket2 Unit57 Sek	3.000.000.000	20.000.000.000	
			Peningkatan Kualitas Kesiswaan SMK	Provinsi, SKPD			Pelaksanaan Lomba-lomba Siswa SMK 7 Jenis Sekolah melaksanakan pendidikan karakter 57 Sekolah Terlaksananya pembinaan kesiswaan SMK 57 Sekolah	7 Jenis 57 Sekolah 57 Sekolah	4.000.000.000	7.000.000.000	
			Pengembangan Kurikulum SMK	Provinsi, SKPD			Terlaksananya pengembangan kurikulum SMK 57 Sekolah Tersedianya analisis instrumen kurikulum SMK 1 Dok	57 Sekolah 1 Dok 1 Dok 50 Orang 30 Sekolah 57 Sekolah	1.000.000.000	3.200.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Tersedianya Bank Soal Penilaian SMK 1 Dok Tersedianya Asesor 50 Orang SMK memiliki TUK 30 Sekolah SMK melaksanakan UNBK 57 Sekolah				
			Pemberian Beasiswa Siswa SMK	Provinsi, SKPD			Jumlah Siswa Tidak Mampu terbiayai 1.809 Siswa	1.809 Siswa	1.309.000.000	2.214.000.000	
			Pengembangan Sarana Pendidikan SMK (DAK Penugasan)	Provinsi, SKPD			Terbangunnya RKB SMK 20 Ruang Terbangunnya RPS 25 Unit Tersedianya rumah dinas /asrama 4 Unit Tersedianya peralatan Praktik Siswa 10 Paket Terbangunnya WC/KM Siswa 30 Unit	20 Ruang 25 Unit 4 Unit 10 Paket 30 Unit	-	14.000.000.000	
			Peningkatan Sarana/Prasarana Pendidikan Kejuruan						5.267.000.000	-	
	PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT	Menurunnya angka Pengangguran	<b>Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Pangkalpinang dan Bangka</b>		Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pendidikan SMA, SMK, SLB di wilayah Pangkalpinang dan Bangka	79,29 Persen					DINAS PENDIDIKAN
			Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Wilayah Pangkalpinang dan Bangka	Bangka, Pangkal Pinang			Jumlah sekolah terlayani 26 Sekolah	26 Sekolah	13.000.000.000	10.000.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 4 Kota Pangkalpinang	Pangkal Pinang			Jumlah Siswa SMA N 4 Pangkalpinang terlayani 631 Siswa	631 Siswa	884.800.000	1.193.400.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Pangkalpinang	Pangkal Pinang			Jumlah siswa SLB N Pangkalpinang terlayani 260 Siswa	260 Siswa	1.080.000.000	1.785.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Sungailiat, Bangka	Bangka			Jumlah siswa SMKN 1 Sungailiat terlayani 1.082 Siswa	1.082 Siswa	1.648.000.000	2.248.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 2 Sungailiat, Bangka	Bangka			Jumlah siswa SMK N 2 Sungailiat terlayani 691 Siswa	691 Siswa	1.028.800.000	1.446.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK	Bangka			Jumlah siswa SMKN 1 Mendobarat terlayani 321	321 Siswa	406.400.000	770.000.000	



No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Negeri 1 Mendo Barat, Bangk				Siswa				
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Belinyu, Bangka	Bangka			Jumlah siswa SMKN 1 Belinyu terlayani 364 Siswa	364 Siswa	569.600.000	856.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Bakam, Bangka	Bangka			Jumlah siswa SMK N 1 Bakam terlayani 281 Siswa	281 Siswa	536.000.000	690.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Bakam, Kabupaten Bangka	Bangka			Jumlah siswa SMAN 1 Bakam terlayani 281 Siswa	281 Siswa	319.200.000	642.600.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Belinyu, Kabupaten Bangka	Bangka			Jumlah siswa SMAN 1 Belinyu Terlayani 514 Siswa	514 Siswa	698.600.000	925.200.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Mendobarat, Kabupaten Bangka	Bangka			Jumlah siswa SMA N 1 Mendobarat terlayani 520 Siswa	520 Siswa	721.000.000	993.600.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Pangkalpinang	Pangkal Pinang			Jumlah siswa SMK N 1 Pangkalpinang terlayani 797 Siswa	797 Siswa	1.356.800.000	1.704.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Mendobarat, Kabupaten Bangka	Bangka			Jumlah Siswa SMAN 2 Mendobarat terlayani 207 Siswa	207 Siswa	296.800.000	430.200.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Merawang, Kabupaten Bangka	Bangka			Jumlah siswa SMA N 1 Merawang terlayani 448 Siswa	448 Siswa	564.200.000	864.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Pemali, Kabupaten Bangka	Bangka			Jumlah siswa SMA N 1 Pemali terlayani 800 Siswa	800 Siswa	1.107.400.000	1.440.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Puding Besar, Kabupaten Bangka	Bangka			Jumlah siswa SMA N 1 Puding Besar terlayani 521 Siswa	521 Siswa	673.400.000	995.400.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Riau Silip, Kabupaten Bangka	Bangka			Jumlah siswa SMA N 1 Riau Silip terlayani 338 Siswa	338 Siswa	441.000.000	666.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Sungailiat, Kabupaten Bangka	Bangka			Jumlah siswa SMA N 1 Sungailiat terlayani 889 Siswa	889 Siswa	1.253.000.000	1.600.200.000	
		Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA	Bangka			Jumlah siswa SMA N 2 Puding Besar terlayani 160	160 Siswa	250.000.000	403.200.000		

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Negeri 2 Puding Besar, Kabupaten Bangka				Siswa					
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Sungailiat	Bangka			Jumlah Siswa SLB N Sungailiat terlayani 106 Siswa	106 Siswa	500.000.000	812.000.000		
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 2 Pangkalpinang	Pangkal Pinang			Jumlah Siswa Terlayani di SMK N 1 Pangkalpinang 1.500 Siswa	1.500 Siswa	2.452.800.000	3.000.000.000		
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 3 Pangkalpinang	Pangkal Pinang			Jumlah Siswa SMK N 3 Pangkalpinang terlayani 593 Orang	593 Orang	1.108.800.000	1.250.000.000		
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 4 Pangkalpinang	Pangkal Pinang			Jumlah siswa SMK N 4 Pangkalpinang terlayani 518 Orang	518 Orang	872.000.000	1.100.000.000		
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 5 Pangkalpinang	Pangkal Pinang			Jumlah siswa SMK N 5 Pangkalpinang terlayani 372 Siswa	372 Siswa	537.600.000	808.000.000		
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kota Pangkalpinang	Pangkal Pinang			Jumlah siswa SMA N 1 Pangkalpinang terlayani 797 Siswa	797 Siswa	1.226.400.000	1.434.600.000		
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Kota Pangkalpinang	Pangkal Pinang			Jumlah Siswa SMA N 2 Pangkalpinang terlayani 743 Siswa	743 Siswa	4.273.800.000	1.395.000.000		
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 3 Kota Pangkalpinang	Pangkal Pinang			Jumlah Siswa SMA N 3 Pangkalpinang terlayani 827 Siswa	827 Siswa	1.176.000.000	1.546.200.000		
				<b>Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Barat</b>		Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pendidikan SMA, SMK, SLB di wilayah Bangka Barat	79,29 Persen					DINAS PENDIDIKAN
				Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Kabupaten Bangka Barat	Provinsi, Bangka Barat			Jumlah Sekolah terlayani 12 Sekolah	12 Sekolah	6.500.000.000	6.000.000.000	
				Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Parit Tiga, Kabupaten Bangka Barat	Bangka Barat			Jumlah siswa SMA N 1 Parit Tiga terlayani 439 Siswa	439 Siswa	557.200.000	847.800.000	
				Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat	Bangka Barat			Jumlah siswa SMA N 1 Simpang Teritip Terlayani 623 Siswa	623 Siswa	816.200.000	1.179.000.000	
				Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Tempilang, Kabupaten Bangka Barat	Bangka Barat			Jumlah Siswa SMA N 1 Tempilang terlayani 374 Siswa	374 Siswa	509.600.000	730.800.000	
			Peningkatan Fungsi	Bangka Barat			Jumlah siswa SLB N	85 Siswa				

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Pelayanan KBM di SLB Negeri Muntok				Muntok terlayani 85 Siswa		365.000.000	665.000.000		
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Mentok, Bangka Barat	Bangka Barat			Jumlah Siswa SMK N 1 Muntok Terlayani 697 Siswa	697 Siswa	1.121.600.000	1.458.000.000		
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Kelapa, Bangka Barat	Bangka Barat			Jumlah siswa SMK N 1 Kelapa terlayani 586 Siswa	586 Siswa	875.200.000	1.236.000.000		
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Parittiga, Bangka Barat	Bangka Barat			Jumlah siswa SMK N 1 Parit tiga terlayani 639 Siswa	639 Siswa	1.094.400.000	1.342.000.000		
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Tempilang, Bangka Barat	Bangka Barat			Jumlah Siswa SMK N 1 Tempilang terlayani 332 Siswa	332 Siswa	425.600.000	728.000.000		
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Simpang Teritip, Bangka Barat	Bangka Barat			Jumlah Siswa SMK N 1 Simpang Teritip Terlayani 128 Siswa	128 Siswa	300.000.000	384.000.000		
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Jebus, Kabupaten Bangka Barat	Bangka Barat			Jumlah siswa SMA N 1 Jebus terlayani 626 Siswa	626 Siswa	858.200.000	1.184.400.000		
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kelapa, Kabupaten Bangka Barat	Bangka Barat			Jumlah siswa SMA N 1 Kelapa Terlayani 633 Siswa	633 Siswa	873.600.000	1.197.000.000		
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Muntok, Kabupaten Bangka Barat	Bangka Barat			Jumlah siswa SMA N 1 Muntok terlayani 614 Siswa	614 Siswa	893.200.000	1.162.800.000		
			<b>Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan</b>			Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pendidikan SMA, SMK, SLB di wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan	79,29 Persen					DINAS PENDIDIKAN
			Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Wilayah Bangka Tengah dan Bangka Selatan	Bangka Selatan, Bangka Tengah				Jumlah sekolah terlayani 28 Sekolah	28 Sekolah	13.000.000.000	14.300.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Pangkalanbaru, Kabupaten Bangka Tengah	Bangka Tengah				Jumlah siswa SMA N 1 Pangkalan Baru terlayani 499 Siswa	499 Siswa	621.600.000	955.800.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah	Bangka Tengah			Jumlah siswa SMA N 1 Sungaiselan 264 Siswa	264 Siswa	330.400.000	532.800.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Sungaiselan, Kabupaten Bangka Tengah	Bangka Tengah			Jumlah siswa SMA N 2 Sungaiselan terlayani 583 Siswa	583 Siswa	754.600.000	1.107.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri Laskar Pelangi (SKO)	Bangka Tengah			Jumlah Siswa SMA Laskar Pelangi Terlayani 96 Siswa	96 Siswa	672.000.000	1.620.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB N Koba	Bangka Tengah			Jumlah siswa SLB N Koba terlayani 70 Siswa	70 Siswa	365.000.000	560.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Toboali, Bangka Selatan	Bangka Selatan			Jumlah siswa SMK N 1 Toboali terlayani 787 Siswa	787 Siswa	1.123.200.000	1.702.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Payung, Bangka Selatan	Bangka Selatan			Jumlah siswa SMK N 1 Payung terlayani 345 Siswa	345 Siswa	564.800.000	790.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Pulau Besar, Bangka Selatan	Bangka Selatan			Jumlah siswa SMK N 1 Pulau Besar Terlayani 121 Siswa	121 Siswa	300.000.000	306.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Tukak Sadai, Bangka Selatan	Bangka Selatan			Jumlah siswa SMK N 1 Tukak Sadai terlayani 345 Siswa	345 Siswa	504.000.000	754.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Simpangrimba, Bangka Selatan	Bangka Selatan			Jumlah siswa SMK N 1 Simpang Rimba terlayani 126 Siswa	126 Siswa	300.000.000	316.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Koba, Bangka Tengah	Bangka Tengah			Jumlah Siswa SMK N 1 Koba Terlayani 697 Siswa	697 Siswa	804.800.000	1.458.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Airgegas , Bangka Selatan	Bangka Selatan			Jumlah Siswa SMK N 1 Air Gegas terlayani 406 Siswa	406 Siswa	512.000.000	876.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Air Gegas, Kabupaten Bangka Selatan	Bangka Selatan			Jumlah siswa SMA N 1 Air Gegas terlayani 614 Siswa	614 Siswa	802.200.000	1.162.800.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Lepar Pongok,	Bangka Selatan			Jumlah siswa SMA N 1 Lepar Pongok Terlayani 270 Siswa	270 Siswa	329.000.000	543.600.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kabupaten Bangka Selatan								
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Kep. Pongok, Kabupaten Bangka Selatan	Bangka Selatan			Jumlah siswa SMAN 1 Kep. Pongok terlayani 225 Siswa	225 Siswa	271.600.000	462.600.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Payung, Kabupaten Bangka Selatan	Bangka Selatan			Jumlah siswa SMA N 1 Payung terlayani 621 Siswa	621 Siswa	828.800.000	1.175.400.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Pulau Besar, Kabupaten Bangka Selatan	Bangka Selatan			Jumlah siswa SMA N 1 Pulau Besar terlayani 177 Siswa	177 Siswa	250.000.000	376.200.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Simpang Rimba, Kabupaten Bangka Selatan	Bangka Selatan			Jumlah siswa SMA N Simpang Rimba terlayani 428 Siswa	428 Siswa	551.600.000	828.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Toboali, Kabupaten Bangka Selatan	Bangka Selatan			Jumlah siswa SMA N 1 Toboali terlayani 900 Siswa	900 Siswa	1.219.400.000	1.620.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Toboali, Kabupaten Bangka Selatan	Bangka Selatan			Jumlah siswa SMA N 2 Toboali terlayani 510 Siswa	510 Siswa	660.800.000	975.600.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB N Toboali, Kabupaten Bangka Selatan	Bangka Selatan			Jumlah siswa SLB N Toboali terlayani 90 Siswa	90 Siswa	385.000.000	700.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 2 Koba, Bangka Tengah	Bangka Tengah			Jumlah siswa SMK N 2 Koba terlayani 770 Siswa	770 Siswa	1.188.800.000	1.604.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Simpangkatis, Bangka Tengah	Bangka Tengah			Jumlah Siswa SMK N 1 Simpang katis terlayani 792 Siswa	792 Siswa	1.195.200.000	1.648.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Pangkalanbaru, Bangka Tengah	Bangka Tengah			Jumlah siswa SMK N 1 Pangkalan baru terlayani 900 Siswa	900 Siswa	1.340.800.000	1.800.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Sungaiselan, Bangka Tengah	Bangka Tengah			Jumlah Siswa SMK N 1 Sungai Selan Terlayani 255 Siswa	255 Siswa	363.200.000	574.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Koba, Kabupaten	Bangka Tengah			Jumlah siswa SMA N 1 Koba terlayani 694 Siswa	694 Siswa	915.600.000	1.306.800.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Bangka Tengah								
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Lubukbesar, Kabupaten Bangka Tengah	Bangka Tengah			Jumlah siswa SMA N 1 LubukBesar terlayani 454 Siswa	454 Siswa	575.400.000	874.800.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Namang, Kabupaten Bangka Tengah	Bangka Tengah			Jumlah siswa SMA N 1 Namang terlayani 449 siswa	449 siswa	568.400.000	865.800.000	
			<b>Program Pelayanan Pendidikan Wilayah Belitung dan Belitung Timur</b>		Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pendidikan SMA, SMK, SLB di wilayah Belitung dan Belitung Timur	79,29 Persen					DINAS PENDIDIKAN
			Peningkatan Fungsi Pelayanan Pendidikan Kabupaten Belitung	Belitung, Belitung Timur			Jumlah sekolah terlayani 21 Sekolah	21 Sekolah	8.149.940.000	10.500.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 2 Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung	Belitung			Jumlah siswa SMA N 2 Tanjungpandan terlayani 789 Siswa	789 Siswa	1.052.800.000	1.477.800.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung	Belitung			Jumlah siswa SLB N Tanjungpandan terlayani 140 Siswa	140 Siswa	387.000.000	750.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Manggar, Belitung Timur	Belitung Timur			Jumlah siswa SMK N 1 Manggar Terlayani 694 Siswa	694 Siswa	963.200.000	1.516.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Kelapa Kampit, Belitung Timur	Belitung Timur			Jumlah siswa SMK N 1 Kelapa Kampit terlayani 541 Siswa	541 Siswa	779.200.000	1.146.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Dendang, Belitung Timur	Belitung Timur			Jumlah siswa SMK N 1 Dendang terlayani 170 Siswa	170 Siswa	650.000.000	1.414.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Simpang Renggiang, Belitung Timur	Belitung Timur			Jumlah siswa SMK N 1 Simpang Renggiang terlayani 180 Siswa	180 Siswa	300.000.000	424.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Damar, Kabupaten Belitung Timur	Belitung Timur			Jumlah siswa SMA N 1 Damar terlayani 355 Siswa	355 Siswa	449.400.000	696.600.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA	Belitung Timur			Jumlah siswa SMA N 1 Gantung terlayani 657	657 Siswa	865.200.000	1.240.200.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Negeri 1 Gantung, Kabupaten Belitung Timur				Siswa				
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 KelapaKampit, Kabupaten Belitung Timur	Belitung Timur			Jumlah siswa SMA N 1 Kelapa kampit terlayani 466 Siswa	466 Siswa	597.800.000	896.400.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Manggar, Kabupaten Belitung Timur	Belitung Timur			Jumlah siswa SMA N 1 Manggar terlayani 644 Siswa	644 Siswa	921.200.000	1.216.800.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Tanjungpandan, Belitung	Belitung			Jumlah siswa SMK N 1 Tanjungpandan terlayani 1.100 Siswa	1.100 Siswa	1.569.600.000	2.200.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Simpangpesak, Kabupaten Belitung Timur	Belitung Timur			Jumlah siswa SMA N 1 Simpang Pesak terlayani 493 Siswa	493 Siswa	616.000.000	945.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SLB Negeri Manggar, Kabupaten Belitung Timur	Belitung Timur			Jumlah siswa SLB N Manggar terlayani 110 Siswa	110 Siswa	445.000.000	840.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK N 1 Sijuk, Kabupaten Belitung	Belitung			Jumlah Siswa SMK N 1 Sijuk terlayani 64 Siswa	64 Siswa	-	300.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 2 Tanjungpandan, Belitung	Belitung			Jumlah siswa SMK N 2 Tanjungpandan terlayani 802 Siswa	802 Siswa	1.204.800.000	1.668.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 3 Tanjungpandan, Belitung	Belitung			Jumlah siswa SMK N 3 Tanjungpandan terlayani 532 Siswa	532 Siswa	801.600.000	1.128.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Badau, Belitung	Belitung			Jumlah siswa SMK N Badau Terlayani 523 Siswa	523 Siswa	758.400.000	1.110.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMK Negeri 1 Selat Nasik, Belitung	Belitung			Jumlah Siswa SMK N 1 Selat nasik Terlayani 164 Siswa	164 Siswa	300.000.000	392.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Membalong, Kabupaten Belitung	Belitung			Jumlah siswa SMA N 1 Membalong terlayani 496 Siswa	496 Siswa	631.400.000	950.400.000	
		Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Sijuk, Kabupaten Belitung	Belitung			Jumlah siswa SMA N 1 Sijuk terlayani 507 Siswa	507 Siswa	652.400.000	970.200.000		

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan Fungsi Pelayanan KBM di SMA Negeri 1 Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung	Belitung			Jumlah siswa SMA N 1 Tanjungpandan terlayani 723 Siswa	723 Siswa	968.800.000	1.350.000.000	
			<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Menengah Atas-</b>		Persentase Siswa SMA miskin yang mendapatkan beasiswa miskin; APK SMA,; Persentase SMA terakreditasi A; Rata-rata nilai UN SMA; APK SMA Perempuan; APK SMA Laki-Laki	100 Persen; 38,88 Persen; 42,42 Persen; 6,5 point; 42,44 Persen; 35,52 %					DINAS PENDIDIKAN
			Peningkatan Sarana/Prasarana Pendidikan SMA						11.250.000.000	-	
			Peningkatan Sarana/Prasarana dan Pengembangan Kelembagaan SMA	Provinsi, SKPD			Tersedianya Peralatan Lab SMA 7 Paket Tersedianya Meubelair SMA 10 Unit Lab SMA Terbangun 7 Ruang Jumlah RKB SMA Terbangun 10 Ruang Pagar Sekolah terbangun 1 Sek Ruang SMA yang Direhabilitasi 15 Paket Tersedianya Peralatan CBT SMA 12 Paket	7 Paket 10 Unit 7 Ruang 10 Ruang 1 Sek 15 Paket 12 Paket	2.500.000.000	11.500.000.000	
			Peningkatan Kualitas Kesiswaan SMA	Provinsi, SKPD			Terlaksananya Kegiatan Kesiswaan di SMA 67 Sek Terlaksananya Pendidikan Karakter Siswa SMA 201 Siswa Terlaksananya Lomba-lomba siswa SMAi 7 Jenis	67 Sek 201 Siswa 7 Jenis	4.000.000.000	6.000.000.000	
			Pengembangan Kurikulum SMA	Provinsi, SKPD			SMA melaksanakan pendidikan karakter 67 Sekolah SMA melaksanakan UNBK 67 Sekolah Guru SMA mengikuti pelatihan Kurikulum 67 Sekolah	67 Sekolah 67 Sekolah 67 Sekolah	800.000.000	4.000.000.000	
			Pemberian Beasiswa Siswa SMA	Provinsi, SKPD			Jumlah siswa SMA tidak mampu mendapat beasiswa 2.485 Siswa	2.485 Siswa	1.585.000.000	3.040.800.000	



No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengembangan Sarana Pendidikan SMA (DAK Reguler)	Provinsi, SKPD			Terlaksananya rehabilitasi sekolah 20 Paket Terbangunnya WC/KM Siswa 40 Paket Jumlah RKB SMA Terbangun 40 Ruang Tersedianya Sarpras SMA 23 Sekolah Terbangunnya RPS 10 Ruang Tersedianya peralatan Praktik Siswa 25 Paket	20 Paket 40 Paket 40 Ruang 23 Sekolah 10 Ruang 25 Paket	-	18.000.000.000	
			<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Pendidikan Khusus-</b>		APK SLB; Persentase SLB terakreditasi A	26,21 Persen; 100 Persen					DINAS PENDIDIKAN
			Peningkatan sarana/prasarana dan pengembangan kelembagaan pendidikan khusus	Provinsi, SKPD			RKB SLB terbangun 4 Ruang Tersedianya meubelair SLB 18 Paket SLB yang direhabilitasi 2 Paket RPS SLB terbangun 4 Ruang Tersedianya Peralatan praktik siswa 0 Paket	4 Ruang 18 Paket 2 Paket 4 Ruang 0 Paket	1.240.610.000	2.700.000.000	
			Peningkatan kualitas kesiswaan Pendidikan Khusus	Provinsi, SKPD			Terbinanya kegiatan kesiswaan di SLB 9 Sekolah Terlaksananya lomba-lomba siswa dan GTK SLB 4 Jenis	9 Sekolah 4 Jenis	1.055.645.000	1.600.000.000	
			Pengembangan kurikulum pendidikan khusus	Provinsi, SKPD			Jumlah SLB yang menerapkan Kurikulum 2016 dan Kurikulum 2006 9 Sekolah Jumlah SLB melaksanakan pendidikan keluarga 9 Sekolah	9 Sekolah 9 Sekolah	701.095.000	900.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan Pusat Layanan Autis	SKPD			Terlaksananya pelayanan Pusat layanan Autis 12 Bulan	12 Bulan	1.244.473.000	2.500.000.000	
			Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan Khusus (DAK Fisik)	Provinsi, SKPD			Tersedianya RKB SLB 25 Unit Terlaksananya Rehabilitasi SLB 4 Paket Tersedianya Asrama SLB 1 Unit Tersedianya peralatan Praktik Siswa 4 Paket	25 Unit 4 Paket 1 Unit 4 Paket	-	7.000.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Peningkatan dan Pengembangan Kuantitas dan Kualitas Guru Serta Tenaga Kependidikan-		Persentase Guru Berkualifikasi S1/D4, ; Persentase Guru Bersertifikat Pendidik; Persentase guru dengan Nilai Rata-rata Kompetensi Guru minimal 50	97 Persen; 40 Persen; 90 Persen					DINAS PENDIDIKAN
			Peningkatan Mutu PTK SMA	Provinsi, SKPD			Jumlah guru SMA menerima beasiswa S1 dan S2 15 Orang Tersedianya analisis kebutuhan guru SMA 1 Dokumen Jumlah guru dan tenaga kependidikan terlatih 450 Orang	15 Orang 1 Dokumen 450 Orang	1.544.123.000	3.000.000.000	
			Peningkatan Mutu PTK SMK	Provinsi, Bangka, Bangka Barat, Pangkal Pinang, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur			Jumlah guru dan Tenaga Kependidikan terlatih 450 OrangJumlah guru SMK menerima beasiswa S1 dan S2 15 OrangTersedianya analisis kebutuhan guru SMK 1 Dok	450 Orang15 Orang1 Dok	1.342.355.000	3.500.000.000	
			Peningkatan Mutu PTK SLB	Provinsi, SKPD, Bangka Tengah, Belitung, Bangka, Belitung Timur, Bangka Barat, Pangkal Pinang, Bangka Selatan			Jumlah guru dan Tenaga kependidikan SLB terlatih 150 Orang Jumlah terlatihnya guru sekolah inklusi 50 Orang Jumlah Guru SLB menerima beasiswa S1 10 Orang Jumlah analisis Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan SLB 1 Dokumen	150 Orang 50 Orang 10 Orang 1 Dokumen	786.343.000	2.500.000.000	
			Program Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (DAK Non Fisik)		Persentase Sekolah penerima BOS	100 Persen					DINAS PENDIDIKAN
			Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	Pangkal Pinang			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%	-	172.717.650	
			Pengelolaan Dana BOS di SMAN 3 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	Pangkal Pinang			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%	-	750.696.660	
			Pengelolaan Dana BOS di SMAN 4 Pangkalpinang	Pangkal Pinang			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12	100%	-	573.718.950	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			(DAK Non Fisik)				Bulan 100 %					
			Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	Pangkal Pinang			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%		-	1.330.574.175	
			Pengelolaan Dana BOS di SMKN 2 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	Pangkal Pinang			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%		-	2.497.460.175	
			Pengelolaan Dana BOS di SMKN 3 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	Pangkal Pinang			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%		-	1.038.852.675	
			Pengelolaan Dana BOS di SMKN 4 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	Pangkal Pinang			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%		-	763.337.925	
			Pengelolaan Dana BOS di SMKN 5 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	Pangkal Pinang			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%		-	563.994.900	
			Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Bakam (DAK Non Fisik)	Bangka			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%		-	212.956.695	
			Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Belinyu (DAK Non Fisik)	Bangka			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%		-	472.588.830	
			Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Mendo Barat (DAK Non Fisik)	Bangka			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%		-	473.561.235	
			Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Sungailiat (DAK Non Fisik)	Bangka			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%		-	97.240.500	
			Pengelolaan Dana BOS di SMAN 2 Mendo Barat (DAK Non Fisik)	Bangka			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%		-	172.115.685	
			Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Merawang (DAK Non Fisik)	Bangka			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%		-	395.768.835	
			Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Pemali (DAK Non Fisik)	Bangka			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%		-	735.138.180	
			Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Puding Besar (DAK Non Fisik)	Bangka			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%		-	478.423.260	
			Pengelolaan Dana BOS di SMAN 2 Puding Besar (DAK Non Fisik)	Bangka			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%		-	57.371.895	
		Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Riau Silip (DAK Non Fisik)	Bangka			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%		-	246.018.465		
		Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Sungailiat (DAK	Bangka			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12	100%		-	838.213.110		

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Non Fisik)				Bulan 100 %					
			Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Bakam (DAK Non Fisik)	Bangka			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%		-	474.857.775	
			Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Belinyu (DAK Non Fisik)	Bangka			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%		-	491.064.525	
			Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Mendo Barat (DAK Non Fisik)	Bangka			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%		-	416.513.475	
			Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Mentok (DAK Non Fisik)	Bangka Barat			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%		-	97.240.500	
			Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Sungailiat (DAK Non Fisik)	Bangka			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%		-	1.721.156.850	
			Pengelolaan Dana BOS di SMKN 2 Sungailiat (DAK Non Fisik)	Bangka			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%		-	1.079.369.550	
			Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Jebus (DAK Non Fisik)	Bangka Barat			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%		-	579.553.380	
			Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Kelapa (DAK Non Fisik)	Bangka Barat			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%		-	587.332.620	
			Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Muntok (DAK Non Fisik)	Bangka Barat			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%		-	567.884.520	
			Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Parit Tiga (DAK Non Fisik)	Bangka Barat			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%		-	312.142.005	
			Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Simpang Teritip (DAK Non Fisik)	Bangka Barat			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%		-	486.202.500	
			Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Tempilang (DAK Non Fisik)	Bangka Barat			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%		-	338.396.940	
			Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Kelapa (DAK Non Fisik)	Bangka Barat			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%		-	845.992.350	
			Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Muntok (DAK Non Fisik)	Bangka Barat			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%		-	1.077.748.875	
			Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Toboali (DAK Non Fisik)	Bangka Selatan			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%		-	97.240.500	
		Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Parit Tiga (DAK Non Fisik)	Bangka Barat			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%		-	988.611.750		

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Fisik)				Bulan 100 %					
			Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Tempilang (DAK Non Fisik)	Bangka Barat			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%		-	447.306.300	
			Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Koba (DAK Non Fisik)	Bangka Tengah			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%		-	585.387.810	
			Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Lubuk Besar (DAK Non Fisik)	Bangka Tengah			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%		-	357.845.040	
			Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Namang (DAK Non Fisik)	Bangka Tengah			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%		-	397.713.645	
			Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Pangkalan Baru (DAK Non Fisik)	Bangka Tengah			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%		-	385.072.380	
			Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Sungai Selan (DAK Non Fisik)	Bangka Tengah			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%		-	225.597.960	
			Pengelolaan Dana BOS di SMAN 2 Sungai Selan (DAK Non Fisik)	Bangka Tengah			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%		-	509.540.220	
			Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Koba (DAK Non Fisik)	Bangka Tengah			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%		-	638.545.950	
			Pengelolaan Dana BOS di SMKN 2 Koba (DAK Non Fisik)	Bangka Tengah			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%		-	1.272.229.875	
			Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Koba (DAK Non Fisik)	Bangka Tengah			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%		-	97.240.500	
			Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Pangkalan Baru (DAK Non Fisik)	Bangka Tengah			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%		-	1.416.469.950	
			Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Simpang Katis (DAK Non Fisik)	Bangka Tengah			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%		-	1.157.161.950	
			Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Sungai Selan (DAK Non Fisik)	Bangka Tengah			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%		-	322.514.325	
			Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Air Gegas (DAK Non Fisik)	Bangka Selatan			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%		-	448.278.705	
			Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Kep. Pongok (DAK Non Fisik)	Bangka Selatan			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%		-	169.198.470	
		Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Lepar Pongok (DAK	Bangka Selatan			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12	100%		-	211.011.885		

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Non Fisik)				Bulan 100 %					
			Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Payung (DAK Non Fisik)	Bangka Selatan			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%		-	543.574.395	
			Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Pulau Besar (DAK Non Fisik)	Bangka Selatan			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%		-	88.488.855	
			Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Simpang Rimba (DAK Non Fisik)	Bangka Selatan			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%		-	354.927.825	
			Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Toboali (DAK Non Fisik)	Bangka Selatan			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%		-	800.289.315	
			Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Tanjung Pandan (DAK Non Fisik)	Belitung			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%		-	123.865.875	
			Pengelolaan Dana BOS di SMAN 2 Toboali (DAK Non Fisik)	Bangka Selatan			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%		-	443.416.680	
			Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Air Gegas (DAK Non Fisik)	Bangka Selatan			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%		-	598.029.075	
			Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Pulau Besar (DAK Non Fisik)	Bangka Selatan			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%		-	166.929.525	
			Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Payung (DAK Non Fisik)	Bangka Selatan			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%		-	536.443.425	
			Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Simpang Rimba (DAK Non Fisik)	Bangka Selatan			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%		-	93.999.150	
			Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Toboali (DAK Non Fisik)	Bangka Selatan			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%		-	1.124.748.450	
			Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Tukak Sadai (DAK Non Fisik)	Bangka Selatan			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%		-	426.237.525	
			Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Membalong (DAK Non Fisik)	Belitung			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%		-	431.747.820	
			Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Sijuk (DAK Non Fisik)	Belitung			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%		-	442.444.275	
			Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Tanjung Pandan (DAK Non Fisik)	Belitung			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%		-	651.511.350	
		Pengelolaan Dana BOS di SMAN 2 Tanjung Pandan	Belitung			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12	100%		-	681.655.905		

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			(DAK Non Fisik)				Bulan 100 %					
			Pengelolaan Dana BOS di SLB Negeri Manggar (DAK Non Fisik)	Belitung Timur			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%		-	97.240.500	
			Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Badau (DAK Non Fisik)	Belitung			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%		-	742.269.150	
			Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Selat Nasik (DAK Non Fisik)	Belitung			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%		-	213.929.100	
			Pengelolaan Dana BOS di SMKN 2 Tanjung Pandan (DAK Non Fisik)	Belitung			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%		-	1.270.609.200	
			Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Tanjung Pandan (DAK Non Fisik)	Belitung			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%		-	1.740.604.950	
			Pengelolaan Dana BOS di SMKN 3 Tanjung Pandan (DAK Non Fisik)	Belitung			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%		-	810.337.500	
			Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Damar (DAK Non Fisik)	Belitung Timur			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%		-	312.142.005	
			Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Gantung (DAK Non Fisik)	Belitung Timur			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%		-	551.353.635	
			Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Kelapa Kampit (DAK Non Fisik)	Belitung Timur			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%		-	380.210.355	
			Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Manggar (DAK Non Fisik)	Belitung Timur			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%		-	588.305.025	
			Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	Pangkal Pinang			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%		-	774.034.380	
			Pengelolaan Dana BOS di SMAN 1 Simpang Pesak (DAK Non Fisik)	Belitung Timur			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%		-	379.237.950	
			Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Dendang (DAK Non Fisik)	Belitung Timur			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%		-	296.583.525	
			Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Kelapa Kampit (DAK Non Fisik)	Belitung Timur			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%		-	740.648.475	
			Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Manggar (DAK Non Fisik)	Belitung Timur			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%		-	975.646.380	
		Pengelolaan Dana BOS di SMKN 1 Simpang Renggiana	Belitung Timur			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12	100%		-	238.239.225		

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			(DAK Non Fisik)				Bulan 100 %					
			Pengelolaan Dana BOS di SMAN 2 Pangkalpinang (DAK Non Fisik)	Pangkal Pinang			Persentase pengelolaan dana BOS selama 12 Bulan 100 %	100%	-	696.241.980		
		Kesehatan										
			Program Kesehatan Masyarakat		Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita ; Angka kematian ibu per kelahiran hidup; Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup; Persentase kab/kota yang membuat kebijakan yang mendukung PHBS minimal 1 kebijakan baru pertahun; Persentase penduduk yang memiliki kualitas lingkungan sehat; Persentase puskesmas yang menjalankan kesehatan kerja dan kesehatan olah raga	14,3 %; 22 per kelahiran hidup; 7,18 per seribu kelahiran hidup; 80 %; 81,96 %; 65 %					DINAS KESEHATAN	
			Peningkatan kesehatan masyarakat	Provinsi			Persentase Status Kesehatan Masyarakat 72,07 %	72,07 %	1.003.422.000	928.565.108		
			Upaya Peningkatan kesehatan Keluarga	Provinsi			Persentase Status Kesehatan Masyarakat 72,07 %	72,07 %	1.143.426.000	963.997.320		
			Penurunan kematian Ibu	Provinsi			Persentase Status Kesehatan Masyarakat 72,07 %	72,07 %	1.429.148.900	1.572.063.799		
			Penurunan angka kematian bayi	Provinsi			Persentase Status Kesehatan Masyarakat 72,07 %	72,07 %	1.179.280.700	1.297.208.814		
			Peningkatan kesehatan gizi anak dan keluarga	Provinsi			Persentase Status Kesehatan Masyarakat 72,07 %	72,07 %	1.884.962.900	2.073.459.243		
			Peningkatan Penyehatan lingkungan	Provinsi			Persentase Status Kesehatan Masyarakat 72,07 %	72,07 %	1.156.951.200	1.289.266.323		
			peningkatan kesehatan kerja dan olahraga	Provinsi			Persentase Status Kesehatan Masyarakat 72,07 %	72,07 %	273.694.800	315.392.913		



No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Proram Pencegahan dan Pengendalian Penyakit		Persentase kab/kota yang 20% Puskesmasnya menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa; Persentase perempuan usia 30 s.d 50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara; Persentase anggaran pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular lainnya (tekanan darah tinggi, obesitas, Diabetes Melitus); Persentase kabupaten/kota dengan angka keberhasilan pengobatan TB paru BTA positif (succes Rate minimal 85%); Prevalensi HIV pada penduduk beresiko; Jumlah Kabupaten/Kota mencapai eliminasi malaria; Persentase kab/kota yang melaksanakan kewaspadaan dini dan respon; persentase anggaran penanganan penyakit menular lainnya (hepatitis, ispa, diare, kusta, filariasis, DBD, zoonosis)	80 %; 22,5 %; 86 %; 85,7 %; 10 %; 85,71 %; 80 %; 87 %					DINAS KESEHATAN
			pencegahan dan pengendalian penyakit menular TB	Provinsi			Persentase Angka Kesakitan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular 77,6 %	77,6 %	277.249.180	295.908.098	
			Peningkatan pencegahan dan pengendalian HIV	Provinsi			Persentase Angka Kesakitan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular 77,6 %	77,6 %	587.525.000	648.809.018	
			Peningkatan pengendalian penyakit malaria	Provinsi			Persentase Angka Kesakitan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular 77,6 %	77,6 %	142.160.000	226.136.295	
			Penanganan penyakit menular lainnya (hepatitis, ISPA, diare, kusta, filariasis,	Provinsi			Persentase Angka Kesakitan Penyakit Menular dan Penyakit	77,6 %	784.641.000	863.105.100	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			DBD, zoonosis)				Tidak Menular 77,6 %				
			Peningkatan pengendalian dan pencegahan penyakit kanker	Provinsi			Persentase Angka Kesakitan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular 77,6 %	77,6 %	200.000.000	230.860.350	
			Peningkatan pencegahan penyakit tidak menular lainnya (tekanan darah tinggi, obesitas, diabetes militus)	Provinsi			Persentase Angka Kesakitan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular 77,6 %	77,6 %	221.177.600	243.955.360	
			Peningkatan penanganan pelayanan kesehatan jiwa	Provinsi			Persentase Angka Kesakitan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular 77,6 %	77,6 %	739.388.100	813.326.910	
			Peningkatan surveilans, imunisasi dan kesehatan situasi khusus	Provinsi			Persentase Angka Kesakitan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular 77,6 %	77,6 %	2.418.856.220	2.660.741.842	
			<b>Program Pelayanan Kesehatan</b>		Jumlah kecamatan yang memiliki minimal satu Puskesmas yang tersertifikasi akreditasi; Jumlah RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional; Persentase kepesertaan JKN; Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan tradisional	38 kecamatan; 10 RSUD; 65,5 %; 75 %					DINAS KESEHATAN
			Peningkatan pelayanan kesehatan primer	Provinsi			Persentase Standarisasi Pelayanan Kesehatan 77,12 %	77,12 %	1.294.332.740	1.344.130.974	
			Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan	Provinsi			Persentase Standarisasi Pelayanan Kesehatan 77,12 %	77,12 %	1.374.364.780	1.579.981.458	
			Pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat	Provinsi			Persentase Standarisasi Pelayanan Kesehatan 77,12 %	77,12 %	19.263.583.000	21.189.941.395	
			Pengembangan pelayanan kesehatan tradisional	Provinsi			Persentase Standarisasi Pelayanan Kesehatan 77,12 %	77,12 %	402.194.760	442.414.236	
		<b>Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan</b>		Jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya (kumulatif); Persentase Puskesmas dengan ketersediaan obat dan vaksin esensial;	4.028 orang; 94 %; 91 %					DINAS KESEHATAN	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Persentase produk alkes dan PKRT di peredaran yang memenuhi syarat						
			Pengembangan sumberdaya manusia kesehatan / SDMK	Provinsi			Persentase Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Kesehatan 83,39 %	83,39 %	1.772.220.120	1.949.442.132	
			Peningkatan pelayanan kefarmasian	Provinsi			Persentase Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Kesehatan 83,39 %	83,39 %	986.200.700	1.456.350.233	
			Peningkatan ketersediaan alkes dan PKRT	Provinsi			Persentase Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Kesehatan 83,39 %	83,39 %	203.276.700	227.016.570	
			<b>Program Pelayanan Teknis Laboratuim Kesehatan</b>		Jumlah pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan sesuai standar	2.200 sampel					DINAS KESEHATAN
			Peningkatan dan pengembangan pelayanan teknis laboratorium kesehatan	Provinsi			Persentase Standarisasi Pelayanan Kesehatan 77,12 %	77,12 %	1.305.392.370	1.266.696.607	
			<b>Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD RSUP</b>		Pertumbuhan pendapatan BLUD RSUP	90 persen					RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI
			Pelayanan dan Pendukung pelayanan	Provinsi			Persentase tingkat kepuasan pelayanan pasien 85 persen	85 persen	6.000.000.000	10.000.000.000	
			<b>Program Pelayanan Teknis Keperawatan</b>		1. Survey kepuasan pasien terhadap pelayanan publik pelayanan teknis keperawatan RSUP, 2.LOS (Length of Stay), 3. Tingkat kelulusan akreditasi RSUP yang memenuhi standar akreditasi	75 persen					RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI
			Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Provinsi			persentase akreditasi pelayanan RS 50 persen	50 persen	1.639.100.000	3.550.000.000	
			Evaluasi standar pelayanan teknis keperawatan	Provinsi, Bangka			Jumlah dokumen SOP dalam pelayanan pasien 5 dokumen	5 dokumen	40.425.000	72.000.000	
			Peningkatan etika keperawatan	Provinsi, Bangka			bertambahnya tenaga keperawatan yang berkompeten 0	0	91.531.000	100.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Pelayanan Teknis Medis dan Penunjang Medis		1. Survey kepuasan pasien terhadap pelayanan publik ,pelayanan teknis medis dan penunjang medis RSUP, 2. Persentase ketersediaan obat,peralatan dan perbekalan kesehatan, 3. Persentase ketersediaan pelayanan di Rumah Sakit, 4. Rasio korban bencana dengan tenaga kesehatan yang dikirim, 5. Persentase korban bencana yang mendapat pelayanan rujukan	75 persen					RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI
			Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	Provinsi			persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan 100	100	10.137.443.000	12.000.000.000	
			Upaya Kesehatan Masyarakat	Provinsi			persentase masyarakat yang dilayani sesuai standar 85 persen	85 persen	13.000.040.000	15.000.000.000	
			kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Provinsi, Bangka			meningkatnya kemitraan pelayanan kesehatan 2	2	1.419.928.000	1.600.000.000	
			Penyusunan standar kesehatan dan evaluasi standar kesehatan	Provinsi, Bangka			jumlah dokumen SOP Pelayanan rumah sakit 15	15	100.000.000	-	
			Program Peningkatan Sarana Prasarana Rumah Sakit Umum			1. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap sarana dan prasarana pelayanan Rumah Sakit, 2. Persentase sarana dan prasarana yang tersedia di Rumah Sakit	85 persen				RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI
			Pembangunan Pagar Rumah Sakit	Provinsi, Bangka, Merawang			1 Unit Pagar 1 pagar	1 pagar	2.067.800.000	-	
			Pembangunan Masjid	Provinsi, Bangka, Merawang			1 Unit Masjid 1 masjid	1 masjid	2.067.800.000	-	
			Pembangunan Gedung Jenazah Rumah Sakit	Provinsi, Bangka, Merawang			1 Unit Gedung Jenazah Rumah Sakit 1 gedung	1 gedung	2.278.800.000	-	
			Pembangunan Gedung Laundry Rumah Sakit	Provinsi, Bangka, Merawang			1 Unit Gedung Dapur 1 gedung	1 gedung	2.278.800.000	-	
			Perencanaan Gedung C	Provinsi, Bangka, Merawang			1 dokumen perencanaan gedung C 90 persen	90 persen	900.000.000	-	
			Pembangunan Gedung Dapur Rumah Sakit	Provinsi, Bangka, Merawang			1 Unit Gedung Dapur Rumah Sakit 1 Gedung	1 Gedung	2.581.410.000	-	
			Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Provinsi			persentase promosi pelayanan kesehatan 100	100 persen	-	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
							persen					
			Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Provinsi			persentase sarana dan prasarana yang tersedia di RS 85 persen	85 persen	8.700.000.000	1.500.000.000		
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Provinsi			persentase sarana dan prasarana RS yang dipelihara 85	85	9.000.000.000	10.000.000.000		
			Pembangunan Gedung B				persentase sarana dan prasarana yang tersedia di RS 0 persen	0 persen	9.500.000.000	-		
			Pembangunan IPAL				persentase sarana dan prasarana yang tersedia di RS 0 persen	0 persen	1.500.000.000	-		
			Pembangunan instalasi air sumur bor						900.000.000	-		
			Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD RSJ			Pertumbuhan Pendapatan BLUD RSJ	80 persen					RUMAH SAKIT JIWA
			Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD	SKPD, Bangka, Sungai Liat				Pelayanan dan Pendukung Pelayanan yang diberikan 1 Tahun	1 Tahun	10.000.000.000	8.000.000.000	
			Program Pelayanan Teknis Medis Kejiwaan dan Napza			Persentase penduduk yang mengalami gangguan jiwa dan mendapatkan pelayanan kesehatan; Persentase Penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan pelayanan medis rehabilitasi; Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap pelayanan publik pelayanan teknis medik kejiwaan; Tingkat Kelulusan Akreditasi RS Jiwa yang memenuhi standar akreditasi; Persentase masyarakat yang direhabilitasi sosial yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa; Persentase korban pasca bencana yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa	90 Persen; 42 Hari; 85 Persen; 85 Persen; 85 persen; 80 Persen					RUMAH SAKIT JIWA
			Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pasien Rumah Sakit	SKPD, Bangka, Sungai Liat				Jumlah tenaga kesehatan non PNS 133 orang	133 orang	5.200.950.000	5.400.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyusunan Clinical Pathway dan Discharge Planning ODGJ	SKPD, Bangka, Sungai Liat			Jumlah Diagnosa Medis dan Kunjungan Ke ODGJ 7 kab/Kota 350 orang	350 orang	339.375.000	672.000.000	
			Penjangkauan Bebas Pasung	SKPD, Bangka, Sungai Liat			Jumlah ODGJ yang terjangkau 65 orang	65 orang	370.000.000	400.000.000	
			Survey Kepuasan Masyarakat	SKPD, Bangka, Sungai Liat			Tingkat Kepuasan Masyarakat 82 Persen	82 Persen	55.500.000	61.000.000	
			Promosi Kesehatan Jiwa	SKPD, Bangka, Sungai Liat			Jumlah Penyuluhan 80 Kali	80 Kali	280.000.000	300.000.000	
			<b>Program Pelayanan Teknis Keperawatan Jiwa dan Napza</b>		Persentasi penyalahgunaan napza yang mendapatkan pelayanan keperawatan rehabilitasi; Rata-rata lama rawat/ Average Length Of Stay (ALOS); Persentase ketersediaan pelayanan sesuai standar; Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pelayanan, Pelayanan Tekhnis Keperawatan Kejiwaan; Persentase Kabupaten/Kota yang terintegrasi pelayanan kesehatan jiwa	60 persen; 95 Persen; 80 persen; 100 Persen; 100 Persen					RUMAH SAKIT JIWA
			Penilaian Akreditasi	SKPD, Bangka, Sungai Liat			Jumlah Dokumen Akreditasi 1 Dokumen	1 Dokumen	436.000.000	536.000.000	
			Pelayanan Rehabilitasi Psikososial	SKPD, Bangka, Sungai Liat			Jumlah Pelayanan rehabilitasi Mental sosial, Napza dan tumbuh kembang anak dan remaja yang terlaksana 5.500 kunjungan	5.500 kunjungan	555.275.000	980.000.000	
			Jambore Nasional Kesehatan Jiwa	SKPD, Bangka, Sungai Liat			Jumlah Rehabilitan dan Pendamping yang diikuti sertakan 1.000 orang	1.000 orang	2.627.500.000	-	
			Penyediaan Pelayanan Kesehatan Jiwa Mobilitas Berbasis Kepulauan dan homevisite	SKPD, Bangka, Sungai Liat			Jumlah Puskesmas yang dikunjungi 40 Puskesmas	40 Puskesmas	295.425.000	680.000.000	
			Penyusunan Asuhan Keperawatan Anak dan Remaja serta Psikogeriatrik	SKPD, Bangka, Sungai Liat			Jumlah Buku Askep 2 buku	2 buku	61.850.000	-	
		Audit Mutu Pelayanan Keperawatan dan MPKP	SKPD, Bangka, Sungai Liat			Jumlah Laporan 4 Laporan	4 Laporan	98.675.000	-		

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Jiwa		Persentase sarana dan prasarana yang tersedia di RSJ; Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap sarana dan prasarana pelayanan Kejiwaan dan NAPZA; Persentase Obat dan Perbekalan Kesehatan	95 Persen; 75 persen; 95 Persen					RUMAH SAKIT Jiwa
			Pengadaan Obat-Obatan dan Perbekalan Rumah Sakit	SKPD, Bangka, Sungai Liat			Jumlah jenis obat yang dibeli 55 jenis	55 jenis	-	2.500.000.000	
			Pengadaan Pakaian Pasien dan Linen	SKPD, Bangka, Sungai Liat			Jumlah pakaian dan linen pasien yang dibeli 1 tahun	1 tahun	137.160.000	350.000.000	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Rawat Inap Rumah Sakit (VVIP,VIP,Kelas I,II dan III)	SKPD, Bangka, Sungai Liat			Jumlah ruang rawat inap yang terawat 1 tahun	1 tahun	200.575.000	360.000.000	
			Pengembangan SIMRS	SKPD, Bangka, Sungai Liat			Jumlah SIM RS yang dikembangkan 1 paket	1 paket	188.880.000	200.000.000	
			Rehabilitasi Gedung Rehabilitasi Psikososial	SKPD, Bangka, Sungai Liat			Jumlah gedung Rehabilitasi Psikososial yang direhab 1 paket	1 paket	-	160.000.000	
			Peningkatan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Promosi Kesehatan	SKPD, Bangka, Sungai Liat			Jumlah Promosi Pelayanan Kesehatan Jiwa 4 promosi	4 promosi	120.000.000	144.000.000	
			Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit	SKPD, Bangka, Sungai Liat			Jumlah gedung rumah sakit yang terawat 1 tahun	1 tahun	941.000.000	950.000.000	
			Pemusnahan Obat dan Perbekalan Kesehatan Rumah Sakit	SKPD, Bangka, Sungai Liat			Jumlah Obat dan perbekalan rumah sakit yang dimusnahkan 100 Persen	100 Persen	18.700.000	19.000.000	
			Pembangunan Gedung Rawat Inap	SKPD, Bangka, Sungai Liat			Jumlah Gedung Rawat Inap Yang dibangun 1 paket	1 paket	-	-	
			Pembangunan Rumah Dinas	Provinsi, Bangka, Sungai Liat			jumlah rumah dinas yang dibangun 1 paket	1 paket	-	1.000.000.000	
			Pengadaan Alkes Rawat Jalan (DAK)	SKPD, Bangka, Sungai Liat			Jumlah alkes rawat jalan yang dibeli 1 paket	1 paket	-	1.000.000.000	
			Pengadaan Kendaraan Roda 4 Operasional	SKPD, Bangka, Sungai Liat			Jumlah kendaraan operasional yang dibeli 1 unit	1 unit	500.000.000	-	
			Pembangunan Gedung Rawat Jalan	Provinsi, Bangka, Sungai Liat			Jumlah Gedung rawat Jalan Yang dibangun 1 paket	1 paket	6.000.000.000	-	
			Pengadaan Ambulance	SKPD, Bangka, Sungai Liat			Jumlah mobil ambulance yang dibeli 1	1	700.000.000	-	
			Pengadaan Alkes Rawat Inap (DAK)	SKPD, Bangka, Sungai Liat			Jumlah alkes rawat inap yang dibeli 1 paket	1 paket	-	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengadaan Kendaraan Operasional Kesehatan Jiwa	SKPD, Bangka, Sungai Liat			Jumlah Kendaraan Operasional yang dibeli 1 unit	1 unit	800.000.000	-	
			Pembangunan Gedung CSSD	SKPD, Bangka, Sungai Liat			jumlah gedung cssd yang dibangun 1 paket	1 paket	-	-	
			Pelayanan dan pendukung pelayanan	SKPD, Bangka, Sungai Liat			Jumlah Pelayanan yang terealisasi 12 bulan	12 bulan	-	8.000.000.000	
			Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit	SKPD, Bangka, Sungai Liat			Jumlah perbekalan kesehatan dan alat-alat kesehatan yang dibeli 1 paket	1 paket	1.000.000.000	1.200.000.000	
			Penyusunan Formularium	SKPD, Bangka, Sungai Liat			1 Dokumen Formularium Rumah Sakit 100 Persen	100 Persen	32.050.000	-	
			Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (dapur,ruang pasien,laundry,ruang tunggu dll)	SKPD, Bangka, Sungai Liat			Jumlah Perlengkapan rumah tangga rumah sakit yang dibeli 1 paket	1 paket	200.425.000	250.000.000	
			Pengujian dn Kalibrasi Alat Kesehatan	SKPD, Bangka, Sungai Liat			Terpeliharanya sarana dan prasarana rumah sakit 1 Tahun	1 Tahun	100.000.000	100.000.000	
			Pemeliharaan Rutin/Berkala alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit	SKPD, Bangka, Sungai Liat			Terpeliharanya alat kesehatan rumah sakit 1 Tahun	1 Tahun	90.000.000	100.000.000	
			Pemeliharaan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit	SKPD, Bangka, Sungai Liat			Jumlah instalasi pengolahan limbah rumah sakit 1 tahun	1 tahun	100.000.000	100.000.000	
			Rehabilitasi Dapur Gizi	SKPD, Bangka, Sungai Liat			Jumlah gedung dapur gizi yang direhabilitasi 1 paket	1 paket	-	-	
			Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang								
	PENGEMBANGAN ENERGI DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN	Pembangunan infrastruktur dan konektivitas mendukung pengembangan potensi daerah	Program Pengembangan Sumber Daya Air		Luas Wilayah Cakupan Sumber Air Baku (ha) dan Panjang Talud Sumber Air Baku (M); Panjang Penahan Abrasi pantai ; Panjang Pengerukan dan Pengendalian ; Luas Jaringan Irigasi /Optimalisasi Irigasi	3 hektar; 200 meter; 2.500 meter; 60 hektar					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			Pembangunan turap / talud / bronjong	Bangka, Belitung Timur			panjang talud penahan tanah yang terbangun 1.000 Meter	1.000 Meter	3.497.845.000	30.973.750.000	
			Konservasi sumber air	Bangka Selatan			luas area yang tertata 1 ha	1 ha	1.076.165.000	-	
			Perencanaan turap / talud / bronjong	Bangka Barat			jumlah dokumen perencanaan pengamanan pantai 1 Dokumen	1 Dokumen	350.645.000	1.400.000.000	
			Peningkatan, pembersihan	Belitung, Belitung			Panjang saluran / sungai	4.600 meter			



No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			dan pengerukan sungai/kali	Timur, Bangka			4.600 meter		5.033.060.000	17.303.574.479	
			Pembersihan /rehabilitasi/normalisasi/sungai/kali	Provinsi			Panjang Saluran/sungai 5.500 meter	5.500 meter	2.985.458.000	776.073.787	
			Perencanaan pembangunan jaringan irigasi dan rawa	Bangka Barat			Jumlah Dokumen perencanaan pembangunan jaringan irigasi 1 Dokumen	1 Dokumen	300.645.000	-	
			Peningkatan Capaian Kinerja Realisasi Bidang Sumber Daya Air	Provinsi, Luar Daerah			jumlah laporan capaian kinerja realisasi bidang sumber daya air 1 Laporan	1 Laporan	52.750.000	62.750.000	
			Pemberdayaan Petani Pemakai Air	Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan			jumlah gapoktan yang terbedayakan 4 Kelompok Gapoktan	4 Kelompok Gapoktan	532.851.816	586.139.907	
			<b>Program Penataan Ruang dan Pertanahan</b>		Identifikasi Permasalahan dan Pengkajian Ilmiah sesuai peraturan Penataan Ruang dan Pertanahan Secara Komprehensif; Luas Lahan Berserikat dan Persentase Kepemilikan Lahan Untuk Kepentingan Umum ; Ketaatan terhadap RTRW Prov. Kep. Babel; Persentase tersedianya Informasi mengenai RTR melalui Peta Digital dan Peta Analog	45 persen; 38 persen; 80 persen; 85 persen					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			Survey pelanggaran Pemanfaatan Ruang dalam RTRW Prov.Kep.Bangka Belitung	Provinsi			tersedianya papan informasi pelanggaran tata ruang 350 unit	350 unit	330.000.000	363.000.000	
			Penyusunan RDTR/RRTR Kawasan Strategis Provinsi sesuai RTRW Provinsi Kep.Babel	Provinsi			Jumlah dokumen RDTR/RRTR Kawasan Strategis Provinsi 2 Dokumen	2 Dokumen	1.637.650.000	1.804.264.859	
			Pendataan Sertifikasi Kepemilikan Aset Provinsi	Provinsi			Jumlah dokumen data sertifikasi kepemilikan lahan untuk kepentingan umum 1 Dokumen	1 Dokumen	350.000.000	160.000.000	
			Koordinasi Penyelenggaraan Tata Ruang	Provinsi			Jumlah Advice Planning dihasilkan 1 Dokumen	1 Dokumen	440.000.000	484.000.000	
		Kajian Peninjauan Kembali Perda RTRW Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi			Jumlah dokumen regulasi Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) 2 Dokumen	2 Dokumen	500.000.000	1.775.152.360		

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penataan Penguasaan , Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Provinsi			luas lahan yang dibebaskan 0 Km	0 Km	-	-	
			<b>Program Pembinaan Jasa Konstruksi</b>		Tingkat Pengendalian Pelaksanaan Konstruksi	20 persen					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah provinsi	Provinsi			Jumlah data dan informasi Jasa Konstruksi 1 Laporan	1 Laporan	940.533.520	1.034.586.872	
			Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Provinsi			jumlah ahli manajemen mutu; jumlah ahli asesor; jumlah tenaga ahli konstruksi ;jumlah ahli k4 jumlah kelembagaan yang dibina 150 Orang 3 lembaga	150 Orang 3 lembaga	1.189.173.120	1.308.090.432	
		Meningkatnya konektivitas antar wilayah	<b>Program Kebinamargaan</b>		Panjang Jalan dan Jembatan Provinsi dalam Kondisi mantap	92,7 persen					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			Pengadaan Alat-alat Laboratorium	SKPD			tersedianya alat-alat ukur dan bahan laboratorium kebinamargaan 2 unit	2 unit	112.060.000	200.000.000	
			Pemeliharaan Rutin Jembatan	Provinsi			Panjang jembatan dalam kondisi baik (unit) 3.119,37 meter	3.119,37 meter	1.479.112.800	5.552.219.400	
			Rehabilitasi/Pemeliharaan alat-alat ukur dan bahan labolatorium kebinamargaan	Provinsi			Jumlah alat-alat ukur dan bahan labolatorium kebinamargaan yang terpelihara 1 paket	1 paket	120.000.000	139.089.500	
			Pengadaan Jembatan Bailey	Provinsi			Jumlah Jembatan Bailey yang tersedia (Unit) 2 Unit	2 Unit	-	-	
			Leger Jembatan	Provinsi			-Tersedianya Dokumen Leger Jembatan 1 dokumen	1 dokumen	-	550.000.000	
			Leger Jalan	Provinsi			Tersedianya Dokumen Leger Jalan (Dokumen ) (Dokumen ) 1 1 Dokumen	1 Dokumen	648.595.000	1.100.000.000	
			Inspeksi Kondisi Jembatan	Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang			Jumlah dokumen pelaksanaan inspeksi kondisi jembatan 1 dokumen	1 dokumen	200.000.000	257.752.465	
			Pengadaan Alat-alat Berat	SKPD			Tersedianya alat-alat laboratorium kebinamargaan (Unit) 3 Unit	3 Unit	-	-	
			Pemeliharaan Alat-alat Laboratorium	SKPD					-	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pemeliharaan Rutin Jalan	Provinsi			Panjang jalan yang terpelihara (km) 825,19 Km	825,19 Km	28.798.430.000	65.935.740.000	
			Pemeliharaan Berkala Jalan	Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur			Panjang jalan yang terpelihara dalam kondisi mantap (Km) 7,4 KM	7,4 KM	18.328.320.000	317.816.000.000	
			Perencanaan Pembangunan Jalan	Provinsi, Bangka, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang			Jumlah Dokumen Perencanaan Jalan 4 Dokumen	4 Dokumen	2.264.480.000	2.690.000.000	
			Rehabilitasi/Pemeliharaan Operasional Jembatan Baturusa II	Pangkal Pinang			Panjang Jembatan Bturus II yang terpelihara 784,5 meter	784,5 meter	1.663.450.000	2.515.348.000	
			Inspeksi Kondisi Jalan	Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat			Jumlah dokumen pelaksanaan inspeksi kondisi jalan 1 dokumen	1 dokumen	200.000.000	257.751.780	
			Pembangunan Jalan	Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat			Panjang Jalan yang terbangun 18,4 km	18,4 km	80.110.090.000	124.800.000.000	
			Peningkatan Capaian Kinerja Realisasi Bidang Bina Marga	Provinsi, Luar Daerah			Jumlah Laporan Capaian Realisasi Bidang Bina Marga 1 Laporan	1 Laporan	1.497.690.000	1.597.690.000	
			Perencanaan Jembatan	Luar Daerah, Provinsi, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka			Jumlah dokumen perencanaan jembatan 1 Dokumen	1 Dokumen	1.194.530.000	2.176.391.100	
			Pembangunan Jembatan	Provinsi, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka			Jumlah jembatan yang ditingkatkan / dibangun dalam kondisi baik (unit/km) 10 unit	10 unit	10.244.382.200	9.257.500.000	
		Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan	Bangka Barat, Bangka Selatan,			Panjang jalan yang terpelihara 869,13 km	869,13 km	-	-		

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka							
			Pembangunan Jalan (DAK)				memperlancar Arus lalu lintas 1.058 KM	1.058 KM	-	82.075.000.000	
			Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jembatan	Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung			Panjang Jembatan yang terpelihara 3.050,67 meter	3.050,67 meter	-	-	
		Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur Masyarakat	Program Pengawasan dan Peralatan PUPR		Tingkat Pendapatan Peralatan Workshop untuk Daerah	80 persen					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			Pertumbuhan pendapatan asli daerah dari alat-alat berat PUPR	Provinsi			Retribusi Alat-alat Berat untuk meningkatkan pendapatan asli daerah 0 unit Retribusi Alat-alat laboratorium untuk meningkatkan pendapatan asli daerah 0	0 unit 0	-	291.135.150	
			Pengadaan alat-alat UPR				Retribusi Alat-alat laboratorium untuk meningkatkan pendapatan asli daerah 0 unit	0 unit	-	-	
			Pertumbuhan pendapatan asli daerah dari alat-alat laboratorium PUPR				Retribusi Alat-alat laboratorium untuk meningkatkan pendapatan asli daerah 0 unit	0 unit	-	190.016.800	
			Peningkatan Fungsi UPTD Pengawasan dan Peralatan	Belitung			Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani 30 Orang	30 Orang	1.127.243.000	1.983.750.000	
			Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat	Provinsi			Alat berat yang dipelihara 1 Paket	1 Paket	317.757.000	349.532.700	
			Monitoring dan evaluasi peralatan workshop	Provinsi			Jumlah Laporan Monitoring dan evaluasi Peralatan Workshopas PUPR 1 Laporan	1 Laporan	55.000.000	60.500.000	
		Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman									

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Program Keciptakarya dan Permukiman		Persentase bangunan yang tertata; Persentase lingkungan yang tertata; Persentase berkurangnya luasan kawasan kumuh; Persentase rumah tangga berakses air minum layak ; Persentase rumah tinggal berakses sanitasi layak; Persentase jalan permukiman dalam kondisi baik di Pengembangan kawasan TPA Regional; Persentase drainase dalam kondisi baik/aliran air tidak tersumbat di Pengembangan kawasan TPA Regional	4 persen; 5 persen; 0,01 Persen; 68,52 Persen; 83,59 Persen; 4 Persen; 4 Persen					DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
			Pembangunan / Peningkatan Drainase di Kawasan Kumuh	Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka, Belinyu, Muntok, Simpang Rimba			Panjang drainase yang terbangun di Kawasan Kumuh 6.520 Meter	6.520 Meter	-	4.761.400.000		
			Pembangunan / Peningkatan Sarana Persampahan di Kawasan Kumuh	Bangka Selatan, Simpang Rimba			Terbangunnya sarana persampahan di kawasan kumuh provinsi 1 Unit	1 Unit	350.000.000	640.000.000		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Kawasan Permukiman	Provinsi			Dokumen Perencanaan Kawasan Permukiman yang tersusun 1 Dokumen	1 Dokumen	175.290.000	300.000.000		
			Bimbingan Teknis Pengelola Bangunan Gedung Negara	Provinsi			Jumlah peserta bimbingan teknis pengelola bangunan gedung negara 20 peserta	20 peserta	-	150.000.000		
			Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman di Kawasan Kumuh	Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Tempilang, Toboali, Belinyu, Koba, Muntok, Simpang Rimba, Sungai Liat			Panjang jalan lingkungan permukiman yang terbangun di kawasan kumuh 3.781 Meter	3.781 Meter	1.363.500.000	2.727.000.000		
			Peningkatan / Perluasan Jaringan Distribusi Air Minum dan Sambungan Rumah	Bangka Barat, Muntok			Jaringan distribusi air minum yang terpasang 150 SR	150 SR	1.090.000.000	800.000.000		
			Program Pembangunan Perumahan Rakyat			Persentase Rumah Layak Huni; Persentase Rumah akibat bencana; Persentase relokasi kawasan hilir daerah rawan bencana teluk	22,51 persen; 100 Pesen; 0 Persen					DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
					bayur							
			Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang			Jumlah RTLH yang direnovasi 72 Unit	72 Unit	-	24.897.000.000		
			Rapat Koordinasi Bidang Perumahan	Provinsi			Jumlah Peserta rapat bidang perumahan 50 Orang	50 Orang	145.500.000	198.375.000		
			Sosialisasi dan Pembiayaan Perumahan Kabupaten / Kota	Provinsi			Jumlah Peserta yang tersosialisasi pembiayaan perumahan 50 Orang	50 Orang	-	198.375.000		
			Survey dan Pendataan Rumah Tidak Layak Huni	Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat			Jumlah laporan survey dan pendataan rumah tidak layak huni yang tersusun 1 Laporan	1 Laporan	150.000.000	150.000.000		
			Survey Pembiayaan Micro Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Tidak Tetap	Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang			Jumlah Laporan Pembiayaan Mikro Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Tidak Tetap yang tersusun 1 Laporan	1 Laporan	133.486.250	153.509.188		
			Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Satu Juta Rumah	Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan			Jumlah MBR yang termonitor dan terevaluasi 1 laporan	1 laporan	100.000.000	100.000.000		
			Rekontruksi dan Rehabilitasi Rumah Pasca Bencana	Belitung Timur			Jumlah Rumah yang di rekonstruksi dan di rehabilitasi akibat bencana 75 Unit	75 Unit	4.977.000.000	-		
		Sosialisasi Rekontruksi dan Rehabilitasi Rumah Pasca Bencana	Belitung Timur			Jumlah Kepala Keluarga yang tersosialisasi 79 KK	79 KK	100.000.000	-			
			Perencanaan									
	PEMBANGUNAAN DEMOKRASI	Peningkatan Pembangunan Demokrasi	Program Perencanaan, Evaluasi Dan Informasi Pembangunan Daerah		Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun sesuai dengan kaidah peraturan yang berlaku; Persentase rumusan hasil	85 Persen; 70 Persen; 85 Persen					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditindaklanjuti; Persentase pemutakhiran data dan informasi dalam SIPD						
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan yang tersusun 2 Dokumen	2 Dokumen	1.500.000.000	1.235.000.000	
			Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang terkelola 2 Aplikasi	2 Aplikasi	75.000.000	250.000.000	
			Penyusunan Rumusan Kebijakan Percepatan Pembangunan Daerah	Provinsi			Jumlah laporan/rekomendasi bahan rumusan kebijakan percepatan pembangunan daerah 6 laporan/rekomendasi	6 laporan/rekomendasi	804.500.000	1.304.050.000	
			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Pembangunan Daerah	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi yang disusun 16 Laporan	16 Laporan	298.950.000	1.125.000.000	
			Pengembangan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah Elemen Data Perencanaan Pembangunan yang Terisi dan Terbarukan 500 Elemen Data	500 Elemen Data	325.000.000	525.000.000	
			Pengembangan Sistem Informasi Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah Instrumen Pengendalian dan Evaluasi Dalam Sistem 2 Instrumen	2 Instrumen	250.000.000	175.000.000	
			Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah	Provinsi, Luar Daerah			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sinkronisasi 3 Laporan	3 Laporan	300.000.000	450.000.000	
			Program Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan		Persentase rumusan hasil pengendalian dan evaluasi pada dokumen perencanaan PD mitra kerja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang ditindaklanjuti ; Persentase Renstra PD mitra kerja Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang baik (memiliki rencana kinerja	65 Persentase; 85 Persentase					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					yang baik, tepat, dan jelas sasaran dan tujuannya dengan indikator yang tepat)						
			Perencanaan Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah Rekomendasi/Laporan hasil Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi urusan PU dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta pada penunjang urusan Perencanaan yang ditindaklanjuti. 4 Rekomendasi/Laporan	4 Rekomendasi/Laporan	111.750.000	440.000.000	
			Perencanaan Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah Rekomendasi/laporan hasil koordinasi Perencanaan dan Evaluasi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi, Perhubungan, Komunikasi dan Informasi, Statistik serta Persandian yang ditindaklanjuti. 4 Rekomendasi/Laporan	4 Rekomendasi/Laporan	93.750.000	525.000.000	
			Pengendalian dan Evaluasi Sub Bidang Infratraktur dan Pengembangan Wilayah I	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah Dokumen pendukung perencanaan pembangunan urusan PU dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta pada penunjang urusan Perencanaan 1 Dokumen	1 Dokumen	82.568.000	325.000.000	
			Pengendalian dan Evaluasi Sub Bidang Infratraktur dan Pengembangan Wilayah II	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah dokumen pendukung perencanaan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi, Perhubungan, Komunikasi dan Informasi, Statistik serta Persandian 1 Dokumen	1 Dokumen	87.500.000	350.000.000	



No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyusunan Study Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Provinsi			Jumlah dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000	300.000.000	
			Program Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam		Persentase Renstra PD mitra kerja Bidang Perekonomian dan SDA yang baik (memiliki rencana kinerja yang baik, tepat, dan jelas sasaran dan tujuannya dengan indikator yang tepat) ; Persentase rumusan hasil pengendalian dan evaluasi pada dokumen perencanaan PD mitra kerja Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang ditindaklanjuti	85 Persentase; 65 Persentase					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
			Perencanaan Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam I	Provinsi, Luar Daerah, SKPD			Jumlah Rekomendasi/Laporan hasil Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, UKM, Penanaman Modal, Kebudayaan, Tenaga Kerja dan Pariwisata serta pada penunjang urusan Keuangan yang ditindaklanjuti 4 Rekomendasi/Laporan	4 Rekomendasi/Laporan	187.500.000	315.000.000	
			Perencanaan Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam II	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah Rekomendasi/Laporan hasil Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi urusan Lingkungan Hidup, Kehutanan, ESDM, Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan yang ditindaklanjuti 4 Rekomendasi/Laporan	4 Rekomendasi/Laporan	187.500.000	415.000.000	
			Penyusunan Study Perencanaan Bidang Ekonomi dan SDA	Provinsi, SKPD			Jumlah dokumen Perencanaan Bidang Ekonomi dan SDA 1 DokumenJumlah Dokumen Study Pemetaan Jaringan	1 Dokumen0 Dokumen	350.000.000	350.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Irigasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 0 Dokumen				
			Pengendalian dan Evaluasi Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam I	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah dokumen pendukung perencanaan pembangunan urusan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, UKM, Penanaman Modal, Kebudayaan, Tenaga Kerja dan Pariwisata serta pada penunjang urusan Keuangan 1 Dokumen	1 Dokumen	105.000.000	425.000.000	
			Pengendalian dan Evaluasi Sub Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam II	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah dokumen pendukung perencanaan pembangunan urusan Lingkungan Hidup, Kehutanan, ESDM, Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan 1 dokumen	1 dokumen	105.000.000	350.000.000	
			<b>Program Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan</b>		Persentase Renstra PD mitra kerja Bidang Perekonomian dan SDA yang baik (memiliki rencana kinerja yang baik, tepat, dan jelas sasaran dan tujuannya dengan indikator yang tepat) ; Persentase rumusan hasil pengendalian dan evaluasi pada dokumen perencanaan PD mitra Bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan ditindaklanjuti	85 Persentase; 65 Persentase					BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH
			Perencanaan Sub Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan I	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah Rekomendasi/Laporan hasil Koordinasi Perencanaan dan Evaluasi urusan Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Pemuda, Olahraga, Kearsipan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Adminduk Capil, Pemberdayaan	4 Rekomendasi/Laporan	350.000.000	575.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Perempuan dan Perlindungan Anak yang ditindaklanjuti. 4 Rekomendasi/Laporan				
			Perencanaan Sub Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan II	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah rekomendasi/laporan hasil koordinasi perencanaan dan evaluasi urusan perpustakaan dan trantibbum linmas serta pada penunjang urusan pengawasan, kesekretariatan DPRD, kesekretariatan daerah, badan penghubung daerah, penelitian dan pengembangan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia. 4 Rekomendasi/Laporan	4 Rekomendasi/Laporan	250.000.000	350.000.000	
			Forum Revolusi Mental Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi, SKPD			Rekomendasi Perencanaan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Revolusi Mental 2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	-	120.000.000	
			Pengendalian dan Evaluasi Sub Bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan I	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah dokumen pendukung perencanaan pembangunan urusan Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Pemuda, Olahraga, Kearsipan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Adminduk Capil, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1 Dokumen	1 Dokumen	148.000.000	325.000.000	
			Pengendalian dan Evaluasi Sub Bidang Perencanaan Sosial, Budaya dan Pemerintahan II	Provinsi, Luar Daerah, SKPD			Jumlah dokumen pendukung perencanaan pembangunan urusan Perpustakaan dan Trantibbum Linmas serta pada penunjang urusan Pengawasan, Kesekretariatan DPRD,	1 Dokumen	118.907.000	425.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
							Kesekretariatan Daerah, Badan Penghubung Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia 1 Dokumen					
			Penyusunan Study Perencanaan Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan	Luar Daerah, Provinsi			Jumlah dokumen Perencanaan Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan 1 Dokumen	1 Dokumen	196.000.000	300.000.000		
			Perhubungan									
	PENGEMBANGAN ENERGI DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Program Pengembangan dan Pembangunan Perhubungan Darat		Prosentase pemenuhan Sarana dan Prasarana pendukung Perhubungan Darat menuju Kawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung Berikat; Persentase pemenuhan sarana parasarana penunjang Jalan Kawasan Peruntukan Pariwisata Tanjung gunung dan kawasan lintas timur Pulau Bangka; Persentase pemenuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan darat dalam menunjang Daerah Tujuan Wisata; Persentase pemenuhan sarana parasarana penunjang perhubungan darat di Kawasan Pariwisata Museum Nasional Maritim Beltung; Persentase pemenuhan sarana parasarana perhubungan di Kawasan Strategis Tanjung Kalian; Persentase pemenuhan sarana parasarana penunjang Jalan Kawasan Peruntukan Pariwisata Tanjung gunung dan kawasan lintas timur Pulau Bangka; Persentase pemenuhan	0 %; 50 %; 20 %; 15 %; 20 %; 10 %; 5 %; 10 %; 20 %; 20 %; 10 %; 20 %; 5 %; 3,2 %; 8 %					DINAS PERHUBUNGAN	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					sarana parasarana penunjang perhubungan darat di Kawasan Pariwisata Gunung Menumbing; Persentase pemenuhan sarana parasarana penunjang Jalan di dan menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Kelayang; Persentase pemenuhan sarana parasarana penunjang perhubungan darat di Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang; Persentase pemenuhan sarana parasarana penunjang perhubungan darat di Kawasan Kota Tua Muntok; Persentase pemenuhan sarana parasarana penunjang perhubungan darat di kawasan pariwisata gunung Permisan Simpang Rimba; Persentase desa yang terlayani oleh angkutan perintis lintas kabupaten dalam provinsi; Rasio Jumlah Bus sekolah dengan Jumlah Murid; Persentase penurunan korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas; Prosentase Penurunan Emisi dari Sektor Transportasi						
		Penilaian Penghargaan Wahana Tata Nugraha Tingkat Provinsi	Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang			Jumlah kabupaten/ Kota yang mendapatkan penghargaan wahana tata nugraha 4 Kabupaten Kota	4 Kabupaten Kota	211.307.900	243.000.000		

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Provinsi			Jumlah Unit Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) 83 unit	83 unit	3.861.820.000	9.162.609.389	
			Pemeliharaan Alat Keselamatan Transportasi	Bangka Tengah, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan			Prosentase Perlengkapan Jalan dalam kondisi baik 75 %	75%	1.000.000.000	1.489.108.550	
			Pengoperasian Bus Sekolah	Provinsi			Jumlah Bus Sekoah Yang Beroperasi 11 Bus	11 Bus	1.397.172.000	1.497.172.000	
			Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Provinsi			Persentase Pembangunan Perlengkapan Jalan terhadap kondisi Optimal pada ruas jalan Provinsi di Pualu Bangka 20 %	20%	2.078.000.000	4.113.964.230	
			Penyelenggaraan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	Provinsi			Jumlah Dokumen Hasil Survey dan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas 3 Dokumen	3 Dokumen	121.277.100	127.340.955	
			Penyelenggaraan Penilaian Analisis Dampak Lalu Lintas	Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur			Jumlah Rekomendasi Penyelenggaraan Penilaian Analisis Dampak Lalu Lintas 4 Dokumen	4 Dokumen	185.040.750	212.796.863	
			Pengadaan Alat-Alat Berat Operasional	SKPD			Jumlah unit Alat Berat (Kendaraan Crane/ Sky Lift) dan Kendaraan Derek 1 unit	1 unit	-	1.300.000.000	
			Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/ Juru Mudi/ Awak Kendaraan Umum Teladan	SKPD, Pangkal Pinang			Jumlah Peserta yang mengikuti Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/ Juru Mudi/ Awak Kendaraan Umum Teladan 14 orang	14 orang	100.000.000	141.446.340	
			Penyelenggaraan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	SKPD, Pangkal Pinang			Jumlah Peserta Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas 30 orang	30 orang	185.000.000	177.663.465	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Pengembangan dan Pembangunan Perhubungan Laut		Prosentase Pelabuhan Khusus (Pelsus) dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) yang memiliki izin; Prosentase Pemenuhan Sarana dan Prasana Perhubungan Laut di lokasi wisata; Prosentase pemenuhan Sarana dan Prasarana pendukung Perhubungan Laut di Kawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok; Persentase pemenuhan sarana prasarana penunjang Pelabuhan Tanjung Kalian; Persentase pemenuhan sarana prasarana penunjang Pelabuhan ASDP Manggar - Ketapang; Presentase sarana dan prasarana perhubungan laut kawasan konektifitas Pulau Bangka dengan Pulau Sumatera; Persentase pulau-pulau berpenduduk yang terkoneksi kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil; Jumlah armada pengangkutan; Prosentase sarana dan prasana perhubungan laut Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu (KIPT) Tanjung Ular yang terbangun serta digunakan; Prosentase pemenuhan Sarana dan Prasarana pendukung Perhubungan Laut di Kawasan Strategis Industri Terpadu Air Kelik; Prosentase	25 %; 20 %; 20 %; 0 %; 10 %; 0 %; 20 %; 0 unit; 3 %; 0 %; 10 %; 0 %; 0 %; 10 %					DINAS PERHUBUNGAN

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					pemenuhan Sarana dan Prasarana pendukung Perhubungan Laut di Kawasan Strategis Ekonomi Khusus Tanjung Berikat; Prosentase peningkatan sarana dan prasana perhubungan laut Kawasan Strategis Industri Sadai; Prosentase pemenuhan Sarana dan Prasarana pendukung Perhubungan Laut Kawasan strategis Industri Terpadu di Teluk Klabat Belinyu; Prosentase infrastruktur perhubungan laut dalam kondisi baik terhadap kondisi optimal						
			Penyusunan Study Kelayakan Pembangunan Pelabuhan/Dermaga di kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil	Provinsi, Belitung, Belitung Timur			Jumlah Dokumen Study Kelayakan Pembangunan Pelabuhan/Dermaga di kawasan konektivitas Pulau Lepar, Pulau Long, dan Pulau Kuil 3 Dokumen	3 Dokumen	1.000.000.000	-	
			Penyusunan DED dan SID Pembangunan Pelabuhan/Dermaga di kawasan konektivitas Pulau Bangka dengan Pulau Belitung serta pulau-pulau kecil	Provinsi, Belitung, Belitung Timur			Jumlah Dokumen SID dan DED Pembangunan Pelabuhan/Dermaga di Pulau Gresik, Pulau Seliu dan Pulau Mendanau 3 Dokumen	3 Dokumen	822.533.125	3.750.000.000	
			Pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	Provinsi			Terselenggaranya Pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) 1 Paket	1 Paket	180.000.000	1.653.600.000	
			DED dan SID Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)	Provinsi, Lepar Pongok			Tersedianya Dokumen DED dan SID Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) 2 Dokumen	2 Dokumen	450.000.000	-	
			Program Peningkatan Pengendalian, Oprasional dan Kebandarudaraan		Prosentase Angkutan Umum yang laik jalan; Prosentase pertambahan pendapata n dari pengolahan perhubungan udara:	15 %; 10 %; 30 %					DINAS PERHUBUNGAN



No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Persentase sarana dan prasarana fasilitas bandara kewenangan provinsi yang tersedia dan beroperasi.						
			Pekerjaan Pembangunan Jalan Akses Gedung VIP Bandara Depati Amir	Bangka Tengah, Pangkal Pinang			Prosentase Pekerjaan jalan akses ke Gedung VIP Bandara Depati Amir 100 %	100%	6.409.200.000	-	
			Pengendalian dan Pengawasan Angkutan Pada Hari-Hari Peringatan Daerah dan Nasional	Provinsi, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka			Jumlah Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Pada Hari-Hari Peringatan Daerah dan Nasional 14 kegiatan	14 kegiatan	150.000.000	150.000.000	
			Pengawasan dan Pengendalian Angkutan pada Hari Besar Keagamaan	Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang			Jumlah hari pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Angkutan di Terminal, Bandara dan Pelabuhan pada Hari Besar Keagamaan 3 Hari	3 Hari	201.928.500	232.217.775	
			Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung VIP Bandara Depati Amir	Bangka Tengah			Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Gedung VIP Bandara Depati Amir 1 Paket	1 Paket	1.500.000.000	-	
			Pengawasan dan Pengendalian Operasional Angkutan Laut dan Udara	Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat			Jumlah Surat-surat kapal penumpang dan barang dibawah < 7 GT 100 unit Jumlah penumpang dan kargo yang diangkut pesawat, jadwal penerbangan dan frekuensi penerbangan 5 maskapai	100 unit 5 maskapai	-	193.000.000	
			Pengadaan dan Pemasangan X-Ray dan Perlengkapannya	Bangka Tengah			Jumlah unit Pengadaan dan Pemasangan X-Ray dan Perlengkapannya 1 set	1 set	2.500.000.000	-	
			Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka			Jumlah Angkutan Umum yang diperiksa terkait surat-surat kendaraan, Penimbangan Muatan dan pengukuran dimensi kendaraan 600 unit kendaraan	600 unit kendaraan	214.000.000	230.000.000	
			Studi Identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan di Jalan Provinsi	SKPD			Jumlah Dokumen Studi Identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan di Jalan Provinsi 1 dokumen	1 dokumen	-	-	
			Lingkungan Hidup								

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN AGROPOLITAN	Meningkatnya produksi sub sektor pertanian, peternakan dan jasa perkebunan	Program Peningkatan Tata Kelola Lingkungan Hidup		FALSE	FALSE					DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis	Luar Daerah, Provinsi, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang			Jumlah dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang tersusun 1 Dokumen	1 Dokumen	450.000.000	1.000.000.000	
			Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten/Kota	Provinsi, Luar Daerah, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur			Jumlah Rekomendasi Hasil Validasi KLHS Kabupaten/Kota 7 Rekomendasi	7 Rekomendasi	200.000.000	275.000.000	
			Analisis data dan informasi Lingkungan Hidup	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan			Jumlah Dokumen informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) 1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000	135.850.000	
			Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rivi Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rivi Peninjuan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah yang tersusun 1 Dokumen	1 Dokumen	450.180.000	-	
			Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kawasan Strategis Provinsi KIPT Tanjung Ular	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Barat			Jumlah Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kawasan Strategis Provinsi KIPT Tanjung Ular yang Tersusun 1 Dokumen	1 Dokumen	400.000.000	-	
			Layanan Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan	Luar Daerah, Provinsi, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka			Jumlah Usaha/Kegiatan yang dilayani 8 Usaha/Kegiatan	8 Usaha/Kegiatan	100.000.000	161.345.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Barat, Bangka Selatan							
			Evaluasi Kinerja Penilaian AMDAL dan Pemeriksaan UKL-UPL serta Penerbitan Izin Lingkungan yang dilakukan Kabupaten/Kota	Luar Daerah, Provinsi, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah			Jumlah Komisi Penilaian Amdal yang di Evaluasi 7 Komisi Penilai Amdal	7 Komisi Penilai Amdal	100.000.000	140.200.000	
	PENGEMBANGAN ENERGI DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN	Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur Masyarakat	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Laboratorium Lingkungan Hidup		Persentase Parameter Kualitas Lingkungan Yang terakreditasi	100 %					DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Peningkatan Mutu Pemeriksaan Kualitas Lingkungan di Laboratorium Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Luar Daerah, Provinsi, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat			Jumlah Parameter Lingkungan yang akreditasi 32 Parameter	32 Parameter	293.000.000	305.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan Laboratorium	Provinsi, SKPD			Jumlah sampel yang dilayani dalam 1 tahun 1.225 Sampel	1.225 Sampel	950.000.000	1.265.000.000	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Laboratorium	Luar Daerah, Provinsi			Jumlah Paket Pengadaan Sarana Parasarana Laboartorium 2 Paket	2 Paket	198.500.000	1.500.000.000	
			Peningkatan Kapasitas SDM UPT Laboratorium Lingkungan	Provinsi, SKPD			Jumlah SDM UPT Laboratorium Lingkungan yang terlatih 40 Orang	40 Orang	105.000.000	135.000.000	
			TPA ST Regional						850.000.000	-	
			Program Peningkatan Pengendalian dan Pnaatan Lingkungan Hidup			Persentase penurunan Konsentrasi BOD ; Persentase penurunan Konsentrasi COD ; Persentase penurunan Konsentrasi TSS ; Persentase Penurunan Konsentrasi SO2	6,31 mg/l; 17,67 mg/l; 39,47 mg/l; 145,5 µg/Nm3				DINAS LINGKUNGAN HIDUP
				Pemantauan Kualitas Air Sungai di Provinsi Kepulauan Bangka Beitung	Luar Daerah, Provinsi, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung			Jumlah Titik Pantau Kualitas Air Sungai 45 Titik Pantau	45 Titik Pantau	251.104.500	516.225.000

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Timur							
			Pengendalian Beban Pencemaran Air	Luar Daerah, Provinsi, Bangka			Persentase rekomendasi Peningkatan Kualitas Sungai yang ditindak lanjuti 40 % Dokumen Rencana Aksi Daerah dalam Peningkatan Kualitas Sungai di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tersusun 1 Dokumen	40 % 1 Dokumen	200.000.000	311.052.000	
			Penguatan Upaya Peningkatan Kualitas Air Sungai Berbasis Kinerja Tim Pokja	Provinsi, SKPD			Persentase rekomendasi Peningkatan Kualitas Sungai yang ditindak lanjuti 0 % Dokumen Rencana Aksi Daerah dalam Peningkatan Kualitas Sungai di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tersusun 1 Dokumen	0 % 1 Dokumen	153.350.000	450.000.000	
			Pemantauan Kualitas Udara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Luar Daerah, Provinsi, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang			Jumlah Titik pantau kualitas udara di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 21 Titik Pantau	21 Titik Pantau	140.000.000	198.375.000	
			Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bagi Pelaku Usaha/Kegiatan	Luar Daerah, Provinsi, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka			Jumlah Usaha/Kegiatan yang diawasi 70 Usaha/Kegiatan	70 Usaha/Kegiatan	200.000.000	595.125.000	
			Penerimaan, penelaahan, dan verifikasi pengaduan masyarakat	Provinsi, Luar Daerah, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur			Jumlah Pengaduan masyarakat yang diverifikasi 14 Kasus	14 Kasus	115.000.000	132.250.000	
			Program Peningkatan Pengolahan Sampah, Pemeliharaan dan			FALSE	FALSE				

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan Kapasitas								
			Persiapan Rencana Pra Pembangunan Kawasan Tempat Pembuangan akhir Sampah Terpadu Regional	Luar Daerah, Provinsi, Pangkal Pinang, Bangka Tengah			Jumlah Laporan Rencana Pra Pembangunan 1 Laporan/Dokumen	1 Laporan/Dokumen	-	300.000.000	
			Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Luar Daerah, Provinsi, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung			Jumlah Kader/Kelompok Masyarakat yang Terlatih 35 Kader/Kelompok	35 Kader/Kelompok	325.000.000	378.000.000	
			Inventarisasi emisi gas rumah kaca	Provinsi, Luar Daerah, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang			Dokumen Inventarisasi emisi gas rumah kaca 1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	74.350.000	
			Pemberian Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup Tingkat Provinsi	Provinsi, Luar Daerah, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang			Jumlah Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup 3 Jenis Penghargaan Jumlah Penghargaan Adiwiyata Tingkat Provinsi 14 Jenis Penghargaan Jumlah Kabupaten/Kota yang Mendapat Penghargaan Adipura Tingkat Nasional 4 Kabupaten/Kota Jumlah Penghargaan Kalpataru 3 Penghargaan Jumlah Kampung Iklim yang Mendapat Penghargaan Tingkat Nasional 3 Kampung Iklim	3 Jenis Penghargaan 14 Jenis Penghargaan 4 Kabupaten/Kota 3 Penghargaan 3 Kampung Iklim	316.805.000	172.500.000	
			Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
	PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT	Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk	Program Pengadministrasian Kependudukan dan Catatan Sipil		Jumlah penyediaan data base kependudukan tingkat provnsi yang akurat untuk memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik perencanaan pembangunanalokasi	7 Jumlah; 5 Jumlah; 7 jumlah					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
					anggaran pembangunan demokrasi serta penegakkan hukum dan pencegahan kriminal; Jumlah pemanfaatan NIK Data base kependudukan dan KTP_el oleh OPD Provinsi; Jumlah pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil disemua kabupaten/kota						PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA	
			Pengembangan bank data kependudukan	SKPD			Jumlah aplikasi 1 Aplikasi	1 Aplikasi	60.000.000	70.000.000		
			Rapat teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan tingkat provinsi	SKPD, Belitung, Bangka Selatan			Jumlah peserta rakor adminduk 70 Orang	70 Orang	100.000.000	30.500.000		
			Evaluasi penyelenggaraan kependudukan dan pencatatan sipil se- provinsi kepulauan bangka belitung	SKPD, Pangkal Pinang, Belitung, Belitung Timur, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah			Jumlah laporan 1 Laporan	1 Laporan	300.000.000	121.000.000		
			Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan di Kab/Kota	SKPD, Belitung Timur, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Bangka, Pangkal Pinang			Perangkat perekaman dan penerbitan KTP-el 7 Paket	7 Paket	1.278.967.500	1.000.000.000		
			Peningkatan cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak	SKPD, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat			Jumlah peserta 50 Orang Jumlah blanko KIA 14.000 Blanko	50 Orang 14.000 Blanko	150.000.000	150.000.000		
			Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
		Menurunnya angka Pengangguran	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan		Persentase kebijakan pembangunan pemberdayaan perempuan; Persentase keterwakilan perempuan dilembaga publik; Persentase keberdayaan organisasi dan lembaga masyarakat dan berbasis gender	100 %; 30 %; 100 %					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											BERENCANA
			Penguatan kapasitas Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan PPRG	SKPD, Pangkal Pinang			Jumlah peserta Workshop 315 Orang	315 Orang	250.000.000	300.000.000	
			Pembinaan dan Monev Pelaksanaan Program Industri Rumahan perempuan di Kab/Kota	Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Pangkal Pinang, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur			Jumlah peserta pelaku IR 50 Orang	50 Orang	150.000.000	175.000.000	
			Advokasi dan KIE Pengarusutamaan Gender dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	SKPD, Pangkal Pinang			Jumlah peserta 160 orang	160 orang	75.000.000	50.000.000	
			Pemetaan Industri Rumahan di Kab/Kota	Bangka			Jumlah IR di kab/kota 40 Orang	40 Orang	100.000.000	110.000.000	
			Pembinaan Organisasi Perempuan	SKPD, Bangka, Pangkal Pinang, Belitung, Bangka Selatan, Belitung Timur, Bangka Barat, Bangka Tengah			Terlaksananya pembinaan organisasi perempuan 12 Bulan	12 Bulan	300.000.000	200.000.000	
			Peningkatan nilai nilai kejuangan perempuan indonesia	Provinsi, SKPD, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur			Jumlah Peserta Peningkatan nilai-nilai kejuangan perempuan indonesia 500 Orang	500 Orang	300.000.000	242.000.000	
		Terkendalnya Laju Pertumbuhan Penduduk	Program Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak		Rasio Perempuan Korban Kekerasan per 100.000 penduduk usia 18 Tahun keatas di tingkat daerah provinsi ; Rasio Anak yang memerlukan perlindungan khusus per 100.000 anak usia 0-18 Tahun tingkat daerah Provinsi ; Persentase Kab/Kota Layak Anak	0 Persen; 0 Persen; 0 Persen					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
			Peningkatan Fungsi Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Provinsi Kepulauan	Provinsi, SKPD			Jumlah komisioner 7 orang Jumlah admin 1 orang	7 orang 1 orang	280.000.000	290.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Bangka Belitung									
			Advokasi dan pembinaan KIE kebijakan Forum Anak kab/Kota	SKPD, Pangkal Pinang			Jumlah peserta Advokasi dan KIE 26 orang	26 orang	75.000.000	80.000.000		
			Peningkatan Peran Serta Anak dalam Pembangunan	Provinsi, SKPD, Pangkal Pinang			Jumlah Peserta HAN 800 Orang	800 Orang	270.000.000	290.000.000		
			Rapat Koordinasi Provinsi Layak Anak (Provila)	SKPD, Pangkal Pinang			Jumlah peserta rakor 60 orang	60 orang	75.000.000	80.000.000		
			Penguatan pembinaan dan Pelayanan Korban Kekerasan	SKPD			Kelancaran Fungsi pusat pelayanan terpadu 1 Kegiatan	1 Kegiatan	250.000.000	242.000.000		
			Workshop Kab/Kota Menuju Provinsi layak anak (Provila)	SKPD			Jumlah Peserta Workshop dan Fasilitasi kebijakan kab/kota layak anak 65 Orang	65 Orang	-	157.000.000		
			Partisipasi Anak dalam pembangunan (Forum Anak)	SKPD, Pangkal Pinang			Jumlah Peserta Forum anak TK provinsi dan Nasional 80 Orang	80 Orang	200.000.000	220.000.000		
			TOT bagi aktifis PATBM tk kab/kota	SKPD			Terlaksananya TOT bagi aktifis PATBM kab/kota 80 Orang	80 Orang	300.000.000	242.000.000		
			Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana									
			Program Peningkatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Persentase PUS yang menggunakan KB MKJP; Persentase keluarga Pra sejahtera dan Keluarga Pra sejahtera I	100 %; 100 %					DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN, PENCATATAN SIPIL DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA	
		Pembinaan dan Penguatan Kampung KB	SKPD, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat			Jumlah pemenang Kampung KB 3 pemenang	3 pemenang	300.000.000	320.000.000			
		Pemuktahiran Grand design kependudukan	SKPD			Jumlah dokumen 1 dokumen	1 dokumen	68.000.000	70.000.000			
		Pelatihan konselor dan pendidik sebaya	SKPD, Pangkal Pinang			Jumlah peserta 40 orang	40 orang	175.000.000	190.000.000			
		Pembinaan peningkatan peran perempuan dalam kehidupan keluarga	SKPD, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang,			Jumlah pemenang lomba Harganas 3 pemenang	3 pemenang	350.000.000	370.000.000			



No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah								
			Advokasi dan KIE program KKBPK	Provinsi, SKPD, Pangkal Pinang			Jumlah Peserta 100 orang	100 orang	85.000.000	90.000.000		
			Penguatan Komitmen Peningkatan Kinerja Lini Lapangan	SKPD, Pangkal Pinang			Jumlah Peserta 100 Peserta	100 Peserta	175.000.000	180.000.000		
		Sosial										
		Menurunnya angka kemiskinan	Program Rehabilitasi Sosial		Persentase korban napza; Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial; Persentase Perempuan korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial; Persentase anak yang mendapatkan hak dalam pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial	100 %; 100 %; 100 %; 100 %					DINAS SOSIAL	
			Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia	Provinsi, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang			Jumlah Lanjut Usia yang mendapatka pelayanan, Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial dan Optimalisasi/Meningkatnya Peranan Panti/Yayasan/Organisasi Sosial dan kader masyarakat dalam pelayanan Lanjus Usia 300 Orang	300 Orang	300.000.000	300.000.000		
			Peningkatan Kinerja Komda Lanjut Usia	Provinsi, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat			Meningkatnya Kinerja da Peran Serta KOMDA Lansia Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan kepada Lanjut Usia 8 Komda	8 Komda	100.000.000	100.000.000		
			Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak	Provinsi, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang			Jumlah anak yang direhabilitasi dab memperoleh perlindungan sosial 270 Anak	270 Anak	399.950.000	400.000.000		

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pembinaan Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA	Provinsi, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Belitung, Bangka Tengah			Jumlah masyarakat dan korban napza yang mendapatkan pembinaan penyalahgunaan napza 100 Orang	100 Orang	334.925.000	350.000.000	
			Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi Peyandang Disabilitas	Provinsi, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang			Jumlah Penyandang Disabilitas yang Mendapatkan Perlindungan, Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial dan Meningkatnya Kinerja dan Peran serta Yayasan/ Lembaga Kesejahteraan Sosial/ Kader/ dan PSKS dalam Memberikan Pelayanan dan Pendampingan kepada Penyandang Disabilitas 100 Orang	100 Orang	350.000.000	350.000.000	
			Pembinaan Sosial Tuna Sosial	Provinsi, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang			Jumlah tuna sosial yang mendapatkan pembinaan sosial 140 Orang	140 Orang	245.850.000	250.000.000	
			Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran	Provinsi, Bangka, Bangka Selatan, Bangka Barat, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang			Jumlah korban tindak kekerasan bermasalah sosial yang mendapat perlindungan dan bantuan usaha 31 Orang	31 Orang	-	250.000.000	
			Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak atau Tim PIPA	Provinsi, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung			Jumlah bayi dan anak yang mendapat pertimbangan perizinan untuk di adopsi 5 org	5 org	75.000.000	90.000.000	
			Pendampingan dan advokasi sosial klien bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum	Provinsi, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan			Jumlah anak yang mendapat pendampingan dan advokasi apabila berhadapan dengan hukum 10 org	10 org	80.000.000	120.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial		Persentase PMKS/PSKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial; Persentase desa/kelurahan rawan bencana yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial; Persentase korban bencana yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial; Persentase PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitas berkaitan dengan Kesiapsiagaan bencana	100 %; 100 %; 100 %; 100 %					DINAS SOSIAL
			Pengelolaan Posko Kebencanaan Alam	Provinsi, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung			Jumlah PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitas berkaitan dengan Kesiapsiagaan bencana alam 56 org Jumlah desa/kelurahan rawan bencana alam yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial 1 Desa Jumlah korban bencana alam yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial Jumlah korban bencana alam yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial 25 KK	56 org 1 Desa 25 KK	-	601.965.000	
			Pengelolaan Posko Kebencanaan Sosial	Provinsi, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah			Jumlah PSKS yang mendapatkan peningkatan kapasitas berkaitan dengan Kesiapsiagaan bencana sosial 70 org Jumlah desa/kelurahan rawan bencana sosial yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial 1 desa/kelurahan Jumlah korban bencana sosial yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial 50 kk	70 org 1 desa/kelurahan 50 kk	-	350.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penguatan Akses Jaminan Sosial Keluarga	Provinsi, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah			Jumlah pekerja sektor informal/ mandiri dan keluarga miskin penerima PKH yang memperoleh jaminan sosial 1.445 org Jumlah keluarga miskin penerima santunan kematian 55 org	1.445 org 55 org	499.110.000	500.000.000	
			Penguatan Jaminan Sosial Keluarga PKH	Provinsi, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah			Jumlah keluarga miskin yang mendapatkan pendampingan program PKH 45.000 org	45.000 org	-	1.000.000.000	
			Program Penanganan Farkir Miskin		Persentase PMKS yang mendapatkan Bantuan Beras Sejahtera; Persentase PMKS yang mendapatkan Bantuan Usaha; Persentase debitur yang membayar tunggakan kredit usaha peningkatan ekonomi masyarakat (KUPEM)	100 %; 100 %; 100 %					DINAS SOSIAL
			Peningkatan Kualitas Dukungan Program Pusat	Provinsi, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang			Jumlah Dukungan terhadap peningkatan kualitas program Pusat 13 KUBE	13 KUBE	89.400.000	150.000.000	
			Peningkatan kwalitas pelayanan terhadap bantuan Rastra dan BPNT	Provinsi, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah			Jumlah Rastra dan BPNT yang tersalur kepada keluarga Miskin 43.019 org	43.019 org	-	15.131.000.000	
			Pelatihan Keterampilan dan Menajemen Usaha bagi Keluarga Miskin	Belitung, Belitung Timur, Bangka, Pangkal Pinang, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah			Jumlah Keluarga Miskin yang mendapatkan pelatihan manajemen usaha 180 kk	180 kk	-	500.000.000	
			Stimulan Penguatan Sosial Ekonomi Keluarga Fakir Miskin di Wilayah Perdesaan	Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung			Jumlah Keluarga Miskin yang mendapatkan stimulan UEP dan KUBE 250 kk	250 kk	700.000.000	1.800.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Timur, Bangka							
			Penanganan Fakir Miskin Pesisir dan Pulau Pulau Kecil	Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung Timur, Pangkal Pinang			Jumlah Keluarga Miskin penerima Pelayanan Program Penanganan Fakir Miskin 200 kk	200 kk	-	702.000.000	
			Simulan Penguatan Sosial Ekonomi Keluarga Miskin dan Rentan	Provinsi, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang			Jumlah Keluarga Miskin dan rentan yang mendapatkan stimulan penguatan sosial ekonomi 115 kk	115 kk	688.745.000	750.000.000	
			Program Pemberdayaan Sosial		Persentase PMKS/PSKS yang mendapatkan pemberdayaan sosial	100 %					DINAS SOSIAL
			Pemberdayaan Keluarga	Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah			Jumlah Klien yang ditangani melalui LK3 75 org	75 org	189.857.000	250.000.000	
			Pelestarian dan Peningkatan Kualitas TMP	Provinsi			Jumlah sarana dan prasarana TMP yang dapat dipelihara dan disediakan 1 TMP	1 TMP	-	300.000.000	
			Peringatan Hari Pahlawan dan HKSN	Luar Daerah, Provinsi			Jumlah peserta dan partisipasi dalam memperingati Hari pahlawan dan HKSN 4 kegiatan	4 kegiatan	-	148.000.000	
			Penyuluhan Sosial	Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung Timur			Jumlah kelompok sasaran dan lokasi yang dapat dijangkau dan diberikan penyuluhan sosial 275 org	275 org	150.000.000	250.000.000	
			Asistensi dan Advokasi Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial	Provinsi			Jumlah dunia usaha/lembaga/ masyarakat yang menyelenggarakan Pengumpulan Uang/Barang dan Undian Gratis Berhadiah sesuai aturan berlaku 30 Lembaga	30 Lembaga	60.000.000	150.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat	Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah			Jumlah pilar-pilar Sosial yang diberdayakan 100 org	100 org	150.000.000	200.000.000	
			Peningkatan Pelayanan dan Kesejahteraan Keluarga Pionir	Provinsi			Jumlah Veteran dan Janda Pahlawan yang Mampu melaksanakan Peran dan Fungsi Sosial 1 TMP Jumlah Veteran dan Janda Pahlawan yang Mampu melaksanakan Peran dan Fungsi Sosial 4 kegiatan	1 TMP 4 kegiatan	750.000.000	850.000.000	
			<b>Program Peningkatan Pelayanan Teknis Panti Sosial</b>		Persentase PMKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial melalui Pelayanan Teknis Panti Sosial	100 %					DINAS SOSIAL
			Pelayanan Psikososial bagi PMKS di Panti Sosial Bina Serumpun	Provinsi, Pangkal Pinang			Jumlah klien/warga binaan sosial yang mendapatkan pelayanan psikososial 50 org	50 org	568.800.000	568.800.000	
			Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kessos bagi PMKS	Provinsi, Pangkal Pinang			Jumlah sarana/prasarana pelayanan dan rehabilitasi sosial yang disediakan 10 pkt	10 pkt	289.430.000	289.430.000	
			Bimbingan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Warga Bina Sosial di PSBS	Provinsi, Pangkal Pinang			Jumlah warga binaan sosial yang memperoleh pelatihan dan keterampilan kerja 20 org	20 org	37.500.000	50.000.000	
			Advokasi dan Pemulangan Klien/Warga Binaan Sosial	Provinsi, Pangkal Pinang			Jumlah klien yang dapat diadvokasi dan dipulangkan 20 org	20 org	75.000.000	75.000.000	
			Rehabilitasi Ringan Sarana Prasarana Panti	Provinsi, Pangkal Pinang			Jumlah Prasarana Panti yang di rehabitiati 1 tahun	1 tahun	101.000.000	150.000.000	
			Pembangunan Prasarana Panti	Provinsi, Pangkal Pinang			Jumlah Sarana dan Prasarana panti yang dibangun 1 pkt	1 pkt	150.420.000	-	
			<b>Program Penguatan Penyelenggaraan Panti Sosial</b>		Persentase PMKS penerima manfaat yang mampu melaksanakan peranan dan fungsi sosial melalui Penguatan Penyelenggaraan Panti Sosial	100 %					DINAS SOSIAL
		Pendampingan dan Pembinaan Lanjutan Kilen	Provinsi, Belitung Timur			Jumlah klien yang memperoleh	10 org	40.000.000	40.000.000		

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
							pendampingan dan pembinaan lanjutan 10 org					
			Penyediaan Buku dan Referensi bagi penghuni panti	Provinsi, Belitung Timur			Jumlah buku bacaan dan referensi 1.000 eksp	1.000 eksp	-	-		
			Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi penghuni panti	Provinsi, Belitung Timur			Jumlah penghuni panti yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan keterampilan 2 org	2 org	60.000.000	60.000.000		
			Pengelolaan Fungsi Pelayanan dan rehabiltasi Sosial Dalam Panti	Provinsi, Belitung Timur			Jumlah pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar yang disediakan bagi penghuni panti 20 Orang	20 Orang	700.000.000	700.000.000		
			Penyediaan bantuan UEP bagi eks Penghuni panti	Provinsi, Belitung Timur			Jumlah eks penghuni panti yang menerima bantuan UEP 4 org	4 org	40.000.000	40.000.000		
			Penyediaan dan Dukungan Sarana Penunjang Panti	Provinsi, Belitung Timur			Jumlah sarana penunjang yang disediakan dalam Panti 1 tahun	1 tahun	760.000.000	400.000.000		
			Rehabilitasi ringan prasarana panti	Provinsi, Belitung Timur			Jumlah prasarana panti yang direhabilitasi 0 pkt	0 pkt	-	150.000.000		
			Peningkatan Kapasitas dan Keterampilan Pengelola Panti	Provinsi, Belitung Timur			Jumlah Pengelola Panti yang memperoleh pengetahuan dan keerampilan 4 org	4 org	20.000.000	20.000.000		
			Pembangunan Prasarana Panti	Provinsi, Belitung Timur			Jumlah Sarana dan Prasarana panti yang dibangun 1 pkt	1 pkt	300.000.000	-		
			Rehabilitasi Sedang/Berat Prsarana Panti	Provinsi, Belitung Timur			Jumlah Prasarana Panti yang direhabilitasi 1 pkt	1 pkt	-	-		
				<b>Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana</b>		Persentase Daerah Rawan Bencana yang Diintervensi Dalam Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	74 %					BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH
				Mitigasi Penanggulangan Bencana di Daerah Rawan Bencana	Provinsi, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur			Jumlah peserta yang mendapat ilmu pengetahuan tentang Mitigasi penanggulangan bencana Di 7 Kab/Kota 100 Peserta	100 Peserta	300.000.000	300.000.000	
				Fasilitasi Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana Dalam Penyelenggaraan Dan Pengembangan Sistem Penanqqulangan Bencana	Provinsi, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Panokal			Jumlah Koordinasi berkala Tim Penangggulangan Bencana /Tim Tantangan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana 1 Kegiatan	1 Kegiatan	160.000.000	350.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Daerah	Pinang							
			Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencegahan Banjir di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang			Jumlah orang Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencegahan Banjir di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 100 orang	100 orang	450.000.000	400.000.000	
			Sosialisasi Penanggulangan Bencana Ke Pelajar/Mahasiswa	Provinsi, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang			Jumlah peserta yang terSosialisasi Penanggulangan Bencana Ke Pelajar/Mahasiswa di 7 Kabupaten/Kota 100 Peserta	100 Peserta	-	350.000.000	
			Pembekalan Tentang Penanggulangan Bencana Kepada Aparatur Perangkat Daerah, Aparatur Desa/Kelurahan Dan Masyarakat	Provinsi, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang			Jumlah peserta yang mendapat Pembekalan Tentang Penanggulangan Bencana Ke Kepada Aparatur Perangkat Daerah, Aparatur Desa/Kelurahan Dan Masyarakat Di 7 Kab/Kota 100 Peserta	100 Peserta	400.000.000	200.000.000	
			Sosialisasi Pencegahan Bencana	Provinsi, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang			Jumlah peserta yang mendapat Pembekalan Rencana Evakuasi partisipasif masyarakat di zona penangganan bencana Di 7 Kab/Kota 100 Peserta	100 Peserta	-	150.000.000	
			Identifikasi Daerah Rawan Bencana Dalam Rangka Pengurangan Risiko Bencana	Provinsi, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang			Jumlah HimbauanPencegahan Dan Kesiapsiagaan Dalam Rangka Pengurangan Risiko Bencana yang Terpasang di 7 Kabupaten/Kota 25 Unit	25 Unit	-	200.000.000	
			Penyusunan Rencana Kontinjensi	Provinsi, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang			Jumlah Rencana Kontinjensi Yang Tersusun di 7 Kabupaten/Kota 1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	150.000.000	



No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kajian Daerah Rawan Bencana	Provinsi, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang			Jumlah Kajian Kebencanaan di daerah rawan bencana di 7 Kabupaten/kota 1 Kegiatan	1 Kegiatan	300.000.000	220.000.000	
			Pembangunan Jaringan Informasi Kebencanaan Terpusat	Provinsi, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang			Jumlah Pusdalops yang terbangun di Provinsi dan 7 Kabupaten/Kota 1 Paket Kegiatan	1 Paket Kegiatan	100.000.000	150.000.000	
			Publikasi Panduan Standar Minimum Penyelamatan Dini Saat Terjadi Bencana	Provinsi, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang			Jumlah Publikasi Panduan Standar Minimum Penyelamatan Dini Saat Terjadi Bencana di setiap 7 Kabupaten/kota 10 Media Cetak/Elektronik	10 Media Cetak/Elektronik	168.000.000	200.000.000	
			Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana		Persentase Daerah Bencana Yang Di Rehabilitasi Dan Rekonstruksi	75 %					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Bimbingan Teknis Pemulihan Kesehatan Psikis Masyarakat Pasaca Bencana Kabupaten/Kota dan Provinsi	Provinsi, Luar Daerah, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang			Jumlah peserta yang mendapat Bimbingan Teknis Rehabilitasi Pasaca Bencana Kabupaten/Kota dan Provinsi 30 Peserta	30 Peserta	140.000.000	145.000.000	
			Monitoring Dan Evaluasi Pascabencana Ke Kabupaten/Kota	Provinsi, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan			umlah (Laporan) Tersusunnya Data Sarana Prasarana Pascabencana laporan dalam Tahun 2017 - 2022 1 Laporan	1 Laporan	145.000.000	145.000.000	
			Pengadaan Alat Berat Penunjang Jembatan Portable				Jumlah Sarana dan Prasarana Alat Berat Penunjang Jembatan Portable 1 Unit Dump Truck	1 Unit Dump Truck	-	700.000.000	
			Pengadaan Peralatan Lapangan Pascabencana				Jumlah Unit Peralatan Survey Lapangan Pascabencana 1 Paket	1 Paket	-	40.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Bimbingan Teknis Aparatur Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Dalam Menangani Tindakan Dini Pascabencana	Provinsi, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang			Jumlah peserta Bimbingan Teknis Aparatur Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Dalam Menangani Tindakan Dini Pascabencana Di Provinsi, dan 7 Kab/Kota 30 Peserta	30 Peserta	140.000.000	140.000.000	
			Bimbingan Teknis Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (Jitu Pasna) Aparatur Provinsi,Kab/Kota	Provinsi			Jumlah peserta Bimbingan Teknis tenaga terampil Jitu Pasna bagi Aparatur Kabupaten/Kota dan Provinsi 160 orang 30 Peserta	30 Peserta	150.000.000	200.000.000	
			Rapat Koordinasi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Kabupaten/Kota Dan Provinsi	Provinsi			Jumlah Rapat Koordinasi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Kabupaten/Kota Dan Provinsi 1 Laporan	1 Laporan	-	100.000.000	
			Koordinasi dan Konsultasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana	Provinsi, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka			Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Penanggulangan Pascabencana di Kabupaten/Kota 7 Kabupaten/Kota	7 Kabupaten/Kota	-	150.000.000	
			Pengadaan Jembatan Portable	Provinsi			Jumlah unit Jembatan Portable dalam Tahun 2017 - 2022 1 Unit	1 Unit	-	2.000.000.000	
			Pemeliharaan Jembatan Portable	Provinsi, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat			Jumlah Unit Jembatan Portable Dalam Tahun 2017 - 2022 yang di pelihara 2 Unit	2 Unit	100.000.000	100.000.000	
			Bongkar Dan Atau Pasang Jembatan Portable	Provinsi, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat			Jumlah unit Bongkar dan atau Pasang Jembatan Portable 2 Unit	2 Unit	150.000.000	100.000.000	
			Pelatihan Bongkar Pasang (Install) Jembatan Portable Kabupaten/Kota Dan Provinsi	Provinsi			Jumlah orang yang Terdidik dan terlatih tenaga terampil Bongkar Pasang (Install) Jembatan Portable dalam Tahun 2017 - 2022 40 Peserta	40 Peserta	-	100.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Kedaruratan dan logistik Penanggulangan Bencana		Persentase Daerah Bencana yang Diintervensi Dalam Kedaruratan Penanggulangan Bencana	80 %					BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			Pos Komando Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Provinsi, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur			Jumlah Bulan honor Tim Reaksi Cepat yang terbayarkan 12 Bulan	12 Bulan	2.393.200.000	1.900.000.000	
			Pengambilan Serta Pendistribusian Logistik Dan Peralatan Penanggulangan Bencana	Luar Daerah			Jumlah Ketersediaan Logistik dan Peralatan Bantuan dari BNPB untuk Penanggulangan Bencana 1 Paket	1 Paket	100.000.000	100.000.000	
			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Provinsi, SKPD, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur			Jumlah peningkatan kualitas SDM TRC Di Provinsi, dan 7 Kab/Kota (Orang) 37 Orang	37 Orang	-	150.000.000	
			Pelatihan Penguatan Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Provinsi, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan			Jumlah orang dalam pelatihan penguatan TRC BPBD Di Provinsi, dan 7 Kab/Kota 40 Orang	40 Orang	150.000.000	150.000.000	
			Penyediaan Perlengkapan Tanggap Darurat	Provinsi, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan			Jumlah perlengkapan tanggap darurat Di Provinsi, dan 7 Kab/Kota 55 Orang	55 Orang	-	150.000.000	
			Pengerahan Dan Mobilisasi Tim Reaksi Cepat	Provinsi, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan			Jumlah pengerahan dan mobilisasi ke lokasi bencana Di (Kabupaten/Kota) 7 Kabupaten/Kota	7 Kabupaten/Kota	170.000.000	150.000.000	
			Pengadaan/Penyediaan Logistik untuk Penanggulangan Bencana	Provinsi, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka			Jumlah ketersediaan logistik untuk Penanggulangan BencanaDi Provinsi, dan 7 Kab/Kota 4 Item Barang	4 Item Barang	150.000.000	150.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				Barat, Bangka Selatan								
			Pengadaan/Penyediaan Peralatan Untuk Penanggulangan Bencana				Jumlah Item Peralatan ketersediaan peralatan untuk Penanggulangan Bencana 11 Item Peralatan	11 Item Peralatan	150.000.000	500.000.000		
			Pengadaan, Peningkatan Dan Pemeliharaan / Perawatan Sarana Dan Sarana Gudang Dan Tempat Penyimpanan	Provinsi			Jumlah Tempat penyimpanan / Gudang yang terawat 1 Paket	1 Paket	175.000.000	175.000.000		
			Pemeliharaan / Perawatan Logistik Dan Peralatan Penanggulangan Bencana	Provinsi, Belitung, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah			Jumlah Jenis Peralatan PB Kualitas Logistik dan Peralatan untuk Penanggulangan Bencana yang di Pemelihara dan dirawat 9 Jenis Peralatan PB	9 Jenis Peralatan PB	175.000.000	175.000.000		
			Tenaga Kerja									
	PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN AGROPOLITAN	Meningkatnya produksi sub sektor pertanian, peternakan dan jasa perkebunan	Program Peningkatan Pengawasan Ketenagakerjaan, Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial		Persentase perusahaan perkebunan yang diperiksa dan dibina ; persentase perusahaan pariwisata yang diperiksa dan dibina; persentase perusahaan kelautan perikanan yang diperiksa dan dibina ; persentase perusahaan pertambangan yang diperiksa dan dibina	2 %; 1,6 %; 1,2 %; 4,8 %					DINAS TENAGA KERJA	
			Gema Bulan Bhakti Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Provinsi, Pangkal Pinang			Jumlah perusahaan yang mendapatkan penghargaan K3 terbaik 3 Perusahaan	3 Perusahaan	58.000.000	150.000.000		
			Pemeriksaan Norma Kerja dan norma keselamatan kerja dan Kesehatan Kerja (K3)	Provinsi, Belitung, Pangkal Pinang, Bangka Selatan, Bangka, Bangka Tengah, Bangka Barat			Jumlah Perusahaan yang diperiksa pada norma kerja dan norma K3 250 Perusahaan	250 Perusahaan	264.105.000	308.334.000		
			Pemetaan Kerawanan Kondisi HI	Provinsi, Luar Daerah, Belitung, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka			Jumlah perusahaan yang dipetakan 100 Perusahaan	100 Perusahaan	100.000.000	135.000.000		

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Selatan, Bangka Tengah							
			Peningkatan fungsi LKS Tripartit dan Pembahasan masalah Ketenagakerjaan	Luar Daerah, Provinsi, Pangkal Pinang			Jumlah rapat LKS tripartit dan pembahasan masalah ketenagakerjaan 4 Kali rapat	4 Kali rapat	110.000.000	225.000.000	
			Peningkatan fungsi DP, Pembahasan UMP, UMK/UMSK dan Sosialisasi UMP	Luar Daerah, Provinsi, Pangkal Pinang			Jumlah Rapat Pembahasan Upah Minimum Provinsi 4 Kali rapat	4 Kali rapat	155.000.000	225.000.000	
			Perlindungan Tenaga Kerja	Provinsi, Luar Daerah, Bangka Tengah, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan			Jumlah peralatan yang diperiksa uji kelayakannya 50 alat yang di uji Jumlah perusahaan yang melaksanakan wajib lapor ketenagakerjaan 100 perusahaan	50 alat yang di uji 100 perusahaan	84.910.000	150.000.000	
			Program Pengembangan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja		persentase pencari kerja yang di tempatkan; Persentase peningkatan tenaga kerja pariwisata bersertifikat kompetensi; Persentase peningkatan tenaga kerja sektor pertambangan Timah bersertifikat kompetensi; Pertumbuhan pendapatan asli daerah dari tenaga kerja Asing; Persentase peningkatan tenaga kerja pertanian bersertifikat kompetensi; Persentase peningkatan tenaga kerja kelautan dan perikanan bersertifikat kompetensi; Pesentase lansia potensial yang mendapatkan pelatihan ketenagakerjaan; Persentase wanita Tuna sosial yang mendapatkan pelatihan tenaga kerja; Persentase penyandang disabilitas yang mendapatkan pelatihan keterampilan tenaga kerja; Persentase Exs korban Napza yang mendapatkan	17,14 %; 17,5 %; 17,54 %; 4.000.000.000 Rp.; 17,54 %; 17,54 %; 0,28 %; 8,62 %; 0,78 %; 10,64 %					DINAS TENAGA KERJA

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					pelatihan ketenagakerjaan						
			Pelatihan Pariwisata dan Otomotif Bagi Lulusan SMK						6.500.000.000	-	
			Bimtek Penerapan tata kelola lembaga pelatihan kerja	Luar Daerah, Provinsi, Pangkal Pinang			Jumlah LPK yang mampu mencapai kompetensi sesuai standar yang berlaku 25 Orang	25 Orang	125.000.000	115.000.000	
			Pembinaan dan Pengendalian TKA	Luar Daerah, Provinsi, Bangka, Bangka Selatan, Bangka Barat, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur			Jumlah pembinaan terhadap perusahaan pengguna TKA 50 Perusahaan	50 Perusahaan	100.000.000	100.000.000	
			Program Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja		Persentase peningkatan produksi per tenaga kerja sektor pertanian Lada, karet dan sapi; Persentase peningkatan produksi per tenaga kerja sektor Perikanan; Persentase peningkatan produksi per tenaga kerja bidang pariwisata; Persentase peningkatan produksi per tenaga kerja sektor pertambangan Timah; persentase pertumbuhan produktifitas tenaga kerja sektor perikanan	0,02 %; 0,12 %; 0,05 %; 0,05 %; 0,12 %					DINAS TENAGA KERJA
			Pengembangan Kompetensi SDM di Desa Produktif	Provinsi, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah			jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan peningkatan produksi sektor Pariwisata 50 oran jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan peningkatan produksi sektor pertambangan Timah 30 orang	50 oran 30 orang 30 orang 30 orang	250.000.000	250.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
							jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan peningkatan produksi sektor perkebunan 30 orang jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan peningkatan produksi sektor perikanan 30 orang					
			pelayanan dan peningkatan produktivitas	Provinsi, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang			jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan peningkatan produktifitas 40 Tenaga kerja	40 Tenaga kerja	150.000.000	190.000.000		
	PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT	Menurunnya angka Pengangguran	<b>Program Peningkatan Pelayanan Teknis Hygienis Perusahaan dan Kesehatan Kerja</b>		persentase perusahaan yang menerapkan norma kesehatan kerja	2,73 %					DINAS TENAGA KERJA	
			Pengujian Lingkungan Kerja	Provinsi, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang			Jumlah alat yang dikalibrasi 92 alat jumlah perusahaan yang dilakukan pengujian lingkungan kerja 10 perusahaan	92 alat 10 perusahaan	153.400.000	163.400.000		
			<b>Program Peningkatan Pelayanan Teknis Latihan Kerja Industri</b>		FALSE	FALSE					DINAS TENAGA KERJA	
			Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja di Kabupaten/ Kota	, Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang()			Jumlah Pencari kerja bidang pertanian lada, karet dan sapi yang mendapat pelatihan 32 orang	32 orang	1.224.500.000	-		
			<b>Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>									
	PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN AGROPOLITAN	Meningkatnya produksi sub sektor pertanian, peternakan dan jasa perkebunan	<b>Program Peningkatan Pembinaan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi</b>		persentase pertumbuhan koperasi aktif; persentase pertumbuhan kelembagaan koperasi ; persentase peningkatan koperasi berkualitas	15,5 %; 12,7 %; 6,6 %					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan Kelembagaan dan Perizinan Koperasi	Luar Daerah, SKPD, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat			Sosialisasi kepada kelompok strategis 80 orangRapat koordinasi Nasional dan rakor penguatan kelembagaan koperasi 2.080 orangPeningkatan pemahaman nilai-nilai dan prinsip perkoperasian 35 koperasipembuatan akta notaris untuk koperasi 14 akta Terlaksananya peningkatan kualitas dan kuantitas Rapat Anggota Tahunan (RAT) 40 koperasi	80 orang2.080 orang35 koperasi14 akta 40 koperasi	2.047.000.000	1.395.000.000	
			Peningkatan Partisipasi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan Perkoperasian	Luar Daerah, SKPD, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat			Tersedianya peraturan internal perkoperasianpada koperasi provinsi 35 ART dan Persus Penerapan buku wajib perkoperasian 35 Koperasi Terlaksananya rapat koordinasi evaluasi penerapan ART dan Persus 35 Koperasi	35 ART dan Persus 35 Koperasi 35 Koperasi	400.000.000	715.000.000	
			Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan Koperasi	Luar Daerah, SKPD, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah			Terpilihnya koperasi berprestasi tingkat provinsi 3 Koperasi Terlaksananya penilaian kesehatan koperasi 60 Koperasi Terpilihnya Tokoh penggerak koperasi 2 Tokoh Terlaksananya bimtek penilaian kesehatan koperasi 35 orang	3 Koperasi 60 Koperasi 2 Tokoh 35 orang	400.000.000	1.005.000.000	
			Program Peningkatan Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi		persentase peningkatan volume usaha koperasi; persentase peningkatan investasi koperasi sektor kelautan dan perikanan; persentase peningkatan investasi koperasi sektor pariwisata	10 %; 4 %; 7 %					



No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pendampingan Pemasaran, Kemitraan, Permodalan dan Jaringan Usaha	Luar Daerah, SKPD, Bangka Tengah, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan			Pengembangan usaha koperasi produktif 7 koperasi Pengembangan Jaringan pemasaran produk 5 koperasi Koperasi yang melakukan kemitraan 7 MoU Pendampingan akses pembiayaan koperasi 35 koperasi	7 koperasi 5 koperasi 7 MoU 35 koperasi	1.200.000.000	1.495.000.000	
			Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi	SKPD, Bangka Tengah, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan			Bimbingan Teknis mengenai SPI 90 Pengurus/Pengawas koperasi Koperasi yang mengikuti pola pengembangan usaha 35 koperasi Jumlah pengurus koperasi yang mengikuti bimtek koperasi komoditi kelautan 35 Pengurus koperasi Jumlah pengurus koperasi yang mengikuti bimtek koperasi komoditi pertanian 35 Pengurus koperasi	90 Pengurus/Pengawas koperasi 35 koperasi 35 Pengurus koperasi 35 Pengurus koperasi	750.000.000	1.046.000.000	
			Peningkatan Kualitas SDM Koperasi	Luar Daerah, SKPD, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat			Penyediaan Tenaga Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) 13 PPKLPemasyarakatan kewirausahaan koperasi 100 orangPembinaan Perkoperasian 135 Pembina Koperasi/PPKL	13 PPKL100 orang135 Pembina Koperasi/PPKL	1.000.000.000	955.000.000	
			Program Peningkatan Pemberdayaan Usaha Kecil		persentase pertumbuhan volume usaha pelaku usaha kecil; persentase pertumbuhan pelaku usaha kecil; persentase pertumbuhan produk usaha kecil yang dikembangkan; pertumbuhan produk usaha kecil yang tersertifikasi	10 %; 15 %; 4 %; 540 %					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pendampingan dan Promosi Usaha Kecil	Luar Daerah, SKPD, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka			Pendampingan akses permodalan 60 pelaku usaha Pendampingan perizinan 2.500 IUMK Akses promosi dan pemasaran produk melalui pameran 30 pelaku usaha	60 pelaku usaha 2.500 IUMK 30 pelaku usaha	1.688.000.000	1.785.600.000	
			Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil	Luar Daerah, SKPD, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang			Rapat Forum Koordinasi Pemberdayaan Usaha Kecil 1 rakorPeraturan Gubernur tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Kecil 1 pergubKerjasama pelaku usaha antar daerah 1 kesepakatan kerja samaGelar Produk Halal 1 kaliDiseminasi dan fasilitasi sertifikasi halal 1.000 sertifikat halalData Usaha Kecil 1 Dokumen	1 rakor1 pergub1 kesepakatan kerja sama1 kali1.000 sertifikat halal1 Dokumen	4.274.000.000	6.150.000.000	
			Peningkatan kualitas kewirausahaan	Luar Daerah, SKPD, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang			Jumlah pelaku kewirausahaan baru 100 pelaku usaha Jumlah pelaku usaha berprestasi tingkat provinsi 10 pelaku usaha kecil	100 pelaku usaha 10 pelaku usaha kecil	350.000.000	720.000.000	
			Program Peningkatan Pelayanan Teknis Latihan Perkoperasian, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah		persentase SDM koperasi terlatih ; persentase SDM Usaha Kecil terlatih	10,32 %; 1,07 %					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
			Peningkatan fungsi pelayanan pemerintah pada pelatihan koperasi dan UMKM	SKPD			persentase aparatur yang terlayani selama 12 bulan 100 %	100%	700.000.000	900.000.000	
			Penyelenggaraan Pelatihan Perkoperasian dan UKM	SKPD			Jumlah kurikulum dan silabus pelatihan perkoperasian dan kewirausahaan yang disusun 5 kurikulumPenerapan Sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 24 SOPJumlah sertifikat ISO 9001:2015 1 sertifikatJumlah SDM koperasi terlatih 150	5 kurikulum24 SOP1 sertifikat150 orang630 orang2 dokumen	3.000.000.000	3.000.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							orangJumlah SDM UKM terlatih 630 orangJumlah kajian mutu pelatihan koperasi dan kewirausahaan 2 dokumen				
	PENGEMBANGAN PARIWISATA	Meningkatnya pengembangan pembangunan pariwisata	Program Peningkatan Pusat Layanan Usaha Terpadu KUMKM		Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pusat Layanaan Usaha Terpadu PLUT KUMKM; Pertumbuhan produk parekraf	0 %; 10 %					DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
			Peningkatan Layanan Usaha Terpadu	Luar Daerah, SKPD, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan			Pendampingan inovasi produk 21 produk Pendampingan terhadap pelaku usaha 70 pelaku usaha Pembentukan kelembagaan sentra usaha 7 sentra usaha Klinik usaha terpadu 2.000 pelaku usaha	21 produk 70 pelaku usaha 7 sentra usaha 2.000 pelaku usaha	1.000.000.000	1.585.000.000	
			Penanaman Modal								
	PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN AGROPOLITAN	Meningkatnya produksi sub sektor pertanian, peternakan dan jasa perkebunan	Program Peningkatan Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal		Pertambahan jumlah UMK pertanian yang bermitra dengan investor; Pertambahan jumlah profil investasi sektor pertanian yang digunakan untuk promosi investasi daerah di sektor pertanian; Pertambahan jumlah profil investasi sektor kelautan dan perikanan yang digunakan untuk promosi investasi daerah di sektor kelautan dan perikanan; Pertambahan jumlah UMK kelautan dan perikanan yang bermitra dengan investor; Pertambahan jumlah profil investasi sektor pariwisata yang digunakan untuk promosi investasi daerah di sektor ; Pertambahan jumlah UMK pariwisata yang bermitra	1 UMK sektor pertanian; 0 profil sektor pertanian; 5 Profil sektor kelautan dan perikanan; 1 UMK sektor kelautan dan perikanan; 0 Profil sektor pariwisata; 1 UMK sektor pariwisata; 0 profil sektor sumber daya mineral; 0 UMK sektor sumber daya mineral					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					dengan investor; Pertambahan jumlah profil investasi sektor sumber daya mineral yang digunakan untuk promosi investasi daerah di sektor sumber daya mineral; Pertambahan jumlah UMK sumber daya mineral yang bermitra dengan investor						
			Studi Kelayakan Potensi Investasi	Bangka, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung			Jumlah Kajian Potensi Investasi Sektotr Potensi 1 Kajian	1 Kajian	400.000.000	425.000.000	
			Forum komunikasi pemberdayaan usaha daerah	Provinsi, Bangka Barat, Bangka, Pangkal Pinang, Belitung Timur, Belitung, Bangka Tengah, Bangka Selatan			Jumlah peserta forum komunikasi 40 Peserta	40 Peserta	100.000.000	110.000.000	
			Pemutakhiran Data Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah (SIPID)	Bangka, Bangka Barat, Pangkal Pinang, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur			Jumlah pengelola data SIPID yang terlatih 50 Orang	50 Orang	100.000.000	150.000.000	
			Pelaksanaan matchmaking daerah	Luar Daerah			Jumlah UMK potensial dan PMA/PMDN yang melaksanakan kemitraan usaha 2 UMK	2 UMK	625.000.000	450.000.000	
			Workshop Pengembangan usaha daerah	Pangkal Pinang, Belitung			Jumlah pelaksanaan workshop 2 Kali	2 Kali	250.000.000	250.000.000	
			Rapat koordinasi perencanaan dan pelaksanaan penanaman modal daerah (RKPPMD)	Provinsi, Pangkal Pinang			Jumlah peserta yang mengikuti rapat koordinasi 40 Peserta	40 Peserta	100.000.000	150.000.000	
			<b>Program Peningkatan Promosi Penanaman Modal</b>			Pertambahan Jumlah investor Sektor kelautan dan perikanan; Pertambahan Jumlah investor Sektor Pertanian; Pertambahan Jumlah investor Sektor Periwisata; Pertambahan Jumlah investor Sektor sumber	2 investor Sektor kelautan dan perikanan; 3 investor sektor pertanian; 3 investor Sektor Periwisata; 3 investor Sektor sumber daya mineral				

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					daya mineral						
			Penyelenggaraan Pameran Investasi	Luar Daerah			Jumlah pameran investasi 5 Pameran	5 Pameran	880.000.000	1.150.000.000	
			Peningkatan pelayanan peluang investasi	Pangkal Pinang			Jumlah calon investor yang difasilitasi 7 Calon investor	7 Calon investor	125.000.000	150.000.000	
			Pembuatan Bahan Promosi	Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Pangkal Pinang, Belitung, Belitung Timur			Jumlah sektor bahan promosi 4 sektor bahan promosi	4 sektor bahan promosi	200.000.000	235.000.000	
			Business Gathering Investment	Luar Daerah			jumlah sektor investasi 2 Sektor	2 Sektor	250.000.000	-	
			Promosi Investasi melalui Media Massa	Provinsi, Pangkal Pinang			Jumlah media massa untuk informasi investasi 2 Media	2 Media	75.000.000	235.000.000	
			<b>Program Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi</b>		Presentase perusahaan sektor kelautan dan perikanan yang sesuai realisasi investasi dengan rencana investasi; Presentase perusahaan sektor pertanian yang sesuai realisasi investasi dengan rencana investasi; Presentase perusahaan sektor pariwisata yang sesuai realisasi investasi dengan rencana investasi; Presentase perusahaan sektor sumber daya mineral yang sesuai realisasi investasi dengan rencana investasi	0,44 %; 0,44 %; 0,44 %; 0,44 %					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			Penyusunan Profil Perusahaan Penanaman Modal secara Elektronik yang Tervalidasi	Pangkal Pinang			Persentase Profil Perusahaan yang tervalidasi 17,89 Persen	17,89 Persen	200.000.000	242.000.000	
			Sosialisasi peraturan terkait Penanaman Modal	Provinsi, Pangkal Pinang			Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi 40 Peserta	40 Peserta	90.000.000	-	
			Workshop laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) Online	Pangkal Pinang			Jumlah peserta yang mengikuti workshop LKPM 50 Perusahaan	50 Perusahaan	100.000.000	120.000.000	
		Pemantauan pelaksanaan ketentuan penanaman modal	Provinsi, Belitung, Pangkal Pinang,			Nilai realisasi PMA/PMDN 985 Milyar	985 Milyar	485.000.000	540.000.000		

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Belitung Timur, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah							
			Penyusunan Dokumen Laporan Kegiatan Penanaman Modal	Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Bangka, Bangka Barat, Pangkal Pinang, Bangka Selatan			Jumlah Perusahaan yang melaporkan data LKPM 60 Perusahaan	60 Perusahaan	125.000.000	172.192.452	
	PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT	Menurunnya angka Pengangguran	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu		Persentase ketepatan waktu penerbitan perizinan sumber daya mineral; Rata-rata ketepatan waktu penyelesaian perijinan	79 %; 0					DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			Rakor Forum PTSP se-Provinsi kepulauan bangka Belitung	Pangkal Pinang			Jumlah pelaksanaan rakor forum ptsp 1 kali	1 kali	213.265.000	400.000.000	
			Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat			Jumlah izin yang diterbitkan 1.100 Izin	1.100 Izin	1.310.000.000	1.370.000.000	
			Penyusunan standar operasional prosedur (SOP) pelayanan perizinan penanaman modal	Pangkal Pinang			Jumlah buku penyusunan standar operasional prosedur (SOP) pelayanan perizinan penanaman modal 50 Buku	50 Buku	50.000.000	-	
			Kebudayaan								
	PENGEMBANGAN PARIWISATA	Meningkatnya pengembangan pembangunan pariwisata	Program Pelestarian Budaya		Budaya lokal yang dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan dan dibina	18 %					DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
			Muntok Heritage						400.000.000	-	
			Kajian Tradisi Bangka Belitung	Luar Daerah, Provinsi, Belitung, Bangka			Jumlah naskah kajian tradisi 2 kajian	2 kajian	150.000.000	200.000.000	
			Pengelolaan cagar budaya	Provinsi, Luar Daerah, Bangka, Pangkal Pinang, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah,			Jumlah pembinaan tim ahli dan pengelolaan cagar budaya 1 Cagar budaya	1 Cagar budaya	122.200.000	350.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Belitung, Belitung Timur							
			Pendokumentasian dan publikasi koleksi museum daerah	Provinsi, Luar Daerah, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Belitung, Belitung Timur			Jumlah cetakan dan digitalisasi publikasi koleksi museum daerah 10 buah	10 buah	125.000.000	196.568.000	
			Registrasi cagar budaya Bangka Belitung	Luar Daerah, Provinsi, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Pangkal Pinang			Jumlah cagar budaya yang teregistrasi 50 Cagar budaya	50 Cagar budaya	111.834.000	117.426.000	
			Penyelenggaraan Festival Kesenian Daerah	Luar Daerah, Provinsi			Jumlah Festival yang diselenggarakan 1 event	1 event	282.500.000	716.625.000	
			Penulisan Sejarah Bangka Belitung	Luar Daerah, Provinsi, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Belitung, Bangka			Jumlah Naskah Sejarah Bangka Belitung 1 kajian	1 kajian	222.737.500	233.874.000	
			Pentas seni budaya	Provinsi, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Pangkal Pinang, Belitung Timur, Bangka, Bangka Barat			jumlah sanggar yang dipentaskan 115 pentas/event	115 pentas/event	965.000.000	1.296.882.000	
			Pembinaan drum band serumpun sebalai	Provinsi			Jumlah personil drum band yang dibina 60 Orang	60 Orang	250.000.000	471.841.000	
			Pendokumentasian Sejarah dan Tradisi Bangka Belitung	Provinsi			Jumlah buku sejarah dan tradisi Bangka Belitung yang tersusun 250 buku/poster/sketsa	250 buku/poster/sketsa	-	121.340.000	
			Partisipasi dan Penghargaan serta kerjasama di bidang budaya	Provinsi, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Pangkal Pinang, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur			Jumlah penggiat budaya 38 anugerah budaya/dukungan event budaya/lembaga adat/dewan kesenian/kominitas budaya	38 anugerah budaya/dukungan event budaya/lembaga adat/dewan kesenian/kominitas budaya	1.876.720.000	2.089.849.000	
			Gita bahana dan Aubade Kemerdekaan RI	Provinsi, Luar Daerah			Jumlah peserta gita bahana dan aubade 300 orang	300 orang	400.000.000	458.794.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Festival Budaya Melayu	Luar Daerah, Provinsi, Bangka			Jumlah Festival Budaya yang diselenggarakan 1 Festival/event	1 Festival/event	997.500.000	1.047.375.000		
		Kepemudaan dan Olahraga										
			Program Peningkatan Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda		Pertumbuhan Kunjungan Pemuda Lintas Negara; Persentase Pemuda Berprestasi yang dibina; Persentase Dokumen Kepemudaan yang Tersusun; Persentase Pemuda yang Bekerja; Persentase Insan Kepemudaan yang Berprestasi dan Berdedikasi yang Menerima Bantuan	0 %; 0 %; 0 %; 0 %; 0 %					DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
			Pemberdayaan Peran serta Pemuda	Luar Daerah, Provinsi			Jumlah pemuda yang mengikuti pemberdayaan peran serta pemuda 80 Pemuda	80 Pemuda	145.000.000	432.272.500		
			Pemberdayaan Pemuda Lintas Negara	Provinsi			Jumlah pemuda yang pemuda yang mengikuti pemberdayaan pemuda lintas negara 32 Pemuda	32 Pemuda	300.000.000	502.150.000		
			Pengiriman dan Pemberian Penghargaan bagi Pemuda yang Berdedikasi dan Berprestasi	Luar Daerah, Provinsi			Jumlah pemuda berdedikasi dan berprestasi yang menerima bantuan dan penghargaan 10 Pemuda	10 Pemuda	50.000.000	121.000.000		
			Pengembangan, Pembinaan dan Pelatihan Generasi Pemuda	Luar Daerah, Provinsi			Jumlah pemuda yang Mengikuti pengembangan, pembinaan dan pelatihan generasi pemuda 240 Pemuda	240 Pemuda	2.500.000.000	3.707.654.140		
			Pengembangan dan Penumbuhan Kewirausahaan Pemuda	Luar Daerah, Provinsi			Jumlah pemuda yang mengikuti pengembangan dan penumbuhan kewirausahaan pemuda 100 Pemuda	100 Pemuda	210.000.000	363.931.828		
			Program Peningkatan Pembudayaan dan Peningkatan Prestasi Olah Raga		Persentase Peserta yang Mengikuti Olahraga Rekreasi dan Tradisional ; Persentase Sumber Daya Tenaga Keolahragaan; Persentase Pelajar Penyandang Disabilitas yang di bina dalam Bidang Keolahragaan;	0 %; 0 %; 0 %; 0 %; 2 %; 0 %; 0 %					DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	



No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Pertumbuhan Event Olahraga Tingkat Regional, Nasional dan International; Persentase Insan Olahraga yang Berprestasi dan Berdedikasi yang menerima Bantuan; Persentase Atlet Berprestasi yang dibina di Tingkat Provinsi yang Memperoleh Medali; Persentase Lansia yang Mengikuti Olahraga Khusus Lansia						
			Pembibitan, Pembinaan dan Pelatihan Olahragawan Berbakat pada Sentra Keolahragaan dan Klub Olahraga	Provinsi			Jumlah atlet yang berprestasi yang di latih dan di bina 48 Atlet	48 Atlet	1.500.000.000	1.345.139.153	
			Pembudayaan dan Pemassalan Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Olahraga Layanan Khusus	Luar Daerah, Provinsi			Jumlah peserta lansia yang mengikuti olahraga khusus lansia 70 Peserta Jumlah peserta yang mengikuti pembudayaan dan pemassalan olahraga 60 Peserta	70 Peserta 60 Peserta	400.000.000	515.504.246	
			Bangka Belitung Sport Tourism	Provinsi, Luar Daerah			Jumlah peserta yang mengikuti Bangka Belitung sport tourism 1.000 Peserta	1.000 Peserta	2.285.000.000	605.000.000	
			Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	Luar Daerah, Provinsi			Jumlah atlet berprestasi yang mengikuti kejuaraan 142 Atlet	142 Atlet	2.750.000.000	1.905.573.733	
			Peningkatan Kemampuan Atlet Berprestasi	Provinsi			Jumlah atlet yang mengikuti Training Camp (TC) dan Try Out 105 Atlet. Jumlah atlet pelajar penyandang Disabilitas yang mengikuti Training Camp (TC) dan Try Out 18 Atlet	105 Atlet 18 Atlet	850.000.000	1.811.045.539	
			Pengiriman Kontingen yang Berprestasi	Luar Daerah			Jumlah medali yang diperoleh atlet berprestasi 8 Medali Jumlah medali yang diperoleh atlet Disabilitas yang berprestasi 2 Medali	8 Medali 2 Medali	2.000.000.000	2.081.524.177	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Pengembangan Standarisasi Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga		Persentase Ketersediaan Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan	15 %					DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
			Pengadaan Sarana Kepemudaan dan Olahraga	Provinsi			Jumlah pengadaan sarana kepemudaan 2 Sarana Jumlah pengadaan sarana kepemudaan 1 Sarana	2 Sarana 1 Sarana	1.219.400.000	1.000.000.000	
			Jasa Konsultansi dan Kontruksi Prasarana Kepemudaan dan Olahraga	Provinsi			Jumlah dokumen prasarana kepemudaan dan olahraga 2 dokumen	2 dokumen	905.362.500	5.000.000.000	
			Revitalisasi dan Rehabilitasi Prasarana Kepemudaan dan Olahraga	Bangka Tengah			Jumlah prasarana Olahraga yang direvitalisasi dan direhabilitasi 1 Prasarana Jumlah prasarana Kepemudaan yang direvitalisasi dan direhabilitasi 1 Prasarana	1 Prasarana 1 Prasarana	400.000.000	2.120.000.000	
			Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi Kepemudaan dan Olahraga Standar Nasional	Luar Daerah, Provinsi			Jumlah prasarana yang dilakukan penilaian 1 Laporan	1 Laporan	125.237.500	200.000.000	
			Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat								
	PEMBANGUNAAN DEMOKRASI	Peningkatan Pembangunan Demokrasi	Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat		Persentase penindakan pelanggaran tibumtranmas	100 %					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Provinsi, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat			Jumlah bulan penyelenggaraan tibumtranmas Satpol PP (penertiban, pengamanan dan pengawalan 12 bulan	12 bulan	2.287.500.000	2.287.500.000	
			Pengamanan aset	Provinsi			Jumlah aset rumah dan kantor yang dijaga 8 unit	8 unit	-	-	
			Patroli	Provinsi, Pangkal Pinang			Jumlah patroli 1.080 kali	1.080 kali	265.000.000	280.000.000	
			Gelar pasukan dalam rangka peningkatan penyelenggaraan Tibumtranmas & Linmas serta kesiapsiagaan Tim Pemadam Kebakaran	Provinsi, Pangkal Pinang			Jumlah peserta gelar pasukan 600 orang	600 orang	131.297.200	149.297.500	
			Penyelenggaraan Deteksi Dini Pelanggaran Tibumtranmas	Provinsi			Jumlah deteksi dini pelanggaran tibumtranmas 12 kali	12 kali	100.000.000	100.000.000	
				Program Pembinaan dan Pengembangan Personil Satuan Polisi Pamong		Persentase pembinaan dan pengembangan personil Satpol PP	16,23 %				

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Praja								
			Pembinaan peningkatan personil bagi Satuan Polisi Pamong Praja	Provinsi, Pangkal Pinang			Jumlah peserta yang mengikuti diklat, bimtek, pelatihan dan pembinaan 740 orang kali	740 orang kali	-	200.000.000	
			Pendidikan dan pelatihan dasar polisi pamong praja	Provinsi, Pangkal Pinang			Jumlah peserta diklat dasar pol pp 30 orang	30 orang	214.796.000	500.000.000	
			Uji kompetensi jabatan fungsional polisi pamong praja	Provinsi, Pangkal Pinang			Jumlah peserta uji kompetensi 50 orang	50 orang	-	-	
			Pendidikan dan pelatihan pemadam kebakaran bagi satpol pp	Pangkal Pinang			Jumlah peserta Satpol PP yang memiliki kemampuan pemadam kebakaran 100 orang	100 orang	210.000.000	350.000.000	
			Pengiriman Peserta Bimtek dan Diklat Peningkatan Kompetensi Aparatur	Luar Daerah, Provinsi			Jumlah peserta yang mengikuti diklat, bimtek, pelatihan dan pembinaan 25 orang	25 orang	-	157.903.500	
			Pembinaan jabatan fungsional polisi pamong praja	Pangkal Pinang			Jumlah pejabat fungsional yang dibina 50 orang	50 orang	150.000.000	150.000.000	
			Bimtek peningkatan kapasitas anggota satpol pp dalam menciptakan tibumtranmas, stabilitas politik, penegakan perda dan perkara	Pangkal Pinang			Jumla peserta yang memiliki kapasitas dalam menciptakan tibumtranmas, stabilitas politik, penegakan perda dan perkara 100 orang	100 orang	-	-	
			Program Penegakan Perda dan Perkada		Cakupan penegakan perda	100 %					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Pembinaan dan penindakan non yustisial terhadap pelanggar Perda dan Perkada	Provinsi, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat			Jumlah warga, aparat, badan hukum yang ditindak secara non yustisial 352 orang	352 orang	261.811.500	261.811.500	
			Penindakan yustisial terhadap pelanggar perda dan perkara	Provinsi, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat			Jumlah penyidikan (pemberkasas) 5 penyidikan Jumlah penyelidikan 20 penyidikan	5 penyidikan 20 penyelidikan	261.811.000	141.657.000	
			Pemberdayaan peran dan tugas PTI (Petugas Tindak Internal) Satpol PP Prov. Babel	Pangkal Pinang			Jumlah anggota yang melanggar disiplin dan ditindak 10 Orang	10 Orang	41.115.000	41.115.000	
		Penatakelolaan Sekretariat PPNS Prov. Kep. Babel	Provinsi, Pangkal Pinang			Jumlah koordinasi penyidikan, pemeriksaan,	10 kali kegiatan rapat	41.120.000	41.120.000		

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							dan penertiban Satpol PP 10 kali kegiatan rapat				
			Bimtek Pemberkasan PPNS Penegak Perda Se-Provinsi Kep. Babel	Pangkal Pinang			Jumlah PPNS yang mengikuti kegiatan 40 orang PPNS	40 orang PPNS	-	-	
			Rapat Koordinasi Satpol PP se-Provinsi Kep. Babel dengan PPNS di lingkungan Pemprov Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi			Jumlah peserta Rapat koordinasi Satpol PP dengan PPNS 30 orang	30 orang	58.367.000	58.367.000	
			<b>Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat</b>		Presentase peningkatan kualitas Linmas dalam penyelenggaraan kantrantibnas; Presentase peningkatan kualitas Linmas dalam penanggulangan bencana dan kebakaran	5,74 %; 6,05 %					SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Simulasi akbar pemadam kebakaran	Provinsi, Pangkal Pinang			Jumlah simulasi pemadam kebakaran 1 kali	1 kali	-	129.166.000	
			Bimtek pengamanan pemilu dan pemilukada bagi satlinmas seprovinsi kepulauan Bangka Belitung	Pangkal Pinang			Jumlah peserta satlinmas yang mampu mengamankan Pemilu dan Pemilukada 100 orang satlinmas	100 orang satlinmas	192.076.000	-	
			Jambore satlinmas seprovinsi kepulauan Bangka Belitung	Pangkal Pinang			Jumlah peserta satlinmas dalam kegiatan jambore 198 orang satlinmas	198 orang satlinmas	-	-	
			Penyelenggaraan peningkatan kapasitas anggota satuan perlindungan masyarakat se provinsi kepulauan Bangka Belitung	Provinsi, Pangkal Pinang			Jumlah peserta satlinmas 60 orang satlinmas	60 orang satlinmas	227.529.000	337.529.000	
			Sosialisasi Peraturan pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang penyelenggaraan perlindungan masyarakat	Pangkal Pinang			Jumlah peserta sosialisasi peraturan terkait penyelenggaran perlindungan masyarakat 660 orang	660 orang	-	-	
			Pendidikan dan pelatihan bencana dan kebakaran bagi Satlinmas	Provinsi			Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan bencana dan kebakaran bagi satlinmas 200 orang	200 orang	220.000.000	386.293.000	
		Pengurangan resiko bencana dan kebakaran	Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat			Jumlah ketanggapan dalam membantu penguranga resiko bencana dan kebakaran 12 kaliJumlah dokumen peta daerah rawan kebakaran 1 Dokumen	12 kali1 Dokumen	302.370.000	302.370.000		

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pemetaan daerah rawan bencana dan kebakaran	Provinsi			Jumlah dokumen peta rawan bencana dan kebakaran 0 dokumen	0 dokumen	-	-	
			Program Penguatan Kewaspadaan Nasional		Tingkat Kerawanan Konflik Kabupaten/kota	9 %					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Penyelenggaraan penanganan Konflik sosial	Provinsi, Luar Daerah, SKPD, Pangkal Pinang, Bangka, Belitung, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung Timur			Peringkat pelaporan Konflik Sosial Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 5 Peringkat	5 Peringkat	325.000.000	720.000.000	
			Forum Komunikasi dan Koordinasi KOMINDA	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Belitung, Belitung Timur, Bangka, Pangkal Pinang, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah			Jumlah Laporan 2 Laporan	2 Laporan	270.000.000	320.000.000	
			Penguatan Kerjasama Intelijen Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pencegahan Konflik Sosial dan Aksi Terorisme di Bangka Belitung	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat			Jumlah Laporan 4 Laporan	4 Laporan	105.000.000	360.000.000	
			Penguatan kewaspadaan dan deteksi Dini serta serta pengawasan Orang Asing di Bangka Belitung	Provinsi, Luar Daerah, SKPD, Bangka Tengah, Belitung, Bangka, Belitung Timur, Bangka Barat, Pangkal Pinang, Bangka Selatan			Jumlah Laporan 4 Laporan	4 Laporan	50.000.000	125.000.000	
			Program Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan		persentase kasus terhadap simbol negara yg dapat diantisipasi; persentase kasus konflik sara yg dapat diantisipasi	0 %; 2 %					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Bangka, Pangkal Pinang,			Jumlah Rekomendasi 4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	204.000.000	224.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Bangka Barat, Bangka Selatan							
			Forum dialog penguatan ideologi bangsa (4 Konsensus Kebangsaan) dalam rangka mencegah budaya dan ideologi yang bertentangan dengan pancasila	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah Rekomendasi 1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	47.100.000	60.000.000	
			Peningkatan Kecintaan terhadap NKRI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang			Jumlah Partisipasi acara HUT RI 5.000 orang	5.000 orang	1.250.000.000	1.265.000.000	
			Gerakan Revolusi Mental di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Belitung, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka Barat, Bangka			Jumlah aksi yang dilaksanakan 3 Aksi	3 Aksi	330.000.000	363.000.000	
			Pembinaan Pusat Pendidikan Wawasan kebangsaan	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Pangkal Pinang, Belitung, Bangka, Bangka Barat, Belitung Timur			Jumlah Sekolah yang di Kunjungi 14 Sekolah	14 Sekolah	220.000.000	242.000.000	
			Pembentukan, Pendidikan dan Pelatihan Kader bela negara	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Pangkal Pinang, Namang			Jumlah Kader Bela Negara 44 Orang	44 Orang	129.205.200	135.000.000	
			Program Pembinaan Politik dalam Negeri		Pertumbuhan Cakupan Pembinaan Politik Daerah; persentase rekomendasi pengembangan berdemokrasi yg ditindak lanjuti	7 Jumlah; 50 %					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Penguatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi, Luar Daerah, SKPD, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka			Jumlah Rekomendasi 4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	242.000.000	265.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur							
			Peningkatan Kualitas Peran dan Fungsi Parpol dalam rangka Penguatan Leadership dan kaderisasi	Provinsi, Luar Daerah, SKPD, Pangkal Pinang			Jumlah Partai Politik dalam Penguatan Leadership dan Kaderisasi 15 Parpol	15 Parpol	77.000.000	85.000.000	
			Penyusunan Database Kelembagaan Politik Pemerintahan dan Parpol (KPPP)	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang			Data dan Informasi 10 Dokumen	10 Dokumen	93.000.000	102.000.000	
			Verifikasi Penyaluran Bantuan Keuangan Partai Politik	Provinsi, Luar Daerah, SKPD, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung			Jumlah Partai politik yang mendapatkan bantuan Keuangan 11 Parpol	11 Parpol	66.000.000	72.000.000	
			Workshop Pendidikan Etika dan Budaya Politik	Provinsi, Luar Daerah, SKPD, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka Barat			Jumlah Peserta yang mengerti etika dan budaya politik 280 Orang	280 Orang	250.000.000	330.000.000	
			Monitoring dan Pemantauan Perkembangan Situasi Politik di Daerah	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Pangkal Pinang, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Bangka, Belitung Timur, Bangka Barat			Jumlah Laporan 4 Laporan	4 Laporan	250.000.000	275.000.000	
			Sosialisasi Undang-Undang Mengenai Politik	Provinsi, Luar Daerah, SKPD, Bangka Selatan, Pangkal Pinang, Bangka Barat, Belitung Timur, Bangka, Belitung, Bangka Tengah			Jumlah Peserta yang Memahami Undang-Undang Mengenai Politik 500 Orang	500 Orang	510.000.000	254.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Rapat Koordinasi Kesiapan Pelaksanaan Pemilu/Pemilukada	Provinsi, Luar Daerah, SKPD, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat			Jumlah Rekomendasi 1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	200.000.000	240.000.000	
			Penguatan Kapasitas Kelembagaan/Institusi Demokrasi dalam Pembangunan Bidang Politik	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Pangkal Pinang			Jumlah Peserta yang memahami sistem dan implementasi IDI 100 Orang	100 Orang	154.000.000	85.000.000	
			<b>Program Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan</b>		Persentase Ormas/LSM dan OKP yang ikut serta dalam kegiatan Pembangunan; pertumbuhan masyarakat yg sadar bahaya napza; Persentase Jumlah sanggar/paguyuban yang melestarikan seni dan budaya	35 %; 500 Orang; 40 %					BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
			Evaluasi Data dan Informasi Lembaga Usaha Ekonomi serta Pemantauan Stabilitas Harga Sembako di Daerah	Provinsi, Luar Daerah, SKPD, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat			Jumlah Dokumen 4 Dokumen	4 Dokumen	261.428.200	270.000.000	
			Forum Komunikasi dan Kerjasama antar Umat Beragama	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Barat, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung			Jumlah rekomendasi 3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	100.671.800	121.000.000	
			Penyuluhan Pencegahan dan penanggulangan narkoba	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka, Belitung, Pangkal Pinang			Jumlah Peserta yang memahami Bahaya Narkotika 150 Orang	150 Orang	185.740.000	333.000.000	
			Workshop Optimalisasi peran Aparatur,Ormas dan Masyarakat dalam menjaga Seni dan Budaya	Provinsi, Luar Daerah, SKPD, Pangkal Pinang			Jumlah Peserta dalam menjaga seni dan budaya 90 Orang	90 Orang	61.285.000	70.000.000	
			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Ormas	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Pangkal Pinang			Jumlah Peserta yang Memahami Undang-Undang Ormas 90 Orang	90 Orang	61.735.000	84.000.000	



No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Evaluasi dan Verifikasi data ormas	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Belitung Timur, Bangka Barat, Pangkal Pinang, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Bangka			Jumlah Ormas dan Verifikasi Data Ormas 12 Ormas	12 Ormas	140.875.000	182.000.000		
		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah										
		Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Perekonomian		Prosentase Koordinasi Kebijakan Perekonomian	100 %						SEKRETARIAT DAERAH	
		Monitoring pengawasan supplay dan demand barang dan jasa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi, SKPD			Jumlah data Peredaran barang dan jasa 1 laporan	1 laporan	-	101.000.000			
		Monitoring dan Evaluasi Sistem Resi Gudang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah Laporan peningkatan sarana prasarana perekonomian yang Representative 1 Laporan	1 Laporan	125.000.000	125.000.000			
		Koordinasi,Monitoring dan Evaluasi UMKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			jumlah laporan pengendalian dan evaluasi Koperasi, UKM dan UMKM di Prov.Kep.Babel 1 Laporan	1 Laporan	125.000.000	100.000.000			
		Forum Pengembangan Ekonomi	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Belitung			Jumlah Rekomendasi data perkembangan ekonomi daerah 3 rekomendasi	3 rekomendasi	150.000.000	220.000.000			
		Koordinasi Pengawasan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Provinsi Kepulauan Bangka belitung	Provinsi, Luar Daerah, SKPD			Jumlah Rekomendasi Pengendalian Inflasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	200.000.000	320.000.000			
		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Koperasi dan UKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			jumlah laporan pengendalian dan evaluasi Koperasi, UKM dan UMKM di Prov.Kep.Babel 1 Laporan	1 Laporan	125.000.000	130.000.000			
		Monitoring,Evaluasi Promosi potensi daerah (EXPO) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi, Luar Daerah, SKPD, Belitung			Jumlah data potensi investasi 1 Laporan	1 Laporan	125.000.000	230.000.000			
		Monitoring dan Evaluasi Analisis Ekonomi Makro di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi, Luar Daerah, SKPD			Jumlah Rekomendasi Makro dan Mikro Ekonomi 2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	125.000.000	140.000.000			
			Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan		Prosentase Koordinasi Kebijakan Sumber Dava	100 %					SEKRETARIAT DAERAH	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			<b>Sumber Daya Alam</b>		Alam							
			Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Distribusi Bahan Bakar Minyak dan Gas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah laporan Distribusi Bahan Bakar Minyak dan Gas 1 Laporan	1 Laporan	125.000.000	162.500.000		
			Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Penataan serta Pengembangan Lahan Kritis di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi, Luar Daerah, SKPD			Jumlah Rekomendasi kebijakan kerjasama investasi pertambangan Timah dengan yang ditindaklanjuti 1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	125.000.000	100.125.000		
			Monitoring dan evaluasi Perizinan Analisis mengenai Dampak Llingkungan (Amdal) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah desa mandiri pangan yang terdata 1 Dokumen	1 Dokumen	125.000.000	104.000.000		
			Monitoring, Evaluasi dan Koordinasi Komoditi Pangan	Provinsi, SKPD, Belitung			Jumlah laporan komoditi pangan 1 Laporan	1 Laporan	125.000.000	150.000.000		
			Monitoring dan Evaluasi Tim Terpadu Penanganan masalah Penambangan Timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah Laporan Rekomendasi penanganan masalah pertambangan timah 2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	125.000.000	400.000.000		
			<b>Program Peningkatan Koordinasi Bumd, Penanaman Modal, Pariwisata dan Budaya</b>		Prosentase Koordinasi Kebijakan BUMD, Penanaman Modal, Pariwisata dan Budaya	100 %						SEKRETARIAT DAERAH
			Pemetaan Potensi Investasi Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi, Luar Daerah, SKPD			Jumlah perizinan yang terdata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 1 Laporan	1 Laporan	-	240.000.000		
			Pembentukan Bank Umum Syariah Bangka Belitung	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah kesepakatan bersama terbentuknya bank umum syariah Bangka Belitung 1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	300.000.000	200.000.000		
			Koordinasi Program CSR di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Belitung			Jumlah Rekomendasi/Kesepakatan Program CSR 3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	250.000.000	200.000.000		
			Monitoring dan Evaluasi Penyertaan Modal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah laporan Penyertaan Modal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 1 Berkas	1 Berkas	175.000.000	220.000.000		
			Penyusunan Kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata di Provinsi	Provinsi, SKPD			Jumlah data Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata 7 Dokumen	7 Dokumen	-	340.000.000		

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kepulauan Bangka Belitung								
			Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kajian dan Penyusunan Perlindungan Benda Cagar Budaya atau Benda diduga cagar budaya	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			jumlah BCB dan Benda diduga BCB yang dilindungi 1 Laporan	1 Laporan	125.000.000	340.000.000	
			Kajian Strategis Destinasi Wisata Baru di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Luar Daerah, Provinsi, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka			Jumlah laporan pengembangan Destinasi wisata baru 1 Laporan	1 Laporan	-	140.000.000	
			Rakor Teknis Tata Kelola BUMD di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah Dokumen tata laksana BUMD se-Provinsi Kep.Babel yang aktif 1 Berkas	1 Berkas	300.000.000	160.000.000	
			Penyusunan SOP BUMD di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah dokumen laporan 1 dokumen	1 dokumen	-	360.000.000	
			Program Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBN		Prosentase Realisasi Keuangan dan Realisasi Fisik Penyelenggaraan Dana APBN di Provinsi dan Kabupaten/Kota	80 %					SEKRETARIAT DAERAH
			Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Sistem e-Monev APBN	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Belitung Timur, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Pangkal Pinang, Bangka Tengah, Belitung			Jumlah Aplikasi e-Monev APBN 1 Aplikasi	1 Aplikasi	200.000.000	429.852.588	
			Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan yang bersumber dari APBN	Pangkal Pinang			Jumlah Laporan 2 Laporan	2 Laporan	200.000.000	280.444.479	
			Koordinasi Kebijakan APBN	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Belitung, Bangka Barat, Belitung Timur, Bangka Selatan, Pangkal Pinang, Bangka Tengah, Bangka			Draft Regulasi/Rekomendasi Evaluasi APBN 1 Dokumen	1 Dokumen	-	185.380.000	
			Program Pengembangan Risalah Rapat dan Kajian		Persentase peningkatan fungsi legislasi lembaga	80 %					SEKRETARIAT DPRD

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Produk Hukum Perundang-Undangan		DPRD dan alat kelengkapan lainnya						
			Rapat-rapat paripurna	SKPD			Jumlah rapat paripurna yang dilaksanakan (paripurna istimewa/biasa) 15 kali	15 kali	637.723.900	701.496.290	
			Pembahasan rancangan peraturan daerah dan produk hukum lainnya	Luar Daerah			Jumlah raperda dan produk hukum yang dibahas (Perda ) 20 Perda/produk hukum lainnya	20 Perda/produk hukum lainnya	20.255.190.000	23.380.709.000	
			Pembahasan anggaran pemerintah prov.kep.babel	SKPD			Dokumen nota/kesepakatan (dokumen/laporan) 4 laporan	4 laporan	415.800.000	457.380.000	
			Kunjungan kerja badan anggaran	Luar Daerah			Jumlah dokumen/laporan kegiatan Banggar 6 Dokumen/laporan	6 Dokumen/laporan	2.740.485.000	3.014.533.500	
			Kunjungan kerja badan legislasi/pembentukan perda	Luar Daerah			Jumlah dokumen/laporan kegiatan Bapemperda 6 dokumen/laporan	6 dokumen/laporan	2.119.733.770	2.331.707.147	
			Kunjungan kerja badan kehormatan	Luar Daerah			Jumlah dokumen/laporan kegiatan Badan Kehormatan 6 dokumen/laporan	6 dokumen/laporan	1.033.890.000	1.137.279.000	
			Reses	Provinsi, SKPD			Jumlah pokok-pokok pikiran DPRD bersumber dari aspirasi masyarakat (dokumen/laporan) 3 dokumen	3 dokumen	8.166.510.000	8.983.161.000	
			Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	Luar Daerah			Jumlah keikutsertaan pimpinan dan anggota DPRD pada diklat (anggota) 90 anggota	90 anggota	1.653.355.000	1.818.690.500	
			Rapat koordinasi asosiasi DPRD provinsi seluruh indonesia (ADPSI)	Luar Daerah			Jumlah rekomendasi / kesepakatan 3 kesepakatan	3 kesepakatan	585.475.000	644.022.500	
			Penyediaan tenaga ahli dan kegiatan akademik	SKPD			Jumlah tenaga ahli dan pakar hukum 9 tenaga ahli dan pakar hukum	9 tenaga ahli dan pakar hukum	802.329.000	882.561.900	
			Koordinasi dan konsultasi masalah hukum dan administrasi kesekretariatan	Luar Daerah, SKPD			Jumlah dokumen/laporan kegiatan koordinasi dan konsultasi (laporan) 5 laporan	5 laporan	220.000.000	242.000.000	
			Kunjungan kerja komisi	Luar Daerah, Provinsi			Jumlah dokumen/laporan kegiatan komisi (dokumen/laporan) 288 laporan	288 laporan	29.797.998.000	33.877.797.800	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kunjungan kerja badan musyawarah	Luar Daerah			Jumlah dokumen/laporan kegiatan Banmus 6 dokumen/laporan	6 dokumen/laporan	1.453.342.000	1.598.676.200	
			<b>Program Peningkatan Pelayanan Kerumahtanggaan, Kehumasan dan Protokol Dewan</b>		Persentase Kesesuaian antar informasi yang dipublikasikan dan layanan keprotokol dewan dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah ; Persentase ketersediaan sarana dan prasarana lembaga DPRD	95 %; 76 %					SEKRETARIAT DPRD
			Publikasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah publikasi fungsi kelembagaan 30 publikasi	30 publikasi	2.250.000.000	2.976.224.900	
			Peningkatan Sarana dan Prasarana DPRD dan Sekretariat	SKPD			Persentase pelaksanaan pekerjaan peningkatan sarana prasarana perkantoran 76 %	76%	4.530.152.000	4.983.167.200	
			<b>Program Pengawasan dan Pembinaan Pemerintahan dan Aparatur</b>		Prosentase tingkat capaian OPD dengan Laporan Kinerja BAIK	75 %					INSPEKTORAT DAERAH
			Penanganan Whistle Blower System	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah laporan pengaduan melalui WBS 12 Laporan	12 Laporan	105.000.000	135.000.000	
			Evaluasi Lakip dan EKPPD/LPPD Provinsi dan Kabupaten/Kota	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang			Peningkatan Nilai Sakip/LPPD 8 Lakip/LPPD PD	8 Lakip/LPPD PD	176.000.000	300.000.000	
			Penilaian Internal Zona Integritas	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka			Jumlah Unit Kerja Zona Integritas 4 Unit kerja	4 Unit kerja	200.000.000	250.000.000	
			Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung			Jumlah laporan penilaian mandiri reformasi birokrasi 4 Laporan	4 Laporan	227.500.000	363.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyusunan Laporan Tim Aksi PPK Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan			Jumlah laporan RAD PPK 4 Laporan	4 Laporan	82.000.000	140.000.000	
			Monev Laporan Gratifikasi	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah laporan gratifikasi 12 Laporan	12 Laporan	150.000.000	165.000.000	
			<b>Program Pengawasan dan Pembinaan Pegelolaan Keuangan dan Asset Daerah</b>		Prosentase jumlah rekomendasi temuan pemeriksaan APIP dan BPK yang selesai ditindaklanjuti; Prosentase jumlah pengembalian uang yang disetorkan ke kas daerah; Prosentase penyelesaian kasus pengaduan masyarakat	90 %; 94 %; 80 %					INSPEKTORAT DAERAH
			Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah obrik yang telah menyelesaikan tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi 150 Obrik	150 Obrik	-	472.500.000	
			Penyelesaian TPTGR oleh Majelis dan Sekretariat TPTGR Keuangan dan Barang Daerah	Provinsi, Luar Daerah, SKPD			Prosentase pengembalian uang yang disetor ke kas daerah 15 %	15%	420.000.000	611.100.000	
			Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang			Jumlah Perangkat Daerah yang diawasi 150 Obrik	150 Obrik	2.940.000.000	3.087.000.000	
			Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Daerah	Provinsi, SKPD, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka			Jumlah rekomendasi yang dihasilkan dari rakor 2 Rakor/1 PKPT	2 Rakor/1 PKPT	176.970.000	329.000.000	
			Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka			Jumlah evaluasi yang dilaksanakan 150 obrik	150 obrik	635.000.000	800.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Selatan, Bangka Tengah, Belitung							
			Sapu Bersih Pungutan Liar di Lingkungan Provinsi Kep. Bangka Belitung	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan			Jumlah laporan Tim Satgas Saber Pungli 2 Laporan	2 Laporan	300.000.000	417.000.000	
			Peningkatan Sistem Aplikasi Pengawasan	SKPD			Tingkat akurasi data hasil pengawasan 100 %	100%	100.000.000	178.957.000	
			Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka			Jumlah pengaduan kasus yang ditindaklanjuti 15 Laporan	15 Laporan	125.000.000	270.112.000	
			Bimbingan teknis E-LHKPN	SKPD					181.275.000	-	
			<b>Program Pengawasan dan Pembinaan Pembangunan, Sosial, Ekonomi dan Budaya</b>		Peningkatan capaian Level Kapabilitas APIP; Peningkatan Capaian Level Maturitas SPIP	3 level; 2 level					INSPEKTORAT DAERAH
			Pelaksanaan Diklat SPIP bagi Perangkat Daerah	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat			Jumlah pegawai yang mengikuti diklat 100 Peserta	100 Peserta	300.000.000	375.000.000	
			Monitoring/Pemantauan dan Evaluasi SPIP	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung			Jumlah monev SPIP 4 Kali	4 Kali	100.000.000	158.000.000	
			Sosialisasi SPIP	Provinsi, SKPD, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur,			Jumlah sosialisasi SPIP 4 kali sosialisasi dalam setahun	4 kali sosialisasi dalam setahun	-	165.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Pangkal Pinang							
			Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah peningkatan penerapan SPI Perangkat Daerah 42 Seluruh Perangkat Daerah Provinsi	42 Seluruh Perangkat Daerah Provinsi	262.500.000	275.625.000	
			Konsultasi Audit	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan			Jumlah konsultasi yang dilaksanakan 42 Perangkat Daerah Provinsi	42 Perangkat Daerah Provinsi	160.000.000	172.000.000	
			Program Peningkatan Informasi, Investasi dan Pelayanan Serta Hubungan antar Lembaga Penghubung Provinsi		Persentase Promosi, Informasi dan Hubungan Antar Lembaga serta Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Ibukota Jakarta	100 %					BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
			Penyelenggaraan Keprotokolan dan pelayanan tamu serta pimpinan daerah	Luar Daerah, SKPD			Jumlah Penyelenggaraan Keprotokolan di Jabodetabek 22 kali	22 kali	1.000.000.000	1.200.000.000	
			Kegiatan Pengembangan Seni dan Budaya daerah	Luar Daerah, SKPD			Meningkatnya Pelaksanaan Event Seni Budaya dan Kegiatan Penyusunan Informasi dan Promosi 100 %	100%	1.000.000.000	1.400.000.000	
			Kegiatan Expo dan Forum Serumpun Sebalai	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah Kegiatan Expo dan Forum Serumpun Sebalai 1 kali	1 kali	-	750.000.000	
			Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	Luar Daerah, SKPD			Jumlah Pendampingan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 12 Kali	12 Kali	316.333.000	350.000.000	
			Bimbingan Teknis Kehumasan dan Keprotokolan	Luar Daerah, SKPD			Terselenggaranya Kegiatan Bimbingan Teknis Kehumasan dan Keprotokolan 100 %	100%	-	350.000.000	
			Rapat Koordinasi Teknis dengan Provinsi Lainnya	Luar Daerah, SKPD			Terselenggaranya Kegiatan Rapat Koordinasi dengan Provinsi Lainnya 100 %	100%	-	180.000.000	
		Kerjasama Peliputan Kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah dengan Media Massa dan Elektronik	Luar Daerah, SKPD			Terlaksananya Peliputan Kegiatan dalam Rangka Kehumasan dan Keprotokolan melalui Media Massa dan	100%	200.000.000	250.000.000		



No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
							Elektronik 100 %					
			Dialog/Audiensi dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat	Luar Daerah, SKPD			Jumlah Kegiatan Dialog/Audiensi dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat 4 acara	4 acara	1.688.190.000	2.000.000.000		
			Pengadaan Pakaian Adat dan Barang - Barang Kebudayaan	Luar Daerah, SKPD			Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Pakaian Adat dan Barang - Barang Kebudayaan 100 %	100%	-	300.000.000		
			Penguatan Peran Hubungan Antar Lembaga dan organisasi kemasyarakatan perantauan	Luar Daerah, SKPD			Jumlah Kegiatan yang Terselenggara dalam Meningkatkan Peran Hubungan Antar Lembaga 1 Kali	1 Kali	-	300.000.000		
			Rehabilitasi Berat Anjungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Taman Mini	Luar Daerah, SKPD			Jumlah Anjungan yang di Rehabilitasi Berat 1 Anjungan	1 Anjungan	1.363.340.000	-		
			Pangan									
	PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT	Menurunnya angka Inflasi	Program Ketersediaan dan Kerawanan Pangan		Persentase Jumlah Penduduk Rawan Pangan yang difasilitasi; Capaian Skor PPH Ketersediaan	1,1 Orang; 90,5 Skor					DINAS PANGAN	
			Gerakan Pemenuhan Gizi 1000 hari kehidupan	Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur			Jumlah Orang yang mengikuti Kegiatan Gerakan Pemenuhan Gizi 320 orang	320 orang	250.000.000	300.000.000		
			Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat	Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung			Jumlah Dokumen Analisis Akses Pangan Masyarakat 1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000	250.000.000		
			Penyusunan Data Daerah Rawan Pangan	Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan			Dokumen Dokumen Data Desa Rawan Pangan 1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000	40.000.000		
			Koordinasi peningkatan produktivitas komoditi pangan	Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan,			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Peningkatan Produktifitas Komoditi Pangan 1 laporan	1 laporan	50.000.000	75.000.000		

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Bangka Tengah							
			Pengembangan Desa Mandiri Pangan	Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat			Jumlah Terbentuknya Desa Mandiri Pangan 8 Desa	8 Desa	500.000.000	550.000.000	
			Penguatan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan			Terlaksananya penyusunan Dokumen FSVA dan SKPG serta terlaksananya investigasi dan penanggulangan rawan pangan di wilayah kepulauan bangka belitung 1 Dokumen	1 Dokumen	175.000.000	175.000.000	
			Penanganan Daerah Rawan Pangan	Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat			Jumlah Orang yang Tertangani di Daerah Rawan Pangan 1.000 orang	1.000 orang	350.000.000	450.000.000	
			Penyusunan dan Pengkajian Dokumen Neraca Bahan Makanan	Provinsi			Jumlah Dokumen Analisis Ketersediaan Pangan 1 Dokumen	1 Dokumen	180.000.000	200.000.000	
			Pemberian penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara	Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat			Jumlah pelaksanaan Pemberian Penghargaan APN Tingkat Provinsi 1 kali	1 kali	100.000.000	125.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan Dewan Ketahanan Pangan	Provinsi			Jumlah Rekomendasi Tentang Peningkatan Ketahanan Pangan 1 Regulasi	1 Regulasi	100.000.000	175.000.000	
			Program Pengembangan Distribusi, Stabilisasi dan Cadangan Pangan		persentase Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah; Coefisien Varian Harga pangan pokok (beras); Coefisien Varian Harga Pangan Hortikultura (Cabe Merah); Coefisien Varian harga pangan hewani (Ayam)	2,6 persen; 5 Persen; 25 persen; 10 persen					DINAS PANGAN
			Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)	Bangka Selatan, Belitung Timur			Jumlah Gapoktan yang difasilitasi 5 GAPOKTAN	5 GAPOKTAN	300.000.000	350.000.000	
		Penyusunan Neraca Prognosa Pangan	SKPD			Jumlah Dokumen Neraca Prognosa Pangan 1	1 Dokumen	50.000.000	50.000.000		

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
							Dokumen					
			Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat	Provinsi, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat			Jumlah Pembinaan Kepada Lumbung Pangan Masyarakat 2 Kali	2 Kali	100.000.000	325.000.000		
			Pengendalian Distribusi Pangan	Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah			Jumlah Pengawasan Pemantauan Harga pangan Pokok di Tingkat Produsen, Konsumen dan pasokan di 6 Pelabuhan 4 Pengawasan	4 Pengawasan	170.000.000	200.000.000		
			Pengembangan Cadangan Pangan Provinsi	Provinsi, SKPD			Jumlah pengadaan Cadangan pangan Daerah Pemerintah 50 ton	50 ton	575.000.000	575.000.000		
			Database Harga dan Stock Pangan Tingkat Distributor	Provinsi, SKPD			Jumlah Dokumen Database Harga dan Stock Pangan Tingkat Distributor 1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	120.000.000		
			Pelatihan Peningkatan Mutu Hasil Gabah dan Beras	SKPD			Jumlah Pelaksanaan Pelatihan Untuk Kelompok Masyarakat 1 Angkatan	1 Angkatan	125.000.000	145.000.000		
			Penindakan Hukum Kasus Penyimpangan Pangan	Provinsi, SKPD, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah			Jumlah Kasus Penyimpangan Pangan yang ditangani (kasus) 1 Kasus	1 Kasus	75.000.000	80.000.000		
			Program Peningkatan Konsumsi Dan Keamanan Pangan			Peningkatan Skor PPH Konsumsi menjadi 92,50; Persentase Pangan yang aman dikonsumsi	89,7 Skor PPH; 83 Persen					DINAS PANGAN
			Promosi Konsumsi dan Keamanan Pangan termasuk gerakan makan sayur, buah dan ayam merawang (GEMA SABUK AMANG)	Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka Selatan				Event 3 Kali	3 Kali	225.000.000	300.000.000	
			Bimtek Peningkatan kualitas SDM di bidang pengawasan keamanan pangan	Provinsi				Jumlah Bimtek Keamanan Pangan 1 kali	1 kali	-	200.000.000	
			Pengadaan Mobil Lab Keliling Pengawasan Keamanan Pangan	SKPD				Jumlah Pengadaan Kendaraan Laboratorium Keliling 1 Unit	1 Unit	-	-	
			Penguatan Kerjasama dalam investigasi pengawasan	Bangka Tengah, Belitung, Belitung				jumlah pelaksanaan koordinasi dan	1 Tim jejaring keamanan pangan	130.000.000	250.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			penyelenggaraan keamananan pangan daerah (tim jejaring kemananan pangan)	Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan			pengawasan tim jejaring keamanan pangan 1 Tim jejaring keamanan pangan				
			Pemberdayaan lahan pekarangan masyarakat melalui program Kampung/Desa KRPL	Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang			Jumlah Kelompok Masyarakat dalam memanfaatkan lahan pekarangan 7 kelompok	7 kelompok	250.000.000	300.000.000	
			Pengembangan Usaha Pemanfaatan Lahan Pekarangan pada kelompok masyarakat	Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan			Jumlah Kelompok Masyarakat Pemanfaatan Pekarangan 42 kelompok	42 kelompok	350.000.000	350.000.000	
			Gelar Pangan Daerah dan Lomba Cipta Menu Pangan B2SA Provinsi dan Nasional	Luar Daerah, Provinsi			Jumlah Event Daerah dan Nasional 2 Event	2 Event	800.000.000	800.000.000	
			Identifikasi dan Analisis Pola Pangan Harapan	Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat			Tersedianya Dokumen data Skor PPH 1 DOKumen	1 DOKumen	150.000.000	175.000.000	
			Lomba Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Tingkat Provinsi	Provinsi			Jumlah Pelaksanaan Lomba KRPL 1 Event	1 Event	200.000.000	200.000.000	
			Pengembangan Produk Pangan Lokal Hasil Pertanian	Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Pangkal Pinang, Belitung, Belitung Timur, Bangka			Jumlah Pelaku Usaha yang dibina 30 Kelompok	30 Kelompok	400.000.000	600.000.000	
			Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Segar	Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat			Jumlah Pengawasan yang dilaksanakan 7 Kali	7 Kali	200.000.000	450.000.000	
			Pengembangan Pelaku usaha produk PSAT Lokal (Sertifikat (Prima 3, Sertifikat Prima 2 dan Registrasi PSAT) (Pelaku Usaha)	Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka Barat, Bangka, Bangka Selatan, Bangka Tengah			Jumlah Pelaku usaha yang mendapat Sertifikat Produk Pertanian 50 Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha	300.000.000	500.000.000	
		Penguatan Sarana dan Prasarana Pengawasan Keamanan Pangan Segar	Provinsi			Jumlah Sarana dan Prasarana 7 paket	7 paket	300.000.000	800.000.000		

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD		
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)						
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa										
	PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN AGROPOLITAN	Meningkatnya produksi sub sektor pertanian, peternakan dan jasa perkebunan	Program Pengembangan Pendayagunaan Sumber Daya Alam, Teknologi Tepat Guna dan Pelatihan Masyarakat		Persentase masyarakat yang mendayagunakan teknologi tepat guna (TTG); Persentase masyarakat yang mengelola sumberdaya alam (SDA) dengan baik; Persentase masyarakat yang dibina dalam pendayagunaan serta pengelolaan SDA & TTG	3 Nilai; 3 NILAI; 3 NILAI					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
			Pengembangan Teknologi Tepat Guna	Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Bangka, Bangka Barat			Jumlah Peserta Lomba dan gelar TTG yang dikutsertakan 30 peserta Jumlah Alat 3 alat Jumlah Peserta workshop TTG 0 orang	30 peserta 3 alat 0 orang	567.105.000	894.478.497			
			Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat	Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Bangka			Jumlah Masyarakat Desa yang terlatih dalam Kewirausahaan 60 Pengurus BUMDes Jumlah Kader KPM yang dibina 60 Kader	60 Pengurus BUMDes 60 Kader	698.277.053	1.019.885.754			
	PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT	Menurunnya angka Pengangguran	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan		Persentase dokumen perencanaan pembangunan kawasan perdesaan yang tersusun; Persentase Sumber Daya Manusia (SDM) yang dikembangkan	3 Nilai; 3 Nilai					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
			Pembangunan Kawasan Perdesaan	Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan			Jumlah rakor 2 rakor jumlah dokumen 2 Rancangan jumlah kerjasama 2 kerjasama	2 rakor 2 Rancangan 2 kerjasama	600.000.000	1.441.961.026			
	PEMBANGUNAAAN DEMOKRASI	Peningkatan Pembangunan Demokrasi	Program Pembinaan Pemerintah Desa		Persentase aparatur desa dan lembaga kemasyarakatan yang terbina; Persentase Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Asset Desa yang baik; Persentase desa yang menyusun PERDES (RPJMDES, RKPDES, APBDES tepat waktu)	3 Nilai; 3 Nilai; 3 NILAI					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
			Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan	Bangka Tengah, Belitung, Belitung			Jumlah Desa yang dimonitoring Bantuan	309 desa	179.750.000	192.937.500			

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			kepada Pemerintah Desa/Kelurahan	Timur, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan			Keuangannya 309 desa				
			Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur			Jumlah BPD yang dibina 40 orang Jumlah Aparatur Desa yang dibina 60 Aparatur	40 orang 60 Aparatur	467.400.000	758.520.000	
			Penataan Kewenangan Desa	Belitung, Belitung Timur, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah			Jumlah Desa dan Kelurahan yang Evaluasi Perkembangannya 12 Desa/kel Jumlah Profil Desa dan Kelurahan yang tersusun dan terbina 21 Desa/Kel Jumlah laporan penataan kewenangan Desa yang tersusun 2 Laporan	12 Desa/kel 21 Desa/Kel 2 Laporan	600.000.000	1.059.974.004	
			Peningkatan Kapasitas Bendahara Desa melalui Siskeudes	Belitung Timur, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung			Jumlah Bendahara Desa yang dibina 42 Aparatur Desa, Kabupaten dan Provinsi	42 Aparatur Desa, Kabupaten dan Provinsi	150.000.000	150.000.000	
			Program Peningkatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat		persentase lembaga adat desa se-prov. Kep. Babel yang terbina; persentase lembaga adat desa se-prov. Kep. Babel yang terbina	3 Nilai; 3 Nilai					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
			Pendampingan Kelembagaan Desa	Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur			Jumlah Lembaga Adat Desa yang aktif 10 Lembaga AdatJumlah BUMDES yang aktif 30 BUMDesJumlah Lembaga Cadangan Pangan Pemerintahan Desa dikabupaten yang terbentuk 10 LembagaJumlah Pokjanal Posyandu aktif 50 Pokjanal Posyandu	10 Lembaga Adat30 BUMDes10 Lembaga50 Pokjanal Posyandu	500.000.000	1.099.122.437	
			Pemberdayaan Masyarakat	Belitung Timur, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung			Jumlah Kelompok PKK yang dibina 12 Kelompok PKK Jumlah rakor PKK Provinsi yang terlaksana 20 Rakor Jumlah Desa yang dinilai dalam kegiatan BBGRM 7	12 Kelompok PKK 20 Rakor 7 Desa/Kel	1.500.000.000	1.987.256.250	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
							Desa/Kel					
			Capacity Building Usaha Ekonomi Masyarakat dalam Sistem Manajemen Integrasi BUMDesa	Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur			Jumlah bantuan alat 8 Unit Jumlah Laporan 2 Laporan Jumlah Peserta 160 orang Jumlah Rakor 1 Rakor	8 Unit 2 Laporan 160 orang 1 Rakor	500.000.000	1.466.325.000		
		Statistik										
			Program Peningkatan Pemberdayaan TIK, Statistik dan Persandian		Rasio Ketersediaan informasi sektoral prioritas pertahun	0					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
			Pengembangan Sistem Informasi Basis Data Sektoral dan Spatial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Format Dashboard	Provinsi			Jumlah layanan sistem informasi basis data spatial Prov Bangka Belitung dengan format dashboard 1 aplikasi	1 aplikasi	600.000.000	1.022.487.759		
			Inventarisasi dan Pengelolaan Data Sektoral Daerah	SKPD			Jumlah ketersediaan data informasi statistik daerah yang telah diinventarisasi dan diolah 8 kelompok parameter	8 kelompok parameter	218.263.632	261.916.358		
			Pengembangan Satu Data/ One Data	Provinsi, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung			Jumlah aplikasi sistem informasi database dukungan kebijakan daerah 1 aplikasi	1 aplikasi	-	661.020.000		
			Pengembangan, Pengelolaan dan Optimalisasi Pemanfaatan Data/Informasi/Statistik Daerah	Luar Daerah, Provinsi			Jumlah data informasi statistik daerah yang dipublikasikan 500 Data	500 Data	215.420.000	258.504.000		
			Komunikasi dan Informatika									
	PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN AGROPOLITAN	Meningkatnya produksi sub sektor pertanian, peternakan dan jasa perkebunan	Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik		Persentase pemenuhan jaringan informasi di pulau terpencil; - Rasio intensitas informasi berkaitan dengan pemasaran pariwisata periode satu tahun; - Persentase jumlah sektor yang ada dengan informasi/ berita tiap sector yang dipublikasikan: Rasio	0 ; 5 Jenis; 13 Jenis; 0 ; 0					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					informasi tentang pelayanan kesehatan dengan periode satu tahun; Persentase kesesuaian antara kuantitas berita dengan informasi yang dipublikasi						
			Pengelolaan Saluran Komunikasi Pemerintah Daerah dan Non Pemerintah Daerah	Luar Daerah, Provinsi, Belitung, Bangka Tengah, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan			Jumlah saluran komunikasi yang dikelola 16 Saluran	16 Saluran	1.500.000.000	3.000.000.000	
			Pengelolaan Konten	Provinsi			Jumlah pengemasan dan pengelolaan konten 0 konten	0 konten	-	1.600.000.000	
			Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Provinsi			Jumlah data/informasi pemerintah daerah 0 Pameran kegiatan Jumlah data/informasi pemerintah daerah 0 Pertemuan kegiatan Jumlah data/informasi pemerintah daerah 550 informasi/bln	0 Pameran kegiatan 0 Pertemuan kegiatan 550 informasi/bln	1.500.000.000	1.750.000.000	
			Pengelolaan Kemitraan	Provinsi, Bangka Barat, Bangka Tengah, Belitung Timur, Bangka Selatan			Jumlah mitra yang terfasilitasi 132 kemitraan	132 kemitraan	400.000.000	2.150.000.000	
			Pengelolaan Aspirasi Publik Lingkup Pemerintah Daerah	Luar Daerah, Provinsi			Jumlah aspirasi publik lingkup pemerintah daerah 440 aspirasi/bln	440 aspirasi/bln	250.000.000	1.300.000.000	
			Pengelolaan Komunikasi Publik	Provinsi, Luar Daerah			Jumlah konferensi pers dan wartawan 0 Pengelolaan komunikasi/bln	0 Pengelolaan komunikasi/bln	-	1.100.000.000	
	PENGEMBANGAN PARIWISATA	Meningkatnya pengembangan pembangunan pariwisata	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Teknolgi Informasi		Rasio luas wilayah desa dengan luas cakupan pelayanan jaringan internet; Persentase SMA/SMK yang telah berbasis IT; Persentase insiden atau penyimpangan keamanan sistem informasi; - Persentase peningkatan	5 Jaringan; 1 Ada; 0 ; 0					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
					pemberdayaan teknologi informasi dan komunikasi untuk birokrasi							
			Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur dan Teknologi	Provinsi			Layanan internet 1 paketLayanan data center 1 paketLayanan call location 1 paket	1 paket1 paket1 paket	5.321.341.000	6.154.780.500		
			Layanan Publik dan Pemerintah Berbasis E-Government	Provinsi			kapasitas Layanan Publik dan Pemerintah Berbasis E-Government 7 lisensi aplikasi pendukung kapasitas Layanan Publik dan Pemerintah Berbasis E-Government 6 aplikasi layanan kapasitas Layanan Publik dan Pemerintah Berbasis E-Government 40 website kapasitas Layanan Publik dan Pemerintah Berbasis E-Government 6 laporan	7 lisensi aplikasi pendukung 6 aplikasi layanan 40 website 6 laporan	234.892.480	2.029.073.200		
			Pembangunan Media Penyebaran Informasi Masyarakat	Belitung, Pangkal Pinang			Jumlah Media Penyebaran Informasi Masyarakat 0 lokasi	0 lokasi	-	4.146.906.500		
			Penguatan Jaringan Komunikasi Data Pemerintah	Provinsi			Layanan Komunikasi data 1 paket	1 paket	300.000.000	360.000.000		
			Pengawasan dan Pengendalian Keamanan Sistem Informasi	Luar Daerah, Provinsi			Jumlah insiden atau penyimpangan keamanan sistem informasi 0 insiden	0 insiden	126.000.000	189.000.000		
			Perumusan Kebijakan Teknis dan SDM Keamanan Informasi	Luar Daerah, Provinsi			Jumlah kebijakan di Bidang Keamanan Informasi 2 kebijakan sertifikasi SDM di Bidang Keamanan Informasi 3 sertifikasi	2 kebijakan 3 sertifikasi	500.000.000	170.000.000		
			Program Peningkatan Pemberdayaan TIK, Statistik dan Persandian			Persentase peningkatan pemberdayaan Teknologi Informasi dan komunikasi untuk birokrasi	6					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Provinsi, Belitung, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah			Jumlah layanan interaktif pemerintah dan masyarakat 6 kabupaten 20 kali layanan interaktif	20 kali layanan interaktif	275.000.000	650.492.086		
			Perpustakaan									

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT	Menurunnya angka Pengangguran	<b>Program Pengembangan Bahan Pustaka dan Layanan Perpustakaan</b>		Pertambahan jumlah koleksi buku perpustakaan ; Pertambahan jumlah jenis koleksi bahan pustaka; Pertambahan pengunjung perpustakaan	0 %; 0 %; 0 %						DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
			Penyusunan Bibliografi Induk Daerah dan Katalog Induk Daerah	Provinsi			Jumlah dokumen Bibliografi Induk Daerah dan Katalog Induk Daerah 2 Dokumen	2 Dokumen	53.590.000	145.000.000		
			Pelestarian dan Pengelolaan Bahan Pustaka	Provinsi			Jumlah Bahan Pustaka yang terpelihara dan terkelola 430 Bahan Pustaka	430 Bahan Pustaka	38.420.000	125.000.000		
			Pengumpulan Koleksi Hasil Terbitan Daerah	Provinsi			Jumlah koleksi hasil terbitan daerah yang terkumpul berupa karya cetak dan karya rekam 150 terbitan	150 terbitan	51.965.000	85.000.000		
			Kegiatan Pelayanan Perpustakaan Keliling	Provinsi			jumlah pengunjung Perpustakaan Keliling Bagi pelajar, mahasiswa dan Masyarakat 7.200 Orang	7.200 Orang	150.000.000	450.000.000		
			Publikasi dan Sosialisasi Minat Dan Budaya Baca	Provinsi			Jumlah pengunjung hasil Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca bagi masyarakat umum 1.000 Orang	1.000 Orang	90.000.000	300.000.000		
			Kegiatan Pengelolaan Layanan Website	Provinsi			Jumlah informasi yang tersedia dalam website 80 Informasi	80 Informasi	32.678.000	75.000.000		
			Kegiatan Pameran Buku	Provinsi			Jumlah pengunjung pameran dan bedah buku 1.500 Orang	1.500 Orang	120.000.000	700.000.000		
			Kegiatan Pengembangan Minat dan Budaya Baca	Provinsi			Jumlah peserta lomba menulis puisi untuk anak SD, lomba bercerita bahasa daerah, lomba menulis anak untuk anak SMP dan SMA dan lomba penulisan cerita rakyat daerah 260 orang	260 orang	311.441.000	600.000.000		
				<b>program Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan</b>		presentase perpustakaan terakreditasi; Pertambahan pengelola perpustakaan yang dapat menerapkan perpustakaan sesuai standar	100 %; 40 orang					DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Lomba Pustakawan Terbaik Tingkat Provinsi	Provinsi			Jumlah pustakawan teladan tingkat provinsi 15 Orang	15 Orang	74.043.500	120.000.000	
			Penilaian Angka Kredit Pustakawan	Provinsi			Jumlah DUPAK pustakawan dan calon pustakawan 25 DUPAK	25 DUPAK	31.044.000	52.000.000	
			Kegiatan Pembinaan dan Pendampingan Pengelolaan Perpustakaan Desa/Kelurahaan dan Perpustakaan Sekolah	Provinsi			Jumlah perpustakaan yang dibina 42 Perpustakaan	42 Perpustakaan	118.083.700	130.455.000	
			Kegiatan Penyusunan Profil Perpustakaan se-Prov. Kep. Bangka Belitung	Provinsi			jumlah informasi profil perpustakaan se-Prov Kep Bangka Belitung 16 Buku	16 Buku	191.698.000	210.375.000	
			Kegiatan Akreditasi Perpustakaan	Provinsi			Jumlah perpustakaan yang terakreditasi 4 Perpustakaan	4 Perpustakaan	160.349.500	180.000.000	
			Pertanian								
	PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN AGROPOLITAN	Meningkatnya produksi sub sektor pertanian, peternakan dan jasa perkebunan	Program Pengembangan Tanaman Pangan dan Holtikultura		Peningkatan produksi komoditi strategis tanaman pangan (padi) ; peningkatan produksi komoditi strategis Hortikultura (Cabai Besar) ; peningkatan produksi komoditi strategis Hortikultura (Cabai Rawit) ; peningkatan produksi komoditi strategis Hortikultura (Bawang Merah) ; Pengembangan Kawasan Padi; Pengembangan kawasan cabai ; Pengembangan kawasan bawang merah; Jumlah kelompok yang menerapkan peningkatan mutu, daya saing, dan nilai tambah hasil tanaman pangan dan hortikultura ; NTP subsektor Tanaman Pangan; NTP subsektor Hortikultura	43.135 ton; 2.813,28 ton; 2.651,13 ton; 98,11 ton; 1 (kaw/unit); 1 (kaw/unit); 1 (kaw/unit); 40 (pelaku usaha/poktan); 95,08 %; 100,75 %					DINAS PERTANIAN
			Pengembangan komoditi hortikultura melalui penerapan budidaya tanaman yang baik	Provinsi, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung			Pengembangan komoditas hortikultura strategis 28 hektar	28 hektar	674.482.000	1.450.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengembangan Komoditi pangan dengan penerapan GP-PTT (padi dan jagung)	Provinsi, Belitung Timur, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung			pelaksanaan GP-PTT tanaman padi dan jagung di provinsi kepulauan bangka belitung 700 hektar	700 hektar	621.083.000	2.500.000.000	
			Pelatihan teknis budidaya, penanganan panen dan pasca panen komoditi pangan dan hortikultura	Provinsi			Jumlah kelompok tani yang mengalami peningkatan kualitas SDM pertanian 3 Kelompok tani	3 Kelompok tani	60.142.000	70.000.000	
			Pengembangan komoditas hortikultura lokal yang unggul	Provinsi, Bangka Barat, Bangka Tengah, Pangkal Pinang			Jumlah komoditas hortikultura lokal yang unggul 30 Ha	30 Ha	323.349.000	1.000.000.000	
			<b>Program Pengembangan Prasarana, Sarana Pertanian dan Penyuluhan Pertanian</b>		ketersediaan Prasarana dan Sarana Pertanian ; Kebijakan dan implementasi Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan ; Peningkatan pemberdayaan petani dalam mendukung sektor pertanian ; Peningkatan fungsi kelembagaan pertanian	15 (%); 2 (Dok); 10 (%); 10 (%)					DINAS PERTANIAN
			Pemberdayaan petani dan penyuluh pertanian	Provinsi			Terlaksananya pemberdayaan petani dan penyuluh pertanian 100 %	100%	269.648.000	1.451.240.000	
			Fasilitasi asuransi pertanian	Provinsi			Polis asuransi lahan sawah 2.500 Ha/	2.500 Ha/	300.000.000	400.000.000	
			Pemberian asuransi peternakan	Provinsi			Pemberian asuransi peternakan 2.000 ekor sapi	2.000 ekor sapi	200.000.000	200.000.000	
			Pengembagan optimasi lahan	Provinsi, Bangka Barat, Bangka Selatan, Belitung Timur, Bangka			Luasan peningkatan indeks pertanaman 100 IP	100 IP	1.625.678.000	3.250.000.000	
			Pemetaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Provinsi			Draf perda 1 dokumen	1 dokumen	750.500.000	1.000.000.000	
			Pembangunan jaringan irigasi tersier	Provinsi			jaringan irigasi pertanian 1.000 ha	1.000 ha	844.630.000	3.500.000.000	
			Pembangunan gudang alsintan	Provinsi, Belitung Timur, Belitung, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka			gudang alsintan 10 unit	10 unit	852.500.000	2.750.000.000	
			Pengembangan pupuk, pestisida dan alat mesin	Provinsi			Berkembangnya kualitas pupuk, pestisida dan alat	100%	488.650.000	700.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			pertanian				mesin pertanian 100 %				
			Peningkatan kapabilitas penyuluhan dan SDM pertanian	Provinsi			Meningkatnya kapabilitas penyulluhan dan sdm pertanian 100 %	100%	1.000.000.000	1.350.000.000	
			Program Pengembangan Perkebunan		Peningkatan produksi lada; Peningkatan produksi karet; Pengembangan kawasan lada ; Jumlah kelompok yang menerapkan peningkatan mutu, daya saing, dan nilai tambah hasil perkebunan ; NTP subsektor Perkebunan	43.577 ton; 60.173 ton; 1 (kaw/unit); 56 (pelaku usaha/poktan); 100,6 %					DINAS PERTANIAN
			Intensifikasi tanaman perkebunan	Provinsi, Belitung, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah			peningkatan produktivitas tanaman perkebunan 1.500 Ha	1.500 Ha	3.874.434.000	4.000.000.000	
			Penanganan organisme pengganggu tanaman perkebunan	Provinsi, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur			penerapan penanggulangan OPT perkebunan 200 Ha	200 Ha	337.251.000	500.000.000	
			Pelayanan informasi pemasaran hasil perkebunan	Provinsi			informasi pemasaran hasil perkebunan 1 Tahun	1 Tahun	330.516.000	850.000.000	
			Penanganan pasca panen tanaman perkebunan	Provinsi, Bangka Barat, Bangka Tengah			sarana pascapanen lada dan karet melalui poktan/gapoktan 4 Unit	4 Unit	406.593.000	2.100.000.000	
			Program Pengembangan Peternakan dan Kesehatan Hewan		populasi ternak besar sapi ; populasi ternak ayam; Pengembangan kawasan ternak sapi ; Jumlah kelompok yang menerapkan peningkatan mutu, daya saing, dan nilai tambah hasil peternakan ; NTP subsektor Peternakan	14.399 (ekor); 12.678.800 (ekor); 1 (kaw/unit); 14 (pelaku usaha/poktan); 94,86 %					DINAS PERTANIAN
			Peningkatan populasi ternak	Provinsi, Bangka, Bangka Tengah, Bangka Barat, Belitung, Belitung Timur, Bangka Selatan			Meningkatnya populasi ternak (sapi dan unggas) 13 kelompok ternak	13 kelompok ternak	2.435.385.000	2.506.930.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan pengolahan dan pemasaran hasil produksi subsektor Peternakan	Provinsi, Bangka Tengah			pengolahan dan pemasaran hasil produksi subsektor peternakan 100 %	100%	387.255.000	400.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan Laboratorium Keswan dan Klinik Hewan	Provinsi			fungsi pelayanan laboratorium keswan dan klinik hewan 100 %	100%	426.270.000	450.000.000	
			Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Hewan Menular Strategis Zoonosis dan Gangguan Reproduksi	Provinsi			angka kesakitan dan kematian ternak akibat penyakit menular/zoonosis pada ternak 100 %	100%	302.274.000	400.000.000	
			Sosialisasi pengawasan mutu hasil ternak sapi di RPH	Provinsi			sosialisasi pengawasan mutu hasil ternak sapi di RPH 80 Pelaku usaha	80 Pelaku usaha	63.782.000	300.000.000	
			<b>Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Benih</b>		Jumlah benih tanaman perkebunan yang bersertifikat dan berlabel; Jumlah benih tanaman pangan yang bersertifikat dan berlabel ; Jumlah benih tanaman hortikultura yang bersertifikat dan berlabel; Pengawasan peredaran benih tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; Jumlah varietas unggul yang didaftarkan	1.310.000 (polibag) ; 150 (ton); 1.500 (polibag); 44 Produsen; 2 Varietas					DINAS PERTANIAN
			Pengawasan peredaran benih dan pembinaan produsen	Provinsi			Pengawasan dan pembinaan produsen benih yang mengedarkan benih 44 Produsen/penangkar	44 Produsen/penangkar	126.979.000	230.000.000	
			Sertifikasi benih Pertanian/Perkebunan	Provinsi			meningkatnya kualitas benih di provinsi kepulauan bangka belitung 100 %	100%	107.011.000	200.000.000	
			Penilaian kultivar/varietas unggul lokal	Provinsi, Bangka Barat			Jumlah varietas unggul lokal provinsi kepulauan bangka belitung 2 varietas	2 varietas	98.465.000	120.000.000	
			Peningkatan fungsi pelayanan UPTD BPSMB	SKPD			UPTD BPSMB 1 UPTD	1 UPTD	161.885.000	200.000.000	
			<b>Program Peningkatan Pelayanan Teknis Proteksi Tanaman</b>		Terkendalnya areal tanam yang terserang OPT dan DPI	5 (%)					DINAS PERTANIAN
			Peningkatan pelayanan teknis proteksi tanaman	Provinsi			Terkendalnya areal tanam yang terserang OPT dan DPI 5 %	5%	160.600.000	160.600.000	
			Peningkatan fungsi pelayanan UPTD Balai	SKPD			UPTD Balai Proteksi Tanaman 1 UPTD	1 UPTD	236.041.000	300.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Proteksi Tanaman									
			Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pengembangan Benih Pertanian		Ketersediaan kandang ternak, gudang pakan, gedung pertemuan dan sarana prasarana; Ketersediaan bibit ayam ; Ketersediaan anakan sapi ; Ketersediaan benih sumber padi ; Ketersediaan bibit lada ; Ketersediaan bibit karet	1 Dok/Unit; 6.000 (ekor); 20 (ekor); 4 (ton); 50.000 polibag; 40.000 polibag					DINAS PERTANIAN	
			Peningkatan fungsi pelayanan UPTD Balai Benih Pertanian	SKPD			UPTD Balai Benih Pertanian 1 UPTD	1 UPTD	468.191.000	594.150.000		
			Pengembangan sarana dan prasarana UPTD Balai Benih Pertanian	SKPD			sarana dan prasarana di UPTD Balai Benih Pertanian 1 Paket	1 Paket	2.346.515.000	1.500.000.000		
			Penyediaan benih sumber dan benih sebar	Provinsi, SKPD			Meningkatnya ketersediaan benih sumber dan benih sebar 100 %	100%	855.873.000	1.018.420.000		
			Pengembangan perbibitan ternak ruminansia	Provinsi, SKPD			Jumlah bibit ayam 10.000 ekor Jumlah bibit sapi 100 Ekor	10.000 ekor 100 Ekor	1.059.975.000	2.585.305.000		
			Integrasi jagung dan sapi	SKPD			Tersedianya pakan ternak (jagung) 5 Ha	5 Ha	94.019.000	140.000.000		
			Kehutanan									
			Program Peningkatan Tata Kelola dan Pemanfaatan Kawasan Hutan		Persentase luas Kawasan Hutan yang dikelola; Persentase izin usaha hasil hutan kayu ; Persentase hasil hutan bukan kayu yang dikembangkan ; Presentase luas areal kawasan hutan yang dikelola di Kawasan strategis Ekonomi khusus Tanjung Berikat	62,5 %; 20 %; 20 %; 9,53 %					DINAS KEHUTANAN	
			Pemanfaatan Kawasan Hutan	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Belitung, Bangka, Bangka Barat, Bangka Tengah			Jumlah Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan 11 Izin	11 Izin	193.900.150	500.000.000		
		Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka, Bangka Barat			Jumlah hasil hutan bukan kayu yang dikembangkan 2 Lokasi	2 Lokasi	307.321.500	500.000.000			

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Hutan	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Belitung, Belitung Timur, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah			Jumlah Kawasan Hutan yang dikelola 8 Unit	8 Unit	223.280.000	497.042.000	
			Peningkatan Usaha Hasil Hutan Kayu	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur			Jumlah izin usaha hasil hutan kayu 12 Izin	12 Izin	219.990.163	330.000.000	
			Expo Pengembangan dan Promosi Hasil Hutan	Provinsi, Luar Daerah			Terlaksananya keikutsertaan dalam Expo Pengembangan dan Promosi Hasil Hutan 2 Kali	2 Kali	431.280.000	650.000.000	
			Pembangunan sumber benih dan konservasi exsitu Gaharu dan Pelawan	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Tengah, Belitung, Bangka Barat, Bangka, Belitung Timur, Bangka Selatan			Jumlah sumber benih Gaharu dan Pelawan 20 Hektar	20 Hektar	450.000.000	450.000.000	
			Penyelesaian usulan perubahan status kawasan hutan / TORA	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Belitung Timur, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung			Dokumen penyelesaian perubahan status kawasan hutan/TORA 3.600 HektarLuas perubahan status kawasan hutan di Kawasan strategis Ekonomi khusus Tanjung Berikat 3.000 Hektar	3.600 Hektar3.000 Hektar	-	300.000.000	
			Program Peningkatan Perlindungan dan Konservasi SDA Dan Ekosistem		Persentase Penanganan tindak pidana Kehutanan; Persentase Kawasan Ekosistem Essensial; Persentase Penurunan Luas Kebakaran Hutan	20 %; 20 %; 20 %					DINAS KEHUTANAN
			Penertiban Pelanggaran Tindak Pidana Kehutanan	Provinsi, SKPD, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan			Jumlah tindak pidana kehutanan yang ditangani 2 Berkas Perkara	2 Berkas Perkara	213.000.000	600.000.000	
			Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Provinsi, SKPD, Belitung Timur, Bangka, Bangka			Penurunan Luas Kebakaran Hutan dan Lahan 3.300 Hektar	3.300 Hektar	300.000.000	500.000.000	



No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung							
			Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan	Provinsi, SKPD, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang			Jumlah Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan 60 Orang	60 Orang	484.000.000	750.000.000	
			Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengamanan Hutan oleh POLHUT	Provinsi, SKPD, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung			Luas kawasan hutan yang terlindungi 155.000 Hektar	155.000 Hektar	350.000.000	450.000.000	
			Tenaga Pendukung Polisi Kehutanan	Provinsi, SKPD, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang			Jumlah Tenaga Pendukung Polisi Kehutanan/PAMHUT 15 Orang	15 Orang	487.400.000	550.000.000	
			Identifikasi,Inventarisasi dan Pemanfaatan Kawasan ekosistem essensial	Provinsi, SKPD, Bangka Tengah, Belitung			Luas Kawasan ekosistem essensial yang diidentifikasi dan diinventarisasi 2 Kawasan	2 Kawasan	162.000.000	325.000.000	
			Program Peningkatan Pengelolaan DAS dan Pemberdayaan Masyarakat		Persentase luas kawasan Perhutanan Sosial; Persentase DAS kritis yang dikelola; Persentase luas kawasan hutan yang bervegetasi	2,07 %; 9,11 %; 0,88 %					DINAS KEHUTANAN
			Pembinaan Pegelolaan Daerah Aliran Sungai	Provinsi, SKPD, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur			Jumlah Dokumen Peningkatan Pembinaan Pegelolaan Daerah Aliran Sungai 200 Hektar	200 Hektar	200.000.000	300.000.000	
			Pemenuhan Kewajiban Rehabilitasi DAS bagi Pemegang IPPKH	Provinsi, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang			Jumlah pemegang IPPKH yang memenuhi kewajiban rehabilitasi DAS 6 Izin	6 Izin	160.000.000	230.750.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur			Jumlah dokumen penyelenggaraan RHL 1 Dokumen Luas tegakan benih yang teridentifikasi dan terseleksi 20 Hektar	1 Dokumen 20 Hektar	250.000.000	200.000.000		
			Penyelenggaaraan Penyuluhan Kehutanan	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan			Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH) yang terbina 90 Kelompok	90 Kelompok	300.000.000	690.000.000		
			Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Pangkal Pinang			Luas rehabilitasi hutan dan lahan 80 Hektar	80 Hektar	500.000.000	900.000.000		
			Pengembangan Perhutanan Sosial	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur			Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat 20.000 Hektar	20.000 Hektar	400.000.000	800.000.000		
			Penumbuhan dan pengembangan kelompok pecinta alam/ pramuka/siswa sekolah	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah			Jumlah kelompok kelompok pecinta alam/pramuka 2 Kelompok	2 Kelompok	-	250.000.000		
			Pembangunan sumber benih dan konservasi ex situ gaharu dan pelawan	Provinsi, SKPD, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Belitung			Jumlah sumber benih gaharu dan pelawan 20 Hektar	20 Hektar	-	400.000.000		
			<b>Program Peningkatan Pelayanan Teknis Tata Kelola Kehutanan</b>		Persentase pengelolaan hutan oleh UPTD KPH	50 %						DINAS KEHUTANAN
			Pelayanan Teknis UPTD KPHP Sigambir Kotawaringin	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka			Jumlah pengelolaan hutan oleh KPHP Sigambir Kotawaringin 3 Dokumen	3 Dokumen	212.200.000	400.000.000		
			Pelayanan Teknis UPTD KPHP Bubus Panca	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka			Jumlah pengelolaan hutan oleh KPHP Bubus Panca 3 Doumen	3 Doumen	210.568.000	400.000.000		
		Pelayanan Teknis UPTD KPHP Muntai Palas	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Selatan			Jumlah pengelolaan hutan oleh KPHP Muntai Palas 3 Dokumen	3 Dokumen	213.708.000	300.000.000			

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Pelayanan Teknis UPTD KPHP Sungai Sembulan	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Tengah			Jumlah pengelolaan hutan KPHP Sungai Sembulan 3 Dokumen	3 Dokumen	270.510.000	400.000.000		
			Pelayanan Teknis UPTD KPHP Rambat Menduyung	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Barat			Jumlah kegiatan pengelolaan hutan KPHP Rambat Menduyung 3 Dokumen	3 Dokumen	211.168.000	350.000.000		
			Pelayanan Teknis UPTD KPHP Jebu Bembang Antan	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Barat			Jumlah pengelolaan hutan oleh KPHP Jebu Bembang Antan 3 Dokumen	3 Dokumen	208.568.000	300.000.000		
			Pelayanan Teknis UPTD KPHL Belantu Mendanau	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Belitung			Jumlah pengelolaan hutan oleh KPHL Belantu Mendanau 3 Dokumen	3 Dokumen	270.200.000	300.000.000		
			Pelayanan Teknis UPTD KPHP Gunung Duren	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Belitung Timur			Jumlah kegiatan pengelolaan hutan oleh KPHP Gunung Duren 3 Dokumen	3 Dokumen	270.200.000	300.000.000		
			Penyelesaian usulan perubahan status kawasan hutan / TORA	Provinsi, SKPD, Belitung Timur, Bangka Tengah, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Belitung			Luas penyelesaian perubahan status kawasan hutan/TORA 3.000 Hektar	3.000 Hektar	117.300.000	225.000.000		
			Energi dan Sumber Daya Mineral									
	PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT	Menurunnya angka Inflasi	Program Pengembangan Pertambangan Mineral Logam		Persentase DBH (Dana Bagi Hasil) SDA (Sumber Daya Alam) Mineral Logam; Persentase luasan lahan kritis di arel IUP yang di reklamasi;; Persentase perusahaan yang menempatkan Nilai jaminan reklamasi; Persentase Perusahaan pertambangan mineral logam yang menerapkan good mining practices	38,4 %; 13 %; 40 %; 65 %					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
			Pembinaan Produksi dan Pemasaran Mineral Logam	Provinsi, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur			Jumlah Perusahaan yang dibina 15 Perusahaan	15 Perusahaan	150.000.000	330.000.000		
			Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara	Luar Daerah, Provinsi			Jumlah Pendapatan Kontribusi Sektor Pertambangan 80 Milyar	80 Milyar	150.000.000	330.000.000		

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pembinaan Pengembangan dan Pemerdayaan Masyarakat Sekitar (Community Developmen and Carporate Social Responsibility / CD-CSR)	Provinsi, Luar Daerah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah			Jumlah Perusahaan pengembangan dan pemerdayaan masyarakat sekitar CDCSR 20 Perusahaan	20 Perusahaan	100.000.000	210.000.000	
			Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Logam	Provinsi, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur			Jumlah Perusahaan yang di bina dan di awasi 200 Perusahaan	200 Perusahaan	550.000.000	980.000.000	
			Verifikasi dan Rekomendasi Terkait Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Logam	Provinsi, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat			Jumlah Rekomendasi yang di keluarkan 30 Rekomendasi	30 Rekomendasi	150.000.000	470.000.000	
			Verifikasi , Evaluasi terhadap dokumen Rencana Reklamasi (RR)	Luar Daerah, Provinsi, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat			Jumlah Dokumen terverifikasi dalam Rencana Reklamasi 10 Dokumen	10 Dokumen	200.000.000	530.000.000	
			<b>Program Pengembangan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan</b>		Persentase Perusahaan pertambangan mineral non logam yang menerapkan good mining practices	60 %					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
			Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Pertambangan Bukan Logam dan Batuan	Provinsi, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Bangka			Jumlah Perusahaan yang dibina dan diawasi 110 Perusahaan	110 Perusahaan	550.000.000	800.000.000	
			Pelatihan RKAB	Provinsi			Jumlah Peserta Pelatihan RKAB 100 Peserta	100 Peserta	150.000.000	-	
			Penilaian Prestasi Pengelolaan Keselamatan Pertambangan dan Kepala Teknik Tambang Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung Timur, Bangka, Bangka Barat			Jumlah Nominator dalam Pengelolaan Keselamatan Pertambangan 3 Pemenang/Perusahaan	3 Pemenang/Perusahaan	150.000.000	350.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Verifikasi dan Rekomendasi Terkait Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Provinsi, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang			Jumlah Rekomendasi yang di keluarkan 30 Rekomendasi	30 Rekomendasi	250.000.000	500.000.000	
			Pertemuan Tahunan KTT dan Pembina Usaha Pertambangan Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi			Jumlah Peserta Pertemuan Teknis 190 Orang	190 Orang	180.000.000	200.000.000	
			Sosialisasi Rencana Kerja Kegiatan Pemasangan Tanda Batas dalam WIUP-OP	Provinsi, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur			Jumah Sosialisasi Pemasangan Tanda Batas dalam WIUP-OP 10 Desa	10 Desa	150.000.000	370.000.000	
	PENGEMBANGAN ENERGI DAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN	Meningkatnya Pemenuhan Infrastruktur Masyarakat	<b>Program Peningkatan Pengelolaan Geologi dan Air Tanah</b>		Persentase cadangan Mineral yang potensial; Persentase Pendapatan Asli Daerah dari retribusi pergantian biaya cetak peta	32,55 %; 35,2 %					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
			Penyelidikan Kebumian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Luar Daerah, Provinsi, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka			Persentase Data dan Informasi Geologi dan Air Tanah 100 %	100%	300.000.000	510.000.000	
			Dukungan Percepatan Pembangunan Geopark	Provinsi, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah			Jumlah Obyek Geosite yang di Kaji 10 Obyek	10 Obyek	185.000.000	450.000.000	
			Survey Geofisika Aplikasi Metoda Geolistrik Untuk Pendugaan Keberadaan Lapisan Akuifer Bawah Permukaan	Luar Daerah, Provinsi, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang			Jumlah Desa yang di Survey Lapisan Akuifer Bawah Permukaan 4 Desa	4 Desa	200.000.000	200.000.000	
			Pembinaan Supervisi Pengelolaan Air Tanah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka			Persentase Pembinaan dan Supervisi Pengelolaan Air Tanah 100 %	100%	120.670.000	220.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Selatan							
			Peningkatan Pelayanan Cetak Peta	Luar Daerah, Provinsi			Pendapatan Daerah dari Retribusi Pergantian Biaya Cetak Peta 1,7 Miliar	1,7 Miliar	200.000.000	200.000.000	
			Verifikasi dan Rekomendasi Terkait Pengelolaan Air Tanah	Provinsi, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka			Persentase Verifikasi dan Rekomendasi Pengelolaan Air Tanah 100 %	100%	110.000.000	180.000.000	
			Program Pengembangan Sumber Daya Energi		Persentase penggunaan EBT; Persentase perusahaan pendistribusian Minyak dan Gas yang taat aturan; Persentase Dana Bagi Hasil dari lifting MIGAS Babel	6,83 %; 60 %; 42,4 %					DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
			Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) dan Sarana Umum menggunakan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Bangka			Jumah Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU) dan Sarana Umum Menggunakan Energi Baru Terbarukan (EBT) 100 Unit	100 Unit	4.750.000.000	38.000.000.000	
			Pembinaan dan Pengawasan di Bidang Ketenagalistrikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka			Jumlah Perusahaan yang di bina dan diawasi 60 Perusahaan	60 Perusahaan	500.000.000	550.000.000	
			Penyusunan PERDA dan Sosialisasi Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi			Jumlah Dokumen 1 Dokumen	1 Dokumen	350.000.000	-	
			Pemeliharaan Penerangan Jalan umum Tenaga Surya (PJUTS) dan PLTS di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan			Jumlah PJUTS yang terpelihara 15 Unit	15 Unit	250.000.000	600.000.000	
			Koordinasi Kegiatan Migas dengan Pemerintah Pusat dan Partisipasi ADPM	Luar Daerah			Jumlah Kontribusi dari Sektor Migas 410 Ribu Barel	410 Ribu Barel	200.000.000	260.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Pembinaan dan Pengendalian Pendistribusian BBM dan Gas	Provinsi, Luar Daerah, Belitung Timur, Bangka, Pangkal Pinang, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung			Jumlah Pelaku usaha di bidang Minyak dan Gas 65 Pelaku Usaha	65 Pelaku Usaha	150.000.000	310.000.000		
			Pariwisata									
	PENGEMBANGAN PARIWISATA	Meningkatnya pengembangan pembangunan pariwisata	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata		Persentase destinasi pariwisata provinsi yang ditingkatkan kualitas dan daya saing kepariwisataan	0 %					DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	
			Sosialisasi Paket Wisata Edukatif dan Kreatif di Desa Wisata Pulau Belitung	Belitung			Terselenggaranya sosialisasi paket wisata edukatif dan kreatif 1 kegiatan	1 kegiatan	175.000.000	385.000.000		
			Penyusunan Interpretasi Berbasis Geowisata di Daya Tarik Wisata di Pulau Belitung	Belitung, Belitung Timur			Tersusunnya intreprastasi di Daya Tarik Wisata 10 lokasi	10 lokasi	250.000.000	550.000.000		
			Pengembangan kawasan pariwisata provinsi	Provinsi, Bangka, Pangkal Pinang, Bangka Tengah			Jumlah kawasan pariwisata provinsi yang dikembangkan 2 kawasan	2 kawasan	900.500.000	1.407.743.000		
			Penyusunan paket wisata	Provinsi			Jumlah penyusunan paket wisata 1 paket wisata	1 paket wisata	311.912.000	373.250.000		
			Pelaksanaan Forum koordinasi pengembangan destinasi pariwisata	Provinsi, Luar Daerah			Presentase destinasi pariwisata yang dikembangkan 1 kegiatan	1 kegiatan	292.154.000	156.568.000		
			Pemberdayaan Masyarakat di Destinasi Pariwisata	Luar Daerah, Provinsi, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan			Jumlah Desa Wisata yang diberdayakan 4 kab/kota	4 kab/kota	175.000.000	199.136.000		
			Pembuatan Papan Informasi di Daya Tarik Wisata	Provinsi, Belitung, Belitung Timur, Bangka, Pangkal Pinang, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah			Jumlah Papan Informasi Pariwisata 20 unit	20 unit	200.000.000	731.000.000		
				Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata		Tingkat kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara	7 %					DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata (Penerbangan Internasional dari Singapore - Belitung)						1.475.000.000	-	
			Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata (Penerbangan dari Surabaya - Pangkalpinang dan Pangkalpinang - Lampung)						1.500.000.000	-	
			Festival Toboali City On Fire						200.000.000	-	
			Kegiatan Festival Kayak Marathon Internasional						600.000.000	-	
			Festival Pelangi Travel Mart						300.000.000	-	
			Festival Tanjung Kelayang						400.000.000	-	
			Dukungan Triatlon Sungailiat						250.000.000	-	
			Pelaksanaan Promosi Geowisata	Provinsi, Luar Daerah, Belitung, Belitung Timur			Terselenggaranya event promosi pariwisata 1 event	1 event	175.000.000	467.500.000	
			Pengembangan Promosi Wisata Edukatif, Kreatif dan Minat Khusus Bahari	Luar Daerah, Provinsi, Belitung, Belitung Timur			Terselenggaranya event promosi pariwisata edukatif, kreatif dan minat khusus bahari 1 event	1 event	150.000.000	400.000.000	
			Pengembangan Promosi Kawasan Ekonomi Khusus	Provinsi, Luar Daerah, Belitung, Belitung Timur			Terselenggaranya event promosi pariwisata 2 event	2 event	250.000.000	475.000.000	
			Peningkatan Pencitraan Pariwisata Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi			Tersedianya Bahan Promosi Pariwisata 7 bahan promosi dan informasi	7 bahan promosi dan informasi	716.600.500	788.260.000	
			Pelayanan Informasi Pariwisata	Luar Daerah, Provinsi, Belitung, Pangkal Pinang			Tersedianya informasi destinasi pariwisata Bangka Belitung 4 TIC	4 TIC	155.430.000	140.344.900	
			Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Pemasaran Pariwisata Bangka Belitung	SKPD			Jumlah media informasi yang berbasis IT 2 website	2 website	175.000.000	326.568.000	
			Pembuatan Bahan Publikasi	Provinsi, Bangka Barat, Bangka, Pangkal Pinang, Belitung Timur, Belitung, Bangka Tengah, Bangka Selatan			Tersedianya master publikasi pariwisata 1 master publikasi	1 master publikasi	56.700.000	59.535.000	
			Kajian Pemasaran Pariwisata Bangka Belitung	Provinsi, Bangka Selatan, Bangka			Jumlah dokumen kajian pemasaran pariwisata	1 dokumen	149.112.000	156.568.000	



No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				Barat, Bangka, Pangkal Pinang, Belitung Timur, Belitung, Bangka Tengah			Bangka Belitung 1 dokumen					
			Pelaksanaan Promosi Pariwisata Dalam Negeri	Luar Daerah, Provinsi, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung Timur, Belitung, Pangkal Pinang, Bangka			Jumlah partisipasi event promosi pariwisata di dalam dan luar daerah 6 event	6 event	300.000.000	273.994.000		
			Partisipasi Event Promosi Pariwisata	Provinsi, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka			jumlah event pariwisata 15 event	15 event	450.000.000	5.778.911.000		
			Pelaksanaan Fam Trip	Provinsi, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka			Jumlah peserta widyawisata pengenalan destinasi pariwisata 1 kegiatan	1 kegiatan	223.668.500	234.852.000		
			Pelaksanaan Promosi Pariwisata melalui media	Provinsi, Luar Daerah, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur			Jumlah kerjasama dengan media massa 5 media cetak, media elektronik dan cyber media	5 media cetak, media elektronik dan cyber media	200.000.000	575.450.800		
			Pelaksanaan Promosi Pariwisata Luar Negeri	Luar Daerah			Jumlah partisipasi even promosi di luar negeri 2 even	2 even	-	782.665.000		
			Penyusunan Profil Pariwisata Bangka Belitung	Provinsi, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang			Tersedianya profil pariwisata daerah 1 dokumen	1 dokumen	-	303.187.000		
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kelembagaan		persentase sumber daya pariwisata, industri pariwisata dan pelaku usaha sektor ekonomi	100 %; 100 %						DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kepariwisataan		kreatif yang dilatih dan kompeten; Jumlah Lembaga yang berperan aktif dalam pengembangan pariwisata daerah						
			penyelenggaraan sertifikasi bagi sumber daya pariwisata	Luar Daerah, Provinsi, Bangka Tengah, Pangkal Pinang, Belitung, Belitung Timur, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan			Jumlah peserta sertifikasi sumber daya pariwisata 300 orang	300 orang	1.361.382.000	1.550.500.000	
			Penyelenggaraan sertifikasi lanjutan bagi sumber daya pariwisata	Luar Daerah, Provinsi, Bangka, Bangka Selatan, Belitung, Belitung Timur			Jumlah Peserta sertifikasi Sumber Daya Pariwisata lanjutan 100 orang	100 orang	-	1.832.234.250	
			penyelenggaraan pemilihan putra-putri kepariwisataan provinsi kepulauan bangka belitung	Provinsi, Luar Daerah			Jumlah Penyelenggaraan Pemilihan Putra Putri Kepariwisata 3 keg	3 keg	664.573.000	675.500.000	
			penyelenggaraan kegiatan wisata kuliner	Provinsi			jumlah penyelenggaraan kegiatan wisata kuliner 1 kegiatan	1 kegiatan	195.710.000	250.000.000	
			pengembangan industri perfilman, animasi, video dan fotografi	Provinsi			jumlah peserta kegiatan 70 kegiatan	70 kegiatan	583.009.000	695.500.000	
			Pengembangan Seni Rupa dan seni Kriya	Luar Daerah, Provinsi, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Pangkal Pinang, Belitung Timur, Bangka			Profil pengembangan ekonomi kreatif di Bangka Belitung 10 Dokumen	10 Dokumen	-	397.557.600	
			Pengembangan Cenderamata Khas Kepulauan Bangka Belitung	Luar Daerah, Provinsi, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Pangkal Pinang, Belitung, Belitung Timur, Bangka			produk cinderamata khas Kepulauan bangka belitung 2 kegiatan	2 kegiatan	-	544.500.000	
			peningkatan peran serta kelembagaan dalam pengembangan pariwisata daerah	Provinsi			Jumlah kegiatan peningkatan peran serta kelembagaan dalam pengembangan pariwisata	1 kegiatan	165.375.000	175.500.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							daerah 1 kegiatan				
			forum komunikasi pemangku kepentingan pariwisata dalam pembangunan kepariwisataan Daerah	Provinsi			Jumlah pertemuan Forum komunikasi pemangku kepentingan pariwisata dalam pembangunan kepariwisataan 1 kegiatan	1 kegiatan	196.000.000	200.000.000	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi program dan Kegiatan Lintas Sektor Pariwisata	Provinsi			Jumlah rapat koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan lintas sektor pariwisata 1 kegiatan	1 kegiatan	110.250.000	150.000.000	
			Partisipasi Event Festival Nusantara	Luar Daerah, Provinsi, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung Timur, Belitung, Pangkal Pinang			Jumlah event / festival yang diselenggarakan 30 duk event / festival	30 duk event / festival	1.126.532.700	1.653.750.000	
			Kelautan dan Perikanan								
	PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT	Menurunnya angka kemiskinan	Program Pengembangan Pengelolaan Ruang Laut		Luas Kawasan Konservasi yang dicadangkan; Persentase Usulan Pemanfaatan Ruang Laut yang terekomendasi; Persentase sarana dan prasarana yang terbangun di Desa Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	820.077 Ha; 65 %; 2,13 %					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Pembangunan Dermaga Jetty	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Selatan			Jumlah sarana dan prasarana yang dmanfaatkan oleh masyarakat pesisir 1 Jetty	1 Jetty	1.000.000.000	8.856.000.000	
			Desalinasi Air Laut	Provinsi, Luar Daerah, SKPD, Belitung			Jumlah sarana dan prasarana yang dimanfaatkan oleh masyarakat pesisir 2 Unit	2 Unit	580.000.000	610.000.000	
			Identifikasi dan Survey Pengembangan dan Pemanfaatan Ruang Laut	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah rekomendasi teknis penerbitan perizinan 7 Rekomendasi Izin	7 Rekomendasi Izin	276.000.000	282.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pengelolaan Ruang Laut	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah rekomendasi teknis penerbitan perizinan 7 Rekomendasi	7 Rekomendasi	240.000.000	288.000.000	
			Pengelolaan Kawasan Konservasi Daerah	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Luas kawasan konservasi Daerah yang Ditetapkan 544.000 Ha	544.000 Ha	500.000.000	300.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Program Pengembangan Perikanan Tangkap		Volume Produksi Perikanan Tangkap; Persentase penduduk yang bekerja di sektor perikanan tangkap; Pertambahan pendapatan asli daerah dari layanan fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI); Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap dikawasan Strategis Industri Perikanaan Terpadu Teluk Klabat ; Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap dikawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok; Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap dikawasan Strategis Etalase Perikanaan Selat Nasik; Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap dikawasan Strategis Industri Perikanaan Tanjung Binga; Nilai Tukar Nelayan; Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap di Kawasan Pedesaan Minapolitan Manggar	215.300 Ton; 6,82 %; 386 Juta Rupiah; 2.750 Ton; 19.500 Ton; 33.000 Ton; 15.000 Ton; 109 Indeks; 10.000 Ton					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Peningkatan Fungsi Pelayanan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)	Provinsi, Bangka Selatan, Pangkal Pinang, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur			jumlah layanan fungsi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) 12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	3.320.000.040	2.400.000.000	
			peningkatan pelayanan perizinan perikanan tangkap	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			jumlah rekomendasi teknis penerbitan perizinan 300 rekomendasi	300 rekomendasi	300.000.000	300.000.000	
			Peningkatan dan Pengembangan PPI	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			jumlah PPI yang ditingkatkan dan dikembangkan 6 PPI	6 PPI	2.000.000.000	2.500.000.000	
			pengadaan kapal perikanan tangkap lengkap	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			jumlah sarana dan prasarana perikanan tangkap yang diadakan bagi masyarakat, berupa kapal dan alat tangkapnya	21 kapal	4.500.000.000	15.000.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							21 kapal				
			Pengadaan sarana dan prasarana perikanan tangkap	Provinsi, Luar Daerah, SKPD			jumlah sarana dan prasarana perikanan tangkap yang diadakan bagi masyarakat 1.000 unit	1.000 unit	2.100.000.000	12.200.000.000	
			Peningkatan kualitas SDM perikanan tangkap	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Selatan, Belitung Timur			Jumlah SDM Perikanan Tangkap yang dibina 70 orang	70 orang	250.000.000	300.000.000	
			Peningkatan pengelolaan sumber daya ikan	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			jumlah nelayan yang dibina 70 orang	70 orang	250.000.000	300.000.000	
			Peningkatan fungsi syahbandar pelabuhan perikanan	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			jumlah bulan layanan fungsi syahbandar pelabuhan perikanan 12 bulan	12 bulan	120.000.000	140.000.000	
			peningkatan kesejahteraan nelayan	Provinsi, Luar Daerah, SKPD			jumlah nelayan yang dibantu sarana dan prasarananya 120 orang	120 orang	300.000.000	2.500.000.000	
			Program Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan		Volume Produksi Perikanan Budidaya; Angka Konsumsi Ikan; Volume Produksi Olahan; Persentase penduduk yang bekerja di sektor perikanan budidaya dan Usaha Pengolahan & Pemasaran; Persentase kontribusi komoditas ikan terhadap inflasi; Pertumbuhan Volume Produksi Olahan dikawasan Strategis Industri Perikanaan Terpadu Teluk Kelabat; Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya dikawasan Strategis Minapolitan Lepar Pongok; Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya dikawasan Strategis Etalase Perikanaan Selat Nasik; Pertumbuhan Volume Produksi Olahan dikawasan Strategis Industri Perikanaan Taniung Binqa	12.120 Ton; 54 Kg/Org/Thn; 21.110 Ton; 1,14 %; 22.22 %; 120 Ton; 220 Ton; 121 Ton; 121 Ton					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Pembinaan Pasar Hasil Perikanan se- Bangka Belitung	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah pasar hasil perikanan yang dibina 7 Pasar	7 Pasar	70.000.000	90.000.000		
			Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Pengolahan Hasil Perikanan	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran yang diadakan bagi masyarakat berupa alat pengolahan 1 Koperasi	1 Koperasi	1.000.000.000	3.100.000.000		
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Selatan, Belitung			Jumlah sarana dan prasarana perikanan budidaya yang diadakan bagi masyarakat 2 Paket	2 Paket	146.000.000	1.130.000.000		
			Pengadaan Coldstorage	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Selatan			Jumlah sarana dan prasarana yang dimanfaatkan oleh masyarakat 1 Unit	1 Unit	1.200.000.000	6.120.000.000		
			Pembinaan Pra-Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP) untuk Unit Pengolahan Ikan	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah pelaku usaha yang dibina untuk mendapatkan penerbitan SKP pada UPI skala menengah-besar maupun skala mikro-kecil 30 Pelaku Usaha	30 Pelaku Usaha	175.000.000	180.000.000		
			Pengembangan dan Pembinaan Promosi serta Kerjasama Pemasaran	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah promosi usaha perikanan 5 Kegiatan	5 Kegiatan	811.000.000	735.000.000		
			Pameran Sektor Kelautan dan Perikanan	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah promosi usaha perikanan 3 Promosi	3 Promosi	320.200.000	750.000.000		
			Program Peningkatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan			Persentase Pelaku Usaha yang Taat Aturan	70 %					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Pengawasan sumber daya kelautan	Luar Daerah, Provinsi, SKPD				jumlah hari operasi kapal pengawas 50 Hari Operasi jumlah pelaku usaha kelautan yang taat terhadap ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku 35 pelaku usaha	50 Hari Operasi 35 pelaku usaha	1.100.000.000	1.680.000.000	
			Pengawasan sumber daya perikanan	Provinsi, Luar Daerah, SKPD				jumlah POKMASWAS aktif 40 kelompok jumlah pelaku usaha perikanan yang taat terhadap ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku 35 pelaku usaha	40 kelompok 35 pelaku usaha	100.000.000	470.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengawasan tindak pidana kelautan dan perikanan	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah perkara tindak pidana kelautan dan perikanan yang selesai disidik secara akuntabel dan tepat waktu serta 3 berkas data dan informasi tindak pidana kelautan dan perikanan di kab/kota yang akuntabel 0 dokumen	3 berkas0 dokumen	150.000.000	220.000.000	
			Peningkatan fungsi BOOST Center	Provinsi, Luar Daerah, SKPD			jumlah layanan fungsi BOOST Center 12 bulan	12 bulan	140.000.000	260.000.000	
			<b>Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pengujian dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan</b>		Persentase Produk Hasil Kelautan dan Perikanan yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan	84 %					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Peningkatan fungsi laboratorium pengujian dan pengendalian mutu hasil perikanan	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			jumlah Bulan layanan fungsi pengujian dan pengendalian mutu hasil perikanan 12 bulan	12 bulan	770.000.000	950.000.000	
			Pembinaan,supervisi dan sosialisasi penerapan standar mutu dan keamanan pangan produk hasil kelautan dan perikanan	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah UPI yang dibina dalam rangka memenuhi standar sertifikasi mutu dan keamanan pangan hasil produk kelautan dan perikanan 75 UPI	75 UPI	110.000.000	250.000.000	
			Peningkatan kapasitas pengujian mutu hasil produk kelautan dan perikanan				Jumlah sampel yang diuji untuk keamanan pangan produk kelautan dan perikanan dari bahan berbahaya 650 Sampel	650 Sampel	220.000.000	3.500.000.000	
			<b>Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pembenihan Ikan Air Payau</b>		Jumlah Produksi Benih Ikan yang Unggul; Pertumbuhan pendapatan asli daerah	9,63 Juta Ekor; 26,25 Juta Rupiah					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD Balai Pemuliaan Ikan	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah Bulan layanan fungsi produksi dan penanganan hama dan penyakit 12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	1.850.000.000	1.900.000.000	
			Peningkatan Produksi UPTD Balai Pemuliaan Ikan	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah produksi benih 38,5 Juta ekor	38,5 Juta ekor	750.000.000	1.000.000.000	
			<b>Program Peningkatan Pelayanan Teknis Pembenihan Ikan Laut</b>		Jumlah Produksi Benih Ikan yang Unggul; Pertumbuhan pendapatan asli daerah	0,06 Juta Ekor; 82,5 Juta Rupiah					DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
			Peningkatan Fungsi Pelayanan UPTD Balai Pemuliaan Ikan	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah Bulan layanan fungsi produksi dan penanganan hama dan penyakit 12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	1.200.000.000	1.300.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Peningkatan Produksi UPTD Balai Pemuliaan Ikan	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah produksi benih 0,065 Juta Ekor	0,065 Juta Ekor	440.000.000	480.000.000		
			Perdagangan									
			Program Pengembangan Perdagangan		Pertumbuhan Volume Ekspor; Persentase rumah tangga miskin yang bekerja di sektor perdagangan; Persentase pemantauan dan pengawasan distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting (18 bahan pokok); Persentase peningkatan sarana dan sarana perdagangan yang dibangun; Pertumbuhan nilai resi gudang yang diterbitkan; Pertumbuhan komoditi yang terjual melalui Pasar Lelang; Persentase peningkatan promosi produk dalam negeri	862.000 ton; 10 %; 83 %; 63 %; 20 %; 1 Komoditi; 10 %					DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
			Pelaksanaan Pasar murah	Provinsi			Jumlah pelaksanaan 45 kali	45 kali	500.000.000	600.000.000		
			Partisipasi Pepper Day	Provinsi, Luar Daerah			Terlaksananya kegiatan partisipasi 11 org	11 org	72.750.000	457.741.000		
			Peningkatan kompetensi pelaku usaha sektor perikanan	Provinsi, Belitung			Jumlah Pelaku usaha 40 Pelaku usaha	40 Pelaku usaha	-	150.000.000		
			Peningkatan pemahaman penggunaan produk dalam negeri	Provinsi			jumlah peserta 55 Pelaku usaha	55 Pelaku usaha	100.320.000	110.352.000		
			Pengadaan Gerobak	Provinsi, Belitung			Jumlah gerobak 20 unit	20 unit	160.000.000	180.000.000		
			Peningkatan Kemampuan Pengelola Resi Gudang	Luar Daerah, Provinsi			Jumlah orang 10 orang	10 orang	125.000.000	250.000.000		
			Verifikasi dan Pengawasan Perdagangan Sumber Daya Mineral	Provinsi, Bangka, Pangkal Pinang, Belitung Timur, Belitung, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Bangka Barat			Jumlah Pelaku usaha 45 Pelaku Usaha	45 Pelaku Usaha	208.000.000	250.000.000		
			Pengadaan lahan dan Pembangunan PUJASERA	Provinsi, Pangkal Pinang, Bangka Barat, Bangka Selatan, Belitung			jumlah lahan yang dibebaskan 4 lahan	4 lahan	-	5.500.000.000		



No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Perencanaan dan Pengelolaan Sistem Resi Gudang	Provinsi, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Belitung			Jumlah gudang diadakan, gudang terbangun dan sistem resi gudang yang dijalankan/terkelola 3 bangunan dan sistem resi gudang	3 bangunan dan sistem resi gudang	3.606.778.100	11.000.000.000		
			Pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaku usaha	Provinsi, Bangka Barat, Bangka, Pangkal Pinang, Belitung Timur, Belitung, Bangka Tengah, Bangka Selatan			Jumlah Pelaku Usaha 50 Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha	250.000.000	300.000.000		
			Peningkatan dan perluasan akses pasar	Luar Daerah, Provinsi			Jumlah keikutsertaan 4 Kali	4 Kali	375.000.000	1.500.000.000		
			Informasi perdagangan dalam negeri	Provinsi, Bangka Selatan, Bangka Barat, Bangka, Pangkal Pinang, Belitung Timur, Belitung, Bangka Tengah			Tersedianya data informasi harga barang pokok dan barang penting lainnya 20 komoditi	20 komoditi	160.000.000	204.000.000		
			Perindustrian									
	PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN AGROPOLITAN	Meningkatnya produksi sub sektor pertanian, peternakan dan jasa perkebunan	Program Pengembangan Sumberdaya, Fasilitasi dan Akses Industri		Persentase tenaga kerja Industri terhadap total tenaga kerja; Persentase Tenaga Kerja yang terserap di Industri Kelautan dan Perikanan; Persentase Tenaga Kerja yang tererap di Industri Pariwisata; Persentase industri yang memiliki informasi kandungan nutrisi olahan pangan; Pertumbuhan industri pada sektor pertanian; Persentase tenaga kerja industri pada sektor pertanian; Pertumbuhan industri turunan Potensi Sumber Daya Mineral yang dikembangkan; Persentase tenaga kerja yang terserap di bidang industri turunan pertambangan`	5,17 %; 0,7 %; 0,32 %; 4,68 %; 1.499 unit; 10,28 %; 4 unit; 1,04 %					DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
			Penyuluhan dan Pendampingan Pelaku	Provinsi, Bangka Barat, Bangka			Jumlah Pelaku Industri 210 Pelaku Industri	210 Pelaku Industri	210.000.000	288.838.800		

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Industri oleh PFPP	Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka								
			Peningkatan Kemampuan Teknologi Tepat Guna produk olahan berbasis Sumber Daya Lokal	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Selatan, Belitung, Pangkal Pinang			Jumlah Teknologi Tepat Guna 3 TTG	3 TTG	151.575.000	200.000.000		
			Pemetaan dan penetapan SDA industri Kelautan dan Perikanan	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah dokumen SDA industri kelautan dan perikanan 1 dokumen	1 dokumen	-	-		
			Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pelatihan	Provinsi, Luar Daerah, Pangkal Pinang, Bangka Selatan, Bangka Barat, Bangka			Jumlah SDM Yang Terlatih 80 Pelaku Industri/masyarakat	80 Pelaku Industri/masyarakat	350.000.000	440.000.000		
			Sosialisasi, fasilitasi dan digitalisasi industri	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah peserta 20 pelaku industri	20 pelaku industri	-	190.000.000		
			Fasilitasi Uji Nutrisi	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah produk yang memiliki Informasi Nutrisi 120 produk	120 produk	150.000.000	180.000.000		
			Inkubator Wirausaha baru	Provinsi, Bangka, Pangkal Pinang			Jumlah Kelompok 3 kelompok	3 kelompok	245.112.000	294.134.000		
			Peningkatan Daya Saing Produk Industri	Provinsi, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung			Jumlah Pelaku Industri yang terfasilitasi 700 Pelaku industri	700 Pelaku industri	670.000.000	892.366.200		
			Rumah Pengembangan Produk	Provinsi			Jumlah Pelaku Industri yang terfasilitasi 430 Pelaku Industri	430 Pelaku Industri	490.000.000	651.103.200		
			Lomba Industri Kreatif	Provinsi			Jumlah Produk Kreatif 30 produk	30 produk	98.835.000	118.819.440		
			Pembinaan dan Pengembangan OVOP	Provinsi, Luar Daerah			Jumlah OVOP 9 OVOP	9 OVOP	125.000.000	198.000.000		
			Promosi/Gelar Produk Industri	Luar Daerah, Provinsi			Jumlah Event 9 event	9 event	1.120.613.500	1.893.615.413		
			Pemberdayaan Dekranasda	Luar Daerah, Provinsi			Jumlah Pelaku Industri/Masyarakat 500 Pelaku Industri/Masyarakat	500 Pelaku Industri/Masyarakat	884.765.000	866.184.638		
			Program Peningkatan Pelayanan Teknis Sertifikasi dan Pengendalian Mutu Produk		Persentase komoditi unggulan daerah yang di uji (7 komoditi) dan kalibrasi peralatan (4 besaran)	18 %						DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan Pelayanan Pemerintah UPTD BSPM	Luar Daerah, Provinsi			Jumlah Pegawai 23 orang	23 orang	643.259.000	945.195.000	
			Pembelian Alat Laboratorium UPTD BSPM	Provinsi			Jumlah Alat 5 Unit	5 Unit	750.000.000	500.000.000	
			Pemeliharaan dan Penambahan Status Akreditasi Laboratorium	Provinsi			Jumlah Lingkup Akreditasi 3 ruang lingkup	3 ruang lingkup	90.000.000	150.000.000	
			Pelatihan Teknis Personil Laboratorium UPTD BSPM	Luar Daerah, Provinsi, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Bangka Barat, Bangka, Pangkal Pinang, Belitung Timur, Belitung			Jumlah Personil Terlatih 10 personil	10 personil	104.712.000	129.712.000	
			Monitoring Mutu Pengujian	Luar Daerah, Provinsi, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka			Laporan Mutu Komoditi 1 laporan	1 laporan	100.000.000	250.000.000	
			Sosialisasi Mutu Produk Unggulan Daerah	Provinsi, Bangka Tengah, Bangka Barat, Belitung, Bangka Selatan			Jumlah Peserta 50 Peserta	50 Peserta	200.000.000	200.000.000	
			Jejaring Kerjasama Laboratorium	Luar Daerah, Provinsi			Jumlah Laporan 1 Laporan	1 Laporan	-	65.000.000	
	PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT	Menurunnya angka Inflasi	Program Pengembangan Wilayah dan Pengawasan Industri		Jumlah kawasan strategis/kawasan industri/kawasan sentra; Jumlah industri yang memenuhi standar industri	1 kawasan; 15 Industri					DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Industri	Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka			Jumlah Industri yang diawasi 50 industri	50 industri	200.000.000	500.000.000	
			Peningkatan Pemahaman Standar Produk Industri	Provinsi			Jumlah Peserta yang memahami standar produk industri 60 Peserta	60 Peserta	70.000.000	250.000.000	
			Peningkatan Pengembangan Pembangunan Kawasan Strategis	Provinsi, Pangkal Pinang, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Bangka, Bangka			Jumlah Pelaku Usaha 50 Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha	60.000.000	400.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Barat							
			Monev Kawasan Strategis/kawasan industri/sentra	Provinsi, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Pangkal Pinang, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur			Jumlah Dokumen yang tersusun 1 dokumen	1 dokumen	75.000.000	350.000.000	
			Penyusunan Profil Kawasan Strategis/kawasan Industri/sentra	Provinsi, Bangka Selatan			Jumlah Profil yang tersusun 1 buku	1 buku	75.000.000	300.000.000	
			Pembinaan dan Penyuluhan Pembentukan Sentra Industri	Provinsi, Belitung Timur, Bangka Tengah			Jumlah Lokasi Pembinaan dan Penyuluhan Pembentukan Sentra Industri 2 lokasi	2 lokasi	100.000.000	200.000.000	
			Pendataan Perizinan Industri	Provinsi, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Pangkal Pinang, Belitung Timur			Jumlah Buku yang disusun 1 buku	1 buku	90.000.000	300.000.000	
			Sistem Informasi Industri Provinsi (SIIProv)	Provinsi			Jumlah Industri Besar dan SIKIM yang teregistrasi 1 unit	1 unit	100.000.000	475.000.000	
			<b>Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Kemetrologian</b>		Indeks Keberdayaan Konsumen; Persentase pengawasan Barang Beredar, Jasa dan Tertib Niaga (112 barang SNI wajib; 140 pelaku usaha Tertib Niaga); Persentase pengembangan standarisasi dan lab. kemetrolgion	22 Indeks; 14 %; 20 %					DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
			Pengawasan Barang Beredar dan Jasa	Provinsi, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Belitung, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah			Jumlah barang dan jasa 10 barang dan jasa	10 barang dan jasa	200.000.000	880.000.000	
			Peningkatan Kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka pengawasan barang beredar dan jasa serta tertib niaga	Provinsi, Pangkal Pinang			Laporan Rapat dan Koordinasi 2 Dokumen	2 Dokumen	-	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pelaksanaan Penentuan Penegakan hukum pelanggaran dalam rangka Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Tertib Niaga	Provinsi			Kasus 1 Kasus	1 Kasus	150.000.000	500.000.000	
			Pengembangan SDM Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK), Petugas Pengawas Barang Beredar dan Jasa (PPBJ), Penyidik Pegawai Negeri Slpil Perdagangan (PPNS Dag) dan Petugas Pengaw	Luar Daerah, Provinsi			Jumlah PPNS PK, PPBJ, PPNS Dag dan PPTN 8 orang	8 orang	100.000.000	200.000.000	
			Pengawasan Tertib Niaga	Provinsi, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung			Jumlah Pengawasan 14 kali	14 kali	100.000.000	750.000.000	
			Bimbingan Teknis Kelembagaan dan Pemberdayaan Konsumen	Provinsi, Pangkal Pinang			Jumlah peserta pelatihan 30 orang	30 orang	-	350.000.000	
			Forum dialog dengan perguruan tinggi	Provinsi, Pangkal Pinang			Jumlah peserta forum dialog 100 orang	100 orang	-	-	
			Penyusunan daftar jumlah jenis dan massa berlaku standar ukur	Provinsi			Dokumen daftar jumlah jenis dan massa berlaku standar ukur 1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000	55.000.000	
			Survey Pengukuran Indeks Keberdayaan Konsumen	Provinsi, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang			Jumlah Konsumen 400 orang	400 orang	80.000.000	140.000.000	
			Pos Layanan Pengaduan Konsumen	Provinsi			jumlah pengaduan konsumen 36 pengaduan	36 pengaduan	200.000.000	365.000.000	
			Penyediaan Informasi dan Publikasi standarisasi dan kemetrolagian	Provinsi			Jumlah sarana/media informasi 1 sarana/media	1 sarana/media	-	80.000.000	
			Monitoring pelayanan kemetrolagian legal	Provinsi, SKPD			Laporan monitoring 1 dokumen	1 dokumen	-	115.000.000	
			Sosialisasi Kelembagaan dan Pemberdayaan Konsumen	Provinsi, Pangkal Pinang			Jumlah Peserta 100 orang	100 orang	94.000.000	655.000.000	
			Pengembangan SDM dalam ranaka pengawasan barang	Provinsi, Pangkal Pinang			Pelaku usaha dan instansi terkait 30 Pelaku Usaha	30 Pelaku Usaha	-	620.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			beredar, jasa dan tertib niaga									
			Transmigrasi									
	PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN AGROPOLITAN	Meningkatnya produksi sub sektor pertanian, peternakan dan jasa perkebunan	Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi		persentase KK transmigrasi mandiri	80,08 %					DINAS TENAGA KERJA	
			perencanaan pembangunan Kawasan transmigrasi	Luar Daerah, Provinsi, Bangka Selatan			Jumlah Dokumen rencana kawasan transmigrasi 1 dokumen	1 dokumen	160.000.000	267.430.000		
			Peningkatan fungsi POKJA KTM Tingkat Provinsi	Provinsi, Luar Daerah			Jumlah dokumen laporan 1 laporan	1 laporan	65.800.000	81.520.000		
			peningkatan kapasitas SDM bidang Transmigrasi	Provinsi, Belitung Timur, Gantung			Jumlah warga transmigrasi yang mendapat peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam meningkatkan kualitas hidup di kawasan transmigrasi 30 orang	30 orang	90.000.000	173.320.350		
			Keuangan									
	PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT	Menurunnya angka kemiskinan	Program Peningkatan Tata Kelola Pendapatan Pajak Daerah		Prosentase kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Daerah; Nilai rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Publik Unit Pelaksana Teknis Badan Keuangan Daerah :	24,19 %; 3 NILAI					BADAN KEUANGAN DAERAH	
			Intensifikasi Sumber-sumber Pajak Daerah	Luar Daerah, Provinsi, Bangka, Belitung Timur, Bangka Barat, Pangkal Pinang, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung			Tercapainya realisasi penerimaan pendapatan pajak daerah melalui PKB, BBNKB, PAP, PBBKB dan Pajak Rokok 673.279.876.467 Rp	673.279.876.467 Rp	645.444.000	832.305.125		
			Peningkatan pelayanan pemerintahan pada UPTB wilayah Kabupaten Bangka	Bangka			Jumlah bulan layanan Peningkatan pelayanan pemerintahan pada UPTB wilayah Kabupaten Bangka 12 bulan	12 bulan	857.905.750	986.591.613		
			Peningkatan pelayanan pemerintah pada UPTB wilayah Kabupaten Belitung	Belitung			Jumlah bulan layanan Peningkatan pelayanan pemerintah pada UPTB wilayah Kabupaten Belitung 12 bulan	12 bulan	917.000.000	1.017.000.000		

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan pelayanan pemerintah pada UPTB Wilayah Kabupaten Bangka Tengah	Bangka Tengah			Jumlah bulan layanan Peningkatan pelayanan pemerintah pada UPTB Wilayah Kabupaten Bangka Tengah 12 bulan	12 bulan	574.791.000	603.531.000	
			Peningkatan Pelayanan pemerintah pada UPTB Kabupaten Bangka Barat	Bangka Barat			Jumlah bulan layanan Peningkatan Pelayanan pemerintah pada UPTB Kabupaten Bangka Barat 12 bulan	12 bulan	606.000.000	600.000.000	
			Peningkatan pelayanan pemerintah pada UPTB Kabupaten Bangka Selatan	Bangka Selatan			Jumlah bulan layanan Peningkatan pelayanan pemerintah pada UPTB Kabupaten Bangka Selatan 12 bulan	12 bulan	651.125.000	682.137.500	
			Peningkatan pelayanan pemerintah pada UPTB Kabupaten Belitung Timur	Belitung Timur			Jumlah bulan layanan Peningkatan pelayanan pemerintah pada UPTB Kabupaten Belitung Timur 12 bulan	12 bulan	772.750.000	853.012.500	
			Penyusuna Regulasi/Kebijakan Bidang Tata Kelola Pajak Daerah	SKPD, Pangkal Pinang			Jumlah Peraturan tentang tata kelola pajak daerah tersusun 3 Peraturan	3 Peraturan	67.952.500	105.251.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pajak Daerah	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung			Jumlah Bulan Layanan Fungsi Pelayanan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pajak Daerah 12 Bulan	12 Bulan	635.966.000	855.040.650	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan Samsat Keliling (PPRG)	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Belitung Timur, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Pangkal Pinang, Bangka Tengah, Belitung			Jumlah Bulan Layanan Peningkatan Fungsi Pelayanan Samsat Keliling 12 Bulan	12 Bulan	390.270.000	628.893.618	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan Samsat Corner	Pangkal Pinang, Bukit Intan			Jumlah Bulan Layanan Fungsi Pelayanan Samsat Comer 12 Bulan	12 Bulan	79.177.000	102.089.231	
			Rapat Koordinasi PKB dan BBNKB dengan instansi Terkait	Provinsi, Pangkal Pinang			Jumlah penyelenggaraan Rapat Koordinasi PKB dan BBNKB dengan instansi Terkait 2 kali	2 kali	90.110.000	125.034.881	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Sosialisasi Pajak Daerah	Provinsi, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka			jumlah peserta Sosialisasi Perda Pajak Daerah 280 orang jumlah hari pameran yang diikuti 4 hari Jumlah spot sosialisasi pada media massa cetak dan elektronik 30 kali	280 orang 4 hari 30 kali	262.165.250	693.375.000	
			Peningkatan Pelayanan Pemerintah pada UPTB Wilayah Kota Pangkalpinang	Pangkal Pinang			Jumlah bulan layanan Peningkatan Pelayanan Pemerintah pada UPTB Wilayah Kota Pangkalpinang 12 bulan	12 bulan	1.000.000.000	1.100.000.000	
			Program Peningkatan Tata Kelola Pendapatan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain yang Sah		Prosentase kontribusi retribusi daerah dan pendapatan lain-lain terhadap Pendapatan Daerah	75,81 %					BADAN KEUANGAN DAERAH
			Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Penerimaan Restribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain	Provinsi, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Pangkal Pinang, Belitung, Belitung Timur			jumlah Perangkat Daerah dan pihak terkait penerimaan retribusi dan pendapatan lain-lain 45 instansi	45 instansi	260.640.000	484.939.590	
			Rapat Kerja Restribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain	Provinsi, Bangka			Jumlah penyelenggaraan Rapat Kerja Restribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain 10 kali	10 kali	48.119.000	69.610.448	
			Rakor Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	Provinsi			Jumlah peseerta Rakor Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak 50 orang	50 orang	87.445.000	205.700.000	
			Tim pengawasan peningkatan pendapatan daerah	Provinsi, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Pangkal Pinang, Belitung Timur			Realisasi pendapatan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2.902.308.971.303,4 Rp	2.902.308.971.303,4 Rp	437.226.000	600.000.000	
			Penyusunan Regulasi/Kebijakan Bidang Tata Kelola Retribusi dan Pendapatan lain-lain yang Sah	Pangkal Pinang			Jumlah Peraturan Tentang Regulasi/Kebijakan Bidang tata Kelola retribusi dan pendapatan lain-lain yang sah 1 Peraturan	1 Peraturan	60.015.000	185.000.000	
			Program Penganggaran Pembangunan Daerah		Tingkat kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan jadwal penetapan APBD dan	3 nilai; 100 %					BADAN KEUANGAN DAERAH



No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					perubahan APBD; Prosentase kesesuaian antara RAPBD dengan dokumen KUA-PPAS						
			Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur Tentang APBD	SKPD, Pangkal Pinang			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur Tentang APBD 4 rancangan peraturan	4 rancangan peraturan	1.392.589.000	1.783.558.150	
			Penyusunan Raperda tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	SKPD, Pangkal Pinang			Jumlah Raperda tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 1 rancangan peraturan	1 rancangan peraturan	357.730.000	-	
			Penyusunan KUA dan PPAS	SKPD			Jumlah dokumen KUA-PPAS dan KUPA-PPAS Perubahan 4 DOKUMEN	4 DOKUMEN	716.830.000	757.653.600	
			Penyusunan regulasi/kebijakan bidang anggaran	SKPD, Pangkal Pinang			jumlah peraturan tentang regulasi/kebijakan bidang anggaran 1 Peraturan	1 Peraturan	189.300.000	200.000.000	
			Sosialisasi Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD (PPRG)	SKPD, Pangkal Pinang			Jumlah peserta Sosialisasi Permendagri tentang Pedoman Penyusunan APBD 200 orang	200 orang	216.827.000	400.000.000	
			Evaluasi Raperda Kab/Kota tentang APBD	SKPD, Pangkal Pinang			Jumlah Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Raperda Kab/Kota tentang APBD 7 keputusan Jumlah Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Raperda Kab/Kota tentang Perubahan APBD 7 keputusan	7 keputusan 7 keputusan	618.650.000	825.000.000	
			Rapat-rapat Koordinasi Pembinaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Provinsi, Bangka, Bangka Barat, Pangkal Pinang, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur			Jumlah Rapat-rapat Koordinasi Pembinaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 8 kali	8 kali	218.613.000	300.000.000	
			Penyusunan pedoman tentang penyusunan RKA-PD/PPKD	SKPD, Pangkal Pinang			Jumlah Rapergub tentang pedoman penyusunan RKA-PD/PPKD 1 rancangan peraturan	1 rancangan peraturan	-	400.000.000	
	PEMBANGUNAAN DEMOKRASI	Peningkatan Pembangunan Demokrasi	Program Peningkatan Pelayanan Akutansi dan Pelaporan		Prosentase laporan keuangan Perangkat Daerah yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100 %					BADAN KEUANGAN DAERAH

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Luar Daerah, SKPD, Pangkal Pinang			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 1 rancangan peraturan	1 rancangan peraturan	294.134.000	390.000.000	
			Peningkatan Fungsi Pelayanan Aplikasi SIMDA Keuangan	SKPD, Pangkal Pinang			Jumlah bulan layanan Fungsi Pelayanan Aplikasi SIMDA Keuangan 12 bulan layanan	12 bulan layanan	120.285.000	690.000.000	
			Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	SKPD, Pangkal Pinang			Jumlah Laporan Keuangan Semesteran 1 laporan	1 laporan	95.394.000	140.000.000	
			Evaluasi Raperda Kab/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD	SKPD, Pangkal Pinang			Jumlah Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Raperda Kab/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD 7 keputusan	7 keputusan	111.294.000	160.000.000	
			Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Luar Daerah, SKPD, Pangkal Pinang			Jumlah Nota Kesepakatan antara Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Penyusunan Laporan Keuangan 1 dokumen	1 dokumen	107.319.000	240.000.000	
			Program Peningkatan Tata Kelola Aset Daerah		Nilai aset daerah yang dapat diyakini kewajarannya; Prosentase kontribusi kemanfaatan aset daerah terhadap PAD	4.929.403.053.587,66 Rp; 0,34 %					BADAN KEUANGAN DAERAH
			Pembinaan teknis Pejabat Penata Usahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang dan Pengurus Barang Pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Luar Daerah, SKPD, Pangkal Pinang			Jumlah Peserta Pembinaan teknis Pejabat Penata Usahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang dan Pengurus Barang Pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 200 orang	200 orang	213.578.000	264.000.000	
			Penyusunan rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Pengadaan dan Pemeliharaan				Jumlah Keputusan Gubernur tentang Penetapan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)Pengadaan dan Pemeliharaan 1 keputusan	1 keputusan	59.747.000	80.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan Fungsi Pelayanan Aplikasi SIMDA BMD	SKPD, Pangkal Pinang			jumlah bulan layanan aplikasi SIMDA BMD terupdate 12 bulan	12 bulan	98.739.000	480.000.000	
			Penilaian/Appraisal Barang Milik Daerah/Asset Daerah	Provinsi			Jumlah Dokumen Penilaian Asset yang sebelumnya bernilai Rp.0,00/Rp 1,00 dan Asset yang dimanfaatkan oleh Pihak Ketiga 1 dokumen	1 dokumen	238.214.000	180.000.000	
			Penyusunan pedoman tentang pengelolaan barang milik daerah	SKPD, Pangkal Pinang			Jumlah pergub tentang pengelolaan barang milik daerah 1 peraturan	1 peraturan	-	222.000.000	
			Sosialisasi Permendagri dan Pergub tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (PPRG)	SKPD, Pangkal Pinang			Jumlah peserta Sosialisasi Permendagri dan Pergub tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 100 orang	100 orang	-	144.000.000	
			Pembinaan teknis Pejabat Penata Usahaan Barang, Pengurus Barang Pengelola dan Pembantu Pengurus Barang Pengelola pada BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	SKPD, Pangkal Pinang			Jumlah peserta Pembinaan teknis Pejabat Penata Usahaan Barang, Pengurus Barang Pengelola dan Pembantu Pengurus Barang Pengelola pada BAKUDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 9 orang	9 orang	-	265.000.000	
			Pengamanan dan Pengawasan Barang Milik Daerah	Provinsi, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur			Jumlah Laporan Pengamanan dan Pengawasan Barang Milik Daerah 2 laporan	2 laporan	111.294.000	225.850.735	
			Penyusunan Harga Satuan Barang dan Jasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	SKPD, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung Timur, Belitung, Pangkal Pinang			Jumlah Keputusan Gubernur tentang Penetapan Harga Satuan Barang dan Jasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 1 keputusan	1 keputusan	119.243.000	275.000.000	
			Penghapusan barang milik daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	SKPD, Pangkal Pinang			Jumlah Keputusan Gubernur tentang penetapan penghapusan barang milik daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 1 keputusan	1 keputusan	150.300.000	135.000.000	
			Penyusunan laporan barang milik daerah	Luar Daerah, SKPD, Pangkal Pinang			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah Provinsi	2 laporan	99.369.000	190.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
							Kepulauan Bangka Belitung 2 laporan					
			Sertifikasi Lahan Milik pemerintah daerah	Provinsi, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur			Jumlah Sertifikat lahan milik Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 20 sertifikat bidang tanah	20 sertifikat bidang tanah	166.167.000	350.000.000		
			Program Peningkatan Fungsi Perbendaharaan dan Verifikasi		prosentase bendahara perangkat daerah yang berkompeten	100 %					BADAN KEUANGAN DAERAH	
			Pembinaan Teknis Bendahara Pengeluaran dan PPK SKPD (PPRG)	SKPD, Pangkal Pinang			Jumlah peserta Pembinaan Teknis Bendahara Pengeluaran dan PPK SKPD 120 orang	120 orang	123.218.000	369.076.620		
			Sosialisasi Penata usahaan Keuangan	SKPD, Pangkal Pinang			Jumlah Peserta sosialisasi 100 orang	100 orang	104.934.000	145.200.000		
			Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah	SKPD, Pangkal Pinang			Jumlah dokumen register SP2D, Buku Kas Umum B.IX BUD, Laporan posisi kas harian dan laporan posisi kas bulanan 4 dokumen	4 dokumen	122.423.000	169.400.000		
			Peningkatan fungsi pelayanan dan pemeliharaan sistem penggajian ASN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pangkal Pinang			Jumlah bulan layanan Jasa Pemeliharaan Sistem Penggajian PNS SKPD di Lingkungan Prov Kep Bangka Belitung 12 bulan	12 bulan	105.148.000	145.496.450		
			Kepegawaian,Pendidikan dan Pelatihan									
			Program Pengadaan Pegawai, Mutasi, Promosi, dan Kepangkatan		Persentase Pegawai ASN Yang Ditempatkan Sesuai Dengan Kompetensi; Persentase Pemenuhan Pegawai Sesuai Dengan Kebutuhan dan Formasi; Persentase Pegawai ASN Naik Pangkat dan Pensiun Tepat Waktu	74 %; 87 %; 0 %					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
			Pengadaan CASN dan Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN/Sekolah Kedinasan Lainnya	SKPD			Jumlah Peserta Yang Lulus CASN/ASN 150 Orang Jumlah Peserta Yang Lulus Seleksi Calon Praja IPDN/Sekolah Kedinasan 25 Orang	150 Orang 25 Orang	528.193.000	1.101.150.000		
		Perencanaan ASN	SKPD			Jumlah Dokumen Perencanaan ASN 2	2 Dokumen	180.182.000	249.250.000			

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							Dokumen				
			Perencanaan dan Pengadaan ASN	Provinsi, SKPD			Jumlah Dokumen Perencanaan Aparatur Sipil Negara 1 DokumenJumlah Peserta Yang Lulus Seleksi Calon ASN 150 Orang Jumlah Peserta Yang Lulus Seleksi Calon Praja IPDN / Sekolah Kedinasan 25 Orang	1 Dokumen150 Orang 25 Orang	-	885.468.750	
			Pengelolaan Administrasi Kepangkatan dan Pensiun	Provinsi, SKPD			Jumlah ASN yang Diusulkan Naik Pangkat dan Pensiun 900 Orang	900 Orang	135.760.000	200.000.000	
			Promosi dan Mutasi ASN	SKPD			Jumlah ASN yang Lulus Seleksi Mutasi 50 Orang Jumlah ASN yang diusulkan Promosi / Mutasi 250 Orang	50 Orang 250 Orang	1.745.401.920	1.045.000.000	
			<b>Program Penilaian Kinerja, Disiplin, Informasi Dan Kesejahteraan Aparatur Sipil Negara</b>		Persentase ASN Yang SKP nya Dinilai Tepat Waktu; Persentase Akurasi Data dan Informasi Kepegawaian; Persentase Kasus Pelanggaran Disiplin Minimal Sedang; Persentase ASN Yang Menerima Penghargaan	65 %; 84 %; 0,15 %; 2,19 %					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
			Pembinaan ASN	SKPD			Jumlah ASN Yang Terbina 6.907 Orang	6.907 Orang	650.000.000	800.000.000	
			Pengembangan Profesi ASN	SKPD			Jumlah ASN Yang Dikembangkan Profesinya 5.605 Orang	5.605 Orang	6.046.178.550	6.050.000.000	
			Peningkatan Kesejahteraan ASN	SKPD			Jumlah ASN Yang Sejahtera 2.776 Orang	2.776 Orang	800.000.000	800.000.000	
			Monitoring dan Evaluasi Kinerja ASN	SKPD			Jumlah ASN yang dimonitoring dan dievaluasi SKP-nya 3.000 Orang	3.000 Orang	78.596.680	201.250.000	
			Pembinaan dan Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin ASN	SKPD			Jumlah ASN Yang Dibina Disiplinnya 2.000 OrangJumlah ASN yang diperiksa Narkoba 500 OrangJumlah ASN Yang Diperiksa Untuk Cuti Sakit / Kejiwaan 3 OrangJumlah Kasus Pelanggaran Disiplin Yang Ditangani 7	2.000 Orang500 Orang3 Orang7 Kasus3.000 Orang	-	1.460.500.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
							KasusJumlah ASN yang diverifikasi/validasi 3.000 Orang					
			Penguatan Sistem Informasi dan Pengelolaan Database / Arsip Kepegawaian	SKPD			Jumlah ID Card 2.500 Buah Jumlah Data Kepegawaian Yang Diupdate 4.800 Data Jumlah Aplikasi Kepegawaian yang dikembangkan 4 Aplikasi Jumlah Artikel, Konten, Terjemahan 410 Artikel/terjemahan/konten Jumlah Buku Profil Kepegawaian dan DUK 280 Buku	2.500 Buah 4.800 Data 4 Aplikasi 410 Artikel/terjemahan/konten 280 Buku	300.000.000	852.000.000		
			Peningkatan Kesejahteraan, Pemberian Penghargaan dan Pengembangan Profesi ASN	SKPD			Jumlah ASN yang menerima KARIS / KARSU / KARPEG / KGB 2.100 OrangJumlah ASN yang dibina rohaninya 800 OrangJumlah ASN berprestasi 5 OrangJumlah ASN penerima Satya Lencana 100 OrangJumlah ASN yang menerima penghargaan / tanda jasa 48 OrangJumlah Atlet ASN yang mengikuti PORNAS 3.500 Orang	2.100 Orang800 Orang5 Orang100 Orang48 Orang3.500 Orang	-	2.562.132.250		
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara		Persentase Pegawai ASN Yang Memenuhi Kompetensi Dasar dan Manajerial; Persentase Pegawai ASN Yang Meningkatkan Kompetensi Teknis dan Fungsional; Nilai Akreditasi Diklat; Persentase Pegawai ASN Yang Meningkatkan Pendidikan Formalnya	96 %; 42 %; 81 ; 39,9 %						BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
			Ujian Dinas dan Seleksi Diklatpim III dan IV	SKPD				Jumlah ASN Yang Lulus Seleksi Diklatpim III dan IV 0 Orang Jumlah ASN Yang Lulus	0 Orang 200 Orang	353.200.000	400.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
							Ujian Dinas 200 Orang					
			Pengembangan Kompetensi Dasar dan Manajerial	SKPD			umlah ASN yang Lulus Diklat Kepemimpinan 40 Orang Jumlah ASN yang Lulus Diklat Dasar 200 Orang	40 Orang 200 Orang	2.651.250.360	4.235.000.000		
			Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional	SKPD			Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat teknis dan fungsional 660 Orang	660 Orang	2.350.000.000	7.562.000.000		
			Peningkatan Pendidikan Formal	SKPD			Jumlah ASN yang Yang Menerima Beasiswa dan Cost Sharing 40 Orang	40 Orang	1.749.228.000	1.836.689.400		
			Peningkatan Mutu Kediklatan	SKPD			Nilai akreditasi diklat 2 Nilai Jumlah Dokumen 2 Dokumen	2 Nilai 2 Dokumen	220.000.000	242.000.000		
			Program Penilaian dan Pemetaan Kompetensi ASN		Persentase ASN Yang Mempunyai Profil Kompetensi Sesuai Dengan Standar Penilaian	30,67 %					BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	
			Pengukuran dan Penilaian Kompetensi Aparatur	SKPD			Jumlah ASN yang Mengikuti Assesment 300 Orang Jumlah ASN Yang Lulus Ujian Dinas Tingkat I 200 Orang Jumlah ASN yang lulus seleksi Talent Scouting 50 Orang	300 Orang 200 Orang 50 Orang	-	1.514.240.000		
			Persandian									
			Program Peningkatan Pemberdayaan TIK, Statistik dan Persandian		Rasio kualitas layanan persandian yang dimanfaatkan untuk pengamanan informasi berklasifikasi dan strategis milik Pemerintah daerah di lingkungan Pemprov Babel	100 %					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
			Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Persandian	Provinsi, Belitung, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah			Jumlah sosialisasi dan pembinaan yang dilakukan 8 kali	8 kali	74.455.785	72.905.485		
		Kearsipan										
		Program Peningkatan		Persentase kelembagaan	100 %					DINAS KEARSIPAN		

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan		kearsipan yang melaksanakan tertib arsip						DAN PERPUSTAKAAN
			Peningkatan kapasitas SDM Kearsipan	Provinsi			Jumlah peserta bimtek 40 Orang	40 Orang	-	260.150.000	
			Penilaian Angka Kredit Arsiparis	Provinsi			Jumlah PAK/SKP yang dinilai 80 SKP	80 SKP	40.000.000	121.435.600	
			Arsip Masuk Desa	Provinsi			Jumlah desa/kelurahan yang mendapat layanan sadar arsip 25 Desa/Kel	25 Desa/Kel	110.000.000	317.872.800	
			Lomba kearsipan di provinsi kepulauan bangka belitung	Provinsi			Jumlah Peserta Lomba Arsiparis Teladan Tingkat provinsi dan Lomba pengelolaan kearsipan 35 Orang	35 Orang	139.910.000	234.517.350	
			Pembinaan kearsipan di pemerintah prov. Kep. Bangka belitung	Provinsi			Jumlah Perangkat daerah yang dibina, didampingi dan dilombakan 40 Perangkat Daerah Jumlah SMA/SMK yang dibina, didampingi dan dilombakan 28 SMA/SMK	40 Perangkat Daerah 28 SMA/SMK	196.275.000	418.383.850	
			Pengawasan kearsipan di pemerintah prov kep babel	Provinsi			Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat pengawasan kearsipan 14 Perangkat Daerah	14 Perangkat Daerah	100.000.000	346.346.700	
			Program Peningkatan Pengelolaan dan Pelestarian Arsip		Pertambahan jumlah arsip yang dikelola (Dinamis dan Statis)	0 %					DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
			Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah	Provinsi			Jumlah arsip yang dipelihara provinsi 200 arsip	200 arsip	12.000.000	70.000.000	
			Pengelolaan dan pendataan arsip vital di Kabupaten/kota Provinsi kep. Bangka Belitung	Provinsi			jumlah LKD di kab/kota 7 LKD Kab/kota	7 LKD Kab/kota	69.000.000	115.000.000	
			Pengelolaan dan pendataan arsip asset di 7 Kab/Kota Prov. Kep. Babel	Provinsi			jumlah arsip asset yang terdata di 7 kab/kota 40 Arsip	40 Arsip	125.000.000	255.000.000	
			Pendampingan pengelolaan arsip dinamis di Kab/Kota	Provinsi			jumlah LKD di kab/kota 7 LKD Kab/Kota	7 LKD Kab/Kota	125.000.000	255.000.000	
			Pameran arsip statis Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi			Jumlah pengunjung pameran 300 Pengunjung	300 Pengunjung	128.100.000	385.875.000	
			Pendampingan Pendataan Arsip Statis Kabupaten/Kota	Provinsi			Jumlah LKD kab/kota yang didampingi 7 Arsip	7 Arsip	78.000.000	141.750.000	
			Penerapan E-Arsip	Provinsi			Jumlah PD yang terdaftar elektronik arsip 40 Peranokat Daerah	40 Perangkat Daerah	250.000.000	250.000.000	



No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Pendataan arsip Inaktif di Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi			Pendataan arsip Inaktif di Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 44 Arsip Inaktif	44 Arsip Inaktif	135.000.000	140.000.000		
		Penelitian dan Pengembangan										
		Program Penelitian dan Pengembangan		Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan sebagai bahan perumusan dan persentase hasil inovasi daerah yang dikembangkan	80 Persentase						BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH	
		Penelitian Prioritas Pembangunan Daerah	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah penelitian prioritas daerah yang dilakukan 6 penelitian	6 penelitian	442.310.000	630.000.000			
		Penguatan Sistem Inovasi Daerah	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah inovasi daerah yang dikembangkan 3 Dokumen	3 Dokumen	274.987.500	420.000.000			
		Penguatan Jaringan Kelitbangan	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah Laporan kegiatan pendukung kelitbangan 3 Laporan	3 Laporan	333.362.500	682.500.000			
		Peningkatan Peran Dewan Riset Daerah Dalam Pembangunan	Provinsi, Luar Daerah, SKPD			Jumlah rekomendasi kebijakan pembangunan yang dirumuskan oleh DR 16 Rekomendasi/Penelitian	16 Rekomendasi/Penelitian	400.000.000	1.210.000.000			
		Sekretariat Daerah										
		Program Peningkatan Administrasi Kewilayahan		Persentase penyelesaian kasus tanah negara; Persentase bidang tanah pemerintah provinsi yang bersertifikat; persentase kasus sengketa batas wilayah administrasi yang diselesaikan	81.000.000 meter persegi; 30 bidang; 40 persentase						SEKRETARIAT DAERAH	
		Kegiatan Perencanaan,Evaluasi dan Penyusunan Laporan Internal Biro Pemerintahan	Provinsi, Bangka Tengah, Belitung, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan			terlaksananya monitoring dan evaluasi pengaduan sengketa pertanahan di kabupaten/kota se- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 6 pengaduan	6 pengaduan	37.000.000	85.300.000			
	Kegiatan Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Prov. Kep. Bangka Belitung	Provinsi, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah,			terlaksananya proses sertifikasi tanah / terlaksananya penanganan komplik pertanahan 0 Bidang - orang	0 Bidang - orang	300.000.000	124.260.000				

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Belitung Timur							
			Kegiatan Pembinaan Penanganan Masalah Konflik Pertanahan di Prov. Kep. Bangka Belitung	Provinsi, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang			Jumlah penyelesaian sengketa batas daerah antar Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 1 sengketa batas administrasi wilayah	1 sengketa batas administrasi wilayah	300.000.000	113.500.000	
			Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Data Administrasi Kewilayahan	Provinsi, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang			Jumlah Kabupaten yang terinventarisir 0 Kabupaten	0 Kabupaten	168.700.000	165.300.000	
			Kegiatan Inventarisasi dan Pemutakhiran Data Rupabumi	Provinsi, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur			Jumlah segmen batas daerah yang diinventarisir dan dipelihara 30 segmen batas	30 segmen batas	164.975.000	110.250.000	
			Kegiatan Penegasan Batas Daerah	Provinsi, Belitung, Belitung Timur			Jumlah pilar batas daerah yang terpasang 10 pilar batas	10 pilar batas	517.664.000	137.300.000	
			<b>Program Pengembangan Otonomi Daerah</b>		Peringkat penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan provinsi ; Persentase kebijakan yang diterbitkan dalam rangka harmonisasi dan efektifnya pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan; Jumlah kepala daerah dan anggota legislative yang terfasilitasi secara administrasi; Peningkatan kapasitas kelembagaan untuk menciptakan kepuasan masyarakat atas layanan-layanan publik	13 peringkat; 15 Prosentase; 20 %; 90 %					SEKRETARIAT DAERAH
			Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Provinsi, Luar Daerah, SKPD, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka			Tersusunnya dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 1 Dokumen	1 Dokumen	232.387.500	347.905.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Tengah, Belitung, Belitung Timur							
			Kegiatan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Prov. Kep. Bangka Belitung	SKPD			Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan yang sama 6 Dokumen	6 Dokumen	266.970.000	110.250.000	
			Kegiatan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Luar Daerah, Provinsi, Bangka, Pangkal Pinang, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur			Tersusunnya dokumen EKPPD Kabupaten/Kota di Provinsi Kep. Bangka Belitung 7 dokumen	7 dokumen	327.100.000	490.000.000	
			Kegiatan Pemantauan Pelaksanaan Pemilihan Legislative dan Pilpres 2019	Luar Daerah, Provinsi, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka, Belitung, Bangka Barat, Belitung Timur, Pangkal Pinang			Jumlah Kabupaten/Kota yang terfasilitasi pelaksanaan Pilkada Provinsi/Kabupaten/Kota di Provinsi Kep. Bangka Belitung 0 Provinsi/Kabupaten/Kota	0 Provinsi/Kabupaten/Kota	189.950.000	275.100.000	
			Kegiatan Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan KDH dan WKDH	Provinsi, Luar Daerah, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur			Terselenggaranya Pelantikan KDH dan WKDH Provinsi/Kabupaten/Kota 0 kali	0 kali	-	220.000.000	
			Kegiatan Verifikasi Berkas Calon Anggota DPRD Prov. Kep. Bangka Belitung dan Calon Anggota DPRD Kab/Kota se-Prov. Kep. Bangka Belitung	Provinsi, Luar Daerah, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan			Jumlah berkas calon anggota DPRD Provinsi/Kab/Kota. yang di verivikasi 235 berkas	235 berkas	226.200.000	165.375.000	
			Pelayanan Perizinan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Ketua/Anggota DPRD Prov. Kep. Bangka Belitung ke Luar Negeri	Provinsi, Luar Daerah			Jumlah izin keluar negeri yang dikeluarkan 10 surat izin	10 surat izin	206.980.000	165.375.000	
			Kegiatan Workshop Penataan dan Optimalisasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Prov. Kep. Bangka Belitung	Luar Daerah, Provinsi, Bangka Barat, Pangkal Pinang, Bangka Selatan, Bangka			Jumlah urusan kewenangan yang sinergi dengan baik 7 urusan	7 urusan	-	241.100.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Tengah, Belitung, Belitung Timur, Bangka							
			Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Indikator Kinerja Kunci, serta Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2017	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung			Tersusunnya dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) 1 dokumen	1 dokumen	441.978.000	386.500.000	
			Kegiatan Optimalisasi Penerapan dan Pelaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Prov. Kep. Bangka Belitung	Provinsi, Luar Daerah, SKPD, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung			Jumlah SPM yang diterapkan secara optimal 6 SPM	6 SPM	327.925.000	241.100.000	
			<b>Program Pengembangan Kerja Sama Pemerintah Daerah</b>		Meningkatnya koordinasi hubungan kepala daerah di Prov. Kep. Bangka Belitung; Meningkatnya jumlah kerjasama antar pemerintah daerah, swasta dan luar negeri	90 %; 90 %					SEKRETARIAT DAERAH
			Rapat Koordinasi Gubernur dengan Bupati/Walikota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi			Terlaksananya Rapat Koordinasi antara Gubernur dengan Bupati dan Walikota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2 Kali	2 Kali	619.758.000	401.508.000	
			Kegiatan Partisipasi Kontribusi luran dan Keikutsertaan dalam Rakor/Rakemas APPSI	SKPD			Terlaksananya keikutsertaan Provinsi dalam APPSI 1 Kali	1 Kali	266.722.000	241.980.000	
			Kegiatan Partisipasi Kontribusi luran dan Keikutsertaan dalam Rapat Kerja BKS Provinsi Kepulauan	SKPD			Terlaksananya keikutsertaan dalam BKS Provinsi Kepulauan 1 Kali	1 Kali	242.251.000	273.290.000	
			Kegiatan Verifikasi dan Validasi bantuan pemerintah provinsi kepada Pemerintah/pemerintahan daerah lainnya dan BUMD	Provinsi			Jumlah proposal bantuan hibah yang diverifikasi 4 proposal bantuan	4 proposal bantuan	78.070.000	82.560.000	
			Kegiatan Pengembangan Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama	Provinsi			jumlah rekomendasi kerjasama/perjanjian 10 rekomendasi	10 rekomendasi	250.000.000	151.631.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kegiatan Inventarisasi potensi kerjasama	Provinsi			Prosentase Terlaksananya inventarisasi potensi daerah yang dapat dikerjasamakan oleh perangkat daerah 100 %	100%	500.000.000	125.342.000	
			Kegiatan Penyelarasan program pemerintah daerah dan pusat	Provinsi			Pelaksanaan penyelarasan program pemerintah daerah dan pusat 1 kali pertemuan	1 kali pertemuan	300.000.000	450.000.000	
			<b>Program Peningkatan Pembinaan Keagamaan</b>		Prosentase pembinaan keagamaan	100 persen					SEKRETARIAT DAERAH
			Pembinaan Mental dan Spritual Masyarakat provinsi Kep.Bangka Belitung	Provinsi			persentase pembinaan masyarakat 80 %	80%	954.880.800	1.552.648.000	
			Pembinaan dan Pemberangkatan Kontingen POSPENAS	Provinsi, Luar Daerah, SKPD					998.900.000	-	
			Peningkatan Kehidupan Beragama pada Bulan Ramadhan	Provinsi			Frekuensi Peyelenggaraan Safari Ramadhan 17 Masjid	17 Masjid	580.456.500	725.100.000	
			Penyelenggaraan Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji	Provinsi			Jumlah Jamaah haji yang diberangkatan 1.100 jemaah/orang	1.100 jemaah/orang	900.645.000	1.048.600.000	
			Pendampingan Jamaah Haji Prov. Kep. Bangka Belitung	Provinsi			Terseleksinya Petugas Haji Daerah TPHD/TKHD 7 orang	7 orang	450.680.500	604.080.000	
			Pembiayaan Transportasi Domestik Jamaah Haji	Provinsi			Jumlah Jamaah yang Terfasilitasi Biaya Domestik Haji 1.100 orang	1.100 orang	3.168.736.000	3.300.000.000	
			Pembinaan dan Pemberangkatan Khafilah STQ Nasional	Pangkal Pinang			Jumlah Khafilah yang mengikuti STQ 30 orang	30 orang	991.657.000	1.556.600.000	
			Pekan Olah Raga dan Seni antar Pondok Pesantren Tingkat Daerah Prov. Kep. Babel	Provinsi, SKPD					534.965.000	-	
			<b>Program Peningkatan Koordinasi Kebijakan Pendidikan, KB, Pemuda dan Pariwisata</b>		prosentase pengembangan pendidikan, keluarga berencana, pemuda dan pariwisata	100 persen					SEKRETARIAT DAERAH
			Pelaksanaan Kegiatan TP UKS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi			Jumlah Sekolah yang dinilai 28 sekolah	28 sekolah	369.120.500	434.090.000	
			Peningkatan Kecintaan Bermasyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi			Jumlah Partisipasi Acara HUT Bangka Belitung 3.000 orang	3.000 orang	730.000.000	1.146.630.000	
			<b>Program Peningkatan</b>		Prosentase koordinasi	100 persen					SEKRETARIAT

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Koordinasi Kebijakan Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi		kebijakan sosial, kesehatan, tenaga kerja dan transmigrasi						DAERAH
			Rapat Bagian Sosial, Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi	Provinsi			terlaksannya pelayanan yang optimal kepada masyarakat 21 Rekomendasi	21 Rekomendasi	125.000.000	480.233.000	
			Monitoring dan evaluasi dana bantuan sosial dan hibah	Provinsi			Meningkatnya kegiatan monitoring dan evaluasi bansos dan hibah 200 Proposal	200 Proposal	200.495.000	433.985.000	
			Evaluasi dan Analisi Proposal Bansos dan Hibah	Provinsi			Terlaksananya Evaluasi dan Analisis Proposal Bansos dan Hibah 500 proposal	500 proposal	158.172.600	303.204.000	
			Program Peningkatan Penataan Peraturan Perundang-Undangan		Persentase penataan Peraturan Perundang-undangan	85 %					SEKRETARIAT DAERAH
			Penyusunan Propemperda Dan Rancangan Peraturan Daerah	Provinsi			Jumlah Usulan Propemperda yang selesai disusun 1 Usulan Propemperda Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang selesai disusun 10 Raperda	1 Usulan Propemperda 10 Raperda	800.000.000	1.550.000.000	
			Penyusunan Produk Hukum Daerah	Provinsi, Luar Daerah			Jumlah Produk Hukum Daerah (PHD) yang selesai disusun 70 Pergub Jumlah Produk Hukum Daerah (PHD) yang selesai disusun 900 Keppub	70 Pergub 900 Keppub	684.000.000	600.000.000	
			Penyusunan Naskah Hukum Lainnya	Provinsi, Luar Daerah, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka Tengah, Belitung			Jumlah Naskah Hukum Lainnya (NHL) yang selesai disusun 100 NHL	100 NHL	80.000.000	170.000.000	
			Evaluasi Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	Luar Daerah, Provinsi, Pangkal Pinang, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Bangka			Jumlah Raperda Kabupaten/Kota yang selesai dievaluasi 12 Raperda	12 Raperda	400.000.000	430.000.000	
			Program Peningkatan		Persentase Pelayanan	85 %					SEKRETARIAT

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pelayanan Hukum Pemerintah Daerah		Hukum						DAERAH
			Penyelesaian Perselisihan/Sengketa Perdata antara Pemda dengan Orang/Masyarakat secara Litigasi atau Non Litigasi	Provinsi, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang			Jumlah Kasus Sengketa Perdata yang melalui tahapan proses penyelesaian 2 Kasus	2 Kasus	190.000.000	320.000.000	
			Penyelesaian Sengketa TUN akibat Pelaksanaan Produk Hukum dan Kebijakan Pemda	Provinsi, Luar Daerah			Jumlah Kasus Sengketa TUN yang melalui tahapan proses penyelesaian 2 Kasus	2 Kasus	200.000.000	320.000.000	
			Pembinaan Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Akibat Pelaksanaan Produk Hukum Daerah dan Kebijakan Pemda di Kab/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Luar Daerah, Provinsi, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur			Jumlah Laporan Pembinaan Penyelesaian Sengketa Kabupaten/Kota 1 Laporan	1 Laporan	110.000.000	170.000.000	
			Pembinaan Pelaksanaan RANHAM di Kab/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi, Luar Daerah, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang			Jumlah Laporan Pembinaan Pelaksanaan Rencana Hak Asasi Manusia (HAM) di Provinsi dan Kabupaten/Kota 4 Laporan	4 Laporan	110.000.000	240.000.000	
			Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin oleh Lembaga Bantuan Hukum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi, Belitung, Bangka, Belitung Timur, Bangka Barat, Bangka Selatan, Pangkal Pinang, Bangka Tengah			Jumlah masyarakat miskin yang diberikan bantuan hukum 40 Orang	40 Orang	170.000.000	260.000.000	
			Penyuluhan Hukum di 7 Wilayah Kabupaten/Kota	Provinsi, Belitung Timur, Bangka, Pangkal Pinang, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung			Jumlah orang yang diberikan penyuluhan hukum 310 Orang	310 Orang	-	370.000.000	
			Program Pengembangan Dokumentasi Hukum Dan Informasi Hukum		Persentase Pengembangan Dokumentasi Hukum dan Informasi Hukum	85 %					

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Pengelolaan dan Pengembangan JDIH	Provinsi, Luar Daerah, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Tengah, Bangka Barat, Belitung, Bangka Selatan, Belitung Timur			Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang dipublikasi melalui website JDIH 80 Peraturan Jumlah artikel yang dipublikasi melalui website JDIH 50 Artikel	80 Peraturan 50 Artikel	281.628.400	650.000.000	
			Penyusunan Katalog Perda dan Pergub dan Kompilasi Perda dan Pergub	Provinsi, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang			Jumlah Buku Kompilasi dan Katalog Perda/Pergub yang tersedia 150 Buku	150 Buku	75.000.000	90.000.000	
			Rakor Biro Hukum dan Bagian Hukum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi, Luar Daerah, Belitung Timur, Bangka, Bangka Barat, Pangkal Pinang, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung			Jumlah Rekomendasi Pembangunan di Bidang Hukum 1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	140.000.000	190.000.000	
			Program Perencanaan Setda		Persentase Dokumen Keuangan dan Laporan Kinerja meningkat	80 %					SEKRETARIAT DAERAH
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah Dokumen Perencanaan 4 Dokumen	4 Dokumen	89.710.000	150.000.000	
			Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Sekretariat Daerah	Provinsi, Luar Daerah, SKPD			Jumlah Laporan 4 Laporan	4 Laporan	80.587.500	259.558.450	
			Program Pengendalian Pembangunan Daerah		Prosentase Realisasi Keuangan dan Realisasi Fisik Penyelenggaraan Dana APBD di Provinsi dan Kabupaten/Kota	95 %					SEKRETARIAT DAERAH
			Pengendalian Percepatan Pembangunan di Provinsi Kabupaten/Kota	Belitung Timur, Pangkal Pinang			Jumlah Laporan Koordinasi Sinkronisasi Pengendalian Percepatan Pembangunan di Provinsi Kabupaten/Kota 1 Laporan	1 Laporan	288.784.300	437.517.500	
			Peningkatan Fungsi Sistem Monitoring TEPPRA (SISMONTEP) Provinsi Kabupaten/Kota	Provinsi			Jumlah Laporan Koordinasi Sistem Monitoring TEPPRA (SISMONTEP) Provinsi Kabupaten/Kota 4 Laporan	4 Laporan	-	761.802.097	
			Peningkatan Pengendalian Pembangunan Provinsi	Provinsi			Jumlah Kesepakatan Rencana Tindak Lanjut	1 Dokumen	-	381.529.750	



No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Kepulauan Bangka Belitung				(RTL) 1 Dokumen				
			<b>Program Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan APBD</b>		Persentase Realisasi Program dan Kegiatan APBD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	85 %					SEKRETARIAT DAERAH
			Peningkatan Fungsi Sistem E-Monev APBD	Pangkal Pinang			Jumlah Laporan Koordinasi Sistem E-Monev 1 Laporan	1 Laporan	150.000.000	627.328.194	
			Kebijakan Monitoring Evaluasi APBD	Provinsi, SKPD, Pangkal Pinang			Jumlah Laporan dan Rekomendasi 1 Laporan	1 Laporan	104.750.000	175.547.500	
			Peningkatan Capaian Realisasi APBD	Pangkal Pinang			Rekomendasi APBD 1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	225.620.000	-	
			Peningkatan Fungsi Sismontepra APBD Provinsi, Kab/Kota	Provinsi, Belitung, Bangka, Pangkal Pinang, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah			Jumlah Rekomendasi dan Laporan 1 laporan	1 laporan	200.000.000	287.281.500	
			<b>Program Pengembangan Data Informasi Layanan Pengadaan</b>		Persentase data dan informasi pengadaan barang/jasa yang dikelola dan dipublikasikan berbasis IT; Survey kepuasan masyarakat terhadap pengembangan data informasi layanan pengadaan	92 persen; 80 Nilai indeks Kepuasan					SEKRETARIAT DAERAH
			Peningkatan penerapan data dan informasi layanan	Luar Daerah, Provinsi			Jumlah penerapan aplikasi sistem informasi pengadaan barang/jasa 1 Aplikasi	1 Aplikasi	89.450.000	100.000.000	
			Pengelolaan data dan informasi	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah Admin OPD sistem informasi pengadaan 42 Admin	42 Admin	428.678.000	284.955.000	
			Peningkatan Administrasi Ketatausahaan	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah Dokumen dukungan data perencanaan, pelaporan dan ketatausahaan 8 Dokumen	8 Dokumen	97.680.000	452.358.500	
		Peningkatan Pelayanan Publik	Provinsi, Luar Daerah, SKPD			Jumlah SOP dan Penerapannya 1 Dokumen	1 Dokumen	48.675.000	55.000.000		
		<b>Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa</b>		Persentase RPP siap lelang yang selesai ditangani ULP; Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengadaan Barang dan	92 persen; 80 Nilai Indeks Kepuasan					SEKRETARIAT DAERAH	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
					Jasa							
			Peningkatan Fungsi Pelayanan ULP	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah Bulan Layanan Pengadaan oleh ULP 12 Bulan	12 Bulan	1.986.928.000	3.894.264.000		
			Peningkatan Pembinaan Pengadaan barang dan Jasa	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan			Frekuensi Pelatihan / Pembinaan / bimtek / Pendampingan 3 kali	3 kali	158.208.000	544.971.900		
			Peningkatan pelayanan perencanaan Pengadaan barang dan jasa	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat			Jumlah Pendampingan dan Monev Pengadaan 2 Kali	2 Kali	-	445.376.800		
			Pencegahan dan Penanganan Pengaduan	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang			Frekuensi Sosialisasi Pencegahan dan Pengaduan 2 kali	2 kali	78.152.000	653.412.100		
			Program Peningkatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik			Persentase Penggunaan e - Procrument terhadap belanja pengadaan; Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengadaan secara elektronik	92 persen; 80 Nilai Indeks Kepuasan					SEKRETARIAT DAERAH
			Peningkatan Fungsi Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Luar Daerah, Provinsi, SKPD				Jumlah Bulan Layanan oleh LPSE 12 Bulan	12 Bulan	1.701.624.000	2.327.749.600	
			Peningkatan Layanan dan Dukungan Pengadaan Secara Elektronik	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah			Jumlah Penerapan aplikasi pendukung SPSE 2 Aplikasi	2 Aplikasi	485.596.000	1.059.106.950		

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Peningkatan Pelayanan dan Registrasi dan Verifikasi	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang			Jumlah Penerapan aplikasi pendukung SPSE 1 Aplikasi	1 Aplikasi	246.400.000	271.040.000	
			Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah Penerapan aplikasi Penyedia Barang/Jasa 12 Bulan	12 Bulan	774.350.000	1.275.158.500	
			<b>Program Peningkatan Dan Pengembangan Kelembagaan Serta Analisis Jabatan</b>		Persentase organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi dan ukuran kelembagaannya; Persentase ASN memahami dan mengimplementasikan analisa jabatan, analisa beban kerja, peta jabatan dan standar kompetensi teknis; Persentase jumlah pejabat struktural ASN yang memahami dan mengimplementasikan uraian tugas dan fungsi; Persentase jumlah OPD provinsi, kabupaten, kota yang efektif dan efisien	75 %; 80 %; 80 %; 75 %					SEKRETARIAT DAERAH
			Evaluasi Kelembagaan UPT/Cabdin Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi			Jumlah dokumen pembinaan 40 PD di lingkungan pemerintah provinsi kepulauan bangka belitung 1 Dokumen	1 Dokumen	135.340.000	142.670.000	
			Pembinaan dan pengendalian kelembagaan perangkat daerah kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi			Jumlah laporan pembinaan kelembagaan 1 laporan	1 laporan	130.580.000	180.000.000	
			Penataan perangkat daerah pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka			Jumlah dokumen laporan pembinaan 1 Dokumen	1 Dokumen	115.010.000	175.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Validasi analisis jabatan dan analisis beban kerja Perangkat Daerah Provinsi Bangka Belitung	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan			Jumlah dokumen analisa jabatan 2 Dokumen	2 Dokumen	267.210.000	170.000.000	
			Validasi standar kompetensi jabatan aparatur sipil negara pada perangkat daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung			Jumlah dokumen standar kompetensi teknis 1 Dokumen	1 Dokumen	201.150.000	170.000.000	
			Validasi evaluasi jabatan pegawai negeri sipil pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Provinsi			Jumlah dokumen Evaluasi jabatan 1 dokumen	1 dokumen	156.200.000	230.000.000	
			<b>Program Peningkatan Dan Pengembangan Kinerja Pemerintah Daerah</b>		Persentase peningkatan pengembangan kinerja ASN dan Pemerintah Daerah; Persentase peningkatan informasi data profil aparatur jabatan struktural propinsi kepulauan bangka belitung; Peningkatan nilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; Persentase kepatuhan penyampaian LHKPN	75 %; 75 %; 65 ; 97 %					SEKRETARIAT DAERAH
			Penyusunan Profil Aparatur jabatan struktural	Provinsi, Luar Daerah, SKPD, Pangkal Pinang			Tersusunnya laporan profil aparatur 15 laporan	15 laporan	98.500.000	165.000.000	
			Penyusunan laporan kinerja tahunan dan perjanjian kinerja tahunan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang			Jumlah laporan kinerja dan perjanjian kinerja tahunan 1 Dokumen	1 Dokumen	108.101.000	225.000.000	
			Penyusunan pedoman indikator kinerja utama	Luar Daerah, Provinsi, Bangka Tengah, Belitung,			Jumlah Laporan kinerja provinsi 1 Laporan	1 Laporan	-	-	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan							
			Penyusunan Pedoman Pengembangan Penerapan Budaya Kerja ASN	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang			Jumlah rakor, bimbingan teknis dan pergub pedoman penerapan budaya kerja ASN dan Monev 1 laporan/pergub/buku	1 laporan/pergub/buku	-	275.000.000	
			Penyusunan standar capaian kinerja individu ASN	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat			Jumlah OPD yang dibina 43 OPD	43 OPD	145.050.000	275.000.000	
			Pembinaan standar manajemen mutu pada OPD, Cabdin dan UPT di lingkungan pemerintah provinsi kepulauan bangka belitung	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat			Jumlah laporan 1 laporan	1 laporan	80.900.000	275.000.000	
			Pembinaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat			Jumlah laporan 1 laporan	1 laporan	64.275.000	140.000.000	
			Forum Sekretaris Daerah Prov.babel	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka			jumlah dokumen kesepakatan 1 Dokumen	1 Dokumen	62.889.000	185.000.000	
			Bimbingan Teknis penyusunan Laporan kinerja, perjanjian kinerja dan rencana aksi kinerja di	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Belitung, Belitung Timur, Pangkal			Jumlah peserta 50 orang	50 orang	180.305.000	225.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah							
			Rapat koordinasi evaluasi capaian kinerja pemerintah daerah	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang			Jumlah dokumen hasil/kesepakatan rakor 43 OPD	43 OPD		- 220.000.000	
			<b>Program Peningkatan Dan Pengembangan Tata Laksana Pemerintah Daerah</b>		Peningkatan kepuasan masyarakat; Peningkatan kinerja sumber daya aparatur	0 ; 55 %					SEKRETARIAT DAERAH
			Pembinaan pelaksanaan pelayanan publik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah			Laporan pembinaan pelaksanaan pelayanan publik 1 Laporan	1 Laporan	170.000.000	200.000.000	
			Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah			Jumlah laporan pembinaan pelaksanaan SOP 1 laporan	1 laporan	176.000.000	190.000.000	
			Roadmap Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah			dokumen reformasi birokrasi 1 Dokumen	1 Dokumen	121.750.000	290.000.000	
			Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah			Jumlah dokumen terkait kepuasan masyarakat 1 dokumen	1 dokumen	152.000.000	165.000.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Rapat koordinasi Biro/Bagian Organisasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur			Dokumen kesepakatan Biro/Bagian Organisasi 1 Dokumen	1 Dokumen	102.230.000	190.000.000	
			Peningkatan administrasi ketatausahaan	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah			Jumlah laporan dukungan data perencanaan, pelaporan dan ketatausahaan 1 laporan	1 laporan	162.000.000	300.000.000	
			Bimtek penyusunan proposal dan pelatihan admin kompetisi inovasi pelayanan publik	Provinsi, Luar Daerah, SKPD, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur			Jumlah Kegiatan Bimtek 1 Kegiatan	1 Kegiatan	114.900.000	300.000.000	
			Audit Surveillance ISO 9001:2008 menuju Sertifikasi ISO 9001:2015 untuk Samsat Sungailiat dan UPTSP	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah			Ketetapan atas ISO 9001 : 2008 1 Dokumen	1 Dokumen	211.220.000	200.000.000	
			Peningkatan Pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka			Jumlah dokumen laporan pelaksanaan RB 1 dokumen	1 dokumen	211.440.000	200.000.000	
			Program Peningkatan Pelayanan Kehumasan, Dokumentasi, Publikasi Media dan IT		Persentase pemanfaatan media dan IT untuk layanan kehumasan, dokumentasi dan publikasi	85 %					SEKRETARIAT DAERAH
			Publikasi Media Massa / Cetak	Provinsi, Luar Daerah, SKPD, Pangkal Pinang, Bangka Barat, Bangka Selatan,			Jumlah publikasi di media massa/cetak 154 Tayang	154 Tayang	1.450.155.300	2.578.875.000	

No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD	
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)					
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				Bangka Tengah, Bangka, Belitung, Belitung Timur								
			Publikasi Media Elektronik/IT	Provinsi, SKPD, Bangka Selatan, Bangka, Bangka Tengah, Bangka Barat, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang			Jumlah publikasi di media elektronik dan IT 120 Tayang	120 Tayang	339.721.850	527.189.630		
			Pendokumentasian dan Belanja Spanduk/Baleho	Provinsi, SKPD, Bangka Barat, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung, Bangka			Jumlah publikasi media luar 30 Tayang	30 Tayang	176.114.200	300.034.517		
			Penerbitan Majalah / Buletin Pemerintah Provinsi	Provinsi, SKPD, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Belitung			Jumlah Terbitan Majalah/Buletin Pemerintah Provinsi 4.200 Eksemplar	4.200 Eksemplar	225.361.000	435.168.492		
			Media Gathering	Provinsi, SKPD			Jumlah peserta media gathering dari media lokal dan nasional 0 Orang	0 Orang	-	60.024.250		
			Workshop Humas Bidang Media Elektronik dan IT	Provinsi, SKPD			Jumlah SDM yang memiliki kompetensi di bidang Media Elektronik dan IT 0 Orang	0 Orang	-	34.862.952		
			Workshop Bidang Kehumasan	Provinsi, SKPD			Jumlah SDM yang memiliki kompetensi di bidang Kehumasan 0 Orang	0 Orang	-	84.294.000		
			Program Peningkatan Pelayanan Protokol			Persentase agenda kepala daerah yang terlayani	85 %					SEKRETARIAT DAERAH
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Provinsi, SKPD			Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan 4.600 Buah	4.600 Buah	92.173.750	90.673.906		
			Workshop Bidang Keprotokolan	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah SDM yang memiliki kompetensi di bidang keprotokolan 60 Orang	60 Orang	104.704.300	225.072.558		
			Layanan Tamu Pemerintah dan Negara	Provinsi, SKPD			Jumlah layanan tamu pemerintah dan negara 200 Orang	200 Orang	-	97.410.986		
			Peningkatan Fungsi Keprotokolan	Provinsi, SKPD			Tersedianya IT untuk keprotokolan 18 Buah	18 Buah	-	172.500.000		
		Program Peningkatan Publikasi, Pengumpulan			Persentase Pelayanan dan Penyampaian	85 %					SEKRETARIAT DAERAH	



No	Prioritas Daerah	Sasaran Prioritas	Program/Kegiatan	Lokasi Detail	Indikator kinerja				Rencana Tahun 2019 (N)	Rencana Tahun 2020 (N+1)	SKPD
					Hasil Program (Outcome)		Keluaran Kegiatan (Output)				
					Tolok Ukur/Indikator	Target	Tolok Ukur/Indikator	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			dan Penyaringan Informasi		informasi kepada aparatur dan publik						
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Provinsi, SKPD			Tersedianya bahan bacaan untuk aparatur di sekretariat daerah 18.480 Eksemplar	18.480 Eksemplar	225.346.200	327.951.170	
			Pengumpulan, Penyaringan informasi dan Publikasi Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Dalam dan Luar Daerah di rubah menjadi Pengumpulan Informasi, Layanan Kehumasan, dan keprotokolan	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah			Frekuensi Layanan Publikasi dan Keprotokolan Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Dalam dan luar Daerah 185 kali	185 kali	249.538.000	455.487.780	
			Penguatan Fungsi Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Bangka Tengah, Belitung, Bangka, Belitung Timur, Bangka Barat, Pangkal Pinang, Bangka Selatan			Jumlah Ketersediaan informasi dan dokumentasi yang bisa diakses publik 23 PD	23 PD	194.226.550	417.290.276	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Layanan Kehumasan dan keprotokolan	Luar Daerah, Provinsi, SKPD, Belitung, Belitung Timur, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah			Jumlah Ketersediaan Peralatan dan Perlengkapan Layanan Kehumasan dan Keprotokolan 4.010 Buah	4.010 Buah	676.140.600	910.975.691	
			Peningkatan Kualitas SDM dan Koordinasi Kehumasan dan Keprotokolan	Luar Daerah, Provinsi, SKPD			Jumlah SDM yang mengikuti kursus/pelatihan untuk meningkatkan kompetensi di luar daerah 3 Orang	3 Orang	-	45.509.076	
			Penyediaan Pakaian Khusus Lapangan Humas dan Protokol	Provinsi, SKPD			Jumlah pakaian khusus lapangan 0 Stel	0 Stel	-	115.000.000	
TOTAL									1.124.961.390.870	2.190.476.818.201	



## **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH**

Kompleks Pusat Perkantoran dan Perumahan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Jl. Pulau Belitung No. 2, Kel. Air Itam, Telp. (0717) 439333-439336 Fax: (0717) 439335  
PANGKALPINANG 33149